

TRANSFORMASI INDUSTRI PUPUK PENOPANG KEDAULATAN PANGAN NASIONAL

Fertilizer Industry Transformation
as a Pillar of National Food Sovereignty

LAPORAN TAHUNAN 2025 ANNUAL REPORT

Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan 2025

About 2025 Annual Report and Preparation Method

Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia (Persero), selanjutnya disebut "PTPI" atau "Perusahaan," Tahun Buku 2025 diterbitkan bersamaan dengan Laporan Keberlanjutan PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Buku 2025, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai risiko, peluang, dan prospek Perusahaan di masa depan, serta kinerja keberlanjutan Perusahaan, sehingga dapat membantu Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan dalam memahami arah strategis Perusahaan serta perkembangannya dalam menciptakan nilai berkelanjutan.

Laporan Tahunan PTPI disusun dengan tema "Transformasi Industri Pupuk Penopang Kedaulatan Pangan Nasional" yang dipilih berdasarkan analisis dan kajian mendalam atas fakta serta perkembangan bisnis Perusahaan sepanjang tahun 2025, sekaligus mempertimbangkan prospek keberlanjutan usaha Perusahaan di masa mendatang.

Laporan Tahunan PTPI disajikan dalam dua bahasa, apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Perusahaan berharap Laporan Tahunan ini dapat memberikan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi seluruh pembaca.

The Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero), hereinafter referred to as "PTPI" or "the Company," for Fiscal Year 2025 is published together with the Sustainability Report of PT Pupuk Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2025, which forms an inseparable part. This report provides a comprehensive overview of the Company's risks, opportunities, and future prospects, as well as its sustainability performance, to assist Shareholders and Stakeholders in understanding the Company's strategic direction and its progress in creating sustainable value.

PTPI's 2025 Annual Report theme is "Fertilizer Industry Transformation as a Pillar of National Food Sovereignty," which was chosen after an in-depth analysis and review of the Company's business facts and developments during 2025, while also considering the Company's future business sustainability prospects.

PTPI's Annual Report is presented in two languages, should there be any discrepancies in interpretation between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

The Company is committed to providing all readers with accurate, relevant, and useful information through this Annual Report.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai pernyataan berwawasan ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pernyataan yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut mengandung berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan realisasi dan hasil aktual berbeda secara material dari yang disampaikan dalam laporan ini.

Pernyataan berwawasan ke depan dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan berbagai asumsi terkait kondisi terkini, kondisi Perusahaan di masa mendatang, serta lingkungan bisnis tempat Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa asumsi dan proyeksi yang digunakan akan sepenuhnya terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Excluding statements of historical nature, this Annual Report contains statements concerning the Company's financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives that may be categorized as forward-looking statements in accordance with applicable laws and regulations. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results and outcomes to differ materially from those presented in this report.

The forward-looking statements in this Annual Report are based on current assumptions regarding the Company's operations and the broader business environment in which it operates. Therefore, the Company provides no assurance that the assumptions and projections used will be fully realized as anticipated.

Penjelasan Tema

Theme Explanation



Transformasi Industri Pupuk Penopang Kedaulatan Pangan Nasional

Fertilizer Industry Transformation as a Pillar of National Food Sovereignty

Sepanjang tahun buku 2025, PT Pupuk Indonesia (Persero) "PTPI" atau "Perusahaan," menjalankan penguatan peran dalam mendukung agenda pangan nasional melalui transformasi yang mencakup aspek industri, operasional, dan tata kelola. Langkah ini menjadi semakin relevan seiring terbitnya Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang menandai penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk ke arah sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Regulasi tersebut tidak hanya memengaruhi mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, tetapi juga memperkuat landasan bagi pembenahan industri pupuk nasional agar semakin adaptif terhadap kebutuhan sektor pertanian.

Throughout the 2025 fiscal year, PT Pupuk Indonesia (Persero) "PTPI" or "the Company," strengthened its role in supporting the national food agenda through industrial, operational, and governance transformation. These steps have become increasingly relevant following the issuance of Presidential Regulation No. 113 of 2025, as an amendment to Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning Subsidized Fertilizer Governance, representing a refinement of the fertilizer subsidy policy towards a more efficient, transparent, and accountable system. This regulation not only impacted the procurement and distribution mechanisms for subsidized fertilizer but also strengthened the foundation for improving the national fertilizer industry to make it more adaptive to the needs of the agricultural sector.

Dalam konteks tersebut, PTPI menempatkan tahun 2025 sebagai fase penting untuk memperkuat keandalan pasokan, meningkatkan efektivitas penyaluran, serta menyesuaikan proses bisnis dengan kerangka tata kelola baru yang ditetapkan Pemerintah. Penyederhanaan tata kelola penyaluran Pupuk bersubsidi, termasuk penguatan tanggung jawab PTPI hingga titik serah, menunjukkan arah transformasi yang tidak lagi terbatas pada aspek produksi, tetapi juga mencakup penyempurnaan sistem distribusi agar ketersediaan pupuk lebih terjaga di berbagai wilayah.

Transformasi tata kelola tersebut juga membuka ruang efisiensi yang lebih besar di tingkat industri. Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2025 mendorong perubahan mekanisme penagihan pupuk bersubsidi dari basis biaya produksi ke pendekatan nilai komersial atau *marked-to-market*, sehingga ruang peningkatan efisiensi menjadi semakin terbuka. Arah kebijakan ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk mewujudkan sistem pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagi PTPI, perubahan tersebut memiliki arti strategis karena efisiensi tata kelola subsidi perlu berjalan seiring dengan pembenahan struktur industri pupuk itu sendiri. Sepanjang 2025, penguatan peran PTPI tidak hanya bertumpu pada kapasitas produksi dan jangkauan distribusi, tetapi juga pada kemampuannya menyesuaikan diri terhadap reformasi kebijakan dan menerjemahkannya ke dalam sistem industri yang lebih efisien, tata kelola yang lebih kuat, serta layanan yang semakin andal bagi sektor pertanian. Melalui arah tersebut, PTPI memperkuat kontribusinya dalam menjaga kesinambungan pasokan pupuk, mendukung produktivitas pertanian, dan menopang kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan.

In this context, PTPI identified 2025 as a critical phase to strengthen supply reliability, increase distribution effectiveness, and align its business processes with the Government's new governance framework. Simplifying the subsidized fertilizer distribution governance, including strengthening PTPI's responsibility down to the point of delivery, demonstrated a transformation that was no longer limited to production aspects but also included improvements to the distribution system to ensure fertilizer availability across the regions.

The governance transformation also creates greater efficiency at the industry level. Presidential Regulation No. 113 of 2025 encouraged a shift in the subsidized fertilizer billing mechanism from a production cost basis to a commercial value or marked-to-market approach, and opening up greater room for efficiency improvements. This policy directive underscores the government's efforts to create a more effective, efficient, transparent, and accountable system for subsidized fertilizer procurement and distribution.

These changes are of strategic significance for PTPI, as efficient subsidy management must be coupled with structural improvements within the fertilizer industry. Throughout 2025, strengthening PTPI's role depended not only on production capacity and distribution reach, but also on its ability to adapt to policy reforms and translate them into a more efficient industrial system, with stronger governance, and increasingly reliable services for the agricultural sector. Through this directive, PTPI strengthened its contribution to maintaining a sustainable fertilizer supply, supporting agricultural productivity, and bolstering national food sovereignty.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity



Mendorong Keberlanjutan, Mengawal Ketahanan Pangan

Promoting Sustainability, Safeguarding Food Security

PT Pupuk Indonesia (Persero) atau "PTPI" dan "Perusahaan", berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai pilar utama sektor pertanian nasional. Sebagai produsen pupuk terbesar di Indonesia, Perusahaan memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk secara tepat waktu dan tepat sasaran. Melalui berbagai inisiatif transformasi, Perusahaan terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasok, serta menerapkan inovasi dalam produksi dan distribusi pupuk guna mendukung produktivitas pertanian nasional.

Keberlanjutan menjadi landasan utama dalam strategi bisnis Perusahaan. Sejalan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), Perusahaan berupaya mengurangi jejak karbon melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Selain itu, inovasi dalam pengembangan produk pupuk yang lebih presisi dan efisien bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Inisiatif tersebut tidak hanya memperkuat posisi Perusahaan dalam industri pupuk tetapi juga mendukung tercapainya Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya dalam ketahanan pangan dan aksi terhadap perubahan iklim.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan, Perusahaan turut mendukung program-program pemerintah, termasuk subsidi pupuk dan pengembangan ekosistem pertanian berbasis teknologi. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat guna meningkatkan efisiensi pemupukan dan memperluas adopsi praktik pertanian berkelanjutan. Dengan berbagai inisiatif tersebut, Perusahaan tidak hanya berperan sebagai penyedia pupuk, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi petani dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, volatilitas harga komoditas, serta dinamika kebijakan perdagangan, PTPI terus memperkuat fondasi bisnisnya dengan berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan.

Melalui langkah-langkah tersebut, PTPI berkomitmen untuk tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung pertanian nasional yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

PT Pupuk Indonesia (Persero) or "PTPI" and "the Company", is committed to fulfilling its role as a key pillar of the national agricultural sector. As the largest fertilizer producer in Indonesia, the Company bears a strategic responsibility to ensure the prompt and targeted distribution and availability of fertilizer. Through various transformation initiatives, the Company continues to strive to improve operational efficiency, optimize the supply chain, and implement innovations in fertilizer production and distribution to support national agricultural productivity.

Sustainability serves as a fundamental pillar of the Company's business strategy. In line with environmental, social, and governance (ESG) principles, the Company strives to reduce its carbon footprint through the adoption of environmentally friendly technologies, energy efficiency measures, and more sustainable waste management practices. Additionally, innovations in the development of more precise and efficient fertilizer products are aimed at enhancing soil fertility while minimizing negative environmental impacts. These initiatives not only strengthen the Company's position in the fertilizer industry but also contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in the areas of food security and climate action.

In line with its commitment to safeguarding food security, the Company fully supports key government programs, ranging from fertilizer subsidies to the development of technology-based agricultural ecosystems. Collaboration with various stakeholders continues to be deepened to drive fertilizer use efficiency and expand the adoption of sustainable agricultural practices. Through these initiatives, the Company positions itself not only as a fertilizer provider but also as a strategic partner to farmers in achieving sustainable food security. Amid global challenges such as climate change, commodity price volatility, and trade policy dynamics, PTPI continues to strengthen its business foundation by focusing on innovation and sustainability.

Through these steps, PTPI remains committed to leading and supporting a resilient, productive, and sustainable national agriculture.

2023



Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

Forging a Sustainable Future

Perkembangan kegiatan usaha pada tahun 2023 masih diwarnai berbagai tantangan yang tidak mudah. Selain proses pemulihan ekonomi global yang berlangsung relatif lambat, harga komoditas, termasuk pupuk dan amonia, juga mengalami tren penurunan. Meskipun demikian, Pupuk Indonesia Group mampu menavigasi dinamika tersebut dengan baik sehingga berhasil mencatatkan kinerja yang sangat positif.

Capaian tersebut tercermin dari peningkatan peringkat PTPI di antara perusahaan sejenis di tingkat global menjadi peringkat ke-6, naik dari posisi ke-9 pada tahun sebelumnya. Pemeringkatan ini didasarkan pada capaian laba bersih yang diperoleh Perusahaan.

Ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut semakin mengukuhkan posisi PTPI sebagai pemain global dalam mewujudkan visinya, yaitu "*A Leading Global Agrosolution and Integrated Chemical Company*." Selain memperkuat posisinya di industri, Perusahaan juga berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Business development in 2023 continued to be marked by significant challenges. In addition to the relatively slow global economic recovery, commodity prices, including fertilizer and ammonia, there was also a downward trend. Nevertheless, Pupuk Indonesia Group was able to navigate these dynamics effectively, achieving a very positive performance.

This achievement is reflected in PTPI's improved ranking among similar companies globally, rising to 6th place from 9th place the previous year. This ranking is based on the Company's net profit.

This resilience in facing challenges further solidified PTPI's position as a global player, enabling it to realize its vision of "A Leading Global Agrosolution and Integrated Chemical Company." In addition to strengthening its position in the industry, the Company is also committed to continuing to contribute to national food security while supporting sustainable national economic growth.

2022



Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih

Transformation towards a Greener and Cleaner Industry

Tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam sejarah Perusahaan, di mana PTPI berhasil membukukan laba tertinggi sepanjang sejarah. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program transformasi yang dijalankan selama dua tahun terakhir, melalui berbagai inisiatif seperti sentralisasi pada sejumlah fungsi, peningkatan efisiensi operasional, serta percepatan digitalisasi di berbagai lini usaha yang terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja Perusahaan.

Perusahaan juga tetap berkomitmen menjalankan mandat Pemerintah dalam mengamankan pasokan pupuk domestik guna mendukung ketahanan pangan nasional, dengan tetap mengelola aspek bisnis secara optimal sesuai amanat Pemegang Saham.

Selain itu, PTPI terus menjalankan berbagai inisiatif industri hijau, antara lain pengembangan amonia bersih dan pengembangan Kawasan Industri Hijau. Upaya tersebut turut didukung oleh keberhasilan sejumlah entitas anak dalam meraih penghargaan PROPER Emas, sebagai bagian dari kontribusi Perusahaan dalam mendukung target *Net Zero Emission* (NZE) Pemerintah Indonesia pada tahun 2060.

The year 2022 became a separate record in the Company's history, where PTPI managed to achieve the highest profit in the Company's history. This achievement cannot be separated from the success of the transformation program that has been carried out over the past two years. Several initiatives have been carried out, such as centralization in a number of fields, increasing efficiency and digitalization in various fields which have proven to have a positive impact on the Company's performance.

The Company also remains committed to carrying out the duties of the Government in securing domestic fertilizer supply in order to support food security by continuing to carry out business aspects properly as mandated by the Shareholders.

In addition, PTPI has also carried out green industry initiatives through the development of clean ammonia, as well as the development of Green Industrial Estates and the success of achieving Gold PROPER for a number of its Subsidiaries as part of efforts to achieve Net Zero Emission (NZE) launched by the Government of Indonesia in 2060.

Sekilas tentang Pupuk Indonesia

Pupuk Indonesia at a Glance

Kepemilikan Saham
Share Ownership



1 Saham Seri A Dwiwarna

Negara Republik Indonesia
Republic of Indonesia

24.999.999 Saham Seri B

PT Danantara Asset Management (Persero)*

*Pada Mei 2025, Perusahaan menerima informasi perubahan nama **PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)** menjadi **PT Danantara Asset Management (Persero)**, yang ditetapkan dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada tahun 2026.

*In May 2025, the Company received information regarding the change of name of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to PT Danantara Asset Management (Persero), which was stipulated in the amendment to the Company's Articles of Association in 2026.

Produk dan Jasa
Products and Services

1. Pupuk dan Amonia
2. Jasa Konstruksi
3. Kegiatan usaha pada segmen lain-lain

1. Fertilizer and Ammonia
2. Construction Services
3. Business Activities in Other Segments

Wilayah Produksi
Production Areas

- Lhokseumawe-Aceh
- Palembang-Sumatera Selatan
- Cikampek-Jawa Barat
- Bontang-Kalimantan Timur
- Gresik-Jawa Timur

Tujuan dan Kegiatan Perusahaan
Company Objectives and Activities

Melakukan usaha pengelolaan perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agro industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Manage the Company, trading, and service businesses in the fields of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals, and other chemicals, as well as agro-industry, to produce high-quality, competitive goods and/or services to obtain/pursue profits and increase the Company's value by applying the principles of a Limited Liability Company.

Keunggulan PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT Pupuk Indonesia (Persero) Excellence

Pemimpin pasar pupuk nasional

National fertilizer market leader

Menguasai pangsa pasar 99,99% urea, 44,66% NPK, dan 63,71% amonia, sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis sektor pertanian nasional.

Being a market leader by holding a market share of 99.99% of urea, 44.66% of NPK, and 63.71% of ammonia, while strengthening its role as a strategic partner in the national agricultural sector.

Reputasi kuat dan pengalaman panjang

Strong reputation and extensive experience

Didukung pengalaman lebih dari 40 tahun serta jejaring kemitraan yang luas dengan perusahaan multinasional, pemasok, dan pelanggan strategis.

Supported by over 40 years of experience and an extensive network of partnerships with multinational companies, suppliers, and strategic customers.

Distribusi terintegrasi dengan logistik andal

Integrated distribution with reliable logistics

Memiliki jaringan distribusi yang luas, ditopang armada kapal, *distribution center*, unit pengantongan, pelabuhan, Pelaku Usaha Distribusi, dan puluhan ribu titik serah di seluruh Indonesia.

Has an extensive distribution network, supported by a fleet of ships, distribution centers, packing units, ports, distributors, and tens of thousands of retailers throughout Indonesia.

Transformasi digital rantai pasok

Digital supply chain transformation

Memperkuat efisiensi distribusi, ketepatan penyaluran, dan kualitas pengambilan keputusan melalui digitalisasi *supply chain* dan pemanfaatan *data science*.

Strengthening distribution efficiency, delivery accuracy, and decision-making quality through supply chain digitization and the use of data science.



Transformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Fertilizer Governance Transformation



Prinsip 7 Tepat (7T)

pupuk subsidi merupakan kebijakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi tahun 2025-2026 yang diatur pemerintah untuk memastikan pupuk sampai ke petani yang berhak secara efisien. Prinsip ini meliputi: Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, Mutu, dan Penerima.

The 7 Right Principle (7T)

for subsidized fertilizer are a government-managed distribution policy for subsidized fertilizer in 2025-2026, designed to ensure that fertilizer reaches eligible farmers efficiently. These principles include: Right Type, Quantity, Price, Place, Time, Quality, and Recipient.

Sebagai bagian penting dalam mata rantai ketahanan pangan nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PTPI mendukung penuh implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan penguatan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih efisien, transparan, modern, dan akuntabel. Kebijakan ini tidak hanya menata ulang skema subsidi dan mekanisme pembayaran agar lebih mendukung kesehatan pendanaan industri pupuk, tetapi juga memperkuat pengawasan penyaluran berdasarkan prinsip 7T (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Penerima), sehingga pupuk bersubsidi dapat tersalurkan lebih tepat penerima.

As a vital component of the national food security chain, PT Pupuk Indonesia (Persero) or PTPI fully supports the Presidential Regulation (Perpres) No. 113 of 2025 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 6 of 2025. This regulation establishes a foundation for strengthening the governance of subsidized fertilizers , making it more efficient, transparent, modern, and accountable. This policy not only restructures the subsidy scheme and payment mechanism to better support the financial health of the fertilizer industry, but also strengthens distribution supervision based on The 7 Right Principle (Right Type, Right Quantity, Right Price, Right Place, Right Time, Right Quality, Right Recipient), ensuring subsidized fertilizer reaches its intended target.

Kondisi Sebelum Transformasi: Tata Kelola Konvensional (Manual & Panjang)
Conditions Before Transformation: Legacy Governance (Manual & Protracted)

Sebelum berlakunya Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, rantai pasok dan implementasi digitalisasi, rantai pasok pupuk dihadapkan pada alur yang panjang dan birokratis. Proses validasi manual menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian bagi petani.

1. **Alur Birokrasi:** Proses penetapan alokasi pupuk bersubsidi yang dilakukan secara berjenjang dari level kecamatan hingga nasional. Selain itu, mekanisme penyaluran dilakukan secara berjenjang melalui Gudang Lini I, Lini II, Lini III, hingga kios/pengecer.
2. **Titik Penebusan Manual:** Dari PUD, pupuk disalurkan ke Toko Kios Pupuk Lengkap (KPL) di mana petani menebus pupuk secara manual dengan validasi berdasarkan kertas e-RDKK, seringkali menyebabkan antrean panjang dan potensi kesalahan data.
3. **Tantangan Utama:** Kompleksitas birokrasi, data yang tidak akurat (manual), dan potensi masalah penyimpangan yang tinggi, yang pada akhirnya menyulitkan Petani dalam proses penebusan.

Prior to the enforcement of the Presidential Regulation on the Governance of Subsidized Fertilizer, and the implementation of digitalization, the fertilizer supply chain faced lengthy and bureaucratic processes. Manual validation processes caused delays and uncertainty among farmers.

1. **Bureaucratic Flow:** The process of determining subsidized fertilizer allocation was carried out in stages from the sub-district to the national level. Furthermore, the distribution mechanism is carried out in stages through Line I, Line II, Line III warehouses, down to kiosks/retailers.
2. **Manual Redemption Points:** From the distributor, fertilizer was distributed to Fertilizer Shops (KPL) where farmers redeemed fertilizer manually, and validated using e-RDKK paperwork, often leading to long queues and potential data errors.
3. **Main Challenges:** Bureaucratic complexity, inaccurate (manual) data, and a high risk for irregularities created significant challenges, which ultimately complicated the redemption process for eligible farmers.

Kondisi Setelah Transformasi: Tata Kelola Modern Digital (Terintegrasi & Transparan)
Post-Transformation Condition: Modern Digital Governance (Integrated & Transparent)

Implementasi Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 dan kebijakan turunan BUMN melahirkan alur tata kelola dan penyaluran baru yang lebih ringkas dan terintegrasi secara digital melalui *platform* utama, i-Pubers (Pesan Pupuk dan Salur Pupuk).

1. **Optimasi & Integrasi Digital:** Pupuk dari Produsen dan Gudang PUD yang dioptimalkan kini langsung tervalidasi melalui platform i-Pubers.
2. **Pemesanan & Penyaluran Real-Time:** Aplikasi i-Pubers mengotomatisasi proses pemesanan dan penyaluran, menggantikan validasi manual.
3. **Titik Serah Terintegrasi**: Proses serah terima dilakukan melalui Titik Serah Terintegrasi yang melibatkan Gapoktan, Pengecer, Pokdakan, dan Koperasi, yang semuanya terdaftar dalam sistem. Proses ini didukung penuh oleh fitur *Delivery Tracking* (Lacak Pengiriman) untuk transparansi pergerakan stok secara *real-time*.
4. **Petani Terdaftar (Penebusan Cepat & Mudah):** Petani valid (dengan kriteria NIK, luas lahan maks 2 Ha, dan terdaftar) kini dapat melakukan penebusan pupuk dengan cepat dan mudah menggunakan *Cashless Payment* (Pembayaran Digital/QR), memastikan penyaluran tepat penerima.

The implementation of Presidential Regulation No. 6 of 2025, alongside derivative SOE policies, established a new, more streamlined and digitally integrated governance and distribution process through the main platforms, i-Pubers (Fertilizer Order and Fertilizer Distribution).

1. **Digital Optimization and Integration:** Fertilizer from producers and optimized Distributor's warehouses is now directly validated through the i-Pubers platform.
2. **Real-Time Ordering and Disbursement:** The i-Pubers application automates the ordering and disbursement process, replacing manual validation.
3. **Integrated Delivery Point:** The handover process is carried out through an Integrated Delivery Point involving agricultural farmer groups (Gapoktan), retailers, fish farmer groups (Pokdakan), and cooperatives, all registered in the system. This process is fully supported by the Delivery Tracking feature for real-time transparency of stock movements.
4. **Registered Farmers (Fast & Easy Redemption):** Eligible farmers - identified by their National Identity Number (NIK), a maximum land area of 2 hectares, and fully registered farmer - can now redeem fertilizer quickly and easily using Cashless Payment (Digital Payment/QR), ensuring targeted distribution.

Transformasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi: dari Distribusi Berjenjang ke Titik Serah Terintegrasi
Transformation of Subsidized Fertilizer Distribution: From Tiered Distribution to an Integrated Delivery Point System

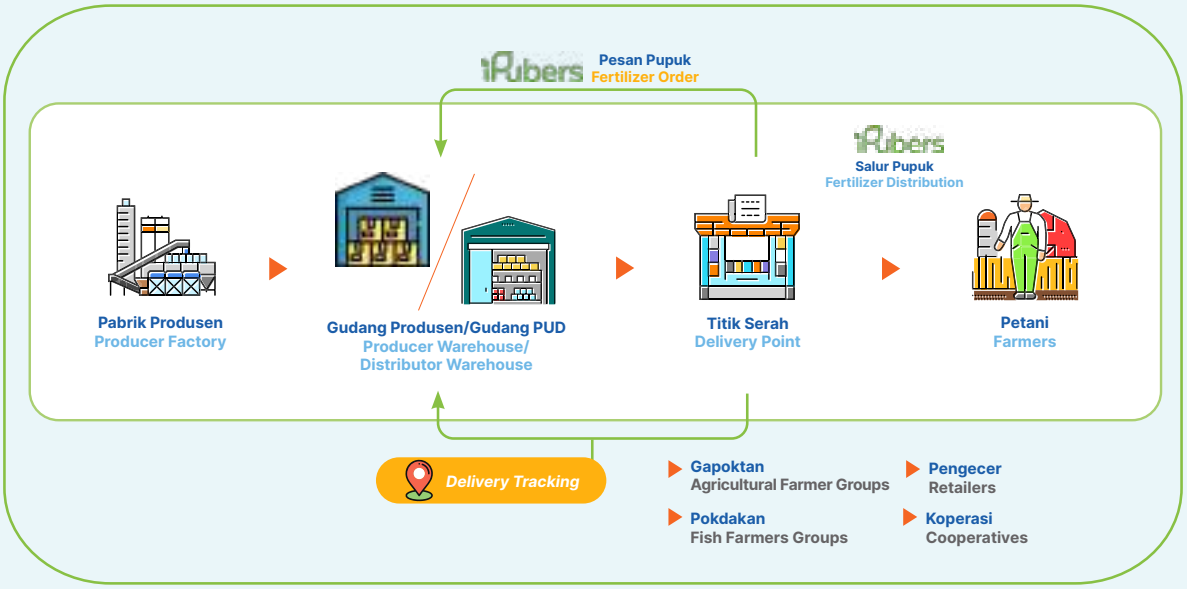
Regulasi strategis Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 ini menjadi tonggak sejarah bagi Perusahaan dalam merombak sistem birokrasi konvensional yang kompleks menjadi ekosistem tata kelola modern yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Melalui penyederhanaan rantai pasok dan pemanfaatan teknologi digital terpusat, kami berkomitmen memastikan setiap alur distribusi—dari pabrik hingga ke tangan petani—berjalan efisien dan tepat penerima sesuai prinsip 7T, sebagai wujud nyata dedikasi Perusahaan dalam mengawal kemandirian dan keberlanjutan swasembada pangan Indonesia.

This enactment of Presidential Regulation No. 6 of 2025, marks a pivotal milestone for the Company in transforming its complex, conventional bureaucratic system into a modern, integrated, transparent, and accountable governance ecosystem. Through supply chain simplification and the use of centralized digital technology, we are committed to ensuring that all distribution channels—from production plant to farmers—runs efficiently and effectively, in accordance with The 7 Right Principle. This demonstrates the Company's unwavering dedication to safeguarding Indonesia's food sovereignty and sustainability.

Skema Distribusi Berjenjang
Tiered Distribution Scheme



Skema Titik Serah Terintegrasi
Integrated Delivery Point Scheme



Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025
Subsidized Fertilizer Distribution Flow based on Presidential Regulation No. 6 of 2025

Produksi & Penyimpanan (Pabrik ke Gudang)
Pupuk diproduksi di Pabrik Produsen, kemudian didistribusikan untuk disimpan di Gudang Produsen/Gudang PUD (Lini penyangga di bawah Pupuk Indonesia).

Pemesanan Pupuk (i-Pubers Pesan Pupuk)
Pihak Titik Serah, yang meliputi Gapoktan, Pengecer, Pokdakan dan Koperasi melakukan pemesanan stok pupuk ke Gudang Produsen secara digital melalui sistem i-Pubers Pesan Pupuk.

Pelacakan Pengiriman
Proses distribusi fisik pupuk dari Gudang Produsen menuju Titik Serah dipantau secara transparan menggunakan fitur *Delivery Tracking* (pelacakan pengiriman).

Penyaluran ke Petani (i-Pubers Salur Pupuk)
Setelah pupuk tiba di Titik Serah, tahap akhir adalah pendistribusian langsung kepada Petani. Proses serah terima ini dicatat dan diverifikasi menggunakan sistem i-Pubers Salur Pupuk untuk memastikan pupuk diterima oleh pihak yang tepat sasaran.

Production & Storage (Plant to Warehouse)
Fertilizer is produced at the Producer's Factory, then distributed for storage at the Producer/Distributor Warehouse (a support line under Pupuk Indonesia).

Fertilizer Ordering (i-Pubers Order Fertilizer)
The Delivery Points, including Agricultural Farmer Groups (Gapoktan), Retailers, Fish Farmers Groups (Pokdakan), and Cooperatives, digitally order fertilizer stock from the Producer's Warehouse through the i-Pubers Fertilizer Order system.

Delivery Tracking
The physical distribution process of fertilizer from the manufacturer's warehouse to the delivery point is transparently monitored using the Delivery Tracking feature.

Distribution to Farmers (i-Pubers Fertilizer Distribution)
After the fertilizer arrives at the Delivery Point, the final stage is direct distribution to farmers. This handover process is recorded and verified using the i-Pubers Fertilizer Distribution system to ensure subsidized fertilizer reaches the eligible recipients.

Dampak Positif dan Komitmen Masa Depan
Positive Impacts and Future Commitments

Pemerintah kemudian melakukan penyempurnaan kembali terhadap tata kelola pupuk bersubsidi dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres No. 113 Tahun 2025 ini pada substansinya mengatur mekanisme pembayaran subsidi yang tidak lagi berbasis biaya produksi (*cost+*) melainkan berbasis harga pasar (*marked-to-market*). Selain itu, Perpres No. 113 Tahun 2025 juga mengatur mekanisme pembayaran biaya bahan baku pupuk bersubsidi di awal tahun, sehingga dapat diperoleh efisiensi biaya keuangan.

Transformasi ini menjadi momentum penting bagi PTPI untuk mendorong efisiensi operasional, revitalisasi fasilitas produksi, pengamanan pasokan bahan baku, serta penguatan layanan dan edukasi bagi petani. Efektivitas dari penguatan tata kelola ini tercermin langsung dari kemampuan petani untuk menebus pupuk bersubsidi sejak 1 Januari 2025. Hal ini merupakan pencapaian signifikan, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, penebusan umumnya baru berjalan efektif beberapa bulan setelah awal tahun, sehingga kini pupuk bersubsidi dapat tersalurkan dengan jauh lebih tepat sasaran.

Selaras dengan Peraturan Presiden RI No. 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, PTPI berkomitmen untuk mengembangkan 7 (tujuh) proyek yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi pupuk nasional, serta mendukung agenda Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

The government then further refined the management of subsidized fertilizer by issuing Presidential Regulation No. 113 of 2025 on Amendments to Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizer. In substance, Presidential Regulation No. 113 of 2025 regulates the subsidy payment mechanism, which is no longer based on production costs (cost+) but rather on market prices (marked-to-market). Furthermore, Presidential Regulation No. 113 of 2025 also governs the payment mechanism for subsidized fertilizer raw material costs at the beginning of the year, thereby enabling significant financial cost efficiencies.

This transformation represented a crucial momentum for PTPI to drive operational efficiency, revitalize production facilities, secure raw material supplies, and strengthen services and education for farmers. The effectiveness of this strengthened governance is directly reflected in the farmers' ability to redeem subsidized fertilizer starting from January 1, 2025. This was a significant achievement, considering that in previous years, redemptions generally only became effective several months after the start of the year. This means that subsidized fertilizer can now be distributed far more effectively.

In line with Presidential Regulation No. 113 of 2025 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizer, PTPI is committed to developing seven projects that are expected to strengthen the national fertilizer production capacity and support the Indonesian Government's agenda to achieve sustainable national food security.

Komitmen Tujuh Proyek Revitalisasi dan Penguatan Industri Pupuk

Commitment to Seven Revitalization and Industrial Strengthening Projects in the Fertilizer Sector

PT Pupuk Iskandar Muda

Pabrik Amonia-Urea PIM-3

Kapasitas I Capacity

Amonia I Ammonia
825.000 Ton/Tahun Ton/Year

Urea I Urea
1.155.000 Ton/Tahun Ton/Year

Lokasi I Location
Lhokseumawe, Aceh

Timeline Proyek I Project Timeline
2027-2030

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Pabrik Amonia – Urea Pusri-IIIB

PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Kapasitas I Capacity

Amonia I Ammonia
445.500 Ton/Tahun Ton/Year

Urea I Urea
907.500 Ton/Tahun Ton/Year

Lokasi I Location
Palembang, Sumatera Selatan

Timeline Proyek I Project Timeline
2023-2027



PT Pupuk Kujang

PABRIK NPK NITRAT

PUPUK KUJANG

Kapasitas I Capacity

NPK Nitrat I NPK Nitrate
100.000 Ton/Tahun Ton/Year

Lokasi I Location
Cikampek, Jawa Barat

Timeline Proyek I Project Timeline
2025-2027

PT Petrokimia Gresik

PABRIK PHONSKA VI

PETROKIMIA GRESIK
Solusi Agroindustri

Kapasitas I Capacity

NPK Chemical | NPK Chemical
600.000 Ton/Tahun Ton/Year

Lokasi I Location
Gresik, Jawa Timur

Timeline Proyek I Project Timeline
2026-2028

PT Pupuk Kalimantan Timur

PUPUK KALTIM

REVAMPING AMMONIA PABRIK 2

Target | Target

Menurunkan konsumsi energi minimum 4 MMBtu/ton Amonia
Menurunkan emisi 110.000 ton CO2 eq/tahun
melalui penghematan pemakaian gas alam
Reduce energy consumption by at least 4 MMBtu per ton of ammonia
Reduce emissions by 110,000 tons of CO2
equivalent per year through natural gas savings

Lokasi I Location
Bontang,
Kalimantan Timur

Timeline Proyek I Project Timeline
2023-2026

PT Pupuk Kalimantan Timur

PUPUK KALTIM

PABRIK AMONIA-UREA
PAPUA BARAT

Kapasitas I Capacity

Amonia I Ammonia
825.000 **Ton**/Tahun **Ton**/Year

Urea I Urea
1.155.000 **Ton**/Tahun **Ton**/Year

Lokasi I Location
Fakfak,
Papua Barat

Timeline Proyek I Project Timeline
2027-2031





PT Pupuk Kalimantan Timur

PUPUK KALTIM

PABRIK SODA ASH

Kapasitas I Capacity

Soda Ash I Soda Ash
300.000 **Ton**/Tahun **Ton**/Year

Amonium Klorida | Ammonium Chloride
300.000 **Ton**/Tahun **Ton**/Year

Lokasi I Location
Bontang,
Kalimantan Timur

Timeline Proyek I Project Timeline
2025-2028

Pencapaian dan Perkembangan Kinerja Keberlanjutan Tahun 2025

Sustainability Performance Achievements and Developments in 2025

Inovasi I Innovation

DAPRescue Team
Inisiatif strategis untuk menjaga ketahanan pasokan bahan baku DAP bagi Pupuk Indonesia Group melalui optimalisasi harga, fleksibilitas distribusi, diversifikasi sumber pasokan, dan strategi pengiriman terpadu.

DAPRescue Team
A strategic initiative to maintain the resilience of DAP raw material supplies for Pupuk Indonesia Group through pricing optimization, distribution flexibility, diversification of supply sources, and an integrated delivery strategy.

Pertumbuhan I Growth

Pendapatan
Revenue
Rp90,40 Triliun I trillion

Pertumbuhan Pendapatan
Revenue Growth
10,76%

Volume Penjualan
Sales Volume
13.858.521 ton

Pertumbuhan Volume Penjualan
Sales Volume Growth
5,84%

Total Aset
Total Assets
Rp150,18 Triliun I trillion

Pertumbuhan Total Aset
Total Assets Growth
7,82%

Volume Produksi
Production Volume
19.239.635 ton
(Pupuk & Non Pupuk)
(Fertilizer and Non-Fertilizer)

Pertumbuhan Volume Produksi
Production Volume Growth
0,98%

▶ ***Integrated Supply Chain Support System***
Sistem digital terintegrasi yang meningkatkan visibilitas distribusi secara *real-time*, mempercepat respons terhadap gangguan distribusi, serta meningkatkan efisiensi dan stabilitas penyaluran produk Pupuk Indonesia Group.

Integrated Supply Chain Support System
An integrated digital system that enhances real-time distribution visibility, accelerates response to distribution disruptions, and improves the efficiency and stability of Pupuk Indonesia Group product distribution.

▶ **GeckoLabs – *Collaborative Survey Platform***
Platform digital kolaboratif untuk pengumpulan *feedback*, survei operasional, dan analisis *insight* bisnis secara *real-time*, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai fungsi perusahaan.

GeckoLabs – Collaborative Survey Platform
A collaborative digital platform for real-time feedback collection, operational surveys, and business insight analysis, supporting data-driven decision-making across Company functions.

▶ **GEN-VI – *Stock Calculation Tools***
Solusi analitik untuk optimasi stok *spare part* yang meningkatkan *service level* sekaligus menekan biaya dan potensi kelebihan inventori di Pupuk Indonesia Group.

GEN-VI – Stock Calculation Tools
An analytical solution for optimizing spare part inventory, improving service levels while reducing costs and potential excess inventory within the Pupuk Indonesia Group.

▶ **GEOSPASIAL**
Teknologi pemanfaatan data satelit dan analisis spasial untuk memantau dinamika pertumbuhan tanaman serta kondisi lahan pertanian secara *real time* dan berbasis lokasi guna memperkuat implementasi program swasembada pangan melalui praktik pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

GEOSPATIAL
Technology using satellite data and spatial analysis to monitor plant growth dynamics and agricultural land conditions in real time and on a location-based basis to strengthen the food self-sufficiency program through more productive and sustainable agricultural practices.

Sosial I Social

259 (Rp Miliar I Rp Billion)

Total Penyaluran Pendanaan UMK dan TJSL
Total MSE and CSR Funds

Tata Kelola I Governance

Keberhasilan meningkatkan skor Corporate Governance Perception Index (CGPI) dengan predikat **"Sangat Tepercaya"** dan hasil asesmen oleh BPKP yang tetap berada pada kategori **"Sangat Baik"**.

Successfully improved the Corporate Governance Perception Index (CGPI) score to achieve a **"Most Trusted"** rating, while the BPKP assessment results remain in the **"Very Good"** category.

Rating Perusahaan 2021-2025
Company Rating 2021-2025

idAAA

Pefindo (*Outlook Stable*)
Pefindo idAAA (Outlook Stable)

Lingkungan I Environment

- **PT Pupuk Kalimantan Timur**
  PROPER EMAS I PROPER GOLD
- **PT Petrokimia Gresik**
  PROPER HIJAU I PROPER GREEN
- **PT Pupuk Kujang**
  PROPER HIJAU I PROPER GREEN
- **PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**
  PROPER HIJAU I PROPER GREEN
- **PT Pupuk Iskandar Muda**
  PROPER HIJAU I PROPER GREEN

Realisasi Program Pengurangan Emisi
Implementation of Emission Reduction Programs

2.275.205 ton CO_2eq

Emisi Gas Rumah Kaca
Greenhouse Gas Emissions

Skor ESG
ESG Score

61 dari lembaga Rating S&P Global
from S&P Global Ratings
(Peringkat 1 Klaster Industri Pupuk Global)
(Ranked 1st in the Global Fertilizer Industry Cluster)

SKOR MSCI MSCI Score **BBB**

Penghargaan dan Sertifikasi 2025

Awards and Certification in 2025

Majalah BUMN Track I BUMN Track Magazine

Anugerah BUMN 2025

2025 BUMN Awards

1. Kepemimpinan Visioner Direktur Utama Terbaik
2. Strategi Pertumbuhan Perusahaan Terbaik Pertama
3. Inovasi Bisnis Perusahaan Terbaik Kedua
4. Kolaborasi Strategis Perusahaan Terbaik Pertama

1. Best CEO Visionary Leadership
2. Best Corporate Growth Strategy
3. Second Best Corporate Business Innovation
4. First Best Corporate Strategic Collaboration



20 Maret 2025 I March 20, 2025

Investortrust

Anugerah Terbaik atas Transparansi Penurunan Emisi Perusahaan Tahun 2025

Best Corporate Emission Reduction Transparency Award 2025

1. Pencapaian Hijau dalam Penurunan Emisi
2. Pencapaian Diamond dalam Transparansi Emisi

1. Green Achievement in Emission Reduction
2. Diamond Achievement in Emission Transparency



29 April 2025 I April 29, 2025

Majalah BUMN Track I BUMN Track Magazine

Anugerah TJSL & CSR 2025

SER & CSR Awards 2025

TJSL & CSR Awards 2025:
1. Platinum, Kategori Pilar Ekonomi
2. Gold, Kategori Pilar Sosial
3. Gold, Kategori Pilar Lingkungan

SER & CSR Awards 2025:
1. Platinum, Economic Pillar Category
2. Gold, Social Pillar Category
3. Gold, Environmental Pillar Category



25 Juni 2025 I June 25, 2025

Investor trust

Anugerah BUMN 2025
BUMN Awards 2025

Keunggulan dalam Konsolidasi Strategis *Holding* Pupuk

Excellence in Strategic Fertilizer Holding Consolidation



31 Juli 2025 I July 31, 2025

The Iconomics

PR Summit & Awarding

1. Pemenang Corporate Reputation Awards 2025 pada Kategori Industri Agro
2. Sekretaris Perusahaan sebagai Pemenang 50 PR Person Awards 2025

1. Winner of Corporate Reputation Awards 2025 in Agro Industry Category
2. Corporate Secretary as the Winner of 50 PR Person Awards 2025



8 Agustus 2025 I August 8, 2025

Detikcom

Anugerah Ekonomi Hijau
Green Economy Award



14 Agustus 2025 I August 14, 2025

Majalah Fortune Indonesia I Fortune Indonesia Magazine

Fortune Indonesia 100:
Perusahaan Terbesar Indonesia 2025
(Peringkat ke-15)
Fortune Indonesia 100:
Indonesia's Largest Company 2025
(Ranked 15th)



12 September 2025 I September 12, 2025

Bisnis Indonesia

Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bisnis Indonesia (BISRA):
Juara Platinum untuk program "TAJUMASE"
Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA):
Platinum Champion for the "TAJUMASE" program



30 September 2025 I September 30, 2025

Republika

Anugerah RESG Now 2025:
Pilar Lingkungan, Kategori Juara Pertanian Berkelanjutan
RESG Now Awards 2025:
Environmental Pillar, Sustainable Agriculture Champion Category



16 Oktober 2025 I October 16, 2025

Corporate Forum for CSR Development

- **ISDA Pilar Pembangunan Ekonomi (Permaisuri) - Silver**
- **ISDA Pilar Pembangunan Ekonomi (TAJUMASE) - Gold**
- **ISDA Pilar Pembangunan Sosial (TAJUMASE) - Gold**
- ISDA Economic Development Pillar (Permaisuri) - Silver
- ISDA Economic Development Pillar (TAJUMASE) - Gold
- ISDA Social Development Pillar (TAJUMASE) - Gold



19 Oktober 2025 I October 19, 2025

Investortrust

Anugerah Investortrust ESG 2025: Penghargaan Bintang Emas, Kategori Perusahaan Keterbukaan (Non-Emiten)

Investortrust ESG Awards 2025: Gold Star Award, Disclosure Category (Non-Issuing Companies)



23 Oktober 2025 I October 23, 2025

Wahana Kendali Mutu (WKM)

Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXIX tahun 2025:

The 29th National Quality and Productivity Work Meeting (TKMPN) in 2025

1. Sangat Baik (Kualitas Inovasi Strategis)
2. 1 Top 3 Diamond
3. 18 Diamond
4. 5 Platinum
5. 3 Kinerja Terbaik
6. 2 Presentasi Terbaik
7. 2 Paling Favorit

1. Excellent (Quality Strategic Innovation)
2. 1 Top 3 Diamond
3. 18 Diamond
4. 5 Platinum
5. 3 Best Performance
6. 2 Best Presentation
7. 2 Most Favorite



24-29 November 2025 I November 24-29, 2025

IICG Bekerja Sama dengan SWA Media

Perusahaan dalam Program Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024 memiliki nilai yang termasuk dalam predikat "Sangat Tepercaya"

The Company participating in the 2024 Corporate Governance Perception Index (CGPI) Research and Ranking Program have received a rating of "Most Trusted"



1 Desember 2025 I December 1, 2025

Majalah BUMN Track I BUMN Track Magazine

Branding & Pemasaran BUMN

BUMN Branding & Marketing

1. Best Chief Marketing Officer (CMO) Branding & Marketing
2. Platinum kategori Global Branding & Marketing "Impact on Indonesia"
3. Platinum untuk Best Transformation Brand & Marketing in Digital Era
4. Gold untuk Global Branding & Marketing Strategy.

1. Best Chief Marketing Officer (CMO) Branding & Marketing
2. Platinum in the Global Branding & Marketing "Impact on Indonesia" category
3. Platinum in the Best Transformation Brand & Marketing in the Digital Era
4. Gold in the Global Branding & Marketing Strategy.



1 Desember 2025 I December 1, 2025

Disway Awards

Anugerah Brand Populer Indonesia, Disway Awards 2025, Jakarta

Popular Brand Indonesia Awards, Disway Awards 2025, Jakarta



4 Desember 2025 I December 4, 2025

Pikiran Rakyat Media Network (PRMN)

Anugerah Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) 2025 : Pemimpin Merek Berkelanjutan

Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) Award 2025: Sustainable Brand Leader



5 Desember 2025 I December 5, 2025

Corporate Forum for CSR Development (CFCD)

Indonesia SDG Award's (ISDA)

Indonesia SDG Award's (ISDA)

1. ISDA Ekonomi Pilar - Silver
2. ISDA Pilar Sosial - Gold
3. ISDA Ekonomi Pilar - Gold
4. ICA - Core Subject (5B) Fair Operating Practice

1. ISDA Economic Pillar - Silver
2. ISDA Social Pillar - Gold
3. ISDA Economi Pilar - Gold
4. ICA - Core Subject (5B) Fair Operating Practice



17 Desember 2025 I December 17, 2025

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2025

Certifications Still Valid in 2025



20000-1:2018 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi
20000-1:2018 Information Technology Service Management System

Dikeluarkan oleh I Issued By
PT URS Indonesia

Tanggal Penerbitan Sertifikasi
Certification Issuance date
13 Februari 2023 I February 13, 2023

Masa Berlaku Sertifikasi
Certification Validity
13 Februari 2026 I February 13, 2026



ISO 9001:2015-*Quality System Management Certification*
ISO 9001:2015-Quality System Management Certification

Dikeluarkan oleh I Issued By
PT URS Indonesia

Tanggal Penerbitan Sertifikasi
Certification Issuance date
26 Desember 2025 I December 26, 2025

Masa Berlaku Sertifikasi
Certification Validity
25 Desember 2028 I December 25, 2028



SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SNI ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System

Dikeluarkan oleh I Issued By
TUV Nord Indonesia

Tanggal Penerbitan Sertifikasi
Certification Issuance date
27 Juni 2023 I June 27, 2023

Masa Berlaku Sertifikasi
Certification Validity
26 Juni 2026 I June 26, 2026



ISO/IEC 27001 : 2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
ISO/IEC 27001: 2022 Information Security Management System

Dikeluarkan oleh I Issued By
BSI

Tanggal Penerbitan Sertifikasi
Certification Issuance date
21 Maret 2025 I March 21, 2025

Masa Berlaku Sertifikasi
Certification Validity
20 Maret 2028 I March 20, 2028



Sertifikasi SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk PTPI (Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan, Perencanaan & Pemantauan, serta Perencanaan Penjualan & Penagihan *Public Service Obligation* (PSO).
SNI ISO 37301:2021 Certification of Compliance Management System for PTPI (Governance & Compliance Function, Planning & Monitoring, and Sales Planning & Public Service Obligation (PSO) Collection)

Dikeluarkan oleh I Issued By
PT Chesna

Tanggal Penerbitan Sertifikasi
Certification Issuance date
23 Desember 2024 I December 23, 2024

Masa Berlaku Sertifikasi
Certification Validity
22 Desember 2027 I December 22, 2027



Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk PT Pupuk Kujang (Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 2803:2024)
Certificate of Product Use of SNI Mark (SPPT SNI) for PT Pupuk Kujang (The company has implemented SNI Quality Management System ISO 9001:2015 and the quality of its products has met the requirements of SNI 2803:2024)

Dikeluarkan oleh I Issued By
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Republic of Indonesia Ministry of Industry

Tanggal Penerbitan Sertifikasi
Certification Issuance date
6 Februari 2023 I February 6, 2023

Masa Berlaku Sertifikasi
Certification Validity
2 April 2027 I April 2, 2027



Sertifikat SNI 2803:2012 untuk Pupuk NPK Padat PT Petrokimia Gresik dengan merek: Phonska Pupuk Indonesia, Phonska Plus, KEBOMAS, Phonska PG, Pelangi Agro, Petro Nitrat, Petro Ningrat, Pupuk Kujang, Pupuk Indonesia *Holding Company* Phonska Plus, PETROKIMIA GRESIK Logo PG, Petro Cane, Sipedas, Phonska Booster/BUTIRAN; Granule.
SNI 2803:2012 Certificate for PT Petrokimia Gresik Solid NPK Fertilizer with brands: Phonska Pupuk Indonesia, Phonska Plus, KEBOMAS, Phonska PG, Pelangi Agro, Petro Nitrat, Petro Ningrat, Pupuk Kujang, Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus, PETROKIMIA GRESIK Logo PG, Petro Cane, Sipedas, Phonska Booster/BUTIRAN; Granule.

Dikeluarkan oleh I Issued By
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
East Java Provincial Government

Tanggal Penerbitan Sertifikasi
Certification Issuance date
28 April 2022 I April 28, 2022

Masa Berlaku Sertifikasi
Certification Validity
27 April 2026 I April 27, 2026



Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk PT Pupuk Kaltim (Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 2803:2012)
Certificate of Product Use of SNI Mark (SPPT SNI) for PT Pupuk Kaltim (The company has implemented the SNI Quality Management System ISO 9001: 2015 and the quality of its products has met the requirements of SNI 2803: 2012).

Dikeluarkan oleh I Issued By
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Republic of Indonesia Ministry of Industry

Tanggal Penerbitan Sertifikasi
Certification Issuance date
7 Maret 2022 I March 7, 2022

Masa Berlaku Sertifikasi
Certification Validity
10 Mei 2026 I May 10, 2026



Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 2803:2012)
Certificate of Product Use of SNI Mark (SPPT SNI) for PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (The company has implemented Quality Management System SNI ISO 9001:2015 and the quality of its products has met the requirements of SNI 2803:2012)

Dikeluarkan oleh I Issued By
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Republic of Indonesia Ministry of Industry

Tanggal Penerbitan Sertifikasi
Certification Issuance date
21 Juli 2021 I July 21, 2021

Masa Berlaku Sertifikasi
Certification Validity
6 April 2031 I April 6, 2031

Daftar Isi

Table of Contents

TRANSFORMASI INDUSTRI PUPUK PENOPANG KEDAULATAN PANGAN NASIONAL

Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan 2025 About 2025 Annual Report and Preparation Method	2
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability	3
Penjelasan Tema Theme Explanation	4
Kesinambungan Tema Theme Continuity	6
Sekilas tentang Pupuk Indonesia Pupuk Indonesia at a Glance	8
Transformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Fertilizer Governance Transformation	10
Komitmen Tujuh Proyek Revitalisasi dan Penguatan Industri Pupuk Commitment to Seven Revitalization and Industrial Strengthening Projects in the Fertilizer Sector	14
Pencapaian dan Perkembangan Kinerja Keberlanjutan Tahun 2025 Sustainability Performance Achievements and Developments in 2025	16
Penghargaan dan Sertifikasi 2025 Awards and Certification in 2025	18
Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2025 Certifications Still Valid in 2025	24
Daftar Isi Table of Contents	26

01 Kilas Kinerja
Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	32
Ikhtisar Bisnis dan Operasional Business and Operational Highlights	38
Ikhtisar Organisasi Organization Highlights	44
Ikhtisar Saham Stock Highlights	45
Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar Information Regarding Outstanding Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds	46
Kilas Peristiwa 2025 2025 Event Highlights	48

02 Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Reports	56
Laporan Direksi Board of Directors Report	70
Dewan Komisaris Board of Commissioners	88
Direksi Board of Directors	89
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Pupuk Indonesia (Persero) Statement by the Members of Directors and Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero)	90

03 Profil Perusahaan
Company Profile

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan Company General Information and Identity	92
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	99
Jejak Langkah Milestones	104
Makna Logo Perusahaan Meaning of the Company Logo	106
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	108
Kegiatan Usaha Business Activities	112
Wilayah Operasi Operational Area	122
Keanggotaan Dalam Asosiasi Membership in Associations	127
Struktur Organisasi Organizational Structure	128
Profil Direksi Board of Directors Profiles	131
Perubahan Komposisi Direksi serta Alasan Perubahannya Changes to the Board of Directors Composition and Reasons for Changes	139
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profiles	143
Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang Terjadi setelah Tahun Buku Berakhir Changes in The Board of Directors and/or Board of Commissioners Composition that Occurred After The End of The Fiscal Year	155

Profil Pejabat Eksekutif 157
Executive Officers Profiles

Demografi Karyawan 163
Employee Demographics

Komposisi Pemegang Saham 170
Shareholders Composition

Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama 173
List of Subsidiaries, Associated Companies, and Joint Ventures

Struktur Grup Perusahaan 186
Company Group Structure

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham 188
Chronology of Shares Issuance and/or Listing

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya 190
Chronology Of Other Securities Issuance and/or Listing

Kantor Akuntan Publik (KAP) 195
Public Accounting Firm (KAP)

Lembaga dan Profesi Penunjang 197
Supporting Institutions and Professionals

Informasi Pada Situs Web Perusahaan 198
Information on the Company Website

04 Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis

Tinjauan Umum Perekonomian dan Industri 202
General Overview of Economic and Industry

Kebijakan Strategis dan Tantangan Tahun 2025 205
Strategic Policies and Challenges for 2025

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha 208
Operational Review by Business Segment

Aspek Pemasaran 228
Marketing Aspects

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain 229
Implementation of National Strategic Projects or Other Assignments

Teknologi 230
Technology

Riset dan Inovasi 231
Research and Innovation

Analisis Kinerja Keuangan 242
Financial Performance Analysis

Kemampuan Membayar Utang 275
Ability to Pay Debt

Tingkat Kolektibilitas Piutang 277
Receivables Collectibility Level

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal 279
Capital Structure and Capital Structure Management Policy

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal 280
Material Commitments for Capital Goods Investments

Realisasi Investasi Barang Modal 281
Capital Goods Investment Implementation

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan 282
Material Information and Facts Occurring After The Date of The Accountant's report

Dampak Mata Uang Asing Terhadap Kinerja Perusahaan 284
Impact of Foreign Currency on the Company's Performance

Pencapaian Target Tahun 2025 285
Achievement of 2025 Targets

Tingkat Kesehatan Perusahaan 290
Company Health Level

Kebijakan dan Pembagian Dividen 290
Dividend Policy and Distribution

Perpajakan dan PNBP Lainnya: Kontribusi Terhadap Negara 292
Taxation and Other PNBP Revenue: Contribution to the State

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 293
Use of Proceeds from the Public Offering

Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) 294
Report on The Use of Additional State Capital Participation (PMN)

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 295
Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestments, Business Mergers, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Affiliated Transactions, and Involving Conflicts of Interest Transactions

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi 295
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak Terhadap Perusahaan 296
Changes to Statutory Regulations that Impact the Company

Perubahan Kebijakan Akuntansi 297
Changes in Accounting Policies

Prospek Usaha Tahun 2026 298
Business Prospects for 2026

Proyeksi Kinerja Tahun 2026 300
Performance Projections for 2026

Peta Jalan Usaha: Rencana Pengembangan Jangka Panjang 303
Business Roadmap: Long-Term Development Plan

05 Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di PTPI 308
Corporate Governance Implementation at PTPI

Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan 311
Best Achievements in Corporate Governance Implementations

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan 317
Implementation of Sustainable Corporate Governance

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 330
Corporate Governance Structure and Mechanism

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	334
Dewan Komisaris Board of Commissioners	355
Komisaris Independen Independence of Independent Commissioners	373
Direksi Board of Directors	376
Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi Transparency of Information Regarding The Board of Commissioners and Board of Directors	403
Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of The Board of Commissioners	359
Komite di Bawah Direksi Committees Below The Board of Directors	508
Audit Eksternal/Akuntan Publik External Audit/Public Accountant	550
Sistem Pengendalian Intern Internal Control System	560
Manajemen Risiko Risk Management	566
Perkara Hukum Legal Cases	581
Sanksi Administratif oleh Otoritas Terkait Administrative Sanctions by the Relevant Authorities	583
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Long-Term Compensation Policy	584
Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Kerja Setelah Terjadinya Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan atas Saham Perusahaan Terbuka Share Ownership Information Disclosure Policy for Members of The Board of Directors and Members of The Board of Commissioners No Later than 3 (Three) Business Days After the Ownership or any Change in Ownership of Shares of A Public Company	585
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	586
Teknologi Informasi Information Technology	589
Pedoman Etika dan Perilaku Ethics and Conduct Guidelines	600
Whistleblowing System Whistleblowing System	606
Pengendalian Gratifikasi Gratification Control	625
Pengelolaan Benturan Kepentingan Conflict of Interest Management	628
Kebijakan Anti-Fraud/Antikorupsi Anti-Fraud/Anti-Corruption Policy	629
Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik Political Activities Funding Information	632
Etika Perusahaan dalam Berhubungan dengan Pejabat Publik Corporate Ethics in Relations with Public Officials	632
Pelaporan Kekayaan Pejabat Officials' Wealth Reporting	633
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	639
Pengelolaan Rekanan Partner Management	642
Transparansi Praktik *Bad Governance* Transparency of Bad Governance Practices	644
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group Implementation of Integrated Governance in The Pupuk Indonesia Group Conglomerate	644
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Good Corporate Governance Guidelines in Public Companies	649
Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Implementation of The General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI)	666

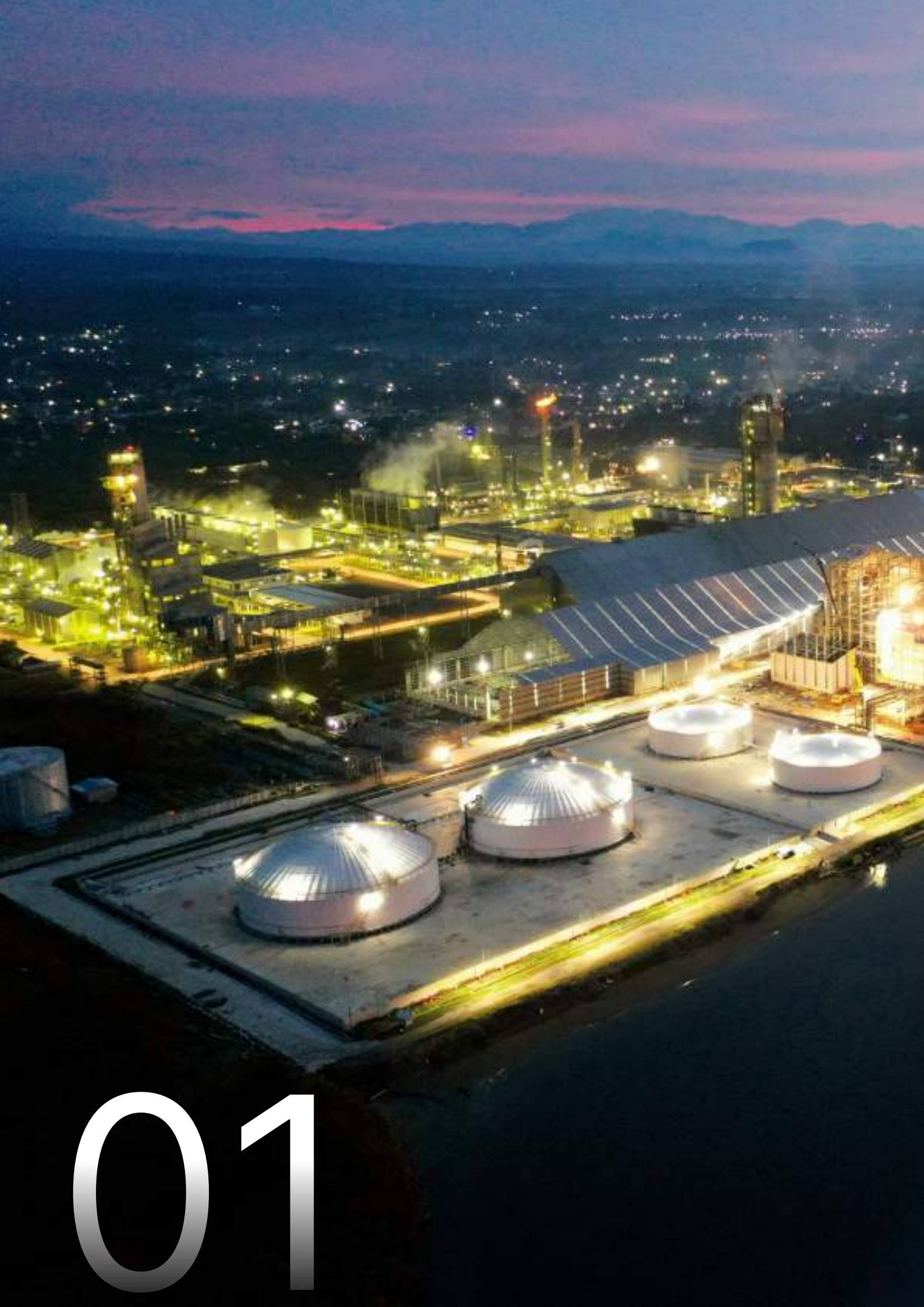
06 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility

Komitmen dan Landasan Kebijakan Commitment and Policy Basis	696
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights	698
Pelaksanaan Tiga Pilar TJSL Implementation of Three SER Pillars	701
Program *Creating Shared Value* (CSV) Tahun 2025 Creating Shared Value (CSV) Program in 2025	705
Glosarium Glossary	708

07 Laporan Keuangan
Financial Statements

Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements	712
Referensi Silang SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies	845





01



Kilas Kinerja

Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)		CAGR 2021-2025 (%)	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Sales and Other Revenues									
Penjualan Produk Sales of products	**48.118.045**	44.202.966	44.221.081	64.491.788	49.313.851	8,86	●	(0,49)	●
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia	**39.507.147**	33.323.915	32.512.230	36.109.067	25.258.692	18,55	●	9,36	●
Pendapatan Jasa Service Revenue	**2.776.457**	4.089.327	2.473.956	3.258.638	4.030.593	(32,10)	●	(7,18)	●
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total revenue from contracts with customers	**90.401.649**	81.616.208	79.207.267	103.859.493	78.603.136	10,76	●	2,84	●
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	**(75.013.927)**	(65.590.416)	(63.303.146)	(70.288.172)	(63.469.789)	14,37	●	3,40	●
Laba Bruto Gross Profit	**15.387.722**	16.025.792	15.904.121	33.571.321	15.133.347	(3,98)	●	0,33	●
Beban Penjualan Selling expenses	**(920.334)**	(1.039.742)	(1.276.030)	(1.183.293)	(1.280.505)	(11,48)	●	(6,39)	●
Beban Umum dan Administrasi General and administrative expenses	**(5.551.810)**	(5.970.735)	(5.031.467)	(5.956.428)	(4.023.124)	(7,02)	●	6,65	●
Pendapatan (Beban) Lainnya-Bersih Other Revenues (Expenses) - Net	**(443.404)**	3.677.940	157.838	692.906	150.180	(112,06)	●	(224,18)	●
Laba Operasi Operating Profit	**8.472.174**	12.693.255	9.754.462	27.124.506	9.979.898	(33,25)	●	(3,22)	●
Pendapatan Keuangan Finance income	**1.160.425**	1.026.960	925.137	271.478	226.343	13,00	●	38,67	●
Biaya Keuangan Finance costs	**(1.372.451)**	(1.917.934)	(2.519.821)	(2.243.064)	(2.047.494)	(28,44)	●	(7,69)	●
Bagian atas Laba/(Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of net loss of associates and joint ventures	**(342.126)**	(581.710)	447.295	(66.175)	296.018	41,19	●	(202,94)	●
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	**7.918.022**	11.220.571	8.607.073	25.086.745	8.454.765	(29,43)	●	(1,30)	●
Beban Pajak Tax Expense	**(2.405.237)**	(2.334.533)	(2.353.514)	(6.576.153)	(3.320.090)	3,03	●	(6,24)	●
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**5.512.785**	8.886.038	6.253.559	18.510.592	5.134.675	(37,96)	●	1,43	●
Jumlah Penghasilan/(Rugi) Komprehensif lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Other Comprehensive Income/(Loss) for the Year After Tax	**1.564.913**	(252.310)	(377.799)	1.480.776	46.592	(720,23)	●	101,95	●
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**7.077.698**	8.633.728	5.875.760	19.991.368	5.181.267	(18,02)	●	6,44	●

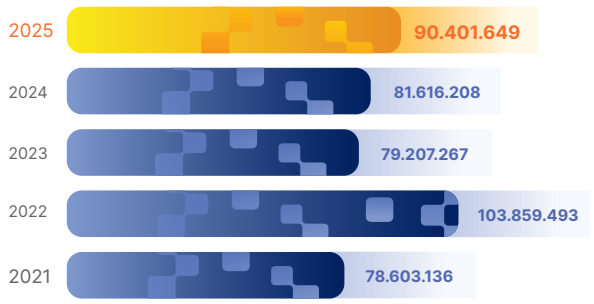
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)		CAGR 2021-2025 (%)	
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Profit for the Year Attributable to:									
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	**5.535.884**	8.668.906	6.200.780	18.461.812	5.321.127	(36,14)	●	0,79	●
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	**(23.099)**	217.132	52.779	48.780	(186.452)	(110,64)	●	(34,14)	●
	5.512.785	8.886.038	6.253.559	18.510.592	5.134.675	(37,96)	●	1,43	●
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:									
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	**7.100.797**	8.416.596	5.822.981	19.942.588	5.367.719	(15,63)	●	5,76	●
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	**(23.099)**	217.132	52.779	48.780	(186.452)	(110,64)	●	(34,14)	●
	7.077.698	8.633.728	5.875.760	19.991.368	5.181.267	(18,02)	●	6,44	●
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk-Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah penuh) Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity - Basic and Diluted (in full Rupiah)	**221.435**	346.756	248.031	738.472	212.845	(36,14)	●	0,79	●

Keterangan:
Penggunaan warna **hijau** untuk memberikan gambaran tentang kinerja yang meningkat/membaik serta warna **merah** untuk kinerja yang terkoreksi/belum tercapai.

Note:
The use of **green** to indicate improving/enhancing performance and **red** to indicate corrected/not yet achieved performance.

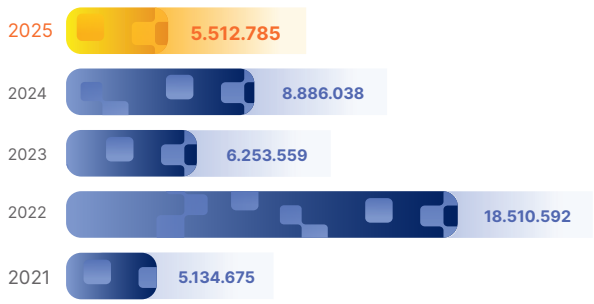
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya
Sales and Other Revenues

(Rp-juta) | (Rp-million)



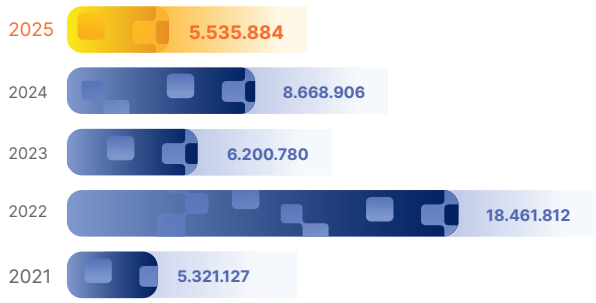
Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

(Rp-juta) | (Rp-million)



Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

(Rp-juta) | (Rp-million)



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

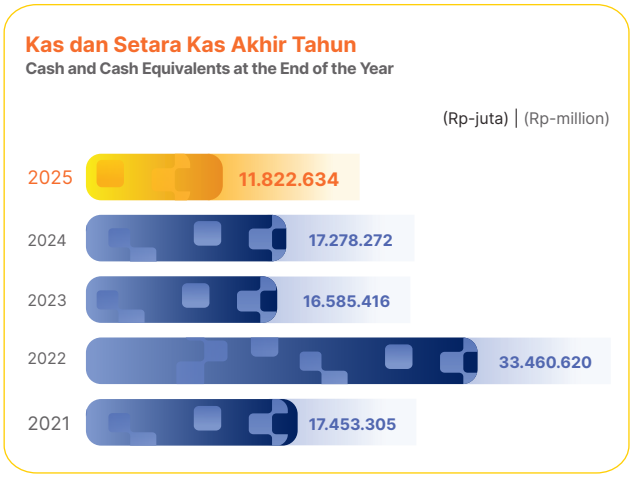
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Aset Assets							
Aset Lancar Current Assets							
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	**11.822.634**	17.278.272	16.585.416	33.460.620	17.453.305	(31,58)	(7,49)
Persediaan Inventories	**13.970.264**	13.720.295	17.089.004	20.567.169	13.910.126	1,82	0,09
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	**27.790.804**	19.345.233	24.764.936	23.947.305	12.810.781	43,66	16,75
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**53.583.702**	50.343.800	58.439.356	77.975.094	44.174.212	6,44	3,94
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets							
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	**2.285.095**	1.927.194	1.502.881	1.103.067	1.178.092	18,57	14,17
Properti Investasi Investment Properties	**3.965.449**	1.956.409	1.862.663	1.519.458	888.788	102,69	34,86
Aset Tetap Fixed Assets	**84.562.281**	79.680.596	75.695.175	74.658.647	74.118.213	6,13	2,67
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	**5.786.298**	5.388.656	5.496.255	3.464.241	8.103.867	7,38	(6,52)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**96.599.123**	88.952.855	84.556.974	80.745.413	84.288.960	8,60	2,76
Jumlah Aset Total Assets	**150.182.825**	139.296.655	142.996.330	158.720.507	128.463.172	7,82	3,17
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Liabilitas Liabilities							
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**26.525.307**	25.286.189	30.278.416	42.749.997	33.008.039	4,90	(4,28)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**20.199.983**	14.649.740	20.752.736	24.810.210	23.515.157	37,89	(2,99)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**46.725.290**	39.935.929	51.031.152	67.560.207	56.523.196	17,00	(3,74)
Ekuitas Equity							
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	**103.242.280**	99.087.038	91.883.844	91.106.864	71.914.276	4,19	7,50
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali Equity Attributable to Non-Controlling Interests	**215.255**	273.688	81.334	53.436	25.700	(21,35)	52,97
Jumlah Ekuitas Total Equity	**103.457.535**	99.360.726	91.965.178	91.160.300	71.939.976	4,12	7,54

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**150.182.825**	139.296.655	142.996.330	158.720.507	128.463.172	7,82	3,17
Informasi Lainnya Other Information							
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	**27.058.395**	25.057.611	28.160.940	35.225.097	11.166.173	7,98	19,37
Investasi Investments	**8.620.433**	9.323.318	3.911.072	3.461.120	2.113.916	(7,54)	32,46

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statements of Cash Flow

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	**4.099.980**	22.488.663	6.481.747	22.030.176	14.517.293	(81,77)	(22,34)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	**(10.216.975)**	(10.961.610)	(13.729.227)	(4.383.225)	(3.007.701)	(6,79)	27,71
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	**625.607**	(10.929.088)	(9.311.270)	(2.385.661)	(6.457.203)	(105,72)	(162,70)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**(5.491.388)**	597.965	(16.558.750)	15.261.290	5.052.389	(1.018,35)	(201,68)
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	**35.750**	94.891	(316.454)	746.025	(4.602)	(62,33)	(250,68)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	**17.278.272**	16.585.416	33.460.620	17.453.305	12.405.518	4,18	6,85
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	**11.822.634**	17.278.272	16.585.416	33.460.620	17.453.305	(31,58)	(7,49)

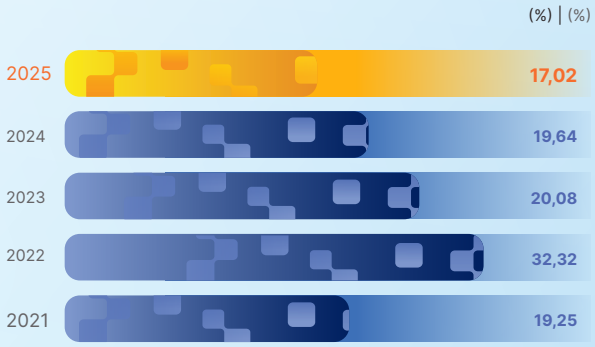


Rasio-Rasio Keuangan

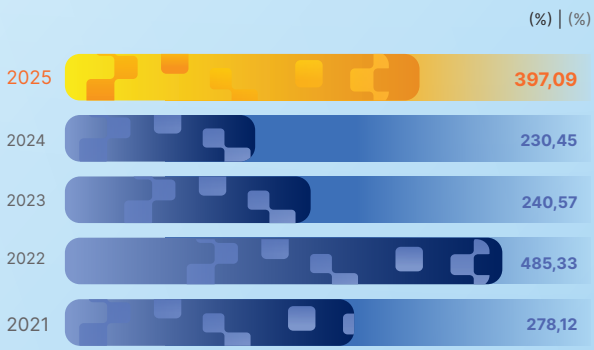
Financial Ratios

Dalam persen (%), kecuali dinyatakan lain In percentage (%), unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	Selisih | Difference 2021-2025 (%)	
Profitabilitas Profitability							
Rasio Marjin Laba Bruto Gross Profit Margin	**17,02**	19,64	20,08	32,32	19,25	(2,61)	●
Rasio Marjin Laba Operasi Operating Profit Margin	**9,37**	15,55	12,32	26,12	12,70	(6,18)	●
Rasio Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	**6,10**	10,89	7,90	17,82	6,53	(4,79)	●
Rasio Laba terhadap Aset Return on Assets	**3,67**	6,38	4,37	11,66	4,00	(2,71)	●
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas Return on Equity	**5,33**	8,94	6,80	20,31	7,14	(3,61)	●
Rasio EBITDA terhadap Pendapatan EBITDA Margin	**15,84**	**16,59**	**18,40**	**29,64**	**18,04**	**(0,75)**	●
Likuiditas Liquidity							
Rasio Kas Cash Ratio	**44,57**	68,33	54,78	78,27	52,88	(23,76)	●
Rasio Cepat Quick Ratio	**149,34**	144,84	136,57	134,29	91,69	4,50	●
Rasio Lancar Current Ratio	**202,01**	199,10	193,01	182,40	133,83	2,91	●
Solvabilitas Solvability							
Debt to Equity Ratio	**45,16**	40,19	55,49	74,11	78,57	4,97	●
Interest Bearing Debt	**21,24**	17,62	31,24	34,16	43,53	3,62	●
Interest Bearing Debt to EBITDA	**1,53**	1,29	1,97	1,01	2,21	0,24	●
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	**397,09**	230,45	240,57	485,33	278,12	166,64	●
Interest Coverage Ratio (ICR)	**1.043,55**	706,16	578,47	1.379,80	692,53	337,39	●

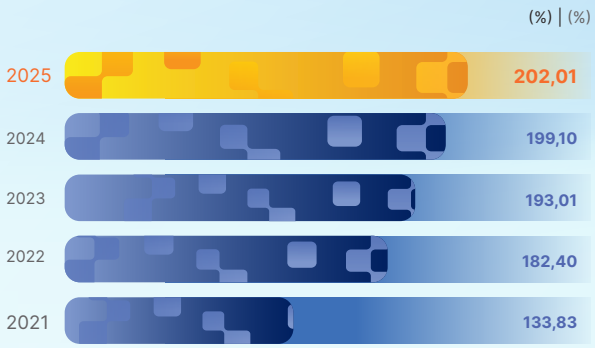
Marjin Laba Bruto
Gross Profit Margin



Debt Service Coverage Ratio (DSCR)



Rasio Lancar
Current Ratio





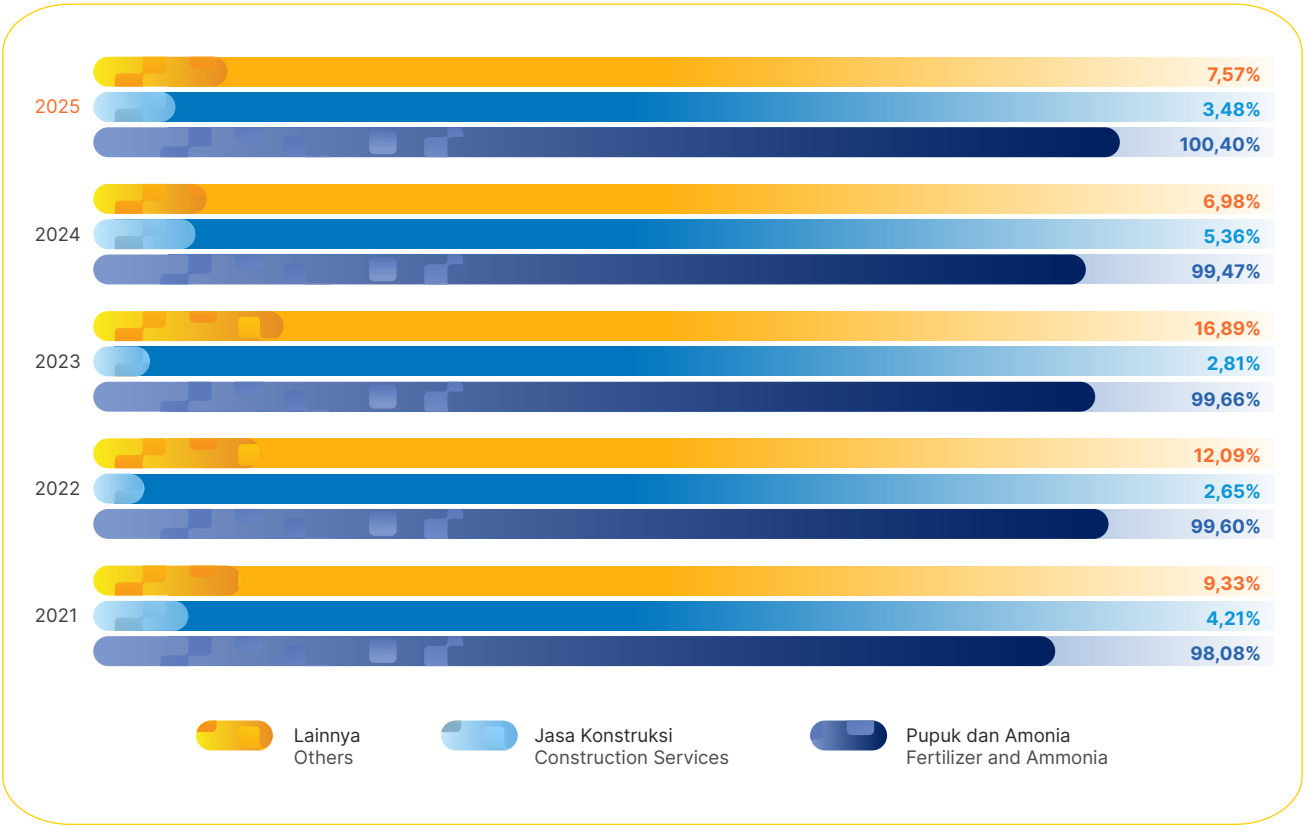
Ikhtisar Bisnis dan Operasional
Business and Operational Highlights

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Berdasarkan Segmen
Sales and Other Operating Revenues by Segment

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In millions of Rupiah, unless otherwise stated	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Segmen Usaha Business Segment							
Pupuk dan Amonia Fertilizer and Ammonia	**90.764.316**	81.181.882	78.937.710	103.442.919	77.094.451	11,80	3,32
Jasa Konstruksi Construction Services	**3.148.947**	4.376.461	2.225.789	2.749.770	3.310.739	(28,05)	(1,00)
Lainnya Others	**6.846.874**	5.699.904	13.376.279	12.559.199	7.333.918	20,12	(1,36)
Eliminasi* Elimination*	**(10.358.488)**	(9.642.039)	(15.332.511)	(14.892.395)	(9.135.972)	7,43	2,54
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Operating Revenues	**90.401.649**	**81.616.208**	**79.207.267**	**103.859.493**	**78.603.136**	**10,76**	**2,84**

*) Eliminasi adalah seluruh transaksi baik penjualan dan pembelian yang dilakukan antar Perusahaan Pupuk Indonesia Group.
*) Elimination refers to all transactions, both sales and purchases, conducted among Pupuk Indonesia Group companies.

Komposisi Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Berdasarkan Segmen
Composition of Sales and Other Operating Revenues by Segment



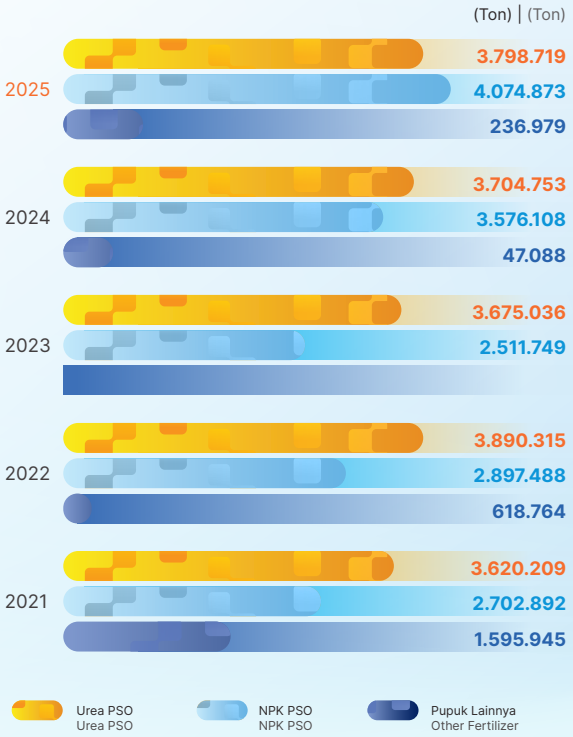
Produksi dan Penjualan Pupuk dan Amonia/Non-Pupuk

Production and Sales of Fertilizers and Ammonia/Non-Fertilizer Products

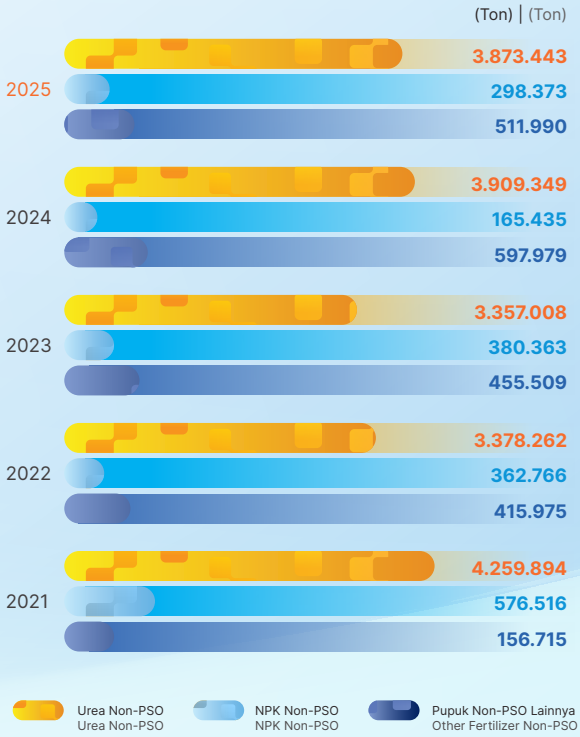
Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)		CAGR 2021-2025 (%)	
Segmen Usaha Business Segment										
Pupuk Fertilizer										
Urea Urea	Ton	**7.627.060**	7.681.964	7.697.286	7.467.192	7.968.504	(0,71)	●	(0,87)	●
Non-Urea Non-Urea	Ton	**4.906.027**	4.563.787	3.949.867	4.329.025	4.267.597	7,50	●	2,83	●
Jumlah Volume Produksi Pupuk Total Fertilizer Production Volume	**Ton**	**12.533.088**	**12.245.751**	**11.647.154**	**11.796.218**	**12.236.101**	**2,35**	●	**0,48**	●
Non-Pupuk Non-Fertilizer										
Amonia Ammonia	Ton Ton	**5.761.280**	5.881.249	5.941.798	5.957.455	6.149.670	(2,04)	●	(1,30)	●
Asam Sulfat Sulfuric Acid	Ton Ton	**608.859**	570.696	925.912	886.688	881.200	6,69	●	(7,13)	●
Asam Fosfat Phosphoric Acid	Ton Ton	**257.896**	273.817	253.923	222.388	191.856	(5,81)	●	6,09	●
Aluminium Fluoride Aluminium Fluoride	Ton Ton	**10.001**	10.830	9.570	9.323	7.265	(7,65)	●	6,60	●
Lain-Lain Others	Ton Ton	**68.512**	70.174	57.533	64.179	58.899	(2,37)	●	3,07	●
Jumlah Volume Produksi Non-Pupuk Total Non-Fertilizer Production Volume	Ton Ton	**6.628.034**	6.725.762	7.188.735	7.140.033	7.288.889	(1,45)	●	(1,88)	●
Jumlah Volume Produksi Pupuk dan Non-Pupuk Total Fertilizer and Non-Fertilizer Production Volume	**Ton** Ton	**19.239.635**	**19.052.517**	**18.835.889**	**18.936.251**	**19.524.990**	**0,98**	●	**(0,29)**	●
Rasio Konsumsi Gas Gas Consumption Ratio										
Urea Urea	MMBTu/ Ton	**27,61**	28,28	28,09	27,82	27,45	(2,38)	●	0,11	●
Amonia Ammonia	MMBTu/ Ton	**35,79**	36,21	36,09	35,77	35,51	(1,15)	●	0,16	●
Volume Penjualan Sales Volume										
Pupuk Fertilizer										
Pupuk PSO PSO Fertilizer	Ton Ton	**8.110.571**	7.327.950	6.186.785	7.406.566	7.919.045	10,68	●	0,48	●
Pupuk Non-PSO Non-PSO Fertilizer	Ton Ton	**4.683.805**	4.672.762	4.192.880	4.157.003	4.993.125	0,24	●	(1,27)	●
Jumlah Volume Penjualan Pupuk Total Fertilizer Sales Volume	**Ton** Ton	**12.794.376**	**12.000.712**	**10.379.665**	**11.563.569**	**12.912.170**	**6,61**	●	**(0,18)**	●

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)		CAGR 2021-2025 (%)	
Non-Pupuk Non-Fertilizer										
Amonia Ammonia	Ton Ton	**708.403**	814.874	934.899	1.055.915	988.317	(13,07)	🔴	(6,44)	🔴
Non-Amonia Non-Ammonia	Ton Ton	**355.742**	278.747	393.497	397.625	271.693	27,62	🟢	5,54	🟢
Jumlah Volume Penjualan Non-Pupuk Total Non-Fertilizer Sales Volume	Ton Ton	**1.064.145**	1.093.621	1.328.396	1.453.540	1.260.010	(2,70)	🔴	(3,32)	🔴
Jumlah Volume Penjualan Pupuk dan Non-Pupuk Total Fertilizer and Non-Fertilizer Sales Volume	**Ton** Ton	**13.858.521**	**13.094.333**	**11.708.061**	**13.017.109**	**14.172.180**	**5,84**	🟢	**(0,45)**	🔴
Nilai Penjualan dan Pendapatan Sales Value and Revenue										
Pupuk Fertilizer										
Nilai Penjualan Pupuk PSO PSO Fertilizer Sales Value	Rp-juta Rp-million	**13.222.221**	13.237.968	11.191.700	13.352.337	13.693.290	(0,12)	🔴	(0,70)	🔴
Nilai Penjualan Pupuk Non-PSO Non-PSO Fertilizer Sales Value	Rp-juta Rp-million	**27.359.457**	22.884.956	22.620.206	33.667.340	24.878.782	19,55	🟢	1,92	🟢
Jumlah Nilai Penjualan Pupuk Total Fertilizer Sales Value	**Rp-juta** Rp-million	**40.581.678**	**36.122.924**	**33.811.906**	**47.019.677**	**38.572.072**	**12,34**	🟢	**1,02**	🟢
Non-Pupuk Non-Fertilizer										
Jumlah Nilai Penjualan Non-Pupuk Total Non-Fertilizer Sales Value	Rp-juta Rp-million	**7.536.367**	8.080.042	10.409.175	17.472.111	10.741.779	(6,73)	🔴	(6,84)	🔴
Penggantian Biaya Subsidi Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia	Rp-juta Rp-million	**39.507.147**	33.323.915	32.512.230	36.109.067	25.258.692	18,55	🟢	9,36	🟢
Pendapatan Jasa Service Revenue	Rp-juta Rp-million	**2.776.457**	4.089.327	2.473.956	3.258.638	4.030.593	(32,10)	🔴	(7,18)	🔴
Jumlah Nilai Penjualan dan Pendapatan Pupuk dan Non-Pupuk Total Fertilizer and Non-Fertilizer Sales and Revenue	**Rp-juta** Rp-million	**90.401.649**	**81.616.208**	**79.207.267**	**103.859.493**	**78.603.136**	**10,76**	🟢	**2,84**	🟢

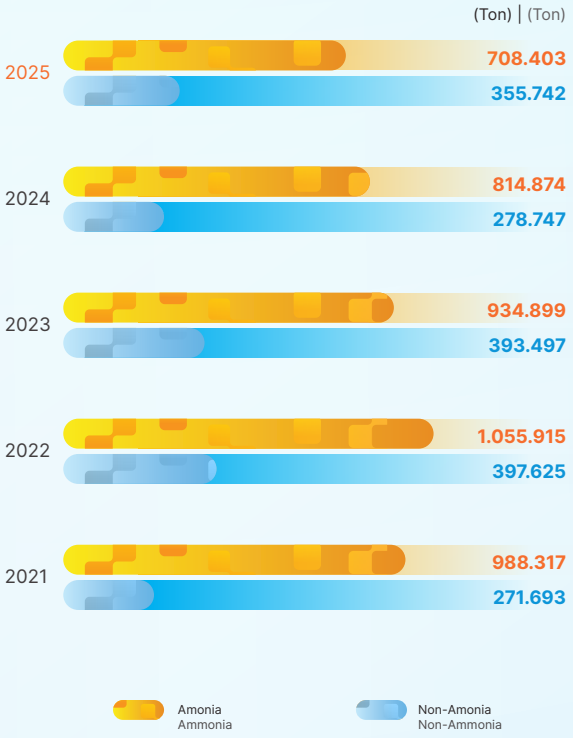
Volume Penjualan Pupuk PSO
PSO Fertilizer Sales Volume



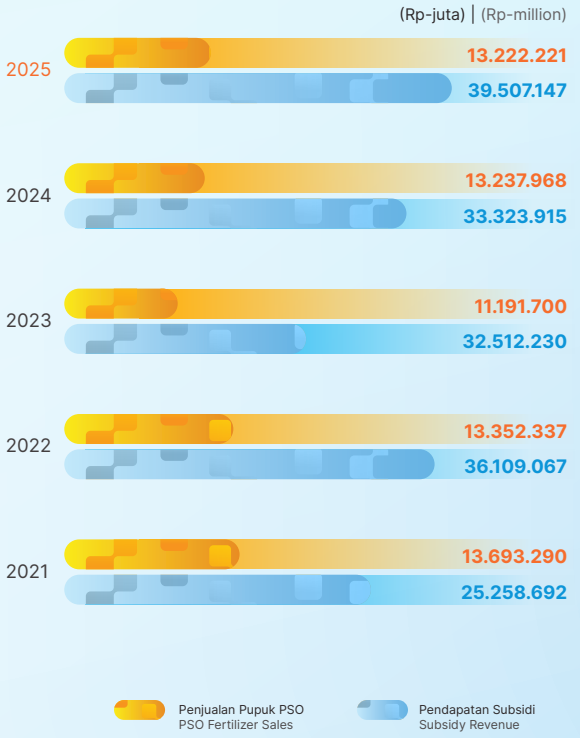
Volume Penjualan Pupuk Non-PSO
Non-PSO Fertilizer Sales Volume



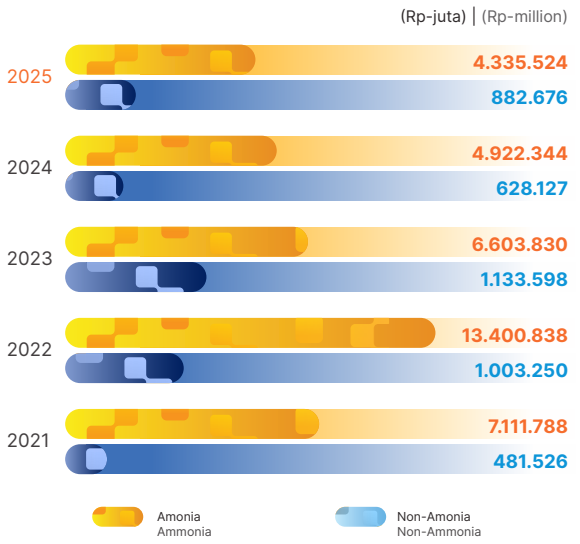
Volume Penjualan Amonia dan Non-Amonia
Ammonia and Non-Ammonia Sales Volume



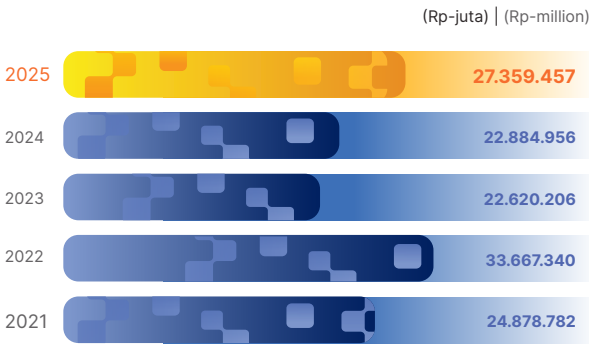
Nilai Penjualan Pupuk PSO
PSO Fertilizer Sales Value



Nilai Penjualan Amonia dan Non-Amonia
Ammonia and Non-Ammonia Sales Value



Nilai Penjualan Pupuk Non-PSO
Non-PSO Fertilizer Sales Value



Jasa Konstruksi dan Lainnya
Construction and Other Services

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Jasa Konstruksi Construction Services								
Perolehan Kontrak Baru New Contract Acquisition	Rp-juta Rp-million	**3.221.248**	1.908.014	1.920.676	2.439.981	1.722.005	68,83	13,34
Lainnya Others								
Tonase Angkutan Laut Sea Freight Tonnage								
Angkutan Pupuk Urea Urea Freight	Ton	**1.248.812**	992.079	890.609	871.982	734.046	25,88	11,21
Angkutan Amonia Ammonia Freight	Ton	**215.091**	303.430	209.734	263.520	225.131	(29,11)	(0,91)
Angkutan Lainnya* Other Freight*	Ton	**78.828**	100.912	59.042	86.829	273.666	(21,88)	(22,04)
Jumlah Tonase Angkutan Laut Total Sea Freight Tonnage	**Ton**	**1.542.731**	**1.396.421**	**1.159.385**	**1.222.331**	**1.232.843**	**10,48**	**4,59**
Jasa Konstruksi Construction Services								
Pupuk PSO PSO Fertilizer	Ton	**124.242**	132.151	109.702	150.639	140.989	(5,98)	(2,50)
Pupuk Non-PSO Non-PSO Fertilizer	Ton	**185.921**	347.931	205.874	317.138	219.009	(46,56)	(3,22)
Produk Lainnya* Other Products*	Ton	**18.676**	16.168	21.647	127.356	78.942	15,51	(25,05)
Volume Perdagangan Produk Product Trading Volume	**Ton**	**328.839**	**496.250**	**337.223**	**595.133**	**438.940**	**(33,74)**	**(5,61)**

*) Terdiri dari angkutan DAP/KCL, Clay serta PTD.
*) Includes DAP/KCL, Clay and PTD freight.

Perolehan Kontrak Baru
New Contracts Acquisition

(Rp-juta) | (Rp-million)



Jumlah Tonase Angkutan Laut
Total Sea Transportation Tonnage

(Ton) | (Ton)



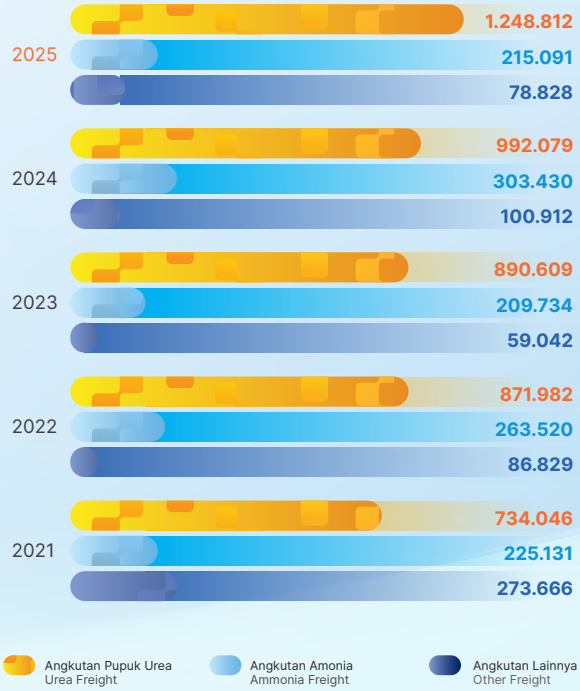
Jumlah Volume Perdagangan
Total Trade Volume

(Ton) | (Ton)



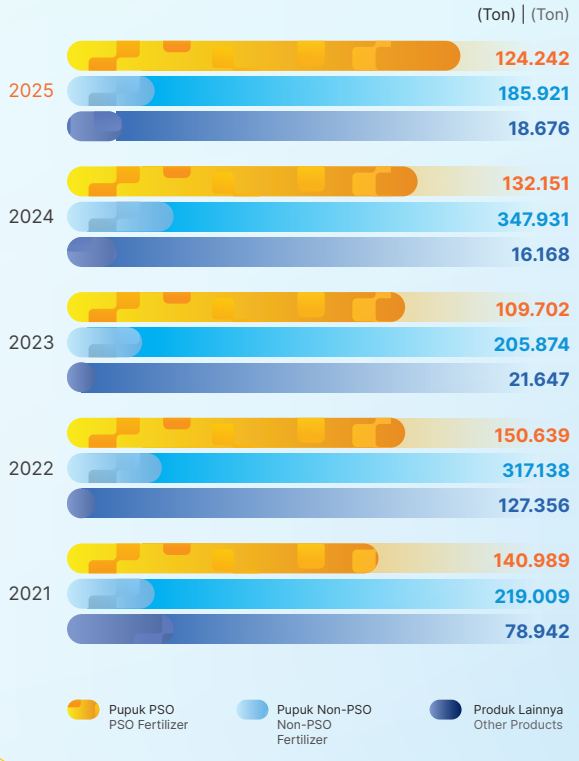
Tonase Angkutan Laut
Sea Freight Tonnage

(Ton) | (Ton)



Volume Perdagangan
Trade Volume

(Ton) | (Ton)



Ikhtisar Organisasi
Organization Highlights

Perihal Description	Satuan Unit	2025	2024	2023	2022	2021
Jumlah Karyawan[1] Number of Employees[1]	Orang People	**7.832**	7.712	7.832	7.538	7.851
Jam Kerja Aman Safe Working Hours	Jam Hours	**48.229.488**	48.103.759	52.800.556	58.471.948	73.560.164
Investasi Pendidikan dan Pelatihan bagi Karyawan Investment in Employee Education and Training	Rp-juta Rp-million	**203.538**	224.083	232.994	194.098	90.094
Jumlah Mitra Binaan dari Program Pendanaan Swakelola dan Kolaborasi BRI[2] Number of Partner Organizations in BRI's Self-Managed and Collaborative Funding Programs[2]	Mitra Partners	**3.387**	3.559*	2.277	1.301	1.030
Penyaluran Dana PUMK[2] PUMK Fund Distribution[2]	Rp-juta Rp-million	**11.650**	22.506	63.315	100.962	103.105
Rating Perusahaan Company Rating	*Rating*	**idAAA**	idAAA	idAAA	idAAA	idAAA

Keterangan:
*) Jumlah mitra binaan aktif swakelola dan mitra binaan kerja sama BRI
1) Jumlah karyawan mencakup Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) & Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Pupuk Indonesia Group. Mulai tahun 2024 jumlah karyawan sudah tidak termasuk karyawan PT Pupuk Indonesia Utilitas.
2) Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S-721/MBU/11/2022 tentang Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerjasama PUMK").

Note:
*) Number of active fostered partners (self-managed and BRI cooperation)
1) The total number of employees includes those under Temporary Employment Agreement (PKWT) and Permanent Contract (PKWTT) employees within Pupuk Indonesia Group. Starting from 2024, the employee count no longer includes employees of PT Pupuk Indonesia Utilitas.
2) The implementation of the Social and Environmental Responsibility Program is guided by the Minister of State-Owned Enterprises Regulation (BUMN) No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises, and the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Letter No. S-721/MBU/11/2022 concerning Cooperation in the Micro and Small Enterprise Funding Program ("PUMK Cooperation").

Ikhtisar Saham
Stock Highlights

Mengacu pada Akta No. 02 tanggal 26 Januari 2026 ditandatangani di hadapan Notaris Lumassia, S.H., dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0015214.AH.01.02. TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia yang ditetapkan pada 5 Maret 2026.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia 16/2025, Para Pemegang Saham menyetujui pengalihan 249.999 lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah), atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.999.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) milik PT Danantara Asset Management (Persero) pada Perusahaan kepada Negara Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) yang klasifikasinya diubah menjadi saham Seri A Dwiwarna sehingga kepemilikan saham BP BUMN pada Perusahaan menjadi 1%.

Sehubungan dengan pengalihan saham yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham, terdapat perubahan struktur kepemilikan modal Perusahaan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. 250.000 lembar saham Seri A Dwiwarna dimiliki Negara Republik Indonesia c.q BP BUMN, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
2. 24.750.000 lembar saham Seri B dimiliki PT Danantara Asset Management (Persero), masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp24.750.000.000.000 (dua puluh empat triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Pursuant to the Deed No. 02 dated January 26, 2026, signed before Notary Lumassia, S.H., and based on the Decree of the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-0015214. AH.01.02.TAHUN 2026 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company (Persero) PT Pupuk Indonesia, as determined on March 5, 2026.

In order to comply with the provisions in Republic of Indonesia Law No. 16 of 2025, the Shareholders approved the transfer of 249,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah), or a total nominal value of Rp249,999,000,000 (two hundred forty-nine billion nine hundred and ninety-nine million rupiah) owned by PT Danantara Asset Management (Persero) to the Republic of Indonesia through State-Owned Enterprise Regulatory Agency (BP BUMN), with the classification changed to Series A Dwiwarna shares, thereby reducing the BP BUMN's share ownership in the Company to 1%.

In connection with the share transfer approved by the Shareholders, there was a change in the Company's capital ownership structure, as follows:

1. 250,000 Series A Dwiwarna shares owned by the Republic of Indonesia, c.q. BP BUMN, each share with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah), bringing the total value to Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah); and
2. 24,750,000 Series B shares owned by PT Danantara Asset Management (Persero), each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah), bringing the total value to Rp24,750,000,000,000 (twenty-four trillion seven hundred and fifty billion rupiah).

Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar

Information Regarding Outstanding Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds

PTPI telah beberapa kali menerbitkan obligasi yang dananya sebagian besar digunakan untuk *refinancing* pinjaman perbankan dan obligasi sebelumnya. Obligasi yang masih beredar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selain obligasi berikut ini, PTPI tidak menerbitkan efek apa pun dalam bentuk lain.

PTPI has issued bonds on several times, the proceeds of which were primarily used to refinance bank loans and previous bonds. The bonds outstanding in 2025 are shown in the table below. Other than these bonds, PTPI has not issued any other securities.

Obligasi yang Masih Beredar Hingga Tahun 2025
Outstanding Bonds at the End of 2025

Tahun Penerbitan Redemption Date	**Nama Obligasi** Name of Bond	**Tanggal Penerbitan** Issuance Date	**Nilai Obligasi (Rp)** Bond Value (Rp)	**Tanggal Jatuh Tempo** Maturity Date	**Tingkat Suku Bunga (p.a)** Interest Rate (p.a)	**Peringkat** Rating	**Status** Status	**Bursa Efek** Stock Exchange
2021	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B (PIHC02BCN2) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series B (PIHC02BCN2)	10 Maret 2021 March 10, 2021	1.600.000.000.000	10 Maret 2026 March 10, 2026	6,20%	Pefindo idAAA (Outlook Stable)	Aktif/ Belum Jatuh Tempo Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C (PIHC02CCN2) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series C (PIHC02CCN2)	10 Maret 2021 March 10, 2021	800.000.000.000	10 Maret 2028 March 10, 2028	7,20%	Pefindo idAAA (Outlook Stable)	Aktif/ Belum Jatuh Tempo Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
2020	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C (PIHC02CCN1) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series C (PIHC02CCN1)	3 September 2020 September 3, 2020	431.850.000.000	3 September 2027 September 3, 2027	8,30%	Pefindo idAAA (Outlook Stable)	Aktif/ Belum Jatuh Tempo Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Jumlah (Rp) Total (Rp)			**2.831.850.000.000**					

Obligasi yang Telah Dilunasi dalam 2 (dua) Tahun Terakhir, Periode 2024-2025
Bonds Paid in the Last 2 (two) Years, 2024-2025 Period

Tanggal Pelunasan Redemption Date	**Tahun Penerbitan** Issuance Year	**Nama Obligasi** Name of Bond	**Tanggal Penerbitan** Issuance Date	**Nilai Obligasi (Rp)** Bond Value (Rp)	**Tanggal Jatuh Tempo** Tempo Maturity Date	**Tingkat Suku Bunga (p.a)** Interest Rate (p.a)	**Peringkat** Rating	**Bursa Efek** Stock Exchange
2 September 2025 September 2, 2025	2020	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B (PIHC02BCN1) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series B (PIHC02BCN1)	3 September 2020 September 3, 2020	857.835.000.000	3 September 2025 September 3, 2025	7,70%	Pefindo idAAA (*Outlook Stable*)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
11 Juli 2024 July 11, 2024	2017	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN1) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase I 2017 Series B (PIHC01BCN1)	12 Juli 2017 July 12, 2017	2.085.000.000.000	12 Juli 2024 July 12, 2024	8,60%	Pefindo idAAA (*Outlook Stable*)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
8 Maret 2024 March 8, 2024	2021	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A (PIHC02ACN2) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series A (PIHC02ACN2)	10 Maret 2021 March 10, 2021	350.000.000.000	10 Maret 2024 March 10, 2024	5,60%	Pefindo idAAA (*Outlook Stable*)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Jumlah (Rp) Total (Rp)				**3.292.835.000.000**				

Kilas Peristiwa 2025

2025 Event Highlights



Lampung Timur, 1 Januari 2025
East Lampung, January 1, 2025

Penebusan Pupuk Bersubsidi 1 Januari

Pertama kali dalam sejarah pupuk bersubsidi dapat ditebus oleh petani secara langsung mulai 1 Januari pukul 00.00 di seluruh Indonesia. Dari data transaksi PT Pupuk Indonesia (Persero), pada tanggal 1 Januari 2025 tercatat sebanyak 6.693 transaksi di seluruh Indonesia. Adapun transaksi pertama terjadi pada dini hari yang dilakukan oleh Parto dari Kelompok Tani Sido Mukti VI, Lampung Timur, yang menebus pupuk Urea sebesar 950 kg pada pukul 00.00.22 WIB. Penebusan pupuk bersubsidi pada awal tahun ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah yang telah berhasil memperbaiki tata kelola distribusi, menyederhanakan skema penebusan, hingga penetapan alokasi pupuk bersubsidi yang lebih terencana dengan baik. Hal ini mendapat sambutan sangat baik dari *stakeholder*, terutama petani di seluruh Indonesia.

Subsidized Fertilizer Redemption on January 1

For the first time in history, subsidized fertilizer can be redeemed directly by farmers starting January 1 at 00.00 across Indonesia. According to transaction data from PT Pupuk Indonesia (Persero), on January 1, 2025, a total of 6,693 transactions were recorded nationwide. The first transaction occurred at midnight, carried out by Parto from the Sido Mukti VI Farmers Group in East Lampung, who redeemed 950 kg of urea fertilizer at 12:00:22 a.m. Western Indonesian Time. The redemption of subsidized fertilizer at the beginning of this year demonstrated the government's support in successfully improving distribution governance, simplifying the redemption scheme, and establishing a more well-planned allocation of subsidized fertilizer. This has been warmly welcomed by stakeholders, especially farmers throughout Indonesia.



Banten, 10 Januari 2025
Banten, January 10, 2025

Kunjungan Menko Bidang Pangan ke Gudang Pupuk di Banten

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan stok pupuk bersubsidi di Provinsi Banten tersedia sehingga tidak ada hambatan dalam menghadapi musim tanam. Hal ini disampaikan Menko Pangan saat mengunjungi Gudang Lini III Sumurpecung, Kota Serang, usai Rapat Koordinator Bidang Pangan di Pendopo Gubernur Banten pada tanggal 10 Januari 2025. Ia pun mengapresiasi kerja keras Pupuk Indonesia dalam mempersiapkan stok pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Dengan dukungan banyak *stakeholder*, termasuk Pupuk Indonesia, Menko Pangan semakin optimistis target swasembada pangan tercapai di tahun 2027.

The Coordinating Minister for Food Affairs Visits Fertilizer Warehouse in Banten

The Coordinating Minister for Food Affairs, Zulkifli Hasan (Zulhas), ensured that subsidized fertilizer stocks in Banten Province were sufficient to ensure a smooth planting season. This was conveyed by the Coordinating Minister during his visit to Sumurpecung Line III Warehouse in Serang City, following the Coordinating Meeting on Food Affairs at Banten Governor's Office on January 10, 2025. He also commended Pupuk Indonesia's hard work in preparing subsidized fertilizer stocks throughout Indonesia in accordance with established regulations. With the support of many stakeholders, including Pupuk Indonesia, the Coordinating Minister for Food Affairs is increasingly optimistic that the target of achieving national food self-sufficiency will be realized by 2027.



Jakarta, 24 Februari 2025
Jakarta, February 24, 2025

Anugerah Lingkungan PROPER: Dirut Pupuk Indonesia Raih *Green Leadership* & 5 Anak Perusahaan Raih Emas

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi meraih anugerah Green *Leadership* kategori Utama dan lima anak perusahaan meraih kategori Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada ajang Anugerah Lingkungan Proper Tahun 2024. Anak Perusahaan peraih Proper Emas di Pupuk Indonesia Group yaitu Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar Muda, dan Pupuk Sriwidjaja Palembang. Selain itu, Direktur Utama Pupuk Kalimantan Timur Budi Wahju Soesilo juga menerima *Green Leadership* Madya.

PROPER Environmental Award: President Director of Pupuk Indonesia Wins Green Leadership Award & 5 Subsidiaries Win Gold

President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, received the Green Leadership Award in the Utama category, while five subsidiaries received Gold Awards from the Ministry of Environment (KLH) at the 2024 PROPER Environmental Award Event. Pupuk Indonesia Group's subsidiaries that received Gold PROPER awards were Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar Muda, and Pupuk Sriwidjaja Palembang. Additionally, Pupuk Kalimantan Timur's President Director Budi Wahju Soesilo also received the Green Leadership Award, in the Madya category.



Jakarta, 17 Februari 2025
Jakarta, February 17, 2025

Perpanjangan PJBG PKT dengan Pertamina

Salah satu Anak Perusahaan Pupuk Indonesia yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), dengan PT Pertamina (Persero) untuk periode kontrak 2022-2028. Penandatanganan PJBG ini juga sebagai bagian kolaborasi strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi dan industri.

Penandatanganan PJBG dihadiri Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro, Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia Sunaryanto, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi, Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Rayendra Sidik, serta Kepala Departemen Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas Syarif Maulana Chaniago. Sementara dari Pupuk Indonesia hadir Wakil Direktur Utama Gusrizal, dan Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis Jamsaton Nababan, dari PKT hadir Direktur Pengembangan Hanggara Patrianta, serta Direktur Keuangan dan Umum Qomaruzzaman. Penandatanganan ini juga dihadiri President Director Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali, VP Commercial dan Business Development ENI Lorenzo Gaspari.

Extension of Gas Sales and Purchase Agreement (GSA) with Pertamina

One of Pupuk Indonesia's subsidiaries, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), officially signed a Gas Sales and Purchase Agreement (GSA) with PT Pertamina (Persero) for the 2022-2028 contract period. The signing of this GSA also serves as part of a strategic collaboration to support government policies in the energy and industrial sectors.

The GSA signing was attended by Pertamina's Vice President Director Wiko Migantoro, Pertamina Hulu Indonesia's President Director Sunaryanto, Deputy of Finance and Commercialization of SKK Migas Kurnia Chairi, Head of Oil and Gas Commercialization Division of SKK Migas Rayendra Sidik, and Head of Natural Gas Commercialization Department of SKK Migas Syarif Maulana Chaniago. Pupuk Indonesia's Deputy President Director Gusrizal and Portfolio and Business Development Director Jamsaton Nababan were in attendance. PKT's Director of Development Hanggara Patrianta and Finance and General Affairs Director Qomaruzzaman were in attendance. The signing was also attended by Mubadala Energy Indonesia's President Director Abdulla Bu Ali and VP of Commercial and Business Development of ENI Lorenzo Gaspari.



Jakarta, 10 Maret 2025
Jakarta, March 10, 2025

Kolaborasi Pupuk Indonesia dan KPK Perkuat Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

PT Pupuk Indonesia (Persero) meningkatkan kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komitmen untuk menyempurnakan tata kelola pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional. Kolaborasi ini merupakan bentuk optimalisasi Pupuk Indonesia dalam menjalankan tugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pupuk Indonesia and the Corruption Eradication Commission (KPK) Collaborate to Strengthen Subsidized Fertilizer Governance

PT Pupuk Indonesia (Persero) enhanced its collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of its commitment to improve the governance of subsidized fertilizer in support of national food self-sufficiency. This collaboration represents Pupuk Indonesia's efforts in its role in distributing subsidized fertilizer to regions across Indonesia in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles and applicable laws and regulations.



Jakarta, 16 April 2025
Jakarta, April 16, 2025

Menteri Pertanian RI Sidak ke Kantor Pupuk Indonesia

Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Amran Sulaiman mengapresiasi kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini disampaikan Mentan Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pupuk Indonesia di Jakarta pada tanggal 16 April 2025. Di tengah sidak, Mentan Amran menjelaskan bahwa, distribusi pupuk menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, sepulang dari kunjungan kenegaraan di Yordania, Mentan Amran langsung berkunjung ke Pupuk Indonesia memantau distribusi pupuk bersubsidi. Ia menegaskan bahwa dukungan dari Pupuk Indonesia sangat penting untuk mewujudkan visi besar Presiden Prabowo dalam membangun ketahanan pangan yang kuat dan berdaulat.

Indonesian Minister of Agriculture Makes Unannounced Inspection at Pupuk Indonesia Office

The Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia, Amran Sulaiman, expressed his appreciation for PT Pupuk Indonesia (Persero) performance in distributing subsidized fertilizer. This was delivered by Minister Amran during a surprise inspection at the Pupuk Indonesia office in Jakarta on April 16, 2025. During the inspection, Minister Amran explained that fertilizer distribution is one of the government's focuses in achieving food self-sufficiency. Therefore, upon returning from his state visit to Jordan, Minister Amran immediately visited Pupuk Indonesia to monitor the distribution of subsidized fertilizer. He emphasized that Pupuk Indonesia's support is crucial to realizing President Prabowo's ambitious vision of building a strong and sovereign food security.



Yogyakarta, 13 Mei 2025
Yogyakarta, May 13, 2025

Pupuk Indonesia Dukung Penyelenggaraan Kejurnas Angkat Besi 2025
Pupuk Indonesia Group mendorong peningkatan prestasi dan regenerasi atlet angkat besi nasional melalui Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Angkat Besi Senior 2025, yang diselenggarakan selama seminggu (13-18 Mei 2025) di Yogyakarta. Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pupuk Indonesia (Persero), Tina T. Kemala Intan, mengatakan Perusahaan sebagai bagian dari BUMN tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di bidang olahraga, salah satunya melalui cabang olahraga (cabor) angkat besi yang diikuti 84 atlet dari 25 provinsi. Tina mengungkapkan cabor angkat besi telah menjadi ladang lahirnya prestasi yang membanggakan, khususnya di tingkat internasional. Hal itu menjadi bukti kekuatan dan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

Pupuk Indonesia Supports the 2025 National Weightlifting Championship
Pupuk Indonesia Group is encouraging the improvement of achievements and regeneration of national weightlifting athletes through the 2025 National Senior Weightlifting Championship, held for a week (May 13-18, 2025) in Yogyakarta. Tina T. Kemala Intan, Director of Human Capital (HC) of PT Pupuk Indonesia (Persero), stated that the Company, as a state-owned enterprise, is not solely focused on profit but also on providing benefits to society, including in the field of sports, one of which is weightlifting, participated in by 84 athletes from 25 provinces. Tina emphasized that weightlifting has become a source of proud achievements, especially at the international level. This is a testament to Indonesia's strength and immense potential.



Jakarta, 13 Juni 2025
Jakarta, June 13, 2025

***Head of Agreement* (HOA) antara PKG dengan Petronas untuk pemanfaatan gas di WK Ketapang**
Salah satu Anak Perusahaan Pupuk Indonesia yaitu PT Petrokimia Gresik (PKG), menandatangani *Head of Agreement* (HoA) dengan PC Ketapang II Ltd, anak usaha Petronas, untuk rencana jual-beli gas dari Blok Ketapang dalam rangka mengamankan produksi pupuk nasional yang akan mendukung tercapainya Swasembada Pangan nasional.

Head of Agreement (HOA) between PKG and Petronas for gas utilization in the Ketapang Block
One of Pupuk Indonesia's subsidiaries, PT Petrokimia Gresik (PKG), signed a Head of Agreement (HOA) with PC Ketapang II Ltd, a subsidiary of Petronas, for the planned sale and purchase of gas from the Ketapang Block to secure national fertilizer production and support the achievement of national food self-sufficiency.

Tangerang, 21 Mei 2025
Tangerang, May 21, 2025

Pupuk Indonesia Menandatangani Dua Dokumen Kesepakatan
Penandatanganan dua dokumen yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia dalam rangkaian acara Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025, yaitu penandatanganan MoU antara Pupuk Indonesia dengan Mubadala Energy untuk kerja sama pengembangan di wilayah Aceh dengan potensi gas dari WK South Andaman, dan penandatanganan *Head of Agreement* (HOA) antara Pupuk Indonesia dengan JV INPEX Masela Ltd - PT Pertamina Hulu Energi Masela dan PETRONAS Masela Sdn. Bhd. untuk kerja sama pengembangan gas di Blok Masela. Kolaborasi ini ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari visi Asta Cita pemerintah.

Pupuk Indonesia Signs Two Agreements
Pupuk Indonesia signed two agreements during the Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025 namely a Memorandum of Understanding(MoU) between Pupuk Indonesia and Mubadala Energy for development cooperation in Aceh region, with gas potential from the South Andaman Block and a Head of Agreement (HOA) between Pupuk Indonesia and JV INPEX Masela Ltd - PT Pertamina Hulu Energi Masela and PETRONAS Masela Sdn. Bhd. for cooperation in gas development in the Masela Block. This collaboration aims to achieve national food security, which is part of the government's Asta Cita vision.

Jakarta, 18 Juni 2025
Jakarta, June 18, 2025

Pupuk Indonesia Peringkat 69 pada Fortune Southeast Asia 500
Fortune Southeast Asia 500 (FSEA500) 2025, kembali mengumumkan 500 perusahaan terbesar di kawasan Asia Tenggara berdasarkan pendapatan tahun fiskal 2024. Tahun ini PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil bertengger di peringkat ke-69, naik dari peringkat ke-71 di tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2024, Pupuk Indonesia mencatatkan total pendapatan *audited* Rp81,6 triliun. Masuknya Pupuk Indonesia dalam daftar ini turut mempertegas arah strategis perusahaan yang berpijak pada tata kelola yang baik, efisiensi operasional, dan keberpihakan kepada petani. Pupuk Indonesia akan terus menjaga komitmen untuk memastikan akses pupuk yang tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Pupuk Indonesia Ranked 69th on Fortune Southeast Asia 500
The Fortune Southeast Asia 500 (FSEA500) 2025 has once again announced the 500 largest companies in Southeast Asia based on fiscal year 2024 revenue. This year, PT Pupuk Indonesia (Persero) ranked 69th, up from 71st the previous year. In 2024, Pupuk Indonesia recorded total audited revenue of Rp81.6 trillion. The inclusion of Pupuk Indonesia in this list further emphasizes the Company's strategic direction, which is based on good governance, operational efficiency, and a commitment to serve farmers. Pupuk Indonesia will continue to maintain its commitment to ensuring targeted, equitable, and sustainable access to fertilizer throughout Indonesia.



Yogyakarta, 8 Juli 2025
Yogyakarta, July 8, 2025

Pupuk Indonesia Gelar Rembuk Tani & Panen Tebu Bersama Wakil Presiden RI
PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar acara Panen Tebu dan Rembuk Tani Bersama Wakil Presiden RI di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 Juli 2025. Program ini menjadi wujud nyata komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung tercapainya swasembada gula yang sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah di bidang ketahanan pangan. Dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI menyampaikan komitmen penuh pemerintah dalam mencapai produktivitas petani tebu nasional guna mencapai swasembada gula. Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyampaikan bahwa Rembuk Tani merupakan program Pupuk Indonesia untuk membangun ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan sektor pertanian sekaligus merumuskan solusi bersama.

Pupuk Indonesia Holds Farmers' Dialogue & Sugarcane Harvest with the Vice President of the Republic of Indonesia
PT Pupuk Indonesia (Persero) organized a Sugarcane Harvest and Farmers' Dialogue with the Vice President of the Republic of Indonesia in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region, on July 8, 2025. This program demonstrates Pupuk Indonesia's commitment to supporting the achievement of sugar self-sufficiency, which aligns with the Government's Asta Cita vision for food security. During the event, the Vice President of the Republic of Indonesia expressed the government's full commitment to improving the productivity of national sugarcane farmers to achieve sugar self-sufficiency. Meanwhile, Pupuk Indonesia's President Director, Rahmad Pribadi, stated that the Farmers' Dialogue is Pupuk Indonesia program aimed at establishing a dialogue space that brings together the government, farmers, and other stakeholders to discuss challenges in the agricultural sector and formulate joint solutions.



Jakarta, 10 Juli 2025
Jakarta, July 10, 2025

Pupuk Indonesia Menandatangani Dua Nota Kesepahaman
PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani dua Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait rencana strategis penyediaan gas bumi dan pemanfaatan karbon dioksida (CO2) dengan dua anak usaha PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk. Pupuk Indonesia bersama dengan EMP Gebang Limited, akan melakukan kajian, evaluasi dan pertukaran informasi tentang peluang kerja sama pemanfaatan pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja Gebang di Sumatra Utara. Sementara itu, Pupuk Indonesia bersama dengan PT Pema Global Energi (PGE) akan menjajaki peluang kerja sama pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Wilayah Kerja PGE, terutama di Lapangan Gas Arun, Lhokseumawe, Aceh untuk produksi blue ammonia.

Pupuk Indonesia Signs Two Memorandum of Understanding
PT Pupuk Indonesia (Persero) signed two Memorandums of Understanding (MoUs) regarding strategic plans for the supply of natural gas and the utilization of carbon dioxide (CO2) with two subsidiaries of PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk. Pupuk Indonesia, together with EMP Gebang Limited, will conduct studies, evaluations, and exchange information on opportunities for collaboration in using natural gas supplies from Gebang Working Area in North Sumatra. While, Pupuk Indonesia, together with PT Pema Global Energi (PGE), will explore opportunities for collaboration in the development of Carbon Capture and Storage (CCS) and Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) within PGE Working Area, particularly in Arun Gas Field in Lhokseumawe, Aceh, for blue ammonia production.



Jakarta, 31 Juli 2025
Jakarta, July 31, 2025

Pupuk Indonesia dan PETRONAS Chemicals Perkuat Sinergi Strategis untuk Hilirisasi Industri
PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) memperkuat kemitraan strategisnya melalui penandatanganan *Joint Feasibility Study Agreement* (JFSA) yang membuka peluang kolaborasi lebih luas dalam mendukung hilirisasi industri pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kerja sama ini mencakup penyusunan studi kelayakan untuk pengembangan Proyek Methanol dan turunannya.

Pupuk Indonesia and PETRONAS Chemicals Strengthen Strategic Synergy for Downstream Industry Development
PT Pupuk Indonesia (Persero) and PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) strengthened their strategic partnership by signing a Joint Feasibility Study Agreement (JFSA), opening up opportunities for broader collaboration in supporting the downstream development of the fertilizer and petrochemical industry in Indonesia. This collaboration includes the preparation of a feasibility study for the development of Methanol and its derivatives project.



Jakarta, 8 September 2025
Jakarta, September 8, 2025

Pupuk Indonesia Buka Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi (PUD) 2026
Pupuk Indonesia membuka pendaftaran untuk Pelaku Usaha Distribusi (PUD) guna mendukung penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026 di seluruh Indonesia. Pendaftaran berlaku secara terbuka dan umum mulai tanggal 8 hingga 20 September 2025. Senior Vice President (SVP) Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia (Persero), Deni Dwiguna Sulaeman, menyampaikan bahwa, pendaftaran ini dijalankan Pupuk Indonesia sesuai dengan mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pupuk Indonesia Opens Registration for Distributors 2026
Pupuk Indonesia opens registration for Distributors to (PUD) to support the distribution of subsidized fertilizer throughout Indonesia in 2026. Registration is open for public from September 8 to 20, 2025. Deni Dwiguna Sulaeman, Senior Vice President (SVP) of Sales Strategy & Customer Service at PT Pupuk Indonesia (Persero), stated that this registration is carried out by Pupuk Indonesia in accordance with the new mechanism for subsidized fertilizer distribution, as stipulated in Presidential Regulation (Perpres) No. 6 of 2025 concerning Subsidized Fertilizer Governance, and the Minister of Agriculture (Permentan) Regulation No. 15 of 2025 as its implementing regulations.



Jakarta, 22 Oktober 2025
Jakarta, October 22, 2025

Menjadi Sejarah Era Presiden Prabowo, Pupuk Indonesia Dukung Kebijakan Penurunan HET Pupuk Bersubsidi
Bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung penuh keputusan Presiden menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Keputusan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi, yang semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah pada petani sekaligus komitmen pada terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Pupuk Indonesia optimistis kebijakan yang diambil oleh Presiden ini akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk, sekaligus memperkuat daya beli petani. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, maka akan memudahkan akses petani terhadap pupuk, sekaligus mendorong produktivitas pertanian nasional. Sumber foto: https://www.cnbcindonesia.com/news/20251022100653-4-678138/mentan-amran-ungkap-alasan-harga-pupuk-turun-diumumkan-hari-rabu.

Historic moment in President Prabowo's Era: Pupuk Indonesia Supports Policy to lower Subsidized Fertilizer Price Ceiling (HET)
Coinciding with the first year of President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Raka administration, PT Pupuk Indonesia (Persero) fully supports the President's decision to lower the Highest Retail Price (HET) for subsidized fertilizer. This decision marks a historic moment, as it is the first time the government has lowered the HET for subsidized fertilizer, further demonstrating the government's commitment to farmers and its commitment to achieving sustainable food self-sufficiency. Pupuk Indonesia is optimistic that this Presidential policy will increase fertilizer affordability and strengthen farmers' purchasing power. More affordable fertilizer prices will facilitate farmers' access to fertilizer and boost national agricultural productivity. Photo Source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20251022100653-4-678138/mentan-amran-ungkap-alasan-harga-pupuk-turun-diumumkan-hari-rabu.



Bontang, 31 Oktober 2025
Bontang, October 31, 2025

***Groundbreaking* Proyek Soda Ash PKT**
Pupuk Indonesia Group melalui anak perusahaannya, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dan PT Rekayasa Industri (Rekind), hari ini resmi memulai pembangunan Pabrik Soda Ash pertama di Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Senior Director of Business Performance & Assets Optimization PT Danantara Asset Management (Persero), Bhimo Aryanto, jajaran direksi dan komisaris Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang. Pembangunan ini menandai babak baru dari perjalanan panjang industri pupuk dan petrokimia nasional yang telah berkembang sejak berdirinya pabrik pertama pada 1959, sekaligus menjadi langkah penting menuju hilirisasi industri kimia strategis dan transformasi berkelanjutan yang rendah emisi.

Groundbreaking of Soda Ash Project by PKT
Pupuk Indonesia Group, through its subsidiaries, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) and PT Rekayasa Industri (Rekind), officially began construction of Indonesia's first Soda Ash Plant today. The event was attended by Bhimo Aryanto, Senior Director of Business Performance & Assets Optimization of PT Danantara Asset Management (Persero), along with the Board of Directors and the Board of Commissioners of Pupuk Indonesia and Pupuk Kaltim, as well as representatives from the East Kalimantan Provincial Government and Bontang City. This development marks a new chapter in the national fertilizer and petrochemical industry long journey, which has grown since the establishment of the first plant in 1959. It also represents a significant step toward downstreaming strategic chemical industries and advancing sustainable, low-emission transformation.



Jakarta, 24 Oktober 2025
Jakarta, October 24, 2025

Subsidi Pupuk Dirombak, Perpres 113/2025 Menjadi Titik Balik Efisiensi Industri Pupuk Nasional
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Pupuk Bersubsidi sebagai bagian dari reformasi tata kelola subsidi pupuk untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan industri pupuk nasional. Regulasi ini memberikan kerangka kebijakan yang lebih adaptif dalam pelaksanaan subsidi pupuk, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan efisiensi, penguatan rantai pasok bahan baku, dan modernisasi industri pupuk nasional. Pjs. Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira, menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia menyambut implementasi Perpres 113/2025 sebagai landasan strategis untuk mempercepat agenda transformasi yang selama ini telah dilakukan Perusahaan.

Fertilizer Subsidies Reform: Presidential Regulation 113/2025 marks Turning Point for Efficiency in the National Fertilizer Industry
The government has officially enacted Presidential Regulation (Perpres) No. 113 of 2025 concerning Amendments to Presidential Regulation No.6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizer as part of the fertilizer subsidy governance reform to strengthen national food security and the sustainability of the national fertilizer industry. This regulation provides a more adaptive policy framework for fertilizer subsidies, while also opening opportunities for increased efficiency, strengthening the raw material supply chain, and modernizing the national fertilizer industry. Yehezkiel Adiperwira, Corporate Secretary of PT Pupuk Indonesia (Persero), stated that Pupuk Indonesia welcomes Perpres 113/2025 as a strategic foundation to accelerate the Company's ongoing transformation agenda.



Karawang, 6 November 2025
Karawang, November 6, 2025

Kunjungan ke Pupuk Kujang, Menko Bidang Pangan Sebut Skema *Marked To Market* Jadikan Pupuk Indonesia bisa Revitalisasi Industri Pupuk

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan mengapresiasi penghematan yang dilakukan Pupuk Indonesia, karena mampu mendukung rencana revitalisasi pabrik berusia tua hingga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini disampaikan Menko Pangan saat menyambangi Pabrik Pupuk Kujang di Karawang. Dengan pengubahan skema subsidi pupuk, Menko Pangan mengatakan bahwa ke depan Pupuk Indonesia dapat merevitalisasi bahkan membangun pabrik pupuk yang lebih efisien. "Dengan skema *Marked To Market*, Pupuk Indonesia bisa membangun pabrik setiap tahun. Kemudian penghematannya bisa memberi diskon 20% untuk pupuk bersubsidi," ujar Menko Pangan. Menko Zulhas menilai program revitalisasi pabrik di Pupuk Indonesia sangat dibutuhkan karena usianya sebagian di atas 30 tahun.

Visiting Pupuk Kujang, Coordinating Minister for Food Affairs Highlights Marked-To-Market Scheme Enables Pupuk Indonesia to Revitalize the Fertilizer Industry

The Coordinating Minister for Food Affairs (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, expressed his appreciation for the savings achieved by Pupuk Indonesia, which supports plans to revitalize aging factories and lower the Highest Retail Price (HET). He made this statement during a visit to Pupuk Kujang Fertilizer Factory in Karawang. With the change in the fertilizer subsidy scheme, the Minister stated that Pupuk Indonesia can revitalize and even build more efficient fertilizer factories in the future. "With the Marked-To-Market scheme, Pupuk Indonesia can build factories every year. The savings can then provide a 20% discount on subsidized fertilizer," said the Coordinating Minister. The minister emphasized that the revitalization program at Pupuk Indonesia's is urgently needed, as many facilities are over 30 years old.



Cikampek, 23 Desember 2025
Cikampek, December 23, 2025

***Groundbreaking* Pembangunan Pabrik NPK Berbasis Nitrat Pertama di Indonesia**

PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui dua anak usahanya, PT Pupuk Kujang (PKC) dan PT Rekayasa Industri (Rekind), resmi membangun pabrik NPK berbasis Nitrat pertama di Indonesia. *Groundbreaking* yang berlangsung di Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Jawa Barat ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian pasokan pupuk nasional yang lebih modern, efisien, dan bernilai tambah tinggi untuk mendukung swasembada pangan.

Groundbreaking of Indonesia's First Ammonium Nitrate-Based NPK Nitrate Plant

PT Pupuk Indonesia (Persero), through its two subsidiaries, PT Pupuk Kujang (PKC) and PT Rekayasa Industri (Rekind), officially commence the construction of Indonesia's first ammonium nitrate-based NPK Nitrate plant. The groundbreaking, held in Kujang Cikampek Industrial Estate (KIKC) area, West Java, marks a significant milestone in strengthening the independence of the national fertilizer supply. The plant is designed to be more modern, efficient, and high-value-added, to support national food self-sufficiency.



Laporan Manajemen

Management Report


02

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Reports



Dalam mendukung program Asta Cita terkait ketahanan pangan nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) mampu merumuskan keunggulan kompetitifnya, memperkuat kapabilitas strategisnya, dan mengambil peran dalam menyukseskan transformasi tata kelola pupuk bersubsidi.

In alignment with the Asta Cita agenda on national food security, PT Pupuk Indonesia (Persero) has strengthened its competitive positioning and strategic capabilities, enabling the Company to assume a pivotal role in advancing the governance transformation of subsidized fertilizer.

Yang terhormat Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan,

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyadari perannya dalam membentuk ekosistem pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan visi Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan PTPI tahun buku 2025.

Menumbuhkan Optimisme di Tengah Kewaspadaan Tantangan Perekonomian dan Industri

Tahun 2025 diwarnai dengan transisi dari fase guncangan pasca-pandemi menuju fase stabilitas baru yang dipenuhi tantangan keberlanjutan. Mengutip data International Monetary Fund (IMF), ekonomi dunia diprediksi tumbuh pada level 3,2%, sedikit di bawah tahun sebelumnya sebesar 3,3%[1].

[1] https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/CHN/IND

Dear Shareholders and Stakeholders,

PT Pupuk Indonesia (Persero) recognizes the role it plays in shaping the agricultural and plantation ecosystem to realize the Indonesian Government's Asta Cita vision of achieving national food independence and security. With heartfelt gratitude to God Almighty, I am honored to present, on behalf of the Board of Commissioners, this supervisory report on PTPI's management for the 2025 fiscal year.

Cultivating Optimism with Prudent Vigilance Amid Economic and Industrial Challenges

2025 marked a transition period from the post-pandemic shock phase to the new phase of stability fraught with sustainability challenges. Citing data from the International Monetary Fund (IMF), the global economy is predicted to grow at 3.2%, slightly below last year's 3.3%[1].

Meski inflasi mulai melandai, suku bunga tinggi (*High for Longer*) masih akan menekan likuiditas. Ketegangan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah tetap menjadi faktor risiko utama yang dapat mengganggu rantai pasok energi.

Di tengah tantangan perekonomian dunia, Indonesia menunjukkan kemampuannya untuk tetap menjaga pertumbuhannya pada level yang diharapkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi nasional mampu tumbuh 5,11% (*Cumulative-to-Cumulative*)[2] atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 5,03%[2]. Fokus Pemerintah baru pada ketahanan pangan menjadi salah satu pendorong utama ekonomi domestik yang dipicu oleh peningkatan permintaan domestik. Namun, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tetap perlu diwaspadai karena berdampak langsung pada biaya impor bahan baku.

Industri pupuk tidak lagi hanya bicara tentang volume produksi, melainkan tentang efisiensi dan dekarbonisasi. Harga gas alam sebagai bahan baku utama Urea mengalami volatilitas namun cenderung stabil dibandingkan tahun-tahun krisis sebelumnya. Harga fosfat (DAP) dan *Potassium* (MOP) sangat bergantung pada kebijakan ekspor negara produsen seperti Tiongkok dan Rusia. Industri pupuk juga diwarnai transisi ke *Green/Blue Ammonia* di mana pada tahun 2025 menjadi tahun percepatan investasi pada teknologi rendah karbon. Tekanan regulasi global (seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* di Eropa) memaksa produsen pupuk untuk mulai mengadopsi energi terbarukan. Tak hanya itu, digitalisasi pertanian melalui penggunaan pupuk presisi (*precision farming*) menunjukkan tren peningkatan, mengubah permintaan dari pupuk komoditas curah menjadi pupuk spesifik lokasi/tanaman atau NPK Formula Khusus.

Bagi PTPI yang bergerak di sektor ini, tahun 2025 menjadi "pedang bermata dua" yaitu tantangan maupun peluang. Operasional Pupuk Indonesia Group akan menemui tantangan di antaranya kenaikan biaya logistik dan ketidakpastian pasokan bahan baku impor serta implementasi *Smart Manufacturing* untuk efisiensi konsumsi energi. Aspek finansial, misalnya beban bunga pinjaman untuk investasi modal atau *Capital Expenditure* masih cukup tinggi. Di sisi lain skema pembiayaan hijau atau *Green Financing* semakin terbuka lebar. Pada aspek pasar, sektor ini menemui tantangan pengetatan standar lingkungan global pada produk ekspor, serta peningkatan permintaan domestik melalui program ketahanan pangan nasional.

Secara keseluruhan, tahun 2025 adalah tahun optimisme yang waspada. Pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil memberikan fondasi kuat, namun Perusahaan harus gesit bertransformasi menuju keberlanjutan agar tidak tertinggal oleh regulasi global dan tuntutan pasar yang semakin hijau. Kami meyakini bahwa Pupuk Indonesia Group mampu melakukan integrasi hulu-hilir dan memiliki fleksibilitas dalam bauran energi.

Although inflation is starting to fall, Higher for Longer interest rates will continue to put pressure on liquidity. Geopolitical tensions in Eastern Europe and the Middle East remain a major risk factor that could disrupt the energy supply chain.

Despite the global economic challenges, Indonesia has demonstrated its ability to maintain growth at the expected levels. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the national economy grew 5.11% (Cumulative-to-Cumulative)[2] , exceeding the previous year's growth of 5.03%[2]. The new Government's focus on food security has been a key driver for the domestic economy, stimulating increased domestic demand. However, fluctuations in the rupiah exchange rate against the US dollar require vigilance, as they directly impact the cost of raw material imports.

The fertilizer industry is no longer just about production volume, but also about efficiency and decarbonization. Natural gas prices, the primary raw material for urea, have experienced volatility but have tended to be stable compared to previous crisis years, and Phosphate (DAP) and Potassium (MOP) prices are highly dependent on the export policies of producing countries such as China and Russia. The fertilizer industry is also experiencing a transition to Green/Blue Ammonia, with 2025 being the year for accelerated investment in low-carbon technologies. Global regulatory pressure (such as the Carbon Border Adjustment Mechanism in Europe) is forcing fertilizer producers to choose renewable energy. Also, agriculture digitalization through the use of precision fertilizers (precision farming) is showing an increasing trend, shifting demand from bulk commodity fertilizers to location-specific/crop-specific fertilizers or Special Formula NPK.

As PTPI operates in this sector, 2025 presented a double-edged sword of both challenges and opportunities, with Pupuk Indonesia Group operations facing challenges including rising logistics costs and uncertain supplies of imported raw materials, as well as the need to implement Smart Manufacturing for energy efficiency. Financial aspects, such as interest rate on capital expenditure loan remained quite high, while Green Financing schemes were becoming more available. Market-wise, this sector faced challenges from tightening global environmental standards for exported products, as well as increasing domestic demand through the national food security program.

Overall, 2025 was a year of cautious optimism, with stable national economic growth providing a strong foundation, but the Company has to remain agile during its transformation towards sustainability to avoid being left behind by global regulatory trends and the increasingly green market demands. We are confident that Pupuk Indonesia Group is capable of upstream-downstream integration and has flexibility in its energy mix.

[2] Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 17/02/Vol. XXVIII, 5 Februari 2025.
[2]Central Bureau of Statistics (BPS), Official Statistical Bulletin No. 17/02/ Vol. XXVIII, February 5, 2025.

Penilaian Kinerja Direksi

Sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), penilaian Direksi merupakan evaluasi atas kemampuan eksekutif dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis jangka panjang dan profitabilitas jangka pendek di tengah fluktuasi ekonomi. Kami memandang pengelolaan Perusahaan tahun 2025 oleh Direksi dapat dikategorikan sebagai *"Transformative Resilience"* atau "Ketangguhan yang Transformatif". Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan, Direksi dituntut untuk tidak sekadar bertahan, tetapi melakukan reposisi strategis.

Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil menjaga keseimbangan antara aspek operasional dan finansial melalui 3 (tiga) pilar utama yakni:

1. Efisiensi biaya atau *Operational Excellence* melalui upaya mengoptimalkan konsumsi gas dan bahan baku di tengah volatilitas harga komoditas global.
2. Ketahanan finansial yang terlihat dalam keberhasilan mengelola *cash flow* dan menjaga rasio utang tetap sehat meskipun suku bunga masih di level tinggi.
3. Adaptasi pasar tercermin dari kecepatan Direksi merespons perubahan kebutuhan petani dan industri, terutama dalam memperkuat penetrasi produk non-subsidi untuk mengimbangi fluktuasi kebijakan subsidi pemerintah, melalui kebijakan:

    a. Penggunaan teknologi (seperti *precision farming* dan sistem distribusi digital) untuk menekan kebocoran pasar dan meningkatkan akurasi penyaluran produk.
    b. Inisiatif Hijau (ESG) melalui pengurangan emisi karbon yang menjadi syarat mutlak untuk menjaga daya saing di pasar ekspor dan akses terhadap pendanaan internasional.
    c. Sinergi Pupuk Indonesia Group yang terlihat pada keberhasilan Direksi dalam mengintegrasikan seluruh lini bisnis untuk menciptakan efisiensi rantai pasok dari hulu hingga ke hilir.

Penilaian Dewan Komisaris di atas didasarkan pada dokumen dan fakta objektif seperti laporan berkala Direksi meliputi laporan bulanan dan triwulanan yang mencakup aspek operasional, keuangan, dan SDM; masukan dan rekomendasi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang melakukan kajian mendalam atas kinerja Direksi; serta Temuan dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan auditor eksternal mengenai kepatuhan dan integritas laporan.

Meskipun demikian, penilaian final tetap merujuk pada *Key Performance Indicators* (KPI) yang tercantum dalam RKAP, dengan bobot signifikan pada efisiensi energi dan pertumbuhan pangsa pasar non-subsidi.

Board of Directors Performance Assessment

In line with the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Board of Directors' assessment evaluates their ability to maintain a balance between long-term business sustainability and short-term profitability during economic fluctuations. Our assessment of the Board of Directors' management of the Company in 2025 can be characterized as "Transformative Resilience" — a recognition that, amid the pressures of the global economic climate, the Board of Directors was required not only to maintain stability but also to strategically reposition the Company.

The Board of Commissioners' assessment shows that the Board of Directors has successfully maintained a balance between operational and financial aspects through three key pillars:

1. Cost efficiency or Operational Excellence efforts to optimize natural gas and raw material consumption despite the global commodity price volatility.
2. Financial resilience, as seen in the successful cash flow management and the healthy debt ratio despite the persistently high level of interest rates.
3. Market adaptation can be seen in the Board of Directors' swift response to changing farmer and industry needs, particularly by strengthening the penetration of non-subsidized products to offset fluctuations in the government subsidy policies, through the following policies:
    a. Use of technology (such as precision farming and digital distribution systems) to reduce market leakage and improve product distribution accuracy.
    b. Green Initiatives (ESG) through carbon emission reduction, which is an absolute requirement for maintaining competitiveness in export markets and access to international funding.
    c. Pupuk Indonesia Group synergy, as evidenced by the Board of Directors' success in integrating all business lines to create supply chain efficiency from upstream to downstream.

The Board of Commissioners' assessment is based on objective documents and facts, such as the Board of Directors' periodic reports, including monthly and quarterly reports covering operational, financial, and Human Resources (HR) aspects; input and recommendations from the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee, which carried out in-depth reviews of the Board of Directors' performance; and the findings from the Internal Audit (SPI) and external auditors concerning compliance and reporting integrity.

Notwithstanding, the final assessment still refers to the Key Performance Indicators (KPIs) listed in the Annual Budget Plan, with a significant weighting given to energy efficiency and growth of market share in the non-subsidized segment.

5 (Lima) Perspektif Penilaian Kinerja Direksi
5 (Five) Perspectives on the Performance Assessment of the Board of Directors

Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Economic and Social Value for Indonesia

Inovasi Model Bisnis
Business Model Innovation

Kepemimpinan Teknologi
Technology Leadership

Pengembangan Investasi
Investment Development

Pengembangan Talenta
Talent Development

Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia mencakup beberapa indikator terkait keuangan, operasi, serta penyaluran pupuk bersubsidi; Inovasi Model Bisnis meliputi pengembangan lini bisnis baru dan transformasi tata kelola pupuk bersubsidi; Kepemimpinan Teknologi mencakup inisiatif digital; Pengembangan Investasi berisi tentang investasi pabrik atau proyek; serta Pengembangan Talenta yang meliputi transformasi pengelolaan SDM PTPI.

The Economic and Social Value for Indonesia includes several indicators related to finance, operations, and the distribution of subsidized fertilizer; Business Model Innovation includes the development of new business lines and the transformation of subsidized fertilizer governance; Technology Leadership includes digital initiatives; Investment Development includes plant or project investments; and Talent Development includes the transformation of PTPI's Human Resources management.

Dari penilaian yang telah dilakukan, tercatat bahwa realisasi KPI Direksi tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang baik. Dalam perjalanan pencapaian KPI ini, kami selaku Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara rutin dan berkala melalui rapat gabungan dengan Direksi. Secara keseluruhan, kami memberikan apresiasi atas pencapaian KPI tersebut. Terdapat beberapa catatan evaluasi dari realisasi KPI tersebut yang dapat menjadi titik penting bagi Direksi untuk meningkatkan performa PTPI pada level yang diharapkan oleh Pemegang Saham.

Based on the assessment conducted, the realization of the Board of Directors' KPI in 2025 demonstrated strong results. As part of the Board of Commissioners' ongoing supervisory efforts in monitoring KPI achievement, we conduct regular and periodic supervision through joint meetings with the Board of Directors. Overall, we commend the achievement of these KPIs. There are several evaluation notes from these KPI realizations that can serve as key points for the Board of Directors to improve PTPI's performance to the level expected by Shareholders.

Pengawasan Dewan Komisaris

Sebagai badan pengawas, Dewan Komisaris memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah sesuai dengan prinsip mendasar pendirian, visi misi, dan aspirasi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam perumusan strategi, Dewan Komisaris memastikan bahwa strategi yang disusun Direksi telah mempertimbangkan *stress test* terhadap risiko makro seperti kenaikan harga gas bumi atau fluktuasi kurs. Dewan Komisaris memberikan "tantangan konstruktif" agar target yang ditetapkan tetap ambisius namun realistis. Dalam implementasinya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui rapat rutin dan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa inisiatif strategis, seperti digitalisasi rantai pasok atau pembangunan pabrik baru, berjalan sesuai jadwal *(on time)*, sesuai anggaran *(on budget)*, dan sesuai spesifikasi *(on specification)*.

Board of Commissioners Supervision

As the supervisory body, the Board of Commissioners plays a crucial role in ensuring the Company's management aligns with the fundamental principles of its establishment, the vision and mission, and the aspirations of shareholders and stakeholders. When formulating the strategies, the Board of Commissioners ensures that the strategies developed by the Board of Directors have taken into account stress tests against macroeconomic risks such as rising natural gas prices or exchange rate fluctuations. The Board of Commissioners provides a "constructive challenge" to ensure targets remain ambitious yet realistic. During its implementation, the Board of Commissioners conducts supervision through regular meetings and field visits to ensure the strategic initiatives, such as supply chain digitalization or the construction of new plants, were on schedule, on budget, and according to specifications.

Pengawasan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan berlapis yang menggabungkan fungsi penasihatan *(advisory)* dan pengendalian *(oversight)* secara ketat guna memastikan strategi Direksi selaras dengan kepentingan pemegang saham serta regulasi yang berlaku. Pengawasan Dewan Komisaris juga berfokus pada ketahanan pangan nasional dan transformasi bisnis berkelanjutan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan Direksi menjalankan operasional sesuai visi "*Leading global agrosolution*" sambil memitigasi risiko volatilitas pasar global.

Berikut adalah bentuk-bentuk pengawasan spesifik yang dilakukan:

1. Pengawasan dalam Tahap Perumusan Strategi
   Dewan Komisaris bertindak sebagai mitra strategis sekaligus pengawas kritis sebelum strategi disahkan. Hal ini dilakukan melalui:
   a. Penelaahan Rencana Jangka Panjang (RJP) & Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025: Dewan Komisaris meninjau asumsi makro ekonomi (seperti nilai tukar dan harga gas) serta parameter anggaran yang diajukan Direksi untuk memastikan target perusahaan realistis namun tetap kompetitif
   b. *Challenge Session:* Melalui rapat gabungan, Dewan Komisaris memberikan "tantangan" terhadap inisiatif Direksi, terutama terkait efisiensi biaya produksi dan strategi penetapan harga produk non-subsidi di tengah dinamika pasar global.
   c. Mitigasi Risiko Strategis: Memastikan strategi yang dirumuskan mencakup rencana cadangan (*contingency plan*) untuk menghadapi potensi gangguan rantai pasok atau perubahan kebijakan pemerintah terkait pupuk.
2. Pengawasan dalam Tahap Implementasi Strategi
   Sepanjang tahun berjalan, Dewan Komisaris memantau eksekusi strategi melalui mekanisme berikut:
   a. Pemantauan Kinerja Berkala: Melakukan evaluasi rutin terhadap laporan kinerja bulanan dan triwulanan Direksi untuk memastikan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) tetap sesuai jalur *(on track)*.
   b. Optimalisasi Organ Pendukung (Komite): Mengoptimalkan peran Komite Audit, Komite Risiko, dan Komite Investasi Pengembangan untuk melakukan kajian mendalam atas proyek-proyek strategis (seperti revitalisasi pabrik atau digitalisasi) guna mencegah terjadinya pembengkakan biaya atau penyimpangan operasional.
   c. Kunjungan Lapangan *(Site Visit)*: Melakukan tinjauan langsung ke area operasional untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan manajemen dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait aspek Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH).
   d. Pengawasan Kepatuhan GCG: Memastikan setiap langkah implementasi strategi oleh Direksi tetap menjunjung tinggi prinsip GCG dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian Nasihat dan Arahan
   Jika ditemukan deviasi dalam implementasi, Dewan Komisaris memberikan nasihat atau arahan korektif kepada Direksi demi kepentingan terbaik Perusahaan. Hal ini mencakup arahan strategis terkait sinergi antar anak perusahaan dan penguatan ekosistem pertanian berbasis teknologi.

The Board of Commissioners' supervision throughout 2025 was conducted using a multi-layered approach that strictly combines advisory and supervisory functions to ensure the Board of Directors' strategies were aligned with shareholder interests and applicable regulations. The Board of Commissioners' supervision also focused on national food security and sustainable business transformation. This mechanism was designed to ensure the Board of Directors carried out operations in accordance with the "Leading global agrosolution" vision while mitigating the risks of global market volatility.

The specific forms of supervision carried out were as follows:

1. Supervision during the Strategy Formulation Stage
   The Board of Commissioners acted as a strategic partner and critical supervisor before the strategy was approved. This was achieved through:
   a. A Review of the Long-Term Plan (RJP) & 2025 Annual Budget Plan (RKAP): The Board of Commissioners reviewed macroeconomic assumptions (such as exchange rates and natural gas prices) and budget parameters proposed by the Board of Directors to ensure the Company's targets were realistic yet competitive.
   b. Challenge Session: Through a joint meeting, the Board of Commissioners challenged the Board of Directors' initiatives, particularly those related to production cost efficiencies and pricing strategies for non-subsidized products amidst global market dynamics.
   c. Strategic Risk Mitigation: Ensuring the formulated strategies included a contingency plan to address potential supply chain disruptions or changes in government fertilizer policies.
2. Supervision during the Strategy Implementation Phase
   Throughout the year, the Board of Commissioners monitored the strategy execution using the following mechanisms:
   a. Periodic Performance Monitoring: Conducting regular evaluations of the Board of Directors' monthly and quarterly performance reports to ensure the Key Performance Indicators (KPIs) remain on track.
   b. Optimizing Supporting Organs (Committees): Optimizing the roles of the Audit Committee, Risk Committee, and Investment Development Committee to conduct in-depth reviews of strategic projects (such as plant revitalization or digitalization) to prevent cost overruns or operational irregularities.
   c. Site Visits: Conducting on-site inspections of operational areas to verify the alignment of management reports with actual conditions on the ground, particularly those related to the occupational Health & Safety, and Environment (HSE) aspect.
   d. GCG Compliance Monitoring: Ensuring every step in strategy implementation by the Board of Directors upheld the GCG principles and complied with applicable laws and regulations.
3. Providing Advice and Directives
   If deviations in implementation were identified, the Board of Commissioners provided corrective advice or directives to the Board of Directors in the best interests of the Company. These included strategic directives regarding synergies between subsidiaries, and the strengthening of the technology-based agricultural ecosystem.

Berdasarkan pedoman tata kelola (*Board Manual*) dan praktik yang berlaku, interaksi formal antara Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2025 meliputi:

1. Rapat Pleno Dewan Komisaris: Minimal diadakan 1 (satu) kali setiap bulan untuk membahas isu-isu krusial.
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi: Minimal diadakan 1 (satu) kali setiap bulan guna mengevaluasi capaian KPI dan memberikan arahan strategis.
3. Pemberian Nasihat Tertulis: Dilakukan secara *ad-hoc* melalui surat resmi atau memo sebagai tanggapan atas laporan bulanan/triwulanan Direksi jika ditemukan deviasi kinerja.

Sepanjang tahun 2025, rekomendasi utama Dewan Komisaris diarahkan pada:

1. Kelancaran Distribusi: Memastikan pupuk bersubsidi tersedia sebelum musim tanam sesuai arahan Menko Pangan.
2. Efisiensi Biaya: Memberikan rekomendasi terkait program *cost reduction* untuk menjaga marjin di tengah ketidakpastian harga bahan baku internasional.
3. Implementasi ESG: Mendorong percepatan teknologi rendah karbon guna meningkatkan daya saing ekspor dan akses terhadap *Green Financing*.

Dewan Komisaris memberikan pandangan yang optimis namun terukur terhadap target dan proyeksi tahun 2026 yang disusun oleh Direksi. Fokus utama mereka adalah pada keberlanjutan transformasi dari sekadar perusahaan pupuk menjadi perusahaan agrosolution global yang terintegrasi. Penilaian ini didasarkan pada pembahasan KPI Perusahaan 2025-2026 yang melibatkan penelaahan atas realisasi program sentralisasi *holding* dan transformasi bisnis yang telah berjalan.

Secara keseluruhan, fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi telah menjalankan fungsi pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dengan cukup lincah *(agile)*, di mana strategi yang diimplementasikan mampu memitigasi risiko eksternal tahun 2025 dengan tetap menjaga komitmen terhadap pemangku kepentingan utama, termasuk penugasan pemerintah. Kami mencatat implementasi strategi yang dilakukan Direksi telah sesuai dengan 3 (tiga) pilar implementasi strategi yaitu:

1. Transformasi bisnis, yang tercermin pada implementasi kecepatan transisi dari pupuk komoditas ke produk bernilai tambah (pupuk spesialis/NPK). Indikator keberhasilannya adalah peningkatan margin laba dari sektor non-subsidi.
2. Keunggulan operasional melalui implementasi teknologi untuk menekan biaya produksi dan optimasi *supply chain*, dengan indikator keberhasilan penurunan biaya per ton produksi (HPP) dibanding tahun sebelumnya.
3. Keberlanjutan melalui langkah nyata dalam reduksi emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan di pabrik. indikator keberhasilannya adalah tercapainya target *roadmap* dekarbonisasi perusahaan.

Based on the governance guidelines (Board Manual) and prevailing practices, formal interactions between the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025 included:

1. Plenary Meetings of the Board of Commissioners: Held at least once a month to discuss crucial issues.
2. Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors: Held at least once a month to evaluate KPI achievements and provide strategic directives.
3. Written Advice: Provided on an ad hoc basis via official letters or memos in response to the Board of Directors' monthly/quarterly reports if performance deviations were found.

Throughout 2025, the Board of Commissioners' primary recommendations focused on:

1. Smooth Distribution: Ensuring the availability of subsidized fertilizer before the planting season, as directed by the Coordinating Minister for Food.
2. Cost Efficiency: Providing recommendations on cost reduction programs to maintain margins despite uncertain international raw material prices.
3. ESG Implementation: Encouraging the acceleration of low-carbon technologies to increase export competitiveness and access to Green Financing.

The Board of Commissioners expressed a positive and appreciative view of the GCG implementation in 2025, based on the Company's success in maintaining operational integrity and transparency despite the significant transformation of the national fertilizer industry. We believe that PTPI's GCG implementation in the 2025 fiscal year demonstrated significant strengthening, particularly in integrating governance standards across all holding company members.

Overall, the Board of Commissioners' supervisory function observed that the Board of Directors had carried out its management and administration functions with sufficient agility. The strategies implemented have been able to mitigate external risks in 2025 while maintaining commitments to key stakeholders, including government assignments. We note that the Board of Directors' strategy implementation is consistent with the three pillars of strategy implementation:

1. Business transformation, reflected in the rapid implementation of the transition from commodity fertilizers to value-added products (specialized fertilizers/NPK). The success indicator is an increase in profit margins in the non-subsidized sector.
2. Operational excellence through the implementation of technology to reduce production costs and optimize the supply chain, with the success indicator being a reduction in the cost per ton of production (COGS) compared to the previous year.
3. Sustainability through concrete steps to reduce carbon emissions and use renewable energy in factories. The success indicator is the achievement of the Company's decarbonization roadmap targets.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Prinsip GCG menjadi bagian penting dalam upaya Perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya. Aspek kepatuhan atau pemenuhan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang diwajibkan menjadi hal paling mendasar, yang diikuti dengan kesukarelaan Perusahaan dalam menerapkan aspek GCG pada praktik terbaik sesuai kebutuhan perkembangan situasi saat ini.

Dewan Komisaris memberikan pandangan yang positif dan apresiatif terhadap penerapan GCG di sepanjang tahun 2025. Apresiasi ini didasarkan pada keberhasilan Perusahaan dalam menjaga integritas operasional dan transparansi di tengah transformasi besar industri pupuk nasional. Kami memandang, penerapan GCG di lingkup PTPI pada tahun buku 2025 menunjukkan penguatan signifikan, terutama dalam mengintegrasikan standar tata kelola di seluruh anggota *holding*.

Beberapa penjelasan lebih lanjut dari apresiasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan dan Kemajuan Penerapan GCG Tahun 2025
   Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi terkait Tata Kelola Terintegrasi yang semakin matang melalui upaya-upaya berikut:
   a. Sentralisasi Standar: Kemajuan utama terlihat pada harmonisasi kebijakan GCG di seluruh anak perusahaan, sehingga tidak ada ketimpangan standar etika antar anggota *holding*.
   b. Digitalisasi *Governance*: Implementasi *platform* digital untuk pemantauan kepatuhan *(compliance dashboard)* memudahkan Dewan Komisaris memantau kepatuhan secara *real-time*.
   c. Pengakuan Eksternal: Keberhasilan meningkatkan skor *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan predikat Sangat Tepercaya (*Most Trusted*) dan hasil asesmen oleh BPKP yang tetap berada pada kategori "Sangat Baik".
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern SPI
   Dewan Komisaris menilai pengendalian internal Perusahaan telah berjalan sangat efektif dalam memitigasi kebocoran operasional. Hal ini terlihat pada:
   a. Tiga Lini Pertahanan: Penerapan *The IIA's Three Lines Model* semakin solid, di mana Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertindak proaktif dalam melakukan Internal Audit berbasis risiko.
   b. Fokus pada Distribusi: Pengendalian internal difokuskan pada rantai pasok pupuk bersubsidi melalui integrasi sistem *i-Pubers*, yang secara signifikan mengurangi risiko penyimpangan penyaluran di tingkat kios.
3. Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan
   Manajemen risiko tahun 2025 dinilai telah bergeser dari sekadar kepatuhan menjadi "*Risk-Based Decision Making*" melalui:
   a. Mitigasi Dampak Global: Perusahaan berhasil mengelola risiko volatilitas harga gas bumi dan fluktuasi kurs melalui strategi *hedging* dan diversifikasi pasokan bahan baku yang direviu ketat oleh Dewan Komisaris.

Perspective on the Corporate Governance Implementation

GCG principles are a crucial part of the Company's efforts to maintain business continuity. Compliance with all required laws and regulations is fundamental, followed by the Company's voluntary implementation of GCG aspects based on best practices that are required in the current situation.

The Board of Commissioners expressed a positive and appreciative view of the GCG implementation in 2025. Based on the Company's success in maintaining operational integrity and transparency despite the significant transformation of the national fertilizer industry. We believe that PTPI's GCG implementation in the 2025 fiscal year demonstrated significant strengthening, particularly in integrating governance standards across all holding company members.

Further explanation of the Board of Commissioners' appreciation include:

1. GCG Implementation Development and Progress in 2025
   The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' performance in the increasingly mature Integrated Governance system through the following efforts:
   a. Standards Centralization: Major progress was seen in the harmonization of GCG policies across all subsidiaries, eliminating disparities in ethical standards among holding company members.
   b. Governance Digitalization: Implementing a digital platform for compliance monitoring (compliance dashboard) makes it easier for the Board of Commissioners to monitor compliance in real time.
   c. External Recognition: Successfully improving the Corporate Governance Perception Index (CGPI) score to Most Trusted, and the BPKP assessment results remaining in the "Very Good" category.
2. Internal Control System Effectiveness
   The Board of Commissioners assessment shows that the Company's internal controls have been very effective in mitigating operational leaks. This is evident in:
   a. Three Lines of Defense: The implementation of the IIA's Three Lines Model is increasingly robust, with the Internal Audit (SPI) proactively conducting risk-based internal audits.
   b. Distribution Focus: Internal controls are focused on the subsidized fertilizer supply chain through the integration of the i-Pubers system, significantly reducing the risk of distribution irregularities at the kiosk level.
3. Enterprise Risk Management Implementation
   Risk management in 2025 was seen to have shifted from mere compliance to "Risk-Based Decision Making" through:
   a. Global Impact Mitigation: The Company successfully manages the risks of natural gas price volatility and exchange rate fluctuations through hedging strategies and diversification of raw material supplies, which were rigorously reviewed by the Board of Commissioners.

b. Kultur Risiko: Penanaman kesadaran risiko hingga ke level operasional di pabrik, memastikan aspek keselamatan kerja (K3) dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga di tengah target produksi yang tinggi.

4. Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS)

Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) di lingkup PTPI senantiasa dilakukan penguatan serta dioptimalkan secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas sistem serta mendorong peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Hal ini diperoleh melalui upaya:

a. Penguatan Kemandirian WBS: Penguatan independensi dalam pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) melalui penunjukan pihak eksternal independen. Langkah ini merupakan bentuk pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/03/2023, yang mengatur bahwa bagi BUMN dengan klasifikasi risiko signifikan dan sistemik A, pengelolaan WBS mengutamakan penggunaan pihak independen. Dengan demikian, pengelolaan WBS dilakukan secara lebih objektif, transparan, serta bebas dari potensi konflik kepentingan, sekaligus menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan serta kualitas laporan pengaduan yang diterima.
b. Peran Dewan Komisaris: Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, melakukan supervisi langsung terhadap penanganan pengaduan yang melibatkan level manajemen senior. Dewan Komisaris memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara adil tanpa intervensi dari pihak terlapor.
c. Peran Direksi: Direksi berperan dalam memastikan implementasi *Whistleblowing System* (WBS) berjalan secara efektif dan berkelanjutan melalui penetapan kebijakan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta penguatan budaya integritas di lingkungan perusahaan. Direksi juga memastikan bahwa setiap laporan yang diterima ditindaklanjuti secara tepat waktu, objektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Peran pemangku kepentingan internal dan eksternal: Seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran. Perusahaan menjamin aksesibilitas, kerahasiaan, serta perlindungan terhadap pelapor, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang berintegritas. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan ini turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas sistem serta kualitas laporan yang diterima.

5. Capaian Kinerja Dewan Komisaris dalam Pengawasan GCG
Capaian kinerja Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan GCG di tahun 2025 meliputi:

a. Efektivitas Rapat: Frekuensi rapat pleno dan rapat gabungan dengan Direksi yang konsisten untuk membahas isu strategis dan kepatuhan.
b. Rekomendasi Strategis: Pemberian rekomendasi perbaikan tata kelola secara tertulis yang ditindaklanjuti oleh Direksi dengan tingkat penyelesaian mencapai >95%.

b. Risk Culture: Instilling risk awareness down to the operational level in the plants and production facilities, ensuring occupational safety (OHS) and environmental sustainability are maintained despite high production targets.

4. Implementation of a Whistleblowing System (WBS)

PTPI's Whistleblowing System (WBS) management is continuously being strengthened and optimized to improve the system's effectiveness and to foster stakeholder trust. This is achieved through the following efforts:

a. Strengthening the WBS Independence: Strengthening the independence of Whistleblowing System (WBS) management through the appointment of an independent external party. This step fulfills the provisions in the Minister of BUMN Regulation Number PER-02/MBU/03/2023, which stipulates that for BUMN with a significant and systemic risk classification of A, WBS management prioritizes the use of an independent party. This ensures that WBS management is conducted more objectively, transparently, and free from potential conflicts of interest, while ensuring the confidentiality and protection of whistleblowers, which will result in increased stakeholder trust and the quality of whistleblowing reports received.
b. Role of the Board of Commissioners: The Board of Commissioners, through the Audit Committee, directly supervises the handling of complaints involving senior management. The Board of Commissioners ensures that each report is followed up fairly without intervention from the reported party.
c. Role of the Board of Directors: The Board of Directors plays a role in ensuring the effective and sustainable implementation of the Whistleblowing System (WBS) by establishing policies, providing adequate resources, and strengthening a culture of integrity within the Company. The Board of Directors also ensures that each report received is followed up in a timely, objective, and accountable manner in accordance with applicable regulations.
d. Role of the internal and external stakeholders: All internal and external stakeholders actively participate by using the Whistleblowing System (WBS) as a means of reporting suspected violations. The Company guarantees accessibility, confidentiality, and protection for whistleblowers, thus fostering an environment of integrity. This active participation by stakeholders contributes to improving the effectiveness of the system and the quality of reports received.

5. Board of Commissioners' GCG Supervision Performance Achievements The Board of Commissioners' performance achievements in its GCG supervisory function in 2025 included:

a. Meeting Effectiveness: Consistent frequency of plenary meetings and joint meetings with the Board of Directors to discuss strategic and compliance issues.
b. Strategic Recommendations: Written recommendations for governance improvements were provided, and followed up by the Board of Directors, with a completion rate of >95%.

c. Supervisi Komite: Keberhasilan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam melakukan *deep-dive* terhadap isu spesifik, seperti integritas laporan keuangan dan efektivitas manajemen risiko di anak perusahaan yang memiliki profil risiko tinggi.

Salah satu langkah penting dalam penerapan GCG dilakukan Dewan Komisaris melalui penetapan struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi pada September 2025 yang dipimpin langsung oleh Komisaris Utama. Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara termasuk Petunjuk Teknis turunannya, di mana PTPI termasuk dalam kategori BUMN Konglomerasi dan Klasifikasi Sistemik A yang mewajibkan Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite ini berfungsi menyelaraskan praktik GCG di seluruh Pupuk Indonesia Group untuk memastikan standar etika yang seragam. Secara khusus kami juga memberikan tanggapan positif atas terbitnya Peraturan Presiden RI No. 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Kami memandang regulasi ini sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi pupuk, sekaligus menjawab catatan evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara khusus, kami memberikan apresiasi atas pencapaian Anak Perusahaan dalam penilaian pihak independen atas penerapan GCG yang dilakukan, seperti PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang meraih "*Most Trusted Company*" dan PT Pupuk Kujang meraih "*Trusted Company*" dalam ajang *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2025. Hal ini dipandang sebagai bukti nyata efektivitas pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi GCG di level operasional. Selain itu, implementasi GCG yang konsisten dinilai menjadi salah satu faktor pendukung PTPI meraih peringkat ke-69 dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2025. Pencapaian ini dipandang oleh Dewan Komisaris sebagai validasi atas kualitas manajemen dan tata kelola perusahaan di tingkat Asia Tenggara.

Di luar seluruh upaya dan pencapaian yang berhasil ditorehkan, Dewan Komisaris menekankan pentingnya aspek etika keteladanan bagi seluruh Insan PTPI. Komitmen atas etika keteladanan ini akan menjadikan diri sebagai figur teladan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme guna menjaga keberlanjutan bisnis, yang pada akhirnya akan berimbas positif bagi perilaku sehari-hari setiap Insan PTPI.

Susunan Dewan Komisaris

Dalam RUPS Tahunan tanggal 16 Juni 2025, Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat 9 (sembilan) Komisaris PTPI, yaitu Darmin Nasution dari posisinya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; Mustoha Iskandar, Riswinandi, dan Danar Rahmanto ketiganya sebagai Komisaris Independen; serta, Farhat Brachma, Ari Dwipayana, Anwar Sanusi, Febrio Nathan Kacaribu, dan Suwandi sebagai Komisaris.

c. Committee Supervision: The success of committees under the Board of Commissioners in conducting in-depth studies on specific issues, such as the integrity of financial statements and the effectiveness of risk management in subsidiaries with high-risk profiles.

One of the key steps for GCG implementation was taken by the Board of Commissioners with the establishment of the Integrated Governance Committee structure, on September 2025, led directly by the President Commissioner. This committee was established pursuant on the Republic of Indonesia Minister of State-Owned Enterprise Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for State-Owned Enterprise Governance and Significant Corporate Activities and its derivative technical instructions. PTPI is categorized as a BUMN Conglomerate and classified as Systemic Risk A, requiring the Board of Commissioners to establish an Integrated Governance Committee.

This committee's function is to align GCG practices across the Pupuk Indonesia Group to ensure uniform ethical standards. Specifically, we responded positively to the Presidential Regulation No. 113 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizer. We view this regulation as a key instrument for improving the efficiency and transparency of fertilizer distribution, while also addressing the evaluation report from the Supreme Audit Agency (BPK).

In particular, we would like to express our appreciation for the achievements of the Subsidiaries in the independent assessment of GCG implementation, such as PT Pupuk Kalimantan Timur and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang which received the "Most Trusted Company" award, as well as PT Pupuk Kujang, which received the "Trusted Company" award in the 2025 Corporate Governance Perception Index (CGPI). This was viewed as clear evidence of the Board of Commissioners' supervisory effectiveness of GCG implementation at the operational level. Also, consistent GCG implementation was considered a contributing factor to PTPI's 69th ranking on the Fortune Southeast Asia 500 list in 2025. This achievement is viewed by the Board of Commissioners as validation of the quality of management and corporate governance in Southeast Asia.

Beyond the efforts and achievements, the Board of Commissioners would like to emphasize the importance of all PTPI's exemplary ethical behavior. This commitment to exemplary ethics will establish us as role models in complying with laws and regulations and upholding the principles of professionalism to maintain business sustainability, which will ultimately have a positive impact on the daily behavior of every PTPI employee.

Board of Commissioners Composition

At the AGMS held on June 16, 2025, the Shareholders resolved to honorably dismiss nine PTPI Commissioners: Darmin Nasution as President Commissioner and Independent Commissioner; Mustoha Iskandar, Riswinandi, and Danar Rahmanto, as Independent Commissioners; and Farhat Brachma, Ari Dwipayana, Anwar Sanusi, Febrio Nathan Kacaribu, and Suwandi as Commissioners.

Pada kesempatan yang sama, Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkat 9 (sembilan) orang untuk menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris PTPI, yaitu Sudaryono sebagai Komisaris Utama; Rachlan S Nashidik sebagai Komisaris Independen; Iwan Sumule, Nurul Ichwan, Yovie Widianto, Muhammad Rizal Kamal, Immanuel Ebenezer Gerungan, Febrio Nathan Kacaribu, dan Suwandi sebagai Komisaris.

Per 24 Juni 2025, Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan Muhammad Rizal Kamal sebagai Komisaris dan mengangkat Chrisna Deva Priyapratama sebagai Komisaris Independen, sedangkan Immanuel Ebenezer Gerungan diberhentikan dari posisinya sebagai Komisaris per tanggal 22 Agustus 2025. Selanjutnya, pada 15 Desember 2025 Febrio Nathan Kacaribu tidak lagi menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris pada akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama: Sudaryono
2. Komisaris Independen: Irfan Ahmad Fauzi
3. Komisaris Independen: Rachlan S Nashidik
4. Komisaris Independen: Chrisna Deva Priyapratama
5. Komisaris: Iwan Sumule
6. Komisaris: Nurul Ichwan
7. Komisaris: Yovie Widianto
8. Komisaris: Suwandi

Susunan Dewan Komisaris kembali mengalami perubahan setelah tahun buku berakhir, perubahan dilakukan oleh Pemegang Saham, dalam hal ini BP Danantara, melalui Surat Keputusan Pemegang Saham tertanggal 24 April 2026, yang memutuskan untuk mengangkat Dadan Kusdiana selaku anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). Dengan demikian, susunan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Utama, 5 (lima) orang Komisaris, dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen.

At the same time, the Shareholders appointed nine individuals to serve on the PTPI Board of Commissioners: Sudaryono as President Commissioner; Rachlan S Nashidik as Independent Commissioner; Iwan Sumule, Nurul Ichwan, Yovie Widianto, Muhammad Rizal Kamal, and Immanuel Ebenezer Gerungan, Febrio Nathan Kacaribu, and Suwandi as Commissioners.

As of June 24, 2025, the Shareholders resolved to dismiss Muhammad Rizal Kamal as Commissioner and appoint Chrisna Deva Priyapratama as Independent Commissioner, while Immanuel Ebenezer Gerungan was dismissed from his position as Commissioner as of August 22, 2025. Furthermore, as of December 15, 2025, Febrio Nathan Kacaribu no longer serves as a Member of the Board of Commissioners due to resigning. Thus, the Board of Commissioners' composition at the end of 2025 is as follows:

1. President Commissioner: Sudaryono
2. Independent Commissioner: Irfan Ahmad Fauzi
3. Independent Commissioner: Rachlan S Nashidik
4. Independent Commissioner: Chrisna Deva Priyapratama
5. Commissioner: Iwan Sumule
6. Commissioner: Nurul Ichwan
7. Commissioner: Yovie Widianto
8. Commissioner: Suwandi

The composition of the Board of Commissioners changed subsequent to the end of the financial year. The change was resolved by the Shareholders, in this case BP Danantara, through a Shareholders' Resolution dated April 24, 2026, which approved the appointment of Dadan Kusdiana as a member of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero). Accordingly, the Company's Board of Commissioners comprises 9 (nine) members, consisting of 1 (one) President Commissioner, 5 (five) Commissioners, and 3 (three) Independent Commissioners.



Berikut susunan Dewan Komisaris Per 24 April 2026 sampai Laporan Tahunan ini diterbitkan:

1. Komisaris Utama: Sudaryono
2. Komisaris Independen: Irfan Ahmad Fauzi
3. Komisaris Independen: Rachlan S Nashidik
4. Komisaris Independen: Chrisna Deva Priyapratama
5. Komisaris: Iwan Sumule
6. Komisaris: Nurul Ichwan
7. Komisaris: Yovie Widianto
8. Komisaris: Suwandi
9. Komisaris: Dadan Kusdiana

Memandang Prospek 2026

> **Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang hasil pertanian, tetapi juga tentang kemampuan bangsa menjaga kemandirian dan kedaulatannya.**
> Food security encompasses more than agricultural output — it reflects the nation's resilience in sustaining food self-sufficiency and food sovereignty.

Di tengah tekanan geopolitik dan kenaikan harga energi global, Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi moderat untuk kawasan Asia dan Pasifik sebesar 5,1% pada tahun 2026[3]. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI menetapkan target angka pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,6%[4], melampaui capaian tahun 2025 sebesar 5,11%[5].

Salah satu hal yang mendasari proyeksi akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah agenda ketahanan pangan yang akan memicu peningkatan permintaan domestik. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang hasil pertanian, tetapi juga tentang kemampuan bangsa menjaga kemandirian dan kedaulatannya. Dengan landasan pemikiran tersebut, Dewan Komisaris memandang prospek usaha tahun 2026 dengan optimisme strategis, yang didasarkan pada beberapa hal.

Pertama, Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Indonesia tahun 2026 menempatkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi sebagai visi besar, di mana ketahanan pangan didorong pada bingkai produktivitas, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani & nelayan.

Kedua, keberhasilan transformasi PTPI menjadi pemain global sekaligus pilar utama ketahanan pangan nasional. Hingga tahun 2025, Perusahaan telah menunjukkan resiliensi dengan menempati peringkat ke-6 di antara industri sejenis di dunia berdasarkan laba bersih dan peringkat ke-69 dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 2025.[6]

The composition of the Board of Commissioners as of April 24, 2026 and up to the issuance date of this Annual Report is as follows:

1. President Commissioner: Sudaryono
2. Independent Commissioner: Irfan Ahmad Fauzi
3. Independent Commissioner: Rachlan S Nashidik
4. Independent Commissioner: Chrisna Deva Priyapratama
5. Commissioner: Iwan Sumule
6. Commissioner: Nurul Ichwan
7. Commissioner: Yovie Widianto
8. Commissioner: Suwandi
9. Commissioner: Dadan Kusdiana

Prospects for 2026

Perekonomian Indonesia, termasuk juga sektor pupuk dan perkebunan serta agroindustri, harus mewaspadai situasi politik dan ekonomi dunia yang terus mengalami dinamika yang terjadi. Faktor tensi geopolitik dan perang yang terjadi di awal tahun 2026 memicu kenaikan tinggi komoditas minyak mentah—termasuk juga kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dengan penetapan tarif impornya, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kondisi perekonomian nasional.
The Indonesian economy, including the fertilizer, plantation, and agro-industry sectors, must stay vigilant of the ongoing dynamics of the global political and economic landscape. Geopolitical tensions and the conflict that erupted in early 2026 triggered a sharp increase in crude oil prices—compounded by the United States' protectionist import tariffs, directly impacting Indonesia's economy.

Amid geopolitical tensions and rising global energy prices, Asian Development Bank (ADB) projected moderate economic growth in Asia and the Pacific region at 5.1% in 2026[3]. Meanwhile, the Government of Indonesia, through the Ministry of Finance, has set an economic growth target of 5.6%[4] for 2026, surpassing the 5.11%[5] achievement in 2025.

One of the key factors underpinning projected acceleration in Indonesia's economic growth is the food security agenda, which is expected to drive increased domestic demand. Food security encompasses not only agricultural output — it reflects the nation's resilience in sustaining food self-sufficiency and food sovereignty. Based on this strategic rationale, the Board of Commissioners views the business prospects for 2026 with optimism, based on several considerations.

First, Indonesia's 2026 Draft State Budget (RAPBN) prioritizes food, energy, and economic sovereignty, with food security driven through productivity, maintaining price stability, and improving the welfare of farmers and fishermen.

Second, PTPI's successful transformation into a global player and a key pillar of national food security. By 2025, the Company had demonstrated resilience, ranking sixth among its peers globally based on net profit and 69th on the Fortune Southeast Asia 500 2025 list.[6]

[3] Asian Development Outlook April 2026: https://www.adb.org/outlook/editions/april-2026
[4] Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | Indonesia's Economic Growth: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi-Indonesia-Tumbuh-5,61-Persen
[5] Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026. | [5] Bureau of Statistics (BPS), Official Statistical Bulletin No. 18/02/Vol. XXIX, February 5, 2026.
[6] Fortune Southeast Asia 500: https://fortune.com/asia/ranking/southeast-asia-500/2025/

Dewan Komisaris mendukung proyeksi peningkatan kinerja finansial dan operasional yang disusun oleh Direksi untuk tahun 2026 yang tercermin pada beberapa hal di bawah ini:

1. Peningkatan Profitabilitas: Adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk mendukung swasembada pangan dan energi akan berdampak langsung pada meningkatnya permintaan pupuk. Hal ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan pemasaran serta pendapatan dan laba Pupuk Indonesia Group, khususnya dengan upaya manajemen dalam melakukan pembenahan sistem dan penurunan biaya produksi.
2. Ketahanan Pangan Nasional: Tahun 2026 dipandang sebagai masa krusial bagi swasembada pangan. Target pemerintah mencakup pembangunan 3 juta hektar sawah baru dan digitalisasi melalui "Brigade Pangan", yang membutuhkan agrosolusi cerdas dari Perusahaan.
3. Ekspansi Global: Dewan Komisaris terus mendukung strategi "*Go Global*" melalui optimalisasi kantor perwakilan di luar negeri seperti di Uni Emirat Arab untuk meningkatkan pendapatan dari pasar internasional dan mengamankan rantai pasok bahan baku.
4. Transformasi Industri Hijau: Prospek 2026 mencakup percepatan proyek dekarbonisasi, termasuk pembangunan proyek *Hybrid Green Ammonia* pertama di dunia dan pengembangan ekosistem hidrogen hijau bersama mitra strategis seperti PLN dan ACWA Power.

Pandangan optimis Dewan Komisaris didasarkan pada beberapa faktor penguat. Pertama, efisiensi operasional, di mana keberhasilan program sentralisasi *holding* dan digitalisasi selama beberapa tahun terakhir telah membuktikan dampak positif pada kinerja Perusahaan. Kedua, kebijakan afirmatif Pemerintah Indonesia melalui penurunan harga pupuk bersubsidi seperti NPK Kakao menjadi Rp2.640 per kg yang berlaku mulai Oktober 2025 diharapkan dapat merangsang permintaan dan produktivitas pertanian nasional. Ketiga, inovasi berkelanjutan melalui program inovasi seperti PIQI 2024 bertema "*Green Growth*" telah menjaring ribuan karya inovasi dari karyawan, memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi grup.

Meskipun prospek dinilai positif, Dewan Komisaris mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang harus dimitigasi oleh Direksi:

1. Kelangkaan dan Biaya Bahan Baku: Cadangan gas bumi domestik yang menurun menjadi tantangan besar mengingat industri pupuk adalah konsumen gas yang signifikan, lebih kurang 11,72%[7] dari total serapan gas nasional. Fluktuasi harga gas alam global tetap menjadi risiko utama biaya produksi.

2. Pengelolaan Subsidi: Tantangan dalam mengelola subsidi pada RAPBN 2026 memerlukan ketelitian agar tetap tepat sasaran di tengah target swasembada pangan yang ambisius.

The Board of Commissioners supports the projections for improved financial and operational performance prepared by the Board of Directors for 2026, as reflected in the following points:

1. Enhanced Profitability: the implementation of agricultural intensification and extensification programs to support food and energy self-sufficiency is expected to directly increase fertilizer demand. This is anticipated to serve as a driving factor for the growth of marketing performance, as well as the revenue and profit of the Pupuk Indonesia Group, particularly through management's efforts to improve systems and reduce production costs.
2. National Food Security: 2026 is seen as a crucial year for food self-sufficiency. The government's target includes the development of 3 million hectares of new rice fields and digitalization through the "Food Brigade," which requires the Company's intelligent agro-solutions.
3. Global Expansion: The Board of Commissioners continues to support the Company's "Go Global" strategy through the optimization of overseas representative offices, including in the United Arab Emirates, to enhance revenue from international markets and secure the supply chain of raw materials.
4. Green Industrial Transformation: The 2026 outlook includes accelerating decarbonization projects, including the construction of the world's first Hybrid Green Ammonia project and the development of a green hydrogen ecosystem with strategic partners such as PLN and ACWA Power.

The Board of Commissioners' optimistic outlook is underpinned by several key factors. First, operational efficiency, where the success of the holding company's centralization and digitalization programs over the past few years has had a positive impact on the Company's performance. Second, the Indonesian Government's affirmative policy, which includes reducing the price of subsidized fertilizers, such as NPK Cocoa, to Rp2,640 per kg, effectively implemented in October 2025, which is expected to stimulate national agricultural demand and productivity. Third, continuous innovation through programs such as the 2024 PIQI "Green Growth" initiative, which has garnered thousands of innovation submissions from employees, providing significant financial benefits to the group.

Although the outlook is positive, the Board of Commissioners has identified several key challenges that the Board of Directors must mitigate:

1. Raw Material Scarcity and Cost: Declining domestic natural gas reserves pose a significant challenge, given that the fertilizer industry is a major consumer of natural gas, accounting for approximately 11.72%[7] of total national natural gas consumption. Fluctuations in global natural gas prices remain a major risk to production costs.
2. Subsidy Management: The challenge of managing subsidies in the 2026 Draft State Budget requires careful attention to ensure they remain on target amidst the ambitious food self-sufficiency target.

[7] SKK Migas, BPH Migas, atau lainnya: https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-pastikan-kebutuhan-gas-untuk-industri-pupuk-akan-terpenuhi#goog_rewarded
[7] Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities, Downstream Oil and Gas Regulatory Agency or others: https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-pastikan-kebutuhan-gas-untuk-industri-pupuk-akan-terpenuhi#goog_rewarded

3. Tekanan Lingkungan dan Emisi: Produksi pupuk nitrogen sintetis berkontribusi pada emisi gas rumah kaca (*nitrous oxide*). Perusahaan harus terus mempercepat implementasi energi ramah lingkungan untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan memenuhi komitmen *Net Zero Emission*.

4. Volatilitas Pasar Komoditas: Ketidakpastian geopolitik global yang memengaruhi harga komoditas perkebunan dan pupuk menuntut adaptasi strategi pemasaran yang lebih lincah.

Penutup

Secara khusus kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Direksi dan seluruh jajarannya dalam membangun hubungan yang selaras dengan Dewan Komisaris dan organ pendukungnya. Prinsip keselarasan ini menjadi penting karena dari hubungan yang selaras antara operasi dan pengawasan dapat tercipta sebuah organisasi berbasis tata kelola dengan praktik yang sehat dan berkelanjutan. Semoga keselarasan ini, bersama-sama dengan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi modal penting bagi perjalanan PTPI di masa-masa mendatang.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua.

3. Environmental Pressures and Emissions: The production of synthetic nitrogen fertilizers contributes to greenhouse gas (nitrous oxide) emissions. The Company must continue to accelerate the adoption of environmentally sustainable energy to mitigate the impacts of climate change and meet Net Zero Emission commitments.
4. Commodity Market Volatility: Global geopolitical uncertainty affects plantation commodity and fertilizer prices, requiring more agile adaptation of marketing strategies.

Conclusion

We would like to express our special appreciation and gratitude to the Board of Directors and all their staff for building a harmonious relationship with the Board of Commissioners and its supporting bodies. This principle of harmony is crucial as a harmonious relationship between operations and supervision can create a governance-driven organization grounded in healthy and sustainable practices. We hope that this harmony, together with the support of shareholders and all stakeholders, will serve as a vital asset for PTPI's future endeavours.

May God Almighty continue to bless us all.

Jakarta, 11 Mei 2026
Jakarta, May 11, 2026

Atas nama Jajaran Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
On behalf of the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Commissioners

Sudaryono
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors Report



Melalui optimalisasi operasi yang unggul, PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen terlibat penuh dalam mewujudkan transformasi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi, yang akan mendorong ketangguhan rantai pasok pupuk dan ketahanan pangan nasional.

Through the optimization of operational excellence, PTPI remains firmly committed to playing an integral role in driving the governance transformation of subsidized fertilizer distribution, there by reinforcing the resilience of the fertilizer supply chain and supporting the achievement of national food security objectives.

Yang terhormat Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan,

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat melalui tahun buku 2025 dengan sangat baik. Pada tahun 2025, Perusahaan mengambil peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk yang berkualitas dan berdaya saing, sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah yang pro-petani dalam kerangka percepatan swasembada pangan nasional.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise be to God Almighty, PT Pupuk Indonesia (Persero) successfully completed the 2025 fiscal year. In 2025, the Company played a strategic role in strengthening national food security by providing high-quality and competitive fertilizers, in line with various pro-farmer Government policies aimed at accelerating national food self-sufficiency.

Kondisi Perekonomian dan Industri Tahun 2025 dan Satu Langkah Pasti Mewujudkan Ketahanan Pangan

Sepanjang tahun 2025 perekonomian global masih diwarnai oleh volatilitas harga energi, dinamika geopolitik, serta fluktuasi nilai tukar yang memengaruhi stabilitas perdagangan komoditas internasional. Di tengah tantangan tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan sebesar 5,11% (c-to-c) dan tingkat inflasi 2,92% pada tahun 2025[1]. Stabilitas tersebut memberikan fondasi yang positif bagi sektor industri manufaktur, khususnya industri agrokimia, sebagai salah satu pendukung ketahanan pangan nasional.

Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 berada pada level Rp16.504,-, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp15.906,-[2]. Dalam industri pupuk, peningkatan nilai tukar berdampak pada peningkatan biaya produksi, khususnya pada komponen bahan baku yang diperdagangkan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, Perusahaan dapat merespons beragam tantangan tersebut dengan baik, sehingga tetap mencatatkan kinerja positif.

Dinamika geopolitik dan gangguan rantai pasok global memberikan tekanan terhadap stabilitas harga bahan baku pupuk majemuk, khususnya fosfat dan potasium yang masih bergantung pada impor. Kondisi ini menuntut pengamanan pasokan bahan baku melalui diversifikasi sumber serta disiplin pengendalian biaya guna menjaga stabilitas operasional dan kebutuhan modal kerja.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mencapai kedaulatan pangan merupakan salah satu arah kebijakan strategis nasional. PTPI sebagai *holding* BUMN pupuk nasional mengambil peran strategis sebagai pelaksana mandat negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk di seluruh Indonesia. Dengan kapasitas produksi memadai dan jaringan distribusi terintegrasi, Perusahaan memastikan kesinambungan pasokan pupuk nasional di tengah dinamika eksternal dan kebijakan domestik.

Di tahun 2025 Pemerintah Indonesia juga memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi melalui penerbitan Peraturan Presiden RI No. 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden RI No. 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres No. 6 Tahun 2025 menyederhanakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan memberi tanggung jawab penuh pada PTPI terhadap penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke titik serah. Selain itu, Pemerintah menegaskan komitmen terkait pupuk bersubsidi melalui penetapan alokasi pupuk bersubsidi yang berbasis kebutuhan nutrisi tanaman, peningkatan akurasi data penerima, serta integrasi sistem pemantauan distribusi secara nasional.

Penyempurnaan terhadap tata kelola pupuk bersubsidi kembali dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden RI No. 113 Tahun 2025. Aturan ini memberikan dorongan pada PTPI untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui perbaikan mekanisme subsidi pupuk berbasis harga pasar.

The 2025 Economic and Industrial Outlook and A Single Decisive Step to Achieving Food Security

Throughout 2025, the global economy continued to be characterized by persistent energy price volatility, geopolitical dynamics, and exchange rate fluctuations, which unsettled international commodity market. Despite global headwinds, the Indonesian economy demonstrated strong resilience, finishing 2025[1] with 5.11% (c-to-c) growth and inflation rate remained steady at 2.92%. This condition provided a robust foundation for the domestic manufacturing sector, in particular the agrochemical industry as one of a critical pillars of national food security.

The average rupiah exchange rate weakened to Rp16,504 per US dollar throughout 2025 from Rp15,906[2] in 2024. In the fertilizer industry, currency fluctuations have a considerable impacts on production costs especially concerning dollar-denominated raw materials. Nevertheless, the Company has successfully mitigated these challenges to sustain a strong performance throughout the year.

Geopolitical dynamics and disruptions to the global supply chain were putting pressure on the price stability of compound fertilizer raw materials, particularly phosphate and potassium, which remained dependent on imports. This situation required securing raw material supplies through source diversification and disciplined cost control to maintain operational stability and working capital requirements.

The Indonesian Government emphasizes that achieving national food sovereignty is one of the key directions of national strategic policy. PTPI, as the holding company for the national state-owned fertilizer enterprise, plays an instrumental role in fulfilling the state mandate to ensure fertilizer accessibility across the nation. Leveraging a robust production capacity and highly integrated distribution network, the Company ensured the continuity of the national fertilizer supply chain despite shifting external dynamics and domestic policy landscapes.

In 2025, the Indonesian Government strengthened the subsidized fertilizer governance through Presidential Regulation No. 6 of 2025 and Presidential Regulation No. 113 of 2025 concerning Subsidized Fertilizer Governance. Presidential Regulation No. 6 of 2025 streamlined the subsidized fertilizer distribution mechanism to farmers and centralized full responsibility for the distribution of subsidized fertilizer to the point of delivery with PTPI. Also, the government reaffirmed its commitment to subsidized fertilizer by establishing nutrition needs-based allocations, improving the data accuracy for recipients, and integrating a national distribution monitoring system.

Further improvements to the subsidized fertilizer governance were made through Presidential Regulation No. 113 of 2025. These reforms incentivized PTPI to drive operational efficiency and industrial competitiveness through the refinement of the market-price-based fertilizer subsidy mechanism.

[1] Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026. | Central Bureau of Statistics (BPS), Official Statistical Bulletin No. 18/02/Vol. XXIX, February 5, 2026.
[2] Diolah dari | Adapted from: https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/nilai-tukar

Hasil dari berbagai upaya efisiensi turut dinikmati oleh petani melalui kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu harga yang dibayar oleh petani sebesar 20% sejak 22 Oktober 2025. Atas perbaikan tata kelola ini, PTPI berkomitmen untuk melaksanakan 7 (tujuh) proyek investasi pengembangan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Reformasi kebijakan ini bertujuan memastikan Prinsip 7 Tepat (7T) dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Dalam konteks perubahan tata kelola pupuk bersubsidi, khususnya penguatan mekanisme subsidi berbasis harga pasar, Perusahaan semakin dituntut untuk memperkuat disiplin efisiensi pada seluruh rantai nilai. Upaya efisiensi tersebut tidak hanya dilakukan melalui perbaikan proses produksi dan distribusi, tetapi juga melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki Perusahaan dan Grup.

Industri pupuk merupakan salah satu pengguna gas bumi yang berfokus pada peningkatan nilai tambah gas bumi di dalam negeri. Penentuan alokasi dan harga gas bumi di Indonesia ditetapkan melalui kebijakan Pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepastian suplai jangka panjang dan keberlanjutan kebijakan harga gas untuk industri dalam negeri merupakan determinan penting dalam menjaga daya saing industri pupuk nasional.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan *Return on Asset*, Direksi mendorong penguatan tata kelola dan optimalisasi aset secara lebih terintegrasi di lingkungan Pupuk Indonesia Group. Pengelolaan aset diarahkan untuk memastikan bahwa aset-aset strategis, baik yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional utama maupun aset non-*core* yang memiliki potensi ekonomi, dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap efisiensi biaya, pendapatan usaha, dan penciptaan nilai jangka panjang.

Direksi memandang bahwa kombinasi antara stabilitas makro ekonomi nasional, kepastian kebijakan energi domestik, pengelolaan risiko bahan baku secara *prudent*, serta penguatan tata kelola subsidi menjadi fondasi utama keberlanjutan industri pupuk nasional. Dengan disiplin operasional dan tata kelola yang kuat, Perusahaan terus memperkuat posisinya sebagai pilar industri pupuk nasional dan kontributor utama dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan.

Kebijakan Strategis Perusahaan dan Peran Direksi dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Perusahaan

Dalam menghadapi dinamika industri, Direksi menjalankan peran aktif dalam pengelolaan aktivitas bisnis Perusahaan sehingga pencapaian target dan pengembangan bisnis dapat selaras dengan arah kebijakan strategis Pemerintah. Direksi senantiasa mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu kondisi eksternal ekonomi-politik dunia, volatilitas harga bahan baku dan komoditas global, perubahan tata kelola pupuk bersubsidi, dan dinamika pasar pupuk nasional. Serta tren keberlanjutan dan tuntutan ESG global. Pada saat yang sama, Direksi secara aktif mengintegrasikan persyaratan ESG serta tren global menuju praktik berkelanjutan dan penerapan nilai-nilai ESG.

The results of these efficiency efforts were also enjoyed by farmers through a 20% reduction in the Highest Retail Price (HET), ie. price paid by farmers, effective October 22, 2025. In alignment with these enhanced governance improvement, PTPI is committed to spearheading seven strategic investment development projects over the next 5 (five) years. This policy reform aims to ensure The 7 Right Principle (7T) for the distribution of subsidized fertilizer, while ensuring maximum transparency and rigorous accountability in the allocation of the state budget.

In the context of changes in subsidized fertilizer governance, particularly the strengthening of market-based subsidy mechanisms, the Company is increasingly required to strengthen disciplined efficiency throughout the value chain. These efficiency efforts are not only carried out through improvements to production and distribution processes, but also through optimizing the use of assets owned by the Company and the Group.

As a primary consumer of natural gas, the fertilizer industry is central to the government's mandate of maximizing added-value of domestic natural gas production. The Ministry of Energy and Mineral Resources governs the allocation and pricing of natural gas as Indonesia's critical industrial feedstock. Consequently, long term supply security and sustainable price policies are essential for maintaining the competitiveness of national fertilizer industry.

To maximize Return on Assets (ROA), the Board of Directors is committed to robust governance framework and integrated asset optimization across Pupuk Indonesia Group. This focus ensures that all assets—ranging from core operational infrastructure to non-core assets with economic potential will contribute to increased cost efficiency, accelerated revenue growth, and strengthened long-term value creation.

The Board of Directors believes that the combination of national macroeconomic stability, consistent domestic energy policy, prudent management of raw material risks, and strengthened subsidy governance is the foundation for the national fertilizer industry long-term sustainability. Through rigorous operational discipline and strong governance framework, the Company is securing its position as the backbone of the national fertilizer industry and a major contributor to Indonesia's long-term sustainable food security.

Corporate Strategic Policy: The Pivotal Role of the Board of Directors in Strategy Formulation and Implementation

The Board of Directors actively steers the Company's operations to ensure that performance target achievement and business development activities remain aligned with the Government's strategic policy directives. The Board of Directors maintains rigorous oversight of external conditions concerning global economic and political landscapes, fluctuations in raw materials and commodity prices, changes in domestic subsidized fertilizer governances and national fertilizer market dynamics. Simultaneously, the Board of Directors is integrating ESG requirements and global trends towards sustainable practices and integration of ESG Value.

Direksi menyusun strategi Perusahaan dengan pertimbangan menyeluruh terkait kemampuan produksi, jaringan distribusi dan penjualan nasional, struktur biaya, portofolio bisnis non-pupuk yang terus berkembang, serta arahan untuk meningkatkan *Return on Asset* (ROA) Perusahaan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Direksi mengarahkan strategi tahun 2025 berfokus pada penguatan peran sebagai pilar ketahanan pangan nasional sekaligus peningkatan profitabilitas berkelanjutan pada seluruh portofolio usaha. Strategi tersebut dijalankan melalui beberapa fokus utama.

The Board of Directors defines the Company's strategic trajectory by fully leveraging its production capabilities, nationwide distribution and sales network, and optimized cost structure. This includes driving portfolio expansion into non-fertilizer businesses and implementing targeted directives to maximize the Company's Return on Assets (ROA).

Guided by these considerations, the Board of Directors' 2025 strategy was centered on a dual strategic mandate: strengthening the Company's role as a critical pillar of national food security while simultaneously driving sustainable profitability across the diversified business portfolio. This strategy was operationalized through high-impact initiatives in the following key areas.

Penetapan Fokus Utama Strategi PTPI Tahun 2025
PTPI's Main Strategic Focus in 2025



PTPI berkomitmen untuk menjalankan *Operational Excellence* dan *Cost Leadership* dalam seluruh kegiatan operasional melalui peningkatan efisiensi produksi, peningkatan *reliability*, digitalisasi di seluruh proses bisnis, serta pengendalian biaya energi dan bahan baku. Untuk mencapai target efisiensi produksi secara grup, PTPI telah melakukan upaya efisiensi energi dengan revitalisasi pabrik Pusri-IIIB dan *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT.

Dalam kerangka *Operational Excellence* dan *Cost Leadership*, Perusahaan juga memperkuat program optimalisasi aset untuk memastikan pemanfaatan sumber daya berjalan lebih produktif dan efisien. Inisiatif ini mencakup peningkatan utilisasi aset, evaluasi aset *idle* dan non-*core*, optimalisasi kantor pemasaran wilayah, serta penajaman strategi pemanfaatan aset properti untuk mendukung efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan non-*core*. Program optimalisasi aset juga diarahkan untuk memperkuat disiplin pengelolaan biaya, terutama pada aset-aset yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan distribusi, pergudangan, fasilitas operasional, dan sarana pendukung bisnis lainnya. Dengan demikian, pengelolaan aset menjadi bagian dari agenda efisiensi Perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga pada pengendalian biaya dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan.

PTPI remains committed to operational excellence and cost leadership across all operational activities. By optimizing production efficiency and digitizing the end-to-end value chain, the Company effectively managed energy and raw material costs. To achieve its group-wide production efficiency targets, PTPI has implemented energy efficiency initiatives through the revitalization of Pusri IIIB plant and the Revamping of Ammonia PKT Plant-2.

Under the Operational Excellence and Cost Leadership framework, the Company has strengthened its asset optimization program to maximize resource utilization. Key initiatives include increasing asset utilization, evaluating idle or non-core assets, optimizing regional marketing offices, and refining property asset management strategies to drive cost efficiencies and increase non-core revenue streams. Furthermore, this program reinforces strict cost discipline across distribution, warehousing, and operational assets. By embedding asset management into our broader efficiency agenda, the Company balances revenue generation with rigorous cost control, ultimately enhancing the quality of corporate decision-making.

Di tengah pasar pupuk yang semakin kompetitif, Perusahaan menyiapkan berbagai strategi penguatan daya saing khususnya di pasar komersial. Beberapa fokus strategi untuk meningkatkan daya saing di pasar komersial di antaranya peningkatan partisipasi dalam berbagai kegiatan tender, perluasan pasar *Business-to-Business* khususnya pada pasar perkebunan, peningkatan *distributor excellence*, serta peningkatan kapasitas produksi untuk menangkap perkembangan pasar. Untuk mendukung transformasi komersial ini, Perusahaan turut melakukan transformasi struktural dengan mengubah Direktorat Pemasaran menjadi Direktorat *Supply Chain*.

Sejalan dengan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Pemerintah, Perusahaan turut melakukan penguatan secara internal untuk mendukung perbaikan tata kelola tersebut. Aplikasi iPubers akan diperkuat untuk dapat menjalankan skema penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung hingga ke titik serah. Berbagai langkah penguatan dijalankan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran serta memastikan Prinsip 7 Tepat penyaluran pupuk bersubsidi dapat terlaksana.

Selain itu, fokus Perusahaan juga diarahkan pada penguatan fondasi transisi energi dan keberlanjutan. PTPI mulai membangun *roadmap* dekarbonisasi melalui efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pengembangan *clean ammonia* dan produk ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Dalam perumusan dan pelaksanaan strategi di atas, Direksi berperan aktif dalam memastikan strategi Perusahaan selaras dengan mandat negara, dinamika industri, serta keberlanjutan jangka panjang Perusahaan. Peran tersebut meliputi:

1. Menetapkan visi arah jangka panjang Perusahaan sebagai pelaku usaha agrokimia dan agrosolusi yang terintegrasi;
2. Memberikan arahan strategis berbasis analisis makro, industri, dan regulasi;
3. Menentukan prioritas portofolio bisnis dan alokasi sumber daya;
4. Menyetujui target kinerja, KPI strategis, serta indikator nilai tambah; dan
5. Memastikan strategi mendukung ketahanan pangan nasional dan kesehatan finansial Perusahaan.

Direksi memastikan strategi tidak hanya berorientasi jangka pendek tetapi juga meningkatkan daya tahan bisnis terhadap siklus komoditas.

Perumusan strategi dilakukan melalui proses terstruktur sebagai berikut:

1. Analisis lingkungan eksternal (makro ekonomi, industri pupuk global, regulasi);
2. Evaluasi kinerja dan portofolio bisnis internal;
3. Penyusunan skenario dan proyeksi jangka menengah-panjang;
4. Pembahasan strategis dalam forum Direksi; dan
5. Sinkronisasi dengan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Untuk memastikan strategi dapat terlaksana dengan baik, Direksi melakukan berbagai langkah seperti Rapat Kerja Penyusunan RKAP, rapat penyelarasan strategi, serta berbagai forum rapat

To navigate an increasingly competitive fertilizer market, the Company has prepared various strategies to strengthen its competitiveness, particularly in the commercial segment. Some of the strategic focuses are on increasing participation in various tender activities, expanding Business-to-Business market, particularly in the plantation market, increasing distributor excellence, and increasing production capacity to capture market developments. To support this commercial transformation, the Company also undertook a structural transformation by transitioning from the Marketing Directorate to the Supply Chain Directorate.

In direct alignment with the Government's subsidized fertilizer governance reforms, the Company strengthened internal operations to ensure seamless implementation of these changes. The existing i-Pubers digital platform will be further strengthened to ensure the distribution of subsidized fertilizers to the final point of delivery. This initiative enhances the accuracy and transparency of subsidized fertilizer distribution by institutionalizing the "The 7 Right Principle" to ensure compliance and accountability.

The Company's is strengthening its energy transition and sustainability foundations by developing a comprehensive decarbonization roadmap. The roadmap focuses on energy efficiency, emission reduction, and the development of clean ammonia and environmentally friendly products. These initiatives are integral to the Company's long-term strategy.

In formulating and executing corporate strategies, the Board of Directors plays an active role in ensuring the Company's strategies align with the state mandates, industry dynamics, and long-term sustainability. This includes:

1. Establishing the Company's long-term vision and strategic direction as an integrated agrochemical and agrosolutions player;
2. Providing strategic direction based on by macroeconomic, industrial, and regulatory analysis;
3. Determining priorities on business portfolio and resource allocation;
4. Approving performance targets, strategic KPIs, and value-added indicators; and
5. Ensuring strategic alignment to support national food security while safeguarding the Company's financial resilience.

The Board of Directors ensures that strategies are not only short-term oriented but also increase business resilience against commodity cycles.

Strategy formulation was executed through a structured process:

1. Analysis of the external environment (macroeconomics, the global fertilizer industry, the regulatory landscapes);
2. Evaluation of internal business and portfolio performance;
3. Preparation of medium to long-term scenarios and projections;
4. Strategic discussions within the Board of Directors meetings; and
5. Synchronization with Shareholders and the Board of Commissioners.

To ensure seamless strategy execution, the Board of Directors took a number of steps, including a Work Plan and Budget (RKAP) Formulation Meetings, strategic alignment sessions, and

monitoring. Direksi memastikan implementasi strategi berjalan efektif melalui pendekatan *Strategy Execution Framework* sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.

dedicated monitoring forums. The Board of Directors ensured effective strategy execution by deploying the Strategy Execution Framework, as illustrated in the following chart.

***Strategy Execution Framework* Direksi untuk Memastikan Strategi Berjalan Efektif**
Board of Directors' Strategy Execution Framework to Ensure Effective Strategy Implementation



Untuk memastikan inisiatif optimalisasi aset berjalan secara terukur, Perusahaan menerapkan pendekatan eksekusi yang mencakup *cascading* target pendapatan aset, *monitoring* progres kerja sama pemanfaatan aset, evaluasi risiko atas setiap inisiatif kerja sama, serta eskalasi pengambilan keputusan untuk aset-aset yang memerlukan persetujuan organ Perusahaan. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi nilai atas aset sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG).

To ensure asset optimization initiatives are followed in a measurable manner, the Company uses an execution approach that includes cascading asset revenue targets, monitoring the progress of asset utilization collaborations, evaluating the risks of each collaboration initiative, and escalating decision-making for assets requiring approval from Company organs. This approach is expected to accelerate asset value realization while maintaining compliance with good corporate governance principles.

Penguatan tata kelola tersebut juga mencakup penajaman proses perencanaan kerja sama pemanfaatan aset, pemastian kelengkapan kajian komersial dan risiko, serta penguatan dokumentasi dalam setiap proses persetujuan. Dengan mekanisme yang lebih terstruktur, Perusahaan dapat mempercepat pengambilan keputusan tanpa mengurangi aspek kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun regulasi yang berlaku.

This governance strengthening also includes sharpening the asset utilization collaboration planning process, ensuring the completeness of commercial and risk assessments, and strengthening documentation in each approval process. Through a more structured mechanism, the Company can expedite decision-making without compromising prudence, accountability, and compliance with internal provisions and applicable regulations.

Direksi secara berkala melakukan evaluasi dan pemantauan atas implementasi kebijakan strategis melalui beberapa forum:

1. Evaluasi Berkala
   a. Reviu kinerja bulanan dan triwulanan; dan
   b. Evaluasi pencapaian inisiatif strategis.
2. Tindak lanjut
   a. Penyesuaian program kerja dan anggaran;
   b. Reprioritisasi inisiatif strategis;
   c. Perbaikan proses operasional; dan
   d. Penyesuaian target apabila terjadi perubahan regulasi atau pasar.

The Board of Directors periodically evaluates and monitors the execution of strategic policies through several forums:

1. Periodic Evaluation
   a. Monthly and quarterly performance reviews; and
   b. Evaluation of the achievement of strategic initiatives.
2. Follow-up
   a. Adjustment of work programs and budgets;
   b. Reprioritization of strategic initiatives;
   c. Optimization of operational processes; and
   d. Target calibrations in response to regulatory or market changes.

Melalui pendekatan tersebut, Direksi memastikan strategi tidak hanya direncanakan dengan baik tetapi juga terimplementasi secara disiplin, adaptif, dan memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi Perusahaan serta pemangku kepentingan.

Through this approach, the Board of Directors ensures that strategies are both meticulously planned and executed with discipline and adaptability, delivering sustainable value for the Company and its stakeholders.

Pengembangan Proyek dan Permodalan Perusahaan

Beberapa proyek berjalan menjadi jejak langkah penting bagi PTPI khususnya dalam mendukung ekspansi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sejumlah realisasi pelaksanaan proyek pengembangan di lingkungan Pupuk Indonesia Group antara lain:

1. Penyelesaian Proyek *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT
   Pekerjaan *Engineering, Procurement, & Construction Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT telah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Penyelesaian proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya revitalisasi industri pupuk nasional yang terus didorong oleh PTPI. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, keandalan operasional, serta daya saing industri pupuk secara berkelanjutan.
2. Pelaksanaan Proyek PUSRI-IIIB
   Proyek PUSRI-IIIB ditujukan untuk menggantikan pabrik PUSRI-III dan PUSRI-IV, guna meningkatkan efisiensi, keandalan operasional, dan daya saing industri secara berkelanjutan. Progres proyek PUSRI-IIIB hingga Desember 2025 adalah sebesar 80,78% dari target 80,72% dan ditargetkan dapat beroperasi penuh pada awal 2027.
3. Eksekusi Proyek NPK Berbasis Nitrat
   Proyek NPK berbasis Nitrat di Cikampek dimulai pada 12 November 2025. Rekind terpilih sebagai kontraktor proyek EPC berdasarkan evaluasi menyeluruh dan mengedepankan tata kelola yang baik. Proyek ini bertujuan meningkatkan kemampuan produksi NPK dalam negeri, khususnya NPK berbasis nitrat yang selama ini dipenuhi melalui impor. Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor, namun juga dirancang untuk menciptakan kemandirian industri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hingga Desember 2025, progres proyek telah mencapai 3,29% dari target 3,06%.
4. *Groundbreaking* Proyek Soda Ash
   Pemasangan tiang pancang pertama pada 31 Oktober 2025 menandai pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia sebagai langkah strategis substitusi impor dan penguatan kemandirian industri. Proyek ini juga mengintegrasikan pemanfaatan CO_2 sebagai bahan baku untuk menurunkan emisi GRK sekaligus menghasilkan amonium klorida yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Dengan demikian, Perusahaan turut berkontribusi dalam peningkatan efisiensi sumber daya dan praktik industri yang berkelanjutan.

Untuk dapat mewujudkan berbagai proyek berjalan tersebut sekaligus memenuhi modal kerja yang dibutuhkan, faktor permodalan dan pendanaan turut menjadi perhatian. Dalam mengelola pendanaan, kami menerapkan strategi pembiayaan yang *prudent* dengan mengoptimalkan kombinasi ekuitas dan surat hutang, untuk memastikan setiap proyek strategis terdukung oleh struktur permodalan yang sehat dan berkelanjutan. Kemampuan pengelolaan pendanaan PTPI juga diperkuat melalui pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), di mana pada tahun 2025 PTPI memperoleh status "Sangat Sehat" (idAAA). Dengan pengelolaan arus kas yang cukup kuat, PTPI mampu melunasi seluruh utang obligasinya yang jatuh tempo, termasuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B (PIHC02BCN1) pada 2 September 2025.

Project Development and Capital Capitalization

Several ongoing projects have become important milestones for PTPI, particularly in supporting the Indonesian Government's national mandate to achieve food security. Key development projects currently being executed within Pupuk Indonesia Group include:

1. Completion of the Revamping of Ammonia PKT Plant-2 Project
   The Engineering, Procurement, and Construction work for the Revamping of Ammonia PKT Plant-2 was completed in December 2025. This project completion marked a significant milestone in PTPI's ongoing efforts to revitalize the national fertilizer industry, and its success reflects the Company's commitment to continuously improving efficiency, operational reliability, and the competitiveness of the fertilizer industry.
2. Implementation of the PUSRI-IIIB Project
   The PUSRI-IIIB Project is aimed at replacing the PUSRI-III and PUSRI-IV fertilizer plant to improve efficiency, operational reliability, and industrial competitiveness in a sustainable manner. As of December 2025, the PUSRI-IIIB project had progressed to 80.78% against a target of 80.72%, with full operation expected in Q1 2027.
3. Nitrate-Based NPK Project Execution
   The Nitrate-Based NPK project in Cikampek commenced on November 12, 2025. Rekind was selected as the EPC Contractor based on a comprehensive evaluation rooted in the principles of good corporate governance. This project aims to increase domestic NPK production capacity, particularly nitrate-based NPK, which has historically been met through imports. This program not only reduces import dependency but also strategically designed to foster industrial independence to support the national food security mandate. As of December 2025, the project progress reached 3.29% surpassing the target of 3.06%.
4. Soda Ash Project Groundbreaking
   The first pile was successfully installed on October 31, 2025, marking the construction of Indonesia's first soda ash plant, a strategic step towards achieving import substitution and strengthening national industrial independence. This project will also integrate the use of CO2 as a raw material to reduce GHG emissions while producing ammonium chloride for use as fertilizer. Through this initiative, the Company reinforces its commitment to resource optimization and sustainable industrial practices.

To realize these ongoing projects while meeting working capital requirements, capital and funding factors are also important. When managing funding, we follow a prudent financing strategy by optimizing a combination of equity and debt to ensure each strategic project is supported by a healthy and sustainable capital structure. PTPI's funding management capabilities were further bolstered by a rating of idAAA from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) in 2025, affirming the Company's "Very Healthy financial standing.With robust cash flow management, PTPI has been able to repay all maturing bonds, including the repayment of Pupuk Indonesia's Shelf Registration Bond II Phase I Year 2020 Series B (PIHC02BCN1) on September 2, 2025.

Untuk memantau risiko pendanaan, kami melakukan *monitoring* kinerja rasio keuangan yang relevan, antara lain *Debt to Equity Ratio* maupun *Debt to* EBITDA. Hal ini kami lakukan untuk memastikan proyek yang dibiayai masih dalam koridor batasan keuangan yang dipersyaratkan oleh Kreditur.

To monitor funding risk, we monitor the performance of relevant financial ratios, such as the Debt-to-Equity Ratio and Debt-to-EBITDA. We do this to ensure that the financed projects remain within the financial limits required by the creditors.

Dengan proyek berjalan yang ada, yang diiringi dengan strategi pendanaan yang kuat, hal ini menunjukkan PTPI memiliki pendekatan yang cukup tangguh dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional khususnya dalam proses bisnis, investasi proyek, dan pendanaan yang dilakukan.

With existing projects underway and a robust funding strategy in place, PTPI is demonstrating a resilient approach to supporting the national food security agenda, particularly through its streamlined business processes, strategic project investments, and financial optimization.

Pencapaian Target 2025

2025 Target Achievement

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan berhasil merealisasikan kinerja yang selaras dengan target dan arahan strategis Pemegang Saham, mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga disiplin eksekusi serta pencapaian nilai tambah yang berkelanjutan.

In 2025, the Company successfully delivered performances that fully aligned with its targets and the Shareholders' strategic direction, reflecting an unwavering commitment to disciplined execution and the creation of sustainable long-term value.

1. Kinerja Produksi

   Sebagai produsen pupuk *N-based* terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara, Pupuk Indonesia Group memiliki total kapasitas produksi pupuk hingga 14,7 juta ton per tahun. Selain itu, Pupuk Indonesia Group juga memiliki kapasitas produksi amonia sebesar 7,1 juta ton per tahun.

   Pada tahun 2025, Perusahaan berhasil mempertahankan kinerja produksinya dengan pencapaian produksi pupuk 12,53 juta ton atau 99,29% dari target yang tertuang dalam target RKAP 2025. Produksi produk non pupuk mencakup amonia, asam sulfat, dan asam fosfat mencapai 6,63 juta ton atau 101,37% dari RKAP. Rasio konsumsi bahan baku gas untuk amonia, berada lebih rendah dari target RKAP, yaitu sebesar 35,79 MMBTu per ton. Begitu juga dengan rasio konsumsi bahan baku gas urea yang sebesar 27,61 MMBTu per ton dari target 28,00 MMBTu per ton.

   Capaian tersebut selaras dengan rancangan RKAP tahun 2025 yang berfokus pada optimalisasi kapasitas produksi dengan memperhatikan peningkatan efisiensi produksi. Selain itu, Perusahaan turut menerapkan teknologi berbasis Kecerdasan Buatan untuk memastikan operasi dapat berjalan secara andal dan optimal, melalui fasilitas *Production Analytic Center*.

1. Production Performance

   PTPI is the largest N-based fertilizer producer in Asia Pacific, Middle East, and North African regions. It maintains a total annual fertilizer production capacity of 14.7 million tons per year, including an ammonia production capacity of 7.1 million tons per year.

   In 2025, the Company maintained its production performance, with fertilizer production of 12.53 million tons, or 99.29% of the target set out in the 2025 Work Plan and Budget (RKAP). Production of non-fertilizer products, including ammonia, sulfuric acid, and phosphoric acid, reached 6.63 million tons, or 101.37% of the Company's budget (RKAP). The natural gas feedstock consumption ratio for ammonia was optimized at lower than the Work Plan and Budget (RKAP) at 35.79 MMBTu per ton. Similarly, the urea natural gas feedstock consumption ratio was 27.61 MMBTu per ton, outperforming the established target of 28.00 MMBTu per ton.

   These achievements aligned with the 2025 Work Plan and Budget (RKAP), which focus on optimizing production capacity while increasing production efficiency. In addition, the Company is integrating Artificial Intelligence-based technology to ensure reliable and optimal operations through its Production Analytic Center facility.

2. Kinerja Penjualan

   Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah atas kebijakan yang berpihak terhadap sektor pertanian, khususnya atas berbagai perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi memungkinkan petani untuk menebus pupuk bersubsidi dengan mudah, sehingga terjadi peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang tahun 2025. Selain itu, kebijakan penurunan HET sejak 22 Oktober 2025 juga mendorong peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.

   Total penjualan ini terdiri dari penjualan ke sektor subsidi sebesar 8,11 juta ton atau 84,93% dari komitmen kontrak Perusahaan dengan Pemerintah Indonesia, dan penjualan pupuk non subsidi sebesar 4,68 juta ton atau 123,81% dari RKAP. Adapun penjualan produk non pupuk, yang terdiri dari

2. Sales Performance

   The Board of Directors would like to express its profound appreciation and gratitude to the Indonesian Government for its strategic policies and commitment to the agricultural sector, particularly the impactful improvements to the management of subsidized fertilizer governance. Improved management of subsidized fertilizer governance allowed farmers to easily redeem subsidized fertilizer, which resulted in increased distribution of subsidized fertilizer in 2025. Furthermore, the policy of reducing the maximum retail price (HET) since October 22, 2025, catalyzed an increase in the distribution of subsidized fertilizer in 2025.

   This total sales included sales to the subsidized sector of 8.11 million tons, or 84.93% of the Company's contractual commitment with the Indonesian Government, and sales of non-subsidized fertilizers of 4.68 million tons, or 123.81% of the RKAP. Sales of non-fertilizer products, which comprised

amonia, asam sulfat dan asam fosfat, mencapai 1,06 juta ton atau 95,38% dari RKAP.

Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan penjualan ekspor dengan total volume sebesar 2,27 juta ton. Nilai ini meningkat dari 2,04 juta ton pada tahun 2024 sejalan dengan upaya strategis Perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk Perusahaan di kawasan. Permintaan ekspor dari kawasan Asia, Afrika, dan Oceania tetap menjadi peluang bagi Perusahaan untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan regional dan global.

3. Kinerja Keuangan
   Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid pada tahun 2025. Pendapatan Perusahaan mencapai Rp90,40 triliun, didorong oleh peningkatan volume produksi, efisiensi biaya operasional, serta strategi ekspansi pasar yang efektif. Perusahaan juga berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp5,51 triliun atau 113,46% dari RKAP sebagai hasil dari penerapan strategi *operational excellence* dan *cost leadership* sepanjang tahun 2025.

   Kinerja keuangan tersebut dapat dicapai di tengah berbagai tantangan seperti volatilitas harga bahan baku yang merupakan komponen utama biaya produksi pupuk. Perusahaan secara aktif melakukan upaya diversifikasi sumber dan mekanisme kontrak bahan baku non-gas bumi. Perusahaan turut melakukan peningkatan efisiensi produksi dan optimalisasi aset untuk menjaga kestabilan margin keuntungan di tengah tekanan biaya bahan baku. Selain itu, strategi diversifikasi produk dan peningkatan kontribusi dari segmen pupuk non-subsidi serta produk non pupuk, memberikan tambahan sumber pendapatan yang signifikan. Dengan fondasi keuangan yang kuat, Perusahaan optimistis dapat terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

   Dari sisi optimalisasi aset, Perusahaan mencatat realisasi nilai aset sebesar Rp150,18 triliun sampai dengan Desember 2025, atau mencapai 98,57% dari target tahun 2025. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah menjadi salah satu kontributor dalam mendukung penguatan pendapatan non-*core* dan peningkatan produktivitas aset Perusahaan. Selain capaian pendapatan, Perusahaan juga melakukan pemetaan dan klasifikasi aset properti non-*core* di lingkungan Pupuk Indonesia Group. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat 415 aset yang dikelola, terdiri dari 352 aset yang telah terutilisasi dan 63 aset *idle*. Pemetaan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi optimalisasi aset, baik melalui kerja sama pemanfaatan aset, peningkatan utilisasi, maupun penyiapan *pipeline* aset yang memiliki potensi monetisasi.

Perusahaan secara proaktif menjalankan langkah-langkah strategis yang terukur dan terintegrasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta praktik GCG. Evaluasi kinerja dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan baik yang bersumber dari faktor internal, seperti aspek operasional, produksi, efektivitas rantai pasok, maupun dari faktor eksternal, termasuk dinamika kebijakan, kondisi pasar, serta volatilitas harga bahan baku dan energi.

of ammonia, sulfuric acid, and phosphoric acid, reached 1.06 million tons, or 95.38% of the Work Plan and Budget (RKAP).

In 2025, the Company's export sales reached 2.27 million tons, an increase from 2.04 million tons recorded in 2024. This growth aligns with the Company's strategic efforts to expand its market footprint and enhance its product competitiveness within the region. Export demand from Asia, Africa, and Oceania regions continue to be a strategic opportunity for the Company to strengthen its contribution to supporting both regional and global food security.

3. Financial Performance
   The Company recorded solid financial performance growth in 2025. Revenue reached Rp90.40 trillion, driven by increased production volume, cost-focused operational efficiency, and effective market expansion strategy. The Company's net profit reached Rp5.51 trillion, or 113.46% of the Company's Budget (RKAP), reflecting the through rigorous implementation of operational excellence and cost leadership strategies in 2025.

   This financial performance was achieved notwithstanding global market volatility of raw materials price, which represents a major component of fertilizer production costs. The Company actively diversified its procurement sources and optimized contract architecture for non-gas raw materials. The Company also increased production efficiency and optimized assets to maintain stable margin profile against escalating input cost of raw materials. Furthermore, the Company's strategic diversification into non-subsidized fertilizer and industrial chemical segment provided significant additional revenue sources. With a strong financial foundation, the Company is optimistic about its continued growth, reinforcing its pivotal contribution to national food security and sustainable economic development.

   In terms of asset optimization, the Company achieved asset-generated revenue of Rp150.18 trillion as of December 2025, which represents 98.57% of the 2025 target. This achievement demonstrates asset management as a key driver of non-core revenue expansion and enhanced asset productivity. In addition to these financial gains, the Company has completed a mapping and classification of non-core property assets across Pupuk Indonesia Group. Of the 415 assets under management, 352 are actively utilized, while 63 are currently classified as idle. This database provides a critical foundation for our forward-looking asset optimization strategies, enabling strategic collaborations, increased utilization, and a structured pipeline for future asset monetization.

The Company proactively implemented measurable and integrated strategic steps, anchored in the principles of prudence and Implementation of Good Corporate Governance (GCG). PTPI maintained a continuous and comprehensive performance evaluations to identify improvement opportunities, both from internal factors, such as operations, production, and supply chain effectiveness, as well as from external factors, including policy dynamics, market conditions, and the volatility of raw materials and energy price.

Pendekatan ini memastikan penyesuaian strategi dan rencana aksi pada aspek operasional dan komersial, antara lain melalui optimalisasi perencanaan produksi, penyesuaian pola distribusi, serta penguatan koordinasi lintas fungsi dan entitas anak agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien serta dilakukan secara terukur. Pada saat yang sama Perusahaan memperkuat pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi termasuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset, utilisasi aset *idle*, peningkatan efisiensi energi, serta peninjauan kembali struktur biaya guna menjaga daya saing dan keberlanjutan kinerja keuangan.

Dari sisi manajemen kinerja, Perusahaan meningkatkan intensitas pemantauan terhadap profil risiko dan *Key Risk Indicator* (KRI) secara berkala dan berjenjang, sehingga potensi deviasi maupun peningkatan eksposur risiko dapat diidentifikasi lebih dini serta ditindaklanjuti secara tepat waktu. Selain itu, Perusahaan juga melakukan penguatan mitigasi risiko melalui pengamanan sumber pasokan bahan baku, pengamanan likuiditas, serta koordinasi yang lebih intensif dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian dan regulator, guna memastikan keberlangsungan operasional dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.

Direksi senantiasa memastikan bahwa Perusahaan senantiasa adaptif, responsif, dan berdaya saing, dengan penyempurnaan strategi dan perencanaan ke depan. Dengan demikian, Perusahaan tetap berada pada jalur pencapaian sasaran strategis jangka menengah dan panjang, serta mampu menjaga kinerja yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi dan Upaya Solusi yang Dilakukan

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang menjadi bagian dari dinamika dalam menjalankan operasional dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan dan harga gas bumi untuk Pupuk Indonesia Group, serta adanya kenaikan harga gas bumi dibandingkan tahun sebelumnya. Keterbatasan suplai gas bumi, khususnya di Jawa Barat, turut menjadi kendala bagi Perusahaan dalam menyiapkan rencana operasi jangka pendek maupun pengembangan jangka panjang. Untuk itu, Perusahaan telah berkoordinasi dengan SKK Migas, Kementerian ESDM RI, dan seluruh penyedia gas potensial untuk memastikan skema pasokan gas jangka panjang bagi Perusahaan. Perusahaan turut menjajaki pemanfaatan Pipa CISEM-II yang diproyeksikan akan tersambung pada April 2026 untuk transportasi gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam operasional pabrik, Perusahaan telah mengambil berbagai langkah strategis seperti pelaksanaan TA, penggunaan produk substitusi sebagai bahan baku, dan perencanaan kedatangan bahan baku secara lebih *prudent*. TA dilaksanakan sebagai langkah pemeliharaan preventif dan prediktif dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.

Dalam mengantisipasi potensi gangguan dalam suplai bahan baku impor, khususnya fosfat dan potasium, Perusahaan telah melakukan perencanaan kedatangan bahan baku secara lebih *prudent*. Selain itu, Perusahaan turut melakukan diversifikasi sumber bahan baku dan penjajakan kontrak suplai jangka panjang

This approach ensures strategic alignment and action plans across operational and commercial aspects, including optimization of production planning, adjustment of distribution patterns, and strengthening coordination across functions and subsidiaries to ensure all resources are used more effectively, efficiently, and measurably. At the same time, the Company is strengthening cost controls and improving efficiencies, including optimizing asset utilization, utilizing idle assets, increasing energy efficiencies, and reviewing its cost structure to maintain competitiveness and a sustainable financial performance.

In terms of performance management, the Company has intensified its monitoring of its risk profiles and Key Risk Indicators (KRIs) on a regular and tiered basis, ensuring early identification of potential deviations and increased risk exposure and timely action. In addition, the Company has strengthened its risk mitigation efforts by securing raw material supply sources, securing liquidity, and intensifying coordination with relevant stakeholders, including ministries and regulators, to ensure operational continuity and compliance with applicable policies.

The Board of Directors consistently ensures the Company remains adaptive, responsive, and competitive, by continually refining its strategies and forward-looking planning. Consequently, the Company remains on track to achieve its medium and long-term strategic goals, thereby sustaining its performance in support of national food security and inclusive economic growth.

Challenges and Strategic Responses

Throughout 2025, the Company faced obstacles and challenges inherent in operational dynamics while consistently achieving established targets. One such challenge was the availability and price of natural gas for Pupuk Indonesia Group, as well as an increase in natural gas prices compared to the previous year. Limited natural gas supplies, particularly in West Java, also hampered the Company's formulation of both short-term operational strategies and long-term development plans. Therefore, the Company coordinated closely with SKK Migas, the Ministry of Energy and Mineral Resources, and all potential gas suppliers to ensure a long-term gas supply scheme for the Company. The Company is also exploring the use of the CISEM-II Pipeline, scheduled for interconnection in April 2026, for transporting gas from East Java to West Java.

To mitigate operational challenges in plant operations, the Company has initiated strategic steps, such as implementing TA maintenance, using alternative sources of raw materials, and more prudent planning of raw material arrivals. TA was implemented as a comprehensive preventive and predictive maintenance measure, with implementation timelines strictly aligned to the initial plan.

To anticipate potential disruptions in the imported raw materials supply, particularly phosphate and potassium, the Company has optimized synchronization of raw material arrivals more prudently. Additionally, the Company has diversified its raw material procurement sources and explored long-term supply

dengan harga yang kompetitif untuk memastikan ketersediaan bahan baku pada harga yang bersaing. Perusahaan juga melakukan optimasi persediaan produk dengan secara rutin melakukan pemantauan dan penyesuaian kegiatan produksi.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Hal fundamental dari penerapan prinsip GCG adalah komitmen untuk menyelenggarakan prinsip bisnis yang beretika. PTPI menyadari hal itu dan berupaya untuk membentuk organisasi yang mampu mewujudkan prinsip mendasar tersebut, termasuk diantaranya manajemen risiko dan pengendalian internal khususnya dalam mempertanggungjawabkan penyaluran pupuk bersubsidi yang melibatkan permodalan dari Negara Republik Indonesia.

Perwujudan aspek GCG ini terutama dilakukan dengan komitmen dan keberadaan organ-organ yang diperlukan, serta pedoman dan kebijakan yang mengatur peran dan fungsi masing-masing organ. PTPI telah cukup lama membentuk dan melakukan penerapan GCG, baik dalam hal pemenuhan kepatuhan, maupun upaya evaluatif untuk mengukur sejauh mana keberhasilan prinsip-prinsip GCG diterapkan.

Beberapa sorotan penting dalam pengembangan penerapan GCG di sepanjang tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Omnibus Pedoman dan Prosedur
   Secara berkala, Perusahaan terus melakukan pengembangan GCG dari segi regulasi, hal ini ditunjukkan dengan pemutakhiran pedoman dan prosedur mengikuti dinamika perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan juga melakukan penyederhanaan Dokumen Sistem Manajemen (DSM) melalui Omnibus dari 384 DSM menjadi 190 DSM, serta penguatan sistem manajemen mencakup Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Kepatuhan, Sistem Layanan Teknologi Informasi, dan penerapan Pelindungan Data Pribadi.

2. Sistem Pengendalian Intern
   Sistem Pengendalian Intern Perusahaan merupakan suatu kerangka terpadu yang dijalankan oleh manajemen (*risk owner*) melalui aktivitas pengendalian berbasis COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), didukung oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan (mengacu ISO 31000), serta diawasi secara independen oleh Internal Audit sebagai *three line of defense*.

   Evaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP) dilakukan dengan menggunakan *scorecard* yang dikembangkan oleh audit internal dengan mengacu kepada referensi dan ketentuan dari standar Pengendalian Internal yang dikeluarkan oleh COSO. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai kecukupan dan efektivitas 5 (lima) komponen Pengendalian Internal Perusahaan.

   Hasil evaluasi di tahun 2025 di PTPI mendapatkan predikat, "Baik" dengan skor 88,12. Hal tersebut memberikan peluang peningkatan di berbagai aspek, dan telah dikomunikasikan kepada fungsi terkait.

contracts at competitive prices to ensure raw material availability. The Company also optimized its inventory management through routine monitoring and dynamic readjusting of production activities.

Strategic Developments in the Good Corporate Governance Implementation

Central to the Good Corporate Governance (GCG) principles is a strong commitment to ethical business practices. PTPI recognizes this imperative and has strived to establish an organization capable of embodying these fundamental principles, encompassing robust risk management and rigorous internal control - particularly in upholding accountability for the distribution of subsidized fertilizer, which involves the stewardship of capital from the Republic of Indonesia.

The realization of these GCG aspects is primarily achieved through the commitment and presence of the necessary governance organs, as well as guidelines and policies governing the roles and functions of each organ. PTPI has institutionalized and implemented Good Corporate Governance (GCG) for some time, spanning both compliance adherence and strategic evaluation designed to measure the success of these governing principles.

Several key highlights in the development of Good Corporate Governance (GCG) implementation throughout 2025 can be explained as follows:

1. Comprehensive Guidelines and Procedures
   The Company continued to reinforce its Good Corporate Governance (GCG) framework by proactively updating policies, guidelines, and procedures in line with evolving laws and regulation. Furthermore, the Company has simplified its Management System Documents (DSM) through an Omnibus approach, consolidating them from 384 to 190 DSM's. PTPI has also strengthened its management system, including the Quality Management System, Anti-Bribery Management System, Compliance Management System, Information Technology Service System, and the Personal Data Protection.

2. Internal Control System
   The Company's Internal Control System is an integrated framework implemented by management (risk owner) through COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) based control activities, supported by risk management and compliance functions (referring to ISO 31000), and independently supervised by Internal Audit as the three lines of defense.

   Management assesses the effectiveness of the Company's Internal Control System (SPIP) using a scorecard developed by the Internal Audit in alignment with COSO Internal Control - Integrated Framework (2013). The evaluation is conducted by assessing the adequacy and effectiveness of internal control through five internal control dimensions.

   The 2025 PTPI evaluation results were rated "Good" with a score of 88.12. This indicates opportunities for improvement in a number of aspects and has been communicated to relevant functions.

3. Manajemen Risiko

Pelaksanaan sistem manajemen risiko Perusahaan telah dilaksanakan secara terintegrasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam implementasinya, Perusahaan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, khususnya dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Penerapan tersebut dilaksanakan melalui Sistem Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 serta didukung dengan penyempurnaan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan prosedur pendukung implementasinya secara berkala agar selaras dengan perkembangan praktik terbaik, kebutuhan bisnis Perusahaan, dan dinamika lingkungan usaha.

Strategi pengelolaan risiko dikembangkan Perusahaan melalui penerapan pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam aktivitas operasional sehari-hari secara efektif, dengan dukungan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam penyusunan metrik strategi risiko, Perusahaan menggunakan pendekatan pemetaan hubungan antara taksonomi risiko dengan risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi untuk menentukan parameter risiko yang paling relevan dan material terhadap eksposur risiko Perusahaan. Hasil pemetaan tersebut kemudian diprioritisasi sehingga diperoleh metrik atau parameter risiko yang mampu merepresentasikan berbagai aspek risiko secara lebih komprehensif dan mendukung proses pemantauan eksposur risiko secara berkelanjutan.

Untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah efektif dijalankan dan mendukung pencapaian sasaran, maka Perusahaan melakukan penilaian indeks kematangan risiko atau *Risk Maturity Index* (RMI) setiap tahunnya. PTPI telah melakukan penilaian RMI tahun 2025 atas tahun buku 2024 yang dilakukan oleh pihak independen. Hasil penilaian RMI untuk tahun buku 2024 sebesar 3,1 dengan kategori "Praktik yang Baik".

Seluruh Pupuk Indonesia Group telah melakukan tindak lanjut rekomendasi RMI tahun buku 2024 yang harus dilaksanakan di tahun 2025 sebesar 100% atau seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti. Selanjutnya Perusahaan fokus melakukan inventarisir dan tindak lanjut rekomendasi RMI tahun buku 2024 di tahun 2026 dan 2027.

4. Teknologi Informasi dan Upaya Penguatan Akuntabilitas

Perusahaan telah menyusun pedoman strategis TI sebagai panduan yang memastikan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola TI Perusahaan mengacu pada Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 2019. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/03 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Setiap tahun, dalam pelaksanaan audit keuangan perusahaan, bidang TI turut diaudit untuk menilai efektivitas penyelenggaraan TI sesuai standar IT *General Control* (ITGC). Selain itu, Perusahaan juga melakukan penilaian tingkat kematangan tata kelola TI berbasis COBIT 2019 yang dilakukan oleh pihak independen eksternal. Pada tahun 2025, Pupuk Indonesia Group mendapat hasil rata-rata skor tingkat kematangan TI sebesar 4,19, meningkat dibandingkan skor tahun sebelumnya sebesar 3,93.

3. Risk Management

The Company's risk management system has been implemented in an integrated manner as part of strengthening good corporate governance. For its implementation, the Company adhered to the provisions in the Minister of BUMN Regulation PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN, specifically to ensure integrated, effective risk management that supports the achievement of the Company's strategic objectives. This implementation is carried out through an ISO 31000-based Risk Management System and is supported by periodic refinements of the Risk Management Guidelines and supporting procedures to align with developments in best practices, the Company's business needs, and the dynamics of the business environment.

The Company's risk management strategy has been developed through the effective integration of risk management into daily operational activities, supported by active supervision from the Board of Directors and Board of Commissioners. When developing risk strategy metrics, the Company uses an approach that maps the relationship between the risk taxonomy and the identified key risks to determine the most relevant and material risk parameters to the Company's risk exposure. The results of this mapping are then prioritized to obtain risk metrics or parameters that more comprehensively represent the different risk aspects and support the processes.

To ensure risk management is applied effectively and facilitates the achievement of strategic objectives, the Company conducts an annual Risk Maturity Index (RMI) assessment. PTPI commissioned an independent party to conduct the 2025 RMI assessment for the 2024 fiscal year. The resulting RMI assessment for the 2024 fiscal year reached 3.1, categorized as "Good Practice."

The entire Pupuk Indonesia Group has followed up on the RMI recommendations for the 2024 fiscal year, which must all (100%) be implemented in 2025; consequently all mandated recommendations have been completed. The Company will now focus on the comprehensive inventorying and subsequent resolutions of the RMI recommendations for fiscal year 2024 in 2026 and 2027.

4. Information Technology and Efforts to Strengthen Accountability

The Company has developed strategic IT guidelines to ensure the application of IT policies and governance is in accordance with alignment with the Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 2019 framework. This aligns with the Republic of Indonesia Minister of BUMN Regulation No. PER-02/MBU/03 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN. Each year, during the Company's financial audit, the IT function is also audited to assess the effectiveness of IT controls in accordance with IT General Controls (ITGC) standards. In addition, the Company through an independent external party conducts IT governance maturity assessments based on COBIT 2019. In 2025, Pupuk Indonesia Group achieved an average IT maturity score of 4.19, an increase from the previous year's score of 3.93.

Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Layanan TI berstandar internasional standar ISO 20000-1:2018 untuk meningkatkan keandalan layanan TI dalam operasional bisnis Perusahaan. Selain itu, Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai standard ISO 27001:2022 dan berkomitmen menerapkan kebijakan serta melakukan penguatan fungsi *cyber security* yang meliputi aspek tata kelola TI, infrastruktur, aplikasi, dan layanan sesuai Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Perusahaan juga melakukan kerja sama dengan BSSN untuk mengukur tingkat *Cyber Security Maturity* (CSM) secara berkala dan mencapai skor 4,36 pada tahun 2025. Skor tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 3.74. Upaya tersebut merupakan bagian dari penerapan GCG dalam pengelolaan Teknologi Informasi yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keamanan informasi Perusahaan.

Atas berbagai upaya tersebut, PTPI memperoleh beberapa penghargaan baik di lingkup nasional maupun internasional oleh lembaga berkompeten dalam bidang GCG. Selain itu, hasil penilaian atas penerapan GCG yang diindikasikan dari hasil asesmen GCG dengan skor 89,05 berpredikat "Sangat Baik", predikat "*Most Trusted*" dengan skor 88,03 dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Di luar berbagai raihan tersebut, Direksi menekankan pentingnya integritas dalam seluruh tindak tanduk Insan Perusahaan. Nilai integritas menjadi hal paling fundamental, yang akan membawa setiap Insan PTPI untuk dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diemban dalam nilai kemanusiaan. Melalui nilai integritas ini, akan dapat dicapai berbagai hal dari penerapan bisnis beretika, seperti penghormatan pada Hak Asasi Manusia, hingga upaya menciptakan profitabilitas yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

To enhance the reliability of its IT services in the business operations, the Company has implemented an IT Service Management System that meets the international ISO 20000-1:2018 standards. Furthermore, the Company has implemented an Information Security Management System (ISMS) in accordance with the ISO 27001:2022 standard, and is committed to implementing policies and strengthening cybersecurity functions, encompassing IT governance, infrastructure, applications, and services, in accordance with Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The Company also collaborates with the National Cyber Security Agency (BSSN) to periodically measure its Cyber Security Maturity (CSM) level, achieving a score of 4.36 in 2025, an increase from the previous year's score of 3.74. These initiatives are integral part of Information Technology management GCG implementation, designed to bolster the Company's transparency, accountability, and information security.

In recognition of these efforts, PTPI received several national and international awards from competent GCG institutions. In addition, its GCG implementation evidenced by a GCG assessment score of 89.05 (Very Good), a "Most Trusted" rating of 88.03 in the Corporate Governance Perception Index (CGPI).

Beyond these achievements, the Board of Directors has underscored the importance of integrity in all actions by the Company's employees. Integrity is the most fundamental principle, guiding every PTPI's employee to act in accordance with the noble values imbued in humanity. Through this integrity, several goals can be achieved, ranging from the implementation of ethical business practices, such as respecting human rights, to the efforts to create responsible and sustainable profitability.

Mengintegrasikan Keberlanjutan dalam Bisnis Perusahaan

PTPI telah mengidentifikasi berbagai dampak mendasar dari bisnis yang dijalankan, baik dampak ekonomi, sosial, lingkungan, maupun tata kelola. Salah satu strategi penting dari identifikasi tersebut adalah *roadmap* dekarbonisasi dengan tujuan besar menciptakan bisnis sektor pupuk yang bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Pada tahun 2025, Perusahaan mencapai realisasi penurunan emisi sebesar 2.275.205 ton CO_2eq dari realisasi KPI penurunan emisi 1.662.923 ton CO_2eq melalui implementasi efisiensi energi, *fuel switching*, *green energy*, utilisasi CO_2, kendaraan listrik, dan berbagai program lainnya, yang dihitung berdasarkan realisasi penurunan emisi level proyek dari program dekarbonisasi tersebut.

PTPI juga mengembangkan program *Nature-Based Solution* (NBS) sebagai salah satu strategi dekarbonisasi. NBS adalah pendekatan strategis yang mengintegrasikan konservasi, restorasi, dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan guna mengatasi tantangan perubahan iklim sekaligus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penerapan NBS tidak hanya bertujuan untuk menurunkan emisi karbon, tetapi juga untuk memperkuat keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan wilayah

Integrating Sustainability into Corporate Business

PTPI has identified several fundamental impacts of its business operations, including economic, social, environmental, and governance impacts. One key strategy from this identification was a decarbonization roadmap, with the overarching goal of creating an environmentally responsible fertilizer business. In 2025, the Company achieved a total emission reduction of 2,275,205 tons CO_2eq, from realization of KPI for emissions reduction of 1,662,923 tons CO_2eq, through the implementation of energy efficiency, fuel switching, green energy, CO_2 utilization, electric vehicles, and other programs, calculated based on the actual reduction in emissions at the project level resulting from those decarbonization programs.

PTPI is also developing a Nature-Based Solution (NBS) program as a part of decarbonization strategy. NBS represents a strategic approach that integrates conservation, restoration, and sustainable ecosystem management to address the challenges of climate change while delivering multifaceted social, economic, and environmental benefits. NBS aims not only to reduce carbon emissions but also to strengthen biodiversity, increase the resilience of operational areas to climate disasters,

operasional terhadap bencana iklim, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar melalui sistem *agroforestry* dan kegiatan *forestry* lainnya. Pada tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan program *agroforestry* dengan luas lahan 245 Ha, selesai persiapan lahan *agroforestry* 755 Ha, serta inventori program NBS dari entitas anak sebesar 294 Ha, sehingga total tercapai 1.294 Ha.

Selain itu, PTPI juga berupaya memantau kemajuan perkembangan agenda keberlanjutan yang diusung. Berdasarkan hasil penilaian S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, PTPI mencatat peningkatan skor ESG menjadi 61 dari 56 pada tahun 2024, mencerminkan penguatan kinerja keberlanjutan yang konsisten dan posisi yang signifikan di atas rata-rata industri kimia. Kenaikan ini terutama ditopang oleh penguatan dimensi lingkungan yang meningkat menjadi 59 dari 49, melalui perbaikan pada tata kelola dan/atau pengungkapan kebijakan dan manajemen lingkungan, strategi iklim, serta pengelolaan air dan limbah.

Selain itu, dimensi tata kelola turut mengalami peningkatan menjadi 59 dari 51, didorong oleh tata kelola dan/atau pengungkapan penguatan praktik etika bisnis, manajemen risiko, dan *policy influence*. Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan tren kinerja ESG yang semakin solid dan kompetitif, sekaligus menggarisbawahi komitmen Perusahaan untuk terus mendorong peningkatan berkelanjutan pada area prioritas guna memperkuat daya saing dan kredibilitas di tingkat global, yang turut tercermin dari terpilihnya PTPI dalam S&P Global Sustainability Yearbook 2026.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2025, Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Gusrizal, Bob Indiarto, dan Panji Winanteya Ruky yang masing-masing menjabat sebagai Wakil Direktur Utama, Direktur Produksi, dan Direktur Transformasi Bisnis. Pada kesempatan yang sama, Pemegang Saham juga memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PTPI sebagai berikut:

and create added value for the surrounding communities through agroforestry systems and other forestry activities. In 2025, the Company implemented an agroforestry program covering 245 hectares, completed land preparation across 755 hectares, and secured an inventory of 294 hectares of NBS programs from its subsidiaries, bringing the cumulative total to 1,294 hectares.

In addition, PTPI is also working to monitor the progress of its sustainability agenda. Based on the results of the 2025 S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), PTPI recorded an improvement in its ESG score to 61 from 56 in 2024, reflecting a consistent strengthening of its sustainability performance and a significantly higher position than the chemical industry average. This increase was primarily driven by a strengthening of the environmental dimension, which rose to 59 from 49, following improvements in governance and/or disclosure of environmental policies and management, climate strategy, and water and waste management.

In addition, the governance dimension also increased to 59 from 51, due to governance and/or disclosure of strengthening business ethics practices, risk management, and policy influence. Overall, these achievements confirmed the increasingly solid and competitive ESG performance trend, while also underscoring the Company's commitment to consistently driving improvement in priority areas to strengthen its competitiveness and credibility globally. This was also reflected in PTPI's selection in the S&P Global Sustainability Yearbook 2026.

Changes in the Composition of the Board of Directors

At the AGMS held on June 16, 2025, the Shareholders resolved to honorably dismiss Gusrizal, Bob Indiarto, and Panji Winanteya Ruky, who served as Vice President Director, Production Director, and Director of Business Transformation, respectively. At the same time, the Shareholders resolved to change the nomenclature of the PTPI Board of Directors as follows:

Wakil Direktur Utama Vice President Director	→	**menjadi** became	→	**Ditiadakan** Eliminated
Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	→	**menjadi** became	→	**Direktur Manajemen Aset** Director of Asset Management
Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	→	**menjadi** became	→	**Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum** Director of Human Capital and General Affairs
Direktur Pemasaran Director of Marketing	→	**menjadi** became	→	**Direktur Supply Chain** Director of Supply Chain
Direktur Produksi Director of Production	→	**menjadi** became	→	**Direktur Operasi** Director of Operations
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Director of Portfolio and Business Development	→	**menjadi** became	→	**Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis** Director of Technical and Business Development

Perubahan nomenklatur jabatan Direksi merupakan bagian dari transformasi struktural untuk memperkuat struktur kepemimpinan yang selaras dengan kebutuhan strategis dan tantangan yang dihadapi. Perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Operasi mencerminkan perluasan mandat yang tidak hanya berfokus pada aktivitas produksi, tetapi juga kesinambungan *end-to-end* operasional perusahaan, termasuk pada aspek penguatan sinergi dengan fungsi penjualan dan integrasi digitalisasi di seluruh proses bisnis.

The changes in the nomenclature of the Board of Directors position was part of a structural transformation to strengthen the leadership structure, aligning it with strategic needs and the challenges faced. The change in nomenclature to the Operations Directorate reflected an expanded mandate that focuses not only on production activities but also on the end-to-end operational sustainability. This change strengthens synergies with the sales function and integrating digitalization across all business processes.

Penguatan pengelolaan rantai pasok turut dilakukan sejalan dengan amanat Perpres No. 6 Tahun 2025 yang memberikan tanggung jawab penuh pada Perusahaan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga dilakukan perubahan nomenklatur Direktorat Pemasaran menjadi Direktorat Supply Chain. Selain itu, arahan strategis Pemerintah untuk meningkatkan *Return on Asset* ditindaklanjuti dengan pembentukan Direktorat Manajemen Aset, untuk mengoptimalisasi aset Perusahaan. Perubahan nomenklatur Direktorat Teknik dan Pengembangan Bisnis bertujuan untuk mempertegas peran strategis dalam mengawal kesiapan teknis dan mendorong akselerasi berbagai inisiatif pengembangan Perusahaan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Dalam RUPS yang sama, Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkat Dwi Satriyo Annurogo sebagai Direktur Operasi dan Robby Setiabudi Madjid untuk menjabat Direktur Supply Chain. Dengan demikian, susunan Direksi di akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama: Rahmad Pribadi
2. Direktur Operasi: Dwi Satriyo Annurogo
3. Direktur Keuangan: Wono Budi Tjahyono
4. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Tina T. Kemala Intan
5. Direktur Supply Chain: Robby Setiabudi Madjid
6. Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis: Jamsaton Nababan
7. Direktur Manajemen Risiko: Ninis Kesuma Adriani
8. Direktur Manajemen Aset: Tri Wahyudi Saleh

Per 31 Desember 2025 hingga diterbitkannya Laporan Tahunan ini, tidak terdapat perubahan susunan Direksi.

Prospek Usaha

Kebutuhan pupuk di Indonesia diproyeksikan akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan populasi dan perluasan target swasembada Pemerintah di seluruh sektor pertanian. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam mendukung swasembada pangan dan energi, termasuk implementasi B50 Biodiesel, berimplikasi langsung pada peningkatan permintaan pupuk dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, penerbitan Perpres No. 113 Tahun 2025 turut menjadi pendorong pertumbuhan bagi Perusahaan melalui kebijakan subsidi yang berorientasi efisiensi dan daya saing. Sejalan dengan tren peningkatan kinerja keberlanjutan di industri, Perusahaan memandang adanya peluang untuk menghadirkan inovasi produk yang lebih efisien, rendah emisi, dan bernilai tambah tinggi.

Tren peningkatan penggunaan pupuk majemuk menuntut Perusahaan untuk dapat memperkuat bisnis *agrichemical*, khususnya melalui peningkatan kapasitas produksi NPK dan berbagai strategi pengamanan pasokan bahan baku fosfat dan kalium. Selain itu, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%, industri petrokimia dituntut untuk memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, khususnya untuk substitusi produk impor. Untuk itu PTPI, memiliki aspirasi menjadi *industrial & specialty chemical powerhouse* di Indonesia.

Dalam merespons prospek bisnis tersebut, PTPI mempercepat pengembangan proyek, meningkatkan efisiensi dan daya saing produk, serta mendorong diversifikasi ke produk petrokimia bernilai tambah dan rendah karbon, termasuk *clean ammonia*. Strategi ini

Strengthening the supply chain management was also carried out in line with the mandate in the Presidential Regulation No. 6 of 2025, which gave the Company full responsibility for the distribution of subsidized fertilizer. Consequently, the Marketing Directorate nomenclature has been changed to the Supply Chain Directorate. Furthermore, the Government's strategic direction to increase Return on Assets has been realized through the establishment of an Asset Management Directorate, to optimize the Company's assets. The nomenclature change to the Engineering and Business Development Directorate aim is to emphasize its strategic role in supervising technical readiness and driving the acceleration of the Company's development initiatives in support of long-term growth.

At the same GMS, Shareholders decided to appoint Dwi Satriyo Annurogo as Operations Director and Robby Setiabudi Madjid as Supply Chain Director. Therefore, the Board of Directors composition at the end of 2025 was as follows:

1. President Director: Rahmad Pribadi
2. Director of Operations: Dwi Satriyo Annurogo
3. Director of Finance: Wono Budi Tjahyono
4. Director of Human Capital and General Affairs: Tina T. Kemala Intan
5. Director of Supply Chain: Robby Setiabudi Madjid
6. Director of Technic and Business Development: Jamsaton Nababan
7. Director of Risk Management: Ninis Kesuma Adriani
8. Director of Asset Management: Tri Wahyudi Saleh

Between December 31, 2025 and the publication of this Annual Report there have been no changes to the Board of Directors.

Business Prospect

Domestic fertilizer demand is projected to maintain its upward trajectory in line with population growth and the expansion of the Government's self-sufficiency targets across all agricultural sectors. The Government's focus on food and energy self-sufficiency - through agricultural land intensification and extensification programs including the B50 biodiesel mandate - represents a structural driver for sustained fertilizer demand in the coming years. In addition, Presidential Regulation No. 113 of 2025 will also serve as a growth driver for the Company through a subsidy policy oriented towards efficiency and competitiveness. Aligning with the global transition toward sustainability performance in the industry, the Company is accelerating the introduction of product innovations that are more efficient, with low-emissions, and high-added value.

The increasing demand for compound fertilizers necessitates that the Company strengthen its agrichemical business, particularly by expanding NPK production capacity and implementing strategies to secure the supply of phosphate and potassium as raw materials. In addition, to support Indonesia's 8% economic growth target, the petrochemical industry is required to solidify its domestic production capabilities and accelerate import substitution. To this end, PTPI's aspiration is to become a leading industrial and specialty chemical powerhouse in Indonesia.

In response to these business prospects, PTPI is accelerating project development, enhancing product efficiency and competitiveness, and encouraging diversification into value-added and low-carbon petrochemical products, including clean ammonia. This strategy is

dirancang untuk memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional. Selain 4 (empat) proyek pengembangan yang telah terlaksana pada tahun 2025, Perusahaan akan terus memperkuat kapasitas dan efisiensi produksi melalui 3 (tiga) proyek, yaitu:

1. Proyek Amonia-Urea Papua Barat
   Proyek ini bertujuan untuk memonetisasi gas bumi di wilayah timur Indonesia yang melimpah dengan harga yang kompetitif. Selain itu, proyek ini sejalan dengan rencana Pemerintah untuk pengembangan ekonomi di wilayah timur Indonesia, khususnya sektor pertanian. Saat ini Perusahaan sedang dalam tahap evaluasi lokasi rencana pembangunan proyek untuk memastikan proyek dapat dijalankan secara layak, baik dari sisi teknis maupun finansial.
2. Proyek Amonia-Urea PIM-3
   Selain di Papua Barat, Perusahaan turut menjajaki potensi suplai gas bumi yang melimpah di Aceh. Dengan ketersediaan gas dalam jumlah dan harga yang memadai, Perusahaan telah menyiapkan rencana pembangunan pabrik amonia-urea di Lhokseumawe. Lokasi ini dinilai strategis pada jalur pelayaran internasional serta didukung potensi *Arun Field* sebagai *Carbon Storage (CCS)* sehingga berpeluang menjadi pusat ekosistem energi baru.
3. Proyek NPK Phonska VI
   Selain proyek amonia-urea, Perusahaan juga telah menyiapkan rencana peningkatan kapasitas produksi NPK seiring peningkatan alokasi pupuk NPK bersubsidi oleh Pemerintah dan pertumbuhan pasar NPK domestik. Proyek ini akan dilaksanakan di Gresik dengan target dimulai pada Triwulan II 2026.

Perusahaan turut mengembangkan portofolio usaha ke industri petrokimia melalui pembangunan pabrik methanol dan turunannya, sebagai bagian dari strategi hilirisasi gas bumi. Inisiatif ini diarahkan untuk mendorong substitusi produk impor sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik. Dengan demikian, PTPI turut memperkuat ketahanan industri nasional dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Perusahaan juga akan memperkuat tata kelola manajemen aset melalui penyempurnaan mekanisme persetujuan kerja sama pemanfaatan aset, penerapan prinsip ISO 55000, formulasi harga sewa yang lebih objektif, serta digitalisasi data aset properti. Inisiatif ini diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi nilai kerja sama, dan mengoptimalkan aset yang memiliki potensi ekonomi. Penguatan tersebut juga mencakup evaluasi aset kantor pemasaran wilayah dan gudang, termasuk aset di atas lahan pihak ketiga, agar lebih efisien, produktif, serta mendukung *core business* melalui peningkatan kualitas gudang dan ketahanan rantai distribusi pupuk. Selain itu, digitalisasi aset dapat diperluas melalui penerapan *building automation system* pada aset tertentu untuk meningkatkan efisiensi listrik dan memperkuat kontribusi pengelolaan aset terhadap agenda ESG Perusahaan

Dengan prospek yang cukup positif, Pupuk Indonesia Group secara optimis memproyeksikan peningkatan volume produksi dan volume penjualan, yang terutama didorong kebutuhan Pemerintah Indonesia akan kenaikan alokasi penyaluran produk Pupuk *Public Service Obligation* (PSO) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No. 1360/Kpts/Hk.150/M/12/2025 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi

designed to ensure sustainable business growth while supporting the national energy transition agenda. In addition to the four development projects already implemented in 2025, the Company will continue to strengthen its production capacity and efficiency through three main projects:

1. West Papua Ammonia-Urea Project
   This project aims to monetize the abundant natural gas resources in eastern Indonesia at competitive prices. In addition, this project aligns with the Government's plan for regional economic development in eastern Indonesia, particularly in the agricultural sector. The Company is currently conducting a rigorous evaluation of proposed project development locations to ensure both technical and financial feasibility.
2. PIM-3 Ammonia-Urea Project
   In addition to West Papua, the Company is exploring the potential of abundant natural gas reserves in Aceh. With adequate natural gas availability and affordability, the Company has prepared development plans to construct an ammonia-urea plant in Lhokseumawe, Aceh. This location is strategically positioned along international shipping routes and further enhanced by the potential for CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) integration facilities in Arun, establishing a potential hub for a new energy ecosystem.
3. Phonska VI NPK Project
   In addition to the ammonia-urea project, the Company has also prepared development plans to expand NPK production capacity in alignment with the Government's increased allocation of subsidized NPK fertilizer and the growth of domestic NPK market. This project will be implemented in Gresik with a targeted commencement date in Q2 2026.

The Company is also actively expanding its business portfolio into the petrochemical industry by establishing a methanol and derivatives plant, as a key component of Its natural gas downstreaming strategy. This initiative is aimed at fostering import substitution and increasing the value-added potential of domestic resources. In doing so, PTPI is contributing to the strengthening of national industrial resilience and the optimization of domestic natural gas utilization.

The Company has also strengthened its asset management governance by refining the asset utilization cooperation agreement mechanism, implementing ISO 55000 principles, formulating more objective rental prices, and digitizing property asset data. These initiatives are aimed at accelerating decision-making, increasing transparency in the value of partnerships, and optimizing assets with economic potential. This strengthening also includes evaluating regional marketing office and warehouse assets, including assets on third-party land, to ensure greater efficiency and productivity, and to support the core business by improving warehouse quality and the resilience of the fertilizer distribution chains. In addition, asset digitization can be expanded through building automation systems on certain assets to improve electricity efficiency and strengthen asset management's contribution to the Company's ESG agenda.

With a positive outlook, PTPI projects a steady increase in production and sales volumes, driven primarily by the Government's requirement for increased distribution allocation of Public Service Obligation (PSO) fertilizer products, as stipulated in the Republic of Indonesia Minister of Agriculture Decree No. 1360/Kpts/Hk.150/M/12/2025 concerning the Allocation of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector in the 2026 Fiscal Year. An increase in sales volume, a shift

Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2026. Kenaikan volume pemasaran, perubahan skema subsidi dari *Cost+* menjadi *Marked to Market,* efisiensi produksi melalui rekonfigurasi pabrik, dan asumsi perpanjangan HGBT diproyeksikan menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas Perusahaan pada tahun 2026.

Penutup

Atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pencapaian kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2025. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang terus mendukung penyempurnaan tata kelola pupuk bersubsidi, sehingga PTPI dapat menjalankan mandat sebagai pendukung ketahanan pangan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas kepercayaan serta arahan yang diberikan kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan.

Direksi turut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran manajemen dan insan Pupuk Indonesia atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan amanat yang diembankan kepada Perusahaan. Pencapaian kinerja PTPI merupakan buah kolaborasi dan kerja keras seluruh insan Pupuk Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, kami mengapresiasi segala dukungan dan kepercayaan petani dan mitra usaha PTPI di seluruh Indonesia. Hubungan baik antara PTPI dengan para petani merupakan fondasi yang kokoh dalam mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Seluruh kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini menjadi modal penting bagi PTPI dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan cita-cita besar tentang kemandirian Bangsa Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

in the subsidy scheme from Cost+ to Marked to Market, production efficiencies achieved through plant reconfiguration, and the assumption that the Specific Natural Gas Prices (HGBT) will be extended are projected to be the main drivers of the Company's revenue growth and profitability in 2026.

Conclusion

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our sincere appreciation to our diverse stakeholders for their steadfast support throughout 2025. We would like to extend our immense and profound gratitude to the Government for its ongoing commitment to enhancing the governance of the subsidized fertilizer framework, which has empowered PTPI to effectively fulfill its mandate as a cornerstone of national food security. We also would like to express our earnest appreciation to the Shareholders and the Board of Commissioners for their trust and strategic guidance in managing the Company.

The Board of Directors would also like to convey its commendation to the management team and all employees of Pupuk Indonesia for their unwavering dedication and discipline in carrying out the mandate entrusted to the Company. PTPI's robust performance in 2025 is a direct testament to the collective efforts and hard-work of all Pupuk Indonesia's employees.

With deep humility, we acknowledge the trust and support of farmers and business partners across Indonesia. The abiding commitment between Pupuk Indonesia and farmers provides the strategic bedrock upon which national food security is realized. This collaborative ecosystem is a vital asset, fostering Pupuk Indonesia and its stakeholders to contribute meaningfully to the nation's grand vision of independence and sovereignty to sustain enduring national food security.

Jakarta, 11 Mei 2026
Jakarta, May 11, 2026

Atas nama Direksi dan Seluruh Jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero)
On behalf of the Board of Directors and all levels of PT Pupuk Indonesia (Persero)



Rahmad Pribadi
Direktur Utama
President Director

Dewan Komisaris
Board of Commissioners





Dari Kiri Ke Kanan
From Left to Right

1

Yovie Widianto
Komisaris
Commissioner

2

Chrisna Deva Priyapratama
Komisaris Independen
Independent Commissioner

3

Sudaryono
Komisaris Utama
President Commissioner

4

Suwandi
Komisaris
Commissioner

5

Dadan Kusdiana
Komisaris
Commissioner

6

Irfan Ahmad Fauzi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

7

Nurul Ichwan
Komisaris
Commissioner

8

Rachlan S Nashidik
Komisaris Independen
Independent Commissioner

9

Iwan Sumule
Komisaris
Commissioner

Direksi
Board of Directors





Dari Kiri Ke Kanan
From Left to Right

1

Tina T. Kemala Intan
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Director of Human Capital and General Affairs

2

Rahmad Pribadi
Direktur Utama
President Director

3

Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Operasi
Director of Operation

4

Robby Setiabudi Madjid
Direktur Supply Chain
Director of Supply Chain

5

Tri Wahyudi Saleh
Direktur Manajemen Aset
Director of Asset Management

6

Ninis Kesuma Adriani
Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management

7

Wono Budi Tjahyono
Direktur Keuangan
Director of Finance

8

Jamsaton Nababan
Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis
Director of Technical and Business Development

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Pupuk Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PTPI tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Mei 2026
Jakarta, May 11, 2026

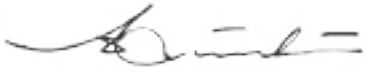
Dewan Komisaris
Board of Commissioners



SUDARYONO
Komisaris Utama
President Commissioner



IRFAN AHMAD FAUZI
Komisaris Independen
Independent Commissioner



RACHLAN S NASHIDIK
Komisaris Independen
Independent Commissioner



CHRISNA DEVA PRIYAPRATAMA
Komisaris Independen
Independent Commissioner



IWAN SUMULE
Komisaris
Commissioner



NURUL ICHWAN
Komisaris
Commissioner



YOVIE WIDIANTO
Komisaris
Commissioner



SUWANDI
Komisaris
Commissioner



DADAN KUSDIANA
Komisaris
Commissioner

Statement by the Members of Directors and Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero)

We, the undersigned, testify that all information in the 2025 Annual Report of PTPI is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 11 Mei 2026
Jakarta, May 11, 2026

Direksi
Board of Directors

RAHMAD PRIBADI
Direktur Utama
President Director

DWI SATRIYO ANNUROGO
Direktur Operasi
Director of Operations

WONO BUDI TJAHYONO
Direktur Keuangan
Director of Finance

TINA T. KEMALA INTAN
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Director of Human Capital and General Affairs

ROBBY SETIABUDI MADJID
Direktur Supply Chain
Director of Supply Chain

JAMSATON NABABAN
Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis
Director of Technical & Business Development

NINIS KESUMA ADRIANI
Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management

TRI WAHYUDI SALEH
Direktur Manajemen Aset
Director of Asset Management



Profil Perusahaan

Company Profile


03

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan
Company General Information and Identity



Nama Perusahaan Company Name	**PT Pupuk Indonesia (Persero)**
Informasi Perubahan Nama Perusahaan Information Concerning Company Name Change	Tidak terdapat perubahan nama Perusahaan pada tahun buku 2025. Informasi terperinci terkait perubahan nama sejak awal berdiri, disampaikan pada pembahasan Riwayat Singkat Perusahaan, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini. There was no change in the Company's name during the 2025 fiscal year. Detailed information regarding name changes since its establishment can be found in the Brief History of the Company section of this Annual Report.
Tanggal Pendirian Date of Establishment	3 Januari 1970 January 3, 1970
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20. Deed No. 4 dated January 3, 1970 made before Soeleman Ardjasasmita, Notary in Jakarta, which was approved based on the Excerpt from the Register of Determination of the Minister of Justice decree No.J.A.5/7/20 dated February 7, 1970.
Jaringan Usaha Business Network	Jaringan usaha melalui 9 (sembilan) Entitas Anak Kepemilikan Langsung yang menaungi berbagai entitas, baik Entitas Anak Tidak Langsung, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia. Business network through 9 Direct Ownership Subsidiaries that oversee entities, including Indirect Subsidiaries, Associated Entities and Joint Ventures, supported by an extensive distribution network spanning all regions of Indonesia.
Tujuan dan Kegiatan Objectives and Activities	Melakukan usaha pengelolaan (manajemen) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. To engage in the management of the Company, as well as in trading and services in the fields of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals, other chemicals, and agroindustry, in order to produce high-quality and highly competitive goods and/or services to generate profits and optimize the utilization of the Company's resources in accordance with the principles of good corporate governance.
Kepemilikan Saham Share Ownership	• Negara Republik Indonesia: 1 saham Seri A Dwiwarna • PT Danantara Asset Management (Persero) yang sebelumnya bernama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero): 24.999.999 saham Seri B • Republic of Indonesia: 1 Series A Dwiwarna share • PT Danantara Asset Management (Persero), previously named PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero): 24,999,999 Series B shares
Modal Dasar Authorized Capital	Rp100.000.000.000.000 Seratus triliun rupiah One hundred trillion rupiah
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued & Fully Paid Up Capital	Rp25.000.000.000.000 Dua puluh lima triliun rupiah Twenty-five trillion rupiah
Jumlah Karyawan Total Employees	7.882 Karyawan (PKWT & PKWTT) 7,882 Employees (PKWT & PKWTT)
Bursa Efek Stock Exchange	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Kode Obligasi & Peringkatnya Bond Code and Rating	• PIHC02CCN1 (idAAA) Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C • PIHC02BCN2 (idAAA) Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B • PIHC02CCN2 (idAAA) Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C • PIHC02CCN1 (idAAA) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2020 Series C • PIHC02BCN2 (idAAA) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2021 Series B • PIHC02CCN2 (idAAA) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2021 Series C

Akses Terhadap Perusahaan Termasuk Kantor Cabang atau Perwakilan

Access to the Company, including branch offices or representative offices

Jaringan Kantor Office Network	Alamat dan Kontak Address and Contact

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Kantor Pusat
Head Office

Jl. Taman Anggrek - Kemanggisan Jaya
Jakarta Barat 11480 DKI Jakarta-Indonesia
Telp: +62 21 53654900
Fax: +62 21 5481 755
E-mail: info@pupuk-indonesia.com

Situs Web | Website
www.pupuk-indonesia.com

Layanan Keluhan Pelanggan
Customer Complaints Service
konsumen@pupuk-indonesia.com

WhatsApp (Layanan Pelanggan)
Customer Service
+62-811-1000-1959

Layanan Pelanggan Bebas Pulsa
Toll-Free Customer Service
0800-100-800-1

Media Sosial | Social Media

Facebook	: PT Pupuk Indonesia
X	: @pupuk_indonesia
Instagram	: pt.pupukindonesia
YouTube	: PTPupukIndonesiaOfficial
TikTok	: pupuk.indonesia

Entitas Anak Kepemilikan Langsung
Direct Ownership Subsidiaries

PT Petrokimia Gresik	Jl. Jend. A. Yani, Gresik 61119, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 398 1811; 398 2100; 398 2200 *Fax*: +62 31 398 1722; 398 2272 *E-mail*: pg@petrokimia-gresik.com Web: www.petrokimia-gresik.com
PT Pupuk Kujang	Jl. Jend. A. Yani No. 39 Kec. Cikampek, Kab. Karawang 41373, Jawa Barat, Indonesia Telp: +62 264 316 141; 317 007 *Fax*: +62 264 314 235 *E-mail*: info@pupuk-kujang.co.id Web: www.pupuk-kujang.co.id
PT Pupuk Kalimantan Timur	Jl. Ir. James Simandjuntak No. 1, Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Bontang 75313 Kalimantan Timur, Indonesia Telp: +62 548 41202 *Fax*: +62 548 41626 *E-mail*: dof@pupukkaltim.com Web: www.pupukkaltim.com
PT Pupuk Iskandar Muda	Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh, Indonesia Telp: +62 645 56222. *Fax*: +62 645 56095. *E-mail*: info@pim.co.id Web: www.pim.co.id
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Jl. Mayor Zen, Palembang 30118, Indonesia Tel: +62 711 712 222 *Fax*: +62 711 712 100 *E-mail*: info@pusri.co.id humas@pusri.co.id Web: www.pusri.co.id
PT Rekayasa Industri	Gedung Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 Indonesia Telp: +62 21 798 8700; 798 8707 *Fax*: +62 21 798 8701; 798 8702 *E-mail*: corpsec@rekayasa.co.id Web: www.rekayasa.com
PT Pupuk Indonesia Niaga	Gedung Rekayasa Industri Gedung ROB-2 Lt. 3 & 4 Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 Indonesia Telp: +62 21 7919 6026; 7919 6027 *E-mail*: corcom@pi-niaga.com Web: www.pi-niaga.com
PT Pupuk Indonesia Logistik	Gedung Wisma Pusri 101 Jl. Letjend. S. Parman Kav. 101 RT/RW. 2/1 Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta 11440 Indonesia Telp: +62 21 2263 1881; 2263 1882; 2263 1883 *Fax*: +62 21 2256 1904 *E-mail*: info@pi-logistik.com marketing@pi-logistik.com Web: www.pi-logistik.com

Jaringan Kantor Office Network	Alamat dan Kontak Address and Contact
PT Pupuk Indonesia Pangan	Gedung Rekayasa Industri Gd. ROB-1, Lt. 1 Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, 12740 Indonesia Telp: +62 21 2286665 *Fax*: +62 21 2286665 *E-mail*: info@pi-pangan.com Web: www.pi-pangan.com
Entitas Anak Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership Subsidiaries	
PT Petrosida Gresik	Jl. KIG Raya Utara Kav. O No. 5 Kawasan Industri Gresik (KIG), Gresik 61151 Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 398 1553, 398 5541-42, 398 5594 *Fax*: +62 31 398 1653 *E-mail*: corporate@petrosida-gresik.com Web: www.petrosida-gresik.com
PT Petrokimia Kayaku	Jl. Jenderal Ahmad Yani PO Box 107 Gresik, 61119 Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 398 1815/1831/1989 *Fax*: +62 31 398 1830 *E-mail*: info@petrokayaku.com Web: www.petrokayaku.com
PT Kawasan Industri Kujang Cikampek	Kawasan Industri Kujang Cikampek, Jl. Jend. A. Yani No. 39 Cikampek, Jawa Barat, Indonesia Telp: +62 264 313113 *Fax*: +62 264 313114 *E-mail*: info@kikc.co.id Web: www.kikc.co.id
PT Sintas Kurama Perdana	Kawasan Industri Kujang Cikampek, Jl. Jend. A. Yani No. 39 Kalihurip, Cikampek, Jawa Barat 41373 Indonesia Telp: +62 264 313392 *Fax*: +62 264 313043 *E-mail*: sales@sintas90.co.id Web: www.sintas90.co.id
PT Kaltim Industrial Estate	Wisma KIE, Lt. 3 Kawasan Industri Bontang, Jl. Paku Aji Kav. 79 Bontang 75313 Kalimantan Timur, Indonesia Telp: +62 548 41368 *E-mail*: contact@kie.co.id
PT Pusri Agro Lestari	Kawasan Industri Karawang Sukses Makmur, Dusun Sukamaju, Desa Telukjambe, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat-41361 *E-mail*: pusriagrolestari@gmail.com Web: www.pusriagro.co.id
PT PIM Prima Medika	Jl. Singgalang No. 1 PIM Housing Komp. Tambon Tunong, Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh, Indonesia Telp: +62 822 7262 8796 *E-mail*: info@ptprime.id; rspim@ptprime.id
PT Rekind Daya Mamuju	Jl. MT. Haryono No. 8 Tebet Jakarta 12820 Indonesia Telp: +62 21 837 89152; 837 85961 *Fax*: +62 21 830 7578 *E-mail*: info@rdm.co.id *Web*: www.rdm.co.id
PT Puspetindo	Gedung Gresik Migas Tower Lt. 2 Jl. Dr. Wahidin S.H. No. 708 Kembangan, Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61124 Indonesia Telp: +62 31 99103048 *E-mail*: info@puspetindo.com *Web*: www.puspetindo.com
PT Yasa Industri Nusantara	Jl. Kalibata Timur No. 36 RT/RW. 2/8 Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740 Indonesia Telp: +62 21 79187800 *Fax*: +62 21 7942030

Jaringan Kantor Office Network	Alamat dan Kontak Address and Contact
PT Tracon Industri	Jl. Kalibata Timur No. 27 RT/RW. 2/8 Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740 Indonesia Telp: +62 21 7974367 *Fax*: +62 21 79180907 *E-mail*: sales@tracon.co.id *Web*: www.tracon.co.id
PT Rekayasa Engineering	Jl. Kalibata Timur No. 27 RT/RW. 2/8 Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Indonesia Telp: +62 21 79181180 *Fax*: +62 21 7940984 *E-mail*: marketing@re.rekayasa.co.id *Web*: www.rekayasaengineering.co.id
Rekind Malaysia Sdn. Bhd.	Suite 9-2 Lt. 9, Wisma UOA II, No. 21 Jl. Pinang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: +60 3 21815251
PT Sigma Utama	Jl. Lanbau No. 1 Karang Asem Barat, Citeureup, Kab. Bogor 16810 Jawa Barat, Indonesia Telp: +62 21 8756310 *Fax*: +62 21 8753042 *Web*: www.sigmautama.com
PT Pupuk Indonesia Utilitas	Alamanda Tower Lt. 26 Jl. TB Simatupang No. 22-26 RT/RW. 1/1 Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta 12430 Indonesia Telp: +62 21 2966 1628; 2966 1629; 2966 1630; 2966 1631 *Fax*: +62 21 345 2609 *E-mail*: info@pi-utilitas.com *Web*: www.pi-utilitas.com
PT Kaltim Jasa Sekuriti	Wisma KIE Lt. Dasar, Jl. Paku Aji Kav. 79 Kawasan Industri Bontang, Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia Telp: +62 548 41101 *Fax*: +62 548 41104
PT Kaltim Adhiguna Dermaga	Jl. Paku Aji Kav. 79 Wisma KIE Lt. 1 Guntung, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia E-mail: kaltim.adhiguna@gmail.com kaltimadhiguna@kad.co.id *Web*: www.kad.co.id
PT Rekayasa Cakrawala Resources	Jl. Kalibata Timur I No. 36 Jakarta Selatan 12740 Indonesia Telp: +62 21 79181180 Ext. 5511/12/14 *Fax*: +62 21 79196204 *E-mail*: marketing@recare.rekayasa.co.id, recruitment@recare.rekayasa.co.id, designschool@recare.rekayasa.co.id *Web*: www.recare.rekayasa.com
PT Rekind Engineering & Construction	Jl. Kalibata Timur II No. 27 RT/RW. 002/08 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Indonesia *Web*: www.recon.co.id
PT Tracon Industri Solusindo	Graha Gabah Pertani Lt. 1 Jl. Raya Pasar Minggu No. 1 Jakarta Selatan 12760 Indonesia Telp: +62 21 7974367; +62 21 79180907 *E-mail*: bisnis@tracon.rekayasa.co.id sales@tracon.rekayasa.co.id (*Supply Chain*) *Web*: www.tracon.co.id
Entitas Asosiasi Associated Entities	
PT Petronika	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, Tlogopojok Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151 Indonesia Telp: +62 31 395 1956 *E-mail*: petronika@telkom.net *Web*: www.panditaindustries.com

Jaringan Kantor Office Network	Alamat dan Kontak Address and Contact
PT Multi Nitrotama Kimia	Equity Tower Lt. 41 Suite E Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9 Jakarta 12190 Indonesia Telp: +62 21 29035022 (Hunting) *Fax*: +62 21 29035021
PT Clariant Kujang Catalyst	Kawasan Industri Kujang Cikampek, Jl. Jend. A. Yani No. 39 Kalihurip, Cikampek, Jawa Barat 41373 Indonesia Telp: +62 21 83701020,; 83701719 *Fax*: +62 21 83700410 *E-mail*: info@kikc.co.id *Web*: www.kikc.co.id
PT Peroksida Indonesia Pratama	Kawasan Industri Kujang Cikampek, Jl. Jend. A. Yani No. 39 Kalihurip, Cikampek, Jawa Barat 41373 Indonesia Telp: +62 264 313383; 313387 *Fax*: +62 264 313386 *E-mail*: info@ptpip.co.id *Web*: www.ptpip.co.id
PT Kaltim Amonium Nitrat	Menara MTH, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 23, RT/RW. 11/5 Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810 Indonesia
PT Aneka Jasa Grhadika	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 122, Jarangkuwung, Ngipik, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61119 Indonesia Telp: +62 31 3954726 *E-mail*: info@ajg.co.id *Web*: www.ajg.co.id
PT Petrokopindo Cipta Selaras	Jl. Raya Romo 242, Maduran, Roomo, Gresik, Indonesia Telp: +62 31 3984194 *E-mail*: admin@petrokopindo.com *Web*: www.petrokopindo.com
Hotel Bintang Sintuk	Jl. Urea, Komplek Lapangan Golf PT Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia Telp: +62 21 548 26268; 392 2566 *E-mail*: reservation@hotelbintangsintuk.com *Web*: www.hotelbintangsintuk.com
Ventura Bersama Joint Ventures	
PT Petro Jordan Abadi	Jl. Raya Roomo, Manyar Gresik, Jawa Timur 61151, Indonesia Telp: +62 31 399 1887 *E-mail*: admin@pja-gresik.com *Web*: www.pja-gresik.com
PT Kalimantan Agro Nusantara	Komplek Thomas Square C-5 Jl. Yos Sudarso II No. 17 Kec. Sengata Utara, Kab. Kutai Timur, Indonesia Telp: +62 549 2027833
PT Kaltim Jordan Abadi	Wisma KIE Lt. 2 Jl. Ammonia Kav. 79 Bontang 75314 Kalimantan Timur, Indonesia *E-mail*: contact@kja-bontang.com *Web*: www.kaltimjordanabadi.com
PT Pupuk Agro Nusantara	Jl. Pulau Saparua II, Blok C3, Kawasan Industri Medan III, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Indonesia

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



PTPI merupakan *holding* BUMN industri pupuk yang terintegrasi, dengan peran strategis dalam memperkuat ekosistem pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.

PTPI is an integrated SOE fertilizer industry holding company with a strategic role in strengthening the agricultural ecosystem and supporting national food security.

PT Pupuk Indonesia (Persero) pertama kali didirikan dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja berdasarkan Akta No. 177 tanggal 24 Desember 1959 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan menjadi badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Muda Kehakiman melalui Keputusan No. J.A.5/3/19 tanggal 28 Januari 1960. Pengesahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Februari 1960 dengan nomor register 320 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 186 tahun 1960.

PT Pupuk Indonesia (Persero) was first established under the name PT Pupuk Sriwidjaja based on Deed No. 177 dated December 24, 1959 made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta, and became a legal entity upon obtaining ratification from the Junior Minister of Justice through Decree No. J.A.5/3/19 dated January 28, 1960. The ratification was registered at the Registrar's Office of the Jakarta District Court on February 8, 1960 with register number 320 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 7, 1960, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 186 of 1960.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 44) didirikan Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja (PN Pusri), dan PT Pupuk Sriwidjaja yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta tersebut dilebur ke dalam PN Pusri sehingga hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta utang usaha dari PT Pupuk Sriwidjaja beralih ke PN Pusri.

Based on Government Regulation No. 20 of 1964 concerning the Establishment of Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1964 No. 44), Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja (PN Pusri) was established, and PT Pupuk Sriwidjaja was established based on the Deed of Limited Liability Company of PT Pupuk Sriwidjaja No. 177 dated December 24, 1959 made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta and were merged into PN Pusri, such that the rights and obligations, equipment, assets, and trade payables of PT Pupuk Sriwidjaja were transferred to PN Pusri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 31), PN Pusri mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sehubungan hal ini, telah ditandatangani Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20.

Based on the Republic of Indonesia Government Regulation No. 20 of 1969 concerning the Transfer of Legal Entity Form of State Company Pupuk Sriwidjaja to Company (Persero) (State Institution of the Republic of Indonesia Year 1969 No. 31), PN Pusri underwent a change in legal entity form from a State Public Company to a State-Owned Company (Persero). Deed of Establishment No. 4 dated January 3, 1970 was signed before Soeleman Ardjasasmita, Notary in Jakarta and which was approved by the Minister of Justice based on the Excerpt from the Register of Determinations of the Minister of Justice dated February 7, 1970 No. J.A.5/7/20.

Pada tahun 1997, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, maka PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) ditugaskan untuk menjadi Induk Perusahaan (*Operation Holding*) yang membawahi 6 (enam) Anak Perusahaan.

In 1997, based on Government Regulation No. 28 of 1997 in conjunction with Government Regulation No. 34 of 1998 concerning the Injection of State Capital by the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was assigned to serve as a Parent Company (Operation Holding) overseeing 6 (six) Subsidiaries.

Dalam rangka restrukturisasi/pengembangan usaha, telah dilakukan pemisahan aset dengan cara spin off, di mana PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Pengalihan sebagian aset PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dilaksanakan per 1 Januari 2011. Dengan demikian, segala kegiatan operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang meliputi produksi, pemasaran, pengadaan, pengembangan usaha, dan lain-lain diserahkan kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) bertindak murni sebagai *Non-Operating Holding.*

As part of the restructuring and development initiative, a spin-off was carried out whereby PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) established a Subsidiary PT Pupuk Sriwidjaja Palembang through Deed of Establishment No. 14 dated November 12, 2010 made before Fathiah Helmi S.H., Notary in Jakarta. The transfer of some of the assets of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) to PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was carried out on January 1, 2011. Thus, all operational activities of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), which included production, marketing, procurement, business development, etc. were handed over to PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) acted purely as a Non-Operating Holding.

Pada tanggal 3 April 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PTPI yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012.

On April 3, 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero), domiciled in Jakarta, based on Deed No. 3 dated April 3, 2012 made before Nanda Fauz Iwan, S.H., Notary in South Jakarta, with offices covering the entire territory of DKI Jakarta, and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights based on the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-17695.AH.01.02 Year 2012..



Dalam Akta No. 01 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0175443.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0399104 tanggal 18 Oktober 2020, PTPI berubah menjadi *activist holding*.

Di tahun 2021, Perusahaan resmi menetapkan pemberlakuan sentralisasi fungsi *holding* di lingkungan Pupuk Indonesia Group sebagai bagian dari amanah Kementerian BUMN selaku pemegang saham Perusahaan untuk melakukan transformasi. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan secara sentralisasi di *holding* Perusahaan antara lain mencakup fungsi pemasaran dan penjualan komersial, penelitian dan pengembangan, *supply chain* dan *cost management*, pengadaan barang dan jasa, keuangan, audit, manajemen risiko dan kepatuhan, serta manajemen talenta dan pengembangan SDM, dan juga hukum. Tujuan utama sentralisasi dilaksanakan untuk meningkatkan *Value Creation* serta memastikan aktivitas fungsi-fungsi anggota Pupuk Indonesia Group sehingga sejalan dengan strategi perusahaan. Diharapkan dengan penerapan *activist holding role* ini Perusahaan akan mempunyai peran lebih aktif dalam aktivitas operasional Perusahaan.

The last amendment was contained in Deed No. 01 dated October 12, 2020, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta, which was received and recorded in the Legal Entity Administration System Company Register No. AHU-0175443.AH.01.11 of 2020 on October 18, 2020, together with the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights Directorate General of General Legal Administration Letter No. AHU-AH.01.03-0399104 dated October 18, 2020, whereby PTPI became an activist holding company.

In 2021, the Company officially implemented the centralization of holding functions within Pupuk Indonesia Group as part of the mandate of the Ministry of State-Owned Enterprises, as the Company's shareholder to carry out a transformation. Functions carried out centrally within the Company's holding include commercial marketing and sales, research and development, supply chain and cost management, procurement of goods and services, finance, audit, risk management and compliance, talent management and Human Resources development, and legal affairs. The main purpose of centralization was to enhance Value Creation and to ensure that the activities of Pupuk Indonesia Group member functions were aligned with the Company's strategy. With the adoption of this activist holding role, the Company was expected to take on a more active role in its operational activities.

Pada tahun 2024, PTPI menindaklanjuti arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan butir 9 mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPI Tahun 2024 dengan melaksanakan inisiatif strategis penyehatan salah satu Anak Perusahaan Non-Produsen Pupuk di bidang jasa *engineering, procurement, & construction,* yaitu PT Rekayasa Industri (Rekind). Inisiatif strategis tersebut dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP) yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN. Salah satu langkah utama yang diambil untuk mendukung penguatan proses bisnis dan peningkatan kinerja Rekind adalah melalui aksi korporasi berupa inbreng saham PTPI pada Anak Perusahaan Non Produsen Pupuk di bidang utilitas, PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU), kepada Rekind.

Pelaksanaan inisiatif ini mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PIU sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pemegang Saham serta disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham PIU pada 16 Desember 2024, dan selanjutnya dinyatakan dalam Akta Notaris Lumassia, S.H. tanggal 23 Desember 2024 Nomor 13 tentang Perubahan Kepemilikan dan Komposisi Saham PIU.

Sebagai *activist holding* yang menaungi jaringan usaha melalui Entitas Anak Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung serta Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia, PTPI memiliki peran yang lebih aktif dalam bidang operasional, terutama untuk fungsi-fungsi strategis seperti pemasaran, pengadaan, riset, pengembangan, juga untuk fungsi SDM, TI, dan beberapa fungsi lainnya.

Berdasarkan lembaga riset independen Fertecon, PTPI dan Anak Perusahaan menjadi produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian nasional dan ketahanan pangan, di mana Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki berbagai jenis produk pupuk urea, pupuk non-urea, dan industri kimia lainnya serta layanan jasa *engineering, procurement & construction*, perdagangan umum, distribusi, serta pangan. PTPI menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dalam upaya meningkatkan kekuatan jaringan kelompok usaha. Perusahaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu melalui produk pupuk dan amonia yang berkualitas.

Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, kinerja Perusahaan didukung oleh 9 Anak Perusahaan yang mengoperasikan 14 pabrik urea, 13 pabrik amonia, 19 pabrik NPK, 3 pabrik ZA, dan 2 pabrik ZK di lokasi yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

In 2024, PTPI followed up on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) directive, point 9, concerning the approval of PTPI's 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) by implementing a strategic initiative to rehabilitate one of its non-fertilizer-producing subsidiaries in the engineering, procurement, and construction (EPC) services sector, namely PT Rekayasa Industri (Rekind). This strategic initiative was carried out based on the Corporate Restructuring Plan (RPP) document approved by the Ministry of State-Owned Enterprises. One of the main steps taken to support the strengthening of Rekind's business processes and performance was through a corporate action in the form of a share injection (inbreng) of PTPI's shares in PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU), its non-fertilizer-producing subsidiary in the utilities sector, into Rekind.

This initiative resulted in a change in PIU's share ownership, as set out in the Shareholders' Agreement and approved at PIU's General Meeting of Shareholders on December 16, 2024, and further recorded in Notarial Deed No. 13 before Lumassia, S.H., dated December 23, 2024, concerning Changes in PIU's Share Ownership and Composition.

As an activist holding company that supervises a business network through Direct and Indirect Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures, together with a distribution network throughout Indonesia, PTPI plays a more active role in operations, particularly in strategic functions such as marketing, procurement, research, and development, as well as Human Resources, Information Technology, and other functions.

According to the independent research firm Fertecon, PTPI and its subsidiaries are the largest fertilizer producers in Southeast Asia, playing a vital role in national agricultural development and food security. The Company and its subsidiaries offer a wide range of urea fertilizers, non-urea fertilizers, and other chemical products, as well as engineering, procurement and construction (EPC) services, general trading, distribution, and food services. PTPI serves as a partner of the Indonesian Government in distributing subsidized fertilizers, to strengthen the Company's business group network. The Company also plays a vital role in achieving food security through its quality fertilizer and ammonia products.

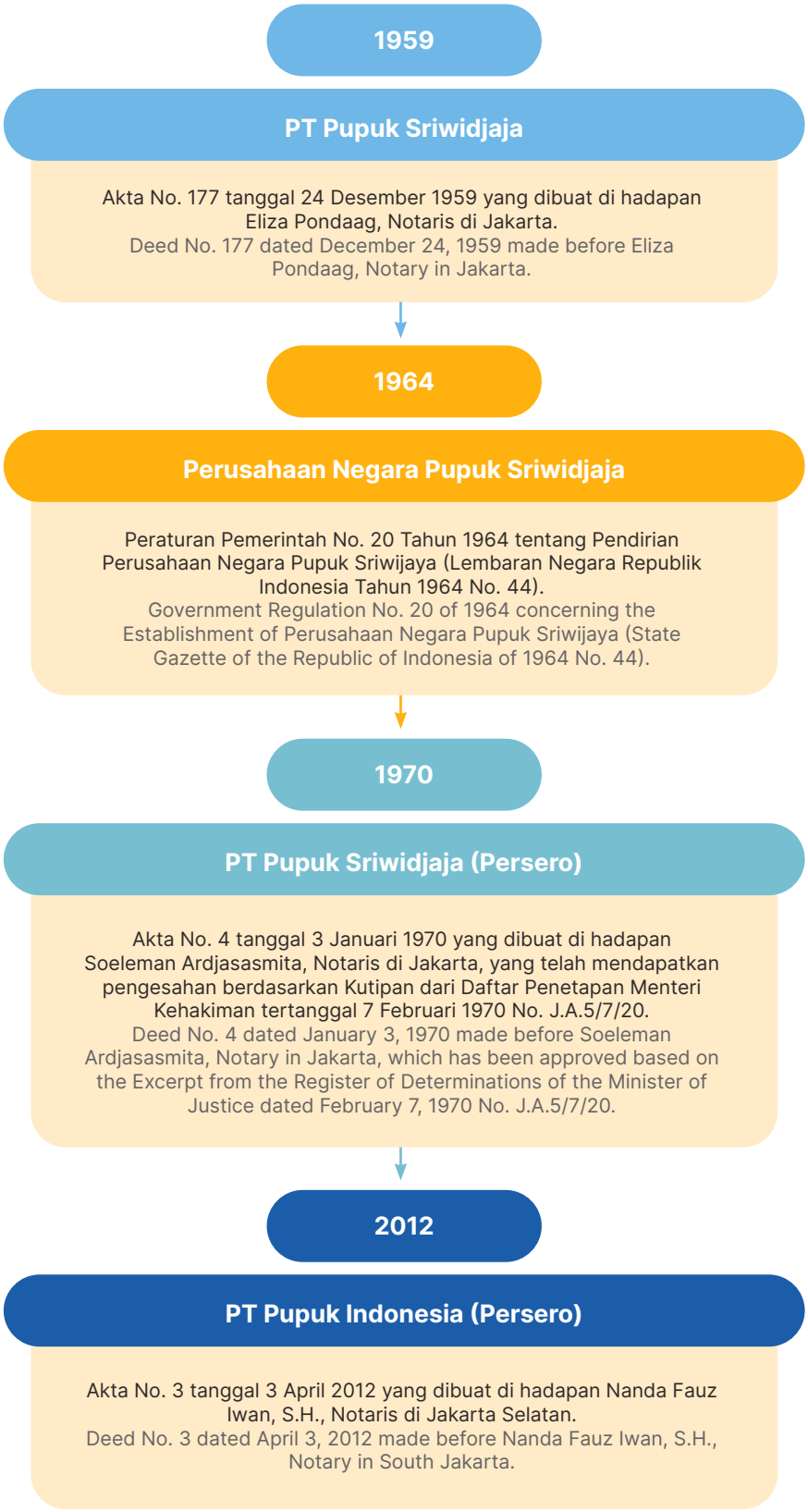
As of the publication of this Annual Report, the Company's performance is supported by nine subsidiaries operating 14 urea plants, 13 ammonia plants, 19 NPK plants, 3 ZA plants, and 2 ZK plants at sites spread across the islands of Java, Sumatra, and Kalimantan.

Informasi Perubahan Nama Perusahaan

PTPI mengalami beberapa kali perubahan nama dan badan hukum sebagaimana dituangkan dalam bagan berikut:

Information Concerning Company Name Changes

PTPI has undergone several name and legal entity changes, as outlined in the following chart:



Sepanjang tahun 2025 sampai laporan tahunan ini diterbitkan, tidak ada perubahan nama. Nama Perusahaan tetap "PT Pupuk Indonesia (Persero)".

During 2025 and until the publication of this annual report, there were no name changes. The Company's name remains "PT Pupuk Indonesia (Persero)".

Jejak Langkah
Milestones

1959, 1979–1980

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berdiri sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di industri pupuk sejak tahun 1959. Dalam rangka kerja sama dengan negara-negara ASEAN dibentuk perusahaan patungan:
- PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menguasai 60% saham.
- Asean Bintulu Fertilizer (ABF) Sdn. Bhd., Pemerintah Indonesia menguasai 13% saham. Pemerintah menugaskan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) untuk mewakili Pemerintah di dalam pengawasan kinerja perusahaan.

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was established as a state-owned enterprise (SOE) operating in the fertilizer industry in 1959. In collaboration with the ASEAN countries, the following joint ventures were established:
- PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) owned 60% of the shares.
- Asean Bintulu Fertilizer (ABF) Sdn. Bhd., Indonesian government owned 13% of the shares. The government assigned PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) to represent the Government in supervising the company's performance.

1997–1998

Diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang dahulu bernama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjadi Perusahaan Induk (*Operating Holding*) yang membawahi 6 (enam) Anak Perusahaan (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, dan PT Mega Eltra).

Issuance of Government Regulation Number: 28 of 1997 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja in conjunction with Government Regulation Number: 34 of 1998 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Indonesia (Persero) formerly known as PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) became the Holding Company (Operating Holding) that oversaw 6 (six) subsidiaries (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, and PT Mega Eltra).

2010–2012

- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 24 Desember 2010 dan berubah dari Operating Holding menjadi Strategic and Investment Holding.
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan selanjutnya tanggal 3 April 2012 ditetapkan sebagai hari jadi PT Pupuk Indonesia (Persero).

- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) established PT Pupuk Sriwidjaja Palembang on December 24, 2010 and transformed from Operating Holding into Strategic and Investment Holding.
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero) and April 3, 2012 was designated as the founding anniversary of PT Pupuk Indonesia (Persero).

2013–2017

- Pada tanggal 23 Desember 2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Logistik.
- Pada tanggal 18 Agustus 2014, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Energi.
- Pada tanggal 30 April 2015, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Pangan.
- Peresmian Pabrik PKT 5, November 2015.
- Pembangunan Pabrik NPK II PT Pupuk Kujang.
- Pembangunan Pabrik NPK Fusion I PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di tahun 2016.
- Selesainya konstruksi Pabrik Pusri IIB di tahun 2017.

- On December 23, 2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a subsidiary named PT Pupuk Indonesia Logistik.
- On August 18, 2014, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a subsidiary named PT Pupuk Indonesia Energi.
- On April 30, 2015, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a subsidiary named PT Pupuk Indonesia Pangan.
- Inauguration of PKT Plant 5, November 2015.
- Construction of PT Pupuk Kujang's NPK II Plant.
- Construction of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's NPK Fusion I Plant in 2016.
- Completion of Pusri IIB Plant construction in 2017.

2018

Selesainya Konstruksi dan Produksi Urea Pertama Proyek Amurea II Petrokimia Gresik Anak Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) di Gresik, Jawa Timur.

Completion of Construction and First Urea Production of the Amurea II Project at PT Petrokimia Gresik, a Subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) in Gresik, East Java.

2019

Dimulainya konstruksi proyek NPK Chemical PT Pupuk Iskandar Muda.

Commencement of the PT Pupuk Iskandar Muda NPK Chemical construction project.

2020

- PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi "*Activist Holding*".
- Penyelesaian pabrik CO_2 cair PT Pupuk Kujang.

- Pupuk Indonesia (Persero) changed to "Activist Holding"
- Completion of the liquid CO_2 plant of PT Pupuk Kujang (PKC)

2021

- PT Pupuk Indonesia (Persero) menerapkan sentralisasi fungsi *Holding*.
- Pupuk Indonesia luncurkan penyeragaman brand produk ritel.
- Perubahan nama PT Pupuk Indonesia Energi ("PIE") menjadi PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU").

- Pupuk Indonesia Implements Centralization of Holding Functions
- Pupuk Indonesia Launched Unified Retail Product Branding
- Change of Name of PT Pupuk Indonesia energy ("PIE") to PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU")

Pupuk Indonesia adalah pemimpin dalam penelitian dan inovasi kelas dunia. Produk kami melindungi investasi para petani dan menghasilkan tanaman berkualitas tinggi.

Pupuk Indonesia is a world-class leader in research and innovation. Our products protect farmers' investment and produce high-quality crops.





2023

- Peresmian Pabrik NPK PIM oleh Presiden RI, Joko Widodo.
- Penandatanganan Perjanjian Kredit Pendanaan dan *Engineering, Procurement & Construction* (EPC) Proyek Pusri IIIB.
- *Groundbreaking* Kawasan Industri Pupuk Fakfak.

- Inauguration of PIM NPK Plant by the President of Indonesia, Joko Widodo.
- Signing of Funding Credit Agreement and Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract for the Pusri IIIB Project.
- Groundbreaking of Fakfak Fertilizer Industrial Estate.

2022

- Perubahan nama PT Mega Eltra ("ME") menjadi PT Pupuk Indonesia Niaga ("PI Niaga").
- Peresmian Kantor Perwakilan di Kota Dubai, UAE.

- Change of name of PT Mega Eltra ("ME") to PT Pupuk Indonesia Niaga ("PI Niaga").
- Inauguration of Representative Office in Dubai City, UAE.

2024

- PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan inbreng saham di Anak Perusahaan Non Produsen Pupuk yang bergerak di bidang utilitas yaitu PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU) kepada PT Rekayasa Industri.
- PT Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan satu saham istimewa untuk dimiliki negara (selanjutnya disebut saham Seri-A Dwiwarna) pada Anak Perusahaan eks BUMN berikut:
  - PT Pupuk Kalimantan Timur/PKT (eks BUMN).
  - PT Pupuk Kujang/PKC (eks BUMN).
  - PT Petrokimia Gresik/PKG (eks BUMN).
  - PT Pupuk Iskandar Muda/PIM (eks BUMN).
  - PT Pupuk Sriwidjaja Palembang/PSP (hasil *spin off* eks BUMN).

- PT Pupuk Indonesia (Persero) Carried Out the Share Injection (Inbreng) of PT Pupuk Indonesia Utilitas into PT Rekayasa Industri.
- PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PI") designated one preferred share to be owned by the state (hereinafter referred to as Series-A Dwiwarna shares) in the following former BUMN Subsidiaries:
  - PT Pupuk Kalimantan Timur/PKT (former SOE).
  - PT Pupuk Kujang/PKC (former SOE).
  - PT Petrokimia Gresik/PKG (former SOE).
  - PT Pupuk Iskandar Muda/PIM (former SOE).
  - PT Pupuk Sriwidjaja Palembang/PSP (result of spin off of former SOE).

2025

- **Perubahan nama Pemegang Saham Seri B dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ("PT BKI") menjadi PT Danantara Asset Management (Persero) ("PT DAM").**
- ***Groundbreaking* Proyek Soda Ash PKT**
- ***Groundbreaking* Proyek NPK Nitrat PKC**
- Change of name of Series B shareholder from PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ("PT BKI") to PT Danantara Asset Management (Persero) ("PT DAM").
- Groundbreaking of the PKT Soda Ash Plant
- Groundbreaking of the PKC NPK Nitrate Plant

Makna Logo Perusahaan
Meaning of The Company Logo

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

Objektivitas
Objective

Objektif dari desain logo adalah memberikan citra baru untuk PTPI sebagai *Holding Company*, sehingga dapat menghilangkan citra merek sebelumnya yaitu Pusri.
The objective of the logo design is to provide a new image for PTPI as a Holding Company, subsequently phasing out its previous brand image, namely Pusri.

Bentuk
Shape

Bentuk dasar logo terinspirasi dari hal-hal yang menjadi dasar usaha PTPI yaitu molekul atom yang terkandung di dalam senyawa pupuk, petrokimia dan energi. Bentuk dasar logo PTPI diilhami dari bentuk senyawa kimia pupuk urea, yang merupakan produk utama PTPI. Besaran lingkaran yang ada melambangkan *main-business* dan *sub-business*. Lingkaran kosong melambangkan bisnis yang akan terus berkembang, terus berkarya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
The basic shape of the logo is inspired by the foundation of PTPI's business, specifically the atomic molecules contained in fertilizer, petrochemical and energy compounds. The basic shape of PTPI's logo is inspired by the chemical compound of urea fertilizer, which is PTPI's main product. The varying sizes of the circles represent the main business and sub-businesses. The open circle symbolizes a business that continues to grow and strive to meet the needs of society.

Jenis Huruf
Typeface

Huruf yang digunakan adalah huruf tanpa 'serif' yang memberi kesan modern, dinamis, dan profesional.
A sans-serif typeface is used, conveying a modern, dynamic, and professional impression.

Warna

Warna-warna yang mewakili unsur-unsur bisnis PTPI, yaitu pupuk, petrokimia dan energi. Warna logo diilhami dari bisnis inti PTPI dan filosofi yang terkandung di dalamnya.

Color

The colors used in the logo represent the elements of PTPI's business, namely fertilizers, petrochemicals, and energy. The color of the logo was inspired by PTPI's main business and its philosophy.



Hijau | Green

Mewakili *main business* PTPI yang bergerak di bidang agrokimia dan juga melambangkan pembaharuan.
Represents PTPI's main business in the agrochemical sector and also symbolizes renewal.



Kuning | Yellow

Mewakili padi yang menguning dan juga melambangkan kesuburan.
Represents ripening rice plants and also symbolizes fertility



Oranye | Orange

Mewakili sumber daya alam, energi, dan hasil bumi yang diolah PTPI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan dapat diartikan juga sebagai kesuksesan dan pencapaian bisnis.
Represents the natural resources, energy, and natural products processed by PTPI to fulfill the needs of Indonesian people and can also be interpreted as a symbol of success and business achievement.



Biru Muda | Light Blue

Mewakili keselarasan dan keseimbangan alam.
Represents harmony and balance with nature.



Biru Tua | Dark Blue

Mewakili sifat dan sikap profesional yang diusung PTPI dan juga kepercayaan.
Represents the professional character and attitude upheld by PTPI and also symbolizes trust

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture

VISI *Vision*

"A leading global agrosolution and integrated chemical company."

MISI *Mission*

- Menyediakan solusi pertanian, produk nutrisi tanaman berkualitas tinggi sesuai kebutuhan konsumen serta solusi industri kimia berkelanjutan yang andal untuk Indonesia dan dunia.
- Memaksimalkan *circular economy* sehingga memberikan manfaat serta nilai tambah ekonomi dan sosial untuk Indonesia.
- Mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan nasional, serta berkontribusi dalam hilirisasi industri berkelanjutan di Indonesia.
- Menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi terkini yang mengedepankan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup dengan menjaga risiko dan prinsip tata kelola yang baik dengan manajemen risiko yang efektif dan didukung oleh SDM kelas dunia yang kompeten dan profesional.
- Membangun budaya yang inovatif, kolaboratif, dan berkinerja unggul untuk menjamin Perusahaan yang berkelanjutan.

- Providing competitive plant nutrition products and agricultural solutions according to consumer needs through sustainable agricultural ecosystems throughout Indonesia and global.
- Maximizing the circular economy so as to provide economic and social benefits and added value for Indonesia.
- Support national food security and sovereignty programs and contribute to the downstream development of sustainable industries in Indonesia.
- Running a business by applying the latest technology that prioritizes work safety and environmental sustainability with the principles of good governance with effective risk management and supported by professional human resources.
- Creating an innovative, collaborative, and high-performing culture to ensure a sustainable company.



TUJUAN *Purpose*

"Contributing to national food security and sustainable economic growth."

Reviu Serta Penerapan Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Perumusan Visi, Misi dan Tujuan PTPI senantiasa melibatkan manajemen Pupuk Indonesia Group yang terdiri dari Dewan Komisaris PTPI, Direksi PTPI, dan Direktur Utama Anak Perusahaan. Berdasarkan tinjauan manajemen, pada tahun 2025, tidak ada perubahan Visi, Misi, serta Tujuan PTPI, karena dinilai masih relevan dengan operasi dan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan.

Budaya Perusahaan

PTPI mengimplementasikan Budaya dan Nilai "AKHLAK" yang merupakan akronim dari (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai fondasi budaya kerja Perusahaan. Nilai-nilai ini diterapkan sesuai Surat Edaran Menteri BUMN No. SE–7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan juga telah memiliki ketetapan yang mewajibkan penerapan nilai-nilai AKHLAK di lingkungan Anak Perusahaan. Ketetapan internal itu disampaikan melalui Surat Edaran No. 08/A/KK/S22/SE/2020 perihal Implementasi Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) tanggal 4 Agustus 2020. *Core Values* Perusahaan terdiri dari:

Review and Implementation of the Company's Vision and Mission by Key Management

The formulation of PTPI's Vision, Mission, and Purpose engages Pupuk Indonesia Group management, comprising PTPI's Board of Commissioners, PTPI's Board of Directors, and the President Directors of its subsidiaries. Based on a management review, there were no changes to PTPI's Vision, Mission, and Purpose in 2025, as they remain relevant to the Company's operations and evolving business environment.

Corporate Culture

PTPI implements the "AKHLAK" Culture and Values, an acronym for Trustworthy (Amanah), Competent (Kompeten), Harmonious (Harmonis), Loyal (Loyal), Adaptive (Adaptif), and Collaborative (Kolaboratif), as the foundation of the Company's work culture. These values are applied in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 concerning the Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises. PTPI also has a regulation mandating the application of AKHLAK values within its subsidiaries. This internal regulation was delivered through Circular Letter No. 08/A/KK/S22/SE/2020 concerning the Implementation of Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises' Corporate Culture, dated August 4, 2020. The Company's Core Values consist of:

AKHLAK

	Panduan Perilaku:	Behavioral Guidelines:
Amanah | Trustworthy Definisi: Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan. Definition: Upholding the trust that has been given.	1. Memenuhi janji dan komitmen; 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.	1. Fulfilling promises and commitments; 2. Taking responsibility for tasks, decisions, and actions; 3. Adhering to moral and ethical values.
Kompeten | Competent Definisi: Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas. Definition: Continuously learning and developing capabilities.	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2. Membantu orang lain belajar; 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.	1. Enhancing personal competencies to meet ever-changing challenges; 2. Helping others to learn; 3. Completing tasks to the highest quality standards.
Harmonis | Harmonious Definisi: Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan. Definition: Caring for one another and respecting differences.	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; 2. Suka menolong orang lain; 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.	1. Respecting everyone, regardless of background; 2. Being helpful to others; 3. Creating a conducive work environment.
Loyal | Loyal Definisi: Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara. Definition: Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State.	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara; 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.	1. Maintaining the good reputation of fellow employees, leaders, SOEs, and the State; 2. Willing to make sacrifices to achieve greater goals; 3. Obeying leadership as long as they do not conflict with laws and ethics.
Adaptif | Adaptive Definisi: Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan Definition: Continuously innovating and being enthusiastic in driving or responding to change.	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; 2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; 3. Bertindak proaktif.	1. Quickly adapting to improve; 2. Continuously making improvements in line with technological advancements; 3. Acting proactively.
Kolaboratif | Collaborative Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis. Definition: Building synergistic cooperation.	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.	1. Providing opportunities for all parties to contribute; 2. Being open to collaboration to create added value; 3. Mobilizing various resources to achieve common goals.

Implementasi budaya "AKHLAK" di lingkungan Pupuk Indonesia Group bertujuan untuk mendukung transformasi bisnis, sesuai arahan Manajemen PTPI. Selain itu, penerapan nilai-nilai tersebut juga telah menjadi program kerja yang disusun oleh Tim Pengelola Budaya PTPI dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan.

The implementation of the AKHLAK Core Values across the The implementation of the AKHLAK culture within Pupuk Indonesia Group aims to support business transformation, in accordance with the directives of PTPI's Management. Furthermore, the application of these values has also become part of the work program developed by PTPI's Culture Management Team in order to achieve the Company's vision and mission.

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan

Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan Budaya Perusahaan dengan perilaku seluruh Insan PTPI dalam operasional sehari-hari, PTPI secara aktif melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi Budaya Perusahaan melalui sejumlah program yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Socialization and Internalization of the Corporate Culture

As part of efforts to align the Company's Corporate Culture with the behavior of all PTPI employees in their daily operations, PTPI actively implements socialization and internalization programs for the Company's Corporate Culture, as described in the table below:

No	Program Program	Deskripsi Description	Waktu Date
1.	*Learn* & *Share* Budaya Hidup Sehat Learn & Share a Healthy Living Culture	*Learn* & *Share* yang bertujuan untuk menekankan pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik, mental dan sosial karyawan Pupuk Indonesia. Learn & Share, which aims to emphasize the importance of balancing the physical, mental, and social health of Pupuk Indonesia employees.	Januari – Desember 2025 January – December 2025
2.	Penguatan Tim Budaya Perusahaan Pupuk Indonesia Group tentang Roadmap AKHLAKVolution Strengthening the Pupuk Indonesia Group Corporate Culture Team on the AKHLAKVolution Roadmap	Program budaya perusahaan yang bertujuan Penguatan Tim Budaya Pupuk Indonesia Group terkait *Roadmap* AKHLAKVolution yang di dalam terdapat integrasi antara *Core Values* AKHLAK, EWP, RWP dan Inklusivitas. This corporate culture program aims to strengthen Pupuk Indonesia Group's Culture Team, and is related to the AKHLAKVolution Roadmap, which integrates the core values of AKHLAK, EWP, RWP, and Inclusivity.	Februari 2025 February 2025
3.	Pendaftaran HAKI Game AKAR "AKHLAK Keluarga" Registration of Intellectual Property Rights for the AKAR Game "AKHLAK Keluarga"	Pendaftaran atas Hak Intelektual Program internalisasi budaya AKHLAK dengan metode *Gamification* yaitu AKHLAK Keluarga. Registration of Intellectual Property Rights: Internalization program for the AKHLAK culture using Gamification, namely AKHLAK Keluarga (Family AKHLAK).	Februari – Maret 2025 February – March 2025
4.	Asesmen Modalitas Pupuk Indonesia Group oleh Tim Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia Assessment of Pupuk Indonesia Group Modalities by the Republic of Indonesia National Commission on Disabilities	Program asesmen terkait kesiapan dan ketersediaan fasilitas infrastruktur pendukung untuk aksesibilitas karyawan Disabilitas di lingkungan Pupuk Indonesia Group. Assessment program related to the readiness and availability of supporting infrastructure facilities for accessibility by employees with disabilities within the Pupuk Indonesia Group.	Januari – Agustus 2025 January – August 2025
5.	*Workshop* Pelayanan Publik yang Inklusif Inclusive Public Service Workshop	*Workshop* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelayanan publik yang inklusif untuk *Office Boy* dan *Security* di kantor Pupuk Indonesia. Workshop aimed at providing an understanding of inclusive public services for office workers and security guards at Pupuk Indonesia offices.	Januari-Februari 2025 January-February 2025
6.	Penyusunan *Journey Safety Culture* Development of a Safety Journey Culture	Penyusunan *journey* terkait program *safety culture* bersama Tim Safety Pupuk Indonesia yang bertujuan memperkuat budaya *safety* di lingkungan Pupuk Indonesia Group Development of a journey related to the safety culture program with the Pupuk Indonesia Safety Team, aimed at strengthening safety culture within the Pupuk Indonesia Group.	Maret – Agustus 2025 March – August 2025

No	Program Program	Deskripsi Description	Waktu Date
7.	Penyusunan *Journey* Implementasi Penguatan Pemahaman Pedoman Etika dan Perilaku Development of an Implementation Journey to Strengthen Understanding of Ethical and Behavioral Guidelines	Penyusunan *journey* terkait Implementasi Pemahaman Pedoman Etika dan Perilaku bersama Tim Tata Kelola Pupuk Indonesia yang bertujuan memperkuat implementasi dan pemahaman tentang pedoman etika dan perilaku yang sudah ada di lingkungan Pupuk Indonesia Group Development of a journey related to the Implementation of Understanding the Ethics and Behavior Guidelines with the Pupuk Indonesia Governance Team, aimed at strengthening the implementation and understanding of existing ethics and behavior guidelines within the Pupuk Indonesia Group.	Maret – Juni 2025 March – June 2025
8.	Media Pembelajaran AKHLAK di LXP AKHLAK Learning Media in LXP	Pembuatan media pembelajaran AKHLAK di LXP yang disesuaikan dengan kamus kompetensi Pupuk Indonesia "*Culture Management*" yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap *Core Values* AKHLAK. Creation of AKHLAK learning media in LXP, adapted to the Pupuk Indonesia competency dictionary "Culture Management," aimed at improving employee understanding of AKHLAK Core Values.	Juni – Agustus 2025 June – August 2025
9.	Pengukuran Implementasi Budaya Culture Implementation Measurement	Program pengukuran tingkat efektivitas implementasi budaya perusahaan. Corporate Culture Implementation Effectiveness Measurement Program	Oktober – Desember 2025 October – December 2025
10.	Penyusunan *Framework Organizational Culture for Sustainable Growth & High-Performance Organization* Development of an Organizational Culture Framework for Sustainable Growth & High-Performance Organizations	Program Penyusunan *Journey* Program Budaya Pupuk Indonesia Group yang fokus pada 5 proses bisnis Pupuk Indonesia (*Safety, Risk, Learning, Digital* dan Pengelolaan Inovasi) dan dikaitkan dengan strategi bisnis *Marked to Market*. Pupuk Indonesia Group's Culture Journey Program Development Program focusing on Pupuk Indonesia's five business processes (Safety, Risk, Learning, Digital, and Innovation Management) and is linked to the Marked to Market business strategy.	September - Desember 2025 September – December 2025
11.	Program SaPa PaGi (*Sharing* Pemahaman Padu bersinergi) SaPa PaGi Program (Sharing Understanding in Synergy)	Kegiatan rutin bulanan yang dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkungan PTPI yang bertujuan meningkatkan internalisasi *Core Values* AKHLAK. A monthly routine activity conducted by each work unit within PTPI, aimed at increasing the internalization of AKHLAK Core Values.	Januari – Desember 2025 January – December 2025
12.	Program eNPeKa (Ekspresi Nyata Pemahaman Kualitas AKHLAK) dengan Tema *Know Your Customer* eNPeKa Program eNPeKa Program (Real Expression of Understanding of AKHLAK Quality) with the Theme "Know Your Customer" eNPeKa Program	Merupakan program bersama yang dirumuskan oleh *Culture Leader* (SVP), *Culture Champion* (VP), dan *Culture Fertilizer* (Tim Budaya) untuk meningkatkan *Core Values* AKHLAK. A joint program formulated by the Culture Leader (SVP), Culture Champion (VP), and Culture Fertilizer (Culture Team) to enhance AKHLAK Core Values.	Januari – Desember 2025 January – December 2025
13.	AKHLAK Goes to School	Program internalisasi AKHLAK kepada siswa dan/atau keluarga karyawan di sekolah yang berada di sekitar lingkungan dan di bawah yayasan Anak Perusahaan PTPI dengan *game board* AKHLAK Keluarga (AKAR) yang telah disusun Tim Budaya PTPI untuk menciptakan ekosistem AKHLAK secara lebih luas. AKHLAK internalization program for students and/or employee families at schools located in the surrounding areas, under the foundation of PTPI subsidiaries using the AKHLAK Keluarga (AKAR) game board developed by the PTPI Culture Team to create a broader AKHLAK ecosystem.	Juni – Juli 2025 June – July 2025

Kegiatan Usaha
Business Activities



Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta No. 01 tanggal 17 April 2025, yang dibuat Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan telah diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-012763 tanggal 09 Mei 2025, maksud dan tujuan dari kegiatan Perusahaan adalah melakukan usaha pengelolaan (manajemen) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agro industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam menjalankan maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, PT Pupuk Indonesia (Persero) tidak hanya berperan sebagai holding BUMN pupuk nasional, tetapi juga menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya strategis Grup, termasuk aset-aset yang mendukung kegiatan usaha utama maupun aset yang memiliki potensi pemanfaatan ekonomi. Pengelolaan aset tersebut dilaksanakan untuk mendukung efektivitas operasional, efisiensi biaya, serta peningkatan nilai Perusahaan secara berkelanjutan.

Business Activities Based on Articles of Association

In accordance with the Company's Articles of Association, as last amended by Deed No. 01 dated April 17, 2025, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta, and received and recorded in the Legal Administration System of the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-012763 dated May 9, 2025, the purpose and objectives of the Company's activities are to manage the Company's business, conduct trading, and provide services in the fields of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals and other chemicals as well as agro-industry, in order to produce high-quality and highly competitive goods and/or services, generate profits and optimize the utilization of the Company's resources in accordance with the principles of good corporate governance.

When carrying out the Company's purposes and objectives as stated in its Articles of Association, PT Pupuk Indonesia (Persero) not only serves as the holding company for national BUMN fertilizer companies, but also manages the Group's strategic resources, including assets that support core business activities and assets with potential economic benefits. These assets are managed to support operational effectiveness, cost efficiency, and the sustainable enhancement of the Company's value.

Penguatan fungsi manajemen aset menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara produktif, terkendali, dan selaras dengan arah pengembangan usaha. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan aset memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi holding, aktivitas kantor pusat, jasa manajemen, pengelolaan fasilitas, pergudangan, kawasan industri, konstruksi, serta kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kegiatan usaha Perusahaan dan Grup.

Strengthening the asset management function is part of the Company's efforts to ensure its resources are used productively, in a controlled manner, and are aligned with business development. As such, asset management activities are directly linked to the holding functions, head office activities, management services, facility management, warehousing, industrial estates, construction, and other supporting activities that support the Company and the Group's business activities.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Pada Tahun Buku

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah disampaikan di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:

Business Activities Executed in the Fiscal Year

To achieve the purpose and objectives as set out above, the Company may carry out the following business activities:

Beberapa kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan juga memiliki keterkaitan dengan fungsi manajemen aset, terutama dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan dan Grup. Kegiatan tersebut tercermin antara lain melalui aktivitas perusahaan holding, aktivitas kantor pusat, jasa konsultasi manajemen, sewa guna atas aset non-finansial, pergudangan dan penyimpanan, kawasan industri, konstruksi, serta kegiatan penunjang lainnya yang mendukung pemanfaatan aset secara produktif.

Several of the Company's business activities are also related to asset management, particularly for optimizing the use of the Company's and the Group's resources. These activities are reflected in the holding company activities, head office activities, management consulting services, leasing of non-financial assets, warehousing and storage, industrial estates, construction, and other activities that support productive asset utilization.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan aset dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang digunakan dalam kegiatan operasional maupun aset yang belum termanfaatkan secara optimal dapat dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan penciptaan nilai. Hal ini sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk meningkatkan nilai Perusahaan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan berdaya guna.

In practice, asset management is carried out to ensure that assets used in operational activities, as well as assets not yet optimally used, are managed based on the principles of efficiency, accountability, and value creation. This aligns with the Company's goal of increasing corporate value through more effective and efficient resource management.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activity based on the Articles of Association	**Telah/Belum Dijalankan** Executed/ Not Executed
Kegiatan Usaha Utama Main Business Activities	
A. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar, termasuk: Conducting business in the wholesale trade sector, including:	
1. Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar; Wholesale trade of basic chemical materials and goods;	✓
2. Perdagangan besar pupuk dan agrokimia; Wholesale trade of fertilizers and agrochemicals;	✓
3. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; Wholesale trade of office and industrial machinery, spare parts, and equipment;	✓
4. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; Wholesale trade of machinery, equipment, and other supplies;	✓
5. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi; Wholesale trade of metal goods for construction materials;	✓
6. Perdagangan besar berbagai macam barang. Wholesale trade of various goods.	✓
B. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Perusahaan *Holding*; Conducting business in the Holding Company Activities;	
C. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Kantor Pusat; Conducting business in the Head Office Activities;	

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activity based on the Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Executed/ Not Executed
D. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri termasuk; Conducting business in the industrial sector, including:	
1. Industri pupuk alam/non sintesis hara makro primer; Natural/non-synthetic primary macronutrient fertilizer industry;	✓
2. Industri pupuk buatan tunggal makro primer; Single primary macronutrient artificial fertilizer industry;	✓
3. Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer; Compound primary macronutrient artificial fertilizer industry;	✓
4. Industri pupuk buatan campuran hara makro primer; Mixed primary macronutrient artificial fertilizer industry;	✓
5. Industri pupuk hara makro sekunder; Secondary macronutrient fertilizer industry;	✓
6. Industri pupuk hara makro; Macronutrient fertilizer industry;	✓
7. Industri pupuk pelengkap; Complementary fertilizer industry;	✓
8. Industri pupuk lainnya; Other fertilizer industry;	✓
9. Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali; Chlorine and alkali basic inorganic chemical industry;	✗
10. Industri kimia dasar anorganik gas industry; Gas industrial inorganic basic chemical industry;	✓
11. Industri kimia dasar anorganik lainnya Other inorganic basic chemical industry	✓
12. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian; Organic basic chemical industry derived from agricultural products;	✗
13. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara; Organic basic chemical industry derived from petroleum, natural gas, and coal;	✓
14. Industri bahan baku pemberantas hama; Pest control raw material industry;	✓
15. Industri pemberantas hama (formulasi); Pest control (formulation) industry;	✓
16. Industri zat pengatur tumbuh; Plant growth regulator industry;	✓
17. Industri bahan amelioran; Ameliorant industry;	✓
18. Industri kimia dasar organik lainnya; Other organic basic chemical industry;	✓
19. Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung; Rice and corn milling industry and rice and corn flour industry;	✓
20. Industri penggilingan padi dan penyosohan beras. Rice milling and rice polishing industry.	✓
E. Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa Konsultasi Manajemen termasuk: Conducting business in the Management Consulting Services sector, including:	
1. Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis lainnya, YTDL; Other professional, scientific, and technical activities, YTDL:	✓
2. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Other management consulting activities.	✓
F. Menjalankan usaha-usaha di bidang Penelitian dan Pengembangan termasuk: Conducting business in the research and development sector, including:	
1. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam; Research and development of natural sciences;	✗
2. Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa; Research and development of technology and engineering;	✓
3. Penelitian dan pengembangan bioteknologi; Biotechnology research and development;	✗
4. Penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan; Agricultural and livestock science research and development;	✗

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activity based on the Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Executed/ Not Executed
5. Penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan; Fisheries and marine science research and development;	✗
6. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya; Natural science and other engineering technology research and development;	✗
7. Penelitian pasar; Market research;	✗
8. Sewa guna tanpa hak opsi aset *non-financial* bukan karya hak cipta. Leases without option rights for non-financial assets that are not copyrighted works.	✓
G. Menjalankan usaha-usaha di bidang Kawasan Industri; Conducting business in the Industrial Estate sector;	
H. Menjalankan usaha-usaha di bidang reparasi, termasuk: Conducting business in the repair sector, including:	
• Reparasi mesin untuk keperluan khusus. Repair of machinery for special purposes.	✓
I. Menjalankan usaha-usaha di bidang pergudangan dan penyimpanan, termasuk: Conducting business in the warehousing and storage sector, including:	
• Pergudangan dan penyimpanan. Warehousing and storage.	✓
J. Menjalankan usaha-usaha di bidang ekspedisi, termasuk: Conducting business in the expedition sector, including:	
1. Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (Emka dan Ead); Rail freight forwarding and land freight forwarding activities (Emka and Ead);	✓
2. Aktivitas ekspedisi muatan kapal (Emkl); Ship freight forwarding activities (Emkl);	✓
3. Angkutan multimoda. Multimodal transportation.	✓
K. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi, termasuk: Conducting business in the construction sector, including:	
1. Konstruksi gedung tempat tinggal; Constructing residential buildings;	✓
2. Konstruksi gedung perkantoran; Constructing office buildings;	✓
3. Konstruksi gedung industri; Constructing industrial buildings;	✓
4. Konstruksi gedung perbelanjaan; Constructing shopping buildings;	✓
5. Konstruksi gedung kesehatan; Constructing health buildings;	✓
6. Konstruksi gedung pendidikan; Constructing educational buildings;	✓
7. Konstruksi gedung penginapan; Constructing lodging buildings;	✓
8. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; Constructing entertainment and sports buildings;	✓
9. Konstruksi gedung lainnya; Constructing other buildings;	✓
10. Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung; Installing prefabricated structures for buildings;	✓
11. Konstruksi jalan raya; Constructing highways;	✓
12. Konstruksi jembatan dan jalan layang; Constructing bridges and overpasses;	✓
13. Konstruksi landasan pacu pesawat terbang; Constructing airplane runways;	✓
14. Konstruksi jalan rel dan jembatan rel; Constructing railways and railway bridges;	✓
15. Konstruksi terowongan; Constructing tunnels;	✓

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activity based on the Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Executed/ Not Executed
16. Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel; Installing prefabricated structures for road and railway construction;	✓
17. Konstruksi jaringan irigasi; Constructing irrigation networks;	✓
18. Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum, air limbah, dan drainase; Constructing buildings for processing, distributing, and storing drinking water, wastewater, and drainage;	✓
19. Konstruksi bangunan elektrikal; Constructing electrical buildings;	✓
20. Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai; Constructing telecommunications, marine navigation aids, and river signs;	✓
21. Konstruksi telekomunikasi navigasi udara; Constructing air navigation telecommunications;	✓
22. Konstruksi sentral telekomunikasi; Constructing telecommunications centers;	✓
23. Pembuatan/pengeboran sumur air tanah; Constructing/drilling groundwater wells;	✓
24. Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya; Constructing electrical and other telecommunications networks;	✓
25. Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah; Installing prefabricated buildings for the construction of irrigation, communication, and sewage networks;	✓
26. Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; Constructing water resource infrastructure;	✓
27. Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan; Constructing non-fishery port buildings;	✓
28. Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas; Constructing oil and gas processing and storage buildings;	✓
29. Pengerukan; Dredging;	✓
30. Konstruksi bangunan sipil lainnya; Constructing other civil engineering structures;	✓
31. Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya; Installing prefabricated buildings for the construction of other civil engineering structures;	✓
32. Pembongkaran; Demolition;	✓
33. Penyiapan lahan; Land preparation;	✓
34. Instalasi listrik; Electrical installation;	✓
35. Instalasi telekomunikasi; Telecommunications installation;	✓
36. Instalasi navigasi laut dan sungai; Marine and river navigation installation;	✓
37. Instalasi navigasi udara; Air navigation installation;	✓
38. Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya; Highway signal and sign installation;	✓
39. Instalasi elektronika; Electronic installation;	✓
40. Instalasi saluran air (plambing); Plumbing installation;	✓
41. Instalasi pemanas dan geotermal; Heating and geothermal installation;	✓
42. Instalasi minyak dan gas; Oil and gas installation;	✓
43. Instalasi pendingin dan ventilasi udara; Air conditioning and ventilation installation;	✓
44. Instalasi mekanikal; Mechanical installation;	✓

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activity based on the Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Executed/ Not Executed
45. Instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika; Meteorological, climatological, and geophysical installation;	✓
46. Instalasi konstruksi lainnya; Other construction installation;	✓
47. Pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium; Glass and aluminium installation;	✓
48. Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter, dan plafon; Floor, wall, sanitary ware, and ceiling installation;	✓
49. Pengecatan; Painting;	✓
50. Dekorasi interior; Interior decoration;	✓
51. Dekorasi eksterior; Exterior decoration;	✓
52. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya; Completing other building construction;	✓
53. Pemasangan pondasi dan tiang pancang; Installing foundations and piles;	✓
54. Pemasangan perancah (*steiger*); Installing scaffolding;	✓
55. Pemasangan atap/*roof covering*; Installing roofing/roof covering;	✓
56. Pemasangan kerangka baja; Installing steel frames;	✓
57. Penyewaan alat konstruksi dengan operator; Renting construction equipment with operators;	✓
58. Konstruksi khusus lainnya. Other special construction.	✓
L. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, termasuk; Conducting business in the electricity, gas, steam/hot water, and cold air supply sectors, including:	
1. Pembangkitan tenaga listrik; Electricity generation;	✓
2. Transmisi tenaga listrik; Electricity transmission;	✓
3. Pengadaan uap/air panas dan udara dingin. Supply of steam/hot water and cold air.	✓
M. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan batu bara dan lignit serta mineral, termasuk: Conducting businesses in the coal, lignite, and mineral mining sectors, including:	
1. Pertambangan batu bara; Coal mining;	✓
2. Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan; Coal gasification in the mining sites;	✓
3. Pertambangan lignit; Lignite mining;	✗
4. Pertambangan mineral, bahan kimia, dan bahan pupuk lainnya. Minerals, chemicals, and other fertilizers mining.	✗
Kegiatan Usaha Penunjang Supporting Business Activities	
N. Penunjang atau pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk; Supporting or ancillary activities to optimize the use of existing resources for:	
1. Angkutan melalui saluran pipa; Transportation via pipelines;	✓
2. Angkutan bermotor untuk barang umum; Motorized transportation for general goods;	✓
3. Angkutan laut dalam negeri liner untuk barang; Domestic sea transportation by liner for goods;	✓

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activity based on the Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Executed/ Not Executed
4. Angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang; Domestic sea transportation by tramper for goods;	✓
5. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus; Domestic sea transportation for special goods;	✓
6. Angkutan laut luar negeri *liner* untuk barang; International sea transportation by liner for goods;	✓
7. Angkutan laut luar negeri *tramper* untuk barang; International sea transportation by tramper for goods;	✓
8. Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus; International sea transportation for special goods;	✓
9. Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus; River and lake transportation for special goods;	✓
10. Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya. River and lake transportation for dangerous goods.	✓
O. Melaksanakan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Carrying out government assignments in accordance with corporate management principles and laws and regulations.	

Keterangan:
√ = telah dijalankan
X= belum dijalankan

Explanation:
√ = implemented
X= not yet implemented

Produk dan Jasa

Products and Services



Pupuk dan Amonia

Kegiatan produksi dan perdagangan produk pupuk dan amonia yang ditopang oleh 5 (lima) Entitas Anak, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Kegiatan perdagangan produk pupuk mencakup penyaluran pupuk bersubsidi atau *Public Service Obligation* (PSO) dan komersial.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 6 tahun 2025, PTPI melaksanakan pengadaan dan penyaluran

Fertilizer and Ammonia

Fertilizer and ammonia production and trading activities are supported by 5 (five) Subsidiaries, namely PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Fertilizer trading activities cover the distribution of subsidized fertilizers or Public Service Obligation (PSO) fertilizers and commercial fertilizers.

In accordance with Minister of Trade Regulation No. 15 of 2025 concerning the Implementing Regulations for Presidential Regulation No. 6 of 2025. PTPI procures and distributes subsidized fertilizers to

pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/petani dan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian meliputi Urea, NPK dan organik. Tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.02/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi.

Berikut adalah produk-produk yang dipasarkan oleh Pupuk Indonesia Group:

1. **UREA**
   Pupuk dengan kandungan N sebesar 46% dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi (komersial). Pupuk Urea memiliki fungsi membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kandungan protein tanaman.
2. **NPK**
   Merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan N, P, K, dan unsur mikro dengan komposisi yang variatif disesuaikan dengan permintaan pasar. Pupuk NPK dipasarkan untuk sektor subsidi maupun nonsubsidi (komersil). Pupuk NPK memiliki fungsi dapat meningkatkan hasil panen, membuat tanaman lebih hijau, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit dan kekeringan.
3. **Pupuk Organik**
   Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan menyuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pupuk Organik dipasarkan untuk sektor subsidi.
4. **Fosfat**
   Merupakan pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor non-subsidi komersial. Pupuk Fosfat terdiri dari SP-36 (P_2O_5 36%), SP-26 (P_2O_5 26%), dan Phosgreen (P_2O_5 20%) berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan bunga serta masaknya buah dan biji.
5. **ZA**
   Merupakan pupuk yang diproduksi PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor non-subsidi komersial. Pupuk ZA memiliki kandungan N sebesar 21% dan Sulfur 24% serta berfungsi untuk meningkatkan produksi khususnya tebu, meningkatkan kualitas hasil panen, menjadikan tanaman lebih sehat dan tahan terhadap hama.
6. **ZK**
   Merupakan pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor non-subsidi komersial. Pupuk ZK memiliki kandungan K_2O sebesar 50% dan Sulfur 17% dan berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah, membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, serta memperbaiki warna, aroma, dan rasa.
7. **Amonia**
   Merupakan bahan mentah industri kimia dengan kemurnian 99,5% yang diproduksi oleh Pupuk Indonesia Group dan dipasarkan untuk sektor dalam negeri maupun ekspor.

meet the needs of farmer groups and/or individual farmers covering the types of subsidized fertilizers stipulated by the Ministry of Agriculture, namely Urea, NPK, and Organic. The procedures for the provision, disbursement, and accountability of fertilizer subsidies are regulated in the Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.02/2016 dated April 26, 2016 concerning the Procedures for the Provision, Disbursement, and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds. The amount of fertilizer subsidy is calculated based on the difference between the cost of goods sold and the maximum retail price.

The following are the products marketed by Pupuk Indonesia Group:

1. **UREA**
   This fertilizer with N content of 46% is marketed to both the subsidized and non-subsidized (commercial) sectors. Urea fertilizer promotes greener plant growth, accelerates plant development and increases plant protein content.
2. **NPK**
   A compound fertilizer that contains N, P, K, and micro elements with a varied composition tailored to market demand. NPK fertilizers are marketed for both subsidized and non-subsidized sectors. NPK fertilizers function to increase crop yields, promote greener plant growth, and improve plant resistance to pest attacks and drought.
3. **Organic Fertilizer**
   Organic fertilizer is a type of fertilizer made entirely or partially from plant or animal materials that have been processed. It can be found in solid or liquid form and is utilized to provide organic matter, thereby enhancing the physical, chemical, and biological attributes of soil. Organic fertilizers are marketed for subsidized sector.
4. **Phosphate**
   A fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik and marketed for the non-subsidized (commercial) sector. Phosphate fertilizers consist of SP-36 (P_2O_5 P36%), SP-26 (P_2O_5 P26%), and Phosgreen (P_2O_5 P20%) which function to spur root and flower growth as well as fruit and seed ripening.
5. **ZA**
   A fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik and marketed for the non-subsidized sector. ZA fertilizer has an N content of 21% and 24% Sulfur and functions to increase production yields, particularly for sugarcane, improve crop quality, make plants healthier and more resistant to pests.
6. **ZK**
   A fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik and marketed for the non-subsidized sector. ZK fertilizer contains 50% K_2O and 17% Sulfur and functions to increase soil nutrients, make plants more upright and sturdy, and improve color, aroma, and taste.
7. **Ammonia**
   A chemical industry raw material with 99.5% purity produced by Pupuk Indonesia Group and marketed for domestic and export sectors.

Produk Lainnya

Asam Sulfat, Asam Fosfat, Aluminium Fluorida, dan lain-lain yang dipasarkan untuk sektor dalam negeri maupun ekspor. Dengan menawarkan nilai yang istimewa dan kinerja yang unggul, produk-produk Pupuk Indonesia Group telah membantu jutaan petani Indonesia untuk meningkatkan hasil dan kualitas panennya.

Jasa Konstruksi

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri ("Rekind"), Entitas Anak yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement & Construction* (EPC). Dengan pengalaman lebih dari 42 tahun di bidang EPC, Rekind telah membangun pabrik-pabrik skala besar di Indonesia di bidang minyak dan gas bumi (migas), kimia/petrokimia, mineral, infrastruktur, dan pembangkit listrik.

Lain-Lain

Kegiatan usaha pada segmen lain-lain merupakan kegiatan penunjang yang mendukung kelengkapan ekosistem usaha Pupuk Indonesia Group, antara lain perdagangan umum melalui PT Pupuk Indonesia Niaga dan PT Pupuk Indonesia Pangan, jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik, serta aktivitas pendukung lainnya yang memperkuat efektivitas operasional Grup. Segmen ini berperan dalam mendukung kelancaran rantai pasok, distribusi, penyediaan barang dan jasa, serta pemanfaatan sumber daya Grup secara lebih optimal.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan dan optimalisasi aset menjadi salah satu bagian dari kegiatan penunjang, terutama melalui pengelolaan fasilitas, pergudangan dan penyimpanan, kawasan industri, konstruksi, sewa guna aset non-finansial, serta evaluasi aset pendukung operasional dan distribusi. Pada tahun 2025, pengelolaan aset diarahkan untuk meningkatkan utilisasi aset properti dan aset *idle*, memperkuat kerja sama pemanfaatan aset, mendukung penyediaan gudang bagi core business dan ketahanan rantai pasok pupuk, serta menjadi penunjang pendapatan di luar *core business* Perusahaan. Upaya tersebut dilakukan secara terintegrasi melalui koordinasi dengan entitas anak dan entitas terkait di lingkungan Pupuk Indonesia Group guna memperkuat sinergi, efisiensi, dan penciptaan nilai Perusahaan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, pengelolaan aset menjadi salah satu fungsi pendukung yang memperkuat pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan. Fokus pengelolaan aset diarahkan pada pemanfaatan aset properti, peningkatan utilisasi aset *idle*, penguatan kerja sama pemanfaatan aset, serta evaluasi aset yang mendukung kegiatan operasional dan distribusi. Melalui pendekatan tersebut, Perusahaan berupaya memastikan bahwa aset yang dimiliki tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung operasional, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi, pendapatan, dan peningkatan nilai Perusahaan.

Pengelolaan aset juga dilaksanakan melalui koordinasi dengan entitas anak dan entitas terkait di lingkungan Pupuk Indonesia Grup, terutama untuk aset-aset yang memiliki nilai strategis, potensi kerja sama, atau relevansi terhadap kegiatan operasional Grup. Koordinasi ini menjadi penting agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, menghindari fragmentasi pemanfaatan aset, serta memperkuat sinergi antarentitas dalam mendukung tujuan usaha Perusahaan.

Other Products

Sulfuric Acid, Phosphoric Acid, Aluminium Fluoride and others products marketed for both the domestic and export sectors. By offering exceptional value and superior performance, Pupuk Indonesia Group's products have helped millions of Indonesian farmers to improve the yield and quality of their crops.

Construction services

Construction Services business activities are carried out by PT Rekayasa Industri ("Rekind"), a Subsidiary engaged in Engineering, Procurement & Construction (EPC). With more than 42 years of experience in EPC, Rekind has developed large-scale plants in Indonesia in the oil and gas, chemical/petrochemical, minerals, infrastructure, and power generation sectors.

Others

Business activities within the other segment constitute supporting activities that complement the business ecosystem of Pupuk Indonesia Group. These include general trading activities conducted through PT Pupuk Indonesia Niaga and PT Pupuk Indonesia Pangan, shipping and sea transportation services provided by PT Pupuk Indonesia Logistik, as well as other supporting activities that strengthen the Group's operational effectiveness. This segment plays a role in supporting the smooth operation of the supply chain, distribution, procurement of goods and services, and more optimal utilization of the Group's resources.

In this context, asset management and optimization form part of the supporting activities, particularly through the management of facilities, warehousing and storage, industrial estates, construction, leasing of non-financial assets, as well as evaluation of assets supporting operational and distribution activities. In 2025, asset management was directed toward increasing the utilization of property assets and idle assets, strengthening cooperation in asset utilization, supporting warehouse provision for the Company's core business and fertilizer supply chain resilience, as well as serving as a source of revenue outside the Company's core business. These efforts were carried out in an integrated manner through coordination with subsidiaries and affiliated entities within Pupuk Indonesia Group in order to strengthen synergy, efficiency, and the sustainable creation of corporate value.

In 2025, asset management became a supporting function that strengthened the Company's business operations. Asset management focuses on property asset utilization, increasing idle asset utilization, strengthening asset utilization collaboration, and evaluating assets that support operational and distribution activities. Through this approach, the Company endeavors to ensure its assets not only function as operational support but also contribute to efficiency, revenue, and increased corporate value.

Asset management is also carried out through coordination with subsidiaries and related entities within the Pupuk Indonesia Group, particularly for assets with strategic value, potential for collaboration, or relevance to the Group's operational activities. This coordination is crucial for more integrated asset management, avoids fragmented asset utilization, and strengthens synergies between entities in supporting the Company's business objectives.

Pasar yang Dilayani

Perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa terbagi menjadi dua, yakni produk dan layanan yang didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia, serta produk yang diekspor ke luar negeri. Sebaran pasar geografis sebagai negara tujuan ekspor yang dilakukan Perusahaan meliputi India, Australia, Filipina, Thailand, Chile, Vietnam, Korea Selatan, China, Taiwan, Jepang, serta beberapa negara lainnya.

Markets Served

The Company's marketing of products and services is divided into two, namely products and services that are distributed throughout Indonesia, and products that are exported overseas. The geographic market distribution to export destination countries carried out by the Company includes India, Australia, Filipina, Thailand, Chile, Vietnam, South Korea, China, Taiwan, Japan, and several other countries.

10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar
10 Largest Export Destination Countries



Realisasi penjualan Perusahaan pada tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut, yang mencakup penjualan pupuk untuk segmen PSO dan non-PSO, serta penjualan non-pupuk dan produk samping untuk pasar domestik dan luar negeri.

The realized Company sales for 2025 and 2024 are showned in the following table, which includes fertilizer sales for the PSO and non-PSO segments, as well as sales of non-fertilizer and by-products for the domestic and international markets.

Komposisi Persebaran Volume Penjualan Pupuk PSO dan Non PSO
Composition of Sales Volume Distribution of PSO and Non-PSO Fertilizers

Keterangan Description	**2025** (ton) **(1)**	**2024** (ton) **(2)**	**YoY** **%** **(2:1)**	
Pupuk Fertilizer				
PSO	8.110.571	7.327.950	10,68	●
Non-PSO:				
1. Domestik Domestic	2.849.546	3.145.658	(9,41)	●
2. Ekspor Export	1.834.259	1.527.104	20,11	●
Non-Pupuk dan Produk Samping Non-Fertilizer and By-Products				
1. Domestik Domestic	626.950	572.686	9,47	●
2. Luar Negeri Overseas	437.195	520.935	(16,07)	●

Keterangan:
Penggunaan warna **hijau** untuk memberikan gambaran tentang kinerja yang meningkat/membaik serta warna **merah** untuk kinerja yang terkoreksi/belum tercapai.

Note:
The use of **green** to indicate improving/enhancing performance and **red** to indicate corrected/not yet achieved performance.

Wilayah Operasi
Operational Area

Operasi PTPI di Indonesia tersebar di berbagai wilayah guna memastikan kelancaran rantai produksi dan distribusi produk ke seluruh pelosok negeri. PTPI memiliki pabrik dan kegiatan operasi yang terintegrasi di beberapa lokasi berikut:

PTPI's operations across Indonesia are strategically located to ensure an efficient production and distribution chain nationwide. PTPI has integrated factories and operational activities in the following locations:



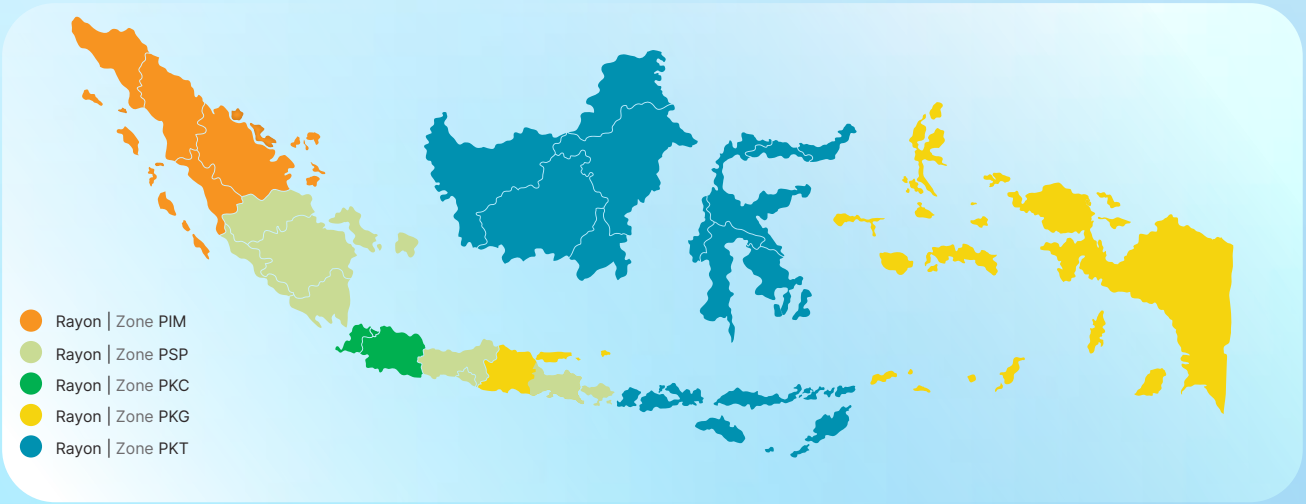
Wilayah Operasi PTPI per 31 Desember 2025

PTPI Operational Area as of December 31, 2025



Rayonisasi Tahun 2025 Produk Urea PSO

Zoning in 2025 Urea PSO Products



Rayonisasi Tahun 2025 Produk NPK PSO

Zoning in 2025 NPK PSO Products



Rayonisasi Tahun 2025 Produk NPK Kakao

Zoning in 2025 NPK Cocoa Products



Rayonisasi Tahun 2025
Produk Pupuk Organik Bersubsidi

Zoning in 2025
Subsidized Organic Fertilizer Products



Rayonisasi Tahun 2025
Produk ZA

Zoning in 2025
ZA Products



Wilayah Operasional Produk Komersial dan Non Pupuk

Untuk produk Komersial dan Non Pupuk tidak diberlakukan rayonisasi. Keputusan penjualan disesuaikan preferensi dari konsumen untuk memilih membeli barang dari masing-masing Anak Perusahaan.

Operational Areas for Commercial and Non-Fertilizer Products

Commercial and Non-Fertilizer products are not zoning. Sales decisions are tailored to consumer preferences for purchasing goods from each subsidiary.

Negara Tujuan Ekspor Produk Pupuk Indonesia Group
Export Destination Countries of Pupuk Indonesia Group Products

Negara Country	Produk (ton) Product (ton)					
	Urea	NPK	ZK	ALF3	Amonia Ammonia	Total
India India	811.043	125.999	2.625	2.180	64.151	1.005.998
Australia Australia	337.204	-	-	-	-	337.204
Filipina Philippines	166.547	-	-	-	552	167.099
Thailand Thailand	78.934	-	-	-	32.469	111.403
Chili Chile	102.722	-	-	-	-	102.722
Vietnam Viet Nam	62.673	-	1.200	-	21.079	84.952
Korea Selatan South Korea	17.724	-	-	-	50.807	68.531
Cina China	-	-	-	-	61.582	61.582
Taiwan Taiwan	12.072	-	-	-	47.411	59.483
Jepang Japan	1.855	-	120	18	51.905	53.898
Djibouti Djibouti	51.166	-	-	-	-	51.166
Myanmar Myanmar	32.952	-	-	-	-	32.952
Meksiko Mexico	-	-	-	-	31.013	31.013
Singapura Singapore	1.020	-	-	-	28.799	29.819
Spanyol Spain	-	-	-	-	25.525	25.525
Malaysia Malaysia	21.316	-	-	-	3.501	24.816
Amerika Serikat United States	92	-	-	-	16.202	16.294
Afrika Selatan South Africa	5.025	-	-	-	-	5.025
Mozambik Mozambique	620	-	-	-	-	620
Sierra Leone Sierra Leone	400	-	-	-	-	400
UEA UAE	-	-	375	-	-	375
Selandia Baru New Zealand	355	-	-	-	-	355

Negara Tujuan Ekspor Produk Pupuk Indonesia Group
Export Destination Countries of Pupuk Indonesia Group Products

Negara Country	Produk (ton) Product (ton)					
	Urea	NPK	ZK	ALF3	Amonia Ammonia	Total
Timor Leste Timor-Leste	160	-	-	-	-	160
Pantai Gading Ivory Coast	20	-	-	-	-	20
French Polynesia French Polynesia	20	-	-	-	-	20
New Caledonia New Caledonia	20	-	-	-	-	20
Jumlah Total	**1.703.940**	**125.999**	**4.320**	**2.198**	**434.997**	**2.271.454**

Keanggotaan Dalam Asosiasi
Membership in Associations

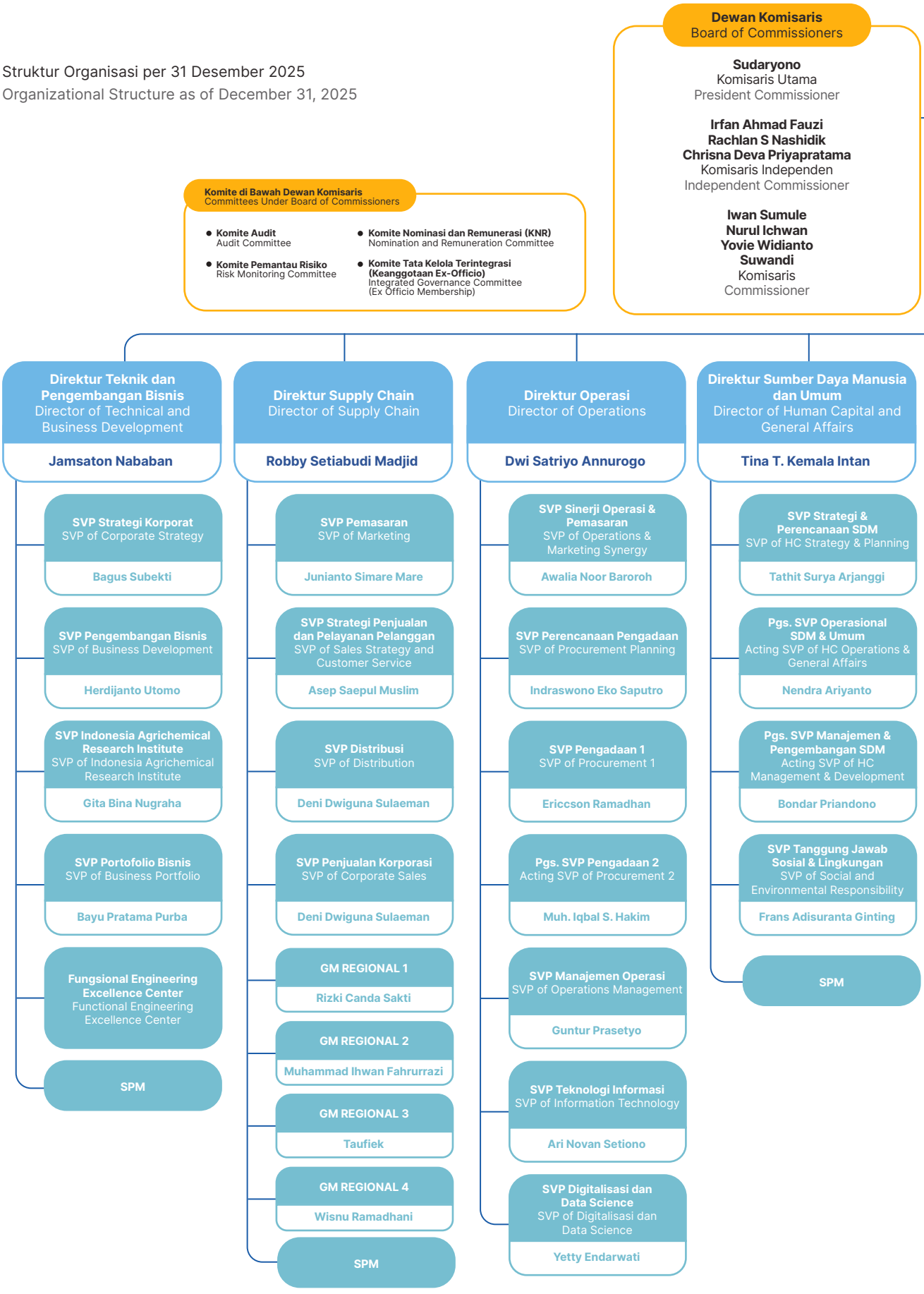
PTPI telah terdaftar sebagai anggota di beberapa organisasi sebagai strategi penguatan posisi dan peran dalam pasar perpupukan, baik di tataran nasional maupun global, sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

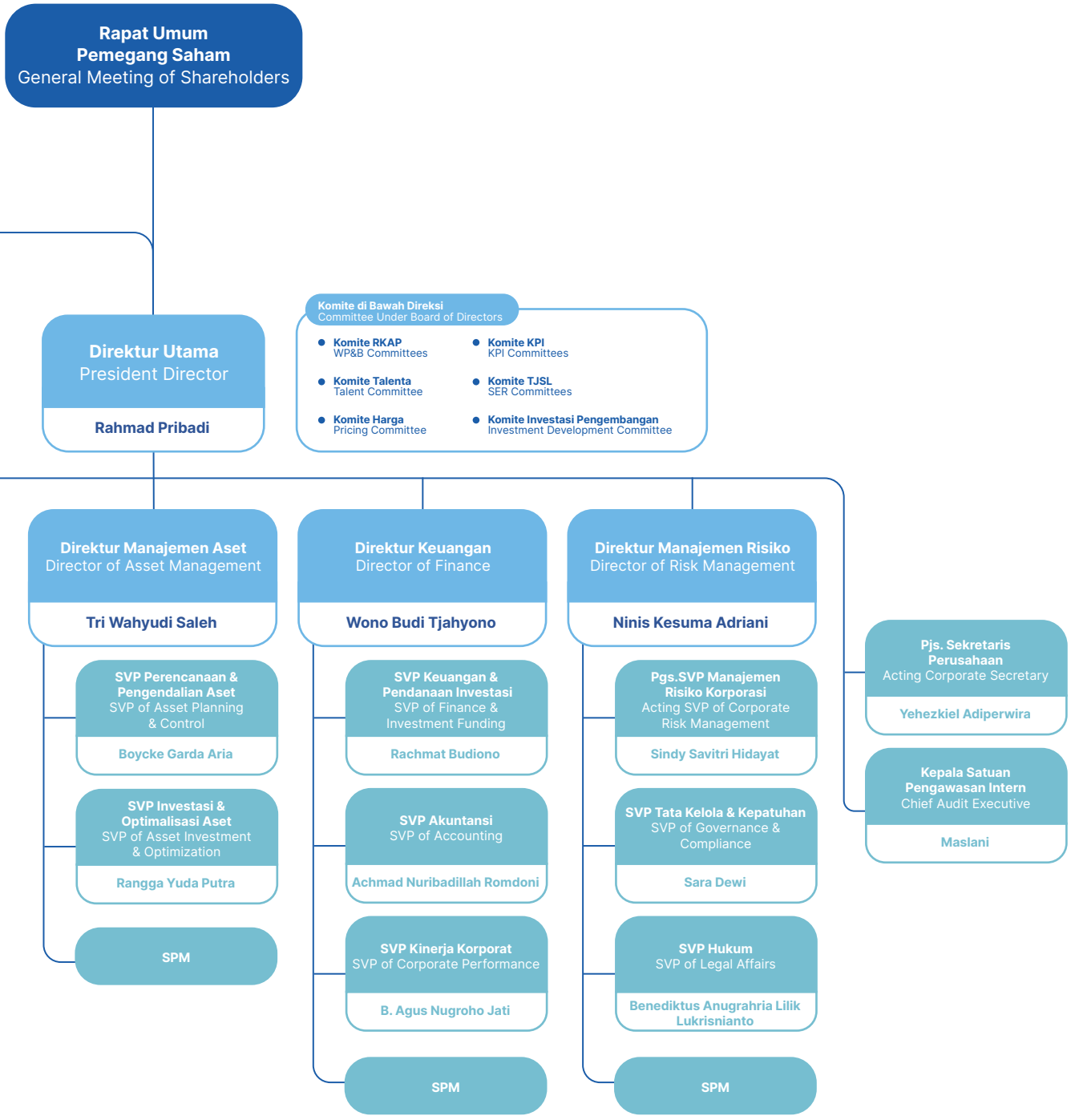
PTP is registered as a member in several organizations as a strategy to strengthen its position and role in the national and global fertilizer market, as shown in the table below:

Nama Organisasi/Asosiasi Organization/Association Name	Ruang Lingkup Scope	Posisi Keikutsertaan Position Held
International Fertilizer Association (IFA)	Internasional International	Anggota Tetap Permanent Member
Massachusetts Institute of Technology-Industrial Liaison Program (MIT-ILP)	Internasional International	Anggota Member
Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) Indonesian Fertilizer Entrepreneurs Association (AP PI)	Nasional National	Ketua Presidium Chairperson of the Presidium
Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP-IPI) Professional Certification Institute (LSP-IPI)	Nasional National	Anggota Member
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)	Nasional National	Anggota Member
Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Nasional National	Anggota Member
BUMN School of Excellence	Nasional National	Anggota Member

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Struktur Organisasi per 31 Desember 2025
Organizational Structure as of December 31, 2025




Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
Direktur Utama
President Director
Rahmad Pribadi
Komite di Bawah Direksi
Committee Under Board of Directors
Komite RKAP
WP&B Committees
Komite KPI
KPI Committees
Komite Talenta
Talent Committee
Komite TJSL
SER Committees
Komite Harga
Pricing Committee
Komite Investasi Pengembangan
Investment Development Committee
Direktur Manajemen Aset
Director of Asset Management
Tri Wahyudi Saleh
SVP Perencanaan & Pengendalian Aset
SVP of Asset Planning & Control
Boycke Garda Aria
SVP Investasi & Optimalisasi Aset
SVP of Asset Investment & Optimization
Rangga Yuda Putra
SPM
Direktur Keuangan
Director of Finance
Wono Budi Tjahyono
SVP Keuangan & Pendanaan Investasi
SVP of Finance & Investment Funding
Rachmat Budiono
SVP Akuntansi
SVP of Accounting
Achmad Nuribadillah Romdoni
SVP Kinerja Korporat
SVP of Corporate Performance
B. Agus Nugroho Jati
SPM
Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management
Ninis Kesuma Adriani
Pgs.SVP Manajemen Risiko Korporasi
Acting SVP of Corporate Risk Management
Sindy Savitri Hidayat
SVP Tata Kelola & Kepatuhan
SVP of Governance & Compliance
Sara Dewi
SVP Hukum
SVP of Legal Affairs
Benediktus Anugrahria Lilik Lukrisnianto
SPM
Pjs. Sekretaris Perusahaan
Acting Corporate Secretary
Yehezkiel Adiperwira
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Chief Audit Executive
Maslani

Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Direksi
Committees Under Board of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

	Komisaris Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner
Sudaryono **Komisaris Utama** President Commissioner	**Iwan Sumule** **Nurul Ichwan** **Yovie Widianto** **Suwandi**	**Irfan Ahmad Fauzi** **Rachlan S Nashidik** **Chrisna Deva Priyapratama**

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi didukung oleh komite-komite yang berperan memberikan masukan, evaluasi, serta rekomendasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna mendukung penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dan pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan, sebagaimana disajikan di bawah ini.

In supporting the effective implementation of the Company's supervisory and management functions, the Board of Commissioners and the Board of Directors are supported by committees that provide input, evaluation, and recommendations in accordance with their respective areas of responsibility to support the implementation of good corporate governance and the sustainable achievement of the Company's objectives, as presented below.

Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees Under Board of Commissioners

Komite Audit
Audit Committee

Rachlan S. Nashidik
Ketua
Chairperson

Febrio Nathan Kacaribu*
Wakil Ketua I
Vice Chairperson I

Nurul Ichwan
Wakil Ketua II
Vice Chairperson II

Tubagus Donny Syafardan
Anggota
Member

Arief Ibnu Nugroho
Anggota
Member

*Per 15 Desember 2025 tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Audit karena tidak lagi menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris.
*As of December 15, 2025, he no longer serve as Vice Chair of the Audit Committee because he is no longer a member of the Board of Commissioners.

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

Suwandi
Ketua
Chairperson

Iwan Sumule
Wakil Ketua I
Vice Chairperson I

Irfan Ahmad Fauzi
Wakil Ketua II
Vice Chairperson II

Emmanuel Setyo Budi Nugroho
Anggota
Member

Riza Azmi
Anggota
Member

Stanislaus Riyanta
Anggota
Member

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)
Nomination and Remuneration Committee

Chrisna Deva Priyapratama
Ketua
Chairperson

Yovie Widianto
Wakil Ketua I
Vice Chairperson I

R. Nurhidayat
Anggota
Member

Aznil
Anggota
Member

Komite Tata Kelola Terintegrasi (Keanggotaan Ex-Officio)
Integrated Governance Committee (Ex Officio Membership)

Ketua merangkap Anggota:
Komisaris Utama PTPI
Chairperson concurrent Member: President Commissioner of PTPI

Anggota:
- **Anggota Dewan Komisaris PTPI**
- **Komisaris Utama PKG**
- **Komisaris Utama PKC**
- **Komisaris Utama PKT**
- **Komisaris Utama PIM**
- **Komisaris Utama PSP**
- **Komisaris Utama Rekind**
- **Komisaris Utama PIN**
- **Komisaris Utama PILOG**
- **Komisaris Utama PIP**

Members:
- Member of the Board of Commissioners of PTPI
- President Commissioner of PKG
- President Commissioner of PKC
- President Commissioner of PKT
- President Commissioner of PIM
- President Commissioner of PSP
- President Commissioner of Rekind
- President Commissioner of PIN
- President Commissioner of PILOG
- President Commissioner of PIP

Komite di Bawah Direksi
Committees Under Board of Directors

Komite RKAP
WP&B Committees

Pengarah
- Direktur Utama
- Wakil Direktur Utama
- Direktur Produksi
- Direktur Sumber Daya Manusia
- Direktur Transformasi Bisnis
- Direktur Pemasaran
- Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha

Penanggung Jawab
- Direktur Keuangan
- Direktur Manajemen Risiko

Ketua
SVP Kinerja Korporat

Sekretaris
VP Anggaran

Penanggung Jawab Bidang
- Kesekretariatan, Hukum & GCG: Sekretaris Perusahaan
- Portofolio Bisnis: SVP Portofolio Bisnis
- Pengembangan Korporat: SVP Pengembangan
- Operasi: SVP Manajemen Operasi
- K3LH: Pgs. SVP K3LH
- Pengadaan: SVP Perencanaan Pengadaan
- Keuangan & Investasi: SVP Keuangan & Investasi

- Inisiatif Strategis & Transformasi Bisnis: SVP Strategi Korporat
- SDM: SVP Operasional Sumber Daya Manusia; SPM Manajemen Talenta & Kinerja
- Strategi Pemasaran: SVP Strategi Pemasaran
- Manajemen PSO: SVP Perencanaan & Manajemen PSO
- Pemasaran Komersil: SVP Pemasaran Komersil

- Distribusi: SVP Distribusi
- *Supply Chain* Management: SPM Inbound & Outbound Control Tower
- Risiko RKAP: SVP Manajemen Risiko Korporasi

Directors
- President Director
- Vice President Director
- Director of Production
- Director of Human Capital
- Director of Business Transformation
- Director of Marketing
- Director of Portfolio and Business Development

Persons in Charge
- Director of Finance
- Director of Risk Management

Chairperson
SVP of Corporate Performance

Secretary
VP Budget

Persons in Charge
- Secretariat, Legal & GCG: Corporate Secretary

- Business Portfolio: SVP Business Portfolio
- Corporate Development: SVP Development
- Operations: SVP of Operations Management
- HSE: Acting SVP HSE
- Procurement: SVP of Procurement Planning
- Finance & Investment: SVP of Finance & Investment
- Strategic Initiatives & Business Transformation: SVP of Corporate Strategy
- HC: SVP of HC Operations; SPM Talent & Performance Management
- Marketing Strategy: SVP of Marketing Strategy
- PSO Management: SVP of PSO Planning & Management
- Commercial Marketing: SVP of Commercial Marketing
- Distribution: SVP of Distribution
- Supply Chain Management: SPM of Inbound & Outbound Control Tower
- RKAP Risk: SVP of Enterprise Risk Management

Komite Investasi Pengembangan
Investment Development Committee

Komite Investasi Pengembangan A
Investment Development Committee A

Fungsi Bisnis
Business Function

- **Direktur yang membawahi fungsi teknik dan pengembangan bisnis**
- **Direktur yang membawahi fungsi operasi**
- **Direktur yang membawahi fungsi pemasaran**
- Director in charge of technical and business development
- Director in charge of operations
- Director in charge of marketing

Fungsi Risiko
Risk Function

- **Direktur Utama**
- **Direktur yang membawahi fungsi keuangan**
- **Direktur yang membawahi fungsi SDM**
- **Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko**
- **Direktur yang membawahi fungsi manajemen aset**
- President Director
- Director in charge of finance
- Director in charge of HC
- Director in charge of risk management
- Director in charge of asset management

Komite Investasi Pengembangan B
Investment Development Committee B

Fungsi Bisnis
Business Function

- **Direktur yang membawahi fungsi teknik dan pengembangan bisnis**
- **Direktur yang membawahi fungsi operasi**
- **Direktur yang membawahi fungsi pemasaran**
- Director in charge of technical and business development
- Director in charge of operations
- Director in charge of marketing

Fungsi Risiko
Risk Function

- **Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko**
- **Direktur yang membawahi fungsi keuangan**
- **Direktur yang membawahi fungsi SDM**
- Director in charge of risk management
- Director in charge of finance
- Director in charge of HC

Komite Talenta
Talent Committee

- **Ketua : Direktur Utama**
- **Sekretaris : Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum**
- **Anggota : Direksi**

- Chairperson : President Director
- Secretary : Director of Human Capital and General Affairs
- Member : Board of Director

Komite Harga
Pricing Committee

- **Direktur Utama**
- **Direktur Keuangan**
- **Direktur *Supply Chain***

- President Director
- Director of Finance
- Director of Supply Chain

Komite KPI
KPI Committee

Penasihat
Direktur Utama
Ketua I
Direktur Keuangan
Ketua II
Direktur Sumber Daya Manusia
Ketua III
Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis
Ketua IV
Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris I
SVP Kinerja Korporat
Sekretaris II
SVP Manajemen & Pengembangan SDM

Advisor
President Director
Chairperson I
Director of Finance
Chairperson II
Director of Human Capital
Chairperson III
Director of Technical and Business Development
Chairperson IV
Director of Risk Management
Secretary I
SVP of Corporate Performance
Secretary II
SVP of HC Management & Development

Komite TJSL
SER Committee

Ketua
Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko PTPI
Sekretaris
SVP Umum & TJSL PTPI
Anggota
- Direktur Keuangan dan Umum PKG
- Direktur Keuangan dan Umum PKC
- Direktur Keuangan dan Umum PKT
- Direktur Keuangan dan Umum PIM
- Direktur Keuangan dan Umum PSP
- Direktur Keuangan dan SDM Rekind

Chairperson
Director of HC, Governance, and Risk Management PTPI
Secretary
SVP of General Affairs and SER PTPI
Members
- Director of Finance and General Affairs PKG
- Director of Finance and General Affairs PKC
- Director of Finance and General Affairs PKT
- Director of Finance and General Affairs PIM
- Director of Finance and General Affairs PSP
- Director of Finance and Human Capital Rekind

Profil Direksi
Board of Directors Profiles



Rahmad Pribadi

Direktur Utama
President Director

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 55 tahun | Age 55 years

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 27 Juli 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028, Periode Pertama.
Term of Office: July 27, 2023–GMS on Performance in 2028, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama PTPI pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan keputusan No. SK-212/MBU/07/2023.	**Appointment History** First served as President Director of PTPI on July 27, 2023 based on decision No. SK-212/MBU/07/2023.
Riwayat Pendidikan • *Master of Public Administration,* Harvard University, USA (2013); • *Bachelor of Business Administration*, University of Texas, Austin (1992).	**Educational Background** • Master of Public Administration, Harvard University, USA (2013); • Bachelor of Business Administration, University of Texas, Austin (1992).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Certified Risk Executive Leader (CREL).	**Training and Professional Certification** Certified Risk Executive Leader (CREL).
Pengalaman Kerja • Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (2020 – 2023); • Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (2018 – 2020); • Direktur Utama PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2017 – 2018); • Direktur SDM & Umum PT Petrokimia Gresik (2016 – 2017); • *Founder & Director* PPRL Group (2009 – 2016); • Chief Executive Officer PT Bakrie Niagatama (2000 – 2009); • Chief Operating Officer-Trading PT Bakrie & Brothers Tbk (1998 – 2000); • Manager Audit Internal PT Bakrie dan Brothers Tbk (1997-1998).	**Work Experience** • President Director, PT Pupuk Kalimantan Timur (2020 – 2023); • President Director, PT Petrokimia Gresik (2018 – 2020); • President Director, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2017 – 2018); • HC & General Director, PT Petrokimia Gresik (2016 – 2017); • Founder & Director, PPRL Group (2009 – 2016); • Chief Executive Officer, PT Bakrie Niagatama (2000 – 2009); • Chief Operating Officer – Trading, PT Bakrie & Brothers Tbk (1998 – 2000); • Internal Audit Manager PT Bakrie & Brothers Tbk (1997–1998).
Informasi Rangkap Jabatan Tidak memiliki rangkap jabatan	**Concurrent Position Information** Does not hold concurrent positions
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, or with the majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Dwi Satriyo Annurogo

Direktur Operasi
Director of Operation

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 58 tahun | **Age 58 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Pertama.
Term of Office: June 16, 2025–GMS on Performance in 2030, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Direktur Operasi PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.	**Appointment History** First served as Director of Operations of PTPI on June 16, 2025 based on Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.
Riwayat Pendidikan • Magister Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2007); • Sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991).	**Educational Background** • Master's degree in Chemical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2007); • Bachelor's degree in Chemical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Certified Risk Executive Leader (CREL).	**Training and Professional Certification** Certified Risk Executive Leader (CREL).
Pengalaman Kerja • Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (2020 - 2025); • Direktur PT Perkebunan Nusantara XI (2020); • Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X (2017 - 2020); • Direktur Produksi, Teknik, dan Pengembangan PT Pupuk Iskandar Muda (2016 - 2017); • General Manager Pabrik III PT Petrokimia Gresik (2014 – 2016); • General Manager pabrik II PT Petrokimia Gresik (2011 – 2014).	**Work Experience** • President Director, PT Petrokimia Gresik (2020 - 2025); • Director, PT Perkebunan Nusantara XI (2020); • President Director, PT Perkebunan Nusantara X (2017 - 2020); • Director of Production, Engineering, and Development, PT Pupuk Iskandar Muda (2016 - 2017); • General Manager of Plant III PT Petrokimia Gresik (2014–2016); • General Manager of Plant II PT Petrokimia Gresik (2011–2014).
Informasi Rangkap Jabatan Tidak memiliki rangkap jabatan.	**Concurrent Position Information** Does not hold concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, or with the majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Wono Budi Tjahyono

Direktur Keuangan
Director of Finance

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 58 tahun | **Age 58 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 22 Desember 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026, Periode Pertama.
Term of Office: December 22, 2021 – GMS on Performance in 2026, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Direktur Keuangan & Investasi PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK-408/MBU/12/2021, lalu dialihkan sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK-22/MBU/02/2023, kemudian dialihkan sebagai Direktur Keuangan PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK - 303/MBU/11/2023.	**Appointment History** First appointed as Finance & Investment Director of PTPI on December 22, 2021, based on Decree No. SK-408/MBU/12/2021, then transferred to Director of Finance & Risk Management of PTPI on February 3, 2023, based on Decree No. SK-22/MBU/02/2023, and then transferred to Director of Finance of PTPI on November 2, 2023, based on Decree No. SK - 303/MBU/11/2023.
Riwayat Pendidikan • *Master of Business Administration* Universitas Gadjah Mada (2009); • Sarjana Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1991).	**Educational Background** • Master of Business Administration degree from Universitas Gadjah Mada (2009); • Bachelor's degree in Agriculture from Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1991).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi • *Certificate in Accounting, Finance & Business* (CAFB); • Chief Finance Officer (CFO); • *Chartered Accountant* (CA); • *Certified Risk Executive Leader* (CREL).	**Training and Professional Certification** • Certificate in Accounting, Finance & Business (CAFB); • Chief Finance Officer (CFO); • Chartered Accountant (CA); • Certified Risk Executive Leader (CREL).
Pengalaman Kerja • Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPI (2023); • Direktur Keuangan & Investasi PTPI (2021–2023); • *Senior Executive Vice President* PT Bank Mandiri Tbk (2021); • *Senior Vice President* PT Bank Mandiri Tbk (2016–2021).	**Work Experience** • Director of Finance & Risk Management, PTPI (2023); • Director of Finance & Investment, PTPI (2021–2023); • Senior Executive Vice President, PT Bank Mandiri Tbk (2021); • Senior Vice President, PT Bank Mandiri Tbk (2016–2021).
Informasi Rangkap Jabatan Tidak memiliki rangkap jabatan.	**Concurrent Position Information** Does not hold concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, or with the majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Tina T. Kemala Intan

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Director of Human Capital and General Affairs

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 66 tahun | **Age 66 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 22 Desember 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026, Periode Pertama.
Term of Office: December 22, 2021 - GMS on Performance in 2026, First Period.

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK – 408/MBU/12/2021, lalu dialihkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK – 22/MBU/02/2023, kemudian dialihkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.

Appointment History
First appointed as Director Human Capital, Governance, & Risk Management of PTPI on December 22, 2021, based on Decree No. SK–408/MBU/12/2021. Was then transferred to the position of HC Director of of PTPI on February 3, 2023, based on Decree No. SK–22/MBU/02/2023. Was then transferred to the position of HC & General Affairs Director of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Psikologi Universitas Padjadjaran (1985).

Educational Background
Bachelor's degree in Psychology Universitas Padjadjaran (1985).

Pelatihan dan Sertifikasi Profesi
Certified Professional Organization Development (CPOD).

Training and Professional Certification
Certified Professional Organization Development (CPOD).

Pengalaman Kerja
- Direktur Sumber Daya Manusia PTPI (2023 – 2025);
- Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko PTPI (2021–2023);
- Komisaris Utama PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (2019 – 2022);
- Komisaris Utama PT Industri Kantong Semen Gresik (2019 – 2022);
- Direktur SDM dan Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2019–2021);
- Komisaris PT Angkasa Pura Solusi (2018–2019);
- Director of Human Capital, General Affair, and IT PT Angkasa Pura II (Persero) (2017–2019).
- SVP Organization Development, Human Capital and General Service PT Merpati Nusantara Airlines (2010 – 2012)
- Kepala Biro SDM Komisi Pemberantasan Korupsi (2005 – 2010)
- Head of Change Management Project PT Merpati Nusantara Airlines (2004 – 2005)
- General Manager Human Resources Management PT Merpati Nusantara Airlines (1999 – 2004)

Work Experience
- Director of Human Capital, PTPI (2023 – 2025);
- Director of HC, Governance, & Risk Management, PTPI (2021–2023);
- President Commissioner, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (2019 – 2022);
- President Commissioner, PT Industri Kantong Semen Gresik (2019 – 2022);
- Director of HC and Legal Affairs, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2019 – 2021);
- Commissioner, PT Angkasa Pura Solusi (2018 – 2019);
- Director of Human Capital, General Affairs, and IT, PT Angkasa Pura II (Persero) (2017 – 2019);
- Senior Vice President of Organization Development, Human Capital, and General Services PT Merpati Nusantara Airlines (2010–2012)
- Head of the Human Resources Bureau, Corruption Eradication Commission (2005–2010)
- Head of the Change Management Project, PT Merpati Nusantara Airlines (2004–2005)
- General Manager of Human Resources Management, PT Merpati Nusantara Airlines (1999–2004)

Informasi Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Position Information
Does not hold concurrent positions.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Affiliated Relationships
Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, or with the majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Robby Setiabudi Madjid

Direktur *Supply Chain*
Director of Supply Chain

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 46 tahun | **Age 46 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Pertama.
Term of Office: June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030, First Period.

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur *Supply Chain* PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.

Appointment History
First served as Director of Supply Chain of PTPI on June 16, 2025 based on Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.

Riwayat Pendidikan
- *Master of Commerce with distinction of Valedictorian* dari Sekolah Bisnis University of Queensland, Australia (2011);
- Sarjana Akuntansi Ekonomi Universitas Airlangga (2002).

Educational Background
- Master of Commerce with distinction of Valedictorian from Sekolah Bisnis University of Queensland, Australia (2011);
- Bachelor of Accounting degree in Economics Universitas Airlangga (2002).

Pelatihan dan Sertifikasi Profesi
- *Qualified Risk Management Professional* (QRMP).
- *Certified Risk Executive Leader* (CREL).

Training and Professional Certification
- Qualified Risk Management Professional (QRMP).
- Certified Risk Executive Leader (CREL).

Pengalaman Kerja
- Direktur Keuangan & Umum PT Petrokimia Gresik (2023 – 2025);
- Senior Vice President Keuangan dan Pendanaan Investasi PTPI (2021-2023);
- Senior Vice President Pengadaan Strategis PTPI (2021);
- Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Pangan (2019 – 2021).

Work Experience
- Director of Finance & General Affairs, PT Petrokimia Gresik (2023 – 2025);
- Senior Vice President Finance and Investment Funding PTPI (2021-2023);
- Senior Vice President Strategic Procurement PTPI (2021);
- Director of Finance, PT Pupuk Indonesia Pangan (2019 – 2021).

Informasi Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Position Information
Does not hold concurrent positions.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Affiliated Relationships
Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, or with the majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Jamsaton Nababan

Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis
Director of Technical and Business Development

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 63 tahun | **Age 63 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 16 Juli 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026, Periode Pertama.
Term of Office: July 16, 2021–GMS on Performance in 2026 GMS, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PTPI pada tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan keputusan No. SK–237/MBU/07/2021, kemudian dialihkan sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.	**Appointment History** First appointed as Portfolio & Business Development Director of PTPI on July 16, 2021, based on Decree No. SK–237/MBU/07/2021, was then transferred to Director of Technic and Business Development of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.
Riwayat Pendidikan Sarjana Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara (1987).	**Educational Background** Bachelor's degree in Mechanical Engineering, Universitas Sumatera Utara (1987).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	**Training and Professional Certification** Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Pengalaman Kerja • Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PTPI (2021 – 2025); • *President Director* PT Pertamina EP Cepu (2017 – 2021); • *Development Director* PT Pertamina EP Cepu (2016 – 2017); • *Vice President Surface Facilities* PT Pertamina EP (2013 – 2016).	**Work Experience** • Director of Portfolio & Business Development, PTPI (2021 – 2025); • President Director, PT Pertamina EP Cepu (2017 – 2021); • Director of Development, PT Pertamina EP Cepu (2016 – 2017); • Vice President of Surface Facilities, PT Pertamina EP (2013 – 2016).
Informasi Rangkap Jabatan Tidak memiliki rangkap jabatan.	**Concurrent Position Information** Does not hold concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, or with the majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Ninis Kesuma Adriani

Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 59 tahun | **Age 59 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 2 November 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028, Periode Pertama.
Term of Office: November 2, 2023 – GMS on Performance in 2028, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Direktur Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK–303/MBU/11/2023.	**Appointment History** First served as Director of Risk Management of PTPI on November 2, 2023 based on decision No. SK–303/MBU/11/2023.
Riwayat Pendidikan • *Master of Business Administration*, State University of New York at Buffalo, USA (2000); • Sarjana Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1989).	**Educational Background** • Master of Business Administration, State University of New York at Buffalo, USA (2000); • Bachelor of Agriculture degree, Institut Pertanian Bogor (1989).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi • *Certified Risk Executive Leader* (CREL). • *Certified Professional Management Accountant* (CPMA) • Sertifikasi Risk Management level IV BSMR • Certified Professional Management Accountant (IAMI)	**Training and Professional Certification** • Certified Risk Executive Leader (CREL). • Certified Professional Management Accountant (CPMA) • Certified Risk Management Level IV BSMR • Certified Professional Management Accountant (IAMI)
Pengalaman Kerja • Direktur Perencanaan Strategis & Keuangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2022–2023); • Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, & Manajemen Risiko PT Pegadaian (2021 – 2022); • Direktur Keuangan & Perencanaan Strategis PT Pegadaian (2018 – 2021); • Kepala Divisi Hubungan Investor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017–2018).	**Work Experience** • Director of Strategic Planning and Finance, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2022 – 2023); • Director of Finance, Strategic Planning, & Risk Management, PT Pegadaian (2021 – 2022); • Director of Finance & Strategic Planning, PT Pegadaian (2018 – 2021); • Head of the Investor Relations Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017–2018).
Informasi Rangkap Jabatan Tidak memiliki rangkap jabatan.	**Informasi Rangkap Jabatan** Does not hold concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, or with the majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Tri Wahyudi Saleh

Direktur Manajemen Aset
Director of Asset Management

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 58 tahun | **Age 58 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 2 November 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028, Periode Pertama.
Term of Office: November 2, 2023 – GMS on Performance in 2028, First Period.

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Pemasaran PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK–303/MBU/11/2023, kemudian dialihkan sebagai Direktur Manajemen Aset PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.

Appointment History
First served as Director of Marketing of PTPI on November 2, 2023, based on Decree No. SK–303/MBU/11/2023, and was then transferred to Director of Asset Management of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (2003);
- Sarjana Biologi, Universitas Nasional, Jakarta (1991).

Educational Background
- Master of Agribusiness Management degree from Institut Pertanian Bogor (2003);
- Bachelor of Biology degree, Universitas Nasional, Jakarta (1991).

Pelatihan dan Sertifikasi Profesi
Certified Risk Executive Leader (CREL).

Training and Professional Certification
Certified Risk Executive Leader (CREL).

Pengalaman Kerja
- Direktur Pemasaran PTPI (2021 – 2025);
- Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020 – 2023);
- Direktur Operasional & Pelayanan Publik Perum BULOG (2018 – 2020);
- Direktur Komersial Perum BULOG (2017 – 2018);
- Direktur Pengadaan Perum BULOG (2017);
- Direktur Operasional & Pelayanan Publik Perum BULOG (2016 – 2017);
- Kepala Divisi Pengadaan Beras Direktorat Pengadaan BULOG (2016);
- Direktur Utama PT Jasa Prima Logistik BULOG (2013 – 2016);
- General Manager Divisi Jasa Direktorat Komersial BULOG (2012 – 2013).

Work Experience
- Director of Marketing, PTPI (2021 – 2025);
- President Director, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020 – 2023);
- Director of Operations & Public Services, Perum BULOG (2018 – 2020);
- Commercial Director, Perum BULOG (2017 – 2018);
- Director of Procurement, Perum BULOG (2017);
- Director of Operations & Public Services, Perum BULOG (2016 – 2017);
- Head of the Rice Procurement Division, Directorate of Procurement, BULOG (2016);
- President Director, PT Jasa Prima Logistik BULOG (2013 – 2016).
- General Manager of the Services Division, Commercial Directorate, BULOG (2012–2013).

Informasi Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Position Information
Does not hold concurrent positions.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Affiliated Relationships
Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, or with the majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Perubahan Komposisi Direksi serta Alasan Perubahannya

Changes to the Board of Directors Composition and Reasons for Changes

Pada tahun 2025, PTPI menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di tanggal 16 Juni 2025. Dari terselenggaranya RUPS Tahunan tersebut, komposisi anggota Direksi PTPI mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana penjelasan berikut.

In 2025, PTPI held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 16, 2025, and following the meeting, the PTPI Board of Directors composition underwent changes to meet the Company's needs, as shown below:

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan 2025

Komposisi Direksi sebelum RUPS Tahunan 2025 sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 7 (tujuh) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Board of Directors Composition and Basis for Appointment Prior to the 2025 AGMS

The Board of Directors composition prior to the 2025 AGMS comprised 9 (nine) members, consisting of one President Director, one Vice President Director, and 7 (seven) Directors. The Board of Directors composition and basis for appointment are shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan 2025
Board of Directors Composition and Basis for Appointment Prior to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Rahmad Pribadi	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-212/MBU/07/2023 tanggal 27 Juli 2023. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-212/MBU/07/2023 dated July 27, 2023.	27 Juli 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028 July 27, 2023 – GMS on Performance in 2028	Ke – 1 1st
Gusrizal	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Pertama kali menjabat sebagai Direktur PTPI pada tanggal 4 Desember 2015 berdasarkan keputusan No. SK-243/MBU/12/2015, kemudian dialihkan sebagai Direktur Investasi PTPI pada tanggal 13 September 2017 berdasarkan keputusan No. SK-196/MBU/09/2017, kemudian dialihkan sebagai Direktur Pemasaran PTPI pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan keputusan No. SK-263/ MBU/08/2020, kemudian diberhentikan dan diangkat sebagai Direktur Pemasaran PTPI pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan keputusan No. SK-377/MBU/11/2020, kemudian dialihkan sebagai Wakil Direktur Utama PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK-303/MBU/11/2023. First served as Director of PTPI on December 4, 2015, based on Decree No. SK-243/MBU/12/2015, then became Investment Director of PTPI on September 13, 2017, based on Decree No. SK-196/MBU/09/2017, and then became Director of Marketing of PTPI on August 4, 2020, based on Decree No. SK-263/MBU/08/2020. Was dismissed and appointed as Director of Marketing of PTPI on November 20, 2020, based on Decree No. SK-377/MBU/11/2020, and then became Vice President Director of PTPI on November 2, 2023, based on Decree No. SK-303/MBU/11/2023.	20 November 2020 – RUPS Kinerja di Tahun 2025 November 20, 2020 – GMS on Performance in 2025	Ke – 2 2nd
Bob Indiarto	Direktur Produksi Director of Production	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020.	4 Agustus 2020 – RUPS Kinerja di Tahun 2025 August 4, 2020 – GMS on Performance in 2025	Ke – 1 1st

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan 2025

Board of Directors Composition and Basis for Appointment Prior to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan Director of Finance	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023. Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK-408/MBU/12/2021, kemudian dialihkan sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK-22/MBU/02/2023, kemudian dialihkan sebagai Direktur Keuangan PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK-303/MBU/11/2023. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023. First appointed as Finance & Investment Director of PTPI on December 22, 2021, based on Decree No. SK-408/MBU/12/2021, and then became Director of Finance & Risk Management of PTPI on February 3, 2023, based on Decree No. SK-22/MBU/02/2023, and then became Director of Finance of PTPI on November 2, 2023, based on Decree No. SK-303/MBU/11/2023.	22 Desember 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026 December 22, 2021 – GMS on Performance in 2026	Ke – 1 1st
Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020.	4 Agustus 2020 – RUPS Kinerja di Tahun 2025 August 4, 2020 – GMS on Performance in 2025	Ke – 1 1st
Tina T. Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023. Pertama kali menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK-408/MBU/12/2021, kemudian dialihkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK-22/MBU/02/2023. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023. First served as Director of Human Capital, Governance, & Risk Management at PTPI on December 22, 2021, based on Decree No. SK-408/MBU/12/2021, and became Director of Human Capital at PTPI on February 3, 2023, based on Decree No. SK-22/MBU/02/2023.	22 Desember 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026 December 22, 2021 – GMS on Performance in 2026	Ke – 1 1st
Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023.	2 November 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028 November 2, 2023 – GMS on Performance in 2028	Ke – 1 1st
Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Director of Portfolio and Business Development	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021.	16 Juli 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026 July 16, 2021 – GMS on Performance in 2026	Ke – 1 1st
Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK- SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023.	2 November 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028 November 2, 2023 – GMS on Performance in 2028	Ke – 1 1st

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan 2025

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 16 Juni 2025, Pemegang Saham memutuskan perubahan komposisi Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), yang mencakup pemberhentian, pengangkatan, serta perubahan nomenklatur jabatan Direksi. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari keputusan Pemegang Saham dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, penguatan efektivitas kepemimpinan, serta penyelarasan struktur Direksi dengan arah strategis dan kebutuhan pengelolaan usaha Perusahaan.

Dalam RUPS tersebut, Pemegang Saham memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Gusrizal sebagai Wakil Direktur Utama;
2. Memberhentikan dengan hormat Bob Indiarto sebagai Direktur Produksi;
3. Memberhentikan dengan hormat Panji Winanteya Ruky sebagai Direktur Transformasi Bisnis;
4. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PTPI sebagai berikut;

Board of Directors Composition and Basis for Appointment After to the 2025 AGMS

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on June 16, 2025, Shareholders changed the Board of Directors' composition of PT Pupuk Indonesia (Persero), including dismissals, appointments, and changes to the nomenclature of Director positions. These changes were made as part of the Shareholders' decision to align with organizational needs, strengthen leadership effectiveness, and align the Board of Directors' structure with the Company's strategic direction and business management needs.

At the GMS, the Shareholders resolved to:

1. Honorably dismiss Gusrizal as Deputy President Director;
2. Honorably dismiss Bob Indiarto as Director of Production;
3. Honorably dismiss Panji Winanteya Ruky as Director of Business Transformation;
4. Change the position nomenclature of PTPI's Board of Directors as follows:

No	Semula Before	Menjadi Became
1	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Ditiadakan Eliminated
2	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Direktur Manajemen Aset Director of Asset Management
3	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs
4	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Direktur *Supply Chain* Director of Supply Chain
5	Direktur Produksi Director of Production	Direktur Operasi Director of Operations
6	Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Director of Portfolio and Business Development	Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Director of Technical and Business Development

5. Mengangkat Dwi Satriyo Annurogo sebagai Direktur Operasi;
6. Mengangkat Robby Setiabudi Madjid sebagai Direktur *Supply Chain*.

5. Appointed Dwi Satriyo Annurogo as Director of Operations;
6. Appointed Robby Setiabudi Madjid as Director of Supply Chain.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan 2025
Board of Directors Composition and Basis for Appointment After the 2025 AGMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Rahmad Pribadi	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-212/MBU/07/2023 tanggal 27 Juli 2023. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-212/MBU/07/2023 dated July 27, 2023.	27 Juli 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028 July 27, 2023 – GMS on Performance in 2028	Ke – 1 1st
Dwi Satriyo Annurogo	Direktur Operasi Director of Operations	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-155/MBU/06/2025 tanggal 16 Juni 2025. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-155/MBU/06/2025 dated June 16, 2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan 2025

Board of Directors Composition and Basis for Appointment After the 2025 AGMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan Director of Finance	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023. Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK-408/MBU/12/2021, kemudian dialihkan sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK-22/MBU/02/2023, kemudian dialihkan sebagai Direktur Keuangan PTPI pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan keputusan No. SK-303/MBU/11/2023. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-303/MBU/11/2023 dated June 16, 2023. First served as Finance & Investment Director of PTPI on December 22, 2021, based on Decree No. SK-408/MBU/12/2021, and then became Director of Finance & Risk Management of PTPI on February 3, 2023, based on Decree No. SK-22/MBU/02/2023, and became Director of Finance of PTPI on November 2, 2023, based on Decree No. SK-303/MBU/11/2023.	22 Desember 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026 December 22, 2021 – GMS on Performance in 2026	Ke – 1 1st
Tina T. Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023. Pertama kali menjabat sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko PTPI pada tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan keputusan No. SK-408/MBU/12/2021, lalu dialihkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PTPI pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan keputusan No. SK-22/MBU/02/2023, kemudian dialihkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023. First served as Human Capital, Governance, & Director of Risk Management at PTPI on December 22, 2021, based on Decree No. SK-408/MBU/12/2021, and became Director of Human Capital at PTPI on February 3, 2023, based on Decree No. SK-22/MBU/02/2023, and then became Director of Human Capital and General Affairs of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.	22 Desember 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026 December 22, 2021 – GMS on Performance in 2026	Ke – 1 1st
Robby Setiabudi Madjid	Direktur *Supply Chain* Director of Supply Chain	Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025. Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 - GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Jamsaton Nababan	Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Director of Technical and Business Development	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, kemudian dialihkan sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021, and became Director of Technic and Business Development of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.	16 Juli 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026 July 16, 2021 – GMS on Performance in 2026	Ke – 1 1st
Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK- SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023	2 November 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028 November 2, 2023 – GMS on Performance in 2028	Ke – 1 1st
Tri Wahyudi Saleh	Direktur Manajemen Aset Director of Asset Management	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023, kemudian dialihkan sebagai Direktur Manajemen Aset PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023, and then became Director of Asset Management at PTPI on June 16, 2025, based on Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.	2 November 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028 November 2, 2023 – GMS on Performance in 2028	Ke – 1 1st

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profiles



Sudaryono

Komisaris Utama
President Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 41 tahun | Age 41 years

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Pertama.
Term of Office June 16, 2025–GMS on Performance in 2030, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	**Appointment History** First appointed as President Commissioner of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.
Riwayat Pendidikan • Doktor Bisnis Manajemen Institut Pertanian Bogor (2025); • Master *Business Administration* Swiss German University (2017); • Mechanical System Engineering National Defence Academy of Japan (2009).	**Educational Background** • Doctoral in Business Management at Institut Pertanian Bogor (2025); • Master of Business Administration at Swiss German University (2017); • Mechanical Systems Engineering at the National Defense Academy of Japan (2009).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi • *Elevate Innovation with Design Thinking.* • Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia	**Training and Professional Certification** • Elevate Innovation with Design Thinking. • Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia
Pengalaman Kerja • CEO Garuda TV (2022 – 2024); • Direktur Operasional PT Indonesia Defense and Securities Technologhies (2021 – 2024); • Komisaris PT Boga Halal Nusantara (2015 – 2024).	**Work Experience** • CEO, Garuda TV (2022 – 2024); • Operational Director, PT Indonesia Defense and Securities Technologies (2021 – 2024); • Commissioner, PT Boga Halal Nusantara (2015 – 2024).
Informasi Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pertanian Indonesia (Juli 2024 – sekarang).	**Concurrent Position Information** Deputy Minister of Agriculture of Indonesia (July 2024 – present).
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, or with majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Irfan Ahmad Fauzi

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 38 tahun | **Age 38 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 22 Juli 2024 – RUPS Kinerja di Tahun 2029, Periode Pertama.
Term of Office: July 22, 2024 – GMS on Performance in 2029, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen PTPI pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024.	**Appointment History** First appointed as Independent Commissioner of PTPI on July 22, 2024, based on Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-188/MBU/07/2024.
Riwayat Pendidikan • Magister Humaniora Universitas Padjajaran (2017); • Sarjana Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (2012).	**Educational Background** • Master of Humanities, Universitas Padjajaran (2017) • Bachelor of History Education, Universitas Pendidikan Indonesia (2012)
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi • *Certified Governance Oversight Professional (CGOP).* • Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia • Pelatihan Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital	**Training and Professional Certification** • Certified Governance Oversight Professional (CGOP). • Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia • Risk Mitigation Training in Digital Transformation
Pengalaman Kerja • Komisaris Independen PT Pupuk Iskandar Muda (2023 – 2024); • Dosen Universitas Indraprasta PGRI (2021 – 2024).	**Work Experience** • Independent Commissioner, PT Pupuk Iskandar Muda (2023 – 2024) • Lecturer at Universitas Indraprasta PGRI (2021 – 2024).
Informasi Rangkap Jabatan Direktur Utama PT Fatijja Nusantara Inovasi (2021 – sekarang).	**Concurrent Position Information** President Director, PT Fatijja Nusantara Inovasi (2021 – present).
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, or with majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Rachlan S Nashidik

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 58 tahun | **Age 58 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Pertama.
Term of Office: June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	**Appointment History** First appointed as Independent Commissioner of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.
Riwayat Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Pancasila (2012).	**Educational Background** Bachelor's degree in Law, Universitas Pancasila (2012).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi • Pelatihan *Certified Governance Oversight Professional* (CGOP). • Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia	**Training and Professional Certification** • Training Certified Governance Oversight Professional (CGOP) • Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia
Pengalaman Kerja Ketua Tim Khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (2010 – 2014).	**Work Experience** Head of the Special Team for the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs (2010 – 2014).
Informasi Rangkap Jabatan • Wakil Ketua Komite Tetap Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2025 – Sekarang); • Senior Advisor PT Pegasus Galang Mineral (2020 – sekarang).	**Concurrent Position Information** • Deputy Chair of the Standing Committee for Infrastructure at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (2025 – present); • Senior Advisor to PT Pegasus Galang Mineral (2020 – present).
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, or with majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Chrisna Deva Priyapratama

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 59 tahun | Age 59 years

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 24 Juni 2025–RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Pertama.
Term of Office: June 24, 2025–GMS on Performance in 2030, First Period.

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen PTPI pada tanggal 24 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-167/MBU/06/2025 dan No. SK-023/DI-DAM/DO/2025.

Appointment History
First appointed as Independent Commissioner of PTPI on June 24, 2025, based on Decree of the KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-167/MBU/06/2025 and No. SK-023/DI-DAM/DO/2025.

Riwayat Pendidikan
- Historical – Philological di Peoples' Friendship University of Russia (1998);
- Sarjana Indonesia – Australia Polycommerce Universitas Udayana (1991);
- *Basic Military Training, Infantry Regiment* Kodam IX Udayana (1988).

Educational Background
- Historical – Philological from Peoples' Friendship University of Russia (1998);
- Sarjana Indonesia – Australia Polycommerce, Universitas Udayana (1991);
- Basic Military Training in Infantry Regiment Kodam IX Udayana (1988).

Pelatihan dan Sertifikasi Profesi
- *Certified Governance Oversight Professional (CGOP).*
- Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia

Training and Professional Certification
- Certified Governance Oversight Professional (CGOP).
- Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia

Pengalaman Kerja
- *Director* AMEX TSNI (2003 – 2004);
- *Executive Director* GK *Brothers* (1992 – 1994).

Work Experience
- Director at AMEX TSNI (2003 – 2004);
- Executive Director at GK Brothers (1992 – 1994).

Informasi Rangkap Jabatan
- Komisaris PT Global Arrow (2022 – Sekarang);
- Direktur Armindo Dinamika Energi (2011 – sekarang);
- Direktur PT Kaltim Nitrat Indonesia (2008 – sekarang).

Concurrent Position Information
- Commissioner, PT Global Arrow (2022 – present);
- Director, Armindo Dinamika Energi (2011 – present);
- Director, PT Kaltim Nitrat Indonesia (2008 – present).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Affiliated Relationships
Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, or with majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Iwan Sumule

Komisaris
Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 54 tahun | Age 54 years

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Pertama.
Term of Office: June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	**Appointment History** First appointed as Commissioner of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.
Riwayat Pendidikan Sarjana Teknik Universitas Kristen Indonesia (1997).	**Educational Background** Bachelor of Engineering degree, Universitas Kristen Indonesia (1997).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia.	**Training and Professional Certification** Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia.
Pengalaman Kerja Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (Agustus 2009 – 2013).	**Work Experience** Assistant to the Special Staff to the President of the Republic of Indonesia (August 2009 – 2013).
Informasi Rangkap Jabatan • Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (2024 – sekarang); • Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) (2023 – sekarang).	**Concurrent Position Information** • Deputy Head of the Agency for the Acceleration of Poverty Alleviation of the Republic of Indonesia (2024 – present); • Chair of the Council of the Pro – Democracy Activists Network (ProDem) (2023 – present).
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, or with majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Nurul Ichwan

Komisaris
Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 57 tahun | Age 57 years

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Pertama.
Term of Office: June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	**Appointment History** First appointed as Commissioner of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.
Riwayat Pendidikan • Magister Manajemen Universitas Mercu Buana (2015); • Sarjana Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (1997).	**Educational Background** • Master of Management degree, Universitas Mercu Buana (2015); • Bachelor of Economics degree, Universitas Jenderal Soedirman (1997).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi • *Certified Governance Oversight Professional* (CGOP). • Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia	**Training and Professional Certification** • Certified Governance Oversight Professional (CGOP). • Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia
Pengalaman Kerja • Plt. Deputi Perencanaan Penanaman Modal (2023-2024); • Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (2020-2022); • Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan (2020).	**Work Experience** • Acting Deputy for Investment Planning (2023–2024); • Deputy for Investment Planning (2020 – 2022); • Director of Service and Area Planning (2020).
Informasi Rangkap Jabatan Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2022 – sekarang).	**Concurrent Position Information** Deputy for Promotion and Investment, Ministry of Investment and Downstream Development/Investment Coordinating Board (BKPM) (2022 – present).
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, or with majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Yovie Widianto

Komisaris
Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 58 tahun | **Age 58 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 16 Juni 2025–RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Pertama.
Term of Office: June 16, 2025–GMS on Performance in 2030, First Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat pertama kali sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	**Appointment History** First appointed as Commissioner of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.
Riwayat Pendidikan Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (1990).	**Educational Background** Bachelor of International Relations, Universitas Padjajaran (1990).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi • *Certified Governance Oversight Professional* (CGOP). • Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia	**Training and Professional Certification** • Certified Governance Oversight Professional (CGOP). • Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia
Pengalaman Kerja Musisi, Produser, Komposer, Pengembang *Intellectual Property* Kreatif, Penggiat Media dan Pendidikan Musik, serta Penggerak Ekosistem Ekonomi Kreatif.	**Work Experience** Musician, producer, composer, creative Intellectual Property Developer, Media and Music Education Advocate, and Champion of the Creative Economy Ecosystem.
Informasi Rangkap Jabatan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif (Oktober 2024 – sekarang).	**Concurrent Position Information** • Special Staff to the President for the Creative Economy (October 2024 – present).
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, or with majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Suwandi

Komisaris
Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 59 tahun | **Age 59 years**

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Masa Jabatan: 16 Juni 2025–RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Kedua.
Term of Office: June 16, 2025–GMS on Performance in 2030, Second Period.

Riwayat Penunjukan Diangkat kembali sebagai Komisaris PTPI pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	**Appointment History** Reappointed as Commissioner of PTPI on June 16, 2025, based on Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.
Riwayat Pendidikan • Doktor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (2005); • Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (2000); • Sarjana Pertanian Institut Pertanian Bogor (1991).	**Educational Background** • Doctorate in Natural Resource and Environmental Management, Institut Pertanian Bogor (2005); • Master's in Planning and Public Policy, Universitas Indonesia (2000); • Bachelor's in Agriculture, Institut Pertanian Bogor (1991).
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi • *Certified Governance Oversight Professional* (CGOP). • Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia	**Training and Professional Certification** • Certified Governance Oversight Professional (CGOP). • Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia
Pengalaman Kerja • Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara VIII (2020); • Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (2019 – 2024); • Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2018 – 2019);	**Work Experience** • President Commissioner, PT Perkebunan Nusantara VIII (2020); • Director General of Food Crops, Ministry of Agriculture (2019 – 2024); • Director General of Horticulture, Ministry of Agriculture (2018 – 2019);
Informasi Rangkap Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (2025 – sekarang).	**Concurrent Position Information** Secretary General of the Ministry of Agriculture (2025–present)
Hubungan Afiliasi Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	**Affiliated Relationships** Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, or with majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.



Dadan Kusdiana

Komisaris
Commissioner

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen
Usia 57 tahun | **Age 57 years**

Domisili | Domicile
Sumedang, Indonesia

Masa Jabatan: 24 April 2026 - RUPS Kinerja di Tahun 2030, Periode Pertama.
Term of Office: April 24, 2026 – GMS on Performance in 2030, First Period.

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komisaris PTPI pada tanggal 24 April 2026 berdasarkan Surat Keputusan BP BUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. 245 Tahun 2026 dan No. SK-085/DI-DAM/DO/2026.

Appointment History
First appointed as a Member of the Board of Commissioners of PTPI on April 24, 2026 based on Decree of BP BUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. 245 of 2026 and No. SK-085/DI-DAM/DO/2026

Riwayat Pendidikan
- Doctoral in Energy Science, Kyoto University (2004);
- Master in Energy Science, Kyoto University (2001);
- Sarjana Mekanisme Pertanian Institut Pertanian Bogor (1992).

Educational Background
- Doctoral in Energy Science, Kyoto University (2004);
- Master in Energy Science, Kyoto University (2001);
- Bachelor's Agricultural Mechanization, Institut Pertanian Bogor (1992).

Pelatihan dan Sertifikasi Profesi
- Leadership Development Program "Executive Course for Strategic Public Comunication Skill"
- Leadership Development Program "Energy Global Collaboration: Energy Transition Toward Net Zero Emission"

Training and Professional Certification
- Leadership Development Program "Executive Course for Strategic Public Comunication Skill"
- Leadership Development Program "Energy Global Collaboration: Energy Transition Toward Net Zero Emission"

Pengalaman Kerja
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2023-2025)
- Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020-2023)
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2019-2020)

Work Experience
- Secretary General of the Ministry of Energy and Mineral Resources (2023–2025)
- Director General of New, Renewable, and Energy Conservation Minister of Energy and Mineral Resources (2020–2023)
- Head of the Energy and Mineral Resources Research and Development Agency Minister of Energy and Mineral Resources (2019–2020)

Informasi Rangkap Jabatan
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (2025 - sekarang).

Concurrent Position Information
Secretary General of the National Energy Council (2025–present).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Affiliated Relationships
Has no affiliated relationships with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners, or with majority or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris serta Alasan Perubahannya

Pada tahun 2025, PTPI menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di tanggal 16 Juni 2025. Dari terselenggaranya RUPS Tahunan tersebut, komposisi anggota Dewan Komisaris PTPI mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana penjelasan berikut.

Changes to the Board of Commissioners Composition and Reasons for the Changes

In 2025, PTPI held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 16, 2025, and following the meeting, the PTPI Board of Commissioners composition underwent changes to reflect the Company's needs and other reasons deemed appropriate by the GMS for the Company's interests and objectives, as shown below.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan 2025

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan 2025 sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Board of Commissioners Composition and Basis for Appointment Prior to the 2025 AGMS

The Board of Commissioners composition prior to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) comprised 10 (ten) people, consisting of 1 (one) President Commissioner concurrently serving as an Independent Commissioner, 4 (four) Independent Commissioners, and 5 (five) Commissioners. The Board of Commissioners composition and basis for appointment can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan 2025
Board of Commissioners Composition and Basis for Appointment Prior to the 2025 AGMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Minister of SOE as GMS Decree No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020.	4 Agustus 2020 – RUPS Kinerja di Tahun 2025 August 4, 2020 – GMS on Performance in 2025	Ke – 1 1st
Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Minister of SOE as GMS Decree No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020.	4 Agustus 2020 – RUPS Kinerja di Tahun 2025 August 4, 2020 – GMS on Performance in 2025	Ke – 1 1st
Farhat Brachma	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-253/MBU/11/2022 tanggal 4 November 2020. Minister of SOE as GMS Decree No. SK-253/MBU/11/2022 dated November 4, 2020.	4 November 2022 – RUPS Kinerja di Tahun 2027 November 4, 2022 – GMS on Performance in 2027	Ke – 1 1st
Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Minister of SOE as GMS Decree No. SK-26/MBU/08/2020 dated August 4, 2020.	4 Agustus 2020 – RUPS Kinerja di Tahun 2025. August 4, 2020 – GMS on Performance in 2025	Ke – 1 1st
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Minister of SOE as GMS Decree No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020.	4 Agustus 2020 – RUPS Kinerja di Tahun 2025 August 4, 2020 – GMS on Performance in 2025	Ke – 1 1st
Ari Dwipayana	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Minister of SOE as GMS Decree No. SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020.	4 Agustus 2020 – RUPS Kinerja di Tahun 2025 August 4, 2020 – GMS on Performance in 2025	Ke – 1 1st
Anwar Sanusi	Komisaris Commissioner	• Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-193/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018; • Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-163/MBU/06/2023 tanggal 22 Juni 2023. • Minister of SOE as GMS Decree No. SK-193/MBU/06/2018 dated June 8, 2018; • Minister of SOE as GMS Decree No. SK-163/MBU/06/2023 dated June 22, 2023.	• 8 Juni 2018 – RUPS Kinerja di Tahun 2023 • 22 Juni 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028 • June 8, 2018 – GMS on Performance in 2023 • June 22, 2023 – GMS on Performance in 2028	Ke – 2 2nd

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan 2025
Board of Commissioners Composition and Basis for Appointment Prior to the 2025 AGMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Riswinandi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK/53/MBU/03/2024 tanggal 4 Maret 2024. Minister of SOE as GMS Decree No. SK/53/MBU/03/2024 dated March 4, 2024.	4 Maret 2024 – RUPS Kinerja di Tahun 2029 March 4, 2024 – GMS on Performance in 2029	Ke – 1 1st
Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024. Minister of SOE as GMS Decree No. SK-188/MBU/07/2024 dated July 22, 2024.	22 Juli 2024 – RUPS Kinerja di Tahun 2029 July 22, 2024 – GMS on Performance in 2029	Ke – 1 1st
Danar Rahmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024. Minister of SOE as GMS Decree No. SK-188/MBU/07/2024 dated July 22, 2024.	22 Juli 2024 – RUPS Kinerja di Tahun 2029 July 22, 2024 – GMS on Performance in 2029	Ke – 1 1st

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan 2025

Pada tanggal 16 Juni 2025, RUPS Tahunan 2025 memutuskan:
1. Memberhentikan dengan hormat Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
2. Memberhentikan dengan hormat Mustoha Iskandar sebagai Komisaris Independen;
3. Memberhentikan dengan hormat Farhat Brachma sebagai Komisaris;
4. Memberhentikan dengan hormat Ari Dwipayana sebagai Komisaris;
5. Memberhentikan dengan hormat Anwar Sanusi sebagai Komisaris;
6. Memberhentikan dengan hormat Riswinandi sebagai Komisaris Independen;
7. Memberhentikan dengan hormat Danar Rahmanto sebagai Komisaris Independen;
8. Memberhentikan dengan hormat Suwandi sebagai Komisaris;
9. Memberhentikan dengan hormat Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris;
10. Mengangkat Sudaryono sebagai Komisaris Utama;
11. Mengangkat Rachlan S Nashidik sebagai Komisaris Independen;
12. Mengangkat Iwan Sumule sebagai Komisaris;
13. Mengangkat Nurul Ichwan sebagai Komisaris;
14. Mengangkat Muhammad Rizal Kamal sebagai Komisaris;
15. Mengangkat Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris;
16. Mengangkat Yovie Widianto sebagai Komisaris;
17. Mengangkat Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris;
18. Mengangkat Suwandi sebagai Komisaris;
19. Mengangkat Chrisna Deva Priyapratama sebagai Komisaris Independen.

Board of Commissioners Composition and Basis for Appointment After to the 2025 AGMS

On June 16, 2025, the 2025 Annual GMS decided:
1. Honorably dismissed Darmin Nasution as President Commissioner and Independent Commissioner;
2. Honorably dismissed Mustoha Iskandar as Independent Commissioner;
3. Honorably dismissed Farhat Brachma as Commissioner;
4. Honorably dismissed Ari Dwipayana as Commissioner;
5. Honorably dismissed Anwar Sanusi as Commissioner;
6. Honorably dismissed Riswinandi as Independent Commissioner;
7. Honorably dismissed Danar Rahmanto as Independent Commissioner;
8. Honorably dismissed Suwandi as Commissioner;
9. Honorably dismissed Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner;
10. Appointed Sudaryono as President Commissioner;
11. Appointed Rachlan S Nashidik as Independent Commissioner;
12. Appointed Iwan Sumule as Commissioner;
13. Appointed Nurul Ichwan as Commissioner;
14. Appointed Muhammad Rizal Kamal as Commissioner;
15. Appointed Immanuel Ebenezer Gerungan as Commissioner;
16. Appointed Yovie Widianto as Commissioner;
17. Appointed Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner;
18. Appointed Suwandi as Commissioner;
19. Appointed Chrisna Deva Priyapratama as Independent Commissioner.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan 2025
Board of Commissioners Composition and Basis for Appointment After the 2025 AGMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Sudaryono	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-188/MBU/07/2024	22 Juli 2024 – RUPS Kinerja di Tahun 2029 July 22, 2024 – GMS on Performance in 2029	Ke – 1 1st
Rachlan S Nashidik	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Chrisna Deva Priyapratama	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-167/MBU/06/2025 dan SK-023/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-167/MBU/06/2025 and. SK-023/DI-DAM/DO/2025.	24 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 24, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Iwan Sumule	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of BP BUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Nurul Ichwan	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Yovie Widianto	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke - 2 2nd

Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan 2025

Setelah RUPS Tahunan 2025, kembali terjadi perubahan pada susunan dan komposisi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Muhammad Rizal Kamal berhenti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris per 24 Juni 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham.
2. Immanuel Ebenezer Gerungan berhenti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada 22 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham.
3. Febrio Nathan Kacaribu berhenti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada 15 Desember 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham.

Dengan demikian, susunan Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 berjumlah 8 orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Utama, 4 (empat) orang Komisaris, dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners Following the 2025 Annual GMS

Following the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS), further changes occurred in the composition of the Company's Board of Commissioners, as follows:

1. Muhammad Rizal Kamal ceased serving as a Member of the Board of Commissioners as of 24 June 2025 pursuant to a Shareholders' Resolution.
2. Immanuel Ebenezer Gerungan ceased serving as a Member of the Board of Commissioners on 22 August 2025 pursuant to a Shareholders' Resolution.
3. Febrio Nathan Kacaribu ceased serving as a Member of the Board of Commissioners on December 15, 2025 pursuant to a Shareholders' Resolution.

Accordingly, the Board of Commissioners as of 31 December 2025 consists of 8 members: 1 (one) President Commissioner, 4 (four) Commissioners, and 3 (three) Independent Commissioners.

Susunan dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris PTPI per 31 Desember 2025
Changes in the Composition of the Board of Commissioners Following the 2025 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Sudaryono	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-188/MBU/07/2024	22 Juli 2024 – RUPS Kinerja di Tahun 2029 July 22, 2024 – GMS on Performance in 2029	Ke – 1 1st
Rachlan S Nashidik	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Chrisna Deva Priyapratama	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-167/MBU/06/2025 dan SK-023/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-167/MBU/06/2025 and. SK-023/DI-DAM/DO/2025.	24 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 24, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Iwan Sumule	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Nurul Ichwan	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Yovie Widianto	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke - 2 2nd

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang Terjadi setelah Tahun Buku Berakhir

Changes in The Board of Directors and/or Board of Commissioners Composition that Occurred After The End of The Fiscal Year

DIREKSI

Tidak terdapat perubahan pada susunan maupun komposisi anggota Direksi Perusahaan setelah tahun buku 2025 berakhir hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan.

BOARD OF DIRECTORS

There were no changes to the composition of the Company's Board of Directors after the close of fiscal year 2025 through the date of publication of this Annual Report.

DEWAN KOMISARIS

Terdapat perubahan pada susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terjadi setelah tahun buku berakhir. Perubahan dilakukan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan serta menyesuaikan dengan kebutuhan strategis Perusahaan. Perubahan dilakukan oleh Pemegang Saham, dalam hal ini BP Danantara, melalui Surat Keputusan Pemegang Saham tertanggal 24 April 2026, yang memutuskan untuk mengangkat Bapak Dadan Kusdiana selaku anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). Dengan demikian, susunan dan komposisi Dewan Komisaris hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS

Changes occurred in the composition of the Company's Board of Commissioners after the close of the fiscal year. The changes were made to strengthen the supervisory function and align with the Company's strategic needs. The changes were effected by the Shareholder, BP Danantara, through a Shareholders' Decree dated April 24, 2026, which resolved to appoint Mr. Dadan Kusdiana as a member of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero). Accordingly, the composition of the Board of Commissioners as of the date of publication of this Annual Report is as follows:

Tabel Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris per 24 April 2026
Table of Board of Commissioners Composition as of April 24, 2026

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Sudaryono	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024. Ministry of SOEs as GMS Decree No. SK-188/MBU/07/2024.	22 Juli 2024 – RUPS Kinerja di Tahun 2029 July 22, 2024 – GMS on Performance in 2029	Ke – 1 1st
Rachlan S Nashidik	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – 2030 AGMS	Ke – 1 1st
Chrisna Deva Priyapratama	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-167/MBU/06/2025 dan No. SK-167/MBU/06/2025. Decree of the KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-167/MBU/06/2025 and No. SK-167/MBU/06/2025.	24 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 24, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Iwan Sumule	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Nurul Ichwan	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Yovie Widianto	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke - 2 2nd
Dadan Kusdiana	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. 245 Tahun 2026 dan No. SK-085/DI-DAM/DO/2026. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. 245 of 2026 and No. SK-085/DI-DAM/DO/2026.	24 April 2026 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 April 24, 2026 – GMS on Performance in 2030	Ke – 1 1st

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profiles

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Domisili Domicile	Riwayat Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
Yehezkiel Adiperwira	Pjs. Sekretaris Perusahaan Acting Corporate Secretary	37 th	Gresik, Indonesia	S2 Akuntansi STIESIA Surabaya (2022) Master's Degree in Accounting, STIESIA Surabaya (2022)	• VP Strategic Delivery Unit PTPI (2024 – 2025) • VP Portofolio Bisnis PKG (2022 – 2024) • VP Strategic Delivery Unit PTPI (2024 – 2025) • VP Business Portfolio PKG (2022 – 2024)	Surat Keputusan Direksi No. 83/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No. 83/A/HK/E0200/SK/2025	-
Maslani	Kepala Satuan Pengawasan Intern Chief Audit Executive	49 th	Bogor, Indonesia	S3 Manajemen dan Bisnis Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (2023) Doctoral degree in Management and Business, Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (2023)	• SVP Kinerja Korporat (2023 – 2025) • SPM Reformasi Subsidi Pupuk (2021 – 2023) • SVP Keuangan & Pendanaan Investasi (2021) • SVP Corporate Performance (2023 – 2025) • SPM Fertilizer Subsidy Reform (2021 – 2023) • SVP Finance & Investment Funding (2021)	Surat Keputusan Direksi No. 82/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No. 82/A/HK/E0200/SK/2025	Anggota Komite Audit PT PKG Audit Committee Member PT PKG
Ericcson Ramadhan	SVP Pengadaan 1 SVP Procurement 1	43 th	Tangerang Selatan, Indonesia South Tangerang, Indonesia	S2 Master of Science in Rotating Machinery Eng & Mngmnt Cranfield University, UK (2017) S2 Master of Science in Rotating Machinery Eng & Mngmnt, Cranfield University, UK (2017)	• VP Layanan Konsultasi (2024) • SPM Optimalisasi Stock & Sparepart (2021 – 2024) • VP Perenc. Strategi & Evaluasi (2021) • VP Consulting Services (2024) • SPM Stock & Spare Part Optimization (2021 – 2024) • VP Strategy Planning & Evaluation (2021)	Surat Keputusan Direksi No. 59/A/HK/028/SK/2024 Board of Directors Decree No. 059/A/HK/P28/SK/2024	-
Muh. Iqbal S. Hakim	Pgs. SVP Pengadaan 2 Acting SVP Procurement 2	38 th	Tangerang, Indonesia	S1 Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (2008) Bachelor's degree in Industrial Engineering, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (2008)	• VP Pengadaan Jasa Dist Pemasaran (2021 – 2024) • VP Pengadaan Jasa (2020 – 2021) • VP Procurement Services, Marketing Division (2021 – 2024) • VP Procurement Services (2020 – 2021)	Surat penunjukan PGS. No. 38291/A/SM/E0202/IT/2025 PGS Appointment Letter No. 38291/A/SM/E0202/IT/2025	-
Indraswono Eko Saputro	SVP Perencanaan Pengadaan SVP of Procurement Planning	45 th	Jakarta, Indonesia	S1 Teknik Material Institut Teknologi Bandung (2003) Bachelor's degree in Materials Engineering, Institut Teknologi Bandung	• SVP Pengadaan 2 (2024) • SVP Pengadaan Strategis (2022 – 2024) • SVP Procurement 2 (2024) • SVP Strategic Procurement (2022 – 2024)	Surat Keputusan Direksi No. 59/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No. 59/A/HK/P28/SK/2024	-
Awalia Noor Baroroh	SVP Sinerji Operasi & Pemasaran SVP of Operations and Marketing Synergy	41 th	Jakarta, Indonesia	S2 Master of Business Administration Maastricht School of Management (2016) Master's degree in Business Administration, Maastricht School of Management (2016)	• SVP Dukungan Manajemen Strategis (2024 – 2025) • VP Riset PKT (2022 – 2024) • Manager Pengembangan Bisnis PT KDM (2019 – 2022) • SVP Strategic Management Support (2024 – 2025) • VP Research, PKT (2022 – 2024) • Business Development Manager, PT KDM (2019 – 2022)	Surat Keputusan Direksi No.82/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.82/A/HK/E0200/SK/2025	-

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Domisili Domicile	Riwayat Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
Guntur Prasetyo	SVP Manajemen Operasi SVP of Operations Management Pgs. SVP K3LH Acting SVP HSE	46 th	Jakarta, Indonesia	S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro (2002) Bachelor's degree in Chemical Engineering, Universitas Diponegoro (2002)	• SVP Operasi & K3LH (2024 – 2025) • SVP Operasi & Produksi (2023 – 2024) • SPM SBU Operation & Maintenance (2022 – 2023) • SVP Operations & HSE (2024 – 2025) • – SVP Operations & Production (2023 – 2024) • – SVP Operations & Maintenance (2022 – 2023)	Surat Keputusan Direksi No.82/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.82/A/ HK/E0200/ SK/2025 Surat penunjukan PGS. No.31678/A/SM/E0202/IT/2025 PGS Appointment Letter No. 31678/A/SM/E0202/IT/2025	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, GCG, dan Pemantau Risiko PT PKC Member of the Nomination and Remuneration, GCG, and Risk Monitoring Committee PT PKC
Ari Novan Setiono	SVP Teknologi Informasi SVP of Information Technology	47 th	Bogor, Indonesia	S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2009) Master's degree in Management, Universitas Gadjah Mada (2009)	• SPM Transformasi Digital (2021 – 2022) • SPM Retail Management System (2021) • SPM DPCS (2020 – 2021) • SPM Digital Transformation (2021 – 2022) • SPM Retail Management System (2021) • SPM DPCS (2020 – 2021)	Surat Keputusan Direksi No.145/A/HK/1/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No.145/A/HK/1/P28/SK/2024	-
Yetty Endarwati	SVP Digitalisasi & Data Science SVP of Digitalization & Data Science	49 th	Tangerang, Indonesia	S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2000) Bachelor's degree in Informatics Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2000)	• SPM Digitalisasi & Data Science (2023 – 2024) • SPM Data Science (2020 – 2023) • VP Sistem Bisnis I (2018 – 2020) • SPM Digitalization & Data Science (2023 – 2024) • SPM Data Science (2020 – 2023) • VP Business Systems I (2018 – 2020)	Surat Keputusan Direksi No. 82/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No. 82/A/HK/E0200/SK/2025	Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) PT PKT Member of the Risk Monitoring Committee (KPR) PT PKT
Achmad Nuribadillah Romdoni	SVP Akuntansi SVP of Accounting	46 th	Jakarta, Indonesia	S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia (2002) Bachelor's degree in Accounting, Universitas Indonesia (2002)	• VP Akuntansi Keuangan (2023 – 2025) • VP Perencanaan Pengawasan (2019 – 2023) • VP Pengawasan Keuangan (2016 – 2019) • VP Financial Accounting (2023 – 2025) • VP Planning and Control (2019 – 2023) • VP Financial Control (2016 – 2019)	Surat Keputusan Direksi No. 105/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No. 105/A/HK/E0200/SK/2025	-
Rachmat Budiono	SVP Keuangan & Pendanaan Investasi SVP of Finance & Investment Funding	52 th	Depok, Indonesia	S2 Magister Ekonomi Syariah IAI / Universitas Tazkia (2024) Master's degree in Islamic Economics, IAI / Universitas Tazkia (2024)	• Staf Direktorat SDM & TK (PT ME) (2021 – 2023) • Staf Penugasan Direktorat SDM & Tata Kelola (2020 – 2021) • VP Verifikasi & Penagihan (2016 – 2020) • HC & Technical Directorate Staff (PT ME) (2021 – 2023) • HC & Governance Directorate Assignment Staff (2020 – 2021) • VP Verification & Billing (2016 – 2020)	Surat Keputusan Direksi No.205/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 205/A/HK/P28/SK/2023	Anggota Komite GCG, PMR & Investasi PT PIM Member of the GCG, PMR & Investment Committee PT PIM

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Domisili Domicile	Riwayat Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
B. Agus Nugroho Jati	SVP Kinerja Korporat SVP of Corporate Performance	53 th	Depok, Indonesia	S2 Akuntansi Manajemen Keuangan Universitas Gadjah Mada (2008) Master's Degree in Accounting and Financial Management, Universitas Gadjah Mada (2008)	• SVP Akuntansi (2021 – 2025) • SVP Kinerja Korporat (2016 – 2021) • Manajer Audit Operasional (2016) • SVP Accounting (2021 – 2025) • SVP Corporate Performance (2016 – 2021) • Operational Audit Manager (2016)	Surat Keputusan Direksi No.82/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.82/A/HK/E0200/SK/2025	-
Tathit Surya Arjanggi	SVP Strategi & Perencanaan SDM SVP of HC Strategy & Planning	47 th	Tangerang Selatan, Indonesia South Tangerang, Indonesia	S2 Manajemen Universitas Bina Nusantara (2023) Master's Degree in Management, Universitas Bina Nusantara (2023)	• SPM Strategi & Kebijakan SDM (2022) • VP Remunerasi & Hubungan Industrial PKT (2021 – 2022) • VP Learning Center PKT (2020 – 2021) • SPM HC Strategy & Policy (2022) • VP Remuneration & Industrial Relations PKT (2021 – 2022) • VP Learning Center PKT (2020 – 2021)	Surat Keputusan Direksi No.021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No.021/A/HK/P28/SK/2024	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PILOG Member of the Nomination and Remuneration, Committee PT PILOG
Nendra Ariyanto	Pgs. SVP Operasional SDM & Umum Acting SVP of HC Operations and General Affair	38 th	Tangerang Selatan, Indonesia South Tangerang, Indonesia	S1 Teknik Industri Universitas Gadjah Mada (2010) Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Universitas Gadjah Mada (2010)	• VP Remunerasi & Manajemen Kinerja (2020 – 2022) • Staf Remunerasi & Manajemen Kinerja (2020) • VP Remuneration & Management Performance (2020 – 2022) • Staff Remuneration & Management Performance (2020)	Surat penunjukan PGS. No. 40996/A/SM/E0202/IT/2024 PGS Appointment Letter No. 40996/A/SM/E0202/IT/2024	-
Bondar Priandono	Pgs. SVP Manajemen & Pengembangan SDM Acting SVP of HC Management and Development	41 th	Bontang, Indonesia	S2 Master of HC & Employment Relation, University of Western Australia (2018) S2 Master of HC & Employment Relation, University of Western Australia (2018)	• VP Pengembangan SDM & Organisasi PKT (2020 – 2024) • Manager Pengembangan SDM PKT (2020) • VP Pengembangan SDM & Organisasi PKT (2020 – 2024) • Manager Pengembangan SDM PKT (2020)	Surat penunjukan PGS. No. 32764/A/SM/E0500/IT/2024 PGS Appointment Letter No. 32764/A/SM/E0500/IT/2024	-
Frans Adisuranta Ginting	SVP TJSL SVP of SER	40 th	Palembang, Indonesia	S2 Manajemen Pemasaran Universitas Sriwijaya (2016) Master's Degree in Marketing Management, Universitas Sriwijaya (2016)	• VP Manajemen Stakeholder (2024 – 2025) • VP Pengawasan Keuangan PSP (2023 – 2024) • VP Stakeholder Management (2024 – 2025) • VP of Financial Supervision PSP (2023 – 2024)	Surat Keputusan Direksi No. 83/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No. 83/A/HK/E0200/SK/2025	-
Junianto Simare Mare	SVP Pemasaran SVP of Marketing	42 th	Jakarta, Indonesia	S2 Agroteknologi Tanah Institut Pertanian Bogor (2012) Master's Degree in Soil Agrotechnology, Institut Pertanian Bogor (2012)	• SVP TJSL (2023 – 2025) • SPM Customer Relationship Management (2022 – 2023) • VP Komunikasi Pemasaran & Branding (2021 – 2022) • SVP SER (2023 – 2025) • SPM Customer Relationship Management (2022 – 2023) • VP Marketing Communications & Branding (2021 – 2022)	Surat Keputusan Direksi No.82/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.82/A/HK/E0200/SK/2025	Sekretaris Dekom PT PIM Secretary of the Board of Commissioners PT PIM
Veronika Trisna Sukmawati	SVP Distribusi SVP of Distribution	43 th	Jakarta, Indonesia	S2 Magister Manajemen Universitas Airlangga (2009) Master's Degree in Management, Universitas Airlangga (2009)	• VP Perencanaan & Pengaturan PSO (2022 – 2023) • VP Operasi Distribusi (2022) • VP Planning and Management PSO (2022 – 2023) • VP Distribution Operations (2022)	Surat Keputusan Direksi No.069/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No.069/A/HK/P28/SK/2023	Anggota Komite GCG, PMR & Investasi PT PIM Member of the GCG, PMR & Investment Committee PT PIM

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Domisili Domicile	Riwayat Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
Asep Saepul Muslim	SVP Strategi Penjualan & PP SVP of Sales Strategy & CS	40 th	Gresik, Indonesia	S1 Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor (2008) Bachelor's Degree in Soil Science, Institut Pertanian Bogor (2008)	• VP Industri (2025) • VP Administrasi Pemasaran & Penjualan PKG (2025) • VP Mitra Bisnis Pemasaran Ritel PKG (2024 – 2025) • VP Industry (2025) • VP Marketing & Sales Administration, PKG (2025) • VP Retail Marketing Business Partners, PKG (2024 – 2025)	Surat Keputusan Direksi No.83/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.83/A/HK/E0200/SK/2025	-
Deni Dwiguna Sulaeman	SVP Penjualan Korporasi SVP of Corporate Sales	43 th	Sukabumi, Indonesia	S2 Magister Sains Institut Pertanian Bogor (2012) Master's Degree in Science, Institut Pertanian Bogor (2012)	• SVP Strategi Penjualan & PP (2024 – 2025) • SVP Mitra Bisnis PKG (2022 – 2024) • SVP Sales Strategy & Sales Promotion (2024 – 2025) • SVP Business Partners PKG (2022 – 2024)	Surat Keputusan Direksi No.82/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.82/A/HK/E0200/SK/2025	Komisaris Utama PT Graha Sarana Gresik President Commissioner PT Graha Sarana Gresik
Rizki Candra Sakti	GM Wilayah 1 GM of Region 1	38 th	Gresik, Indonesia	S2 Magister Manajemen Universitas Airlangga (2018) Master's Degree in Management, Universitas Airlangga (2018)	• SM Sumbagsel (2024 – 2025) • SM Jawa Timur & Bali (2024) • VP Penjualan Wilayah 4 (2022 – 2024) • SM South Sumatra (2024 – 2025) • SM East Java & Bali (2024) • VP Sales Regional 4 (2022 – 2024)	Surat Keputusan Direksi No.26/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.26/A/HK/E0200/SK/2025	-
Muhammad Ihwan Fahrurrazi	GM Wilayah 2 GM of Region 2	44 th	Jakarta, Indonesia	S2 Magister Sains Institut Teknologi Bandung (2011) Master's Degree in Science, Institut Teknologi Bandung (2011)	• SVP Penjualan Korporasi (2024 – 2025) • SVP Pemasaran Komersil (2023 – 2024) • SVP Corporate Sales (2024 – 2025) • SVP Commercial Marketing (2023 – 2024)	Surat Keputusan Direksi No.82/A/HK/E0200/SK//2025 Board of Directors Decree No.82/A/HK/E0200/SK/2025	-
Taufiek	GM Wilayah 3 GM of Region 3	55 th	Palembang, Indonesia	S2 ANT-I BPPPIP (2005) Master's Degree in ANT-I BPPPIP (2005)	• SM Jawa Timur & Bali (2024 – 2025) • SM Sumbagsel (2024) • VP Penjualan Wilayah 2 (2022 – 2024) • SM East Java & Bali (2024 – 2025) • SM South Sumatra (2024) • VP Sales Regional 2 (2022 – 2024)	Surat Keputusan Direksi No.26/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.26/A/HK/E0200/SK/2025	-
Wisnu Ramadhani	GM Wilayah 4 GM of Region 4	43 th	Makassar, Indonesia	D3 Akuntansi Universitas Mulawarman (2003) Diploma in Accounting, Universitas Mulawarman (2003)	• SVP Transformasi Bisnis PKT (2022 – 2025) • VP Marketing Business Partner Retail PKT (2021 – 2022) • SVP Business Transformation PKT (2022 – 2025) • VP Marketing Business Partner Retail PKT (2021 – 2022)	Surat Keputusan Direksi No.26/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.26/A/HK/E0200/SK/2025	Komisaris Utama PT Yapeka Usaha Mandiri President Commissioner PT Yapeka Usaha Mandiri
Brimadiyanto	SPM Restrukturisasi Keuangan SPM of Financial Restructuring	55 th	Depok, Indonesia	S2 Magister Manajemen Universitas Indonesia (2007) Master's degree in Management, Universitas Indonesia (2007)	• SPM Reformasi Subsidi Pupuk (2020 – 2021) • Staf Direktorat Investasi (2019 – 2020) • Staf Utama II Direktorat Investasi (2017 – 2019) • SPM Fertilizer Subsidy Reform Standards (2020 – 2021) • Investment Directorate Staff (2019 – 2020) • Investment Directorate Principal Staff II (2017 – 2019)	Surat Keputusan Direksi No.021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No.021/A/HK/P28/SK/2024	Anggota Komite Audit Rekind Audit Committee Member Rekind

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Domisili Domicile	Riwayat Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
Toto Laksono	SPM Streamlining Lini Bisnis Pupuk Indonesia Group SPM of Streamlining Pupuk Indonesia Group Business Lines	48 th	Jakarta, Indonesia	S1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002) Bachelor's degree in Chemical Engineering, Universitas Gadjah Mada (2002)	• VP Investasi Rutin & Pengembangan (2021 – 2022) • VP Pengelolaan Investasi (2019 – 2020) • VP Perencanaan Strategis (2016 – 2019) • VP Routine Investments & Development (2021 – 2022) • VP Investment Management (2019 – 2020) • VP Strategic Planning (2016 – 2019)	Surat Keputusan Direksi No.56/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No.56/A/HK/P28/SK/2024	-
M. Rozikin Busro	SPM Sustainability & Clean Ammonia	43 th	Jakarta, Indonesia	S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2022) Master's degree in Management, Universitas Gadjah Mada (2022)	• VP Product Owner PMFO 1 PT Rekayasa Industri (2022 – 2025) • VP Product Owner, PMFO 1, PT Rekayasa Industri (2022 – 2025)	Surat Keputusan Direksi No.7/A/HK/E0202/SK/2025 Board of Directors Decree No.7/A	-
Herdijanto Utomo	SVP Pengembangan Bisnis SVP of Business Development	54 th	Jakarta, Indonesia	S1 Teknik Perminyakan Universitas Trisakti (1996) Bachelor's degree in Petroleum Engineering, Universitas Trisakti (1996)	• Staf Direktur Portofolio & Bang Usaha (2021 – 2023) • VP Restrk. Port. Anak & Afiliasi (2019 – 2021) • VP Portofolio Bisnis (2016 – 2019) • Staff Director Portfolio and Business Banking (2021 – 2023) • VP Restructuring, Portfolio, Subsidiaries & Affiliates (2019 – 2021) • VP Business Portfolio (2016 – 2019)	Surat Keputusan Direksi No.228/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No.228/A/HK/P28/SK/2023	-
Bayu Pratama Purba	SVP Portofolio Bisnis SVP of Business Portfolio	40 th	Jakarta, Indonesia	S2 Master of Business Administration University of Cambridge (2020) Master's degree in Business Administration, University of Cambridge (2020)	• Senior Vice President, Head of Strategy & Transformation Bakrie & Brothers (2024 – 2025) • Engagement Manager McKinsey & Company (2022 – 2024) • Senior Vice President, Head of Strategy & Transformation Bakrie & Brothers (2024 – 2025) • Engagement Manager McKinsey & Company (2022 – 2024)	Surat Keputusan Direksi No.37/SPK-PIHC/VIII/2025 Board of Directors Decree No.37/SPK-PIHC/VIII/2025	-
Bagus Subekti	SVP Strategi Korporat SVP of Corporate Strategy	56 th	Jakarta, Indonesia	S1 Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (1994) Bachelor's degree in Chemical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1994)	• SVP Pengembangan Korporat (2020 – 2021) • SVP Manajemen Aset (2020) • SVP Corporate Development (2020 – 2021) • SVP Asset Management (2020)	Surat Keputusan Direksi No.083/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No.083/KU/E10/SK/2021	-
Gita Bina Nugraha	SVP Indonesia Agrichemical Research Institute	40 th	Bandung, Indonesia	S2 Bioteknologi, ITB (2011) Master's degree in Biotechnology, ITB (2011)	• SVP IFRI (2024 – 2025) • SPM Nano Urea (2023 – 2024) • VP Perencanaan Riset (2021 – 2023) • SVP IFRI (2024 – 2025) • SPM Nano Urea (2023 – 2024) • VP Research Planning (2021 – 2023)	Surat Keputusan Direksi No.82/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.82/A/HK/E0200/SK/2025	Anggota Komite Pemantau Risiko PT PIU Risk Monitoring Committee Member PT PIU

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Domisili Domicile	Riwayat Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
Sindy Savitri Hidayat	Pgs. SVP Manajemen Risiko Korporasi Acting SVP of Corporate Risk Management	40 th	Tangerang Selatan, Indoneisa South Tangerang, Indonesia	S1 Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan (2008) Bachelor's degree in Civil Engineering, Universitas Katolik Parahyangan (2008)	• Head of Decision Support Business Enabler PT Bank Mandiri (2024 – 2025) • Head of Decision Support Business Enabler PT Bank Mandiri (2024 – 2025)	Surat penunjukan PGS. No. 21086/A/SM/E0202/IT/2025 PGS Appointment Letter No. 21086/A/SM/E0202/IT/2025	-
Benediktus Anugrahria Lilik Lukrisnianto	SVP Hukum SVP of Legal	40 th	Tangerang Selatan, Indoneisa South Tangerang, Indonesia	S2 Hukum, University of Adelaide (2016) Master's degree in Law, University of Adelaide (2016)	• VP Hukum Korporasi (2020 – 2022) • VP Corporate Law (2020 – 2022)	Surat Keputusan Direksi No.021/A/HK/P28/SK/2024 Board of Directors Decree No.021/A/HK/P28/SK/2024	Anggota Komite Audit Rekind Audit Committee Member Rekind
Sara Dewi	SVP Tata Kelola & Kepatuhan SVP of Governance & Compliance	52 th	Jakarta, Indonesia	S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2017) Master's degree in Management, Universitas Gadjah Mada (2017)	• SVP Portofolio Bisnis (2023 – 2025) • SVP Kinerja Korporat (2021 – 2023) • VP Akuntansi Manajemen (2019 – 2021) • SVP Business Portfolio (2023 – 2025) • SVP Corporate Performance (2021 – 2023) • VP Management Accounting (2019 – 2021)	Surat Keputusan Direksi No.71/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.71/A/HK/E0200/SK/2025	Anggota Komite Investasi & Manajemen Risiko PT PSP Investment & Risk Management Committee Member PT PSP
Boycke Garda Aria	SVP Perencanaan & Pengendalian Aset SVP of Asset Planning & Control	54 th	Karawang, Indonesia	S2 Teknik & Manajemen Industri Universitas Mercu Buana Jakarta (2012) Master's degree in Industrial Engineering & Management, Universitas Mercu Buana , Jakarta (2012)	• SVP Umum & Aset (2023 – 2025) • SPM Implementasi Product Tracking (2023) • VP Sarana Prasarana Distribusi (2021 – 2023) • SVP General Affairs & Assets (2023 – 2025) • SPM Product Tracking Implementation (2023) • VP Distribution Infrastructure (2021 – 2023)	Surat Keputusan Direksi No.82/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.82/A/HK/E0200/SK/2025	-
Rangga Yuda Putra	SVP Investasi & Optimalisasi Aset SVP of Investments & Asset Optimization	42 th	Jakarta, Indonesia	S2 Master of Business, The University of Queensland (2015) Master's degree in Business, The University of Queensland (2015)	• SPM Program Swasembada Pangan (2024 – 2025) • SPM Perdagangan & Logistik (2022 – 2024) • VP Penjualan Urea (2020 – 2021) • SPM Food Self – Sufficiency Program (2024 – 2025) • SPM Trade & Logistics (2022 – 2024) • VP Urea Sales (2020 – 2021)	Surat Keputusan Direksi No.83/A/HK/E0200/SK/2025 Board of Directors Decree No.83/A/HK/E0200/SK/2025	Sekretaris Dekom PT PILOG Secretary to the Board of Commissioners PT PILOG

Demografi Karyawan
Employee Demographics



Karyawan PTPI terdiri dari Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) & Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hingga akhir tahun 2025, jumlah Karyawan PKWT dan PKWTT berjumlah 7.882 orang. Jumlah karyawan PKWTT termasuk Entitas Anak secara langsung mencapai 7.336 orang, mengalami penurunan 1,6% dibandingkan tahun 2024 sejumlah 7.456 orang. Penurunan jumlah karyawan terjadi sejalan dengan berakhirnya hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

PTPI employees consist of Temporary Employment Agreement (PKWT) and Permanent Contract (PKWTT) employees. Until the end of 2025, the number of PKWT and PKWTT employees was 7,882. The number of PKWTT employees, including its subsidiaries, directly reached 7,336, a decrease of 1.6% compared to 7,456 in 2024. This decrease in the number of employees was in line with the end of work contract according to applicable provisions.

Demografi Karyawan (PKWT & PKWTT) Berdasarkan Jenis Kelamin (orang)
Employee Demographics (PKWT & PKWTT) Based on Gender (people)

Entitas Entity	2025				2024			
	Laki-Laki Male	**Perempuan** Female	**Jumlah** Total	**Persentase terhadap Karyawan PTPI Group (%)** Percentage of PTPI Group employees (%)	**Laki-Laki** Male	**Perempuan** Female	**Jumlah** Total	**Persentase terhadap Karyawan PTPI Group (%)** Percentage of PTPI Group employees (%)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4=3:5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9=8:5)
Holding								
Pupuk Indonesia	**275**	**113**	**388**	**4,92**	264	97	361	4,68
Entitas Anak Subsidiaries								
Petrokimia Gresik	**2.048**	**142**	**2.190**	**27,78**	2.044	143	2.187	28,36
Pupuk Kujang	**899**	**81**	**980**	**12,43**	894	84	978	12,68
Pupuk Kalimantan Timur	**1.313**	**151**	**1.464**	**18,57**	1.168	135	1.303	16,90
Pupuk Iskandar Muda	**586**	**68**	**654**	**8,3**	560	68	628	8,14

Demografi Karyawan (PKWT & PKWTT) Berdasarkan Jenis Kelamin (orang)
Employee Demographics (PKWT & PKWTT) Based on Gender (people)

Entitas Entity	2025				2024			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase terhadap Karyawan PTPI Group (%) Percentage of PTPI Group employees (%)	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase terhadap Karyawan PTPI Group (%) Percentage of PTPI Group employees (%)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4=3:5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9=8:5)
Pupuk Sriwidjaja Palembang	**1.630**	**155**	**1.785**	**22,65**	1.634	156	1.790	23,21
Rekayasa Industri	**281**	**51**	**332**	**4,21**	311	56	367	4,76
Pupuk Indonesia Niaga	**31**	**30**	**61**	**0,77**	32	30	62	0,80
Pupuk Indonesia Logistik	**22**	**3**	**25**	**0,32**	24	3	27	0,35
Pupuk Indonesia Pangan	**2**	**1**	**3**	**0,04**	8	1	9	0,12
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	**6.812**	**682**	**7.494**	**95,08**	6.675	676	7.351	95,32
Jumlah Karyawan PTPI Group (5) Total of PTPI Group Employees	**7.087**	**795**	**7.882**	**100,00**	**6.939**	**773**	**7.712**	**100,00**

Demografi Karyawan (PKWT & PKWTT) Jabatan (orang)
Employee Demographics (PKWT & PKWTT) based on Grade Position (people)

Entitas Entity	BOD- 1		BOD- 2		BOD- 3		BOD- 4		BOD- 5-7	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Holding										
Pupuk Indonesia	**56**	51	**104**	109	**112**	100	**70**	70	**46**	31
Entitas Anak Subsidiaries										
Petrokimia Gresik	**32**	26	**100**	99	**260**	248	**508**	457	**1.290**	1.357
Pupuk Kujang	**15**	13	**59**	50	**190**	193	**256**	248	**460**	474
Pupuk Kalimantan Timur	**34**	31	**88**	99	**293**	264	**406**	426	**643**	483
Pupuk Iskandar Muda	**8**	10	**33**	23	**116**	106	**240**	237	**257**	252
Pupuk Sriwidjaja Palembang	**19**	19	**91**	97	**444**	436	**590**	552	**641**	686
Rekayasa Industri	**21**	31	**106**	120	**194**	207	**11**	9	**-**	-
Pupuk Indonesia Niaga	**2**	2	**10**	10	**23**	21	**10**	8	**16**	21
Pupuk Indonesia Logistik	**2**	2	**4**	5	**8**	8	**5**	5	**6**	7
Pupuk Indonesia Pangan	**-**	-	**-**	-	**1**	1	**2**	8	**-**	-
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	**133**	134	**491**	503	**1.529**	1.484	**2.028**	1.950	**3.313**	3.280
Jumlah Total	**189**	**185**	**595**	**612**	**1.641**	**1.584**	**2.098**	**2.020**	**3.359**	**3.311**

Demografi Karyawan Berdasarkan (PKWTT & PKWT) Usia (orang)
Employee Demographics Based on (PKWTT and PKWT) Age (persons)

Entitas Entity	>50 tahun >50 years old		45 – 50 tahun 45 – 50 years old		40 – 45 tahun 40 – 45 years old		35 – 40 tahun 35 - 40 years old		30 – 35 tahun 30 – 35 years old		25 – 30 tahun 25 – 30 years old		<25 tahun <25 years old	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Holding														
Pupuk Indonesia	**35**	34	**46**	39	**65**	62	**108**	90	**89**	102	**31**	29	**14**	5
Entitas Anak Subsidiaries														
Petrokimia Gresik	**37**	47	**8**	4	**33**	24	**443**	294	**795**	724	**770**	948	**104**	146
Pupuk Kujang	**69**	77	**70**	63	**307**	222	**306**	359	**181**	207	**30**	50	**17**	-
Pupuk Kalimantan Timur	**64**	75	**97**	82	**160**	143	**332**	300	**440**	460	**286**	188	**85**	55
Pupuk Iskandar Muda	**16**	12	**22**	16	**124**	114	**174**	178	**108**	84	**158**	172	**52**	52
Pupuk Sriwidjaja Palembang	**93**	95	**155**	105	**273**	267	**541**	479	**585**	617	**127**	227	**11**	-
Rekayasa Industri	**105**	108	**52**	61	**102**	101	**60**	64	**13**	33	**-**	-	**-**	-
Pupuk Indonesia Niaga	**21**	14	**5**	13	**10**	9	**11**	5	**9**	15	**5**	6	**-**	-
Pupuk Indonesia Logistik	**3**	5	**7**	6	**5**	3	**5**	7	**4**	4	**1**	2	**-**	-
Pupuk Indonesia Pangan	**-**	2	**-**	-	**-**	1	**2**	3	**1**	3	**-**	-	**-**	-
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	**408**	435	**416**	350	**1.014**	884	**1.874**	1.689	**2.136**	2.147	**1.377**	1.593	**269**	253
Jumlah Total	**443**	**469**	**462**	**389**	**1.079**	**946**	**1.982**	**1.779**	**2.225**	**2.249**	**1.408**	**1.622**	**283**	**258**

Demografi Karyawan PKWT & PKWTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Demographics of PKWT & PKWTT Employees Based on Education Level (persons)

Entitas Entity	Doctor (S3) Doctor Degre		Pasca Sarjana Postgraduate		Sarjana Bachelor		Diploma Diploma		SLTA Senior High School	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Holding										
Pupuk Indonesia	**3**	3	**151**	85	**226**	272	**6**	1	**2**	-
Entitas Anak Subsidiaries										
Petrokimia Gresik	**3**	-	**123**	20	**498**	669	**181**	228	**1.385**	1.270
Pupuk Kujang	**-**	-	**66**	70	**254**	344	**121**	212	**539**	352
Pupuk Kalimantan Timur	**-**	1	**115**	74	**546**	417	**177**	193	**626**	618
Pupuk Iskandar Muda	**-**	-	**76**	59	**235**	280	**105**	177	**238**	112
Pupuk Sriwidjaja Palembang	**3**	1	**136**	160	**779**	901	**236**	337	**631**	391
Rekayasa Industri	**-**	1	**85**	86	**231**	244	**6**	10	**10**	26
Pupuk Indonesia Niaga	**-**	1	**3**	30	**50**	9	**5**	4	**3**	18
Pupuk Indonesia Logistik	**-**	-	**3**	1	**20**	17	**2**	9	**-**	-
Pupuk Indonesia Pangan	**-**	-	**1**	3	**2**	3	**-**	1	**-**	2

Demografi Karyawan PKWT & PKWTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Demographics of PKWT & PKWTT Employees Based on Education Level (persons)

Entitas / Entity	Doctor (S3) Doctor Degre		Pasca Sarjana Postgraduate		Sarjana Bachelor		Diploma Diploma		SLTA Senior High School	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	6	4	608	503	2.615	2.884	833	1.171	3.432	2.789
Jumlah Total	9	7	759	588	2.841	3.156	839	1.172	3.434	2.789

Keterangan: Pada tahun 2025, data pendidikan menggunakan data pendidikan saat diterima sebagai karyawan
Note: In 2025, education data uses education data when accepted as an employee.

Demografi Karyawan (PKWT & PKWTT) Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)
Employee Demographics (PKWT & PKWTT) Based on Employment Status (persons)

Entitas / Entity	Karyawan PKWTT PKWTT employees			Karyawan PKWT PKWT employees		
	2025	2024	Penambahan/ (Pengurangan) Increase/(Decrease) 2025 - 2024	2025	2024	Penambahan/ (Pengurangan) Increase/(Decrease) 2025 - 2024
Holding						
Pupuk Indonesia	341	338	3	47	23	24
Entitas Anak Subsidiaries						
Petrokimia Gresik	2.170	2.186	(16)	20	1	19
Pupuk Kujang	954	976	(22)	26	2	24
Pupuk Kalimantan Timur	1.148	1.173	(25)	316	130	186
Pupuk Iskandar Muda	544	548	(4)	110	80	30
Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.772	1.790	(18)	13	-	13
Rekayasa Industri	322	358	(36)	10	9	1
Pupuk Indonesia Niaga	57	57	-	4	5	(1)
Pupuk Indonesia Logistik	25	27	(2)	-	-	-
Pupuk Indonesia Pangan	3	3	-	-	6	(6)
Sub Jumlah Entitas Anak Subsidiaries Sub Total	6.995	7.118	(123)	499	233	266
Jumlah Total	7.336	7.456	(120)	546	256	290

Pengembangan Kompetensi Karyawan

PTPI meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni merupakan ujung tombak dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Untuk itu, PTPI menjalankan program pendidikan dan pengembangan kompetensi karyawan secara berkesinambungan agar lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang begitu pesat serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja.

Perusahaan memberikan perhatian besar terhadap kualitas, profesionalitas, dan efektivitas SDM dalam menjaga serta menumbuhkan loyalitas dan produktivitas SDM setiap tahun. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan dengan mengacu pada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh SDM.

Employee Competency Development

PTPI believes that qualified Human Capital (HC) is the key driver in realizing the Company's vision and mission. To this end, PTPI continuously runs employee education and competency development programs to improve competitiveness in the face of rapid changes and development, as well as to increase performance effectiveness and productivity.

The Company places significant emphasis on the quality, professionalism, and effectiveness of its HC, ensuring and fostering employee loyalty and productivity every year. This commitment is demonstrated by the organization of HC training and development programs, which are guided by a training and development framework encompassing all aspects and methods of development for all employees.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah merealisasikan biaya pengembangan kompetensi sebesar Rp203,54 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp224,08 miliar.

Throughout 2025, the Company realized competency development costs of Rp203.54 billion, lower than Rp224.08 billion recorded in 2024.

Realisasi Anggaran Pengembangan Kompetensi
Competency Development Budget Implementation

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Keterangan Description	2025	2024	2023
Realisasi Anggaran Budget Implementation	**203.538**	224.083	232.994

Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan 2025
Employee Competency Development Implementation in 2025

No.	Kategori Pengembangan Kompetensi Competency Development Categories	Peserta Berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level	Jumlah Peserta Total Participants
1.	Proses Bisnis & Inovasi Business Process & Innovation	Manajemen Management	154
		Staf Staff	3.204
2.	Komersial Commercial	Manajemen Management	4
		Staf Staff	2.433
3.	Urusan Korporasi Corporate Affair	Manajemen Management	2
		Staf Staff	442
4.	Strategi Korporasi & Pengembangan Bisnis Corporate Strategy & Business Development	Manajemen Management	65
		Staf Staff	725
5.	Keuangan & Akuntansi Finance & Accounting	Manajemen Management	11
		Staf Staff	1.246
6.	Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan Governance, Risk & Compliance	Manajemen Management	68
		Staf Staff	806
7.	Sumber Daya Manusia & Bagian Umum Human Capital & General Affairs	Manajemen Management	61
		Staf Staff	2.322
8.	Efektivitas Interpersonal Interpersonal Effectiveness	Staf Staff	429
9.	TI & Analitik Data IT & Data Analytics	Manajemen Management	8
		Staf Staff	1.375
10.	Keterampilan Kepemimpinan Leadership Skills	Manajemen Management	231
		Staf Staff	121
11.	Hukum Legal	Manajemen Management	6
		Staf Staff	731
12.	Operasi Operations	Staf Staff	3
13.	Efektivitas Personal Personal Effectiveness	Staf Staff	3.168

Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan 2025
Employee Competency Development Implementation in 2025

No.	Kategori Pengembangan Kompetensi Competency Development Categories	Peserta Berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level	Jumlah Peserta Total Participants
14.	Rantai Pasok Supply Chain	Manajemen Management	5
		Staf Staff	1.109
15.	Keberlanjutan & K3LH Sustainability & HSE	Manajemen Management	4
		Staf Staff	6.316

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, pada tahun 2025 Pupuk Indonesia Group melaksanakan program-program peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia, meliputi *inhouse training, outplant training*, dan pelatihan sertifikasi. *Mandays* pelatihan sampai dengan bulan Desember 2025 sejumlah 131.172 *mandays* dengan rincian sebagai berikut:

To improve HR competency, in 2025, the Pupuk Indonesia Group organized programs to improve HR knowledge and skills, including in-house training, outplant training, and certification training. Training man-days through December 2025 totaled 131,172 mandays with the following breakdown:

No	Perusahaan Company	Realisasi Implementation			
		2025	2024	2023	2022
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	**24.109**	12.169	12.538	4.997
2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	**18.027**	16.647	16.782	39.600
3	PT Pupuk Kujang	**16.269**	16.165	14.129	11.425
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	**21.016**	26.214	27.476	24.745
5	PT Petrokimia Gresik	**28.642**	26.956	20.351	17.056
6	PT Pupuk Iskandar Muda	**15.036**	13.947	19.161	16.878
7	PT Rekayasa Industri	**6.728**	10.950	8.294	7.575
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	**1.891**	1.257	986	696
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	**288**	519	592	454
10	PT Pupuk Indonesia Pangan	**260**	212	130	53
Jumlah *Mandays* Mandays Total		**131.172**	**125.036**	**120.439**	**123.479**

Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri
Domestic and Overseas Study Assignment

Perusahaan Company	2025		2024		2023	
	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri International	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri International	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri International
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**11**	**-**	17	-	8	-
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	**4**	**1**	2	-	3	-
PT Pupuk Kujang	**21**	**-**	24	1	2	1
PT Pupuk Kalimantan Timur	**-**	**-**	1	-	1	-
PT Petrokimia Gresik	**5**	**-**	14	1	1	1
PT Pupuk Iskandar Muda	**1**	**1**	1	-	-	-
PT Rekayasa Industri	**-**	**-**	-	-	-	-
PT Pupuk Indonesia Niaga	**-**	**-**	-	-	-	-
PT Pupuk Indonesia Logistik	**-**	**-**	-	-	-	-
PT Pupuk Indonesia Pangan	**-**	**-**	-	-	-	-
Jumlah Karyawan Total Employees	**42**	**2**	**59**	**2**	**15**	**2**

Dalam rangka peningkatan daya saing SDM, Perusahaan merealisasikannya dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di era global melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP IPI) dan lembaga sertifikasi lainnya.

To improve its HR competitiveness, the Company organizes global competency certification through the Indonesian Fertilizer Industry Professional Certification Institute (LSP IPI) and other certification bodies.

Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan tahun 2026

Perusahaan telah membuat rencana pengembangan kompetensi karyawan Perusahaan pada tahun 2026 di antaranya sebagai berikut:

Employee Competency Development Plan for 2026

The Company has developed an employee competency development plan for 2026, which includes the following:

Rencana Pengembangan Kompetensi tahun 2026
2026 Competency Development Plan

No.	Nama Kegiatan Activity Name	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Berdasarkan Level Jabatan Participants by Position
1.	*Operator Development Program* (ODP)	Meningkatkan kompetensi teknis operator berdasarkan hasil *assessment* Kompetensi Teknis (Komtek) guna mendukung peningkatan keandalan operasional, keselamatan kerja, dan efektivitas pemeliharaan fasilitas produksi. To improve the technical competencies of operators based on the results of a technical competency assessment (Komtek) to support increased operational reliability, occupational safety, and the effectiveness of production facility maintenance.	BOD – 4 s.d BOD – 6
2.	*Maintenance Capacity Development* (MCD)	Meningkatkan kompetensi teknis dan kapabilitas personel *maintenance* dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi secara efektif, andal, dan berkelanjutan. To improve the technical competencies and capabilities of maintenance personnel when carrying out production facility maintenance activities effectively, reliably, and sustainably.	BOD – 4 s.d BOD – 6
3.	HSE *Competency Development* (HSECD)	Meningkatkan kompetensi karyawan di bidang *Health, Safety, and Environment* (HSE) guna mendukung penerapan budaya keselamatan kerja, kepatuhan terhadap standar K3, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. To improve the employee competencies in Health, Safety, and Environment (HSE) to support the implementation of an occupational safety culture, and to complly with OHS standards, and sustainable environmental management.	BOD – 4 s.d BOD – 6
4.	*Engineering Excellent Center* (EEC)	Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas *engineer* dalam pengembangan solusi teknis, inovasi proses, serta peningkatan efisiensi dan keandalan fasilitas produksi. To improve the engineers competencies and capabilities in developing technical solutions, process innovations, and the efficiency and reliability of production facilities.	BOD – 4 s.d BOD – 6
5.	*Enterprise Generic Competencies Series* (EGCS)	Meningkatkan kompetensi teknis karyawan eksekutif dalam bidang GRC & *Financial Excellence, Business Development & Transformation Excellence* dan *Market & Operation Excellence.* *To improve the executive employees* technical competencies in the areas of GRC & Financial Excellence, Business Development & Transformation Excellence, and Market & Operation Excellence.	BOD – 1
6.	Pengembangan *Sales* & *Commercial* (T-*Cup Series*)	Meningkatkan kompetensi karyawan pada fungsi *Sales* dan *Commercial* berdasarkan hasil *assessment* kompetensi teknis guna memperkuat kemampuan analisis pasar, strategi penjualan, serta optimalisasi kinerja bisnis perusahaan. To improve the employees competencies in the Sales and Commercial functions based on the results of the technical competency assessment to strengthen market analysis capabilities, sales strategies, and optimize the Company's business performance.	BOD – 4 s.d BOD – 6 and TKNO
7.	*Leadership Development Program* (*Band* 3 – *Non Shortlist & Longlist Talent*)	Program pengembangan *leadership* bagi karyawan *Band* 3 (*Non Shortlist* & *Longlist Talent*) terlaksana secara efektif, terstruktur, dan menjangkau mayoritas peserta untuk meningkatkan kapabilitas kepemimpinan dasar serta mendukung penguatan *talent pool* perusahaan. The leadership development program for Band 3 employees (non-shortlisted and non-longlisted talent) was implemented effectively and in a structured manner, reaching the majority of participants to enhance their basic leadership skills and support the strengthening of the company's talent pool.	BOD - 3

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan
Company Share Ownership Composition

Pemegang Saham Shareholders	Per 1 Januari 2025 As of January 1, 2025			Per 31 Desember 2025 As of December 31, 2025		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid- up Capital (Rp)	Persentase Saham Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid- up Capital (Rp)	Persentase Saham Ownership (%)
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham **Nominal Value of Shares = Rp1,000,000/share**						
Pemerintah Republik Indonesia (Seri A Dwiwarna) Government of the Republic Indonesia (Seri A Dwiwarna)	25.000.000	25.000.000.000.000	100%	**1**	**1.000.000**	**0,01%**
PT Danantara Asset Management (Persero) yang sebelumnya bernama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Danantara Asset Management (Persero), previously named PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	-	-	-	**24.999.999**	**24.999.999.000.000**	**99,99%**
Jumlah Total	**25.000.000**	**25.000.000.000.000**	**100%**	**25.000.000**	**25.000.000.000.000**	**100%**

Perubahan Struktur Pemegang Saham Setelah Tahun Buku

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur mengenai kepemilikan saham Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), per tanggal 5 Maret 2026, telah terjadi perubahan susunan kepemilikan saham pada PT Pupuk Indonesia (Persero).

Perubahan tersebut dilakukan melalui pengalihan sebagian saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (Persero) ("PT DAM") kepada Negara Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ("BP BUMN"), sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri B pada BUMN kepada BP BUMN yang ditandatangani oleh BP BUMN dan PT DAM.

PT DAM mengalihkan 249.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000, atau dengan nilai keseluruhan sebesar Rp249.999.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kepada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN. Atas pengalihan tersebut, klasifikasi saham diubah dari saham Seri B menjadi saham Seri A Dwiwarna, sehingga kepemilikan saham BP BUMN pada Perusahaan menjadi 1%.

Changes in Shareholder Structure After the end of the Fiscal Year

In connection with Law Number 16 of 2025, which regulated share ownership in State-Owned Enterprises (BUMN), as of March 5, 2026, there were changes in the share ownership structure of PT Pupuk Indonesia (Persero).

The changes were made through a transfer of a portion of Series B shares owned by PT Danantara Asset Management (Persero) ("PT DAM") to the Republic of Indonesia through the State-Owned Enterprises Regulatory Agency ("BP BUMN"), as stated in the Agreement on the Transfer of Republic of Indonesia State-Owned Shares in the Form of Series B Shares in a BUMN to BP BUMN, signed by BP BUMN and PT DAM.

PT DAM transferred 249,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000, for a total value of Rp249,999,000,000 (two hundred forty-nine billion nine hundred and ninety-nine million rupiah), to the Republic of Indonesia through BP BUMN. Following this transfer, the share classification was changed from Series B shares to Series A Dwiwarna shares, resulting in BP BUMN's share ownership in the Company becoming 1%.

Dengan demikian, struktur kepemilikan modal Perusahaan, setelah tahun buku berakhir adalah sebagai berikut:

Thus, the Company's capital ownership structure after the end of the fiscal year was as follows:

Susunan Kepemilikan Saham Sebelum Transaksi Pre-Transaction Shareholding Structure	Susunan Kepemilikan Saham Setelah Transaksi Post-Transaction Shareholding Structure
BP BUMN	
1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna 1 (one) Series A Dwiwarna share	250.000 lembar saham Seri A Dwiwarna 250,000 Series A Dwiwarna share
Persentase kepemilikan: 0,01% Ownership Percetage: 0.01%	Persentase kepemilikan: 1,00% Ownership Percetage: 1.00%
PT DAM	
24.999.999 lembar saham Seri B 24,999,999 Series B shares	24.750.000 lembar saham Seri B 24,750,000 Series B shares
Persentase kepemilikan: 99,99% Ownership Percetage: 99.99%	Persentase kepemilikan: 99,00% Ownership Percetage: 99.00%

Transaksi pengalihan saham ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang mengatur bahwa kepemilikan saham Negara pada BUMN melekat kepada BP BUMN sebesar 1% (satu persen).

This share transfer transaction was carried out to comply with the provisions in Law Number 16 of 2025, which stipulated that the State's share ownership in a BUMN be vested in BP BUMN at 1% (one percent).

Perubahan struktur pemegang saham ini, kemudian dikukuhkan melalui Akta No. 02 tanggal 26 Januari 2026 yang ditandatangan di hadapan Notaris Lumassia, S.H., dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0015214.AH.01.02.TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia yang ditetapkan pada 5 Maret 2026.

This change in shareholder structure was then confirmed in Deed No. 02 dated January 26, 2026, signed before Notary Lumassia, S.H., and ratified in the Republic of Indonesia Minister of Law Decree Number AHU-0015214.AH.01.02.TAHUN 2026 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, on March 5, 2026.

Komposisi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

Manajemen Kunci Key Management	Per 1 Januari 2025 As of January 1, 2025	Per 31 Desember 2025 As of December 31, 2025
	Jumlah Total	**Jumlah** Total
Secara Langsung Direct		
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nihil Nil	Nihil Nil
Direksi Board of Directors	Nihil Nil	Nihil Nil
Secara Tidak Langsung Indirect		
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nihil Nil	Nihil Nil
Direksi Board of Directors	Nihil Nil	Nihil Nil

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali

Information on Majority/ Controlling Shareholders

Struktur Pemegang Saham PTPI Per 31 Desember 2025
PTPI Shareholders Structure As at December 31, 2025



Pemerintah Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan (*Ultimate Beneficial Owner*) melalui kepemilikan langsung 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan kepemilikan saham Seri B oleh PT Danantara Asset Management (Persero).

The Government of the Republic of Indonesia is the Company's Controlling Shareholder (Ultimate Beneficial Owner) through direct ownership of one Series A Dwiwarna share with special rights and indirect ownership of Series B shares through PT Danantara Asset Management (Persero).

Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associated Companies, and Joint Ventures

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Status Operasi Operational Status	Kepemilikan Saham Shareholding	Jumlah Aset (sebelum Eliminasi) (Rp-Juta) Total Assets (before Elimination) (Rp million)	
						2025	2024
Kepemilikan Langsung oleh PTPI Direct Ownership by PTPI							
PT Petrokimia Gresik	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Gresik	1972	Beroperasi komersial sejak tahun 1972 Commercial operation since 1972	99,99%	**42.725.536**	39.982.278
PT Pupuk Kujang	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Cikampek	1975	Beroperasi komersial sejak tahun 1975 Commercial operation since 1975	99,99%	**10.678.944**	10.819.908
PT Pupuk Kalimantan Timur	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Bontang	1977	Beroperasi komersial sejak tahun 1985 Commercial operation since 1985	99,99%	**39.401.788**	38.110.873
PT Pupuk Iskandar Muda	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Aceh	1982	Beroperasi komersial sejak tahun 1982 Commercial operation since 1982	99,99%	**8.354.330**	8.593.949
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pupuk dan Petrokimia Fertilizer and Petrochemicals	Palembang	2010	Beroperasi komersial sejak tahun 2011 Commercial operation since 2011	99,99%	**32.198.389**	25.535.320
PT Rekayasa Industri	Konstruksi/EPC Construction/EPC	Jakarta	1981	Beroperasi komersial sejak tahun 1981 Commercial operation since 1981	98,20%	**6.193.315**	6.237.356
PT Pupuk Indonesia Niaga	Perdagangan Trading	Jakarta	1970	Beroperasi komersial sejak tahun 1970 Commercial operation since 1970	99,84%	**431.675**	613.284
PT Pupuk Indonesia Logistik	Pengiriman Shipping	Jakarta	2013	Beroperasi komersial sejak tahun 2013 Commercial operation since 2013	54,00%	**540.504**	628.791
PT Pupuk Indonesia Pangan	Pangan Food	Jakarta	2015	Beroperasi komersial sejak tahun 2015 Commercial operation since 2015	60,00%	**78.922**	83.678
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Petrokimia Gresik Indirect Ownership, through PT Petrokimia Gresik							
PT Petrosida Gresik	Produksi, distribusi, dan perdagangan bahan aktif pestisida serta bertindak sebagai PUD pupuk Production, distribution, and trading of active pepticide ingredients as well as a fertilizer distributor	Gresik	1983	Beroperasi komersial sejak tahun 1983 Commercial operation since 1983	99,99%	**646.309**	845.612

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Status Operasi Operational Status	Kepemilikan Saham Shareholding	Jumlah Aset (sebelum Eliminasi) (Rp-Juta) Total Assets (before Elimination) (Rp million) 2025	2024
PT Petrokimia Kayaku	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida Production, formulating and marketing	Gresik	1976	Beroperasi komersial sejak tahun 1976 Commercial operation since 1976	60,00%	**1.067.850**	1.039.720
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Pupuk Kujang Indirect Ownership, through PT Pupuk Kujang							
PT Kawasan Industri Kujang Cikampek	Pengelolaan kawasan industri Industrial area management	Cikampek	1990	Beroperasi komersial sejak tahun 1990 Commercial operation since 1990	96,19%	**90.449**	98.441
PT Sintas Kurama Perdana	Industri, perdagangan, jasa dan pergudangan dalam sektor industri kimia dasar Industry, trade, services and warehousing in the basic chemical industry sector	Cikampek	1986	Beroperasi komersial sejak tahun 1988 Commercial operation since 1988	99,00%	**96.952**	94.651
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Pupuk Kalimantan Timur Indirect Ownership, through PT Pupuk Kalimantan Timur							
PT Kaltim Industrial Estate	Pengelolaan kawasan industri Industrial area management	Bontang	1991	Beroperasi komersial sejak tahun 1991 Commercial operation since 1991	99,99%	**1.435.438**	1.291.506
PT Kaltim Adhiguna Dermaga	Penyedia tenaga kerja, jasa kontraktor Labor providers, contractor services	Bontang	1990	Beroperasi komersial sejak tahun 1990 Commercial operation since 1990	51,00%	**88.748**	78.756
PT Kaltim Jasa Security	Penyedia tenaga kerja Labor provider	Bontang	2002	Beroperasi komersial sejak tahun 2002 Commercial operation since 2002	70,00%	**59.861**	50.157
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Pupuk Iskandar Muda Indirect Ownership, through PT Pupuk Iskandar Muda							
PT PIM Prima Medika	Rumah Sakit Hospital	Lhokseumawe	2017	Beroperasi komersial sejak tahun 2017 Commercial operation since 2017	96,00%	**39.520**	40.722
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Indirect Ownership, through PT Pupuk Sriwidjaja Palembang							
PT Pusri Agro Lestari	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida dan agrokimia lainnya Production, formulating and marketing pesticides and other agrochemicals	Jakarta	2015	Beroperasi komersial sejak tahun 2015 Commercial operation since 2015	51,00%	**36.335**	36.451
Kepemilikan tidak Langsung, melalui PT Rekayasa Industri Indirect Ownership, through PT Rekayasa Industri							
PT Pupuk Indonesia Utilitas	Utilitas Utility	Jakarta	2014	Beroperasi komersial sejak tahun 2014 Commercial operation since 2014	62,86%	**1.640.278**	1.709.680

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Status Operasi Operational Status	Kepemilikan Saham Shareholding	Jumlah Aset (sebelum Eliminasi) (Rp-Juta) Total Assets (before Elimination) (Rp million)	
						2025	2024
PT Yasa Industri Nusantara	Perancangan dan perencanaan konstruksi, penyediaan dan pengawasan peralatan dan struktur Construction planning, supply and supervision of equipment and steel structures	Jakarta	1999	Beroperasi komersial sejak tahun 1999 Commercial operation since 1999	99,68%	**89.577**	81.028
PT Tracon Industri	Penyedia jasa konsultasi dan perdagangan Provider of consulting and trading services	Jakarta	2001	Beroperasi komersial sejak tahun 2001 Commercial operation since 2001	80,00%	**574.461**	327.070
PT Rekayasa Engineering	Penyedia jasa teknik dan engineering Engineering and technical service providers	Jakarta	2001	Beroperasi komersial sejak tahun 2001 Commercial operation since 2001	80,00%	**315.864**	298.432
Rekind Malaysia Sdn. Bhd.	Penyedia jasa teknik perancangan dan pengadaan Engineering service provider design and procurement	Malaysia	2014	Beroperasi komersial sejak tahun 2014 Commercial operation since 2014	100,00%	**499**	12.667
PT Rekind Daya Mamuju	Pembangunan pembangkit tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik Construction of power plants, sales of electric power and distribution of electric power	Jakarta	2013	Beroperasi komersial sejak tahun 2013 Commercial operation since 2013	90,00%	**1.562.529**	1.699.369
PT Puspetindo	Industri logam dan permesinan umum General metal and machining industry	Gresik	1990	Beroperasi komersial sejak tahun 1991 Commercial operation since 1991	91,38%	**82.829**	72.572
PT Rekayasa Cakrawala	Penyedia tenaga kerja Labor provider	Jakarta	2006	Beroperasi komersial sejak tahun 2006 Commercial operation since 2006	51,00%	**109.539**	104.733
Tracon Industri Solusindo	EPC Consultant	Jakarta	2019	Beroperasi komersial sejak tahun 2019 Commercial operation since 2019	98,00%	**12.673**	14.315
PT Rekind Engineering & Construction	EPC Contractor	Jakarta	2014	Beroperasi komersial sejak tahun 2014 Commercial operation since 2014	80,00%	**82.156**	85.171
PT Kaltim Daya Mandiri	Produsen listrik dan utilitas Produsen listrik dan utilitas	Bontang	1995	Beroperasi komersial sejak tahun 2002 Commercial operation since 2002	51%	**663.138**	666.138
PT Banyumas Energi Lestari	Pembangkit listrik Power Plant	Purwokerto	*)	-	51,00%	**2.745**	2.745
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Indonesia Niaga Indirect Ownership, through PT Pupuk Indonesia Niaga							
PT Sigma Utama	Manufaktur Cat Paint Manufacturing	Cibinong	1980	Beroperasi komersial sejak tahun 1982 Commercial operation since 1982	99,99%	106.203	115.913

*) Belum beroperasi secara komersial.
*) Not yet commercially operational.

Profil Singkat Entitas Anak/Kepemilikan Langsung Oleh PTPI

Brief Profiles of Subsidiaries/ Direct Ownership by PTPI

PETROKIMIA GRESIK
Solusi Agroindustri

PT Petrokimia Gresik

PKG merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, HM. Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Dalam perjalanannya, PT Petrokimia Gresik mengalami perubahan status, pada tahun 1971 sesuai PP No. 35/1971 menjadi Perum, pada tahun 1974 sesuai PP No. 35/1974 juncto PP No. 14/1975 berubah menjadi Persero. Berdasarkan PP No.28/1997 PKG menjadi anggota *holding* PTPI.

PKG saat ini menempati areal lebih dari 450 hektare di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Total produksi saat ini mencapai 8,9 juta ton/tahun, terdiri dari produk pupuk sebesar 5 (lima) juta ton/tahun, dan produk non-pupuk sebanyak 3,9 juta ton/tahun. Anak Perusahaan PTPI ini bertransformasi menuju perusahaan solusi agroindustri untuk mendukung tercapainya program Ketahanan Pangan Nasional, dan kemajuan dunia pertanian.

Struktur Pemegang Saham PKG adalah PTPI yang memiliki 6.599.834 lembar saham seri-B (99,9975%), Yayasan Petrokimia Gresik yang memiliki 165 lembar saham (0,0024%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A (“Saham Seri-A Dwiwarna”).

PKG is the most comprehensive fertilizer plant in Indonesia, which at its inception was called Petrokimia Surabaya Project. The construction contract was signed on August 10, 1964, and came into effect on December 8, 1964. The project was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, HM. Soeharto on July 10, 1972, which was later designated as the anniversary of PT Petrokimia Gresik. In the course of its development, PT Petrokimia Gresik underwent changes in legal status, in 1971 it became a Perum pursuant to PP No. 35/1971, and in 1974, in accordance with PP No. 35/1974 juncto PP No. 14/1975, it was converted into a Persero. Based on PP No. 28/1997, and PKG became a member of PTPI holding company.

PKG currently occupies an area of more than 450 hectares in Gresik Regency, East Java. Total production currently reaches 8.9 million tons/year, consisting of fertilizer products of 5 (five) million tons/year, and non-fertilizer products of 3.9 million tons/year. This PTPI Subsidiary is transforming into an agroindustry solutions company to support the achievement of the National Food Security program, and the advancement of the agricultural industry.

The Shareholder Structure of PKG is PTPI with 6,599,834 series-B shares (99.9975%), Yayasan Petrokimia Gresik with 165 series-B shares (0.0024%), and the Government of Indonesia with 1 series-A share (0.0001%) (“Saham Seri-A Dwiwarna”).

Komposisi Kepemilikan Saham PKG per Tanggal 31 Desember 2025
PKG Shareholder Composition as of December 31, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**99,9975**
Yayasan Petrokimia Gresik	**0,0024**
Pemerintah Negara Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	**0,0001**

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	**Suhardi Alius**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Luluk Nur Hamidah**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Zaki Saleh Masyhur**
Komisaris Commissioner	**Viva Yoga Mauladi**
Komisaris Commissioner	**Andi Saiful Haq**
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	**Daconi Khotob**
Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	**Adityo Wibowo**
Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	**Majus Luther Sirait**
Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	**Johanes Barus**

PT Pupuk Kujang

PKC resmi berdiri pada tanggal 9 Juni 1975. PKC memproduksi dan memasarkan pupuk (urea, NPK, dan organik) serta bahan kimia lain (amonia). PKC berlokasi di Cikampek, Jawa Barat, dengan kepemilikan saham PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang 0,01%.

Struktur Pemegang Saham PKC adalah PTPI yang memiliki 1.899.915 lembar saham seri-B (99,9955%), Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang yang memiliki 84 lembar saham (0,0044%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A ("Saham Seri-A Dwiwarna").

PKC was officially established on June 9, 1975. PKC produces and markets fertilizers (urea, NPK, and organic fertilizers) and other chemicals (ammonia). PKC is located in Cikampek, West Java, with PTPI holding 99.99% of the shares and Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang holding 0.01%.

PKC's shareholding structure is PTPI with 1,899,915 series B shares (99.9955%), Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang with 84 series B shares (0.0044%), and the Government of Indonesia with 1 series A share (0.0001%) (the "Series A Dwiwarna Share").

Komposisi Kepemilikan Saham PKC per Tanggal 31 Desember 2025
PKC Shareholder Composition as of December 31, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**99,9955**
Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang	**0,0044**
Pemerintah Negara Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	**0,0001**

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	**Idha Widi Arshanti**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Dominggus Oktavianus Tobu Kiik**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Edriana Noerdin**
Komisaris Commissioner	**Faturrohman**
Komisaris Commissioner	**Mukhtasor**
Komisaris Commissioner	**Bambang Widjanarko**
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	**Budi Santoso Syarif**
Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	**Iyan Fajri**
Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	**Arlyza Eka Wijayanti**
Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	**Yana Nurahmad Haerudin**

PT Pupuk Kalimantan Timur

PKT merupakan salah satu produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1977. Berawal dari fasilitas pabrik pupuk terapung yang dikelola oleh Pertamina, kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1975 dan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1976 pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Perindustrian. Pada tahun 2012, PKT menjadi Anak Perusahaan PTPI.

PKT is one of Asia's largest producers of urea and NPK fertilizers and was established on December 7, 1977. Starting from a floating fertilizer plant facility managed by Pertamina, its management was subsequently transferred to the Ministry of Industry based on Presidential Decree No. 43 of 1975 and Presidential Decree No. 39 of 1976. In 2012, PKT became a Subsidiary of PTPI.

Struktur Pemegang Saham PKT adalah PTPI yang memiliki 17.599.812.012 lembar saham seri-B (99,9988%), Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim yang memiliki 187.987 lembar saham (0,0011%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A ("Saham Seri-A Dwiwarna").

The Shareholder Structure of PKT is PTPI with 17,599,812,012 series-B shares (99,9988%), Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim with 187,987 series-B shares (0.0011%), and the Government of Indonesia with 1 series-A share (0.0001%) ("Saham Seri-A Dwiwarna")

Komposisi Kepemilikan Saham PKT per Tanggal 31 Desember 2025
PKT Shareholder Composition as of December 31, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**99,9988**
Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim	**0,0011**
Pemerintah Negara Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	**0,0001**

Manajemen
Manajemen

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	**D. Andhi Nirwanto**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Sukardi Rinakit**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Gustaaf AC Patty**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Etha Rimba Paembonan**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Musthofa**
Komisaris Commissioner	**Aziz Samual**
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	**Gusrizal**
Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	**Qomaruzzaman**
Direktur Operasi Director of Operations	**F. Purwanto**
Direktur Pengembangan Director of Development	**Mohamad Agung**
Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	**Teguh Ismartono**

PT Pupuk Iskandar Muda

PIM merupakan Anak Perusahaan PTPI yang memproduksi dan memasarkan pupuk (urea dan NPK) serta bahan kimia lain (amonia). PIM didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., No. 54 pada tanggal 24 Februari 1982, dan beberapa kali disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, S.H., No. 10 tanggal 30 Agustus 2019.

Struktur Pemegang Saham PIM adalah PTPI yang memiliki 2.225.663 lembar saham seri-B (99,9995%), Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh yang memiliki 10 lembar saham (0,0004%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A ("Saham Seri-A Dwiwarna").

PIM is a Subsidiary of PTPI that produces and markets fertilizers (urea and NPK) and other chemicals (ammonia). PIM was established based on Notarial Deed of Soeleman Ardjasasmita, S.H., No. 54 dated February 24, 1982, and was amended several times, with the most recent by Notarial Deed of Lumassia, S.H., No. 10 dated August 30, 2019.

The Shareholder Structure of PIM is PTPI with 2,225,663 series-B shares (99.9995%), Yayasan Kesejahteraan Karyawan PIM with 10 series-B shares (0.0004%), and the the Government of Indonesia with 1 Series A share (0.0001%) ("Saham Seri-A Dwiwarna").

Komposisi Kepemilikan Saham PIM per Tanggal 31 Desember 2025
PIM Shareholder Composition as of December 31, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**99,9995**
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh	**0,0004**
Pemerintah Negara Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	**0,0001**

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	**Marzuki Daud**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Teuku Asmoni**
Komisaris Commissioner	**Supardiyanto**
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	**Filius Yuliandi**
Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	**Koko Sudiro**
Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	**Zulyan Imansyah**
Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	**Maimun**

PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PSP resmi berdiri pada tanggal 12 November 2010, yang memproduksi dan memasarkan pupuk (urea, NPK, dan organik) serta bahan kimia lain (amonia). PSP berlokasi di Palembang, Sumatra Selatan.

Struktur Pemegang Saham PSP adalah PTPI yang memiliki 5.799.985 lembar saham seri-B (99,9997%), Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri yang memiliki 14 lembar saham (0,0002%) seri-B, dan Pemerintah Indonesia yang memiliki 1 lembar saham (0,0001%) seri-A ("Saham Seri-A Dwiwarna").

PSP was officially established on November 12, 2010, and produces and markets fertilizers (urea, NPK, and organic) and other chemicals (ammonia). PSP is located in Palembang, South Sumatra.

The Shareholder Structure of PSP is PTPI with 5,799,985 series-B shares (99.9997%), Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri with 14 series-B shares (0.0002%), and the the Government of Indonesia with 1 series-A share (0.0001%) ("Saham Seri-A Dwiwarna").

Komposisi Kepemilikan Saham PSP per Tanggal 31 Desember 2025
PSP Shareholder Composition as of December 31, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**99,9997**
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	**0,0002**
Pemerintah Negara Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	**0,0001**

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	**Siti Nurizka Puteri Jaya**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Fadjar Judisiawan**
Komisaris Commissioner	**Bambang Supriyambodo**
Komisaris Commissioner	**Sally Salamah**
Komisaris Commissioner	**Muhammad Syakir**
Komisaris Commissioner	**Arteria Dahlan**
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	**Maryono**
Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	**R. Eric Juliana Rachman**
Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	**Sholikin**
Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	**Panji Winanteya Ruky**

PT Rekayasa Industri

Rekind resmi berdiri pada tanggal 12 Agustus 1981, Perusahaan berlokasi di Jakarta dan bergerak di bidang usaha jasa *engineering, procurement, & construction.*

Pada tahun 2025, kepemilikan saham PTPI 2.471.445 lembar saham (98,22%), Pemerintah Republik Indonesia 22.366 lembar saham (0,89%), dan PKT 22.366 lembar saham (0,89%).

Rekind was officially established on August 12, 1981, The company is located in Jakarta and is engaged in the engineering, procurement, & construction services business.

As of 2025, the share ownership comprised PTPI with 2,471,445 shares (98.22%), the Government of the Republic of Indonesia with 22,366 shares (0.89%), and PKT with 22,366 shares (0.89%).

Komposisi Kepemilikan Saham Rekind per Tanggal 31 Desember 2025
Rekind Shareholder Composition as of December 31, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**98,22**
Pemerintah Republik Indonesia	**0,89**
PT Pupuk Kalimantan Timur	**0,89**

Manajemen
Management

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	**Dody Widodo**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Maret Samuel Sueken**
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	**Triyani Utaminingsih**
Direktur Operasi dan Teknologi/Pengembangan Director of Operation and Technology/Development	**Yusairi**
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HC	**Dedy Rinaldi**

PT Pupuk Indonesia Niaga

Perusahaan ini resmi berdiri pada tahun 1970 dan pada tahun 1977 mendapat penyertaan modal dari Pemerintah berupa aset bekas PN Pembangunan Niaga, sehingga perusahaan ini resmi berekspansi ke bisnis perdagangan (*trading*). Untuk mencerminkan ekspansi tersebut, perusahaan mengubah namanya menjadi "PT Mega Eltra".

Sebagai bagian dari upaya pembentukan *holding* BUMN di bidang pupuk. Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke PT Pupuk Sriwidjaja. Pada tanggal 22 Desember 2022, sesuai dengan keputusan Pemegang Saham, PT Mega Eltra (ME) diubah namanya menjadi "PT Pupuk Indonesia Niaga" (PIN). Per tanggal 31 Desember 2025, saham PI Niaga dimiliki oleh PTPI 303.759 lembar saham (99,84%) dan Rekind 500 lembar saham (0,16%).

The company was officially established in 1970 and in 1977 received capital participation from the Government in the form of assets of the former PN Pembangunan Niaga, so that the company officially expanded into the trading business. To reflect this expansion, the company changed its name to 'PT Mega Eltra'.

As part of its efforts to form a state-owned holding company in the fertilizer sector, in 1998, the Indonesian government officially handed over the majority of the company's shares to PT Pupuk Sriwidjaja. On December 22, 2022, in accordance with the Shareholders' Resolution, PT Mega Eltra ('ME') was renamed to 'PT Pupuk Indonesia Niaga' ('PIN'). As of December 31, 2025, PI Niaga shares are owned by PTPI with 303,759 shares (99.84%) and Rekind with 500 shares (0.16%).

Komposisi Kepemilikan Saham PIN per Tanggal 31 Desember 2025
PIN Shareholder Composition as of December 31, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**99,84**
PT Rekayasa Industri	**0,16**

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	**Sandra Firmania**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Bachren Lukskar Dinul**
Komisaris Commissioner	**Muhammad Mujiburohman**
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	**Yusuf Trudo H.D.M. Nainggolan**
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HC	**Dundi Insan Perlambang**
Direktur Komersial Director of Commercial	**Wijaya Laksana**

PUPUK INDONESIA LOGISTIK (PIHC Group)

PT Pupuk Indonesia Logistik

PILOG resmi berdiri pada tanggal 23 Desember 2013, yang bergerak dalam bidang usaha jasa pelayaran dan jasa angkutan laut. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham adalah PTPI 145.500 lembar saham (55,77%) dan PSP 115.385 (44,23%).

PILOG was officially established on December 23, 2013, and is engaged in the business of shipping services and sea transportation services. The company is located in Jakarta, with share ownership of PTPI with 145,500 shares (55.77%) and PSP with 115,385 shares (44.23%).

Komposisi Kepemilikan Saham PILOG per Tanggal 31 Desember 2025
PILOG Shareholder Composition as of December 31, 2025

Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**55,77**
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	**44,23**

Manajemen
Management

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	**Andreas Wellman Marbun**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Aridayanto Kusumayuda**
Komisaris Commissioner	**Rudi Rusli**
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	**Budi Mulia Utama Hasibuan**
Direktur Operasional Director of Operational	**Hree Shanty Bayu**
Direktur Administrasi dan Keuangan Director of Administration and Finance	**Priyasdhika**
Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	**Muhammad Gustri Oktaviandi**

PT Pupuk Indonesia Pangan

PIP resmi berdiri pada tanggal 30 April 2015, yang bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan di bidang pertanian. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 159.000 lembar saham (60,00%), PKG 26.500 lembar saham (10,00%), PKC 26.500 lembar saham (10,00%), PKT 26.500 lembar saham (10,00%), dan PSP 26.500 lembar saham (10,00%).

PIP was officially established on April 30, 2015, and is engaged in industry and trade in agriculture. The company is located in Jakarta, with share ownership of PTPI with 159,000 shares (60.00%), PKG with 26,500 shares (10.00%), PKC with 26,500 shares (10.00%), PKT with 26,500 shares (10.00%), and PSP with 26,500 shares (10.00%).

Komposisi Kepemilikan Saham PIP per Tanggal 31 Desember 2025
PIP Shareholder Composition as of December 31, 2025

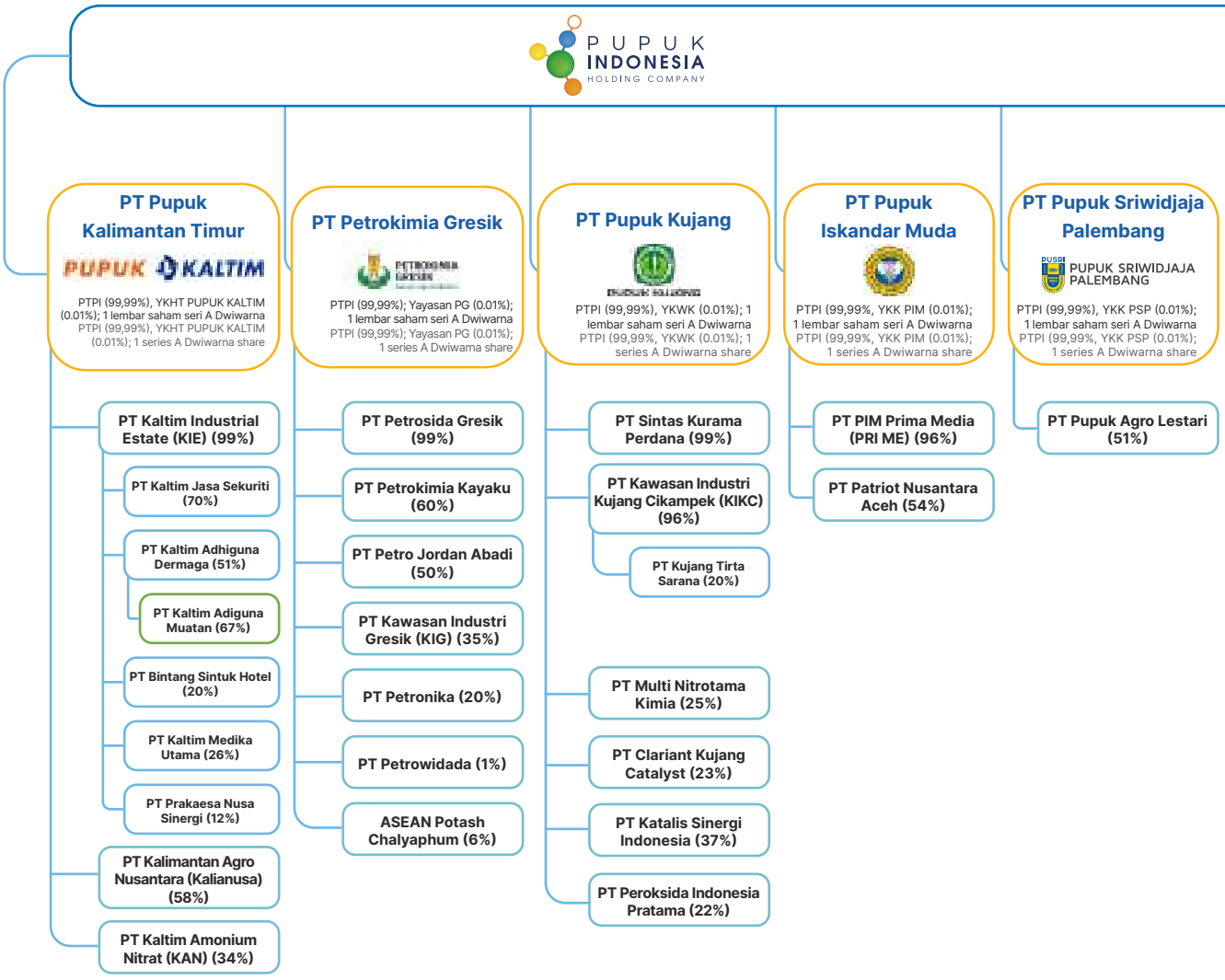
Pemilik Saham Shareholders	% Kepemilikan % Ownership
PT Pupuk Indonesia (Persero)	**60,00**
PT Petrokimia Gresik	**10,00**
PT Pupuk Kujang	**10,00**
PT Pupuk Kalimantan Timur	**10,00**
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	**10,00**

Manajemen
Manajemen

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	**Isra Ramli**
Komisaris Commissioner	**Achmad Suhawi**
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	**Iwan Daru Sukmana**
Direktur Keuangan Director of Finance	**Kiki Lukmanul Hakim**

Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

Struktur Pupuk Indonesia Group per 31 Desember 2025
Pupuk Indonesia Group Structure as at December 31, 2025



Holding Company

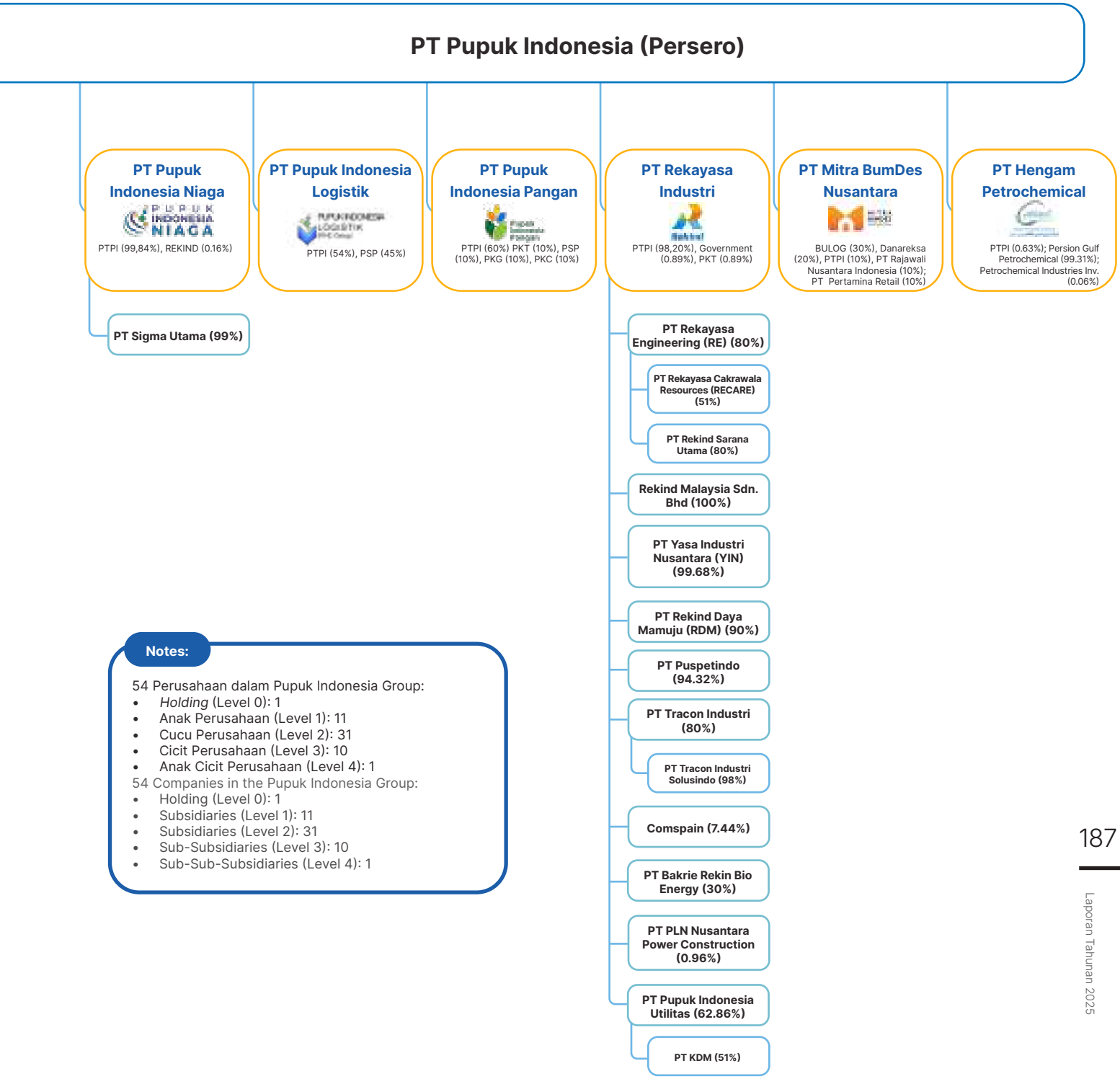
Anak Perusahaan
Subsidiary

Cucu Perusahaan
Sub-Subsidiary

Cicit Perusahaan
Sub-Sub-Subsidiary

Anak Cicit Perusahaan
Sub-Sub-Sub-Subsidiary

(xx%) ownership stake of PTPI entities



Notes:

54 Perusahaan dalam Pupuk Indonesia Group:
- *Holding* (Level 0): 1
- Anak Perusahaan (Level 1): 11
- Cucu Perusahaan (Level 2): 31
- Cicit Perusahaan (Level 3): 10
- Anak Cicit Perusahaan (Level 4): 1

54 Companies in the Pupuk Indonesia Group:
- Holding (Level 0): 1
- Subsidiaries (Level 1): 11
- Subsidiaries (Level 2): 31
- Sub-Subsidiaries (Level 3): 10
- Sub-Sub-Subsidiaries (Level 4): 1

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Shares Issuance and/or Listing

Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Saham melalui bursa efek mana pun. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0015214.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 5 Maret 2026 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, Perusahaan telah memperoleh pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

As of the publication of this annual report, the Company has not conducted a Public Offering of Shares through any stock exchange. Based on the Republic of Indonesia Minister of Law Decree No. AHU-0015214.AH.01.02.TAHUN 2026 dated March 5, 2026, concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of the Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, the Company obtained approval for the amendments to the Articles of Association in accordance with applicable regulations.

Kemudian, dalam rangka melaksanakan ketentuan UU 16/2025, Para Pemegang Saham menyetujui pengalihan 249.999 lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.999.000.000 milik PT DAM pada Perusahaan kepada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN yang klasifikasinya diubah menjadi saham Seri A Dwiwarna sehingga kepemilikan saham BP BUMN pada Perusahaan menjadi 1%.

Subsequently, to implement the provisions of Law 16/2025, the Shareholders approved the transfer of 249,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000, or a total nominal value of Rp249,999,000,000, owned by PT DAM in the Company, to the Republic of Indonesia through BP BUMN, with the classification changed to Series A Dwiwarna shares, thereby reducing BP BUMN's share ownership in the Company to 1%.

Sehubungan dengan pengalihan saham yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham, terdapat perubahan struktur kepemilikan modal Perusahaan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. 250.000 lembar saham Seri A Dwiwarna, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 sehingga keseluruhannya menjadi nilai Rp250.000.000.000; dan
2. 24.750.000 lembar saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp24.750.000.000.000.

In connection with the share transfer approved by the Shareholders, there has been a change in the Company's capital ownership structure, as follows:

1. 250,000 Series A Dwiwarna shares, each with a par value of Rp1,000,000, bringing the total value to Rp250,000,000,000; and
2. 24,750,000 Series B shares, each with a par value of Rp24,750,000,000,000.

Berikut kronologi penerbitan saham dari awal hingga laporan tahunan ini diterbitkan:

The following shows the chronology of share issuance from the beginning until the publication of this annual report:

Keterangan Description	**Tahun** Year	**Jumlah (Rp-juta)** Total (Rp million)	**Akumulasi (Rp-juta)** Accumulation (Rp million)	**Akta Notaris** Notarial Deed	**Nama Notaris** Notary's Name	**Pengesahan** Endorsement
Modal Awal I Initial Capital	1970	7.000	7.000	Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 Deed No. 4 dated January 3, 1970	Soeleman Ardjasasmita, S.H	Menteri Kehakiman No. J.A.5/7/20 tanggal 7 Februari 1970 Ministry of Justice No. J.A.5/7/20 dated February 7, 1970
Penambahan Additional	1975	24.000	31.000	Akta No. 2 tanggal 1 April 1975 Deed No. 2 dated April 1, 1975	Soeleman Ardjasasmita, S.H	Menteri Kehakiman No. J.A.5/132/15 tanggal 17 April 1975 Ministry of Justice No. J.A.5/132/15 dated April 17, 1975
Penambahan Additional	1976	6.000	37.000	Akta No. 62 tanggal 20 Mei 1976 Deed No. 62 dated May 20, 1976	Soeleman Ardjasasmita, S.H	Menteri Kehakiman No. Y.A.5/317/21 tanggal 3 Juni 1976 Ministry of Justice No. Y.A.5/317/21 dated June 3, 1976

Keterangan Description	Tahun Year	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp million)	Akumulasi (Rp-juta) Accumulation (Rp million)	Akta Notaris Notarial Deed	Nama Notaris Notary's Name	Pengesahan Endorsement
Penambahan Additional	1981	108.000	145.000	Akta No. 7 tanggal 5 Oktober 1981 Deed No. 7 dated October 5, 1981	Soeleman Ardjasasmita, S.H	Menteri Kehakiman No. C2206-HT01-04. Tahun 1983 tanggal 12 Januari 1983 Ministry of Justice No. C2206-HT01-04. of 1983 dated January 12, 1983
Penambahan Additional	1984	55.000	200.000	Akta No. 19 tanggal 20 Juli 1984 Deed No. 19 dated July 20, 1984	Soeleman Ardjasasmita, S.H	Menteri Kehakiman No. C2546-HT01-04. Tahun 1985 tanggal 2 Februari 1985 Ministry of Justice No. C2546-HT01-04. of 1985 dated February 2, 1985
Penambahan Additional	1989	870.710	1.070.710	Akta No. 4 tanggal 4 September 1989 Deed No. 4 dated September 4, 1989	Soeleman Ardjasasmita, S.H	Menteri Kehakiman No. C2778-HT01-04. Tahun 1990 tanggal 16 Februari 1990 Ministry of Justice No. C2778-HT01-04. of 1990 dated February 16, 1990
Penambahan Additional	1997	1.829.290	2.900.000	Akta No. 14 tanggal 12 September 1997 Deed No. 14 dated September 12, 1997	Imas Fatimah, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2-10.682-HT01-04.Th.97 tanggal 14 Oktober 1997 Ministry of Justice No. C2-10.682-HT01-04.Th.97 dated October 14, 1997
Penambahan Additional	2002	6.000	2.906.000	Akta No. 13 tanggal 5 Februari 2002 Deed No. 13 dated February 5, 2002	Imas Fatimah, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2-05201-HT01-04.Th.2002 tanggal 28 Maret 2002 Ministry of Justice No. C2-05201-HT01-04. Th.2002 dated March 28, 2002
Penambahan Additional	2005	957.948	3.863.948	Akta No. 20 tanggal 12 September 2005 Deed No. 20 dated September 12, 2005	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Kehakiman No. C229535-HT01-04.Th.2005 tanggal 25 Oktober 2005 Ministry of Justice No. C229535-HT01-04. Th.2005 dated October 25, 2005
Penambahan Additional	2008	390.000	4.253.948	Akta No. 6 tanggal 4 Februari 2008 Deed No. 6 dated February 4, 2008	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.3906 tanggal 19 Februari 2008 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.3906 dated February 19, 2008
Penambahan Additional	2008	35.058	4.289.006	Akta No. 15 tanggal 11 Desember 2008 Deed No. 15 dated December 11, 2008	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.5826 tanggal 13 Mei 2009 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.5826 dated May 13, 2009
Penambahan Additional	2011	6.321.000	10.610.006	Akta No. 7 tanggal 7 Januari 2011 Deed No. 7 dated January 7, 2011	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHU. AH.01.10.02656 tanggal 18 Januari 2011 Ministry of Law & Human Rights No. AHU. AH.01.10.02656 dated January 18, 2011
Penambahan Additional	2012	1.338.048	11.948.054	Akta No. 11 tanggal 19 Januari 2012 Deed No. 11 dated January 19, 2012	Lumassia, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.08848 tanggal 13 Maret 2012 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.08848 dated March 13, 2012
Penambahan Additional	2013	951.854	12.899.908	Akta No. 14 tanggal 26 April 2013 Deed No. 14 dated April 26, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.17728 tanggal 7 Mei 2013 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.17728 dated May 7, 2013
Penambahan Additional	2018	12.100.092	25.000.000	Akta No. 3 tanggal 24 Oktober 2018 Deed No. 3 dated October 24, 2018	Lumassia, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.24295 tanggal 6 November 2018 Ministry of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.24295 dated November 6, 2018

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology Of Other Securities Issuance and/or Listing

Per 31 Desember 2025, PTPI memiliki 3 (tiga) seri obligasi yang masih *outstanding* dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Adapun tabel berikut menyajikan kronologi seluruh penerbitan obligasi PTPI, termasuk obligasi yang telah jatuh tempo dan dilunasi.

As of December 31, 2025, PTPI had 3 (three) outstanding bond series listed on the Indonesia Stock Exchange. The following table presents the chronology of all bond issuances by the Company, including bonds that have matured and been fully paid.

No	Obligasi Bond	Tanggal Terbit Date of Issue	Tanggal Jatuh Due Date	Pokok Obligasi Bond Principal (Rp)	Kode Obligasi Bond Code	Suku Bunga Interest	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status
1	Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 – Seri A Pupuk Indonesia Bond I 2014 – Series A	8 Juli 2014 July 8, 2014	8 Juli 2017 July 8, 2017	568.000.000.000	PIHC01A	9,62%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Lunas Paid
2	Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 – Seri B Pupuk Indonesia Bond I 2014 – Series B	8 Juli 2014 July 8, 2014	8 Juli 2019 July 8, 2019	1.131.000.000.000	PIHC01B	9,95%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Lunas Paid
3	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri A Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase I 2017 Series A	12 Juli 2017 July 12, 2017	12 Juli 2020 July 12, 2020	1.484.500.000.000	PIHC01ACN1	7,90%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Lunas Paid
4	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase I 2017 Series B	12 Juli 2017 July 12, 2017	12 Juli 2024 July 12, 2024	2.085.000.000.000	PIHC01BCN1	8,60%	idAAA dari Pefindo idAAA from Pefindo	Lunas Paid
5	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase II 2017 Series A	9 November 2017 November 9, 2017	9 November 2020 November 9, 2020	2.601.500.000.000	PIHC01ACN2	7,50%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Lunas Paid
6	Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase II 2017 Series B	9 November 2017 November 9, 2017	9 November 2022 November 9, 2022	1.774.000.000.000	PIHC01BCN2	7,90%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Lunas Paid
7	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri A Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series A	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2023 September 3, 2023	1.146.825.000.000	PIHC02ACN1	7,00%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Lunas Paid
8	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series B	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2025 September 3, 2025	857.835.000.000	PIHC02BCN1	7,70%	idAAA dari Pefindo idAAA from Pefindo	Lunas Paid
9	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series C	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2027 September 3, 2027	431.850.000.000	PIHC02CCN1	8,30%	idAAA dari Pefindo idAAA from Pefindo	Aktif Active

No	Obligasi Bond	Tanggal Terbit Date of Issue	Tanggal Jatuh Due Date	Pokok Obligasi Bond Principal (Rp)	Kode Obligasi Bond Code	Suku Bunga Interest	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status
10	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series A	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2024 March 10, 2024	350.000.000.000	PIHC02ACN2	5,60%	idAAA dari Pefindo idAAA from Pefindo	Lunas Paid
11	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series B	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2026 March 10, 2026	1.600.000.000.000	PIHC02BCN2	6,20%	idAAA dari Pefindo idAAA from Pefindo	Aktif Active
12	Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series C	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2028 March 10, 2028	800.000.000.000	PIHC02CCN2	7,20%	idAAA dari Pefindo idAAA from Pefindo	Aktif Active
Jumlah Penerbitan Obligasi *All Time* Total All Time Bond Issuances				**14.830.510.000.000**				
Jumlah Obligasi per 31 Desember 2025 Total Bonds Payable as of December 31, 2025				**2.831.850.000.000**				

10 Pemegang Obligasi Terbesar
10 Largest Bondholders

No.	Nama Pemegang Obligasi (Investor) Name of Bondholder (Investor)	Kategori Investor Investor Category	Total Kepemilikan Obligasi Total Bond Ownership (Rp)
1	PT Bank Mandiri	Bank Domestik Domestic Bank	**389.000.000.000**
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)-Divisi Treasury	Bank Domestik Domestic Bank	**290.000.000.000**
3	Treasury Bank Jatim	Bank Domestik Domestic Bank	**207.000.000.000**
4	DP Bank Indonesia	Dana Pensiun Pension Fund	**205.000.000.000**
5	PT Bank KEB Hana Indonesia-Treasury	Bank Domestik Domestic Bank	**200.000.000.000**
6	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia	Yayasan NPWP NPWP Foundation	**150.000.000.000**
7	Dana Pensiun Bank Mandiri	Dana Pensiun Pension Fund	**122.000.000.000**
8	Dana Pensiun BRI	Dana Pensiun Pension Fund	**102.000.000.000**
9	Aset BP Tapera S/A Modal Awal Operasional	Dana Pensiun Pension Fund	**75.000.000.000**
10	BPJS Kesehatan (dh PT ASKES)	Insurance NPWP NPWP Insurance	**75.000.000.000**

Status Investor Pemegang Obligasi
Bondholder Investor Status

Status Investor Investor Status	Jumlah (Rp) Amount (Rp)
Bank Domestik Domestic Bank	**1.341.000.000.000**
Dana Pensiun Pension Fund	**694.500.000.000**

Status Investor Pemegang Obligasi
Bondholder Investor Status

Status Investor Investor Status	Jumlah (Rp) Amount (Rp)
Insurance NPWP NPWP Insurance	205.300.000.000
Yayasan NPWP NPWP Foundation	168.000.000.000
Mutual Funds	290.200.000.000
Pemerintah Indonesia Government of Indonesia	0
Koperasi Cooperative	75.000.000.000
Jamsostek JHT Jamsostek JHT	25.000.000.000
Individual Domestik Domestic Individual	11.850.000.000
Perusahaan Terbatas NPWP Limited Liability Company NPWP	21.000.000.000
Jumlah Utang Obligasi per 31 Desember 2025 Total Bonds Outstanding as of December 31, 2025	2.831.850.000.000

Realisasi Penggunaan Dana
Implementation of Fund Use

Subjek Subject	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri C Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series C	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri B Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series B	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri C Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series C
Penggunaan Dana Use of Funds	31% *Refinancing* Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Iskandar Muda 31% Refinancing of PT Pupuk Iskandar Muda's Working Capital Loan	94% *Refinancing* atas Kredit Investasi Perbankan Amurea II PT Petrokimia Gresik 94% Refinancing of PT Petrokimia Gresik's Amurea II Bank Investment Loan	88% *Refinancing* atas Kredit Investasi Perbankan Amurea II PT Petrokimia Gresik 88% Refinancing of Amurea II Bank Investment Loans for PT Petrokimia Gresik
	69% *Refinancing* Obligasi untuk Modal Kerja PT Rekayasa Industri 69% Refinancing of PT Rekayasa Industri's Working Capital Bonds	6% *Refinancing* Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik 6% Refinancing of PT Pupuk Indonesia Logistik's Bank Working Capital Loan	12% *Refinancing* Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik 12% Refinancing of PT Pupuk Indonesia Logistik Bank Working Capital Loans

Perkembangan Pemeringkat Efek

Berdasarkan peringkat utang yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia pada tahun 2025, seluruh surat utang Perusahaan mendapatkan rating idAAA, hal ini mencerminkan kemampuan superior dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya dibandingkan emiten Indonesia lainnya.

Securities Rating Developments

Based on the debt ratings issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia in 2025, all of the Company's debt securities were assigned an idAAA rating, reflecting a superior ability to meet long-term financial obligations compared to other Indonesian issuers.

Status Investor Investor Status	**2025**	**2024**	**Perubahan** Change
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN1) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds I Phase I 2017 Series B (PIHC01BCN1)	-	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Telah lunas pada tahun 2024 Paid off in 2024
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B (PIHC02BCN1) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series B (PIHC02BCN1)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C (PIHC02CCN1) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series C (PIHC02CCN1)	Pefindo : idAAA (Outlook: Stable)	Pefindo : idAAA (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A (PIHC02ACN2) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series A (PIHC02ACN2)	-	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Telah lunas pada tahun 2024 Paid off in 2024
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B (PIHC02BCN2) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series B (PIHC02BCN2)	Pefindo : idAAA (Outlook: Stable)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C (PIHC02CCN2) Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series C (PIHC02CCN2)	Pefindo : idAAA (Outlook: Stable)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	-

Peringkat nasional idAAA menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang yang dinilai memiliki kemampuan superior dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya dibandingkan emiten Indonesia lainnya.

The idAAA national rating represents the highest rating assigned by PT Pemeringkat Efek Indonesia on the national rating scale for Indonesia. This rating is awarded to issuers or debt securities deemed to have superior capacity to meet their long-term financial obligations compared to other Indonesian issuers.

Pembayaran Obligasi (Pokok)
Bond Principal Payments

Perihal Subject	**Kewajiban 2025** 2025 Obligation **(Rp-Juta)** (Rp Million)	**Kewajiban 2026** 2026 Obligation **(Rp-Juta)** (Rp Million)
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series B	857.835	Lunas Paid
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series B	Belum Jatuh Tempo Not Yet Due	1.600.000

Pada tahun 2025 PTPI melunasi Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2020 pada 3 September 2025 senilai Rp857.835 juta. Di tahun 2026, terdapat rencana pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B Tahun 2021 pada 10 Maret 2026 senilai Rp1.600.000 juta.

In 2025, PTPI will repay the principal of its 2020 Shelf Registration Bonds II Phase I Series B on September 3, 2025, amounting to Rp857,835 million. In 2026, it plans to repay the principal of its 2021 Shelf Registration Bonds II Phase II Series B on March 10, 2026, amounting to Rp1,600,000 million.

Pembayaran Obligasi (Bunga)
Bond Interest Payments

Perihal Subject	**Kewajiban 2025** 2025 Obligation **(Rp-Juta)** (Rp Million)	**Kewajiban 2026** 2026 Obligation **(Rp-Juta)** (Rp Million)
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series B	49.539	Lunas Paid
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series C	35.843	35.843
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series B	99.200	24.800
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C Pupuk Indonesia Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series C	57.600	57.600

Tidak ada pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B Tahun 2020 di tahun 2026, hal ini dikarenakan Obligasi tersebut telah lunas pada 3 September 2025. Pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B Tahun 2021, terdapat perbedaaan pembayaran bunga Obligasi dikarenakan akan lunas pada 10 Maret 2026.

There will be no interest payments for the 2020 Shelf Registration Bonds II Phase I Series B in 2026, as the bond was fully repaid on September 3, 2025. There will be a difference in interest payments for the 2021 Shelf Registration Bonds II Phase II Series B, as due to be fully repaid on March 10, 2026.

Kantor Akuntan Publik (KAP)

Public Accounting Firm (KAP)

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	**Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (KAP)**
Jaringan/Asosiasi/Aliansi Network/Association/Alliance	**PwC**
Alamat Address	**WTC 3, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta**
Akuntan Accounting	**Heryanto**
Tahun Audit Audit Year	**Tahun Buku 2025** Fiscal Year 2025
Periode Penugasan Assignment Period	**17 November 2025 s.d. 31 Mei 2026** November 17, 2025 – May 31, 2026

Jasa Audit dan *Fee* Masing-Masing Penugasan

Audit Services and Fees for Each Assignment

No.	Jasa Audit yang Diberikan Audit Services Provided	Fee Audit Audit Fee
1	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the year ended December 31, 2025	Rp16.335.000.000
2	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Konsolidasi) Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the Year Ended December 31, 2025 (Consolidated)	Rp100.000.000
3	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program for the Year Ended December 31, 2025	Rp910.000.000
4	Laporan Auditor Independen atas Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Independent Auditor's Report on the Audit of Compliance regarding Laws and Regulations and Internal Control for the Year Ending December 31, 2025	Rp625.000.000
	Total Fee Audit Total Audit Fees	**Rp 17.970.000.000 (di luar PPN) dan Out of Pocket Expenses (OPE)** Rp 17,970,000,000 (excluding VAT) and Out-of-Pocket Expenses (OPE)

Jasa Non Audit dan *Fee* Masing-Masing Penugasan

Non-Audit Services and Fees for Each Engagement

No.	Jasa Non Audit yang Diberikan Non-Audit Services Provided	Fee Audit Audit Fee
1	Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Penilaian Tingkat Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Direksi Kolegial dan Individu Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Independent Accountant's Report on the Agreed-Upon Procedures for Assessing the Board of Directors and Individual Directors Achievement Level of Key Performance Indicators (KPIs) for the Year Ending December 31, 2025	Rp 800.000.000
2	Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Tindak Lanjut atas Keputusan dan Arahan RUPS RKAP Tahun Buku 2025 Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures for Follow-Up on the GMS Resolutions and Directives for the Company's Work Plan and Budget for the 2025 Fiscal Year	Rp 250.000.000
3	Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Tindak Lanjut atas tanggapan dan saran Dewan Komisaris PTPI atas Kinerja Perusahaan Tahun 2025 Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures for Follow-Up on the PTPI's Board of Commissioners Responses and Recommendations regarding the Company's Performance in 2025	Rp 100.000.000
4	Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati sesuai dengan format yang disampaikan oleh Kementerian BUMN perihal Penyampaian Format Laporan AUP Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures in accordance with the format provided by the Ministry of BUMN regarding Submission of AUP Report Formats	Rp 400.000.000
5	Hasil pelaksanaan jasa terkait lingkup jasa yang dituangkan dalam Instruksi Audit dari BPK (SA 600) Results of service implementation related to the scope of services outlined in the Audit Instructions from the Supreme Audit Agency (SA 600).	Rp 350.000.000
6	Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait laporan Komposit Risiko untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures for the Composite Risk Report for the Year Ended December 31, 2025	Rp 455.000.000
7	Hasil pelaksanaan jasa terkait lingkup pekerjaan yang dituangkan dalam Grup Audit Instruction dari auditor pemegang saham (PT DAM) Results of service implementation related to the scope of work outlined in the Group Audit Instructions from the shareholder auditor (PT DAM)	Rp 350.000.000
	Total Fee Non Audit Total Audit Fees	**Rp 2.705.000.000 (Di luar PPN) dan Out of Pocket Expenses (OPE)** Rp 2,705.000,000 (excluding VAT) and Out-of-Pocket Expenses (OPE)

Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professionals

Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Biaya (%) Cost (%)	Penugasan Assignment
Bank Mega	Menara Bank Mega, Lt. 16 Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12970 Indonesia Tel.: +62 21 7917 5000 Fax.: +62 21 799 0720 waliamanat@bankmega.com www.bankmega.com	Wali Amanat Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Trustee for Issuance of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,003	2021 – 2028
Mandiri Sekuritas	Plaza Mandiri, Lt. 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36–38 Jakarta 12190 Indonesia Tel.: +62 21 526 3445 Fax.: +62 21 526 3507 corsec@mandirisek.co.id MS_Prambanan@mandirisek.co.id www.mandirisekuritas.co.id	Underwriter Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,03	2021
Danareksa Sekuritas	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Indonesia Tel.: +62 21 2955 5777/888 Fax.: +62 21 350 1724/25 cs@danareksa.co.id callcenter@danareksa.co.id www.danareksasekuritas.co.id	Underwriter Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,03	2021
BCA Sekuritas	Menara BCA-Grand Indonesia, Lt.41 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia Tel.: +62 21 2358 7222 Fax.: +62 21 2358 7290/7250/7300 halo@bcasekuritas.co.id cf@bcasekuritas.co.id www.bcasekuritas.co.id	Underwriter Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,03	2021
BNI Sekuritas	Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78 Jakarta 12910 Indonesia Tel.: +62 21 2554 3946 Fax.: +62 21 5793 6934 customercare@ bnisekuritas.co.id www.bnisekuritas.co.id	Underwriter Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,03	2021
KAP Maksum, Suyamto, dan Hirdjan	Jl. Kaji No. 2B-5 Petojo Utara Jakarta 10130 Indonesia Tel.: +62 21 632 6436; 6385 2854 Fax: +62 21 632 6371 kap_hms@yahoo.com	Audit Penjatahan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Audit of the Allotment of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,002	2021
Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office	South Tower, Lt. 24 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Sampoerna Strategic Square, Jakarta 12930 Indonesia Tel.: +62 21 577 0108 mmik_mmco@mmiklaw.co.id www.mmiklaw.co.id	Konsultan Hukum Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Legal Consultant for Issuance of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,015	2021
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito	Jl. Panglima Polim V No. 11 RT 1/RW 6 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia Tel.: +62 21 724 4650; 739 2801; 720 9542 Fax.: +62 21 726 5090 poerbaningsih@yahoo.com	Notaris Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Notary for Issuance of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021	0,002	2021
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Equity Tower 30th Floor Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel.: +62 21 509 684 69 Fax.: +62 21 509 648 68 www.pefindo.com	Lembaga Pemeringkat Penerbitan Obligasi Rating Agency for Issuance of Shelf Registration Bonds	0,0024	2024 - 2026

Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Biaya (%) Cost (%)	Penugasan Assignment
Kustodian Sentral Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53 Jakarta 12190 Indonesia Tel.: +62 21 515 2855 Fax.: +62 21 5299 1199 Bebas Pulsa +62 800 186 5734 helpdesk@ksei.co.id www.ksei.co.id	Kustodian Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Bentuk Jasa: Pencatatan Obligasi Custodian for Issuance of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Service Type: Bond Registration	0,00003	2021
Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53 Jakarta 12190 Indonesia Tel.: +62 21 515 2855 Fax.: +62 21 52991199 Bebas Pulsa +62 800 186 5734	Pencatatan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Bentuk Jasa: Pencatatan Obligasi Listing of Issuance of Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Service Type: Bond Registration	0,0057	2021

Informasi Pada Situs Web Perusahaan
Information on The Company Website

PTPI memiliki situs web resmi, yaitu www.pupuk-indonesia.com. Situs web ini menjadi salah satu sarana Perusahaan dalam memenuhi keterbukaan informasi terhadap publik dengan menyajikan informasi secara informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang Perusahaan sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik. Oleh karenanya, situs web Perusahaan dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja oleh khalayak luas. Situs web resmi Perusahaan yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2015, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

PTPI has an official website, www.pupuk-indonesia.com. This website serves as one of the Company's channels for fulfilling public information disclosure obligations by presenting comprehensive, accurate, and current information about the Company in accordance with the principles of transparency and public information disclosure. Therefore, the Company's website can be accessed openly, anytime and anywhere, by the general public. The Company's official website is available in two languages, Indonesian and English, and complies with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies, which was issued on June 25, 2015, including:

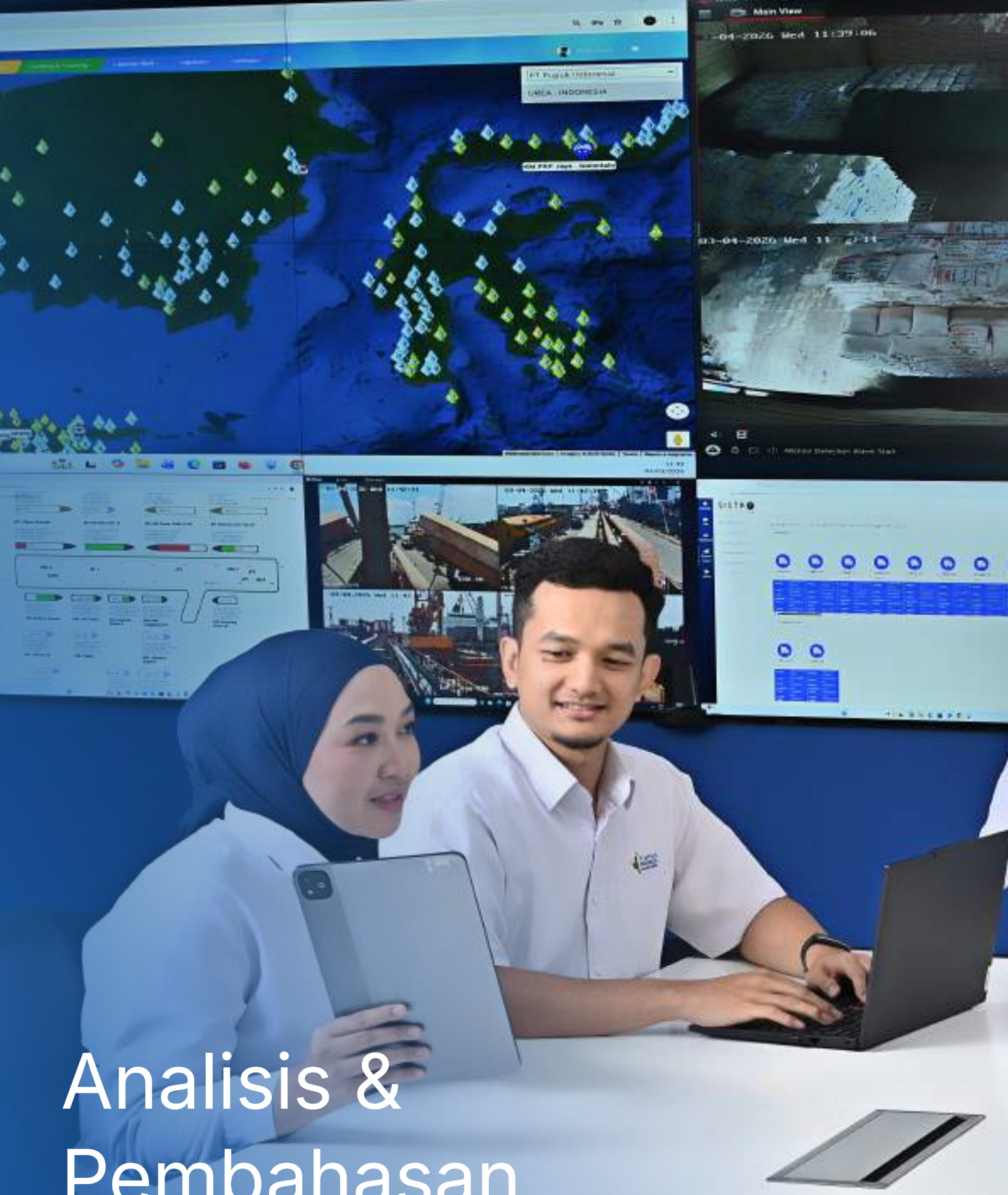
1. General Information of Issuer or Public Company;
2. Information for Investors;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information.

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Link
Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik General Information of Issuer or Public Company	✔	https://www.pupuk-indonesia.com/
Riwayat Singkat Emiten atau Perusahaan Publik Brief History of the Issuer or Public Company	✔	https://www.pupuk-indonesia.com/investor
Struktur Organisasi Emiten atau Perusahaan Publik Organizational Structure of the Issuer or Public Company	✔	https://www.pupuk-indonesia.com/profile/our-leadership
Struktur Kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik Ownership Structure of the Issuer or Public Company	✔	https://www.pupuk-indonesia.com/investor
Struktur Grup Emiten atau Perusahaan Publik Group Structure of the Issuer or Public Company	✔	https://www.pupuk-indonesia.com/investor
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Sekretaris Perusahaan Profiles of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees, Corporate Secretary	✔	https://www.pupuk-indonesia.com/profile/our-leadership
Lembaga Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions	✔	https://www.pupuk-indonesia.com/investor

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Link
Dokumen Anggaran Dasar Articles of Association	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/keterbukaan
Informasi bagi Pemodal atau Investor information for the Capital Owners or Investors	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/keuangan_kinerja
Prospektus Penawaran Umum Public Offering Prospectus	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/storage/656/6375a3a2e8cc6_62d14cf3dbfb8_Pupuk-Indonesia-Prospektus.pdf
Laporan Tahunan untuk Periode 5 (lima) Tahun Buku Terakhir Annual Reports for the Last 5 (five) Fiscal Years	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/annual-report
Laporan Keuangan Tahunan (3 tahun terakhir) Annual Financial Statement (for the Last 3 years)	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/keuangan_kinerja
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting, yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), including at least the material of the agenda discussed in the GMS, summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, date of the invitation to the GMS, date of the GMS, date of the summary of the minutes of the GMS summary of the minutes of the GMS announced	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/investor/keterbukaan
Informasi Obligasi Bond Information	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/investor
Informasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Information	✓	https://gcg.pupuk-indonesia.com/
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	✓	https://gcg.pupuk-indonesia.com/
Isi Kode Etik Content of Code of Conduct	✓	https://gcg.pupuk-indonesia.com/
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Social and Environmental Responsibility	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/sustainability/regulation-tjsl

Semua informasi yang disajikan dalam situs web PTPI senantiasa diperbarui secara berkala untuk memberikan informasi terkini bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Perusahaan juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Facebook, X, Instagram, Youtube, dan TikTok.

All information presented on PTPI's website is regularly updated to provide the most current information to all stakeholders and the general public. The Company also maintains social media accounts as part of its information transparency and communication with all stakeholders, including Facebook, X (formerly Twitter), Instagram, YouTube, and TikTok.



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis



04

Tinjauan Umum Perekonomian dan Industri

General Overview of Economic and Industry



Tahun 2025 menandai fase konsolidasi perekonomian global setelah periode panjang disrupsi akibat pandemi, krisis energi, dan pengetatan kebijakan moneter global. Aktivitas ekonomi dunia tetap tumbuh, namun dengan laju yang lebih moderat dan tingkat ketidakpastian yang masih tinggi, terutama dipengaruhi oleh fragmentasi perdagangan internasional, konflik geopolitik, dan penyesuaian struktur rantai pasok global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui laporan *World Economic Situation and Prospects* 2026 mencatat bahwa perekonomian global tumbuh sebesar 2,8 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh negara berkembang, sementara negara maju menghadapi perlambatan akibat tingginya biaya tenaga kerja, tekanan produktivitas, dan terbatasnya ruang kebijakan fiskal.

Sepanjang tahun 2025, tekanan inflasi global menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Normalisasi rantai pasok dan stabilisasi harga energi menjadi faktor utama meredanya tekanan inflasi, meskipun inflasi inti di sejumlah negara masih berada di atas sasaran bank sentral sehingga kebijakan moneter global tetap dijalankan secara hati-hati.

2025 marked a phase of global economic consolidation after a prolonged period of disruption caused by the pandemic, the energy crisis, and tightening of global monetary policies. Global economic activities continued to grow, but at a more moderate pace and with a high level of uncertainty, primarily influenced by the fragmentation of international trade, geopolitical conflicts, and adjustments to the structure of global supply chains.

The United Nations, in its World Economic Situation and Prospects 2026 report, stated that the global economy would grow by 2.8 percent in 2025. This growth would be driven primarily by developing countries, while developed countries faced a slowdown due to high labor costs, productivity pressures, and limited fiscal policy space.

Throughout 2025, global inflationary pressures showed a downward trend compared to the previous year, with supply chain normalization and energy price stabilization being the main factors for easing inflationary pressures, although core inflation in several countries remained above central bank targets, requiring prudent global monetary policy implementation.

Dari sisi komoditas energi, *World Bank Commodities Price Data* atau *The Pink Sheet* edisi Februari 2026 mencatat bahwa harga minyak mentah dunia rata-rata sepanjang 2025 berada pada level USD67,4 Dolar Amerika Serikat per barel, dengan kecenderungan melemah pada paruh kedua tahun seiring melambatnya permintaan global. Harga gas alam Eropa yang tercermin pada indeks *Title Transfer Facility* juga mengalami penurunan sepanjang 2025. Harga gas alam Eropa tercatat rata-rata USD11,96 per juta BTU, dan turun menjadi USD10,26 per juta BTU pada triwulan IV 2025, mencerminkan meredanya tekanan biaya energi global meskipun volatilitas tetap terjadi.

In terms of energy commodities, the February 2026 edition of the World Bank Commodities Price Data, or The Pink Sheet, stated that the average global crude oil price throughout 2025 would be USD67.4 per barrel, with a trend towards weakening in the second half of the year due to slowing global demand. European natural gas prices, as shown in the Title Transfer Facility index, also declined throughout 2025. European natural gas prices averaged USD11.96 per million BTU, dropping to USD10.26 per million BTU in the Q4 2025, reflecting easing global energy cost pressures, although volatility persists.

Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia berada pada level 5,11% secara tahunan (sumber: BPS), dengan kontribusi utama berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi di sektor industri pengolahan serta pertanian.

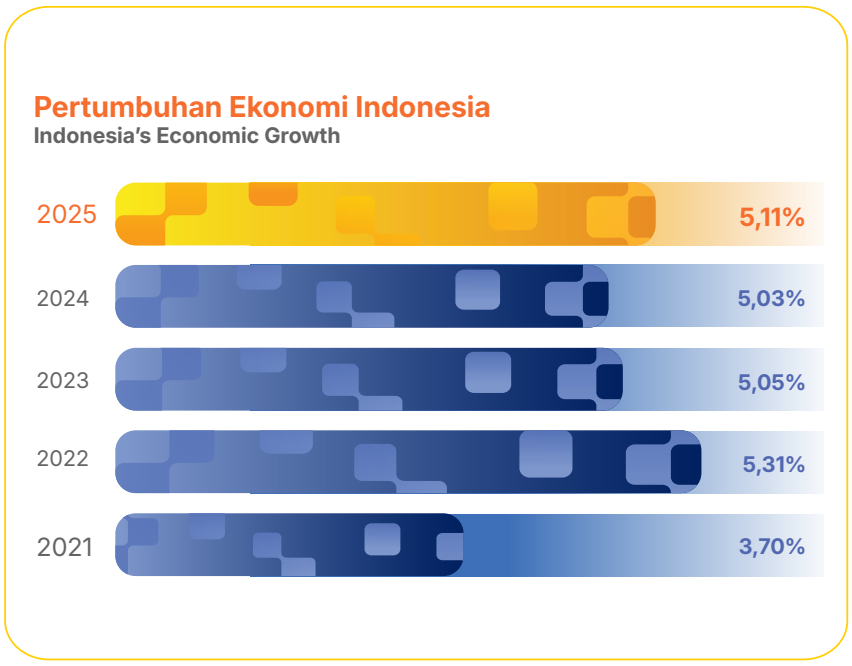
Despite these global dynamics, the Indonesian economy showed relatively strong resilience in 2025, with the Central Statistics Agency (BPS) recording Indonesia's Gross Domestic Product growth at 5.11% annually, with the main contributions coming from household consumption, government spending, and investment in the manufacturing and agricultural sectors.

Stabilitas harga tetap terjaga sepanjang 2025. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen pada Desember 2025 sebesar 2,92% secara tahunan, mencerminkan efektivitas pengendalian inflasi dan terjaganya daya beli masyarakat. Sementara Bank Indonesia sepanjang 2025 menjalankan kebijakan moneter yang pruden untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar Rupiah. Pengelolaan likuiditas dan penguatan cadangan devisa dilakukan untuk meredam dampak volatilitas pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik.

Price stability remained steady throughout 2025, with the Central Statistics Agency (BPS) recording annual Consumer Price Index inflation of 2.92% in December 2025, reflecting effective inflation control and maintained public purchasing power. While, Bank Indonesia instigated prudent monetary policies throughout 2025 to maintain macroeconomic stability and the Rupiah exchange rate. Liquidity management and strengthening of foreign exchange reserves helped mitigate the impact of global financial market volatility on the domestic economy.

Sektor pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai penopang ketahanan pangan dan stabilitas sosial. Keberlanjutan sektor ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan input produksi, khususnya pupuk, yang menjadikan industri pupuk sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional.

The agricultural sector continued to play a strategic role in the national economy as a pillar of food security and social stability. The sustainability of this sector is strongly influenced by the availability and affordability of production inputs, particularly fertilizer, making the fertilizer industry an integral part of the national economic system.



Sumber: Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Source: Economic Growth Based on Gross Domestic Product (GDP) from the Central Bureau of Statistics (BPS)

Industri pupuk global pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan aktivitas seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan dunia. *International Fertilizer Association* mencatat bahwa konsumsi pupuk global kembali meningkat setelah penyesuaian yang terjadi pada periode sebelumnya. Meskipun harga energi cenderung menurun, harga pupuk global tetap berfluktuasi. Berdasarkan *World Bank Pink Sheet* edisi Februari 2026, harga urea acuan *Eastern Europe* rata-rata sepanjang 2025 tercatat sebesar USD422,7 per metrik ton, dengan kenaikan signifikan pada triwulan III 2025 sebelum kembali menurun pada akhir tahun. Fluktuasi harga pupuk tersebut mencerminkan pengaruh faktor non energi seperti konsentrasi pasokan global, kebijakan ekspor negara produsen, gangguan logistik internasional, serta pola permintaan musiman yang masih kuat.

Pada tingkat nasional, industri pupuk Indonesia berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 sebesar 9,55 juta ton untuk menjamin keterjangkauan pupuk bagi petani dan menjaga produktivitas pertanian nasional.

Permintaan pupuk domestik pada tahun 2025 tetap tinggi sejalan dengan luas tanam dan program intensifikasi pertanian. Tantangan utama industri terletak pada menjaga keandalan pasokan dan efisiensi distribusi di tengah volatilitas harga bahan baku global. Pada tahun 2025, penyaluran pupuk *Public Service Obligation* (PSO) mengalami kenaikan 10,68% dibandingkan penyaluran PSO tahun 2024. Industri pupuk nasional juga berada dalam fase transformasi menuju praktik yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui optimalisasi aset, efisiensi energi, dan penguatan tata kelola distribusi.

The global fertilizer industry in 2025 was expected to show increased activity in line with rising global food demand, and the International Fertilizer Association noted that global fertilizer consumption had rebounded following adjustments made in the previous period. Despite a downward trend in energy prices, global fertilizer prices remained volatile. According to the February 2026 edition of the World Bank Pink Sheet, the average benchmark urea price in Eastern Europe throughout 2025 was USD422.7 per metric ton, with a significant increase in the QIII 2025 before declining again at the end of the year. These fertilizer price fluctuations reflected the influence of non-energy factors such as global supply concentration, export policies of producing countries, disruptions in international logistics, and persistently strong seasonal demand patterns.

At the national level, the Indonesian fertilizer industry plays a strategic role in supporting food security, and the government allocated 9.55 million tons of subsidized fertilizer in 2025 to ensure affordability for farmers and maintain national agricultural productivity.

Domestic fertilizer demand in 2025 remainded high in line with planted areas and agricultural intensification programs. The industry's primary challenges lay in maintaining supply reliability and distribution efficiency despite global raw material price volatility. In 2025, Public Service Obligation (PSO) fertilizer distribution increased by 10.68% compared to 2024. The national fertilizer industry was also undergoing a transformation phase towards more efficient and sustainable practices through asset optimization, energy efficiency, and strengthening distribution governance.

Kebijakan Strategis dan Tantangan Tahun 2025

Strategic Policies and Challenges for 2025

Inisiatif Strategis Tahun 2025

Pada tahun 2025, Perusahaan memfokuskan penguatan peran sebagai *strategic enabler* ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan profitabilitas berkelanjutan melalui optimalisasi portofolio pupuk dan non-pupuk, efisiensi biaya produksi, serta transformasi menuju industri kimia dan nutrisi tanaman yang berkelanjutan.

Beberapa inisiatif strategis yang dijalankan pada tahun 2025, antara lain meningkatkan efisiensi konsumsi bahan baku gas lewat program *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT untuk menurunkan konsumsi gas minimum sebesar 4 MMBTU/ton Amonia dan menekan emisi CO_2, kemudian penggantian Pusri-III dan IV lewat pembangunan pabrik baru Pusri-IIIB yang dapat menekan konsumsi gas dari 34 MMBTu/ton urea menjadi 24 MMBTU/ton urea. Perusahaan juga meningkatkan kapasitas produksi NPK melalui pembangunan pabrik NPK Nitrat PKC maupun diversifikasi produk melalui pembangunan pabrik Soda Ash PKT sebagai hilirisasi produk Amonia. Guna meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka menunjang ketahanan pangan di Indonesia Timur, Perusahaan juga tengah mengembangkan proyek Pabrik Urea dan Amonia di Papua Barat.

Fokus dan Strategi Tahun 2025

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pupuk, PTPI terus mengembangkan dan memperkuat segmen pupuk dan Amonia sebagai bisnis inti. Pada tahun 2025, fokus dan strategi yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang, dan mendukung sektor pertanian nasional dalam menghadapi tantangan dan peluang baru. Fokus dan strategi Perusahaan di tahun 2025 dijalankan melalui beberapa fokus utama antara lain:

1. Penguatan *Operational Excellence dan Cost Leadership*
2. Transformasi Komersial dan *Market Driven Strategy*
3. Transformasi Tata Kelola Program Subsidi Pupuk Pemerintah
4. Fondasi Transisi Energi dan Keberlanjutan

Rincian Tantangan yang Terjadi di Sepanjang Tahun 2025 dan Solusinya

Tahun 2025 menjadi periode krusial bagi Perusahaan dalam menjaga peran sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Perusahaan beroperasi di tengah kombinasi tekanan struktural yang berasal dari keterbatasan pasokan energi, dinamika kebijakan pupuk bersubsidi, serta kompleksitas pengelolaan aset dan proyek pengembangan. Tantangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan memerlukan respons strategis yang terintegrasi agar keberlanjutan pasokan pupuk nasional tetap terjaga.

Pada tahun 2025, Perusahaan secara aktif mendorong transformasi struktural tata kelola pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan industri pupuk nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya keluhan petani terkait ketersediaan pupuk bersubsidi. Keluhan tersebut disebabkan oleh tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi yang panjang dan kompleks, yang

Strategic Initiatives for 2025

In 2025, the Company focused on strengthening its role as a strategic enabler of national food security while simultaneously increasing sustainable profitability through optimizing its fertilizer and non-fertilizer portfolios, efficiencies in production costs, and transforming into a sustainable chemical and plant nutrition industry.

Several strategic initiatives implemented in 2025 include increasing the efficiency of gas raw material consumption through the Revamping of Ammonia PKT Plant-2 program to reduce gas consumption by at least 4 MMBTU/ton of ammonia and reduce CO2 emissions, and the replacement of Pusri-III and IV plants through the construction of the new Pusri-IIIB plant, to reduce gas consumption from 34 MMBTu/ton of urea to 24 MMBTU/ton of urea. The Company also increased NPK production capacity through the construction of the PKC NPK Nitrate plant and diversify its products through the construction of the PKT Soda Ash plant as a downstream amonia product. To increase production capacity to support food security in Eastern Indonesia, the Company is also developing Urea and Ammonia Plant project in West Papua.

Focus and Strategy for 2025

As a company operating in the fertilizer sector, PTPI continues to develop and strengthen its core business, the fertilizer and amonia segments. In 2025, the focus and strategy implemented sought to increase efficiencies, meet evolving market needs, and support the national agricultural sector in facing new challenges and opportunities. The Company's focus and strategy for 2025 were followed through several key areas, including:

1. Strengthening Operational Excellence and Cost Leadership
2. Commercial Transformation and Market-Driven Strategy
3. Transformation of the Government's Fertilizer Subsidy Program Governance
4. Foundation for Energy Transition and Sustainability

Details of Challenges Occurring Throughout 2025 and Their Solutions

2025 was a crucial year for the Company maintaining its role as the backbone of national food security. The Company operated despite a combination of structural pressures stemming from limited energy supplies, the dynamics of subsidized fertilizer policies, and the complexity of asset management and development projects. These challenges were not isolated but interconnected and required an integrated strategic response to ensure the sustainability of the national fertilizer supply.

In 2025, the Company actively promoted the structural reform of subsidized fertilizer governance to support national food security and long-term sustainability of national fertilizer industry. This initiative was driven by continuing concerns among farmers regarding the availability of subsidized fertilizer. These concerns were largely attributable to a lengthy and complex governance framework involving multiple ministries, institutions, and

melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta Pemerintah Daerah di berbagai tingkatan. Perusahaan mengidentifikasi setidaknya terdapat 145 peraturan terkait pupuk bersubsidi dan proses penetapan alokasi yang membutuhkan persetujuan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota yang menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi dapat terhambat oleh birokrasi tersebut. Untuk itu Perusahaan mendorong penyederhanaan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dan mempertegas tanggung jawab Perusahaan dalam penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke Penerima pada Titik Serah. Sebagai hasilnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi pada 30 Januari 2025 yang pada substansinya menyederhanakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

Pada tahun 2025, Perusahaan dihadapkan pada tantangan fasilitas produksi yang semakin tua, khususnya pada fasilitas amonia dan urea. Sekitar 72% kapasitas produksi urea Perusahaan telah berumur lebih dari 20 tahun, sehingga berdampak terhadap efisiensi produksi dan meningkatkan kebutuhan investasi untuk peremajaan serta peningkatan keandalan fasilitas produksi. Namun demikian, meskipun Perusahaan memiliki posisi kas yang kuat, pelaksanaan investasi efisiensi belum dapat dilakukan secara optimal karena adanya pertimbangan terhadap mekanisme subsidi pupuk yang berlaku. Mekanisme subsidi yang berbasis Biaya Pokok Produksi ditambah marjin, atau skema Cost+, menyebabkan manfaat dari peningkatan efisiensi berpotensi menurunkan tingkat profitabilitas Perusahaan. Kondisi tersebut menciptakan tantangan struktural berupa *underinvestment*, di mana kebutuhan investasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Perusahaan secara aktif mendorong perubahan mekanisme subsidi pupuk dari pendekatan berbasis biaya menjadi berbasis harga pasar atau *marked-to-market*. Melalui pendekatan ini, investasi efisiensi diharapkan dapat memperoleh insentif yang lebih tepat, sekaligus mendukung penyediaan pupuk bersubsidi yang tetap terjangkau bagi petani. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi pada 24 Oktober 2025.

Kedua perbaikan tata kelola tersebut berdampak signifikan terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pupuk nasional. Perpres No. 6 Tahun 2025 memastikan pupuk tersedia di seluruh Indonesia dengan menyederhanakan tata kelola penyaluran hingga ke titik serah. Di sisi lain, Perpres No. 113 Tahun 2025 memungkinkan Perusahaan untuk melakukan berbagai upaya efisiensi yang tidak hanya dinikmati oleh Perusahaan, namun juga oleh Pemerintah dan petani melalui kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi sebesar 20% sejak 22 Oktober 2025. Upaya aktif Perusahaan sepanjang 2025 mampu memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk secara nasional.

Sebagai industri berbasis gas bumi, keberlanjutan pasokan gas menjadi isu strategis yang fundamental bagi Perusahaan sepanjang 2025. Risiko keterbatasan pasokan gas di wilayah Jawa dan Sumatra menjadi perhatian serius, mengingat meningkatnya kebutuhan gas lintas sektor serta keterbatasan produksi domestik di beberapa wilayah. Kondisi ini berpotensi memengaruhi reliabilitas operasi pabrik pupuk dan stabilitas biaya produksi jika tidak dikelola secara proaktif. Selain itu, harga gas yang kompetitif juga menjadi isu yang fundamental karena akan memengaruhi biaya produksi secara langsung.

Menjawab tantangan tersebut, Perusahaan menempatkan pengamanan pasokan gas sebagai prioritas strategis melalui penguatan koordinasi dengan regulator dan pemangku kepentingan sektor energi, pengelolaan kontrak pasokan, serta penjajakan berbagai

regional governments across various administrative levels. The Company identified at least 145 regulations related to subsidized fertilizers, as well as an subsidized fertilizer allocation determination process requiring approval from all Governors and Regents/Mayors, which could potentially hinder subsidized fertilizer distribution due to bureaucratic complexity. Accordingly, the Company advocated for the simplification of subsidized fertilizer distribution governance and the reinforcement of the Company's responsibilities in delivering subsidized fertilizers to eligible beneficiaries at the designated handover points. These efforts contributed to the issuance of Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers on 30 January 2025, which, in substance, streamlined the subsidized fertilizer distribution mechanism.

In 2025, the Company faced challenges arising from aging production facilities, particularly in ammonia and urea production. Approximately 72% of the Company's urea production capacity had been in operation for more than 20 years, affecting production efficiency and increasing the need for investment in plant rejuvenation and reliability improvement. However, despite the Company's strong cash position, efficiency-driven investments could not be optimally implemented due to considerations related to the prevailing fertilizer subsidy mechanism. The subsidy mechanism, which was based on the Cost of Goods Manufactured plus margin scheme, commonly referred to as the Cost+ mechanism, meant that the benefits of efficiency improvements could potentially reduce the Company's profitability. This created a structural challenge of underinvestment, where the need to invest in efficiency and competitiveness could not be fully realized. To address this challenge, the Company actively advocated for a reform of the fertilizer subsidy mechanism, shifting from a cost-based approach to a market-based, or marked-to-market, mechanism. Under this approach, efficiency-driven investments are expected to receive more appropriate incentives while supporting the continued provision of affordable subsidized fertilizers for farmers. These efforts culminated in the issuance of Presidential Regulation No. 113 of 2025 on the Amendment to Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers on October 24, 2025.

These structural reforms had a significant impact on the availability and affordability of fertilizer nationwide. Presidential Regulation No. 6 of 2025 strengthened fertilizer availability across Indonesia by simplifying distribution governance up to the designated handover points. Meanwhile, Presidential Regulation No. 113 of 2025 enabled the Company to undertake broader efficiency initiatives, the benefits of which are shared not only by the Company, but also by the Government and farmers, including through the 20% reduction in the Highest Retail Price effective from 22 October 2025. Through its active efforts throughout 2025, the Company was able to help safeguard the national fertilizer availability and affordability.

As a natural gas-based industry, sustainable gas supplies and competitive gas prices would be the Company's most fundamental strategic issues throughout 2025. The risk of limited gas supply in Java and Sumatra was a serious concern, given the increasing demand for gas across sectors and limited domestic production in some areas. This situation could potentially impact the reliability of fertilizer plant operations and the stability of production costs if not managed proactively. Competitive gas prices were also a fundamental issue as they directly impact production costs.

To address these challenges, the Company prioritized securing gas supplies (both volume and price) through strengthening coordination with regulators and energy sector stakeholders, managing supply contracts, and exploring distribution schemes to

skema distribusi untuk memastikan kontinuitas suplai bagi fasilitas produksi utama. Langkah ini menjadi fondasi agar operasional industri pupuk nasional tetap berjalan stabil di tengah dinamika pasokan energi nasional. Selain pengamanan pasokan, Perusahaan juga mendorong efisiensi konsumsi gas melalui program revitalisasi dan peremajaan aset produksi. Upaya ini diarahkan untuk menurunkan intensitas penggunaan gas per satuan produk sehingga daya saing biaya dapat tetap terjaga, sekaligus mengurangi sensitivitas operasional terhadap fluktuasi pasokan dan harga gas di masa mendatang.

Seiring dengan tantangan pasokan energi, Perusahaan juga menghadapi isu reliabilitas operasi pabrik yang sebagian telah melewati umur ekonomisnya. Sepanjang 2025, kondisi ini tercermin pada meningkatnya kebutuhan perawatan dan risiko gangguan operasi yang berpotensi menurunkan tingkat produksi dan meningkatkan biaya. Dalam konteks industri pupuk yang sangat padat modal dan energi, reliabilitas aset menjadi faktor penentu keberlanjutan kinerja. Untuk mengatasi hal tersebut, Perusahaan memperkuat pendekatan perawatan berbasis pencegahan dan prediksi, serta melakukan penyesuaian jadwal perawatan berdasarkan kondisi aktual operasi. Pada unit-unit tertentu, Perusahaan juga menyiapkan program *revamping* dan penggantian peralatan utama untuk meningkatkan keandalan pabrik sekaligus menurunkan konsumsi energi.

Pada tahun 2025, tantangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi utamanya dari sisi serapan dan tata kelola permintaan. Realisasi penyaluran pada sebagian periode awal tahun masih berada di bawah target, yang mencerminkan adanya isu akurasi data petani, pola tebus, serta kesesuaian alokasi dengan kebutuhan riil di lapangan. Menjelang akhir tahun, intensifikasi koordinasi dengan pemangku kepentingan dan penguatan eksekusi distribusi mendorong peningkatan signifikan realisasi penyaluran hingga melampaui delapan juta ton secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola distribusi dan pendekatan yang lebih presisi terhadap kebutuhan petani menjadi kunci efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi.

Di sisi keuangan, Perusahaan juga menghadapi tantangan keterlambatan pembayaran tagihan subsidi pada akhir tahun yang berdampak pada arus kas operasional beberapa entitas. Sebagai respons, Perusahaan melakukan penguatan pengelolaan kas dan koordinasi intensif untuk mempercepat realisasi pembayaran, sekaligus menyiapkan kesiapan internal menghadapi perubahan skema pembayaran subsidi yang akan diterapkan ke depan.

Di tengah tantangan operasional jangka pendek, tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi Perusahaan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui pelaksanaan proyek-proyek pengembangan. Pembangunan Pusri-IIIB dilanjutkan sebagai bagian dari modernisasi fasilitas produksi guna meningkatkan efisiensi energi, memperkuat keandalan operasional, serta membentuk struktur biaya yang lebih kompetitif dibandingkan generasi pabrik sebelumnya. Secara paralel, Perusahaan membangun pabrik NPK Nitrat sebagai langkah hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperluas portofolio produk bernilai tambah yang mendukung kebutuhan pertanian modern dan hortikultura. Upaya diversifikasi juga dilakukan melalui pengembangan pabrik Soda Ash yang mengintegrasikan proses produksi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya eksisting, sehingga memperluas posisi di industri kimia dasar serta mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular. Secara keseluruhan, rangkaian inisiatif tersebut mencerminkan respons terstruktur Perusahaan dalam menjawab tantangan 2025 sekaligus memperkuat daya saing dan memastikan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

ensure supply continuity for key production facilities. These steps formed the foundation for the national fertilizer industry stable operations despite the dynamics of the national energy supply. In addition to securing supplies, the Company also promoted efficient gas consumption through a revitalization and rejuvenation program for production assets. These efforts were aimed at reducing gas usage intensity per unit of product, thereby maintaining cost competitiveness, while simultaneously reducing operational sensitivity to future fluctuations in gas supply and prices.

Together with the energy supply challenges, the Company also faced operational reliability issues at plants, some of which exceeded their economic lifespan. Throughout 2025, this condition could be seen in increasing maintenance requirements and the risk of operational disruptions, which potentially could reduce production levels and increase costs. In the highly capital- and energy-intensive fertilizer industry, asset reliability is a key factor for sustainable performance. To address this, the Company is strengthening its preventive and predictive maintenance approach and adjusting maintenance schedules based on actual operating conditions. For certain units, the Company is also preparing a major equipment revamping and replacement program to improve plant reliability while reducing energy consumption.

In 2025, the challenges in subsidized fertilizer distribution primarily lay in absorption and demand management. Distribution realized in the first part of the year fell below target, reflecting issues with farmer data accuracy, redemption patterns, and the alignment of allocations with actual needs on the ground. Towards the end of the year, intensified coordination with stakeholders and strengthened distribution execution led to a significant increase in distribution realization, surpassing eight million tons nationally, demonstrating that improved distribution governance and a more precise approach to farmer needs were key to the effectiveness of subsidized fertilizer policies.

On the financial side, the Company also faced the challenge of delayed subsidy bill payments at the end of the year, which impacted the operational cash flow in several entities. In response, the Company strengthened its cash management and intensified coordination to speed up payment realization, while also prepared internally for changes to the subsidy payment scheme that will be implemented going forward.

Despite these short-term operational challenges, 2025 presented a strategic momentum for the Company to strengthen its foundation for long-term growth through the development projects. Construction of Pusri-IIIB continued as part of the modernization of production facilities to improve energy efficiency, strengthen operational reliability, and establish a more competitive cost structure compared to previous generation plants. In parallel, the Company is building an NPK Nitrate plant as a downstream step to reduce dependence on imports while expanding its portfolio of value-added products to support the needs of modern agriculture and horticulture. Diversification efforts were also being undertaken with the development of a Soda Ash plant that integrates production processes and optimizes the use of existing resources, thereby expanding its position in the basic chemical industry and encouraging the application of circular economy principles. Overall, these initiatives reflected the Company's structured response to the challenges of 2025 while strengthening its competitiveness and ensuring a more sustainable growth over the long term.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI" atau "Perusahaan") membagi segmen usahanya dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Segmen Operasi yang tercatat dalam Laporan Keuangan teraudit. Informasi segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

Sesuai dengan kebijakan tersebut, segmen usaha PTPI sesuai dengan produk dan jasa yang dihasilkan, mencakup 3 (tiga) segmen, yaitu Segmen Pupuk dan Amonia, Segmen Jasa Konstruksi, dan Segmen Lain-lain yang disampaikan secara konsolidasi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI" or the "Company") divides its business segments by referring to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 108 concerning Operating Segments, as mentioned in the audited Financial Statements. Operating segment information is reported consistently with the internal reporting provided to the chief operating decision maker who is responsible for allocating resources, assessing operating segment performance, and making strategic decisions, as well as the Board of Directors.

In line with this policy, PTPI's business segments, based on the products and services provided, include three segments: the Fertilizer and Amonia Segment, the Construction Services Segment, and the Other Segment, which are presented in a consolidated basis.

Segmen Usaha PTPI
PTPI Business Segments

Jasa Konstruksi Construction Services	Pupuk dan Amonia Fertilizer and Ammonia	Lain-lain Others
Melakukan kegiatan usaha dalam *Engineering, Procurement & Construction* ("EPC"). Engaging in Engineering, Procurement & Construction ("EPC").	Melakukan kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa bidang perpupukan. Engaging in production, trade, and services in the fertilizer sector.	Melakukan kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi, pergudangan, dan kegiatan terkait lainnya. Engaging in transportation, expeditions, warehousing, and other related activities.

Untuk dapat memberikan gambaran kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, berikut disampaikan sekilas tentang kinerja segmen secara konsolidasian yang dapat memberikan gambaran tentang ukuran bisnis dan kontribusinya bagi PTPI.

To provide shareholders and stakeholders with an overview, the following tables give a brief picture of the consolidated segment performance, and an overview of the size of PTPI's business and contribution.

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Konsolidasian, Periode 2024-2025
Business Segment Contribution to Consolidated Sales and Other Operating Revenues, 2024-2025

Segmen Usaha Business Segment	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Pupuk dan Amonia Fertilizer and Ammonia	**90.764.316**	**100,40**	81.181.882	99,47	9.582.434	11,80	●
Jasa Konstruksi Construction Services	**3.148.947**	**3,48**	4.376.461	5,36	(1.227.514)	(28,05)	●
Lain-lain Others	**6.846.874**	**7,57**	5.699.904	6,98	1.146.970	20,12	●
Eliminasi* Elimination*	**(10.358.488)**	**(11,46)**	(9.642.039)	(11,81)	(716.449)	7,43	●
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Revenues	**90.401.649**	**100,00**	**81.616.208**	**100,00**	**8.785.441**	**10,76**	●

*) Eliminasi adalah seluruh transaksi baik penjualan dan pembelian yang dilakukan antar Perusahaan Pupuk Indonesia Group
*) Elimination includes all sales and purchase transactions conducted between Pupuk Indonesia Group Companies.

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Laba Tahun Berjalan Konsolidasian, Periode 2024-2025

Business Segment Contribution to Consolidated Profit for the Year, 2024-2025

Segmen Usaha Business Segment	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Pupuk dan Amonia Fertilizer and Ammonia	**7.479.499**	**135,68**	7.452.505	83,87	26.994	0,36	●
Jasa Konstruksi Construction Services	**(1.067.578)**	**(19,37)**	3.712.292	41,78	(4.779.870)	(128,76)	●
Lain-lain Others	**5.105.142**	**92,61**	1.873.544	21,08	3.231.598	172,49	●
Eliminasi* Elimination*	**(6.004.278)**	**(108,92)**	(4.152.303)	(46,73)	(1.851.975)	44,60	●
Jumlah Laba Tahun Berjalan Total Profit for the Year	**5.512.785**	**100,00**	**8.886.038**	**100,00**	**(3.373.253)**	**(37,96)**	●

*) Eliminasi adalah seluruh transaksi baik penjualan dan pembelian yang dilakukan antar Perusahaan Pupuk Indonesia Group
*) Elimination includes all sales and purchase transactions conducted between Pupuk Indonesia Group Companies.

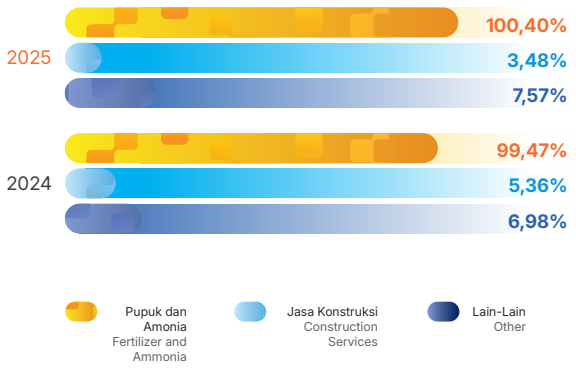
Keterangan:
Penggunaan warna **hijau** untuk memberikan gambaran tentang kinerja yang meningkat/membaik serta warna **merah** untuk kinerja yang terkoreksi/belum tercapai.

Note:
The use of **green** to indicate improving/enhancing performance and **red** to indicate corrected/not yet achieved performance.

Komposisi Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya per Segmen Usaha (Sebelum Eliminasi)

Sales and Other Operating Revenue Composition by Business Segment (Before Elimination)

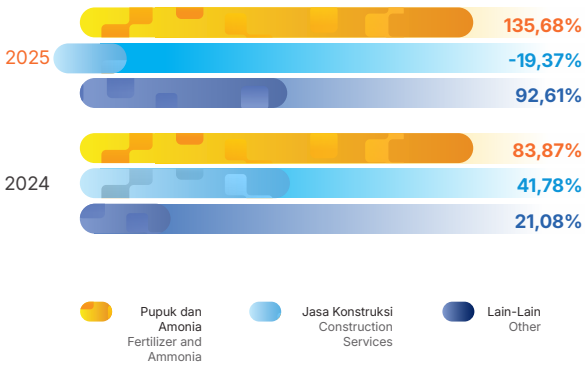
(Sebelum Eliminasi) | (before elimination)



Komposisi Laba Tahun Berjalan per Segmen Usaha (Sebelum Eliminasi)

Profit for the Year Composition by Business Segment (Before Elimination

(Sebelum Eliminasi) | (before elimination)

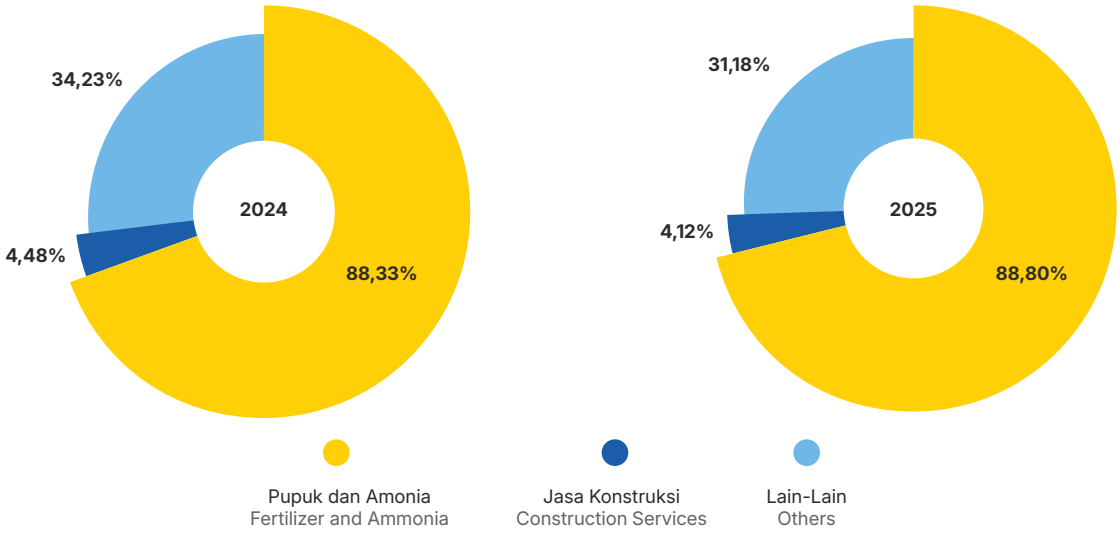


Kontribusi Segmen Usaha terhadap Jumlah Aset Konsolidasian, Periode 2024-2025
Business Segment Contribution to Total Consolidated Assets, 2024-2025

Segmen Usaha Business Segment	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Pupuk dan Amonia Fertilizer and Ammonia	**133.359.103**	**88,80**	123.042.326	88,33	10.316.777	8,38	●
Jasa Konstruksi Construction Services	**6.193.314**	**4,12**	6.237.359	4,48	(44.045)	(0,71)	●
Lain-lain Others	**46.820.558**	**31,18**	47.681.994	34,23	(861.436)	(1,81)	●
Eliminasi* Elimination*	**(36.190.150)**	**(24,10)**	(37.665.024)	(27,04)	1.474.874	(3,92)	●
Jumlah Aset Total Assets	**150.182.825**	**100,00**	139.296.655	100,00	10.886.170	7,82	●

*) Eliminasi adalah seluruh transaksi baik penjualan dan pembelian yang dilakukan antar Perusahaan Pupuk Indonesia Group
*) Elimination includes all sales and purchase transactions conducted between Pupuk Indonesia Group Companies.

Komposisi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)
Business Segment Revenue Composition to Total Assets (Before Elimination)



Dari tabel dan bagan di atas, dapat dilihat bahwa segmen usaha Pupuk dan Amonia merupakan bisnis inti PTPI selaku Holding BUMN Pupuk. Kegiatan produksi dan penjualan atas produk Pupuk dan Amonia ini meliputi pasar komersial maupun produk *Public Service Obligation* (PSO).

Berikut disampaikan secara rinci tentang kegiatan usaha, konsolidasi kelompok usaha, kinerja produktivitas, hingga kinerja keuangan dan profitabilitas masing-masing segmen.

In the tables and charts above, it can be seen that the Fertilizer and Amonia business segment is PTPI's core business, as a BUMN Fertilizer Holding Company. Production and sales of these fertilizer and amonia products cover the commercial market and Public Service Obligation (PSO) products.

The following shows the business activities, business group consolidation, productivity performance, and financial performance and profitability of each segment.

Segmen Pupuk dan Amonia

Kegiatan Segmen Pupuk dan Amonia

Segmen Pupuk dan Amonia merupakan bisnis inti PTPI. Segmen ini memiliki kegiatan produksi dan perdagangan produk Pupuk dan Non-Pupuk/Amonia yang ditopang oleh kelompok usaha. Adapun produk yang dihasilkan pada segmen ini adalah Pupuk Urea, NPK, Fosfat, ZA, dan ZK, serta produk non-pupuk berupa Amonia. Khusus untuk produk pupuk, Perusahaan memiliki 2 (dua) lini bisnis, yaitu pupuk bersubsidi dan non-subsidi, di mana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah penugasan dari Pemerintah.

Dalam menjalankan kegiatan pada segmen ini, Pupuk Indonesia Group dikonsolidasikan dari beberapa anak usaha sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

Fertilizer and Ammonia Segment

Fertilizer and Ammonia Segment Activities

The Fertilizer and Ammonia segment is PTPI's core business and these segments cover the production and the trading of Fertilizer and Non-Fertilizer/ammonia products, supported by business groups. The products produced in these segments include Urea, NPK, Phosphate, ZA, and ZK fertilizers, as well as non-fertilizer products such as ammonia. Specifically for fertilizer products, the Company has two business lines: subsidized and non-subsidized fertilizers, with the procurement and distribution of subsidized fertilizers being assigned by the Government.

To carry out activities in these segments, the Pupuk Indonesia Group has consolidated several subsidiaries, as shown in the chart below.



Tentang wilayah operasi masing-masing entitas anak dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The operational areas of each subsidiary can be seen in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi/Pupuk PSO

Pupuk Indonesia Group memiliki penugasan untuk mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi atau *Public Service Obligation* (PSO). Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 15 tahun 2025 yang berlaku tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Perusahaan mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian domestik secara nasional, mulai dari Gudang Pabrik hingga Titik Serah. Guna menjamin kelancaran distribusi, Perusahaan menerapkan prinsip "7 Tepat" (7T) - Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, Mutu, dan Penerima, serta memastikan ketersediaan gudang di setiap wilayah tanggung jawabnya. Adapun mekanisme dan pola distribusi selengkapnya disajikan pada bagan di bawah ini. Dalam pelaksanaannya, PUD menyalurkan pupuk hingga titik serah. PPTS menyalurkan kepada petani, kelompok tani (poktan), maupun kelompok pembudidaya ikan (pokdakan).

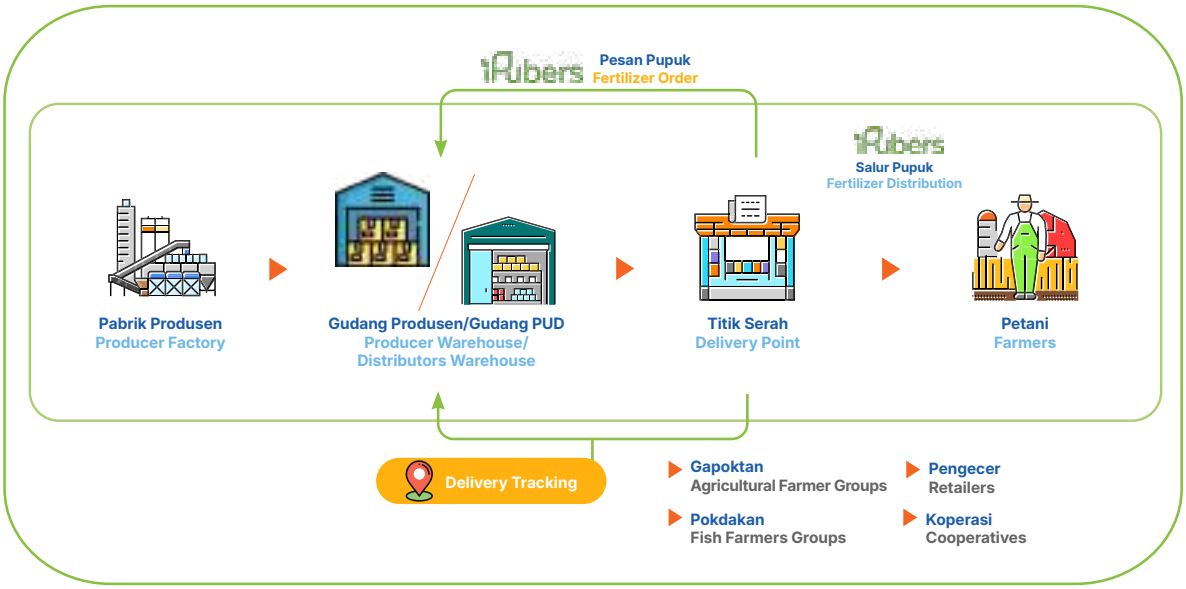
Subsidized Fertilizer/PSO Fertilizer Distribution Mechanism

Pupuk Indonesia Group is tasked with procuring and distributing subsidized fertilizer or Public Service Obligation (PSO). This is in accordance with the current Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 on the Implementing Regulations for Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Management of Subsidized Fertilizers.

The Company manages the procurement and distribution of subsidized fertilizer for the domestic agricultural sector nationally, from Factory Warehouse to Delivery Point. To ensure smooth distribution, the Company applies the "7 Right" (7T) principle - Right Type, Quantity, Price, Place, Time, Quality, and Recipient, and ensures the availability of warehouses in each area of responsibility. The complete distribution mechanism and pattern are presented in the chart below. In its implementation, PUD distributes fertilizer to the delivery point. PPTS distributes to farmers, farmer groups (poktan), and fish farming groups (pokdakan).

Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Sesuai Permentan No. 15 Tahun 2025

The distribution mechanism from is regulated in accordance with Minister of Agriculture Regulation No. 15 Tahun 2025



Kuantum moda transportasi PTPI dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat pada tabel berikut.

PTPI's transportation quantum modes for subsidized fertilizer distribution can be seen in the following table.

Kuantum Moda Transportasi Pupuk Indonesia Group

Pupuk Indonesia Group Transportation Quantum Mode

No.	Produsen Manufacturer	Moda Transportasi (ton) Transportation Mode (ton)	
		Angkutan Darat Land Transportation	Angkutan Laut Sea Transportation
1	PT Petrokimia Gresik	3.288.085	992.267
2	PT Pupuk Iskandar Muda	840.615	225.427
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	809.764	1.694.995
4	PT Pupuk Kujang	753.909	-
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.965.155	860.771
Jumlah Total		**7.657.528**	**3.773.460**

Fokus dan Strategi Tahun 2025

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pupuk, PTPI terus mengembangkan dan memperkuat segmen pupuk dan amonia sebagai bisnis inti. Pada tahun 2025, fokus dan strategi yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang, dan mendukung sektor pertanian nasional dalam menghadapi tantangan dan peluang baru. Fokus dan strategi Perusahaan di tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan *Operational Excellence dan Cost Leadership*
   Perusahaan meningkatkan efisiensi produksi melalui optimalisasi utilisasi pabrik, peningkatan *reliability*, digitalisasi operasi, serta pengendalian biaya energi dan bahan baku. Untuk mencapai target efisiensi ke depan, Perusahaan juga melakukan upaya efisiensi energi dengan pembangunan pabrik Pusri-IIIB dan *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT.
2. Transformasi Komersial dan *Market Driven Strategy*
   Perusahaan mengembangkan pendekatan komersial berbasis kebutuhan pelanggan (*customer segmentation*) khususnya pada pasar non-PSO seperti perkebunan, industri, dan ekspor. Optimalisasi penjualan produk (Urea, NPK formula khusus, dan *specialty fertilizer*) dilakukan untuk meningkatkan margin dan memperluas pangsa pasar.
3. Transformasi Tata Kelola Program Subsidi Pupuk Pemerintah

   Sebagai pelaksana mandat negara, Perusahaan perlu memperkuat akurasi distribusi, integrasi sistem *monitoring*, serta transparansi penyaluran pupuk bersubsidi untuk memastikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga. Untuk itu, dilakukan transformasi tata kelola pupuk bersubsidi dengan penyederhanaan peraturan, sehingga Perusahaan melakukan distribusi pupuk hingga ke titik serah.

4. Fondasi Transisi Energi dan Keberlanjutan
   Perusahaan mulai membangun *roadmap* dekarbonisasi melalui efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pengembangan *green ammonia* dan produk ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Focus and Strategy in 2025

As a company operating in the fertilizer sector, PTPI continues to develop and strengthen the fertilizer and ammonia segments as its core business. In 2025, with the focus and strategies aimed at increasing efficiencies, meeting evolving market needs, and supporting the national agricultural sector when facing new challenges and opportunities. The Company's focus and strategies for 2025 included:

1. Strengthening Operational Excellence and Cost Leadership
   The Company is increasing production efficiency by optimizing factory utilization, increasing reliability, digitizing operations, and controlling energy and raw material costs. To achieve future efficiency targets, the Company is also implementing energy efficiency efforts by the construction of Pusri-IIIB plant and Revamping of Ammonia PKT Plant-2.
2. Commercial Transformation and Market-Driven Strategy
   The Company is developing a commercial approach based on customer segmentation, particularly in non-PSO markets such as plantations, industries, and exports. Optimizing product sales (Urea, special-formula NPK, and specialty fertilizers) is being carried out to increase margins and expand market share.
3. Transformation of the Government's Fertilizer Subsidy Governance Program
   As an implementer of the state mandate, the Company needs to strengthen distribution accuracy, integrate monitoring systems, and ensure transparency in subsidized fertilizer distribution to ensure the principles of right targeting, right quantity, right time, and right price. To this end, the subsidized fertilizer governance has been transformed by simplifying regulations, allowing the Company to distribute fertilizer all the way to the point of delivery.
4. Energy Transition and Sustainability Foundation
   The Company has begun developing a decarbonization roadmap through energy efficiencies, emission reductions, and the development of green ammonia and environmentally friendly products as part of its long-term strategy.

Kinerja Produksi

Production Performance

Kinerja Produksi Pupuk dan Amonia, Periode 2024-2025
Fertilizer and Ammonia Production Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (ton)	2024 (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Volume (ton)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pupuk Fertilizer					
Urea Urea	**7.627.060**	7.681.964	(54.904)	(0,71)	●
NPK NPK	**4.233.507**	3.956.361	277.146	7,01	●
Pupuk Lainnya* Other Fertilizer*	**672.521**	607.427	65.094	10,72	●
Subtotal Produksi Pupuk Fertilizer Production Subtotal	**12.533.088**	12.245.751	287.337	2,35	●

Kinerja Produksi Pupuk dan Amonia, Periode 2024-2025
Fertilizer and Ammonia Production Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (ton)	2024 (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Volume (ton)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Non-Pupuk Non-Fertilizer					
Amonia Ammonia	**5.761.280**	5.881.249	(119.969)	(2,04)	●
Non-Amonia** Non-Ammonia**	**866.755**	844.513	22.242	2,63	●
Subtotal Produksi Non-Pupuk Subtotal Non-Fertilizer Production	**6.628.034**	6.725.762	(97.728)	(1,45)	●
Produk Samping By-Products					
Subtotal Produksi Produk Samping*** Subtotal of By-Product Production***	**78.513**	81.004	(2.491)	(3,07)	●
Jumlah Produksi Total Production	**19.239.635**	**19.052.517**	**187.119**	**0,98**	●

*) Terdiri dari SP-36, ZA, dan ZK.
**) Terdiri dari Asam Sulfat dan Asam Fosfat.
***) Terdiri dari AlF3, HCl, dan CO2.
* Consists of SP-36, ZA, and ZK.
** Consists of Sulfuric Acid and Phosphoric Acid.
*** Consists of AlF3, HCl, and CO2.

Pada tahun 2025, realisasi tonase produksi pupuk Urea mencapai 7,63 juta ton, turun 0,71% dibandingkan kinerja tahun 2024 yang mencapai 7,68 juta ton. Sementara itu, tonase produksi pupuk NPK (termasuk DAP) tahun 2025 tercatat 4,23 juta ton, meningkat 7,01% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3,96 juta ton. Sedangkan realisasi tonase produksi pupuk lainnya pada tahun 2025 mencapai 672,52 ribu ton, meningkat 10,72% dibandingkan tahun 2024 sebesar 607,43 ribu ton. Kenaikan produksi antara lain dikontribusikan oleh produksi pupuk, di mana di tahun 2025 terdapat penyesuaian jenis pupuk bersubsidi yaitu penambahan pupuk ZA dan Organik. Kinerja produksi amonia mengalami penurunan 2,04% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 5,88 juta ton pada tahun 2024 menjadi 5,76 juta ton pada tahun 2025.

In 2025, Implementation production tonnage of urea fertilizer reached 7.63 million tons, a 0.71% decrease compared to 7.68 million tons in 2024. While, the production tonnage of NPK fertilizer production (including DAP) in 2025 reached 4.23 million tons, a 7.01% increase compared to 3.96 million tons in 2024. While, other fertilizer production in 2025 reached 672.52 thousand tons, a 10.72% increase compared to 607.43 thousand tons in 2024. This increase in production was contributed by fertilizer production, with adjustments to subsidized fertilizer types in 2025, including the addition of ZA and organic fertilizers. Ammonia production performance decreased by 2.04% compared to the previous year, from 5.88 million tons in 2024 to 5.76 million tons in 2025.

Pupuk Indonesia Group menggunakan gas bumi sebagai bahan baku utama dalam produksi pupuk Urea. Gas bumi tersebut juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Perusahaan telah memiliki sejumlah perjanjian pengadaan gas bumi dengan beberapa penyedia sebagai salah satu upaya kesinambungan dalam produksi, antara lain:

1. PT Pupuk Iskandar Muda dengan Pertamina Gas Niaga (PTGN) serta dengan BP Berau (untuk pasokan LNG)
2. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Pertamina EP, Medco Grissik Ltd, Medco E&P Indonesia, Medco E&P Lematang, PHE Jambi Merang serta dengan Tropik Energi Pandan.
3. PT Pupuk Kujang dengan Pertamina EP, PHE ONWJ dan PGN.
4. PT Petrokimia Gresik dengan Husky CNOOC Madura Ltd lapangan MDA-MBH, BD serta MAC, PEP Cepu Lapangan JTB, PHE WMO serta Kangean Energy Indonesia Lapangan TSB dan Pagerungan.
5. PT Pupuk Kalimantan Timur dengan Pertamina (Persero) serta Genting Oil Kasuri Pte Ltd.

Pupuk Indonesia Group uses natural gas as the primary raw material in Urea fertilizer production. This natural gas is also used as an energy source. The Company has several natural gas procurement agreements with suppliers as part of its production sustainability efforts, including:

1. PT Pupuk Iskandar Muda with Pertamina Gas Niaga (PTGN) and with BP Berau (for LNG supply).
2. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang with Pertamina EP, Medco Grissik Ltd, Medco E&P Indonesia, Medco E&P Lematang, PHE Jambi Merang, and Tropik Energi Pandan.
3. PT Pupuk Kujang with Pertamina EP, PHE ONWJ, and PGN.
4. PT Petrokimia Gresik with Husky CNOOC Madura Ltd for the MDA-MBH, BD, and MAC fields, PEP Cepu with the JTB field; PHE with WMO and Kangean Energy Indonesia with the TSB and Pagerungan fields.
5. PT Pupuk Kalimantan Timur with Pertamina (Persero) and Genting Oil Kasuri Pte Ltd.

Selain itu, dalam rangka pengamanan pasokan gas ke depan, baik untuk operasional maupun eksisting, Pupuk Indonesia Group telah menandatangani beberapa HoA atau MoU antara lain:

1. HoA PTPI dengan Inpex Masela untuk potensi gas dari Masela
2. HoA antara PKG dengan Kris Energy untuk potensi gas dari WK Sakti dan Lengo
3. HoA antara PKG dengan Petronas untuk potensi gas dari Lapangan Ketapang
4. MoU antara PTPI dengan Mubadala Energy Indonesia untuk pasokan gas dari WK South Andaman
5. MoU PKC dengan Husky CNOOC Madura Ltd untuk potensi gas dari lapangan MDK-MBF.

Gas bumi adalah komponen utama bahan baku sehingga efisiensi konsumsi gas menjadi sangat berpengaruh pada Harga Pokok Produksi (HPP). Capaian kinerja Rasio konsumsi energi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Also, to secure future gas supplies, both for operational and existing projects, the Pupuk Indonesia Group has signed several HoAs or MoUs, including:

1. HoA between PTPI and Inpex Masela for gas potential from Masela.
2. HoA between PKG and Kris Energy for gas potential from the Sakti and Lengo Working Areas.
3. HoA between PKG and Petronas for gas potential from the Ketapang Field.
4. MoU between PTPI and Mubadala Energy Indonesia for gas supplies from the South Andaman Working Area.
5. MoU between PKC and Husky CNOOC Madura Ltd for gas potential from the MDK-MBF field.

Natural gas is a key raw material, so efficient gas consumption significantly impacts the Cost of Goods Sold (COGS). The 2025 energy consumption ratio can be seen in the following table.

Kinerja Rasio Konsumsi Gas, Periode 2024-2025
Gas Consumption Ratio Performance, 2024-2025

Perihal Subject	**2025 (MMBTU/ton)**	**2024 (MMBTU/ton)**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Volume (MMBTU/ton)	**Persentase (%)** Percentage (%)
	(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**
Urea Urea	**27,61**	28,28	(0,67)	(2,38)
Amonia Ammonia	**35,79**	36,21	(0,42)	(1,15)

Realisasi konsumsi gas bumi per ton urea dan amonia tahun 2025 masing-masing mencapai 27,61 MMBTU/Ton dan 35,79 MMBTU/Ton atau lebih efisien dari tahun 2024 karena pabrik yang dapat beroperasi lebih optimal.

Implementation natural gas consumption per ton of urea and amonia in 2025 was 27.61 MMBTU/Ton and 35.79 MMBTU/Ton, respectively, or more efficient than in 2024 due to more optimal plant operations.

Kinerja Penjualan

Sejalan dengan prinsip 7T sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PTPI membagi penjualan pupuk ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu penjualan pupuk bersubsidi atau pupuk *Public Service Obligation* (PSO) yang tata niaganya diatur regulasi pemerintah serta penjualan pupuk komersial atau non-subsidi/Non-PSO. Pupuk dan non-pupuk komersil dipasarkan kepada jaringan distribusi domestik, penjualan industri, dan ekspor.

Sales Performance

In line with the 7T principle as explained previously, PTPI divides fertilizer sales into 2 (two) categories: subsidized fertilizer sales or Public Service Obligation (PSO) fertilizers, the trading system of which is regulated by government regulations, and commercial fertilizer sales or non-subsidized/non-PSO fertilizers. Commercial fertilizers and non-commercial fertilizers are marketed to domestic distribution networks, industrial sales, and exports.

Volume Penjualan Pupuk dan Amonia, Periode 2024-2025
Fertilizer and Ammonia Sales Volume, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (ton)	2024 (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Volume (ton)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pupuk Fertilizer					
Pupuk PSO PSO Fertilizer	**8.110.571**	7.327.950	782.621	10,68	●
Pupuk Non-PSO Non-PSO Fertilizer	**4.683.805**	4.672.762	11.043	0,24	●
Subjumlah Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Sub Total	**12.794.376**	12.000.712	793.664	6,61	●
Non-Pupuk Non-Fertilizer					
Amonia Ammonia	**708.403**	814.874	(106.471)	(13,07)	●
Non-Amonia Non-Ammonia	**355.742**	278.747	76.995	27,62	●
Subjumlah Penjualan Non-Pupuk Non-Fertilizer Sales Sub Total	**1.064.145**	1.093.621	(29.476)	(2,70)	●
Jumlah Volume Penjualan Total Sales Volume	**13.858.521**	**13.094.333**	**764.188**	**5,84**	●

Rincian penjualan, baik dari sisi volume maupun nilai penjualan baik untuk pupuk maupun non-pupuk diuraikan secara rinci di bawah ini.

Sales details, in terms of volume and value, for both fertilizer and non-fertilizer products are outlined below.

Pupuk Bersubsidi/Pupuk PSO

Untuk sektor PSO, pupuk yang disalurkan oleh Pupuk Indonesia Group meliputi Urea, NPK, Organik, dan ZA.

Subsidized Fertilizer/PSO Fertilizer

For the PSO sector, fertilizers distributed by the Pupuk Indonesia Group include Urea, NPK, Organic, and ZA.

Kinerja Volume Penjualan Pupuk PSO, Periode 2024-2025
PSO Fertilizer Sales Volume Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (ton)	2024 (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Volume (ton)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Urea PSO PSO Urea	**3.798.719**	3.704.753	93.966	2,54	●
NPK PSO PSO NPK	**4.074.873**	3.576.108	498.765	13,95	●
Pupuk Lainnya* Other Fertilizer*	**236.979**	47.088	189.891	403,27	●
Jumlah Total	**8.110.571**	**7.327.950**	**782.621**	**10,68**	●

*) Terdiri dari Organik dan ZA.
*) Consists of Organic and ZA.

Sepanjang tahun 2025, Pupuk Indonesia Group telah menyalurkan pupuk Urea PSO sebanyak 3,80 juta ton, meningkat 2,54% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,70 juta ton. Sementara itu, penyaluran pupuk NPK PSO pada tahun 2025 sebanyak 4,07 juta ton, juga meningkat 13,95% dibandingkan tahun sebelumnya

In 2025, Pupuk Indonesia Group distributed 3.80 million tons of PSO urea fertilizer, a 2.54% increase compared to 3.70 million tons the previous year. PSO NPK fertilizer distribution in 2025 reached 4.07 million tons, a 13.95% increase compared to 3.58 million tons the previous year. While, distribution of other PSO

sebesar 3,58 juta ton. Sedangkan penyaluran pupuk PSO lainnya yang terdiri dari pupuk organik dan ZA sebanyak 237 ribu ton, juga mengalami kenaikan hingga 403,27% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 47,09 ribu ton. Kenaikan penyaluran pupuk PSO tersebut terutama sejalan dengan kenaikan nilai kontrak dengan Kementerian Pertanian serta penyesuaian jenis pupuk bersubsidi yaitu penambahan pupuk ZA di tahun 2025.

fertilizers, consisting of organic fertilizers and ZA, reached 237 thousand tons, a 403.27% increase compared to 47.09 thousand tons the previous year. This increase in PSO fertilizer distribution was primarily in line with the increase in the contract value with the Ministry of Agriculture, and adjustments to the subsidized fertilizer types, including the addition of ZA fertilizer in 2025.

Berikut disampaikan kinerja nilai penjualan dari produk PSO yang dilakukan Pupuk Indonesia Group.

The following show the sales value performance of PSO products sold by the Pupuk Indonesia Group.

Kinerja Nilai Penjualan Pupuk PSO, Periode 2024-2025
PSO Fertilizer Sales Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Penjualan Pupuk PSO PSO Fertilizer Sales	**13.222.221**	13.237.968	(15.747)	(0,12)	●
Pendapatan Subsidi Subsidy Revenue	**39.507.147**	33.323.915	6.183.232	18,55	●
Jumlah Total	**52.729.368**	**46.561.883**	**6.167.485**	**13,25**	●

Nilai penjualan pupuk PSO tahun 2025 mencapai Rp13,22 triliun, mengalami penurunan 0,12% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13,24 triliun. Penurunan ini sejalan dengan penerapan Keputusan Menteri Pertanian No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20% yang mulai diterapkan di bulan Oktober 2025.

PSO fertilizer sales in 2025 reached Rp13.22 trillion, a 0.12% decrease compared to Rp13.24 trillion in 2024. This decrease was due to the implementation of Minister of Agriculture Decree No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 concerning a 20% reduction in the Highest Retail Price (HRP) for subsidized fertilizer, which took effect in October 2025.

Di sisi lain, penggantian biaya subsidi dari Pemerintah tahun 2025 mencapai Rp39,51 triliun, mengalami kenaikan 18,55% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp33,32 triliun.

On the other side, the Government's subsidy reimbursement for 2025 reached Rp39.51 trillion, an 18.55% increase compared to Rp33.32 trillion in 2024.

Pupuk Non-Subsidi/Non-PSO

Non-Subsidized/Non-PSO Fertilizers

Kinerja Volume Penjualan Pupuk Non-PSO, Periode 2024-2025
Non-PSO Fertilizer Sales Volume Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (ton)	2024 (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Volume (ton)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Urea Urea	**3.873.443**	3.909.349	(35.906)	(0,92)	●
NPK NPK	**298.373**	165.435	132.938	80,36	●
Pupuk Non-PSO Lainnya* Other Non-PSO Fertilizer*	**511.990**	597.979	(85.989)	(14,38)	●
Jumlah Penjualan Pupuk Non-PSO Total Non-PSO Fertilizer Sales	**4.683.805**	**4.672.762**	**11.043**	**0,24**	●

*) Terdiri dari SP-36, ZA, DAP, ZK, Kaptan, Petrocas, KCL.
*) Consists of SP-36, ZA, DAP, ZK, Kaptan, Petrocas, KCL.

Pada sektor Non-PSO, tonase penjualan pupuk di tahun 2025 meningkat 0,24% dibandingkan tonase penjualan pupuk di tahun 2024, dari 4,67 juta ton menjadi 4,68 juta ton. Kenaikan ini terutama dikontribusikan dari penjualan ekspor yang naik 20% dibandingkan tahun 2024.

In the Non-PSO sector, fertilizer sales tonnage in 2025 increased by 0.24% compared to 2024, from 4.67 million tons to 4.68 million tons. This increase was mainly due to export sales, which increased by 20% compared to 2024.

Tonase penjualan pupuk Urea tahun 2025 sebesar 3,87 juta ton, turun 0,92% dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,91 juta ton, yang disebabkan penjualan difokuskan untuk pemenuhan pupuk bersubsidi.

Urea fertilizer sales tonnage in 2025 was 3.87 million tons, a decrease of 0.92% compared to 3.91 million tons in 2024, due to sales being focused on meeting subsidized fertilizer needs.

Sementara tonase penjualan pupuk NPK meningkat 80,36%, dari 165,44 ribu ton pada tahun 2024 menjadi 298,37 ribu ton pada tahun 2025, yang dikontribusikan dari penjualan ekspor. Begitu juga dengan tonase penjualan pupuk lainnya sebesar 511,99 ribu ton, turun 14,38% dibandingkan tahun 2024 sebesar 597,98 ribu ton.

While, NPK fertilizer sales tonnage increased by 80.36%, from 165.44 thousand tons in 2024 to 298,37 thousand tons in 2025, due to export sales. Similarly, sales tonnage of other fertilizers reached 511.99 thousand tons, a 14.38% decrease compared to 597.98 thousand tons in 2024.

Peningkatan tonase penjualan berdampak pada nilai penjualan pupuk Non-PSO secara keseluruhan yang sedikit lebih tinggi 19,55%, dari Rp22,88 triliun di tahun 2024 menjadi Rp27,36 triliun di tahun 2025.

The increase in sales tonnage resulted in a slightly higher 19.55% increase in overall sales value of non-PSO fertilizers, from Rp22.88 trillion in 2024 to Rp27.36 trillion in 2025.

Kinerja Nilai Penjualan Pupuk Non-PSO, Periode 2024-2025
Non-PSO Fertilizer Sales Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Penjualan Pupuk Non-PSO Non-PSO Fertilizer Sales	**27.359.457**	22.884.956	4.474.501	19,55	●

Amonia dan Non-Amonia

Ammonia and Non-Ammonia

Kinerja Volume Penjualan Amonia dan Non-Amonia, Periode 2024-2025
Amonia and Non-Amonia Sales Volume Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (Ton) (Ton)	2024 (Ton) (Ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Volume (Ton)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Amonia Ammonia	**708.403**	814.874	(106.471)	(13,07)	●
Non-Ammonia					
Asam Sulfat Sulphuric Acid	**266.080**	188.944	77.136	40,82	●
Asam Fosfat Phosphoric Acid	**17.160**	13.225	3.935	29,75	●
Lainnya*) Others*)	**72.502**	76.579	(4.077)	(5,32)	●
Subjumlah Penjualan Non-Amonia Non-Ammonia Sales Sub Total	**355.742**	278.747	76.995	27,62	●
Jumlah Penjualan Non-Pupuk Total Non-Amonia Sales	**1.064.145**	**1.093.621**	**(29.476)**	**(2,70)**	●

*) Terdiri dari AlF3, HCl, dan CO2.
*) Consists of AlF3, HCl, and CO2

Realisasi volume penjualan amonia pada tahun 2025 mencapai 708,40 ribu ton, turun 13,07% dibandingkan volume penjualan pada tahun sebelumnya sebanyak 814,87 ribu ton. Penurunan penjualan amonia disebabkan antara lain karena pasokan amonia untuk ekspor terbatas, pabrik Kaltim 2 mengalami *shutdown* pada Januari, Juli, Agustus, dan September, sehingga volume ekses yang bisa dijual ekspor berkurang, sehingga sisa pasokan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Sedangkan realisasi volume penjualan non-amonia pada tahun 2025 mencapai 355,74 ribu ton, meningkat 27,62% dibandingkan volume penjualan pada tahun sebelumnya sebanyak 278,75 ribu ton.

Implementation ammonia sales volume in 2025 reached 708.40 thousand tons, a 13.07% decrease compared to 814.87 thousand tons the previous year, mainly due to limited ammonia supplies for export. The Kaltim 2 plant was shut down in January, July, August, and September, reducing the excess volume available for export, and prioritizing the remaining supply for domestic needs. Meanwhile, non-ammonia sales volume in 2025 reached 355.74 thousand tons, a 27.62% increase compared to 278.75 thousand tons the previous year.

Nilai penjualan amonia pun mengalami penurunan sebesar 11,92%, dari Rp4,92 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp4,34 triliun pada tahun 2025 sejalan dengan penurunan volume penjualan amonia. Sedangkan nilai penjualan non-amonia tahun 2025 sebesar Rp882,68 miliar, mengalami kenaikan 40,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp628,13 miliar.

Ammonia sales also decreased by 11.92%, from Rp4.92 trillion in 2024 to Rp4.34 trillion in 2025, in line with the decline in amonia sales volume. While, non-ammonia sales in 2025 were projected to reach Rp882.68 billion, a 40.53% increase compared to Rp628.13 billion the previous year.

Kinerja Nilai Penjualan Amonia dan Non-Amonia, Periode 2024-2025
Amonia and Non-Ammonia Sales Performance, 2024-2025

Perihal Subject	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)	
	(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Amonia Ammonia	**4.335.524**	4.922.344	(586.820)	(11,92)	●
Non-Amonia Non-Ammonia	**882.676**	628.127	254.549	40,53	●
Jumlah Total	**5.218.200**	**5.550.471**	**(332.271)**	**(5,99)**	●

Profitabilitas Segmen Pupuk dan Amonia

Laporan kinerja profitabilitas untuk Segmen Pupuk dan Amonia belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian kinerja profitabilitas disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Fertilizer and Ammonia Segment Profitability

The profitability performance report for the Fertilizer and Ammonia Segment does not include inter-segment eliminations. Details of the profitability performance are shown in the tables below.

Kinerja Profitabilitas Segmen Pupuk dan Amonia, Periode 2024-2025
Fertilizer and Ammonia Segment Profitability Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)	
	(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Profit and Loss and Comprehensive Income					
Pendapatan Revenues					
Pendapatan Eksternal External Revenues	**89.102.651**	78.709.747	10.392.904	13,20	●
Pendapatan antar Segmen Inter-segment Revenues	**1.661.665**	2.472.135	(810.470)	(32,78)	●
Pendapatan Bersih Net Revenues	**90.764.316**	81.181.882	9.582.434	11,80	●
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	**(75.013.451)**	(66.075.932)	(8.937.519)	13,53	●

Kinerja Profitabilitas Segmen Pupuk dan Amonia, Periode 2024-2025
Fertilizer and Ammonia Segment Profitability Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Beban Penjualan Selling Expenses	**(2.309.498)**	(2.412.945)	103.447	(4,29)	●
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	**(3.379.751)**	(3.025.440)	(354.311)	11,71	●
Pendapatan Lainnya – Bersih Other Income-Net	**(477.625)**	650.417	(1.128.042)	(173,43)	●
Pendapatan Keuangan Finance Income	**556.193**	427.729	128.464	30,03	●
Beban Keuangan Finance Costs	**(970.245)**	(1.504.294)	534.049	(35,50)	●
Bagian atas Laba/(Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures	**428.190**	306.406	121.784	39,75	●
Laba sebelum Pajak Profit before Income Tax	**9.598.129**	9.547.823	50.306	0,53	●
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**(2.118.630)**	(2.095.318)	(23.312)	1,11	●
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Profit / (Loss) for The Year	**7.479.499**	7.452.505	26.994	0,36	●
Posisi Keuangan Finance Position					
Aset Segmen Assets Segment	**133.359.103**	123.042.326	10.316.777	7,12	●
Liabilitas Segmen Liabilities Segment	**40.327.967**	34.840.555	5.487.412	12,55	●
Pengeluaran Modal Capital Expenditures	**11.219.386**	9.172.188	2.047.198	-	
Profitabilitas Profitability					
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**8,24**	9,18	(0,94)		●
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**5,61**	6,06	(0,45)		●

Pada tahun 2025, laba tahun berjalan untuk Segmen Pupuk dan Amonia yang berhasil dibukukan oleh Perusahaan sebesar Rp7,48 triliun, mengalami kenaikan 0,36% atau setara dengan Rp26,99 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7,45 triliun. Hal ini disebabkan beban pokok pendapatan naik 13,53% dibandingkan tahun 2024 yang antara lain disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga gas.

In 2025, the Company's profit in the Fertilizer and Amonia Segment reached Rp7.48 trillion, a 0.36% increase, or Rp26.99 billion, compared to Rp7.45 trillion in 2024. This was due to a 13.53% increase in cost of revenue compared to 2024, partly due to an increase in average gas prices.

Rencana Pengembangan Tahun 2026

Perusahaan telah menyiapkan rencana pengembangan untuk segmen Pupuk dan Amonia di tahun 2026, dengan fokus pada kelanjutan program-program tahun 2025 serta beberapa inisiatif baru yang akan mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Adapun Rencana strategis tersebut sebagai berikut:

1. Pengembangan fasilitas produksi dan infrastruktur pada bisnis inti Pupuk dan Amonia yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk pembangunan pabrik baru dengan

2026 Development Plan

The Company has prepared a 2026 development plan for the fertilizer and amonia segment, focusing on continuing the 2025 programs and several new initiatives to support the Company's long-term growth. The strategic plan is as follows:

1. Developing more efficient and eco-friendly production facilities and infrastructure in the core fertilizer and amonia businesses, including the construction of new plants with more advanced

teknologi yang lebih canggih serta penerapan otomatisasi untuk meminimalkan biaya operasional dan meningkatkan volume produksi. Sejalan dengan penguatan bisnis inti tersebut, Perusahaan juga menjalankan program diversifikasi portofolio ke produk kimia bernilai tambah sebagai upaya memperluas sumber pendapatan, meningkatkan ketahanan usaha, serta membangun pilar pertumbuhan yang lebih tangguh terhadap dinamika pasar.

a. Proyek dalam Fase Persiapan: Pabrik *Methanol*, Pabrik *Blue Ammonia*, Pabrik Amurea PIM 3, Pabrik NPK Fusion PSP, Pabrik NPK Granular 3 PKC, *Revamping Ammonia* Pabrik Kujang-1B PKC, Pabrik Amonia 1C PKG, Pabrik Natrium Sianida PKG, dan Pabrik Amurea Papua Barat PKT.
b. Proyek dalam Fase Pengadaan: Pabrik Pupuk Fosfat PKG, Pabrik Phonska VI PKG, Pabrik Soda Ash PKG, dan Pabrik NPK-3 PKT.
c. Proyek dalam Fase Pelaksanaan: Pabrik Pusri-IIIB PSP, Pabrik NPK Nitrat PKC, Tangki Asam Sulfat PKG, Dermaga A PKG, *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT, dan Pabrik Soda Ash PKT.

2. Perusahaan akan memperkenalkan lebih banyak produk pupuk yang berbasis bahan organik dan ramah lingkungan, mendukung pertanian yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetik.
3. Perusahaan melakukan ekspansi dengan memperkenalkan produk-produk unggulan di pasar-pasar luar negeri yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Selain itu, perusahaan akan memperkuat kemitraan dengan distributor internasional dan menjalin aliansi strategis dengan mitra bisnis global untuk memperkuat jangkauan pasar dan mendiversifikasi sumber pendapatan.

technology and automation to minimize operational costs and increase production volume. In line with strengthening its core businesses, the Company is also implementing a portfolio diversification program into value-added chemical products to expand revenue sources, increase business resilience, and build growth pillars that are more resilient to market dynamics.

a. Projects in the Preparation Phase: Methanol Plant, Blue Ammonia Plant, Amurea PIM 3 Plant, NPK Fusion PSP Plant, Granular NPK 3 PKC Plant, Revamping in the Ammonia Plant Kujang-1B PKC, Amonia Plant 1C PKG, Sodium Cyanide Plant PKG, and West Papua Amurea Plant PKT.
b. Projects in the Procurement Phase: Phosphate Fertilizer Plant PKG, Phonska VI PKG Plant, and Soda Ash Plant PKG.
c. Projects in the Implementation Phase: Pusri-IIIB PSP Plant, NPK Nitrate Plant PKC, Sulfuric Acid Tank PKG, Pier A PKG, Revamping of Ammonia PKT Plant-2, and Soda Ash Plant PKT.

2. The Company will introduce more organic and eco-friendly fertilizer products, to support sustainable agriculture and reduce dependence on synthetic chemical fertilizers.
3. The Company will expand by introducing superior high growth potential products in foreign markets. The Company will also strengthen partnerships with international distributors and forge strategic alliances with global business partners to strengthen market reach and diversify revenue sources.

Segmen Jasa Konstruksi

Kegiatan Segmen Jasa Konstruksi

Segmen Jasa Konstruksi dijalankan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind), Entitas Anak yang bergerak di bidang *Engineering*, *Procurement*, dan *Construction* (EPC). Rekind telah membangun pabrik-pabrik skala besar di Indonesia, yaitu di sektor minyak dan gas bumi (migas), kimia/petrokimia, mineral, infrastruktur dan pembangkit listrik. Secara umum, bisnis konstruksi Rekind berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun (*multiyears*). Dengan demikian, kontrak kerja yang diperoleh baru tercatat sebagai pendapatan pada tahun-tahun berikutnya.

Construction Services Segment

Construction Services Segment Activities

The Construction Services Segment is operated by PT Rekayasa Industri (Rekind), a subsidiary engaged in Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Rekind has built large-scale factories in Indonesia, specifically in the oil and gas, chemical/petrochemical, mineral, infrastructure, and power generation sectors. Generally, Rekind's construction business contracts are multi-year, therefore, any work contracts obtained are only recorded as revenue in subsequent years.

PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT Rekayasa Industri
dan entitas anaknya
and its subsidiaries

Fokus dan Strategi Segmen Jasa Konstruksi

Segmen Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) pada tahun 2025 berfokus pada implementasi atas kajian restrukturisasi perusahaan yang telah disusun sebelumnya. Adapun implementasi restrukturisasi pada tahun 2024 difokuskan pada restrukturisasi keuangan melalui 7 (tujuh) inisiatif strategis, yaitu:

1. Restrukturisasi utang *vendor*
2. Restrukturisasi utang bank
3. Dukungan penyelesaian proyek
4. Dukungan finansial
5. *Capital Injection*
6. Dukungan proyek Pupuk Indonesia Group
7. Inbreng saham dan aset tetap

Selanjutnya pada tahun 2025 berfokus pada transformasi bisnis untuk meningkatkan daya saing dan menegaskan peran strategis melalui 8 (delapan) *Initiative Charter*, yaitu:

1. *Revenue Enhancement*
2. *Profitable Project Delivery*
3. *Procurement Exellence*
4. *Zero Based Budgeting and Lean Organization*
5. *Partnership as an Accelerator*
6. *CFO Exellence*
7. *Risk Management, Governance, and Transparent Reporting*
8. *World Class People and System*

Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk penyehatan perusahaan dan memberikan nilai tambah maupun efisiensi bagi Perusahaan.

Construction Services Segment Focus and Strategy

PT Rekayasa Industri (Rekind) focuses on implementing the previously prepared company restructuring study in 2025. The restructuring in 2024 will focus on financial restructuring through seven strategic initiatives:

1. Vendor debt restructuring
2. Bank debt restructuring
3. Project completion support
4. Financial support
5. Capital injection
6. Pupuk Indonesia Group project support
7. Share Investment and fixed assets

Also, in 2025, the focus will be on business transformation to increase competitiveness and affirm strategic roles through eight Initiative Charters, including:

1. Revenue Enhancement
2. Profitable Project Delivery
3. Procurement Excellence
4. Zero-Based Budgeting and Lean Organization
5. Partnership as an Accelerator
6. CFO Excellence
7. Risk Management, Governance, and Transparent Reporting
8. World-Class People and Systems

The restructuring aims to improve the Company's health and provide added value and efficiency.

Kinerja Segmen Jasa Konstruksi

Construction Services Segment Performance

Kinerja Segmen Jasa Konstruksi, Periode 2024-2025
Construction Services Segment Performance, 2024-2025

Perolehan Kontrak Baru New Contract Acquisition	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)	
	(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
EPC	**1.418.741**	499.021	919.720	184,30	●
Non-EPC	**100.855**	277.077	(176.222)	(63,60)	●
Entitas Lain di bawah Rekind Other Entities Under Rekind	**1.701.652**	1.131.917	569.735	50,33	●
Jumlah Perolehan Kontrak Baru Total New Contracts Obtained	**3.221.248**	**1.908.014**	**1.313.233**	**68,83**	●

Pada tahun 2025, Segmen Jasa Konstruksi memperoleh kontrak baru sebesar Rp3,22 triliun, mengalami kenaikan 68,83% atau setara dengan Rp1,31 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,91 triliun. Perolehan kontrak baru utamanya dikontribusikan dari proyek EPC yang mencapai Rp1,42 triliun, antara lain seperti proyek Soda Ash PKT dan NPK Nitrat PKC.

In 2025, the Construction Services Segment secured new contracts worth Rp3.22 trillion, a 68.83% increase, or Rp1.31 trillion, compared to Rp1.91 trillion in 2024, mainly due to EPC projects, reaching Rp1.42 trillion, including the PKT Soda Ash and NPK Nitrate PKC projects.

Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi

Laporan kinerja profitabilitas untuk segmen Jasa Konstruksi belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Construction Services Segment Profitability

The Construction Services segment profitability performance report does not account for inter-segment eliminations. Details of the Construction Services Segment's profitability are shown below.

Kinerja Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi, Periode 2024-2025
Construction Services Segment Profitability Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Profit and Loss and Comprehensive Income					
Pendapatan Revenues					
Pendapatan Eksternal External Revenues	**3.148.947**	4.376.461	(1.227.514)	(28,05)	●
Pendapatan antar Segmen Inter-segment Revenues					
Pendapatan Bersih Net Revenues	**3.148.947**	4.376.461	(1.227.514)	(28,05)	●
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	**(2.571.354)**	(1.969.974)	(601.380)	30,53	●
Beban Penjualan Cost of Sales	**(8.994)**	(1.791)	(7.203)	402,18	●
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	**(477.134)**	(720.988)	243.854	(33,82)	●
Pendapatan Lainnya – Bersih Other Income-Net	**(6.771)**	3.363.275	(3.370.046)	(100,20)	●
Pendapatan Keuangan Finance Income	**47.755**	11.865	35.890	302,49	●
Beban Keuangan Finance Costs	**(377.125)**	(352.380)	(24.745)	7,02	●
Bagian atas Laba/(Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures	**(746.229)**	(885.925)	139.696	(15,77)	●
Laba sebelum Pajak Profit before Income Tax	**(990.905)**	3.820.543	(4.811.448)	(125,94)	●
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**(76.673)**	(108.251)	31.578	(29,17)	●
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Profit / (Loss) for The Year	**(1.067.578)**	3.712.292	(4.779.870)	(128,76)	●
Posisi Keuangan Finance Position					
Aset Segmen Assets Segment	**6.193.314**	6.237.359	(44.045)	(0,71)	●
Liabilitas Segmen Liabilities Segment	**6.383.558**	5.113.090	1.270.468	24,85	●
Pengeluaran Modal Capital Expenditures	**147.325**	759.596	(612.271)	(80,60)	●
Profitabilitas Profitability					
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**(33,90)**	84,82	(118,72)		●
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**(17,24)**	59,52	(76,76)		●

Pada tahun 2025, Segmen Jasa Konstruksi membukukan pendapatan sebesar Rp3,15 triliun, mengalami penurunan 28,05% atau setara dengan Rp1,23 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,38 triliun, dan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp1,07 triliun, di mana penurunan yang cukup signifikan ini hingga mencapai 128,76% atau setara dengan Rp4,78 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,71 triliun.

In 2025, the Construction Services Segment's revenue reached Rp3.15 trillion, a 28.05% decrease, or Rp1.23 trillion, compared to Rp4.38 trillion in 2024. It also posted a loss for the year of Rp1.07 trillion, a significant decrease of 128.76%, or Rp4.78 trillion, compared to Rp3.71 trillion in 2024.

Rencana Pengembangan Tahun 2026

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian di seluruh wilayah Indonesia, pada tahun 2026 Perusahaan berencana melakukan pengembangan dengan memanfaatkan sumber gas alam yang melimpah di berbagai wilayah di Indonesia, dan meningkatkan kapasitas produksi pupuk NPK secara bertahap guna memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan mendukung program swasembada pangan, serta berencana membangun pabrik dengan melibatkan Rekind sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi.

2026 Development Plan

In 2026, to support increased agricultural production in across Indonesia, the Company plans to develop by utilizing the abundant natural gas resources in various regions of Indonesia, and gradually increase its NPK fertilizer production capacity to meet national fertilizer needs and support the food self-sufficiency program. It also plans to build a factory with Rekind, a company engaged in construction services.

Segmen Lainnya

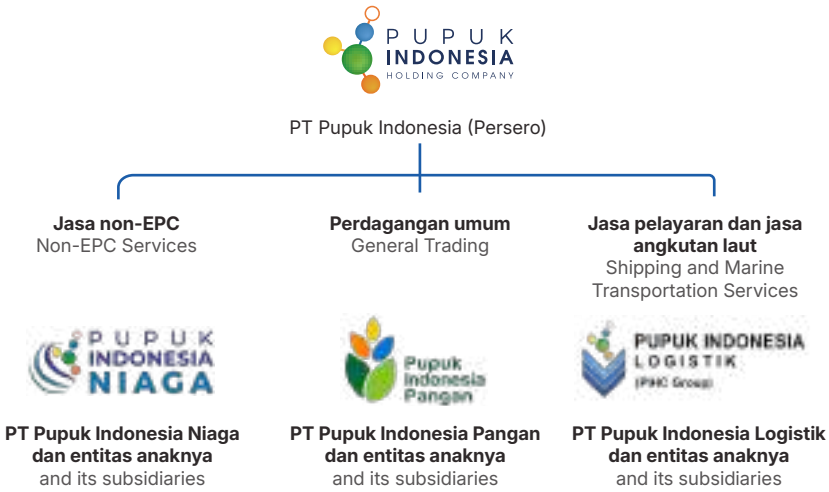
Other Segments

Kegiatan Segmen Lainnya

Segmen Lain-lain terdiri dari bidang perdagangan umum yang dijalankan melalui PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN") dan PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP"), jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG"), serta jasa non-EPC melalui PIN.

Other Segment Activities

Other Segment consists of general trading activities conducted through PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN") and PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP"), shipping and sea transportation services by PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG"), and non-EPC services through PIN.



Fokus dan Strategi Segmen Lainnya

Strategi bisnis pada tahun 2025 berfokus pada peningkatan kinerja Perusahaan melalui strategi restrukturisasi Perusahaan dan sinergi yang memberikan nilai tambah maupun efisiensi bagi Perusahaan. Bidang perdagangan umum yang dijalankan melalui PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) melakukan strategi penguatan bisnis *trading* pupuk impor, terutama pupuk tunggal yang tidak diproduksi Pupuk Indonesia Group. Selain itu, PIN juga melakukan ekspansi bisnis NPK dengan skema *low risk* dan *light asset* melalui maklon NPK bersama dengan produsen NPK swasta. Sedangkan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) menjalankan strategi ekspansi pasar ke sektor *retail*, *modern trade*, *private label*, dan pasar institusi.

Sementara itu, Jasa Pelayaran dan Jasa Angkutan Laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) berfokus pada peningkatan pelayanan *end to end logistic* melalui program *Port to Door Service*

Other Segment Focus and Strategy

The 2025 business strategy focuses on improving Company performance through corporate restructuring and synergies that provide added value and efficiency. The general trading sector, operated by PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN), is instigating a strategy to strengthen its imported fertilizer trading business, particularly single fertilizers not produced by the Pupuk Indonesia Group. Also, PIN is expanding its NPK business with a low-risk and asset-light scheme through NPK maklon (contract manufacturing) in collaboration with private NPK producers. While, PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) is pursuing a market expansion strategy into the retail, modern trade, private label, and institutional markets.

Also, Shipping and Sea Transportation Services, operated by PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), are focusing on improving end-to-end logistics services through the Port to Door Service (PTDS)

(PTDS) dan bertransformasi menjadi perusahaan *one stop logistic company* melalui skema *light asset model*.

Sedangkan pada Jasa Non-EPC melalui PIN masih dalam proses pengembangan yang menjadikan tidak hanya melaksanakan perdagangan cat tetapi juga menyediakan layanan jasa pengecatan (aplikator).

program and transforming into a one-stop logistics company through a light asset model.

While PIN's Non-EPC Services are still under development, to expand beyond paint trading to include painting services (applicator).

Kinerja 2025

Jasa pelayaran dan jasa angkutan laut dijalankan oleh PILOG yang merupakan Entitas Anak Pupuk Indonesia Group yang berdiri sejak tahun 2014. PILOG memiliki 9 (sembilan) armada kapal laut dengan jumlah kapasitas angkut sebanyak 79,90 ribu MT per tahun yang digunakan untuk mengangkut produk-produk utama Pupuk Indonesia Group, seperti pupuk, amonia, dan produk lainnya seperti LPG. Selain memiliki armada sendiri, PILOG menyewa kapal laut kepada pihak ketiga.

2025 Performance

Shipping and maritime transportation services are operated by PILOG, a subsidiary of the Pupuk Indonesia Group, established in 2014. PILOG has a fleet of 9 (nine) vessels with a total annual capacity of 79.90 thousand MT, used to transport Pupuk Indonesia Group's primary products, such as fertilizer, amonia, and other products such as LPG. In addition to its own fleet, PILOG also leases vessels from third parties.

Kinerja Tonase Angkutan Laut PILOG, Periode 2024-2025
PILOG Sea Tonnage Transportation Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (ton)	2024 (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Volume (ton)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Angkutan Pupuk Urea Urea Fertilizer Transportation	**1.248.812**	992.079	256.733	25,88	●
Angkutan Amonia Ammonia Transportation	**215.091**	303.430	(88.339)	(29,11)	●
Angkutan Lainnya* Other Transportation*	**78.828**	100.912	(22.084)	(21,88)	●
Jumlah Total	**1.542.731**	**1.396.421**	**146.310**	**10,48**	●

Sepanjang tahun 2025, realisasi tonase Angkutan Pupuk sebanyak 1,25 juta ton, meningkat 25,88% dibandingkan tahun 2024 sebanyak 992,08 ribu ton. Angkutan Amonia dan LPG tahun 2025 turun 29,11% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 303,43 ribu ton menjadi 215,09 ribu ton. Sementara itu, Angkutan Lainnya tahun 2025 turun 21,88% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 100,91 ribu ton menjadi 78,83 ribu ton.

In 2025, the implementation tonnage of fertilizer transportation was 1.25 million tons, a 25.88% increase compared to 992.08 thousand tons in 2024. Amonia and LPG transportation in 2025 decreased 29.11% compared to the previous year, from 303.43 thousand tons to 215.09 thousand tons. While, other transportation in 2025 decreased 21.88% compared to the previous year, from 100.91 thousand tons to 78.83 thousand tons.

Kinerja Volume Perdagangan, Periode 2024-2025
Trade Transportation Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (ton)	2024 (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Volume (ton)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pupuk PSO PSO Fertilizer	**124.242**	132.151	(7.909)	(5,98)	●
Pupuk Non-PSO Non-PSO Fertilizer	**185.921**	347.931	(162.010)	(46,56)	●
Produk Lainnya* Other Products*	**18.676**	16.168	2.508	15,51	●
Jumlah Total	**328.839**	**496.250**	**(167.411)**	**(33,74)**	●

*) Terdiri dari angkutan herbisida, pewarna pupuk, semen, batu bara, dan lain-lain.
*) Consists of transportation of herbicides, fertilizer dyes, cement, coal, and others.

Realisasi tonase perdagangan Pupuk PSO yang dilakukan oleh Perusahaan melalui PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) dan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) pada tahun 2025 mencapai 124,24 ribu ton, turun 5,98% dibandingkan tahun 2024 mencapai 132,15 ribu ton. Tonase perdagangan Pupuk Non-PSO juga mengalami penurunan, yang mencapai 46,56%, dari 347,93 ribu ton pada tahun 2024 menjadi 185,92 ribu ton pada tahun 2025.

The Company's implementation PSO fertilizer trade tonnage through PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) and PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) in 2025 reached 124.24 thousand tons, a 5.98% decrease compared to 132.15 thousand tons in 2024. Non-PSO fertilizer trade tonnage also decreased by 46.56%, from 347.93 thousand tons in 2024 to 185.92 thousand tons in 2025.

Profitabilitas Segmen Lain-lain

Laporan kinerja profitabilitas untuk Segmen Lainnya belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian kinerja profitabilitas disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Other Segment Profitability

The profitability performance report for the Other Segment does not include inter-segment eliminations. Details of the profitability performance are presented in the table below.

Kinerja Profitabilitas Segmen Lain-Lain, Periode 2024-2025
Other Segments Profitability Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Profit and Loss and Comprehensive Income					
Pendapatan Revenues					
Pendapatan Eksternal External Revenues	**1.061.594**	1.302.021	(240.427)	(18,47)	●
Pendapatan antar Segmen Inter-segment Revenues	**5.785.280**	4.397.883	1.387.397	31,55	●
Pendapatan Bersih Net Revenues	**6.846.874**	5.699.904	1.146.970	20,12	●
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	**(2.036.281)**	(2.783.144)	746.863	(26,84)	●
Beban Penjualan Cost of Sales	**(7.865)**	(15.351)	7.486	(48,77)	●
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	**(84.366)**	(1.558.300)	1.473.934	(94,59)	●
Pendapatan Lainnya – Bersih Other Income-Net	**73.578**	(12.239)	85.817	(701,18)	●
Pendapatan Keuangan Finance Income	**798.403**	1.058.028	(259.625)	(24,54)	●
Beban Keuangan Finance Costs	**(275.267)**	(384.390)	109.123	(28,39)	●
Laba sebelum Pajak Profit before Income Tax	**5.315.076**	2.004.508	3.310.568	165,16	●
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**(209.934)**	(130.964)	(78.970)	60,30	●
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Profit / (Loss) for The Year	**5.105.142**	1.873.544	3.231.598	172,49	●
Posisi Keuangan Finance Position					
Aset Segmen Assets Segment	**46.820.558**	47.681.994	(861.436)	(1,81)	●
Liabilitas Segmen Liabilities Segment	**5.448.079**	6.580.166	(1.132.087)	(17,20)	●
Pengeluaran Modal Capital Expenditures	**44.839**	373.037	(328.198)	(87,98)	●

Kinerja Profitabilitas Segmen Lain-Lain, Periode 2024-2025
Other Segments Profitability Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Profitabilitas Profitability					
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**74,56**	32,87	41,69		●
Imbal Balik Aset (%) Return on Assets (%)	**10,90**	3,93	6,97		●

Segmen Lainnya pada tahun 2025 mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp6,85 triliun, mengalami kenaikan 20,12% atau setara dengan Rp1,15 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,70 triliun. Kenaikan ini utamanya dikontribusikan pada pendapatan antar-segmen yang naik 31,55% dibandingkan tahun 2024.

The Other Segment recorded net revenue of Rp6.85 trillion in 2025, a 20.12% increase, or Rp1.15 trillion, compared to Rp5.70 trillion in 2024. This increase was mainly due to inter-segment revenue, which rose 31.55% compared to 2024.

Rencana Pengembangan Tahun 2026

Segmen Perdagangan Umum melalui PIN dan PIP akan berfokus pada diversifikasi produk dan perluasan jaringan distribusi, dan Segmen Jasa Logistik melalui PILOG yang akan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk optimalisasi pengapalan dan peningkatan layanan pengangkutan, serta melakukan peremajaan fasilitas penyimpanan.

Pada tahun 2026, Perusahaan akan memfokuskan pengembangan Segmen Lain-lain pada pelaksanaan *streamlining* lini bisnis Pupuk Indonesia Group, yaitu penyederhanaan dalam ekosistem Pupuk Indonesia Group yang meliputi seluruh Anak Perusahaan dan entitas asosiasi dengan skema *subholding* dan anggota *subholding*. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing bisnis Perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta ekspansi ke sektor industri strategis lainnya.

2026 Development Plan

The General Trading Segment, through PIN and PIP, will focus on product diversification and distribution network expansion. The Logistics Services Segment, through PILOG, will collaborate with strategic partners to optimize shipping and improve transportation services, as well as rejuvenate storage facilities.

In 2026, the Company will focus the Other Segment development on streamlining the Pupuk Indonesia Group's business lines, including simplifying the Pupuk Indonesia Group ecosystem, covering all subsidiaries and associated entities with a subholding scheme and subholding members. This strategy aims to improve the efficiency, effectiveness, and competitiveness of the Company's business in supporting national food security and expanding into other strategic industrial sectors.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects



Kebijakan Pemasaran

PTPI telah memiliki kebijakan di bidang pemasaran, yaitu:
1. Sentralisasi bidang pemasaran dimulai bulan Januari 2021 yang meliputi fungsi penjualan PSO, penjualan komersil, logistik, dan strategi pemasaran.
2. Sentralisasi mendorong optimalisasi dan harmonisasi produk, pendapatan, dan laba baik untuk PTPI maupun Anak Perusahaan.
3. Pembentukan Unit Project Management untuk merespons isu strategis perusahaan yang bersifat spesifik (SPM).
4. Prioritas pemenuhan kebutuhan produk:
   a. PSO sebagai pemenuhan penugasan dari Kementerian Pertanian.
   b. Ritel untuk memenuhi kebutuhan petani yang tidak diakomodir di sektor PSO.
   c. Korporasi/Industri dalam negeri.
   d. Ekspor.
5. Sinergi antar BUMN dan antar-Anak Perusahaan.

Marketing Policy

PTPI's marketing policy includes:
1. Centralizing the marketing sector began in January 2021, covering the functions of PSO sales, commercial sales, logistics, and marketing strategy.
2. Centralizing encourages optimization and harmonization of products, revenue, and profits for both PTPI and its subsidiaries.
3. Establishing a project management unit to address specific Company strategic issues (SPM).
4. Priority for fulfilling product needs:
   a. PSO as a fulfillment of assignments from the Ministry of Agriculture.
   b. Retail to meet farmers' needs not covered in the PSO sector.
   c. Domestic corporations/industry.
   d. Exports.
5. Synergy between state-owned enterprises and subsidiaries.

Strategi Pemasaran

Strategi Pemasaran pada tahun 2025 difokuskan untuk pemenuhan penugasan PSO sebagai prioritas utama guna mendukung program swasembada pangan dari Pemerintah.

Meningkatnya alokasi PSO menjadi 9,5 juta ton di tahun 2025 membutuhkan upaya tambahan untuk mencapai target. Beberapa inisiatif yang dilakukan Penjualan Regional adalah dengan mengidentifikasi Petani terdaftar E-RDKK yang belum melakukan penebusan serta mengadakan *event* Rembuk Tani dan Tebus Bersama untuk meningkatkan penebusan PSO.

Strategi selanjutnya adalah strategi *swing*, di mana setiap adanya selisih prognosa dan realisasi PSO pada periode tertentu, maka sisa prognosa PSO yang tidak terjual tersebut langsung dialihkan untuk sektor Non-PSO.

Marketing Strategy

The 2025 Marketing Strategy focused on fulfilling PSO assignments as a top priority to support the government's food self-sufficiency program.

Increasing the PSO allocation to 9.5 million tons in 2025 required additional efforts to achieve the target. Initiatives undertaken by Regional Sales include identified farmers registered with the E-RDKK (Early Harvesting and Reforestation) who had not yet redeemed their PSO and holding Farmer Consultation and Joint Redemption events to increase PSO redemption.

Another strategy was the swing strategy, whereby, whenever there is a discrepancy between the PSO forecast and actual PSO for a given period, the remaining unsold PSO forecast goods are immediately diverted to the Non-PSO sector.

Pangsa Pasar

Market Share

Produk Product	2025 (%) (1)	2024 (%) (2)	**Selisih (%)** Difference (1-2)	
Urea	**99,99**	99,97	0,02	●
NPK	**44,66**	41,69	2,97	●
Amonia	**63,71**	69,05	(5,34)	●

Pada skala nasional atas penjualan produk, Pupuk Indonesia Group menguasai peredaran produk Pupuk Urea mencapai 99,99%, sedangkan produk NPK dan Amonia masing-masing menguasai pangsa pasar sebesar 44,66% dan 63,71%.

On a national scale, Pupuk Indonesia Group controls 99.99% of urea fertilizer sales, while NPK and Amonia products hold 44.66% and 63.71% market share, respectively.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain

Implementation of National Strategic Projects or Other Assignments

Pada tahun 2025, Perusahaan melanjutkan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Papua Barat, sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pemerataan kapasitas produksi pupuk ke wilayah timur Indonesia. Kelanjutan proyek ini menegaskan komitmen Perusahaan dalam menjamin ketersediaan pupuk secara merata di seluruh Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional, khususnya melalui penguatan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan.

In 2025, the Company continued the development of the National Strategic Project (PSN) for the Fakfak Fertilizer Industrial Estate in West Papua, as a strategic step to strengthen national food security while encouraging equitable distribution of fertilizer production capacity across eastern Indonesia. The continuation of this project underscores the Company's commitment to ensuring equitable fertilizer availability throughout Indonesia and supporting regional economic growth, particularly through strengthening the agricultural sector as a key pillar of development.

Teknologi
Technology

Pabrik Factory	Teknologi Technology	Negara Pembuat Country of Manufacture
Amonia	KBR Purifier	Amerika Serikat USA
	Kellog	Amerika Serikat USA
	Topsoe	Denmark
Urea	TOYO-ACES21	Jepang Japan
	TOYO-ACES	Jepang Japan
	Stamicarbon	Belanda Netherlands
	Snamprogetti	Italia Italy
NPK	Chemical Reaction Granulation, INCRO	Spanyol Spain
	Chemical Reaction Granulation, Petrokimia Gresik	Indonesia
	Steam Granulation, Wuhan Haisingtech, SRICI	Cina China
	Steam Granulation, Petrokimia Gresik	Indonesia

Perusahaan berkomitmen memenuhi kebutuhan konsumen melalui peningkatan kapasitas produksi dengan membangun pabrik-pabrik baru berbasis teknologi mutakhir. Upaya ini diimplementasikan pada tiga pabrik amonia-urea terbaru, yaitu PSP-2B, PKT-5, dan PKG-1B, yang mengintegrasikan teknologi KBR *Purifier* dan TOYO ACES 21. Teknologi TOYO ACES 21 memberikan keunggulan kompetitif berupa penghematan energi yang signifikan, sehingga mampu meminimalkan jejak karbon (*carbon footprint*) serta limbah operasional dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, TOYO ACES 21 juga memiliki desain reaktor yang lebih ringkas, dengan demikian biaya operasional dan biaya investasi menjadi lebih efisien. Selaras dengan itu, pabrik NPK terbaru juga telah mengadopsi berbagai keunggulan teknis dari unit-unit pendahulunya.

The Company is committed to meeting consumer needs by increasing production capacity by building new factories based on cutting-edge technology. This effort is being carried out in three new ammonia-urea plants: PSP-2B, PKT-5, and PKG-1B, which integrate KBR Purifier and TOYO ACES 21 technology. TOYO ACES 21 technology provides a competitive advantage in the form of significant energy savings, thereby minimizing the carbon footprint and operational waste compared to previous generations. In addition, TOYO ACES 21 also features a more compact reactor design, resulting in more efficient operational and investment costs. Similarly, the new NPK plant has adopted technical advantages from its predecessors.

Perusahaan telah mengadopsi sistem digitalisasi dari pengembangan *Production Analytics Center* sebagai pusat kendali data yang mampu menyajikan kondisi operasional pabrik secara langsung *(real-time)*. Melalui sistem ini, manajemen dapat memantau seluruh aspek produksi, mulai dari ketersediaan stok hingga tingkat keamanan kerja secara akurat. Sistem ini juga dilengkapi fitur deteksi dini yang mampu mengidentifikasi keanehan pada mesin serta memprediksi sisa masa pakai peralatan. Dengan informasi tersebut, petugas dapat melakukan langkah pencegahan lebih awal untuk menghindari kerusakan mesin yang dapat menghentikan aktivitas produksi secara mendadak (*downtime*).

The Company has adopted a digitalization system by developing a Production Analytics Center as a data control center capable of presenting plant operational conditions in real time. Through this system, management will be able to accurately monitor all aspects of production, from stock availability to workplace safety levels. This system also features an early detection feature that can identify machine abnormalities and predict the remaining service life of equipment. With this information, personnel can take early preventative measures to avoid machine damage that could suddenly halt production activities (downtime).

Riset dan Inovasi
Research and Innovation



Penguatan fungsi riset menjadi salah satu fokus strategis Perusahaan dalam mendukung transformasi bisnis dan peningkatan daya saing. Melalui Kompartemen Indonesia Agrichemical Research Institute (IARI), peningkatan kompetensi dan kapabilitas keilmuan terus dilakukan untuk memperkaya wawasan di bidang industri pupuk, sistem pertanian, serta perkembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar dan arah kebijakan nasional.

Pada kegiatan penelitian, riset diposisikan sebagai pendorong utama dalam menjaga keberlanjutan kinerja usaha PTPI dan Pupuk Indonesia Group. Kegiatan penelitian dan pengembangan, baik yang dilaksanakan secara internal maupun melalui kolaborasi dengan mitra strategis, diarahkan untuk menghasilkan solusi inovatif yang responsif terhadap dinamika industri, perubahan regulasi, serta tuntutan efisiensi dan produktivitas.

Perusahaan meyakini bahwa inovasi berbasis riset memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan nilai tambah dan pembukaan peluang bisnis baru. Hal ini tercermin dari berbagai inisiatif riset yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan produk, tetapi juga pada penyempurnaan proses, model bisnis, serta dukungan kebijakan yang mendorong penguatan posisi kompetitif Grup.

Pelaksanaan riset dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dengan mengedepankan metodologi ilmiah yang akuntabel serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Fokus penelitian mencakup aspek bahan baku dan penunjang, proses dan teknologi produksi, inovasi produk, pengembangan pasar, hingga isu lingkungan dan keberlanjutan. Seluruh aktivitas tersebut dilaksanakan secara sinergis guna memastikan hasil riset selaras dengan kebutuhan bisnis dan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan Perusahaan.

Strengthening the research function is one of the Company's strategic focuses in supporting business transformation and increasing competitiveness. Through the Indonesia Agrichemical Research Institute Compartment (IARI), scientific competency and capability development are continuously being enhanced to enrich insights in the fertilizer industry, agricultural systems, and technological developments relevant to market needs and national policy directions.

In research activities, research is positioned as a key enabler in maintaining the sustainability of PTPI and the Pupuk Indonesia Group's business performance. Research and development activities, conducted internally and through collaboration with strategic partners, are directed at producing innovative solutions that respond to industry dynamics, regulatory changes, and demands for efficiency and productivity.

The Company believes that research-based innovation makes a real contribution to creating added value and opening up new business opportunities. This is reflected in the research initiatives that are oriented not only towards product development but also towards improving processes, business models, and supporting policies that strengthen the Group's competitive position.

Research is conducted in a structured and integrated manner, prioritizing accountable scientific methodology and supported by competent human capital in their respective fields. Research focuses on raw and supporting materials, production processes and technology, product innovation, market development, and environmental and sustainability issues. All activities are carried out synergistically to ensure research results align with business needs and provide optimal impact on the Company's growth.

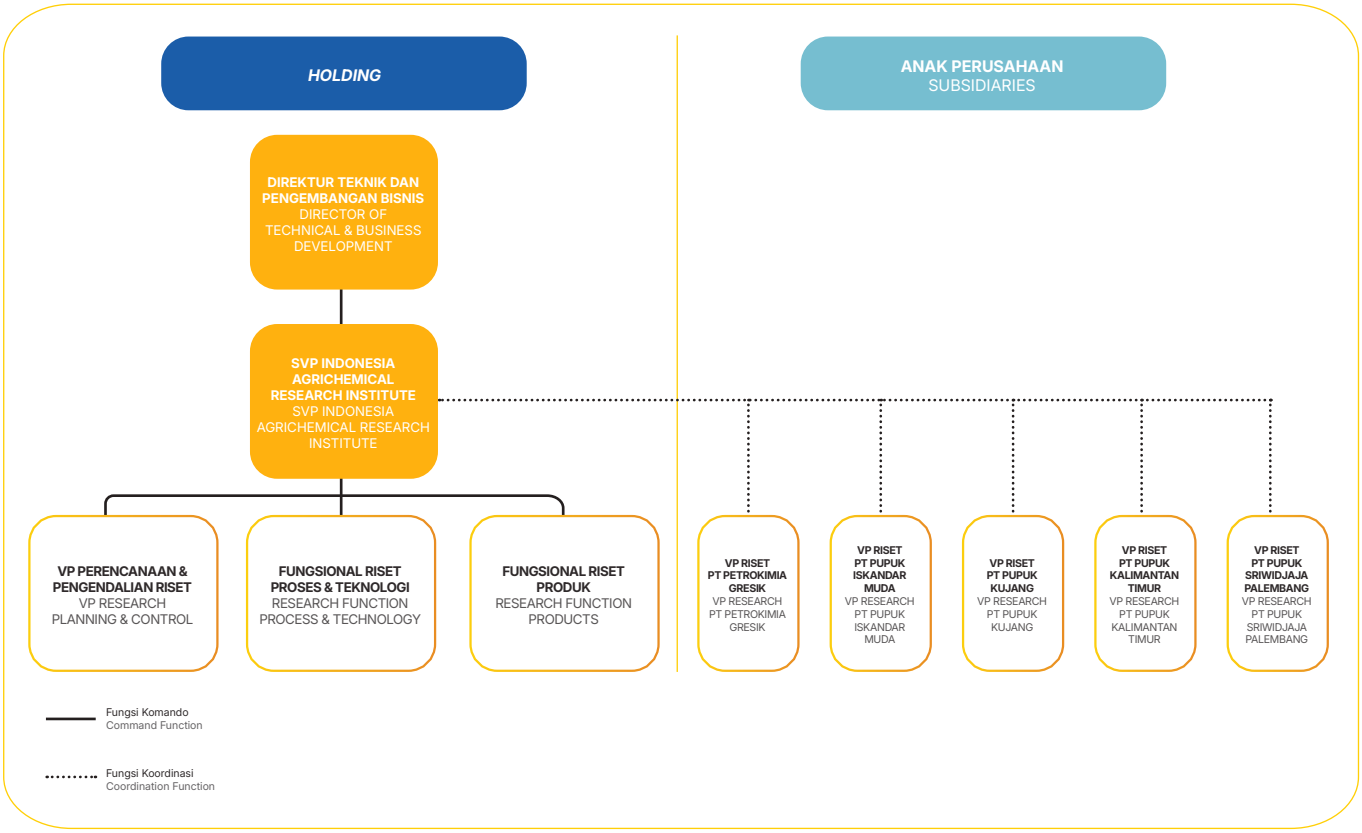
Struktur Organisasi Fungsi Riset

Riset Perusahaan dikelola oleh Kompartemen IARI yang bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis. IARI mengoordinasikan Departemen Perencanaan dan Pengendalian Riset serta unit-unit fungsional yang meliputi Riset Produk serta Riset Proses dan Teknologi, sehingga tercipta tata kelola riset yang terpadu dari perencanaan, pengendalian hingga implementasi.

Research Function Organizational Structure

The Company's research is managed by the IARI, which reports to the Director of Technical and Business Development. IARI coordinates the Research Planning and Control Department and functional units covering Product Research, Process Research, and Technology Research, thus creating integrated research governance from planning, control, and implementation.

Struktur Organisasi Fungsi Riset
Research Functions Organizational Structure



Struktur organisasi fungsi riset saat ini dipimpin Senior Vice President yang dijabat oleh Gita Bina Nugraha yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 053/A/HK/P28/SK/2024 tanggal 19 April 2024.

The research function's organizational structure is currently led by Gita Bina Nugraha, a Senior Vice President, who was appointed based on the Board of Directors' Decree No. 053/A/HK/P28/SK/2024 dated April 19, 2024.

Riset Anak Perusahaan Subsidiary Research	**Fokus Bidang/Keunggulan** Focus Field/Excellence	
	Umum General	**Spesifik** Specific
PT Petrokimia Gresik	• Produk dan layanan terkait komoditas pangan dan horti • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Products and services related to food and horticultural commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• *Precision Farming* Komoditas Pangan • Produk efisien P dan K • Pupuk organik • Pupuk untuk pertanian organik • Dekomposisi biomassa pertanian • Precision Farming of Food Commodities • Efficient P and K Products • Organic Fertilizers • Fertilizers for Organic Farming • Decomposition of Agricultural Biomass
PT Pupuk Kujang	• Produk dan layanan terkait komoditas pangan dan horti • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Products and services related to food and horticultural commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• *Advanced biofertilizer* • *Smart farming basis greenhouse* • *Controlled-release fertilizer* • *Water-soluble Fertilizer*

Riset Anak Perusahaan Subsidiary Research	Fokus Bidang/Keunggulan Focus Field/Excellence	
	Umum General	**Spesifik** Specific
PT Pupuk Kalimantan Timur	• Produk dan layanan terkait komoditas perkebunan • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Products and services related to plantation commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• *Precision Farming* Komoditas Sawit • *Blue Ammonia Technology* • Dekomposisi biomassa pertanian • Alternatif bahan bakar di Boiler Batubara (*Biogenic Fuel*) • Precision Farming Commodities Palm Oil • Blue Ammonia Technology • Agricultural biomass decomposition • Alternative fuel for coal-fired boilers (biogenic fuel)
PT Pupuk Iskandar Muda	• Implementasi produk dan layanan Pupuk Indonesia Group • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Implementation of Pupuk Indonesia Group products and services • Utilization of fertilizer industry waste	• *Precise Soil Nutrient Mapping* pada Lahan Padi • Pengembangan Formulasi Pupuk *Advanced* • Pupuk *Gen*-B (Nitrogen - Boron) • Pupuk NPS (Nitrogen, *Phosphor*, Sulfur) • Precise Soil Nutrient Mapping in Rice Fields • Development of Advanced Fertilizer Formulations • Gen-B Fertilizer (Nitrogen - Boron) • NPS Fertilizer (Nitrogen, Phosphorus, Sulfur)
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	• Produk dan layanan terkait komoditas perkebunan • Pemanfaatan limbah industri pupuk • Products and services related to plantation commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• *Precision Farming* Komoditas Tebu • *Nanofertilizer* • Biostimulan • Pupuk dengan Nitrogen *stabilizer* • Precision Farming for Sugarcane Commodities • Nanofertilizer • Biostimulant • Fertilizer with Nitrogen stabilizer

Fungsi Utama IARI

IARI berperan sebagai institusi riset nutrisi tanaman dan solusi pertanian berkelas dunia yang dapat memecahkan tantangan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan peran sebagai institusi riset nutrisi tanaman, IARI memiliki misi:

1. Menjadikan riset sebagai prioritas utama strategi bisnis dan inovasi Pupuk Indonesia Group.
2. Berperan aktif dalam peningkatan daya saing Pupuk Indonesia Group dalam lanskap industri agrokimia global.
3. Mengembangkan produk nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang unggul dan kompetitif berbasis kebutuhan pelanggan.
4. Membangun ekosistem R&D dan budaya inovasi.
5. Membangun saluran komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Dalam mewujudkan peran dan misi, ada beberapa inisiatif strategis yang menjadi sasaran utama dari IARI adalah:

1. Pengembangan *Framework* Pengelolaan R&D
   Menyusun dan menyempurnakan kerangka kerja R&D yang sistematis, terukur, dan selaras dengan arah strategis Perusahaan.
2. Pengelolaan R&D Terpusat
   Mengintegrasikan kegiatan riset dalam satu sistem koordinasi yang terpadu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
3. Penguatan *Knowledge Management System*
   Membangun dan mengelola sistem manajemen pengetahuan guna memastikan dokumentasi, transfer pengetahuan, dan pemanfaatan hasil riset secara optimal.
4. Standardisasi Kompetensi SDM dan Fasilitas R&D
   Menetapkan standar kompetensi peneliti dan fasilitas riset guna menjamin kualitas dan keberlanjutan inovasi.

IARI's Main Functions

IARI serves as a world-class plant nutrition and agricultural solutions research institution capable of sustainably solving national food security challenges. To realize its role as a plant nutrition research institution, IARI has the following missions:

1. Making research a top priority for Pupuk Indonesia Group's business strategy and innovation.
2. Playing an active role in enhancing Pupuk Indonesia Group's competitiveness in the global agrochemical industry.
3. Developing superior and competitive plant nutrition and agricultural solutions based on customer needs.
4. Building an R&D ecosystem and a culture of innovation.
5. Establishing communication channels with relevant stakeholders.

To realize its role and mission, IARI has several strategic initiatives that are the main targets:

1. Developing an R&D Management Framework
   Developing and refining an R&D framework that is systematic, measurable, and aligned with the Company's strategic direction.
2. Centralizing R&D Management
   Integrating research activities within a unified coordination system to increase effectiveness, efficiency, and accountability.
3. Strengthening the Knowledge Management System
   Establishing and managing a knowledge management system to ensure optimal documentation, knowledge transfer, and utilization of research results.
4. Standardizing HC Competencies and R&D Facilities
   Establishing standards for researcher competencies and facilities to ensure the quality and sustainability of innovation.

5. Penguatan *Communication Channeling*
   Membangun jalur komunikasi yang efektif dan kolaboratif dengan unit bisnis serta pemangku kepentingan untuk memastikan hasil riset relevan dan aplikatif.
6. Pengembangan Produk dan Bisnis Baru
   Mendorong hilirisasi hasil riset melalui pengembangan produk inovatif dan inisiatif *business development* untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan.

5. Strengthening Communication Channeling
   Establishing effective and collaborative communication channels with business units and stakeholders to ensure relevant and applicable research results.
6. Developing New Products and Businesses
   Encouraging the downstreaming of research results through innovative product development and business development initiatives to create sustainable added value.

SDM Riset

Pada tahun 2025, jumlah SDM riset sebanyak 53 personil, yang terbagi menjadi 10 personel di IARI (*holding*) dan 43 orang di *Research Lab* (Entitas Anak Perusahaan). SDM tersebut berasal dari berbagai bidang keilmuan, antara lain pertanian, teknik kimia, teknik mesin, manajemen, bioteknologi, dan keilmuan lainnya dengan jenjang pendidikan Sarjana hingga Doktor. Adapun tingkat pendidikan SDM riset diuraikan pada tabel di bawah ini.

Human Resources Research

By 2025, total HC research reached 53 personnel, divided into 10 personnel at IARI (holding) and 43 in the Research Lab (Subsidiary Entity). This HC comes from scientific fields, including agriculture, chemical engineering, mechanical engineering, management, biotechnology, and other disciplines, with educational levels ranging from Bachelor's to Doctoral degrees.

Bidang Keilmuan Scientific Fields	**Pendidikan** Education		
	Sarjana Bachelor	**Magister** Master	**Doktor** Doctoral
Holding			
Pertanian/Agroteknologi Agriculture/Agrotechnology	3	1	-
Teknik Kimia Chemical Engineering	1	1	-
Teknik Mesin Mechanical Engineering	-	-	1
Manajemen/Ekonomi Management/Economics	1	1	-
Biologi/Mikrobiologi/Bioteknologi Biology/Microbiology/Biotechnology	-	1	-
Research Lab			
Pertanian/Agroteknologi Agriculture/Agrotechnology	10	5	-
Sosial Ekonomi/Agribisnis Socio-Economic/Agribusiness	4	-	-
Kimia/Mesin/Teknik Chemistry/Mechanical/Engineering	7	1	-
Biologi/Mikrobiologi/Bioteknologi Biology/Microbiology/Biotechnology	3	3	-
Manajemen dan kompetensi lain Management and other competencies	4	6	-
Jumlah Total Personil Pupuk Indonesia Group Total Pupuk Indonesia Group Personnel	**33**	**19**	**1**

Program Peningkatan Kompetensi Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan keahlian dan pengetahuan tentang industri pupuk, pertanian, serta wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, Kompartemen IARI melaksanakan pengembangan kompetensi untuk terus meningkatkan peran riset dalam mendukung kinerja Perusahaan. Hal ini dilaksanakan baik secara *public training* maupun *inhouse training*. Berikut program peningkatan kompetensi yang dilaksanakan Kompartemen IARI sepanjang tahun 2025.

2025 Competency Development Program

To improve expertise and knowledge in the fertilizer and agricultural industries, as well as related scientific and technological insights, the IARI Compartment conducted competency development to continuously improve the role of research in supporting the Company's performance. This was implemented through public and in-house training. The following shows competency improvement program implemented by the IARI Compartment throughout 2025.

Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Narasumber Speaker	Waktu Pelaksanaan Implementation Date
Business Masterclass MLDP BOD-2 Pupuk Indonesia Group: "Mastering Global Business Savvy: Strategies for Retail Success in National and International Markets" Business Masterclass MLDP BOD-2 Pupuk Indonesia Group: "Mastering Global Business Savvy: Strategies for Retail Success in National and International Markets"	PT Daya Dimensi Indonesia	14-16 Januari 2025 January 14-16, 2025
Pelatihan Sistem Manajemen Terintegrasi Integrated Management System Training	PT TUV Rheinland Indonesia	11 Februari 2025 February 11, 2025
IFA Cultivating Tomorrow Conference 2025 - Innovation Meets Sustainability	International Fertilizer Association (IFA)	31 Maret-3 April 2025 March 31-April 3, 2025
Pelatihan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025 ISO 37001:2025 Anti-Bribery Management System (ABMS) Socialization Training	PT BSI Group Indonesia	17 April 2025 April 17, 2025
ARGUS Fertilizer Asia Conference 2025 Bali	Argus Media Singapore Group Pte Ltd	22-24 April 2025 April 22-24, 2025
Pupuk Indonesia Group Pelatihan Market Research for Product Development Pupuk Indonesia Group Market Research for Product Development Training	MarkPlus Institute	27-28 Mei 2025 May 27-28, 2025
Training Business Process Analysis, Design & Innovation	PT Serasan Cipta Abadi	15-17 Juli 2025 July 15-17, 2025
International Conference & Exhibition on Powder Technology Indonesia (ICePTi) 2025	Finder Unpad	4-5 Agustus 2025 August 4-5, 2025
Renewal Program Remote Pilot Certificate	Drone Pilot Academy	6-8 Oktober 2025 October 6-8, 2025
The 3rd International and Indonesia Carbon Capture Storage Forum (IICCS) 2025	IICS	7 Oktober 2025 October 7, 2025
Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 "Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy and Global Trade"	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	12-14 November 2025 November 12-14, 2025
Pelatihan Risk Management Essentials Risk Management Essentials Training	CRMS Indonesia	16-17 Desember 2025 December 16-17, 2025

Strategi Riset

Perusahaan memiliki acuan strategi dalam pengembangan riset yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Perusahaan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan produk berdasarkan kebutuhan petani yang disesuaikan dengan tren pasar yang prospektif.
2. Penelitian dan pengembangan produk yang bersifat *advanced* seperti *micronutrient*, *controlled release*, *water soluble*, *biostimulant*, dan lain-lain.
3. Pengembangan dan implementasi teknologi yang mendukung konsep *good agricultural practice* dan *precision farming*.
4. Pelaksanaan sentralisasi fungsi riset dengan membentuk *Center of Excellence* sesuai dengan pengalaman, kompetensi, serta potensi pasar Anak Perusahaan.
5. Kolaborasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan riset dengan pihak eksternal seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun mitra-mitra potensial lain yang sesuai dengan sasaran Perusahaan.

Research Strategy

The Company has a strategic framework for research development aimed at increasing corporate value, outlined as follows:

1. Product development based on farmer needs and tailored to prospective market trends.
2. Research and development of advanced products such as micronutrients, controlled-release fertilizers, water-soluble fertilizers, biostimulants, and others.
3. Development and implementation of technology that supports the concept of good agricultural practices and precision farming.
4. Centralization of research functions by establishing Centers of Excellence aligned with the experience, competencies, and market potential of Subsidiaries.
5. Active collaboration in conducting research activities with external parties such as research institutions, universities, and other potential partners aligned with the Company's objectives.

6. Sinergi dengan tim pemasaran maupun produksi untuk memperoleh *feedback* dan *market insight* yang diperlukan dalam inisiasi riset.
7. Pengembangan teknologi dalam upaya peningkatan efisiensi produksi maupun kualitas produk serta teknologi prospektif yang mendukung penurunan tingkat emisi karbon Perusahaan sesuai target NDC Pemerintah Indonesia.
8. Aktif memberikan rekomendasi maupun kajian terhadap regulasi/kebijakan kepada *stakeholder* maupun pihak-pihak yang terkait.

6. Synergy with marketing and production teams to gain feedback and market insights necessary for research initiation.
7. Technology development to improve production efficiency and product quality, as well as prospective technologies that support the Company's carbon emission reduction in line with the Indonesian Government's NDC targets.
8. Actively providing recommendations and reviews on regulations/policies to stakeholders and related parties.

Strategi Kolaborasi Riset PTPI
PTPI's Research Collaboration Strategy



Pencapaian Tahun 2025

Pada tahun 2025, IARI berhasil merealisasikan berbagai program riset dan inovasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta pengembangan teknologi berbasis data dan digital.

1. *Precise Soil Nutrient Mapping* (Agritech)
   Program pemetaan kadar hara lahan terealisasi seluas 103,2% dari target, *deployment* mencapai 107,0% dari target. Implementasi melalui PreciPalm, PreciRice, PreciCorn, dan PreciCane mendorong peningkatan produktivitas rata-rata 13,3%, melampaui target sebesar 5%.

2025 Achievements

In 2025, IARI successfully implemented research and innovation programs that supported increased agricultural productivity and the development of data-based and digital technologies.

1. Precise Soil Nutrient Mapping (Agritech)
   The land nutrient mapping program achieved 103.2% of its target, with deployment reaching 107.0% of the target. Implementation through PreciPalm, PreciRice, PreciCorn, and PreciCane resulted in an average productivity increase of 13.3%, exceeding the target by 5%.

2. Demplot dan Peningkatan Produktivitas Produk
   Perusahaan melaksanakan 20 titik demplot di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk pengujian enam produk pupuk, yaitu Nitrokal, Petroganik, Phosgreen, Bioripah, NPK + Advanced Biofertilizer, dan Phonska. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 12% dengan rasio R/C (Revenue/Cost) >1, yang menunjukkan potensi peningkatan nilai tambah bagi pengguna.
3. Keberhasilan Riset Strategis
   Produk Bionitrogen N-Fix, Urea Hydroxyapatite Nanohybrid, dan Soil Sensing Kit (SSK) mencapai skor Tingkat Kesiapan Riset (TKR) 5,00, melampaui target 4,00 berdasarkan validasi pakar independen dari BRIN. Evaluasi penerimaan pelanggan terhadap NPK + Advanced Biofertilizer dan PreciRice juga menunjukkan skor >4,00, mencerminkan tingkat penerimaan pasar yang baik.
4. Akurasi Model Geospasial Tanaman Pangan
   Pengembangan model geospasial untuk klasifikasi komoditas padi, jagung, dan tebu di delapan provinsi mencapai akurasi 88,02%, sementara pemodelan fase tanam di 133 titik di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi mencapai akurasi 86%, melampaui target >75%.
5. Pengembangan Digital Soil Nutrient Map & Tools
   IARI menyelesaikan fabrikasi *prototype* Soil Sensing Kit tipe *gun* dan *standing*. Hasil uji stabilisasi dan validasi menunjukkan tingkat akurasi parameter tanah yang tinggi, yaitu C-Organik 95%, pH 98%, N 77%, P 97%, dan K 93%, sehingga memperkuat pengembangan sistem pemetaan hara tanah berbasis teknologi digital.

Biaya Riset

Pada tahun 2025, Perusahaan telah merealisasikan biaya riset sebesar Rp23,2 miliar guna mendukung pelaksanaan program penelitian dan pengembangan, baik yang dijalankan secara internal maupun melalui kolaborasi dengan lembaga riset maupun perguruan tinggi. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp13,6 miliar dikelola *holding* dan Rp9,6 miliar dikelola Anak Perusahaan (*Research Lab*) sebagai bagian dari penguatan kapasitas inovasi di lingkungan Pupuk Indonesia Group.

2. Demplots and Product Productivity Improvement
   The Company conducted 20 demplots in West and East Java to test six fertilizer products: Nitrokal, Petroganik, Phosgreen, Bioripah, NPK + Advanced Biofertilizer, and Phonska. Test results showed a 12% increase in productivity with an R/C ratio of >1, indicating the potential for increased added value for users.

3. Strategic Research Success
   Bionitrogen N-Fix, Urea Hydroxyapatite Nanohybrid, and the Soil Sensing Kit (SSK) achieved a Research Readiness Level (RRR) score of 5.00, exceeding the target of 4.00 based on validation by independent experts from BRIN. Customer acceptance evaluations of NPK + Advanced Biofertilizer and PreciRice also scores above 4.00, reflecting strong market acceptance.
4. Accuracy of Food Crop Geospatial Models
   The development of geospatial models for the classification of rice, corn, and sugarcane commodities in eight provinces achieved 88.02% accuracy, while modeling the planting phase at 133 locations in Java, Sumatra, and Sulawesi achieved 86% accuracy, exceeding the target of >75%.
5. Development of Digital Soil Nutrient Maps & Tools
   IARI completed the fabrication of prototype gun-type and standing Soil Sensing Kits. Stabilization and validation test results demonstrated a high level of soil parameter accuracy, including 95% Organic Carbon, 98% pH, 77% N, 97% P, and 93% K, thus strengthening the development of a digital technology-based soil nutrient mapping system.

Research Costs

In 2025, the Company allocated Rp23.2 billion for research costs to support research and development programs, both internally and through collaborations with research institutions and universities. Of this total budget, Rp13.6 billion was managed by the holding company and Rp9.6 billion by its subsidiary (Research Lab) as part of strengthening the Group's innovation capacity.



Komersialisasi Riset

Kinerja hilirisasi inovasi pada tahun 2025 tercermin dari nilai komersialisasi produk hasil riset yang mencapai Rp1,4 triliun. Nilai tersebut berasal dari penjualan berbagai produk berbasis hasil penelitian, termasuk pupuk, produk hayati, serta inovasi lainnya yang telah memasuki tahap komersial dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perusahaan.

Utilisasi MIT – *Industrial Liaison Program* (MIT–ILP)

Tahun 2025, PTPI secara resmi menjalin kemitraan dengan Massachusetts Institute of Technology melalui program MIT – Industrial Liaison Program (MIT–ILP). Langkah strategis ini sebagai upaya memperkuat daya saing global melalui kolaborasi dengan ekosistem inovasi kelas dunia. Program ini memungkinkan terjalinnya *joint partnership* dengan para ahli dan peneliti MIT untuk mengakselerasi pengembangan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. Selain itu, partisipasi dalam MIT–ILP juga berperan dalam meningkatkan *brand awareness* PTPI di tingkat global, sekaligus membuka akses terhadap solusi *breakthrough* berstandar internasional guna mendukung transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Research Commercialization

The performance of downstream innovation in 2025 was reflected in the commercialization value of research products, which reached Rp1.4 trillion from the sale of research-based products, including fertilizers, biological products, and other innovations that entered the commercial stage and contributed to the Company's revenue.

Utilizing the MIT – Industrial Liaison Program (MIT–ILP)

In 2025, PTPI officially established a partnership with the Massachusetts Institute of Technology through the MIT – Industrial Liaison Program (MIT–ILP). This strategic step was an effort to strengthen global competitiveness through collaboration with a world-class innovation ecosystem. This program enables joint partnerships with MIT experts and researchers to accelerate the development of innovative solutions relevant to the Company's business needs. Participation in the MIT–ILP also plays a role in increasing PTPI's brand awareness globally, while also providing access to breakthrough solutions with international standards to support sustainable business transformation.



Melalui kemitraan ini, Perusahaan memperoleh berbagai manfaat strategis, antara lain:

1. Akses terhadap database teknologi mutakhir serta *expertise* dari MIT.
2. Partisipasi dalam *webinar* dan *conference* bertaraf internasional.
3. Fasilitas *executive briefing* untuk penguatan wawasan strategis manajemen.
4. *Customized business visit* guna eksplorasi peluang kolaborasi.
5. Program *internship* untuk pengembangan talenta.
6. Peluang kolaborasi riset untuk menghasilkan inovasi bernilai tambah tinggi.

Through this partnership, the Company gained strategic benefits, including:

1. Access to the latest technology database and expertise from MIT.
2. Participation in international-level webinars and conferences.
3. Executive briefings to strengthen management's strategic insights.
4. Customized business visits to explore collaboration opportunities.
5. Internship programs for talent development.
6. Opportunities for research collaboration to generate high-value-added innovations.

Penguatan Portofolio Produk dan Peningkatan Kesiapan Hilirisasi Inovasi

Sebagai bagian dari strategi penguatan portofolio dan peningkatan daya saing, Perusahaan melalui fungsi riset dan inovasi melanjutkan diversifikasi produk anorganik majemuk dengan kandungan kalium tinggi yang diposisikan sebagai produk pelengkap bagi segmen subsidi maupun non-subsidi. Produk ini dikembangkan untuk mendukung peningkatan rendemen dan kualitas hasil panen pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan. Pengujian multilokasi menunjukkan konsistensi peningkatan produktivitas dibandingkan praktik budidaya eksisting petani, disertai tingkat penerimaan pasar yang melampaui target internal berdasarkan kajian independen, sehingga memperkuat kesiapan produk untuk tahap komersialisasi lanjutan.

Sejalan dengan itu, Perusahaan juga memperkuat implementasi melalui kegiatan demplot dan evaluasi agronomis di berbagai wilayah guna memastikan manfaat teknis dan keekonomian produk. Hasil kajian menunjukkan peningkatan produktivitas dan kelayakan usaha tani yang lebih baik, sekaligus mempertegas nilai tambah produk di pasar. Di sisi riset, sejumlah produk strategis seperti Bionitrogen N-Fix, Urea Hydroxyapatite Nanohybrid, dan Soil Sensing Kit (SSK) mencatat capaian Tingkat Kesiapan Riset (TKR) yang melampaui target dan mencapai kategori optimal berdasarkan validasi independen oleh BRIN, sehingga memperkuat fondasi pengembangan teknologi dan hilirisasi inovasi secara berkelanjutan.

Akselerasi Pertanian Presisi melalui PreciX (*Precision Agriculture Platform*)

Dalam rangka mendukung agenda transformasi pertanian nasional sebagaimana tertuang dalam *Roadmap* Agtech 2034, Perusahaan menjalankan pengembangan teknologi pertanian presisi sebagai bagian dari kolaborasi inovasi riset. Penugasan implementasi *Precise Soil Nutrient Mapping* menjadi salah satu inisiatif strategis untuk mendorong peningkatan produktivitas komoditas utama, antara lain padi, jagung, tebu, dan kelapa sawit. Melalui pendekatan berbasis data dan teknologi, Perusahaan berkomitmen memperkuat sistem rekomendasi pemupukan yang lebih akurat dan terukur melalui PreciX yang dikembangkan oleh IARI bersama entitas Anak Perusahaan sebagai solusi pertanian presisi yang terintegrasi. *Platform* ini memanfaatkan teknologi satelit, *drone* multispektral, serta *proximal sensor* untuk menghasilkan analisis spasial kondisi hara tanah dan tanaman. Sistem dirancang adaptif terhadap karakteristik komoditas dan luasan lahan, dengan keluaran utama berupa informasi status hara dan rekomendasi pemupukan guna meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan keberlanjutan praktik budidaya.

Strengthening the Product Portfolio and Increasing Readiness for Downstream Innovation

As part of its strategy to strengthen its portfolio and increase competitiveness, the Company, through its research and innovation function, continued to diversify its compound inorganic products with high potassium content, which are positioned as complementary products for both subsidized and non-subsidized segments. These products were developed to support increased yield and quality of food crops, horticulture, and plantations. Multi-location testing demonstrated consistent productivity increases compared to existing farmer cultivation practices, together with market acceptance that exceeded internal targets based on independent studies, thus strengthening the product's readiness for further commercialization.

In line with this, the Company is also strengthening implementation through demplots and agronomic evaluations in regions to ensure the technical and economic benefits of the products. The results of these studies indicate increased productivity and improved agricultural feasibility, while also reinforces the added value of the products in the market. On the research side, several strategic products, such as Bionitrogen N-Fix, Urea Hydroxyapatite Nanohybrid, and the Soil Sensing Kit (SSK), have achieved Research Readiness Levels (TKR) that exceed targets and are categorized as optimal based on independent validation by BRIN, thus strengthening the foundation for sustainable technology development and innovation downstreaming.

Accelerating Precision Agriculture through PreciX (Precision Agriculture Platform)

To support the national agricultural transformation agenda as outlined in the Agtech 2034 Roadmap, the Company is developing precision agriculture technology as part of a collaborative research innovation. The implementation of Precise Soil Nutrient Mapping is a strategic initiative to boost productivity of key commodities, including rice, corn, sugarcane, and palm oil. Through a data-driven and technology-driven approach, the Company is committed to strengthening its fertilizer recommendation system for greater accuracy and measurability through PreciX, developed by the IARI and its subsidiaries, offers an integrated precision agriculture solution. This platform uses satellite technology, multispectral drones, and proximal sensors to generate spatial analyses of soil and crop nutrient conditions. The system is designed to adapt to commodity characteristics and land areas, with key outputs being nutrient status information and fertilizer recommendations to improve fertilizer use efficiency and the sustainability of cultivation practices.

Sepanjang tahun 2025, implementasi *Precise Soil Nutrient Mapping* mencatat realisasi pemetaan kadar hara lahan seluas 290.944,7 hektar atau 103,2% dari target 282.000 hektar, serta *deployment* seluas 30.173,1 hektar atau 107,0% dari target 28.200 hektar, dengan rerata peningkatan produktivitas sebesar 13,3% dari target 5%. *Platform* rekomendasi pemupukan telah diterapkan pada komoditas padi, tebu, jagung, dan kelapa sawit dengan cakupan luasan yang terus bertumbuh, serta realisasi implementasi lapangan yang memperlihatkan adopsi teknologi secara progresif. Capaian tersebut menegaskan efektivitas model pertanian presisi Perusahaan dalam mendukung optimalisasi produktivitas dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat lahan.

In 2025, the implementation of Precise Soil Nutrient Mapping resulted in the mapping of nutrient levels in 290,944.7 hectares of land, or 103.2% of the target of 282,000 hectares, and deployment on 30,173.1 hectares, or 107.0% of the target of 28,200 hectares. This resulted in an average productivity increase of 13.3%, compared to the target of 5%. The fertilizer recommendation platform has been implemented for rice, sugarcane, corn, and oil palm, with growing coverage, and field implementation demonstrating progressive technology adoption. These achievements underscore the effectiveness of the Company's precision agriculture model in supporting productivity optimization and data-driven decision-making at the farm level.

Sistem Klasifikasi Tanaman Berbasis Geospasial

Dalam mendukung mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan nasional, PTPI senantiasa berupaya meningkatkan akurasi distribusi dan efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi. Prinsip 7T, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.

Geospatial-Based Plant Classification System

In support of the Government of the Republic of Indonesia's mandate to maintain national food security, PTPI continuously endeavors to improve the distribution accuracy and effectiveness of subsidized fertilizer use. The 7T Principle, are the main foundation for implementing subsidized fertilizer distribution.

Peta Komoditas Skema Klasifikasi Kelas Bertahap
Commodity Map: Gradual Classification Scheme



Sebagai bagian dari penguatan tata kelola distribusi pupuk dan peningkatan akurasi rekomendasi pemupukan, PTPI pada tahun 2025 telah mengimplementasikan *Platform* Soil Nutrient Map berbasis WebGIS hingga tingkat kelurahan/desa dengan cakupan awal Pulau Jawa (*ready to deploy*). *Platform* ini memanfaatkan peta dasar unsur hara tanah nasional serta mengintegrasikan data uji laboratorium, mobil uji tanah, dan model prediksi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dan *remote sensing*, dengan variabel utama Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), dan Karbon Organik (C-Organik). Integrasi dan transformasi data tersebut menghasilkan standarisasi rekomendasi pemupukan yang lebih presisi per

As part of strengthening fertilizer distribution governance and improving the accuracy of fertilizer recommendations, PTPI implemented a WebGIS-based Soil Nutrient Map Platform down to the sub-district/village level in 2025, with initial coverage of Java Island (ready to deploy). This platform uses the national soil nutrient basemap and integrates laboratory test data, soil test vehicles, and predictive models based on Artificial Intelligence (AI) and remote sensing, with the main variables being Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), and Organic Carbon (C-Organic). This data integration and transformation results in more precise standardization of fertilizer recommendations per region, supports

wilayah, mendukung peningkatan akurasi alokasi pupuk nasional, serta memperkuat dukungan agronomis bagi tim lapangan dalam mendampingi petani.

Rencana Riset 2026

Sejalan dengan agenda transformasi dan penguatan daya saing Perusahaan, arah strategis riset tahun 2026 disusun untuk memastikan kesinambungan inovasi yang berdampak langsung terhadap kinerja operasional dan pertumbuhan bisnis. Perencanaan riset difokuskan pada pengembangan teknologi pertanian presisi, percepatan hilirisasi inovasi, optimalisasi proses produksi, serta penguatan aspek keberlanjutan dan kemitraan strategis.

Rencana tersebut dirancang secara terintegrasi dengan prioritas RKAP dan kebutuhan bisnis Grup, sehingga setiap inisiatif riset tidak hanya menghasilkan keluaran ilmiah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang terukur bagi produktivitas pertanian, efisiensi proses, dan penguatan posisi kompetitif Perusahaan. Adapun fokus program riset tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

increased accuracy of national fertilizer allocation, and strengthens agronomic support for field teams in assisting farmers.

2026 Research Plan

In line with the Company's transformation and competitiveness strengthening agenda, the strategic research direction for 2026 has been designed to ensure the continuity of innovations that directly impact operational performance and business growth. Research planning focuses on the development of precision agriculture technology, accelerating innovation downstreaming, optimizing production processes, and strengthening sustainability and strategic partnerships.

The plan is designed in an integrated manner with the Group's RKAP priorities and business needs, ensuring that each research initiative not only produces scientific output but also provides measurable added value for agricultural productivity, process efficiency, and strengthening the Company's competitive position. The focus of the 2026 research program is shown in the following table.

No	Program Kerja Work Program	Rincian Program Program Details	Keterangan Description
1	Transformasi Pertanian Cerdas Smart Agricultural Transformation	Agritech (*Precision*): Integrasi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi input. Agritech (Precision): Integration of digital technology to increase land productivity and input efficiency.	• Integrasi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi input pertanian. • Geospasial: Pemanfaatan data spasial untuk pemetaan tanam sebagai dasar rekomendasi pemupukan presisi. • Integration of digital technology to increase land productivity and agricultural input efficiency. • Geospatial: Utilizing spatial data for crop mapping as the basis for precision fertilizer recommendations.
2	Strategi Hilirisasi Teknologi Technology Downstreaming Strategy	• *Proof of Concepts* & Implementasi Teknologi Pertanian • Evaluasi Pasar Produk Hasil Riset • Proof of Concepts & Implementation of Agricultural Technology • Market Evaluation of Research Products	• Validasi teknologi riset hingga siap diterapkan di lapangan. • Memastikan inovasi riset layak pasar dan bernilai bisnis. • Validating research technology until it is ready for field implementation. • Ensuring research innovations are market-worthy and have commercial value.
3	Optimalisasi Teknologi Produksi Production Technology Optimization	• *Online Quality Check Monitoring* NPK • Optimisasi Proses Teknologi Pabrik • Online Quality Check and NPK Monitoring • Optimization of Factory Technology Processes	• Monitoring kualitas NPK secara real-time untuk menjaga mutu produk dan efisiensi produksi. • Fokus peningkatan efisiensi proses produksi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan output. • Real-time monitoring of NPK quality to maintain product quality and production efficiency. • Focusing on improving production process efficiency to reduce costs and increase output.
4	Indeks Keberlanjutan & Kemitraan Strategis Sustainability Index & Strategic Partnerships	• Indeks Pertanian Berkelanjutan • MIT-ILP: Kemitraan strategis global • Sustainable Agriculture Index • MIT-ILP: Global Strategic Partnership	• Pengembangan indikator keberlanjutan untuk mendukung kebijakan pupuk. • Penguatan tata kelola riset Pupuk Indonesia Group dari hulu ke hilir untuk meningkatkan dampak hasil riset terhadap bisnis. • Developing sustainability indicators to support fertilizer policies. • Strengthening Pupuk Indonesia Group research governance from upstream to downstream to increase the impact of research results on the business.

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

Uraian kinerja keuangan PTPI pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC). Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal yang berlaku.

PTPI's financial performance description in this annual report refers to the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2025, and December 31, 2024, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC). The Company's Consolidated Financial Statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK"), which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants and applicable capital market regulations.

Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Aset Assets					
Jumlah Aset Total Assets	**150.182.825**	139.296.655	10.886.170	7,82	●
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**46.725.290**	39.935.929	6.789.361	17,00	●
Jumlah Ekuitas Total Equity	**103.457.535**	99.360.726	4.096.809	4,12	●
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**150.182.825**	139.296.655	10.886.170	7,82	●

Aset
Assets

Jumlah Aset
Total Asset

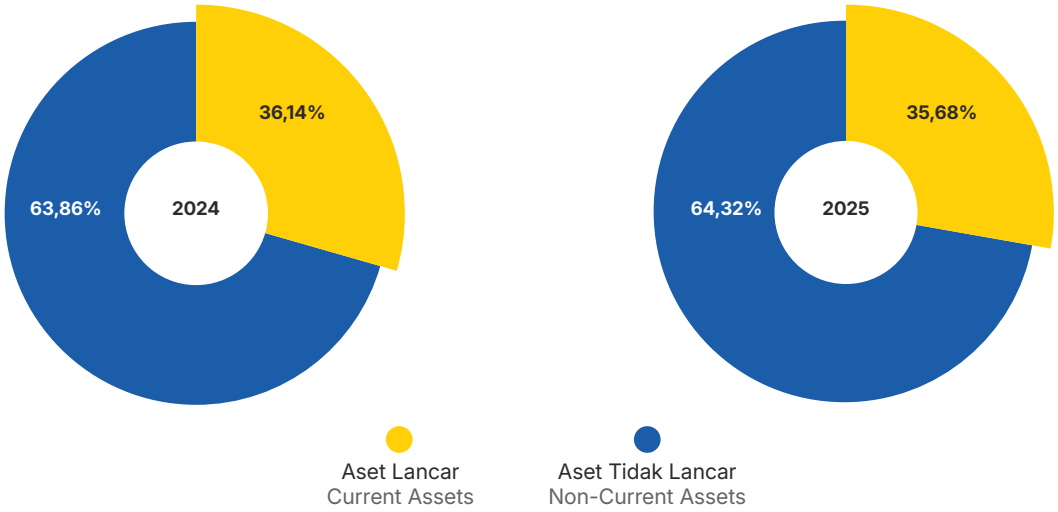
Jumlah aset Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp150,18 triliun, meningkat 7,82% dibandingkan jumlah aset tahun 2024 sebesar Rp139,30 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2021-2025, aset Perusahaan mengalami pertumbuhan 3,17%.
The Company's total assets in 2025 reached Rp150.18 trillion, a 7.82% increase compared to Rp139.30 trillion in 2024. At the Compound Annual Growth Rate (CAGR) from 2021 to 2025, the Company's assets grew by 3.17%.

Periode 2021-2025
(Rp-juta) | (Rp-million)



Pos Akun Account	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Aset Lancar Current Assets	**53.583.702**	**35,68**	50.343.800	36,14	3.239.902	6,44	●
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	**96.599.123**	**64,32**	88.952.855	63,86	7.646.268	8,60	●
Jumlah Aset Total Assets	**150.182.825**	**100,00**	**139.296.655**	**100,00**	**10.886.170**	**7,82**	●

Komposisi Aset Konsolidasian, Periode 2024-2025
Consolidated Asset Composition, 2024-2025



Perusahaan membukukan nilai aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp150,18 triliun, meningkat 7,82% atau setara dengan Rp10,89 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp139,30 triliun. Kenaikan ini disebabkan kenaikan piutang subsidi dari pemerintah Indonesia sebesar Rp10,03 triliun dan kenaikan aset tetap sebesar Rp4,88 triliun, sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

The Company's assets reached Rp150.18 trillion as of December 31, 2025, an increase of 7.82%, or Rp10.89 trillion, compared to Rp139.30 trillion in 2024. This increase was due to an increase in subsidy receivables from the Indonesian government of Rp10.03 trillion and an increase in fixed assets of Rp4.88 trillion, as detailed below.

Aset Lancar

Current Assets

Kinerja Aset Lancar, Periode 2024-2025
Current Asset Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	**11.822.634**	17.278.272	(5.455.638)	(31,58)	●
Piutang Usaha Trade Receivables	**2.313.876**	2.450.699	(136.823)	(5,58)	●
Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia Subsidy Receivables from the Government of Indonesia	**11.224.770**	1.165.380	10.059.390	863,19	●
Piutang Subsidi yang Belum Ditagih Unbilled Subsidy Receivables	**912.589**	930.933	(18.344)	(1,97)	●
Piutang Lainnya Other Receivables	**188.196**	78.488	109.708	139,78	●

Kinerja Aset Lancar, Periode 2024-2025
Current Asset Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi-dari Pelanggan Construction Contract Work in Progress-due from Customers	**192.643**	369.944	(177.301)	(47,93)	●
Persediaan Inventories	**13.970.264**	13.720.295	249.969	1,82	●
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Advances and Prepayments	**1.111.136**	392.294	718.842	183,24	●
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	**602.876**	812.897	(210.021)	(25,84)	●
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	**11.244.718**	13.144.598	(1.899.880)	(14,45)	●
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**53.583.702**	**50.343.800**	**3.239.902**	**6,44**	●

Aset Lancar Perusahaan pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp53,58 triliun, mengalami kenaikan 6,44% atau setara dengan Rp3,24 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp50,34 triliun. Kenaikan Aset Lancar terutama disebabkan kenaikan nilai piutang subsidi dari pemerintah Indonesia sebesar Rp10,06 triliun dikarenakan belum dibayarnya tagihan atas piutang subsidi periode bulan November dan Desember tahun 2025. Hal ini juga tercermin pada penurunan nilai kas dan setara kas sebesar Rp5,46 triliun dibandingkan tahun 2024. Piutang subsidi yang belum dibayarkan pemerintah menyebabkan terhambatnya pemasukan kas Perusahaan pada tahun 2025.

The Company's current assets in 2025 reached Rp53.58 trillion, a 6.44% increase, or Rp3.24 trillion, compared to Rp50.34 trillion in 2024. The increase in current assets was primarily due to a rise in the value of subsidy receivables from the Indonesian government of Rp10.06 trillion, resulting from the non-payment of invoices for subsidy receivables for the months of November and December 2025. This was also reflected in a decrease in cash and cash equivalents of Rp5.46 trillion compared to 2024. Unpaid subsidy receivables from the government hampered the Company's cash flow in 2025.

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas merupakan salah satu komponen terbesar dalam aset lancar, dengan kontribusi sebesar 22,06% terhadap Aset Lancar Perusahaan. Jumlah Kas dan Setara Kas Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp11,82 triliun, mengalami penurunan 31,58% atau setara dengan Rp5,46 triliun dibandingkan Kas dan Setara Kas tahun 2024 sebesar Rp17,28 triliun. Penurunan Kas dan Setara Kas terutama disebabkan belum diterimanya pembayaran atas tagihan piutang subsidi kepada pemerintah untuk periode November dan Desember 2025, serta meningkatnya pembayaran kepada pemasok seiring dengan tingginya harga bahan baku di tahun 2025.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are one of the largest components of current assets, contributing 22.06% to the Company's current assets. The Company's cash and cash equivalents reached Rp11.82 trillion in 2025, a 31.58% decrease, or Rp5.46 trillion, compared to Rp17.28 trillion in 2024. Mainly due to the unpaid subsidy receivables to the government for the November and December 2025 periods, as well as increased payments to suppliers due to high raw material prices in 2025.

Piutang Usaha

Piutang Usaha merupakan piutang usaha setelah dikurangi cadangan penurunan nilai. Pada tahun 2025, Piutang Usaha tercatat sebesar Rp2,31 triliun, mengalami penurunan 5,58% atau setara dengan Rp136,82 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,45 triliun. Hal ini sejalan dengan upaya Perusahaan yang telah mengoptimalkan proses penagihan piutang usaha sehingga saldo piutang usaha yang masih *outstanding* dapat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pupuk Indonesia Group menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Trade Receivables

Trade Receivables represents accounts receivable after deducting allowances for impairment losses. In 2025, Trade Receivables reached Rp2.31 trillion, a 5.58% decrease, or Rp136.82 billion, compared to Rp2.45 trillion in 2024. This was in line with the Company's efforts to optimize the collection process for accounts receivables, resulting in a decrease in the outstanding balance of accounts receivables compared to the previous year.

Pupuk Indonesia Group applies a lifetime allowance for expected losses to all trade receivables. To measure expected credit losses, trade receivable are grouped based on similar credit risk characteristics and maturity dates.

Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia

Piutang Subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk bersubsidi. Pada tahun 2025, penjualan pupuk bersubsidi terdiri dari 4 jenis pupuk, yaitu Urea, NPK, ZA dan Organik. Bagian lancar Piutang Subsidi Perusahaan tahun 2025 sebesar Rp11,22 triliun, mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang mencapai 863,19% atau setara dengan Rp10,06 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,17 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan belum dibayarkannya tagihan atas piutang subsidi oleh pemerintah terutama untuk periode bulan November dan Desember tahun 2025, sedangkan pembayaran piutang subsidi tahun 2024 relatif lebih lancar.

Piutang Subsidi yang Belum Ditagih

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk bersubsidi ke distributor namun belum tersalurkan ke petani. Piutang ini akan diakui sebagai piutang subsidi pada periode dimana pupuk bersubsidi tersalurkan ke petani. Piutang Subsidi yang Belum Ditagih tahun 2025 sebesar Rp912,59 miliar, mengalami penurunan 1,97% atau setara dengan Rp18,34 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp930,93 miliar. Penurunan ini disebabkan belum dilakukannya penagihan subsidi kepada Pemerintah untuk periode bulan Desember 2025 sehingga masih tercatat di Laporan Keuangan piutang subsidi yang belum ditagih.

Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang yang ditagihkan atas kegiatan diluar bisnis utama Perusahaan (piutang non-usaha). Piutang Lainnya tahun 2025 sebesar Rp188,20 miliar, mengalami kenaikan 139,78% atau setara dengan Rp109,71 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp78,49 miliar. Kenaikan ini utamanya dikontribusikan kenaikan pada piutang lainnya pihak ketiga sebesar Rp116,72 miliar.

Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi-dari Pelanggan

Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi-dari Pelanggan adalah bagian dari kontrak aset yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nilai pekerjaan tersebut pada tahun 2025 sebesar Rp192,64 miliar, mengalami penurunan 47,93% atau setara dengan Rp177,30 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp369,94 miliar.

Persediaan

Nilai persediaan Perusahaan tahun 2025 sebesar Rp13,97 triliun, mengalami kenaikan 1,82% atau setara dengan Rp249,97 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13,72 triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan meningkatnya persediaan barang dalam perjalanan atas pembelian impor bahan baku.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka tahun 2025 sebesar Rp1,11 triliun, mengalami kenaikan 183,24% atau setara dengan Rp718,84 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp392,29 miliar. Kenaikan yang cukup signifikan ini utamanya disebabkan meningkatnya biaya kontrak dibayar dimuka atas transaksi pembelian gas alam.

Subsidy Receivables from the Indonesian Government

Subsidy Receivables represent the balance of subsidized receivables from the Indonesian Government for the distribution of subsidized fertilizer. In 2025, subsidized fertilizer sales consisted of four types: urea, NPK, ZA and organic fertilizer. The Company's current portion of Subsidy Receivables in 2025 was Rp11.22 trillion, a significant increase of 863.19%, or Rp10.06 trillion, compared to Rp1.17 trillion in 2024. This increase was mainly due to unpaid bills for subsidy receivables from the government, particularly for the months of November and December 2025, while payments for subsidy receivables in 2024 were relatively smooth.

Uncollected Subsidy Receivables

Uncollected subsidy receivables represent revenue from the sales of subsidized fertilizer to distributors that have not yet been distributed to farmers. These receivables are recognized as subsidy receivables during the period when the subsidized fertilizer is distributed to farmers. Uncollected Subsidy Receivables in 2025 reached Rp912.59 billion, a decrease of 1.97%, or Rp18.34 billion, compared to Rp930.93 billion in 2024. This decrease was due to the uncollected subsidies from the Government during the December 2025 period, which were still recorded in the Financial Statements as uncollected subsidy receivables.

Other Receivables

Other Receivables represent receivables collected for activities outside the Company's core business (non-trade receivables). Other Receivables in 2025 reached Rp188.20 billion, an increase of 139.78%, or Rp109.71 billion, compared to Rp78.49 billion in 2024. This increase was mainly due to an increase in other receivables from third parties of Rp116.72 billion.

Work in Progress on Construction Contracts from Customers

Work in Progress on Construction Contracts from Customers is part of the contract assets recognized in connection with revenue from contracts with customers. The value of this work in 2025 was Rp192.64 billion, a 47.93% decrease, or Rp177.30 billion, compared to Rp369.94 billion in 2024.

Inventories

The Company's inventories in 2025 reached Rp13.97 trillion, a 1.82% increase, or Rp249.97 billion, compared to Rp13.72 trillion in 2024. This increase was mainly due to increased inventory in transit from imported raw material purchases.

Advances and Prepaid Expenses

Advances and Prepaid Expenses in 2025 reached Rp1.11 trillion, a 183.24% increase, or Rp718.84 billion, compared to Rp392.29 billion in 2024. This significant increase was due to increased prepaid contract costs for natural gas purchase transactions.

Pajak Dibayar Dimuka

Pajak Dibayar Dimuka tahun 2025 sebesar Rp602,88 miliar, mengalami penurunan 25,84% atau setara dengan Rp210,02 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp812,90 miliar. Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan Pajak penghasilan badan (PPh badan).

Prepaid Taxes

Prepaid Taxes in 2025 amounted to Rp602.88 billion, a decrease of 25.84%, or Rp210.02 billion, compared to Rp812.90 billion in 2024. This decrease was due to the contribution of Value Added Tax (VAT).

Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya antara lain terdiri dari deposito berjangka lebih dari tiga bulan, aset keuangan, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Lancar Lainnya tahun 2025 sebesar Rp11,24 triliun, mengalami penurunan 14,45% atau setara dengan Rp1,90 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13,14 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan kas yang dibatasi penggunaannya.

Other Current Assets

Other Current Assets consist of time deposits outstanding for more than three months, financial assets, and restricted cash. Other Current Assets in 2025 reached Rp11.24 trillion, a 14.45% decrease, or Rp1.90 trillion, compared to Rp13.14 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in restricted cash.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Piutang Lainnya-Tidak Lancar Other Receivables-Non-current	**2.074**	18.462	(16.388)	(88,77)	●
Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia-Tidak Lancar Subsidy Receivables from the Government of Indonesia-Non- current	**419.242**	452.313	(33.071)	(7,31)	●
Pajak Dibayar Dimuka-Tidak Lancar Prepaid Taxes-Non-current	**1.314.343**	1.378.458	(64.115)	(4,65)	●
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	**2.285.095**	1.927.194	357.901	18,57	●
Properti Investasi Investment Properties	**3.965.449**	1.956.409	2.009.040	102,69	●
Aset Tetap Fixed Assets	**84.562.281**	79.680.596	4.881.685	6,13	●
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	**384.435**	273.360	111.075	40,63	●
Aset Imbalan Pascakerja Post-employment Benefits Assets	**695.330**	654.558	40.772	6,23	●
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	**2.970.874**	2.611.505	359.369	13,76	●
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**96.599.123**	**88.952.855**	**7.646.26**	**8,60**	●

Aset Tidak Lancar Perusahaan pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp96,60 triliun, mengalami kenaikan 8,60% atau setara dengan Rp7,65 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp88,95 triliun. Kenaikan Aset Lancar terutama dikontribusikan oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp4,88 triliun dan kenaikan properti investasi sebesar Rp2,01 triliun.

The Company's Non-Current Assets reached Rp96.60 trillion in 2025, an 8.60% increase, or Rp7.65 trillion, compared to Rp88.95 trillion in 2024. The increase in Current Assets was mainly due to an increase in fixed assets of Rp4.88 trillion and an increase in investment properties of Rp2.01 trillion.

Piutang Lainnya-Tidak Lancar

Piutang Lainnya-Tidak Lancar tahun 2025 sebesar Rp2,07 miliar, mengalami penurunan 88,77% atau setara dengan Rp16,39 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp18,46 miliar.

Other Receivables - Non-Current

Other Receivables - Non-Current in 2025 amounted to Rp2.07 billion, a decrease of 88.77%, or Rp16.39 billion, compared to Rp18.46 billion in 2024.

Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia-Tidak lancar

Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia-Tidak Lancar tahun 2025 sebesar Rp419,24 miliar, mengalami penurunan 7,31% atau setara dengan Rp33,07 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp452,31 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya penerimaan atas Kurang Bayar tahun 2020 yang bayarkan pada bulan Oktober 2025 sebesar Rp93,45 miliar.

Berdasarkan notulen rapat tertanggal 28 Januari 2026, piutang subsidi tahun penyaluran 2020 sudah dilakukan reviu atas penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi, dan sudah dilakukan penyampaian kepada BPK-RI melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut ("SIPTL"), yang saat ini masih menunggu tanggapan dari BPK-RI. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih menunggu laporan BPK-RI terkait hal ini. Oleh karena itu, manajemen menyajikan piutang subsidi tahun 2020 pada porsi tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Subsidy Receivables from the Government of Indonesia - Non-Current

Subsidy Receivables from the Government of Indonesia - Non-Current in 2025 reached Rp419.24 billion, a decrease of 7.31%, or Rp33.07 billion, compared to Rp452.31 billion in 2024. This decrease was due to receipt of Rp93.45 billion for 2020 underpayments, which were paid in October 2025.

Based on meeting minutes dated January 28, 2026, the 2020 subsidy receivables were reviewed for the distribution and inventory of subsidized fertilizer. This was submitted to BPK-RI through the Follow-up Monitoring Information System ("SIPTL"), and is currently awaiting a response from the BPK-RI. As of the completion date of these consolidated financial statements, management is still waiting for the BPK-RI's report on this matter. Therefore, management has presented the 2020 subsidy receivables as non-current as of December 31, 2025, and 2024.

Pajak Dibayar Dimuka-Tidak Lancar

Pajak Dibayar Dimuka-Tidak Lancar tahun 2025 sebesar Rp1,31 triliun, mengalami penurunan 4,65% atau setara dengan Rp64,12 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,38 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan Pajak penghasilan badan (PPh badan).

Prepaid Taxes - Non-Current

Prepaid Taxes - Non-Current in 2025 reached Rp1.31 trillion, a 4.65% decrease, or Rp64.12 billion, compared to Rp1.38 trillion in 2024. This decrease was manly due to a decrease in corporate income tax (PPh badan).

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas, di mana Pupuk Indonesia Group memiliki pengaruh signifikan, namun bukan pengendalian. Biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada Entitas Asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi Pupuk Indonesia Group pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi. Realisasi investasi tersebut pada tahun 2025 sebesar Rp2,29 triliun, mengalami kenaikan 18,57% atau setara dengan Rp537,90 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,93 triliun.

Investments in Associated Entities and Joint Ventures

Associated Entities includes all entities over which the Pupuk Indonesia Group has significant influence, but not control, typically through ownership of voting rights between 20% and 50%. Investments in Associated Entities are accounted for using the equity method. Under the equity method, investments are initially recorded at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of profits and losses. The Pupuk Indonesia Group's investments in Associated Entities also includes goodwill identified at the time of acquisition. The realized investment in 2025 was Rp2.29 trillion, an increase of 18.57%, or Rp537.90 billion, compared to Rp1.93 trillion in 2024.

Properti Investasi

Properti Investasi merupakan tanah, bangunan, dan prasarana yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh entitas di dalam Grup konsolidasian. Properti Investasi juga termasuk properti yang sedang dikonstruksi atau pembangunan untuk penggunaan di masa yang akan datang.

Properti Investasi tahun 2025 sebesar Rp3,97 triliun, mengalami kenaikan 102,69% atau setara dengan Rp2,01 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,96 triliun. Kenaikan ini utamanya merupakan kenaikan properti investasi berupa tanah di PKG yang naik Rp807 miliar dibandingkan tahun 2024.

Manajemen melakukan penilaian atas Properti Investasi secara berkala untuk memastikan ada tidaknya penurunan nilai permanen yang material.

Investment Properties

Investment Properties includes land, buildings, and infrastructure held for long-term rental or for capital appreciation, or both, and not occupied by entities within the Consolidated Group. Investment Properties also includes properties under construction or development for future use.

Investment Properties in 2025 amounted to Rp3.97 trillion, an increase of 102.69%, or Rp2.01 trillion, compared to Rp1.96 trillion in 2024. This increase was mainly due to an increase in investment properties, namely land in the PKG (Parking Plant), which increased by Rp807 billion compared to 2024.

Management periodically assesses Investment Properties to determine whether there is any material permanent impairment.

Aset Tetap

Aset Tetap Perusahaan tahun 2025 sebesar Rp84,56 triliun, mengalami kenaikan 6,13% atau setara dengan Rp4,88 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp79,68 triliun. Kenaikan ini terjadi sehubungan dengan adanya progres investasi pengembangan di Anak Perusahaan.

Fixed Assets

The Company's fixed assets in 2025 stood at Rp84.56 trillion, a 6.13% increase, or Rp4.88 trillion, compared to Rp79.68 trillion in 2024. This increase was due to progress in investment development in the subsidiaries.

Perkembangan Nilai Aset Tetap
Total Fixed Asset Development

Periode 2021-2025
(Rp-juta) | (Rp-million)



Aset Tetap terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, pabrik dan peralatan, mesin bengkel kerja, kendaraan dan alat berat, perlengkapan kantor dan rumah, kapal, lokomotif dan gerbong, aset penyangga, aset hak guna, serta aset dalam penyelesaian. Aset tetap dihitung berdasarkan biaya perolehannya dan dikurangi akumulasi penyusutan.

Fixed assets consist of land, buildings and infrastructure, plant and equipment, workshop machinery, vehicles and heavy equipment, office and home equipment, ships, locomotives and railcars, supporting assets, right-of-use assets, and assets in progress. Fixed assets are measured at cost minus accumulated depreciation.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan tahun 2025 sebesar Rp384,43 miliar, mengalami kenaikan 40,63% atau setara dengan Rp111,08 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp273,36 miliar. Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets in 2025 reached Rp384.43 billion, an increase of 40.63%, or Rp111.08 billion, compared to Rp273.36 billion in 2024. Deferred tax assets, including those arising from tax loss that can be carried forward and temporary differences, are recognized only when they are considered likely to be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits.

Aset Imbalan Pascakerja

Aset Imbalan Pascakerja tahun 2025 sebesar Rp695,33 miliar, mengalami kenaikan 6,23% atau setara dengan Rp40,77 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp654,56 miliar.

Post-Employment Benefit Assets

Post-Employment Benefit Assets in 2025 amounted to Rp695.33 billion, an increase of 6.23%, or Rp40.77 billion, compared to Rp654.56 billion in 2024.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp2,97 triliun, mengalami kenaikan 13,76% atau setara dengan Rp359,37 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,61 triliun. Kenaikan ini sejalan dengan perubahan fungsi dari aset tetap terkait, Pupuk Indonesia Group melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset tidak lancar lainnya.

Other Non-Current Assets

Other Non-Current Assets at the end of 2025 reached Rp2.97 trillion, an increase of 13.76%, or Rp359.37 billion, compared to Rp2.61 trillion in 2024. This increase was in line with the change in function of its fixed assets. Pupuk Indonesia Group reclassified these from fixed assets to other non-current assets.

Liabilitas

Liabilities

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

Jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp46,72 triliun, mengalami kenaikan 17,00% dibandingkan Jumlah Liabilitas tahun 2024 sebesar Rp39,94 triliun.
The Company's total liabilities in 2025 reached Rp46.72 trillion, an increase of 17,00% compared to Rp39.94 trillion in 2024.

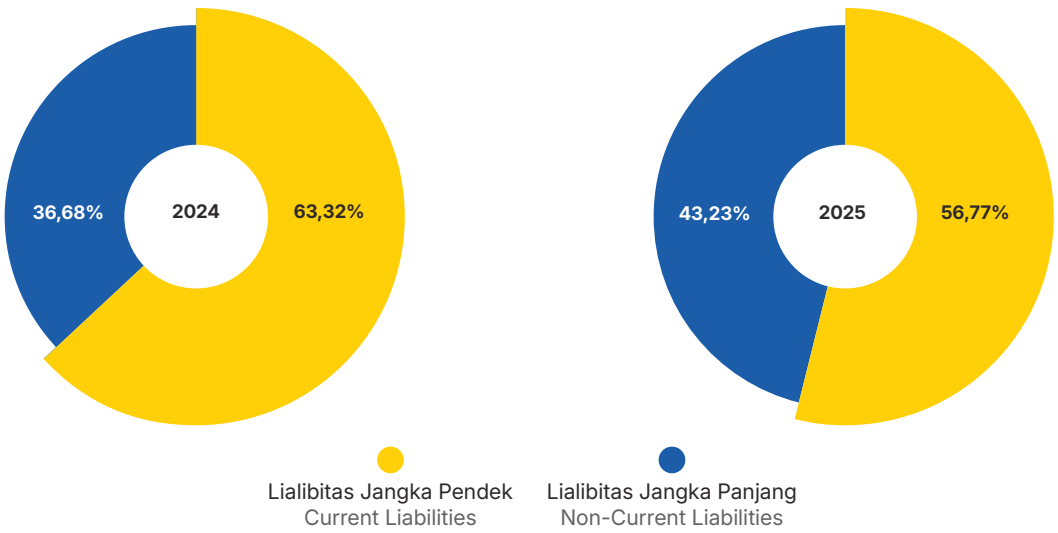
Periode 2021-2025
(Rp-juta) | (Rp-million)



Kinerja Liabilitas, Periode 2024-2025
Liability Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	**26.525.307**	**56,77**	25.286.189	63,32	1.239.118	4,90	●
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	**20.199.983**	**43,23**	14.649.740	36,68	5.550.243	37,89	●
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**46.725.290**	**100,00**	**39.935.929**	**100,00**	**6.789.361**	**17,00**	●

Komposisi Liabilitas Konsolidasian, Periode 2024-2025
Consolidated Liabilities Composition, 2024-2025



Pada tahun 2025, Perusahaan membukukan jumlah Liabilitas sebesar Rp46,73 triliun, mengalami kenaikan 17,00% atau setara dengan Rp6,79 triliun dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp39,94 triliun. Kenaikan Liabilitas ini terutama dikontribusikan Pinjaman Bank dan Lainnya-Jangka Panjang sebesar Rp14,24 triliun atau naik 78,36% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp7,99 triliun.

In 2025, the Company's total liabilities were Rp46.73 trillion, an increase of 17.00%, or Rp6.79 trillion, compared to Rp39.94 trillion in 2024. This increase in liabilities was mainly due to the contribution of long-term Bank and other loans of Rp14.24 trillion, which increased by 78.36% compared to Rp7.99 trillion in 2024.

Kinerja Liabilitas Perusahaan sepanjang tahun 2025 akan diuraikan secara rinci berikut ini.

The Company's liability performance in 2025 is shown below.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Kinerja Liabilitas Jangka Pendek, Periode 2024-2025
Current Liabilities Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pinjaman Bank Jangka Pendek Current Bank Loans	**2.529.628**	4.209.975	(1.680.347)	(39,91)	●
Utang Usaha Trade Payables	**3.406.268**	2.335.343	1.070.925	45,86	●
Kelebihan subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Excess of Subsidy Paid by the Government of Indonesia	**62.002**	1.435.708	(1.373.706)	(95,68)	●
Utang Bruto kepada Pelanggan untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi Amounts Due to Customers for Construction Contract Work	**3.538**	5.040	(1.502)	(29,80)	●
Utang Lainnya Other Payables	**1.676.961**	1.264.821	412.140	32,58	●
Utang Pajak Taxes Payables	**917.904**	618.793	299.111	48,34	●
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar Accrued Liabilities	**9.923.722**	9.543.703	380.019	3,98	●
Provisi Provisions	**1.573.629**	860.530	713.099	82,87	●
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Current Employment Benefit Liabilities	**2.635.226**	2.638.986	(3.760)	(0,14)	●
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: Current Maturities of Non-current Borrowings:					
Pinjaman Bank dan Lainnya Bank and Other Loans	**2.003.210**	1.376.976	626.234	45,48	●
Utang Obligasi Bonds Payable	**1.599.942**	857.394	742.548	86,61	●
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	**193.277**	138.920	54.357	39,13	●
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**26.525.307**	**25.286.189**	**1.239.118**	**4,90**	●

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan tahun 2025 sebesar Rp26,53 triliun, mengalami kenaikan 4,90% atau setara dengan Rp1,24 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp25,29 triliun. Kenaikan ini utamanya dikontribusikan dari Utang Usaha sebesar Rp3,41 triliun atau naik 45,86% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,34 triliun.

The Company's total short-term liabilities in 2025 reached Rp26.53 trillion, an increase of 4.90%, or Rp1.24 trillion, compared to Rp25.29 trillion in 2024. This increase was mainly due to Trade Payables reaching Rp3.41 trillion, a 45.86% increase compared to Rp2.34 trillion in 2024.

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman Bank Jangka Pendek merupakan salah satu komponen terbesar dalam liabilitas jangka pendek. Pinjaman Bank Jangka Pendek tahun 2025 sebesar Rp2,53 triliun, mengalami penurunan 39,91% atau setara dengan Rp1,68 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,21 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya pelunasan atas pinjaman jangka pendek seiring dengan dilakukannya penarikan pinjaman jangka panjang.

Utang Usaha

Jumlah Utang usaha Perusahaan tahun 2025 sebesar Rp3,41 triliun, mengalami kenaikan 45,86% atau setara dengan Rp1,07 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,34 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan terdapatnya kenaikan harga gas dan bahan baku NPK.

Kelebihan subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

Kelebihan subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan utang kepada Pemerintah Republik Indonesia yang timbul dari kelebihan penerimaan atas penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pupuk Indoneisa Group. Perusahaan membukukan adanya kelebihan subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tahun 2025 sebesar Rp62 miliar, mengalami penurunan 95,68% atau setara dengan Rp1,37 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,44 triliun. Penurunan ini terjadi karena dilakukannya pembayaran atas utang subsidi kepada pemerintah.

Utang Bruto kepada Pelanggan untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi

Pada tahun 2025, Utang Bruto Kepada Pelanggan Untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi sebesar Rp3,54 miliar, mengalami penurunan 29,80% atau setara dengan Rp1,50 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,04 miliar.

Utang Lainnya

Perusahaan membukukan Utang Lainnya hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp1,68 triliun, mengalami kenaikan 32,58% atau setara dengan Rp412,14 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,26 triliun. Kenaikan ini utamanya berasal dari meningkatnya pendapatan diterima dimuka.

Utang Pajak

Utang Pajak Perusahaan tahun 2025 sebesar Rp917,90 miliar, mengalami kenaikan 48,34% atau setara dengan Rp299,11 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp618,79 miliar. Kenaikan ini terjadi seiring kenaikan nilai PPh Badan Pasal 25/29 dan PPh Pasal 21.

Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Jumlah Liabilitas yang Masih Harus Dibayar tahun 2025 sebesar Rp9,92 triliun, mengalami kenaikan 3,98% atau setara dengan Rp380,02 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9,54 triliun. Kenaikan ini utamanya atas akrual biaya bahan baku non gas dan biaya proyek pembangunan Pusri-IIIB.

Provisi

Provisi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,57 triliun, mengalami kenaikan 82,87% atau setara dengan Rp713,10 miliar dibandingkan nilai Provisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp860,53 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Provisi kerugian terkait proyek RDMP JO.

Non-Current Bank Loans

Non-Current Bank Loans represents one of the largest components of Non-Current liabilities. Non-Current Bank Loans in 2025 amounted to Rp2.53 trillion, a decrease of 39.91%, or Rp1.68 trillion, compared to Rp4.21 trillion in 2024, due to the repayment of Non-Current loans together with the withdrawal of Non-Current loans.

Trade Payables

The Company's Trade Payables in 2025 reached Rp3.41 trillion, an increase of 45.86%, or Rp1.07 trillion, compared to Rp2.34 trillion in 2024. This increase was mainly due to increases in gas and NPK raw material prices.

Excess subsidy paid by the Government of the Republic of Indonesia

Excess subsidy paid by the Government of the Republic of Indonesia represents a debt to the Government of the Republic of Indonesia arising from excess revenue from subsidized fertilizer distribution by the Pupuk Indonesia Group. The Company's excess subsidy paid by the Government of the Republic of Indonesia in 2025 reached Rp62 billion, a 95.68% decrease, or Rp1.37 trillion, compared to Rp1.44 trillion in 2024. This decrease was due to subsidy payable to the government.

Gross Payables to Customers for Construction Contract Work

In 2025, Gross Payables to Customers for Construction Contract Work reached Rp3.54 billion, a 29.80% decrease, or Rp1.50 billion, compared to Rp5.04 billion in 2024.

Other Payables

The Company's Other Liabilities by the end of 2025 reached Rp1.68 trillion, a 32.58% increase, or Rp412.14 billion, compared to Rp1.26 trillion in 2024. This increase was mainly due to increased unearned revenue.

Taxes Payable

Corporate tax liabilities for 2025 reached Rp917.90 billion, a 48.34% increase, or Rp299.11 billion, compared to Rp618.79 billion in 2024. This increase was due to increases in Corporate Income Tax Article 25/29 and Income Tax Article 21.

Accrued Liabilities

Accrued Liabilities for 2025 reached Rp9.92 trillion, a 3.98% increase, or Rp380.02 billion, compared to Rp9.54 trillion in 2024. This increase was mainly due to accrued costs for non-gas raw materials and costs for the Pusri IIIB construction project.

Provisions

Provisions as of December 31, 2025, reached Rp1.57 trillion, an increase of 82.87%, or Rp713.10 billion, compared to Rp860.53 billion as of December 31, 2024. This increase was due to an increase in provisions for losses related to the RDMP JO project.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar manfaat kepada karyawan setelah purna jabatan atau berhenti bekerja. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek tahun 2025 sebesar Rp2,63 triliun, mengalami penurunan 0,14% atau setara dengan Rp3,76 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,64 triliun.

Current Employee Benefits Liabilities

Current Employee Benefits Liabilities represents the Company's obligation to pay benefits to employees upon retirement or termination of employment. Current Employee Benefits Liabilities in 2025 amounted to Rp2.63 trillion, a decrease of 0.14%, or Rp3.76 billion, compared to Rp2.64 trillion in 2024.

Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: Pinjaman Bank dan Lainnya

Bagian Lancar Pinjaman Bank dan Lainnya tahun 2025 sebesar Rp2,00 triliun, mengalami kenaikan 45,48% atau setara dengan Rp626,23 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,38 triliun.

Current Portion of Non-Current Liabilities: Bank Loans and Others

Current Portion of Bank Loans and Others in 2025 was Rp2.00 trillion, an increase of 45.48%, or Rp626.23 billion, compared to Rp1.38 trillion in 2024.

Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: Utang Obligasi

Jumlah Bagian Lancar Utang Obligasi Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,60 triliun, mengalami kenaikan 86,61% atau setara dengan Rp742,55 miliar dibandingkan Jumlah Bagian Lancar Utang Obligasi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp857,39 miliar. Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2026 terdapat jatuh tempo pembayaran Obligasi berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri B.

Current Portion of Long-Term Liabilities: Bonds Payable

The total current portion of Bonds Payable as of December 31, 2025, was Rp1.60 trillion, an increase of 86.61%, or Rp742.55 billion, compared to Rp857.39 billion as of December 31, 2024. This increase was due to the maturity of the Subordinated Bonds II Phase II Year 2021 Series B in 2026.

Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang: Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa tahun 2025 sebesar Rp193,28 miliar, mengalami kenaikan 39,13% atau setara dengan Rp54,36 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp138,92 miliar. Kenaikan ini disebabkan terdapatnya beberapa kontrak sewa pembiayaan akan habis dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Current Portion of Long-Term Liabilities: Lease Liabilities

Lease Liabilities in 2025 amounted to Rp193.28 billion, an increase of 39.13%, or Rp54.36 billion, compared to Rp138.92 billion in 2024, due to several finance lease contracts expiring in less than one year.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Kinerja Liabilitas Jangka Panjang, Periode 2024-2025
Non-Current Liabilities Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pinjaman Jangka Panjang: Non-Current Borrowings:					
Pinjaman Bank dan Lainnya Bank and Other Loans	14.244.908	7.986.445	6.258.463	78,36	●
Utang Obligasi Bonds Payable	1.224.701	2.823.534	(1.598.833)	(56,63)	●
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	179.797	115.362	64.435	55,85	●
Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-employment Benefits Liabilities	3.368.006	2.701.672	666.334	24,66	●
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	567.610	828.425	(260.815)	(31,48)	●
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya Other non-current liabilities	614.961	194.302	420.659	216,50	●
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**20.199.983**	**14.649.740**	**5.550.243**	**37,89**	●

Pada tahun 2025 Perusahaan membukukan Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan sebesar Rp20,20 triliun, mengalami kenaikan 37,89% atau setara dengan Rp5,55 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp14,65 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya pinjaman jangka panjang sebesar Rp6,26 triliun.

In 2025, the Company's Non-Current Liabilities reached Rp20.20 trillion, an increase of 37.89%, or Rp5.55 trillion, compared to Rp14.65 trillion in 2024, mainly due to an increase in Non-Current loans of Rp6.26 trillion.

Pinjaman Jangka Panjang: Pinjaman Bank dan Lainnya

Pinjaman Bank dan Lainnya Jangka Panjang yang merupakan komponen terbesar dalam Liabilitas Jangka Panjang, pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp14,24 triliun, mengalami kenaikan 78,36% atau setara dengan Rp6,26 triliun dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp7,99 triliun.

Non-Current Loans: Bank Loans and Others

Non-Current Bank Loans and Others, the largest component of Non-Current Liabilities, reached Rp14.24 trillion in 2025, an increase of 78.36%, or Rp6.26 trillion, compared to Rp 7.99 trillion in 2024.

Pinjaman Jangka Panjang-Setelah Dikurangi Bagian lancar: Utang Obligasi

Utang Obligasi tahun 2025 sebesar Rp1,22 triliun, mengalami penurunan 56,63% atau setara dengan Rp1,60 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,82 triliun. Penurunan ini disebabkan terdapatnya jatuh tempo pembayaran obligasi tahap II-seri B tahun 2021.

Non-Current Loans - Net of Current Component: Bonds Payable

Bonds Payable in 2025 amounted to Rp1.22 trillion, a decrease of 56.63%, or Rp1.60 trillion, compared to Rp2.82 trillion in 2024, due to the maturity of the Phase II-Series B bonds in 2021.

Pinjaman Jangka Panjang: Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa Jangka Panjang tahun 2025 sebesar Rp179,80 miliar, mengalami kenaikan 55,85% atau setara dengan Rp64,43 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp115,36 miliar. Kenaikan ini seiring kenaikan aset hak guna yang berasal dari penambahan kontrak sewa baru.

Non-Current Loans: Lease Liabilities

Non-Current Lease Liabilities in 2025 amounted to Rp179.80 billion, an increase of 55.85%, or Rp64.43 billion, compared to Rp115.36 billion in 2024. This increase was in line with the increase in right-of-use assets resulting from the addition of new lease contracts.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Liabilitas Imbalan Pascakerja hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp3,37 triliun, mengalami kenaikan 24,66% atau setara dengan Rp666,33 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,70 triliun. Hal ini disebabkan terdapatnya kenaikan biaya pesangon.

Post-Employment Benefit Liabilities

Post-Employment Benefit Liabilities until the end of 2025 amounted to Rp3.37 trillion, an increase of 24.66%, or Rp666.33 billion, compared to Rp2.70 trillion in 2024, due to an increase in severance payments.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Liabilitas Pajak Tangguhan hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp567,61 miliar, mengalami penurunan 31,48% atau setara dengan Rp260,81 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp828,42 miliar.

Deferred Tax Liabilities

Deferred Tax Liabilities represent the amount of income tax payable for future periods resulting from taxable temporary differences. Deferred Tax Liabilities as of the end of 2025 amounted to Rp567.61 billion, a decrease of 31.48%, or Rp260.81 billion, compared to Rp828.42 billion the previous year.

Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Liabilitas Tidak Lancar Lainnya tahun 2025 sebesar Rp614,96 miliar, mengalami kenaikan 216,50% atau setara dengan Rp420,66 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp194,30 miliar. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya liabilitas keuangan jangka panjang dan utang retensi jangka panjang.

Other Non-Current Liabilities

Other Non-Current Liabilities in 2025 amounted to Rp614.96 billion, an increase of 216.50%, or Rp420.66 billion, compared to Rp194.30 billion in 2024. This increase was due to increased long-term financial liabilities and long-term retention payables.

Ekuitas

Equity

Jumlah Ekuitas
Total Equity

Jumlah ekuitas Perusahaan tahun 2025 mencapai Rp103,46 triliun, meningkat 4,12% dibandingkan jumlah ekuitas tahun 2024 sebesar Rp99,36 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2021-2025, ekuitas Perusahaan mengalami pertumbuhan 7,54%

The Company's total equity in 2025 reached Rp103.46 trillion, an increase of 4.12% compared to Rp99.36 trillion in 2024. At the Compound Annual Growth Rate (CAGR) from 2021-2025, the Company's equity grew by 7.54%.

Periode 2021-2025
(Rp-juta) | (Rp-million)



Kinerja Ekuitas, Periode 2024-2025
Equity Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity					
Modal Saham Share Capital	**25.000.000**	25.000.000	-	-	-
Saldo Laba: Retained Earnings					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	**44.741.784**	39.018.434	5.723.350	14,67	●
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	**2.279.491**	5.412.512	(3.133.021)	(57,88)	●
Komponen Ekuitas Lainnya Other Components of Equity	**31.221.005**	29.656.092	1.564.913	5,28	●
Subjumlah Sub Total	**103.242.280**	99.087.038	4.155.242	4,19	●
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali Equity Attributable to Owners of the Parent Entity Non-controlling Interest					
Subjumlah Sub Total	**215.255**	273.688	(58.433)	(21,35)	●
Jumlah Ekuitas Total Equity	**103.457.535**	**99.360.726**	**4.096.809**	**4,12**	●

Kinerja Ekuitas dipengaruhi oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang terdiri dari modal saham, saldo laba baik yang dicadangkan maupun belum dicadangkan, penghasilan komprehensif lain serta ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali.

Pada tahun 2025, nilai Ekuitas Perusahaan sebesar Rp103,46 triliun, mengalami kenaikan 4,12% atau setara dengan Rp4,10 triliun dibandingkan nilai Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp99,36 triliun. Kenaikan ini terutama dikontribusikan kenaikan saldo laba ditentukan penggunaannya dan komponen ekuitas lainnya.

Modal Saham

Modal Saham Perusahaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama, yaitu sebesar Rp25 triliun.

Saldo Laba

Saldo Laba terdiri dari saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

1. Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya tahun 2025 sebesar Rp44,74 triliun, mengalami kenaikan 14,67% atau setara dengan Rp5,72 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39,02 triliun.
2. Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya tahun 2025 sebesar Rp2,78 triliun, mengalami penurunan 57,88% atau setara dengan Rp3,13 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,41 triliun, yang disebabkan penurunan laba tahun berjalan 2025.

Equity performance is influenced by equity attributable to owners of the parent entity, which consists of share capital, appropriated and undistributed retained earnings other comprehensive income, and equity attributable to non-controlling interests.

In 2025, the Company's total Equity reached Rp103.46 trillion, a 4.12% increase, or Rp4.10 trillion, compared to Rp99.36 trillion in 2024. This increase is mainly due to increases in appropriated retained earnings and other equity components.

Share Capital

The Company's share capital as of December 31, 2025, remained unchanged from the same period the previous year, at Rp25 trillion.

Retained Earnings

Retained earnings consist of appropriated and unappropriated retained earnings.

1. Appropriated Retained Earnings in 2025 reached Rp44.74 trillion, an increase of 14.67%, or Rp5.72 trillion, compared to Rp39.02 trillion the previous year.

2. Unappropriated Retained Earnings in 2025 reached Rp2.78 trillion, a decrease of 57.88%, or Rp3.13 trillion, compared to Rp5.41 trillion in 2024, due to a decrease in current year profit in 2025.

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan wajib dari keuntungan paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya (*appropriated*) meliputi cadangan terkait pemenuhan kewajiban sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan cadangan umum lainnya.

Komponen Ekuitas Lainnya

Komponen Ekuitas Lainnya terdiri dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, surplus revaluasi aset, pengukuran kembali program imbalan pasti dan lainnya.

Komponen Ekuitas Lainnya tahun 2025 sebesar Rp31,22 triliun, mengalami kenaikan 5,28% atau setara dengan Rp1,56 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp29,66 triliun. Kenaikan ini utamanya dikontribusikan dari surplus revaluasi aset yang mengalami kenaikan sebesar Rp1,93 triliun dibandingkan tahun 2024.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Entitas Induk

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2025 sebesar Rp103,24 triliun, mengalami kenaikan 4,19% atau setara dengan Rp4,15 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp99,09 triliun.

Kepentingan Non-Pengendali

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali tahun 2025 sebesar Rp215,25 miliar, mengalami penurunan 21,35% atau setara dengan Rp58,43 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp273,69 miliar.

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

According to the Limited Liability Company Law, companies are required to set aside statutory reserves from profits of at least 20% of the total number of issued and fully paid shares.

Appropriated reserves include reserves related to the fulfillment of obligations under the Limited Liability Company Law and other general reserves.

Other Equity Components

Other Equity components consist of exchange differences due to financial statement translation, asset revaluation surplus, remeasurement of defined benefit plans, and other matters.

Other Equity components in 2025 amounted to Rp31.22 trillion, an increase of 5.28%, or Rp1.56 trillion, compared to Rp29.66 trillion in 2024, mainly due to the asset revaluation surplus, which increased by Rp1.93 trillion compared to 2024.

Equity Attributable to the Parent Entity

Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity in 2025 amounted to Rp103.24 trillion, an increase of 4.19%, or Rp4.15 trillion, compared to Rp99.09 trillion in 2024.

Non-Controlling Interests

Equity Attributable to Non-Controlling Interests in 2025 amounted to Rp215.25 billion, a decrease of 21.35%, or Rp58.43 billion, compared to Rp273.69 billion in 2024.

Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income

"PTPI menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola model bisnis yang efektif dan efisien yang tercermin dari kinerja Laba Rugi yang cukup solid."
"PTPI has demonstrated its success in managing an effective and efficient business model, as reflected in its solid Profit and Loss performance."

Kinerja Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Periode 2024-2025
Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage (%)	
	(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Sales and Other Operating Revenue	**90.401.649**	81.616.208	8.785.441	10,76	●
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	**(75.013.927)**	(65.590.416)	(9.423.511)	14,37	●
Laba Bruto Gross Profit	**15.387.722**	16.025.792	(638.070)	(3,98)	●
Beban Penjualan Selling Expenses	**(920.334)**	(1.039.742)	119.408	(11,48)	●
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	**(5.551.810)**	(5.970.735)	418.925	(7,02)	●

Kinerja Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Periode 2024-2025
Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
(Beban)/Pendapatan Lainnya-Bersih Other (Expense)/Income-Net	**(443.404)**	3.677.940	(4.121.344)	(112,06)	●
Laba Operasi Operating Profit	**8.472.174**	12.693.255	(4.221.081)	(33,25)	●
Pendapatan Keuangan Finance Income	**1.160.425**	1.026.960	133.465	13,00	●
Biaya Keuangan Finance Costs	**(1.372.451)**	(1.917.934)	545.483	(28,44)	●
Bagian atas Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net Loss of Associates and Joint Ventures	**(342.126)**	(581.710)	239.584	41,19	●
Laba sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	**7.918.022**	11.220.571	(3.302.549)	(29,43)	●
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**(2.405.237)**	(2.334.533)	(70.704)	3,03	●
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**5.512.785**	8.886.038	(3.373.253)	(37,96)	●
Jumlah Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Total Other Comprehensive Income/(Loss) for the Year after Tax	**1.564.913**	(252.310)	1.817.223	720,23	●
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**7.077.698**	8.633.728	(1.556.030)	(18,02)	●
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	**5.535.884**	8.668.906	(3.133.022)	(36,14)	●
Kepentingan Nonpengendali Non-controlling interests	**(23.099)**	217.132	(240.231)	(110,64)	●
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	**7.100.797**	8.416.596	(1.315.799)	(15,63)	●
Kepentingan Nonpengendali Non-controlling interests	**(23.099)**	217.132	(240.231)	(110,64)	●
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk-Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah penuh) Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity-Basic and Diluted (in full Rupiah)	**221.435**	346.756	(125.321)	(36,14)	●

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Perusahaan diperoleh dari 3 (tiga) segmen usaha: Segmen Pupuk dan Amonia, Jasa Konstruksi, dan Segmen Lainnya.

Segmen Pupuk dan Amonia berperan besar dalam membentuk kinerja Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya PTPI. Dengan kontribusi mencapai 100,40% di tahun 2025, segmen ini merupakan bisnis inti Pupuk Indonesia Group yang dijalankan melalui manufaktur dan produksi pupuk dan amonia/non-pupuk serta penjualannya. Tentang kinerja produksi dan penjualan pupuk dan amonia/non-pupuk, termasuk juga kinerja segmen Konstruksi dan segmen Lainnya dapat dilihat pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha pada bagian awal bab ini.

Di samping itu, Laporan Keuangan teraudit PTPI juga menyajikan Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya berdasarkan kegiatan yang dilakukan, yang dapat dilihat di bawah ini.

Sales and Other Operating Revenue

As described in the Operational Review by Business Segment section, the Company's Sales and Other Operating Revenue are generated from three business segments: the Fertilizer and Ammonia Segment, the Construction Services Segment, and the Other Segment.

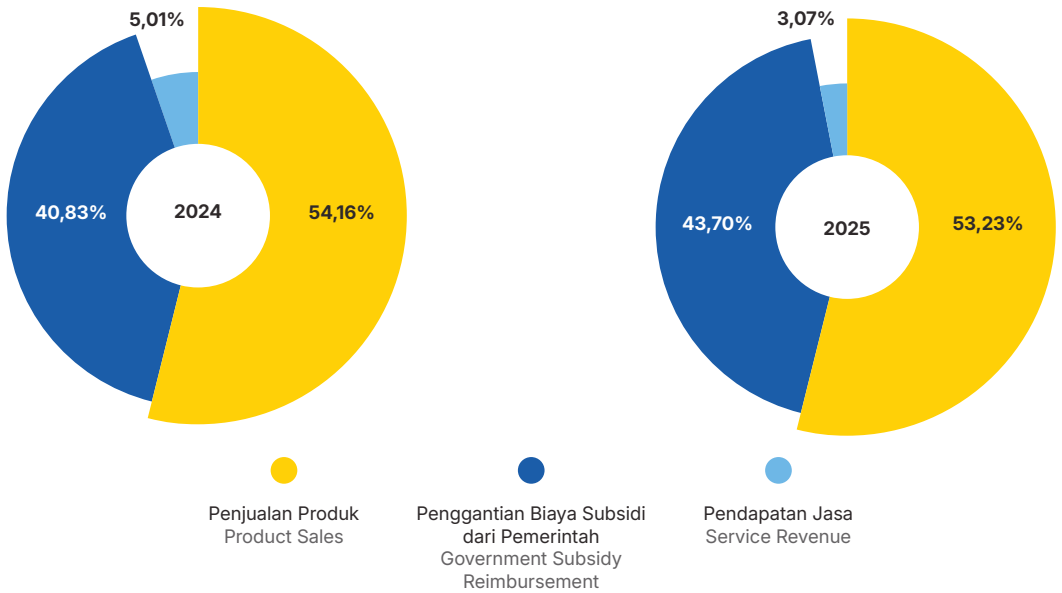
The Fertilizer and Ammonia Segment plays a significant role in shaping PTPI's Sales and Other Operating Revenue performance. Contributing 100.40% in 2025, this segment represents the Pupuk Indonesia Group's core business, operating through the manufacturing and production of fertilizers, ammonia/non-fertilizers, and their sales. Details of the production and sales performance of fertilizers, ammonia/non-fertilizers, as well as the Construction and Other segments performance, can be found in the Operational Review by Business Segment section at the beginning of this chapter.

PTPI's audited financial statements also present Sales and Other Operating Revenue based on activities undertaken, as shown below.

Kinerja Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya, Periode 2024-2025
Sales and Other Operating Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Penjualan Produk Product Sales	**48.118.045**	**53,23**	44.202.966	54,16	3.915.079	8,86	●
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Government Subsidy Reimbursement	**39.507.147**	**43,70**	33.323.915	40,83	6.183.232	18,55	●
Pendapatan Jasa Service Revenue	**2.776.457**	**3,07**	4.089.327	5,01	(1.312.870)	(32,10)	●
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Total Sales and Other Operating Revenue	**90.401.649**	**100,00**	**81.616.208**	**100,00**	**8.785.441**	**10,76**	●

Komposisi Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya, Periode 2024-2025
Sales and Other Operating Revenue Composition, 2024-2025



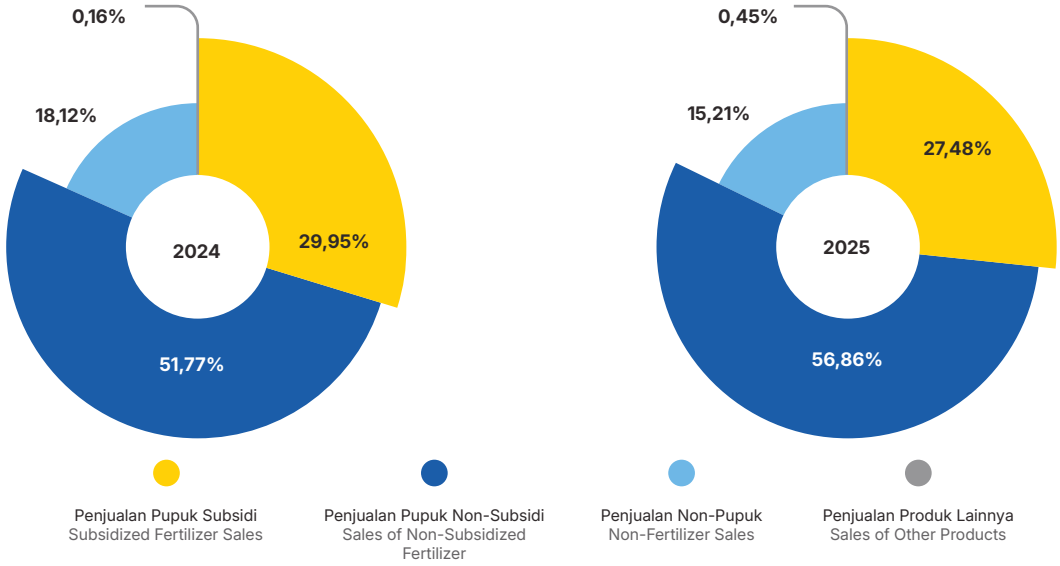
Pada tahun 2025, Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya sebesar Rp90,40 triliun, mengalami kenaikan 10,76% atau setara dengan Rp8,79 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp81,62 triliun. Kenaikan tersebut akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

In 2025, Sales and Other Operating Revenues reached Rp90.40 trillion, a 10.76% increase, or Rp8.79 trillion, compared to Rp81.62 trillion in 2024. This increase is explained in detail below.

Kinerja Penjualan Produk, Periode 2024-2025
Product Sales Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Penjualan Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer Sales	**13.222.221**	**27,48**	13.237.968	29,95	(15.747)	(0,12)	●
Penjualan Pupuk Non-Subsidi Sales of Non-Subsidized Fertilizer	**27.359.457**	**56,86**	22.884.956	51,77	4.474.501	19,55	●
Penjualan Non-Pupuk Non-Fertilizer Sales	**7.319.954**	**15,21**	8.008.055	18,12	(688.101)	(8,59)	●
Penjualan Produk Lainnya Sales of Other Products	**216.413**	**0,45**	71.987	0,16	144.426	200,63	●
Jumlah Penjualan Produk Total Product Sales	**48.118.045**	**100,00**	**44.202.966**	**100,00**	**3.915.079**	**8,86**	●

Komposisi Penjualan Produk, Periode 2024-2025
Product Sales Composition, 2024-2025



Perusahaan melaksanakan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

The Company carries out fertilizer subsidies from the Indonesian Government based on Minister of Agriculture Regulation Number 15 of 2025 on the Implementing Regulation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizer.

Jumlah Penjualan Produk tahun 2025 mengalami kenaikan 8,86% dibandingkan tahun sebelumnya, dari sebesar Rp44,20 triliun menjadi Rp48,12 triliun, di mana Pupuk (Subsidi dan Non-Subsidi) tahun 2025 mengalami kenaikan 12,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Penjualan Non-Pupuk mengalami penurunan 8,59%, dan penjualan produk lainnya mengalami kenaikan 200,63%.

Total Product Sales in 2025 increased by 8.86% compared to the previous year, from Rp44.20 trillion to Rp48.12 trillion. Fertilizer (subsidized and non-subsidized) sales increased by 12.34% in 2025 compared to the previous year. Non-fertilizer sales decreased by 8.59%, and sales of other products increased by 200.63%.

Kinerja Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia, Periode 2024-2025
Subsidy Reimbursement Performance from the Government of Indonesia, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Subsidi Pupuk: Fertilizer Subsidy:					
Urea Urea	**14.957.039**	12.636.330	2.320.709	18,37	●
NPK NPK	**23.840.855**	20.531.568	3.309.287	16,12	●
ZA ZA	**30.495**	-	30.495	-	
Organik Organic	**274.349**	45.585	228.764	501,84	●
NPK Kakao NPK Cocoa	**422.753**	339.164	83.589	24,65	●
Subjumlah Sub Total	**39.525.491**	33.552.647	5.972.844	17,80	●
Penyesuaian Piutang Subsidi dari Pemerintah, yang Belum Ditagih - Bersih Setelah Penyesuaian Tahun Sebelumnya Adjustment to Uncollectible Subsidy Receivables from the Government - Net of Prior Year Adjustments	**(18.344)**	(228.732)	210.388	(91,98)	●
Jumlah Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Subsidy Reimbursement Amount from the Government of Indonesia	**39.507.147**	**33.323.915**	**6.183.232**	**18,55**	●

Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia tahun 2025 mengalami kenaikan 18,55% atau setara dengan Rp6,18 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, dari sebesar Rp33,32 triliun menjadi Rp39,51 triliun. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan penyaluran pupuk PSO yang naik 10,68% dibandingkan tahun sebelumnya.

The Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia in 2025 increased by 18.55%, or Rp6.18 trillion, from Rp33.32 trillion the previous year to Rp39.51 trillion. This increase was due to the 10.68% increase in PSO fertilizer distribution compared to the previous year.

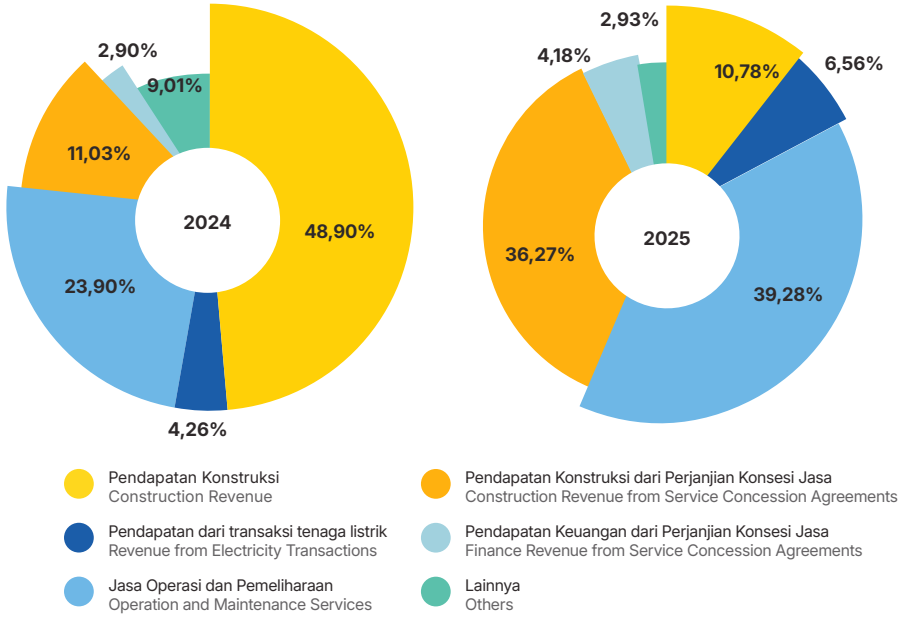
Kinerja Pendapatan Jasa, Periode 2024-2025
Service Revenue Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	**1.090.642**	**39,28**	977.532	23,90	113.110	11,57	●
Pendapatan Konstruksi dari Perjanjian Konsesi Jasa Construction Revenue from Service Concession Agreement	**1.007.042**	**36,27**	451.076	11,03	555.966	123,25	●
Pendapatan Konstruksi Construction Revenue	**299.337**	**10,78**	1.999.787	48,90	(1.700.450)	(85,03)	●
Pendapatan dari transaksi tenaga listrik Revenue from electronic power transaction	**182.171**	**6,56**	174.078	4,26	8.093	4,65	●
Pendapatan Keuangan dari Perjanjian Konsesi Jasa Finance Income from Service Concession Arrangement	**115.966**	**4,18**	118.438	2,90	(2.472)	(2,09)	●

Kinerja Pendapatan Jasa, Periode 2024-2025
Service Revenue Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)
Lainnya Others	81.299	2,93	368.416	9,01	(287.117)	(77,93)
Jumlah Pendapatan Jasa Total Rendering of Services	**2.776.457**	**100,00**	**4.089.327**	**100,00**	**(1.312.870)**	**(32,10)**

Komposisi Pendapatan Jasa, Periode 2024-2025
Service Revenue Composition, 2024-2025



Pendapatan Jasa tahun 2025 sebesar Rp2,78 triliun, mengalami penurunan 32,10% atau setara dengan Rp1,31 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,09 triliun. Penurunan ini terjadi terutama disebabkan penurunan pendapatan jasa konstruksi.

Service revenues in 2025 reached Rp2.78 trillion, a 32.10% decrease, or Rp1.31 trillion, compared to Rp4.09 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in construction service revenue.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan terdiri dari Beban Manufaktur (biaya produksi, persediaan barang jadi, barang dalam proses) dan Beban Non-Manufaktur. Beban Pokok Pendapatan Perusahaan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Cost of Revenues

Cost of Revenues consists of Manufacturing Expenses (production costs, finished goods inventory, work-in-progress) and Non-Manufacturing Expenses. The Company's Cost of Revenues per account is shown in the table below.

Kinerja Beban Pokok Pendapatan, Periode 2024-2025
Cost of Revenues Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3;2)	
Beban Produksi Production Costs	**70.141.906**	59.510.808	10.631.098	17,86	●
Persediaan Barang Jadi dan Barang dalam Proses: Finished Goods and Work in Progress Inventories:					
Awal Tahun Beginning of the Year	**9.371.296**	11.743.310	(2.372.014)	(20,20)	●
Akhir Tahun End of the Year	**(8.195.594)**	(9.371.296)	1.175.702	(12,55)	●
	71.317.608	61.882.822	9.434.786	15,25	●
Beban Non-Manufaktur Cost of Non-Manufacturing	**3.696.319**	3.707.594	(11.275)	(0,30)	●
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenues	**75.013.927**	**65.590.416**	**9.423.511**	**14,37**	●

Beban Pokok Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp75,01 triliun mengalami kenaikan 14,37% atau setara dengan Rp9,42 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp65,59 triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan karena kenaikan volume penjualan dan adanya kenaikan harga bahan baku serta kurs USD yang memberikan pengaruh terhadap kenaikan Beban Pokok Pendapatan per ton.

Cost of Revenue in 2025 reached Rp75.01 trillion, a 14.37% increase, or Rp9.42 trillion, compared to Rp65.59 trillion in 2024. This increase was mainly due to increased sales volume, raw material prices, and the USD exchange rate, which impacted the increase in Cost of Revenue per ton.

Beban Produksi tahun 2025 sebesar Rp70,14 triliun, mengalami kenaikan 17,86% atau setara dengan Rp10,63 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp59,51 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan harga gas serta kenaikan kurs USD dibandingkan tahun 2024.

Production costs in 2025 reached Rp70.14 trillion, a 17.86% increase, or Rp10.63 trillion, compared to Rp59.51 trillion in 2024. This increase was due to higher gas prices and the USD exchange rate compared to 2024.

Beban Non-Manufaktur tahun 2025 sebesar Rp3,70 triliun mengalami penurunan 0,30% atau setara dengan Rp11,28 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,71 triliun.

Non-Manufacturing costs in 2025 reached Rp3.70 trillion, a 0.30% decrease, or Rp11.28 billion, compared to Rp3.71 trillion in 2024.

Beban Penjualan

Beban Penjualan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Selling Expenses

Selling Expenses per account are shown in the table below.

Kinerja Beban Penjualan, Periode 2024-2025
Selling Expense Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Salaries, Wages, and Welfare	**294.761**	392.362	(97.601)	(24,88)	●
Beban Promosi dan pemasaran Promotion and marketing expenses	**122.253**	189.503	(67.250)	(35,49)	●
Biaya Jasa Service Expense	**111.350**	125.482	(14.132)	(11,26)	●
Beban Penyusutan Depreciation Expense	**105.476**	108.125	(2/649)	(2,45)	●
Beban Sewa Rent Expenses	**87.452**	50.723	36.729	72,41	●

Kinerja Beban Penjualan, Periode 2024-2025
Selling Expense Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	**54.679**	62.528	(7.849)	(12,55)	●
Beban Perlengkapan dan Operasional Kantor Supply and Office Operating Expenses	**41.579**	39.863	1.716	4,30	●
Beban Asuransi Insurance Expenses	**21.138**	20.265	873	4,31	●
Beban Penelitian Research Expenses	**19.928**	14.159	5.769	40,74	●
Beban Perjalanan Dinas Official Travel Expenses	**19.150**	22.438	(3.288)	(14,65)	●
Beban Unit Pelayanan dan Utilitas Service Unit and Utility Expenses	**10.230**	8.560	1.670	19,51	●
Penyesuaian Beban Imbalan Pascakerja-Biaya Jasa Lalu Adjustment of Post-Employment Benefits Expense - Past Service Costs	**-**	(28.167)	28.167	-	
Beban Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000) Other Expenses (each below Rp10,000)	**32.338**	33.901	(1.563)	(4,61)	●
Jumlah Beban Penjualan Total Sales Expenses	**920.334**	**1.039.742**	**(119.408)**	**(11,48)**	●

Beban Penjualan tahun 2025 sebesar Rp920,33 miliar, mengalami penurunan 11,48% atau setara dengan Rp119,41 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,04 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan terdapatnya penurunan beban gaji, upah dan kesejahteraan serta beban promosi dan pemasaran.

Selling Expenses in 2025 reached Rp920.33 billion, a decrease of 11.48%, or Rp119.41 billion, compared to Rp1.04 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in salaries, wages, and welfare expenses, as well as promotion and marketing expenses.

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi Perusahaan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

General and Administrative Expenses

The Company's General and Administrative Expenses per account are shown in the table below.

Kinerja Beban Umum dan Administrasi, Periode 2024-2025
General and Administrative Expense Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Salary, Wages and Welfare	**2.425.558**	2.452.417	(26.859)	(1,10)	●
Beban Jasa Service Charges	**822.233**	891.393	(69.160)	(7,76)	●
Penambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang - Bersih Additional Provision for Impairment of Receivables - Net	**344.223**	546.925	(202.702)	(37,06)	●
Beban Penyusutan Depreciation Expenses	**252.204**	200.655	51.549	25,69	●
Beban Bina Wilayah Regional Development Expenses	**214.717**	250.864	(36.147)	(14,41)	●
Beban Unit Pelayanan dan Utilitas Service Unit and Utility Expenses	**197.586**	182.911	14.675	8,02	●
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	**185.630**	129.679	55.951	43,15	●

Kinerja Beban Umum dan Administrasi, Periode 2024-2025
General and Administrative Expense Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Beban Pajak Lainnya Other Tax Expenses	**172.105**	212.933	(40.828)	(19,17)	●
Biaya Perjalanan Dinas Official Travel Expenses	**167.160**	195.459	(28.299)	(14,48)	●
Beban Perlengkapan dan Operasional Supply and Operating Expenses	**168.389**	148.632	19.757	13,29	●
Beban Promosi dan Pemasaran Promotion and Marketing Expenses	**155.077**	261.235	(106.158)	(40,64)	●
Beban Pelatihan Training Expenses	**131.333**	159.163	(27.830)	(17,49)	●
Beban Sewa Rent Expenses	**53.946**	81.839	(27.893)	(34,08)	●
Beban Penelitian Research Expenses	**51.388**	50.693	695	1,37	●
Beban Asuransi Insurance Expense	**9.505**	17.773	(8.268)	(46,52)	●
Penurunan Nilai Aset Tetap Impairment of Fixed Asset	**-**	54.338	(54.338)	-	
Penyesuaian beban imbalan pascakerja-biaya jasa lalu Adjusment of post-employment benefit expense – past service cost	**-**	(164.275)	164.275	-	
Beban Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000) Other Expenses (each below Rp10.000)	**200.756**	298.101	(97.345)	(32,66)	●
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Total General and Administrative Expenses	**5.551.810**	**5.970.735**	**(418.925)**	**(7,02)**	●

Beban Umum dan Administrasi tahun 2025 sebesar Rp5,55 triliun, mengalami penurunan 7,02% atau setara dengan Rp418,93 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,97 triliun, yang utamanya disebabkan penurunan beban penambahan cadangan kerugian nilai piutang - bersih serta beban promosi dan pemasaran.

General and Administrative Expenses in 2025 reached Rp5.55 trillion, a 7.02% decrease, or Rp418.93 billion, compared to Rp5.97 trillion in 2024. This was mainly due to a decrease in the increase in the allowance for doubtful accounts - net and in promotion and marketing expenses.

(Beban)/Pendapatan Lainnya-Bersih

Beban Lainnya-Bersih tahun 2025 sebesar Rp443,40 miliar, mengalami penurunan cukup signifikan yang mencapai 112,06% atau setara dengan Rp4,12 triliun dibandingkan tahun 2024 yang mengalami Pendapatan Lainnya-Bersih sebesar Rp3,68 triliun. Hal ini terutama disebabkan adanya gain restrukturisasi utang bank Rekind sebesar Rp2,44 triliun dan gain restrukturisasi utang usaha Rp834 miliar di tahun 2024.

Other (Expense)/Income - Net

Net Other Expenses in 2025 amounted to Rp443.40 billion, a significant decrease of 112.06%, equivalent to Rp4.12 trillion, compared to Rp3.68 trillion in 2024. This decrease was primarily due to a gain of Rp2.44 trillion from Rekind's bank debt restructuring and a gain of Rp834 billion from trade debt restructuring in 2024.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perusahaan tahun 2025 sebesar Rp1,16 triliun, mengalami kenaikan 13,00% atau setara dengan Rp113,46 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,03 triliun.

Finance Income

The Company's finance income in 2025 reached Rp1.16 trillion, a 13.00% increase, or Rp113.46 billion, compared to Rp1.03 trillion in 2024.

Kinerja Biaya Keuangan, Periode 2024-2025
Finance Cost Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans	**565.355**	745.118	(179.763)	(24,13)	●
Amortisasi atas Resrukturi Utang dan Pinjaman-Rekind Amortisasion of Restructured Payables and Loans-Rekind	**286.793**	227.456	59.337	26,09	●
Utang Obligasi Bonds Payable	**238.596**	350.799	(112.203)	(31,98)	●
Pinjaman Jangka Panjang Long-term Loan	**173.086**	351.547	(178.461)	(50,76)	●
Biaya Bank dan Pinjaman Bank and Loan Cost	**99.235**	84.992	14.243	16,76	●
Kerugian Selisih Kurs atas Pinjaman Foreign Exchange Loss on Borrowing	**9.386**	158.022	(148.636)	(94,06)	●
Jumlah Biaya Keuangan Total Finance Cost	**1.372.451**	**1.917.934**	**(545.483)**	**(28,44)**	●

Biaya keuangan yang dikeluarkan Perusahaan pada tahun 2025 mencapai Rp1,37 triliun, mengalami penurunan 28,44% atau setara dengan Rp545,48 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,92 triliun. Hal ini terutama karena penurunan beban bunga pinjaman bank jangka pendek, utang obligasi dan pinjaman jangka panjang.

The Company's finance costs in 2025 reached Rp1.37 trillion, a 28.44% decrease, or Rp545.48 billion, compared to Rp1.92 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in interest expense on short-term bank loans, bonds payable, and long-term loans.

Bagian atas (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Bagian atas Rugi Bersih dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama pada tahun 2025 mencapai Rp342,13 miliar, mengalami penurunan 41,19% atau setara dengan Rp239,58 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp581,71 miliar.

Share of Net (Loss) of Associated Entities and Joint Ventures

The Net Loss of Associates and Joint Ventures in 2025 reached Rp342.13 billion, a 41.19% decrease, or Rp239.58 billion, compared to Rp581.71 billion in 2024.

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain

Other Comprehensive Income/(Loss)

Kinerja Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain, Periode 2024-2025
Other Comprehensive income/(Loss) Performance, Period 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Item That Will Be Reclassified to Profit or Loss					
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak Difference in Foreign Currency Arising from Translation of the Financial Statements of Subsidiaries	**49.059**	73.991	(24.932)	(33,70)	●
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss					
Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Remeasurement Loss on Defined Benefit Plans	**(520.236)**	(408.978)	(111.258)	27,20	●
Surplus Revaluasi Aset Asset Surplus Revaluation	**1.928.798**	-	1.928.798	-	
Lainnya Others	**(7.160)**	(7.298)	138	(1,89)	●

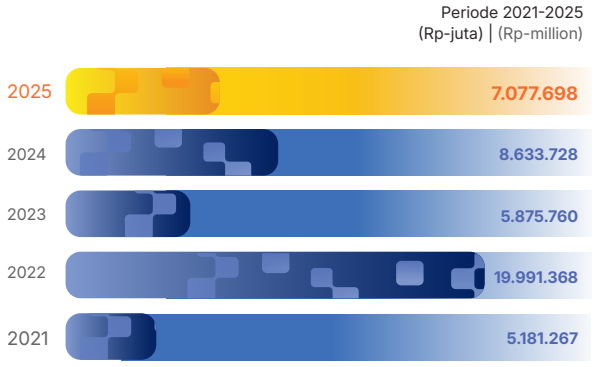
Kinerja Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain, Periode 2024-2025
Other Comprehensive income/(Loss) Performance, Period 2024-2025

Pos Akun Account	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Manfaat Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax Benefit	**114.452**	89.975	24.477	27,20	●
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**7.077.698**	**8.633.728**	**(1.556.030)**	**(18,02)**	●

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan didapatkan dari akun Laba Tahun Berjalan yang diakumulasikan dengan Laba (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak. Pada tahun 2025, nilai yang dibukukan Perusahaan mencapai Rp7,08 triliun, mengalami penurunan 18,02% atau setara dengan Rp1,56 triliun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp8,63 triliun. Hal ini sejalan dengan penurunan laba tahun berjalan.

Total Comprehensive Income for the Current Year is calculated by adding the Profit for the Year account to Other Comprehensive Income (Loss) After Tax. In 2025, the Company recorded Rp7.08 trillion, an decrease of 18.02%, or Rp1.56 trillion, compared to Rp8.63 trillion in 2024. This decrease is in line with the decline in profit for the year.

Perkembangan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Current Year Comprehensive Income Development



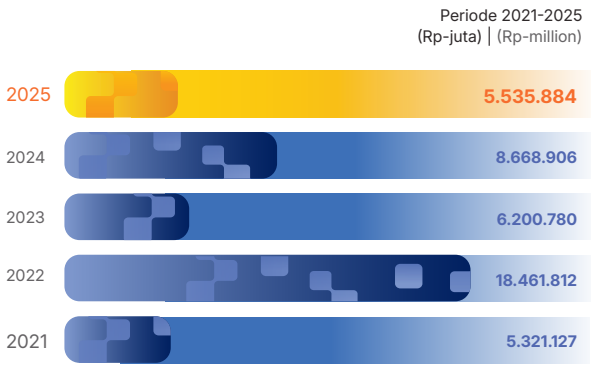
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2025 Rp5,54 triliun, mengalami penurunan 36,14% atau setara dengan Rp3,13 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,67 triliun.

Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity in 2025 reached Rp5.54 trillion, a decrease of 36.14%, or Rp3.13 trillion, compared to Rp8.67 trillion in 2024.

Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity



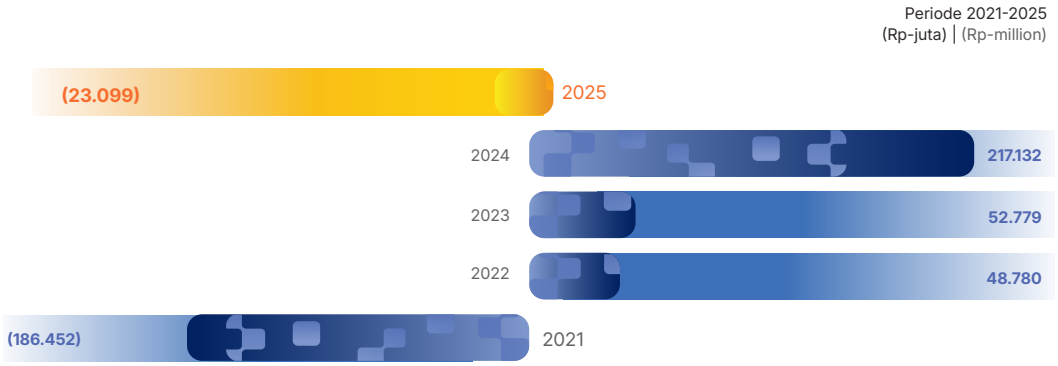
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali tahun 2025 sebesar defisit Rp23,10 miliar, mengalami penurunan 110,64% atau setara dengan Rp240,23 miliar dibandingkan tahun 2024 yang mengalami surplus sebesar Rp217,13 miliar.

Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

In 2025, Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests recorded a deficit of Rp23.10 billion, a decrease of 110.64%, or Rp240.23 billion, compared to the surplus of Rp217.13 billion in 2024.

Perkembangan Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali
Development of Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests



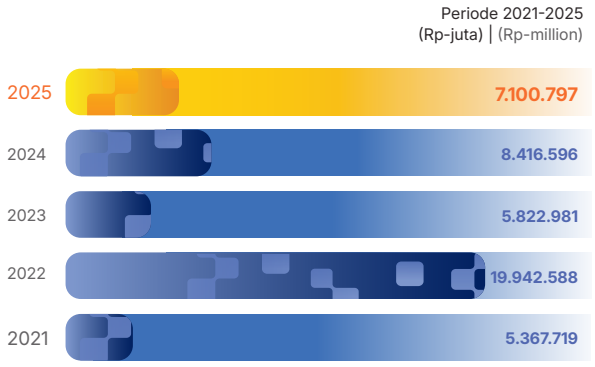
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2025 mencapai Rp7,10 triliun, mengalami penurunan 15,63% atau setara dengan Rp1,32 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,42 triliun. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan laba tahun berjalan.

Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

In 2025, Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity was Rp7.10 trillion, a decrease of 15.63%, or Rp1.32 trillion, compared to Rp8.42 trillion in 2024. This decrease was in line with the decline in profit for the year.

Perkembangan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Development of Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity



Sementara Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp23,01 miliar, mengalami penurunan 110,64% atau setara dengan Rp240,23 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp217,13 miliar.

While, in 2025 Comprehensive Income Attributable to Non-Controlling Interests recorded a deficit Rp23.01 billion, a decrease of 110.64%, or Rp240.23 billion, compared to Rp217.13 billion in 2024.

Laba Per Saham yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk-Dasar dan Dilusian (Rupiah Penuh)

Laba Bersih Per Saham Dasar dihitung dengan membagi Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk dengan Jumlah Rata-Rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar pada periode bersangkutan.

Untuk tujuan penghitungan Laba Per Saham Dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Berikut disampaikan perhitungan laba per saham-dasar dan dilusian tahun 2025 dan perbandingannya dengan tahun 2024.

Earnings Per Share Attributable to Owners of the Parent Entity - Basic and Diluted (Full Rupiah)

Basic Net Earnings Per Share is calculated by dividing Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity by the Weighted Average Number of Common Shares Outstanding in during the relevant period.

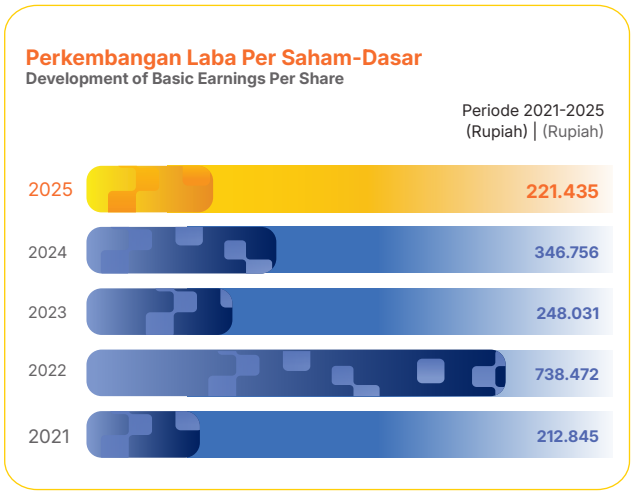
For the purpose of calculating Diluted Earnings Per Share, the Company adjusts profit or loss attributable to common shareholders of the parent entity and the weighted average number of shares outstanding for the impact of all potentially dilutive common stock instruments.

The following shows the calculation of basic and diluted earnings per share for 2025 and their comparison with 2024.

Pos Akun Account	**2025**	**2024**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal	**Persentase** Percentage (%)	
	(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp-juta) Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity (Rp Million)	**5.535.884**	8.668.906	(3.133.022)	(36,14)	●
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Biasa yang Beredar (Lembar Saham) Weighted Average Number of Shares Outstanding (Shares)	**25.000.000**	25.000.000	-	-	
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk-Dasar dan Dilusian (Rupiah Penuh) Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity – Basic and Diluted	**221.435**	346.756	(125.321)	(36,14)	●

Laba Per Saham yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk-Dasar dan Dilusian tahun 2025 sebesar Rp221.435 per lembar saham, mengalami penurunan 36,14% atau setara dengan Rp125.321 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp346.756 per lembar saham.

Earnings per Share Attributable to Owners of the Parent Entity - Basic and Diluted in 2025 amounted to Rp221,435 per share, a decrease of 36.14%, or Rp125,321, compared to Rp346,756 per share in 2024.



Rasio Profitabilitas

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan indikator utama keberlanjutan dan efisiensi operasionalnya. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, digunakan berbagai rasio profitabilitas yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai efisiensi operasional dan manajerial perusahaan. Beberapa rasio yang digunakan antara lain, melalui Marjin Laba Bruto atau *Gross Profit Margin* (GPM), Marjin Laba Usaha atau *Operating Profit Margin* (OPM), Marjin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* (NPM), Tingkat Imbalan Kepada Pemegang Saham atau *Return on Equity* (ROE), dan Tingkat Imbalan Aset atau *Return on Asset* (ROA).

1. Marjin Laba Bruto
   Marjin Laba Bruto digunakan untuk menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan.

Profitability Ratios

A company's ability to generate profits is a key indicator of its sustainability and operational efficiency. To measure a company's ability to generate profits, profitability ratios are used to provide a comprehensive overview of the company's operational and managerial efficiency. Some of the ratios used include Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Equity (ROE), and Return on Assets (ROA).

1. Gross Profit Margin
   Gross Profit Margin is used to illustrate a company's efficiency in generating gross profit from sales after deducting the cost of goods sold.

Kinerja Marjin Laba Bruto, Periode 2024-2025
Gross Profit Margin Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	**Satuan** Unit	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
				Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage (%)	
		(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Sales and Other Revenues	Rp-juta Rp-million	**90.401.649**	81.616.208	8.785.441	10,76	●
Laba Bruto Gross Profit	Rp-juta Rp-million	**15.387.722**	16.025.792	(638.070)	(3,98)	●
Marjin Laba Bruto Gross Profit Margin	%	**17,02**	19,64	(2,61)		●

Pada tahun 2025, posisi Marjin Laba Bruto Perusahaan mencapai 17,02%, turun 2,61% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 19,64%. Penurunan ini disebabkan terdapatnya kenaikan biaya pokok pendapatan yang pada tahun 2025 mencapai Rp75,01 triliun, meningkat sekitar Rp9,42 triliun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp65,59 triliun. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan harga bahan baku.

In 2025, the Company's Gross Profit Margin reached 17.02%, a decrease of 2.61% compared to 19.64% in 2024. This decrease was due to an increase in the cost of revenue, which reached Rp75.01 trillion in 2025, an increase of Rp9.42 trillion compared to Rp65.59 trillion in 2024. This increase was due to rising raw material prices.

2. Marjin Laba Usaha
Marjin Laba Usaha digunakan untuk mengukur persentase laba usaha yang dihasilkan setelah memperhitungkan seluruh biaya operasional.

2. Operating Profit Margin
Operating Profit Margin is used to measure the percentage of operating profit generated after accounting for all operating costs.

Kinerja Marjin Laba Usaha, Periode 2024-2025
Operating Profit Margin Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	**Satuan** Unit	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
				Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage (%)	
		(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Sales and Other Revenues	Rp-juta Rp-million	**90.401.649**	81.616.208	8.785.441	10,76	●
Laba Operasi Operating Profit	Rp-juta Rp-million	**8.472.174**	12.693.255	(4.221.081)	(33,25)	●
Marjin Laba Usaha Operating Profit Margin	%	**9,37**	15,55	(6,18)		●

Pada tahun 2025, Marjin Laba Usaha Perusahaan mencapai 9,37%, turun 6,18% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 15,55%. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan biaya pokok produksi pupuk seiring dengan peningkatan harga gas alam. Meskipun demikian, perusahaan berhasil melakukan efisiensi biaya usaha yang pada tahun 2025 mencapai Rp6,47 triliun lebih rendah dari tahun 2024 yang mencapai Rp7,01 triliun, sebagai komitmen perusahaan dalam menjaga efisiensi operasional.

In 2025, the Company's Operating Profit Margin reached 9.37%, a decrease of 6.18% compared to 15.55% in 2024. This decrease was due to increases in fertilizer production costs due to rising natural gas prices. Nevertheless, the Company successfully implemented cost efficiencies of Rp6.47 trillion in 2025, a decrease from Rp7.01 trillion in 2024, reflecting its commitment to maintaining operational efficiencies.

3. Marjin Laba Bersih
Marjin Laba Bersih digunakan untuk menunjukkan persentase laba bersih yang dihasilkan dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya, termasuk pajak dan bunga.

3. Net Profit Margin
Net Profit Margin is used to indicate the percentage of net profit generated from total revenue after deducting all expenses, including taxes and interest.

Kinerja Marjin Laba Bersih, Periode 2024-2025
Net Profit Margin Performance, 2024-2025

Pos Akun Account	**Satuan** Unit	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
				Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage (%)	
		(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Sales and Other Revenues	Rp-juta Rp-million	**90.401.649**	81.616.208	8.785.441	10,76	●
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp-juta Rp-million	**5.512.785**	8.886.038	(3.373.253)	(37,96)	●
Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	%	**6,10**	10,89	(4,79)		●

Marjin Laba Bersih tahun 2025 mencapai 6,10%, turun 4,79% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 10,89%. Penurunan ini terjadi seiring penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp3,37 triliun dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kenaikan biaya pokok produksi akibat naiknya harga gas alam. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat pencatatan *gain* restrukturisasi utang bank Rekind sebesar Rp2,44 triliun dan gain restrukturisasi utang usaha Rp834 miliar. Di sisi lain, pada 2025 Perusahaan juga menanggung beban lain-lain terutama dari pembebanan kerugian penghapusan aset tetap di PKT, dan pembebanan biaya atas pengembalian lebih bayar subsidi.

Net Profit Margin in 2025 was 6.10%, down 4.79% compared to 10.89% in 2024. This decrease was in line with a decrease in current year profit of Rp3.37 trillion from the previous year, due to an increase in production costs due to rising natural gas prices. In addition, in 2024, there was a gain recorded for the restructuring of Rekind's bank debt of Rp2.44 trillion and a gain for the restructuring of trade debt of Rp834 billion, and in 2025, the Company also incurred other expenses, primarily from the expense of the loss on the write-off of fixed assets in the PKT and the expense for the refund of overpaid subsidies.

4. Tingkat Imbalan Aset

Tingkat Imbalan Aset atau *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengoptimalkan profitabilitas berdasarkan aset yang dimilikinya.

4. Return on Assets

Return on Assets (ROA) is a ratio used to measure the Company's ability to optimize profitability based on its assets.

Kinerja Tingkat Imbalan Aset Periode 2024-2025
Return on Assets Performance Period 2024-2025

Pos Akun Account	**Satuan** Unit	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
				Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage (%)	
		(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Jumlah Aset Total Assets	Rp-juta Rp-million	**150.182.825**	139.296.655	10.886.170	7,82	●
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp-juta Rp-million	**5.512.785**	8.886.038	(3.373.253)	(37,96)	●
Tingkat Imbalan Aset Return on Assets	%	**3,67**	6,38	(2,71)		●

Pada tahun 2025, Tingkat Imbalan Aset Perusahaan mencapai 3,67%, turun 2,71% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 6,38%. Hal ini disebabkan turunnya laba bersih sebesar 37,96%, dari Rp8,89 triliun di 2024 menjadi Rp5,51 triliun di 2025. Selain itu, total aset meningkat 7,82% menjadi Rp150,18 triliun, didorong oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp4,88 triliun sejalan dengan progres investasi pengembangan Pabrik Pusri-IIIB, serta saldo piutang subsidi yang lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp10,06 triliun akibat belum dibayarnya tagihan subsidi bulan November dan Desember 2025

In 2025, the Company's Return on Assets reached 3.67%, a 2.71% decrease compared to 6.38% in 2024. This was due to a 37.96% decrease in net profit, from Rp8.89 trillion in 2024 to Rp5.51 trillion in 2025. In addition, total assets increased by 7.82% to reach Rp150.18 trillion, due to an increase in fixed assets of Rp4.88 trillion in line with the investment progress in the development of the Pusri-IIIB Factory, as well as a larger subsidy receivables balance of Rp10.06 trillion compared to the previous year due to unpaid subsidy bills in November and December 2025.

5. Tingkat Imbalan Ekuitas

Tingkat Imbalan Ekuitas atau *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham.

5. Return on Equity

Return on Equity (ROE) is a ratio used to measure a company's effectiveness in generating returns on the capital invested by shareholders.

Kinerja Tingkat Imbalan Ekuitas, Periode 2024-2025
Return on Equity Performance, Period 2024-2025

Pos Akun Account	**Satuan** Unit	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
				Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage (%)	
		(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp-juta Rp-million	**5.512.785**	8.886.038	(3.373.253)	(37,96)	●
Ekuitas Equity	Rp-juta Rp-million	**103.457.535**	99.360.726	4.096.809	4,12	●
Tingkat Imbalan Ekuitas Return on Equity (%)	%	**5,33**	8,94	(3,61)		●

Tingkat Imbalan kepada Pemegang Saham Perusahaan tahun 2025 mencapai 5,33%, turun 3,61% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 8,94%. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya laba bersih sebesar 37,96%, dari Rp8,89 triliun di 2024 menjadi Rp5,51 triliun di 2025. Meski demikian, perusahaan tetap menunjukkan komitmen menjaga profitabilitas, tercermin dari kenaikan ekuitas sebesar 4,12% menjadi Rp103,46 triliun. Kenaikan ekuitas ini seiring dengan tambahan saldo laba dari laba tahun berjalan.

The Company's rate of return to shareholders in 2025 reached 5.33%, a 3.61% decrease compared to 8.94% in 2024. This decrease was mainly due to a 37.96% decrease in net profit, from Rp8.89 trillion in 2024 to Rp5.51 trillion in 2025. Nevertheless, the Company remained committed to maintaining profitability, as reflected in the 4.12% increase in equity to Rp103.46 trillion. This increase was in line with the addition of retained earnings from the current year's profit.

Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flow

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

Periode 2021-2025
(Rp-juta) | (Rp-million)



"Arus kas memberikan gambaran tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran Perusahaan dalam suatu periode tertentu."
"Cash flow provides an overview of the Company's income and expenses during a specific period.

Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling likuid, sehingga semakin besar nilainya maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada waktu dan periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi tiga kegiatan penting: kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Cash is one of the most liquid assets, so the higher its value, the better the Company's financial condition. While, the cash flow statement is a financial report that contains information about a company's cash receipts and disbursements over a specific period. The cash flow statement is grouped into three key activities: operating, investing, and financing.

Kas dan setara kas akhir periode 2025 menunjukkan penurunan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Cash and cash equivalents at the end of 2025 showed a decrease, as shown in the table below.

Kinerja Arus Kas, Periode 2024-2025
Cash Flow Performance, 2024-2025

Perihal Subject	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage (%)	
	(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	**4.099.980**	22.488.663	(18.388.683)	(81,77)	●
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	**(10.216.975)**	(10.961.610)	744.635	(6,79)	●
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	**625.607**	(10.929.008)	11.554.695	105,72	●
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents	**(5.491.388)**	597.965	(6.089.353)	(1.018,35)	●
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	**35.750**	94.891	(59.141)	(62,33)	●
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	**17.278.272**	16.585.416	692.856	4,18	●

Kinerja Arus Kas, Periode 2024-2025
Cash Flow Performance, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	**11.822.634**	17.278.272	(5.455.638)	(31,58)	●

Pada akhir tahun 2025, Perusahaan mencatatkan Kas dan Setara Kas sebesar Rp11,82 triliun, mengalami penurunan 31,58% atau setara dengan Rp5,46 triliun dibandingkan pada akhir tahun 2024, di mana Perusahaan membukukan Kas dan Setara Kas sebesar Rp17,28 triliun. Hal ini terutama disebabkan saldo arus kas dari aktivitas operasi yang pada tahun 2025 turun signifikan menjadi Rp4,10 triliun dari tahun 2024 yang sebesar Rp22,49 triliun. Uraian analisis kinerja secara komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

At the end of 2025, the Company's cash and cash equivalents reached Rp11.82 trillion, a 31.58% decrease, or Rp5.46 trillion, compared to Rp17.28 trillion at the end of 2024. This decrease was mainly due to a significant decrease in cash flow from operating activities in 2025 of Rp4.10 trillion compared to Rp22.49 trillion in 2024. A comprehensive performance analysis, including a comparison of performance over the last two fiscal years, and an explanation of the reasons for the changes and their impact, are presented below.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities

Kinerja Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Periode 2024-2025
Cash Flow Performance from Operating Activities, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	**52.952.000**	49.452.261	3.499.739	7,08	●
Penerimaan Subsidi Pupuk dari Pemerintah Indonesia Receipts of Fertilizer Subsidy from the Government of Indonesia	**29.199.757**	42.291.595	(13.091.838)	(30,96)	●
Penerimaan Pendapatan Keuangan Receipt from Finance Income	**1.141.458**	1.029.782	111.676	10,84	●
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan Badan Receipt from Corporate Income Tax Restitutions	**530.517**	70.197	460.320	646,94	●
Penerimaan Klaim Asuransi Receipt from Insurance Claim	**-**	233.540	(233.540)	-	
Pembayaran Utang Subsidi Kepada Pemerintah Indonesia Payment of Subsidy Payable to the Government of Indonesia	**(1.749.802)**	-	(1.749.802)	-	
Pembayaran kepada Pemasok Payment to Supplier	**(67.959.659)**	(57.652.339)	(10.307.320)	17,88	●
Pembayaran kepada Karyawan Payment to Employees	**(7.852.094)**	(7.620.292)	(231.802)	3,04	●
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Payment of Corporate Income Tax	**(2.490.508)**	(2.247.193)	(243.315)	10,83	●
Pembayaran Beban Keuangan dan Transaksi Utang Obligasi Payment of Finance Cost and Bonds Payable Transaction	**(1.387.224)**	(1.896.893)	509.669	(26,87)	●
Pencairan Kas yang Dibatasi Penggunaannya Withdrawal of Restricted Cash	**4.185.122**	5.809.623	(1.624.501)	(27,96)	●
Penempatan Kas yang Dibatasi Penggunaannya Placement of Restricted Cash	**(2.469.587)**	(6.981.618)	4.512.031	(64,63)	●
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows Generated from Operating Activities	**4.099.980**	22.488.663	(18.388.683)	(81,77)	●

Perusahaan membukukan Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi tahun 2025 sebesar Rp4,10 triliun, mengalami penurunan 81,77% atau setara dengan Rp18,39 triliun dibandingkan tahun 2024, di mana Perusahaan mencatat perolehan Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp22,49 triliun. Hal ini terutama disebabkan lebih rendahnya penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia yang turun 30,96% menjadi Rp29,20 triliun, serta adanya pembayaran kelebihan subsidi sebesar Rp1,75 triliun. Selain itu, pembayaran kepada pemasok meningkat 17,88% menjadi Rp67,96 triliun, sejalan dengan kenaikan biaya pokok produksi akibat harga gas alam yang lebih tinggi.

In 2025, the Company's Net Cash from Operating Activities reached Rp4.10 trillion, a decrease of 81.77%, or Rp18.39 trillion, compared to Rp22.49 trillion in 2024. This decrease was mainly due to lower receipts of fertilizer subsidies from the Indonesian government, which decreased by 30.96% to Rp29.20 trillion, and the payment of excess subsidies of Rp1.75 trillion. In addition, payments to suppliers increased by 17.88% to Rp67.96 trillion, in line with the increase in production costs due to higher natural gas prices.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investing Activities

Kinerja Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Periode 2024-2025
Cash Flow Performance from Investing Activities, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi Receipts of Dividend from Associates	**100.120**	74.211	25.909	34,91	●
Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	**(10.554.637)**	(8.556.724)	(1.997.913)	23,35	●
Penempatan Deposito Berjangka Placement of time deposits	**(4.836.600)**	(6.772.514)	1.935.914	(28,58)	●
Pencairan Deposito Berjangka Withdrawal of time deposits	**5.074.100**	4.218.752	855.348	20,27	●
Pelepasan Investasi Asosiasi Disposal of investment in associates	**-**	30.000	(30.000)	-	
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap Receipt from Sale of Fixed Assets	**42**	44.665	(44.623)	(99,91)	●
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows Used in Investing Activities	**(10.216.975)**	(10.961.610)	744.635	(6,79)	●

Pada akhir tahun 2025 Perusahaan mencatat penggunaan Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp10,22 triliun, mengalami penurunan 6,79% atau setara dengan Rp744,64 miliar dibandingkan akhir tahun 2024, di mana Perusahaan mencatat penggunaan Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi yang mencapai Rp10,96 triliun. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 terjadi penurunan penempatan deposito berjangka 28,58% atau setara Rp1,94 triliun dibandingkan akhir tahun 2024.

At the end of 2025, the Company recorded net cash used in investing activities of Rp10.22 trillion, a decrease of 6.79% or Rp744.64 billion compared to the end of 2024, when the Company recorded net cash used in investing activities of Rp10.96 trillion. This was due to a 28.58% decrease in time deposit placements in 2025, or the equivalent of Rp1.94 trillion, compared to the end of 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

Kinerja Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, Periode 2024-2025
Cash Flow Performance from Financing Activities, 2024-2025

Perihal Subject	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek Proceeds from Short-term Bank Loans	**12.523.575**	18.276.737	(5.753.162)	(31,48)	●
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Repayment of Short-term Bank Loans	**(14.206.292)**	(17.973.760)	3.767.468	(20,96)	●
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Proceeds from Non-current Borrowings	**9.864.360**	2.313.012	7.551.348	326,47	●
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang Repayments of Non-current Borrowings	**(3.074.328)**	(9.645.714)	6.571.386	(68,13)	●
Penerimaan Utang Salam Proceeds from Salam Payables	**-**	150.000	(150.000)	-	
Pembayaran Utang Salam Repayment of Salam Payables	**(150.000)**	-	(150.000)	-	
Pembayaran Dividen kepada Entitas Non-Pengendali Payment of Dividends to Non-controlling Interest	**(35.333)**	(24.778)	(10.555)	42,60	●
Pembayaran Utang Obligasi Repayments of Bonds Payable	**(857.835)**	(2.435.000)	1.577.165	(64,77)	●
Pembayaran Liabilitas Sewa Repayments of Lease Liabilities	**(492.985)**	(376.183)	(116.802)	31,05	●
Pembayaran Dividen Kas Payment of Cash Dividend	**(2.945.555)**	(1.213.402)	(1.732.153)	142,75	●
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Generated from/(used in) Financing Activities	**625.607**	(10.929.088)	11.554.695	105,72	●

Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2025 mencapai Rp625,61 miliar, mengalami kenaikan 105,72% atau setara dengan Rp11,55 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Perusahaan membukukan penggunaan Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp10,93 triliun. Hal ini terutama disebabkan adanya penerimaan pinjaman jangka panjang di tahun 2025 mencapai Rp9,86 triliun, naik signifikan sebesar Rp7,55 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,31 triliun, serta lebih rendahnya pembayaran pinjaman jangka panjang yang pada tahun 2025 turun menjadi Rp3,07 triliun dari tahun 2024 yang mencapai Rp9,65 triliun.

Net Cash from Financing Activities in 2025 reached Rp625.61 billion, a 105.72% increase, or Rp11.55 trillion, compared to a net cash outflow of Rp10.93 trillion the previous year. This increase was due to the receipt of long-term loans in 2025, which reached Rp9.86 trillion, a significant increase of Rp7.55 trillion compared to Rp2.31 trillion in 2024. This was also due to lower long-term loan repayments, which decreased to Rp3.07 trillion in 2025 compared to Rp9.65 trillion in 2024.

Kemampuan Membayar Utang
Ability to Pay Debt

Kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan finansial dan keberlanjutan operasionalnya. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, digunakan dua jenis rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

A company's ability to meet its obligations is a key indicator of its financial health and operational sustainability. Two ratios are used to measure a company's ability to meet these obligations: liquidity ratios and solvency ratios.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka pendek tanpa harus bergantung pada pendanaan eksternal atau menjual aset dalam waktu singkat.

Liquidity ratios are used to measure a company's ability to meet its short-term obligations. The higher the liquidity ratio, the better the company's financial position in facing short-term obligations without having to rely on external funding or sell assets quickly.

Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini mencerminkan seberapa besar aset dan ekuitas perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban yang dimiliki. Untuk rasio solvabilitas, khususnya rasio utang *(interest bearing & leverage*) terhadap modal sendiri, semakin rendah menunjukkan adanya perbaikan kemampuan Perusahaan untuk melunasi kewajibannya.

While, the solvency ratio is used to measure a company's ability to meet its long-term obligations. This ratio reflects the company's assets and equity compared to its total liabilities. For solvency ratios, specifically the debt (interest-bearing and leverage) to equity ratio, a lower one indicates an improvement in the company's ability to meet its obligations.

Rasio Likuiditas: Mengukur Kemampuan Membayar Kewajiban Jangka Pendek

Liquidity Ratios: Measuring the Ability to Pay Short-Term Obligations

Kinerja Rasio Likuiditas: Kemampuan Perusahaan Membayar Kewajiban Jangka Pendek, Periode 2024-2025
Liquidity Ratio Performance: The Company's Ability to Pay Short-Term Liabilities, 2024-2025

Perihal Subject	**Satuan** Unit	2025	2024	**Selisih** Difference	
		(1)	(2)	(3=1-2)	
Rasio Lancar Current Ratio	%	**202,01**	199,10	2,91	●
Rasio Cepat Quick Ratio	%	**149,34**	144,84	4,50	●
Rasio Kas Cash Ratio	%	**44,57**	68,33	(23,76)	●

Rasio Solvabilitas: Mengukur Kemampuan Membayar Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Perusahaan mengukur rasio solvabilitas melalui perhitungan tingkat rasio utang (*Leverage and Interest Bearing*) terhadap modal sendiri, *Debt Service to Coverage Ratio* (DSCR), dan *Interest Coverage Ratio* (ICR).

Solvency Ratios: Measuring the Ability to Pay Short-Term and Long-Term Obligations

The Company measure its solvency ratios by calculating the debt ratio (Leverage and Interest Bearing) to equity, the Debt Service to Coverage Ratio (DSCR), and the Interest Coverage Ratio (ICR).

Kinerja Rasio Solvabilitas: Kemampuan Perusahaan Membayar Seluruh Kewajiban, Periode 2024-2025
Solvency Ratio Performance: The Company's Ability to Pay All Liabilities, 2024-2025

Perihal Subject	Satuan Unit	2025 (1)	2024 (2)	Selisih Difference (3=1-2)	
Debt to Equity Ratio	%	**45,16**	40,19	4,97	●
Interest Bearing Debt	%	**21,24**	17,62	3,62	●
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	**1,53**	1,29	0,24	●
Debt Service to Coverage Ratio (DSCR)	%	**397,09**	230,45	166,64	●
Interest Coverage Ratio (ICR)	%	**1.043,55**	706,16	337,39	●

Kemampuan Membayar Efek yang Diterbitkan

Berdasarkan peringkat utang yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia pada tahun 2025, seluruh surat utang Perusahaan mendapatkan *rating* idAAA.

Ability to Pay Issued Securities

Based on the debt rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia in 2025, all of the Company's debt securities received an idAAA rating.

Jenis Surat Utang Types of Notes	2025	2024	Perubahan Changes
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017-Seri B (PIHC02BCN1) Shelf Registration Bonds I Pupuk Indonesia Phase I Year 2017-Series B (PIHC02BCN1)	-	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Telah Lunas (2024) Paid (2024)
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 - Seri B (PIHC02BCN1) Shelf Registration BondsII Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series B (PIHC02BCN1)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Telah Lunas (2025) Paid (2025)
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 - Seri C (PIHC02CCN1) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series C (PIHC02CCN1)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Seri A (PIHC02ACN2) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series A (PIHC02ACN2)	-	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Telah Lunas (2024) Paid (2024)
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Seri B (PIHC02BCN2) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series B (PIHC02BCN2)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	-
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Seri C (PIHC02CCN2) Shelf Registration Bonds II Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series C (PIHC02CCN2)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	Pefindo: idAAA (Outlook: Stable)	-

Peringkat nasional idAAA menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang yang dinilai memiliki kemampuan superior dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya dibandingkan emiten Indonesia lainnya.

The idAAA national rating represents the highest rating assigned by PT Pemeringkat Efek Indonesia on the national rating scale for Indonesia. This rating is awarded to issuers or debt securities deemed to have superior capacity to meet their long-term financial obligations compared to other Indonesian issuers.

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility Level

Perusahaan secara konsisten mengelola piutang usaha dengan pemantauan yang ketat terhadap posisi piutang guna memastikan arus kas perusahaan tetap sehat dan stabil. Kemampuan perusahaan untuk menagih piutang-piutang yang dimiliki tercermin pada tingkat kolektibilitas piutang atau *collection period*. Nilai *collection period* yang semakin kecil maka semakin baik. Hal itu berarti kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang-piutangnya semakin cepat.

The Company consistently manages its accounts receivable by closely monitoring its receivables position to ensure healthy and stable cash flow. The Company's ability to collect its receivables is reflected in its receivables collectibility level, or collection period. The shorter the collection period, the better. This indicates the Company's ability to collect its receivables more quickly.

Kinerja Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang, Periode 2024-2025
Accounts Receivable Collectibility Ratio Performance, 2024-2025

Pos Akun Accout	**Satuan** Unit	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
				Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage (%)	
		(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya tidak termasuk Penggantian Biaya dari Pemerintah Indonesia Sales and Other Operating Revenues excluding Reimbursement of Expenses from the Government of Indonesia	Rp-juta Rp-million	**50.894.502**	48.292.293	2.602.209	5,39	●
Piutang Usaha Accounts Receivable	Rp-juta Rp-million	**2.313.876**	2.450.699	(136.823)	(5,58)	●
Rata-rata Hari Pelunasan Piutang (Collection Period) Average Receivables (Collection Period)	Hari Days	**16,59**	18,52	(1,93)		●

Perusahaan memiliki kebijakan batasan kredit bagi debitur sesuai dengan kemampuan masing-masing pelanggan. Kemampuan tersebut dievaluasi secara periodik untuk menentukan kualitas kredit yang diperkirakan mampu dipenuhi oleh debitur, sehingga Perusahaan terhindar dari risiko gagal bayar debitur.

The Company has a credit limit policy for debtors based on each customer's ability. This ability is periodically evaluated to determine the credit quality that debtors are expected to meet, thereby preventing the Company from defaulting.

Collection period tahun 2025 selama 17 hari, lebih cepat 2 hari dibandingkan tahun sebelumnya yang selama 19 hari, yang disebabkan optimalnya penagihan piutang usaha.

In 2025, the collection period was 17 days, 2 days lower than the previous year's 19 days, due to optimized accounts receivable collection.

Perusahaan membukukan piutang usaha Perusahaan tahun 2025 sebesar Rp2,31 triliun, mengalami penurunan 5,58% atau setara dengan Rp136,82 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, di mana piutang usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp2,45 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan optimalnya penagihan piutang usaha.

In 2025, the Company's trade receivables in 2025 reached Rp2.31 trillion, a 5.58% decrease, or Rp136.82 billion, compared to Rp2.45 trillion the previous year. This decrease was due to optimized accounts receivable collection.

Berikut disampaikan rincian umur piutang usaha Perusahaan yang mencerminkan piutang jangka pendek, menengah, dan piutang jangka panjang.

The following shows a breakdown of the Company's accounts receivable aging, reflecting short-term, medium-term, and long-term receivables.

Kinerja Umur Piutang Usaha, Periode 2024-2025
Accounts Receivable Aging Ratio, 2024-2025

Perihal Subject	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	**Persentase** Percentage (%)	
	(1)	**(2)**	**(3=1-2)**	**(3:2)**	
Lancar Current	**1.741.887**	1.647.584	94.303	5,72	●
Jatuh Tempo: Maturity					
1–90 Hari/Days	**523.395**	736.435	(213.040)	(28,93)	●
91–120 Hari/Days	**77.331**	112.208	(34.877)	(31,08)	●
121–365 Hari/Days	**37.279**	130.023	(92.744)	(71,33)	●
> 365 Hari/Days	**766.130**	680.323	85.807	12,61	●
Sub Jumlah Sub Amount	**3.146.022**	3.306.573	(160.551)	(4,86)	●
Cadangan Penurunan Nilai Impairment Proposal	**(832.146)**	(855.874)	23.728	(2,77)	●
Jumlah Piutang Usaha-Bersih Total Accounts Receivable-Net	**2.313.876**	2.450.699	(136.823)	(5,58)	●

Perusahaan memiliki sistem pengelolaan piutang yang ketat guna memastikan stabilitas arus kas dan kesehatan keuangan. Salah satu aspek penting dalam manajemen piutang adalah umur piutang usaha, yang mencerminkan seberapa lama piutang Perusahaan belum tertagih sejak transaksi dilakukan.

The Company maintains a rigorous accounts receivable management system to ensure cash flow stability and financial health. One important aspect of accounts receivable management is the aging of accounts receivable, which reflects the length of time the Company's receivables have been outstanding since the transaction was made.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Individual allowances for impairment losses are calculated for customers who have experienced payment difficulties within a specified period and for customers with generally good credit ratings. This calculation takes into account customer payment trends, relevant information about past events, current conditions, and forecasts of economic conditions.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Based on a review of individual and collective customer receivables at year-end, Group management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover potential losses on uncollectible accounts.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Management Policy

Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan menerapkan kebijakan yang strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Struktur modal yang optimal menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pendanaan dari ekuitas dan utang, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien, mengembangkan bisnis, serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk kepentingan ekspansi, Perusahaan berupaya memaksimalkan pinjaman jangka panjang dari kreditur. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha Perusahaan. Sedangkan untuk kebutuhan modal kerja, Perusahaan menggunakan pinjaman jangka pendek dari kreditur secara proporsional serta memaksimalkan penerbitan obligasi untuk restrukturisasi pinjaman. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga komposisi *debt to equity ratio* agar tidak melampaui syarat/*covenant* yang ditetapkan oleh kreditur.

Kebijakan Perusahaan di bidang struktur modal ini diharapkan mampu menjaga kondisi keuangan yang sehat sehingga dapat mendanai kebutuhan permodalan jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk, menjaga kemampuan melakukan pembayaran kembali pinjaman-pinjamannya.

Rincian Struktur Modal

Pada tahun 2025, Perusahaan dan Entitas Anak menjalankan strategi dalam mengoptimalkan keseimbangan antara ekuitas dan liabilitas guna memastikan stabilitas keuangan jangka panjang serta mendukung rencana ekspansi strategis di masa mendatang. Untuk realisasi total *Leverage* dan *Debt*/EBITDA per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar 0,45 kali dan 1,53 kali.

Capital Structure Policy

Companies implement strategic policies to ensure business sustainability and support long-term growth. An optimal capital structure is key to maintaining a balance between equity and debt financing, enabling the company to operate efficiently, grow its business, and create added value for shareholders and other stakeholders.

For expansion purposes, the Company is striving to maximize long-term borrowings from creditors. This initiative aims to maintain the Company's business continuity. For working capital needs, the Company utilizes short-term borrowings from creditors proportionally and maximizes bond issuance for loan restructuring. This policy is intended to maintain the debt-to-equity ratio so that it does not exceed the requirements/covenants set by creditors.

The Company's capital structure policy is expected to maintain a healthy financial condition so that it can fund both short-term and long-term capital needs, including maintaining the ability to repay its loans.

Capital Structure Details

In 2025, the Company and its Subsidiaries instigated a strategy to optimize the balance between equity and liabilities to ensure long-term financial stability and support future strategic expansion plans. Total leverage and debt/EBITDA as of December 31, 2025, were 0.45x and 1.53x, respectively.

Rasio Struktur Modal Perusahaan, Periode 2024-2025, dan Perubahannya

Company Capital Structure Ratios, 2024-2025, and Changes

Perihal Subject	**Satuan** Unit	**2025**	**2024**	**Selisih** Difference	
		(1)	(2)	(3=1-2)	
Leverage	Kali Times	**0,45**	0,40	0,05	●
Debt/EBITDA	Kali Times	**1,53**	1,29	0,24	●

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Goods Investments

Ikatan material untuk investasi barang modal merupakan langkah strategis yang dilakukan perusahaan guna memastikan realisasi proyek pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi. Hal ini dilakukan untuk menunjang penguatan bisnis perusahaan di masa depan. Pada tahun 2025, Perusahaan memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal yang bukan dalam bentuk pendanaan dengan uraian sebagai berikut:

Material commitments for capital goods investments are strategic steps taken by the company to ensure the implementation of development projects and production capacity increases. This is done to support the strengthening of the company's business in the future. By 2025, the Company had material commitments for capital investment that were not in the form of financing, as shown below:

Realisasi Ikatan Material Investasi Barang Modal
Implementation Material Capital Goods Investment Bonds

Jenis Perikatan/Nama Proyek Type of Engagement/Project Name	**Pihak yang Melakukan Perikatan** Contracting Party	**Nilai Investasi (Rp-juta)** Investment Value (Rp Million)	**Mata Uang** Currency	**Sumber Dana** Funding Source	**Upaya Melindungi Risiko Mata Uang Asing** Efforts to Hedge Foreign Currency Risk
Pembangunan Tangki Amonia PIM kapasitas 10.000 ton Construction of 10,000 tons capacity Amonia Tank	PT Kokoh Semesta	167.646	IDR IDR	DER 0:100	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Pembangunan Pabrik Pusri-IIIB PSP kapasitas 445.500 ton per tahun (Amonia) dan 907.500 ton per tahun (Urea) Construction of Pusri-IIIB Plant with capacity of 445,500 tons per year (Ammonia) and 907,500 tons per Annum (urea)	Konsorsium China Wuhuan Engineering Corp. Ltd - PT Adhi Karya (Persero)	11.458.361	USD dan IDR USD and IDR	DER 70:30	Telah dilakukan upaya lindung nilai sesuai kebutuhan Hedging has been conducted as needed
Pembangunan Pabrik NPK Nitrat PKC kapasitas 100.000 ton per tahun Construction of a PKC NPK Nitrate Plant with a capacity of 100,000 tons per year	PT Rekayasa Industri	608.764	IDR IDR	DER 0:100	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Pembangunan Dermaga A PKG kapasitas 60.000 DWT Construction of Pier A at PKG with a capacity of 60,000 DWT	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	858.730	IDR IDR	DER 0:100	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Pembangunan Tangki Asam Sulfat PKG kapasitas 2 × 20.000 ton Construction of two 20,000-ton sulfuric acid tanks at PKG	PT Nindya Karya	308.776	IDR IDR	DER 0:100	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Proyek *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT kapasitas 594.000 ton per tahun Revamping of Ammonia PKT Plant-2 Project with a capacity of 594,000 tons per year	PT Tripatra Engineers & Constructors	990.051	IDR IDR	DER 0:100	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Pembangunan Pabrik Soda Ash PKT kapasitas 300.000 ton per tahun (Soda Ash) dan 300.000 ton per tahun (Amonium Klorida) Construction of a PKT Soda Ash Plant with a capacity of 300,000 tons per year (Soda Ash) and 300,000 tons per year (Ammonium Chloride)	Konsorsium China Tianchen Engineering Corp. Ltd - PT Enviromate Technology International dan PT Rekayasa Industri	4.322.150	IDR IDR	DER 0:100	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required

Realisasi Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment Implementation

Berikut disampaikan jenis nilai investasi barang modal dan penyertaan modal yang direalisasikan pada tahun 2025, antara lain:

The following is a breakdown of the types of capital goods investments and equity participation realized in 2025, including:

	Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Goods Investment	Tujuan Purpose	Nilai Investasi (Rp-juta) Investment Amount (Rp-million)
Fase Konstruksi Construction Phase			
1	Pembangunan Tangki Amonia PIM kapasitas 10.000 ton Construction of a 10,000-ton PIM amonia tank	Meningkatkan fleksibilitas operasi pabrik amonia-urea eksisting Increasing operational flexibility at existing amonia-urea plants	52.684
2	Pembangunan Pabrik Pusri-IIIB PSP kapasitas 445.000 ton per tahun (Amonia) dan 907.500 ton per tahun (Urea) Construction of the Pusri-IIIB PSP plant with a capacity of 445,000 tons per year (amonia) and 907,500 tons per year (urea)	Membangun pabrik baru dalam rangka meningkatkan competitiveness produk Constructing new plants to enhance product competitiveness	4.435.459
3	Pembangunan Pabrik NPK Nitrat PKC kapasitas 100.000 ton per tahun Construction of a 100,000-ton-per-year PKC NPK Nitrate plant	Diversifikasi bisnis dan substitusi produk impor Business diversification and import product substitution	29.208
4	Pembangunan Dermaga A PKG kapasitas 60.000 DWT Construction of Pier A PKG with a capacity of 60,000 DWT	Mendukung kegiatan bongkar muat bahan baku dan produk untuk pabrik eksisting maupun rencana pengembangan Supporting the loading and unloading of raw materials and products for existing and planned expansion plants	326.727
5	Pembangunan Tangki Asam Sulfat PKG kapasitas 2 x 20.000 ton Construction of 2 × 20,000-ton PKG sulfuric acid tanks	Mendukung pengamanan bahan baku untuk fleksibilitas operasi pabrik eksisting dan rencana pengembangan Supporting raw material security for operational flexibility at existing and planned expansion plants	3.153
6	Proyek Revamping Pabrik Amonia Kaltim-2 PKT kapasitas 594.000 ton per tahun Revamping project for the Kaltim-2 PKT amonia plant with a capacity of 594,000 tons per year	Menambah profit perusahaan melalui efisiensi pemakaian gas bumi Increasing company profits through efficient natural gas use	281.586
7	Pembangunan Pabrik Soda Ash PKT kapasitas 300.000 ton per tahun (Soda Ash) dan 300.000 ton per tahun (NH4Cl) Construction of a 300,000-ton PKT soda ash plant with a capacity of 300,000 tons per year (soda ash) and 300,000 tons per year (NH4Cl)	Hilirisasi produk Amonia untuk mengurangi ketergantungan impor Soda Ash. Downstreaming of ammonia products to reduce dependence on imported soda ash.	302.585
Jumlah Realisasi Fase Konstruksi Total Construction Phase Implementation			**5.431.402**
Fase Persiapan Preparation Phase			
Jumlah Realisasi Fase Persiapan Total Implementation of Preparation Phase			76.431
Jumlah Realisasi Investasi Barang Modal Total Implementation of Capital Goods Investment			5.507.833

Tujuan dari ikatan material investasi barang modal adalah untuk menjamin terealisasinya proyek-proyek pengembangan Perusahaan untuk menunjang penguatan bisnis di masa mendatang. Investasi barang modal Perusahaan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5,51 triliun, yang terdiri dari jumlah realisasi fase konstruksi sebesar Rp5,43 triliun dan fase persiapan sebesar Rp76,43 miliar. Nilai realisasi investasi barang modal tahun 2025 mengalami kenaikan mencapai 31,20% atau setara dengan Rp1,31 triliun dibandingkan dengan nilai realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4,20 triliun.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya progres proyek Pembangunan Pabrik Pusri-IIIB PSP kapasitas 445,50 ribu ton per tahun (Amonia) dan 907,50 ribu ton per tahun (Urea) sebesar Rp4,44 triliun, Dermaga A PKG kapasitas 60.000 DWT sebesar Rp326,73 miliar, Pabrik Soda Ash PKT kapasitas 300,00 ribu ton per tahun *(Soda Ash)* dan 300,00 ribu ton per tahun (Amonium Klorida) sebesar Rp302,58 miliar, dan *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT kapasitas 594,00 ribu ton per tahun sebesar Rp281,59 miliar.

The purpose of the capital goods investment material bonds is to ensure the realization of the Company's development projects to support future business strengthening. The Company's realized capital goods investments in 2025 amounted to Rp5.51 trillion, consisting of Rp5.43 trillion for the construction phase and Rp76.43 billion for the preparation phase. The implementation capital goods investment value in 2025 increased by 31.20%, or Rp1.31 trillion, compared to the previous year's Rp4.20 trillion.

This increase was mainly due to the progress of the Pusri-IIIB PSP Plant construction project with a capacity of 445.50 thousand tons per year (Ammonia) and 907.50 thousand tons per year (Urea) for Rp4.44 trillion, the PKG Pier A with a capacity of 60,000 DWT for Rp326.73 billion, the PKT Soda Ash Plant with a capacity of 300.00 thousand tons per year (Soda Ash) and 300.00 thousand tons per year (Ammonium Chloride) for Rp302.58 billion, and the Revamping of Ammonia PKT Plant-2 with a capacity of 594.00 thousand tons per year for Rp281.59 billion.

Realisasi Investasi Barang Modal, Periode 2024-2025
Capital Goods Investment Implementation, 2024-2025 Period

Perihal Subject	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)
Realisasi Investasi Barang Modal Capital Goods Investment implementation	**5.507.833**	4.197.932	1.309.901	31,20

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring After The Date of The Accountant's report

Berikut disajikan informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan per 31 Desember 2025.

1. *Marked-to-Market*
   Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia ("Perpres") No. 113 Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025, yang mengubah Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, maka peraturan turunan yang diterbitkan setelah periode pelaporan adalah sebagai berikut:
   a. Permentan No. 3 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2026, mengubah Permentan No. 15 Tahun 2025 tentang Perpres No. 6 Tahun 2025 mengenai Pengelolaan Pupuk bersubsidi;
   b. Permentan No. 6 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2026 mengenai Prosedur Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk bersubsidi, menggantikan Permentan No. 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Produksi Pupuk Bersubsidi; dan

The following presents material information and facts that occurred after the Accountant's Report date as of December 31, 2025.

1. Marked to market
   In connection with the issuance of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia ("Perpres") No. 113 of 2025 dated October 24, 2025, which amended Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning the Management of Subsidized Fertilizer, the derivative regulations issued after the reporting period are as follows:
   a. Minister of Agriculture Regulation No. 3 of 2026, issued on February 20, 2026, amending Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 on Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning the Management of Subsidized Fertilizer;
   b. Minister of Agriculture Regulation No. 6 of 2026, issued on March 3, 2026, concerning the Procedure for Calculating the Commercial Value and Components of Subsidized Fertilizer Raw Materials, replacing Minister of Agriculture Regulation No. 28 of 2020 concerning Components of the Cost of Production of Subsidized Fertilizer; and

c. PMK No. 19 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2026, mengenai Perubahan Kedua atas PMK No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Peraturan-peraturan ini menjadi dasar bagi mekanisme pengelolaan subsidi pupuk yang menggunakan sistem *marked to market.*

2. Penerimaan uang muka dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan implementasi marked to market
Berdasarkan Berita Acara No. BA/46/SR.340/B.4/03/2026 dan 01440/A/KU/B0103/SP/2026 tanggal 31 Maret 2026 terkait Perhitungan Pembayaran keperluan Pengadaan Bahan Baku Subsidi Pupuk Urea dan NPK, Grup telah menerima uang muka dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan implementasi *marked to market* sebagai berikut:

c. Minister of Finance Regulation No. 19 of 2026, issued on March 27, 2026, on the Second Amendment to Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.02/2016 concerning Procedures for the Provision, Disbursement, and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds.

These regulations form the basis for the fertilizer subsidy management mechanism using the marked-to-market system.

2. Receipt of advance payments from the Indonesian Government related to the implementation of marked-to-market
Based on Minutes No. BA/46/SR.340/B.4/03/2026 and 01440/A/KU/B0103/SP/2026 dated March 31, 2026, concerning the Calculation of Payments for the Procurement of Raw Materials for Subsidized Urea and NPK Fertilizers, the Group has received advance payments from the Indonesian Government related to the implementation of marked-to-market as follows:

Uang Muka Diterima
Advance Payment Received

Entitas Entity	**Nilai (Rp-juta)** Value (Rp-million)
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	8.658.415
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")	4.226.122
PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	3.703.289
PT Pupuk Kujang ("PKC")	2.171.795
PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	1.822.757

3. Perubahan kepemilikan dan komposisi pemegang saham untuk saham Perusahaan yang diotorisasi
Sesuai dengan Akta Notaris Lumassia, S.H., notaris di Jakarta No. 2 tanggal 26 Januari 2026 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum tanggal 5 Maret 2026 melalui Surat Keputusan No. AHU- 0048823.AH.01.11 tahun 2026, para pemegang saham PT Pupuk Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengalihkan kepemilikan saham atas 249.999 lembar saham Seri B milik DAM kepada Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ("BP BUMN") dalam bentuk saham Seri A Dwiwarna.

Atas perubahan tersebut, komposisi pemegang saham PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi sebagai berikut:

3. Changes in ownership and shareholder composition of authorized Company shares
In accordance with Notarial Deed No. 2 of Lumassia, S.H., a notary in Jakarta, dated January 26, 2026, and ratified by the Minister of Law on March 5, 2026, through Decree No. AHU-0048823.AH.01.11 of 2026, the shareholders of PT Pupuk Indonesia (Persero) agreed to transfer ownership of 249,999 Series B shares owned by DAM to the Indonesian Government through the State-Owned Enterprises Regulatory Agency ("BP BUMN") in the form of Series A Dwiwarna shares.

Due to this change, the shareholder composition of PT Pupuk Indonesia (Persero) is as follows:

Perihal Description	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**	**Jumlah** Amount
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Indonesia Series A Dwiwarna Shares of the Indonesian Government	**250.000**	1,00	250.000
Saham Seri B PT Danantara Asset Management (Persero) Series B Shares of PT Danantara Asset Management (Persero)	**24.750.000**	99,00	24.750.000
Jumlah Total	**25.000.000**	**100,00**	**25.000.000**

Dampak Mata Uang Asing Terhadap Kinerja Perusahaan

Impact of Foreign Currency on The Company's Performance

Perusahaan serta seluruh entitas di bawahnya menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing, yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Perusahaan dan entitas di bawahnya melakukan lindung nilai atas risiko tersebut dan sebagian dikelola menggunakan nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

The Company and all its subsidiaries face foreign exchange risk, which primarily arises from monetary assets and liabilities recognized in a currency different from the entity's functional currency. The Company and its subsidiaries hedge this risk, and some of it is managed using the fair value of monetary assets and liabilities denominated in the same foreign currency.

Fluktuasi mata uang asing, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Perusahaan. Dari sisi operasional, sebagian bahan baku utama pupuk, seperti gas masih banyak yang diperoleh melalui impor dan dibayar dalam valuta asing. Ketika nilai tukar Rupiah melemah terhadap USD, biaya pengadaan bahan baku dan biaya produksi secara keseluruhan meningkat, sehingga mempengaruhi laba Perusahaan.

Foreign currency fluctuations, particularly with the United States Dollar (USD), significantly impact the Company's performance. Operationally, many of the main fertilizer raw materials, such as gas, are still imported and paid for in foreign currencies. When the Rupiah weakens against the USD, raw material procurement costs and overall production costs increase, impacting the Company's bottom line.

Dari sisi keuangan, fluktuasi nilai tukar juga berdampak pada kewajiban perusahaan yang menggunakan mata uang asing sebagai pinjaman, maupun kontrak jangka panjang. Pelemahan rupiah dapat menimbulkan rugi selisih kurs serta meningkatkan beban pembayaran pokok dan bunga utang dalam rupiah, yang pada akhirnya memengaruhi laba rugi, arus kas, dan rasio keuangan perusahaan.

Financially, exchange rate fluctuations also impact the Company's obligations using foreign currency for loans and long-term contracts. A weakening Rupiah can result in foreign exchange losses and increase the expense of principal and interest payments on Rupiah-denominated debt, ultimately impacting the Company's profit and loss, cash flow, and financial ratios.

Dari sisi penjualan, bisnis komoditas seperti Urea dan Amonia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Pada tahun 2025 harga jual Urea dalam negeri sebesar Rp5.678.886/ton dan Urea ekspor sebesar USD405/ton. Untuk harga jual Amonia dalam negeri sebesar Rp6.710.538/ton dan Amonia ekspor sebesar USD343/ton. Harga jual Urea mengalami kenaikan dibandingkan harga jual tahun 2024, sementara itu Amonia tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan harga jual tahun 2024. Hal ini utamanya disebabkan kondisi geopolitik yang mempengaruhi pasar global.

In terms of sales, commodity businesses such as urea and ammonia are heavily influenced by market price fluctuations. In 2025, the domestic selling price for urea was Rp5,678,886/ton, and the export price for urea was USD405/ton. The domestic selling price for amonia was Rp6,710,538/ton, and the export price for amonia was USD343/ton. Urea selling prices increased compared to 2024, while amonia prices decreased in 2025 compared to 2024. This was primarily due to geopolitical conditions affecting the global market.

Pencapaian Target Tahun 2025
Achievement of 2025 Targets

Perihal Subject	Jumlah Produksi Production Quantity Target 2025 (ton) 2025 Target (ton) (1)	Realisasi 2025 (ton) 2025 Implementation (ton) (2)	Capaian Target 2025 (%) Achievement of 2025 Target (%) (3=2:1)	
Pupuk Fertilizer				
Urea Urea	**7.860.000**	**7.627.060**	97,04	●
SP-36 SP-36	**25.000**	**53.985**	215,94	●
ZA ZA	**564.000**	**607.342**	107,68	●
NPK NPK	**4.164.500**	**4.233.506**	101,66	●
ZK ZK	**9.000**	**11.194**	124,38	●
Subtotal Produksi Pupuk Fertilizer Production Subtotal	**12.622.500**	**12.533.088**	99,29	●
Non-Pupuk Non-Fertilizer				
Amonia Ammonia	**5.970.000**	**5.761.280**	96,50	●
Asam Sulfat Sulfuric Acid	**320.000**	**608.859**	190,27	●
Asam Fosfat Phosphoric Acid	**248.185**	**257.896**	103,91	●
Subtotal Produksi Non-Pupuk Non-Fertilizer Production Subtotal	**6.538.185**	**6.628.034**	101,37	●
Produk Samping* By-products	**62.600**	**78.513**	125,42	●
Jumlah Produksi Production Total	**19.223.285**	**19.239.636**	**100,09**	●

*) Produk Samping terdiri dari CO2 Cair, Dry Ice, HCL, dan Alumunium Fluorida.
*) By-products consist of liquid CO2, dry ice, hydrochloric acid, and aluminium fluoride

Capaian realisasi jumlah produksi pupuk dan non-pupuk tahun 2025 sebanyak 19,24 juta ton atau mencapai 100,09% terhadap RKAP 2025. Realisasi ini lebih tinggi dari RKAP, yang utamanya dikontribusikan oleh produksi non-pupuk.

The implementation production of fertilizer and non-fertilizer products in 2025 reached 19.24 million tons, or 100.09% of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP). This achievement was higher than the RKAP, primarily contributed by non-fertilizer production.

Pemasaran dan Penjualan
Marketing and Sales

Perihal Subject	Target 2025 (ton) 2025 Target (ton)	Realisasi 2025 (ton) 2025 Implementation (ton)	Capaian Target 2025 (%) Achievement of 2025 Target (%)	
	(1)	(2)	(3=2:1)	
Pupuk Fertilizer				
Pupuk PSO PSO Fertilizer				
Urea Urea	**4.634.106**	3.798.719	81,97	●
NPK NPK	**4.415.894**	4.074.873	92,28	●
Pupuk Lainnya* Other Fertilizer*	**500.000**	236.979	47,40	●
Subtotal Penjualan Pupuk PSO PSO Fertilizer Production Subtotal	**9.550.000**	8.110.571	84,93	●
Pupuk Non-PSO Non-PSO Fertilizer				
Urea Urea	**3.073.000**	3.873.443	126,05	●
NPK NPK	**203.321**	298.373	146,75	●
Pupuk Lainnya* Other Fertilizer*	**506.700**	511.990	101,04	●
Subtotal Penjualan Pupuk Non-PSO Non-PSO Fertilizer Production Subtotal	**3.783.021**	4.683.805	123,81	●
Subtotal Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Subtotal	**13.333.021**	12.794.376	95,96	●
Non-Pupuk Non-Fertilizer				
Amonia Ammonia	**819.580**	708.403	86,43	●
Asam Sulfat Sulfuric Acid	**200.000**	266.080	133,04	●
Asam Fosfat Phosphoric Acid	**33.000**	17.160	52,00	●
Lainnya***) Others***)	**63.100**	72.502	114,90	●
Subtotal Penjualan Non-Pupuk Non-Fertilizer Sales Subtotal	**1.115.680**	1.064.145	95,38	●
Jumlah Volume Penjualan Total Sales Volume	**14.448.700**	**13.858.521**	**95,92**	●

*) Terdiri dari Organik dan ZA.
**) Terdiri dari SP-36, ZA, DAP, ZK, Kaptan, Petrocas, KCL, Rock Phosphate.
***) Terdiri dari AlF3, HCl, dan CO2.
*) Consists of Organics and ZA.
**) Consists of SP-36, ZA, DAP, ZK, Kaptan, Petrocas, KCl, Rock Phosphate.
***) Consists of AlF3, HCl, and CO2.

Realisasi volume penjualan tahun 2025 mencapai 13,86 juta ton atau mencapai 95,92% terhadap RKAP 2025. Realisasi ini lebih rendah dari RKAP disebabkan penjualan pupuk PSO belum mencapai target dikarenakan jumlah petani yang tidak melakukan penebusan masih tinggi, yaitu sebesar 3,52 juta petani atau 23,6% dari petani terdaftar sebesar 14,97 juta petani.

Sales volume realization in 2025 reached 13.86 million tons, or 95.92% of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP). This lower realization was due to the fact that PSO fertilizer sales did not reach the target due to the high number of farmers who did not redeem their fertilizers, namely 3.52 million farmers, or 23.6% of the 14.97 million registered farmers.

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain
Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Perihal Subject	Target 2025 (Rp-juta) (Rp-million) (1)	Realisasi 2025 (Rp-juta) Implementation 2025 (Rp-million) (2)	Capaian Target 2025 (%) Achievement of 2025 Target (%) (3=2:1)	
Pendapatan Revenue	**52.124.129**	50.894.502	97,64	●
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia	**43.111.832**	39.507.147	91,64	●
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Revenue from Contract with Customers	**95.235.961**	90.401.649	94,92	●
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	**(80.769.731)**	(75.013.927)	92,87	●
Laba Bruto Gross Profit	**14.466.230**	15.387.722	106,37	●
Beban Penjualan Selling Expenses	**(1.208.906)**	(920.334)	76,13	●
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	**(5.353.185)**	(5.551.810)	103,71	●
(Beban)/Pendapatan Lainnya-Bersih Other (Expense)/Income-Net	**34.558**	(443.404)	(1.283,08)	●
Laba Operasi Operating Profit	**7.938.697**	8.472.174	106,72	●
Pendapatan Keuangan Finance Income	**386.779**	1.160.425	300,02	●
Biaya Keuangan Finance Costs	**(1.914.793)**	(1.372.451)	71,68	●
Bagian atas (Rugi)/Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net (Loss)/Profit of Associates and Joint Ventures	**240.749**	(342.126)	(142,11)	●
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**6.651.431**	7.918.022	119,04	●
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**(1.792.726)**	(2.405.237)	134,17	●
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**4.858.705**	5.512.785	113,46	●
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income for the Year After Tax	-	1.564.913	-	
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	-	7.077.698	-	
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	**4.858.705**	5.535.884	113,94	●
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interest	-	(23.099)	-	
Laba Komprehensif yang Diatribusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	**4.858.705**	7.100.797	146,15	●
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interest	-	(23.099)	-	

Pada tahun 2025, Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp5,51 triliun atau mencapai 113,46% dari target sebesar Rp4,86 triliun. Laba tahun berjalan dapat mencapai target disebabkan:

1. Volume penjualan produk komersil (pupuk dan non pupuk) mencapai 117,34% dari target.
2. Efisiensi beban usaha dan beban keuangan yaitu masing-masing mencapai Rp6,47 triliun atau 98,63% serta Rp1,37 triliun atau 71,68% dari target.
3. Pendapatan keuangan mencapai Rp1,16 triliun atau 300,02% dari target yang merupakan kontribusi dari pengelolaan keuangan.

In 2025, the Company recorded a net profit of Rp5.51 trillion, or 113.46% of the target of Rp4.86 trillion. The net profit exceeded the target due to:

1. Sales volume of commercial products (fertilizers and non-fertilizers) reached 117.34% of the target.
2. Efficiency in operating expenses and financial expenses, which reached Rp6.47 trillion or 98.63% and Rp1.37 trillion or 71.68% of the target, respectively.
3. Financial income reached Rp1.16 trillion or 300.02% of the target, which was a result of effective financial management.

Posisi Keuangan
Financial Position

Perihal Subject	**Target 2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Realisasi 2025 (Rp-juta)** Implementation 2025 (Rp-million)	**Capaian Target 2025 (%)** Achievement of 2025 Target (%)	
	(1)	**(2)**	**(3=2:1)**	
Aset Assets				
Aset lancar Current Assets	**54.062.323**	**53.583.702**	99,11	●
Aset Tetap Non-current Assets	**84.889.534**	**84.562.281**	99,61	●
Aset lain-lain Other Assets	**13.411.614**	**12.036.842**	89,75	●
Jumlah Aset Total Assets	**152.363.470**	**150.182.825**	**98,57**	●
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Liabilities				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	**29.680.005**	**26.525.307**	89,37	●
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	**20.242.039**	**20.199.983**	99,79	●
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**49.922.044**	**46.725.290**	**93,60**	●
Ekuitas Equity				
Jumlah Ekuitas Total Equity	**102.441.426**	**103.457.535**	**100,99**	●
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**152.363.470**	**150.182.825**	**98,57**	●

Jumlah Aset tahun 2025 sebesar Rp150,18 triliun atau mencapai 98,57% terhadap RKAP sebesar Rp152,36 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari RKAP disebabkan terdapatnya penurunan nilai piutang usaha, serta kas dan setara kas.

Total assets in 2025 reached Rp150.18 trillion, or 98.57% of the RKAP (Regional Budget Plan) of Rp152.36 trillion. This realisation is lower than the RKAP due to a decrease in the value of accounts receivable, as well as cash and cash equivalents.

Struktur Modal
Capital Structure

Perihal Subject	Target 2025 (Rp-juta) (Rp-million)	Realisasi 2025 (Rp-juta) Implementation 2025 (Rp-million)	Capaian Target 2025 (%) Achievement of 2025 Target (%)	
	(1)	(2)	(3=2:1)	
Liabilitas Berbasis Bunga (*Interest Bearing Debt*) Total Interest Bearing Debt	**26.963.909**	**21.975.463**	**81,50**	●
Jumlah Ekuitas Total Equity	**102.441.425**	**103.457.535**	**100,99**	●
Jumlah Sumber Permodalan Total Sources of Capital	**129.405.334**	**125.432.998**	**96,93**	●

Pada tahun 2025, struktur modal Perusahaan didominasi oleh ekuitas atau permodalan sendiri. Hal ini menegaskan bahwa struktur modal Perusahaan memiliki fondasi yang kuat.

In 2025, the Company's capital structure was dominated by equity, or equity capital. This confirms the Company's capital structure is a strong foundation.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Capital Management

Perihal Subject	Target 2025 (Rp-juta) (Rp-million)	Realisasi 2025 (Rp-juta) Implementation 2025 (Rp-million)	Capaian Target 2025 (%) Achievement of 2025 Target (%)	
	(1)	(2)	(3=2:1)	
Jumlah Karyawan (Orang) Number of Employees (People)	**8.012**	**7.882**	98,38	●
Biaya Pelatihan dan Pendidikan (Rp-juta) Training and Education Costs (Rp-million)	**274.828**	**203.538**	74,06	●

Jumlah karyawan tahun 2025 sebanyak 7.882 orang dengan memperhitungkan jumlah karyawan PKWTT dan karyawan PKWT atau mencapai 98,38% terhadap target. Sedangkan biaya pelatihan dan pendidikan mencapai Rp203,54 miliar atau mencapai 74,06% terhadap target.

The number of employees in 2025 was 7,882, taking into account both fixed-term and fixed-term employees, or 98.38% of the target. While, training and education costs reached Rp203.54 billion, or 74.06% of the target.

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Health Level

Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023, PTPI telah melakukan pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan Tingkat Kesehatan Sangat Sehat (idAAA).

In line with the Republic of Indonesia Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023, PTPI was rated as Very Healthy (idAAA) by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terkait penggunaan laba Perusahaan, Manajemen mengusulkan pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan mengacu pada kinerja Perusahaan selama periode tertentu. Usulan tersebut diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen hanya dapat dibagikan jika Perusahaan memiliki saldo laba ditahan yang positif dan telah memenuhi ketentuan minimal cadangan wajib.

Basis for Dividend Distribution Policy
Based on the Company's Articles of Association concerning the use of profits, Management proposes dividend payments to shareholders based on the Company's performance during a specific period. This proposal is approved by the General Meeting of Shareholders (GMS). Dividends can only be distributed if the Company has a positive retained earnings balance and meets the minimum required reserve requirements.

Pembagian Dividen Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2025 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024, pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp8,67 triliun, dengan komposisi sebagai berikut.

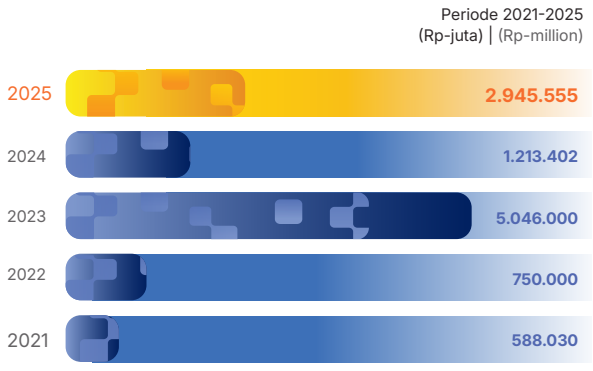
Dividend Distribution for 2025 and Previous Years
Based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) resolution held on June 16, 2025, concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year, shareholders approved the allocation of net profit for the 2024 fiscal year attributable to owners of the parent entity amounting to Rp8.67 trillion, with the following composition:

Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tahun 2024 (Rp-juta) Net Income Attributable to Parent Entity in 2024 (Rp-million)	:	**8.668.906**
Dividen kas yang dibagikan (jumlah dividen yang didistribusikan) (Rp-juta) Total Cash Dividends Distributed (Rp-million)	:	**2.945.555**
Rasio pembayaran dividen (persentase laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tahun 2024 yang dibagikan sebagai dividen) (%) Dividend payout ratio (percentage of net profit attributable to the parent entity in 2024 distributed as dividends) (%)	:	**33,98%**
Nilai dividen kas per lembar saham (Rp) Cash dividend amount per share (Rp)	:	**117.822**
Tanggal pengumuman Announcement Date	:	**16 Juni 2025** June 16, 2025
Tanggal pembayaran Payment Date	:	• **25 Juli 2025** • **5 Desember 2025** • July 25, 2025 • December 5, 2025

Tahun Buku Fiscal Year	**Tahun Pembagian** Distribution Year	**Tanggal Pengumuman** Announcement Date	**Tanggal Pembayaran** Payment Date	**Dividen Kas yang Dibagikan(Rp-juta)** Cash Dividends Distributed (Rp-million)	**Dividen per Lembar Saham (Rp)** Dividend per Share	**Rasio Pembagian Dividen (%)** Dividend Payout Ratio
2024	2025	16 Juni 2025 June 16, 2025	• 25 Juli 2025 • 5 Desember 2025 • July 25, 2025 • December 5, 2025	2.945.555	117.822	33,98
2023	2024	22 Juli 2024 July 22, 2024	21 Agustus 2024 August 21, 2024	1.213.402	48.536	19,57
2022	2023	6 Juni 2023 June 6, 2023	• 6 Juli 2023 • 4 Agustus 2023 • 6 September 2023 • July 6, 2023 • August 4, 2023 • September 6, 2023	5.046.000	201.840	27,33
2021	2022	29 Juni 2022 June 29, 2022	• 28 Juli 2022 • 29 Agustus 2022 • 29 September 2022 • July 28, 2022 • August 29, 2022 • September 29, 2022	750.000	30.000	14,09
2020	2021	30 Juni 2021 June 30, 2021	• 29 Juli 2021 • 30 Agustus 2021 • 29 September 2021 • July 29, 2021 • August 30, 2021 • September 29, 2021	588.030	23.521	25,16
2019	2020	4 Agustus 2020 August 4, 2020	• 2 September 2020 • 2 Oktober 2020 • 2 November 2020 • September 2, 2020 • October 2, 2020 • November 2, 2020	973.500	38.940	26,73*

*) Rasio pembagian dividen sebesar 26,73% pada tahun 2020 dihitung berdasarkan laba bersih konsolidasian tahun buku 2019 sebesar Rp3,64 triliun, sebagaimana tercantum dalam keputusan RUPS. Nilai tersebut mengacu pada laporan keuangan sebelum dilakukan *restatement* oleh auditor independen pada tahun 2020, yang menyesuaikan laba tahun 2019 menjadi Rp2,9 triliun. Dengan demikian, rasio dividen tersebut tidak menggunakan angka laba bersih setelah *restatement*.
*) The dividend distribution ratio of 26.73% in 2020 was calculated based on the consolidated net profit for the 2019 fiscal year of Rp3.64 trillion, as stated in the GMS resolution. This value refers to the financial statements prior to the restatement by the independent auditor in 2020, which adjusted the 2019 profit to Rp2.9 trillion. Therefore, the dividend ratio did not use the net profit figure after the restatement.

Perkembangan Dividen Kas yang Dibagikan
Development of Cash Dividends Distributed



Perpajakan dan PNBP Lainnya: Kontribusi Terhadap Negara

Taxation And Other PNBP Revenue: Contribution to the State

Kebijakan Pengelolaan dan Pembayaran Pajak

Pajak yang dibayarkan Perusahaan setiap tahun adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Unifikasi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pajak lainnya. Upaya Pengendalian Perpajakan tahun 2025 Pupuk Indonesia Group dilakukan melalui peningkatan Aspek Tax Compliance dan edukasi yang berkelanjutan terkait perubahan dan/atau pembaruan Peraturan Perpajakan kepada seluruh personil pajak serta wajib pajak perorangan di dalam Pupuk Indonesia Group bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Tax Management and Payment Policy

The Company's annual taxes include Corporate Income Tax (PPh Badan), Article 21 Income Tax, Unified Income Tax, Value Added Tax (VAT), and other taxes. Pupuk Indonesia Group's 2025 Tax Control efforts were implemented through improved Tax Compliance and ongoing education regarding changes and/or updates to Tax Regulations for all tax personnel and individual taxpayers within the Pupuk Indonesia Group, in collaboration with the Directorate General of Taxes.

Realisasi Pembayaran Pajak

Pajak yang dibayarkan Perusahaan setiap tahun adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Unifikasi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak lainnya. Perusahaan telah melakukan pemenuhan terkait kewajiban dalam membayar pajak yang merupakan salah satu bentuk kontribusi Perusahaan kepada negara. Pada tahun 2025, kontribusi Perusahaan dalam bentuk pajak tercatat sebesar Rp7,15 triliun, mengalami kenaikan 11,30% atau setara dengan Rp726,39 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp6,43 triliun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya kenaikan setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 4,51% yang sejalan dengan kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setiap tahunnya;
2. Kenaikan setoran atas pajak dan retribusi daerah sebesar 9,49% yang sejalan dengan kenaikan konsumsi air dan listrik di Anak Perusahaan;
3. Adanya kenaikan setoran Pajak Penghasilan sebesar 8,03% dikarenakan kenaikan transaksi jual-beli dan adanya dinamisasi (peningkatan) angsuran PPh Pasal 25;
4. Adanya kenaikan setoran PPN sebesar 15,2% dikarenakan kenaikan transaksi pembelian; dan
5. Adanya kenaikan setoran bea dan pajak lainnya sebesar 308,45% dikarenakan peningkatan nilai impor PKT dan beberapa Anak Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas kurang bayar pajak di tahun 2025.

Rincian realisasinya untuk tahun buku 2024 dan 2025 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Implementation Tax Payments

Taxes paid by the Company each year include Corporate Income Tax (PPh Badan), Income Tax Article 21, Unified Income Tax, Value Added Tax (VAT), and other taxes. The Company has fulfilled its tax obligations, which constitute its contribution to the state. In 2025, the Company's tax contribution was Rp7.15 trillion, an increase of 11.30%, or Rp726.39 billion, compared to Rp6.43 trillion in 2024. This increase was due to several factors, including:

1. A 4.51% increase in Land and Building Tax payments, in line with the annual increase in the Taxable Value (NJOP);
2. A 9.49% increase in regional taxes and levies, in line with the increase in water and electricity consumption at Subsidiaries;
3. An 8.03% increase in Income Tax payments due to an increase in sales and purchase transactions and a dynamic (increase) in Article 25 Income Tax installments;
4. A 15.2% increase in VAT payments due to an increase in purchase transactions; and
5. A 308.45% increase in customs duties and other taxes due to an increase in the value of PKT imports and several Subsidiaries receiving Tax Collection Letters (STP) for tax underpayments in 2025.

Details of the Implementation for the 2024 and 2025 fiscal years are shown in the table below.

Kontribusi Perusahaan kepada Negara Berupa Pajak, Periode 2024-2025
Corporate Contributions to the State in the Form of Taxes, 2024-2025

	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Tax	**105.681**	101.124	4.557	4,51	●
Pajak dan Retribusi Daerah Local Taxes and Retributions	**53.555**	48.913	4.642	9,49	●

Kontribusi Perusahaan kepada Negara Berupa Pajak, Periode 2024-2025
Corporate Contributions to the State in the Form of Taxes, 2024-2025

	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)	
Pajak Penghasilan* Income Tax*	**4.329.364**	4.007.469	321.895	8,03	●
PPN** VAT**	**2.595.724**	2.253.227	342.497	15,20	●
Bea dan Pajak Lainnya Other Duties and Taxes	**69.923**	17.119	52.804	308,45	●
Jumlah Total	**7.154.247**	**6.427.852**	**726.395**	**11,30**	●

*) Terdiri dari PPh, PotPut, dan PPh Wajib Pajak Badan.
*) Consist of Withholding Taxes and Corporate Income Tax
**) Terdiri dari Kurang Bayar PPN Masa, PPn Dipungut oleh WAPU.
**) Consist of Periodic VAT Underpayment, VAT Collected by Collectors (WAPU)

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Pada tahun 2025 PTPI tidak memiliki kewajiban terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

Other Non-Tax State Revenue (PNBP)

In 2025, PTPI had no obligations related to other Non-Tax State Revenue (PNBP).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Use of Proceeds from the Public Offering

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak melaksanakan penawaran umum saham perdana. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham.

As of the end of 2025, the Company did not conduct an initial public offering. Therefore, there is no information regarding the implementation of the use of proceeds from the initial public offering.

Informasi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Information Regarding the Use of Proceeds from Public Bond Offering

Subjek Subject	**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri C** Shelf Registration Bonds II Phase I 2020 Series C	**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri B** Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series B	**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri C** Shelf Registration Bonds II Phase II 2021 Series C
Penggunaan Dana Use of Funds	31% *Refinancing* Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Iskandar Muda 31% Refinancing of PT Pupuk Iskandar Muda's Working Capital Loans	94% Refinancing atas Kredit Investasi Perbankan *Amurea* II PT Petrokimia Gresik 94% Refinancing of PT Petrokimia Gresik's Amurea II Bank Investment Loans	88% *Refinancing* atas Kredit Investasi Perbankan Amurea II PT Petrokimia Gresik 88% Refinancing of PT Petrokimia Gresik's Amurea II Bank Investment Loans
	69% *Refinancing* Obligasi untuk Modal Kerja PT Rekayasa Industri 69% Refinancing of PT Rekayasa Industri's Working Capital Bonds	6% *Refinancing* Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik 6% Refinancing of PT Pupuk Indonesia Logistik's Bank Working Capital Loans	12% *Refinancing* Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik 12% Refinancing of PT Pupuk Indonesia Logistik's Bank Working Capital Loans

Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Report on The Use of Additional State Capital Participation (PMN)

Sebagai entitas usaha yang mendapatkan modal dari Pemerintah Indonesia, PTPI memiliki kewajiban untuk menyampaikan kronologi penerbitan saham sejak awal hingga posisi per tanggal 31 Desember 2025. Posisi Modal Disetor PTPI per tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp25.000.000.000.000 dengan jumlah lembar saham sebanyak 25.000.000 lembar bernilai Rp1.000.000 per lembar. Berikut kronologi penerbitan saham dari awal sampai akhir tahun buku 2025.

As a business entity receiving capital from the Indonesian Government, PTPI is required to submit a chronology of share issuances from inception to December 31, 2025. PTPI's Paid-in Capital as of December 31, 2025, was Rp25,000,000,000,000, with 25,000,000 shares worth Rp1,000,000 per share. The following is a chronology of share issuances from inception to the end of the 2025 fiscal year.

Keterangan Description	**Tahun** Year	**Jumlah (Rp-juta)** Total (Rp million)	**Akumulasi (Rp-juta)** Accumulation (Rp million)	**Akta Notaris** Notarial Deed	**Nama Notaris** Notary
Modal Awal Initial Capital	1970	7.000	7.000	Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 Deed No. 4 dated January 3, 1970	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1975	24.000	31.000	Akta No. 2 tanggal 1 April 1975 Deed No. 2 dated April 1, 1975	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1976	6.000	37.000	Akta No. 62 tanggal 20 Mei 1976 Deed No. 62 dated May 20, 1976	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1981	108.000	145.000	Akta No. 7 tanggal 5 Oktober 1981 Deed No. 7 dated October 5, 1981	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1984	55.000	200.000	Akta No. 19 tanggal 20 Juli 1984 Deed No. 19 dated July 20, 1984	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1989	870.710	1.070.710	Akta No. 4 tanggal 4 September 1989 Deed No. 4 dated September 4, 1989	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1997	1.829.290	2.900.000	Akta No. 14 tanggal 12 September 1997 Deed No. 14 dated September 12, 1997	Imas Fatimah, S.H.
Penambahan Additional	2002	6.000	2.906.000	Akta No. 13 tanggal 5 Februari 2002 Deed No. 13 dated February 5, 2002	Imas Fatimah, S.H.
Penambahan Additional	2005	957.948	3.863.948	Akta No. 20 tanggal 12 September 2005 Deed No. 20 dated September 12, 2005	Fathiah Helmi, S.H.
Penambahan Additional	2008	390.000	4.253.948	Akta No. 6 tanggal 4 Februari 2008 Deed No. 6 dated February 4, 2008	Fathiah Helmi, S.H.
Penambahan Additional	2008	35.058	4.289.006	Akta No. 15 tanggal 11 Desember 2008 Deed No. 15 dated December 11, 2008	Fathiah Helmi, S.H.
Penambahan Additional	2011	6.321.000	10.610.006	Akta No. 7 tanggal 7 Januari 2011 Deed No. 7 dated January 7, 2011	Fathiah Helmi, S.H.
Penambahan Additional	2012	1.338.048	11.948.054	Akta No. 11 tanggal 19 Januari 2012 Deed No. 11 dated January 19, 2012	Lumassia, S.H.
Penambahan Additional	2013	951.854	12.899.908	Akta No. 14 tanggal 26 April 2013 Deed No. 14 dated April 26, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H.
Penambahan Additional	2018	12.100.092	25.000.000	Akta No. 3 tanggal 24 Oktober 2018 Deed No. 3 dated October 24, 2018	Lumassia, S.H.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestments, Business Mergers, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Affiliated Transactions, and Involving Conflicts of Interest Transactions

Di tahun 2025 Perusahaan tidak memiliki informasi material antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.

Di samping itu, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, dan Peraturan OJK No. VIII.G.7, sebagai transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Pihak berelasi di sini didefinisikan berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, bahwa entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan pihak berelasi dari Pupuk Indonesia Group; mencakup entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Informasi transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan telah diungkapkan secara rinci pada CALK 30, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 yang dilampirkan pada Laporan Tahunan ini.

Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan mengedepankan pemenuhan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan tidak pernah mendapatkan sanksi terkait dugaan ketidakwajaran atas transaksi yang terjadi maupun dugaan adanya benturan kepentingan.

In 2025, the Company has no material information regarding, among other things, investments, expansions, divestitures, business mergers or consolidations, acquisitions, debt or equity restructurings, material transactions, related-party transactions, and conflicts of interest.

In addition, the Company conducts transactions with related parties as defined in PSAK 224: Disclosure of Related Parties, and OJK Regulation No. VIII.G.7, as affiliate transactions that constitute business activities carried out to generate business revenue and are conducted routinely, repeatedly, and/or continuously. Related parties here are defined based on OJK Regulation No. VIII.G.7, whereby entities related to the Government are considered related parties of the Pupuk Indonesia Group; this includes entities controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

Information regarding related-party transactions or material transactions—which constitute business activities conducted to generate revenue and are carried out on a routine, recurring, and/or ongoing basis—has been disclosed in detail in Note 30 to the 2025 Consolidated Financial Statements, attached to this Annual Report.

All transactions with related parties are conducted in compliance with applicable laws and regulations. As of the end of the reporting period, the Company has never received any sanctions related to allegations of irregularities in transactions or allegations of conflicts of interest.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi yang memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun hasil usaha Perusahaan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi keuangan yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kejadian tersebut.

Throughout the 2025 fiscal year, there were no extraordinary or rare events that had a material impact on the Company's financial condition or results of operations. Therefore, no financial information needs to be reported in connection with these events.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak Terhadap Perusahaan

Changes to Statutory Regulations that Impact The Company

UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enacted Regulations and/or Legislation	:	Pembentukan BPI Danantara dan Perubahan struktur pemegang saham pada BUMN. Establishment of BPI Danantara and Changes to the Shareholder Structure of BUMN.
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on the Company	:	Perubahan Struktur Pemegang Saham PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi: 1. Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN 2. Saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (Persero) yang semula bernama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Changes in the Shareholding Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero) to: 1. Series A Dwiwarna Shares owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of BUMN 2. Series B Shares owned by PT Biro Klasifikasi Indonesia
Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan Qualitative Impact on the Company	:	-

UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 29 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law No. 29 of 2003 concerning State-Owned Enterprises

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enacted Regulations and/or Legislation	:	Negara Republik Indonesia memiliki 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan saham Seri A Dwiwarna melalui Kepala BP BUMN dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada BUMN yang merupakan saham Seri B melalui BPI Danantara. The Republic of Indonesia owns 1% (one percent) of the Series A Dwiwarna shares in BUMN through the Head of BP BUMN, and 99% (ninety-nine percent) of the Series B shares in BUMN through BPI Danantara.
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on the Company	:	Komposisi Pemegang Saham PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi: 1. 1% saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN 2. 99% saham Seri B milik PT Danantara Asset Management The composition of PT Pupuk Indonesia (Persero) shareholders is as follows: 1. 1% of the Series A Dwiwarna shares in the Republic of Indonesia through BP BUMN 2. 99% of the Series B shares in PT Danantara Asset Management
Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan Qualitative Impact on the Company	:	-

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 113 of 2025 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizer

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enacted Regulations and/or Legislation	:	Perpres Nomor 113 Tahun 2025 menyempurnakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui efisiensi anggaran dan percepatan distribusi, di mana berdasarkan peraturan ini perusahaan wajib melakukan efisiensi operasional industri pupuk guna menjamin ketersediaan stok domestik sebelum melakukan ekspor. Presidential Regulation No. 113 of 2025 improves the governance of subsidized fertilizer through budget efficiency and accelerated distribution. Under this regulation, companies are required to implement operational efficiencies in the fertilizer industry to ensure domestic stock availability before export.
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on the Company	:	Perubahan skema skema *Cost+* menjadi *Marked to Market* dapat meningkatkan daya saing Perusahaan Changing the Cost+ scheme to Marked to Market can improve company competitiveness.
Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan Qualitative Impact on the Company	:	Pengembangan pada pabrik pupuk agar lebih efisien dalam penyediaan pupuk untuk Petani Nasional Development of fertilizer factories to increase efficiency in providing fertilizer to national farmers.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Republic of Indonesia Minister of Agriculture Regulation Number 15 of 2025 concerning Implementing Presidential Regulation Number 6 of 2025 concerning Subsidized Fertilizer Governance

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enacted Regulations and/or Legislation	:	Aturan ini menjadi panduan teknis bagi perusahaan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi secara lebih ketat, di mana penyaluran hanya diberikan kepada petani yang menggarap lahan maksimal dua hektar untuk komoditas pangan tertentu. Pemerintah menetapkan kuota nasional yang harus dijaga ketersediaannya oleh perusahaan hingga ke tingkat kios pengecer, lengkap dengan mekanisme pengawasan dan sanksi tegas jika terjadi penyimpangan di lapangan. Dengan aturan ini, seluruh proses penebusan pupuk di kios resmi wajib tercatat secara digital agar pertanggungjawaban anggaran subsidi tetap transparan dan tepat sasaran bagi mereka yang berhak. This regulation provides technical guidance for companies to distribute subsidized fertilizer more strictly, with distribution only granted to farmers cultivating a maximum of two hectares of land for specific food commodities. The government has established a national quota that companies must maintain, down to the retail kiosk level, complete with a monitoring mechanism and strict sanctions for any deviations in the field. This regulation requires that the entire fertilizer redemption process at official kiosks be digitally recorded to ensure transparency and targeted distribution of the subsidy budget to those entitled to it.
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on the Company	:	Perusahaan dapat menurunkan terjadinya penyimpangan pupuk bersubsidi yang dapat merugikan Perusahaan. Companies can reduce the incidence of subsidized fertilizer misappropriation, which can be detrimental to the company.
Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan Qualitative Impact on the Company	:	Perusahaan dapat melakukan melakukan *monitoring* terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi hingga Titik Serah, karena penyederhanaan rangkaian rantai pasokan. Companies can monitor the distribution of subsidized fertilizer down to the point of delivery, thanks to the simplified supply chain.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

PSAK 117 : Kontrak Asuransi
PSAK 117: Insurance Contracts

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan Explanation of the Changes in Accounting Policies Implemented	:	Perubahan Kebijakan Akuntansi yang diberlakukan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Changes in Accounting Policies implemented based on the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).
Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya. The implementation of standards, amendments, and annual adjustments effective on or after January 1, 2025, does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material impact on the amounts reported in the current or prior periods.

Amandemen PSAK 221 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran
Amendments to PSAK 221: Effect of Changes in Foreign Exchange Rates – Exchange Losses

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan Explanation of the Changes in Accounting Policies Implemented	:	Perubahan Kebijakan Akuntansi yang diberlakukan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Changes in Accounting Policies implemented based on the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).
Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya. The implementation of standards, amendments, and annual adjustments effective on or after January 1, 2025, does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material impact on the amounts reported in the current or prior periods.

Prospek Usaha Tahun 2026

Business Prospects for 2026

Memasuki tahun 2026, perekonomian dunia menunjukkan arah pemulihan moderat setelah sebelumnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dunia menghadapi tekanan inflasi tinggi, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian geopolitik. Berdasarkan IMF *World Economic Outlook* (*Update* Juli 2025), pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,1% pada tahun 2026 atau sedikit terkoreksi dari tahun 2025 sebesar 3,2%. Meskipun relatif melambat, perekonomian dunia diprediksi akan diwarnai penurunan inflasi dan pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Bank Dunia dalam *Global Economic Prospects* (Juni 2025) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia berada pada kisaran 2,8% hingga 3,0%, sedangkan OECD dalam *Economic Outlook* (Juni 2025) menegaskan proyeksi serupa dengan inflasi global yang mulai turun mendekati target 2%. Konsistensi proyeksi dari ketiga lembaga ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi global telah memasuki fase stabilisasi menuju pertumbuhan berkelanjutan. Meskipun belum kembali ke tingkat pra-pandemi, arah pemulihan yang lebih seimbang antara negara maju dan berkembang menjadi landasan bagi meningkatnya kepercayaan pasar dan arus investasi lintas kawasan.

As we enter 2026, the global economy is showing signs of moderate recovery after facing high inflation, supply chain disruptions, and geopolitical uncertainty over the past three years. According to the IMF World Economic Outlook (July 2025 Update), global economic growth is projected to reach 3.1% in 2026, a slight correction from 3.2% in 2025. Despite the relative slowdown, the global economy is predicted to be characterized by declining inflation and monetary policy easing in several developed countries. The World Bank, in its Global Economic Prospects (June 2025), estimates global economic growth in the range of 2.8% to 3.0%, while the OECD, in its Economic Outlook (June 2025), confirms a similar projection, with global inflation beginning to decline toward its 2% target. The consistency of these three institutions' projections reinforces the view that the global economy has entered a stabilization phase leading to sustainable growth. Although not yet back to pre-pandemic levels, the more balanced recovery trajectory between developed and developing countries is laying the foundation for increased market confidence and cross-regional investment flows.

Pasar pupuk global pada tahun 2026 akan bergerak menuju fase pemulihan setelah periode fluktuasi harga tinggi sepanjang 2022–2024. Permintaan dunia diharapkan akan menunjukkan stabilitasnya seiring membaiknya sektor pertanian dan aktivitas ekonomi, meskipun tekanan *over supply*, tingginya biaya energi, dan kompetisi ekspor masih menjadi tantangan utama industri.

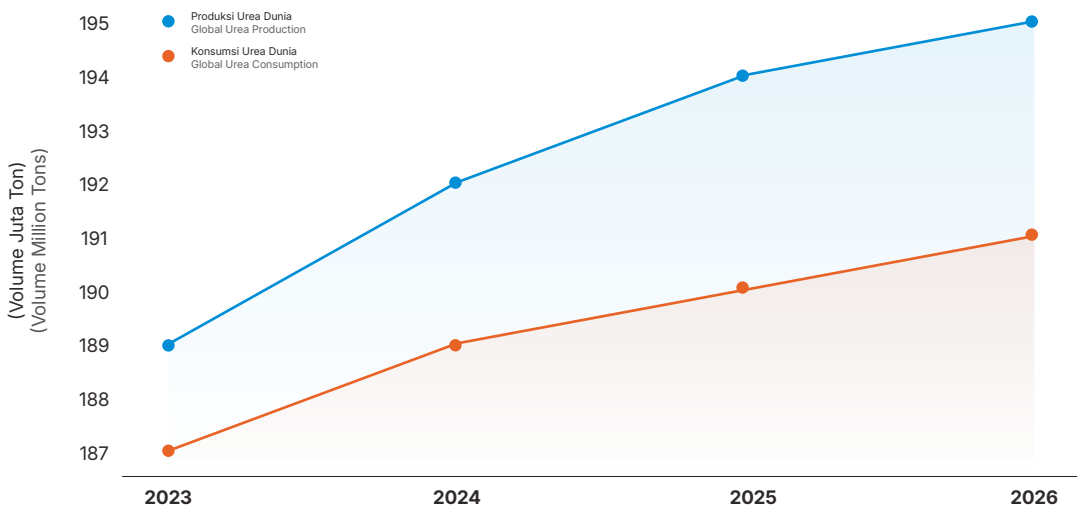
The global fertilizer market will move into a recovery phase in 2026 after a period of high price fluctuations throughout 2022–2024. Global demand is expected to stabilize as the agricultural sector and economic activity improve, although oversupply pressures, high energy costs, and export competition remain key challenges for the industry.

Menurut *World Bank Commodity Markets Outlook* (Oktober 2025), harga rata-rata pupuk nitrogen (termasuk urea) diperkirakan mengalami penurunan lebih kurang 4% pada 2026 setelah menunjukkan kenaikan lebih kurang 7% pada 2025. Proyeksi penurunan harga tersebut sejalan dengan kapasitas produksi baru di India, Tiongkok, dan Rusia. Khususnya produksi urea India yang meningkat signifikan berkat pengoperasian pabrik baru seperti Talcher Fertilizers dan Ramagundam, sementara Tiongkok menahan ekspor untuk menjaga pasokan domestik.

According to the World Bank Commodity Markets Outlook (October 2025), average prices for nitrogen fertilizers (including urea) are projected to decline by approximately 4% in 2026 after rising by approximately 7% in 2025. This projected price decline is in line with new production capacity in India, China, and Russia. India's urea production, in particular, has increased significantly thanks to the commissioning of new plants such as Talcher Fertilizers and Ramagundam, while China has restrained exports to maintain domestic supply.

Di sisi lain, kebijakan *Carbon Border Adjusment Mechanism* (CBAM) yang mulai diterapkan Uni Eropa pada 2026 menekan daya saing ekspor pupuk berbasis karbon tinggi dari negara produsen utama. Berdasarkan laporan *International Fertilizer Association* (IFA, 2025), konsumsi pupuk global diperkirakan mencapai 197 juta ton nutrien pada 2026, naik 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan permintaan tertinggi terjadi di Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika, seiring meningkatnya produktivitas pertanian dan pemulihan aktivitas ekonomi. *Expert Market Research* (2025) memperkirakan pasar urea global tumbuh sekitar 0,9% per tahun, dengan ekspor dunia mencapai 44 juta ton pada 2026.

On the other side, the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) policy, which the European Union will implement in 2026, will pressure the competitiveness of high-carbon fertilizer exports from major producing countries. According to a report by the International Fertilizer Association (IFA, 2025), global fertilizer consumption is expected to reach 197 million tons of nutrients in 2026, a 1.3% increase compared to the previous year. The highest demand growth will occur in South Asia and Sub-Saharan Africa, as agricultural productivity increases and economic activity recovers. Expert Market Research (2025) estimates the global urea market will grow by around 0.9% annually, with global exports reaching 44 million tons in 2026.



Sumber: International Fertilizer Association (IFA) - *Global Fertilizer Market Forecast* 2025-2026
Source: International Fertilizer Association (IFA) – Global Fertilizer Market Forecast 2025–2026

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas , produksi urea global yang diperkirakan mencapai 195 juta ton masih lebih tinggi dari konsumsi lebih kurang sebanyak 191 juta ton. Hal ini mencerminkan kondisi pasokan berlebih (*over supply*) yang menekan harga internasional. Meskipun demikian, peningkatan permintaan dari Asia dan Afrika memberikan ruang stabilisasi harga pada paruh kedua tahun 2026. Pasar amonia global juga menunjukkan arah positif dengan kapasitas produksi diproyeksikan melebihi 210 juta ton, yang terutama didorong ekspansi di Amerika Serikat, India, dan Rusia. Harga amonia relatif stabil pada paruh pertama tahun 2026 dan berpotensi menguat pada paruh kedua, seiring meningkatnya permintaan *green ammonia* untuk kebutuhan energi rendah karbon. Pemerintah Indonesia sendiri mengatur kebijakan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagai bagian dari langkah stabilisasi harga pangan nasional. HET baru ditetapkan sebesar Rp1.800 per kg untuk Urea, Rp2.100 per kg untuk NPK, dan Rp700 per kg untuk pupuk organik, dengan tujuan menjaga keterjangkauan petani serta mendukung pengendalian inflasi pangan di tengah pemulihan ekonomi. Kebijakan ini menuntut industri pupuk nasional, khususnya Pupuk Indonesia Group, untuk terus meningkatkan efisiensi produksi, optimalisasi rantai pasok, dan distribusi agar keberlanjutan operasional tetap terjaga. Menanggapi dinamika tersebut, PTPI menetapkan arah strategis tahun 2026 yang berfokus pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Strategi utama mencakup penguatan ketahanan pasokan gas dan energi, optimalisasi rantai pasok bahan baku, serta revitalisasi pabrik untuk peningkatan reliabilitas produksi. Selain itu, pengembangan produk bernilai tambah tinggi seperti pupuk spesifik lokasi, urea plus, sulfur, dan *biofertilizer* terus didorong, sejalan dengan komitmen terhadap transformasi hijau melalui proyek *green ammonia*, *carbon capture utilization and storage* (CCUS), serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam proses produksi.

As seen in the graph above, global urea production, estimated at 195 million tons, is still higher than consumption of approximately 191 million tons. This reflects an oversupply situation that is putting pressure on international prices. However, increasing demand from Asia and Africa provides room for price stabilization in the second half of 2026. The global ammonia market is also showing a positive trend, with production capacity projected to exceed 210 million tons, driven primarily by expansion in the United States, India, and Russia. Ammonia prices are relatively stable in the first half of 2026 and have the potential to strengthen in the second half, as demand for green ammonia for low-carbon energy needs increases. The Indonesian government itself regulates a policy of adjusting the Highest Retail Price (HET) for subsidized fertilizers as part of national food price stabilization measures. The new HET is set at Rp1,800 per kg for urea, Rp2,100 per kg for NPK, and Rp700 per kg for organic fertilizer, with the aim of maintaining affordability for farmers and supporting food inflation control amidst economic recovery. This policy requires the national fertilizer industry, particularly the Pupuk Indonesia Group, to continuously improve production efficiency, optimize supply chains, and maintain distribution to maintain operational sustainability. In response to these dynamics, PTPI has established a strategic direction for 2026 focused on efficiency, innovation, and sustainability. Key strategies include strengthening gas and energy supply security, optimizing raw material supply chains, and revitalizing factories to increase production reliability. Furthermore, the development of high-value-added products such as location-specific fertilizers, urea plus, sulfur, and biofertilizers continues to be encouraged, in line with the commitment to green transformation through the green ammonia project, carbon capture utilization and storage (CCUS), and the implementation of circular economy principles in the production process.

Secara keseluruhan, prospek usaha pupuk tahun 2026 menunjukkan stabilisasi pasar global dengan potensi pertumbuhan moderat di tengah tekanan biaya energi dan pengetatan kebijakan lingkungan. Kondisi ini menjadi momentum bagi Pupuk Indonesia Group untuk memperkuat daya saing, mempercepat transformasi hijau, dan berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagai bagian dari langkah stabilisasi harga pangan nasional. HET baru ditetapkan sebesar Rp1.800/kg untuk Urea, Rp2.100/kg untuk NPK, dan Rp700/kg untuk pupuk organik, dengan tujuan menjaga keterjangkauan petani serta mendukung pengendalian inflasi pangan di tengah pemulihan ekonomi. Kebijakan ini menuntut industri pupuk nasional, khususnya Pupuk Indonesia Group, untuk terus meningkatkan efisiensi produksi.

Overall, the fertilizer business outlook for 2026 shows stabilization in the global market with moderate growth potential amidst pressures on energy costs and tightening environmental policies. This situation provides momentum for the Pupuk Indonesia Group to strengthen its competitiveness, accelerate the green transformation, and contribute to maintaining national food security.

The Indonesian government has implemented a policy to adjust the Highest Retail Price (HET) for subsidized fertilizers as part of its efforts to stabilize national food prices. The new HET is set at Rp1,800/kg for urea, Rp2,100/kg for NPK, and Rp700/kg for organic fertilizers. This policy aims to maintain affordability for farmers and support food inflation control amidst economic recovery. This policy requires the national fertilizer industry, particularly the Pupuk Indonesia Group, to continuously improve production efficiency.

Proyeksi Kinerja Tahun 2026
Performance Projections for 2026

Perihal Subject	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Implementation	Proyeksi 2026 2026 Projection	Perbandingan Proyeksi 2026 vs Realisasi 2025 (%) Comparison of 2026 Projection vs. 2025 Implementation (%)	
	(1)	(1)	(2)	(3=2:1)	
Produksi dan Penjualan Production and Sales					
Produksi Production					
Pupuk Fertilizer	Ton	**12.533.088**	12.705.000	101,37	●
Non Pupuk Non-Fertilizer	Ton	**6.706.548**	6.566.500	97,91	●
Jumlah Total	Ton	**19.239.635**	19.271.500	100,17	●
Pemasaran dan Penjualan Marketing and Sales					
Pupuk Fertilizer	Ton	**12.794.376**	13.607.484	106,36	●
Non Pupuk Non-Fertilizer	Ton	**1.064.145**	1.274.700	119,79	●
Jumlah Total	Ton	**13.858.521**	14.882.184	107,39	●
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan Revenue	Rp-juta Rp million	**50.894.502**	51.866.828	101,91	●

Perihal Subject	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Implementation	Proyeksi 2026 2026 Projection	Perbandingan Proyeksi 2026 vs Realisasi 2025 (%) Comparison of 2026 Projection vs. 2025 Implementation (%)	
	(1)	(1)	(2)	(3=2:1)	
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy Costs from the Government of Indonesia	Rp-juta Rp million	**39.507.147**	56.517.364	143,06	●
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Revenue from Customer Contracts	Rp-juta Rp million	**90.401.649**	108.384.193	119,89	●
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	Rp-juta Rp million	**(75.013.927)**	(89.298.987)	119,04	●
Laba Bruto Gross Profit	Rp-juta Rp million	**15.387.722**	19.085.206	124,03	●
Beban Usaha Operating Expenses	Rp-juta Rp million	**(6.472.144)**	(7.210.183)	111,40	●
Laba Operasi Operating Profit	Rp-juta Rp million	**8.472.174**	11.875.023	140,17	●
Biaya Keuangan Finance Costs	Rp-juta Rp million	**(1.372.451)**	(1.219.562)	88,86	●
Pendapatan dan Beban Lain-lain Other Income and Expenses	Rp-juta Rp million	**374.895**	1.298.236	346,29	●
Laba sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	Rp-juta Rp million	**7.918.022**	11.953.698	150,97	●
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	Rp-juta Rp million	**(2.405.237)**	(3.153.415)	131,11	●
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp-juta Rp million	**5.512.785**	8.800.282	159,63	●
Struktur Modal Capital Structure					
Leverage	Kali Times	**0,45**	0,41	90,78	●
Debt/EBITDA	Kali Times	**1,53**	1,09	71,04	●
Dividen Dividens					
Usulan Rasio Pembayaran Dividen Proposed Dividend Pay Out Ratio	%	**33,98**	25,00	73,58	●
Obligasi Bonds					
Total Pembayaran Obligasi Total Bond Payments	Rp-juta Rp million	**857.835**	1.600.000	186,52	●

Pada tahun 2026, PTPI memproyeksikan volume penjualan mencapai 14,88 juta ton, meningkat 7,39% dibandingkan realisasi tahun 2025. Peningkatan ini terutama didorong oleh tingginya alokasi pupuk bersubsidi dari Pemerintah sebagai bagian dari upaya strategis menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung produktivitas sektor pertanian. Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan tersebut, Perusahaan memperkuat langkah optimalisasi produksi yang diproyeksikan mencapai 19,27 juta ton, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan stok agar distribusi pupuk PSO dapat berlangsung tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran di seluruh wilayah layanan.

In 2026, PTPI projects sales volume to reach 14.88 million tons, a 7.39% increase compared to 2025. This increase will be primarily driven by a higher allocation of subsidized fertilizer from the government as part of its strategic efforts to maintain national food security and support for agricultural sector productivity. To ensure this demand is met, the Company is strengthening production optimization measures, which are projected to reach 19.27 million tons, and is improving the effectiveness of stock management to ensure the distribution of PSO fertilizer is in the right quantities, on time, and on target throughout its service areas.

Sejalan dengan pertumbuhan volume penjualan, PTPI memproyeksikan peningkatan kinerja keuangan yang solid pada tahun 2026, dengan laba bersih diperkirakan tumbuh signifikan hingga 81,89% dibandingkan realisasi tahun 2025. Peningkatan ini didukung oleh momentum pasar dan perbaikan operasional yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan dan margin Perusahaan. Momentum tersebut semakin diperkuat oleh perubahan skema subsidi menjadi *Marked-to-Market*. Pada saat yang sama, Perusahaan terus menjalankan berbagai inisiatif efisiensi melalui rekonfigurasi pabrik dan optimalisasi biaya produksi, sehingga fondasi pertumbuhan laba dapat terjaga secara sehat dan berkelanjutan.

In line with the sales volume growth, PTPI projects a solid improvement in financial performance in 2026, with net profit expected to grow significantly by 81.89% compared to 2025. This increase will be supported by market momentum and operational improvements compared to the previous year, and will contribute positively to the Company's revenue and margin growth. This momentum is further strengthened by a change in the subsidy scheme to Marked-to-Market. At the same time, the Company will continue to instigate efficiency initiatives through factory reconfiguration and production cost optimization to maintain a healthy and sustainable foundation for profit growth.

Struktur modal turut menjadi perhatian manajemen. Proyeksi rasio *leverage* tahun 2026 lebih baik dari realisasi 2025. Penguatan ini mencerminkan struktur permodalan yang semakin sehat, sehingga memperkuat fleksibilitas pendanaan dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Capital structure is also a management concern. The projected leverage ratio for 2026 will be better than the realization in 2025. This strengthening reflects an increasingly healthy capital structure that enhances funding flexibility and supports sustainable business growth.

Sedangkan rasio Debt to EBITDA tahun 2026 diproyeksikan mengalami penguatan cukup tinggi yang menunjukan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan EBITDA yang lebih tinggi terhadap tingkat utang, sehingga kapasitas pembayaran kewajiban menjadi semakin kuat.

While, the Debt to EBITDA ratio is projected to increase significantly in 2026, demonstrating the Company's ability to generate higher EBITDA relative to its debt level, thus strengthening its capacity to service its obligations.

Dengan proyeksi *cashflow* yang cukup tangguh, PTPI menargetkan dapat melakukan pembayaran dividen pada RUPS Tahunan 2026 atas kinerja tahun buku 2025 diproyeksikan sebesar 25% dari laba bersih tahun 2025, yang tentunya turut mempertimbangkan kebutuhan pendanaan Perusahaan untuk mendukung proyek investasi pengembangan serta menjaga kondisi arus kas tetap sehat dan berkelanjutan.

With this robust cashflow projection, PTPI is targeting a dividend payment at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2025 fiscal year of 25% of 2025 net profit. This will also take into account the Company's funding needs to support investments and development projects while maintaining a healthy and sustainable cash flow.

Peta Jalan Usaha: Rencana Pengembangan Jangka Panjang

Business Roadmap: Long-Term Development Plan

PTPI telah menyusun rencana pengembangan jangka panjang dalam bentuk *roadmap* Perusahaan. Secara garis besar, gambaran peta jalan tersebut digambarkan melalui grafis di bawah ini.

PTPI has prepared a long-term development plan in the form of a company roadmap. A broad overview of this roadmap is illustrated in the graphic below.

2024-2025

Operations Excellence & Restructure

Meningkatkan kehandalan pabrik serta penataan lini bisnis Pupuk Indonesia Group untuk optimalisasi sinergi bisnis. Penataan melalui pembentukan *subholding* secara bertahap sesuai *milestone* pengembangan bisnis

Improving factory reliability and structuring the Pupuk Indonesia Group's business lines to optimize business synergies. This structuring involves the gradual formation of subholdings in accordance with business development milestones.

2026-2029

Diversification & Expansion

Fokus PTPI melakukan revitalisasi pabrik amurea, ekspansi pabrik dan *trading* NPK, diversifkasi serta pengembangan *market footprint industrial chemical & clean ammonia*

PTPI's focus is on revitalizing the Amurea factory, expanding the NPK plant and trading, diversifying, and expanding its market footprint for industrial chemicals and clean ammonia.

2030-2034

Scale Up Market Footprints

PTPI terus melakukan ekspansi untuk jaminan ketersediaan pupuk dan kompetitif di pasar komersil. PTPI mengelola portofolio bisnis yang beragam, mengoperasikan pabrik-pabrik efsien, *feedstock security* yang kuat, dan *sustainable*

PTPI continues to expand to ensure fertilizer availability and competitiveness in the commercial market. PTPI manages a diverse business portfolio, operates efficient factories, maintains strong feedstock security, and maintains sustainability.

Inisiatif Strategis
Strategic Initiatives

Operations Excellence & Restructure

- Efsiensi biaya produksi & operational *excellence*
- Memastikan *raw materials security*
- Optimalisasi kapasitas dan Pengembangan melalui Investasi pabrik baru dan *revamp* pabrik lama
- Pengembangan produk unggulan melalui Investasi R&D *specialty fertilizer*
- Penguatan *Operating* Model *Subholding* & Klaster melalui *Subholding* dan *streamlining* lini bisnis
- Transformasi *digital* & *world-class capability*
- Production cost efficiency and operational excellence
- Ensuring raw materials security
- Capacity optimization and development through investment in new factories and revamping existing ones
- Development of superior products through investment in specialty fertilizer R&D
- Strengthening the subholding and cluster operating model through subholding and streamlining business lines
- Digital transformation and world-class capabilities

Inisiatif Strategis
Strategic Initiatives

Diversification & Expansion

- Ekspansi portfolio produk melalui methanol & derivatif
- Peningkatan jaringan distribusi & basis pelanggan penjualan ritel & korporasi
- Pengembangan bisnis trading domestik dan internasional
- Memastikan ketersediaan kapasitas logistik
- Pengembangan bisnis *industrial support*
- *Partnership* untuk pengembangan bisnis *Clean Ammonia*
- *Equity fundraising* untuk mendukung pengembangan Pupuk Indonesia Group
- Product portfolio expansion through methanol and derivatives
- Enhancing distribution network and customer base for retail and corporate sales
- Developing domestic and international trading business
- Ensuring availability of logistics capacity
- Developing industrial support business
- Partnership for Clean Ammonia business development
- Equity fundraising to support the Pupuk Indonesia Group development

Inisiatif Strategis
Strategic Initiatives

Scale Up Market Footprints

- *Scale up* E2E pupuk *retail & commercial*
- *Established ind. chemical market footprints*
- Produsen pupuk yang efisien dengan *feedstock security* yang kuat
- *Largest farmers ecosystem & rural retail with strong brands*
- *Industrial & specialty chemicals powerhouse in* Indonesia
- Scale up E2E retail and commercial fertilizers
- Established industrial chemical market footprints
- Efficient fertilizer producer with strong feedstock security
- Largest farmer ecosystem and rural retail with strong brands
- Industrial and specialty chemicals powerhouse in Indonesia

PTPI sesuai *purpose* dan visi, akan menjadi *leading company* untuk bidang *agrosolution* dan kimia terintegrasi. *Roadmap* menuju visi tersebut terbagi dalam 3 tahap utama, yaitu *Operations Excellence & Restructure* (2024-2025), *Diversification & Expansion* (2026-2029), dan *Scale Up Market Foootprints* (2030-2034).

Tahap utama yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2025, yaitu pelaksanaan *operational excellence* dengan revitalisasi Pusri-IIIB dan *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT, penjajakan *strategic partner* untuk *raw material security*, penguatan *operating model* dengan penguatan bisnis *Industrial support*, serta dimulainya diversifikasi soda ash.

PTPI kedepannya akan melakukan optimalisasi kapasitas dan pengembangan untuk mendukung swasembada pangan, serta melakukan hilirisasi dan diversifikasi untuk menjadi *industrial* dan *chemical powerhouse* di Indonesia.

Salah satu akselerasi penting yang akan dilakukan PTPI ke depan terkait pelaksanaan 7 (tujuh) komitmen proyek pengembangan selain revitalisasi Pusri-IIIB dan *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT yang telah dilakukan. Implementasi komitmen ini diharapkan mampu memosisikan PTPI sebagai rantai ekosistem penting dalam tonggak transformasi pupuk nasional yang selaras dengan Peraturan Presiden RI No. 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang akan mendorong peningkatan efisiensi, keandalan operasi, dan industri yang berkelanjutan.

In line with its purpose and vision, PTPI aims to become a leading company in the integrated agro-solution and chemical sector. The roadmap to this vision is divided into three main phases: Operations Excellence & Restructure (2024-2025), Diversification & Expansion (2026-2029), and Scale-Up Market Footprints (2030-2034).

The main phases the company will undertake in 2025 include implementing operational excellence through the revitalization of Pusri-IIIB and the Revamping of Ammonia PKT Plant-2, exploring strategic partners for raw material security, strengthening its operating model by strengthening its industrial support business, and initiating diversification into soda ash.

Going forward, PTPI will optimize capacity and development to support food self-sufficiency, as well as pursue downstreaming and diversification to become an industrial and chemical powerhouse in Indonesia.

One of the key accelerations PTPI will undertake going forward relates to the seven development project commitments, in addition to revitalizing Pusri-IIIB and the Revamping of Ammonia PKT Plant-2, which have already started. These commitments are expected to position PTPI as a key ecosystem chain in the national fertilizer transformation milestone, aligned with Presidential Regulation No. 113 of 2025 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning Subsidized Fertilizer Governance. This will encourage increased efficiency, operational reliability, and a sustainable industry.





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



05

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di PTPI

Corporate Governance Implementation at PTPI



“Menjaga keandalan rantai pasok pupuk nasional melalui tata kelola yang akuntabel, berintegritas, dan berbasis risiko.”

“Maintaining the reliability of the national fertilizer supply chain through accountable, integrity-based, and risk-based governance.”

Mengawal Integritas Distribusi, Mewujudkan Swasembada Pangan

Dalam mendukung program Pemerintah untuk mencapai Ketahanan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai *Holding* BUMN Pupuk memiliki peran guna mendukung tercapainya program tersebut. Wujud dukungan tersebut antara lain dalam penyediaan pupuk bersubsidi bagi Petani yang meliputi pupuk Urea, NPK, Organik dan ZA yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Guarding Distribution Integrity, Achieving Food Self-Sufficiency

To support the Government’s program to achieve National Food Security, PT Pupuk Indonesia (Persero), as SOE Fertilizer Holding plays a key role in supporting the program’s success. This support includes providing subsidized fertilizers for farmers, including Urea, NPK, Organic, and ZA fertilizers, in accordance with the Republic of Indonesia Minister of Agriculture Regulation Number 15 of 2025 concerning the Implementing Presidential Regulation Number 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizers.

Dasar Hukum Pelaksanaan Subsidi Pupuk Tahun 2025

Pelaksanaan Subsidi Pupuk Tahun 2025 mengacu pada 4 (empat) Undang-Undang, 1 (satu) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan Presiden, 12 (dua belas) Peraturan Menteri, dan 3 (tiga) Keputusan Menteri yang seluruhnya menjadi panduan bagi Perusahaan dalam melaksanakan penugasan penyaluran pupuk bersubsidi guna mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

Langkah Strategis dan Kebijakan Pelaksanaan Subsidi Pupuk

Dalam melaksanakan penugasan dari Pemerintah dan untuk mencapai tujuan utama yakni Kedaulatan Pangan Nasional, maka perlu diambil langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat sehingga pupuk bersubsidi sebagai salah satu faktor utama dalam peningkatan produksi dapat tersedia dan diterima oleh pihak yang berhak untuk menerimanya. Adapun langkah-langkah strategis dan kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan untuk mendukung penugasan dari pemerintah antara lain:

1. Pewarnaan Pupuk Urea Bersubsidi (Pink) untuk membedakan dengan pupuk non subsidi serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan pupuk bersubsidi.
2. Penggunaan kantong satu merek untuk menghilangkan preferensi terhadap produk dari produsen tertentu di suatu daerah dan memudahkan dalam melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan.
3. Penggunaan *Bag Code* pada kantong pupuk bersubsidi untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
4. Penyeragaman Kios Pupuk Lengkap untuk meningkatkan pelayanan kepada Petani dan memberi kemudahan dalam memperoleh pupuk bersubsidi.
5. Pengiriman Pupuk bersubsidi secara langsung ke daerah *remote* untuk mengoptimalisasi penyaluran Pupuk bersubsidi pada daerah yang sulit untuk dijangkau.
6. Mencantumkan nomor telepon layanan pelanggan di kantong pupuk bersubsidi untuk memudahkan penyampaian pengaduan ataupun keluhan dari petani.
7. Monitoring stok Pupuk Bersubsidi sampai dengan titik serah dan penebusan pupuk secara *online*.
8. Digitalisasi tata kelola penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan aplikasi WCM, APG dan I-Pubers.

Prinsip 7 Tepat dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi, PT Pupuk Indonesia (Persero) (PTPI) berpedoman pada prinsip 7T atau 7 Tepat, yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima.

Prinsip 7 Tepat tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Tepat Jenis: Pupuk disalurkan sesuai dengan kebutuhan lahan dan komoditas.
- Tepat Jumlah: Alokasi disalurkan sesuai dosis yang ditetapkan, dengan total Alokasi tahun 2025 mencapai 9,5 juta ton.
- Tepat Harga: Pupuk disalurkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
- Tepat Tempat: Distribusi dilakukan hingga titik serah, yaitu kios atau pengecer resmi.
- Tepat Waktu: Ketersediaan pupuk disesuaikan dengan musim tanam.

Legal Basis for the Implementation of Fertilizer Subsidies in 2025

The implementation of the 2025 Fertilizer Subsidy refers to 4 (four) Laws, 16 (sixteen) Ministerial Regulations, and 3 (three) Ministerial Decrees, all of which serve as guidelines for the Company in carrying out subsidized fertilizer distribution assignments to support National Food Security.

Strategic Steps and Policies for Implementing Fertilizer Subsidies

When carrying out government assignments and achieving the primary goal of National Food Sovereignty, strategic steps and appropriate policies must be taken to ensure subsidized fertilizer, a key factor in increasing production, is available and accessible to those entitled to receive it. The strategic steps and policies implemented by the Company to support government assignments include:

1. Coloring Subsidized Urea Fertilizer (Pink) to differentiate it from non-subsidized fertilizer and prevent misuse of subsidized fertilizer.
2. Using single-brand bags to eliminate brand loyalty from specific producers in a region and facilitate monitoring and supervision in the field.
3. Using Bag Code on subsidized fertilizer bags to facilitate tracking in the event of misuse of subsidized fertilizer.
4. Standardizing Complete Fertilizer Kiosks to improve service to farmers and facilitate access to subsidized fertilizer.
5. Direct delivery of subsidized Fertilizer to remote areas to optimize distribution in hard-to-reach areas.
6. Including a customer service telephone number on subsidized fertilizer bags to facilitate the submission of complaints or grievances from farmers.
7. Monitoring subsidized fertilizer stocks up to the point of delivery and online fertilizer redemption.
8. Digitizing management of subsidized fertilizer distribution using the WCM, APG, and I-Pubers applications.

The 7 Right Principle in Subsidized Fertilizer Distribution

In distributing subsidized fertilizer, PT Pupuk Indonesia (Persero) (PTPI) adheres to The 7 Right Principle, or 7 Right Principle: Right Type, Right Quantity, Right Price, Right Place, Right Time, Right Quality, and Right Recipient.

The 7 Right Principle cover the following matters:

- Right Type: Fertilizer is distributed according to land and commodity needs.
- Right Quantity: Allocations are distributed according to the specified dosage, with a total allocation of 9.5 million tons in 2025.
- Right Price: Fertilizer is distributed according to the Highest Retail Price (HET) set by the government.
- Right Place: Distribution is carried out to the point of delivery, such as kiosks or authorized retailers.
- Right Time: Fertilizer availability is adjusted to the planting season.

- Tepat Mutu: Pupuk yang disalurkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- Tepat Penerima: Penyaluran dilakukan sesuai data petani atau pembudidaya yang berhak dan terintegrasi dengan e-RDKK.

Prinsip 7 Tepat menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi diterima oleh petani yang berhak secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan prinsip ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran, memperkuat akuntabilitas, serta memperluas cakupan penerima hingga pembudidaya ikan guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Untuk mewujudkan implementasi Prinsip 7 Tepat tersebut, PTPI terus melakukan pengembangan dan penguatan sistem informasi sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan distribusi.

Pertama, PTPI memastikan bahwa kualitas pupuk bersubsidi yang disalurkan telah memenuhi ketentuan dan standar mutu yang berlaku, sehingga produk yang diterima petani sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Kedua, PTPI mengoptimalkan sistem monitoring ketersediaan stok secara aktual guna menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi hingga tingkat gudang penyangga dan PUD/PPTS. Melalui sistem ini, pengawasan terhadap rantai pasok dilakukan secara lebih terintegrasi, sehingga potensi kelangkaan maupun keterlambatan distribusi dapat diantisipasi lebih dini.

Ketiga, PTPI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam pengembangan sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa penyaluran pupuk dilakukan secara tepat sasaran, sesuai dengan data petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga transparansi dan akuntabilitas distribusi dapat terjaga.

Dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi dan kolaborasi lintas lembaga, implementasi Prinsip 7 Tepat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian nasional.

7 TEPAT

PTPI berpedoman pada Prinsip **7 Tepat**, yaitu **Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu,** dan **Tepat Penerima**. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani yang berhak secara efektif, efisien, dan akuntabel.

PTPI adheres to the 7 Right Principle: **Right Type, Right Quantity, Right Price, Right Place, Right Time, Right Quality,** and **Right Recipient**. This principle serves as the primary foundation for ensuring that subsidized fertilizer reaches eligible farmers effectively, efficiently, and accountably.

- Right Quality: Distributed fertilizer meets the established quality standards.
- Right Recipients: Distribution is carried out according to data on eligible farmers or cultivators, integrated with e-RDKK.

The 7 Right Principle serve as the primary foundation for ensuring that subsidized fertilizer reaches eligible farmers effectively, efficiently, and accountably. The implementation of these principles is also aimed at increasing distribution efficiency, strengthening accountability, and expanding the scope of recipients to include fish cultivators, in order to support national food security.

To support the implementation of The 7 Right Principle, PTPI continues to develop and strengthen its information system as a distribution control and oversight instrument.

First, PTPI ensures that the subsidized fertilizer distributed meets applicable regulations and quality standards, ensuring that the products received by farmers meet government-determined specifications.

Second, PTPI optimizes its real-time stock availability monitoring system to ensure the availability of subsidized fertilizer down to the buffer warehouse and PUD/PPTS levels. Through this system, supply chain monitoring is more integrated, allowing potential shortages or delays in distribution to be anticipated early.

Third, PTPI collaborates with the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia to develop a subsidized fertilizer distribution system through i-Pubers application. This system is designed to ensure that fertilizer distribution is targeted, in accordance with farmer data registered in the Definitive Group Needs Plan (RDKK), thereby maintaining transparency and accountability in distribution.

Through the support of an integrated information system and cross-institutional collaboration, the implementation of The 7 Right Principle is continuously strengthened to increase the effectiveness of subsidized fertilizer distribution and support the sustainability of the national agricultural sector.

Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Best Achievements in Corporate Governance Implementations

Sepanjang tahun 2025, penerapan GCG di PTPI difokuskan untuk mengawal mandat strategis: menjaga keandalan rantai pasok pupuk nasional serta memastikan pelaksanaan penugasan publik (*Public Service Obligation*/PSO) untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan akuntabel guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Mengingat karakter industri pupuk yang padat modal dengan dinamika energi dan logistik yang kompleks, GCG difungsikan sebagai kerangka kendali strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap pengambilan keputusan bersifat *prudent* (hati-hati), risiko terkelola secara terukur, dan mekanisme *check and balance* berjalan efektif di seluruh level organisasi.

Penguatan penerapan GCG direalisasikan melalui efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan kepengurusan Direksi, yang diperkokoh oleh sistem manajemen kepatuhan dan anti-penyuapan yang terstruktur. Lebih jauh, manajemen risiko diintegrasikan secara penuh ke dalam siklus perencanaan, operasional, hingga keputusan investasi.

Dengan pendekatan tersebut, PTPI mendorong terciptanya *governance outcome*, mulai dari penguatan struktur tata kelola, konsistensi penerapan tata kelola, konsistensi asesmen tata kelola, integritas proses bisnis, hingga keandalan sistem kontrol distribusi. Hal ini memastikan amanah negara dijalankan dengan penuh tanggung jawab, memberikan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan swasembada nasional.

In 2025, GCG implementation at PTPI focused on safeguarding its strategic mandate: maintaining the reliability of the national fertilizer supply chain and ensuring the accountable implementation of the Public Service Obligation (PSO) for the procurement and distribution of subsidized fertilizer, ensuring the availability and affordability of fertilizer in line with the Government's commitment to achieving national food self-sufficiency and security.

Given the capital-intensive nature of the fertilizer industry, with its complex energy and logistics dynamics, GCG serves as a strategic control framework. This aims to ensure that every decision is prudent, risks are managed measurably, and checks and balances operate effectively at all levels of the organization.

Strengthening governance is realized through the effective supervisory function of the Board of Commissioners and the management of the Board of Directors, reinforced by a structured compliance and anti-bribery management system. In addition, risk management is fully integrated into the planning, operational, and investment decision cycles.

By following this approach, PTPI encourages the creation of governance outcomes, ranging from strengthening governance structures, consistent governance implementation, consistent governance assessments, business process integrity, and the reliability of distribution control systems. This ensures that the state mandate is carried out responsibly, providing solid support for achieving national food self-sufficiency.

Pencapaian Tata Kelola 2025

Governance Achievements in 2025

Penilaian GCG
GCG Assessment

Skor GCG
GCG Score

89,05

Predikat I Predicate:
"Sangat Baik"
"Very Good"

Most Trusted Company
Skor CGPI | CGPI Score

88,03

Predikat I Predicate:
"Sangat Tepercaya"
"Most Trusted"

Tingkat Kematangan Risiko
Risk Maturity Index (RMI)

Skor RMI
RMI Score

3,1 (Skala 5)
3.1 (Scale 5)

Predikat I Predicate:
"Praktik yang Baik"
"Good Practice"

Kepatuhan LHKPN
LHKPN Compliance

100%

Tepat Waktu
On time

Tindak Lanjut WBS
WBS Follow-Up

100%

Selesai
Finished

Temuan Mayor Audit
Major Audit Findings

0 (Nihil|Nil)

Zero Major Finding

Integritas & Kepatuhan Tersertifikasi
Certified Integrity and Compliance

Sistem pencegahan korupsi & kepatuhan terstruktur
Structured Corruption Prevention & Compliance System

- **ISO 37001 (Manajemen Anti Penyuapan)**
  (Anti-Bribery Management)
- **ISO 37301 (Manajemen Kepatuhan)**
  (Compliance Management)

Cakupan: *Holding* & Fungsi Strategis
Scope: Holding & Strategic Functions

Jaminan Tata Kelola PSO
PSO Governance Assurance

Penerapan Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Implementation of Subsidized Fertilizer Distribution Governance

Kebijakan PSO | Kerangka Kepatuhan | Pengawasan Dewan Komisaris
PSO Policy | Framework | Compliance | Supervision Board of Commissioners

Tata Kelola Digital yang Aman
Secure Digital Governance

- **ISO/IEC 27001 (Keamanan Informasi)**
  ISO/IEC 27001 (Information Security)
- **ISO 20000-1 (Layanan TI)**
  ISO 20000-1 (IT Services)
- ***Governance* PSO: Penerapan Digital *Audit***
  Governance PSO: Implementation of Digital
- ***Trail* pada Penyaluran Pupuk Bersubsidi (i-Pubers)**
  Audit Trails in Subsidized Fertilizer Distribution (i-Pubers).

Sinergi Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Synergy

- ***Single Risk Framework***
  Deteksi dini risiko rantai pasok terintegrasi

  Single Risk Framework Early detection of integrated supply chain risks

- ***Joint Procurement***
  Sentralisasi pengadaan untuk efisiensi (Cost Leadership) dan mitigasi fraud

  Joint Procurement
  Centralized procurement for efficiency (Cost Leadership) and fraud mitigation

NILAI TAMBAH TATA KELOLA 2025

Dengan penerapan kerangka kerja di atas, Tata Kelola 2025 memberikan nilai tambah, antara lain:

Akuntabilitas PSO Terjaga
Maintained PSO Accountability

Penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
Distribution of subsidized fertilizer is on-target and accountable

Kepercayaan *Stakeholder*
Stakeholder Trust

Meningkatnya reputasi di mata Pemerintah, Investor, dan Petani
Improved reputation among the government, investors, and farmers

ADDED VALUE OF GOVERNANCE 2025

By implementing the above framework, Governance 2025 provides added value, including:

Risiko Strategis Dimitigasi
Strategic Risk Mitigation

Gangguan pasokan gas dan distribusi terdeteksi sejak dini
Gas supply and distribution disruptions were detected early

Ketahanan Pangan
Food Security

Dukungan nyata terhadap cita-cita Swasembada Pangan Nasional
True support for the goal of National Food Self-Sufficiency

Komitmen Perusahaan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan

Perusahaan menempatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* disingkat "*GCG*") sebagai landasan utama dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha. Komitmen ini dijalankan secara konsisten untuk menjaga keseimbangan kepentingan Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, serta diyakini sebagai faktor kunci dalam memperkuat kepercayaan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan mendukung penciptaan nilai serta keberlanjutan usaha di tengah dinamika bisnis yang semakin kompetitif.

Komitmen penerapan GCG diwujudkan melalui penguatan kebijakan, struktur, sistem, dan proses tata kelola yang selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Perusahaan secara berkelanjutan mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola, khususnya untuk meningkatkan transparansi proses bisnis, efektivitas pengawasan, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan komitmen ini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai acuan pelaksanaan GCG di seluruh lini organisasi.

Sejalan dengan perannya sebagai Badan Usaha Milik Negara dan dalam mendukung keberlanjutan usaha, Perusahaan terus menyempurnakan penerapan GCG secara berkelanjutan melalui integrasi kebijakan, proses, dan sistem berbasis digital guna memastikan pelaksanaan kegiatan usaha berjalan secara sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan.

Company's Commitment to Sustainable Corporate Governance Implementation

The Company places Good Corporate Governance (GCG) implementation as the primary foundation for all business activities. This commitment is consistently applied to maintain a balance between the interests of the Company and all stakeholders, and is believed to be a key factor in strengthening trust, improving the quality of decision-making, and supporting value creation and business sustainability despite increasingly competitive business dynamics.

The commitment to GCG implementation is demonstrated through strengthening governance policies, structures, systems, and processes that align with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The Company continuously promotes the use of technology and digitalization as an integral part of strengthening governance, particularly to enhance the transparency of business processes, the effectiveness of supervision, internal control, and compliance with applicable laws and regulations. A commitment statement is signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors and is outlined in the Corporate Governance Guidelines as a reference for GCG implementation across all levels of the organization.

In line with its role as a State-Owned Enterprise and to support business sustainability, the Company continues to refine its GCG implementation through the integration of digital-based policies, processes, and systems to ensure business activities are conducted in a healthy, responsible manner, and oriented towards the long-term interests of all stakeholders.

Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PTPI atas Penerapan GCG

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan GCG, Dewan Komisaris dan Direksi PTPI secara bersama-sama telah menyampaikan Pernyataan Komitmen dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, sebagai bentuk penegasan atas peran dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten di seluruh aspek bisnis sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar tetap mampu bertahan di iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan merupakan pedoman yang disusun untuk menjadi panduan melandasi penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Statement of Commitment from the PTPI Board of Commissioners and Board of Directors for GCG Implementation

As part of their commitment to implementing GCG, the Board of Commissioners and Board of Directors of PTPI have jointly submitted a Statement of Commitment in the Corporate Governance Guidelines, affirming their roles and responsibilities, as follows:

1. The Company is committed to consistently implementing GCG across all aspects of its business as a step to improve PTPI's performance and ensure its continued viability in an increasingly competitive and dynamic business climate.
2. The Corporate Governance Guidelines are designed to serve as the foundation for GCG implementation in the Company.

Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

PTPI membangun dan mengelola hubungan dengan pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan secara seimbang dan terintegrasi, dengan berlandaskan prinsip GCG. Pendekatan ini memastikan terciptanya keselarasan kepentingan dan hubungan yang saling mendukung.

Sebaliknya, PTPI tidak menerapkan pola hubungan yang timpang atau tidak selaras, karena praktik tersebut berpotensi menghilangkan keterkaitan antar pemangku kepentingan dan mencerminkan tata kelola yang tidak sehat (*Bad Corporate Governance*).

Corporate Relationships with Shareholders and Stakeholders

PTPI builds and manages relationships with shareholders and all stakeholders in a balanced and integrated manner, based on GCG principles. This approach ensure aligned interests and mutually supportive relationships.

Conversely, PTPI does not implement unequal or misaligned relationships, as such practices have the potential to diminish the interconnectedness between stakeholders and reflect Bad Corporate Governance.

Aktivitas GCG 2025

GCG Activities 2025

Tanggal Date	Aktivitas Activities
25–26 Juni 2025 June 25-26, 2025	*Sharing Session* & *Workshop* "*Strengthening Internal Control System to Improve Risk Management* Pupuk Indonesia Group" Sharing Session & Workshop "Strengthening Internal Control Systems to Improve Risk Management at Pupuk Indonesia Group"
7 Juli 2025 July 7, 2025	*Sharing Session Risk-Driven Decisions for a Resilient* PIHC Sharing Session: Risk-Driven Decisions for a Resilient PIHC
25 Juli 2025 July 25, 2025	Pupuk Indonesia Group *T-Cup Series #3 Basic Risk Class* Pupuk Indonesia Group T-Cup Series #3 Basic Risk Class
31 Juli 2025–25 November 2025 July 31, 2025–November 25, 2025	Program Riset dan Pemeringkatan CGPI "Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan Dalam Kerangka GCG" oleh IICG CGPI Research and Ranking Program "Building Dynamic Company Capabilities Within the GCG Framework" by IICG
25 Agustus 2025–24 Desember 2025 August 25, 2025–December 24, 2025	GCG *Assessment* Pupuk Indonesia Group oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) GCG Assessment of Pupuk Indonesia Group by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
25–26 Agustus 2025 August 25-26 2025	Audit Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016 oleh PT SGS Indonesia Anti-Bribery Management System Surveillance Audit 37001:2016 by PT SGS Indonesia
12–13 September 2025 September 12–13, 2025	*Executive Training: Strategic Risk Management & Value Creation* oleh INSEAD untuk *Chief Risk Officer* Pupuk Indonesia Group Executive Training: Strategic Risk Management & Value Creation by INSEAD for Chief Risk Officers of Pupuk Indonesia Group
2 Oktober 2025 October 2, 2025	*Workshop Control Self Assessment* ICOFR Pupuk Indonesia Group ICOFR Control Self-Assessment Workshop of Pupuk Indonesia Group
3 Oktober 2025 October 3, 2025	Bimbingan Teknis Perempuan Anti Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dengan tema: Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-Nilai Integritas Melawan Korupsi Technical Guidance on Women Against Corruption with the Indonesian Corruption Eradication Commission, with the theme: The Role of Women in Building Integrity Values Against Corruption

Tanggal Date	Aktivitas Activities
17–28 Oktober 2025 October 17–28, 2025	Pelaksanaan *Risk Culture Assessment* Pupuk Indonesia Group Implementation of Pupuk Indonesia Group Risk Culture Assessment
6–9 Desember 2025 December 6–9, 2025	Integrity-Expo Peringatan Hakordia 2025 Integrity Expo Commemorating Hakordia 2025
10 Desember 2025 December 10, 2025	*Workshop Risk Control Self Assessment* (RCSA) *Non Risk That Matters* (RTM) Tahun 2026 Risk Control Self-Assessment (RCSA) Workshop on Non Risk That Matters (RTM) in 2026
10 Desember 2025 December 10, 2025	*Workshop Anti-Fraud* "Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia" Anti-Fraud Workshop "Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia"
11 Desember 2025 December 11, 2025	Pupuk Indonesia *Risk Management Forum* dengan tema "*Embedding Risk Culture for a Resilient Strategy: Navigating Marked-to-Market & Anticipating Unexpected Loss" & Awarding Guardian of Risk* Tahun 2025 Pupuk Indonesia Risk Management Forum with the theme "Embedding Risk Culture for a Resilient Strategy: Navigating Marked-to-Market & Anticipating Unexpected Loss" & Awarding Guardian of Risk in 2025
19 Desember 2025 December 19, 2025	Forum Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan "*Good Governance* & *Compliance* sebagai Pilar Pencegahan *Fraud* & Korupsi" Strengthening Governance and Compliance Forum "Good Governance & Compliance as Pillars of Fraud & Corruption Prevention"

Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip GCG di Perusahaan diarahkan untuk membangun dan menjaga keselarasan hubungan antara Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui penerapan GCG yang konsisten dan terintegrasi, Perusahaan berupaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Adapun tujuan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya mekanisme pengambilan keputusan manajemen yang *proper and prudent* melalui mekanisme *check and balance* sesuai dengan fungsi masing-masing organ Perusahaan.
2. Memaksimalkan nilai Perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja (*high performance*) serta citra Perusahaan yang baik.
3. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan.
4. Mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders*.
5. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko Perusahaan secara lebih efisien dan efektif.
6. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ Perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis Perusahaan.
7. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Purpose of Implementing GCG

The implementation of GCG principles within the Company is aimed at building and maintaining harmonious relationships between PTPI and all stakeholders. Through consistent and integrated GCG implementation, the Company strives to create sustainable added value. The GCG implementation objectives within the Company include the following:

1. Encouraging the creation of a proper and prudent management decision-making mechanism through a check and balance mechanism in accordance with the functions of each organ of the Company.
2. Maximizing the value of the Company in the form of increased performance (high performance) in a good corporate image.
3. Encouraging the management of the Company in a professional, transparent, and efficient manner as well as empowering the functions and increasing the independence of the Company's organs.
4. Encouraging the Company's organs to make decisions and carry out actions based on high ethical/moral values and compliance with applicable laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility to stakeholders.
5. Encouraging more efficient and effective management of the Company's resources and risks.
6. Reducing potential conflict of interest by the Company's organs and workers in running the Company's business.
7. Creating a business environment that is conducive to the achievement of the Company's objectives.

Dasar Hukum Penerapan GCG

Penerapan GCG di Pupuk Indonesia Group dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

Legal Basis for GCG Implementation

The implementation of GCG at Pupuk Indonesia Group is carried out in accordance with applicable regulations and provisions, including:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments;
2. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and its amendments;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
6. Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya.

4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
5. developed by the National Committee for Governance Policy (KNKG).
6. The Company's Articles of Association and amendments there to.

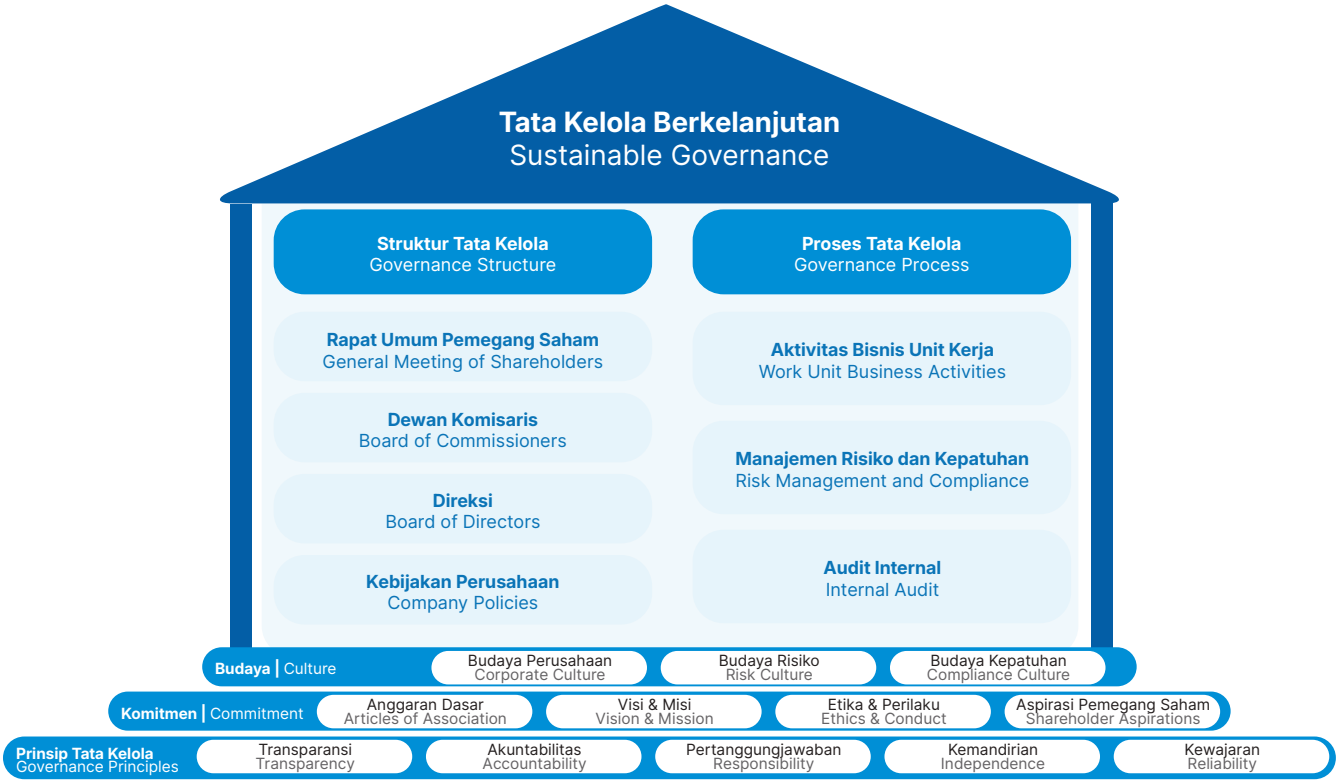
Kerangka Kerja GCG

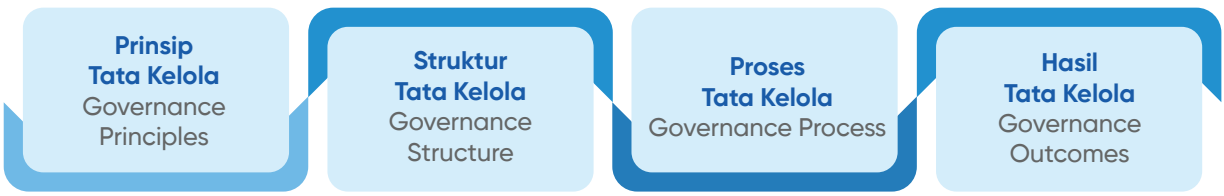
PTPI mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG melalui *Corporate Governance Framework* sebagai fondasi utama tata kelola perusahaan. *Framework* ini dibangun atas empat aspek, yaitu *Governance Principle, Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* yang secara terpadu mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif serta memenuhi harapan Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan.

GCG Framework

PTPI implements the GCG principles through its Corporate Governance Framework, which serves as the primary foundation for corporate governance. This framework is built on four aspects including: Governance Principle, Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome, which, in an integrated manner, promote effective corporate governance and meet the expectations of the Company and all stakeholders.

Kerangka Kerja GCG PTPI
PTPI GCG Framework





Perusahaan menetapkan Kerangka Kerja Tata Kelola (*Governance Framework*) yang dioperasionalisasikan melalui Sistem Manajemen *Governance* yang terstruktur. Sistem ini menjadi penggerak dalam memastikan prinsip-prinsip tata kelola berjalan efektif di setiap lini operasional.

The Company has established a Governance Framework that operates through a structured Governance Management System. This system serves as the driving force for ensuring the effective implementation of governance principles across all operational lines.

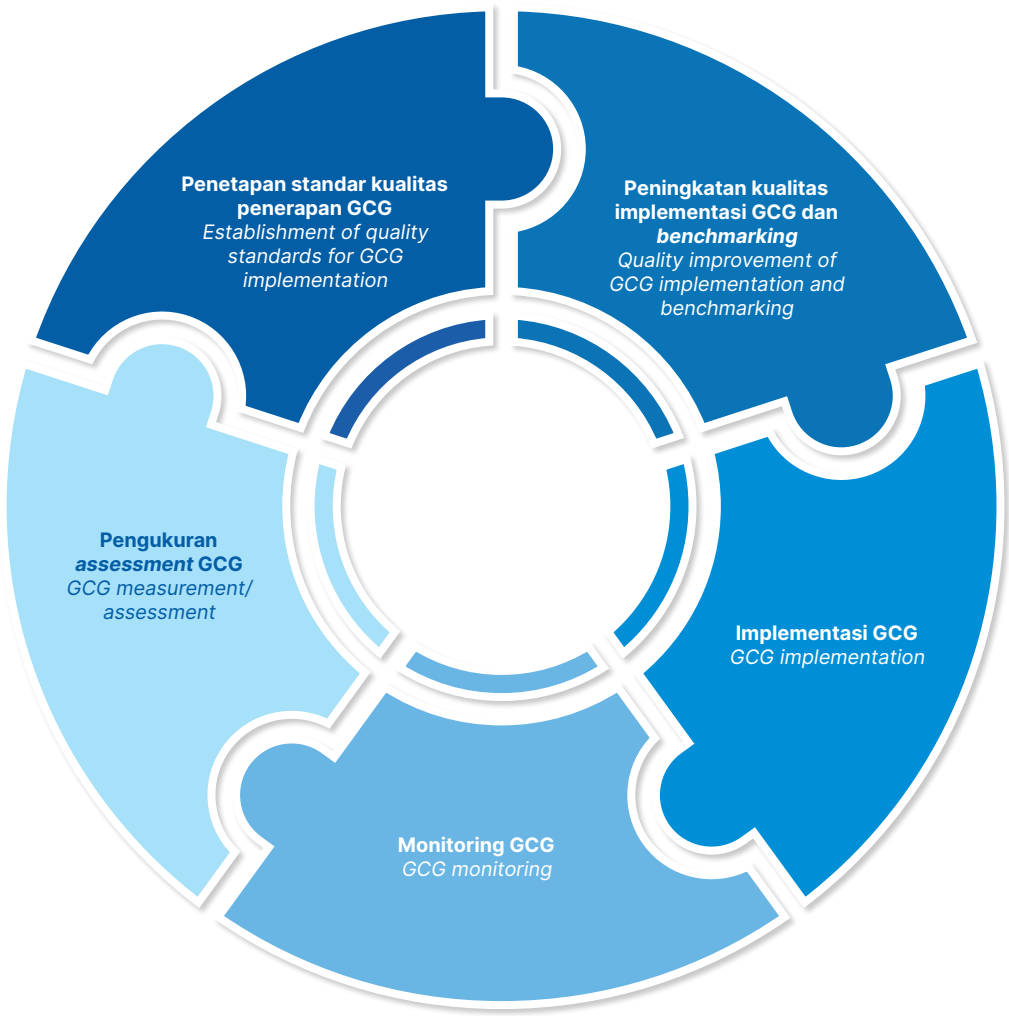
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

Implementation of Sustainable Corporate Governance

Penerapan prinsip GCG dijalankan secara konsisten dan sistematis oleh seluruh organ Perusahaan. Pelaksanaan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola di seluruh lingkungan Pupuk Indonesia Group. Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan tersebut tercermin dalam siklus penerapan sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut.

The application of GCG principles is carried out consistently and systematically in all Company organs to strengthen the quality of governance throughout the Pupuk Indonesia Group. This commitment to sustainable GCG implementation is reflected in the implementation cycle, as shown in the following chart.

Penerapan GCG secara Berkelanjutan
Sustainable Implementation of Good Corporate Governance



Siklus peningkatan kualitas implementasi penerapan GCG, meliputi:

1. Penetapan standar kualitas penerapan GCG, melalui penetapan Struktur Tata Kelola dan penetapan Dokumen Sistem Manajemen (DSM) yang terdiri dari Pedoman, Prosedur, dan Instruksi Kerja;
2. Implementasi GCG/GCG Proses, berupa praktik-praktik GCG meliputi aspek tata kelola dan aspek kepatuhan oleh seluruh Insan Perusahaan pada setiap aktivitas Perusahaan;

The quality improvement cycle for GCG implementation includes:

1. Establishing quality standards for GCG implementation, through the establishment of a Governance Structure and the establishment of a Management System Document (DSM), which consists of Guidelines, Procedures, and Work Instructions;
2. GCG implementation/GCG Process, in the form of GCG practices covering governance and compliance aspects by all Company Personnel in all Company activities;

3. Monitoring penerapan GCG, dilakukan secara terus-menerus oleh Dewan Komisaris dalam tupoksinya melakukan pengawasan jalannya kegiatan operasional Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
4. Penilaian GCG, dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, guna memastikan konsistensi penerapan GCG guna mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan;
5. Peningkatan kualitas implementasi GCG dan *benchmarking*, berdasarkan hasil pengukuran GCG diperoleh rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan GCG, dan berdasarkan hasil *benchmarking* dari perusahaan lain yang kemudian diadopsi oleh Perusahaan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan GCG di Perusahaan.

Standar Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Standar implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) disusun sebagai pedoman utama bagi Perusahaan dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi. Standar ini menetapkan kriteria yang ingin dicapai dari berbagai aspek penerapan GCG, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola Perusahaan secara berkelanjutan. Penyusunan standar tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat wajib, masukan dari para pemangku kepentingan, hasil asesmen, serta praktik terbaik melalui *benchmarking.*

Secara khusus, standar implementasi GCG di PTPI mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada Badan Usaha Milik Negara.

Internalisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman ke dalam kebijakan internal merupakan komitmen Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh Insan Perusahaan dan Pupuk Indonesia Group. Komitmen tersebut tercermin dalam Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan, di mana Visi diwujudkan melalui Misi yang berlandaskan Tata Nilai Perusahaan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, Perusahaan mengembangkan struktur GCG yang mencakup organ utama dan organ pendukung untuk memastikan mekanisme GCG berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik.

Penerapan prinsip GCG dalam seluruh kegiatan usaha diharapkan dapat mendukung terciptanya kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

3. Monitoring of GCG implementation is carried out continuously by the Board of Commissioners, in its role of overseeing the Company's operational activities carried out by the Board of Directors;
4. GCG assessment is carried out every 2 (two) years in accordance with the provisions of the State-Owned Enterprise Regulatory Agency, to ensure consistent GCG implementation to support the Company's business sustainability;
5. Improving the quality of GCG implementation and benchmarking based on the results of GCG measurements, improvement recommendations obtained that must be followed up to improve GCG implementation. These recommendations are based on benchmarking results from other companies, which are then adopted by the Company to increase the effectiveness and efficiency of GCG implementation within the Company.

Quality Standards for Corporate Governance Implementation

Good Corporate Governance (GCG) implementation standards are developed as the primary guidelines for companies in realizing their vision and carrying out their missions. These standards establish the criteria to be achieved across the GCG implementation aspects, while simultaneously encouraging the continuous improvement of corporate governance. These standards are based on mandatory laws and regulations, stakeholder input, assessment results, and best practices through benchmarking.

Specifically, the GCG implementation standards at PTPI refer to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities in State-Owned Enterprises.

Internalizing the laws and regulations and guidelines into internal policies is the commitment of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees of the Company and the Pupuk Indonesia Group, commitment which is reflected in the Company's Vision, Mission, and Values, where the Vision is realized through a Mission based on the Company's Values.

In realizing its Vision and carrying out its Mission, the Company consistently applies GCG principles, including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Based on these principles, the Company has developed a GCG structure encompassing primary and supporting organs to ensure that GCG mechanisms operate in accordance with laws and regulations and best practices.

The application of GCG principles in all business activities is expected to support the Company's long-term business sustainability.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konglomerasi memiliki kompleksitas operasional dan regulasi yang tinggi sehingga terekspos risiko yang sistemik dan harus beroperasi secara hati-hati dan efisien. Untuk mendukung konglomerasi yang sehat, prudent dan berkelanjutan, maka Perusahaan menerbitkan pedoman tata kelola terintegrasi yang menaungi Pupuk Indonesia Group sebagai kelompok usaha secara terintegrasi, sehingga aktivitas operasional masing-masing entitas anggota konglomerasi dapat berjalan dengan baik dan selalu didasari prinsip-prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi atau Profesional, dan Kewajaran. Pedoman ini merupakan penjabaran atas Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini selanjutnya akan menjadi panduan bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Entitas Induk dan seluruh Anak Perusahaan yang telah ada maupun Anak Perusahaan yang akan didirikan kemudian selaku Entitas Anak yang tergabung dalam Konglomerasi Pupuk Indonesia Group, dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari guna mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, menjaga keunggulan daya saing berkelanjutan, mampu menjadi perusahaan yang diterima serta dipercaya oleh pemangku kepentingan.

Developments in Corporate Governance Implementation

In response to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (SOEs), PTPI, as a State-Owned Enterprise (SOE) conglomerate, faces high operational and regulatory complexity, exposing it to systemic risks and requiring prudent and efficient operations. To support a healthy, prudent, and sustainable conglomerate, the Company has issued integrated governance guidelines covering the Pupuk Indonesia Group as an integrated business group. This ensures the operational activities of each member entity within the conglomerate can run smoothly and consistently adhering to the Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Professional, and Fairness principles. These guidelines elaborate on the Integrated Governance Policy of the Pupuk Indonesia Group Conglomerate.

These Integrated Governance Guidelines serve as a guide for PT Pupuk Indonesia (Persero), as the Parent Entity, and all existing and future Subsidiaries within the Pupuk Indonesia Group Conglomerate, when carrying out their daily business activities. These guidelines aim to encourage improvements in the quality of integrated governance implementation, maintain sustainable competitive advantage, and become a company that is accepted and trusted by stakeholders.

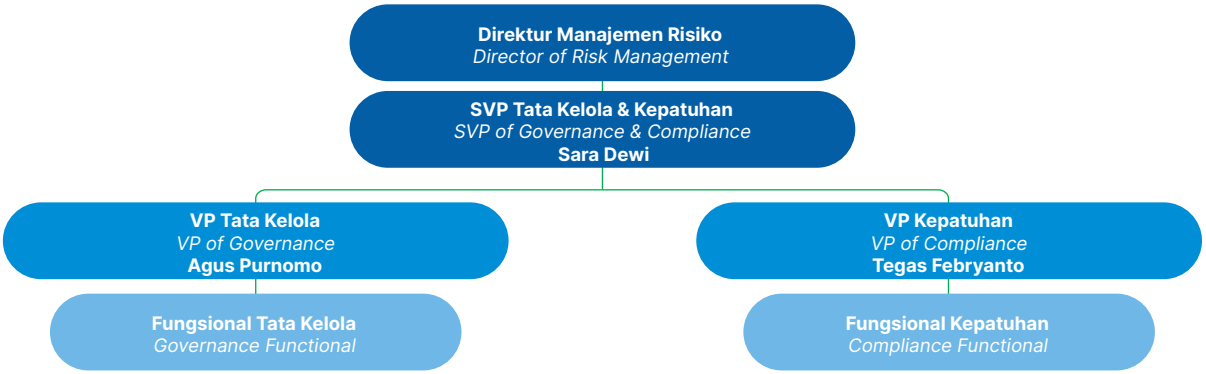
Penanggung Jawab Penerapan GCG

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPI Nomor 13/A/HK/E50/SK/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko PTPI sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PTPI Nomor 92/A/HK/E0500/SK/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko PTPI, Kompartemen Tata Kelola & Kepatuhan ditetapkan berada di bawah Direktorat Manajemen Risiko dalam mendukung dan memastikan penerapan GCG di Perusahaan.

Person in Charge of GCG Implementation

Based on PTPI Board of Directors Decree No. 13/A/HK/E50/SK/2024 dated February 1, 2024, concerning the Organizational Structure of the PTPI Risk Management Directorate, as amended by PTPI Board of Directors Decree No. 92/A/HK/E0500/SK/2025 dated October 1, 2025, concerning the Organizational Structure of the PTPI Risk Management Directorate, the PTPI Board of Directors established a Governance & Compliance Compartment under the Risk Management Directorate, responsible for supporting and ensuring GCG implementation in the Company.

Struktur Organisasi Penanggung Jawab Penerapan GCG PTPI
Person in Charge of PTPI's GCG Implementation Organizational Structure



Penilaian Penerapan GCG

Sebagai upaya memastikan kualitas penerapan tata kelola perusahaan, Perusahaan melaksanakan penilaian penerapan GCG secara berkala melalui mekanisme *assessment* yang terstruktur.

1. **Penilaian Penerapan GCG berdasarkan kriteria penilaian BUMN**
   Untuk memastikan penerapan prinsip GCG berjalan secara konsisten dan menyeluruh, Manajemen Perusahaan melakukan penilaian atas implementasi GCG di seluruh proses bisnis dengan menggunakan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN (sekarang Badan Pengaturan BUMN).
2. **Penilaian Penerapan GCG melalui Program Riset dan Pemeringkatan**
   Perusahaan mengikuti Program Riset dan Pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh lembaga independen The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA.

Penilaian tambahan tersebut berfungsi sebagai pembanding sekaligus memberikan keyakinan (*assurance*) atas hasil penilaian yang telah dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian Kementerian BUMN (sekarang Badan Pengaturan BUMN). Sejak tahun 2018, Perusahaan secara berkelanjutan mengikuti penilaian GCG eksternal melalui program Riset dan Pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), yang diselenggarakan oleh lembaga independen The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA.

GCG Implementation Assessment

To ensure the quality of corporate governance implementation, the Company conducts periodic GCG implementation assessments through a structured assessment mechanism.

1. **Assessment of GCG Implementation Based on BUMN Assessment Criteria**
   To ensure that GCG principles are applied consistently and comprehensively, Company Management assesses the implementation of GCG across all business processes using the assessment criteria established by the Ministry of State-Owned Enterprises (now the BUMN Regulatory Agency).
2. **Assessment of GCG Implementation through the Research and Rating Program**
   The company participates in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Research and Rating Program, which is organized by the independent institution The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine.

This additional assessment acts as a comparison and provides assurance on the results of the assessment conducted using the Ministry of BUMN assessment criteria (now the BUMN Regulatory Agency). Since 2018, the Company has continuously participated in external GCG assessments through the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Research and Ranking program, conducted by the independent institution, The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG), in collaboration with SWA Magazine.

Penilaian Penerapan GCG PTPI
PTPI GCG Implementation Assessment

Skor GCG GCG Score	Skor CGPI CGPI Score
89,05	**88,03**
Predikat I *Predicate*: "Sangat Baik" *"Very good"*	Predikat I *Predicate*: "Sangat Tepercaya" *"Most Trusted Company"*

1. Penilaian Penerapan GCG berdasarkan kriteria penilaian BUMN

Dasar dan Kriteria Penilaian

Penilaian penerapan GCG di PTPI dan Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Pada tanggal 16 Agustus 2023, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan Nomor: SK-12/S.MBU/08/2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya Kementerian BUMN melalui surat Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko menerbitkan surat Nomor S-52/DKU. MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Asesmen GCG BUMN Tahun 2023, yang menyatakan bahwa masih berproses penyusunan petunjuk teknis mengenai indikator/parameter penilaian dan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan referensi praktik terbaik (*global best practice*). Surat ini juga menyatakan bahwa di masa transisi sebelum terbitnya petunjuk teknis tersebut, BUMN diberikan kebebasan untuk menggunakan indikator/parameter penilaian dan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMN.

Hingga akhir Desember 2025, Kementerian BUMN (sekarang Badan Pengaturan BUMN) belum menetapkan maupun menerbitkan indikator/parameter penilaian dan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik dimaksud. Oleh karena itu, penilaian penerapan GCG yang dilaksanakan pada tahun 2025 menggunakan indikator/parameter penilaian yang disepakati bersama Penilai (Asesor) Independen mengacu pada ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN (sekarang Badan Pengaturan BUMN).

Pihak yang Menilai

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara PTPI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 00135/A/HK/A12/SP/2024 dan MOU-15/D4/03/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern PTPI dan Anak Perusahaan, maka pada tahun 2025 Perusahaan bekerja sama dengan BPKP Pusat dan Perwakilan melaksanakan penilaian penerapan GCG di PTPI dan Anak Perusahaan. Penilaian dilaksanakan menggunakan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh BPKP dengan mengacu pada Peraturan BUMN Nomor: PER-01/MBU/03/2023, Peraturan BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023, dan Peraturan BUMN Nomor: PER-03/ MBU/03/2023.

1. Assessment of GCG Implementation based on BUMN assessment criteria

Assessment Basis and Criteria

The GCG implementation assessment at PTPI and its subsidiaries is conducted based on Minister of BUMN Regulation Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN.

On August 16, 2023, the Ministry of BUMN issued Decree Number SK-12/S.MBU/08/2023 concerning the Revocation of Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN.

In this regard, the Ministry of BUMN, through a letter from the Acting Deputy for Finance and Risk Management, issued Letter Number S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2025, concerning the Implementation of the 2023 BUMN GCG Assessment, which stated that the technical guidelines for indicators/parameters for assessing and evaluating the good corporate governance implementation based on global best practices were still being developed. This letter also stated that during the transition period prior to the issuance of these technical guidelines, BUMN would be given the freedom to use indicators/parameters for assessing and evaluating the implementation of good corporate governance, according to their individual needs.

As of the end of December 2025, the Ministry of BUMN (now the BUMN Regulatory Agency) had not established or published indicators/parameters for assessing and evaluating good corporate governance implementation. Therefore, the GCG implementation assessment conducted in 2025 used indicators/parameters agreed upon by the Independent Assessor, in accordance with regulations issued by the Ministry of BUMN (now the BUMN Regulatory Agency).

Assessor

Based on an Memorandum of Understanding between PTPI and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No. 00135/A/HK/A12/SP/2024 and MOU-15/ D4/03/2024 concerning the Development and Strengthening of Corporate Governance, Risk Management, and Internal Control of PTPI and its Subsidiaries, in 2025, the Company, in collaboration with the BPKP Headquarters and Representative Offices conducted an assessment of GCG implementation at PTPI and its Subsidiaries. The assessment was conducted using the assessment criteria established by the BPKP, referring to BUMN Regulation No. PER-01/MBU/03/2023, BUMN Regulation No. PER-02/MBU/03/2023, and BUMN Regulation No. PER-03/MBU/03/2023.

Jenis Pengukuran Measurement Type	:	**Penilaian** Assessment
Asesor/Penilai Assessor/Evaluator	:	**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**
Periode Penerapan Implementation Period	:	**Tahun Buku 2024** Fiscal Year 2024
Tahun Ukur Measurement Year	:	**2025**
Tempat Place	:	**Kantor PT Pupuk Indonesia (Persero)** PT Pupuk Indonesia (Persero) Office
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	**6 Oktober 2025 sd 24 Desember 2025.** October 6, 2025, to December 24, 2025.

Pelaksanaan Penilaian Penerapan GCG PTPI

Hasil penilaian penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 meraih predikat "Sangat Baik" dengan skor 89,05 dengan rincian sebagai berikut:

PTPI GCG Implementation Assessment

The Company's GCG implementation assessment for the 2024 fiscal year, conducted in 2025, achieved a "Very Good" rating with a score of 89.05, as follows:

Hasil Penilaian
Assessment Results

No	Aspek Penilaian Test Aspect	Bobot Weight	Skor Capaian Achievement Score	Tingkat Pemenuhan Fulfillment Level	Predikat Predicate
1	Komitmen terhadap Penerapan GCG Commitment to Corporate Governance	7,00	6,37	91,00%	Sangat Baik Excellent
2	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	8,23	91,43%	Sangat Baik Excellent
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	30,67	87,64%	Sangat Baik Excellent
4	Direksi Board of Directors	35,00	32,27	92,20%	Sangat Baik Excellent
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information disclosures and transparency	9,00	8,13	90,32%	Sangat Baik Excellent
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	3,38	67,50%	Cukup Baik Fairly Good
	Jumlah Total	**100**	**89,05**	**89,05%**	**Sangat Baik** Excellent

Sebagai perbandingan, berikut disajikan hasil penilaian GCG Perusahaan pada periode 2020–2024 yang dilaksanakan oleh BPKP sebagai berikut:

For comparison, the Company's GCG assessment results for Fiscal Years 2024, 2021, and 2019 conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) were as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	2024*	2021	2019
Skor Score	89,05	92,33	88,97
Predikat Predicate	Sangat Baik Excellent	Sangat Baik Excellent	Sangat Baik Excellent

Keterangan:
* Penilaian GCG tahun 2019 dan 2021 menggunakan indikator/parameter penilaian GCG SK-16/S.MBU/2012.
* Penilaian GCG tahun 2024 menggunakan indikator/parameter penilaian GCG SK-16/S.MBU/2012 dan tambahan indikator/parameter dari BPKP.

Description:
* The 2019 and 2021 GCG assessments used the GCG assessment indicators/parameters specified in SK-16/S.MBU/2012.
* The 2024 GCG assessment used the GCG assessment indicators/ parameters SK-16/S.MBU/2012 and additional indicators/ parameters from BPKP.

Pelaksanaan Penilaian Penerapan GCG Anak Perusahaan

Pada tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan GCG *Assessment* di lingkup Pupuk Indonesia Group. Evaluasi ini diikuti oleh seluruh entitas anak, kecuali PT Pupuk Indonesia Pangan yang saat ini berstatus *dormant*. Hasil penilaian penerapan GCG Tahun Buku 2024 pada Anak Perusahaan yang dilaksanakan pada tahun 2025 pada masing-masing entitas sebagai berikut:

Implementation of Subsidiaries GCG Implementation Assessment

In 2025, the Company conducted GCG Assessments in the Pupuk Indonesia Group. These evaluations covered all subsidiaries., except PT Pupuk Indonesia Pangan due to its temporary inactivity. The GCG implementation assessment results for Fiscal Year 2024 in Subsidiaries, conducted in 2025 for each entity, were as follows:

	Aspek Aspect	**Bobot** Weight	PKT	PKG	PSP	PKC	PIM	REKIND	PIN	PILOG
I	Komitmen terhadap Penerapan GCG Commitment to GCG Implementation	7,00	6,98	6,77	6,39	6,21	6,80	6,40	6,07	6,78
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	8,44	8,25	8,09	8,00	8,18	7,97	7,47	8,03
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	33,73	32,73	32,22	31,45	32,18	31,19	25,68	30,46
IV	Direksi Board of Directors	35,00	33,60	33,80	32,58	32,18	31,82	31,15	28,84	30,01
V	Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Disclosure and Transparency Information	9,00	8,80	8,22	8,11	7,83	6,91	6,03	6,45	6,13
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	3,75	3,75	5,00	5,00	2,50	0,00	(1,00)	0,00
Skor Keseluruhan Overall Score		100	95,29	93,52	92,40	90,67	88,38	82,74	73,52	81,41
Predikat Predicate			Sangat Baik Excellent	Sangat Baik Excellent	Sangat Baik Excellent	Sangat Baik Excellent	Sangat Baik Excellent	Baik Good	Cukup Baik Fairly Good	Baik Good

Sebagai perbandingan, hasil penilaian GCG Anak Perusahaan pada periode 2020–2024 yang dilaksanakan oleh BPKP sebagai berikut:

For comparison, the results of GCG assessment of Subsidiaries for the 2020–2024 period carried out by BPKP are as follows:

Perbandingan Hasil Penilaian GCG Anak Perusahaan
Comparison of Subsidiary GCG Assessment Results

No.	Entitas Entity	2024		2021		2019	
		Skor Score	Predikat Predicate	Skor Score	Predikat Predicate	Skor Score	Predikat Predicate
1	PT Petrokimia Gresik	93,52	Sangat Baik Excellent	94,06	Sangat Baik Excellent	91,86	Sangat Baik Excellent
2	PT Pupuk Kujang	90,67	Sangat Baik Excellent	91,47	Sangat Baik Excellent	89,13	Sangat Baik Excellent
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	95,29	Sangat Baik Excellent	95,45	Sangat Baik Excellent	94,60	Sangat Baik Excellent
4	PT Pupuk Iskandar Muda	88,38	Sangat Baik Excellent	85,25	Sangat Baik Excellent	84,87	Baik Good
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	92,40	Sangat Baik Excellent	92,05	Sangat Baik Excellent	91,99	Sangat Baik Excellent
6	PT Rekayasa Industri	82,74	Baik Good	80,81	Baik Good	83,72	Baik Good
7	PT Pupuk Indonesia Niaga	73,52	Cukup Baik Fairly Good	83,06	Baik Good	82,10	Baik Good
8	PT Pupuk Indonesia Logistik	81,41	Baik Good	83,05	Baik Good	77,35	Baik Good
9	PT Pupuk Indonesia Pangan			75,88	Baik Good	66,21	Cukup Baik Fairly Good

*Penilaian penerapan GCG tidak dilakukan karena dalam kondisi tidak aktif sementara sesuai dengan Keputusan RUPS.
*A GCG Implementation Assessment was not conducted due to the Company's temporary inactive status, in accordance with the Shareholders'/GMS Resolution.

Tindak Lanjut atas Penilaian Penerapan GCG PTPI

Hasil progres tindak lanjut rekomendasi GCG Assessment Pupuk Indonesia Group tahun buku 2024 terdapat 521 (lima ratus dua puluh satu) rekomendasi. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut s.d laporan tahunan diterbitkan yaitu:

1. 96 (sembilan puluh enam) rekomendasi (18,43%) telah selesai dan sesuai dengan rekomendasi (*closed*);
2. 342 (tiga ratus empat puluh dua) rekomendasi (65,64%) dalam proses penyelesaian (*in progress*), dan
3. 83 (delapan puluh tiga) rekomendasi (15,93%) yang belum ditindaklanjuti (*open*).

2. Penilaian Penerapan GCG melalui Program Riset dan Pemeringkatan

Sejak 2018, Perusahaan bersama beberapa Entitas Anak, secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dengan berpartisipasi dalam Program Riset dan Pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Program ini diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA. Keikutsertaan dalam Program CGPI diharapkan dapat mendorong Perusahaan untuk mengevaluasi dan membandingkan dengan praktik tata kelola terbaik di industri, serta mendapatkan penilaian dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Follow-up on PTPI's GCG Implementation Assessment

The progress of follow-up actions on GCG Assessment recommendations of Pupuk Indonesia Group for the 2024 fiscal year comprised 521 (five hundred and twenty-one) recommendations. The implementation of follow-up actions on these recommendations through the date the annual report was authorized for issue is as follows:

1. 96 (ninety-six) recommendations (18.43%) have been completed and are in accordance with the recommendations (closed);
2. 342 (three hundred and forty-two) recommendations (65.64%) are in the process of completion (in progress); and
3. 83 (eighty-three) recommendations (15.93%) have not yet been followed up (open).

2. Assessment of GCG Implementation through the Research and Rating Program

Since 2018, the Company, together with several of its Subsidiaries, consistently improved the quality of its Good Corporate Governance (GCG) implementation by participating in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Research and Rating Program. This program is organized by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine. Participation in the CGPI Program is expected to encourage companies to evaluate and benchmark their governance practices against industry best practices, as well as obtain assessments from internal and external stakeholders.

Metode Penilaian

Pada penilaian CGPI Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025, penilaian CGPI menggunakan 3 (tiga) aspek penilaian melalui 2 (dua) tahapan penilaian. Adapun aspek penilaian CGPI terdiri dari:

a. Aspek Struktur Governansi merupakan terhadap kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur governansi dalam membangun kapabilitas dinamis perusahaan yang sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.
b. Aspek Proses Governansi merupakan penilaian terhadap mekanisme governansi dalam membangun kapabilitas dinamis perusahaan yang sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.
c. Aspek Hasil Governansi merupakan penilaian terhadap kualitas luaran, capaian, dampak dan manfaat yang berhasil guna serta berdaya guna dari struktur dan proses governansi dalam membangun kapabilitas dinamis perusahaan yang sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Assessment Method

The CGPI assessment for Fiscal Year 2024, conducted in 2025, used 3 (three) assessment aspects across 2 (two) assessment stages. The CGPI assessment aspects included:

a. The Governance Structure aspect that refers to the completeness of governance organs, structures, and infrastructure in building dynamic company capabilities in accordance with principles, values, and compliance, in order to create value and ensure sustainable growth ethically and with dignity.
b. The Governance Process aspect as an assessment of governance mechanisms in building the Company's dynamic capabilities in accordance with principles, values, and compliance, in order to create value and ensure sustainable growth ethically and with dignity.
c. The Governance Outcome aspect as an assessment of the quality of outputs, achievements, impacts, and benefits that are effective and efficient from governance structures and processes in building the Company's dynamic capabilities in accordance with principles, values, and compliance, creating value and ensuring sustainable growth ethically and with dignity.

Aspek Penilaian CGPI
CGPI Assessment Aspects



Adapun tahapan penilaian CGPI meliputi:

1. Tahapan Analisis terhadap semua aspek dan indikator penilaian CGPI dengan metode:
   a. Pengisian Kuesioner *(Self-Assessment)*
      Self-Assessment ini dilakukan melalui kegiatan pengisian kuesioner sebagai penilaian mandiri oleh seluruh pemangku kepentingan perusahaan, meliputi organ perusahaan, karyawan perusahaan, dan pemangku kepentingan eksternal perusahaan, mengenai penerapan GCG di perusahaan serta upaya membangun kapabilitas dinamis perusahaan berdasarkan prinsip, tata nilai dan kepatuhan.
   b. Penilaian Sistem Dokumentasi
      Penilaian sistem dokumentasi dilakukan melalui klarifikasi dan analisis penilaian terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen perusahaan sesuai dengan yang dipersyaratkan CGPI.

The CGPI assessment stages include:

1. Analysis of all aspects and indicators of the CGPI assessment using the following methods:
   a. Questionnaire Completion (Self-Assessment)
      This self-assessment is conducted through a questionnaire completed as an independent assessment by all Company stakeholders, including Company organs, employees, and external stakeholders, regarding the Company's GCG implementation and efforts to build the Company's dynamic capabilities based on principles, values, and compliance.
   b. Documentation System Assessment
      The documentation system assessment is conducted through clarification and analysis of the existence and completeness of Company documents in accordance with CGPI requirements.

2. Tahapan Observasi
   Pada tahapan observasi dilakukan klarifikasi terhadap hasil yang diperoleh dari tahapan analisis di atas melalui metode diskusi tanya jawab Tim Observer CGPI bersama Organ Perusahaan.

2. Observation Stage
   During the observation stage, clarification of the results obtained from the analysis stage are carried out through a question-and-answer discussion between the CGPI Observer Team and Company organs.

Hasil akhir dari penilaian CGPI selanjutnya dilakukan pemeringkatan yang terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu: Cukup Tepercaya / *Fair Trusted* (Skor 55,00 – 69,99), Tepercaya / *Trusted* (Skor 70,00 – 84,99), dan Sangat Tepercaya / *Most Trusted* (Skor 85,00 – 100). Pemeringkatan menggunakan norma penilaian berdasarkan rentang skor yang dicapai oleh peserta CGPI dengan kategorisasi atas tingkat implementasi GCG menggunakan istilah "Tepercaya/*Trusted*".

The CGPI assessment final results are then ranked into three categories: Fair Trusted (Score 55.00 – 69.99), Trusted (Score 70.00 – 84.99), and Most Trusted (Score 85.00 – 100). The ranking uses assessment norms based on the score range achieved by CGPI participants, with the categorization of GCG implementation using the term "Trusted."

Pihak yang Menilai

Penilaian CGPI dilaksanakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

Assessor

The CGPI assessment was conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

Jenis Pengukuran Measurement Type	:	Penilaian melalui Riset dan Pemeringkatan Assessment through Research and Ranking
Asesor/Penilai Assessor/Evaluator	:	The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)
Periode Penerapan Implementation Period	:	Tahun Buku 2024 Fiscal Year 2024
Tahun Ukur Measurement Year	:	2025
Tempat Place	:	Kantor PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Pupuk Indonesia (Persero) Office
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	31 Juli 2025 – 25 November 2025 July 31, 2025 – November 25, 2025

Hasil Penilaian

Hasil penilaian CGPI Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan tahun 2025 menunjukkan skor 88,03 dengan kategori Sangat Tepercaya (*Most Trusted*), dengan rincian setiap aspek penilaian sebagai berikut:

Assessment Results

The CGPI assessment results for Fiscal Year 2024, conducted in 2025, showed a score of 88.03, categorized as Most Trusted. The breakdown of each assessment aspect is as follows:

Hasil Penilaian CGPI
CGPI Assessment Results

Aspek Penilaian Assessment Aspect	Bobot (%) Weight (%)	Skor Penilaian Assessment Score
Aspek Struktur Governansi Governance Structure Aspect	27,07	23,75
Aspek Proses Governansi Governance Process Aspect	36,56	32,35
Aspek Hasil Governansi Governance Outcomes Aspect	36,37	31,93
Skor Akhir Final Score	**100,00**	**88,03**

Sebagai perbandingan, hasil penilaian CGPI selama 5 tahun pada periode 2021–2025 di PTPI dan beberapa Anak Perusahaan sebagai berikut:

For comparison, the results of the CGPI assessment for the five-year period 2021–2025 at PTPI and several Subsidiaries were as follows:

Perkembangan Hasil Penilaian CGPI PTPI dan Anak Perusahaan
Development of CGPI Assessment Results for PTPI and Subsidiaries

Tahun Year	Skor Penilaian Assessment Score				
	Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure Aspect	Aspek Proses Tata Kelola Governance Process Aspect	Aspek Hasil Tata Kelola Governance Outcome Aspect	Skor Akhir Final Score	Kategori Category
Perusahaan (*Holding*) Company (Holding)					
2025	23,75	32,35	31,93	88,03	Sangat Tepercaya Most Trusted
2024	29,32	29,21	29,13	87,66	Sangat Tepercaya Most Trusted
2023	28,47	28,27	29,49	86,23	Sangat Tepercaya Most Trusted
2022	23,84	32,55	28,89	85,28	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	30,28	30,71	24,15	85,14	Sangat Tepercaya Most Trusted
Entitas Anak Subsidiaries					
PT Petrokimia Gresik					
2025	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate in the CGPI assessment				
2024	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate in the CGPI assessment				
2023	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate in the CGPI assessment				
2022	23,95	32,52	28,78	85,25	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	30,47	30,52	24,13	85,12	Sangat Tepercaya Most Trusted
PT Pupuk Kalimantan Timur					
2025	24,04	32,93	32,40	89,37	Sangat Tepercaya Most Trusted
2024	29,87	29,60	29,62	89,09	Sangat Tepercaya Most Trusted
2023	29,20	29,03	30,14	88,37	Sangat Tepercaya Most Trusted
2022	24,52	33,43	29,66	87,61	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	30,70	31,43	24,76	86,89	Sangat Tepercaya Most Trusted
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang					
2025	23,38	31,76	31,47	86,61	Sangat Tepercaya Most Trusted
2024	28,75	28,79	28,70	86,24	Sangat Tepercaya Most Trusted
2023	28,34	28,13	29,21	85,68	Sangat Tepercaya Most Trusted
2022	23,78	32,46	28,77	85,01	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	29,77	30,36	23,79	83,92	Tepercaya Trusted
PT Pupuk Kujang					
2025	22,87	31,11	30,90	84,88	Tepercaya Trusted
2024	27,87	28,25	28,14	84,26	Tepercaya Trusted

Perkembangan Hasil Penilaian CGPI PTPI dan Anak Perusahaan
Development of CGPI Assessment Results for PTPI and Subsidiaries

Tahun Year	Skor Penilaian Assessment Score				
	Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure Aspect	**Aspek Proses Tata Kelola** Governance Process Aspect	**Aspek Hasil Tata Kelola** Governance Outcome Aspect	**Skor Akhir** Final Score	**Kategori** Category
2023	27,66	27,43	28,42	83,51	Tepercaya Trusted
2022	22,80	31,46	27,91	82,71	Tepercaya Trusted
2021	28,91	29,76	28,91	81,98	Tepercaya Trusted
PT Pupuk Iskandar Muda					
2025	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate in the CGPI assessment				
2024	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate in the CGPI assessment				
2023	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate in the CGPI assessment				
2022	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Did not participate in the CGPI assessment				
2021	28,96	29,77	22,94	81,67	Tepercaya Trusted

Tindak Lanjut atas Penilaian CGPI

Hasil progres tindak lanjut rekomendasi CGPI Pupuk Indonesia Group tahun 2025 terdapat 70 (tujuh puluh) rekomendasi. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut yaitu:

1. 10 (sepuluh) rekomendasi (14,29%) telah selesai dan sesuai dengan rekomendasi (*closed*);
2. 60 (enam puluh) rekomendasi (85,71%) dalam proses penyelesaian (*in progress*); dan
3. 0 (nol) rekomendasi (0%) yang belum ditindaklanjuti (*open*).

Follow-Up on CGPI Assessment

The progress of follow-up actions on CGPI recommendations of Pupuk Indonesia Group in 2025 comprised 70 (seventy) recommendations. The implementation status of these follow-up actions is as follows:

1. 10 (ten) recommendations (14.29%) have been completed and are in accordance with the recommendations (closed);
2. 60 (sixty) recommendations (85.71%) are in the process of completion (in progress); and
3. 0 (zero) recommendations (0%) have not yet been followed up (open).

Peningkatan Kualitas Implementasi GCG dan *Benchmarking*

Improving the Quality of GCG Implementation and Benchmarking

Sosialisasi dan Internalisasi Prinsip-Prinsip GCG

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan GCG oleh seluruh Insan Perusahaan, Perusahaan secara berkelanjutan membangun pemahaman yang menyeluruh atas prinsip-prinsip GCG dengan melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi terkait GCG kepada seluruh Insan Perusahaan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Pedoman Utama GCG kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan baik yang disampaikan secara langsung berbentuk buku, e-mail perusahaan, maupun melalui media lainnya yang digunakan oleh Perusahaan.

GCG Principles Socialization and Internalization

To improve the quality of GCG implementation by all Company Personnel, the Company continuously builds a comprehensive understanding of GCG principles through socialization and internalization programs related to GCG for all Company Personnel through the following activities:

1. Socializing the GCG Core Guidelines to the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Employees, either in person, in a book, through company email, or through other media used by the Company.

2. Pelaksanaan Program Pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat dengan penyampaian materi-materi terkait Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris termasuk hak yang didelegasikan.
3. Pelaksanaan Program *Onboarding* bagi karyawan baru dengan penyampaian materi terkait Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan hal-hal lain terkait kewajiban dan hak karyawan.
4. Sosialisasi Pedoman Utama GCG pada situs web Perusahaan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
5. Pemutakhiran Situs *Web* Perusahaan terkait penerapan GCG, susunan Dewan Komisaris dan Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, termasuk Pedoman Utama GCG yang telah dimutakhirkan.
6. Pemutaran video penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap acara Perusahaan baik internal maupun yang mengundang pihak eksternal.
7. Sosialisasi prinsip-prinsip GCG melalui berbagai media seperti poster, *desktop* laptop/PC kantor, TV kantor, majalah SINTESA, media sosial Perusahaan, dan lain-lain.
8. Penandatanganan Pakta Integritas secara *online* melalui aplikasi PI-SMART yang diakses melalui link https://pismart.pupuk-indonesia.com/.
9. Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan, Kebijakan Anti Gratifikasi, Kebijakan Anti-*Fraud* PTPI kepada *stakeholders*.

Peta Jalan dan Rencana Pengembangan GCG

Sejalan dengan *roadmap* GCG pada RJPP 2024-2029, PTPI telah menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola pada tahun mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka tata kelola terintegrasi sebagai pondasi pengelolaan Pupuk Indonesia Group secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan efektivitas tata kelola melalui penyusunan dan pemutakhiran pedoman terkait *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dan *Environmental, Social and Governance* (ESG) secara terintegrasi.
3. Mengembangkan aplikasi pelaporan dan penilaian atas penerapan GCG untuk Pupuk Indonesia Group berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat sistem pengendalian *fraud*, manajemen anti penyuapan, dan manajemen kepatuhan sebagai bagian dari penguatan budaya kepatuhan perusahaan.
5. Memastikan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi penilaian GCG sebagai bagian dari penguatan tata kelola berkelanjutan.

2. Organizing a Company Introduction Program for newly appointed Commissioners, to provide material related to the Company, Corporate Governance, the Rights and Obligations of the Board of Commissioners, including delegated rights.
3. Organizing an Onboarding Program for new employees, to provide material related to the Company, Corporate Governance, and other matters related to employee obligations and rights.
4. Socializing the Main GCG Guidelines through the Company website, accessible to all stakeholders.
5. Updating the Company Website regarding GCG implementation, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, and the Board of Commissioners' Supporting Organs, including the updated Main GCG Guidelines.
6. Organizing screening of videos on the application of GCG principles at every Company event, both internal and those inviting external parties.
7. Socializing the GCG principles through media such as posters, office laptops/PC desktops, office TV, SINTESA Magazine, Company social media, and others.
8. Signing of the Integrity Pact online through the PI-SMART application, accessed via https://pismart.pupuk-indonesia.com/.
9. Socializing and Internalizating PTPI's Anti-Bribery, Anti-Gratification, and Anti-Fraud Policies and Commitments to Stakeholders.

GCG Roadmap and Development Plan

In line with the GCG roadmap in the 2024-2029 Long-Term Development Plan (RJPP), PTPI has developed a strategic plan to improve the quality of governance implementation in the coming year, among others, as follows:

1. Strengthening the integrated governance framework as a foundation for the sustainable management of Pupuk Indonesia Group.
2. Improving governance effectiveness by developing and updating integrated guidelines related to Governance, Risk, and Compliance (GRC) and Environmental, Social, and Governance (ESG).
3. Developing an information technology-based application for reporting and assessing GCG implementation at Pupuk Indonesia Group.
4. Strengthening the fraud control system, anti-bribery management, and compliance management as part of strengthening the Company's compliance culture.
5. Ensuring effective follow-up on GCG assessment recommendations as part of strengthening sustainable governance.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure and Mechanism



Penerapan GCG didukung oleh struktur dan proses tata kelola yang dirancang secara terukur dan sistematis. Struktur tata kelola dibentuk untuk memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menjawab kebutuhan internal Perusahaan dalam memperkuat kualitas pengelolaan perusahaan.

Proses tata kelola mencakup seperangkat mekanisme, kebijakan, dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Perusahaan secara menyeluruh. Proses tersebut meliputi penerapan peraturan perundang-undangan, prosedur operasional standar, piagam, serta kebijakan internal yang mengatur hubungan kerja dan kewenangan antar organ dan perangkat Perusahaan guna memastikan pengambilan keputusan yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Sebagai Perusahaan yang didirikan dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Perusahaan terdiri atas 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Masing-masing organ memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG.

GCG implementation is supported by a measurable and systematically designed governance structure and process. The governance structure has been established to comply with applicable laws and regulations and to address the Company's internal needs to strengthen the corporate governance quality.

The corporate governance process includes a set of mechanisms, policies, and provisions that govern the Company's overall operations. This process includes the instigation of laws and regulations, standard operating procedures, charters, and internal policies that govern the working relationships and authority between the Company's organs and apparatus to ensure accountable and responsible decision-making.

As a Company established and operated in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's governance structure consists of three main organs: the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Each organ has clear functions, duties, and responsibilities to support the GCG implementation principles.

Sistem kepengurusan Perusahaan mengacu pada model *two-tier system*, di mana Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan peran dan kewenangannya secara terpisah namun saling melengkapi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Keselarasan pemahaman terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan menjadi landasan penting bagi efektivitas pengawasan dan pengelolaan Perusahaan secara berkelanjutan.

The Company's governance system adheres to a two-tiered model, where the Board of Commissioners and the Board of Directors exercise separate but complementary roles and authorities, as stipulated in laws and regulations and the Articles of Association. A shared understanding of the Company's vision, mission, and values is a crucial foundation for effective supervision and sustainable management.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PTPI
PTPI Corporate Governance Structure



Dalam mendukung tugas-tugas Organ Utama, Perusahaan memiliki organ pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris didukung oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari: Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Adapun Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan, Unit Manajemen Risiko, Unit Tata Kelola dan Kepatuhan, Unit Satuan Pengawasan Intern, serta Unit-Unit Kerja lainnya. Selain itu, Direksi juga didukung oleh Komite di bawah Direksi, yaitu: Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Komite Key Performance Indicators (KPI), Komite Harga, Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Komite Investasi Pengembangan, dan Komite Talenta.

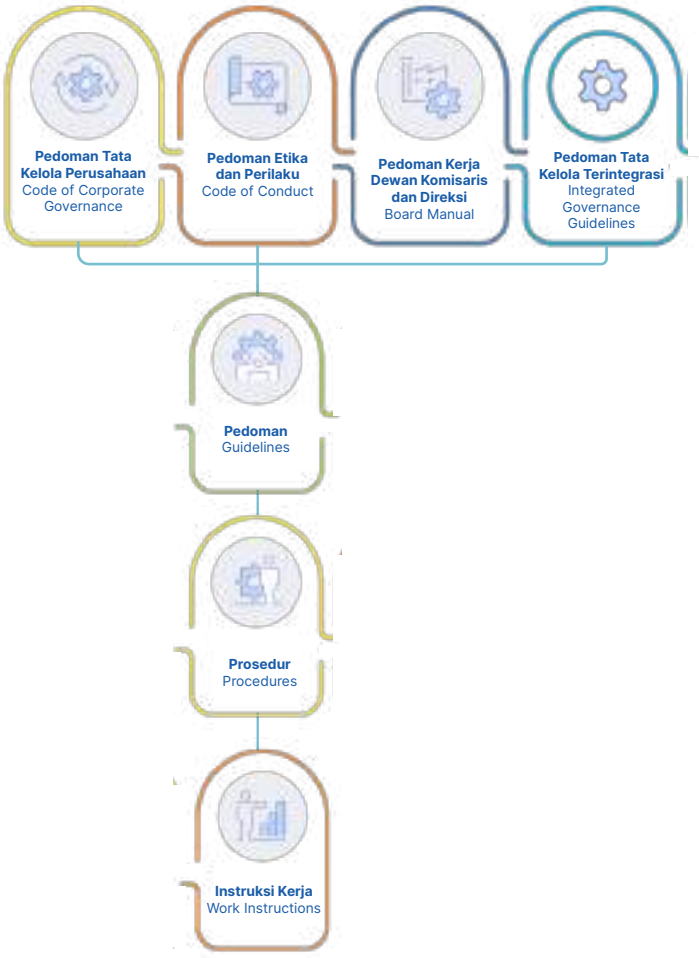
To support the Main Organs duties, the Company has supporting organs to assist the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties. The Board of Commissioners is supported by Supporting Organs, including: the Board of Commissioners consisting of: Secretariat of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Integrated Governance Committee. As for the Board of Directors is supported by the Corporate Secretary, the Risk Management Unit, the Governance and Compliance Unit, the Internal Audit Unit, and other Work Units. The Board of Directors is also supported by Committees under the Board of Directors, including: the Corporate Work Plan and Budget Committee (RKAP), the Key Performance Indicators Committee (KPI), the Pricing Committee, the Social and Environmental (SER) Responsibility Committee, the Respectful Workplace Policy Committee (RWP), and the Talent Committee.

Untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik dan masing-masing Organ memiliki tanggung jawab yang jelas, Perusahaan menerapkan proses tata kelola melalui berbagai kebijakan dan aturan internal. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan mendukung pengelolaan Perusahaan yang tertib dan akuntabel.

To ensure sound corporate governance and clear responsibilities for each Organ, the Company has instigated governance processes through internal policies and regulations. These policies are formulated based on applicable laws and regulations and aim to support orderly and accountable Company management.

Dalam penerapan GCG, Perusahaan menetapkan sejumlah Pedoman Utama GCG yang terdiri dari: Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta didukung oleh pedoman dan prosedur operasional lainnya. Pedoman-Pedoman ini diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan regulasi yang berdampak bagi Perusahaan dan adanya perubahan proses bisnis.

The Company has established several Key GCG Guidelines for GCG implementation, including: Code of Corporate Governance, Code of Conduct Guidelines, Board Manuals for the Board of Commissioners and Board of Directors, Integrated Governance Guidelines, and other operational guidelines and procedures, which are regularly updated to be in line with regulatory changes that impact the Company and changes in business processes.



Soft Structure Tata Kelola Perusahaan

Soft Structure Perusahaan sampai dengan akhir Desember 2025 terdiri dari:

Corporate Governance Soft Structure

The Company's soft structure as of December 31, 2025, consists of:

No.	*Soft Structure* GCG GCG Soft Structure	Pertama Diterbitkan First Published	Terakhir Dimutakhirkan Last Updated
1	Anggaran Dasar Perusahaan Company Articles of Association	3 Januari 1970 January 3, 1970	17 April 2025 April 17, 2025
2	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance	5 November 2012 November 5, 2012	16 Februari 2022 February 16, 2022
3	Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conduct	5 November 2012 November 5, 2012	20 Desember 2024 December 20, 2024

No.	*Soft Structure* GCG GCG Soft Structure	Pertama Diterbitkan First Published	Terakhir Dimutakhirkan Last Updated
4	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines (Board Manual)	5 November 2012 November 5, 2012	30 Desember 2024 December 30, 2024
5	Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha Code of Group Governance	2 Juli 2012 July 2, 2012	24 Desember 2025 December 24, 2025
6	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group Integrated Governance Guidelines for Pupuk Indonesia Group Conglomerate	21 Maret 2024 March 21, 2024	-
7	Pedoman Pengelolaan dan Penerapan Sistem Manajemen terdiri dari: 1. Penyusunan dan Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen 2. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi 3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu 4. Penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan 5. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 6. Penerapan Sistem Manajemen Layanan TI 7. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 8. Penerapan Sistem Manajemen Inovasi The Management System Management and Implementation Guidelines including: 1. Preparation and Control of Management System Documents 2. Implementation of Integrated Management System 3. Implementation of Quality Management System 4. Implementation of Compliance Management System 5. Implementation of Anti-Bribery Management System 6. Implementation of IT Service Management System 7. Implementation of Information Security Management System 8. Implementation of Innovation Management System	13 Mei 2025 May 13, 2024	-
8	Pedoman Pengendalian Kerahasiaan Dokumen dan Informasi Perusahaan terdiri dari: 1. Pengelolaan dan Pengendalian Informasi Publik 2. Pengendalian dan Perlindungan Data Pribadi 3. Pengendalian Kerahasiaan Data dan Informasi Penghasilan Karyawan Controlling the Company Documents and Information Confidentiality Guidelines including: 1. Management and Control of Public Information 2. Control and Protection of Personal Data 3. Control of Confidentiality of Employee Data and Income Information	11 Februari 2025 February 11, 2025	-
9	Pedoman Pengelolaan Tata Kelola & Kepatuhan terdiri dari: 1. Pengelolaan Benturan Kepentingan 2. Pengendalian Gratifikasi 3. Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat 4. Sistem Pengendalian Kecurangan 5. Pengukuran Penerapan Tata Kelola Perusahaan Governance & Compliance Management Guidelines including: 1. Conflict of Interest Management 2. Gratification Control 3. Officials Wealth Reporting 4. Fraud Control System 5. Measuring Corporate Governance Implementation	30 September 2015 September 30, 2015 30 Juni 2015 Juni 30, 2015 23 September 2015 September 23, 2015 28 April 2021 April 28, 2021 31 Mei 2018 Mei 31, 2018	3 Oktober 2025 October 3, 2025
10	Pedoman Manajemen Risiko Risk Management Guidelines	4 Februari 2013 February 4, 2013	30 September 2025 September 30, 2025
11	Pedoman Audit Intern Terintegrasi Integrated Internal Audit Guidelines	29 Desember 2017 December 29, 2017	11 November 2025 November 11, 2025
12	Pedoman Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance Evaluation Guidelines	29 Desember 2017 December 29, 2017	29 Desember 2017 December 29, 2017
13	Pedoman Penunjukan Audit Eksternal External Audit Appointment Guidelines	30 Desember 2022 December 30, 2022	11 November 2025 November 11, 2025
14	Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perusahaan Corporate Internal Control System Guidelines	23 Februari 2016 February 23, 2016	29 Desember 2017 December 29, 2017
15	Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha Business Continuity Management System Guidelines	23 Juni 2022 June 23, 2022	-
16	Pedoman Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (WBMS) Whistleblowing Management System (WBMS) Guidelines	8 September 2027 September 8, 2027	13 Juli 2023 July 13, 2023
17	Piagam Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Charter	29 April 2015 April 29, 2015	3 Januari 2024 January 3, 2024
18	Piagam Komite Pemantauan Risiko (PMR) Risk Monitoring Committee (RMC) Charter	23 Februari 2015 February 23, 2015	29 Februari 2024 February 29, 2024
19	Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	3 Oktober 2014 October 3, 2014	29 April 2024 April 29, 2024
20	Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee Charter	29 April 2024 April 29, 2024	29 April 2024 April 29, 2024

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Perusahaan yang menjalankan kewenangan strategis sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Menteri BUMN bertindak sebagai RUPS Persero dalam hal seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Negara.

Pemegang Saham Utama/Pengendali

Struktur kepemilikan saham PTPI hingga tingkat entitas pemilik akhir per 31 Desember 2025 sepenuhnya berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia, terdiri dari:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham Seri A Dwiwarna; dan
2. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang telah berubah nama menjadi PT Danantara Asset Management (Persero) sebanyak 24.999.999 lembar saham Seri B.

Di tahun 2026, Perusahaan melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham yang berdampak pada komposisi dan klasifikasi saham. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang dan dijelaskan lebih lanjut pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest Company organ, exercising strategic authority in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association. Pursuant to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, the Minister of State-Owned Enterprises acts as the GMS for a limited liability Company if all of the company's shares are owned by the state.

Majority/Controlling Shareholder

PTPI's share ownership structure, down to the ultimate owner entity level, as of December 31, 2025, is entirely under the Government of the Republic of Indonesia, and consists of:

1. The Republic of Indonesia, 1 Dwiwarna Series A share; and
2. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), who changed its name to PT Danantara Asset Management (Persero), 24,999,999 Series B shares.

In 2026, the Company adjusted its share ownership structure, impacting its shares composition and classification. These changes received approval from the relevant authorities and are further explained in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Jenis-Jenis RUPS

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, mekanisme pengambilan keputusan pemegang saham dilaksanakan melalui dua jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi:

1. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan
   RUPS Tahunan mengenai persetujuan laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan laporan tahunan, usulan penggunaan laba bersih perusahaan, dan hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan.
2. RUPS mengenai persetujuan RKAP
   RUPS Tahunan mengenai persetujuan RKAP diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan Rancangan RKAP termasuk Proyeksi Laporan Keuangan dan hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan RKAP.

Dalam RUPS Tahunan dapat juga memasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang/lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perusahaan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus telah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.

RUPS Lainnya

RUPS Lainnya yang selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan.

RUPS Tahunan maupun RUPS-LB memiliki wewenang tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perusahaan. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan kebijakan, peraturan, surat keputusan, serta anggaran dasar Perusahaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

Types of GMS

Based on the provisions in the Company's Articles of Association, the shareholder decision-making mechanism is implemented through two types of General Meetings of Shareholders (GMS): Annual GMS and Other GMS.

Annual GMS

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is held annually and includes:

1. GMS regarding approval of the Annual Report
   The Annual GMS for approval of the annual report shall be held no later than June after the closing of the relevant financial statements. At this meeting, the Board of Directors shall submit the annual report, proposed use of the Company's net profit, and other matters requiring GMS approval for the benefit of the company.
2. GMS for approval of the RKAP
   The Annual GMS for approval of the RKAP shall be held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the relevant RKAP fiscal year). At this meeting, the Board of Directors shall submit a Draft RKAP, including the Financial Statement Projections and other matters requiring GMS approval for the benefit of the company that are not yet included in the Draft RKAP.

The Annual GMS may also include proposals submitted by the Board of Commissioners and/or one or more shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights, provided the proposals in question must have been received by the Board of Directors before the date of the Annual GMS invitation.

Other GMS

Other GMS, hereinafter referred to as Extraordinary GMS (EGMS), may be held at any time as needed for the benefit of the company.

The AGMS and EGMS have the highest authority within the corporate governance structure and are the primary forums for Shareholders to exercise their rights and authority over the Company's management. The GMS is held based on the Company's policies, regulations, decrees, and articles of association, as follows:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and its amendments;
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments;
3. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises and its amendments;
4. Company's Articles of Association.

Keterbukaan Informasi dan Penyampaian Informasi RUPS kepada Pemegang Saham

Perusahaan menyediakan akses informasi bagi publik, khususnya Pemegang Saham, melalui berbagai media, antara lain:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan media penyampaian laporan dan informasi yang memungkinkan Pemegang Saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
2. Media Elektronik, yaitu: situs informasi dengan alamat www.pupuk-indonesia.com;
3. Media Sosial Perusahaan, yaitu:
   X: @pupuk_indonesia
   Instagram: pt.pupukindonesia
   Facebook: @Pupuk.Indonesia
4. Laporan Tahunan, yaitu sarana informasi yang dipublikasikan sebagai laporan kinerja pada setiap tahun buku.

Information Disclosure and Submission of GMS Information to Shareholders

The Company provides access to information for the public, particularly Shareholders, through different media, including:

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is a medium for submitting reports and information that allows Shareholders to participate in decision-making;
2. Electronic Media, namely: the information website at www.pupuk-indonesia.com;
3. Company Social Media, at:
   X: @pupuk_indonesia
   Instagram: pt.pupukindonesia
   Facebook: @Pupuk.Indonesia
4. Annual Report, an information medium published as a performance report for each fiscal year.

Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2025

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2025.

Organizing the 2025 Fiscal Year GMS

Annual GMS

1. Annual GMS concerning Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners' Work Plan and Budget, and the Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget for the 2025 Fiscal Year.

Hari/Tanggal Day/Date	**Kamis, 30 Januari 2025** Thursday, January 30, 2025	
Waktu Time	**14.33 WIB**	
Tempat Venue	**Ruang Residence 7, Lantai 3, Park Hyatt, Jl. Kebon Sirih, No.17-19, Menteng, Jakarta Pusat**	
Kehadiran Participants	**Pemegang Saham** • Zuryati Simbolon selaku Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk. **Direksi** • Rahmad Pribadi selaku Direktur Utama • Gusrizal selaku Wakil Direktur Utama • Bob Indiarto selaku Direktur Produksi • Wono Budi Tjahyono selaku Direktur Keuangan • Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Transformasi Bisnis • Tina T. Kemala Intan selaku Direktur Sumber Daya Manusia • Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Pemasaran • Jamsaton Nababan selaku Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha • Ninis Kesuma Adriani selaku Direktur Manajemen Risiko **Dewan Komisaris** • Darmin Nasution selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen • Mustoha Iskandar selaku Komisaris Independen • Riswinandi selaku Komisaris Independen • Danar Rahmanto selaku Komisaris Independen • Irfan Ahmad Fauzi selaku Komisaris Independen • Anwar Sanusi selaku Komisaris • Suwandi selaku Komisaris • Febrio Nathan Kacaribu selaku Komisaris • Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana selaku Komisaris • Farhat Brachma selaku Komisaris	**Shareholders** • Zuryati Simbolon, Assistant Deputy for the Food and Fertilizer Industry. **Board of Directors** • Rahmad Pribadi as President Director • Gusrizal as Vice President Director • Bob Indiarto as Production Director • Wono Budi Tjahyono as Director of Finance • Panji Winanteya Ruky as Director of Business Transformation • Tina T. Kemala Intan as Director of Human Capital • Tri Wahyudi Saleh as Director of Marketing • Jamsaton Nababan as Director of Portfolio and Business Development • Ninis Kesuma Adriani as Director of Risk Management **Board of Commissioners** • Darmin Nasution as President Commissioner and Independent Commissioner • Mustoha Iskandar as Independent Commissioner • Riswinandi as Independent Commissioner • Danar Rahmanto as Independent Commissioner • Irfan Ahmad Fauzi as Independent Commissioner • Anwar Sanusi as Commissioner • Suwandi as Commissioner • Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner • Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana as Commissioner • Farhat Brachma as Commissioner
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Parties for Vote Counting	**Notaris Lumassia S.H.** Notary Lumassia S.H.	

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Notaris Nomor 04 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat di hadapan Lumassia, Notaris di Jakarta. Adapun rincian keputusan RUPS tersebut sebagai berikut:

The GMS resolutions were stated in Notarial Deed No. 04 dated January 30, 2025, drawn up before Lumassia, Notary in Jakarta. The details of the GMS resolutions are as follows:

Agenda Agenda	**Keputusan** Resolution	**Realisasi** Implementation
Mata Acara 1: Meeting Agenda 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2025. To approve the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the 2025 Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero).	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2025. Ratified the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), as well as the 2025 Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero).	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 30 Januari 2025. Already implementation through Notarial Deed No. 04 dated January 30, 2025.
Mata Acara 2: Meeting Agenda 2: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2025. To approve the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) of PTPI for 2025.	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2025. Ratified the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) of PT Pupuk Indonesia (Persero) 2025.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 30 Januari 2025. Already implementation through Notarial Deed No. 04 dated January 30, 2025.
Mata Acara 3: Meeting Agenda 3: Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025. To establish the Annual Management Contract containing the Key Performance Indicators (KPI) targets for the Board of Directors as a collective body and the Board of Commissioners for 2025.	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025. Established the Annual Management Contract containing the Key Performance Indicators (KPI) targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2025.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 30 Januari 2025. Already implementation through Notarial Deed No. 04 dated January 30, 2025.
Mata Acara 4: Meeting Agenda 4: Persetujuan Penugasan Pemerintah (PSO) melalui Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025. To approve the Government Assignment (PSO) through the Minister of Agriculture's Decree for the distribution of subsidized fertilizer in 2025.	Menyetujui Penugasan Pemerintah (PSO) melalui Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025. Approved the Government Assignment (PSO) through the Minister of Agriculture Decree for the distribution of subsidized fertilizer in 2025.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 04 tanggal 30 Januari 2025. Already implementation through Notarial Deed No. 04 dated January 30, 2025.

2. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024

2. Annual GMS concerning Approval of the Annual Report for the 2024 Fiscal Year

Hari/Tanggal Day/Date	**Senin, 16 Juni 2025** Monday June 16, 2025	
Waktu Time	**19.31 WIB** 07.31 PM	
Tempat Venue	**Kantor Kementerian BUMN** Ministry of BUMN Office	
Kehadiran Participants	**Pemegang Saham Perusahaan** Abdi Mustakim Simbolon selaku pelaksana tugas Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk **Direksi** • Rahmad Pribadi selaku Direktur Utama • Gusrizal selaku Wakil Direktur Utama • Bob Indiarto selaku Direktur Produksi • Wono Budi Tjahyono selaku Direktur Keuangan • Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Transformasi Bisnis • Tina T. Kemala Intan selaku Direktur Sumber Daya Manusia • Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Pemasaran • Jamsaton Nababan selaku Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha • Ninis Kesuma Adriani selaku Direktur Manajemen Risiko **Dewan Komisaris** • Darmin Nasution selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen • Mustoha Iskandar selaku Komisaris Independen • Irfan Ahmad Fauzi selaku Komisaris Independen • Anwar Sanusi selaku Komisaris • Febrio Nathan Kacaribu selaku Komisaris • Farhat Brachma selaku Komisaris	**Company Shareholders** Abdi Mustakim Simbolon as Acting Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry **Board of Directors** • Rahmad Pribadi as President Director • Gusrizal as Vice President Director • Bob Indiarto as Production Director • Wono Budi Tjahyono as Director of Finance • Panji Winanteya Ruky as Director of Business Transformation • Tina T. Kemala Intan as Director of Human Capital • Tri Wahyudi Saleh as Director of Marketing • Jamsaton Nababan as Portfolio and Director of Business Development • Ninis Kesuma Adriani as Director of Risk Management **Board of Commissioners** • Darmin Nasution as President Commissioner and Independent Commissioner • Mustoha Iskandar as Independent Commissioner • Irfan Ahmad Fauzi as Independent Commissioner • Anwar Sanusi as Commissioner • Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner • Farhat Brachma as Commissioner
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Parties for Vote Counting	**Notaris Lumassia, S.H.** Notary Lumassia, S.H.	

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Notaris Nomor 01 tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. Adapun rincian keputusan RUPS tersebut sebagai berikut:

The GMS resolutions were stated in Notarial Deed No. 01 dated June 16, 2025, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta. The details of the GMS resolutions are as follows:

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Implementation
Mata Acara 1: Meeting Agenda 1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024. To approve the Company's Annual Report and Ratify the Company's Consolidated Financial Statements, Approve the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratify the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year, and grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management of the Company and the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the 2024 Fiscal Year.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 yang telah berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan. b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan. 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Laporan Tahunan Perusahaan telah disetujui oleh Pemegang Saham seluruhnya untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan. 1. Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2024 Fiscal Year ending December 31, 2024. 2. Ratified: a. The Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year ending December 31, 2024, audited by KAP Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan. b. The Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year audited by KAP Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan. 3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, and the ratification of the Company's Financial Report and the Financial Report of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK), the Company's Annual Report was approved by all Shareholders for the 2024 Fiscal Year ending December 31, 2024. The GMS granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management of the Company and the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the 2024 Fiscal Year ending December 31, 2024, as long as such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the Company's books and reports.	Laporan Tahunan Perusahaan telah disetujui oleh Pemegang Saham. The Company's Annual Report has been approved by the Shareholders.

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Implementation
Mata Acara 2: Meeting Agenda 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2024. To determine the Use of the Company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year.	Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perusahaan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp8.668.905.046.184,- (delapan triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima juta empat puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebagai berikut: 1. Sebesar 33,9784% (tiga puluh tiga koma sembilan tujuh delapan empat persen) atau sebesar Rp2.945.555.232.213,- (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah) ditetapkan Laporan Tahunan Perusahaan telah disetujui oleh Pemegang Saham sebagai Dividen, yang pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bagian dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perusahaan sebesar Rp117.822,- (seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dibayarkan secara tunai ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN; b. Bagian deviden atas Saham Seri B Perusahaan sebesar Rp2.945.555.114.390,- (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dibayarkan ke rekening yang akan ditunjuk oleh PT Danantara Asset Management (Persero); c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran Dividen Perusahaan termasuk untuk melakukan: i) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; dan ii) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sebesar 66,0216% (enam puluh enam koma nol dua satu enam persen) atau sejumlah Rp5.723.349.8133.971,- (lima triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) digunakan sebagai saldo laba yang dicadangkan. Approved and determined the use of the Company's Net Profit attributable to the owners of the parent entity for the 2024 Fiscal Year in the amount of Rp8,668,905,046,184 (eight trillion six hundred sixty-eight billion nine hundred five million forty-six thousand one hundred and eighty-four rupiah) as follows: 1. 33.9784% (thirty-three point nine seven eight four percent) or Rp2,945,555,232,213 (two trillion nine hundred forty-five billion five hundred fifty-five million two hundred thirty-two thousand two hundred and thirteen rupiah) of the Company's Annual Report was approved by the Shareholders as Dividends, the payment of which will be made under the following conditions: a. a. The portion of dividends paid to the Company's Series A Dwiwarna Shareholders in the amount of Rp117,822 (one hundred seventeen thousand eight hundred twenty-two rupiah) will be paid in cash to an account designated by the Minister of BUMN; b. b. The dividend portion of the Company's Series B shares, amounting to Rp2,945,555,114,390 (two trillion nine hundred forty-five billion five hundred fifty-five million one hundred fourteen thousand three hundred sixty rupiah), will be paid into an account designated by PT Danantara Asset Management (Persero); c. c. The Board of Directors is granted the power and authority, with the right of substitution, to take necessary actions in connection with the payment of the Company's Dividends, including: i) Withholding Dividend tax in accordance with applicable tax regulations; and ii) Other technical matters in accordance with applicable regulations. 2. 66.0216% (sixty-six point zero two one six percent) or Rp5,723,349,8133,971 (five trillion seven hundred twenty-three billion three hundred forty-nine million eight hundred thirteen thousand nine hundred seventy-one rupiah) will be reserved as retained earnings.	Laporan Tahunan Perusahaan telah disetujui oleh Pemegang Saham. The Company's Annual Report has been approved by the Shareholders.

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Implementation
Mata Acara 3: Meeting Agenda 3: Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2025 serta Insentif Kinerja Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris. To determine the remuneration (salary/ honorarium, facilities, and allowances) for the 2025 Financial Year, as well as Performance Incentives for the 2024 Fiscal Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Penetapan Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun Buku 2024, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2025, akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B. The determination of the Performance Incentive/Special Incentive for the 2024 Fiscal Year, the Salaries for the Board of Directors, the Honorarium for the Board of Commissioners, together with other facilities and allowances for 2025, will be determined separately by the Series B Shareholder.	Laporan Tahunan Perusahaan telah disetujui oleh Pemegang Saham. The Company's Annual Report has been approved by the Shareholders.
Mata Acara 4: Meeting Agenda 4: Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025. To appoint a Public Accounting Firm (KAP) to conduct the Consolidated Financial Statement Audit, PSA 62 Compliance Audit, Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) Financial Statement Audit related to the Social and Environmental Responsibility Program, and the Implementation of Agreed-Upon Procedures for the Corporate and Individual KPI Performance Evaluation Report, as well as the Composite Risk Evaluation Report for Fiscal Year 2025.	1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian (termasuk realisasi biaya untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025; 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit KAP yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut; 3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham Seri B untuk: a. Menunjuk KAP pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan b. Menetapkan kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium KAP pengganti. 4. Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi setiap tahun atas kinerja KAP dan mengusulkan kembali untuk penetapan KAP Tahun Buku 2026. 1. Delegated authority to the Board of Commissioners, after first obtaining written approval from the Series B Shareholders, to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to conduct an Audit of the Consolidated Financial Statements (including the implementation of costs for the Social and Environmental Responsibility Program), a PSA 62 Compliance Audit, an Audit of the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) related to the Social and Environmental Responsibility Program, and the implementation of agreed-upon procedures for the Corporate and Individual KPI Performance Evaluation Report, as well as the Composite Risk Evaluation Report for the 2025 Fiscal Year; 2. Delegated authority to the Board of Commissioners to determine the amount of the KAP audit fee approved in decision number 1 above, as well as any necessary additions to the scope of work and other requirements reasonable for the KAP; 3. Delegated authority to the Board of Commissioners, after first obtaining written approval from the Series B Shareholders, to: a. Appoint a replacement KAP if the appointed KAP is unable to continue or perform its duties for any reason; and b. Establish the terms and conditions for the appointment and honorarium of the replacement Public Accountant Firm. 4. The Board of Commissioners to conduct an annual evaluation of the Public Accountant Firm's performance and re-propose the appointment of the Public Accountant Firm for the 2026 Fiscal Year.	Laporan Tahunan Perusahaan telah disetujui oleh Pemegang Saham. The Company's Annual Report has been approved by the Shareholders.

Surat Menteri BUMN selaku RUPS

Adapun Surat Menteri BUMN selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Surat Menteri BUMN selaku RUPS tanggal 18 Maret 2025 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar

Letter from the Minister of State-Owned Enterprises as the Annual GMS

The letters from the Minister of State-Owned Enterprises for 2025 were as follows:

1. Minister of BUMN as GMS Decree dated March 18, 2025, concerning Changes in Share Type and Amendments to the Articles of Association

Hari/Tanggal Day/Date	**Kamis, 18 Maret 2025** Thursday, March 18, 2025
Waktu Time	-
Keputusan Resolution	1. Menetapkan perubahan jenis saham pada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. 2. Menetapkan hak-hak Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dimiliki oleh Saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan: a. Hak untuk menyetujui dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); b. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); c. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang: • Akuntansi dan Keuangan; • Pengembangan dan Investasi; • Operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa; • Informasi teknologi; • Sumber daya manusia; • Manajemen risiko dan pengawasan internal; • Hukum dan Kepatuhan; • Program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan • Program *Environmental, Social and Governance* (ESG). e. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. 3. Mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), menambah satu ayat pada Pasal 4 yaitu ayat (11) serta mengubah keseluruhan Pasal 5 Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk disesuaikan sebagaimana angka 1 dan 2 tersebut di atas. 1. Determined the change in the type of shares in PT Pupuk Indonesia (Persero), from previously unclassified to Series A Dwiwarna Shares and Series B Shares. 2. Determined the rights of Series A Dwiwarna Shares not held by Series B Shares, namely the right to exercise: a. The right to approve decisions at the GMS (General Meeting of Shareholders); b. The right to propose agendas for the GMS (General Meeting of Shareholders); c. The right to request and access company data and documents in accordance with laws and regulations; d. The right to establish strategic guidelines/policies in the following areas: • Accounting and Finance; • Development and Investment; • Operations and procurement of goods and/or services; • Information technology; • Human capital; • Risk management and internal supervision; • Legal and Compliance; • Social and environmental responsibility programs; and • Environmental, Social and Governance (ESG) programs. e. The right to appoint and dismiss members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the approval of the President; 3. Amended Article 4 paragraphs (1) and (2), added one paragraph to Article 4, namely paragraph (11), and amended Article 5 of the Articles of Association of PT Pupuk Indonesia (Persero) in its entirety to align with points 1 and 2 above.
Realisasi Realization	**Telah terealisasi berdasarkan Akta No. 01 tanggal 17 April 2025.** Already realized based on Deed No. 01 dated April 17, 2025.

2. Surat Menteri BUMN selaku RUPS tanggal 22 Maret 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar

2. Minister of BUMN as GMS Decree dated March 22, 2025, concerning Amendments to the Articles of Association

Hari/Tanggal Day/Date	**Selasa, 22 Maret 2025** Tuesday, March 22, 2025
Waktu Time	-
Keputusan Resolution	1. Menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk dijadikan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yakni sebanyak 24.999.999 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratussembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai sebesar Rp 24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah). 2. Perubahan struktur pemegang saham sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp 25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) oleh para pemegang saham sebagai berikut: a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) oleh Negara RI (Republik Indonesia) merupakan setoran modal lama Saham Seri A Dwiwarna; b. Rp24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilanpuluh sembilan juta rupiah) oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan setoran modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B Negara RI (Republik Indonesia) pada Perseroan. 3. Menyetujui perubahan ketentuan mengenai kewenangan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan dan Investasi, Operasional dan Pengadaan barang dan/atau jasa, Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan, Program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan program *Environmental, Social and Governance* (ESG), agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa. 4. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan. 5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam surat keputusan ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan dalam surat keputusan ini. 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. 1. Approved the change in the Company's shareholder structure resulting from the transfer of all Series B shares of the Republic of Indonesia to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to increase the capital participation of the Republic of Indonesia in PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), to 24,999,999 (twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine) shares with a value of Rp 24,999,999,000,000.00 (twenty-four trillion nine hundred ninety-nine billion nine hundred and ninety-nine million Rupiah). 2. The changes to the shareholder structure as referred to in the FIRST dictum include the fulfillment of the Company's total issued and paid-up capital of Rp25,000,000,000,000.00 (twenty-five trillion Rupiah) by the following shareholders: a. Rp1,000,000.00 (one million Rupiah) by the Republic of Indonesia, representing the old capital contribution of the Series A Dwiwarna Shares; b. Rp24,999,999,000,000.00 (twenty-four trillion nine hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million Rupiah) by PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), representing the capital contribution derived from the transfer of all Series B shares of the Republic of Indonesia to the Company. 3. Approved changes to the provisions concerning the authority of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) to establish Company management policies, with the provision that policies in the areas of Accounting and Finance, Development and Investment, Operations and Procurement of Goods and/or Services, Information Technology, Human Capital, Risk Management and Internal Supervision, Legal and Compliance, Social and Environmental Responsibility Programs, and Environmental, Social and Governance (ESG) programs, must always be aligned and in accordance with the policies and regulations applicable to the Series B Shareholder with the largest number of shares. The Board of Directors is required to be guided by the policies established by the Series A Dwiwarna Shareholder or its authorized representative. 4. Approved the amendments to Article 4 paragraph (2) and paragraph (3) and Article 11 paragraph (2) letter a number (1) of the Company's Articles of Association. 5. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set forth and declare everything decided in this decree, including drafting and restating the entire Articles of Association in the form of a notarial deed and appearing before a Notary or other authorized official, and making any necessary adjustments or corrections if required by the authorized party for the purposes of implementing the contents of this decree. 6. This decree shall come into effect on the date of stipulation, namely the date the last Shareholder signs it, with the provision that any errors therein will be subsequently corrected as necessary.
Realisasi Realization	**Telah terealisasi berdasarkan Akta No. 01 tanggal 17 April 2025.** Already realized based on Deed No. 01 dated April 17, 2025.

3. Surat Menteri BUMN selaku RUPS tanggal 16 Juni 2025 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia

3. Minister of BUMN as GMS Decree dated June 16, 2025, concerning the Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia

Hari/Tanggal	**Selasa, 16 Juni 2025**
Waktu	**-**
Keputusan	1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia: a. Tuan Gusrizal dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama; b. Tuan Panji Winanteya Ruky dari Jabatannya sebagai Direktur Transformasi Bisnis; c. Tuan Bob Indiarto A Susatyo dari jabatannya sebagai Direktur Produksi; yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-377/MBU/11/2020, tanggal 20 (dua puluh) bulan November tahun 2020 (dua ribu dua puluh) jo, SK-303/MBU/11/2023 tanggal 02 (dua) bulan November tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan SK-263/MBU/08/2020 tanggal 04 (empat) bulan Agustus tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut. 2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia sebagai berikut: a. Jabatan Wakil Direktur Utama, ditiadakan; b. Jabatan Direktur Transformasi Bisnis diubah menjadi Direktur Manajemen Aset c. Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia diubah menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum; d. Jabatan Direktur Pemasaran diubah menjadi KETIGA Direktur Supply Chain; e. Jabatan Direktur Produksi diubah menjadi Direktur Operasi; f. Jabatan Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha diubah menjadi Direktur Teknik dan. Pengembangan Bisnis. 3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia: a. Nyonya Tina T. Kemala Intan b. semula menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum; c. Tuan Tri Wahyudi Saleh semula menjabat sebagai Direktur Pemasaran menjadi Direktur Manajemen Aset; d. Tuan Jamsaton Nababan semula menjabat sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) juncto, SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 (tiga) bulan Februari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), SK-303/MBU/11/2023 tanggal 02 (dua) bulan November tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan - SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 (enam belas) bulan Juli tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimaksud. 4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia: a. Tuan Robby Setiabudi Madjid sebagai Direktur Supply Chain; b. Tuan Dwi Satriyo Annurogo sebagaiDirektur Operasi. 5. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 6. Bagi anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 7. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. 8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat: a. Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Presiden Republik Indonesia; c. Menteri Sekretaris Negara; d. Menteri Pertanian; e. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara; f. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; g. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Pemegang Saham Seri B Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; h. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; i. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia;
Realisasi	**Telah terealisasi berdasarkan Akta No. 02 tanggal 17 Juni 2025.**

Day/Date	Tuesday, June 16, 2025
Time	-
Resolution	1. Honorably dismissed the following individuals as members of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia: a. Gusrizal from his position as Vice President Director; b. Panji Winanteya Ruky from his position as Business Transformation Director; c. Bob Indiarto A. Susatyo from his position as Production Director; d. Each of whom were appointed based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-377/MBU/11/2020, dated November 20, 2020 (two thousand and twenty), in conjunction with SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023 (two thousand and twenty-three), and SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020 (two thousand and twenty), with gratitude for all their contributions of energy and thought during their tenure in these positions. 2. Amend the job titles of the members of the Board of Directors of the state-owned company (Persero) PT Pupuk Indonesia as follows: a. The position of Vice President Director is eliminated; b. The position of Director of Business Transformation is changed to Director of Asset Management c. The position of Director of Human Capital is changed to Director of Human Capital and General Affairs; d. The position of Director of Marketing is changed to THIRD Director of Supply Chain; e. The position of Director of Production is changed to Director of Operations; f. The position of Director of Portfolio and Business Development is changed to Director of Engineering and Business Development. 3. To reassign the following individuals as members of the Board of Directors of the state-owned company (Persero) PT Pupuk Indonesia: a. Ms. Tina T. Kemala Intan b. previously serving as Director of Human Capital, to Director of Human Capital and General Affairs; c. Mr. Tri Wahyudi Saleh, previously serving as Director of Marketing, to Director of Asset Management; d. Mr. Jamsaton Nababan, previously serving as Director of Portfolio and Business Development, to Director of Technical & Business Development; e. each of whom was appointed pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021, in conjunction with Decision No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023, Decision No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023, and - SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021 (two thousand twenty-one), with the term of office continuing for the remainder of the term in accordance with the decision of the Minister of State-Owned Enterprises in question. 4. Appointed the following as members of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia: a. Robby Setiabudi Madjid as Supply Chain Director; b. Dwi Satriyo Annurogo as Operations Director. 5. The term of office for the members of the Board of Directors appointed as referred to in the Fourth Dictum shall be in accordance with the provisions in the Articles of Association of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. 6. For the members of the Board of Directors appointed as referred to in the Fourth Dictum of this resolution who are still serving in other positions prohibited by law from concurrently holding the position of Director of a State-Owned Enterprise, they must resign or be dismissed from those positions. 7. Granted power of attorney to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia, with the right of substitution, to declare the decisions made in this Decree in authentic form before a notary or authorized official. 8. This Decree shall come into effect on the date of stipulation, namely the date the last Shareholder signs, with the provision that any errors therein will be subsequently corrected as necessary. Copies of this Decree shall be submitted to the following: a. President of the Republic of Indonesia; b. Vice President of the Republic of Indonesia; c. Minister of State Secretary; d. Minister of Agriculture; e. Vice Minister of State-Owned Enterprises; f. Deputy for Human Capital, Technology, and Information, Ministry of State-Owned Enterprises; g. Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management as the Holder of Series B Shares of PT Pupuk Indonesia; h. Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia; i. Board of Directors of PT Pupuk Indonesia;
Realization	Already realized based on Deed No. 02 dated June 17, 2025.

4. Surat Menteri BUMN selaku RUPS tanggal 16 Juni Tahun 2025 tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia

4. Minister of BUMN as GMS Decree dated June 16, 2025, concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia

Hari/Tanggal	**Selasa, 16 Juni 2025**
Waktu	**-**
Keputusan	1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Anhar Adel sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-280/MBU/11/2019, tanggal 22 (dua puluh dua) bulan November tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) juncto, SK-13/MBU/01/2020 tanggal 9 (sembilan) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua - puluh), terhitung sejak tanggal 22 (dua puluh dua) bulan November tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia: a. Tuan Darmin Nasution dari jabatannya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; b. Tuan Mustoha Iskandar dari jabatannya sebagai Komisaris Independen; c. Tuan Riswinandi dari jabatannya sebagai Komisaris Independen; d. Tuan Danar Rahmanto dari jabatannya sebagai Komisaris Independen; e. Tuan Anwar Sanusi dari jabatannya sebagai Komisaris; f. Tuan Ari Dwipayana dari jabatannya sebagai Komisaris; g. Tuan Farhat Brachma dari jabatannya sebagai Komisaris; h. Tuan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatannya sebagai Komisaris; i. Tuan Suwandi dari jabatannya sebagai Komisaris; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 (empat) bulan Agustus tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor SK-253/MBU/11/2022 tanggal 4 (empat) bulan November tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor SK-163/MBU/06/2023 tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Nomor SK-53/MBU/03/2024 tanggal 4 (empat) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Nomor SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juli tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut. 3. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia: a. Tuan Sudaryono sebagai Komisaris Utama; b. Tuan Rachlan Subandhi Nashidik sebagai Komisaris Independen; c. Tuan Iwan Sumule sebagai Komisaris; d. Tuan Nurul Ichwan sebagai Komisaris; e. Tuan Muhammad Rizal Kamal sebagai Komisaris; f. Tuan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris; g. Tuan Yovie Widianto sebagai Komisaris; h. Tuan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris; i. Tuan Suwandi sebagai Komisaris. 4. Masa Jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 6. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. 7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat: a. Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Presiden Republik Indonesia; c. Menteri Sekretaris Negara; d. Menteri Pertanian; e. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara; f. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; g. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Pemegang Saham Seri B Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; h. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; i. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia.
Realisasi	**Telah terealisasi berdasarkan Akta No. 03 tanggal 17 Juni 2025.**

Day/Date	Tuesday, June 16, 2025
Time	-
Resolution	1. Confirmed the honorable dismissal of Anhar Adel as Independent Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, who was appointed based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-280/MBU/11/2019, dated 22 (twenty-second) November 2019 (two thousand nineteen) in conjunction with SK-13/MBU/01/2020 dated 9 (nine) January 2020 (two thousand twenty), effective from 22 (twenty-second) November 2024 (two thousand twenty-four), with gratitude for all his contributions of energy and thoughts during his tenure. 2. Honorably dismissed the following individuals as members of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia: a. Darmin Nasution from his position as President Commissioner and Independent Commissioner; b. Mustoha Iskandar from his position as Independent Commissioner; c. Riswinandi from his position as Independent Commissioner; d. Danar Rahmanto from his position as Independent Commissioner; e. Anwar Sanusi from his position as Commissioner; f. Ari Dwipayana from his position as Commissioner; g. Farhat Brachma from his position as Commissioner; h. Febrio Nathan Kacaribu from his position as Commissioner; i. Suwandi from his position as Commissioner; Each of whom was appointed based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020 (two thousand and twenty), Number SK-253/MBU/11/2022 dated November 4, 2022 (two thousand and twenty-two), Number SK-163/MBU/06/2023 dated June 22, 2023 (two thousand and twenty-three), Number SK-53/MBU/03/2024 dated March 4, 2024 (two thousand and twenty-four) and Number SK-188/MBU/07/2024 dated July 22, 2024 (two thousand and twenty-four), with gratitude for all the contributions of energy and thought during their tenure in these positions. 3. Appointed the following names as members of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia: a. Sudaryono as President Commissioner; b. Rachlan Subandhi Nashidik as Independent Commissioner; c. Iwan Sumule as Commissioner; d. Nurul Ichwan as Commissioner; e. Muhammad Rizal Kamal as Commissioner; f. Immanuel Ebenezer Gerungan as Commissioner; g. Yovie Widianto as Commissioner; h. Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner; i. Suwandi as Commissioner. 4. The term of office of the members of the Board of Commissioners appointed as referred to in theTHIRD Dictum shall be in accordance with the provisions of the Articles of Association of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. 5. For members of the Board of Commissioners appointed as referred to in the THIRD Dictum of this decision who are still serving in other positions prohibited by law from being held concurrently with the position of Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise, they must resign or be dismissed from those positions. 6. Granted power of attorney to the Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, with the right of substitution, to declare the decisions made in this Decree in authentic form before a notary or authorized official; 7. This Decree shall come into effect on the date of stipulation, namely the date the last Shareholder signs, with the provision that any errors therein will be subsequently corrected as necessary. Copies of this Decree shall be submitted to the following: a. President of the Republic of Indonesia; b. Vice President of the Republic of Indonesia; c. Minister of State Secretary; d. Minister of Agriculture; e. Deputy Minister of State-Owned Enterprises; f. Deputy for Human Capital, Technology, and Information, Ministry of State-Owned Enterprises; g. Board of Directors of PT Danantara Asset Management as the Holder of Series B Shares of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; h. Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; i. Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia.
Realization	Already realized based on Deed No. 03 dated June 17, 2025

5. Surat Menteri BUMN selaku RUPS tanggal 24 Juni Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia

5. Minister of BUMN as GMS Decree dated June 24, 2025, concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia

Hari/Tanggal Day/Date	**Selasa, 24 Juni 2025** Tuesday, June 24, 2025
Waktu Time	-
Keputusan Resolution	1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Muhammad Rizal Kamal sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor SK-156/MBU/06/2025, dan SK.014/DI-DAM/DO/2025 tanggal 16 (enam belas) bulan Juni tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. 2. Mengangkat Tuan Chisna Deva Priyapratama sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia. 3. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Bagi angota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 5. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang. 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat: a. Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Presiden Republik Indonesia; c. Menteri Sekretaris Negara; d. Menteri Pertanian; e. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; f. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara; g. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; h. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Pemegang Saham Seri B Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; i. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; j. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; 1. Honorably dismissed Muhammad Rizal Kamal as Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, appointed based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree and the President Director of PT Danantara Asset Management Decree No. SK-156/MBU/06/2025 and SK.014/DI-DAM/DO/2025 dated June 16, 2025, with gratitude for all his contributions and insights during his tenure. 2. Appointed. Chisna Deva Priyapratama as Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia. 3. The term of office of the members of the Board of Commissioners appointed as referred to in the SECOND Dictum shall be in accordance with the provisions of the Articles of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. 4. For members of the Board of Commissioners appointed as referred to in the SECOND Dictum of this decree who are still serving in other positions prohibited by law from concurrently holding positions on the Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise, they must resign or be dismissed from those positions. 5. The Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia is authorized, with the right of substitution, to declare the decisions made in this decree in authentic form before a notary or authorized official. 6. This Decree shall come into effect on the date of its stipulation, namely the date the last Shareholder signs it, with the provision that any errors therein will be subsequently corrected as necessary. Copies of this Decree shall be submitted to the following: a. President of the Republic of Indonesia; b. Vice President of the Republic of Indonesia; c. Minister of State Secretary; d. Minister of Agriculture; e. Head of the Implementing Agency of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency; f. Deputy Minister of State-Owned Enterprises; g. Deputy for Human Capital, Technology, and Information, Ministry of State-Owned Enterprises; h. Board of Directors of PT Danantara Asset Management as the Holder of Series B Shares of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; i. Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; j. Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia;
Realisasi Realization	**Telah terealisasi berdasarkan Akta No. 09 tanggal 24 Juni 2025.** Already realized based on Deed No. 09 dated June 24, 2025.

6. Surat Menteri BUMN selaku RUPS tanggal 22 Agustus Tahun 2025 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia

6. Minister of BUMN as GMS Decree dated August 22, 2025, concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia

Hari/Tanggal Day/Date	**Jumat, 22 Agustus 2025** Friday, August 22, 2025
Waktu Time	-
Keputusan Resolution	1. Memberhentikan Tuan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor SK-156/MBU/06/2025, dan Nomor SK.014/DI-DAM/DO/2025 tanggal 16 (enam belas) bulan Juni tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), terhitung sejak tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Agustus tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat: a. Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Presiden Republik Indonesia; c. Menteri Pertanian; d. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara; e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; f. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management; g. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; h. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; i. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan; 1. Dismissed Immanuel Ebenezer Gerungan as Commissioner of PT Pupuk Indonesia, who was appointed based on Minister of State-Owned Enterprises Decree and President Director of PT Danantara Asset Management Decree No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK.014/DI-DAM/DO/2025 dated June 16, 2025, effective August 22, 2025, with gratitude for all his contributions and insights during his tenure. 2. Granted power of attorney to the Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, with the right of substitution, to declare the decisions made in this Decree in authentic form before a notary or authorized official. 3. This Decree shall come into effect on the date of its stipulation, namely the date the last Shareholder signs it, with the provision that any errors therein will be subsequently corrected as necessary. Copies of this Decree shall be submitted to the following: a. President of the Republic of Indonesia; b. Vice President of the Republic of Indonesia; c. Minister of Agriculture; d. Deputy Minister of State-Owned Enterprises; e. Deputy for Human Capital, Technology, and Information, Ministry of State-Owned Enterprises; f. Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management; g. Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; h. Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia; i. All concerned, for their information and consideration;
Realisasi Realization	**Telah terealisasi berdasarkan Akta No. 09 tanggal 22 Agustus 2025.** Already realized based on Deed No. 09 dated August 22, 2025.

RUPS Tahun Sebelumnya

Previous Year's GMS

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2024.

Annual GMS

1. Annual GMS concerning Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the 2024 Fiscal Year.

Hari/Tanggal Day/Date	**Selasa, 30 Januari 2024** Tuesday January 30, 2024
Waktu Time	**10.37 WIB**
Tempat Venue	**Hotel Pullman, Jakarta**

Kehadiran Participants	**Pemegang Saham Perusahaan:** Zuryati Simbolon selaku Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk. **Direksi** • Rahmad Pribadi Selaku Direktur Utama; • Bob Indiarto selaku Direktur Produksi; • Wono Budi Tjahyono selaku Direktur Keuangan; • Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Transformasi Bisnis; • Tina T. Kemala Intan selaku Direktur Sumber Daya Manusia; • Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Pemasaran; • Jamsaton Nababan selaku Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha; • Ninis Kesuma Adriani selaku Direktur Manajemen Risiko; **Dewan Komisaris** • Darmin Nasution selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen • Anhar Adel selaku Komisaris Independen • Mustoha Iskandar selaku Komisaris Independen • Farhat Brachma selaku Komisaris • Ari Dwipayana selaku Komisaris	**Company Shareholders:** Zuryati Simbolon as Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry. **Board of Directors** • Rahmad Pribadi as President Director; • Bob Indiarto as Production Director; • Wono Budi Tjahyono as Director of Finance; • Panji Winanteya Ruky as Director of Business Transformation; • Tina T. Kemala Intan as Director of Human Capital; • Tri Wahyudi Saleh as Director of Marketing; • Jamsaton Nababan as Director of Portfolio and Business Development; • Ninis Kesuma Adriani as Director of Risk Management; **Board of Commissioners** • Darmin Nasution as President Commissioner and Independent Commissioner • Anhar Adel as Independent Commissioner • Mustoha Iskandar as Independent Commissioner • Farhat Brachma as Commissioner • Ari Dwipayana as Commissioner
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Parties for Vote Counting	**Notaris Lumassia S.H.** Notary Lumassia S.H.	

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
GMS Decisions and Implementation

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Implementation
Mata Acara 1: Meeting Agenda 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris PTPI Tahun 2024. To approve the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) and the 2024 PTPI Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA).	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris PTPI tahun 2024. Approved the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) and the 2024 PTPI Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA).	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2024. Already implementation through Notarial Deed No. 5 dated January 30, 2024.
Mata Acara 2: Meeting Agenda 2: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PTPI Tahun 2024. To approve PTPI's 2024 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-SER).	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PTPI Tahun 2024. Approved PTPI's 2024 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-SER).	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2024. Already implementation through Notarial Deed No. 5 dated January 30, 2024.
Mata Acara 3: Meeting Agenda 3: Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024. To determine the Annual Management Contracts containing Key Performance Indicators (KPI) targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2024.	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024. Determined an Annual Management Contract containing Key Performance Indicators (KPI) targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2024.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2024. Already implementation through Notarial Deed No. 5 dated January 30, 2024.

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
GMS Decisions and Implementation

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Implementation
Mata Acara 4: Meeting Agenda 4: Persetujuan Penugasan Pemerintah (PSO) melalui Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024. To approve the Government Assignment (PSO) through the Minister of Agriculture Decree for the distribution of subsidized fertilizer in 2024.	Menyetujui Penugasan Pemerintah (PSO) melalui Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2024. Approved the Government Assignment (PSO) through the Minister of Agriculture Decree for the distribution of subsidized fertilizer in 2024.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2024. Already implementation through Notarial Deed No. 5 dated January 30, 2024.

2. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023

2. Annual GMS concerning Approval of the 2023 Annual Report

Hari/Tanggal Day/Date	**Senin, 22 Juli 2024** Monday, July 22, 2024	
Waktu Time	**09.17 WIB**	
Tempat Venue	**Kantor Kementerian BUMN, Jakarta** Ministry of BUMN Office, Jakarta	
Kehadiran Participants	**Pemegang Saham Perusahaan:** Zuryati Simbolon selaku Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk. **Direksi** • Rahmad Pribadi Selaku Direktur Utama; • Gusrizal selaku Wakil Direktur Utama; • Bob Indiarto selaku Direktur Produksi; • Wono Budi Tjahyono selaku Direktur Keuangan; • Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Transformasi Bisnis; • Tina T. Kemala Intan selaku Direktur Sumber Daya Manusia; • Tri Wahyudi Saleh selaku Direktur Pemasaran; • Jamsaton Nababan selaku Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha; • Ninis Kesuma Adriani selaku Direktur Manajemen Risiko; **Dewan Komisaris** • Darmin Nasution selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; • Anhar Adel selaku Komisaris Independen; • Mustoha Iskandar selaku Komisaris Independen; • Riswinandi selaku Komisaris Independen; • Anwar Sanusi selaku Komisaris; • Febrio Nathan Kacaribu selaku Komisaris; • Farhat Brachma selaku Komisaris	**Company Shareholders:** Zuryati Simbolon as Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry. **Board of Directors** • Rahmad Pribadi as President Director; • Gusrizal as Vice President Director; • Bob Indiarto as Production Director; • Wono Budi Tjahyono as Director of Finance; • Panji Winanteya Ruky as Director of Business Transformation; • Tina T. Kemala Intan as Director of Human Capital; • Tri Wahyudi Saleh as Director of Marketing; • Jamsaton Nababan as Director of Portfolio and Business Development; • Ninis Kesuma Adriani as Director of Risk Management; **Board of Commissioners** • Darmin Nasution as President Commissioner and Independent Commissioner; • Anhar Adel as Independent Commissioner; • Mustoha Iskandar as Independent Commissioner; • Riswinandi as Independent Commissioner; • Anwar Sanusi as Commissioner; • Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner; • Farhat Brachma as Commissioner
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Parties for Vote Counting	**Notaris Lumassia S.H.** Notary Lumassia S.H.	

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
GMS Decisions and Implementation

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Implementation
Mata Acara 1: Meeting Agenda 1: Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun 2023. Approve the Company's Annual Report and Ratify the Company's Consolidated Financial Statements, Approve the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratify the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, as well as grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management of the Company and the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during 2023.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00515/2.1025/ AU.1/04/1122-4/1/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”; b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Kompilasi 31 Desember 2023 Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, RIntis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporanya Nomor: N20240405008/DC2/THA/2024 tanggal 5 April 2024, laporan aktivitas dan perubahan aset neto kompilasi dan laporan arus kas kompilasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perusahaan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan. 1. Approved the Company's Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2023 Fiscal Year. 2. Ratified: a. The Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year ending December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as stated in its report Number: 00515/2.1025/AU.1/04/1122-4/1/III/2024 dated March 31, 2024, with the opinion "fair, in all material respects"; b. Financial Report of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year ending on December 31, 2023, as part of the Compiled Financial Report of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for December 31, 2023, which was audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, RIntis & Rekan as stated in its report Number: N20240405008/DC2/THA/2024 dated April 5, 2024, the report on activities and changes in compiled net assets and the compiled cash flow report for the year ending on that date. 3. With the approval of the Company's Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Financial Report and the Financial Report of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year ending December 31, 2023, the GMS granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision of the Company during the 2023 Fiscal Year, provided that such actions did not constitute a criminal offense and were reflected in the Company's books and reports.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 22 Juli 2024 Already realized through Notarial Deed No. 05 dated July 22, 2024

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
GMS Decisions and Implementation

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Implementation
Mata Acara 2: Meeting Agenda 2: Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023. To approve the Use of the Company's Consolidated Net Profit for the 2023 Fiscal Year.	1. Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk sebesar Rp6.200.780 juta (enam triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 19,57% (sembilan belas koma lima tujuh persen) atau Rp1.213.402 juta (satu triliun dua ratus tiga belas miliar empat ratus dua juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham; b. Sebesar 80,43% (delapan puluh koma empat tiga persen) atau Rp4.987.378 juta (empat triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan Perusahaan. 2. Dividen sebesar Rp1.213.402 juta (satu triliun dua ratus tiga belas miliar empat ratus dua juta rupiah) agar disetor kepada rekening bendahara umum negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan ini dan pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 1. Determined the use of Profit for the Year Attributable to the Parent Entity amounting to Rp6,200,780 million (six trillion two hundred billion seven hundred and eighty million rupiah) as follows: a. 19.57% (nineteen point five seven percent) or Rp1,213,402 million (one trillion two hundred thirteen billion four hundred and two million rupiah) to be allocated as cash dividends to Shareholders; b. 80.43% (eighty point four three percent) or Rp4,987,378 million (four trillion nine hundred eighty-seven billion three hundred and seventy-eight million rupiah) to be allocated as Company reserves. 2. Dividends amounting to Rp1,213,402 million (one trillion two hundred thirteen billion four hundred and two million rupiah) shall be deposited into the State Treasury account no later than 1 (one) month after the date of this resolution, and shall be implemented in accordance with applicable laws and regulations.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 22 Juli 2024 Already implementation through Notarial Deed No. 05 dated July 22, 2024
Mata Acara 3: Meeting Agenda 3: Penetapan Gaji/ Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2024, serta Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan/ atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024- 2026, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. To determine the Salaries/Honorariums, Facilities, and Allowances for the 2024 Fiscal Year, as well as Performance Incentives/ Special Incentives for the 2023 Fiscal Year and/or Long-Term Incentives for the 2024-2026 Period, for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2024, serta Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, akan ditetapkan secara tersendiri. Determined the Salaries/Honorarium, including Facilities and Allowances for the 2024 Fiscal Year, as well as the Performance Incentive/Special Incentive for the 2023 Fiscal Year and/or Long-Term Incentive for the 2024-2026 Period, for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, to be determined separately.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 22 Juli 2024 Already implementation through Notarial Deed No. 05 dated July 22, 2024

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS
GMS Decisions and Implementation

Agenda Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Implementation
Mata Acara 4: Meeting Agenda 4: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. To appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year and the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year.	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (dahulu bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (dulu bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan. Imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 1. Appointed the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto and Rekan (formerly KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) as the Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year. 2. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2024 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company. 3. Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine the audit fee or other requirements for the Public Accounting Firm, and to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (formerly KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) is, for whatever reason, unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2024, including determining the audit fee and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 05 tanggal 22 Juli 2024 Already implementation through Notarial Deed No. 05 dated July 22, 2024

RUPS Luar Biasa

Adapun RUPS Luar Biasa selama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No. SK-53/MBU/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, memutuskan mengangkat Riswinandi sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI No. SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, memutuskan mengangkat:
   a. Danar Rahmanto sebagai Komisaris Independen;
   b. Irfan Ahmad Fauzi sebagai Komisaris Independen.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Extraordinary GMS held during 2024 were as follows:

1. Minister of State-Owned Enterprises Decree, as a General Meeting of Shareholders of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SK-53/MBU/03/2024 dated March 4, 2024, concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero), decided to appoint Riswinandi as an Independent Commissioner of PTPI.

2. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Decree, acting as the General Meeting of Shareholders of PTPI (Persero), No. SK-188/MBU/07/2024 dated 22 July 2024 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero), resolved to appoint:
   a. Danar Rahmanto as an Independent Commissioner;
   b. Irfan Ahmad Fauzi as an Independent Commissioner.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Sebagai bagian dari struktur tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara kolektif, sekaligus memastikan penerapan GCG dilaksanakan secara konsisten di seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan peran tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yang terdiri atas Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

As part of the Company's governance structure, the Board of Commissioners collectively supervises and advises the Board of Directors, while ensuring the consistent implementation of GCG at all levels of the organization. This role is based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. When carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs consisting of the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Integrated Governance Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus dinyatakan lulus dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Proses tersebut untuk memastikan bahwa Komisaris Perusahaan memenuhi syarat materiil, yaitu: integritas, dedikasi, kompetensi, pengalaman dan keahlian serta dapat menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Adapun syarat formal yang juga harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:
1. Orang perseorangan;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan/perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

Selain itu, untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

Syarat Materiil

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat materiil sebagai berikut:
1. Integritas;
2. Dedikasi;
3. Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Board of Commissioners Criteria

All members of the Company's Board of Commissioners must be declared to have passed the Fit and Proper Test. This process ensures that the Commissioners meet the substantive requirements, namely integrity, dedication, competence, experience and expertise, as well as the ability to allocate sufficient time to perform their respective duties and responsibilities.

In addition, the formal requirements that must be fulfilled to be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners are as follows:
1. Individuals;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Has not been declared bankrupt within the last five (5) years prior to nomination;
4. Has never served as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company/perum to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination; and
5. Has not been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination.

In addition, to be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, the following other requirements must be met:

Material Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, an individual must possess the following material requirements:
1. Integrity;
2. Dedication;
3. Understand the Company management issues related to one of the management functions;
4. Have adequate knowledge in the business field for which the individual is nominated; and e.
5. Be able to devote sufficient time to carrying out their duties.

Syarat Lain

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil dan syarat formal, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan atau Anak Perusahaan;
4. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan;
5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
6. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
8. Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
9. Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

Ketentuan mengenai syarat anggota Dewan Komisaris Perusahaan di atas berlaku juga sebagai syarat anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan), atau berasal dari anggota Direksi Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Other Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, as well as meeting the material and formal requirements, an individual must also meet the following other requirements:

1. Not be a political party official, a legislative candidate, and/or a legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial House of Representatives, and Regency/City House of Representatives;
2. Not be a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
3. Not currently hold a position that could potentially create a conflict of interest with the Company or its Subsidiaries;
4. Not be serving as a member of the Board of Commissioners of the Company or the Board of Commissioners of its Subsidiaries;
5. Not currently hold a position prohibited by law from concurrently holding the position of a member of the Board of Commissioners;
6. Be physically and mentally healthy, and not suffer from any illness that could hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners, as evidenced by a health certificate from a hospital;
7. Hold a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled their tax obligations for the past 2 (two) years;
8. For prospective candidates from technical ministries or other government agencies, a letter of recommendation from the head of the relevant agency is required; and
9. Prospective candidates for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who are state officials must submit a State Officials' Wealth Report (LHKPN) for the past two years, evidenced by LHKPN submissions to the authorized institution.

The provisions regarding the requirements for members of a Company's Board of Commissioners also apply to members of the Board of Commissioners of Subsidiaries (unless otherwise stipulated by laws and regulations), or for members of the Company's Board of Directors. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.

Suksesi: Nominasi dan Pengusulan, Pengangkatan serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Succession: Nomination and Proposal, Appointment, and Dismissal of the Board of Commissioners

The appointment and dismissal of the Board of Commissioners are conducted by the GMS through a transparent and accountable process. The appointment of the Board of Commissioners is regulated in the provisions of the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 19 of 2003 concerning SOE, Ministry of SOE Regulation No. PER- 3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of SOEs and is based on the principles of professionalism and Good Corporate Governance.

Anggota Dewan Komisaris PTPI wajib memenuhi persyaratan, kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Persyaratan kemampuan mencakup memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta memiliki waktu yang cukup dalam menjalankan tugas.

Members of the PTPI Board of Commissioners must meet the requirements, capabilities and propriety as regulated in the Company's Articles of Association. Capability requirements include understanding management issues related to one of the management functions, having adequate knowledge in the Company's business field, and having sufficient time to carry out duties.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS. Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apa pun yang dinilai tepat oleh RUPS, dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

The appointment of members of the Board of Commissioners becomes effective as of the date of inauguration or the date specified in the GMS Decision. Appointed members of the Board of Commissioners are required to sign a statement letter/integrity pact containing their ability to carry out their duties well and are willing to be dismissed at any time based on any reason deemed appropriate by the GMS, and not sue or file legal proceedings in connection with the dismissal.

Beberapa tahapan seleksi calon anggota Dewan Komisaris, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjaringan sumber bakal calon dilakukan oleh Kementerian BUMN (d.h.i. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi yang membidangi sumber daya manusia BUMN mencari bakal calon dari berbagai sumber);
2. Evaluasi persyaratan formal dan persyaratan lain dilakukan oleh Deputi yang membidangi sumber daya manusia BUMN;
3. Penilaian pemenuhan persyaratan material oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri BUMN;
4. Penetapan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS atau Keputusan RUPS.

Several stages of selection for prospective members of the Board of Commissioners are outlined below:

1. The Ministry of State-Owned Enterprises (hereinafter referred to as the Minister, Deputy Minister, Secretary of the Ministry, and/or Deputy in charge of human resource for State-Owned Enterprises) will conduct the recruitment and selection of prospective candidates from a number of sources.
2. Evaluation of formal and other requirements is carried out by the Deputy for Human Capital in State-Owned Enterprises;
3. Assessment of fulfillment of material requirements is carried out by a team appointed by the Minister of BUMN ;
4. Appointment of the Board of Commissioners is based on a Minister of BUMN Decree as the GMS or a Decision of the GMS.

Proses Nominasi dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Nomination and Appointment Process for the Board of Commissioners

No.	Proses Process	Pelaksana Executor
1	Penjaringan oleh Kementerian BUMN Screening by the Minister of BUMN	Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi yang membidangi sumber daya manusia BUMN Minister, Deputy Minister, Secretary of the Ministry, and/or Deputy in charge of human resources for SOEs
2	Evaluasi Persyaratan Formal Evaluation of Formal Requirements	Deputi yang membidangi sumber daya manusia BUMN Deputy in charge of human resources for SOEs
3	Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil Assessment of fulfillment of Material Requirements	Tim yang ditetapkan oleh Menteri Team appointed by the Minister
4	Penetapan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Determination Based on the Decree of the Ministry of BUMN	Menteri BUMN selaku RUPS Minister of SOEs as the GMS
5	Keputusan RUPS GMS Resolution	Pemegang Saham Shareholders

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu dilakukan apabila yang bersangkutan, antara lain:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;

Members of the Company's Board of Commissioners can be dismissed at any time based on the GMS by stating the reasons. Dismissal may be executed at any time if the individual concerned:

1. Is unable to carry out their duties properly;
2. Has failed to comply with statutory provisions and/or the Articles of Association;
3. Has been involved in acts that are harmful to the SOE or the State's finances;
4. Has commits acted that breach ethical standards and/or propriety expected of members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of SOEs;

5. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/ atau keuangan Negara;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Mengundurkan diri.

Selain alasan pemberhentian tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS atau Menteri BUMN berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri BUMN demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain:
1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
2. Dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Memasuki masa usia pensiun dari aparatur sipil negara, bagi anggota Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain.

Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS (sirkuler).

Masa Jabatan

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Masa jabatan tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Walaupun demikian, ketentuan itu dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

5. Has been named a suspect or defendant by the authorities in actions that are detrimental to the SOE and/or State's finances;
6. Has been declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
7. Has resigned.

Apart from these reasons for dismissal, the Minister or GMS may dismiss a member of the Board of Commissioners for other reasons deemed appropriate by the Minister or the GMS for the interests and objectives of the SOE, including:
1. In the context of company restructuring;
2. In order to organize the membership of the Board of Commissioners;
3. Has reached retirement age as a State Civil Apparatus, for are members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who are assigned from the Technical Ministry or other Government Agencies.

Shareholders must notify the Board of Commissioners concerned verbally or in writing of the planned dismissal of a member of the Board of Commissioners.

The decision to dismiss for reasons other than being declared guilty by a court decision that has permanent legal force and resigning, is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself. Determination of the dismissal of members of the Board of Commissioners can be made by decision of the physical GMS and the decision of all Shareholders outside the GMS (circular).

Term of Office

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period of time starting from the closing date or the date determined by the GMS that appointed them and ending at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment. The term of office shall not exceed five (5) years, in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations in the Capital Markets.

However, this provision does not reduce the rights of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends. Upon the expiration of their term, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Dewan Komisaris Tahun 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris. Dengan demikian susunan dan komposisi Dewan Komisaris PTPI per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Number, Composition, and Structure of the Board of Commissioners in 2025

In 2025, there were changes to the membership of the Board of Commissioners. Therefore, the composition of the PTPI Board of Commissioners as of December 31, 2025, was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Sudaryono	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025 Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st
Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-188/MBU/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-188/MBU/07/2024 dated July 22, 2024	22 Juli 2024 - RUPS Kinerja di Tahun 2029 July 22, 2024 – GMS on Performance in 2029	Ke-1 1st
Rachlan S Nashidik	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025 Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st
Chrisna Deva Priyapratama	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-167/MBU/06/2025 dan SK-023/DI-DAM/DO/2025 Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-167/MBU/06/2025 and. SK-023/DI-DAM/DO/2025	24 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 24, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st
Iwan Sumule	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025 Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st
Nurul Ichwan	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025 Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st
Yovie Widianto	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan KBUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of KBUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan BP BUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) selaku RUPS No. SK-156/MBU/06/2025 dan No. SK-014/DI-DAM/DO/2025. Decree of BP BUMN and PT Danantara Asset Management (Persero) as the GMS No. SK-156/MBU/06/2025 and No. SK-014/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-2 2nd

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Dewan Komisaris Perusahaan, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Independence of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners acts independently and is free from the interests of any party. The independence of the Company's Board of Commissioners primarily refers to Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Aspek Independensi Independency Aspect	Sudaryono ***	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik ***	Chrisna Deva Priyapratama ***	Iwan Sumule ***	Nurul Ichwan **	Yovie Widianto ***	Suwandi
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not be an individual who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama. Does not have any affiliated relationships with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Majority Shareholders.	Wakil Menteri Pertanian Indonesia sejak (Juli 2024 – sekarang). Deputy Minister of Agriculture of Indonesia (July 2024 – present).	✓	✓	✓	Wakil II Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (2024 – sekarang) Deputy II Head of the Agency for the Acceleration of Poverty Alleviation of the Republic of Indonesia (2024 – present)	Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2022 – sekarang) Deputy for Promotion and Investment, Ministry of Investment and Downstream Development/ Investment Coordinating Board (BKPM) (2022 – present)	Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif (Oktober 2024 – sekarang) Special Staff to the President for the Creative Economy (October 2024 – present)	Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (2025 – sekarang). Secretary General of the Ministry of Agriculture (2025– present)
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 24 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Tidak lagi menjabat sejak 22 Agustus 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025

Keterangan:
v = hadir
x = tidak hadir

*) No longer serving as of June 16, 2025
**) No longer serving as of June 24, 2025
***) Serving since June 16, 2025
****) No longer serving as of August 22, 2025
*****) No longer serving as of December 15, 2025

Note:
v = present
x = absent

Darmin Nasution *	Mustoha Iskandar *	Anwar Sanusi *	Febrio Nathan Kacaribu *****	Farhat Brachma *	Ari Dwipayana *	Riswinandi *	Danar Rahmanto *	Muhammad Rizal Kamal **	Immanuel Ebenezer Gerungan***
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia (2025 - sekarang) Head of the Manpower Planning and Development Agency, Ministry of Manpower, Republic of Indonesia (2025 - present)	Direktorat Jendral Strategi Ekonomi dan Fiskal (2020 - Sekarang) General of Economic and Fiscal Strategy Directorate (2020 - Present)	✓	✓	✓	✓	Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN (2023 - Sekarang) Deputy Assistant for Human Resources Management at State-Owned Enterprises (2023 – Present)	Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan (2024 - 2025) Deputy Minister of Manpower (2024 – 2025)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dalam rangka menjaga independensi dan profesionalisme, setiap anggota Dewan Komisaris harus mematuhi etika dan perilaku terkait benturan kepentingan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini merupakan pedoman tertulis yang bersifat mengikat bagi individu anggota Dewan Komisaris agar selalu bertindak dan berperilaku dalam koridor yang benar sesuai prinsip-prinsip GCG guna mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan serta implikasi berkelanjutan yang mungkin timbul, maka diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BUMN.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Board Manual: Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) merupakan salah satu *soft structure Good Corporate Governance* (GCG) yang mengacu pada Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perusahaan") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Manual* ini memberikan panduan tentang tata kerja, hubungan dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) pertama kali ditetapkan pada 5 November 2012 dan telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir tanggal 30 Desember 2024.

Dengan diberlakukannya Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dalam hubungan kerja antar kedua Organ Perusahaan tersebut, maka semua kegiatan usaha PTPI dapat dilaksanakan secara harmonis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris *(Board Manual*) yang berlaku memuat ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, antara lain:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Konsep Umum Pengawasan Dewan Komisaris;
3. Syarat Dewan Komisaris;
4. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;

Managing Conflicts of Interest for the Board of Commissioners

To maintain independence and professionalism, each member of the Board of Commissioners must adhere to the ethics and conduct related to conflicts of interest as stipulated in the Minister of BUMN Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. This policy serves as a written, binding guideline for individual members of the Board of Commissioners to ensure they always act and behave within the proper framework, in accordance with GCG principles, to prevent potential conflicts of interest with the Company.

To prevent conflicts of interest and the ongoing implications that may arise, the following principles apply:

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from exploiting SOEs for personal, family, and/or other party interests that could harm or reduce SOE profits.
2. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly, from SOE activities other than legitimate income.

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners and officials who report directly to the Board of Directors or who have significant influence over the Company's policies and/or operations are prohibited from taking actions that could harm the Company or reduce its profits and are required to disclose the conflict of interest in every decision.

Board Manual: Work Guidelines for the Board of Commissioners

The Work Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) is a soft structure of Good Corporate Governance (GCG) that refers to the Articles of Association of PT Pupuk Indonesia (Persero) (the "Company") and applicable laws and regulations. This Board Manual provides guidance on the working procedures, relationships, and communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors was first prepared on November 5, 2012, and has been updated several times, most recently on December 30, 2024.

With the implementation of the Board of Commissioners Charter and the Board Manual, the working relationship between these two Company Organs, all PTPI business activities can be carried out harmoniously, adhering to GCG principles.

The applicable Board of Commissioners Charter (Board Manual) currently contains provisions regarding the implementation of the Board of Commissioners' duties and functions, including:

1. Functions of the Board of Commissioners;
2. General Concept of Board of Commissioners Supervision;
3. Requirements for the Board of Commissioners;
4. Authorities, Duties, and Responsibilities of the Board of Commissioners;

5. Rangkap Jabatan;
6. Etika Jabatan Anggota Dewan Komisaris;
7. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi;
8. Rapat Dewan Komisaris dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
9. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual*, tugas, tanggung jawab, wewenang, serta kewajiban Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
9. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
10. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

5. Concurrent Positions;
6. Professional Ethics for Members of the Board of Commissioners;
7. Introduction and Competency Improvement Program;
8. Board of Commissioners Meetings and Decision-Making Mechanisms;
9. Board of Commissioners Performance Assessment;
10. Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Duties, Responsibilities, Authority, and Obligations of the Board of Commissioners

Based on the Board Manual, the duties, responsibilities, authority, and obligations of the Board of Commissioners are as follows:

Board of Commissioners Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners is the Company organ tasked with supervising and providing advice to the Board of Directors in carrying out Company management activities.

The Board of Commissioners is responsible and authorized to supervise management policies and the general management of both the Company and its business, and to provide advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives, and not for the benefit of any particular party or group.

Board of Commissioners Authorities

The Board of Commissioners has the authority to:

1. Access books, letters and other documents, verify cash and securities, and inspect the Company's assets;
2. Enter grounds, buildings and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. Know all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors;
5. Request the Directors and/or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors attend meetings of the Board of Commissioners;
6. Appoint and dismiss the Secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of these articles of association;
8. Use experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary;
9. Carry out actions to manage the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
10. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;
11. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, articles of association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
8. Mengikuti Program Pengenalan Perusahaan saat pertama kali menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;
9. Menetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris dengan keputusan Dewan Komisaris;
10. Membuat pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
11. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris yang dimasukkan dalam RKAP;
12. Membentuk Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite lainnya jika dibutuhkan;
13. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
14. Memberikan persetujuan atas usulan Direksi tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan;
15. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
16. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di awal masa menjabat, secara periodik selama menjabat, dan di akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
18. Memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
19. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP, dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan;
21. Melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan Komisaris, Komite, dan setiap individu Komisaris, yang didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Evaluasi tahunan tersebut disampaikan kepada RUPS;

Board of Commissioners Obligations

The Board of Commissioners is obliged to:

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. Review, assess, and sign the Company's Long-Term Plan (RJPP), Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors;
3. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's RJPP and RKAP regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the RJPP and RKAP;
4. Follow developments in the Company's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company;
5. Promptly report to the GMS if there are signs of declining Company performance;
6. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report;
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested;
8. Participate in the Company's Induction Program upon first assuming office as a member of the Board of Commissioners;
9. Determine the division of duties within the Board of Commissioners through a Board of Commissioners decision;
10. Create binding guidelines and work procedures for each member of the Board of Commissioners;
11. Prepare the Board of Commissioners' Annual Work Plan and Budget (RKAT), which is included in the RKAP;
12. Establish a Board of Commissioners Secretariat, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and other committees as needed;
13. Propose a Public Accountant to the GMS;
14. Approve the Board of Directors' proposals regarding the appointment and dismissal of the Corporate Secretary;
15. Prepare minutes of Board of Commissioners meetings and retain copies;
16. Submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) at the beginning of the term of office, periodically during the term, and at the end of the term in accordance with statutory provisions;
17. Report to the Company regarding their and/or their family's share ownership in the Company and other companies, including any changes thereto;
18. Monitor and ensure Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably;
19. Ensure the Board of Directors has followed up on findings from Internal Audit, External Audit, BPK audit, BPKP audit, and/or other supervisory authority findings in accordance with statutory regulations;
20. Ensure the Annual Report includes information regarding the identity, primary occupation, position of the Board of Commissioners in other companies, including meetings held during the fiscal year, including internal meetings and joint meetings with the Board of Directors, as well as honorariums, facilities, and/or other benefits received from the Company;
21. Conduct an objective annual evaluation to determine the effectiveness of the Board of Commissioners, Committees, and each individual Commissioner, based on specific, measurable, achievable, and relevant benchmarks or assessment criteria. This annual evaluation is submitted to the GMS;

22. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
23. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Mengacu pada Anggaran Dasar 02 tanggal 27 September 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Anggaran Dasar Nomor 01 tanggal 17 April 2025 PTPI Pasal 11 Ayat 8, perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali: (i) pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis; (ii) penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; serta (iii) pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapus dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan serta Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-83/MBU/06/2015 tanggal 4 Juni 2015, SK-70/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret 2016, SK-160/MBU/07/2016 tanggal 26 Juli 2016, dan SK-193/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan menetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 016/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia.

22. Submit a report to the GMS on the supervisory duties performed during the preceding fiscal year;
23. Carry out other obligations related to their supervisory and advisory duties, as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.

Decisions Requiring Board of Commissioners Approval

Referring to Statute 02 dated September 27, 2018, as last amended by Statute No. 01 dated April 17, 2025, Article 11, Paragraph 8 of PTPI, the actions of the Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners are as follows:

1. Pledging fixed assets for short-term loans;
2. Entering into cooperation with business entities or other parties in the form of licensing agreements, management contracts, asset leasing, Joint Operating Agreements (JOA), Build-Operate-Transfer (BOT), Build- Own-Transfer (BOT), Build-Transfer (or for a specific period as determined by the GMS;
3. Receiving or granting medium-term/long-term loans, except for (i) loans (debts or receivables) arising from business transactions, (ii) the issuance of bonds and other debt instruments; and (iii) loans granted to Subsidiaries of the Company, provided that loans to Subsidiaries of the Company are reported to the Board of Commissioners.
4. Writing off bad debts and obsolete inventory from the books;
5. Disposing of fixed assets with an economic life of up to 5 (five) years, as generally applicable in the industry;
6. Establishing an organizational structure one level below the Board of Directors.

Division of Duties of the Board of Commissioners

Based on the Company's Articles of Association and Minister of BUMN Decrees No. SK-83/MBU/06/2015 dated June 4, 2015, SK-70/MBU/03/2016 dated March 29, 2016, SK-160/MBU/07/2016 dated July 26, 2016, and SK-193/MBU/06/2018 dated June 8, 2018, the Company has established a division of duties for the Board of Commissioners in an effort to improve the effectiveness of its supervisory function. These provisions are outlined in Board of Commissioners Decree No. 016/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia.

Pembagian Tugas Masing-Masing Dewan Komisaris
Division of Duties for Each Member of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas Duties
Sudaryono	Mengoordinasi seluruh pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris di seluruh bidang dan seluruh Anak Perusahaan. Coordinates the implementation of all supervisory tasks of the Board of Commissioners in all areas and all Subsidiaries.
Irfan Ahmad Fauzi	Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero), khususnya: 1. Manajemen risiko; dan 2. Pengawasan terhadap anak perusahaan, yaitu PT Pupuk Kujang. Supervision and provision of advice and recommendations for the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), specifically: 1. Risk management; and 2. Supervision of its subsidiary, PT Pupuk Kujang.
Rachlan S Nashidik	Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero), khususnya: 1. Hukum, tata kelola dan kepatuhan; dan 2. Pengawasan terhadap anak perusahaan, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur. Supervision and provision of advice and recommendations regarding the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), specifically: 1. Legal, governance, and compliance; and 2. Supervision of its subsidiary, PT Pupuk Kalimantan Timur.
Chrisna Deva Priyapratama	Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero), khususnya: 1. Sumber Daya Manusia; 2. Teknologi informasi dan digitalisasi; dan 3. Pengawasan terhadap anak perusahaan, yaitu PT Pupuk Indonesia Logistik. Supervision and provision of advice and recommendations for the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), specifically: 1. Human Capital; 2. Information technology and digitalization; and 3. Supervision of its subsidiary, PT Pupuk Indonesia Logistik.
Iwan Sumule	Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero), khususnya 1. Operasi serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan 2. Pengawasan terhadap anak perusahaan, yaitu PT Rekayasa Industri. Supervision and provision of advice and recommendations for the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), specifically 1. Operations and Occupational Health and Safety; and 2. Supervision of its subsidiary, PT Rekayasa Industri.
Nurul Ichwan	Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero), khususnya: 1. Keuangan dan *supply chain;* dan 2. Pengawasan terhadap anak perusahaan, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Indonesia Niaga. Supervision and provision of advice and recommendations for the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), specifically: 1. Finance and supply chain; and 2. Supervision of subsidiaries, namely PT Pupuk Iskandar Muda and PT Pupuk Indonesia Niaga.
Yovie Widianto	Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero), khususnya: 1. Manajemen Aset; dan 2. Pengawasan terhadap anak perusahaan, yaitu PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Indonesia Pangan. Supervision and provision of advice and recommendations for the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), specifically: 1. Asset Management; and 2. Supervision of subsidiaries, namely PT Petrokimia Gresik and PT Pupuk Indonesia Pangan.
Febrio Nathan Kacaribu	Pengawasan serta pemberian nasihat dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero), khususnya: 1. Bidang Keuangan; dan 2. Pengawasan terhadap anak perusahaan yaitu PT Pupuk Iskandar Muda. Supervision and provision of advice and recommendations for the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), specifically: 1. Finance; and 2. Supervision of subsidiaries, namely PT Pupuk Iskandar Muda.
Suwandi	Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero), khususnya: 1. Bidang investasi; dan 2. Pengawasan terhadap anak perusahaan, yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Supervision and provision of advice and recommendations for the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), specifically: 1. Investment; and 2. Supervision of its subsidiary, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Sesuai dengan *Board Manual* Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program pengenalan Perusahaan yang dikoordinasi oleh Sekretaris Perusahaan. PTPI telah memiliki mekanisme program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Selama tahun 2025 telah dilaksanakan program pengenalan perusahaan kepada Dewan Komisaris baru sebanyak 2 (dua) kali kepada 8 (delapan) orang Komisaris yang diangkat sesuai SK-156/MBU/06/2025, yaitu kepada:

1. Rachlan S. Nashidik pada tanggal 18 Juni 2025
2. Iwan Sumule pada tanggal 18 Juni 2025
3. Nurul Ichwan pada tanggal 18 Juni 2025
4. Muhammad Rizal Kamal pada tanggal 18 Juni 2025
5. Immanuel Ebenezer Gerungan pada tanggal 18 Juni 2025
6. Sudaryono pada tanggal 18 Juni 2025
7. Yovie Widianto pada tanggal 25 Juni 2025
8. Chrisna Deva Priyapratama pada tanggal 25 Juni 2025

Orientation Program for New Commissioners

In accordance with the newly appointed Board of Commissioners Manual, they are required to participate in a Company orientation program coordinated by the Corporate Secretary. PTPI has an orientation program mechanism for new members of the Board of Commissioners to ensure that they can contribute to the Company's performance as quickly as possible.

The Company's introduction program may include presentations, meetings, visits to business units or facilities, document reviews, or other relevant activities deemed appropriate to meet specific needs.

During 2025, an orientation program for the new Board of Commissioners was conducted 2 (two) times for 8 (eight) Commissioners appointed pursuant to SK-156/MBU/06/2025, namely:

1. Rachlan S. Nashidik on June 18, 2025
2. Iwan Sumule on June 18, 2025
3. Nurul Ichwan on June 18, 2025
4. Muhammad Rizal Kamal on June 18, 2025
5. Immanuel Ebenezer Gerungan on June 18, 2025
6. Sudaryono on June 18, 2025
7. Yovie Widianto on June 25, 2025
8. Chrisna Deva Priyapratama on June 25, 2025

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Kebijakan

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris khususnya terkait fungsi pengawasannya.

Realisasi

Training and Competency Improvement for the Board of Commissioners

Policy

The Company organizes competency development programs for the Board of Commissioners to broaden their insight and knowledge, particularly regarding their supervisory function.

Implementation

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** **Education and Training Material**	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
Darmin Nasution*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	*Sharing Session*	*Elevate Innovation with Design Thinking*	16 Januari 2025 January 16, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
Mustoha Iskandar*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	*Corporate Law for Executive:* Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executives: Legal Aspects of Managing BUMN	15–16 Mei 2025 May 15-16, 2025	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
Farhat Brachma*	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	*Corporate Law for Executive:* Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executives: Legal Aspects of Managing BUMN	15–16 Mei 2025 May 15-16, 2025	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
Ari Dwipayana*	Komisaris Commissioner	*Sharing Session*	*Elevate Innovation with Design Thinking*	16 Januari 2025 January 16, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
Anwar Sanusi*	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	*Corporate Law for Executive:* Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executives: Legal Aspects of Managing BUMN	15–16 Mei 2025 May 15–16, 2025	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
Riswinandi*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	*Corporate Law for Executive:* Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executives: Legal Aspects of Managing BUMN	15–16 Mei 2025 May 15–16, 2025	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
Danar Rahmanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Sharing Session*	*Elevate Innovation with Design Thinking*	16 Januari 2025 January 16, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
Muhammad Rizal Kamal**	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Immanuel Ebenezer Gerungan****	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Sudaryono***	Komisaris Utama Commissioner	*Sharing Session*	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
Irfan Ahmad Fauzi	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Sharing Session*	*Elevate Innovation with Design Thinking*	16 Januari 2025 January 16, 202	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Pelatihan Training	*Master Class Program Series* XXIV: Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital Master Class Program Series XXIV: Risk Mitigation in Digital Transformation	3–4 Juli 2025 July 3–4, 2025	PT LSP Manajemen Risiko (LSPMR)
			Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Pelatihan & Sertifikasi Training and Certification	*Certified Governance Oversight Professional* (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Rachlan S Nashidik***	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Sharing Session*	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Pelatihan Training	*Certified Governance Oversight Professional* (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Chrisna Deva Priyapratama***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan & Sertifikasi Training and Certification	*Certified Governance Oversight Professional* (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
Iwan Sumule***	Komisaris Commissioner	*Sharing Session*	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Nurul Ichwan***	Komisaris Commissioner	*Sharing Session*	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Pelatihan & Sertifikasi Training and Certification	*Certified Governance Oversight Professional* (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Yovie Widianto***	Komisaris Commissioner	*Sharing Session*	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Pelatihan & Sertifikasi Training and Certification	*Certified Governance Oversight Professional* (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Febrio Nathan Kacaribu*****	Komisaris Commissioner	*Sharing Session*	*Elevate Innovation with Design Thinking*	16 Januari 2025 January 16, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
Suwandi	Komisaris Commissioner	*Sharing Session*	*Elevate Innovation with Design Thinking*	16 Januari 2025 January 16, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Pelatihan & Sertifikasi Training and Certification	*Certified Governance Oversight Professional* (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 24 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Tidak lagi menjabat sejak 22 Agustus 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025

*) No longer serving as of June 16, 2025
**) No longer serving as of June 24, 2025
***) Serving since June 16, 2025
****) No longer serving as of August 22, 2025
*****) No longer serving as of December 15, 2025

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2025

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan serta tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sejak awal tahun. Realisasi pelaksanaan program kerja tersebut pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Implementation of the Board of Commissioners' Duties in 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners consistently carried out its supervisory functions, duties, and responsibilities in accordance with the work program established at the beginning of the year. The implementation of this work program in 2025 is shown in the following table:

Program Program	Penjelasan Explanation	Target Target
Program Kunjungan Kerja dan Pengawasan Lapangan Working Visit and Field Supervision Program	Dewan Komisaris melaksanakan kunjungan kerja dan pertemuan dengan Anak Perusahaan di berbagai lokasi strategis sepanjang tahun 2025 (antara lain Palembang, Aceh, Gresik, Bontang, Cikampek, Jakarta, dan Semarang). Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung kondisi operasional, meliputi produksi, kondisi pabrik, ketersediaan stok, serta aktivitas distribusi dan pemasaran. Selain itu, kunjungan juga menjadi sarana monitoring implementasi kebijakan dan strategi perusahaan di level operasional. The Board of Commissioners conducted working visits and meetings with subsidiaries in strategic locations throughout 2025 (including Palembang, Aceh, Gresik, Bontang, Cikampek, Jakarta, and Semarang). These activities aimed to obtain a first-hand overview of operational conditions, including production, factory conditions, stock availability, and distribution and marketing activities. Also, these visits served as a means of monitoring the implementation of Company policies and strategies at the operational level.	1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan operasional dengan kebijakan dan strategi perusahaan. 2. Mengidentifikasi potensi risiko dan permasalahan operasional secara dini. 3. Memberikan rekomendasi strategis berbasis kondisi aktual di lapangan kepada Direksi. 1. Ensure operational implementation aligns with Company policies and strategies. 2. Identify potential operational risks and issues early on. 3. Provide strategic recommendations based on actual field conditions to the Board of Directors.
Program Rapat Dewan Komisaris dan Koordinasi dengan Direksi Board of Commissioners Meetings and Coordination with the Board of Directors Program	Dewan Komisaris secara rutin menyelenggarakan rapat internal, rapat gabungan dengan Direksi, serta rapat bersama organ pendukung (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi). Pembahasan meliputi evaluasi kinerja bulanan, tindak lanjut isu strategis (*pending matters*), KPI Direksi, implementasi manajemen risiko, audit keuangan, serta berbagai kebijakan korporasi termasuk transformasi bisnis, restrukturisasi, dan pengelolaan anak perusahaan. The Board of Commissioners regularly held internal meetings, joint meetings with the Board of Directors, and meetings with supporting organs (the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination & Remuneration Committee). Discussions included monthly performance evaluations, follow-up on pending strategic issues, the Board of Directors' KPIs, risk management implementation, financial audits, and corporate policies, including business transformation, restructuring, and subsidiary management.	1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Dewan Komisaris. 2. Memastikan efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. 3. Menjamin *alignment* strategi, kinerja, dan pengelolaan risiko perusahaan. 1. Improve the quality of the Board of Commissioners' decision-making. 2. Ensure the effectiveness of the supervisory and advisory functions for the Board of Directors. 3. Ensure alignment of the Company's strategy, performance, and risk management.
Program Pemberian Arahan, Tanggapan, dan Persetujuan kepada Direksi Directives, Feedback, and Approval Program for the Board of Directors	Dewan Komisaris secara aktif memberikan arahan, tanggapan, dan persetujuan tertulis kepada Direksi sepanjang tahun 2025, mencakup evaluasi kinerja bulanan, pembahasan RKAP, tindak lanjut temuan BPK dan KAP, kebijakan strategis, pengadaan KAP, perubahan organisasi, hingga aksi korporasi. Arahan ini dituangkan dalam surat resmi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan *advisory*. The Board of Commissioners actively provided directives, feedback, and written approval to the Board of Directors throughout 2025, covering monthly performance evaluations, discussions on the Company's Work Plan and Budget (RKAP), follow-up on BPK and KAP findings, strategic policies, KAP procurement, organizational changes, and corporate actions. These directives were outlined in official letters as a form of implementation of its supervisory and advisory functions.	1. Memastikan setiap kebijakan dan keputusan Direksi sejalan dengan prinsip GCG dan strategi perusahaan. 2. Memperkuat akuntabilitas dan pengendalian internal perusahaan. 3. Menjamin tindak lanjut atas rekomendasi audit dan regulator berjalan efektif. 1. Ensure that all Board of Directors policies and decisions are aligned with GCG principles and Company strategy. 2. Strengthen the Company's accountability and internal control. 3. Ensure effective follow-up on audit and regulatory recommendations.
Program Pengawasan Strategis dan Transformasi Bisnis Strategic Supervision and Business Transformation Program	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas berbagai agenda strategis perusahaan, antara lain akuisisi dan restrukturisasi anak usaha, transformasi bisnis (termasuk pengembangan bisnis amonia), perubahan struktur organisasi, implementasi GCG, serta program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Selain itu, Dewan Komisaris juga memantau kesiapan RKAP dan RKAT serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko. The Board of Commissioners supervised strategic Company agendas, including subsidiary acquisitions and restructuring, business transformation (including ammonia business development), organizational structure changes, GCG implementation, and the annual supervisory work program (PKPT). In addition, the Board of Commissioners also monitored the readiness of the Company's Work Plan (RKAP) and Work Plan (RKAT) and strengthened governance and risk management.	1. Memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis perusahaan. 2. Mengawal implementasi transformasi dan inisiatif strategis. 3. Meminimalkan risiko strategis melalui pengawasan yang terintegrasi. 1. Ensure the sustainability and growth of the Company's business. 2. Supervise the implementation of strategic transformations and initiatives. 3. Minimize strategic risks through integrated supervision.

Penilaian Kinerja Organ dan Komite Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian terhadap organ di bawah Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas, baik dalam bentuk rapat untuk menyampaikan rekomendasi, pembahasan materi tertentu, maupun kegiatan reguler yang telah melekat pada fungsi. Selain itu, organ-organ tersebut juga melaksanakan penugasan lain yang berkenaan dengan fungsi Dewan Komisaris serta Organ Pendukung Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja mandiri dengan secara sesuai indikator yang telah disusun.

Performance Assessment of Organs and Supporting Committees Under the Board of Commissioners

Assessment Criteria

The assessment criteria for organs below the Board of Commissioners include the implementation of their duties, whether through meetings to submit recommendations, discussions of specific materials, or regular activities inherent in their functions. These organs also carry out other assignments related to the Board of Commissioners functions, and the Supporting Organs of the Board of Commissioners conduct independent performance assessments in accordance with established indicators.

Dewan Komisaris juga menjadikan rencana kerja organ di bawahnya sebagai dasar penilaian kinerja. Karena itu, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan rencana kerja tersebut selalu dilakukan secara berkala.

Prosedur Penilaian

Penilaian terhadap organ di bawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik melalui rapat dalam rangka penyampaian rekomendasi, pembahasan materi tertentu, maupun pelaksanaan kegiatan rutin yang melekat pada masing-masing organ. Selain itu, organ-organ tersebut juga melaksanakan penugasan lain yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris. Dalam rangka memastikan efektivitas kinerja, penilaian dilakukan melalui mekanisme *self assessment* yang mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil *self assessment* tersebut selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan struktur dan kewenangan masing-masing organ di lingkungan Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan ketercapaian program kerja serta efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. Sepanjang tahun buku 2025, Sekretaris Dewan Komisaris menunjukkan kinerja yang baik, tercermin dari kelancaran penyelenggaraan rapat, pengelolaan korespondensi, pelaksanaan fungsi penghubung (*liaison officer*), dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris secara tepat waktu, baik berkala maupun insidental.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris menetapkan penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dengan predikat "Sangat Baik".

Penilaian Kinerja Komite Audit

Sepanjang tahun buku 2025, Komite Audit menjalankan penilaian kinerja secara terstruktur dan konsisten berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sejak awal tahun. Dalam pelaksanaannya, Komite Audit melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal, pengawasan terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP), serta evaluasi atas capaian kinerja Perusahaan. Selain itu, Komite Audit melaksanakan perjalanan dinas untuk peninjauan langsung ke lapangan dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya. Berdasarkan keseluruhan pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Komisaris memberikan penilaian atas kinerja Komite Audit tahun 2025 dengan predikat "Sangat Baik".

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2025 didasarkan pada pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan sejak awal tahun. Sepanjang periode pelaporan, Komite melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi RKAP dan RJPP, efektivitas sistem pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, sistem teknologi informasi, pengelolaan sumber daya manusia, proses pengadaan, mutu dan layanan,

The Board of Commissioners also uses the work plans of subordinate organs as the basis for performance assessment. Therefore, evaluation and monitoring of the implementation of the work plan is always carried out periodically.

Assessment Procedure

Assessment of organs below the Board of Commissioners is conducted based on the their duties and functions, whether through meetings to submit recommendations, discussions on specific material, or by carrying out routine activities inherent in each organ. These organs also carry out other assignments related to the Board of Commissioners functions. To ensure effective performance, assessments are conducted using a self-assessment mechanism that refers to established performance indicators. These self-assessments results are then submitted for approval by the authorized parties in accordance with the structure and authority of each organ within the Board of Commissioners.

Performance Assessment of the Secretary to the Board of Commissioners

The performance of the Secretary to the Board of Commissioners is evaluated based on the achievement of work programs and the effectiveness of support for the implementation of the Board of Commissioners' functions. Throughout fiscal year 2025, the Secretary to the Board of Commissioners demonstrated strong performance, reflected in the smooth running of meetings, management of correspondence, implementation of liaison officer functions, and timely provision of information required by the Board of Commissioners, both periodically and incidentally.

Based on the implementation of these duties and responsibilities, the Board of Commissioners has awarded the Secretary to the Board of Commissioners with a performance assessment of "Very Good."

Audit Committee Performance Assessment

Throughout the fiscal year 2025, the Audit Committee conducted a structured and consistent performance assessment based on the work program established at the beginning of the year. For its implementation, the Audit Committee reviewed the Internal Audit Unit's Audit Report, supervised the performance of the Public Accounting Firm (KAP), and evaluated the Company's performance achievements. The Audit Committee also undertook official travel for on-site inspections and submitted recommendations to the Board of Commissioners within its scope of responsibilities. Based on the overall implementation of these duties, the Board of Commissioners rated the Audit Committee's performance in 2025 "Very Good."

Risk Monitoring Committee Performance Assessment

The Risk Monitoring Committee's performance assessment in 2025 was based on the implementation of the work program established at the beginning of the year. Throughout the reporting period, the Committee supervised the implementation of the Company's Work Plan (RKAP) and Long-Term Plan (RJPP), the effectiveness of the internal control system, the application of risk management, information technology systems, human capital

serta pengelolaan Perusahaan agar senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, Komite melakukan evaluasi atas Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), KPI individu Direksi, serta melaksanakan kunjungan lapangan melalui perjalanan dinas. Berdasarkan pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Komisaris memberikan penilaian kinerja "Sangat Baik" kepada Komite Pemantau Risiko.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi & Remunerasi

Penilaian kinerja Komite Nominasi & Remunerasi tercermin dari peran aktif dan kontribusinya dalam pengembangan talenta di lingkungan Perusahaan. Komite ini berfungsi sebagai *Talent Committee* bagi Direksi dan BOD-1, dengan rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri BUMN melalui Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi. Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi & Remunerasi telah melaksanakan mandat yang diberikan secara efektif dan konsisten, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap kesinambungan Perusahaan. Atas dasar tersebut, Dewan Komisaris memberikan penilaian kinerja dengan kategori "Sangat Baik".

Penilaian Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi menjalankan berbagai aktivitas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, yang meliputi antara lain:

1. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Entitas Induk atau Entitas Anak;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain: Audit Intern, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, serta dapat mengundang Direksi *Holding* dan Direksi Anak Perusahaan (jika sewaktu-waktu dibutuhkan) untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; dan
7. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

Atas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris memberikan penilaian "Sangat Baik".

management, procurement processes, quality and service, and Company management to ensure they consistently aligned with the GCG principles. The Committee also evaluated the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU), the Board of Directors' individual KPIs, and conducted field visits during official travel. Based on these duties, the Board of Commissioners rated the Risk Monitoring Committee performance as "Very Good".

Nomination & Remuneration Committee Performance Assessment

The Nomination & Remuneration Committee's performance assessment reflects its active role and contribution to talent development within the Company. This committee serves as the Talent Committee for the Board of Directors and the Board of Directors-I, with recommendations submitted to the Minister of BUMN through the Deputy for HC, Technology, and Information. Throughout 2025, the Nomination & Remuneration Committee effectively and consistently carried out its mandate, making a significant contribution to the Company's sustainability. Based on this, the Board of Commissioners rated its performance as "Very Good".

Integrated Governance Committee Performance Assessment

Throughout 2025, the Integrated Governance Committee carried out activities in accordance with its roles and responsibilities, including:

1. Conducting evaluations of the Integrated Governance policies;
2. Monitoring and evaluating the compliance of the Integrated Governance policies of the Parent Entity or Subsidiary Entities;
3. Evaluating the implementation of Integrated Governance, at least through an assessment of the adequacy of internal controls and the integrated implementation of compliance functions;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners for the improvement of Integrated Governance policies;
5. Communicating with work units for functions including: Internal Audit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Capital, and operational aspects of the business as required, and inviting the Holding Company's Board of Directors and the Board of Directors of the Subsidiaries (if necessary) to obtain information, clarification, and requesting reports as required in an integrated manner;
6. Monitoring and evaluating the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders/ Minister; and
7. Exercising other authorities, duties, and responsibilities related to its functions.

The Board of Commissioners has given the Integrated Governance Committee a "Very Good" rating for its performance during the 2025 fiscal year.

Komisaris Independen
Independence of Independent Commissioners

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham pengendali, maupun pihak lain yang berpotensi memengaruhi independensinya, sehingga mampu bertindak sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

An Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who performs their supervisory function objectively and are free from conflicts of interest. They have no financial, management, shareholding, and/or familial relationships with any member of the Board of Commissioners, Board of Directors, controlling shareholder, or other party that could potentially affect their independence, enabling them to act in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Keberadaan Komisaris Independen berperan penting dalam menjaga objektivitas, independensi, dan *fairness* dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham mayoritas dengan perlindungan hak Pemegang Saham minoritas, termasuk Pemegang Saham publik dan pemangku kepentingan lainnya. Pengangkatan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

The presence of Independent Commissioners plays a crucial role in maintaining objectivity, independence, and fairness in the decision-making process, as well as ensuring a balance between the interests of majority shareholders and the protection of the rights of minority shareholders, including public shareholders and other stakeholders. The appointment of Independent Commissioners is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Dalam rangka menjamin pengawasan yang objektif dan efektif, Perusahaan menunjuk Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan tersebut mengacu pada PER-2/MBU/03/2023 Pasal 15 ayat (4), yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh Komisaris Independen PTPI telah memenuhi kriteria independensi tersebut. Kepatuhan ini ditegaskan melalui penandatanganan surat pernyataan independensi oleh masing-masing Komisaris Independen, yang diperbarui secara berkala setiap tahun.

Criteria for Determining Independent Commissioners

To ensure objective and effective supervision, the Company appoints Independent Commissioners in accordance with applicable laws and regulations by referring to PER-2/MBU/03/2023 Article 15 paragraph (4), that states independent members of the Board of Commissioners/Supervisory Board as referred to in paragraph (3) are members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who do not have any financial, management, share ownership, and/or familial relationships with other members of the Board of Commissioners/Supervisory Board, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders, or relationships with the relevant SOE, which could affect their ability to act independently.

All PTPI Independent Commissioners have met these independence criteria. This compliance was confirmed by the signing of a statement of independence by each Independent Commissioner, which is renewed annually.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perusahaan
Composition and Membership of Independent Commissioners on the Company's Board of Commissioners

Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Irfan Ahmad Fauzi	SK-188/MBU/07/2024	22 Juli 2024 - RUPS Kinerja di Tahun 2029 July 22, 2024 – GMS on Performance in 2029	Ke-1 1st
Rachlan S. Nashidik	SK-156/MBU/06/2025 dan SK-014/DI-DAM/DO/2025	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st
Chrisna Deva Priyapratama	SK-167/MBU/06/2025 dan SK-023/DI-DAM/DO/2025	24 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 24, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st

Independensi Komisaris Independen

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komisaris Independen menjalankan peran secara objektif dan bebas dari pengaruh maupun kepentingan pihak mana pun. Pemenuhan prinsip independensi tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Independence of Independent Commissioners

When carrying out their duties and responsibilities, Independent Commissioners perform their roles objectively and are free from the influence or interests of any party. The fulfillment of this independence principle is shown in the following table.

Aspek Independensi Independence Aspect	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik**	Chrisna Deva Priyapratama**	Darmin Nasution*	Mustoha Iskandar*	Riswinandi*	Danar Rahmanto*
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliated relationship with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Menjabat sejak 16 Juni 2025
*) No longer serving as of June 16, 2025
**) Serving as of June 16, 2025

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen
Independent Commissioner's Independence Statement







Direksi
Board Of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan Perusahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, dengan kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS, serta didukung oleh komitmen Direksi untuk menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, auditor eksternal, maupun hasil pengawasan otoritas terkait.

Kriteria dan Persyaratan Direksi

Direksi merupakan jabatan strategis yang akan menciptakan keunggulan pengelolaan dan daya saing Perusahaan sehingga membutuhkan kelengkapan persyaratan dan kompetensi tertentu. Terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), seseorang harus memenuhi syarat materiil, syarat formil, dan syarat lainnya sebagai berikut:

Syarat Materiil
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:
1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;
4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Syarat Formal
Selain memenuhi syarat materiil, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
1. Orang perseorangan;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;

The Board of Directors is a PTPI organ with full authority and responsibility for the management and administration of business activities in accordance with the Company's purposes and objectives. It also represents the Company both inside and outside the courts, based on the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations. The Board of Directors is accountable to Shareholders through the GMS as a form of accountability for the Company's management in line with GCG principles. The Board of Directors' performance is evaluated by the Board of Commissioners and reported to the GMS. This is supported by the Board of Directors' commitment to follow up on all audit findings and recommendations from the Internal Audit, external auditors, and the results of supervision by relevant authorities.

Criteria and Requirements for the Board of Directors

The Board of Directors is a strategic position that creates management excellence and competitiveness for the Company, therefore, it requires specific requirements and competencies. There are three requirements that must be met by prospective members of the Board of Directors, as stipulated in the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of SOEs, Articles 3, 4, and 6.

To be appointed as a member of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero), an individual must meet the following material, formal, and other requirements:

Material Requirements
To be appointed as a member of the Board of Directors, an individual must meet the following material requirements:
1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;
4. Experience;
5. Honesty;
6. Good conduct; and
7. High dedication to advancing and developing the company.

Formal Requirements
In addition to fulfilling the material requirements, to be appointed as a member of the Board of Directors, an individual must meet the following formal requirements:
1. An individual;
2. Capable of performing legal acts;
3. Not having been declared bankrupt within the 5 (five) years prior to appointment;

4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Syarat Lain

Selain memenuhi syarat materiil dan syarat formil, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, seseorang harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
5. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
6. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. Not having been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board found guilty of causing a State-Owned Enterprise, Subsidiary, and/or other business entity to be declared bankrupt within the 5 (five) years prior to appointment; and
5. Has never been convicted of a crime that caused financial losses to the state, BUMN, subsidiaries, other business entities, and/or related to the financial sector within the 5 (five) years prior to appointment.

Other Requirements

In addition to meeting the material and formal requirements, to be appointed as a member of the Board of Directors, an individual must meet the following other requirements:

1. Not be a political party official and/or a legislative candidate and/or a legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial House of Representatives, or Regency/City House of Representatives;
2. Not be a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
3. Not served as a Director of a State-Owned Enterprise (BUMN) or its Subsidiary for 2 (two) terms;
4. Not currently holding a position prohibited by law from concurrently holding a position as a member of the Board of Directors;
5. Dedicated and fully committed to carrying out their duties, as evidenced by a written statement from the individual concerned;
6. Physically and mentally healthy (not currently suffering from any illness that could hinder their performance of duties as a Director, as evidenced by a health certificate from a hospital); and
7. Possess a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled their tax obligations for the past 2 (two) years.

Suksesi: Nominasi, Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi dilakukan jika persyaratan formal, lainnya dan material sesuai dengan ketentuan yang ada.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Untuk itu, Pupuk Indonesia memastikan bahwa seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi Pupuk Indonesia memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.

Succession: Nomination, Proposal, Appointment, and Dismissal of the Board of Directors

The appointment and dismissal of members of the Board of Directors is conducted through a GMS in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Minister of BUMN Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of SOEs. Appointment of Directors is made if the formal, other, and material requirements comply with existing provisions.

All members of the Board of Directors have met the criteria and requirements required for the fit and proper test in accordance with the Limited Liability Company Law, the Company's Articles of Association, regulations related to GCG, and other relevant regulations and provisions. Therefore, Pupuk Indonesia ensures that all currently serving members of the Board of Directors have passed the fit and proper test and have received approval from the Shareholders. This indicates that each member of the PTPI Board of Directors possesses integrity, competence, and a good reputation.

Informasi mengenai suksesi Direksi disajikan secara rinci pada bagian Kebijakan dan Prosedur Nominasi serta Suksesi Direksi dalam bab ini.

Masa Jabatan

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Syarat yang menyertainya adalah tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Direksi Tahun 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan komposisi keanggotaan Direksi. Dengan demikian susunan dan komposisi Direksi PTPI per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Information regarding Board of Directors succession can be found in detail in the Board of Directors' Nomination and Succession Policies and Procedures section of this chapter.

Term of Office

Members of the Board of Directors are appointed for a term commencing from the closing of the appointing GMS or the date determined by the appointing GMS, and ending at the closing of the fifth Annual GMS following the date of their appointment. The term of office may not exceed five years, subject to statutory regulations, but without prejudice to the GMS' right to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term ends.

After their term of office ends, the Director may be reappointed by the GMS for 1 (one) further term, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, subject to Capital Market laws and regulations, and without prejudice to the GMS' right to dismiss at any time.

Number, Composition, and Structure of the Board of Directors in 2025

In 2025, there were changes to the Board of Directors membership. Therefore, the PTPI Board of Directors composition as of December 31, 2025, was as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Rahmad Pribadi	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK212/MBU/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK212/MBU/07/2023 dated July 27, 2023	27 Juli 2023 – RUPS Kinerja di Tahun 2028 July 27, 2023 – GMS on Performance in 2028	Ke-1 1st
Dwi Satriyo Annurogo	Direktur Operasi Director of Operations	Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Asset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025 Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Asset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di Tahun 2030 June 16, 2025–GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-155/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 – RUPS Kinerja di Tahun 2026 December 22, 2021-GMS on Performance in 2026	Ke-1 1st
	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finance & Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023		
	Direktur Keuangan Director of Finance	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023		

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Tina T. Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 – RUPS Kinerja di tahun 2026 December 22, 2021 - GMS on Performance in 2026	Ke-1 1st
	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023		
	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Asset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025 Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Asset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.		
Robby Setiabudi Madjid	Direktur Supply Chain Director of Supply Chain	Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Asset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025 Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Aset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/Asset/2025	16 Juni 2025 – RUPS Kinerja di tahun 2030 June 16, 2025 – GMS on Performance in 2030	Ke-1 1st
Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Director of Portfolio & Business Development	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2021 – RUPS Kinerja di tahun 2026 July 16, 2021-GMS on Performance in 2026	Ke-1 1st
	Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Director of Technical and Business Development	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-155/MBU/06/2025 tanggal 16 Juni 2025 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-155/MBU/06/2025 dated June 16, 2025		
Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023	2 November 2023 – RUPS Kinerja di tahun 2028 November 2, 2023 - GMS on Performance in 2028	Ke-1 1st
Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-303/MBU/11/2023 tanggal 2 November 2023 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-303/MBU/11/2023 dated November 2, 2023	2 November 2023 – RUPS Kinerja di tahun 2028 November 2, 2023 – GMS on Performance in 2028	Ke-1 1st
	Direktur Manajemen Aset Director of Asset Management	Surat Keputusan BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 dan PT Danantara Asset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025 Decree of BP BUMN No. SK–155/MBU/06/2025 and PT Danantara Asset Management (Persero) No. SK.013/DI-DAM/DO/2025.		

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Dalam Board Manual yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 67 ayat (3) dan (4), Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:

1. Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik, dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Directors' Concurrent Position Policy

In the Board Manual, which refers to Minister of BUMN Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of SOEs, Article 67 paragraphs (3) and (4), state members of the Board of Directors are prohibited from holding the following concurrent positions:

1. Directors in SOEs and other business entities;
2. Board of Commissioners/Supervisory Board in other SOEs;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with statutory provisions;
5. Political party administrators, and/or legislative candidates/members and/or regional head/deputy regional head candidates;
6. Other positions that may give rise to a conflict of interest; and/or
7. Legislative candidates or regional head/deputy regional head candidates.

Selain itu, Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kecuali:

1. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan, selain sebagai komisaris utama; dan
2. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Kepala BP BUMN.

Independensi Direksi

Dalam menjalankan fungsinya, Direksi bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Direksi Perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan saham dan rangkap jabatannya, di mana tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham di Perusahaan dan perusahaan lain yang berhubungan dengan Perusahaan, serta tidak merangkap jabatan di perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan serta implikasi berkelanjutan yang mungkin timbul, maka diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Direksi dilarang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BUMN.
2. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Board Manual: Pedoman Kerja Direksi

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) merupakan salah satu *soft structure Good Corporate Governance* (GCG) yang mengacu pada Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perusahaan") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) ini memberikan panduan tentang tata kerja, hubungan dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Board Manual menjadi komitmen bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi bertujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ,
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ,
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* (TARIF), serta Perilaku Beretika dan Keberlanjutan.

In addition, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other business entities, except:

1. As members of the Board of Commissioners in subsidiaries/affiliated companies of the relevant SOE, in addition to serving as the main commissioner; and
2. As members of the Board of Commissioners in other business entities to represent/advocate for the interests of the SOE, provided that permission is obtained from the Minister of BUMN.

Board of Directors Independence

When carrying out its functions, the Board of Directors acts independently and is free from the interests of any party. The Company's Board of Directors independence can be seen in their share ownership and concurrent positions. No member of the Board of Directors owns shares in the Company or any other company related to the Company, and no member holds concurrent positions in any company with a business relationship with the Company.

Managing Board of Directors Conflicts of Interest

To prevent conflicts of interest and the ongoing implications that may arise, the following principles are applied:

1. Directors are prohibited from exploiting SOEs for personal, familial, and/or other party interests that could harm or reduce SOE profits.
2. Directors are prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly, from SOE activities other than legitimate income.
3. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors and officials who report directly to the Board of Directors or who have significant influence over the Company's policies and/or operations are prohibited from taking actions that could harm the Company or reduce its profits and are required to disclose the conflict of interest in all decisions.

Board Manual: Board of Directors Work Guidelines

The Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines (Board Manual) is a soft structure of Good Corporate Governance (GCG) that refers to the Articles of Association of PT Pupuk Indonesia (Persero) (the "Company") and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines (Board Manual) provide guidance on the work procedures, relationships, and communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Board Manual is a shared commitment between the Board of Commissioners and the Board of Directors, aimed to:

1. Serve as a reference/guideline for the main duties and functions of each organ,
2. Improve the quality and effectiveness of working relationships between organs,
3. Implement GCG principles, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (TARIF), as well as Ethical Behavior and Sustainability.

Board Manual pertama kali ditetapkan pada 5 November 2012 dan telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir tanggal 30 Desember 2024.

Dengan diberlakukannya Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dalam hubungan kerja antar dua Organ Perusahaan tersebut, maka semua kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG.

Board Manual yang mengatur ketentuan mengenai Direksi antara lain mencakup:
1. Fungsi Direksi;
2. Syarat Direksi;
3. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
4. Rangkap Jabatan;
5. Etika Jabatan Anggota Direksi;
6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi;
7. Rapat Direksi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
8. Penilaian Kinerja Direksi;
9. Organ Pendukung Direksi;

Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Kewajiban Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar dan *Board Manual*, tugas, tanggung jawab, wewenang, serta kewajiban Direksi sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:
1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan dan Investasi, Operasional dan Pengadaan barang dan/atau jasa, Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan, Program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan program *Environment, Social, and Governance* (ESG), serta kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

The Board Manual was first established on November 5, 2012, and has been updated several times, most recently on December 30, 2024.

Through the implementation of the Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines (Board Manual) in the working relationship between these two Company Organs, all Company business activities can be carried out harmoniously, adhering to GCG principles.

The Board Manual regulates provisions regarding the Board of Directors, including:
1. Board of Directors Functions;
2. Board of Directors Requirements;
3. Board of Directors Authorities, Duties, and Responsibilities;
4. Concurrent Positions;
5. Job Ethics for Board of Directors Members;
6. Introduction and Competency Improvement Program;
7. Board of Directors Meetings and Decision-Making Mechanisms;
8. Board of Directors Performance Assessment;
9. Supporting Organs of the Board of Directors;

Board of Directors Duties, Responsibilities, Authorities, and Obligations

Based on the Articles of Association and the Board Manual, the Board of Directors duties, responsibilities, authorities, and obligations are as follows:

Board of Directors Duties and Responsibilities

The Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives, and representing the Company both inside and outside the court regarding all matters and events, subject to the limitations stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

Board of Directors Authorities

In carrying out its duties, the Board of Directors has the authority to:
1. Establish Company management policies, with the provision that policies in the areas of Accounting and Finance, Development and Investment, Operations and Procurement of Goods and/or Services, Information Technology, Human Resources, Risk Management and Internal Supervision, Legal and Compliance, Social and Environmental Responsibility Programs, and Environment, Social, and Governance (ESG) programs, as well as other strategic policies, are always aligned and in accordance with the policies and regulations applicable to the majority shareholder of Series B shares. The Board of Directors is required to be guided by the policies established by the Series A Dwiwarna Shareholder or by a proxy;
2. Arrange the transfer of authority of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and out of court;
3. 3. Arrange the transfer of authority of the Board of Directors to one or more Company employees, either individually or jointly, or to other individuals, to represent the Company inside and outside the court;

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
7. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;
9. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
10. Menetapkan kebijakan terhadap anak perusahaan;
11. Mengoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk anak perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari anak perusahaan, pada bidang-bidang antara lain sebagai berikut:
    a. Pemasaran dan penjualan;
    b. Penelitian dan pengembangan;
    c. *Supply chain management* dan *cost management*;
    d. Pengadaan barang dan/atau jasa;
    e. *Finance* dan audit serta manajemen risiko dan kepatuhan;
    f. Manajemen talenta dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi;
    g. Hukum;
    h. Bidang lainnya.

Kewajiban Direksi

Kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban

4. Regulate provisions regarding Company personnel, including the determination of salaries, pensions or old-age security, and other income for Company employees based on applicable laws and regulations, provided that the determination of salaries, pensions or old-age security, and other income for employees that exceed the obligations stipulated by laws and regulations must first be approved by the GMS;
5. Appoint and dismiss Company employees based on Company personnel regulations and applicable laws and regulations;
6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary based on the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners;
7. Propose the appointment and dismissal of the Chief Audit Executive to obtain the approval of the Board of Commissioners;
8. Perform all other actions and deeds regarding the management and ownership of Company assets, binding the Company with other parties, and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the court regarding all matters and all events, with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions;
9. Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures;
10. Establish policies for subsidiaries;
11. Coordinate, organize, and/or synergize functions for subsidiaries based on agreements with/authorization from subsidiaries, in the following areas:
    a. Marketing and sales;
    b. Research and development;
    c. Supply chain management and cost management;
    d. Procurement of goods and/or services;
    e. Finance and audit, as well as risk and compliance management;
    f. Talent management and integrated human Capital development;
    g. Legal;
    h. Other areas.

Board of Directors Obligations

The Board of Directors obligations as stipulated in the Company's Articles of Association are as follows:

1. To ensure and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives and business activities.
2. To prepare in a timely manner the RJPP, RKAP, and amendments and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for approval at the GMS.
3. To provide explanations to the GMS regarding the RJPP and RKAP.
4. To prepare a Register of Shareholders, a Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, and Minutes of the Board of Directors' Meetings.
5. To prepare an Annual Report as a form of accountability for the

pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan 5, dan dokumen Perusahaan lainnya.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan dokumen berupa: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 11.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
17. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan.
18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Company's management, as well as the Company's financial documents as defined in the Law on Company Documents.

6. To prepare Financial Statements in accordance with Financial Accounting Standards and submit them to a Public Accountant for audit.
7. To submit the Annual Report, including the Financial Statements, to the GMS for approval and ratification, as well as a report on the Company's unrecorded rights, including those resulting from the write-off of receivables.
8. To provide an explanation to the GMS regarding the Annual Report.
9. To submit the Balance Sheet and Profit and Loss Statement approved by the GMS to the Minister for Law and Human Rights in accordance with statutory provisions.
10. To submit a report on changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners to the Minister for Law and Human Rights.
11. To maintain the Shareholder Register, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, the Annual Report and the Company's financial documents as referred to in points 4 and 5, and other Company documents.
12. To maintain at the Company's domicile the following documents: the Shareholder Register, Special Register, Minutes of General Meeting of Shareholders, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, the Annual Report and the Company's financial documents, and other Company documents as referred to in point 11.
13. To establish an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, particularly the management, recording, storage, and oversight functions.
14. To Provide periodic reports in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
15. To prepare a complete organizational structure of the Company, including details and duties.
16. To provide explanations on all matters inquired or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders.
17. To prepare and establish a blueprint for the Company's organization.
18. To carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and those determined by the GMS in accordance with statutory regulations.

Pembagian Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi melaksanakan tugas berdasarkan pembagian peran yang jelas antar anggota guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 85/A/HK/E0500/SK/2025 tanggal 1 Oktober 2025, dengan uraian sebagai berikut:

Board of Directors Division of Duties and Responsibilities

The Board of Directors carries out its duties based on a clear division of roles among its members to ensure the effective and efficient implementation of their responsibilities. Each member of the Board of Directors duties and responsibilities are stipulated in Board of Directors Decree No. 85/A/HK/E0500/SK/2025 dated October 1, 2025, as shown below:

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duties for Each Member of the Board of Directors

Direksi Board of Directors	Tugas Duties
Rahmad Pribadi (Direktur Utama) President Director	Mengoordinasikan, mengawasi serta memimpin manajemen Perusahaan dan memastikan semua kegiatan usaha Perusahaan dijalankan sesuai dengan visi, misi dan nilai Perusahaan untuk memastikan tercapainya target Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar (AD), Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Coordinating, supervising, and leading the Company's management and ensuring all business activities are carried out in accordance with the Company's vision, mission, and values. This ensures achievement of Company targets based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Articles of Association (AD), Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations.
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Operasi) Director of Operations	Mengarahkan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kegiatan di bidang Operasi secara aman, handal, dan ramah lingkungan, serta menetapkan kebijakan/peraturan sesuai kewenangannya meliputi fungsi Sinerji Operasi & Pemasaran, Pengadaan, Manajemen Operasi, K3LH, Teknologi Informasi, Digitalisasi dan *Data Science* untuk memastikan tercapainya target Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar (AD), Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Directing, coordinating, supervising, controlling, and being responsible for operations activities in a safe, reliable, and environmentally friendly manner, as well as establishing policies and regulations within their authority, including synergizing Operations & Marketing, Procurement, Operations Management, HSE, Information Technology, Digitalization, and Data Science, to ensure the achievement of Company targets based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Articles of Association (AD), Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations.
Wono Budi Tjahyono (Direktur Keuangan) Director of Finance	Mengarahkan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kegiatan di bidang Keuangan, serta menetapkan kebijakan/peraturan sesuai kewenangannya meliputi fungsi Keuangan dan Pendanaan Investasi, Akuntansi, dan Kinerja Korporat untuk mendukung tercapainya target Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar (AD), Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Directing, coordinating, supervising, controlling, and being responsible for activities in the finance sector, as well as establishing policies and regulations within their authority, including the functions of Finance and Investment Funding, Accounting, and Corporate Performance, to support the achievement of the Company's targets based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Articles of Association (AD), Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations.
Tina T. Kemala Intan (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum) Director of Human Capital and General Affairs	Mengarahkan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kegiatan di bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, serta menetapkan kebijakan/peraturan sesuai kewenangannya meliputi fungsi SDM, Umum, Sistem Manajemen Terpadu dan Inovasi, serta Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) untuk memastikan tercapainya target Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar (AD), Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Directing, coordinating, supervising, controlling, and being responsible for activities in the HC & General Affairs sector, as well as establishing policies/regulations within their authority, covering HC, General Affairs, Integrated Management Systems and Innovation, and Social & Environmental Responsibility (SER) functions to ensure the achievement of Company targets based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Articles of Association (AD), Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations.
Robby Setiabudi Madjid (Direktur Supply Chain) Director of Supply Chain	Mengarahkan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kegiatan di bidang *Supply Chain*, serta menetapkan kebijakan/peraturan sesuai kewenangannya meliputi fungsi Pemasaran, Penjualan, dan Distribusi untuk memastikan tercapainya target Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar (AD), Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Directing, coordinating, supervising, controlling, and being responsible for Supply Chain activities, as well as establishing policies and regulations within their authority, covering Marketing, Sales, and Distribution functions, to ensure the achievement of Company targets based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Articles of Association (AD), Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations.

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi
Division of Duties for Each Member of the Board of Directors

Direksi Board of Directors	Tugas Duties
Jamsaton Nababan (Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis) Director of Technical and Business Development	Mengarahkan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kegiatan di bidang Teknik & Pengembangan Bisnis, serta menetapkan kebijakan/peraturan sesuai kewenangannya meliputi fungsi Strategi Korporat, Pengembangan Bisnis, Riset, Portofolio Bisnis, dan *Engineering Excellence Center* untuk memastikan tercapainya target Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar (AD), Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Directing, coordinating, supervising, controlling, and being responsible for activities in the Engineering & Business Development sector, as well as establishing policies and regulations within their authority, including the functions of Corporate Strategy, Business Development, Research, Business Portfolio, and the Engineering Excellence Center, to ensure the achievement of Company targets based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Articles of Association (AD), Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations.
Ninis Kesuma Adriani (Direktur Manajemen Risiko) Director of Risk Management	Mengarahkan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kegiatan di bidang Manajemen Risiko, serta menetapkan kebijakan/peraturan sesuai kewenangannya meliputi fungsi Manajemen Risiko, Tata Kelola, Kepatuhan, dan Hukum untuk memastikan tercapainya target Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar (AD), Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Directing, coordinating, supervising, controlling, and being responsible for activities in the Risk Management sector, as well as establishing policies and regulations within their authority, including Risk Management, Governance, Compliance, and Legal functions, to ensure the achievement of Company targets based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Articles of Association (AD), Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations.
Tri Wahyudi Saleh (Direktur Manajemen Aset) Director of Asset Management	Mengarahkan, mengoordinir, mengawasi, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kegiatan dan penetapan kebijakan perusahaan di bidang Manajemen Aset Properti sesuai kewenangannya meliputi fungsi Perencanaan & Pengendalian Aset, serta fungsi Investasi & Optimalisasi Aset untuk memastikan tercapainya target Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar (AD), Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Directing, coordinating, supervising, controlling, and being responsible for the Company's activities and policy-making in the field of Property Asset Management sector, within their authority, including the Asset Planning & Control function, as well as the Investment & Asset Optimization function, to ensure the achievement of the Company's targets based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Articles of Association (AD), Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi

Perusahaan memiliki mekanisme Program Pengenalan Perusahaan bagi anggota Direksi yang baru menjabat untuk memastikan bahwa anggota Direksi dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Panduan pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Direksi baru telah diatur dalam *Board Manual* Perusahaan yang menyatakan bahwa anggota Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan Program Pengenalan Perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya. Program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;

Company Introduction Program for Directors

The Company has an Introduction Program mechanism for newly appointed members of the Board of Directors to ensure they can quickly contribute to the Company's performance. Guidelines for implementing the Introduction program for new members of the Board of Directors are stipulated in the Company's Board Manual, which states that newly appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors must be given an Introduction program, which must be conducted as soon as possible after their appointment. The Introduction Program for new members of the Board of Directors includes the following:

1. The Company's implementation of GCG principles;
2. An overview of the Company regarding its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information regarding delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, as well as prohibited activities;

5. Penjelasan mengenai *stakeholders* utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Selama tahun 2025 telah dilaksanakan program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi baru sebanyak 1 (satu) kali kepada 2 (dua) orang Direksi yang diangkat sesuai SK-155/MBU/06/2025, yaitu kepada:

1. Robby Setiabudi Madjid pada tanggal 30 Juni 2025
2. Dwi Satriyo Annurogo pada tanggal 30 Juni 2025

5. An explanation of the Company's primary stakeholders and the Company's social responsibility.

In 2025, the Company's Introduction program for new Board members was held once for two Directors appointed in accordance with Decree No. SK-155/MBU/06/2025:

1. Robby Setiabudi Madjid on June 30, 2025
2. Dwi Satriyo Annurogo on June 30, 2025

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Kebijakan

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Direksi untuk menambah wawasan dan pengetahuan Direksi khususnya terkait pengelolaan Perusahaan serta kepemimpinan.

Realisasi

Board of Directors Training and Competency Development

Policy

The Company facilitates competency development programs for the Board of Directors to broaden their insight and knowledge, particularly regarding company management and leadership.

Implementation

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
Rahmad Pribadi	Direktur Utama President Director	*Conference*	*Baker Hughes Annual Meeting* 2025	02 – 04 Februari 2025 February 02 - 04, 2025	Baker Hughes
		Conference	IFA *Cultivating Tomorrow Conference* 2025 - *Innovation Meets Sustainability*	01 – 03 April 2025 April 01 - 03, 2025	International Fertilizer Association (IFA)
		Conference	*Argus Fertilizer Asia Conference* 2025	22 – 24 April 2025 April 22 – 24, 2025	Argus Media
		Conference	IFA *Annual Conference* 2025	12 – 14 Mei 2025 May 12 – 14, 2025	International Fertilizer Association (IFA)
		Conference	IFA *Crossroads* 2025	07 – 09 Oktober 2025 October 07 - 09, 2025	International Fertilizer Association (IFA)
		Conference	*Ammonia Energy Annual Conference* 2025	20 Oktober 2025 October 20, 2025	Ammonia Energy Association
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Dwi Satriyo Annurogo	Direktur Operasi Director of Operations	*Sharing Session*	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan Director of Finance	*Sharing Session*	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Tina T. Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	Pelatihan Training	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Digital Marketing bersama Srikandi PI Financial Management and Digital Marketing Training with Srikandi PI	6 Agustus 2025 August 6, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Sharing Session	*Sharing & Insight Strategies* di *Pre Class* di CBDO Program	13 Agustus 2025 August 13, 2025	Danantara
		Sharing Session	*Learn & Share: Neuroticism & Toxic Behaviour*	13 Agustus 2025 August 13, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)
		Conference	*D'Connection* *Leaders Roundtable* – WEPs *Corporate Action Lab* Indonesia	10 September 2025 September 10, 2025	Danantara
		Conference	*Mental Health & Wellness Exhibition and Conference*	3 Desember 2025 December 3, 2025	Mind Care
		Sharing Session	*Women Leaders Summit*	16 Desember 2025 December 16, 2025	Srikandi BUMN Indonesia
		Conference	FHCI *Connect Expert Series* 2 : *Unlocking Employee Potential With Personalized AI-Driven Development*	27 Agustus 2025 August 27, 2025	FHCI
		Conference	FHCI *Connect Expert Series* 4 : *Humanizing Digital Transformation: Building Ethical, Agile, and Future-Ready Talent Ecosystems*	30 Oktober 2025 October 30, 2025	FHCI
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Robby Setiabudi Madjid	Direktur Supply Chain Director of Supply Chain	*Conference*	IFA *Crossroads* 2025	07 – 09 Oktober 2025 October 07 - 09, 2025	International Fertilizer Association (IFA)
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Jamsaton Nababan	Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Director of Technical and Business Development	Pelatihan Training	*Strategic Risk Management & Value Creation*	12 – 13 September 2025 September 12 – 13, 2025	INSEAD
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Pelatihan Training	Indonesia *Economic Outlook* 2025	18 Januari 2025 January 18, 2025	ISCEA Indonesia
		Pelatihan Training	*Chief Risk Officer* (CRO) *School* Tahun 2025 Chief Risk Officer (CRO) School 2025	02 Mei – 16 Juli 2025 May 02 –July 16, 2025	Kementerian BUMN
		Pelatihan Training	*Strategic Risk Management & Value Creation*	12 – 13 September 2025 September 12 – 13, 2025	INSEAD
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Tri Wahyudi Saleh	Direktur Manajemen Aset Director of Asset Management	*Conference*	*Argus Fertilizer Asia Conference* 2025	22 – 24 April 2025 April 22 – 24, 2025	Argus Media
		Pelatihan Training	*Risk Beyond* 2025	04 – 05 Desember 2025 December 04 – 05, 2025	CRMS Indonesia
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Gusrizal	Wakil Direktur Utama Vice President Director	*Sharing Session*	*Elevate Innovation with Design Thinking*	16 Januari 2025 January 16, 2025,	PT Pupuk Indonesia (Persero) & Dr. Indrawan Nugroho
Bob Indiarto	Direktur Produksi Production Director	*Conference*	*Argus Fertilizer Asia Conference* 2025	22 – 24 April 2025 April 22 – 24, 2025	Argus Media
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Pelatihan Training	*Certified Human Resources Professional* (CHRP)	25 Mei– 30 Agustus 2025 May 25–August 30, 2025	Atmajaya

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2025

Implementation of the Board of Directors' Duties in 2025

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
Produksi Production	Efisiensi rasio konsumsi energi urea dan amonia (MMBTu/Ton): urea 27,99 amonia 35,91 serta *losses* NPK Granul 1,73% dan NPK *Chemical* 1,06%. Efficiency ratio of urea and ammonia energy consumption (MMBTu/Ton): urea 27.99, ammonia 35.91, and losses of NPK Granules 1.73% and NPK Chemical 1.06%.	• Menindaklanjuti hasil *Plant Technical Audit* Pabrik Amurea dan NPK 2024. • Menindaklanjuti hasil *Audit Performance* TA pabrik (tahap persiapan dan *post* TA) Tahun 2024. • Pemetaan *Drone* untuk mengurangi *heat loss* dengan target efisiensi. • Pelaksanaan *Plant Technical Audit* 4 Pabrik Amurea dan 2 NPK. • Followed-up on the results of the 2024 Amurea and NPK Plant Technical Audits. • Followed up on the results of the 2024 TA Performance Audits (preparatory and post-TA stages). • Drone mapping to reduce heat loss with efficiency targets. • Implementation of Plant Technical Audits for 4 Amurea and 2 NPK Plants.
	Tercapainya *plant utilization* pabrik pupuk sebesar ≥91% dan *plant availability* ≥89% dari pabrik-pabrik yang dapat dioperasikan sesuai ketersediaan gas/bahan baku lainnya untuk mendukung pemenuhan pupuk PSO dan penjualan komersial. Fertilizer plant utilization of ≥91% and plant availability of ≥89% at factories, which can be operated according to the availability of gas/ other raw materials to support PSO fertilizer fulfillment and commercial sales.	• Penguatan Sistem Manajemen Produksi, *Maintenance Excellence* dan *Reliability Centered Maintenance Roll Out* 9 Pabrik Amurea sehingga produksi pupuk dapat mencapai 12,6 Juta ton. • Evaluasi Strategi *Maintenance Equipment* Kritis - Evaluasi Risk *Based inspection* (RBI) Pupuk Indonesia Group dengan target *Roll Out* 6 pabrik Amurea + 4 Pabrik NPK. • Implementasi *Production Analytics Center* (*use case* AI/ML). • Strengthened the Production Management System, Maintenance Excellence, and Reliability-Centered Maintenance Roll-Out for 9 Amurea Plants, enabling fertilizer production to reach 12.6 million tons. • Evaluated the Critical Equipment Maintenance Strategy - Risk-Based Inspection (RBI) evaluation for the Pupuk Indonesia Group, targeting roll-out of 6 Amurea and 4 NPK plants. • Implemented a Production Analytics Center (AI/ML use case).
	Tercapainya *Zero Fatality* dan *Sustainability* dalam pengelolaan Aspek K3LH melalui penerapan HSE *Excellence*. Zero Fatalities and Sustainability in the management of K3LH aspects through the implementation of HSE Excellence.	• PSM Audit (meliputi elemen *Asset Integrity & Reliability*) di 5 Anper Pupuk. • PSM Audit (covering Asset Integrity & Reliability elements) at 5 Pupuk Anper.
		• Evaluasi pelaksanaan PSM melalui Audit PSM di 5 Anper Pupuk • Implementasi program PSM *Roll Out* (Pembuatan prosedur/panduan PSM Audit). • Evaluated PSM implementation through PSM Audits at 5 Pupuk Anper • Implemented the PSM Roll Out program (Creation of PSM Audit procedures/guidelines).
		• Tindak lanjut hasil asesmen *Safety Culture.* • Pengembangan *Crisis Emergency Response Plan* di Pupuk Indonesia Group. • Followed-up on Safety Culture assessment results. • Developed Crisis Emergency Response Plan at Pupuk Indonesia Group.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
Pengadaan Procurement	Pelaksanaan pengadaan kelas dunia dengan mencapai *Procurement Excellence.* World-class procurement by achieving Procurement Excellence.	• Penyusunan *Roadmap Procurement Excellence.* • Pengembangan dan implementasi *end-to-end* proses pengadaan melalui aplikasi *Single Platform Procurement System* (ProcureX). • Pengurangan *safety stock* untuk Bahan baku NPK - Mencari sumber baru Bahan Baku NPK. • Pemenuhan BB NPK dengan pembelian spot dan 10% *longterm offtake.* • Prepared a Procurement Excellence Roadmap . • Developed and implemented an end-to-end procurement process through the Single Platform Procurement System (ProcureX) application. • Reduced safety stock for NPK raw materials - Seeking new sources of NPK raw materials. • Fulfilled BB NPK needs through spot purchases and 10% long-term offtake.
	Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Implementing Domestic Component Level (TKDN).	• Mempertahankan realisasi lebih besar dari Target TKDN 40% dari pengadaan barang & jasa. • Maintained realization exceeding the 40% Domestic Component Level (TKDN) target for goods and services procurement.
	Integrasi kriteria keberlanjutan ke dalam proses pengadaan. Integrating sustainability criteria into the procurement process.	• Penyusunan *Roadmap Sustainable Procurement.* • Developed a Sustainable Procurement Roadmap.
	Peningkatan visibilitas data *material sparepart* Pupuk Indonesia Group. Improving the visibility of Pupuk Indonesia Group spare part material data.	• Pembuatan *Dashboard Material* Pupuk Indonesia Group. • Pembuatan *rating spare part availability.* • Created a Pupuk Indonesia Group Material Dashboard. • Created a spare part availability rating.
	Implementasi standardisasi (kataloging) jasa/ *service.* Implementing service standardization (cataloging).	• Pelaksanaan program kataloging jasa/*services.* • Implemented the service cataloging program.
	Meningkatkan optimalisasi nilai persediaan *Spare Part & Material* (MRO) Pupuk Indonesia Group. Improving optimization of Pupuk Indonesia Group's Spare Parts & Materials (MRO) inventory.	• *Scale up* program LCM sesuai dengan matriks kualifikasi material. • *Monitoring* perubahan status material PD V1 dan *Obsolete* per triwulan. • Scale up the LCM program according to the material qualification matrix. • Monitored changes in PD V1 and Obsolete material status quarterly.
Distribusi Distribution	Peningkatan visibilitas proses distribusi Pupuk dengan pemantauan secara digital dan terpusat. Increased visibility of the fertilizer distribution process with digital and centralized monitoring.	• Penambahan Pemasangan CCTV untuk Gudang Penyangga sebanyak 144 Gudang, sehingga target yang terpasang di tahun 2025 adalah sebanyak 309 Gudang. • Pengimplementasian aplikasi *warehouse management system* (APGX) di gudang penyangga lini II dan lini III. • Installed 144 additional CCTV cameras in buffer warehouses, reaching the target of 309 warehouses by 2025. • Implemented the warehouse management system (APGX) application in line II and line III buffer warehouses.
	Peningkatan kualitas hasil pengantongan lini 2 melalui standardisasi sarana gudang pengantongan. Improving the quality of bagging line 2 through standardizing bagging warehouse facilities.	• Penambahan klausul standar sarana/fasilitas gudang Lini II pengantongan pada kontrak pengadaan JP3. • Pemenuhan *grade* minimal gudang Lini II pengantongan (*Grade* B). • Added a standard clause for facilities/facilities for line II packing warehouses to the JP3 procurement contract. • Met the minimum grade for line II packing warehouses (Grade B).
	Efisiensi logistik: *Distribution cost to sales* Rp480.742/ton. Logistics efficiency: Distribution cost to sales Rp480,742/ton.	• Melakukan *review* kapabilitas dan pencapaian *service level agreement* mitra logistik. • Optimalisasi kombinasi moda sarana/prasarana logistik milik, sewa, dan *partnership.* • Reviewed the capabilities and achievement of service level agreements with logistics partners. • Optimized the mix of owned, leased, and partnered logistics infrastructure.
		• Sinergi internal logistik 25%. • Internal logistics synergy 25%.
		• Memastikan ketersediaan stok subsidi dan non-subsidi. • Ensured the availability of subsidized and non-subsidized stock.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
Pemasaran Marketing	Tercapainya penjualan produk premarketing sehingga produk dapat dikomersialisasikan. Achieving premarketing product sales, enabling commercialization.	• Pembuatan kajian strategi penjualan dan promosi produk *premarketing.* • Pelaksanaan kegiatan promosi pemasaran berupa Demplot, *free sample, farmer meeting,* lomba budidaya. • Pelaksanaan promosi penjualan seperti *Cashback Distributor*, Insentif Kios, *One Day* Promo, dan *free product* untuk penebusan tertentu. • Sosialisasi product *knowledge* produk *pre-marketing* ke tenaga penjualan. • Melakukan koordinasi dengan tim wilayah 1 dan 2 untuk penguatan *sales force* dalam penjualan produk *premarketing.* • Melakukan evaluasi kegiatan penjualan dan promosi produk *pre-marketing* untuk lanjut ke tahap komersialisasi. • Pengenalan produk baru melalui partisipasi dalam pameran produk pertanian. • Prepared sales strategy studies and product promotions for pre-marketing; • Implemented marketing promotional activities such as demonstration plots, free samples, farmer meetings, and cultivation competitions. • Implemented sales promotions such as distributor cashback, kiosk incentives, one-day promotions, and free products for certain purchases. • Disseminated pre-marketing product knowledge to sales personnel. • Coordinated with regional teams 1 and 2 to strengthen the sales force in pre-marketing product sales. • Evaluated pre-marketing product sales and promotion activities to advance to the commercialization stage. • Introduced new products through participation in agricultural product exhibitions.
	Tercapainya penjualan seluruh produk (pupuk dan non-pupuk) untuk pasar ritel Pupuk Indonesia Group sesuai target RKAP Tahun 2025. Achieving sales of all products (fertilizer and non-fertilizer) for the Pupuk Indonesia Group retail market in accordance with the 2025 RKAP target.	• Menyusun kajian STP Produk Ritel Pupuk Indonesia Group. • Menentukan dan memonitor stok di gudang prioritas retail sebanyak 235 unit. • Penjualan ritel dengan skema franco kepada distributor. • Pelatihan *Sales Operation* kepada AAE Penjualan Wilayah. • Pemberian dan perbaikan kompensasi tenaga penjualan berbasis kinerja penjualan yang menarik dan kompetitif. • Penunjukan Distributor Ritel yang kompeten berdasarkan kelompok produk/wilayah. • Implementasi penjualan dengan *term of payment* DF Distributor ritel sebesar 10% dari jumlah Distributor. • *Reward* bonus kepada Distributor atas pencapaian target periodik; *cashback*, bonus, poin, hadiah langsung bagi Pengecer/Kios; poin, undian, hadiah langsung, *free sample* bagi petani. • Implementasi aplikasi penjualan untuk sektor ritel. – • Pelaksanaan program promosi *above the line* (*advertising* dan publikasi melalui media massa) dan below the line (sosialisasi, demplot, uji tanah, dsb.). • *Campaign marketing* yang menyasar komunitas dan *end user* Promosi digital melalui social media "sahabat petani" - Pemberian sponsorship untuk menjalin hubungan baik kepada *stakeholder.* • *Branding* produk retail melalui media promosi seperti *collateral marketing* dan *merchandise* - Melakukan sosialisasi secara masif kepada calon mitra. • Compiled a study of Pupuk Indonesia Group's Retail Product STP. • Determined and monitored stock in 235 priority retail warehouses. • Retail sales using a franco scheme for distributors. • Sales Operations training for Regional Sales AAEs. • Provided and improved sales force compensation based on attractive and competitive sales performance. • Appointed competent Retail Distributors based on product groups/ regions. • Implemented sales with a DF payment term for retail Distributors of 10% of the total number of Distributors. • Bonus rewards to Distributors for achieving periodic targets: cashback, bonuses, points, direct prizes for Retailers/Kiosks; points, raffles, direct prizes, free samples for farmers. • Implemented a sales application for the retail sector. – • Implemented above-the-line promotional programs (advertising and publication through mass media) and below-the-line (socialization, demonstration plots, soil testing, etc.). • Marketing campaigns targeting communities and end users • Digital promotions through social media platforms such as "farmers' friends" - Sponsorships to build good relationships with stakeholders and partners. • Branding of retail products through promotional media such as collateral marketing and merchandise - Conducting extensive outreach to potential partners.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
Produksi Production	Tercapainya penjualan pupuk komersial serta meningkatkan monitoring transaksi kepada konsumen. Achieving commercial fertilizer sales and improving transaction monitoring for consumers.	• Mengklasifikasikan konsumen/distributor dalam kelas tertentu. • Menyusun prosedur atau tata tertib terkait dengan klasifikasi konsumen/distributor di sektor Korporasi. • Menetapkan klasifikasi konsumen/distributor pada tahun berikutnya. • Implementasi aplikasi penjualan untuk sektor komersial. • Classified consumers/distributors into specific classes. • Developed procedures or regulations related to consumer/distributor classification in the Corporate sector. • Determined consumer/distributor classifications for the following year. • Implemented sales applications for the commercial sector.
		• Memberikan dan memenuhi kebutuhan informasi pelanggan secara tanggap dan tepat. • Melakukan penyelesaian keluhan pelanggan atas kendala produk dengan melibatkan unit kerja terkait. • Evaluasi dan tindak lanjut dari *customer satisfaction and loyalty*. • Provided and fulfilled customer information needs in a responsive and accurate manner. • Resolved customer complaints regarding product issues by involving relevant work units. • Evaluated and followed up on customer satisfaction and loyalty.
		• Melakukan penjajakan *long term contract* kepada *customer* potensial urea dan amonia. • Explored long-term contracts with potential urea and ammonia customers.
		• Menambah referensi *database* potensi pasar domestik dan internasional. • Melakukan analisis pasar secara berkala untuk memahami tren harga, permintaan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pasar sehingga dapat membantu dalam perencanaan strategi penjualan. • Melakukan Kajian Riset Pasar baik dengan *desk study* maupun dengan konsultan. • Berkoordinasi intensif dengan Anper untuk perhitungan COGS yang optimal. • Added a database of references on domestic and international market potential. • Conducted regular market analysis to understand price trends, demand, and other factors influencing the market, which can assist in planning sales strategies. • Conducted market research studies through desk studies and with consultants. • Coordinated closely with the Operations Manager for optimal COGS calculations.
	Tercapainya penjualan pupuk komersial melalui *Channel Key Account.* Achieving commercial fertilizer sales through Channel Key Accounts.	• Penjualan produk korporasi melalui *channel Key Account.* • Bersama unit kerja terkait meninjau potensi untuk melakukan *up selling* dan *cross selling* terhadap produk yang biasa dibeli oleh tiap *account.* • Terselenggaranya *customer gathering.* • Sold corporate products through Key Account channels. • Collaborated with relevant work units to review potential up-selling and cross-selling of products typically purchased by each account. • Organized customer gatherings.
	Tercapainya pendapatan *circular economy.* Achieving circular economy income.	• Memperoleh pasar baru untuk meningkatkan penjualan produk Amonia, *Gypsum, Petrocas*, NCG, *Purified Gypsum*, CO2 Cair, Asam Sulfat, Asam Fosfat, AlF3, HCl, CO, dan H2 sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. • Obtained new markets to increase sales of Ammonia, Gypsum, Petrocas, NCG, Purified Gypsum, Liquid CO2, Sulfuric Acid, Phosphoric Acid, AlF3, HCl, CO, and H2, thereby providing added value to the company.
	Agrosolution untuk membangun keterikatan pelanggan. Agrosolution to build customer engagement.	• Implementasi *Project Agrosolution* di 500.000 Ha setara dengan penjualan pupuk non-subsidi sebesar 179.401 ton melalui sinergi kerja dengan BUMN seperti Bulog, PTPN, RNI dan Perhutani untuk meningkatkan produktivitas pada beberapa komoditas seperti padi, jagung, tebu, sawit, kopi dan lain-lain. • Implemented the Agrosolution Project across 500,000 hectares, equivalent to the sale of 179,401 tons of non-subsidized fertilizer through synergy with state-owned enterprises (BULOG), PTPN (State-Owned Enterprises), RNI (National Institute of Natural Resources), and Perhutani (Perhutani). This collaboration aimed to increase productivity in several commodities, including rice, corn, sugar cane, palm oil, coffee, and others.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
Pengembangan Bisnis Business Development	Implementasi *Streamlining* Anak, Cucu Perusahaan dan Afiliasi di lingkungan Pupuk Indonesia Group sesuai hasil yang ditetapkan. Implementing Streamlining of Subsidiaries, Subsidiaries, and Affiliates within the Pupuk Indonesia Group in accordance with established outcomes.	• Melanjutkan pengembangan Lini Bisnis Industrial Chemical dengan mengakuisisi sejumlah entitas untuk bergabung sebagai anggota *Subholding*. • Aksi korporasi untuk penyederhanaan struktur kepemilikan saham di PT Pupuk Indonesia Utilitas, PT Pupuk Indonesia Pangan dan PT Rekayasa Industri. • Aksi korporasi pengisian anggota *sub holding* sesuai dengan hasil kajian implementasi pembentukan *sub holding*. • Peningkatan kinerja Anak dan Cucu Perusahaan melalui restrukturisasi proses bisnis dan/atau keuangan. • Continued development of the Industrial Chemical Business Line by acquiring several entities to join as members of the Subholding. • Corporate actions to simplify the share ownership structure of PT Pupuk Indonesia Utilitas, PT Pupuk Indonesia Pangan, and PT Rekayasa Industri. • Corporate actions to fill subholding members in accordance with the results of the implementation study of the subholding formation. • Improved the performance of Subsidiaries and their Subsidiaries through restructuring of business and/or financial processes.
	Ekspansi portofolio produk sesuai potensi pasar terutama industri kimia yang potensial. Expanding the product portfolio in line with market potential, particularly in the chemical industry.	• Melakukan kerja sama/integrasi vertikal untuk pengembangan bisnis baik dengan perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri serta penyelesaian kajian kelayakan bersama mitra investasi dan ditandatanganinya dokumen komitmen *supply gas* untuk pabrik methanol. • Collaboration/vertical integration for business development with both domestic and foreign companies, as well as completion of feasibility studies with investment partners and signing of gas supply commitment documents for the methanol plant.
	Optimalisasi pabrik yang kurang efisien melalui digitalisasi/*revamp* dan/atau pembangunan pabrik baru serta mendorong pengurangan emisi karbon dengan target kapasitas Urea 8,8 Jt ton dan NPK 4,6 jt ton. Optimizing inefficient factories through digitalization/revamping and/or building new plants, while encouraging carbon emission reductions with a target capacity of 8.8 million tons of urea and 4.6 million tons of NPK.	• Pembangunan pabrik Pusri IIIB. • Penyelesaian Studi lahan dan Dokumen Pengadaan Infrastruktur Amurea Papua Barat. • Pembangunan Pabrik NPK Nitrat di PKC. • Persiapan pembangunan Phonska VI PKG dan NPK Nitrat PKT. • Construction of the Pusri IIIB plant. • Completed of land studies and infrastructure procurement documents for Amurea, West Papua. • Construction of the NPK Nitrate Plant at PKC. • Prepared for the construction of Phonska VI PKG and NPK Nitrate PKT.
	Memperkuat *Circular Economy* serta mendorong pengurangan emisi karbon. Strengthening the Circular Economy and encouraging carbon emission reductions.	• Pembangunan Soda Ash PKG dan PKT. • Construction of Soda Ash PKG and PKT.
	Terjaganya kebutuhan pasokan gas untuk pabrik eksisting sebesar 751,6 BBTUD dan pengembangan pabrik baru. Maintaining gas supply requirements of 751.6 BBTUD for existing plants and developing new plants.	• Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pemasok gas bumi untuk mendapatkan komitmen pasokan gas dengan harga kompetitif. • Berkoordinasi dengan pemerintah perihal perencanaan *supply demand* dan alokasi gas dalam memenuhi kebutuhan gas untuk pengembangan pabrik ammonia-urea dan methanol. • Coordinated with the Ministry of Energy and Mineral Resources, SKK Migas, and natural gas suppliers to secure gas supply commitments at competitive prices. • Coordinated with the government regarding supply-demand planning and gas allocation to meet gas needs for the development of ammonia-urea and methanol plants.
	Peningkatan sinergi anak perusahaan dalam hal proyek investasi pengembangan untuk meningkatkan profitabilitas anak perusahaan Pupuk Indonesia Group. Enhancing subsidiary synergy in investment development projects to improve the profitability of Pupuk Indonesia Group subsidiaries.	• Melaksanakan proses penunjukan langsung di lingkungan Pupuk Indonesia Group untuk pelaksanaan proyek Soda Ash PKT, Soda Ash PKG, Amurea Papua Barat PKT, NPK Nitrat PKC, NPK Nitrat PKT dan Pusri-IIIB. • Implemented direct appointment processes within the Pupuk Indonesia Group for the Soda Ash PKT, Soda Ash PKG, Amurea West Papua PKT, NPK Nitrate PKC, NPK Nitrate PKT, and Pusri-IIIB projects.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
	Mendukung pencapaian target *net zero emission* melalui partnership dengan mitra strategis global. Supporting the achievement of net-zero emissions targets through partnerships with global strategic partners.	• *Pre-Feasibility Study* atau *Joint Development Study Agreement* antara PI dan Pertamina untuk pengembangan *Carbon Capture and Storage* (CCS). • *Pre-Feasibility Study* antara PI dan *Chevron Energy* untuk pengembangan *Carbon Capture and Storage* (CCS). • *Bankable Feasibility Study* dan FEED antara PI, TOYO dan ITOCHU untuk pengembangan green hybrid green ammonia di PIM. • Pre-Feasibility Study or Joint Development Study Agreement between PI and Pertamina for the development of Carbon Capture and Storage (CCS). • Pre-Feasibility Study between PI and Chevron Energy for the development of Carbon Capture and Storage (CCS). • Bankable Feasibility Study and FEED between PI, TOYO, and ITOCHU for the development of green hybrid green ammonia at PIM.
	Memperoleh peningkatan skor ESG *rating* dari tahun sebelumnya. Achieving an increase in ESG rating scores from the previous year.	• Implementasi *framework Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) di Perusahaan. • ESG *Rating Assessment* oleh lembaga rating global yang mempunyai reputasi yang baik. • Implemented of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) framework within the Company. • ESG Rating Assessment by a reputable global rating agency.
	Peningkatan *sustainability* melalui implementasi program dekarbonisasi dalam rangka mendukung pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emission* (NZE) serta Penurunan emisi karbon Pupuk Indonesia Group sebesar 1,66 jt ton CO_2 eq. Improving sustainability by implementing decarbonization programs to support the achievement of the Nationally Determined Contribution (NDC) and Net Zero Emission (NZE) targets, as well as reducing Pupuk Indonesia Group's carbon emissions by 1.66 million tons of CO_2 eq.	• Perbaruan *roadmap* dekarbonisasi. • Pelaksanaan program NBS dengan target luas lahan sampai dengan 800 Ha. • Pengembangan sistem manajemen data emisi karbon Pupuk Indonesia Group. • Updated decarbonization roadmap. • Implemented the NBS program with a target land area of up to 800 hectares. • Developed the Pupuk Indonesia Group's carbon emissions data management system.
	Tercapainya progres investasi pengembangan sesuai dengan target RKAP (*on time, on budget & on schedule*) Achieving development investment progress in accordance with the RKAP targets (on time, on budget, and on schedule).	• Implementasi SI *project management* (SI On track) di seluruh Anak Perusahaan Pemilik *Project.* • Implemented SI project management (SI On Track) across all Project Owner Subsidiaries.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
Riset Research	Meningkatkan keterikatan konsumen terhadap produk unggulan. Increasing consumer engagement with superior products.	• *Advance Fertilizer* berbasis NPK untuk pangan dan hortikultura dengan TKR 5. • *Controlled Release Fertilizer* berbasis NPK untuk hortikultura dengan TKR 6. • Pengembangan pupuk nano Nitrogen (TKR 5) & nano Phosphate (TKR 4) untuk peningkatan efisiensi pemupukan. • Uji skala rumah kaca dan *enhancement* mikroba BioNitrogen menggunakan metode Omics untuk mencapai TKR 4. • Riset *Product-Market Fit* terhadap produk/teknologi/layanan baru dengan skor penerimaan pelanggan > 4. • NPK-based Advanced Fertilizer for food and horticulture with a TKR of 5. • NPK-based Controlled Release Fertilizer for horticulture with a TKR of 6. • Developed nano-nitrogen (TKR 5) and nano-phosphate (TKR 4) fertilizers to increase fertilizer efficiency. • Greenhouse-scale testing and microbial enhancement of BioNitrogen using Omics methods to achieve a TKR of 4. • Product-Market Fit research for new products/technologies/services with a customer acceptance score > 4.
	Transformasi *Digital & World Class Capability.* Transforming Digital & World-Class Capability.	• Implementasi *Precision Farming* untuk Padi, Jagung, Kelapa Sawit dan Tebu (*mapping* 282.000 Ha & *deployment* 28.200 Ha. • Optimasi akurasi (>70%) sistem klasifikasi lahan & fase tanam padi, jagung dan tebu seluruh Indonesia basis data geospasial. • *Soil Sensing Kit* deteksi hara tanah dan tanaman untuk identifikasi N, P dan K akurasi mencapai > 80%. • Implemented Precision Farming for Rice, Corn, Oil Palm, and Sugarcane (mapping 282,000 hectares and deployment 28,200 hectares) . • Optimized the accuracy (>70%) of the land classification system and planting phases for rice, corn, and sugarcane throughout Indonesia using a geospatial database. • Soil Sensing Kit for soil and plant nutrient detection for N, P, and K identification with accuracy reaching >80%.
	Memperkuat R&D *Operating Model* dan organisasi serta *research institute*, riset pasar, dan advokasi kebijakan. Strengthening the R&D Operating Model and organization, as well as research institutes, market research, and policy advocacy.	• Utilisasi *platform* dan kolaborasi dengan MIT Industrial Liaison Program untuk peningkatan kapabilitas, kemitraan, dan kompetensi lingkup Pupuk Indonesia Group. • Utilized the platform and collaboration with the MIT Industrial Liaison Program to enhance capabilities, partnerships, and competencies within the Pupuk Indonesia Group.
	Menurunkan tingkat emisi karbon PT Pupuk Indonesia Group sesuai target NDC Pemerintah Indonesia. Reducing PT Pupuk Indonesia Group's carbon emissions in line with the Indonesian Government's National Development Planning (NDC) targets.	• Penyempurnaan dan *launching* Indeks Pertanian Berkelanjutan berbasis 38 provinsi di Indonesia. • Kajian Model Perhitungan Emisi *Scope* 3 untuk Sektor Pertanian. • Refined and launched the Sustainable Agriculture Index based on 38 provinces in Indonesia. • Study of the Scope 3 Emissions Calculation Model for the Agricultural Sector.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
SDM HC	Mengakuisisi *World Class Talent.* Acquiring World-Class Talent.	• Merancang struktur organisasi untuk menghadapi pertumbuhan investasi dan diversifikasi bisnis. • Implementasi penyelarasan *grading* sesuai dengan sistem *grading* yang telah ditetapkan oleh PI. • Perencanaan kapasitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. • Designed an organizational structure to address investment growth and business diversification. • Implemented grading alignment in accordance with the grading system established by PI. • Capacity planning in accordance with company needs.
		• Rasio *Talent Core* : *Supporting* sebesar 65:35. • Pemenuhan gap kompetensi karyawan 90%. • Pengisian karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama untuk posisi kritikal di perusahaan dengan target 90% (*core* dan manajemen risiko) melalui program *talent acquisition* yang tepat. • Pelaksanaan program *talent selection* dengan mengutamakan keberagaman talenta dalam *nominated talent* di perusahaan. • Supported Talent Ratio Core of 65:35. • Fulfilled 90% of employee competency gaps. • Aligned Employee with organizational needs, especially for critical positions within the Company, with a target of 90% (core and risk management) through an appropriate talent acquisition program. • Implemented a talent selection program that prioritizes diversity among nominated talent within the company.
		• Pengukuran kompetensi untuk karyawan terutama di fungsi produksi, pengembangan, penjualan ritel, penjualan korporasi, *project management*, dan bisnis global. • Program pengembangan kompetensi berdasarkan hasil pemetaan *gap* kompetensi karyawan di fungsi produksi, pengembangan, penjualan ritel, penjualan korporasi, *project management*, dan bisnis global. • Competency assessment for employees, particularly in production, development, retail sales, corporate sales, project management, and global business. • Competency development program based on the results of employee competency gap mapping in production, development, retail sales, corporate sales, project management, and global business.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
	Membangun *Performance Driven Culture.* Building a Performance-Driven Culture.	• Mendorong pemimpin untuk menumbuhkan budaya kinerja tinggi melalui dialog kinerja (lanjutan). • Meningkatkan program pengembangan bagi pemimpin terutama dalam program *driving innovation* dan *change management.* • Encouraged leaders to cultivate a high-performance culture through performance dialogues (continued) . • Improved development programs for leaders, particularly those focused on driving innovation and change management.
		• Meningkatkan pemahaman karyawan terkait dengan budaya *safety* dan budaya risiko. • Implementasi AKHLAK *Culture Journey* dan *Respectful Workplace Policy.* • Mendorong pemimpin untuk menumbuhkan budaya kolaboratif sejalan dengan AKHLAK *Culture Journey.* • Implementasi *Roadmap Inclusive Workplace* (lanjutan). • Meningkatkan *exposure* dengan melibatkan karyawan ke dalam proyek strategis perusahaan. • Improved employee understanding of safety and risk culture. • Implemented the AKHLAK Culture Journey and Respectful Workplace Policy • Encouraged leaders to foster a collaborative culture in line with the AKHLAK Culture Journey. • Implemented the Inclusive Workplace Roadmap (continuing). • Increased employee exposure by involving employees in strategic Company projects.
		• *Cascading alignment* antara indikator kinerja di *Holding* dengan Anak Perusahaan selaras dengan penetapan target KPI Manajemen, termasuk antara atasan dan anggota tim. • Merancang program *performance dialogue* untuk meningkatkan produktivitas Perusahaan. • Peningkatan program *performance recognition* berbasis kinerja individu. • Cascaded alignment between performance indicators at the Holding Company and its subsidiaries, in line with Management's KPI targets, including between superiors and team members. • Designed a performance dialogue program to increase Company productivity. • Improved individual-based performance recognition programs.
	Implementasi *Roadmap Human Experience Management.* Implementing a Human Experience Management Roadmap.	• Pemanfaatan dan peningkatan utilitas HCIS *Single Platform* (PI Smart) untuk analisa dan proses pengambilan keputusan bidang SDM melalui pemanfaatan HC *Dashboard & Analytic* berbasis teknologi AI. • Pemanfaatan Sistem HCIS *Single Platform* (PISmart) modul *Career Planning* untuk mendukung perencanaan karir individu berbasis kompetensi Mengembangkan sistem untuk mendukung implementasi rencana karir individu berbasis kompetensi. • Mengembangkan program pengembangan karir (fbi) bagi *talent* muda. • Mengembangkan dan menjalankan strategi EVP yang berfokus pada *Employee Experience* untuk meningkatkan *Employer Branding.* • Utilized and enhanced the utility of the HCIS Single Platform (PI Smart) for HR analysis and decision-making through the use of AI-based HC Dashboard & Analytics. • Utilized the HCIS Single Platform (PISmart) Career Planning module to support competency-based individual career planning. Developing a system to support the implementation of competency-based individual career plans. • Developed a career development program (FBI) for young talent. • Developed and implemented an EVP strategy focused on the Employee Experience to enhance Employer Branding.
		• Evaluasi efektivitas Implementasi HC *Shared Service.* • Evaluated the effectiveness of the HC Shared Service implementation.
		• Implementasi penyelarasan total *reward* di *Holding* dan Anak Perusahaan. • Implemented total reward alignment across the Holding Company and Subsidiaries.
		• Penyelarasan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Anak Perusahaan • Aligned Company Regulations (PP) and Collective Labor Agreements (PKB) of Subsidiaries
	Meningkatkan kematangan pengelolaan SDM (*human capital management maturity level*) secara berkelanjutan, berdasarkan Arsitektur SDM (*Human Capital Architecture*) BUMN. Sustainably improving the maturity level of human capital management (HRM), based on the State-Owned Enterprises (SOE) Human Capital Architecture.	• Tindak Lanjut Hasil *Human Capital Maturity Assessment.* • Melakukan evaluasi sistem pengelolaan SDM yang diselaraskan dengan Arsitektur SDM (*Human Capital Architecture*) BUMN. • Followed-up on Human Capital Maturity Assessment Results. • Evaluate HC management systems aligned with the SOE Human Capital Architecture.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
Manajemen Risiko Risk Management	Tersusunnya kebijakan dan infrastruktur ERM. Developing ERM policies and infrastructure.	• Menyempurnakan kebijakan dan infrastruktur ERM sesuai dengan *area of improvement* dari hasil penilaian *risk maturity index* dan *roadmap* penerapan manajemen risiko dari *project* penguatan ERM. • Improved ERM policies and infrastructure in accordance with areas of improvement from the risk maturity index assessment and the risk management implementation roadmap from the ERM strengthening project.
	Tersusunnya Strategi Risiko RKAP 2026 sesuai dan relevan dengan kebijakan strategi, pengambilan sikap risiko dan RAS dari KBUMN. Formulating the 2026 RKAP Risk Strategy in accordance with and relevant to the strategic policies, risk management, and RAS of the State-Owned Enterprises (KBUMN).	• Melakukan penyusunan strategi risiko atas RKAP 2026 sesuai dengan APS RKAP 2026 dari KBUMN. • Melakukan analisis dan evaluasi atas realisasi strategi risiko dan profil risiko utama konsolidasi. • Developed a risk strategy for the 2026 RKAP in accordance with the 2026 RKAP APS from the State-Owned Enterprises (KBUMN). • Analyzed and evaluated the implementation of the risk strategy and the consolidated main risk profile.
	Tercapainya pengelolaan risiko pada Unit Strategis. Achieving risk management in Strategic Units.	• Melakukan *strategic risk management* dengan menggunakan *framework project risk management & financing* yang berperan dalam pengambilan. • Conducted strategic risk management using a project risk management and financing framework that plays a role in decision-making.
	Terselenggaranya pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan Anak Perusahaan. Implementing integrated risk management with subsidiaries.	• Melakukan analisis dan evaluasi risiko terintegrasi. • Conducted integrated risk analysis and evaluation.
Keuangan dan Akuntansi Finance and Accounting	Mempertahankan kondisi keuangan perusahaan yang baik dengan target *Interest Bearing Debt to* EBITDA, *Interest Bearing Debt to Invested Capital* serta rating perusahaan dengan predikat 'AAA(idn) sesuai RKAP 2025. Maintaining the Company's sound financial condition with targets for Interest-Bearing Debt to EBITDA, Interest-Bearing Debt to Invested Capital, and a Company rating of 'AAA(idn)' in accordance with the 2025 RKAP.	• PTPI dan/atau Anak Perusahaan menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS), efek lainnya, dan/atau instrumen pasar modal lainnya untuk membantu optimalisasi *capital structure* Pupuk Indonesia Group yang bergantung dengan kondisi pasar dan kebutuhan Pupuk Indonesia Group. Dana hasil emisi dapat diteruskan kepada Anak Perusahaan melalui Pinjaman Pemegang Saham. • Negosiasi dengan perbankan terkait *terms & condition* yang *favourable* bagi Pupuk Indonesia Group terkait pendanaan. • PTPI and/or its subsidiaries issued debt securities and/or sukuk (EBUS), other securities, and/or other capital market instruments to help optimize the Pupuk Indonesia Group's capital structure, depending on market conditions and the Group's needs. Proceeds from the issuance may be passed on to subsidiaries through shareholder loans. • Negotiated with banks regarding favorable terms and conditions for the Pupuk Indonesia Group funding.
		• Melakukan *annual rating* dari *independent rating agency*. • Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* bidang keuangan antara lain: Investor, OJK, perbankan, KSEI, Wali Amanat dll. • Memberikan masukan dan *review* atas rencana investasi, *merger*, akuisisi dari Anak Perusahaan, khususnya struktur pendanaan. • Koordinasi untuk pendanaan proyek investasi, merger, akuisisi, dan lainnya. • Persiapan atau Implementasi dari proyek investasi pengembangan, merger, akuisisi, dan lainnya. • Melakukan pengelolaan risiko valas dan upaya mitigasinya (termasuk lindung nilai dan lainnya). • Melakukan kajian secara internal dan/atau eksternal untuk mendukung program kerja bidang keuangan . • Rekind melaksanakan negosiasi dengan *stakeholder* terkait proyek PLTU Lombok. • Meminta *review* dari Jamdatun dan BPKP terkait dengan proyek pekerjaan proyek RDMP Balikpapan. • Percepatan proses Divestasi Saham RDM. • Percepatan proses penerbitan SBUJK. • Conducted annual ratings from independent rating agencies. • Communicated and coordinated with financial stakeholders, including investors, the Financial Services Authority (OJK), banks, the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), trustees, etc. • Provided input and review of investment plans, mergers, and acquisitions of subsidiaries, particularly funding structures. • Coordinated funding for investment projects, mergers, acquisitions, and other matters. • Prepared or implemented investment projects, development projects, mergers, acquisitions, and other matters. • Managed foreign exchange risks and mitigate them (including hedging and other measures). • Conducted internal and/or external studies to support financial work programs. • Rekind conducted negotiations with stakeholders related to the Lombok PLTU project. • Requested reviews from Jamdatun and BPKP regarding the Balikpapan RDMP project. • Accelerated the RDM share divestment process. • Accelerated the issuance of SBUJK.

Bidang Field	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan Activity Program
	Meningkatkan Kesehatan keuangan PTPI dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya. Improving the Financial Health of PTPI and its Subsidiaries and Affiliates.	Penyediaan pendanaan dari PTPI kepada Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi, antara lain (namun tidak terbatas pada): • Pemberian pinjaman, pembelian efek bersifat utang/sukuk/ekuitas dari Anak Perusahaan dan/atau skema lainnya. • Optimalisasi pemanfaatan *National Pooling Account* (NPA) untuk transaksi internal antar Pupuk Indonesia Group dan/atau kebutuhan lainnya. • Pembelian/pengalihan/anjak piutang subsidi Anak Perusahaan kepada PTPI dan/atau Lembaga keuangan. • Pemberian pinjaman yang bersifat *equity like.* • Skema pendanaan/treasury/lainnya dalam rangka untuk mendukung *Streamlining.* • Skema pendanaan lainnya. Provided funding from PTPI to Subsidiaries, Subsidiaries, and/or Affiliated Companies, including (but not limited to): • Provision of loans, purchase of debt/sukuk/equity securities from Subsidiaries, and/or other schemes. • Optimizing the utilization of the National Pooling Account (NPA) for internal transactions within the Pupuk Indonesia Group and/or other needs. • Purchase/transfer/factoring of subsidized receivables from Subsidiaries to PTPI and/or financial institutions. • Provision of equity-like loans. • Funding/treasury/other schemes to support Streamlining. • Other funding schemes.
		Penyediaan dan perpanjangan fasilitas kredit modal kerja baik jangka pendek maupun jangka menengah/panjang dengan *term and condition* yang *favourable* bagi Pupuk Indonesia Group. Provided and extended short-term, medium-term, and long-term working capital loan facilities with favorable terms and conditions for the Pupuk Indonesia Group.

Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite Pendukung Direksi pada Tahun Buku

Untuk mendukung efektivitas pengelolaan Perusahaan, Direksi dibantu oleh 6 (enam), yakni: Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Komite *Key Performance Indicators* (KPI), Komite Harga, Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Komite Investasi Pengembangan, dan Komite Talent.

Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi di Perusahaan merupakan forum/komite yang keanggotaannya bersifat *ex officio*, yang berasal dari unsur Direksi dan pejabat eksekutif sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup tugas masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian terhadap kinerja komite pada dasarnya dilakukan melalui evaluasi atas pelaksanaan tugas, kontribusi, dan efektivitas peran anggota komite sesuai jabatan yang melekat, sekaligus menilai efektivitas komite secara kolektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Pendukung Direksi

Mengingat keanggotaan komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi bersifat *ex officio* dan berasal dari unsur Direksi serta pejabat eksekutif sesuai fungsi masing-masing, penilaian atas kinerja komite dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme evaluasi kinerja jabatan yang melekat pada masing-masing anggota. Dalam proses tersebut, Direksi menelaah pelaksanaan tugas komite berdasarkan program kerja, kontribusi terhadap pengambilan keputusan, kualitas rekomendasi, serta tingkat kehadiran dan partisipasi dalam rapat sepanjang tahun buku.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Pendukung Direksi

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, termasuk partisipasi dalam rapat. Direksi menilai bahwa sepanjang tahun 2025, komite-komite tersebut telah berfungsi secara efektif dan memberikan masukan yang konstruktif dalam mendukung pengambilan keputusan Direksi.

Hasil Penilaian Masing-Masing Komite Pendukung Direksi

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan, Direksi didukung oleh 6 (enam) komite, yaitu Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Komite *Key Performance Indicators* (KPI), Komite Harga, Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Komite Investasi Pengembangan, dan Komite Talenta.

Dalam hal ini, Direksi melakukan penilaian terhadap kinerja komite berdasarkan pelaksanaan tuga dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, termasuk partisipasi kehadiran dalam rapat. Melalui mekanisme tersebut, Direksi dapat memastikan bahwa setiap komite menjalankan perannya secara optimal.

Board of Directors' Assessment of the Supporting Committees' Performance during the Fiscal Year

To support the effective management of the Company, the Board of Directors is assisted by 6 (six) committees: the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) Committee, the Key Performance Indicators (KPI) Committee, the Pricing Committee, the Social and Environmental Responsibility (SER) Committee, the Respectful Workplace Policy (RWP) Committee, Investment Development Committee, and the Talent Committee.

The committees that support the Board of Directors' duties in the Company are forums/committees whose membership is ex officio, drawn from the Board of Directors and executive officers according to their respective functions and scope of duties. Therefore, the assessment of committee performance is primarily conducted through an evaluation of their duties, contributions, and effectiveness of the roles of committee members according to their assigned positions, as well as assessing the committee's collective effectiveness in supporting the Board of Directors' duties.

Board of Directors Supporting Committees Performance Assessment Procedure

Given that the membership of the committees that support the Board of Directors' duties is ex officio and drawn from the Board of Directors and executive officers according to their respective functions, the assessment of committee performance is conducted in an integrated manner with the performance evaluation mechanisms inherent to each member. During this process, the Board of Directors reviews the committee duties based on their work programs, contributions to decision-making, the quality of recommendations, and the level of attendance and participation in meetings throughout the fiscal year.

Board of Directors Supporting Committees Performance Assessment Criteria

The Board of Directors evaluates the performance of committees based on their implementation of their assigned duties and responsibilities, including participation in meetings. The Board of Directors assessed that throughout 2025, showed that these committees functioned effectively and provided constructive input to support the Board of Directors' decision-making.

Assessment Results for Each Committee Supporting the Board of Directors

When carrying out its corporate governance functions, the Board of Directors is supported by six committees: the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) Committee, the Key Performance Indicators (KPI) Committee, the Pricing Committee, the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Committee, Investment Development Committee, and the Talent Committee.

In this regard, the Board of Directors assesses committee performance based on the implementation of their assigned duties and responsibilities, including participation in meetings. Through this mechanism, the Board of Directors can ensure that each committee carries out its role optimally.

Sepanjang tahun 2025, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif. Hasil rapat dan rekomendasi yang dihasilkan juga memberikan dukungan bagi Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan.

Throughout 2025, the Board of Directors assessed that the committees under the Board of Directors had carried out their duties and responsibilities effectively and effectively. The meeting results and recommendations also provided support to the Board of Directors in carrying out its corporate governance functions.

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berperan mendukung Direksi dalam menjembatani kepentingan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan sebagai pejabat penghubung. Fungsi tersebut mencakup pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), pengelolaan komunikasi korporat, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat, guna menjaga citra Perusahaan dan mewakili Direksi dalam setiap aktivitas komunikasi eksternal.

Corporate Secretary Performance Assessment

The Corporate Secretary supports the Board of Directors in bridging the Company's interests with stakeholders as a liaison officer. This function includes implementing Good Corporate Governance (GCG), managing corporate communications, and administering policy documents and meeting minutes, to maintain the Company's image and represent the Board of Directors in all external communication activities.

Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh seorang Sekretaris Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

The Corporate Secretary is led by a Corporate Secretary who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, in accordance with Minister of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

Sepanjang tahun 2025, berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan telah menjalankan perannya dengan baik. Adapun aspek KPI Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

In 2025, based on the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) and the implementation of their duties and responsibilities, the Board of Directors assessment is that the Corporate Secretary performed their role satisfactorily. The Corporate Secretary's KPIs are as follows:

KPI Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary KPIs

Perspektif Perspective	No.	*Key Performance Indicators* (KPI) Key Performance Indicators (KPI)	Satuan Unit	Bobot Weight
Financial	1	% Cost Optimization	Persen Percentage	15
	2	% EBITDA Margin	Persen Percentage	10
	3	% Efektivitas Pengelolaan Anggaran Direksi & Effectiveness of the Board of Directors' Budget Management	Persen Percentage	10
Customer	4	# Skor Corporate Reputation	Skor Score	10
	5	# Efektivitas Penanganan Isu Strategis dan Krisis Komunikasi # Effectiveness of Handling Strategic Issues and Crisis Communication	Persen Percentage	5
	6	% *Stakeholder Engagement Satisfaction*	Skor Score	5
	7	% Kepatuhan Penyampaian kepada Regulator % Compliance in Submissions to Regulators	Persen Percentage	5
	8	% Tindak Lanjut atas Arahan Direksi % Follow-up on Board of Directors' Directives	Persen Percentage	5
Internal Business Process	9	% Pelaksanaan RUPS Tahunan Pupuk Indonesia Group % Implementation of Pupuk Indonesia Group's Annual GMS	Persen Percentage	10
	10	% Penyelesaian Rekomendasi Akreditasi Kearsipan % Completion of Archival Accreditation Recommendations	Persen Percentage	5
	11	% Pengelolaan Saluran Komunikasi Perusahaan % Corporate Communication Channel Management	Persen Percentage	10
	12	% Pemenuhan Kegiatan Direksi % Fulfillment of Board of Directors' Activities	Persen Percentage	5
Learning & Growth	13	% *Talent Development Effectiveness*	Persen Percentage	5
Total Bobot Total Weight				100

Penilaian Kinerja Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) berperan mendukung Direksi dalam penyelenggaraan fungsi audit internal Perusahaan. Peran tersebut mencakup penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta penerapan tata kelola Perusahaan, sekaligus pemberian rekomendasi perbaikan yang diperlukan. SPI dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023.

Sepanjang tahun 2025, berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi menilai bahwa SPI telah menjalankan perannya dengan baik. Adapun aspek KPI SPI meliputi:

Internal Audit Unit Performance Assessment

The Internal Audit Unit (IAU) supports the Board of Directors in implementing the Company's internal audit function. This role includes assessing the effectiveness of the internal control system, risk management, and the corporate governance implementation, as well as providing recommendations for necessary improvements. The IAU is led by the Chief Audit Executive, whose appointment and dismissal are made by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, in accordance with Minister of BUMN Regulation No. PER-02/MBU/03/2023.

In 2025, based on the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) and the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors assessment is that the IAU had performed its role effectively. The IAU's KPIs include:

KPI Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Unit's KPI

Perspektif Perspective	No.	*Key Performance Indicators* (KPI) Key Performance Indicators (KPI)	Satuan Unit	Bobot Weight
Financial	1	% *Cost Optimization*	Persen Percentage	15
	2	% EBITDA *Margin*	Persen Percentage	10
Customer	3	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan PIHC % Completion of PIHC Audit Recommendations	Persen Percentage	10
	4	% Laporan Keuangan *Audited* % Audited Financial Report	Persen Percentage	10
	5	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ANPER % Completion of ANPER Audit Recommendations	Persen Percentage	5
Internal Business Process	6	% Pengelolaan WBS % WBS Management	Persen Percentage	15
	7	% Penyelesaian *Test of Design* ICOFR % Completion of ICOFR Test of Design	Persen Percentage	10
	8	# Pelaksanaan PKPT dan Non PKPT # PKPT and Non-PKPT Implementations	Jumlah Total	10
	9	# Penyelesaian AoI *Internal Audit Capability Model* (IACM) # Completions of AoI of Internal Audit Capability Model (IACM)	Jumlah Total	10
Learning & Growth	10	% *Talent Development Effectiveness*	Persen Percentage	5
		Total Bobot Total Weight		100

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information Regarding
The Board of Commissioners and Board of Directors

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolektif kolegial dan menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis kepada Direksi. Proses ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Pada awal tahun, Dewan Komisaris menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pengawasan sekaligus dasar untuk menilai efektivitas peran Dewan Komisaris sepanjang tahun buku.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode *self-assessment*. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan kualitas arahan strategis yang diberikan, sekaligus menjadi landasan bagi penyempurnaan berkelanjutan dalam penguatan tata kelola perusahaan.

Hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan melalui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Atas dasar laporan tersebut, RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan sepanjang tahun buku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian Dewan Komisaris dilakukan melalui metode *self-assessment* sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP.KOM/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Piagam Dewan Komisaris PTPI.

Kriteria Penilaian

Dewan Komisaris pada tahun 2018 telah melakukan penyempurnaan Pedoman Dewan Komisaris sesuai Keputusan No. 07/KEP.KOM/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Piagam Dewan Komisaris PTPI, yang salah satunya mengatur tentang pelaksanaan *self-assessment* kinerja Individu Dewan Komisaris. Implementasi atas kebijakan tersebut dimulai pada tahun 2020. Dewan Komisaris dengan Keputusannya No. 17/KEP. KOM/2020 tanggal 5 Oktober 2020 telah menetapkan Kebijakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perusahaan PTPI.

Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment

Board of Commissioners Assessment

Assessment Procedures

The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted on a collective and collegial basis and forms part of an ongoing evaluation process to ensure the effectiveness of its supervisory function and the provision of strategic direction to the Board of Directors. This process refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

At the beginning of the year, the Board of Commissioners prepares an Annual Work Plan, which serves as a reference for the execution of its supervisory duties and as the basis for assessing the effectiveness of its role throughout the financial year.

As part of the evaluation mechanism, the performance of the Board of Commissioners is assessed through a self-assessment method. This assessment is intended to measure the effectiveness of the supervisory function and the quality of strategic direction provided, while also serving as a basis for continuous improvement in strengthening corporate governance.

The results of the assessment are reported to the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) through the Board of Commissioners' Supervisory Report. Based on this report, the AGMS grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners for the performance of their supervisory duties throughout the financial year, in accordance with the applicable regulations.

Parties Conducting Assessments

The Board of Commissioners' assessment is conducted through a self-assessment method, as stipulated in Board of Commissioners Decree No. 07/KEP.KOM/XI/2018 dated November 2, 2018, concerning the Establishment of the PTPI Board of Commissioners Charter.

Assessment Criteria

In 2018, the Board of Commissioners refined the Board of Commissioners' Guidelines in accordance with Decree No. 07/KEP.KOM/XI/2018 dated November 2, 2018, concerning the Establishment of the PTPI Board of Commissioners Charter, which includes regulations governing the implementation of individual performance self-assessments for the Board of Commissioners. Implementation of this policy began in 2020. The Board of Commissioners, through Decree No. 17/KEP.KOM/X/2020 dated October 5, 2020, established the PTPI Board of Commissioners Performance Measurement and Assessment Policy.

Hasil Penilaian

Hasil *self-assessment* menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis secara kolektif kolegial sepanjang tahun buku. Penilaian tersebut selanjutnya memperoleh penerimaan dari Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan, yang dibuktikan dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan sepanjang tahun buku.

Penilaian Direksi

Prosedur Penilaian

Proses penilaian kinerja Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta Surat Kementerian BUMN No. S-491/MBU/04/2023 tanggal 29 September 2023. Atas dasar ketentuan tersebut, penilaian kinerja Direksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, selaras dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Penilaian tersebut dijalankan melalui *framework* pengelolaan KPI Manajemen Pupuk Indonesia Group yang mencakup tahapan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian. Pada tahap perencanaan, KPI Direksi disusun secara berjenjang dari KPI Direksi kolegial dan Kontrak Manajemen tahunan, lalu dijabarkan ke dalam KPI individu Direksi. Penyusunannya berlandaskan pada RJPP, RKAP, Arahan Pemegang Saham (APS), arahan Dewan Komisaris, struktur organisasi, nomenklatur jabatan, *job profile*, ketetapan Pemegang Saham Mayoritas dan/atau RUPS, katalog *cascading* dan *alignment* KPI, praktik yang berlaku umum (*best practices*) dan/atau *benchmarking*, serta *business specific review*.

Pada tahap monitoring dan evaluasi, capaian KPI Direksi kolegial dan individu Direksi dinilai serta dilaporkan sesuai dengan periode pengukuran yang berlaku. Penilaian kinerja Direksi, baik secara kolegial maupun individual, dilakukan melalui metode *self-assessment*, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap penilaian tingkat pencapaian KPI Direksi kolegial dan individu Direksi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan hasil penilaian kinerja manajemen.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi PTPI dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* oleh masing-masing anggota Direksi berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan dan disepakati pada awal tahun. Penilaian ini mencakup kinerja Direksi secara individual maupun kolegial.

Untuk menjaga objektivitas dan independensi proses penilaian, PTPI melibatkan pihak eksternal independen, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP), yang melaksanakan prosedur yang disepakati atas penilaian tingkat pencapaian KPI Direksi kolegial dan individu Direksi.

Assessment Results

The results of the self-assessment indicate that the Board of Commissioners has carried out its supervisory function and provided strategic direction on a collective and collegial basis throughout the financial year. The assessment has been duly acknowledged by the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), as evidenced by the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners for the performance of their supervisory duties during the financial year.

Board of Directors Assessment

Assessment Procedures

The performance evaluation process of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources, the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, as well as the Letter of the Ministry of SOEs No. S-491/MBU/04/2023 dated 29 September 2023. Based on these provisions, the performance evaluation of the Board of Directors is conducted in an objective, transparent, and accountable manner, in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

The evaluation is carried out through the Pupuk Indonesia Group Management KPI framework, which includes the stages of planning, monitoring and evaluation, as well as assessment. At the planning stage, the Board of Directors' KPIs are structured hierarchically, starting from the collective KPIs of the Board of Directors and the annual Management Contract, and subsequently cascaded into individual KPIs of each Director. The formulation is based on the Long-Term Corporate Plan (RJPP), the Annual Work Plan and Budget (RKAP), Shareholder Directions (APS), directions from the Board of Commissioners, organizational structure, job nomenclature, job profiles, resolutions of the majority shareholder and/or the GMS, KPI cascading and alignment catalogs, generally accepted practices (best practices) and/or benchmarking, as well as business-specific reviews.

At the monitoring and evaluation stage, the achievement of both collective and individual KPIs of the Board of Directors is assessed and reported in accordance with the applicable measurement period. The performance evaluation of the Board of Directors, both collectively and individually, is conducted through a self-assessment method, the results of which are subsequently set out in an Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures issued by a Public Accounting Firm (KAP) regarding the level of achievement of the Board of Directors' KPIs. These evaluation results serve as the basis for determining the overall management performance assessment.

Assessment Conducted By

The performance evaluation of the Board of Directors of PTPI is conducted through a self-assessment mechanism by each member of the Board of Directors based on the Key Performance Indicators (KPI) established and agreed upon at the beginning of the year. This assessment covers both individual and collective performance.

To ensure the objectivity and independence of the evaluation process, PTPI engages an independent external party, namely a Public Accounting Firm (KAP), to perform agreed-upon procedures on the assessment of KPI achievement levels of both the collective Board of Directors and individual Directors.

Hasil pelaksanaan prosedur tersebut dituangkan dalam Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati dan menjadi salah satu dasar dalam evaluasi kinerja Direksi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, serta dilaporkan kepada PT Danantara Asset Management (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali PTPI.

The results of these procedures are presented in an Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures and serve as one of the bases for evaluating the performance of the Board of Directors. The evaluation results are subsequently submitted to the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee and reported to PT Danantara Asset Management (Persero) as the controlling shareholder of PTPI.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian untuk Direksi, terutama berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Ada lima perspektif, yaitu:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia;
2. Inovasi Model Bisnis;
3. Kepemimpinan Teknologi;
4. Pengembangan Investasi;
5. Pengembangan Talenta.

Assessment Criteria

The assessment criteria for the Board of Directors was primarily based on the achievement of established Key Performance Indicators (KPIs). There are five perspectives:

1. Economic and Social Value for Indonesia;
2. Business Model Innovation;
3. Technological Leadership;
4. Investment Development;
5. Talent Development.

Hasil Penilaian

Di tahun 2025, evaluasi kinerja Direksi mencatat capaian skor sebesar 100,17, yang diperoleh berdasarkan penilaian terhadap beberapa aspek berikut:

Assessment Results

In 2025, the Board of Directors' performance evaluation recorded a score of 100.17, based on an assessment of the following aspects:

KPI Direksi Kolegial PTPI Tahun 2025
PTPI Collegial Board of Directors KPI in 2025

Perspektif Perspective		No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Skor (%) Score (%)
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	*Finance*	1	% EBITDA *Margin*	Persen Percentage	65,00	65,59
		2	% *Excess* of ROIC - WACC	Persen Percentage		
	Operation	3	# ESG *Rating*	Skor Score		
		4	% *Plant Availability*	Persen Percentage		
		5	% *Fulfillment of Gas Raw Materials*	BBTUD		
		6	% *Achievement of Commercial Sales Volume*	Persen Percentage		
		7	# *Reduction in Carbon Emission*	Ton CO2 e		
		8	% Penghematan Biaya *Overhead* COGM % Overhead Cost Savings (COGM)	Persen Percentage		
		9	# *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)	*Rate*		
	Social	10	% Penyaluran Pupuk Bersubsidi % Subsidized Fertilizer Distribution	Persen Percentage		
			Sub Total			
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation		11	% Pengembangan Lini Bisnis Baru % New Business Line Development	Persen Percentage	8,00	8,00
		12	% Transformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi % Subsidized Fertilizer Governance Transformation	Persen Percentage		
			Sub Total			
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		13	% *Milestone* Pencapaian Inisiatif Digital	Persen Percentage	5,00	5,00
			Sub Total			
Peningkatan Investasi Investment Increase		14	% *Plant Development Investment*	Persen Percentage	7,00	6,58
			Sub Total			
Pengembangan Talenta Talent Development		15	% HC *Transformation*	Persen Percentage	8,00	7,99
			Sub Total			
Bobot dan Skor KPI Aktif Weight and Active KPI Score					**93,00**	**93,16**
Pencapaian Skor KPI (%) KPI Score Achievement (%)					**100,17**	

Rincian capaian KPI Direksi secara individual pada tahun 2025 selanjutnya dijabarkan lebih lanjut berdasarkan perspektif penilaian dan indikator kinerja utama pada masing-masing direktorat. Uraian berikut menyajikan komposisi KPI, bobot penilaian, serta fokus pengukuran kinerja yang menjadi dasar evaluasi Direksi PTPI sepanjang tahun 2025.

The details of the Board of Directors' individual KPI achievements in 2025 are further described in detail based on the assessment perspectives and key performance indicators of each directorate. The following section presents the KPI composition, assessment weightings, and key performance measurement focus areas that served as the basis for evaluating the performance of PTPI's Board of Directors throughout 2025.

KPI Individu Direktorat Operasi PTPI Tahun 2025
PTPI Director of Operation KPI in 2025

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)
Bersama Joint	1	% EBITDA *Margin*	Persen Percentage	40,00
	2	% Penyaluran Pupuk Bersubsidi % Subsidized Fertilizer Distribution	Persen Percentage	
	3	# *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)	*Rate*	
	4	% *HC Transformation*	Persen Percentage	
		Sub Total		
Direktorat Directorate	5	# ESG *Rating*	Skor Score	60,00
	6	% *Plant Availability*	Persen Percentage	
	7	# *Fulfillment of Gas Raw Materials*	BBTUD	
	8	# *Reduction in Carbon Emission*	Ton CO_2e	
	9	% Penghematan Biaya *Overhead* COGM % Cost Savings on COGM Overhead	Persen Percentage	
	10	% *Milestone* Pencapaian Inisiatif Digital % Milestones of the Digital Initiative	Persen Percentage	
	11	% *Fulfillment of Fertilizer Volume*	Persen Percentage	
	12	% *Plant Utilization*	Persen Percentage	
	13	# Rasio Konsumsi Energi Urea # Urea Energy Consumption Ratio	MMBTU per Ton	
	14	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Follow-up on Audit Results Recommendations	Persen Percentage	
	15	% *Sparepart Management Effectiveness*	Persen Percentage	
		Sub Total		
Total Bobot Total Weight				**100**

KPI Individu Direktorat Keuangan PTPI Tahun 2025
PTPI Director of Finance KPI in 2025

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)
Bersama Joint	1	% EBITDA *Margin*	Persen Percentage	40,00
	2	% Penyaluran Pupuk Bersubsidi % Subsidized Fertilizer Distribution	Persen Percentage	
	3	# *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)	*Rate*	
	4	% *HC Transformation*	Persen Percentage	
		Sub Total		

KPI Individu Direktorat Keuangan PTPI Tahun 2025
PTPI Director of Finance KPI in 2025

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)
Direktorat Directorate	5	% *Excess of* ROIC - WACC	Persen Percentage	60,00
	6	$ *Cashflow From Operation*	Rp Miliar Rp Billion	
	7	% SGA *to Sales*	Persen Percentage	
	8	# *Interest Bearing Debt to EBITDA*	Kali Times	
	9	% Laporan Keuangan *Audited* % Audited Financial Statements	Persen Percentage	
	10	% Penurunan Piutang Usaha Non Pupuk dan Non Amonia % Decrease in Non-Fertilizer and Non-Ammonia Trade Receivables	Persen Percentage	
	11	% *Effective Tax Rate*	Persen Percentage	
	12	% *Strategic Project Financing*	Persen Percentage	
	13	$ Beban Keuangan $ Finance Costs	Rp Miliar Rp Billion	
	14	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Follow-up on Audit Results Recommendations	Persen Percentage	
	15	% Pengelolaan Risiko Selisih Kurs % Foreign Exchange Risk Management	Persen Percentage	
		Sub Total		
Total Bobot Total Weight				**100**

KPI Individu Direktorat SDM dan Umum PTPI Tahun 2025
PTPI Director of HC and General Affairs KPI in 2025

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)
Bersama Joint	1	% EBITDA *Margin*	Persen Percentage	40,00
	2	% Penyaluran Pupuk Bersubsidi % Subsidized Fertilizer Distribution	Persen Percentage	
	3	# *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)	Rate	
	4	% *HC Transformation*	Persen Percentage	
		Sub Total		
Direktorat Directorate	5	# ESG *Rating*	Skor Score	60,00
	6	$ Rasio Produktivitas Finansial Pegawai $ Employee Financial Productivity Ratio	Rp Juta per orang Rp million per person	
	7	% Pemenuhan Portal HC KBUMN % Compliance with the HC KBUMN Portal	Persen Percentage	
	8	% Implementasi *Roadmap* SDM % Implementation of the HC Roadmap	Persen Percentage	
	9	# *Talent Mobility*	Jumlah Orang Total People	
	10	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Follow-up on Audit Results Recommendations	Persen Percentage	
	11	% *Succession Readiness Key Positions*	Persen Percentage	
	12	% *Core & Supporting Talent Ratio*	Persen Percentage	
	13	% Keterisian Manning PI Group % Manning Pupuk Indonesia Group Staffing Levels	Persen Percentage	
	14	% Program TJSL % SER Program	Persen Percentage	
	15	% Penyelarasan dan Simplifikasi DSM Perusahaan % Alignment and Simplification of the Company's DSM	Persen Percentage	
		Sub Total		
Total Bobot Total Weight				**100**

KPI Individu Direktorat *Supply Chain* PTPI Tahun 2025
PTPI Director of Supply Chain KPI in 2025

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)
Bersama Joint	1	% EBITDA *Margin*	Persen Percentage	40,00
	2	% Penyaluran Pupuk Bersubsidi % Subsidized Fertilizer Distribution	Persen Percentage	
	3	# *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)	*Rate*	
	4	% *HC Transformation*	Persen Percentage	
		Sub Total		
Direktorat Directorate	5	% *Excess of* ROIC - WACC	Persen Percentage	60,00
	6	% *Achievement of Commercial Sales Volume*	Persen Percentage	
	7	% Transformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi % Transformation of the Management of Subsidized Fertilizers	Persen Percentage	
	8	$ *Cashflow From* Operation	Rp Miliar Rp Billion	
	9	% SGA *to Sales*	Persen Percentage	
	10	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Follow-up on Audit Results Recommendations	Persen Percentage	
	11	% Efisiensi Biaya Distribusi % Distribution Cost Efficiency	Persen Percentage	
	12	% Penurunan Piutang Usaha Pupuk dan Amonia % Decrease in Non-Fertilizer and Non-Ammonia Trade Receivables	Persen Percentage	
	13	% Efektivitas Tingkat Persediaan Pupuk Urea dan NPK % The Effectiveness of Urea and NPK Fertilizer Stock Levels	Persen Percentage	
	14	$ Sinergi Angkutan PI *Group* $ Pupuk Indonesia Group Freight Synergy	Rp Miliar Rp Billion	
	15	% Program Kemitraan Agrosolution % Agrosolution Partnership Program	Persen Percentage	
		Sub Total		
Total Bobot Total Weight				**100**

KPI Individu Direktorat Teknik dan Pengembangan Bisnis PTPI Tahun 2025
PTPI Director of Technical and Business Development KPI in 2025

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)
Bersama Joint	1	% EBITDA Margin	Persen Percentage	40,00
	2	% Penyaluran Pupuk Bersubsidi % Subsidized Fertilizer Distribution	Persen Percentage	
	3	# *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)	Rate	
	4	% *HC Transformation*	Persen Percentage	
		Sub Total		
Direktorat Directorate	5	# ESG *Rating*	Skor Score	60,00
	6	# *Reduction in Carbon Emission*	Ton CO_2e	
	7	% Pengembangan Lini Bisnis Baru % Development of New Business Lines	Persen Percentage	
	8	% *Plant Development Investment*	Persen Percentage	
	9	% Penyelesaian RPP Anak dan Cucu Perusahaan % Finalization of the Shareholding Structure of Subsidiaries and Grand-Subsidiaries	Persen Percentage	
	10	% Penyelesaian RJPP 2025-2029 Pupuk Indonesia Group % Finalization of the 2025–2029 Long-Term Strategic Plan for the Pupuk Indonesia Group	Persen Percentage	
	11	% *Precise Soil Nutrient Mapping (Agritech)*	Persen Percentage	

KPI Individu Direktorat Teknik dan Pengembangan Bisnis PTPI Tahun 2025
PTPI Director of Technical and Business Development KPI in 2025

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)
	12	% Tingkat Keberhasilan Riset Strategis % Success Rate of Strategic Research	Persen Percentage	60,00
	13	$ Sinergi Proyek Pupuk Indonesia Group $ Pupuk Indonesia Group Project Synergy	Rp Miliar Rp Billion	
	14	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Follow-up on Audit Results Recommendations	Persen Percentage	
		Sub Total		
Total Bobot Total Weight				**100**

KPI Individu Direktorat Manajemen Risiko PTPI Tahun 2025
PTPI Director of Risk Management KPI in 2025

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)
Bersama Joint	1	% EBITDA Margin	Persen Percentage	40,00
	2	% Penyaluran Pupuk Subsidi % Subsidized Fertilizer Distribution	Persen Percentage	
	3	# *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)	*Rate*	
	4	% HC *Transformation*	Persen Percentage	
Direktorat Directorate	5	# ESG Rating	Skor Score	60,00
	6	% Pencapaian Skala Risiko Utama % Key Risk Scale Achievements	Persen Percentage	
	7	% Penanganan Permasalahan Hukum % Handling Legal Issues	Persen Percentage	
	8	% Pencapaian Penilaian GCG Non Pupuk % Non-Fertilizer GCG Assessment Results	Persen Percentage	
	9	% Tindak Lanjut atas Rekomendasi RMI % Follow-up on RMI Recommendations	Persen Percentage	
	10	# Skor KPMR # KPMR Score	Skor Score	
	11	% Pemulihan Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha % Reversal of the Allowance for Trade Receivables	Persen Percentage	
	12	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Follow-up on Audit Results Recommendations	Persen Percentage	
	13	% Penyelarasan dan Simplifikasi DSM Perusahaan % Alignment and Simplification of the Company's DSM	Persen Percentage	
Total Bobot Total Weight				**100**

KPI Individu Direktorat Direktorat Manajemen Aset PTPI Tahun 2025
PTPI Director of Asset Management KPI in 2025

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)
Bersama Joint	1	% EBITDA Margin	Persen Percentage	40,00
	2	% Penyaluran Pupuk Subsidi % Subsidized Fertilizer Distribution	Persen Percentage	
	3	# *Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)	Rate	
	4	% HC *Transformation*	Persen Percentage	
Direktorat Directorate	5	% *Return on Asset*	Persen Percentage	60,00
	6	% Utilisasi Aset *Non Core* % Utilization of Non-Core Assets	Persen Percentage	
	7	$ Nilai Optimalisasi Aset *Non Core* $ Value of Non-Core Asset Optimization	Rp Miliar Rp Billion	
	8	% Penyelesaian Roadmap Strategi Monetisasi Aset *Non Core* % Completion of the Roadmap for the Non-Core Asset Monetization Strategy	Persen Percentage	
	9	% Monetisasi Aset *Non Core Idle* SHS % Monetization of Idle Non-Core Assets SHS	Persen Percentage	
	10	% Pemenuhan Portal Aset KBUMN % Compliance with the KBUMN Asset Portal	Persen Percentage	
	11	% Penyelesaian Kebijakan Manajemen Aset *Non Core* % Completion of Non-Core Asset Management Policy	Persen Percentage	
	12	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Follow-up on Audit Results Recommendations	Persen Percentage	
Total Bobot Total Weight				**100**

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan penetapan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Kementerian BUMN No. SR-98/Wk.MBU.04/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PTPI tahun 2025.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi tidak semata-mata didasarkan pada pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) tahunan. Perusahaan juga mempertimbangkan capaian kinerja jangka pendek dan jangka panjang yang merupakan hasil dari sistem, kebijakan, dan proses bisnis yang telah dibangun secara berkelanjutan.

Dalam menetapkan remunerasi, Perusahaan melakukan kajian komprehensif dengan memperhatikan berbagai indikator, antara lain kinerja keuangan Perusahaan serta pemenuhan kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, aspek kewajaran dibandingkan dengan *peer group* serta keselarasan dengan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan turut menjadi dasar pertimbangan. Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan memberikan penghargaan yang layak dan kompetitif berupa penghasilan yang mampu memotivasi Dewan Komisaris dan Direksi atas kontribusi, peran, dan tanggung jawabnya dalam mendorong kinerja serta keberlanjutan Perusahaan.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

The policy for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company refers to the Minister of BUMN Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of SOEs and the Ministry of BUMN Letter No. SR-98/Wk.MBU.04/08/2024 dated August 23, 2024, concerning the Determination of Remuneration for the Board of Directors and Commissioners of PTPI in 2025.

Procedure for Proposal and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is not solely based on the achievement of annual Key Performance Indicators (KPIs), but also considers short-term and long-term performance achievements resulting from the systems, policies, and business processes that have been developed sustainably.

For determining remuneration, the Company conducts a comprehensive review taking into account indicators, including the Company's financial performance and the fulfillment of reserve requirements as stipulated in applicable laws and regulations, and also fairness compared to peer groups, and alignment with the Company's long-term goals and strategies. Through this policy, the Company provides appropriate and competitive rewards in the form of remuneration that motivates the Commissioners and Directors in their contributions, roles, and responsibilities in driving the Company's performance and sustainability.

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan peraturan BUMN, Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

1. Faktor Skala Usaha;
2. Faktor Kompleksitas Usaha;
3. Tingkat Inflasi;
4. Kondisi dan Kemampuan Perusahaan.

Apabila perhitungan honorarium dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka honorarium yang dipakai adalah sama dengan honorarium tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pemberian kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama;
2. Dengan memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Dewan Komisaris untuk menyiapkan rekomendasi;
3. Usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk pembahasan dan persetujuan dalam RUPS;
4. RUPS memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris. Skema Pemberian Remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

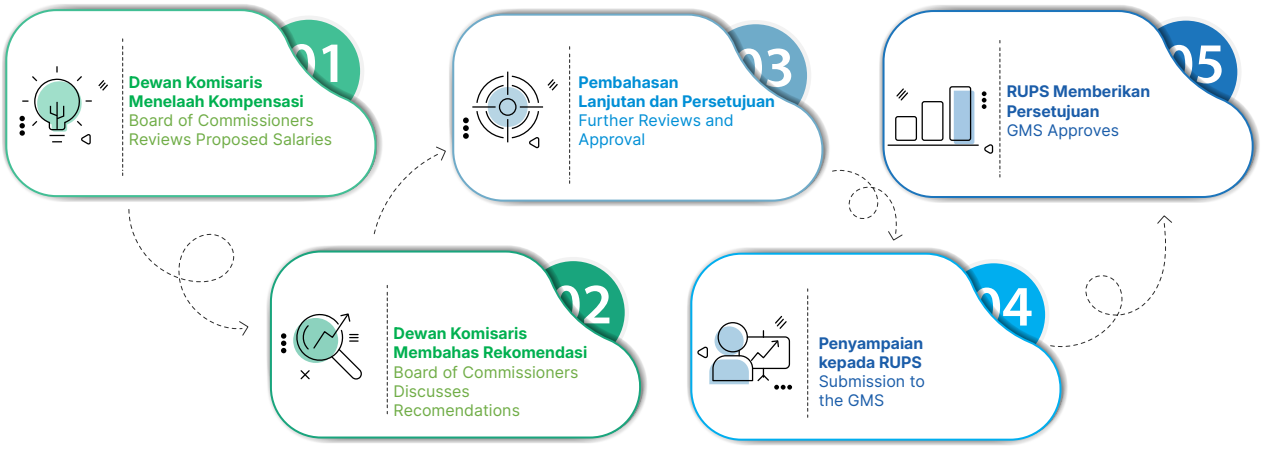
Approval of the Commissioners and Directors remuneration is determined by the GMS. Based on SOE regulations, Shareholders determine adjustments to the remuneration of the Commissioners and Directors by considering:

1. Business Scale Factors;
2. Business Complexity Factors;
3. Inflation Rate;
4. Company Conditions and Capabilities.

If the honorarium calculation takes into account factors that cause the honorarium to be lower than the previous year, the honorarium used is the same as the previous year's honorarium. The compensation mechanism for the Commissioners and Directors is as follows:

1. The Board of Commissioners reviews the compensation offered in the market for the relevant work at other companies with similar business fields and status;
2. Taking into account the Company's business performance and the contributions of each individual, the Board of Commissioners then conducts discussions to prepare recommendations;
3. The proposed remuneration for members of the Board of Commissioners is submitted to the Shareholders for discussion and approval at the GMS;
4. The GMS approves and determines the remuneration for the Board of Commissioners. The Company's Board of Commissioners Remuneration Scheme is as follows:

Prosedur Pengusulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Hingga Penetapan Oleh RUPS
Procedure for Proposing Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors Until Determination by the GMS



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration structure for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Minister of BUMN Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of SOEs. Based on this regulation, the remuneration components for the Board of Commissioners and Board of Directors consist of:

Komponen dan Struktur Remunerasi
Remuneration Components and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Honorarium	**Gaji** Salary
Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut: 1. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama; 2. Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama; 3. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama. Fixed income in the form of money received every month due to his position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following conditions: 1. The honorarium for the President Commissioner is 45% of the President Director's salary; 2. The honorarium for the Vice President Commissioner is 42.5% of the President Director's salary; 3. The honorarium for members of the Board of Commissioners is 90% of the President Commissioner's salary.	Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut: 1. Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh RUPS/Menteri BUMN; 2. Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari gaji Direktur Utama; 3. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Fixed income in the form of money received every month due to his position as a member of the company's Board of Directors, with the following conditions: 1. The President Director's salary is determined using the Ministry of SOE Guidelines; 2. Calculation of the Vice President Director's salary at 90% of the President Director's salary; 3. Calculation of salaries for other Directors is 85% of the salary of the President Director.
Tunjangan Allowances	
Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris, selain honorarium, yang dapat berupa: 1. Tunjangan hari raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali honorarium di setiap tahunnya; 2. Tunjangan transportasi diberikan 20% dari honorarium per bulan; 3. Asuransi purna jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari honorarium dalam 1 (satu) tahun. Income in the form of money or which can be valued in money received at a certain time by members of the Board of Commissioners other than honorarium, which can be in the form of: 1. Holiday Allowance, given a maximum of 1 (one) honorarium each year; 2. Transportation allowance is given at 20% of the monthly honorarium; 3. Post-service insurance, provided with the provision that the premium borne by the Company is a maximum of 25% of the honorarium per year.	Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, selain gaji, yang dapat berupa: 1. Tunjangan hari raya, diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji di setiap tahunnya; 2. Tunjangan perumahan diberikan sebesar Rp27.500.000 per bulan; dan 3. Asuransi purna jabatan, diberikan dengan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari gaji dalam 1 (satu) tahun. Income in the form of money or which can be valued in terms of money received at a certain time by members of the Board of Directors other than salary, which can be in the form of: 1. Holiday Allowance, given a maximum of 1 (one) times the salary each year; 2. Housing allowance is given in the amount of Rp27,500,000 per month; 3. Post-service insurance, provided with the condition that the premium borne by the company is a maximum of 25% of annual salary.
Fasilitas Facilities	
Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: 1. Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (*at cost*); 2. Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Income in the form of facilities and/or benefits and/ or guarantees used/utilized by members of the Board of Commissioners in the context of carrying out duties, authority, obligations and responsibilities based on statutory regulations, which can be in the form of: 1. Health facilities, provided in the form of reimbursement for medical costs (at cost); 2. Legal assistance facilities, provided if necessary, in the event of actions/deeds for and on behalf of their position related to the Company	Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: 1. Fasilitas kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas, termasuk biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai faktor jabatan; 2. Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (*at cost*); 3. Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Directors in the context of carrying out duties, authority, obligations and responsibilities based on statutory regulations, which can be in the form of: 1. Vehicle facilities, provided with 1 (one) official vehicle along with maintenance and operational costs with specifications and standards according to position factors; 2. Health facilities, provided in the form of reimbursement for medical costs (at cost); 3. Legal assistance facilities, provided if necessary, in the event of actions/deeds for and on behalf of their position related to the Company.

Komponen dan Struktur Remunerasi
Remuneration Components and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Insentif Kinerja Performance incentives	
Insentif Kinerja merupakan penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan Insentif Kinerja kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian *Key Performance Indicators* melebihi 100%.	1. Insentif Kinerja merupakan penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. 2. Insentif Kinerja dapat diberikan sebagai tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term incentive*/LTI). Perusahaan dapat memberikan Insentif Kinerja kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian *Key Performance Indicators* melebihi 100%.
Performance incentives is income which is an award given to members of the Board of Commissioners if they make a profit and do not experience accumulated losses. The company can provide bonuses to members of the Board of Commissioners based on the GMS decision in ratifying the annual report if the realization of the achievement of Key Performance Indicators exceeds 100%.	1. Performance incentives is income which is an award given to members of the SOE Board of Directors if they make a profit and do not experience accumulated losses. 2. Bonuses can be given in addition to long-term incentives (LTI). The company can provide bonuses to members of the Board of Directors based on the GMS decision in ratifying the annual report if the realization of the achievement of Key Performance Indicators exceeds 100%.
Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris. Performance incentives refer to compensation granted as a reward to members of the Board of Commissioners.	Insentif kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. Performance incentives, namely income which is an award given to members of the Board of Directors if there is an increase in performance even though they are still experiencing losses or accumulated losses.
Perhitungan insentif kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 1. Insentif kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari insentif kinerja Direktur utama; 2. Insentif kinerja Wakil komisaris utama sebesar 42,5% dari insentif kinerja Direktur Utama; 3. Anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 90% dari insentif kinerja Komisaris Utama. The calculation of performance incentives for members of the Board of Commissioners is as follows: 1. Calculation of performance incentives for the President Commissioner is 45% of the performance incentives President Director's salary; 2. The performance incentives for the Vice President Commissioner is 42.5% of the performance incentives President Director's salary; 3. The performance incentives for members of the Board of Commissioners is 90% of the performance incentives President Commissioner's salary.	Perhitungan insentif kinerja bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut: 1. Insentif kinerja Direktur Utama ditetapkan oleh RUPS/Menteri BUMN; 2. Insentif kinerja Wakil Direktur Utama sebesar 90% insentif kinerja gaji Direktur Utama; 3. Insentif kinerja anggota Direksi lainnya sebesar 85% insentif kinerja gaji Direktur Utama. The calculation of performance incentives for members of the Board of Directors is as follows: 1. The President Director's performance incentives is determined using the Ministry of SOE guidelines; 2. Calculation of performance incentives for the Vice President Director is 90% of the performance incentives for the President Director's salary; 3. Calculation of performance incentives for other Directors is 85% of the performance incentives for the President Director's salary.
Pajak atas Honorarium/Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Tax on Honorarium/Salaries, Allowances, and Facilities	
Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas insentif kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris. Covered and borne by the Company, while taxes on performance incentives for the Board of Commissioners are covered and borne by each member of the Board of Commissioners.	Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas insentif kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi. Covered and borne by the Company, while taxes on performance incentives for Directors are covered and borne by each member of the Board of Directors.

Kebijakan Dasar Terkait Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;

Basic policy regarding indicators for determining the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration

Determination of remuneration in the form of salary or honorarium, allowances and permanent facilities is carried out by considering:

1. Business scale factor;
2. Business complexity factor;
3. Inflation rate;
4. Company's financial condition and capabilities;

5. Tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis; dan
6. Faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Penghasilan yang berupa insentif kinerja/ LTI yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Faktor kinerja;
2. Kemampuan keuangan Perusahaan;
3. Tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis; dan
4. Faktor lain yang relevan.

Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025

Penetapan penghasilan untuk Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Surat Kementerian BUMN No. SR-98/Wk.MBU.04/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PTPI tahun 2025.

Realisasi remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2025 mencakup sebagai berikut:

5. Generally accepted income levels in similar industries; and
6. Other relevant factors, and must not conflict with statutory regulations.

Determination of remuneration in the form of variable performance incentives/LTI (merit rating) is carried out by considering:

1. Performance factors;
2. Company financial capabilities;
3. General income levels in similar industries; and
4. Other relevant factors.

Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

Determination of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is in accordance with the Ministry of SOE Letter No. SR-98/Wk.MBU.04/08/2024 dated August 23, 2024 concerning Determination of the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of PTPI in 2025.

The remuneration paid to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025 is as follows:

Realisasi Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025
Actual Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2025

No.	**Nama** Name	**Honorarium** Honorarium	**Tunjangan Transportasi** Transportation Allowance	**Tunjangan Hari Raya Keagamaan** Religious Holiday Allowance	**Asuransi Purna Jabatan** Retirement Insurance	**Fasilitas Kesehatan** Health Facility	**Fasilitas Bantuan Hukum** Legal Aid Facility	**Insentif Kinerja** Performance Incentives
1	Darmin Nasution*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
2	Mustoha Iskandar*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	Farhat Brachma*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4	Ari Dwipayana*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
5	Anwar Sanusi*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
6	Riswinandi*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
7	Danar Rahmanto*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
8	Muhammad Rizal Kamal**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
9	Immanuel Ebenezer Gerungan ****	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
10	Sudaryono ***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
11	Irfan Ahmad Fauzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
12	Rachlan S Nashidik ***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
13	Chrisna Deva Priyapratama ***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

Realisasi Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025
Actual Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2025

No.	Nama Name	Honorarium Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Insentif Kinerja Performance Incentives
14	Iwan Sumule ***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
15	Nurul Ichwan ***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
16	Yovie Widianto ***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
17	Febrio Nathan Kacaribu *****	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
18	Suwandi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 24 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Tidak lagi menjabat sejak 22 Agustus 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025

*) No longer serving as of June 16, 2025
**) No longer serving as of June 24, 2025
***) Serving since June 16, 2025
****) No longer serving as of August 22, 2025
*****) No longer serving as of December 15, 2025

Realisasi Remunerasi Direksi Tahun 2025

No.	Nama Name	Gaji Salary	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Insentif Kinerja Performance Incentives
1	Rahmad Pribadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
2	Dwi Satriyo Annurogo **	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	Wono Budi Tjahyono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4	Tina T. Kemala Intan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
5	Robby Setiabudi Madjid**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
6	Jamsaton Nababan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
7	Ninis Kesuma Adriani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
8	Tri Wahyudi Saleh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
9	Gusrizal*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
10	Bob Indiarto*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
11	Panji Winanteya Ruky*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Menjabat sejak 16 Juni 2025

*) No longer serving as of June 16, 2025
**) Serving since June 16, 2025

Rekapitulasi Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025
Recapitulation of Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners in 2025

Uraian Description	Jumlah Manajemen Total Management	Total (Rp Juta) Total Amount (Rp Million)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	18 Orang* 8 Person	20.090,28
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	11 Orang* 8 Person	34.633,45
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025 Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025		54.723,73

*) Merupakan jumlah Direksi dan Dewan Komisaris yang pernah menjabat selama tahun 2025
*) Represents the total number of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who served during 2025

Rasio Gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan
Salary Ratio of Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees

Uraian Description	2025	2024
Direktur Utama terhadap Wakil Direktur Utama President Director to Vice President Director	1 : 0,90	1:0,90
Direktur Utama terhadap Direktur Lainnya President Director to Other Directors	1 : 0,85	1:0,90
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Members of the Board of Commissioners	1 : 0,90	1:0,90
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1 : 0,45	1:0,45
Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi President Director to the Highest Employee	1 : 0,32	1:0,27
Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah President Director to the Lowest Employee	1 : 0,05	1:0,04
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee to theLowest Employee	1 : 0,14	1:0,16
Karyawan Terendah terhadap Upah Minimum Regional (UMP) Rata-Rata Lowest Employee to Average Regional Minimum Wage (UMP)	1 : 0,36	1:0,22

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan Perusahaan. Setiap rapat Dewan Komisaris, kecuali ditentukan lain, harus dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat.

Selain rapat internal, Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan. Pada kesempatan itu, Dewan Komisaris memberikan tanggapan.

Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Board of Commissioners Meetings

Policy and Implementation of the Board of Commissioners Meetings and Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Frequency

The Board of Commissioners holds meetings at least once every 1 (one) month or according to the Company's needs. All Board of Commissioners meeting, unless otherwise specified, must be attended by the Secretary to the Board of Commissioners. Decisions at Board of Commissioners meetings are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is taken based on the majority of affirmative votes. The Board of Commissioners can also make legal and binding decisions without holding a meeting.

Other than internal meetings, the Board of Commissioners holds joint meetings by inviting the Board of Directors as a form of coordination to discuss the Board of Directors' periodic reports and discuss business conditions and prospects as well as national policies that have an impact on the Company's performance. On that occasion, the Board of Commissioners provided a response.


Danantara Indonesia
PUPUK INDONESIA
Town Hall
MEETING
2025
sform. Lead.
PUPUK KALTIM
PUPUK INDONESIA NIAGA

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris Pada Rapat Internal Rutin dan RUPS

Implementation of the Board of Commissioners Internal Meetings

Board of Commissioners Agenda and Attendance at the Board of Commissioners Meetings

Tanggal Date	Agenda	Darmin Nasution*	Mustoha Iskandar*	Farhat Brachma*	Ari Dwipayana*	Anwar Sanusi*	Riswinandi*	Danar Rahmanto*
22 Januari 2025 January 22, 2025	• Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Desember 2024; dan • Pembahasan isu-isu strategis lainnya. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in December 2024; and • Discussion on other strategic issues.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗ Dinas Official Travel
25 Februari 2025 February 25, 2025	• Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Januari 2025; dan • Pembahasan isu-isu strategis lainnya. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in January 2025; and • Discussion on other strategic issues.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗ Dinas Official Travel
21 Maret 2025 March 21, 2025	• Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Februari 2025; dan • Pembahasan isu-isu strategis lainnya. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in February 2025; and • Discussion on other strategic issues.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 April 2025 April 24, 2025	• Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Maret 2025; • Pembahasan Rencana Akuisisi Saham Milik Yayasan pada Anak Perusahaan Pupuk; • Pembahasan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia terhadap Rencana Akuisisi PT Prakarsa Nusa Sinergi; dan • Pembahasan isu-isu strategis lainnya. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in March 2025; • Discussion on the Foundation's Share Acquisition Plan in Pupuk's Subsidiary; • Discussion on the PT Pupuk Indonesia Board of Commissioners Written Response to the Proposed Acquisition of PT Prakarsa Nusa Sinergi; and • Discussion on other strategic issues.	✓	✗ Sakit Sick	✓	✗ Dinas Official Travel	✓	✓	✓

Muhammad Rizal Kamal **	Immanuel Ebenezer Gerungan ****	Sudaryono ***	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik ***	Chrisna Deva Priyapratama ***	Iwan Sumule ***	Nurul Ichwan ***	Yovie Widianto ***	Febrio Nathan Kacaribu *****	Suwandi
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✗ Dinas Official Travel	✓
-	-	-	✗ Sakit Sick	-	-	-	-	-	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Darmin Nasution*	Mustoha Iskandar*	Farhat Brachma*	Ari Dwipayana*	Anwar Sanusi*	Riswinandi*	Danar Rahmanto*
26 Mei 2025 May 26, 2025	• Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan April 2025; • Pembahasan Usulan Insentif Kinerja tahun kinerja 2024 dan gaji tahun 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero); dan • Pembahasan isu-isu strategis lainnya. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in April 2025; • Discussion on the proposed Performance incentives for 2024 performance and 2025 salaries for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero); and • Discussion on other strategic issues.	✓	✓	✓	✓	✓	✗ Berada di Luar Kota Outside the City	✓
25 Juni 2025 June 25, 2025	• Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Mei 2025; dan • Pembahasan isu-isu strategis lainnya. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in May 2025; and • Discussion on other strategic issues.	-	-	-	-	-	-	-
29 Juli 2025 July 29, 2025	• Pembahasan tindak lanjut atas permasalahan yang tertunda serta evaluasi kinerja Perusahaan untuk bulan Juni 2025; • Pembahasan hasil temuan dari kunjungan ke PT Rekayasa Industri; • Pembahasan rencana *timeline* dan pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun 2025; • Pembahasan pelaksanaan survey RMI Tahun 2024; dan • Pembahasan berbagai isu strategis lainnya yang relevan • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in June 2025; • Discussion of findings from the visit to PT Rekayasa Industri; • Discussion on the timeline and procurement plan for a Public Accounting Firm (KAP) for 2025; • Discussion on the implementation of the 2024 RMI survey; and • Discussion on other strategic issues.	-	-	-	-	-	-	-

Muhammad Rizal Kamal **	Immanuel Ebenezer Gerungan ****	Sudaryono ***	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik ***	Chrisna Deva Priyapratama ***	Iwan Sumule ***	Nurul Ichwan ***	Yovie Widianto ***	Febrio Nathan Kacaribu *****	Suwandi
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Darmin Nasution*	Mustoha Iskandar*	Farhat Brachma*	Ari Dwipayana*	Anwar Sanusi*	Riswinandi*	Danar Rahmanto*
28 Agustus 2025 August 28, 2025	• Pembahasan tindak lanjut atas permasalahan yang tertunda serta evaluasi kinerja Perusahaan untuk bulan Juli 2025; • Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero); • Pembahasan Persiapan *Assessment* GCG; • Pembahasan Progres Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP); dan • Pembahasan berbagai isu strategis lainnya yang relevan. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in July 2025; • Discussion on Changes to the Organizational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero); • Discussion on Preparation for the GCG Assessment; • Discussion on the Progress of Procurement of Public Accounting Firm (KAP) Services; and • Discussion on other strategic issues.	-	-	-	-	-	-	-

Muhammad Rizal Kamal **	Immanuel Ebenezer Gerungan ****	Sudaryono ***	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik ***	Chrisna Deva Priyapratama ***	Iwan Sumule ***	Nurul Ichwan ***	Yovie Widianto ***	Febrio Nathan Kacaribu *****	Suwandi
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Darmin Nasution*	Mustoha Iskandar*	Farhat Brachma*	Ari Dwipayana*	Anwar Sanusi*	Riswinandi*	Danar Rahmanto*
30 September 2025 September 30, 2025	• Pembahasan tindak lanjut atas permasalahan yang tertunda serta evaluasi kinerja Perusahaan untuk bulan Agustus 2025; • Pembahasan hasil temuan dari kunjungan ke PT Pupuk Indonesia Niaga dan PT Pupuk Kalimantan Timur; • Progres Pengadaan KAP: Proses laporan pengadaan, penunjukan, & persiapan *kick off meeting* di awal Oktober 2025; • Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Aspek Dekom: perlu ditindak lanjuti paling lambat 60 hari; • Pembahasan Surat Nomor 28686/A/OT/B0303/ET/2025 tanggal 03 September 2025 Hal Persetujuan Kontrak Manajemen Tahunan Individu Direksi Pasca RUPS LB Tahun 2025; • Pembahasan Surat Nomor 31328/A/OT/P30/ET/2025 tanggal 27 September 2025 Hal Permohonan Persetujuan Tertulis Atas Perubahan Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero); dan • Pembahasan berbagai isu strategis lainnya yang relevan. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in August 2025; • Discussion on findings from visits to PT Pupuk Indonesia Niaga and PT Pupuk Kalimantan Timur; • Public Accountant Firm Procurement Progress: Procurement report process, appointment, and preparation for the kick-off meeting in early October 2025; • Follow-up on BPK Recommendations on the Board of Commissioners: Follow-up action is required within 60 days; • Discussion on Letter Number 28686/A/OT/B0303/ET/2025 dated September 3, 2025, concerning Approval of Individual Annual Management Contracts for Directors Post-2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders; • Discussion on Letter Number 31328/A/OT/P30/ET/2025 dated September 27, 2025, concerning Request for Written Approval of Changes to the Organizational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero); and • Discussion on other strategic issues.	-	-	-	-	-	-	-

Muhammad Rizal Kamal **	Immanuel Ebenezer Gerungan ****	Sudaryono ***	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik ***	Chrisna Deva Priyapratama ***	Iwan Sumule ***	Nurul Ichwan ***	Yovie Widianto ***	Febrio Nathan Kacaribu *****	Suwandi
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Darmin Nasution*	Mustoha Iskandar*	Farhat Brachma*	Ari Dwipayana*	Anwar Sanusi*	Riswinandi*	Danar Rahmanto*
28 Oktober 2025 October 28, 2025	• Pembahasan tindak lanjut atas permasalahan yang tertunda serta evaluasi kinerja Perusahaan untuk bulan September 2025; • Progres Pengadaan KAP: Proses laporan pengadaan, penunjukan, & persiapan *kick off meeting* • Pembahasan berbagai isu strategis lainnya yang relevan. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in September 2025; • Public Accountant Firm Procurement Progress: Procurement reporting process, appointment, and kick-off meeting preparation • Discussion on other strategic issues.	-	-	-	-	-	-	-
26 November 2025 November 26, 2025	• Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja perusahaan bulan Oktober 2025; dan • Pembahasan isu-isu strategis lainnya. • Discussion on follow-up on pending matters and the Company's performance in October 2025; • Discussion on other strategic issues.	-	-	-	-	-	-	-
23 Desember 2025 December 23, 2025	• Evaluasi Usulan Penutupan Kantor Perwakilan di Dubai; • Laporan Kunjungan Kerja di Pupuk Indonesia Logistik (PILOG); • Pembahasan Tindak Lanjut Pending Matters Bulan Oktober 2025; • Kinerja Perusahaan Bulan November 2025; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya. • Evaluation of the Proposed Closure of the Dubai; Representative Office; • Report on the Working Visit to Pupuk Indonesia Logistik (PILOG); • Discussion on Follow-up of Pending Matters for October 2025; • Company Performance for November 2025; and • Discussion on Other Strategic Issues.	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Rapat Number of Meetings		**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Jumlah Kehadiran Number of Attendance		**5**	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**3**
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance		**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**60%**

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 24 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Tidak lagi menjabat sejak 22 Agustus 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025

Keterangan:
v = hadir
x = tidak hadir
- = tidak dalam masa jabatan

*) No longer serving as of June 16, 2025
**) No longer serving as of June 24, 2025
***) Serving since June 16, 2025
****) No longer serving as of August 22, 2025
*****) No longer serving as of December 15, 2025

Note:
v = present
x = absent
- = not serving

Muhammad Rizal Kamal **	Immanuel Ebenezer Gerungan ****	Sudaryono ***	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik ***	Chrisna Deva Priyapratama ***	Iwan Sumule ***	Nurul Ichwan ***	Yovie Widianto ***	Febrio Nathan Kacaribu *****	Suwandi
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✗ Dinas Official Travel	✓	✗ Dinas Official Travel	✓
-	-	✗ Dinas Official Travel	✓	✓	✓	✗ Dinas Official Travel	✓	✓	✗ Dinas Official Travel	✓
-	-	✓	✓	✗ sakit sick	✓	✗ Dinas Official Travel	✗ Dinas Official Travel	✓	-	✓
0	2	7	12	7	7	7	7	7	11	12
0	2	6	11	6	7	5	5	7	8	12
0%	100%	85,71%	91,67%	85,71%	100%	71,43%	71,43%	100%	72,73%	100%

Rapat Direksi

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Direksi dan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris

Di samping itu, Direksi secara rutin mengadakan Rapat Internal Direksi. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama terkecuali karena suatu dan lain hal Direktur Utama berhalangan hadir dan menunjuk salah seorang Direksi untuk memimpin Rapat Direksi. Bagi setiap anggota Direksi yang telah menerima pemberitahuan rapat secara tertulis wajib menghadiri panggilan rapat dimaksud kecuali karena sesuatu dan lain hal yang bersangkutan berhalangan hadir. Bila karena sesuatu dan lain hal anggota Direksi berhalangan hadir maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Utama atau Direktur yang menandatangani undangan rapat, selanjutnya yang bersangkutan dapat mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain sesuai dengan aturan Anggaran Dasar.

Setiap keputusan yang diambil dalam rapat Direksi harus dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Direktur Utama/Ketua rapat yang menentukan. Adapun untuk penyampaian informasi akan diadakannya Rapat Internal Direksi, Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan dan di dalam panggilan rapat tersebut mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

Board of Directors Meetings

Policy and Implementation of the Frequency of Board of Directors Meetings and Meetings with the Board of Commissioners

In addition, the Board of Directors regularly holds Internal Board of Directors Meetings. All Board of Directors meetings are chaired by the President Director unless the President Director is unable to attend for any reason and appoints a member of the Board of Directors to chair the meeting. Each member of the Board of Directors who has received written notification of a meeting is required to attend the meeting unless they are unable to attend for any reason. If a member of the Board of Directors is unable to attend for any reason, they must notify the President Director or the Director who signed the meeting invitation in writing. They may then delegate their attendance to another party in accordance with the provisions of the Articles of Association.

All decisions made at a Board of Directors meeting must be made by deliberation to achieve consensus. If this is not achieved, decisions must be made by majority vote. If there is an equal number of votes in favor and against, the President Director/ Chairperson of the meeting shall make the final decision. Regarding the dissemination of information regarding the holding of an Internal Board of Directors Meeting, the Company will notify the members of the Board of Directors in writing no later than three (3) days prior to the meeting. The summons shall include the agenda, date, time, and venue of the meeting.

Agenda dan Kehadiran dalam Rapat Direksi
Agenda and Attendance at Board of Directors Meetings

Tanggal Date	Agenda	Rahmad Pribadi	Dwi Satriyo Annurogo **	Wono Budi Tjahyono
07 Januari 2025 January 07, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha (D8) • Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D9) • Agenda Strategis Lainnya • Strategic Management Support Update (D2) • Discussion on the Portfolio & Business Development Directorate Agenda (D8) • Discussion on the Risk Management Directorate Agenda (D9) • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
14 Januari 2025 January 14, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Pembahasan Agenda Direktorat Produksi (D3) • Pembahasan Agenda Direktorat SDM (D6) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Discussion on Production Directorate Agenda (D3) • Discussion on Human Capital Directorate Agenda (D6) • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
21 Januari 2025 January 21, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan (D4) • Pembahasan Agenda Direktorat Pemasaran (D7) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Discussion on Finance Directorate Agenda (D4) • Discussion on Marketing Directorate Agenda (D7) • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
28 Januari 2025 January 28, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis (D5) • Pembahasan Agenda Penggunaan Dana Penyertaan Modal Rekind • Update on Strategic Management Support (D2) • Discussion on Business Transformation Directorate Agenda (D5) • Discussion on Agenda for the Use of Rekind's Equity Participation Funds	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-	✗ Cuti Leave



Tina T. Kemala Intan	Robby Setiabudi Madjid**	Jamsaton Nababan	Ninis Kesuma Adriani	Tri Wahyudi Saleh	Gusrizal*	Bob Indiarto*	Panji Winanteya Ruky*
✓	-	✓	✓	x	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓ Cuti Leave	✓	✓	✓

Agenda dan Kehadiran dalam Rapat Direksi
Agenda and Attendance at Board of Directors Meetings

Tanggal Date	Agenda	Rahmad Pribadi	Dwi Satriyo Annurogo **	Wono Budi Tjahyono
04 Februari 2025 February 04, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha • Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko • Update on Strategic Management Support • Discussion on the Agenda for the Portfolio & Business Development Directorate • Discussion on the Agenda for the Risk Management Directorate	✓	-	✓
11 Februari 2025 February 11, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Pembahasan Agenda Direktorat Produksi • Persiapan Implementasi Perpres No. 6 Tahun 2025 • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Discussion of the Production Directorate's Agenda • Preparation for the Implementation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
18 Februari 2025 February 18, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Keuangan • Agenda Direktorat Pemasaran • Brand Architecture PT Pupuk Indonesia (Persero) • Update on Strategic Management Support • Finance Directorate Agenda • Marketing Directorate Agenda • PT Pupuk Indonesia (Persero) Brand Architecture	✓	-	✓
25 Februari 2025 February 25, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Pembahasan Agenda Direktorat Transformasi Bisnis • Agenda Strategis lainnya • Update on Strategic Management Support • Discussion of the Business Transformation Directorate's Agenda • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
04 Maret 2025 March 4, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Pembahasan Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha (D8) • Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D9) • Keberlanjutan Implementasi dan Optimalisasi Motor Listrik oleh Penjualan Wilayah (D7) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Discussion on the Agenda for the Portfolio & Business Development Directorate (D8) • Discussion on the Agenda for the Risk Management Directorate (D9) • Sustainability Implementation and Optimization of Electric Motorcycle by Regional Sales (D7) • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
11 Maret 2025 March 11, 2025	• Pembahasan Agenda Direktorat Produksi • Discussion on the Production Directorate Agenda	✓	-	✓
12 Maret 2025 March 12, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Update on Strategic Management Support	✓	-	✓
18 Maret 2025 March 18, 2025	• Agenda Direktorat SDM (D6) • Agenda Pembahasan RKO & S&OP • Agenda Direktorat Pemasaran (D7) • Agenda Direktorat Keuangan (D4) • Agenda Direksi & Sekper • Agenda Strategis Lainnya • HC Directorate Agenda (D6) • Discussion on RKO & S&OP Agenda • Marketing Directorate Agenda (D7) • Finance Directorate Agenda (D4) • Board of Directors & Secretary Agenda • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
25 Maret 2025 March 25, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Agenda Direktorat Transformasi Bisnis (D5) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Business Transformation Directorate Agenda (D5) • Other Strategy Agenda Items	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-	✓

Tina T. Kemala Intan	Robby Setiabudi Madjid**	Jamsaton Nababan	Ninis Kesuma Adriani	Tri Wahyudi Saleh	Gusrizal*	Bob Indiarto*	Panji Winanteya Ruky*
✓	-	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-	✓	✓	✓	✗ Cuti Leave	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗ Cuti Leave	-	✓	✓	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✗ Agenda Lainnya Other Agenda
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda
✓	-	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓	✓	✓

Agenda dan Kehadiran dalam Rapat Direksi
Agenda and Attendance at Board of Directors Meetings

Tanggal Date	Agenda	Rahmad Pribadi	Dwi Satriyo Annurogo **	Wono Budi Tjahyono
15 April 2025 April 15, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha (D8) • Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D9) • Agenda Direktorat Pemasaran (D7) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Portfolio & Business Development Directorate Agenda (D8) • Risk Management Directorate Agenda (D9) • Marketing Directorate Agenda (D7) • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
22 April 2025 April 22, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia (D6) • Agenda Direktorat Keuangan (D4) • Agenda SPI • Agenda Sekper & Hukum • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Human Capital Directorate Agenda (D6) • Finance Directorate Agenda (D4) • Internal Affairs Directorate Agenda • Secretary of State & Legal Affairs Agenda • Other Strategy Agenda Items	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-	✓
29 April 2025 April 29, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Agenda Direktorat Sumber Daya Manusia (D6) • Agenda Direktorat Produksi (D3) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Human Capital Directorate Agenda (D6) • Production Directorate Agenda (D3) • Other Strategy Agenda Items	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-	✓
06 Mei 2025 May 6, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Agenda Direktorat Transformasi Bisnis (D5) • Agenda Direktorat Pemasaran (D7) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Business Transformation Directorate Agenda (D5) • Marketing Directorate Agenda (D7) • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
13 Mei 2025 May 13, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha (D8) • Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D9) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Portfolio & Business Development Directorate Agenda (D8) • Risk Management Directorate Agenda (D9) • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
20 Mei 2025 May 20, 2025	• Pembahasan Agenda Direktorat SDM • Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan • Update Dukungan Manajemen Strategis • Pembahasan Agenda Direktorat Produksi • Agenda Strategis Lainnya • Discussion on HC Directorate Agenda • Discussion on Finance Directorate Agenda • Discussion on Strategic Management Support Update • Production Directorate Agenda • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
27 Mei 2025 May 27, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Agenda Direktorat Transformasi Bisnis (D5) • Agenda Direktorat Pemasaran (D7) • Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D9) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Business Transformation Directorate Agenda (D5) • Marketing Directorate Agenda (D7) • Risk Management Directorate Agenda (D9) • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✗ Agenda Lainnya Other Agenda

Tina T. Kemala Intan	Robby Setiabudi Madjid**	Jamsaton Nababan	Ninis Kesuma Adriani	Tri Wahyudi Saleh	Gusrizal*	Bob Indiarto*	Panji Winanteya Ruky*
✗ Cuti Leave	-	✓	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✗ Cuti Leave	✓
✓	-	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓
✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-			✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓
✓	-	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✗ Cuti Leave
✓	-	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✗ Dinas Official Travel	✓	✓
✓	-	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓	✓	✓

Agenda dan Kehadiran dalam Rapat Direksi
Agenda and Attendance at Board of Directors Meetings

Tanggal Date	Agenda	Rahmad Pribadi	Dwi Satriyo Annurogo **	Wono Budi Tjahyono
03 Juni 2025 June 3, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Agenda Direktorat Pemasaran (D7) • Agenda Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha (D8) • Agenda Direktorat Keuangan (D4) • *Refreshing* Materi Kinerja 2024 ke Danantara • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Marketing Directorate Agenda (D7) • Portfolio & Business Development Directorate Agenda (D8) • Finance Directorate Agenda (D4) • Refreshing 2024 Performance Material for Danantara • Other Strategy Agenda Items	✓	-	✓
10 Juni 2025 June 10, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (D2) • Agenda Direktorat Produksi (D3) • *Refreshing* Materi RUPS KInerja PI • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support (D2) • Production Directorate Agenda (D3) • Refreshing 2024 Performance Review Material for PI • Other Strategy Agenda Items	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-	✓
17 Juni 2025 June 17, 2025	• Isu Strategis Perusahaan • *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan • Pembahasan Agenda Direktorat Supply Chain • Company Strategic Issues • Update on Strategic Management Support • Discussion on Finance Directorate Agenda • Discussion on Supply Chain Directorate Agenda	✓	✓	✓
24 Juni 2025 June 24, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Teknik dan Pengembangan Bisnis • Update on Strategic Management Support • Engineering and Business Development Directorate Agenda	✓	✓	✓
01 Juli 2025 July 1, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D7) • Agenda Direktorat Manajemen Aset (D8) • Agenda Direktorat Supply Chain (D5) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Marketing Directorate Agenda (D7) • Asset Management Directorate Agenda (D8) • Business Transformation Directorate Agenda (D5) • Other Strategy Agenda Items	✓	✓	✓
08 Juli 2025 July 08, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Operasi (D2) • Agenda Direktorat SDM & Umum (D4) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Operations Directorate Agenda (D2) • HC & General Affairs Directorate Agenda (D4) • Other Strategy Agenda Items	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓
15 Juli 2025 July 15, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Keuangan • Agenda Direktorat Supply Chain • Strategic Management Support Update • Finance Directorate Agenda • Supply Chain Directorate Agenda	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓
17 Juli 2025 July 17, 2025	• Agenda Direktorat Supply Chain • Supply Chain Directorate Agenda	✓	✓	✓
22 Juli 2025 July 22, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis (DMS) • Agenda Strategis Lainnya (Sekper) • Agenda Direktorat SDM - Tertutup (D4) • Agenda Direktorat Teknik & Pengembangan Bisnis (D6) • Update on Strategic Management Support (DMS) • Other Strategic Agenda (Company Secretary) • HC Directorate Agenda - Closed (D4) • Engineering & Business Development Directorate Agenda (D6)	✓	✓	✓
29 Juli 2025 July 29, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D7) • Agenda Direktorat Manajemen Aset (D8) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Risk Management Directorate Agenda (D7) • Asset Management Directorate Agenda (D8) • Other Strategy Agenda Items	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓

Tina T. Kemala Intan	Robby Setiabudi Madjid**	Jamsaton Nababan	Ninis Kesuma Adriani	Tri Wahyudi Saleh	Gusrizal*	Bob Indiarto*	Panji Winanteya Ruky*
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-

Agenda dan Kehadiran dalam Rapat Direksi
Agenda and Attendance at Board of Directors Meetings

Tanggal Date	Agenda	Rahmad Pribadi	Dwi Satriyo Annurogo **	Wono Budi Tjahyono
05 Agustus 2025 August 5, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Operasi (D2) • Agenda Direktorat Keuangan (D3) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Operations Directorate Agenda (D2) • Finance Directorate Agenda (D3) • Other Strategy Agenda Items	✗ Cuti Leave	✓	✓
12 Agustus 2025 August 12, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Supply Chain (D5) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Supply Chain Directorate Agenda (D5) • Other Strategy Agenda Items	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda
19 Agustus 2025 August 19, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Teknik & Pengembangan Bisnis (D6) • Agenda Direktorat Keuangan (D3) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Engineering & Business Development Directorate Agenda (D6) • Finance Directorate Agenda (D3) • Other Strategy Agenda Items	✗ Cuti Leave	✓	✓
26 Agustus 2025 August 26, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D7) • Agenda Direktorat Manajemen Aset (D8) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Risk Management Directorate Agenda (D7) • Asset Management Directorate Agenda (D8) • Other Strategy Agenda Items	x Cuti Leave	✓	✓
02 September 2025 September 02, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Manajemen Produksi (D2) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Risk Management Directorate Agenda (D7) • Other Strategy Agenda Items	✓	✓	✓
09 September 2025 September 09, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat SDM dan Umum (D4) • Agenda Direktorat Supply Chain (D5) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • HC and General Affairs Directorate Agenda (D4) • Supply Chain Directorate Agenda (D5) • Other Strategy Agenda Items	✓	✓	✓
16 September 2025 September 16, 2025	• Agenda Direktorat Keuangan D3 • *Update* Dukungan Manajemen Strategis DMS • Agenda Direktorat Teknik & Pengembangan Bisnis • Agenda Strategis Lainnya • Finance Directorate Agenda (D3) • DMS Strategic Management Support Update • Engineering & Business Development Directorate Agenda • Other Strategy Agenda Items	✓	✓	✓
23 September 2025 September 23, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D7) • Agenda Direktorat Manajemen Aset (D8) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Risk Management Directorate Agenda (D7) • Asset Management Directorate Agenda (D8) • Other Strategy Agenda Items	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓
30 September 2025 September 30, 2025	• *Update* Dukungan Manajemen Strategis • Agenda Direktorat Operasi (D2) • Agenda Strategis Lainnya • Update on Strategic Management Support • Operations Directorate Agenda (D2) • Other Strategy Agenda Items	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓
07 Oktober 2025 October 07, 2025	• Pembahasan agenda Direktorat SDM dan Umum (D4) • *Update* Pembahasan S&OP (D2) • *Update* Agenda Direksi • Agenda Strategis Lainnya • Discussion on the HC and General Affairs' Directorate Agenda (D4) • Discussion on S&OP Update (D2) • Update on the Board of Directors Agenda • Other Strategy Agenda Items	✗ Dinas Official Travel	✓	✓

Tina T. Kemala Intan	Robby Setiabudi Madjid**	Jamsaton Nababan	Ninis Kesuma Adriani	Tri Wahyudi Saleh	Gusrizal*	Bob Indiarto*	Panji Winanteya Ruky*
✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✗ Cuti Leave	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-	-	-
✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✗ Sakit Sick	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✗ Sakit Sick	✓	✓	-	-	-
✓	✗ Dinas Official Travel	✓	✓	✓	-	-	-

Agenda dan Kehadiran dalam Rapat Direksi
Agenda and Attendance at Board of Directors Meetings

Tanggal Date	Agenda	Rahmad Pribadi	Dwi Satriyo Annurogo **	Wono Budi Tjahyono
14 Oktober 2025 October 14, 2025	• Pembahasan agenda Direktorat Keuangan (D3) • Pembahasan agenda Direktorat Supply Chain (D5) • *Update* Pembahasan S&OP (D2) • *Update* Agenda Direksi • Agenda Strategis Lainnya • Discussion on Finance Directorate Agenda (D3) • Discussion on Supply Chain Directorate Agenda (D5) • Discussion on S&OP Update (D2) • Update on Board of Directors Agenda • Other Strategy Agenda Items	✕ Dinas Official Travel	✓	✓
21 Oktober 2025 October 21, 2025	• Pembahasan agenda Direktorat Teknik dan Pengembangan Bisnis (D6) • Pembahasan agenda Direktorat Manajemen Risiko (D7) • *Update* Pembahasan Sinergi Operasi dan Pemasaran (D2) • *Update* Agenda Direksi • Agenda Strategis Lainnya • Discussion the Engineering and Business Development Directorate Agenda (D6) • Discussion of Risk Management Directorate Agenda (D7) • Update on the Operations and Marketing Synergy Discussion (D2) • Update on Board of Directors Agenda • Other Strategy Agenda Items	✓	✓	✓
28 Oktober 2025 October 28, 2025	• Pembahasan agenda Direktorat Teknik dan Pengembangan Bisnis (D6) • Pembahasan agenda Direktorat Manajemen Risiko (D7) • *Update* Pembahasan Sinergi Operasi dan Pemasaran (D2) • *Update* Agenda Direksi • Agenda Strategis Lainnya • Discussion on Engineering and Business Development Directorate Agenda (D6) • Discussion on Risk Management Directorate Agenda (D7) • Update on the Operations and Marketing Synergy Discussion (D2) • Update on the Board of Directors Agenda • Other Strategy Agenda Items	✕ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓
04 November 2025 November 04, 2025	• Pembahasan agenda Direktorat SDM dan Umum (D4) • Pembahasan agenda Direktorat Keuangan (D3) • Agenda Strategis Lainnya: Progress Divestasi KAN (D6) • Agenda Strategis Lainnya: Progres Proyek Indigo (D6) • *Update* Pembahasan Sinergi Operasi dan Pemasaran (D2) • *Update* Agenda Direksi (Sekper) • Discussion on Directorate of HC and General Affairs Agenda (D4) • Discussion on Finance Directorate Agenda (D3) • Other Strategic Agenda: KAN Divestment Progress (D6) • Other Strategic Agenda: Indigo Project Progress (D6) • Update on Operations and Marketing Synergy Discussion (D2) • Update on the Board of Directors Agenda (Secretary)	✓	✓	✓
11 November 2025 November 11, 2025	• Pembahasan *Marked to Market* • Discussion on Marked to Market	✓	✕ Agenda Lainnya Other Agenda	✓
18 November 2025 November 18, 2025	• *Update* Agenda Direksi • Agenda Strategis pembahasan Indigo (D6) • Pembahasan Agenda Direktorat Operasi (D2) • *Update* Pembahasan Sinergi Operasi dan Pemasaran (D2) • Pembahasan Agenda Direktorat Supply Chain (D5) • *Update* Implementasi *Marked to Market* • Agenda Strategis Lainnya • Update on Board of Directors Agenda • Discussion on Indigo Strategic Agenda (D6) • Discussion on Operations Directorate Agenda (D2) • Discussion on Operations and Marketing Synergy Update (D2) • Discussion on Supply Chain Directorate Agenda (D5) • Update on Marked to Market Implementation • Other Strategy Agenda Items	✓	✓	✕ Agenda Lainnya Other Agenda
25 November 2025 November 25, 2025	• Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan (D3) • Agenda Pembahasan *Marked-to-Market* • Pembahasan Agenda Direktorat Pengembangan dan Bisnis (D6) • *Update* Pembahasan Sinergi Operasi dan Pemasaran (D2) • *Update* Agenda Direksi • Agenda Strategis Lainnya • Discussion on the Finance Directorate's Agenda (D3) • Discussion on the Marked-to-Market Agenda • Discussion on the Development and Business Directorate Agenda (D6) • Update on the Operations and Marketing Synergy Discussion (D2) • Update on the Board of Directors Agenda • Other Strategy Agenda Items	✓	✓	✓

Tina T. Kemala Intan	Robby Setiabudi Madjid**	Jamsaton Nababan	Ninis Kesuma Adriani	Tri Wahyudi Saleh	Gusrizal*	Bob Indiarto*	Panji Winanteya Ruky*
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✗ Cuti Leave	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	-	-	-
✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓	-	-	-

Agenda dan Kehadiran dalam Rapat Direksi
Agenda and Attendance at Board of Directors Meetings

Tanggal Date	Agenda	Rahmad Pribadi	Dwi Satriyo Annurogo **	Wono Budi Tjahyono
01 Desember 2025 December 1, 2025	• Pembahasan Agenda Direktorat SDM dan Umum (D4) • *Update* Implementasi *Marked-to-Market* • Pembahasan Update Penyusunan RJPP 2026-2030 • Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D7) • Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D8) • *Update* Pembahasan Sinergi Operasi dan Pemasaran (D2) • Isu Strategis Perusahaan • *Update* Agenda Direksi • Discussion on HC and General Affairs Directorate Agenda (D4) • Update on Marked-to-Market Implementation • Discussion on 2026-2030 Long-Term Development Plan (RJPP) Update • Discussion on Directorate of Risk Management Agenda (D7) • Discussion on Directorate of Risk Management Agenda (D8) • Discussion on Operations and Marketing Synergy Update (D2) • Company Strategic Issues • Update on Board of Directors Agenda	✓	✓	✓
09 Desember 2025 December 09, 2025	• Pembahasan Agenda Direktorat SDM dan Umum (D4) • *Update* Implementasi *Marked-to-Market* • *Update* Pembahasan Sinergi Operasi dan Pemasaran (D2) • Pembahasan Agenda Direktorat Operasi (D2) • Isu Strategis Perusahaan • *Update* Agenda Direksi • Discussion on HC and General Affairs Directorate Agenda (D4) • Update on Marked-to-Market Implementation • Update on the Synergy of Operations and Marketing (D2) • Discussion on Operations Directorate Agenda (D2) • Corporate Strategic Issues • Update on Board of Directors Agenda	✓	✓	✓
16 Desember 2025 December 16, 2025	• *Update* Pembahasan Sinerji Operasi dan Pemasaran (D2) • Pembahasan Agenda Direktorat Keuangan (D3) • Pembahasan Agenda Direktorat Supply Chain (D5) • Pembahasan Agenda Direktorat SDM dan Umum(D4) • *Update* Implementasi *Marked-to-Market* • *Update* Agenda Direksi • Pembahasan Update Penyusunan RJPP 2026-2030 • Agenda Strategis Lainnya • Update on Operations and Marketing Synergy (D2) • Discussion on Finance Directorate Agenda (D3) • Discussion on Supply Chain Directorate Agenda (D5) • Discussion on HC and General Affairs Directorate Agenda (D4) • Update on Marked-to-Market Implementation • Update on the Board of Directors Agenda • Discussion on 2026-2030 RJPP Development Update • Other Strategy Agenda Items	✓	✓	✓
23 Desember 2025 December 23, 2025	• Pembahasan Agenda Direktorat Teknik dan Pengembangan Bisnis (D6) • *Update* Implementasi *Marked-to-Market* • *Update* Pembahasan Sinergi Operasi & Pemasaran • *Update* Agenda Direksi • Discussion on Engineering and Business Development Directorate (D6) Agenda • Marked-to-Market Implementation Update • Update on Operations & Marketing Synergy Discussion • Update on Board of Directors Agenda	✓	✓	✓
30 Desember 2025 December 30, 2025	• Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Risiko (D7) • Pembahasan Agenda Direktorat Manajemen Aset (D8) • *Update* Pembahasan Sinergi Operasi & Pemasaran • *Update* Implementasi *Marked-to-Market* • *Update* Agenda Direksi • Discussion on Risk Management Directorate Agenda (D7) • Discussion on Asset Management Directorate Agenda (D8) • Update on Operations & Marketing Synergy • Update on Marked-to-Market Implementation • Update on the Board of Directors Agenda	✗ Cuti Leave	✓	✓
Jumlah Rapat Number of Meetings		**52**	**30**	**52**
Jumlah Kehadiran Number of Attendance		**37**	**26**	**46**
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance		**71,15%**	**86,67%**	**92,31%**

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Menjabat sejak 16 Juni 2025
Keterangan:
v = hadir
x = tidak hadir
- = tidak dalam masa jabatan

*) No longer serving as of June 16, 2025
**) Serving since June 16, 2025
Note:
v = present
x = absent
- = not serving as of June 16, 2025

	Tina T. Kemala Intan	Robby Setiabudi Madjid**	Jamsaton Nababan	Ninis Kesuma Adriani	Tri Wahyudi Saleh	Gusrizal*	Bob Indiarto*	Panji Winanteya Ruky*
	✓	✓	✗ Cuti Leave	✓	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	52	**30**	**52**	**52**	**52**	**22**	**22**	**22**
	46	**23**	**41**	**50**	**45**	**19**	**19**	**19**
	88,46%	**76,67%**	**78,85%**	**96,15%**	**86,64%**	**86,36%**	**86,36%**	**86,36%**

Realisasi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Implementation of the Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Agenda	Darmin Nasution*	Mustoha Iskandar*	Farhat Brachma*	Ari Dwipayana*	Anwar Sanusi*	Riswinandi*	Danar Rahmanto*	Muhammad Rizal Kamal**
1	23 Januari 2025 January 23, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan November dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Desember 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in November and Discussion of the Company's Performance in December 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✓	✓	✓	✗ Dinas Official Travel	✓	✓	-
2	27 Februari 2025 February 27, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Desember dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Januari 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in December and Discussion of the Company's Performance in January 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	24 Maret 2025 March 24, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Januari dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Februari 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in January and Discussion of the Company's Performance in February 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	28 April 2025 April 28, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* dan Kinerja Perusahaan bulan Maret 2025 • Pembahasan Kejadian Kecelakaan Kerja pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 31 Maret 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters and the Company's Performance in March 2025 • Discussion of the Workplace Accident Incident at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang on March 31, 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Immanuel Ebenezer Gerungan****	Sudaryono***	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik***	Chrisna Deva Priyapratama***	Iwan Sumule***	Nurul Ichwan***	Yovie Widianto***	Febrio Nathan Kacaribu*****	Suwandi
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓

No	Tanggal Date	Agenda	Darmin Nasution*	Mustoha Iskandar*	Farhat Brachma*	Ari Dwipayana*	Anwar Sanusi*	Riswinandi*	Danar Rahmanto*	Muhammad Rizal Kamal**
5	28 Mei 2025 May 28, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* dan Kinerja Perusahaan bulan April 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters and the Company's Performance in April 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
6	25 Juni 2025 June 25, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan April 2025 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Mei 2025; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in April 2025 and Discussion of the Company's Performance in May 2025; and • Discussion of Other Strategic Issues	-	-	-	-	-	-	-	-
7	29 Juli 2025 July 29, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Mei • 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Juni 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in May 2025 • Discussion of the Company's Performance in June 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	-	-	-	-	-	-	-	-
8	28 Agustus 2025 August 28, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Juni 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Juli 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in June 2025 • Discussion of the Company's Performance in July 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	-	-	-	-	-	-	-	-
9	30 September 2025 September 30, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Juli 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Agustus 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in July 2025 • Discussion of the Company's Performance in August 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	-	-	-	-	-	-	-	-
10	28 Oktober 2025 October 28, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Agustus 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan September 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters Matters in August 2025 • Discussion of Company Performance in September 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	-	-	-	-	-	-	-	-

Immanuel Ebenezer Gerungan****	Sudaryono***	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik***	Chrisna Deva Priyapratama***	Iwan Sumule***	Nurul Ichwan***	Yovie Widianto***	Febrio Nathan Kacaribu*****	Suwandi
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✕ Dinas Official Travel	✓	✕ Dinas Official Travel	✓

No	Tanggal Date	Agenda	Darmin Nasution*	Mustoha Iskandar*	Farhat Brachma*	Ari Dwipayana*	Anwar Sanusi*	Riswinandi*	Danar Rahmanto*	Muhammad Rizal Kamal**
11	26 November 2025 November 26, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan September 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Oktober 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in September 2025 • Discussion of Company Performance in October 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	-	-	-	-	-	-	-	-
12	23 Desember 2025 December 23, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Oktober 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan November 2025 • Pembahasan Transformasi Bisnis PIP Agro Services ke Bisnis Amonia • Pembahasan Rencana Penutupan Kantor Perwakilan PI di Dubai • Pembahasan isu-Isu Strategis Lainnya. • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in October 2025 • Discussion of Company Performance in November 2025 • Discussion of PIP Agro Services' Business Transformation to the Ammonia Business • Discussion of the Planned Closure of PI's Representative Office in Dubai • Discussion of Other Strategic Issues	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Rapat Number of Meetings			**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**
Jumlah Kehadiran Number of Attendance			**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**5**	**0**
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**0%**

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 24 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Tidak lagi menjabat sejak 22 Agustus 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025

Keterangan:
v = hadir
x = tidak hadir
- = tidak dalam masa jabatan

*) No longer serving as of June 16, 2025
**) No longer serving as of June 24, 2025
***) Serving as of June 16, 2025
****) No longer serving as of August 22, 2025
*****) No longer serving as of December 15, 2025

Note:
v = present
x = absent
- = not serving

Immanuel Ebenezer Gerungan****	Sudaryono***	Irfan Ahmad Fauzi	Rachlan S Nashidik***	Chrisna Deva Priyapratama***	Iwan Sumule***	Nurul Ichwan***	Yovie Widianto***	Febrio Nathan Kacaribu*****	Suwandi
-	✕ Dinas Official Travel	✓	✓	✓	✕ Dinas Official Travel	✓	✓	✕ Dinas Official Travel	✓
-	✓	✓	✕ Sakit Sick	✓	✕ Dinas Official Travel	✕ Dinas Official Travel	✓	-	✓
2	7	12	7	7	7	7	7	11	12
2	6	12	6	7	5	5	7	9	12
100%	85,71%	100%	85,71%	100%	71.43%	71,43%	100%	81,82%	100%

No	Tanggal Date	Agenda	Rahmad Pribadi	Dwi Satriyo Annurogo***	Wono Budi Tjahyono	Tina T. Kemala Intan
1	23 Januari 2025 January 23, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan November dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Desember 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in November and Discussion of the Company's Performance in December 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	-	✓	✓
2	27 Februari 2025 February 27, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Desember dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Januari 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in December and Discussion of the Company's Performance in January 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	-	✓	✓
3	24 Maret 2025 March 24, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Januari dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Februari 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in January and Discussion of the Company's Performance in February 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	-	✓	✓
4	28 April 2025 April 28, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* dan Kinerja Perusahaan bulan Maret 2025 • Pembahasan Kejadian Kecelakaan Kerja pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 31 Maret 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters and the Company's Performance in March 2025 • Discussion of the Workplace Accident Incident at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang on March 31, 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	-	✓	✓
5	28 Mei 2025 May 28, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* dan Kinerja Perusahaan bulan April 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters and the Company's Performance in April 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	-	✓	✓
6	25 Juni 2025 June 25, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan April 2025 dan Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Mei 2025; dan • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in April 2025 and Discussion of the Company's Performance in May 2025; and • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✓	✓	✓
7	29 Juli 2025 July 29, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Mei 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Juni 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in May 2025 • Discussion of the Company's Performance in June 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓

Robby Setiabudi Madjid***	Jamsaton Nababan	Ninis Kesuma Adriani	Tri Wahyudi Saleh	Gusrizal*	Bob Indiarto*	Panji Winanteya Ruky*
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓	✓
-	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✗ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✗ Agenda Lainnya Other Agenda
✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-

No	Tanggal Date	Agenda	Rahmad Pribadi	Dwi Satriyo Annurogo***	Wono Budi Tjahyono	Tina T. Kemala Intan
8	28 Agustus 2025 August 28, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Juni 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Juli 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in June 2025 • Discussion of the Company's Performance in July 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✕ Dinas Official Travel	✓	✓	✓
9	30 September 2025 September 30, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Juli 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Agustus 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in July 2025 • Discussion of the Company's Performance in August 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✓	✕ Agenda Lainnya Other Agenda	✕ Agenda Lainnya Other Agenda
10	28 Oktober 2025 October 28, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Agustus 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan September 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters Matters in August 2025 • Discussion of Company Performance in September 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✓	✓	✓
11	26 November 2025 November 26, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan September 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Oktober 2025 • Pembahasan Isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in September 2025 • Discussion of Company Performance in October 2025 • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✓	✓	✓
12	23 Desember 2025 December 23, 2025	• Pembacaan Arahan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut *Pending Matters* bulan Oktober 2025 • Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan November 2025 • Pembahasan Transformasi Bisnis PIP Agro Services ke Bisnis Amonia • Pembahasan Rencana Penutupan Kantor Perwakilan PI di Dubai • Pembahasan isu-Isu Strategis Lainnya • Reading of the Board of Commissioners' Directives on Follow-up to Pending Matters in October 2025 • Discussion of Company Performance in November 2025 • Discussion of PIP Agro Services' Business Transformation to the Ammonia Business • Discussion of the Planned Closure of PI's Representative Office in Dubai • Discussion of Other Strategic Issues	✓	✕ Agenda Lainnya Other Agenda	✓	✓
Jumlah Rapat Number of Meetings			**12**	**7**	**12**	**12**
Jumlah Kehadiran Number of Attendance			**9**	**6**	**11**	**11**
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance			**75,00%**	**85,71%**	**91,67%**	**91,67%**

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Menjabat sejak 16 Juni 2025

Keterangan:
v = hadir
x = tidak hadir
- = tidak dalam masa jabatan

*) No longer serving as of June 16, 2025
**) Serving as of June 16, 2025

Note:
v = present
x = absent
- = not serving

Robby Setiabudi Madjid***	Jamsaton Nababan	Ninis Kesuma Adriani	Tri Wahyudi Saleh	Gusrizal*	Bob Indiarto*	Panji Winanteya Ruky*
✕ Dinas Official Travel	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
7	**12**	**12**	**12**	**5**	**5**	**5**
6	**12**	**12**	**10**	**4**	**5**	**4**
85,71%	**100%**	**100%**	**83,33%**	**80,00%**	**100%**	**80,00%**

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

PTPI memiliki kebijakan yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam penetapan kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap penerapan tata kelola yang baik. Secara prinsip, kebijakan tersebut mendorong terpilihnya individu-individu dengan latar belakang yang beragam untuk menduduki posisi strategis, baik pada tingkat pengawasan maupun pengelolaan Perusahaan. Keberagaman tersebut mencakup aspek pendidikan, pengalaman profesional, serta rentang usia, sehingga diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang komprehensif dalam pengambilan keputusan.

Pemegang saham menetapkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik usaha Perusahaan, termasuk kesesuaian keahlian masing-masing Direksi dengan bidang tugas yang diemban. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi, serta reputasi yang baik, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja dan keberlanjutan Perusahaan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per tanggal 31 Desember 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Diversity in the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

TPI has a policy governing the diversity of its Board of Commissioners and Board of Directors composition, as outlined in the Board Manual. This policy serves as a guideline for establishing criteria for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, while also reflects the Company's commitment to implementing good governance. In principle, this policy encourages the selection of individuals from diverse backgrounds to occupy strategic positions, both at the supervisory and management levels of the Company. This diversity includes aspects of education, professional experience, and age range, thus enabling a comprehensive perspective in decision-making.

Shareholders determines the Board of Commissioners and Board of Directors composition by considering the needs and characteristics of the Company's business, including the suitability of each Director's expertise to their assigned duties. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors possess integrity, competence, and have a good reputation, enabling them to optimally carry out their roles and responsibilities in supporting the Company's performance and sustainability.

The diversity in the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition as of December 31, 2025, was as follows:

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	***Gender***	**Usia** Age	**Latar Belakang Pendidikan** Educationa Background	**Pengalaman Profesional** Professional Experience	**Keahlian** Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Sudaryono	Indonesia	Laki-laki	41	• Doktor Bisnis Manajemen • *Master Business Administration* • *Mechanical System Engineering*	Wakil Menteri Pertanian Indonesia	• Kepemimpinan dan manajemen strategis • Bisnis dan keuangan • Operasional organisasi • Kebijakan dan sektor publik (pertanian)
		Male		• Doctoral in Business Management • Master of Business Administration degree • Mechanical Systems Engineering degree	Deputy Minister of Indonesia Agriculture	• Strategic leadership and management • Business and finance • Organizational operations • Policy and the public sector (agriculture)
Irfan Ahmad Fauzi	Indonesia	Laki-laki	38	• Magister Humaniora • Sarjana Pendidikan Sejarah	Komisaris Independen PT Pupuk Iskandar Muda	• Tata kelola dan Manajemen Risiko • Kepemimpinan dan pengawasan strategis • Pendidikan dan pengembangan SDM
		Male		• Master of Humanities degree • Bachelor's degree in History Education	Independent Commissioner of PT Pupuk Iskandar Muda	• Governance and risk management • Strategic leadership and oversight • Education and HC development

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	*Gender*	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educationa Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Rachlan S. Nashidik	Indonesia	Laki-laki	58	• Sarjana Hukum	Ketua Tim Khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan	• Hukum dan tata kelola • Energi dan pertambangan • Kebijakan publik dan kelembagaan • Kepemimpinan dan advisory strategis
		Male		• Bachelor's degree in Law	Head of the Special Team for the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs	• Law and governance • Energy and mining Public policy and institutions • Strategic leadership and advisory
Chrisna Deva Priyapratama	Indonesia	Laki-laki	59	• *Historical-Philological* • Sarjana Indonesia-Australia Polycommerce • *Basic Military Training*	Director AMEX TSNI Director AMEX TSNI	• Kepemimpinan dan manajemen strategis • Tata kelola dan kepatuhan perusahaan • Operasional dan pengelolaan bisnis
		Male		• Historical-Philological • Indonesian-Australian Bachelor of Commerce • Basic Military Training		• Strategic leadership and management • Corporate governance and compliance • Business operations and management
Iwan Sumule	Indonesia	Laki-laki	54	• Sarjana Teknik	Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia	• Kebijakan publik dan pembangunan sosial • Kepemimpinan dan advokasi masyarakat
		Male		• Bachelor's degree in Engineering	Assistant to the Special Staff to the President of the Republic of Indonesia	• Public policy and social development • Community leadership and advocacy
Nurul Ichwan	Indonesia	Laki-laki	57	• Magister Manajemen • Sarjana Ekonomi	Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan	• Kebijakan publik • Pembangunan sosial, advokasi masyarakat • Tata kelola pemerintahan
		Male		• Master of Management degree • Bachelor's degree in Economics	Director of Service and Regional Planning	• Public policy • Social development, community advocacy • Governance
Yovie Widianto	Indonesia	Laki-laki	58	• Sarjana Hubungan Internasional	Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif	• Kepemimpinan kreatif • Manajemen talenta • Perencanaan strategis • Inovasi kreatif
		Male		• Bachelor's degree in International Relations	Special Staff for the Creative Economy	• Creative leadership • Talent management • Strategic planning • Creative innovation

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	***Gender***	**Usia** Age	**Latar Belakang Pendidikan** Educationa Background	**Pengalaman Profesional** Professional Experience	**Keahlian** Expertise
Suwandi	Indonesia	Laki-laki Male	59	• Doktor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor • Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik • Sarjana Pertanian • Doctorate in Natural Resource and Environmental Management from Institut Pertanian Bogor • Master's degree in Planning and Public Policy • Bachelor's degree in Agriculture	Direktur Jenderal Tanaman Pangan – Kementerian Pertanian Director General of Food Crops – Ministry of Agriculture	• Manajemen dan kebijakan pertanian • Sistem informasi pertanian • Agricultural management and policy • Agricultural information systems
Direksi Board of Directors						
Rahmad Pribadi	Indonesia	Laki-laki Male	55	• *Master in Public Administration* • *Bachelor of Business Administration* • Master's degree in Public Administration • Bachelor's degree in Business Administration	Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur President Director of PT Pupuk Kalimantan Timur	• Manajemen Bisnis dan Administrasi • Administrasi Bisnis • Business Management and Administration • Business Administration
Dwi Satriyo Annurogo	Indonesia	Laki-laki Male	58	• Magister Teknik Kimia • Sarjana Teknik Kimia • Master's degree in Chemical Engineering • Bachelor's degree in Chemical Engineering	Direktur Utama PT Petrokimia Gresik President Director of PT Petrokimia Gresik	• Manajemen Operasional Industri • Teknik Kimia Industri • Industrial Operations Management • Industrial Chemical Engineering
Wono Budi Tjahyono	Indonesia	Laki-laki Male	58	• *Master of Business* Administratif • Sarjana Pertanian • Master of Business Administration Degree • Bachelor's degree in Agriculture	Senior Vice President PT Bank Mandiri Senior Vice President of PT Bank Mandiri	• Administrasi Bisnis • Manajemen Keuangan • Investasi & Pengelolaan Portofolio • Business Administration • Financial Management • Investment and Portfolio Management
Tina T. Kemala Intan	Indonesia	Perempuan Female	66	• Sarjana Psikologi • Bachelor's degree in Psychology	Direktur SDM dan Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Director of HC and Legal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	• Manajemen Sumber Daya Manusia • Human Capital Management
Robby Setiabudi Madjid	Indonesia	Laki-laki Male	46	• *Master of Commerce with distinction of Valedictorian* • Sarjana Akuntansi • Master of Commerce with Valedictorian distinction • Bachelor's degree in Accountancy	Direktur Keuangan & Umum PT Petrokimia Gresik Director of Finance & General Affairs, PT Petrokimia Gresik	• Keuangan Korporasi • Akuntansi • Manajemen Keuangan • Pengelolaan Administrasi & Umum • Corporate Finance Accounting • Financial Management • Administration & General Management

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	*Gender*	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educationa Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Jamsaton Nababan	Indonesia	Laki-laki Male	63	• Sarjana Teknik Mesin • Bachelor's degree in Mechanical Engineering	President Director PT Pertamina EP Cepu President Director of PT Pertamina EP Cepu	• Manajemen Eksekutif • Pengembangan Usaha • Industri Hulu Migas • Operasi Produksi • Executive Management • Business Development • Upstream Oil and Gas Industry • Production Operations
Ninis Kesuma Adriani	Indonesia	Perempuan Female	59	• *Magister Business Administration* Bidang Keuangan dan Pemasaran • Sarjana Pertanian • Master's degree in Business Administration in Finance and Marketing • Bachelor's degree in Agriculture	Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani (2022-2023) Director of Strategic and Financial Planning PT Permodalan Nasional Madani (2022-2023)	• Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko • Strategic Planning and Risk Management
Tri Wahyudi Saleh	Indonesia	Laki-laki Male	58	• Magister Manajemen Agribisnis • Sarjana Biologi • Master's degree inf Agribusiness Management • Bachelor's degree in Biology	Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	• Manajemen dan Pemasaran • Manajemen Strategik dan Logistik • Management and Marketing • Strategic and Logistics Management

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of Affiliated Relationships of the Board of Commissioners and Board of Directors

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi
Affiliated Relationships between the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:			Hubungan Keuangan dengan: Familial Relationship with:		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Company Major / Controlling Shareholder	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Company Major / Controlling Shareholder
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Sudaryono	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Irfan Ahmad Fauzi	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Rachlan S. Nashidik	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Chrisna Deva Priyapratama	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Iwan Sumule	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi
Affiliated Relationships between the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:			Hubungan Keuangan dengan: Familial Relationship with:		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Company Major / Controlling Shareholder	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Company Major / Controlling Shareholder
Nurul Ichwan	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Yovie Widianto	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Suwandi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Direksi Board of Directors						
Rahmad Pribadi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dwi Satriyo Annurogo	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Wono Budi Tjahyono	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Tina T. Kemala Intan	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Robby Setiabudi Madjid	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Jamsaton Nababan	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Ninis Kesuma Adriani	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Tri Wahyudi Saleh	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
Concurrent Position of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As Member of the Board of Directors	Jabatan Lain Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Sudaryono	✓	✗	• Wakil Menteri Pertanian Indonesia • Indonesian Deputy Minister of Agriculture
Irfan Ahmad Fauzi	✗	✓	• Direktur Utama PT Fatijja Nusantara Inovasi • President Director of PT Fatijja Nusantara Inovasi
Rachlan S. Nashidik	✗	✗	• Wakil Ketua Komite Tetap Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia • Senior Advisor PT Pegasus Galang Mineral • Deputy Chair of the Standing Committee for Infrastructure, Indonesian Chamber of Commerce and Industry • Senior Advisor to PT Pegasus Galang Mineral

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
Concurrent Position of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As Member of the Board of Directors	Jabatan Lain Other Positions
Chrisna Deva Priyapratama	✓	✓	• Komisaris PT Global Arrow • Direktur Armindo Dinamika Energi • Direktur PT Kaltim Nitrat Indonesia • Commissioner of PT Global Arrow • Director of Armindo Dinamika Energi • Director of PT Kaltim Nitrat Indonesia
Iwan Sumule	✗	✗	• Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia • Deputy Head II of the Republic of Indonesia Agency for the Acceleration of Poverty Alleviation
Nurul Ichwan	✗	✗	• Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Deputy for Promotion and Investment, Ministry of Investment and Downstream Development/Investment Coordinating Board (BKPM)
Yovie Widianto	✗	✗	• Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif • Special Staff to the President for the Creative Economy
Suwandi	✗	✗	• Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian • Secretary General of the Ministry of Agriculture
Direksi Board of Directors			
Rahmad Pribadi	✗	✗	✗
Dwi Satriyo Annurogo	✗	✗	✗
Wono Budi Tjahyono	✗	✗	✗
Tina T. Kemala Intan	✗	✗	✗
Robby Setiabudi Madjid	✗	✗	✗
Jamsaton Nababan	✗	✗	✗
Ninis Kesuma Adriani	✗	✗	✗
Tri Wahyudi Saleh	✗	✗	✗

Pengungkapan Kepemilikan Saham
Share Ownership Disclosure

Nama Name	Kepemilikan Saham Shareholding		
	Perusahaan Company	Entitas Anak dan Afiliasi Subsidiaries and Affiliated	Perusahaan Lain Other Company
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Sudaryono	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Irfan Ahmad Fauzi	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Rachlan S. Nashidik	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Chrisna Deva Priyapratama	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Iwan Sumule	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Pengungkapan Kepemilikan Saham
Share Ownership Disclosure

Nama Name	Kepemilikan Saham Shareholding		
	Perusahaan Company	Entitas Anak dan Afiliasi Subsidiaries and Affiliated	Perusahaan Lain Other Company
Nurul Ichwan	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Yovie Widianto	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Suwandi	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Direksi Board of Directors			
Rahmad Pribadi	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Dwi Satriyo Annurogo	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Wono Budi Tjahyono	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Tina T. Kemala Intan	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Robby Setiabudi Madjid	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Jamsaton Nababan	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Ninis Kesuma Adriani	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
Tri Wahyudi Saleh	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of The Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris. Organ pendukung tersebut terdiri atas : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris.

When carrying out its duties and functions, the Board of Commissioners is supported by supporting organs below it. These supporting organs consist of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Integrated Governance Committee, and the Secretary to the Board of Commissioners.

Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris guna menyediakan dukungan administratif yang terstruktur.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Di tahun 2025, Perusahaan menetapkan perubahan Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 018/KEP.KOM/X/2025 tertanggal 30 September 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Gempita Pratiwi beralih kepada Dieta Prizylia.

Secretary of the Board of Commissioners

To support the effective performance of the Board of Commissioners' functions, the Board of Commissioners has established a Board of Commissioners Secretariat, led by a Secretary to the Board of Commissioners and assisted by Secretariat staff, to provide structured administrative support.

Term of Office Provisions

Based on Article 126 of the Minister of BUMN Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of SOEs, the term of office of the Secretary to the Board of Commissioners and the Secretariat Staff of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners at three years, and they may be reappointed for two years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time.

Acting Secretary to the Board of Commissioners

In 2025, the Company changed the Secretary to the Board of Commissioners based on Board of Commissioners Decree No. 018/KEP.KOM/X/2025 dated September 30, 2025. Based on this decision, the position previously held by Gempita Pratiwi was transferred to Dieta Prizylia.



Dieta Prizylia

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Masa Jabatan: 30 September 2025 - Sekarang
Term of Office: September 30, 2025 - Present

Usia I Age
40 Tahun I Years

Domisili I Domicile
Bekasi

Kewarganegaraan I Citizenship
Indonesia

Riwayat Pendidikan
S1 Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Katolik Atma Jaya (2008)

Riwayat Pekerjaan
- Corporate Risk Management & Internal Auditor Dept. Head PT Suryaraya Rubber Indo Industry (Astra Group) (2016-2022)
- Internal Auditor PT Astra Honda Motor (2015-2016)
- Risk Analyst PT Astra Honda Motor (2008-2015)

Jabatan Rangkap
Tidak Ada

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris No. 018/KEP.KOM/X/2025

Sertifikasi
- 2025 - Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP)
- 2017 – Professional Coach Certification Program (PCCP)
- 2015 – QIA Dasar 1 dan Dasar 2

Educational History
Bachelor's Degree in Business Administration, Universitas Katolik Atma Jaya (2008)

Employment History
- Corporate Risk Management & Internal Auditor Dept. Head of PT Suryaraya Rubber Indo Industry (Astra Group) (2016-2022)
- Internal Auditor at PT Astra Honda Motor (2015-2016)
- Risk Analyst at PT Astra Honda Motor (2008-2015)

Concurrent Positions
None

Legal Basis for Appointment
Board of Commissioners Decree No. 018/KEP.KOM/X/2025

Certification
- 2025 - Certified Governance Oversight Professional (CGOP) Certification
- 2017 - Professional Coach Certification Program (PCCP)
- 2015 - QIA Basic 1 and Basic 2

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan, anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
5. Rincian realisasi pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris memberikan dukungan administratif dan koordinatif atas penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris, termasuk memfasilitasi 53 (lima puluh tiga) rapat yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) rapat internal dan 12 (dua belas) rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi.

Komite Audit

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan perusahaan, Komite Audit menjalankan fungsi pendukung bagi Dewan Komisaris dalam memastikan penerapan tata kelola yang baik dan pengendalian internal yang efektif. Selain itu, Komite Audit turut mendorong kualitas pelaporan keuangan serta melakukan kajian atas ruang lingkup dan independensi akuntan publik. Keberadaan Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

Secretary to the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities

The Secretary to the Board of Commissioners duties and responsibilities are as follows:

1. Ensuring the Board of Commissioners complies with statutory regulations and implements GCG principles;
2. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Coordinating Committee members, if necessary in order to expedite the duties of the Board of Commissioners;
4. Acting as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.
5. Details of the realization of the competency development of the Secretary to the Board of Commissioners are presented in the "Company Profile" chapter in this annual report.

Implementation of Duties in 2025 Report

In 2025, the Secretary to the Board of Commissioners provided administrative and support for the Board of Commissioners' activities, including organizing 53 (fifty-three) meetings, consisting of 41 (forty-one) internal meetings and 12 (twelve) Board of Commissioners meetings with the Board of Directors.

Audit Committee

As part of the Company's supervisory mechanism, the Audit Committee supports the Board of Commissioners in ensuring the implementation of good governance and effective internal controls. In addition, the Audit Committee promotes the quality of financial reporting and reviews the scope and independence of public accountants. The Audit Committee's existence is regulated by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023.

Kualifikasi Komite Audit

Untuk dapat menjadi anggota Komite Audit khususnya dari pihak independen, seseorang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik, dan mempunyai pengetahuan, serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Mampu berkomunikasi secara efektif;
3. Dapat menyediakan waktu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya;
4. Tidak memiliki benturan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar perusahaan (bukan anggota Dewan Komisaris) tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan Pupuk Indonesia Group;
   b. Anggota Komite Audit pada Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan Pupuk Indonesia Group;
   c. Anggota Komite Audit pada BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN lain;
   d. Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan anggota Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 135 yang menyatakan, "Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Audit Tahun 2025

Di tahun 2025, terdapat 4 (empat) kali perubahan susunan dan keanggotaan Komite Audit yang ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisaris. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian penugasan Dewan Komisaris pada keanggotaan Komite guna memastikan keselarasan fungsi serta efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit. Selain itu, masa jabatan salah satu anggota, Febrio Nathan Kacaribu, berakhir pada 15 Desember 2025 seiring dengan penugasan pada BUMN lain.

Sejalan dengan hal tersebut, susunan dan komposisi Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Audit Committee Qualifications

To become a member of the Audit Committee, especially as an independent party, the person must fulfill the following requirements:

1. Possess strong integrity, as well as sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/inspection;
2. Be able to communicate effectively;
3. Can provide time to complete the duties and responsibilities;
4. Has no personal conflict of interest that could have a negative impact or conflict of interest on the Company;
5. Audit Committee members who come from outside the Company (not members of the Board of Commissioners) may not hold concurrent positions as:
   a. Member of the Board of Commissioners of Pupuk Indonesia Group Subsidiaries and Subsidiaries of a Subsidiary;
   b. Member of the Audit Committee at Pupuk Indonesia Group Subsidiaries and Subsidiaries of a Subsidiary;
   c. Member of the Audit Committee at SOE and/or other SOE Subsidiaries;
   d. Other positions that are prohibited from holding concurrent positions based on internal company policies and/or applicable laws and regulations.

Appointment and Dismissal

The appointment and dismissal of Audit Committee members is carried out by the Board of Commissioners through a decision letter. Dismissal of members of the Audit Committee can be carried out if the member's term of office ends and based on the decision of the Board of Commissioners, they are dismissed because they did not fulfill the specified performance and/or were not competent in carrying out their duties.

Term of Office

The terms of office of members of the Audit Committee are regulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capitals of State-Owned Enterprises, where article 135 states, "The term of office of members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of an SOE is a maximum of 3 (three) years and they can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/SOE Supervisory Board to dismiss him at any time."

Number, Composition, and Structure of the Audit Committee in 2025

In 2025, there were four changes to the composition and membership of the Audit Committee, as determined by Board of Commissioners' decisions. These changes were made to adjust the Board of Commissioners' assignments to the Committee's membership to ensure functional alignment and the effectiveness of the Audit Committee's duties. Also, the term of office for one member, Febrio Nathan Kacaribu, expired on December 15, 2025, following his assignment to another state-owned enterprise.

As a result, the Audit Committee composition as of December 31, 2025, was as follows:

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2025
Audit Committee Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis if Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Rachlan S. Nashidik	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 016/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 016/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 - concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Febrio Nathan Kacaribu	Wakil Ketua I Vice Chairman I	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 016/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 016/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 - concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-2 2nd
Nurul Ichwan	Wakil Ketua II Vice Chairman II	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 016/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 016/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 - concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Tubagus Donny Syafardan	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 022/KEP.KOM/XII/2025 dated December 9, 2025	9 Desember 2025– 8 Desember 2028 December 9, 2025 – December 8, 2028	Ke-1 1st
Arief Ibnu Nugroho	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 013/KEP.KOM/VIII/2025 tanggal 31 Agustus 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 013/KEP.KOM/VIII/2025 dated August 31, 2025	1 September 2025 – 1 September 2028 September 1, 2025 – September 1, 2028	Ke-1 1st

Profil Komite Audit
Audit Committee Profiles

Rachlan S. Nashidik
Ketua Komite Audit
Chair of the Audit Committee

Profil Rachlan S. Nashidik dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Rachlan S. Nashidik's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Nurul Ichwan
Wakil Ketua II Komite Audit
Vice Chair II of the Audit Committee

Profil Nurul Ichwan dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Nurul Ichwan's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles section of this Annual Report.



Tubagus Donny Syafardan
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Usia | Age
59 Tahun | Years

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
- S3 - Universitas Padjadjaran, Ekonomi (2007)
- S2 - Universitas Gadjah Mada, Administrasi Bisnis (1996)
- S1 - Universitas Indonesia, Manajemen Keuangan (1993)

Riwayat Pekerjaan
- Kepala Keuangan dan HC Officer PT Pos Indonesia (2020 - 2022)
- Kepala Proyek Restrukturisasi Perusahaan PT Pos Indonesia (2018 - 2020)
- VP Bisnis Digital dan Data Analisis (2017 - 2018)

Jabatan Rangkap
- Dosen Universitas Logistik Bisnis Internasional (2022 – Sekarang)
- Trainer & Consultant in Finance, Strategic Organization, and HRD Business Partner PT Antawijaya Multi Kreasi (2022 – Sekarang)
- Dosen Pasca Sarjana Politeknik Pariwisata Bandung (2014 – Sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 022/KEP.KOM/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025

Sertifikasi
CCGO, CGOP

Educational History
- Doctoral Degree - Universitas Padjadjaran, Economics (2007)
- Master's Degree - Universitas Gadjah Mada, Business Administration (1996)
- Bachelor's Degree - Universitas Indonesia, Financial Management (1993)

Employment History
- Chief Financial Officer and HC Officer at PT Pos Indonesia (2020 - 2022)
- Head of Corporate Restructuring Project at PT Pos Indonesia (2018 - 2020)
- VP Digital Business and Data Analytics (2017 - 2018)

Concurrent Positions
- Lecturer at Universitas Logistik Bisnis Internasional (2022 – Present)
- Trainer & Consultant in Finance, Strategic Organization, and HRD, Business Partner at PT Antawijaya Multi Kreasi (2022 – Present)
- Postgraduate Lecturer at Politeknik Pariwisata Bandung (2014 – Present)

Legal Basis for Appointment
PTPI Board of Commissioners Decree No. 022/KEP.KOM/XII/2025 dated December 9, 2025

Certification
CCGO, CGOP



Arief Ibnu Nugroho
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Usia | Age
42 Tahun | Years

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
- S1 Akuntansi, Universitas Terbuka (2021)
- DIII Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN (2002)

Riwayat Pekerjaan
- Anggota Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2021 - 2025)
- Anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2019 - 2021)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (2017 - 2019)

Jabatan Rangkap
Kepala Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran Deputi SDM dan Keberlanjutan, BP BUMN (2026 - sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 013/KEP.KOM/VIII/2025 tanggal 31 Agustus 2025

Sertifikasi
CCGO, CGOP, CRMO, QRMP, CSP

Educational History
- Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Terbuka (2021)
- Diploma III in Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN (2002)

Employment History
- Member of the Strategy, Risk Management, and Investment Committee at PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2021 - 2025)
- Member of the Business Development and Risk Monitoring Committee at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2019- 2021)
- Secretary to the Board of Commissioners at PT Perkebunan Nusantara XIII (2017 - 2019)

Concurrent Positions
Head of Program and Budget Synchronization Section, Deputy for HR and Sustainability, BP BUMN (2026 - present)

Legal Basis for Appointment
PTPI Board of Commissioners Decree No. 013/KEP.KOM/VIII/2025 dated August 31, 2025

Certification
CCGO, CGOP, CRMO, QRMP, CSP

Pernyataan Independensi Komite Audit

Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Seorang anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang diperbaharui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum dalam *Audit Committee Charter*, anggota Komite di bawah Dewan Komisaris menandatangani pernyataan independensi Komite Audit.

Audit Committee Independence Statement

The Audit Committee is independent in both the performance of its duties and reporting, and is directly accountable to the Board of Commissioners. Audit Committee members must be independent, objective, and professional, as stipulated in the Audit Committee Charter, which is periodically updated in accordance with applicable laws and regulations. In addition to being included in the Audit Committee Charter, members of the Committee under the Board of Commissioners sign an independence statement from the Audit Committee.

Pengungkapan Pernyataan Independensi Komite Audit
Disclosure of the Audit Committee Independence Statement

Aspek Independensi Independence Aspect	Rachlan S. Nashidik***	Febrio Nathan Kacaribu******	Nurul Ichwan**	Tubagus Donny Syafardan	Arief Ibnu Nugroho*****	Mustoha Iskandar**	Suwandi*	Danar Rahmanto**	RM. Wiratmoko Prasidhanto****
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has management relationships in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Entities	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Owns shares in the Company, either directly or indirectly	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Has familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Committee members	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Menjabat sebagai pengurus partai politik Serves as an administrator for a political party	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Menjabat sebagai pejabat Pemerintah Serving as a Government Official	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓

*) Menjabat sejak 1 Januari 2025 dan dialihtugaskan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 10 Februari 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Tidak lagi menjabat sejak 31 Agustus 2025
*****) Menjabat sejak 1 September 2025
******) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025

*) Serving since January 1, 2025, and reassigned to the Nomination and Remuneration Committee as of February 10, 2025
*) No longer in office since June 16, 2025
**) In office since June 16, 2025
***) No longer in office since August 31, Desember 2025
****) In office since September 1, 2025
*****) No longer in office since December 15, 2025

Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Dewan Komisaris menetapkan pedoman kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit. Pedoman tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 006/KEP.KOM/II/2024 tentang Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI tanggal 29 Februari 2024. Piagam ini menjadi acuan resmi bagi Komite Audit dalam menjalankan perannya sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* serta berfungsi sebagai pedoman yang mengikat seluruh Anggota Komite Audit dalam pelaksanaan aktivitasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Secara rinci, tugas Komite Audit adalah:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
6. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
7. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Ekstern;
8. Memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan auditor eksternal;
9. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan BUMN yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
10. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;
11. Memastikan SPI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan auditor eksternal;
12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SPI;
13. Mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan SPI;
14. Mengevaluasi kinerja SPI;
15. Memastikan SPI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;

Working Guidelines: Audit Committee Charter

The Board of Commissioners established working guidelines as the basis for implementing the Audit Committee duties and functions. These guidelines were outlined in Board of Commissioners Decree No. 006/KEP.KOM/II/2024 concerning the Audit Committee Charter of PTPI, dated February 29, 2024. This charter serves as the official reference for the Audit Committee in carrying out its role in accordance with the principles of Good Corporate Governance and serves as a binding guideline for all Audit Committee members in carrying out their activities.

Duties and Responsibilities

The Audit Committee is tasked with providing opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, and carrying out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners. In detail, the duties of the Audit Committee are to:

1. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of carrying out the duties of external auditors and internal auditors;
2. Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors;
3. Provide recommendations regarding improvements to the management control system and its implementation;
4. Ensure that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the Company;
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners;
6. Perform duties related to risk management as stipulated in laws and regulations;
7. Monitor and review the effectiveness of the implementation of Internal Audit and External Audit;
8. Ensure the objectivity and independence of internal and external auditors;
9. Ensure the credibility and objectivity of SOE financial reports to be published for external parties and supervisory bodies, including following up on complaints and/or reports of irregularities during the Audit Committee's review period;
10. Monitor and review the financial reporting process audited by external auditors;
11. Ensure that SPI communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners and external auditors;
12. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of SPI audit plans, scope and budget;
13. Evaluate periodic internal auditor reports and recommend corrective actions to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies and laws and regulations or other issues identified and reported by SPI;
14. Evaluate SPI performance;
15. Ensure that SPI upholds integrity in carrying out its duties;

16. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SPI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan audit intern BUMN Induk maupun Anak Perusahaan;
18. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern BUMN Induk dan Audit Intern Anak Perusahaan;
19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;
20. Melakukan evaluasi terhadap Perusahaan Pemeringkat yang akan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penunjukan Perusahaan Pemeringkat dimaksud kepada Dewan Komisaris; dan
21. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
22. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

16. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of SPI's annual remuneration as a whole and performance awards;
17. Monitor and evaluate the suitability of the implementation of financial policies and internal audits of the Parent and Subsidiary SOEs;
18. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding matters that support the effectiveness and accuracy of the financial reporting process and the suitability between the Parent SOE Internal Audit and Subsidiary Internal Audit policies;
19. Carry out monitoring and evaluation of the implementation of other Internal Audit functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/ Minister;
20. Conduct evaluations of the Rating Company that will assess the Company's Health Level and provide recommendations for the appointment of the Rating Company to the Board of Commissioners; and
21. Carry out other authorities, duties, and responsibilities related to its functions
22. In carrying out its duties, the Audit Committee has the authority to access employee records or information, funds, assets and other Company resources related to the implementation of its duties.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Komite Audit telah melaksanakan tanggung jawab berkaitan dengan memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor eksternal, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, melalui surat No. S-098/KOM/PIHC/IX/2025 tertanggal 15 November 2025. Selanjutnya memberikan rekomendasi dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Audit Committee Responsibilities in Recommending the Appointment and Dismissal of External Auditors

The Audit Committee has carried out its responsibilities in relation to providing recommendations for the appointment of external auditors, based on the Evaluation Results Report on the Implementation of Audit Services for Annual Historical Financial Information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms, through letter No. S-098/KOM/PIHC/IX/2025 dated November 15, 2025. Furthermore, it provides recommendations for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perusahaan mendukung peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit melalui partisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pendidikan. Seluruh pendanaan atas kegiatan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan. Berikut pelatihan yang diikuti Komite Audit pada tahun 2025.

Audit Committee Competency Development

The Company supports the competency development of Audit Committee members through participation in training and educational programs. All funding for these activities is fully covered by the Company. The following is a list of training programs attended by the Audit Committee in 2025.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
Rachlan S. Nashidik**	Ketua Chair	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Febrio Nathan Kacaribu*****	Wakil Ketua I Vice Chair I	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Nurul Ichwan*	Wakil Ketua II Vice Chair II	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Tubagus Donny Syafardan	Anggota Member	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	*Certified Governance Oversight Professional* (CGOP)	13 December 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Arief Ibnu Nugroho*****	Anggota Member	*Sharing Session*	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 December 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
		Pelatihan Training	GRC Summit 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through GRC In The Post-Digital Era;*	10 December 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
		Pelatihan Training	Penerapan ICoFR Untuk Meningkatkan Integritas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Publik; Implementing ICoFR to Enhance Financial Report Integrity and Public Trust;	21-22 Agustus 2025 December 21-22, 2025	IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association)
		Pelatihan Training	*Financial Modeling and Forecasting Financial Statements via LinkedIn Learning;*	12 Juni 2025 June 12, 2025	LPPI
		Pelatihan Training	*Corporate Finance: Environmental, Social, and Governance* (ESG) *via LinkedIn Learning*	1 Juni 2025 June 1, 2025	LinkedIn Learning
		Pelatihan Training	*Corporate Finance Foundations via LinkedIn Learning*	30 Mei 2025 May 30, 2025	LinkedIn Learning
		Pelatihan Training	BSE *Masterclass "Global Trade Tensions: Turning Crisis into Opportunity"*	30 Mei 2025 May 30, 2025	LinkedIn Learning
		Pelatihan Training	*Project Management Foundations: Quality via LinkedIn Learning*	28 Mei 2025 May 28, 2025	BUMN School of Excellence
		Pelatihan Training	BSE *Masterclass "Masterclass 1 - 2025 - Creating Business Ecosystem"*	29 Maret 2025 March 29, 2025	LinkedIn Learning
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	*Certified Governance Oversight Professional* (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Mustoha Iskandar*	Ketua Chair	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Suwandi***	Wakil Ketua II Vice Chair II	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Danar Rahmanto*	Wakil Ketua III Vice Chair III	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
RM. Wiratmoko Prasidhanto***	Anggota Member	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia. Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia.	10 December 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI

*) Menjabat sejak 1 Januari 2025 dan dialihtugaskan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 10 Februari 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Tidak lagi menjabat sejak 31 Agustus 2025
*****) Menjabat sejak 1 September 2025
******) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025

*) Serving since January 1, 2025, and reassigned to the Nomination and Remuneration Committee as of February 10, 2025
**) No longer in office since June 16, 2025
***) In office since June 16, 2025
****) No longer in office since August 31, Desember 2025
*****) In office since September 1, 2025
******) No longer in office since December 15, 2025

Rapat Komite Audit

Kebijakan rapat Komite Audit, yaitu dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 orang (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Audit yang ditunjuk oleh ketua Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Perbedaan pendapat dalam rapat dicantumkan dalam risalah rapat.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rekapitulasi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

The Audit Committee meeting policy states that it may be held at least once a month. Decisions can be made at Audit Committee meetings if attended by at least 66% of the total membership, or two (including the Chairperson) of the three (including the Chairperson). Committee meeting decisions are made by consensus. In the absence of consensus, decisions are made by majority vote.

Audit Committee meetings are chaired by the Chair of the Audit Committee, who is appointed by the Chair of the Audit Committee. Each Audit Committee meeting is documented in minutes of the meeting, which are signed by all members of the Audit Committee present. Dissenting opinions are recorded in the minutes.

In 2025, the Audit Committee held 11 (eleven) meetings, with a summary of attendance and agenda as follows:

Komite Audit Audit Committee	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attended	**Kehadiran** Attendance
Rachlan S. Nashidik***	6	6	100%
Febrio N. Kacaribu******	10	9	90%
Nurul Ichwan***	6	6	100%
Tubagus Donny Syafardan	11	11	100%
Arief Ibnu Nugroho*****	4	4	100%
Suwandi*	1	1	100%
Mustoha Iskandar**	5	5	100%
Danar Rahmanto**	5	5	100%
RM. Wiratmoko Prasidhanto****	7	7	100%
Rata-Rata Average			**98,89%**

*) Menjabat sejak 1 Januari 2025 dan dialihtugaskan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 10 Februari 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Tidak lagi menjabat sejak 31 Agustus 2025
*****) Menjabat sejak 1 September 2025
******) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025

*) Serving since January 1, 2025, and reassigned to the Nomination and Remuneration Committee as of February 10, 2025
**) No longer in office since June 16, 2025
***) In office since June 16, 2025
****) No longer in office since August 31, Desember 2025
*****) In office since September 1, 2025
******) No longer in office since December 15, 2025

Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No	**Tanggal** Date	**Agenda** Agenda
1.	17 Januari 2025 January 17, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of the Internal Audit Unit's Audit Findings; and 2. Progress of the Internal Audit Unit's Internal Audit Work.
2.	19 Februari 2025 February 19, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of Internal Audit Unit (SPI) Audit Findings; and 2. Progress of Internal Audit Unit (SPI) Internal Audit Work.
3.	18 Maret 2025 March 18, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of Internal Audit Unit (SPI) Audit Findings; and 2. Development of Internal Supervisory Work by SPI.
4.	17 April 2025 April 17, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of Internal Audit Unit (SPI) Audit Findings; and 2. Progress of Internal Audit Unit (SPI) Internal Audit Work.

Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
5.	14 Mei 2025 May 14, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of Internal Audit Unit (SPI) Audit Findings; and 2. Progress of IAU Internal Audit Work.
6.	17 Juli 2025 July 17, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of Internal Audit Unit (SPI) Audit Findings; and 2. Progress of IAU Internal Audit Work.
7.	20 Agustus 2025 August 20, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion of the Progress of IAU Audit Findings; and 2. Progress of Internal Audit Unit (SPI) Internal Audit Work.
8.	17 September 2025 September 17, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of IAU Audit Findings; and 2. Development of IAU Internal Audit Work.
9.	23 Oktober 2025 October 23, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of Internal Audit Unit (SPI) Audit Findings; 2. Development of IAU Internal Audit Work.
10.	20 November 2025 November 20, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-Temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion on the Progress of Internal Audit Unit (SPI) Audit Findings; and 2. Development of IAU Internal Audit Work.
11.	18 Desember 2025 December 18, 2025	1. Pembahasan Progres Temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan Pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI. 1. Discussion of the Progress of IAU Audit Findings; and 2. Development of IAU Internal Audit Work.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit Pada 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten. Pelaksanaan tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of the Audit Committee's Duties and Activities in 2025

In 2025, the Audit Committee consistently carried out all of its duties and responsibilities, and reported the implementation to the Board of Commissioners as follows:

No	Deskripsi Description
1.	Kegiatan memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Ekstern, serta memastikan objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Monitoring and reviewing the Internal and External Audits effectiveness, and ensuring the objectivity and independence of Internal and External Auditors.
2.	Kegiatan memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan Tahun 2025 yang diaudit oleh auditor eksternal untuk memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan. Monitoring and reviewing the 2025 financial reporting process audited by an external auditor to ensure the credibility and objectivity of the financial statements.
3.	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan KAP, termasuk evaluasi proses pemilihan KAP, evaluasi kecukupan ruang lingkup pekerjaan KAP dan evaluasi rekomendasi audit secara keseluruhan. Evaluating the Public Accounting Firm's work, including evaluating the Public Accounting Firm selection process, evaluating the adequacy of the Public Accounting Firm's scope of work, and evaluating the overall audit recommendations.
4.	Memberikan rekomendasi kepada Dekom terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SPI. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the Internal Audit Unit's audit plan, scope, and budget.
5.	Mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI. Evaluating periodic internal auditor reports and recommending corrective actions to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies and laws and regulations, or other issues identified and reported by the Internal Audit Unit.
6.	Mengevaluasi kinerja SPI. Evaluating the IAU performance.
7.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SPI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the overall annual IAU remuneration and performance awards.

No	Deskripsi Description
8.	Kegiatan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan audit intern BUMN Induk dan Anak Perusahaan. Evaluation activities to ensure the compliance in the implementation of financial policies and internal audits of the state-owned enterprises parent company and subsidiaries.
9.	Kegiatan Evaluasi atau Analisis terhadap Kebijakan Akuntansi, Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 dan Audited Tahun 2024 PT Pupuk Indonesia (Persero). Evaluating and analyzing accounting policies, 2025 unaudited financial statements, and 2024 audited financial statements of PT Pupuk Indonesia (Persero).
10.	Kegiatan Evaluasi dan Analisis Kepatuhan Direksi terhadap PSA 62 (Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal). Evaluating and analyzing the Board of Directors' compliance with PSA 62 (Compliance with Laws and Regulations and Internal Control).
11.	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perusahaan yang menekankan pada kepatuhan terhadap Keputusan RUPS tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2024 dan Aspirasi Pemegang Saham. Evaluating Company performance evaluation activities, emphasizing compliance with the GMS resolution in the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) and shareholder aspirations.
12.	Kegiatan penelaahan untuk memberikan Persetujuan atau Tanggapan tertulis Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Pasal 11. Reviewing activities to provide written approval or response to the Board of Commissioners in accordance with Article 11 of the Articles of Association.
13.	Pengusulan Calon Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa PT Pupuk Indonesia (Persero). Proposing external auditor candidates for the 2024 Financial Statements in accordance with the provisions for procurement of goods and services of PT Pupuk Indonesia (Persero).
14.	Pengusulan Calon Lembaga Pemeringkat untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Buku 2024 sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero). Proposing Candidate Rating Agencies for the Company's Health Assessment for the 2024 Fiscal Year in accordance with the Procurement of Goods and Services Regulations of PT Pupuk Indonesia (Persero).
15.	Kegiatan Penelaahan Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2025. Reviewing the Company's Declining Performance for the 2025 Fiscal Year.
16.	Kegiatan Evaluasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025 – 2029. Fiscal the Company's Long-Term Plan for 2025-2029.
17.	Kegiatan meneliti dan menelaah Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2026. Researching and reviewing the Draft Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2026.
18.	Kegiatan Koordinasi antar Komite Dewan Komisaris dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa Rapat Komite dengan Direksi. Coordinating with the Board of Commissioners' Committees on the Implementation of Their Duties and Functions in the form of Committee Meetings with the Board of Directors.
19.	Kegiatan Evaluasi atau Analisis terhadap Laporan Manajemen Triwulanan PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2025. Evaluation or Analyzing the 2025 Quarterly Management Report of PT Pupuk Indonesia (Persero).
20.	Kegiatan Kunjungan Kerja ke Direktorat-Direktorat PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan: a. PT Pupuk Kujang; b. PT Pupuk Iskandar Muda; c. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; d. PT Petrokimia Gresik; e. PT Pupuk Kalimantan Timur; f. PT Pupuk Indonesia Niaga; g. PT Pupuk Indonesia Logistik; h. PT Rekayasa Industri. Working Visits to the Directorates of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries: a. PT Pupuk Kujang; b. PT Pupuk Iskandar Muda; c. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; d. PT Petrokimia Gresik; e. PT Pupuk Kalimantan Timur; f. PT Pupuk Indonesia Niaga; g. PT Pupuk Indonesia Logistik; h. PT Rekayasa Industri.
21.	Kegiatan Penilaian Kinerja Komite Audit. Audit Committee Performance Assessment Activities.
22.	Kegiatan Melaksanakan Penugasan Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan fungsi Komite Audit. Carrying out other Board of Commissioners assignments in accordance with the Audit Committee's functions.

Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko di lingkungan Perusahaan harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Persyaratan kemampuan adalah profesional dalam bidang manajemen risiko, sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, dan membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest* apabila diperlukan.

Anggota komite tersebut juga harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan kepatutan, antara lain: memiliki integritas yang baik, pengetahuan yang memadai tentang bisnis Perusahaan, pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang lainnya yang relevan, jujur, independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.

Standar kompetensi yang ditunjukkan oleh anggota Komite Pemantau Risiko, antara lain melalui sertifikasi:
1. ISO 31000, *International Risk Standard, ERM Fundamentals*;
2. *Certification in Risk Management Assurance* (CRMA).

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Pasal 147 yang menyatakan, "Masa jabatan anggota komite lain yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Komite Pemantau Risiko melalui keputusan Dewan Komisaris sebagai bagian dari penyelarasan penugasan. Dengan demikian susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee Members' Qualifications

The appointment of members to the Company's Risk Monitoring Committee must meet the fit and proper requirements. The requirements include professionalism in the field of risk management, ensuring objectivity in their opinions on the issues at hand, and providing a written statement of freedom from conflicts of interest, if necessary.

Committee members must also have respectable character and behavior and meet the following propriety requirements: good integrity, adequate knowledge of the Company's business, sufficient work experience in supervision/audits and other relevant fields, honesty, independence (no conflict of interest), objectivity, and professionalism, as well as trustworthiness and commitment to their duties.

Competency standards demonstrated by members of the Risk Monitoring Committee include certifications such as:
1. ISO 31000, International Risk Standard, ERM Fundamentals;
2. Certification in Risk Management Assurance (CRMA).

Appointment and Dismissal

The Risk Monitoring Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners through a decree. Dismissal may occur if the member's term of office expires, based on the Board of Commissioners' decision, is dismissed due to failure to meet established performance standards and/or incompetence in carrying out their duties.

Term of Office Provisions

The term of office for members of the Risk Monitoring Committee as regulated in Minister of BUMN Regulation No. Article 147 of Regulation PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organs and Human Capital of SOEs, which states, "The term of office of other committee members who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of a State-Owned Enterprise is a maximum of 3 (three) years and they may be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board of a State-Owned Enterprise to dismiss them at any time."

Number, Composition, and Structure of the Risk Monitoring Committee in 2025

In 2025, there was a change in the Risk Monitoring Committee composition through a decision of the Board of Commissioners as part of the alignment of assignments. Therefore, the composition and membership of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2025, was as follows:

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025
Risk Monitoring Committee Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Suwandi	Ketua Chair	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 016/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 009/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 - concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025
Risk Monitoring Committee Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Iwan Sumule	Wakil Ketua I Vice Chair I	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 016/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 009/KEP.KOM/IX/2025 dated dated September 17, 2025	17 September 2025 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 - concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Irfan Ahmad Fauzi	Wakil Ketua II Vice Chair II	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 016/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 009/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 - concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Emmanuel Setyo Budi Nugroho	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 021/KEP.KOM/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 021/KEP.KOM/VIII/2025 dated August 26, 2025	26 Agustus 2025 – 25 Agustus 2028 August 26, 2025 – August 25, 2028	Ke-1 1st
Riza Azmi	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 011a/KEP.KOM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 011a/KEP.KOM/VII/2024 dated July 29, 2025	29 Juli 2025 – 28 Juli 2026 July 29, 2025 – July 28, 2026	Ke-1 1st
Stanislaus Riyanta	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 008/KEP.KOM/VI/2025 dated June 25, 2025	01 Juli 2025 – 30 Juni 2026 July 01, 2025 – June 30, 2026	Ke-1 1st

Profil Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Profiles

Suwandi
Ketua Komite Pemantau Risiko
Chair of the Risk Monitoring Committee

Profil Suwandi dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Suwandi's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Iwan Sumule
Wakil Ketua I Komite Pemantau Risiko
Vice Chair I of the Risk Monitoring Committee

Profil Sumule dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Sumule's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Irfan Ahmad Fauzi
Wakil Ketua II Komite Pemantau Risiko
Vice Chair II of the Risk Monitoring Committee

Profil Ahmad Fauzi dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Irfan Ahmad Fauzi's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Emmanuel Setyo Budi Nugroho
Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Usia | Age
59 Tahun | Years

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili | Domicile
Cirebon, Jawa Barat

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen, STIE Cirebon (2016)
- Sarjana Akuntansi, STAN (1993)

Riwayat Pekerjaan
- Auditor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Anper (2013-2022)
- Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1986-2013)

Jabatan Rangkap
Tidak memiliki rangkap jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 021/KEP.KOM/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025

Sertifikasi
CRMP, CGOP

Educational History
- Master's Degree in Management, STIE Cirebon (2016)
- Bachelor's Degree in Accounting, STAN (1993)

Employment History
- Auditor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and Subsidiaries (2013–2022)
- Auditor the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (1986–2013)

Concurrent Positions
Has no concurrent positions

Legal Basis for Appointment
Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 021/KEP.KOM/VIII/2025 dated August, 26 2025

Certification
CRMP, CGOP



Riza Azmi
Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Memberr

Usia | Age
41 Tahun

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili | Domicile
Bogor, Jawa Barat | West Java

Riwayat Pendidikan
- Master of Science in Economics, Gadjah Mada University (2014)
- Master of Arts in Economics, Georgia State University (2013)
- Sarjana Sains Terapan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2009)

Riwayat Pekerjaan
Kepala Divisi Pemantauan Program dan Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah, KNEKS (2024-Sekarang)

Jabatan Rangkap
Kepala Divisi Pemantauan Program dan Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah, KNEKS (2024-Sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 011a/KEP.KOM/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025

Sertifikasi
CRMP, CP3P, CRGP, dan CGOP

Educational History
- Master of Science degree in Economics, Gadjah Mada University (2014)
- Master of Arts degree in Economics, Georgia State University (2013)
- Bachelor of Applied Science degree, State College of Accountancy (2009)

Employment History
Head of the Risk, Support, and Assurance Section for Government Assignments, Ministry of Finance (2021–2024)

Concurrent Positions
Head of the Division of Monitoring of Programs and Performance in the Islamic Financial Services Industry, KNEKS (2024–Present)

Legal Basis for Appointment
PTPI Board of Commissioners Decree No. 011a/KEP.KOM/VII/2025 dated July 29, 2025

Certification
CRMP, CP3P, CRGP, dan CGOP

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia



Stanislaus Riyanta
Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Usia | Age
46 Tahun | Years

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili | Domicile
Bekasi, Jawa barat

Riwayat Pendidikan
- Doktor Ilmu Administrasi Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (2022)
- Magister Kajian Stratejik Intelijen, Universitas Indonesia (2016)
- Sarjana FMIPA Ilmu Komputer, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2004)

Riwayat Pekerjaan
- Dosen Tetap, Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia (2023-sekarang)
- Direktur PT Anugerah Kresna Utama (2022-sekarang)
- Analis Strategis Astra Grup PT United Tractors Tbk (2010-2025)

Jabatan Rangkap
- Dosen Tetap, Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia (2023-sekarang)
- Direktur PT Anugerah Kresna Utama (2022-sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 008/KEP.KOM/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025

Sertifikasi
CCGO dan CGOP

Educational History
- Doctor of Public Policy Administration, Universitas Indonesia (2022)
- Master of Strategic Intelligence Studies, Universitas Indonesia (2016)
- Bachelor of Science in Computer Science, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2004)

Employment History
- Permanent Lecturer, Graduate School of Sustainable Development, Universitas Indonesia (2023-present)
- Director, PT Anugerah Kresna Utama (2022-present)
- Strategic Analyst Astra Group, PT United Tractors Tbk (2010-2025)

Concurrent Positions
- Permanent Lecturer, Graduate School of Sustainable Development, Universitas Indonesia (2023-present)
- Director, PT Anugerah Kresna Utama (2022-present)

Legal Basis for Appointment
Decree of the Board of Commissioners of PTPI No. 008/KEP.KOM/VI/2025 dated June 25, 2025

Certification
CCGO and CGOP

Independensi Komite Pemantau Risiko

Independensi adalah syarat menjadi Komite Pemantau Risiko. Anggota Komite Pemantau Risiko harus bersikap independen, objektif, dan profesional sebagaimana diatur dalam Charter Komite Pemantau Risiko yang diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum dalam Charter, Komite Pemantau Risiko juga menandatangani pernyataan independensi. Seluruh anggota Komite tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan tentang pelaksanaan GCG.

Risk Monitoring Committee Independence

Independence is a requirement for membership in the Risk Monitoring Committee. Members of the Risk Monitoring Committee must be independent, objective, and professional, as stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter, which is periodically updated to comply with applicable laws and regulations.

In addition to the Charter, the Risk Monitoring Committee also signs a statement of independence. All Committee members do not hold concurrent positions prohibited by regulations concerning the implementation of GCG.

Aspek Independensi Independence Aspect	**Suwandi*****	**Iwan Sumule****	**Irfan Ahmad Fauzi**	**Emmanuel Setyo Budi Nugroho**	**Riza Azmi**	**Stanislaus Riyanta********	**Riswinandi***	**Farhat Brachma***
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has a management relationship in the Company, Subsidiaries or Affiliated Entities	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Aspek Independensi Independence Aspect	Suwandi***	Iwan Sumule**	Irfan Ahmad Fauzi	Emmanuel Setyo Budi Nugroho	Riza Azmi	Stanislaus Riyanta****	Riswinandi*	Farhat Brachma*
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Owns shares of the Company, either directly or indirectly	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Has a familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Committee members	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Menjabat sebagai pengurus partai politik Serves as an administrator of political parties	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Menjabat sebagai pejabat Pemerintah Serves as a Government Official	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Menjabat sejak 16 Juni 2025
***) Menjabat sejak 23 Juni 2025
****) Menjabat sejak 1 Juli 2025

*) No longer in office since June 16, 2025
**) In office since June 16, 2025
***) In office since June 23, 2025
****) In office since July 1, 2025

Pedoman Kerja: Piagam Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris menetapkan pedoman kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko. Pedoman tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/KEP.KOM/II/2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI tanggal 29 Februari 2024. Piagam ini menjadi acuan bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip GCG serta mengikat seluruh Anggota Komite dalam pelaksanaan aktivitasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko bertugas untuk:

1. Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan fungsi pengawasan (*oversight roles*) dalam perspektif penerapan manajemen risiko terintegrasi Perusahaan terhadap hal-hal berikut ini:
   a. Kinerja Operasional – meninjau pelaksanaan kegiatan dan kinerja operasional yang relevan dengan ruang lingkup penerapan manajemen risiko terintegrasi, sebagaimana yang diterapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.
   b. Manajemen Risiko – melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap proses manajemen risiko, memantau kesesuaian praktik manajemen risiko dengan kebijakannya, serta memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Efektivitas pengelolaan manajemen risiko, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Working Guidelines: Risk Monitoring Committee Charter

The Board of Commissioners has established working guidelines as the basis for implementing the Risk Monitoring Committee's duties. These guidelines were established through Board of Commissioners Decree No. 005/KEP.KOM/II/2024 concerning the PTPI (Persero) Risk Monitoring Committee Charter dated February 29, 2024. This Charter serves as a reference for the Risk Monitoring Committee in carrying out its duties and functions in accordance with GCG principles and is binding on all Committee Members when carrying out its activities.

Duties and Responsibilities

Based on the Risk Monitoring Committee Charter, the Risk Monitoring Committee is responsible for:

1. The Risk Monitoring Committee is responsible for performing oversight roles from the perspective of the Company's integrated risk management implementation regarding the following:
   a. Operational Performance – reviewing the implementation of activities and operational performance relevant to the scope of integrated risk management implementation, as outlined in the company's annual work plan and budget.
   b. Risk Management – monitoring and reviewing the risk management process, ensuring the alignment of risk management practices with its policies, and ensuring the implementation of the principles, functions, and implementation related to the Company's risk management policies. The effectiveness of risk management is related to the following:

i) Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
ii) Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fraud dan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat; dan
iii) Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

c. Melakukan pemantauan dan penelaahan Laporan Manajemen Perusahaan yang antara lain terdiri dari laporan kinerja Perusahaan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, serta laporan-laporan lain, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perusahaan serta pelaksanaan operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal.
d. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perusahaan (Induk) dan Anak Perusahaan.
e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan (Induk) dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan.
f. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
g. Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan, agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada Pemegang Saham dalam kurun waktu yang ditetapkan.
h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS/Menteri.
i. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Pemantau Risiko untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya.
   i) Ketua bersama dengan anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
      - Menentukan rencana kerja tahunan.
      - Menentukan jadwal rapat tahunan.
      - Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Komite Pemantau Risiko.

i) Implementing a strong risk management supervision function;
ii) Establishing a risk management culture that reduces the likelihood of fraud and unhealthy business practices; and
iii) Identifying risk management-related issues that require the attention of the Board of Commissioners.

c. Monitoring and reviewing the Company's Management Report, which includes monthly, quarterly, semi-annual, and annual performance reports, as well as other reports, including but not limited to the implementation of risk management and its mitigation for the Company's business and investment plans, as well as operational implementation from a financial and legal perspective.
d. Monitoring and reviewing the appropriateness of the implementation of the Company's (Parent) and Subsidiary Company's Risk Management policies and strategies.
e. Providing recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of Risk Management implementation and the appropriateness of the Company's (Parent) and Subsidiary Company's Risk Management policies.
f. Reporting the results of monitoring and review and providing recommendations on matters requiring the Board of Commissioners' attention.
g. Assessing situations that are expected to jeopardize the Company's business continuity, so that the Board of Commissioners can report to Shareholders within a specified timeframe.
h. Monitoring and evaluating the implementation of other Risk Management functions in accordance with laws and regulations, the articles of association, and/or GMS/ Ministerial decisions.
i. The Committee Chair is responsible for coordinating all Risk Monitoring Committee activities to achieve the committee's objectives as established.
   i) The Chair, along with the members of the Risk Monitoring Committee, is responsible for the following:
      - Determining the annual work plan.
      - Determining the annual meeting schedule.
      - Actively participating and contributing to all Risk Monitoring Committee activities.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Perusahaan mendukung peningkatan kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko melalui partisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pendidikan. Seluruh pendanaan atas kegiatan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan. Berikut pelatihan yang diikuti Komite Pemantau Risiko pada tahun 2025.

Risk Monitoring Committee Competency Development

The Company supports the competency development of Risk Monitoring Committee members through participation in training and educational programs. All funding for these activities is fully covered by the Company. The following training programs were attended by the Monitoring in 2025.

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Suwandi***	Ketua Chair	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Iwan Sumule**	Wakil Ketua I Vice Chair I	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Irfan Ahmad Fauzi	Wakil Ketua II Vice Chair II	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Emmanuel Setyo Budi Nugroho	Anggota Member	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
		Pelatihan Training	Master Class Program Series XXIV: Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital Master Class Program Series XXIV: Risk Mitigation in Digital Transformation	03 – 04 Juli 2025 July 03-04, 2025	PT LSP Manajemen Risiko (LSPMR)
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Riza Azmi	Anggota Member	*Workshop*	Risk Beyond 2025: On Enterprises Management	4-5 Desember 2025 December 4-5, 2025	ERMA
		Workshop	Mencegah Keputusan Bisnis di BUMN/D Terjerat Dalam Kasus Korupsi Preventing Business Decisions in SOEs/ROEs from Corruption Cases	06 Desember 2025 December 06, 2025	Visi Integritas dan Satu Visi Law Office
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Stanislaus Riyanta****	Anggota Member	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Riswinandi*	Ketua Chair	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Farhat Brachma*	Wakil Ketua I Vice Chair I	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Menjabat sejak 16 Juni 2025
***) Menjabat sejak 23 Juni 2025
****) Menjabat sejak 1 Juli 2025

*) No longer in office since June 16, 2025
**) In office since June 16, 2025
***) In office since June 23, 2025
****) In office since July 1, 2025

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan rapat Komite Pemantau Risiko, yaitu dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 orang (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang ditunjuk oleh ketua Komite Pemantau Risiko. Setiap rapat Komite GCG dan Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir. Perbedaan pendapat dalam rapat dicantumkan dalam risalah rapat.

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rekapitulasi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meetings

The Risk Monitoring Committee meeting policy states that it may be held at least once a month. Decisions can be made at Risk Monitoring Committee meetings if attended by at least 66% of the total membership, or two (including the Chairperson) of the three (including the Chairperson). Committee meeting decisions are made by consensus. In the absence of consensus, decisions are made by majority vote.

Risk Monitoring Committee meetings are chaired by the Chair of the Risk Monitoring Committee, who is appointed by the Chair of the Risk Monitoring Committee. Each GCG and Risk Monitoring Committee meeting is documented in minutes of the meeting, which are signed by all members of the Risk Monitoring Committee present.

Dissenting opinions are recorded in the minutes. In 2025, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings, with a summary of attendance and agenda as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko Pada Rapat Tahun 2025
Recapitulation of Risk Monitoring Committee Attedance at 2025 Meetings

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attended
Suwandi***	7	7	100%
Iwan Sumule**	7	7	100%
Irfan Ahmad Fauzi	12	12	100%
Emmanuel Setyo Budi Nugroho	12	12	100%
Riza Azmi	12	12	100%
Stanislaus Riyanta****	7	7	100%
Riswinandi*	5	5	100%
Farhat Brachma*	5	5	100%
Rata-Rata Average			**100%**

*) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
**) Menjabat sejak 16 Juni 2025
***) Menjabat sejak 23 Juni 2025
****) Menjabat sejak 1 Juli 2025

*) No longer in office since June 16, 2025
**) In office since June 16, 2025
***) In office since June 23, 2025
****) In office since July 1, 2025

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
1	21 Januari 2025 January 21, 2025	1. Update Peran Manajemen Risiko dalam Peraturan Teknis ICOFR; 2. Pembahasan Capaian KPI terkait Manajemen Risiko Triwulan IV 2024; 3. Pembahasan Status RTM dan Kinerja Manajemen Risiko s.d. Desember 2024; 4. Pembahasan Kinerja Tata Kelola sampai dengan November 2024; dan 5. Pembahasan Update Risiko TI sampai dengan Desember 2024. 1. Update on the Role of Risk Management in the ICOFR Technical Regulations; 2. Discussion on KPI Achievements related to Risk Management for QIV of 2024; 3. Discussion on RTM Status and Risk Management Performance as of December 4, 2024; 4. Discussion of Governance Performance as of November 2024; and 5. Discussion of IT Risk Updates as of December 2024.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
2	24 Februari 2025 February 24, 2025	1. Rencana Penyelesaian APS RUPS terkait Manajemen Risiko Tahun 2025; 2. Tindak Lanjut AOI RMI 2024; 3. Persiapan Implementasi Perpres 6/2025; 4. Progress RTM per Januari 2025 dan Rencana Kerja Manajemen Risiko 2025; dan 5. Kinerja Tata Kelola per Januari 2025. 1. Plan for Completion of the 2025 APS GMS related to Risk Management; 2. Follow-up on the 2024 AOI RMI; 3. Preparation for the Implementation of Presidential Regulation 6/2025; 4. Progress of the RTM as of January 2025 and the 2025 Risk Management Work Plan; and 5. Governance Performance as of January 2025.
3	20 Maret 2025 March 20, 2025	1. Pembahasan SDM *Mapping* pada fungsi Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Group dan Kebutuhan SDM dalam rangka Implementasi ICOFR; 2. Pembahasan Risiko Bahan Baku (Pasokan Gas, dan Stok serta Pengadaan Bahan Baku NPK); 3. Status RTM dan Kinerja MR s.d. Februari 2025; 4. Kinerja Tata Kelola dan Kepatuhan s.d. Februari 2025. 1. Discussion on HC Mapping in the Pupuk Indonesia Group Risk Management function and HC Requirements for ICOFR Implementation; 2. Discussion on Raw Material Risks (Gas Supply, Stock, and Procurement of NPK Raw Materials); 3. RTM Status and MR Performance as of February 2025; 4. Governance and Compliance Performance as of February 2025.
4	22 April 2025 April 22, 2025	1. Peningkatan Produktivitas dan efisiensi SDM khususnya pada bidang Produksi; 2. Inventarisasi dan mensolusi rangkap jabatan & kekosongan posisi jabatan di lingkungan Pupuk Indonesia Group; 3. Dampak dan mitigasi atas kejadian *fatality* terhadap SDM Pupuk Indonesia Group; 4. Evaluasi atas pelaksanaan Updating Talent Pool 2025; dan 5. Isu-isu strategis lainnya. 1. Increasing HC productivity and efficiency, particularly in the Production sector; 2. Inventorying and resolving overlapping positions and vacancies within the Pupuk Indonesia Group; 3. Impact and mitigation of fatalities on Pupuk Indonesia Group HC; 4. Evaluation of the implementation of the 2025 Updating Talent Pool; and 5. Other strategic issues.
5	20 Mei 2025 May 20, 2025	1. Pembahasan *Progress* Penyusunan Dokumen *Contingency Plan* PT Pupuk Indonesia (Persero) Induk dan Anper; 2. Pembahasan *Progress* Persiapan GCG *Assessment* PT Pupuk Indonesia (Persero); 3. Pembahasan Kinerja Riset PT Pupuk Indonesia (Persero); 4. Status RTM dan Kinerja MR sampai dengan April 2025; dan 5. Kinerja Tata Kelola sampai dengan April 2025. 1. Discussion on the Progress of Preparing the Contingency Plan Documents for PT Pupuk Indonesia (Persero) Parent and Anper; 2. Discussion on the Progress of Preparation for the GCG Assessment of PT Pupuk Indonesia (Persero); 3. Discussion on the Research Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero); 4. RTM Status and MR Performance as of April 2025; and 5. Governance Performance as of April 2025.
6	23 Juli 2025 July 23, 2025	1. Update Restrukturisasi dan Risiko Keuangan Rekind, Proyeksi Kinerja Rekind Akhir Tahun 2025 serta Dampaknya kepada Kinerja PI; 2. *Progress* Persiapan GCG *Assessment* tahun 2025; 3. Status RKM dan Kinerja MR s.d. Juni 2025; 4. Kinerja Tata Kelola sampai dengan Juni 2025. 1. Update on Rekind's Restructuring and Financial Risks, Projected Rekind Performance by the End of 2025, and Its Impact on PI Performance 2. Progress in Preparation for the 2025 GCG Assessment 3. Status of the RKM and MR Performance as of June 2025 4. Governance Performance as of June 2025.
7	25 Agustus 2025 August 25, 2025	1. Progres Proyek Pusri-IIIB dan *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT; 2. Progres Pengamanan Pasokan Bahan Baku Gas dan Risiko Pengadaan s.d. Akhir Tahun 2025; 3. Status RTM dan Kinerja MR s.d. Juli 2025; dan 4. Kinerja Tata Kelola s.d. Juli 2025. 1. Progress of the Pusri-IIIB Project and the Revamping of Ammonia PKT Plant-2; 2. Progress in Securing Gas Raw Material Supply and Procurement Risks until the End of 2025; 3. RTM Status and MR Performance until July 2025; and 4. Governance Performance until July 2025.
8	22 September 2025 September 22, 2025	1. Pembahasan *Update* Pasokan Gas untuk PKC; 2. Implementasi Skema Baru Penyaluran PSO; 3. Update RMI Tahun Buku 2024; 4. Kinerja MR dan Status RTM sampai dengan Agustus 2025; dan 5. Kinerja Tata Kelola dan Kepatuhan sampai dengan Agustus 2025. 1. Discussion on Gas Supply Updates for PKC; 2. Implementation of the New PSO Distribution Scheme; 3. RMI Update for Fiscal Year 2024; 4. MR Performance and RTM Status as of August 2025; and 5. Governance and Compliance Performance as of August 2025.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
9	22 Oktober 2025 October 22, 2025	1. Progres Pemenuhan Dokumen Asesmen GCG Aspek Dewan Komisaris; 2. Pembahasan MR dalam RKAP 2026; 3. Kinerja MR dan Status RTM sampai dengan September 2025; dan 4. Kinerja Tata Kelola dan Kepatuhan sampai dengan September 2025 1. Progress on Compliance with the GCG Assessment Documents for the Board of Commissioners; 2. Discussion of the Corporate Governance (MR) in the 2026 Work Plan and Budget (RKAP); 3. Corporate Governance (MR) Performance and RTM Status as of September 2025; and 4. Governance and Compliance Performance as of September 2025
10	21 November 2025 November 21, 2025	1. Pembahasan Kinerja dan Risiko Teknologi Informasi sampai dengan Oktober 2025; 2. Pembahasan Rencana Implementasi Marked to Market dalam Perhitungan Subsidi Pupuk dan Risiko bagi PTPI; 3. Pembahasan Progress GCG Assessment Tahun Buku 2024; 4. Status RTM dan Kinerja Manajemen Risiko sampai dengan Oktober 2025; dan 5. Kinerja Tata Kelola dan Kepatuhan sampai dengan Oktober 2025. 1. Discussion on Information Technology Performance and Risks until October 2025; 2. Discussion on the Marked-to-Market Implementation Plan for Fertilizer Subsidy Calculations and Risks for PTPI; 3. Discussion on the GCG Assessment Progress for Fiscal Year 2024; 4. RTM Status and Risk Management Performance until October 2025; and 5. Governance and Compliance Performance until October 2025.
11	04 Desember 2025 December 04, 2025	1. Pedoman *Whistleblowing System*; 2. Pola kerja sama dengan pihak ketiga (Deloitte Consultant); 3. Progres pengelolaan WBS dari Agustus 2024 sampai dengan sekarang; 4. Tim Internal PI yang diberi tanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut aduan. 1. Whistleblowing System Guidelines; 2. Collaboration pattern with third parties (Deloitte Consultants); 3. Progress of WBS management from August 2024 to present; 4. Internal PI Team responsible for implementing complaint follow-up.
12	17 Desember 2025 December 17, 2025	1. Pembahasan Dampak Banjir Sumatera terhadap Operasi dan Penyaluran Pupuk PSO serta Kinerja PTPI; 2. Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko dalam rangka untuk Mendukung Pengelolaan Risiko 2026; 3. *Progress* GCG *Assessment*; 4. Status RTM dan Kinerja MR sampai dengan November 2025; dan 5. Kinerja Tata Kelola dan Kepatuhan sampai dengan November 2026. 1. Discussion on the Impact of the Sumatra Floods on PSO Fertilizer Operations and Distribution and PTPI's Performance; 2. Discussion on the Development of a Risk Management Information System to Support Risk Management in 2026; 3. GCG Assessment Progress; 4. RTM Status and MR Performance as of November 2025; and 5. Governance and Compliance Performance as of November 2026.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Pada 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bentuk realisasi tugas dan tanggung jawabnya. Rincian pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Brief Report on the Implementation of Risk Monitoring Committee Duties and Activities in 2025

In 2025, the Risk Monitoring Committee carried out activities to fulfill its duties and responsibilities. Details of these activities are shown in the following table.

No	Deskripsi Description
1	Evaluasi/Monitoring Pelaksanaan RKAP 2024, yang menekankan pada aspek Governance, Risk, dan Compliance (GRC) sesuai Keputusan RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 Evaluation/Monitoring of the Implementation of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP), emphasizing Governance, Risk, and Compliance (GRC) aspects in accordance with the GMS Resolution regarding the 2024 Company Work Plan and Budget
2	Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) PTPI Tahun 2024 Evaluation of the Implementation of PTPI's 2024 Corporate Governance (GCG)
3	Pemantauan Manajemen Risiko Risk Management Monitoring
4	Evaluasi/Kajian atas usulan permohonan persetujuan atau tanggapan Dewan Komisaris yang disampaikan Direksi untuk aksi korporasi tertentu sesuai Anggaran Dasar Evaluation/Review of the Board of Commissioners' proposals for approval or responses submitted by the Board of Directors for certain corporate actions in accordance with the Articles of Association
5	Pelaksanaan penugasan dari Dewan Komisaris Implementation of assignments from the Board of Commissioners

No	Deskripsi Description
6	Penyusunan laporan pelaksanaan program Komite Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III Tahun 2024 Preparation of Committee program implementation reports for the first, second, and third quarters of 2024
7	Kegiatan koordinasi Komite Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi rapat internal Dewan Komisaris, rapat komite dengan Direksi, serta rapat dengan unit kerja terkait dan rapat lainnya Coordination activities of the Board of Commissioners' Committees in carrying out their duties and functions, including internal Board of Commissioners meetings, committee meetings with the Board of Directors, meetings with relevant work units, and other meetings
8	Telaah atas permohonan tanggapan tertulis terkait tindakan pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan dalam rangka penetapan saham istimewa Seri A Dwiwarna pada anak perusahaan eks BUMN dan/atau hasil spin-off view of requests for written responses regarding the divestment of equity participation in subsidiaries in connection with the establishment of Series A Dwiwarna preferred shares in subsidiaries of former state-owned enterprises and/or spin-offs
9	Telaah bersama Komite Audit serta Komite Nominasi & Remunerasi atas usulan draft KPI individu Direksi PTPI Tahun 2024 Joint review with the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee on the proposed draft of the individual KPIs for the PTPI Board of Directors in 2024
10	Telaah bersama Komite Audit serta Komite Nominasi & Remunerasi terkait kebijakan ambang batas transaksi di PTPI dan entitas anak Joint review with the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee regarding the transaction threshold policy at PTPI and its subsidiaries
11	Telaah bersama Komite Audit serta Komite Nominasi & Remunerasi terkait Rancangan RJP 2025–2029 PTPI Joint review with the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee regarding the Draft 2025–2029 PTPI Long-Term Plan
12	Telaah bersama Komite Tata Kelola Terintegrasi terkait penyusunan dan/atau pemutakhiran kebijakan tata kelola benturan kepentingan di lingkungan Pupuk Indonesia Group Tahun 2024 Joint review with the Integrated Governance Committee regarding the preparation and/or updating of the conflict of interest governance policy within the Pupuk Indonesia Group in 2024
13	Mendampingi Dewan Komisaris dalam kunjungan kerja ke PT Petrokimia Gresik Accompanying the Board of Commissioners on a working visit to PT Petrokimia Gresik
14	Telaah atas Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PTPI Review of PTPI's Contingency Plan
15	Kunjungan kerja Komite bersama Dewan Komisaris ke: 1) PT Pupuk Iskandar Muda 2) PT Pupuk Kujang 3) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 4) PT Petrokimia Gresik 5) PT Pupuk Indonesia Utilitas 6) PT Pupuk Indonesia Logistik Working visits by the Committee and the Board of Commissioners to: 1) PT Pupuk Iskandar Muda 2) PT Pupuk Kujang 3) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 4) PT Petrokimia Gresik 5) PT Pupuk Indonesia Utilitas 6) PT Pupuk Indonesia Logistik
16	Mengikuti pelatihan *Certified Governance Oversight Professional* (CGOP) Participating in Certified Governance Oversight Professional (CGOP) training
17	Pemutakhiran Piagam Komite Pemantau Risiko PTPI Charter Update PTPI Risk Monitoring Committee
18	Evaluasi Komite atas pembaruan Rancangan RJP 2025–2029 PTPI Committee evaluation of the updated PTPI 2025–2029 Draft Long-Term Plan
19	Evaluasi Komite atas permohonan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan inisiatif sesuai RPP Rekind Committee evaluation of the Board of Commissioners' written response request for the implementation of initiatives in accordance with the Rekind RPP
20	Evaluasi dan penilaian teknis pengadaan jasa Akuntan Publik PTPI dan entitas anak Tahun Buku 2024 Evaluation and technical assessment of the procurement of Public Accounting services from PTPI and its subsidiaries for the 2024 Fiscal Year

Komite Nominasi & Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut kebijakan Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Surat No. S-254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Talent & Succession Management Direksi BUMN. Dalam ketentuan angka 3 huruf c, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diarahkan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) atau nomenklatur lain yang memiliki kesetaraan fungsi, dengan perluasan peran sebagai *Talent Committee* bagi Eksekutif BUMN (Direksi dan BOD-1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua: Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawasan/ Komisaris Independen;
2. Sekretaris: Ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
3. Anggota: Ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Nomination & Remuneration Committee

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee was implemented as a follow-up to the Ministry of BUMN policy as stipulated in Letter No. S-254/MBU/04/2020 dated April 17, 2020, concerning Talent & Succession Management for SOE Boards. In provision 3(c), the Board of Commissioners/ Supervisory Board is directed to establish a Nomination and Remuneration Committee (NRC), or another nomenclature with equivalent functions, with an expanded role as a Talent Committee for SOE Executives (Board of Directors and BOD-1), with the following membership composition:

1. Chairman: President Commissioner/Chair of the Supervisory Board/Independent Commissioner;
2. Secretary: Determined through the decision of the Board of Commissioners/Supervisory Board meeting;
3. Members: Determined through the decision of the Board of Commissioners/Supervisory Board meeting.

Kualifikasi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 06/KEP.KOM/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 06/KEP.KOM/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Pada tahun 2021, terjadi perubahan komposisi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, sehingga diperbarui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 serta pengangkatan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP.KOM/ VI/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan No. 011/KEP.KOM/I2021 tanggal 27 September 2021.

Qualifications of Nomination & Remuneration Committee Members

The Board of Commissioners established a Nomination & Remuneration Committee based on PTPI Board of Commissioners Decree No. 06/KEP.KOM/IV/2020 dated April 22, 2020. In 2022, the Board of Commissioners established a Nomination & Remuneration Committee based on PTPI Board of Commissioners Decree No. 06/KEP.KOM/IV/2020 dated April 22, 2020. In 2021, when there was a change in the Nomination & Remuneration Committee members composition, it was updated again through Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021 dated March 5, 2021, with the appointment of Nomination & Remuneration Committee members through Board of Commissioners Decrees No. 007/KEP.KOM/VI/2021 dated July 9, 2021, and No. 011/KEP.KOM/IX/2021 dated September 27, 2021.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Appointment and Dismissal

Members of the Nomination & Remuneration Committee are appointed and dismissed through the Board of Commissioners Meeting for a certain term of office and can be reappointed in the following period. Replacement of members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners shall be carried out no later than 60 days after the member of the Nomination and Remuneration Committee is no longer able to carry out their functions.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Dewan Komisaris ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Term of Office

In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-06/MBU/04/2021 of 2021 concerning Amendments to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee from outside the Board of Commissioners is set at a maximum of three years which may be extended once for a maximum period of two years. This provision does not take away the authority of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss Committee members at any time in accordance with applicable regulations.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Komite Nominasi & Remunerasi melalui keputusan Dewan Komisaris sebagai bagian dari penyelarasan penugasan. Dengan demikian susunan dan komposisi keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Number, Composition, and Structure of the Nomination & Remuneration Committee in 2025

In 2025, the composition of the Nomination & Remuneration Committee changed following a Board of Commissioners decision as part of the alignment of assignments. Therefore, the Nomination & Remuneration Committee composition and membership as of December 31, 2025, was as follows:

Susunan Komite Nominasi & Remunerasi per 31 Desember 2025
Nomination & Remuneration Committee Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Chrisna Deva Priyapratama	Ketua Chair	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 016/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 016/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 - concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Yovie Widianto	Wakil Ketua I Vice Chair I	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 016/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 016/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 - concurrent with the term of office as Commissioner	Ke-1 1st

Susunan Komite Nominasi & Remunerasi per 31 Desember 2025
Nomination & Remuneration Committee Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
R. Nurhidayat	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 011/KEP. KOM/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 011/KEP. KOM/VII/2025 dated July 7, 2025	25 Juli 2025 – 24 Juli 2026 July 25, 2025 – July 24, 2026	Ke-1 1st
Aznil	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 011/KEP. KOM/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 PTPI Board of Commissioners Decree No. 011/KEP. KOM/VII/2025 dated July 7, 2025	25 Juli 2025 – 24 Juli 2026 July 25, 2025 – July 24, 2026	Ke-1 1st

Profil Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee Profiles

Chrisna Deva Priyapratama
Ketua Komite Nominasi & Remunerasi
Chair of the Nomination & Remuneration Committee

Profil Chrisna Deva Priyapratama dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Chrisna Deva Priyapratama's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Yovie Widianto
Wakil Ketua I
Vice Chair I

Profil Yovie Widianto dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Yovie Widianto's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.



R. Nurhidayat
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee Member

Usia | Age
52 Tahun | Years

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili | Domicile
Depok, Jawa Barat | West Java

Riwayat Pendidikan
- Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada (2012)
- Sarjana Terapan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2004)

Riwayat Pekerjaan
- Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) – BRIN (2021-sekarang)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (2020–2021)
- Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) - Kementerian Keuangan (2020–2021)

Jabatan Rangkap
- Kepala Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (2026-sekarang)
- Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) – BRIN
- (2021-sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. No. 011/KEP.KOM/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025

Sertifikasi
- CRMP dan QRMP, CA
- CGOP dan CHRP

Educational Background
- Master's Degree in Development Economics, Universitas Gadjah Mada (2012)
- Bachelor's Degree in Applied Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2004)

Employment History
- Associate Researcher at the Fiscal Policy Agency (BKF) – BRIN (2021-present)
- Member of the Nomination and Remuneration Committee on the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) (2020–2021)
- Associate Researcher at the Fiscal Policy Agency (BKF) – Ministry of Finance (2020–2021)

Concurrent Positions
- Head of the Labor Market Center, Secretariate General of the Ministry of Manpower (2026-present)
- Associate Researcher at the Fiscal Policy Agency (BKF) – BRIN (2021-present)

Legal Basis for Appointment
PTPI Board of Commissioners Decree No. 011/KEP.KOM/VII/2025 dated July 29, 2025

Certification
- CRMP and QRMP, CA
- CGOP dan CHRP



Aznil
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee Member

Usia | Age
53 Tahun | Years

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta | South Jakarta, DKI Jakarta

Riwayat Pendidikan
Sarjana Arsitektur, Universitas Mercubuana (2001)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Eksekutif Migran Watch (2022-sekarang)
- Tenaga Profesional Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI (2021-sekarang)
- Dewan Pakar, Indonesia Future Development Study INFUNDS (2020-2023)

Jabatan Rangkap
- Direktur Eksekutif Migran Watch (2022-sekarang)
- Tenaga Profesional Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI (2021-sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris PTPI No. 011/KEP.KOM/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025

Sertifikasi
CGOP

Educational Background
Bachelor's Degree in Architecture, Universitas Mercubuana (2001)

Employment History
- Executive Director of Migrant Watch (2022-present)
- Professional Staff at the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) (2021-present)
- Expert Council, Indonesia Future Development Study INFUNDS (2020-2023)

Concurrent Positions
- Executive Director of Migrant Watch (2022-present)
- Professional Staff at the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) (2021-present)

Legal Basis for Appointment
PTPI Board of Commissioners Decree No. 011/KEP.KOM/VII/2025 dated July 29, 2025

Certification
CGOP

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi & Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi. Sesuai dengan amanat regulasi, Komite juga mampu menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Nomination & Remuneration Committee Independence

All members of the Nomination & Remuneration Committee have met all independence criteria. In accordance with regulatory mandates, the Committee is also capable of carrying out its duties independently, upholding the Company's interests, and is not subject to influence by any party.

Aspek Independensi Independence Aspect	Chrisna Deva Priyapratama***	Yovie Widianto***	R. Nurhidayat	Aznil****	Ari Dwipayana**	Immanuel Ebenezer Gerungan*****	Muhammad Rizal Kamal******	Anwar Sanusi**
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has a management relationship in the Company, Subsidiaries or Affiliated Entities	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Owns shares of the Company, either directly or indirectly	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Aspek Independensi Independence Aspect	Chrisna Deva Priyapratama***	Yovie Widianto***	R. Nurhidayat	Aznil****	Ari Dwipayana**	Immanuel Ebenezer Gerungan*****	Muhammad Rizal Kamal******	Anwar Sanusi**
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Komite Has a familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/ or fellow Committee members	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Menjabat sebagai pengurus partai Serves as an administrator of political	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Menjabat sebagai pejabat Pemerintah Serves as a Government Official	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓

*) Menjabat sejak 10 Februari 2025 dan dialihtugaskan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak 23 Juni 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Menjabat sejak 25 Juli 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 22 Agustus 2025
******) Tidak mengikuti rapat karena masa jabatan kurang dari 1 bulan

*) Serving since 10 February, 2025, and reassigned to the Risk Monitoring Committee as of 23 June, 2025
**) No longer in office since June 16, 2025
***) In office since June 16, 2025
****) In office since July 25, 2025
*****) No longer in office since August 22, 2025
******) Did not attend the meeting because their term of office is less than one month

Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sebagai bentuk penguatan tata kelola, Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/KEP. KOM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (Persero) PTPI. Piagam ini menjadi acuan resmi bagi Komite dalam menjalankan tugas dan fungsi secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance*, sekaligus mengikat seluruh Anggota Komite dalam pelaksanaan aktivitas dan tanggung jawabnya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:
1. Latang Belakang dan Tujuan;
2. Lingkup Tugas;
3. Wewenang;
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
5. Organisasi dan Keanggotaan;
6. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Kode Etik;
8. Pertanggung Jawaban;
9. Honorarium dan Pembebanan Biaya;
10. Amandemen Piagam dan Kinerja Komite Nominasi dan
11. Remunerasi.

Working Guidelines: Nomination & Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee duties and functions are carried out consistently in accordance with applicable laws and regulations, including Minister of BUMN Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprises' Organs and Human Capital and Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

To strengthen governance, the Board of Commissioners has established work guidelines for the Nomination and Remuneration Committee through Board of Commissioners Decree No. 004/KEP. KOM/II/2024 dated February 29, 2024, concerning the Nomination and Remuneration Committee Charter of PTPI (Persero). This charter serves as the official reference for the Committee in carrying out its duties and functions effectively, accountably, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance. It also binds all Committee Members in carrying out their activities and responsibilities.

The main provisions in the Nomination and Remuneration Committee Charter include:
1. Background and Purpose;
2. Scope of Duties;
3. Authority;
4. Obligations and Responsibilities;
5. Organization and Membership;
6. Nomination and Remuneration Committee Meetings;
7. Code of Ethics;
8. Accountability;
9. Honorarium and Expenses;
10. Amendments to the Charter and Performance of the Nomination and Remuneration Committee; and
11. Remuneration.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan membantu Dewan Komisaris dan bertugas untuk menyusun konsep dan analisis yang berhubungan dengan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Melakukan tinjauan secara berkala atas Sistem Manajemen Talenta perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya.
3. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi.
4. Melakukan evaluasi terhadap kriteria yang digunakan dalam proses talent classification yang dilakukan oleh Direksi.
5. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi, untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri.
6. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
7. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* (KPI) Individu anggota Direksi.
8. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
9. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun.
10. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
11. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
12. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan tugas dan pelaporannya secara mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
2. Bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
3. Melakukan penelaahan atas usulan KPI Direksi secara individual serta melakukan review atas pencapaiannya secara berkala;
4. Menyusun Laporan Triwulanan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris pada bulan pertama setelah triwulan yang bersangkutan;
5. Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris, jika diminta;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
7. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris jika diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris;

Nomination & Remuneration Committee Duties and Responsibilities

The Nomination & Remuneration Committee has the following duties and responsibilities:

1. Assisting the Board of Commissioners and being responsible for developing concepts and analyses related to the Nomination and Remuneration Committee functions;
2. Conducting periodic reviews of the Company's Talent Management System and monitoring and evaluating its implementation.
3. Evaluating the Talent Classification system and procedures implemented by the Board of Directors.
4. Evaluating the criteria used in the talent classification process implemented by the Board of Directors.
5. Validating and calibrating Selected Talent to produce a list of Nominated Talent nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister.
6. Evaluating prospective Company representatives proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of Subsidiaries, prior to submission to the GMS/Minister.
7. Evaluating the proposed Key Performance Indicators (KPIs) for individual members of the Board of Directors.
8. Preparing a proposed individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
9. Assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on established benchmarks.
10. Preparing a proposed development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
11. Evaluating employee remuneration policies that require approval/response from the Board of Commissioners.
12. Evaluating the Board of Directors' proposals regarding the Company's organizational structure.
13. Carrying out other duties as requested by the Board of Commissioners.

Responsibilities

1. Carrying out duties and reports independently and are directly accountable to the Board of Commissioners;
2. Working collectively when carrying out their duties to assist the Board of Commissioners;
3. Reviewing the Board of Directors' individual KPI proposals and periodically reviewing their achievements;
4. Preparing a Quarterly Report on the Nomination and Remuneration Committee's Activities and submitting it to the Board of Commissioners in the first month after the relevant quarter;
5. Preparing special reports to the Board of Commissioners, if requested;
6. Maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information;
7. Providing opinions to the Board of Commissioners, if requested, regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and identifying matters requiring the Commissioners' attention;

8. Melakukan penelaahan atas usulan pengangkatan/pemberhentian Kepala SPI dan Sekretaris Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
9. Melakukan penelaahan atas usulan perubahan struktur organisasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

8. Reviewing proposals for the appointment/dismissal of the Chief Audit Executive and the Corporate Secretary that require the Board of Commissioners' approval;
9. Reviewing proposals for changes in the organizational structure that require the Board of Commissioners' approval.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi & Remunerasi

Perusahaan mendukung peningkatan kompetensi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi melalui partisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pendidikan. Seluruh pendanaan atas kegiatan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan. Berikut pelatihan yang diikuti Komite Nominasi & Remunerasi pada tahun 2025.

Nomination & Remuneration Committee Competency Development

The Company supports the competency development of the Nomination & Remuneration Committee members through their participation in training and educational programs. All funding for these activities is fully covered by the Company. The following training programs were attended by the Nomination & Remuneration Committee in 2025.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Chrisna Deva Priyapratama**	Wakil Ketua I Vice Chair I	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Yovie Widianto**	Wakil Ketua II Vice Chair II	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
R. Nurhidayat	Anggota Member	Pelatihan Training	Pelatihan Data Analytics Data Analytics Training	27 Oktober – 17 Desember 2025 October 27 – December 17, 2025	Purwadhika Digital Technology Institute
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Aznil****	Anggota Member	*Sharing Seassion*	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
		Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	13 Desember 2025 December 13, 2025	CRMS Indonesia
Ari Dwipayana**	Wakil Ketua I Vice Chair I	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Immanuel Ebenezer Gerungan*****	Ketua Komite Committee Chair	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Muhammad Rizal Kamal******	Wakil Ketua I Vice Chair I	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Anwar Sanusi**	Wakil Ketua II Vice Chair II	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the Board of Commissioners Training and Competency Development discussion, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			

*) Menjabat sejak 10 Februari 2025 dan dialihtugaskan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak 23 Juni 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Menjabat sejak 25 Juli 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 22 Agustus 2025
******) Tidak mengikuti rapat karena masa jabatan kurang dari 1 bulan

*) Serving since 10 February, 2025, and reassigned to the Risk Monitoring Committee as of 23 June, 2025
**) No longer in office since June 16, 2025
***) In office since June 16, 2025
****) In office since July 25, 2025
*****) No longer in office since August 22, 2025
******) Did not attend the meeting because their term of office is less than one month

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Kebijakan pelaksanaan rapat Komite Nominasi & Remunerasi dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat komite dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah.

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi & Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rekapitulasi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Nomination & Remuneration Committee Meetings

The Nomination & Remuneration Committee meeting policy states that they must be held at least 1 (one) time in 1 (one) month. A committee meeting can make a decision if it is attended by at least 66% or 2 people (including the Chair) of the total of 3 members (including the Chair). Committee meeting decisions are made by consensus deliberation.

In 2025, the Nomination & Remuneration Committee held 12 (twelve) meetings, with a recapitulation of attendance and agenda as follows:

Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran Attended
Chrisna Deva Priyapratama***	6	6	100%
Yovie Widianto***	6	6	100%
R. Nurhidayat	12	12	100%
Aznil****	5	5	100%
Ari Dwipayana**	6	6	100%
Anwar Sanusi**	6	6	100%
Suwandi*	6	6	100%
Immanuel Ebenezer Gerungan*****	2	2	100%
Muhammad Rizal Kamal******	0	0	0%
Rata-Rata Average			**88,89%**

*) Menjabat sejak 10 Februari 2025 dan dialihtugaskan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak 23 Juni 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak 16 Juni 2025
***) Menjabat sejak 16 Juni 2025
****) Menjabat sejak 25 Juli 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 22 Agustus 2025
******) Tidak mengikuti rapat karena masa jabatan kurang dari 1 bulan

*) Serving since 10 February, 2025, and reassigned to the Risk Monitoring Committee as of 23 June, 2025
**) No longer in office since June 16, 2025
***) In office since June 16, 2025
****) In office since July 25, 2025
*****) No longer in office since August 22, 2025
******) Did not attend the meeting because their term of office is less than one month

Agenda Rapat Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	14 Februari 2025 February 14, 2025	Pembahasan *Updating Talent Pool.* Discussion on Updating the Talent Pool.
2	05 Maret 2025 March 5, 2025	• Pembahasan *Career Path* Karyawan Pupuk Indonesia Group; dan • Pembahasan Pedoman Standarisasi Pemberian Kompensasi dan Benefit Karyawan Pupuk Indonesia Group. • Discussion on Pupuk Indonesia Group Employee Career Paths; and • Discussion on Guidelines for Standardizing Compensation and Benefits for Pupuk Indonesia Group Employees.
3	19 Maret 2025 March 19, 2025	Pembahasan Persiapan *Updating Talent Pool.* Discussion on Preparation for Updating the Talent Pool.
4	24 April 2025 April 24, 2025	• Peningkatan Produktivitas dan efisiensi SDM khususnya pada bidang Produksi; • Inventarisasi dan mensolusi rangkap jabatan & kekosongan posisi jabatan di lingkungan Pupuk Indonesia Group; • Dampak dan mitigasi atas kejadian *fatality* terhadap SDM Pupuk Indonesia Group; • Evaluasi atas pelaksanaan *Updating Talent Poo*l 2025; dan • Isu-isu strategis lainnya. • Increasing HR Productivity and Efficiency, Especially in Production; • Inventory and Resolving Duplication and Vacancies within Pupuk Indonesia Group; • Impact and Mitigation of Fatalities on Pupuk Indonesia Group HR; • Evaluation of the Implementation of Updating the Talent Pool 2025; and • Other Strategic Issues.
5	19 Mei 2025 May 19, 2025	• Paparan pedoman Kompensasi dan Benefit Pupuk Indonesia Group; • Perkembangan kajian usulan remunerasi Tahun 2025; • Tindak lanjut/monitoring K3 dari sisi Budaya Organisasi; • Roadmap perbaikan *safety culture* beserta *timeline* (5W1H); • Data Karyawan dalam kategori *Core* dan *non-Core* dari seluruh jenjang pada semua Anper. • Presentation of the Pupuk Indonesia Group Compensation and Benefits Guidelines; • Progress on the 2025 remuneration proposal review; • Follow-up/monitoring of OHS from an organizational culture perspective; • Roadmap for improving safety culture and its timeline (5W1H); • Employee data, both core and non-core, from all levels across all Anper.
6	23 Mei 2025 May 23, 2025	• Penyampaian hasil kajian usulan remunerasi Tahun 2025; • Isu strategis lainnya. • Submission of the results of the 2025 remuneration proposal review; • Other strategic issues.
7	24 Juli 2025 July 24, 2025	• Usulan penyesuaian Struktur Organisasi; • Keterisian posisi SDM kunci di Pupuk Indonesia Group; • Keberadaan Serikat Pekerja di PT Pupuk Indonesia (Persero); • Isu Strategi Lainnya. • Proposed adjustments to the organizational structure; • Filling of key HR positions in the Pupuk Indonesia Group; • Existence of a labor union at PT Pupuk Indonesia (Persero); • Other strategic issues.
8	25 Agustus 2025 August 25, 2025	• Pedoman *reward and punishment* di Pupuk Indonesia Group; • Pelaksanaan TJSL di Pupuk Indonesia Group • Reward and Punishment Guidelines at Pupuk Indonesia Group; • Implementation of SER at Pupuk Indonesia Group
9	23 September 2025 September 23, 2025	• Penyesuaian struktur organisasi pada tingkat Direktorat Utama; • Agenda strategis Lainnya • Adjustment of the organizational structure at the Main Directorate level; • Other Strategic Agendas
10	23 Oktober 2025 October 23, 2025	• Program kerja strategis SDM 2026; • Progres Implementasi *HC Shared Service*; • Agenda strategis lainnya. • Strategic HC Work Program 2026; • Progress on the Implementation of HC Shared Service; • Other Strategic Agendas
11	25 November 2025 November 25, 2025	• Strategis SDM dalam rencana *Streamlining*; • *Employee Experience* dan *Internal Costumer Satisfaction Index*; • Pengisian posisi jabatan BOD-2 di PTPI, Khususnya Anak Perusahaan; • Agenda Strategis Lainnya. • Strategic HC in the Streamlining Plan; • Employee Experience and Internal Customer Satisfaction Index; • Filling the BOD-2 positions at PTPI, especially in subsidiaries; • Other Strategic Agendas.

Agenda Rapat Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
12	18 Desember 2025 December 18, 2025	• Kesiapan talenta untuk kebutuhan *updating talent pool;* • *Performance management: alignment* target individu dengan target Perusahaan; • *Workforce planning*: realisasi kecukupan jumlah dan kompetensi SDM; • Comben dan hubungan industrial: pengendalian biaya SDM dan hubungan dengan serikat pekerja; • Kepatuhan regulasi & audit SDM: tindak lanjut temuan BPK terkait SDM dan TJSL, serta status penyelesaiannya. • Talent readiness to meet the needs of updating the talent pool; • Performance management: aligning individual targets with company targets; • Workforce planning: ensuring adequate HR numbers and competencies; • Comben and industrial relations: controlling HR costs and relations with labor unions; • Regulatory Compliance & HC Audits: follow-up on BPK findings related to HC and SER, and the status of their resolution.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) PTPI telah melaksanakan fungsinya secara aktif dan strategis dalam mendukung Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan, melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

Implementation of the Nomination and Remuneration Committee's Duties in 2025

Throughout 2025, the PTPI Nomination and Remuneration Committee (NRC) actively and strategically carried out its functions to support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties, through the following activities:

Kegiatan Tahun 2025
2025 Activities

1.	*Review Talent Management System* PT Pupuk Indonesia (Persero). Reviewed PT Pupuk Indonesia (Persero)'s Talent Management System.
2.	*Review* Sistem dan Prosedur Pengklasifikasian Talenta PT Pupuk Indonesia (Persero). Reviewed PT Pupuk Indonesia (Persero)'s Talent Classification System and Procedures.
3.	Validasi dan Kalibrasi *Selected Talent* a. Validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*). b. Menyeleksi *selected talent* menjadi *nominated talent* untuk selanjutnya direkomendasikan kepada RUPS. 3. Validated and Calibrated Selected Talent a. Validation and calibration of Talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent), to produce a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister (Nominated Talent). b. Selecting selected talent into nominated talent for subsequent recommendation to the GMS.
4.	Evaluasi Calon Wakil Perusahaan pada Anak Perusahaan. Evaluated Candidates for Company Representatives in Subsidiaries.
5.	*Review Key Performance Indicator* Individu Anggota Direksi. Reviewed Key Performance Indicators for Individual Members of the Board of Directors.
6.	Penyiapan Usulan Sistem Evaluasi Kinerja Individu BOD dan/atau BOC. Prepared a Proposed Individual Performance Evaluation System for the BOD and/or BOC.
7.	Penyiapan Usulan Program Pengembangan bagi BOD dan/atau BOC. Prepared a Proposed Development Program for the BOD and/or BOC.
8.	Evaluasi Kebijakan Remunerasi. Evaluated the Remuneration Policy.
9.	Evaluasi Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi BOD-1. Evaluated the Proposed Adjustment to the BOD-1 Organizational Structure.
10.	Melaksanakan Tugas Lainnya yang diberikan Dewan Komisaris. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.
11.	Peningkatan Kapasitas Anggota Komite. Capacity Building of Committee Members.
12.	Kegiatan Non Rutin. Non-Routine Activities.
13.	Kegiatan Rutin. Routine Activities.
14.	Kegiatan Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Performance Assessment Activities of the Nomination and Remuneration Committee.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta Surat Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 mengenai Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di lingkungan BUMN, Dewan Komisaris PTPI membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan komite tersebut ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PTPI Nomor 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak hanya berasal dari PTPI sebagai Entitas Utama, tetapi juga melibatkan pengurus dari Entitas Anak.

Kualifikasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengangkatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Perusahaan harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Persyaratan kemampuan adalah profesional dalam bidang GCG, sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, dan membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest* apabila diperlukan. Anggota komite tersebut juga harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan kepatutan, antara lain: memiliki integritas yang baik, pengetahuan yang memadai tentang bisnis Perusahaan, pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang lainnya yang relevan, jujur, independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 017/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Penunjukan Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Indonesia. Dalam keputusan tersebut anggota komite ditetapkan secara *ex officio* dengan susuanan sebagai berikut:

Integrated Governance Committee

Based on the Minister of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN and the Deputy for Finance and Risk Management at the Ministry of BUMN Letter No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 dated 26 May 2023 concerning Technical Instructions for the Composition and Qualification of Risk Management Organs within BUMN, the PTPI Board of Commissioners established an Integrated Governance Committee. The formation of this committee was determined through PTPI Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023. The Integrated Governance Committee membership composition does not only come from PTPI as the Main Entity, but also involves management from Subsidiaries.

Qualifications of Integrated Governance Committee Members

The appointment of the Company's Integrated Governance Committee members must meet the fit and proper requirements. The capability requirement must be professional in the field of GCG, so as not to interfere with the objectivity of any opinion regarding the problems faced, and to make a statements free from conflicts of interest if necessary. Members of the committee must also have commendable characteristics and behavior and meet appropriateness requirements, including: having good integrity, adequate knowledge of the Company's business, sufficient work experience in the field of supervision/inspection and other relevant fields, honest, independent (no conflict of interest), objective and professional and trustworthy and committed to their duties.

Appointment and Dismissal

The Integrated Governance Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners through a decree. Dismissal may occur if the member's term of office expires or, based on the Board of Commissioners' decision, is dismissed for failure to meet established performance standards and/or incompetence in carrying out their duties.

Term of Office

The term of office of members is determined in accordance with the provisions of the Minister of BUMN Regulation No. PER-03/MBU/03/2023.

Number, Composition, and Structure of the Integrated Governance Committee in 2025

In 2025, there was a change in the Integrated Governance Committee composition based on Decree No. 017/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025, concerning the Appointment of the PT Pupuk Indonesia Integrated Governance Committee Membership Composition. In the decision, the following committee members were appointed ex officio:

1.	Ketua Komite **Committee Chair**	:	**Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)** PT Pupuk Indonesia (Persero) President Commissioner
2.	Anggota **Members**	:	• Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) • Komisaris Utama PT Petrokimia Gresik • Komisaris Utama PT Pupuk Kujang • Komisaris Utama PT Pupuk Kalimantan Timur • Komisaris Utama PT Pupuk Iskandar Muda • Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang • Komisaris Utama PT Rekayasa Industri • Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Niaga • Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik • Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Pangan • PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Commissioners Member • PT Petrokimia Gresik President Commissioner • PT Pupuk Kujang President Commissioner • PT Pupuk Kalimantan Timur President Commissioner • PT Pupuk Iskandar Muda President Commissioner • PT Pupuk Sriwidjaja Palembang President Commissioner • PT Rekayasa Industri President Commissioner • PT Pupuk Indonesia Niaga President Commissioner • PT Pupuk Indonesia Logistik President Commissioner • PT Pupuk Indonesia Pangan President Commissioner

Dengan demikian susunan dan komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Therefore, the Integrated Governance Committee composition and membership as of December 31, 2025, was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Sudaryono	Ketua Chair	Surat Keputusan Nomor 017/KEP. KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Decree Number 017/KEP.KOM/ IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Irfan Ahmad Fauzi	Anggota Member	Surat Keputusan Nomor 017/KEP. KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Decree Number 017/KEP.KOM/ IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Rachlan S Nashidik	Anggota Member	Surat Keputusan Nomor 017/KEP. KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Decree Number 017/KEP.KOM/ IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Chrisna Deva Priyapratama	Anggota Member	Surat Keputusan Nomor 017/KEP. KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Decree Number 017/KEP.KOM/ IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Iwan Sumule	Anggota Member	Surat Keputusan Nomor 017/KEP. KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Decree Number 017/KEP.KOM/ IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Nurul Ichwan	Anggota Member	Surat Keputusan Nomor 017/KEP. KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Decree Number 017/KEP.KOM/ IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Yovie Widianto	Anggota Member	Surat Keputusan Nomor 017/KEP. KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Decree Number 017/KEP.KOM/ IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Febrio Nathan Kacaribu	Anggota Member	Surat Keputusan Nomor 017/KEP. KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Decree Number 017/KEP.KOM/ IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-2 2nd

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Suwandi	Anggota Member	Surat Keputusan Nomor 017/KEP.KOM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Decree Number 017/KEP.KOM/IX/2025 dated September 17, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-2 2nd
Suhardi Alius	Anggota/ Komisaris Utama PT Petrokimia Gresik Member/President Commissioner of PT Petrokimia Gresik	Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 13 tanggal 30 Juni 2025 Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 13, dated June 30, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Idha Widi Arsanti	Anggota/Komisaris Utama PT Pupuk Kujang Member/President Commissioner of PT Pupuk Kujang	Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 02 tanggal 13 Agustus 2025 Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 02, dated August 13, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
D. Andhi Nirwanto	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Member/President Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur	Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 01 tanggal 4 Januari 2024 Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 01, dated January 4, 2024	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Marzuki Daud	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Iskandar Muda Member/President Commissioner of PT Pupuk Iskandar Muda	Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 03 tanggal 19 September 2024 Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 03, dated September 19, 2024	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Siti Nurizka Puteri Jaya	Anggota/ Komisaris Utama PT Sriwidjaja Palembang Member/President Commissioner of PT Sriwidjaja Palembang	Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 02 tanggal 10 Juni 2024 Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 02, dated June 10, 2024	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Dody Widodo	Anggota/ Komisaris Utama PT Rekayasa Industri Member/President Commissioner of PT Rekayasa Industri	Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 01 tanggal 7 Februari 2024 Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 01, dated February 7, 2024	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Sandra Firmania	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Niaga Member/President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Niaga	Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 06 tanggal 20 Agustus 2025 Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 06, dated August 20, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Andreas Wellman Marbun	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik Member/President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Logistik	Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 02 tanggal 3 Desember 2025 Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 02, dated December 3, 2025	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Muhammad Isra Ramli	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Pangan Member/President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Pangan	Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 01 tanggal 4 November 2024 Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 01, dated November 4, 2024	17 September 2025 – bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris September 17, 2025 – coincides with term of office as Commissioner	Ke-1 1st

Profil Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Profiles

Sudaryono
Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Chair of the Integrated Governance Committee

Profil Sudaryono dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Sudaryono's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Irfan Ahmad Fauzi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Member

Profil Irfan Ahmad Fauzi dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Irfan Ahmad Fauzi's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report

Rachlan S Nashidik
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Member

Profil Rachlan S Nashidik dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Rachlan S Nashidik's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Chrisna Deva Priyapratama
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Member

Profil Chrisna Deva Priyapratama dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Chrisna Deva Priyapratama's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Iwan Sumule
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Member

Profil Iwan Sumule dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Iwan Sumule's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Nurul Ichwan
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Member

Profil Nurul Ichwan dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Nurul Ichwan's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Yovie Widianto
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Member

Profil Yovie Widianto dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Yovie Widianto's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Suwandi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Member

Profil Suwandi dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.
Suwandi's profile can be found in the Board of Commissioners' profiles, in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Suhardi Alius

Anggota/Komisaris Utama
PT Petrokimia Gresik
Member/President Commissioner of PT Petrokimia Gresik

Usia I Age
65 Tahun I Years

Kewarganegaraan I Citizenship
Indonesia

Domisili I Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana, Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
- S2, Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2005

Riwayat Pekerjaan
- Komisaris Utama PT Taspen (2020 – Juni 2025)
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI (Juli 2016 – Mei 2020)

Jabatan Rangkap
Tidak ada

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 13 tanggal 30 Juni 2025

Sertifikasi
- Sertifikasi Governance, Risk and Compliance (GRC) Professional
- *Certified Risk Executive Leader* (CREL)

Educational History
- Bachelor of Police Science, Police Science College
- Master of Law, Gajah Mada University (2005)

Employment History
- President Commissioner of PT Taspen (2020 - June 2025)
- Head of the National Counter Terrorism Agency (BNPT) of the Republic of Indonesia (July 2016 - May 2020)

Concurrent Positions
None

Legal Basis for Appointment
Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 13, dated June 30, 2025

Certification
- Governance, Risk and Compliance (GRC) Professional Certification
- Certified Risk Executive Leader (CREL)



Idha Widi Arsanti

Anggota/Komisaris Utama PT Pupuk Kujang
Member/President Commissioner of PT Pupuk Kujang

Usia I Age
53 Tahun I Years

Kewarganegaraan I Citizenship
Indonesia

Domisili I Domicile
Bogor

Riwayat Pendidikan
- S3 Economics of Agriculture dari Humboldt University of Berlin
- S2 Ekonomi dan Sumberdaya Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM)
- S1 Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB)

Riwayat Pekerjaan
- Kepala Pusat Pendidikan Pertanian pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (2018–2024)
- Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan (2018)
- Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (2017–2018)

Jabatan Rangkap
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2024- Sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 02 tanggal 13 Agustus 2025

Sertifikasi
- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim Tk. II) – Lembaga Administrasi Negara (2021)
- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim Tk. III) – Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2015)
- Research Management Program – Michigan State University (2014)
- Master Class on Value Chain Analysis – ACIAR (2014)
- Master Class on Impact Assessment (Certified) – ACIAR & ICRISAT (2009)
- Certified Chief Internal Audit (2025)
- Certified Risk Executive Leader (2025)

Educational History
- Ph.D. in Economics of Agriculture from Humboldt University of Berlin
- MSc in Agricultural Economics and Resources from Gadjah Mada University (UGM)
- Bachelor in Agribusiness from Bogor Agricultural University (IPB)

Employment History
- Director of the Center for Agricultural Education at the Agency for Agricultural Extension and Human Resource Development (2018–2024)
- Vice Director of Evaluation and Report, Secretariat General (2018)
- Vice Director of Research Dissemination and Collaboration (2017–2018)

Concurrent Positions
Director General of the Agency for Agricultural Extension and Human Resource Development, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia (2024–present)

Legal Basis for Appointment
Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 02, dated August 13, 2025

Certification
- Leadership Education and Training (Level II) – National Institute of Public Administration (2021)
- Leadership Education and Training (Level III) – Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia (2015)
- Research Management Program – Michigan State University (2014)
- Master Class on Value Chain Analysis – ACIAR (2014)
- Master Class on Impact Assessment (Certified) – ACIAR & ICRISAT (2009)
- Certified Chief Internal Audit (2025)
- Certified Risk Executive Leader (2025)



D. Andhi Nirwanto

Anggota/Komisaris Utama PT Pupuk Kalimantan Timur
Member/President Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur

Usia | Age
69 Tahun | Years

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili I Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2015)
- Magister Manajemen dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta (1998)
- Sarjana Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang (1979)

Riwayat Pekerjaan
- Plt. Jaksa Agung Republik Indonesia (2014)
- Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia (2013–2016)
- Ketua Tim Pemburu Koruptor (2013–2016)

Jabatan Rangkap
Tidak ada

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 01 tanggal 4 Januari 2024

Sertifikasi
Certified Risk Executive Leader (CREL) dari BPKP (2024)

Educational Background
- Doctoral in Law Science from Universitas Padjadjaran, Bandung (2015)
- Master's degree in Management from the Indonesian Institute of Business and Informatics, Jakarta (1998)
- Bachelor's degree in Law from Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang (1979)

Employment History
- Acting of Attorney General of the Republic of Indonesia (2014)
- Deputy Attorney General of the Republic of Indonesia (2013–2016)
- Chairman of the Corruptor Hunting Team (2013–2016)

Concurrent Positions
None

Legal Basis for Appointment
Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 01, dated January 4, 2024

Certification
Certified Risk Executive Leader (CREL) from BPKP (2024)



Marzuki Daud

Anggota/Komisaris Utama PT Pupuk Iskandar Muda
Member/President Commissioner of PT Pupuk Iskandar Muda

Usia | Age
71 Tahun | Years

Kewarganegaraan I Citizenship
Indonesia

Domisili I Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
Sarjana Universitas Iskandar Muda Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (1986)

Riwayat Pekerjaan
- Wakil Ketua Dewan Mufakat DPP Taman Iskandar Muda (2017 - 2022)
- Anggota Badan Anggaran DPR RI (2011-2014)
- Wakil Ketua Tim Pemantauan Otonomi Khusus Aceh dan Otonomi Khusus bagi Papua DPR RI (2010-2014)
- Wakil Ketua Komite Perhubungan, Infrastruktur dan Real Estate Kadin Indonesia, Jakarta (2009-2011)
- Ketua DPP Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKNAS) Jakarta (2001-2006)

Jabatan Rangkap
Tidak ada

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Notaris Lumassia, S.H., Nomor: 03 tanggal 19 September 2024

Sertifikasi
Certified Governance Oversight Profesional (CGOP)

Educational History
Bachelor of Iskandar Muda University, Banda Aceh Faculty of Social and Political Sciences (1986)

Employment History
- Vice Chair of the Consensus Council of the Central Executive Board of Taman Iskandar Muda (2017–2022)
- Member of the Budget Committee, Indonesian House of Representatives (2011–2014)
- Vice Chair of the Monitoring Team for Special Autonomy in Aceh and Special Autonomy for Papua, Indonesian House of Representatives (2010–2014)
- Vice Chair of the Transportation, Infrastructure, and Real Estate Committee of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), Jakarta (2009–2011)
- Chair of the Central Executive Board of the Indonesian National Association of Construction Entrepreneurs (GAPEKNAS), Jakarta (2001–2006)

Concurrent Positions
None

Legal Basis for Appointment
Deed of Notary Lumassia, SH No. 03 dated September 19, 2024

Certification
Certified Governance Oversight Professional (CGOP)



Siti Nurizka Puteri Jaya

Anggota/Komisaris Utama
PT Sriwidjaja Palembang
Member/President Commissioner of PT Sriwidjaja Palembang

Usia I Age
38 Tahun I Years

Kewarganegaraan I Citizenship
Indonesia

Domisili I Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Magister Hukum, Universitas Gajah Mada (2009 - 2011)
- Sarjana Hukum, Universitas Trisakti (2005 - 2009)

Riwayat Pekerjaan
- Dewan Pembina Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Sumatera Selatan (2022)
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi 3 (Hukum, HAM & Keamanan) (2019 - 2024)
- Kepala Bagian Hukum II di Ikatan Keluarga Akademi Militer (IKAM) Jogya (2016)

Jabatan Rangkap
Tidak Ada

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 02 tanggal 10 Juni 2025

Sertifikasi
- Sertifikasi Governance, Risk and Compliance (GRC) Professional
- *Certified Risk Executive Leader* (CREL)

Educational History
- Master of Law, Gajah Mada University (2009 - 2011)
- Bachelor of Law, Universitas Trisakti (2005 - 2009)

Employment History
- Board of Trustees, Forum for Communication of Sons and Daughters of Retired Military and Police Officers (FKPPI) South Sumatra (2022)
- Member, House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), Commission 3 (Law, Human Rights & Security) (2019 - 2024)
- Head of Legal Division II, Military Academy Family Association (IKAM) Yogyakarta (2016)

Concurrent Positions
None

Legal Basis for Appointment
Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 02, dated June 10, 2025

Certification
- Governance, Risk and Compliance (GRC) Professional Certification
- Certified Risk Executive Leader (CREL)



Dody Widodo

Anggota/ Komisaris Utama PT Rekayasa Industri
Member/President Commissioner of PT Rekayasa Industri

Usia | Age
63 Tahun | Years

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili I Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknik Kimia, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, 1998
- Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, 2001
- Doktoral Ilmu Manajemen, Universitas Padjajaran, 2025

Riwayat Pekerjaan
- Pembina Industri Ahli Utama Kementerian Perindustrian (2023 – Sekarang)
- Penasihat Ahli Menteri Perindustrian (2023 – 2024)

Jabatan Rangkap
Pembina Industri Ahli Utama Kementerian Perindustrian (2023 – Sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 01 tanggal 7 Februari 2024

Sertifikasi
Certified Governance Oversight Professional (CGOP)

Educational Background
- Bachelor of Chemical Engineering, College of Textile Technology (1998)
- Master of Public Policy Planning, University of Indonesia (2001)
- Doctorate in Management Science, Padjadjaran University (2025)

Employment History
- Principal Industrial Development Expert, Ministry of Industry (2023 – present)
- Expert Advisor to the Minister of Industry (2023 – 2024)

Concurrent Positions
Principal Industrial Development Expert, Ministry of Industry (2023 – present)

Legal Basis for Appointment
Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 01, dated February 7, 2024

Certification
Certified Governance Oversight Professional (CGOP)



Sandra Firmania

Anggota/Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Niaga
Member/President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Niaga

Usia | Age
56 Tahun | Years

Kewarganegaraan | **Citizenship**
Indonesia

Domisili I Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Strata 2 (S2) Jurusan Hukum Universitas Indonesia Jakarta, lulus tahun 2006;
- Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Andalas Padang, lulus tahun 1995.

Riwayat Pekerjaan
- Komisaris PT Pupuk Indonesia Niaga tahun (2021-2025);
- Komisaris PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) tahun (2016-2021);
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN) tahun (2014-2017);
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) tahun (2013-2014).

Jabatan Rangkap
PKPN Madya/Koordinator pada Keasdepan Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung, Kementerian BUMN, tahun 2024-saat ini

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 06 tanggal 20 Agustus 2025

Sertifikasi
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP);
- Certificate of Compeltion Project Management Foundation;
- Certificate of Completion Finance Foundation Business Valuation;
- Certificate of Completion Learning Design for Sutainabilty.

Educational Background
- Master's degree (S2) in Law from the University of Indonesia, Jakarta, graduated in 2006;
- Bachelor's degree (S1) in Economics and Management from Andalas University, Padang, graduated in 1995.

Employment History
- Commissioner of PT Pupuk Indonesia Niaga (2021–2025);
- Commissioner of PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) (2016–2021);
- Secretary of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (BTN) (2014–2017);
- Secretary of the Board of Commissioners of PT Pegadaian (Persero) (2013–2014).

Concurrent Positions
Senior PKPN/Coordinator at the Deputy Directorate General for Tourism Services and Support, Ministry of State-Owned Enterprises, 2024–present

Legal Basis for Appointment
Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 06, dated August 20, 2025

Certification
- Certified Risk Governance Professional (QRGP);
- Certificate of Completion: Project Management Foundation;
- Certificate of Completion: Finance Foundation – Business Valuation;
- Certificate of Completion: Learning Design for Sustainability.



Andreas Wellman Marbun

Anggota/Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik
Member/President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Logistik

Usia I Age
45 Tahun I **Years**

Kewarganegaraan | **Citizen**
Indonesia

Domisili I Domicile
-

Riwayat Pendidikan
-

Riwayat Pekerjaan
- Staf Khusus Kemenko PM (2024-Sekarang)
- Tim Komunikasi Menpora (2016-2019)

Jabatan Rangkap
- Staf Khusus Kemenko PM (2024-Sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 02 tanggal 3 Desember 2025

Sertifikasi
-

Educational Background
-

Employment History
- Special Staff, Coordinating Ministry for Community Empowerment (2024 – present)
- Communication Team, Ministry of Youth and Sports (2016 – 2019)

Concurrent Positions
- Special Staff Member, Coordinating Ministry for Human Development and Culture (2024–Present)

Legal Basis for Appointment
Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 02, dated December 3, 2025

Certification
-



Muhammad Isra Ramli
Anggota/Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Pangan
Member/President Commissioner o f PT Pupuk Indonesia Pangan

Usia| Age
52 Tahun | Years

Kewarganegaraan I Citizenship
Indonesia

Domisili I Domicile
Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Magister (S2) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (2004)
- Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang (1999)

Riwayat Pekerjaan
- Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresiden RI (2024-2025)
- Founder & CEO Naradata (2022-2024)
- Chief of Strategic dekade08.id (2008-2015)

Jabatan Rangkap
Dewan Pakar di Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia dari Tahun 2025 – Sekarang

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta Notaris Lummasia, S.H., Nomor: 01 tanggal 4 November 2024

Sertifikasi
-

Educational Background
- Master Graduate Comunication Science, Faculty of Social and Political Science, University of Indonesia, Jakarta (2004)
- Post Graduate Communication Science Faculty of Social and Political Science, Muhammadiyah University of Malang, Malang (1999)

Employment History
- Deputy for Communication and Information Materials, Presidential Communication Office of the Republic of Indonesia (2024 - 2025)
- Founder & CEO Naradata (2022 - 2024)
- Chief of Strategic, dekade08.id (2008 - 2015)

Concurrent Positions
Member of the Board of Experts, Government Communication Agency of the Republic of Indonesia (2025 – present)

Legal Basis for Appointment
Notarial Deed of Lummasia, S.H., No. 01, dated November 4, 2024

Certification
-

Pernyataan Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Independensi adalah syarat menjadi Komite Tata Kelola Terintegrasi. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi harus bersikap independen, objektif, dan profesional.

Statement of Independence by the Integrated Governance Committee

Independence is a requirement for membership in the Integrated Governance Committee. Members of the Integrated Governance Committee must be independent, objective, and professional.

Pengungkapan Pernyataan Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi
Disclosure of the Integrated Governance Committee Statement of Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	**Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi** Has financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors	**Memiliki Hubungan Kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak Maupun Entitas Afiliasi** Has management relationships in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Entities	**Memiliki Saham Perusahaan, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung** Owns shares in the Company, either directly or indirectly	**Memiliki Hubungan Keluarga Dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Sesama Anggota Komite** Has familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/ or fellow Committee members	**Menjabat Sebagai Pengurus Partai Politik** Serves as an administrator for a political party	**Menjabat sebagai pejabat Pemerintah** Serves as a Government Official
Sudaryono*	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Irfan Ahmad Fauzi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Rachlan S Nashidik*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Chrisna Deva Priyapratama*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Iwan Sumule*	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Nurul Ichwan*	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Yovie Widianto*	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Pengungkapan Pernyataan Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi
Disclosure of the Integrated Governance Committee Statement of Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	**Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi** Has financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors	**Memiliki Hubungan Kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak Maupun Entitas Afiliasi** Has management relationships in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Entities	**Memiliki Saham Perusahaan, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung** Owns shares in the Company, either directly or indirectly	**Memiliki Hubungan Keluarga Dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Sesama Anggota Komite** Has familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Committee members	**Menjabat Sebagai Pengurus Partai Politik** Serves as an administrator for a political party	**Menjabat sebagai pejabat Pemerintah** Serves as a Government Official
Febrio Nathan Kacaribu***	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Suwandi	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Suhardi Alius*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Iqbal Billy Wahid**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Idha Widi Arsanti*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Mahmud Nurwindu**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
D. Andhi Nirwanto*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Musthofa**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Marzuki Daud*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Siti Nurizka Puteri Jaya*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Bambang Supriyambodo**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dody Widodo*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Doddy Rahadi**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sandra Firmania*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Monica Desideria**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Eko Suseno Agung Cahyanto**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Andreas Wellman Marbun****	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Rudi Rusli*****	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Muhammad Isra Ramli*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Achmad Suhawi**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Darmin Nasution**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Mustoha Iskandar**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Anwar Sanusi**	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Ari Dwipayana**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Riswinandi**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Farhat Brachma**	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Danar Rahmanto**	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*) Menjabat sejak tanggal 17 September 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak tanggal 17 September 2025
***) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025
****) Menjabat sejak tanggal 24 November 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 24 November 2025

*) In office since September 17, 2025
**) No longer in office since September 17, 2025
***) No longer in office since December 15, 2025
****) In office since November 24, 2025
*****) No longer in office since November 24, 2025

Pedoman Kerja: Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi didukung oleh Pedoman Kerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/KEP.KOM/II/2024 tentang Piagam Komite Nominasi & Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPI tanggal 29 Februari 2024, yang mengatur tugas dan fungsinya yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*. Kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas, Isi Piagam tersebut meliputi:

1. Lingkup Tugas;
2. Wewenang;
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
4. Organisasi dan Keanggotaan;
5. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Kode Etik;
7. Pertanggung Jawaban;
8. Honorarium dan Pembebanan Biaya;
9. Amandemen Piagam dan Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan cara:

1. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk atau Anak Perusahaan BUMN;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan kepatuhan terintegrasi;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS atau Menteri BUMN;
7. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya;
8. Menyusun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan reviu atau penyesuaian terhadap Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dimaksud sesuai dengan ketentuan dan arahan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PTPI;
9. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Komite Tata Kelola Terintegrasi dan laporan-laporan berkala yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Work Guidelines: Integrated Governance Committee Charter

The Integrated Governance Committee's functions are supported by the Work Guidelines established through Board of Commissioners Decree No. 004/KEP.KOM/II/2024 concerning the PTPI (Persero) Nomination & Remuneration Committee Charter dated February 29, 2024, which regulates the duties and functions in accordance with Good Corporate Governance requirements. This policy serves as a guideline to bind and regulate the Nomination & Remuneration Committee members in carrying out and executing their activitie, and includes:

1. Scope of Tasks;
2. Authority;
3. Obligations and Responsibilities;
4. Organization and Membership;
5. Nomination and Remuneration Committee Meetings;
6. Code of Ethics;
7. Accountability;
8. Honorarium and Fee Charging;
9. Amendment to the Charter and Performance of the Nomination and Remuneration Committee.

Duties and Responsibilities

Evaluate the implementation of Integrated Governance by:

1. Conducting an evaluation of Integrated Governance policies;
2. Monitoring and evaluating the suitability of the Integrated Governance policies of the Parent BUMN or BUMN Subsidiaries;
3. Evaluating the implementation of Integrated Governance, at least by assessing the adequacy of internal control and the implementation of integrated compliance functions;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners to improve Integrated Governance policies;
5. Communicating with work units for functions including internal audit, law and compliance, finance and risk management, human capital and aspects of necessary business operational functions, to obtain information, clarification and request reports required in an integrated manner to discuss matters related to the internal control system, risk management and integrated compliance;
6. Carrying out monitoring and evaluation of the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or decisions of the GMS or the Minister of BUMN;
7. Carrying out other authorities, duties and responsibilities related to its functions;
8. Preparing the Charter for the Integrated Governance Committee and carrying out reviews or adjustments to the Charter in accordance with the provisions and directives of PTPI Company (Persero) Board of Commissioners;
9. Preparing the Integrated Governance Committee's Annual Work Plan and Budget and periodic reports that have been determined in accordance with applicable regulations; and
10. Carry out other tasks stipulated in the Integrated Governance Committee Charter.

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perusahaan mendukung peningkatan kompetensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui partisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pendidikan. Seluruh pendanaan atas kegiatan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan. Berikut pelatihan yang diikuti Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2025.

Integrated Governance Committee Competency Development

The Company supports increasing the competency of Integrated Governance Committee Members through their participation in training and education programs. All funding for these activities is fully borne by the Company. The following is the training the Integrated Governance Committee participated in in 2025.

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Sudaryono*	Ketua Chair	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Irfan Ahmad Fauzi	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Rachlan S Nashidik*	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Chrisna Deva Priyapratama*	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Iwan Sumule*	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Nurul Ichwan	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Yovie Widianto*	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Febrio Nathan Kacaribu***	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Suwandi	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Suhardi Alius*	Anggota/ Komisaris Utama PT Petrokimia Gresik Member/President Commissioner of PT Petrokimia Gresik	Pelatihan Training	HR Vision	18-20 November 2025 November 18-20, 2025	HR Vision
Iqbal Billy Wahid**	Anggota/Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik Member/ Independent Commissioner of PT Petrokimia Gresik	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Idha Widi Arsanti*	Anggota/Komisaris Utama PT Pupuk Kujang Member/President Commissioner of PT Pupuk Kujang	Pelatihan Training	Program *Digital Leadership & Governance* Digital Leadership & Governance Program	23-24 Oktobber 2025 October 23-24, 2025	PT Mediatama Sinergi Emas
		Sertifikasi Certification	*Certified Risk Executive Leader* (CREL)	3-11 November 2025 November 3-11, 2025	Pusdiklat BPK
		Sertifikasi Certification	*Certified Chief Internal Auditor*	17-19 November 2025 November 17-19, 2025	PT Cipta Raya Mekar Sahitya

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Mahmud Nurwindu**	Anggota/Komisaris Independen PT Pupuk Kujang Member/ Independent Commissioner of PT Pupuk Kujang	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
D. Andhi Nirwanto*	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Member/President Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur	*Sharing Session*	*Sharing Session* - PKT Bebas Korupsi dan Peran Kejaksaan dalam Pengelolaan BUMN yang Baik Sharing Session - Free of Corruption PKT and the Role of the Attorney General's Office in the Proper Management of State-Owned Enterprises	8 Oktober 2025 October 8, 2025	PT Pupuk Kalimantan Timur
		Pelatihan Training	*Risk Governance Master Class*	3 Desember 2025 December 3, 2025	PT Pupuk Kalimantan Timur
Musthofa**	Anggota/Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur Member/Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Marzuki Daud*	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Iskandar Muda Member/President Commissioner of PT Pupuk Iskandar Muda	Pelatihan Training	*Navigating Strategic Risk in Decision-Making Process*	17-18 November 2025 November 17-18, 2025	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
		Pelatihan Training	Pelatihan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) Risk Control Self-Assessment (RCSA) Training	22-23 Desember 2025 December 22-23, 2025	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
		Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Siti Nurizka Puteri Jaya*	Anggota/Komisaris Utama PT Sriwidjaja Palembang Member/President Commissioner of PT Sriwidjaja Palembang	Pelatihan Training	*Onboarding Commissioner* Program Angkatan 9 Tahun 2025 Onboarding Commissioner Program, Class 9, 2025	26-27 Februari 2025 February 26–27, 2025	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises
		Pelatihan Training	IFA 2025 *Annual Conference* Monaco	12-14 Mei 2025 May 12-14, 2025	International Fertilizer Association (IFA)
		Pelatihan Training	*Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"*	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State-Owned Enterprises Risk Management Forum
		Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia
		Pelatihan Training	Developing Audit Observation Tahun 2025 untuk Dewan Komisaris Developing Audit Observations for 2025 for the Board of Commissioners	5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
		Sertifikasi Certification	Sertifikasi Governance, Risk and Compliance (GRC) Professional Governance, Risk, and Compliance (GRC) Professional Certification	11-13 Desember 2025 December 11-13, 2025	WAY ACADEMY
		Pelatihan Training	Pelatihan Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program	4 Desember 2025 December 4, 2025	PT KUNCIE PINTAR NUSANTARA

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
Bambang Supriyambodo**	Anggota/Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Member / Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Dody Widodo*	Anggota/ Komisaris Utama PT Rekayasa Industri Member/President Commissioner of PT Rekayasa Industri	Sertifikasi Certification	*Certified Governance Oversight Professional* (CGOP)	29-30 Oktober 2025 October 29-30, 2025	LSP MKS
		Sertifikasi Certification	*Navigating Strategic Risk in Decision-Making Process*	11-12 Desember 2025 December 11-12, 2025	CRMS
Doddy Rahadi**	Anggota/Komisaris PT Rekayasa Industri Member/Commissioner of PT Rekayasa Industri	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Sandra Firmania*	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Niaga Member/President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Niaga	Pelatihan Training	*Project Management Foundations*	21 November 2025 November 21, 2025	Linkedin Learning
		Pelatihan Training	*The New Age of Risk Management Strategy for Business*	27 Desember 2025 December 27, 2025	Linkedin Learning
		Pelatihan Training	*Finance Foundations: Corporate Governance*	27 Desember 2025 December 27, 2025	Linkedin Learning
		Pelatihan Training	*Learning Design for Sustainability*	27 Desember 2025 December 27, 2025	Linkedin Learning
Monica Desideria**	Anggota/Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia Utilitas Member/ Independent Commissioner of PT Pupuk Indonesia Utilitas	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Eko Suseno Agung Cahyanto**	Anggota/Komisaris PT Pupuk Indonesia Niaga Member/Commissioner of PT Pupuk Indonesia Niaga	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Andreas Wellman Marbun****	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik Member/President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Logistik	Sertifikasi Certification	*Certified Govermance Oversight Profesional*	29-31 Oktober 2025 October 29-31, 2025	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
Rudi Rusli*****	Anggota/Komisaris PT Pupuk Indonesia Logistik Member/Commissioner of PT Pupuk Indonesia Logistik	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Muhammad Isra Ramli*	Anggota/ Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Pangan Member/President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Pangan	Pelatihan Training	ERM Fundamentals	10 - 11 November 2025 (*Online*)	CRMS Indonesia (Center for Risk Management Studies) bersama ERMA (Enterprise Risk Management Academy)

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Achmad Suhawi**	Anggota/Komisaris PT Pupuk Indonesia Pangan Member/Commissioner of PT Pupuk Indonesia Pangan	Sharing Session	Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia	10 Desember 2025 December 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero) & KPK RI
Darmin Nasution**	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Mustoha Iskandar**	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Anwar Sanusi**	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Ari Dwipayana**	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Riswinandi**	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Farhat Brachma**	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			
Danar Rahmanto**	Anggota Member	Pelatihan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris, bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Training can be found in the discussion on the Board of Commissioners Training and Competency Development in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.			

*) Menjabat sejak tanggal 17 September 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak tanggal 17 September 2025
***) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025
****) Menjabat sejak tanggal 24 November 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 24 November 2025

*) In office since September 17, 2025
**) No longer in office since September 17, 2025
***) No longer in office since December 15, 2025
****) In office since November 24, 2025
*****) No longer in office since November 24, 2025

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat komite dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah.

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, dengan rekapitulasi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Integrated Governance Committee Meetings

The Integrated Governance Committee's meeting policy requires that meetings be held at least once a month. Decisions can be made at committee meetings if attended by at least 66% of the total membership, or 2 members (including the Chair) out of 3 members (including the Chair). Committee meeting decisions are made by consensus.

In 2025, the Integrated Governance Committee held 5 (five) meetings with the attendance shown in the table below.

Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Sudaryono*	2	2	100%
Irfan Ahmad Fauzi	5	5	100%
Rachlan S Nashidik*	2	2	100%
Chrisna Deva Priyapratama*	2	2	100%
Iwan Sumule*	2	2	100%
Nurul Ichwan*	2	2	100%
Yovie Widianto*	2	2	100%
Febrio Nathan Kacaribu***	4	4	100%
Suwandi	5	5	100%

Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Suhardi Alius*	2	2	100%
Iqbal Billy Wahid**	3	3	100%
Idha Widi Arsanti*	2	2	100%
Mahmud Nurwindu**	3	3	100%
D. Andhi Nirwanto*	2	2	100%
Musthofa**	3	3	100%
Marzuki Daud*	5	5	100%
Siti Nurizka Puteri Jaya*	2	2	100%
Bambang Supriyambodo**	3	3	100%
Dody Widodo*	2	2	100%
Doddy Rahadi**	3	3	100%
Sandra Firmania*	2	2	100%
Monica Desideria**	3	3	100%
Eko Suseno Agung Cahyanto**	3	3	100%
Andreas Wellman Marbun****	1	1	100%
Rudi Rusli*****	4	4	100%
Muhammad Isra Ramli*	2	2	100%
Achmad Suhawi**	3	3	100%
Darmin Nasution**	3	3	100%
Mustoha Iskandar**	3	3	100%
Anwar Sanusi**	3	3	100%
Ari Dwipayana**	3	3	100%
Riswinandi**	3	3	100%
Farhat Brachma**	3	3	100%
Danar Rahmanto**	3	3	100%
Rata-Rata Average			**100%**

*) Menjabat sejak tanggal 17 September 2025
**) Tidak lagi menjabat sejak tanggal 17 September 2025
***) Tidak lagi menjabat sejak 15 Desember 2025
****) Menjabat sejak tanggal 24 November 2025
*****) Tidak lagi menjabat sejak 24 November 2025

*) In office since September 17, 2025
**) No longer in office since September 17, 2025
***) No longer in office since December 15, 2025
****) In office since November 24, 2025
*****) No longer in office since November 24, 2025

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	21 Januari 2025 January 21, 2025	1. Update Penerapan Tata Kelola Terintegrasi s.d. TW IV 2024; 2. Pembahasan COGM Urea dan Amonia Per Pabrik; dan 3. Top 3 Isu Strategis 2024 di Anper Non Pupuk. 1. Update on the Implementation of Integrated Governance until QIV 2024; 2. Discussion on the COGM of Urea and Ammonia per Plant; and 3. Top 3 Strategic Issues for 2024 in the Non-Fertilizer Business Unit.
2	19 Februari 2025 February 19, 2025	1. Pembahasan tindak lanjut dan Rekomendasi BPK di Anper Tahun 2023-2025 1. Discussion on Follow-up Actions and Recommendations from the Supreme Audit Agency (BPK) for the 2023-2025 Business Units.
3	21 April 2025 April 21, 2025	1. Update Penerapan Tata Kelola Terintegrasi s.d. TW I Tahun 2025 2. Pembahasan *scheduled* dan *Unscheduled shutdown* (*downtime*) dari masing-masing pabrik dikaitkan dengan *opportunity loss* dan *benchmark* dengan Perusahaan lain yang sebanding, serta konsumsi Gas Urea per pabrik. 3. Lanjutan Pembahasan Top 3 Isu Strategis Anper Non Pupuk (REKIND dan PIN) 1. Update on the Implementation of Integrated Governance until QI 2025 2. Discussion on scheduled and unscheduled shutdowns (downtime) at each plant in relation to opportunity losses, and benchmarking against comparable companies, as well as Urea Gas consumption per plant. 3. Continued Discussion on the Top 3 Strategic Issues in the Non-Fertilizer Business Unit (REKIND and PIN)

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
4	20 November 2025 November 20, 2025	1. *Update* implementasi tata kelola terintegrasi TW III 2. Isu strategis Anak Perusahaan PTPI 1. Update on the implementation of integrated governance in QIII 2. Strategic Issues at PTPI Subsidiaries
5	17 Desember 2025 December 17, 2025	1. Kapasitas SDM Pabrik dan Proyek; dan 2. Penerapan Skema Pembayaran Subsidi *Marked-to-Market* (MTM) 1. Factory and Project HC Capacity; and 2. Implementation of the Marked-to-Market (MTM) Subsidy Payment Scheme

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025
Implementation of the Integrated Governance Committee's Duties in 2025

No	Realisasi Implementation
1.	Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Evaluation of Integrated Governance Policy.
2.	Melakukan pembahasan mengenai Update Penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Discussed the Update on the Implementation of Integrated Governance.
3.	Melakukan pembahasan mengenai Update Penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Discussed the Update on the Implementation of Integrated Governance.
4.	1. Melakukan telaah dan pembahasan atas RKAP 2026 terkait Tata Kelola Terintegrasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 2. Melakukan pembahasan kapasitas SDM Pabrik dan Proyek serta evaluasi penerapan skema pembayaran subsidi *Marked-to-Market* (MTM) sebagai bahan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. 1. Review and discuss the 2026 Work Plan and Budget (RKAP) related to Integrated Governance as a basis for preparing recommendations to the Board of Commissioners. 2. Discuss the capacity of Factory and Project HR and evaluate the implementation of the Marked-to-Market (MTM) subsidy payment scheme as a basis for recommendations for policy improvements.
5.	1. Melakukan pembahasan kapasitas SDM Pabrik dan Proyek, dengan mengundang Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. 2. Penerapan Skema Pembayaran Subsidi *Marked-to-Market*, dengan mengundang Direktur Supply Chain. 1. Discuss the capacity of Factory and Project HC, inviting the Directors of Human Capital and General Affairs. 2. Implementation of the Marked-to-Market Subsidy Payment Scheme, inviting the Director of Supply Chain.
6.	1. Melakukan telaah atas draft Laporan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group Semester I Tahun 2025. 2. Melakukan pembahasan mengenai Update Penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 1. Review the draft Integrated Governance Report of the Pupuk Indonesia Group Conglomerate for the First Half of 2025. 2. Discuss the Update on the Implementation of Integrated Governance.
7.	1. Melakukan telaah atas KPI Kolegial dan Individu Direksi Tahun 2025. 2. Melakukan pembahasan mengenai 3 Top Isu Strategis lainnya di Anak Perusahaan. 1. Review the Collegial and Individual KPIs of the Board of Directors for 2025. 2. Discuss the Top 3 Strategic Issues in Subsidiaries.

Komite di Bawah Direksi

Committees Below The Board 0f Directors

Komite Direksi adalah organ pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Komite Direksi berfungsi membantu Direksi dalam menjalankan tugas serta fungsi pengurusan strategis dan operasional Perusahaan agar dapat berjalan lebih efektif. Keanggotaan Komite Direksi terdiri dari anggota Direksi dan pejabat BOD-1 yang membidangi fungsi terkait. Perusahaan telah membentuk Komite Direksi yaitu:

1. Komite RKAP;
2. Komite KPI;
3. Komite Investasi Pengembangan;
4. Komite Talenta;
5. Komite Harga; dan
6. Komite TJSL.

Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) berperan sebagai organ pendukung yang dibentuk oleh Direksi. Komite ini bertugas membantu Direksi dalam mempersiapkan serta menyusun RKAP Perusahaan dan Anak Perusahaan atau Pupuk Indonesia Group, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 094/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pupuk Indonesia Group.

Piagam Komite RKAP

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 094/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menjadi dasar formal pembentukan serta pengaturan peran dan mekanisme kerja Komite.

Struktur dan Keanggotaan Komite RKAP

Susunan organisasi dan keanggotaan Komite RKAP ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 094/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pupuk Indonesia Group. Tidak terdapat perubahan atas Surat Keputusan tersebut, namun terdapat perubahan pada keanggotaan seiring dengan Wakil Direktur Utama yang tidak lagi menjabat pada tahun 2025.

The Board of Directors Committees are supporting bodies established by and directly accountable to the Board of Directors. These Committees function to assist the Board of Directors in carrying out its duties and strategic as well as operational management functions more effectively. The membership of the Board of Directors Committees consists of members of the Board of Directors and BOD-1 level officials overseeing the relevant functions. The Company has established the following Board of Directors Committees:

1. RKAP Committee;
2. KPI Committee;
3. Development Investment Committee;
4. Talent Committee;
5. Pricing Committee; and
6. SER Committee.

Corporate Work Plan and Budget Committee (RKAP)

The Company's Work Plan and Budget Committee (RKAP) serves as a supporting body established by the Board of Directors to assist the Board of Directors in preparing and compiling the RKAP for the Company and its Subsidiaries or the Pupuk Indonesia Group, as stipulated in Board of Directors Decree No. 094/A/KU/B30/SK/2022 dated July 29, 2022, concerning the Pupuk Indonesia Group Corporate Work Plan and Budget Committee (RKAP).

RKAP Committee Charter

The Committee's duties and responsibilities are based on Board of Directors Decree No. 094/A/KU/B30/SK/2022 dated July 29, 2022, which serves as the formal basis for establishing and regulating the Committee's roles and working mechanisms.

RKAP Committee Structure and Membership

The RKAP Committee organizational structure and membership was established through Board of Directors Decree No. 094/A/KU/B30/SK/2022 dated July 29, 2022, concerning the Pupuk Indonesia Group Corporate Work Plan and Budget (RKAP) Committee. There have been no changes to this Decree, but there have been changes to the membership, as the Vice President Director ceased serving in 2025.

Jabatan Position	Dijabat oleh: Held by:
Pengarah Directors	7. Direktur Utama 8. Direktur Produksi 9. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum 10. Direktur Transformasi Bisnis 11. Direktur Pemasaran 12. Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha 1. President Director 2. Director of Production 3. Director of Human Capital and General Affairs 4. Director of Business Transformation 5. Director of Marketing 6. Director of Portfolio & Business Development
Penanggung Jawab Person in Charge	1. Direktur Keuangan 2. Direktur Manajemen Risiko 1. Director of Finance 2. Director of Risk Management
Ketua Chair	SVP Kinerja Korporat SVP of Corporate Performance
Sekretaris Secretary	VP Anggaran VP of Budget
Penanggung Jawab Bidang Field Person in Charge	
Kesekretariatan, Hukum & GCG Secretariat, Legal & GCG	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Portofolio Bisnis Business Portfolio	SVP Portofolio Bisnis SVP Business Portfolio
Pengembangan Korporat Corporate Development	SVP Pengembangan SVP Development
Manajemen Operasi Operation Management	SVP Manajemen Operasi SVP Operation Management
K3LH HSE	Pgs. SVP K3LH Acting SVP HSE
Pengadaan Procurement	SVP Perencanaan Pengadaan SVP Procurement Planning
Keuangan & Investasi Finance & Investment	SVP Keuangan & Pendanaan Investasi SVP Finance & Investment Funding
Inisiatif Strategis & Transformasi Bisnis Strategic Initiatives & Business Transformation	SVP Strategi Korporat SVP Corporate Strategic
SDM HC	1. SVP Operasional Sumber Daya Manusia 2. SPM Manajemen Talenta & Kinerja 1. SVP Human Capital Operations 2. SPM Talent & Performance Management
Strategi Pemasaran Strategic Marketing	SVP Strategi Pemasaran SVP Strategic Marketing
Manajemen PSO PSO Management	SVP Perencanaan & Manajemen PSO SVP PSO Planning & Management
Pemasaran Komersil Commercial Marketing	SVP Pemasaran Komersil SVP Commercial Marketing
Distribusi Distribution	SVP Distribusi SVP Distribution
Supply Chain Management	SPM Inbound & Outbound Control Tower SPM Inbound & Outbound Control Tower
Risiko RKAP RKAP Risk	SVP Manajemen Risiko Korporasi SVP Enterprise Risk Management

Profil Anggota Komite RKAP

Profil anggota Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang meliputi nama dan jabatan serta keanggotaan dalam komite, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, termasuk rangkap jabatan disampaikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

RKAP Committee Members Profiles

The RKAP Committee members profiles, including their names and positions, committee membership, age, nationality, educational background, and concurrent positions, can be found in full in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Pernyataan Independensi Komite RKAP

Komite RKAP menjalankan tugas dan fungsinya secara independen, objektif, dan profesional serta memastikan setiap proses pembahasan dan pemberian rekomendasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dilakukan tanpa benturan kepentingan. Dalam pelaksanaannya, Komite RKAP berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Statement of Independence by the Company's RKAP Committee

The Company's RKAP Committee carries out its duties and functions independently, objectively, and professionally, ensuring that all discussions and recommendations on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) were conducted without conflict of interest. In carrying out its duties, the RKAP Committee adheres to the principles of good corporate governance.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite RKAP

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite RKAP diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Company's RKAP Committee Duties and Responsibilities

Details of the RKAP Committee duties and responsibilities are shown in the table below:

Organ Organ	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Pengarah Directors	Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan penyusunan RKAP kepada Komite RKAP. Provides direction and determine policies and work plans for implementing the RKAP preparation to the RKAP Committee.
Penanggung Jawab Person in Charge	Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan Komite RKAP dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan prinsip ketaatan pada ketentuan/prosedur yang berlaku di perusahaan, transparansi, serta efektivitas proses untuk mendukung penyusunan RKAP. Responsible for the implementation of all RKAP Committee activities and ensuring that these activities are in accordance with the principles of compliance with the provisions/procedures applicable in the Company, transparency and effectiveness of the process to support the preparation of the RKAP.
Ketua Chair	1. Bertanggung jawab dalam memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan Komite RKAP, termasuk pelaksanaan rapat-rapat dan tugas-tugas Komite RKAP. 2. Memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan penyusunan RKAP Pupuk Indonesia Group dilaksanakan dan berjalan dengan baik. 3. Melaporkan RKAP Pupuk Indonesia Group yang telah disusun kepada Direksi PTPI cq. Direktur Keuangan PTPI. 1. Responsible for leading, planning, coordinating, and evaluating all RKAP Committee activities, including the implementation of meetings and the RKAP Committee duties. 2. Ensuring the preparation and implementation of the Pupuk Indonesia Group RKAP is carried out and runs smoothly. 3. Reporting the prepared Pupuk Indonesia Group RKAP to the PTPI Board of Directors, cq. PTPI Director of Finance.
Sekretaris Secretary	Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan penyusunan RKAP di lingkungan Pupuk Indonesia Group. Responsible for carrying out administrative duties to support the preparation and implementation of the Pupuk Indonesia Group's Work Plan and Budget (RKAP).
Penanggung Jawab Bidang Field Person in Charge	1. Bertanggung jawab dalam menyiapkan, menyusun dan mengkoordinir SVP dan SPM Pupuk Indonesia Group terkait sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya untuk penyusunan usulan prognosis pencapaian tahun berjalan, asumsi penyusunan RKAP serta arahan-arahan bersifat strategis di Pupuk Indonesia Group sesuai dengan bidangnya masing-masing, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKAP Anak Perusahaan dan RKAP Konsolidasian. 2. Melakukan review sesuai dengan bidangnya masing-masing atas target-target tahun penyusunan RKAP sesuai dengan timeline dalam RJPP dan Transformasi Bisnis. 3. Menyiapkan dan menyusun risiko strategis utama sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam penyusunan RKAP, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam pembuatan RKAP berbasis risiko. 4. Memastikan bahwa persiapan kebutuhan terkait masing-masing bidang untuk penyusunan RKAP dilaksanakan dengan baik. 5. Menyampaikan perkembangan penyusunan RKAP pada masing-masing bidang kepada Ketua. 1. Responsible for preparing, compiling, and coordinating the relevant Pupuk Indonesia Group SVPs and SPMs, within their respective areas of responsibility, to prepare the proposed current year's achievement prognosis, the assumptions for the preparation of the RKAP (Work Plan and Budget), and strategic directives within the Pupuk Indonesia Group, in accordance with their respective areas, which will then serve as the basis for preparing the Subsidiary RKAP and the Consolidated RKAP. 2. Reviewing the annual targets for the RKAP preparation within each area, in accordance with the RJPP and Business Transformation Plan timelines. 3. Preparing and compiling key strategic risks within each area for the preparation of the RKAP, to further serve as the basis for creating a risk-based RKAP. 4. Ensuring the preparation requirements for each area for the preparation of the RKAP are properly implemented. 5. Reporting the progress of the RKAP preparation for each area to the Chair.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti
Training and/or Competency Development Attended

No.	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Ammonia Energy Annual Conference 2025	Ammonia Energy Association	20 Oktober 2025 October 20, 2025
2	Annual Budget Planning (ABP)	Bester & Co	11 September 2025 September 11, 2025
3	Annual Gathering of HR Directors Indonesia	HR Directors Indonesia	24 April 2025 April 24, 2025
4	Argus Fertilizer Asia Conference 2025	Argus	22 April 2025 April 22, 2025
5	Baker Hughes Annual Meeting 2025	Baker Hughes	02 Februari 2025 February 2, 2025
6	Blue Ocean Strategy Training	INSEAD	03 Februari 2025 February 3, 2025
7	Blue Ocean Strategy Training	INSEAD	10 Februari 2025 February 10, 2025
8	BSE Masterclass : Creating Business Ecosystem	BUMN School of Excellence (BSE)	21 Februari 2025 February 21, 2025
9	Certified Human Resources Professional (CHRP)	Atmajaya	25 Mei 2025 May 25, 2025
10	Certified Supply Chain Management (CSCM) Batch 21	ISCEA - PT. Lingkar Indonesia Unggul	02 September 2025 September 2, 2025
11	Chartered Financial Analyst (CFA)	CFA Institute	21 April 2025 April 21, 2025
12	Chief Risk Officer (CRO) School Tahun 2025	Kementerian BUMN	02 Mei 2025 May 2, 2025
13	D'Connection Leaders Roundtable – WEPs Corporate Action Lab Indonesia	Danantara	10 September 2025 September 10, 2025
14	FHCI Connect Expert Series 2 : Unlocking Employee Potential With Personalized AI-Driven Development	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	27 Agustus 2025 August 27, 2025
15	FHCI Connect Expert Series 3 - HC Talent Development: GlobalTrend, Future Insight and Development	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	08 Oktober 2025 October 8, 2025
16	FHCI Connect Expert Series 4 : Humanizing Digital Transformation: Building Ethical, Agile, and Future-Ready Talent Ecosystems	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	30 Oktober 2025 October 30, 2025
17	FHCI Connect Expert Series 5	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	19 November 2025 November 19, 2025
18	FHCI Connect Expert Series 6	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	18 Desember 2025 December 18, 2025
19	FHCI Connect Expert: Balancing Compliance, Business Agility, and Workforce Welfare - Series 1	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	09 Juli 2025 July 9, 2025
20	IFA Annual Conference 2025	International Fertilizer Association (IFA)	12 Mei 2025 May 12, 2025
21	IFA Crossroads 2025	International Fertilizer Association (IFA)	07 Oktober 2025 October 7, 2025
22	IFA Cultivating Tomorrow Conference 2025 - Innovation Meets Sustainability	International Fertilizer Association (IFA)	01 April 2025 April 1, 2025
23	IFA Strategic Forum 2025	IFA	18 November 2025 November 18, 2025
24	Indonesia Economic Outlook 2025	ISCEA Indonesia	18 Januari 2025 January 18, 2025
25	Leader's Talk "Breaking Through Stagnation: Strategies for Revitalizing Growth and Innovation in Your Organization"	Jamsaton Nababan	03 Maret 2025 March 3, 2025
26	Leader's Talk "Driving Corporate Financial Agility: Strategies for Adaptive Cost Management"	Wono Budi Tjahyono	12 Februari 2025 February 12, 2025

No.	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
27	Leader's Talk "Embracing Risk-Taking: Strategies for Calculated and Confident Decision-Making in Business"	Ninis Kesuma Adriani	12 Maret 2025 March 12, 2025
28	Leader's Talk "Leadership Qualities: Driving Business Success Through Strategic Vision and Execution"	Gusrizal	19 Maret 2025 March 19, 2025
29	Leader's Talk "Optimizing Operational Execution: Strategies for Efficiency, Effectiveness, and Excellence"	Bob Indiarto A. Susatyo	03 Maret 2025 March 3, 2025
30	Leader's Talk "Securing Market: Strategies for Building and Protecting Company Position in a Competitive Industry"	Tri Wahyudi Saleh	10 Maret 2025 March 10, 2025
31	Leader's Talk "Unveiling Leadership Traits: Exploring the Essential Characteristics that Drive Succession Today's Dynamic Workplaces"	Tina T. Kemala Intan	17 Maret 2025 March 17, 2025
32	Mental Health & Wellness Exhibition and Conference	Mind Care	03 Desember 2025 December 3, 2025
33	Mindfulness Practice For Agile Leadership	Nurcahyo Adi Kusumo	13 November 2025 November 13, 2025
34	Onboarding Karyawan Baru & Penugasan Non Mutasi Periode Juni - September 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)	09 Oktober 2025 October 9, 2025
35	Pelatihan Counseling Counseling Training	Insan Performa	10 Juli 2025 July 10, 2025
36	Pelatihan Counseling Counseling Training	PT Daya Dimensi Indonesia (DDI)	02 Juni 2025 June 2, 2025
37	Pelatihan dan Sertifikasi CPLM (Certified Professional in Logistics Management) CPLM (Certified Professional in Logistics Management) Training and Certification	ISCEA Indonesia	20 Januari 2025 January 20, 2025
38	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Digital Marketing bersama Srikandi PI Financial Management and Digital Marketing Training with Srikandi PI	PT Pupuk Indonesia (Persero)	06 Agustus 2025 August 6, 2025
39	Pelatihan Purnabakti Retirement Training	Expertindo	22 Desember 2025 December 22, 2025
40	Performance Coaching	PT Daya Dimensi Indonesia (DDI)	07 Mei 2025 May 7, 2025
41	Performance Coaching (Kelas Susulan) Performance Coaching (Follow-up Class)	Daya Dimensi Indonesia	14 Oktober 2025 October 14, 2025
42	Program Preview Improve Assessor Capabilities	Prasmul Eli	13 Juni 2025 June 13, 2025
43	Program Star Track Cohort 2 & 3 - Danantara	Cornell University	15 Oktober 2025 October 15, 2025
44	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	CRMS	19 Mei 2025 May 19, 2025
45	Risk Beyond 2025	CRMS Indonesia	04 Desember 2025 December 4, 2025
46	Seminar Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Seminar on the Implementation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code	PT Pupuk Indonesia (Persero)	17 September 2025 September 17, 2025
47	Strategic Risk Management & Value Creation	INSEAD	12 September 2025 September 12, 2025
48	The New Special Directorship Program : Governance Strategies - Managing Corporate Risk In Volatile World	IICD	24 Juni 2025 June 24, 2025
49	Update PPN dan Core Tax sesuai Project Management No. 81 Tahun 2024 Update on VAT and Core Tax based on Project Management Regulation No. 81 of 2024	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	25 Januari 2025 January 25, 2025

Sertifikasi Profesi Komite RKAP
KPI Committee Professional Certification

No.	Nama Sertifikasi Certification Name
1	Certified Human Resources Professional (CHRP)
2	Certified Supply Chain Management (CSCM) Batch 21
3	Chartered Financial Analyst (CFA)
4	Sertifikasi CPLM (Certified Professional in Logistics Management)
5	Qualified Risk Management Professional (QRMP)

Rapat Komite RKAP

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2025, Komite RKAP menyelenggarakan rapat sebanyak 3 kali. Pokok-pokok agenda yang dibahas dalam rapat tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

RKAP Committee Meetings

Meeting Frequency and Attendance

In 2025, the RKAP Committee held three meetings. The agenda items discussed at these meetings are shown in the following table:

No.	Agenda Agenda
1	Pembahasan dan Penyelarasan Asumsi Operasional (*Sales and Operation Planning*) RKAP Tahun 2026 Discussion and Alignment on Operational Assumptions (Sales and Operations Planning) for the 2026 RKAP
2	Rapat Kerja RKAP Tahun 2026 Pupuk Indonesia Group 2026 Pupuk Indonesia Group RKAP Working Meeting
3	Rapat Teknis Penyusunan RKAP Tahun 2026 Pupuk Indonesia Group 2026 Pupuk Indonesia Group RKAP Preparation Technical Meeting

Pelaksanaan Kegiatan Komite RKAP pada Tahun Buku

Sepanjang tahun 2025, Komite RKAP telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

Implementation of the RKAP Committee's Activities in the Fiscal Year

In 2025, the RKAP Committee implemented the following work programs:

No.	Program Program
1	Persiapan penyusunan RKAP tahun 2026 yang meliputi penyiapan dan finalisasi asumsi penyusunan RKAP tahun 2025. Identifikasi risiko strategis dan penyiapan arahan strategis setiap bidang sebagai dasar penyusunan RKAP tahun 2025. Preparation of the 2026 RKAP, including the preparation and finalization of assumptions for the 2025 RKAP. Identification of strategic risks and preparation of strategic directions for each sector as the basis for the 2025 RKAP.
2	Pembahasan inisiatif strategis serta *milestone* tahun 2026. Discussion on strategic initiatives and milestones for 2026.
3	Melakukan review atas usulan RKAP Tahun 2026 Anak Perusahaan. Review of the proposed 2026 RKAP for Subsidiaries.

Komite *Key Performance Indicators* (KPI)

Komite *Key Performance Indicators* (KPI) dibentuk sebagai organ pendukung yang berada di bawah Direksi. Komite ini membantu Direksi dalam menyiapkan dan menyusun KPI Perusahaan dan Anak Perusahaan atau Pupuk Indonesia Group, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 112/A/HK/B0300/SK/2025 tanggal 3 Desember 2025 tentang Komite *Key Performance Indicators* (KPI) Pupuk Indonesia Group.

Pedoman atau Piagam Komite KPI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dilandaskan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 112/A/HK/B0300/SK/2025 tanggal 3 Desember 2025 yang menjadi dasar pembentukan sekaligus mengatur kewenangan dan mekanisme kerja Komite dalam menjalankan fungsinya.

Key Performance Indicators (KPI) Committee

The Key Performance Indicators (KPI) Committee was established as a supporting body under the Board of Directors, and assists the Board of Directors in preparing and compiling KPIs for the Company and its Subsidiaries or the Pupuk Indonesia Group, as stipulated in Board of Directors Decree No. 112/A/HK/B0300/SK/2025 dated December 3, 2025, concerning the Pupuk Indonesia Group Key Performance Indicators (KPI) Committee.

KPI Committee Guidelines or Charter

The Committee's duties and responsibilities are based on Board of Directors Decree No. 112/A/HK/B0300/SK/2025 dated December 3, 2025, which serves as the basis for its formation and regulates the Committee's authority and working mechanisms in carrying out its functions.

Struktur dan Keanggotaan Komite KPI

Susunan organisasi serta keanggotaan Komite KPI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 112/A/HK/B0300/SK/2025 tanggal 3 Desember 2025 tentang Komite *Key Performance Indicators* (KPI) Pupuk Indonesia Group, dengan rincian sebagai berikut:

KPI Committee Structure and Membership

The KPI Committee organizational structure and membership was determined based on Board of Directors Decree No. 112/A/HK/B0300/SK/2025 dated December 3, 2025, concerning the Pupuk Indonesia Group Key Performance Indicators (KPI) Committee, with the following details:

Jabatan Position	**Dijabat oleh:** Held by:
Penasihat Advisor	Direktur Utama President Director
Ketua I Chair I	Direktur Keuangan Director of Finance
Ketua II Chair II	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital
Ketua III Chair III	Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Director of Technical and Business Development
Ketua IV Chair IV	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management
Sekretaris I Secretary I	SVP Kinerja Korporat SVP Corporate Performance
Sekretaris II Secretary II	SVP Manajemen & Pengembangan SDM SVP HC Management & Development

Profil Anggota Komite KPI

Profil anggota Komite KPI yang meliputi nama dan jabatan serta keanggotaan dalam komite, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, termasuk rangkap jabatan disampaikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

KPI Committee Member Profiles

The KPI Committee member profiles, including their names and positions, committee membership, age, nationality, educational background, and concurrent positions, can be found in full in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Pernyataan Independensi Komite KPI

Komite KPI menjalankan tugas dan fungsinya secara independen, objektif, dan profesional serta memastikan setiap proses pembahasan dan pemberian rekomendasi terkait penetapan dan evaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) dilakukan tanpa benturan kepentingan. Dalam pelaksanaannya, Komite KPI berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

KPI Committee Independence Statement

The KPI Committee carried out its duties and functions independently, objectively, and professionally, ensuring that all discussions and recommendations related to the establishment and evaluation of Key Performance Indicators (KPIs) were conducted without conflict of interest. When carrying out its duties, the KPI Committee adhered to the principles of good corporate governance.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite KPI

Pembagian tugas dan tanggung jawab Komite KPI disajikan secara rinci dalam tabel berikut:

KPI Committee Duties and Responsibilities

The division the KPI Committee duties and responsibilities are shown in detail in the following table:

Organ Organ	**Tugas dan Tanggung Jawab** Duties and Responsibilities
Penasihat Advisor	Memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat, dan pertimbangan–pertimbangan pada ide atau program dalam proses bisnis KPI di lingkungan Pupuk Indonesia Group. Providing policy directives, input, advice, and considerations on ideas or programs in the Pupuk Indonesia Group's KPI business processes.
Ketua Chair	1. Bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi, dan menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan proses bisnis KPI di lingkungan Pupuk Indonesia Group. 2. Bertanggung jawab mengarahkan dan menetapkan kebijakan atas perselisihan atau dispute yang timbul saat proses perencanaan dan penetapan KPI di lingkungan Pupuk Indonesia Group. 3. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama 1. Responsible for directing, supervising, and establishing policies and work plans for KPI business processes within the Pupuk Indonesia Group. 2. Responsible for directing and establishing policies for disputes arising during the planning and determination of KPIs in the Pupuk Indonesia Group. 3. Reporting to the President Director and Vice President Director.

Organ Organ	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Sekretaris I Secretary I	Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan proses bisnis KPI manajemen yaitu di level korporasi, direktorat, pejabat/unit kerja satu tingkat dibawah Direksi dan Senior Project Manager di lingkungan Pupuk Indonesia Group. Responsible for carrying out administrative duties to support the preparation and implementation of KPI management business processes, including at the corporate level, directorates, officials/work units one level below the Board of Directors, and Senior Project Managers in the Pupuk Indonesia Group.
Sekretaris II Secretary II	Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan proses bisnis KPI level individu karyawan di lingkungan Pupuk Indonesia Group. Responsible for carrying out administrative duties to support the preparation and implementation of KPI business processes at the individual employee level in the Pupuk Indonesia Group.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti
Training and/or Competency Development Attended

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Ammonia Energy Annual Conference 2025	Ammonia Energy Association	20 Oktober 2025 October 20, 2025
2	Annual Budget Planning (ABP)	Bester & Co	11 September 2025 September 11, 2025
3	Annual Gathering of HR Directors Indonesia	HR Directors Indonesia	24 April 2025 April 24, 2025
4	Argus Fertilizer Asia Conference 2025	Argus	22 April 2025 April 22, 2025
5	Baker Hughes Annual Meeting 2025	Baker Hughes	02 Februari 2025 February 2, 2025
6	Blue Ocean Strategy Training	INSEAD	3 & Februari 2025 February 3&10, 2025
7	BSE Masterclass : Creating Business Ecosystem	BUMN School of Excellence (BSE)	21 Februari 2025 February 21, 2025
8	Chief Risk Officer (CRO) School Tahun 2025	Kementerian BUMN	02 Mei 2025 May 2, 2025
9	D'Connection Leaders Roundtable – WEPs Corporate Action Lab Indonesia	Danantara	10 September 2025 September 10, 2025
10	FHCI Connect Expert Series 2 : Unlocking Employee Potential With Personalized AI-Driven Development	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	27 Agustus 2025 August 27, 2025
11	FHCI Connect Expert Series 3 - HC Talent Development: GlobalTrend, Future Insight and Development	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	08 Oktober 2025 October 8, 2025
12	FHCI Connect Expert Series 4 : Humanizing Digital Transformation: Building Ethical, Agile, and Future-Ready Talent Ecosystems	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	30 Oktober 2025 October 30, 2025
13	FHCI Connect Expert Series 5	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	19 November 2025 November 19, 2025
14	FHCI Connect Expert Series 6	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	18 Desember 2025 December 18, 2025
15	FHCI Connect Expert: Balancing Compliance, Business Agility, and Workforce Welfare - Series 1	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	09 Juli 2025 July 9, 2025
16	IFA Annual Conference 2025	International Fertilizer Association (IFA)	12 Mei 2025 May 12, 2025
17	IFA Crossroads 2025	International Fertilizer Association (IFA)	07 Oktober 2025 October 7, 2025
18	IFA Cultivating Tomorrow Conference 2025 - Innovation Meets Sustainability	International Fertilizer Association (IFA)	01 April 2025 April 1, 2025
19	Indonesia Economic Outlook 2025	ISCEA Indonesia	18 Januari 2025 January 18, 2025
20	Leader's Talk "Breaking Through Stagnation: Strategies for Revitalizing Growth and Innovation in Your Organization"	Jamsaton Nababan	03 Maret 2025 March 3, 2025
21	Leader's Talk "Driving Corporate Financial Agility: Strategies for Adaptive Cost Management"	Wono Budi Tjahyono	12 Februari 2025 February 12, 2025
22	Leader's Talk "Embracing Risk-Taking: Strategies for Calculated and Confident Decision-Making in Business"	Ninis Kesuma Adriani	12 Maret 2025 March 12, 2025

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
23	Leader's Talk "Leadership Qualities: Driving Business Success Through Strategic Vision and Execution"	Gusrizal	19 Maret 2025 March 19, 2025
24	Leader's Talk "Optimizing Operational Execution: Strategies for Efficiency, Effectiveness, and Excellence"	Bob Indiarto A. Susatyo	03 Maret 2025 March 3, 2025
25	Leader's Talk "Securing Market: Strategies for Building and Protecting Company Position in a Competitive Industry"	Tri Wahyudi Saleh	10 Maret 2025 March 10, 2025
26	Leader's Talk "Unveiling Leadership Traits: Exploring the Essential Characteristics that Drive Succession Today's Dynamic Workplaces"	Tina T. Kemala Intan	17 Maret 2025 March 17, 2025
27	Mental Health & Wellness Exhibition and Conference	Mind Care	03 Desember 2025 December 3, 2025
28	Pelatihan *Counseling* Counseling Training	PT Daya Dimensi Indonesia (DDI)	02 Juni 2025 June 2, 2025
29	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Digital Marketing bersama Srikandi PI Financial Management and Digital Marketing Training with Srikandi PI	PT Pupuk Indonesia (Persero)	06 Agustus 2025 August 6, 2025
30	Program Preview Improve Assessor Capabilities	Prasmul Eli	13 Juni 2025 June 13, 2025
31	Strategic Risk Management & Value Creation	INSEAD	12 September 2025 September 12, 2025
32	Update PPN dan *Core Tax* sesuai *Project Management* No. 81 Tahun 2024 Update on VAT and Core Tax in accordance with Project Management Regulation No. 81 of 2024	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	25 Januari 2025 January 25, 2025

Sertifikasi Profesi Komite KPI
KPI Committee Professional Certification

No.	Nama Sertifikasi Certification Name
1	*Chief Risk Officer* (CRO) *School* Tahun 2025 Chief Risk Officer (CRO) School Year 2025

Rapat Komite KPI

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2025, Komite KPI menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali. Pokok-pokok agenda yang dibahas dalam rapat tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

KPI Committee Meetings

Meeting Frequency and Attendance

In 2025, the KPI Committee held one meeting, with the agenda discussed at these meeting shown in the following table:

No.	Agenda Agenda
1	Finalisasi KPI Unit Kerja satu tingkat di bawah Direksi Tahun 2025 bersama Komite KPI, pada tanggal 16, 17 & 21 April 2025. Finalization of KPIs for Work Units one level below the Board of Directors in 2025 with the KPI Committee, on April 16, 17, and 21, 2025.

Pelaksanaan Kegiatan Komite KPI pada Tahun Buku

Sepanjang tahun 2025, Komite KPI telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

Implementation of KPI Committee Activities in the Fiscal Year

In 2025, the KPI Committee implemented the following work program:

No.	Program Program
1	Penyusunan KPI Kompartemen dan SPM Tahun 2025 Preparation of Compartment and SPM KPIs for 2025

Komite Harga

Komite Harga dibentuk sebagai organ pendukung. Pembentukan Komite tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 113/A/HK/C0400/SK/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pembentukan Komite Harga dan Tim Evaluasi Harga Pupuk Indonesia Group. Dengan adanya perubahan nomenklatur pada struktur organisasi Direktorat Pemasaran dilakukan perubahan susunan Komite Harga sesuai Surat Keputusan Direksi PTPI No. 52/A/HK/2/C0400/SK/2025 tentang Komite Harga dan Tim Evaluasi Harga PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pedoman atau Piagam Komite Harga

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 113/A/HK/C0400/SK/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang mengatur pembentukan, kewenangan, serta tata kerja Komite.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Harga

Tanggung jawab sebagai Tim melekat pada jabatan meskipun terdapat perubahan nama pejabat atau nama jabatan/nomenklatur. Selama individu menempati posisi jabatan yang tertuang dalam Keputusan Direksi PTPI No. 52/A/HK/2/C0400/SK/2025 tentang Komite Harga dan Tim Evaluasi Harga PT Pupuk Indonesia (Persero), maka keanggotaan akan terus melekat pada individu tersebut.

Struktur dan Keanggotaan Komite Harga

1. Direktur Utama
2. Direktur Keuangan
3. Direktur Supply Chain

Profil Anggota Komite Harga

Profil anggota Komite Harga yang meliputi nama dan jabatan serta keanggotaan dalam komite, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, termasuk rangkap jabatan disampaikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Harga

Komite Harga melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen, objektif, dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan penetapan harga. Pelaksanaan tugas Komite Harga berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Harga

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Harga diuraikan dalam tabel di bawah ini:

1. Menetapkan harga jual rutin produk non subsidi Pupuk Indonesia atas usulan dari Fungsi Pemasaran PTPI.

2. Menetapkan harga jual non rutin produk non subsidi Pupuk Indonesia sesuai dengan otorisasi atas usulan dari Tim Evaluasi Harga.

Pricing Committee

The Pricing Committee was established as a supporting body based on Board of Directors Decree No. 113/A/HK/C0400/SK/2024 dated October 1, 2024, concerning the Establishment of the Pricing Committee and the Pupuk Indonesia Group Price Evaluation Team. Due to the change in nomenclature in the Marketing Directorate's organizational structure, the Pricing Committee composition changed in accordance with PTPI Board of Directors Decree No. 52/A/HK/2/C0400/SK/2025 concerning the Pricing Committee and the PT Pupuk Indonesia (Persero) Price Evaluation Team.

Pricing Committee Guidelines or Charter

The Committee's duties and responsibilities are carried out based on Board of Directors Decree No. 113/A/HK/C0400/SK/2024 dated October 1, 2024, which regulates the formation, authority, and work procedures of the Committee.

Pricing Committee Term of Office

Responsibilities as a member of the Team are inherent in the position, regardless of changes in the official's name or position/nomenclature. As long as an individual holds a position stipulated in PTPI Board of Directors Decree No. 52/A/HK/2/C0400/SK/2025 concerning the Price Committee and Price Evaluation Team of PT Pupuk Indonesia (Persero), membership will remain with that individual.

Pricing Committee Structure and Membership

7. President Director
8. Director of Finance
9. Supply Chain Director

Pricing Committee Member Profiles

The complete profiles of the Price Committee members, including their names and positions, committee membership, age, nationality, educational background, and concurrent positions, can be found in full in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Pricing Committee Independence Statement

The Price Committee carried out its duties and functions independently, objectively, and professionally, free from conflicts of interest in all pricing decisions. The implementation of the Price Committee's duties was guided by the principles of good corporate governance.

Pricing Committee Duties and Responsibilities

The Price Committee's duties and responsibilities are shown in detail in the table below, and include:

1. Determining the regular selling price of Pupuk Indonesia's non-subsidized products based on recommendations from the PTPI Marketing Department.
2. Determining non-routine selling prices for Pupuk Indonesia's non-subsidized products in accordance with the authorization and recommendations from the Price Evaluation Team.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti
Training and/or Competency Development Programs Attended

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Ammonia Energy Annual Conference 2025	Ammonia Energy Association	20 Oktober 2025 October 20, 2025
2	Argus Fertilizer Asia Conference 2025	Argus	22 April 2025 April 22, 2025
3	Baker Hughes Annual Meeting 2025	Baker Hughes	02 Februari 2025 February 2, 2025
4	IFA Annual Conference 2025	International Fertilizer Association (IFA)	12 Mei 2025 May 12, 2025
5	IFA Crossroads 2025	International Fertilizer Association (IFA)	07 Oktober 2025 October 07, 2025
6	IFA Cultivating Tomorrow Conference 2025 - Innovation Meets Sustainability	International Fertilizer Association (IFA)	01 April 2025 April 01, 2025

Sertifikasi Profesi Komite Harga
Belum memiliki sertifikasi profesi pada Komite Harga.

Pricing Committee Professional Certification
The Pricing Committee does not yet have any professional certification.

Rapat Komite Harga
Sepanjang tahun 2025, Komite Harga tidak menyelenggarakan rapat.

Pricing Committee Meetings
The Pricing Committee did not hold any meetings in 2025.

Pelaksanaan Tugas Komite Harga
Sepanjang tahun 2025, Komite Harga telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

Pricing Committee Duties Implementation
In 2025, the Pricing Committee implemented the following work programs:

No.	Program Program
1	Penerbitan berkala Harga Jual Transaksi Rutin untuk Produk Pupuk & Non Pupuk Non Subsidi yang masuk ke dalam kategori sentralisasi. Periodic publication of Routine Transaction Selling Prices for Fertilizer and Non-Subsidized Fertilizer Products, which fall into the centralized category.
2	Penerbitan berkala Harga Jual Transaksi Non Rutin sesuai kebutuhan fungsi Penjualan Perusahaan. Periodic publication of Non-Routine Transaction Selling Prices according to the needs of the Company's Sales function.

Komite Talenta

Komite Pengembangan SDM ditetapkan menjadi Komite Talenta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 43/A/HK/P28/SK/2024. Komite Talenta selanjutnya berfungsi sebagai organ pendukung yang dibentuk oleh Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola program pengembangan Sumber Daya Manusia di Perusahaan agar selaras dengan kebutuhan kompetensi.

Talent Committee

The HC Development Committee was established as the Talent Committee based on Board of Directors Decree No. 43/A/HK/P28/SK/2024. The Talent Committee functions as a supporting body established by the Board of Directors to assist the Board of Directors in managing the Company's HC development program to align with competency needs.

Pedoman atau Piagam Komite Talenta

Pengaturan mengenai pembentukan, mandat, kewenangan, serta tata kerja Komite telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 43/A/HK/P28/SK/2024, yang menjadi dasar hukum dan operasional dalam pelaksanaan tugas Komite.

Talent Committee Guidelines or Charter

The provisions for the Committee's formation, mandate, authority, and work procedures were established through Board of Directors Decree No. 43/A/HK/P28/SK/2024, as the legal and operational basis for carrying out the Committee's duties.

Susunan Anggota Komite Talenta
Talent Committee Membership

Jabatan Position	Dijabat oleh: Held by
Ketua Chair	Direktur Utama President Director
Sekretaris Secretary	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs
Anggota Members	Direksi Board of Directors

Profil Anggota Komite Talenta

Profil anggota Komite Talenta yang meliputi nama dan jabatan serta keanggotaan dalam komite, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, termasuk rangkap jabatan disampaikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Talent Committee Member Profiles

The Talent Committee member profiles, including their names and positions, committee membership, age, nationality, educational background, and concurrent positions, can be found in full in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite Talenta

1. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil kajian dan usulan dari Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia;
2. Menetapkan keputusan-keputusan strategis yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang meliputi namun tidak terbatas pada:
   a. *Organizational Development*
   b. *Performance Management*
   c. *Career and Talent Development*
   d. *People Development*
   e. *HC System and Administration*
   f. *Compensation & Benefit*
   g. *Culture Management*
3. Menetapkan usulan *top talent* yang bersumber dari Direksi Anak Perusahaan dan BoD-1 Pupuk Indonesia Group secara periodik yang disampaikan kepada Dewan Komisaris (Komite Nominasi dan Remunerasi) PTPI;
4. Menetapkan pengisian dan/atau penggantian BoD-1 Pupuk Indonesia Group;
5. Menetapkan BoD-2 sebagai suksesor untuk posisi kunci di Pupuk Indonesia Group;
6. Menetapkan usulan pengisian dan/atau penggantian Direksi Anak Perusahaan yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris PTPI;

Talent Committee Main Duties and Responsibilities

1. Establishing policies and strategies for HC management based on studies and recommendations from the HC Directorate;
2. Establishing strategic decisions related to HC management, including, but not limited to:
   a. Organizational Development
   b. Performance Management
   c. Career and Talent Development
   d. People Development
   e. HC System and Administration
   f. Compensation & Benefits
   g. Culture Management
3. Establishing periodic Top Talent proposals from the Board of Directors of Subsidiaries and the Board of Directors of the Pupuk Indonesia Group, which are submitted to the Board of Commissioners (Nomination and Remuneration Committee) of PTPI;
4. Determining the appointment and/or replacement of Pupuk Indonesia Group BoD-1;
5. Appointing BoD-2 as successors for key positions in the Pupuk Indonesia Group;
6. Determining proposals for the appointment and/or replacement of Directors of Subsidiaries, which require approval from the PTPI Board of Commissioners;

7. Menetapkan usulan pengisian dan/atau penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi yang memerlukan persetujuan dari PTPI;
8. Menetapkan pemberian apresiasi bagi karyawan yang memberikan kontribusi dan prestasi khusus dan/atau luar biasa dan berdampak secara signifikan bagi kinerja dan keberlangsungan Perusahaan;
9. Menetapkan pemberian sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Kepatuhan/Tim Disiplin Perusahaan.

7. Determining proposals for the appointment and/or replacement of Directors and/or Boards of Commissioners of Subsidiary Companies/Affiliated Companies, which require approval from PTPI;
8. Determining appreciation through awards to employees who make special and/or extraordinary contributions and achievements that significantly impact the Company's performance and sustainability;
9. Determining sanctions for employees who commit serious violations, taking into account recommendations from the Company's Compliance Team/Discipline Team.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti
Training and/or Competency Development Attended

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Ammonia Energy Annual Conference 2025	Ammonia Energy Association	20 Oktober 2025 October 20, 2025
2	Argus Fertilizer Asia Conference 2025	Argus	22 April 2025 April 22, 2025
3	Baker Hughes Annual Meeting 2025	Baker Hughes	02 Februari 2025 February 2, 2025
4	Blue Ocean Strategy Training	INSEAD	3 & 10 Februari 2025 February 3 & 10, 2025
5	Certified Human Resources Professional (CHRP)	Atmajaya	25 Mei 2025 May 25, 2025
6	Chief Risk Officer (CRO) School Tahun 2025	Kementerian BUMN	02 Mei 2025 May 2, 2025
7	D'Connection Leaders Roundtable – WEPs Corporate Action Lab Indonesia	Danantara	10 September 2025 September 10, 2025
8	FHCI Connect Expert Series 2 : Unlocking Employee Potential With Personalized AI-Driven Development	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	27 Agustus 2025 August 27, 2025
9	FHCI Connect Expert Series 4 : Humanizing Digital Transformation: Building Ethical, Agile, and Future-Ready Talent Ecosystems	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	30 Oktober 2025 October 30, 2025
10	IFA Annual Conference 2025	International Fertilizer Association (IFA)	12 Mei 2025 May 12, 2025
11	IFA Crossroads 2025	International Fertilizer Association (IFA)	07 Oktober 2025 October 7, 2025
12	IFA Cultivating Tomorrow Conference 2025 - Innovation Meets Sustainability	International Fertilizer Association (IFA)	01 April 2025 April 1, 2025
13	Indonesia Economic Outlook 2025	ISCEA Indonesia	18 Januari 2025 January 18, 2025
14	Mental Health & Wellness Exhibition and Conference	Mind Care	03 Desember 2025 December 3, 2025
15	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Digital Marketing bersama Srikandi PI Financial Management and Digital Marketing Training with Srikandi PI	PT Pupuk Indonesia (Persero)	06 Agustus 2025 August 6, 2025
16	Risk Beyond 2025	CRMS Indonesia	04 Desember 2025 December 4, 2025
17	Strategic Risk Management & Value Creation	INSEAD	12 September 2025 September 12, 2025
18	Update PPN dan Core Tax sesuai Project Management No. 81 Tahun 2024 Update on VAT and Core Tax in accordance with Project Management Regulation No. 81 of 2024	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	25 Januari 2025 January 25, 2025

Sertifikasi Profesi Komite Talenta
Talent Committee Professional Certification

No.	Nama Sertifikasi Certification Name
1	Certified Human Resources Professional (CHRP)

Rapat Komite Talenta

Kebijakan
Komite Talenta dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Nomor 43/A/HK/P28/SK/202 tentang Komite Talenta, dengan ketentuan bahwa rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota, baik secara luring maupun daring; setiap keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat dengan persetujuan seluruh anggota yang hadir; serta proses pembahasan dapat dibantu oleh Pejabat BoD-1 yang membawahi Fungsi Sumber Daya Manusia atas persetujuan Ketua Komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran
Sepanjang tahun 2025, Komite Talenta menyelenggarakan rapat sebanyak 7 kali. Pokok-pokok agenda yang dibahas dalam rapat tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Talent Committee Meetings

Policy
The Talent Committee, in carrying out its duties, is guided by Board of Directors Decree No. 43/A/HK/P28/SK/202 concerning the Talent Committee, which stipulates that a meeting is valid if attended by more than 50% (fifty percent) of members, whether in person or online; all decisions are made through deliberation to reach consensus with the approval of all members present; and the deliberation process may be assisted by the Board of Directors (BoD-1) Official in charge of HC with the approval of the Committee Chair.

Meeting Frequency and Attendance
In 2025, the Talent Committee held seven meetings, with the agenda items discussed at these meetings shown in the following table:

No.	Agenda Agenda
1.	Usulan Perubahan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang Pertama Proposing Changes to the First Supporting Organs of the Board of Commissioners
2.	Usulan Perubahan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang Kedua Proposing Changes to the Second Supporting Organs of the Board of Commissioners
3.	Pengisian Personil *Holding* dan *Subholding* Filing Holding and Subholding Personnel
4.	Pengisian BoD-1 PT Pupuk Indonesia (Persero) dan BoD-1 Anak Perusahaan Filling the BoD-1 of PT Pupuk Indonesia (Persero) and BoD-1 of Subsidiaries
5.	Usulan Direksi dan Dekom Cucu Perusahaan dan Afiliasi Pupuk Indonesia Group Proposing Board of Directors and Board of Commissioners of Pupuk Indonesia Group Subsidiaries and Affiliates
6.	Usulan BoD-1, Direksi, dan Dewan Komisaris Anak, Cucu, dan Perusahaan Afiliasi Pupuk Indonesia Group Proposing Pupuk Indonesia Group BoD-1, Board of Directors, and Board of Commissioners of Subsidiaries, Subsidiaries, and Affiliates
7.	Seleksi *Top Talent* Pupuk Indonesia Group 2025 Selecting Top Talent for Pupuk Indonesia Group in 2025

Pelaksanaan Tugas Komite Talenta

Sepanjang tahun 2025, Komite Talenta telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

Implementation of the Talent Committee Duties

In 2025, the Talent Committee implemented the following:

No.	Program Program
1.	Perubahan Organ Pendukung Dewan Komisaris Changing the Board of Commissioners' Supporting Organs
2.	Pengisian Personel *Holding* dan Subholding Filing Personnel for Holding and Subholding Companies
3.	Pemenuhan BoD-1 PT Pupuk Indonesia (Persero) dan BoD-1 Anak Perusahaan Filling the BoD-1 of PT Pupuk Indonesia (Persero) and BoD-1 of Subsidiaries
4.	Seleksi Top Talent Pupuk Indonesia Group Tahun 2025 Selecting Top Talent for the Pupuk Indonesia Group in 2025
5.	Pengusulan BoD-1, Direksi, dan Dewan Komisaris pada Anak, Cucu, dan Perusahaan Afiliasi Pupuk Indonesia Group Proposing BoD-1, Board of Directors, and Board of Commissioners for Subsidiaries, Subsidiaries, and Affiliated Companies of the Pupuk Indonesia Group

Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Komite TJSL dibentuk sebagai organ pendukung di bawah Direksi. Pengangkatan Komite tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/A/KU/E30/SK/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Komite TJSL Pupuk Indonesia Group.

Pedoman atau Piagam Komite TJSL

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite TJSL mengacu pada Surat Pembentukan Komite berdasarkan Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 053/A/KU/E30/SK/2022 tentang Tim Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup, yang menjadi dasar hukum dan pedoman kerja Komite TJSL dalam menjalankan fungsinya.

Social and Environmental Responsibility (SER) Committee

The SER Committee was established as a supporting body under the Board of Directors, and was carried out based on Board of Directors Decree No. 053/A/KU/E30/SK/2022 dated May 10, 2022, concerning the Pupuk Indonesia Group's SER Committee.

SER Committee Guidelines or Charter

The implementation of the SER Committee's duties and responsibilities refers to the Committee Establishment Letter based on PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors Decree No. 053/A/KU/E30/SK/2022 concerning the PT Pupuk Indonesia (Persero) Group's SER Committee Team, which serves as the legal basis and guidelines for the SER Committee in carrying out its functions.

Susunan Anggota Komite TJSL
SER Committee Members Composition

Jabatan Position	Dijabat oleh: Held By:
Ketua Chair	Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko PTPI Director of HC, Governance, and Risk Management, PTPI
Sekretaris Secretary	SVP Umum & TJSL PT Pupuk Indonesia (Persero) SVP General Affairs & SER, PT Pupuk Indonesia (Persero)
Anggota Members	1. Direktur Keuangan & Umum PT Petrokimia Gresik 2. Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kujang 3. Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kalimantan Timur 4. Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Iskandar Muda 5. Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 6. Direktur Keuangan & SDM PT Rekayasa Industri 1. Finance & General Affairs Director, PT Petrokimia Gresik 2. Finance & General Affairs Director, PT Pupuk Kujang 3. Finance & General Affairs Director, PT Pupuk Kalimantan Timur 4. Finance & General Affairs Director, PT Pupuk Iskandar Muda 5. Finance & General Affairs Director, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 6. Finance & HC Director, PT Rekayasa Industri

Profil Anggota Komite TJSL

Profil anggota Komite TJSL yang meliputi nama dan jabatan serta keanggotaan dalam komite, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, termasuk rangkap jabatan disampaikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

SER Committee Members Profile

The SER Committee members profiles, including their names and positions, committee membership, age, nationality, educational background, and concurrent positions, can be found in full in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite TJSL Level Utama

1. Menerima usulan serta memberikan saran dan arahan strategis terkait program strategis yang dilakukan oleh Komite TJSL Level Madya;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi pada setiap konsolidasi kegiatan yang telah dilaporkan pada Laporan Bulanan kegiatan TJSL;
3. Membahas program strategis TJSL Pupuk Indonesia Group sehingga program tersebut tepat sasaran dan dapat memberikan nilai tambah bagi Pupuk Indonesia Group;
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program TJSL Pupuk Indonesia Group;
5. Bertanggung jawab atas pengelolaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TJSL Pupuk Indonesia Group.

SER Committee Senior Level Duties and Responsibilities

1. Receiving proposals and providing strategic advice and directives regarding strategic programs implemented by the Middle Level SER Committee;
2. Supervising and evaluating each consolidated activity reported in the Monthly SER Activity Report;
3. Discussing Pupuk Indonesia Group's SER strategic programs to ensure they are on target and providing added value to Pupuk Indonesia Group;
4. Being responsible for the implementation of Pupuk Indonesia Group's SER programs;
5. Being responsible for managing Pupuk Indonesia Group's Human Capital (HC) development programs.

Tugas dan Wewenang Ketua Komite TJSL Level Utama

1. Menyerahkan daftar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program TJSL Pupuk Indonesia Group kepada Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) untuk diminta persetujuan;
2. Menyampaikan hasil realisasi kegiatan pada akhir tahun tutup buku kegiatan TJSL Pupuk Indonesia Group kepada Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial KBUMN;
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain berkaitan dengan programprogran TJSL kolaborasi yang mengedepankan kontribusi perusahaan pada masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Pupuk Indonesia Group;
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite TJSL Level Madya berkaitan dengan pemenuhan target dan rencana kegiatan.

Senior Level SER Committee Chair Duties and Authorities

1. Submitting a list of the Pupuk Indonesia Group's SER program Work Plan and Budget (RKA) to the Assistant Deputy for SER at the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) for approval;
2. Submitting the results of the Pupuk Indonesia Group's SER activity realizations at the end of the fiscal year to the Assistant Deputy for Social Responsibility at the KBUMN;
3. Coordinating with other BUMN regarding collaborative SER programs that prioritize the Company's contribution to the community and thus provide added value to the Pupuk Indonesia Group;
4. Evaluating the Middle Level SER Committee performance regarding the achievement of targets and activity plans.

Susunan Anggota Komite TJSL Level Madya
Middle Level SER Committee Members Composition

Jabatan Position	Dijabat oleh: Held By:
Ketua Chair	SVP Umum & TJSL PTPI SVP General Affairs & SER of PTPI
Sekretaris Secretary	VP TJSL, PTPI VP SER, PTPI
Anggota Members	Seluruh SVP Penanggung Jawab Unit TJSL pada setiap Anak Perusahaan All SVP in Charge of SER Units in each Subsidiary

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite TJSL Level Madya

1. Melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan program TJSL Pupuk Indonesia Group;
2. Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program TJSL Pupuk Indonesia Group;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Program TJSL PT Pupuk Indonesia Group;
4. Melakukan pelatihan dan pemantauan Program TJSL Pupuk Indonesia Group;
5. Berperan dalam pengambilan keputusan pemberian bantuan kepada mitra binaan;
6. Melakukan penyaluran dana Program Kemitraan (Pendanaan UMK) bagi Anak Perusahaan PTPI, yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri (selanjutnya disebut "Anak Perusahaan") yang memiliki alokasi anggaran pada Program Kemitraan (Pendanaan UMK);
7. Melakukan pengawasan pada penagihan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan lapangan Program TJSL BUMN;
8. Menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memulihkan pinjaman (macet/bermasalah);
9. Melakukan evaluasi atas rekapitulasi profil mitra binaan yang mendapatkan pinjaman bantuan;
10. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas penyaluran bantuan program.

Middle-Level SER Committee Duties and Responsibilities

1. Coordinating units/directorates to formulate objectives and guidelines for implementing the Pupuk Indonesia Group CSR program;
2. Assisting the Board of Directors in monitoring and evaluating the implementation of the Pupuk Indonesia Group CSR program;
3. Monitoring and evaluating the financial management of the Pupuk Indonesia Group CSR program;
4. Conducting training and monitoring the Pupuk Indonesia Group CSR program;
5. Playing a role in decision-making regarding assistance to fostered partners;
6. Distributing funds from the Partnership Program (Micro, Small, and Medium Enterprises Funding) to PTPI subsidiaries, inclusing PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, and PT Rekayasa Industri (hereinafter referred to as "Subsidiaries") that have budget allocations for the Partnership Program (Micro, Small, and Medium Enterprises Funding);
7. Supervising collection and being responsible for the field implementation of the SOE SER program;
8. Determining possible efforts to recover loans (delinquent/problematic);
9. Evaluating the profile summary of fostered partners receiving loan assistance;
10. Monitoring and supervising distribution of program assistance.

Tugas dan Wewenang Ketua Komite TJSL Level Madya

1. Menyerahkan daftar usulan dan susunan program TJSL BUMN kepada Direktur Sumber Daya Manusia untuk diminta persetujuan Direktur Sumber Daya Manusia;
2. Menyampaikan hasil penilaian Survei Kepuasan Lingkungan TJSL Pupuk Indonesia Group;
3. Memberikan arahan strategis pada setiap program yang diusulkan oleh Anggota komite TJSL Level Utama dan Level Madya.

Head of the Middle Level SER Committee Duties and Authorities

1. Submitting a list of proposed SOE SER programs and their structure to the Director of Human Capital for approval by the Director of Human Capital;
2. Submitting the results of the Pupuk Indonesia Group SER Environmental Satisfaction Survey;
3. Providing strategic directives for each program proposed by the Main and Middle Level SER Committee members.

Tugas dan Wewenang Sekretaris Komite TJSL Level Madya

1. Menyiapkan materi rapat monitoring bulanan TJSL Pupuk Indonesia Group;
2. Berkoordinasi dengan *Person in Charge* (PIC) perlaporan masing-masing Anak Perusahaan;
3. Memastikan kelengkapan dokumentasi serta data pada setiap laporan telah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.

Secretary to the Middle Level SER Committee Duties and Authorities

1. Preparing material for the monthly CSR Pupuk Indonesia Group monitoring meeting;
2. Coordinating with the Person in Charge (PIC) for reporting in each Subsidiary;
3. Ensurig the completeness of documentation and data in each report in accordance with applicable regulations.

Tugas dan Wewenang Anggota Komite TJSL Level Madya

1. Menyiapkan daftar usulan dan susunan program TJSL BUMN;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan lapangan program TJSL BUMN;
3. Pemetaan dan penyusunan program TJSL Pupuk Indonesia Group;
4. Melakukan sosialisasi dan publikasi program TJSL Pupuk Indonesia Group;
5. Memastikan seluruh target dan sasaran kegiatan serta program TJSL berjalan sesuai dengan tata kelola Perusahaan serta manajemen risiko yang berlaku.

Middle-Level SER Committee Members Duties and Authorities

1. Preparing a list of proposals and structure for SOE SER programs;
2. Being responsible for the implementation of SOE SER sector programs;
3. Mapping and developing the Pupuk Indonesia Group SER program;
4. Socializing and publicizing the Pupuk Indonesia Group SER program;
5. Ensuring all SER program targets and objectives are implemented in accordance with applicable corporate governance and risk management.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti
Training and/or Competency Improvement Attended

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Blue Ocean Strategy Training	INSEAD	3 & 10 Februari 2025 February 3 & 10, 2025
2	Chief Risk Officer (CRO) School Tahun 2025	Kementerian BUMN	02 Mei 2025 May 2, 2025
3	D'Connection Leaders Roundtable – WEPs Corporate Action Lab Indonesia	Danantara	10 September 2025 September 10, 2025
4	ESG Reporting	CRMS Indonesia	06 November 2025 November 6, 2025
5	ESG, ISO 26000 dan GRI Pupuk Indonesia Group ESG, ISO 26000 and Pupuk Indonesia Group	Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia (LST UI)	08 Mei 2025 May 8, 2025
6	FHCI Connect Expert Series 2 : Unlocking Employee Potential With Personalized AI-Driven Development	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	27 Agustus 2025 August 27, 2025
7	FHCI Connect Expert Series 4 : Humanizing Digital Transformation: Building Ethical, Agile, and Future-Ready Talent Ecosystems	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	30 Oktober 2025 October 30, 2025
8	Indonesia Economic Outlook 2025	ISCEA Indonesia	18 Januari 2025 January 18, 2025
9	Mental Health & Wellness Exhibition and Conference	Mind Care	03 Desember 2025 December 3, 2025
10	Pelatihan Counseling Counseling Training	PT Daya Dimensi Indonesia (DDI)	02 Juni 2025 June 2, 2025

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
11	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Digital Marketing bersama Srikandi PI Financial Management and Digital Marketing Training with Srikandi PI	PT Pupuk Indonesia (Persero)	06 Agustus 2025 August 6, 2025
12	Sekolah Saham Bennix Bennix Stock School	Bennix	29 Mei 2025 May 29, 2025
13	Strategic Risk Management & Value Creation	INSEAD	12 September 2025 September 12, 2025
14	Update PPN dan Core Tax sesuai Project Management No. 81 Tahun 2024 Update on VAT and Core Tax in accordance with Project Management Regulation No. 81 of 2024	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	25 Januari 2025 January 25, 2025

Sertifikasi Profesi Komite TJSL

Belum memiliki sertifikasi profesi pada Komite TJSL.

SER Committee Professional Certification

The SER Committee does not yet have professional certification.

Rapat Komite TJSL

Kebijakan

Komite TJSL belum memiliki kebijakan khusus terkait penyelenggaraan rapat. Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan secara tertib dan terdokumentasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2025, Komite TJSL menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali. Pokok-pokok agenda yang dibahas dalam rapat tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

SER Committee Meetings

Policy

The SER Committee does not yet have a specific policy regarding meeting procedures. Meetings are held as needed in an orderly and documented manner to ensure the smooth implementation of the Committee's duties.

Meeting Frequency and Attendance

In 2025, the SER Committee held one meeting with the agenda item discussed shown in the following table:

No.	Agenda Agenda
1	Kesepakatan Bersama Implementasi Inisiatif dan Program Kerja Strategis Tahun 2026 Bidang SDM, Umum, dan TJSL di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup. Joint Agreement on the Implementation of Strategic Initiatives and Work Programs for 2026 in the HC, General Affairs, and SER Sectors in the PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Pelaksanaan Tugas Komite TJSL pada Tahun Buku

Di tahun 2025, Komite TJSL menyusun dan menyelaraskan Program Kerja TJSL melalui forum sinergi yang melibatkan *holding* dan seluruh entitas anak. Sinergi tersebut secara resmi disepakati pada 22 September 2025 dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Implementasi Inisiatif dan Program Kerja Strategis Tahun 2026 Bidang SDM, Umum, dan TJSL di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup. Kegiatan ini mencakup penetapan prioritas program, penyelarasan RKA, serta konsolidasi target dan indikator kinerja TJSL secara terintegrasi.

Implementation of the SER Committee's Duties in the Fiscal Year

In 2025, the SER Committee developed and aligned the SER Work Program through a synergy forum involving the holding company and all subsidiaries. This synergy was officially agreed upon on September 22, 2025, and outlined in the Joint Agreement on the Implementation of Strategic Initiatives and Work Programs for 2026 in the HC, General Affairs, and SER Sectors in the PT Pupuk Indonesia (Persero) Group, which included establishing program priorities, aligning the Work Plan and Budget (RKA), and consolidating SER targets and performance indicators in an integrated manner.

Komite Investasi Pengembangan

Komite Investasi Pengembangan berperan sebagai organ pendukung yang dibentuk oleh Direksi. Komite ini bertugas dalam memberikan persetujuan prinsip atas usulan investasi pengembangan dari Anak Perusahaan menggunakan kaidah *Four Eyes Principles*, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 66/A/HK/1/H0202/SK/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Komite Investasi Pengembangan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pedoman atau Piagam Komite Investasi Pengembangan

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 66/A/HK/1/H0202/SK/2025 tanggal 13 Agustus 2025 yang menjadi dasar pembentukan sekaligus mengatur kewenangan dan mekanisme kerja Komite dalam menjalankan fungsinya.

Struktur dan Keanggotaan Komite Investasi Pengembangan

Susunan organisasi dan keanggotaan Komite Investasi Pengembangan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 66/A/HK/1/H0202/SK/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Komite Investasi Pengembangan PT Pupuk Indonesia (Persero), dengan pembagian organisasi Komite Investasi Pengembangan berdasarkan *threshold* nilai investasi pengembangan, dengan rincian sebagai berikut:

Investment Committee Development

The Development Investment Committee serves as a supporting body established by the Board of Directors tasked with providing in-principle approval for development investment proposals from Subsidiaries using the Four Eyes Principles, as stipulated in Board of Directors Decree No. 66/A/HK/1/H0202/SK/2025 dated August 13, 2025, concerning the Development Investment Committee of PT Pupuk Indonesia (Persero).

Investment Development Committee Guidelines or Charter

The implementation of the Committee's duties and responsibilities is based on Board of Directors Decree No. 66/A/HK/1/H0202/SK/2025 dated August 13, 2025, which serves as the basis for its formation and regulates the Committee's authority and working mechanisms in carrying out its functions.

Investment Development Committee Structure and Membership

The Investment Development Committee organizational structure and membership of is stipulated in Board of Directors Decree No. 66/A/HK/1/H0202/SK/2025 dated August 13, 2025, concerning the Investment Development Committee of PT Pupuk Indonesia (Persero). The organizational structure of the Investment Development Committee is divided based on the development investment threshold, as follows:

Komite Investasi Pengembangan A Investment Development Committee A		**Komite Investasi Pengembangan B** Investment Development Committee B	
Fungsi Bisnis Business Function	**Fungsi Risiko** Risk Function	**Fungsi Bisnis** Business Function	**Fungsi Risiko** Risk Function
1. Direktur yang membawahi fungsi teknik dan pengembangan bisnis 2. Direktur yang membawahi fungsi operasi 3. Direktur yang membawahi fungsi pemasaran 1. Director in charge of technical and business development 2. Director in charge of operations 3. Director in charge of marketing	1. Direktur Utama 2. Direktur yang membawahi fungsi keuangan 3. Direktur yang membawahi fungsi SDM 4. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko 5. Direktur yang membawahi fungsi manajemen aset 1. President Director 2. Director in charge of finance 3. Director in charge of HC 4. Director in charge of risk management 5. Director in charge of asset management	1. Direktur yang membawahi fungsi teknik dan pengembangan bisnis 2. Direktur yang membawahi fungsi operasi 3. Direktur yang membawahi fungsi pemasaran 1. Director in charge of engineering and business development 2. Director in charge of operations 3. Director in charge of marketing	1. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko 2. Direktur yang membawahi fungsi keuangan 3. Direktur yang membawahi fungsi SDM 1. Director in charge of risk management 2. Director in charge of finance 3. Director in charge of HC

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komite Investasi Pengembangan dibantu oleh Tim Kerja Komite Investasi untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas usulan Proyek Investasi Pengembangan Anak Perusahaan kepada Komite Investasi Pengembangan, dengan rincian susunan keanggotan sebagai berikut:

1. SVP yang membawahi fungsi Pengembangan Bisnis (Ketua);
2. VP di Kompartemen Pengembangan Bisnis;
3. SVP yang membawahi fungsi Pendanaan Investasi (Anggota);
4. SVP yang membawahi fungsi Akuntansi (Anggota);
5. SVP yang membawahi fungsi operasi (Anggota);
6. SVP yang membawahi fungsi Tata Kelola & Kepatuhan (Anggota);
7. SVP yang membawahi fungsi Hukum (Anggota);

To support the implementation of its duties and authorities, the Investment Development Committee is assisted by an Investment Committee Working Team, which evaluates and provides recommendations on proposed Subsidiary Development Investment Projects to the Investment Development Committee. The membership is as follows:

1. SVP (Chairman) in charge of Business Development (Chair);
2. VP Business Business Development;
3. SVP in charge of Investment Funding (Member);
4. SVP in charge of Accounting (Member);
5. SVP in charge of Operations (Member);
6. SVP in charge of Governance & Compliance (Member);
7. SVP in charge of Legal (Member);

8. SVP yang membawahi fungsi Manajemen Risiko (Anggota);
9. SVP yang membawahi fungsi Pemasaran (Anggota);
10. SVP yang membawahi fungsi Perencanaan Strategis Perusahaan (Anggota);
11. SVP yang membawahi fungsi Perencanaan Pengadaan (Anggota).

8. SVP in charge of Risk Management (Member);
9. SVP in charge of Marketing (Member);
10. SVP in charge of Corporate Strategic Planning (Member);
11. SVP in charge of Procurement Planning (Member).

Profil Anggota Komite Investasi Pengembangan

Profil anggota Komite Investasi Pengembangan yang meliputi nama dan jabatan serta keanggotaan dalam komite, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, termasuk rangkap jabatan disampaikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Investment Development Committee Members Profiles

The Investment Development Committee members profiles, including their names and positions, committee membership, age, nationality, educational background, and concurrent positions, can be found in full in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Tugas dan Wewenang Komite Investasi Pengembangan

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Investasi Pengembangan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Investment Development Committee Duties and Authorities

The Investment Development Committee duties and responsibilities are shown in the table below:

Tugas Duties	Wewenang Authorities
Melakukan pengesahan evaluasi dari Tim Kerja Komite Investasi Pengembangan terhadap usulan Investasi Pengembangan Anak Perusahaan. Approving the Investment Development Committee Working Team evaluation of the Subsidiary's Development Investment proposal.	Memberikan Persetujuan Prinsip atas usulan Investasi Pengembangan dari Anak Perusahaan menggunakan kaidah Four Eyes Principles, yang merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbang-pertimbangan terhadap aspek risiko dan aspek bisnis. Providing In-Principle Approval for the Subsidiary's Development Investment proposal using the Four Eyes Principles, which define decision-making based on considerations of risk and business aspects.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikut

Training and/or Competency Improvement Attended

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Ammonia Energy Annual Conference 2025	Ammonia Energy Association	20 Oktober 2025 October 20, 2025
2	Annual Budget Planning (ABP)	Bester & Co	11 September 2025 September 11, 2025
3	Argus Fertilizer Asia Conference 2025	Argus	22 April 2025 April 22, 2025
4	Baker Hughes Annual Meeting 2025	Baker Hughes	02 Februari 2025 February 2, 2025
5	Blue Ocean Strategy Training	INSEAD	3 & 10 Februari 2025 February 3 & 10, 2025
6	BSE Masterclass : Creating Business Ecosystem	BUMN School of Excellence (BSE)	21 Februari 2025 February 21, 2025
7	Business Development Strategy & Plan	Prasmul Eli	21 Oktober 2025 October 21, 2025
8	Business Process & Project Economics for Upstream Gas	IGS	10 November 2025 November 10, 2025
9	Business Judgement Rule (BJR) & ESGRC UU BUMN 2025	PT Media Madani Ultima (Majalah BusinessNews)	21 Februari 2025 February 12, 2025
10	Certified Internal Audit Officer (CIAO)	PPM Manajemen	12 Juni 2025 July 12, 2025
11	Chief Risk Officer (CRO) School Tahun 2025	Kementerian BUMN	02 Mei 2025 May 2, 2025
12	D'Connection Leaders Roundtable – WEPs Corporate Action Lab Indonesia	Danantara	10 September 2025 September 10, 2025
13	Governance Risk Compliance Professional (GRCP) & Governance Risk Compliance Auditor (GRCA)	CRMS	07 Oktober 2025 October 7, 2025

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
14	IFA Annual Conference 2025	International Fertilizer Association (IFA)	12 Mei 2025 May 12, 2025
15	IFA Crossroads 2025	International Fertilizer Association (IFA)	07 Oktober 2025 October 7, 2025
16	IFA Cultivating Tomorrow Conference 2025 - Innovation Meets Sustainability	International Fertilizer Association (IFA)	01 April 2025 April 1, 2025
17	IFA Strategic Forum 2025	IFA	18 November 2025 November 18, 2025
18	Indonesia Economic Outlook 2025	ISCEA Indonesia	18 Januari 2025 January 18, 2025
19	Leader's Talk MLDP BOD-2 Pupuk Indonesia Group - Mastering Cost Leadership: Strategies for Achieving Competitive Advantage	Oji Fahrurrozi (President Director, PT INEOS Aromatics Indonesia)	23 Juni 2025 June 23, 2025
20	Pelatihan SAK For Executive SAK Training for Executives	Ikatan Akuntan Indonesia	11 Desember 2025 December 11, 2025
21	Risk Beyond 2025	CRMS Indonesia	04 Desember 2025 December 4, 2025
22	Seminar Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Seminar on the Implementation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code	PT Pupuk Indonesia (Persero)	17 September 2025 September 17, 2025
23	Strategic Risk Management & Value Creation	INSEAD	12 September 2025 September 12, 2025
24	The New Special Directorship Program : Governance Strategies - Managing Corporate Risk In Volatile World	IICD	24 Juni 2025 June 24, 2025
25	Update PPN dan Core Tax sesuai Project Management No. 81 Tahun 2024 Update on VAT and Core Tax in accordance with Project Management Regulation No. 81 of 2024	Institut Akuntan Manajemen Indonesia	25 Januari 2025 January 25 2025

Sertifikasi Profesi Komite Investasi Pengembangan
Professional Certification for the Investment Development Committee

No.	Nama Sertifikasi Certification Name
1	Certified Internal Audit Officer (CIAO)

Rapat Komite Investasi Pengembangan

Kebijakan
Rapat komite investasi pengembangan dihadiri oleh Anggota Komite Investasi minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan menjadi basis Keputusan Persetujuan Prinsip.

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran
Sepanjang tahun 2025, Komite Investasi Pengembangan menyelenggarakan rapat sebanyak 2 kali. Pokok-pokok agenda yang dibahas dalam rapat tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Investment Development Committee Meetings

Policy
Investment Development Committee meetings are attended by at least 2/3 (two-thirds) of the total number of Investment Committee Members and serve as the basis for the In-Principle Approval Decisions.

Meeting Frequency
In 2025, the Investment Development Committee held two meetings with the agenda items discussed at these meetings shown in the following table:

No.	Agenda Agenda
1.	Rapat Pembahasan Persetujuan Prinsip Proyek Investasi Pengembangan Phonska VI PT Petrokimia Gresik Meeting to Discuss Approval in Principle for the Phonska VI Development Investment Project at PT Petrokimia Gresik
2.	Rapat Pembahasan Persetujuan Prinsip Proyek Investasi Pengembangan Soda Ash (CAPEX Updated) PT Pupuk Kalimantan Timur Meeting to Discuss Approval in Principle for the Soda Ash Development Investment Project (Capex Updated) at PT Pupuk Kalimantan Timur

Pelaksanaan Kegiatan Komite Investasi Pengembangan pada Tahun Buku

Sepanjang tahun 2025, Komite Investasi Pengembangan telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

Implementation of Development Investment Committee Activities in the Fiscal Year

In 2025, the Development Investment Committee implemented the following work programs:

No.	Program Program
1.	Penerbitan Persetujuan Prinsip Proyek Investasi Pengembangan Phonska VI PT Petrokimia Gresik Issuing Approval in Principle for the Phonska VI Development Investment Project of PT Petrokimia Gresik
2.	Penerbitan Persetujuan Prinsip Proyek Investasi Pengembangan Soda Ash (CAPEX *Updated*) PT Pupuk Kalimantan Timur Issuing Approval in Principle for the Soda Ash Development Investment Project (Capex Updated) of PT Pupuk Kalimantan Timur

Sekretaris Perusahaan

Dalam struktur tata kelola Perusahaan, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan eksternal. Di lingkup internal, Sekretaris Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus memastikan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas membantu Direksi, Sekretaris Perusahaan mengemban fungsi utama sebagai Pejabat Penghubung, pelaksana penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), pengelola komunikasi korporat, serta pengadministrasian dokumen kebijakan dan notulensi rapat. Melalui pelaksanaan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan publik, Sekretaris Perusahaan turut menjaga reputasi Perusahaan serta mewakili Direksi dalam kegiatan komunikasi eksternal, khususnya dengan regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Persyaratan serta mekanisme pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Corporate Secretary

Within the corporate governance structure, the Corporate Secretary serves as the liaison between the Company's interests and external stakeholders. Internally, the Corporate Secretary plays a strategic role in supporting the smooth relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, while ensuring compliance with applicable laws and regulations.

In carrying out their duties to assist the Board of Directors, the Corporate Secretary serves primarily as a Liaison Officer, implementing good corporate governance (GCG), managing corporate communications, and administering policy documents and meeting minutes. Through public relations activities, the Corporate Secretary helps maintain the Company's reputation and represents the Board of Directors in external communications, particularly with regulators, investors, and other stakeholders.

The requirements and appointment mechanism for the Corporate Secretary refer to Minister of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies.

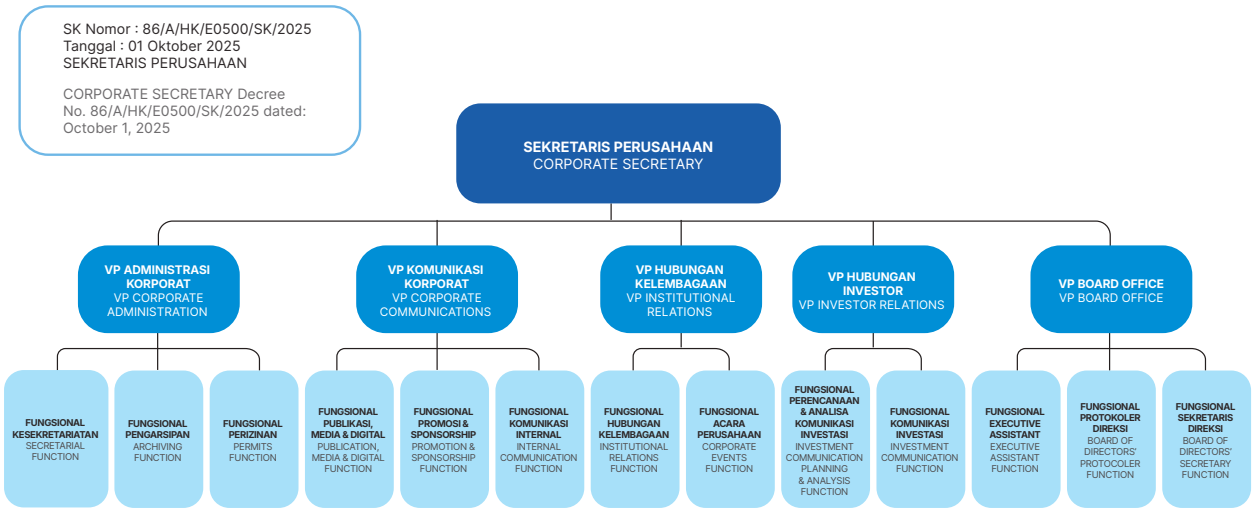
Organisasi Sekretaris Perusahaan

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 86/A/HK/E0500/SK/2025 tanggal 1 Oktober 2025. Ruang lingkup fungsi Sekretaris Perusahaan serta pola koordinasi antarorgan ditampilkan dalam struktur organisasi berikut:

Corporate Secretary Organization

The Corporate Secretary's organization structure is established based on Board of Directors Decree No. 86/A/HK/E0500/SK/2025 dated October 1, 2025. The scope of the Corporate Secretary's functions and the coordination between organs is shown in the following organizational structure:

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Organizational Structure



Sekretaris Perusahaan berada satu tingkat di bawah Direksi yang membawahi VP Administrasi Korporat, VP Komunikasi Korporat, VP Hubungan Kelembagaan, dan VP Hubungan Investor. Sekretaris Perusahaan diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan hubungan yang baik antara Perusahaan sebagai emiten dengan regulator dan lembaga-lembaga penunjang pasar modal, kalangan investor, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan pada umumnya, dan sebagai pengelola informasi yang terkait dengan lingkungan bisnis Perusahaan.

Pada tahun 2025, jumlah karyawan yang tergabung dalam kompartemen Sekretaris Perusahaan sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

The Corporate Secretary is one level below the Board of Directors, supervising the VP Corporate Administration, VP Corporate Communications, VP Institutional Relations, and VP Investor Relations. The Corporate Secretary is expected to assist the Board of Directors in maintaining good relationships between the Company as an issuer and regulators and capital market supporting institutions, investors, the wider public, and stakeholders in general, and managing information related to the Company's business.

In 2025, the Corporate Secretary department had 23 employees with details as follows:

No	Fungsi Function	Jumlah Karyawan Total Employees
1.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	1
2.	Administrasi Korporat Corporate Administration	4
3.	Komunikasi Korporat Corporate Communications	5
4.	Hubungan Kelembagaan Institutional Relations	5
5.	Hubungan Investor Investor Relations	1
6.	Board Office Board Office	7
	Jumlah Total	**23**

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi melalui mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014, Perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia atas setiap pengangkatan, pemberhentian, maupun pergantian pejabat Sekretaris Perusahaan.

Party Who Appoints and Dismisses the Corporate Secretary

The Corporate Secretary reports directly to and reports to the Board of Directors and is appointed and dismissed based on a Board of Directors Decree through the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners.

In accordance with OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014, the Company is required to submit a report to OJK and the Indonesia Stock Exchange regarding any appointment, dismissal, or replacement of the Corporate Secretary.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Perusahaan menetapkan perubahan pejabat Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 83/A/HK/E0200/SK/2025. Jabatan yang sebelumnya diemban oleh Wijaya Laksana selanjutnya dilaksanakan oleh Yehezkiel Adiperwira Tahapary.

Corporate Secretary Officers

The Company changed the Corporate Secretary based on Board of Directors Decree No. 83/A/HK/E0200/SK/2025. The position previously held by Wijaya Laksana is now filled by Yehezkiel Adiperwira Tahapary.



Yehezkiel Adiperwira Tahapary
Pjs. Sekretaris Perusahaan
Acting Corporate Secretary

Menjabat Sejak 1 Oktober 2025 - saat ini
Served from October 1, 2025 - present

Usia | Age
37 Tahun | Years

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili I Domicile
Gresik, Jawa Timur I East Java

Riwayat Pendidikan
- S2 Akuntansi STIESIA Surabaya (2022)
- S1 Akuntansi Universitas Brawijaya (2010)

Pengalaman Kerja
- VP Strategic Delivery Unit PTPI (2024 – 2025)
- VP Portofolio Bisnis, PT Petrokimia Gresik (2022 – 2024)

Dasar Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi No. 83/A/HK/E0200/SK/2025

Sertifikasi
-

Educational History
- Master's Degree in Accounting, STIESIA Surabaya (2022)
- Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Brawijaya (2010)

Work Experience
- VP Strategic Delivery Unit, PTPI (2024-2025)
- VP Business Portfolio, Petrokimia Gresik (2022-2024)

Basis of Appointment
Board of Directors' Decree No. 83/A/HK/E0200/SK/2025

Certification
-

Fungsi dan Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2025, fungsi dan tugas pokok Sekretaris Perusahaan PTPI, yaitu:

1. Memimpin, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan kebijakan dalam bidang administrasi korporat, komunikasi korporat dan hubungan kelembagaan sesuai visi, misi dan strategi di Pupuk Indonesia Group sesuai dengan RJPP dan RKAP;
2. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
3. Menyusun dan mengendalikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Jangka Panjang (RJP) di lingkup Kompartemen Sekretaris Perusahaan untuk mendukung tercapainya target Perusahaan yang ditetapkan pemegang saham;
4. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah unit kerja Sekretaris Perusahaan yang meliputi administrasi korporat, komunikasi korporat, hubungan kelembagaan, hubungan investor;
5. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan tugas-tugas dan kaitannya dengan penyiapan administrasi/dokumentasi penyelenggaraan RUPS (RKAP dan Kinerja) dan RUPS Luar Biasa *Holding* bersama SVP Hukum dan unit kerja terkait sesuai dengan Anggaran Perusahaan;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas keputusan/arahan RUPS *Holding* dan tindak lanjut atas keputusan/arahan RUPS Anak Perusahaan di bidang komunikasi korporat, administrasi korporat, hubungan kelembagaan dan hubungan investor, agar sesuai dengan keputusan/arahan RUPS;

Corporate Secretary Functions and Main Duties

In 2025, PTPI's Corporate Secretary main functions and duties included:

1. Leading, organizing, directing, and controlling policies in the areas of corporate administration, corporate communications, and institutional relations in accordance with the Pupuk Indonesia Group's vision, mission, and strategy, in accordance with the Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan (RKAP);
2. The Corporate Secretary is directly responsible to the President Director and Vice President Director;
3. Preparing and controlling the draft Corporate Work Plan and Budget, as well as the Long-Term Plan (RJP) within the Corporate Secretary's Department, to support the achievement of the Company's targets set by shareholders;
4. Coordinating and being responsible for the duties and working under the Corporate Secretary's work unit, including corporate administration, corporate communications, institutional relations, and investor relations;
5. Coordinating and managing the implementation of duties related to preparing administrative/documentation for the GMS (RKAP and Performance) and the Holding's Extraordinary GMS, together with the SVP Legal Affairs and related work units, in accordance with the Company's Articles of Association;
6. Monitoring and evaluating the decisions/directives of the Holding GMS and following-up on the decisions/directives of the Subsidiary GMS in the areas of corporate communications, corporate administration, institutional relations, and investor relations, to ensure they align with the GMS decisions/directives;

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dalam kaitannya dengan hubungan dengan *stakeholder* (Pemegang Saham, Legislatif/DPR, Eksekutif/Pemerintah), agar dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara profesional;
8. Memberikan masukan kepada Direksi atas perkembangan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta memastikan bahwa Perusahaan memenuhi ketentuan/peraturan tersebut. Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang perlu kepada para Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan peraturan tersebut;
9. Mengelola keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk pengelolaan situs web, media, dan kegiatan publikasi lainnya;
10. Merencanakan, menetapkan, dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebijakan, strategi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi baik hubungan kelembagaan maupun komunikasi korporat di PTPI dan Anak Perusahaan;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas meliputi *Annual Report*, SI-Portal BUMN dengan unit kerja terkait, agar terdapat kesesuaian dengan ketentuan perusahaan;
12. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris, dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik;
13. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di unit kerjanya berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Profil Jabatan agar diperoleh SDM berkualitas;
14. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Kepatuhan, *Whistleblowing Management System*, *Good Corporate Governance* (GCG), Total *Quality Management* (TQM) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

7. Coordinating the implementation of duties related to stakeholder relations (Shareholders, Legislative/DPR, Executive/Government), to ensure they run smoothly and are professionally coordinated;
8. Providing input to the Board of Directors on developments in applicable laws and regulations and ensuring the Company complies with these provisions/regulations. The Company will disclose necessary information to stakeholders related to these regulations;
9. Managing information disclosures to the public, including website management, media, and other publication activities;
10. Planning, establishing, coordinating, and evaluating policies, strategies, and implementation of communication activities, both institutional relations and corporate communications, at PTPI and its Subsidiaries;
11. Coordinating the implementation of duties, including the Annual Report and the BUMN SI-Portal, with relevant work units, to ensure compliance with Company regulations;
12. Being responsible for managing fixed assets, inventory, and work equipment under their responsibility, and ensuring they are properly maintained;
13. Being responsible for developing and improving the competency, abilities, and work attitudes of employees in their work unit, based on Company Regulations and Job Profiles, to ensure the development of quality HC;
14. Actively participating in the implementation of the Occupational Health and Safety (OHS) management system, Risk Management System, Anti-Bribery Management System, Compliance Management System, Whistleblowing Management System, Good Corporate Governance (GCG), Total Quality Management (TQM), and Corporate Social Responsibility (CSR) within their work unit area to achieve OHS and quality standards for continuous improvement.

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan memfasilitasi Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan pendidikan dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan. Rincian kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Competency Development Program

The Company organized the Corporate Secretary's participation in training and education programs, fully funded by the Company. Details of the training and competency development activities attended by Corporate Secretaries during 2025 are shown as follows:

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Yehezkiel Adiperwira Tahapary (Pjs.Sekretaris Perusahaan) (Acting Corporate Secretary)	Konferensi Conference	IFA Annual Conference 2025	12 – 14 Mei 2025 May 12 – 14, 2025	International Fertilizer Association (IFA)
	Pelatihan Training	Sosialisasi Simplifikasi Penyusunan DSM dan Sharing Session Keterbukaan Informasi Publik di Perusahaan Outreach on the Simplification of DSM Preparation and a Sharing Session on Public Information Disclosure in Companies	10 July 2025 July 10, 2025	PT Pupuk Indonesia (Persero)

Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang ditetapkan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Implementation of Duties in 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary carried out their duties and responsibilities in accordance with established provisions, as shown in the following table:

No.	Perihal Subject	Keterangan Description
1.	Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS yang tertib dan akuntabel. Organizing and documenting an orderly and accountable GMS.	• Menyelenggarakan RUPS RKAP, RKA Dewan Komisaris dan RKA TJSL Tahun 2025 dan RUPS Kinerja Tahun Buku 2024. • Mendokumentasikan data RUPS Tahunan dan hasil keputusan RUPS. • Holding GMS for the 2025 Board of Commissioners RKAP, RKA, and SER RKA, and a GMS for the 2024 Fiscal Year Performance. • Documenting the Annual GMS data and GMS resolutions.
2.	Dukungan Board Office yang efektif dan andal bagi Direksi. Effective and reliable Board Office support for the Board of Directors.	• Mengawal pelaksanaan agenda dan kegiatan Direksi secara terstruktur. • Memastikan kualitas dokumen dan materi Direksi (kajian, materi rapat, dan surat). • Mengkoordinasikan tindak lanjut atas arahan dan keputusan Direksi kepada unit kerja terkait. • Monitoring inisiatif strategis perusahaan dan pelaporan berkala kepada Direksi. • Mengelola anggaran Direksi secara efektif. • Supervising the structured implementation of Board of Directors agendas and activities. • Ensuring the quality of Board of Directors documents and materials (studies, minutes, and letters). • Coordinating follow-up on Board of Directors directives and decisions to relevant work units. • Facilitating the effective holding of Board of Directors meetings and Company meetings • Managing the Board of Directors' budget effectively.
3.	Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Organizing and documenting Board of Directors meetings and/or joint meetings with the Board of Commissioners.	Mengkoordinasikan Rapat Direksi serta membuat, menyimpan dan mendokumentasikan Risalah Rapat Direksi dan/atau Rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Coordinating Board of Directors Meetings and preparing, maintaining, and documenting Minutes of Board of Directors Meetings and/or Joint Meetings with the Board of Commissioners.
4.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan yang tertib dan akuntabel. Orderly and accountable administration and archiving management.	• Penyempurnaan sistem pengelolaan arsip Perusahaan sesuai UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan serta peraturan dan prosedur yang berlaku. • Melaksanakan pengelolaan arsip perusahaan yang efektif sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Melaksanakan pembinaan kearsipan perusaahan di internal maupun di lingkungan Pupuk Indonesia Group. • Melaksanakan pengawasan kearsipan perusahaan. • *Monitoring* dan pendampingan pengisian data perizinan termasuk *renewal*/ perpanjangan oleh PIC Perizinan Unit Kerja. • Optimalisasi sistem tata kelola administrasi dan kearsipan perusahaan terkait pengembangan aplikasi Digital Office (DOF) yaitu terkait OCR dan *security document* DOF. • *Enhancement*, peningkatan kualitas, dan penyesuaian pada Aplikasi Perizinan. • Implementasi sistem aplikasi terintegrasi untuk pengelolaan dokumen, perizinan, dan data strategis. Inisiatif ini mencakup penguatan keamanan dokumen, penerapan tanda tangan elektronik, serta pengembangan bank data sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. • Menyusun Dokumen Inisiatif TI dalam rangka pengembangan Aplikasi *Stakeholder Management*. • Improvement of the Company's archive management system in accordance with Law No. 43 of 2009 concerning archives and applicable regulations and procedures. • Implement effective corporate archive management in accordance with applicable laws and regulations. • Implement corporate archive development internally and within Pupuk Indonesia Group. • Implement corporate archive supervision. • Monitor and assist with licensing data entry, including renewals, by the Work Unit Licensing PIC. • Optimization of the company's administrative and archival governance system related to the development of Digital Office application, specifically related to OCR and DOF document security. • Enhancement, quality improvement, and adjustments to the Licensing Application.

No.	Perihal Subject	Keterangan Description
5.	Penyelenggaraan acara perusahaan yang profesional dan berdampak. Organizing professional and impactful corporate events.	• Optimalisasi tata kelola dengan menyusun Pedoman Acara Perusahaan. • Harmonisai *Calendar of Event* Perusahaan. • Menyelenggarakan acara Perusahaan secara terencana dan terintegrasi guna meningkatkan engagement internal dan eksternal seperti *Townhall Meeting*, Hari Besar Nasional, dan Acara sosial keagamaan. • Mendukung penyelenggaraan acara strategis yang melibatkan pemangku kepentingan utama Perusahaan. • Optimizing governance by developing Corporate Event Guidelines. • Harmonizing the Company's Event Calendar. • Organizing planned and integrated corporate events to enhance internal and external engagement, such as Town Hall Meetings, National Holiday, and socio-religious events. • Supporting strategic events involving key corporate stakeholders.
6.	Optimalisasi *Stakeholder Engagement* untuk Membangun Dukungan dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan. Optimizing Stakeholder Engagement to Build Stakeholder Support and Trust.	• Pemetaan dan segmentasi *stakeholder* berbasis pengaruh dan kepentingan untuk memastikan pendekatan *engagement* yang tepat sasaran. • Pelaksanaan komunikasi proaktif dengan pertemuan rutin dengan stakeholder utama melalui forum strategis, FGD, dan koordinasi lintas sektor guna membangun pemahaman dan alignment terkait perkembangan perusahaan, proyek baru, dan isu-isu penting lainnya. • Pengelolaan isu strategis dan advokasi kebijakan secara terstruktur untuk mendukung kepentingan Perusahaan. • Penguatan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam mendukung program strategis dan ekosistem industri. • Stakeholder mapping and segmentation based on influence and interests to ensure a targeted engagement approach. • Proactive communication through regular meetings with key stakeholders through strategic forums, focus group discussions (FGD), and cross-sector coordination to build understanding and alignment regarding Company developments, new projects, and other important issues. • Structured strategic issue management and policy advocacy to support the Company's interests. • Strengthening collaboration with stakeholders to support strategic programs and the industry ecosystem.
7.	Strategi komunikasi terkait aksi korporasi pembentukan subholding yang terarah dan efektif. Targeted and effective communication strategy related to the corporate action of establishing a subholding.	• Menyusun strategi komunikasi terintegrasi untuk mendukung pembentukan subholding dengan penguatan narasi strategis dan *key messages* transformasi. • Mengelola komunikasi melalui media, kanal digital, dan forum *stakeholder*. • Melakukan *engagement* dengan *stakeholder* kunci serta sosialisasi internal. • Mengelola isu dan opini publik secara proaktif. • Mengembangkan dan mengimplementasikan *branding subholding*. • Developing integrated communications strategies to support the formation of a subholding by strengthening the strategic narrative and key messages of the transformation. • Managing communications through media, digital channels, and stakeholder forums. • Engaging with key stakeholders and conducting internal socialization. • Proactively managing issues and public opinion. • Developing and implementing subholding branding.
8.	Strategi komunikasi terkait Reformasi Kebijakan Subsidi Pupuk. Communication strategies related to Fertilizer Subsidy Policy Reform.	• Sosialisasi melalui pemberitaan di media untuk meningkatkan pemahaman publik. • Melaksanakan kegiatan media *engagement* (media visit, konferensi pers, media *gathering*). • Mengoptimalkan publikasi konten melalui berbagai kanal komunikasi. • Memperkuat kanal digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan. • Meningkatkan *engagement* dengan masyarakat melalui komunikasi yang interaktif. • Socializing through media coverage to increase public understanding. • Implementing media engagement activities (media visits, press conferences, media gatherings). • Optimizing content publication through communication channels. • Strengthening digital channels and social media to expand their reach. • Increasing engagement with the public through interactive communication.
9.	Implementasi corporate identity yang konsisten dan efektif. Consistent and effective implementation of corporate identity.	• Implementasi *Corporate Identity* berbasis GSM secara luas dan konsisten di seluruh aktivitas komunikasi Perusahaan. • Penguatan Sosialisasi GSM melalui penerapan pada berbagai kanal promosi dan *branding* Perusahaan. • Implementing broad and consistent GSM-based Corporate Identity across all Company communication activities. • Strengthening GSM socialization through implementation across Company promotional and branding channels.
10.	Penyusunan *Annual Report* & *Sustainability Report* yang *compliant*, berkualitas, dan terintegrasi Preparing a compliant, high-quality, and integrated Annual Report and Sustainability Report	• Menyusun *Annual Report* dan *Sustainability Report* sesuai dengan ketentuan. • Menyajikan kinerja dan informasi perusahaan secara jelas dan menyeluruh kepada *stakeholder* lembaga finansial dan *bondholders*. • Preparing the Annual Report and Sustainability Report in accordance with regulations. • Presenting company performance and information clearly and comprehensively to financial institution stakeholders and bondholders
11.	Memastikan Kepatuhan Regulasi Pasar Modal Ensuring Compliance with Capital Market Regulations	Memastikan Pemenuhan Regulasi OJK, BEI, dan Ketentuan Pasar Modal lainnya. Ensuring Compliance with OJK, IDX, and Other Capital Market Regulations.

Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan

Seiring dengan diberlakukannya Omnibus Law BUMN melalui PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, pada awal tahun 2024 fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan ditetapkan sebagai unit kerja setingkat kompartemen di bawah koordinasi Direktur Manajemen Risiko. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 94/A/HK/E0500/SK/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Direksi Nomor 13/A/HK/E50/SK/2024 tentang Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko PTPI.

Struktur Oganisasi

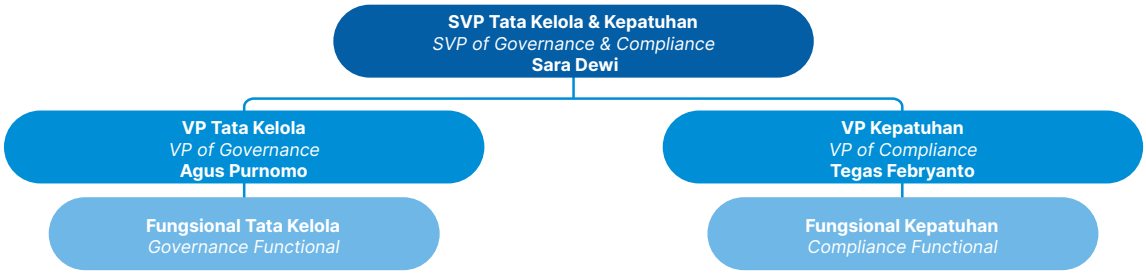
Kompartemen Tata Kelola & Kepatuhan didukung oleh sumber daya yang terdiri atas 1 (satu) orang Senior Vice President (SVP), 2 (dua) orang Vice President (VP), dan 6 (enam) orang Fungsional. Adapun struktur organisasi Kompartemen Tata Kelola & Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Governance & Compliance Function

Following the enactment of the Omnibus Law on BUMN through Regulation PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, in early 2024 the Governance and Compliance function was established as a department-level work unit under the coordination of the Director of Risk Management. This provision was stipulated in Board of Directors Decree No. 94/A/HK/E0500/SK/2024 dated August 1, 2024, concerning the First Amendment to Board of Directors Decree No. 13/A/HK/E50/SK/2024 concerning the Organizational Structure of the PTPI Risk Management Directorate.

Organization Structure

The Governance & Compliance Compartment is supported by human capital including 1 (one) Senior Vice President (SVP), 2 (two) Vice Presidents (VPs), and 6 (six) Functional Personnel. The Governance & Compliance Compartment organizational structure is as follows:



Jumlah Karyawan

Sampai dengan akhir tahun 2025, Kompartemen Tata Kelola dan Kepatuhan didukung oleh 9 orang karyawan yang berada di bawah koordinasi SVP Tata Kelola dan Kepatuhan dengan rincian sebagai berikut:

Number of Employees

At the end of 2025, the Governance and Compliance Department had 9 employees under the coordination of the SVP Governance and Compliance with details as follows:

No	Fungsi Function	Jumlah Karyawan Total Employees
1	SVP Tata Kelola dan Kepatuhan SVP of Governance and Compliance	1
2	Tata Kelola Governance	3
3	Kepatuhan Compliance	5
Total Karyawan Total of Employees		**9**

Pejabat Kompartemen Tata Kelola dan Kepatuhan

Senior Vice President (SVP) Tata Kelola dan Kepatuhan dijabat oleh Sara Dewi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 71/A/HK/E0200/SK/2025 tanggal 22 Agustus 2025.

Governance and Compliance Compartemen Officer

The SVP Governance and Compliance is Sara Dewi, based on Board of Directors Decree No. 71/A/HK/E0200/SK/2025 dated August 22, 2025.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kompartemen Tata Kelola dan Kepatuhan memiliki tugas pokok meliputi:

1. Mengoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana pekerjaan di bawah bidang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Pupuk Indonesia (Persero) pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP), Anggaran Dasar, peraturan perundangan, ketentuan pemerintah dan pemegang saham, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta Keputusan RUPS/ Menteri.
2. Mengoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas penetapan strategi dan kebijakan bidang Tata Kelola dan Kepatuhan, termasuk harmonisasi pelaksanaannya pada Anak Perusahaan dalam konglomerasi Pupuk Indonesia Group.
3. Mengoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas penyusunan pedoman, prosedur dan metode pelaksanaan fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan.
4. Mengoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pengembangan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang Organisasi di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi dalam konglomerasi Pupuk Indonesia Group.
6. Mengarahkan, mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab atas pengendalian kegiatan di bidang kepatuhan di Pupuk Indonesia Group sesuai dengan kaidah *Good Corporate Governance* (GCG).
7. Bertindak sebagai Mitra Kerja/*Counterpart* Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk membantu koordinasi dalam lintas Anak Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Realisasi kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2025, diuraikan seperti berikut ini:

1. *Training Data Protection Officer* (DPO) pada 6-7 Februari 2025.
2. Pengesahan Pedoman Pengendalian Kerahasiaan Dokumen dan Informasi Perusahaan pada 11 Februari 2025.
3. Pengesahan Pengelolaan Pedoman Benturan Kepentingan Revisi 2 pada 25 April 2025.
4. Sosialisasi Pelaksanaan GCG *Assessment* Pupuk Indonesia Group Tahun Buku 2024 pada 02 Mei 2025.
5. Paparan Revisi Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan kepada Pupuk Indonesia Group pada 02 Mei 2025.
6. Pengesahan Pedoman Pengelolaan dan Penerapan Sistem Manajemen pada 13 Mei 2025.
7. *Benchmarking* terkait *Licensor Selection* dan Penentuan KPS dalam Pengelolaan Proyek di Kilang Pertamina Internasional pada 20 Mei 2025.
8. *Benchmarking* Implementasi Fungsi Kepatuhan di PT Perkebunan Nusantara III pada 21 Mei 2025.
9. Sosialisasi *Scorecard* 160 Parameter GCG *Assessment* kepada seluruh PIC Aspek Penilaian GCG pada 05 Juni 2025.
10. *Benchmarking* Pengelolaan *Compliance* dengan Bank Mandiri pada 11 Juni 2025.
11. Sosialisasi *Do's & Don'ts* internalisasi Pedoman Etika & Perilaku (*Code of Conduct*) melalui aplikasi PI-SMART pada 22 Juli 2025.

Main Duties and Functions

The Governance and Compliance Compartment's main duties include:

1. Coordinating, supervising, and being responsible for the preparation of work plans within the Governance and Compliance division of PT Pupuk Indonesia (Persero) in accordance with the Company Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJP), the Articles of Association, laws and regulations, government and shareholder requirements, the principles of Good Corporate Governance (GCG), and decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) or the Minister.
2. Coordinating, supervising, and being responsible for establishing strategies and policies in the areas of Governance and Compliance, including ensuring their consistent implementation across subsidiaries within the Pupuk Indonesia Group conglomerate.
3. Coordinating, supervising, and being responsible for developing guidelines, procedures, and methods for carrying out the Governance and Compliance functions.
4. Coordinating, supervising, and being responsible for the development of a culture of compliance at all levels of the organization within PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries.
5. Coordinating the implementation of good corporate governance principles in an integrated manner across the Pupuk Indonesia Group conglomerate.
6. Directing, coordinating, supervise, and being responsible for the control of compliance activities within the Pupuk Indonesia Group in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).
7. Acting as a Working Partner/Counterpart of the Integrated Governance Committee to assist with coordination across Subsidiaries.

Implementation of Duties in 2025

The activities carried out in 2025 were as follows:

1. Data Protection Officer (DPO) Training on February 6-7, 2025.
2. Ratifying the Guidelines for Controlling the Confidentiality of Company Documents and Information on February 11, 2025.
3. Ratifying the Conflict of Interest Management Guidelines, Revision 2 on April 25, 2025.
4. Socializing the Implementation of the Pupuk Indonesia Group GCG Assessment for the 2024 Fiscal Year on May 2, 2025.
5. Presenting the Revised Conflict of Interest Management Guidelines to the Pupuk Indonesia Group on May 2, 2025.
6. Ratifying the Management System Management and Implementation Guidelines on May 13, 2025.
7. Benchmarking Licensor Selection and PPP Determination in Project Management at the Pertamina Internasional Refinery on May 20, 2025.
8. Benchmarking Compliance Function Implementation at PT Perkebunan Nusantara III on May 21, 2025.
9. Socializing the 160-Parameter GCG Assessment Scorecard to all PICs for GCG Assessment Aspects on June 5, 2025.
10. Benchmarking Compliance Management with Bank Mandiri on June 11, 2025.
11. Socializing the Do's & Don'ts for the internalization of the Code of Conduct through the PI-SMART application on July 22, 2025.

12. Koordinasi Kerja Sama KPK dengan PTPI terkait Dunia Usaha Anti Korupsi Keluarga Berintegritas (Bidang Satgas III) pada 24 Juli 2025.
13. Pelaksanaan Program CGPI "Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan Dalam Kerangka GCG" pada 31 Juli-25 November 2025.
14. *Benchmarking* Pengelolaan GCG dan Compliance dengan PT Semen Indonesia Tbk (SIG) pada 20 Agustus 2025.
15. Keikutsertaan dalam GRC Summit yang diselenggarakan oleh CRMS pada 21-22 Agustus 2025.
16. *Kick off* GCG *Assessment* Pupuk Indonesia Group dengan BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Wilayah Entitas Anak beserta seluruh *stakeholders* terkait, *Entry Meeting* GCG PTPI dan *Exit Meeting* GCG PTPI pada 25 Agustus-24 Desember 2025.
17. Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016 pada 25-26 Agustus 2025.
18. *Benchmarking* Pengelolaan GCG dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 10 September 2025.
19. *Benchmarking* Pengelolaan GCG dengan PT IDSurvey pada 11 September 2025.
20. *Benchmarking* Pengelolaan ESG di PT Pertamina (Persero) pada 17 September 2025.
21. Seminar Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 17 September 2025.
22. Pengesahan Pedoman Pengelolaan Tata Kelola & Kepatuhan pada 03 Oktober 2025.
23. Bimbingan Teknis Perempuan Anti Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dengan tema: Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-Nilai Integritas Melawan Korupsi pada 03 Oktober 2025.
24. *Benchmarking* ke PT Telekomunikasi Indonesia pada 28 November 2025.
25. Integrity-Expo Hakordia 2025 pada 6-9 Desember 2025.
26. *Workshop Anti-Fraud* "Satukan Aksi Basmi Korupsi: Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia" pada 10 Desember 2025.
27. Forum Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan "*Good Governance & Compliance* sebagai Pilar Pencegahan *Fraud* & Korupsi" pada 19 Desember 2025.
28. Pengesahan Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*) yang merupakan panduan tata kelola Perusahaan dengan Anak Perusahaan pada 24 Desember 2025.

Audit Internal

Audit Internal berfungsi sebagai organ pendukung Direksi yang memiliki peran strategis dalam sistem pengendalian intern. Secara umum, Audit Internal bertujuan mendukung manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan melalui evaluasi atas kecukupan serta efektivitas penerapan pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Di lingkungan Perusahaan, fungsi Audit Internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI bertugas membantu Direksi dalam penyelenggaraan audit internal untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

12. Coordinating Cooperation between the Corruption Eradication Commission (KPK) and PTPI regarding the Anti-Corruption Business World of Families with Integrity (Task Force III Sector) on July 24, 2025.
13. Implementing the CGPI Program "Building Dynamic Company Capabilities Within a GCG Framework" from July 31 to November 25, 2025.
14. Benchmarking GCG Management and Compliance with PT Semen Indonesia Tbk (SIG) on August 20, 2025.
15. Participating in the GRC Summit organized by CRMS on August 21-22, 2025.
16. Kick-off of the Pupuk Indonesia Group GCG Assessment with the BPKP Head Office, BPKP Regional Representatives of Subsidiaries, and all relevant stakeholders, PTPI GCG Entry Meeting and PTPI GCG Exit Meeting on August 25-December 24, 2025.
17. Surveillance Audit of the Anti-Bribery Management System 37001:2016 on August 25-26, 2025.
18. Benchmarking GCG Management with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk on September 10, 2025.
19. Benchmarking GCG Management with PT IDSurvey on September 11, 2025.
20. Benchmarking ESG Management at PT Pertamina (Persero) on September 17, 2025.
21. Seminar on Implementing Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on September 17, 2025.
22. Ratifying the Governance & Compliance Management Guidelines on October 3, 2025.
23. Technical Guidance for Women Against Corruption with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK), with the theme: "The Role of Women in Building Integrity Values Against Corruption," on October 3, 2025.
24. Benchmarking with PT Telekomunikasi Indonesia on November 28, 2025.
25. Integrity-Expo Hakordia 2025 on December 6-9, 2025.
26. Anti-Fraud Workshop "Uniting Action to Eradicate Corruption: Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia" on December 10, 2025.
27. Governance and Compliance Strengthening Forum "Good Governance & Compliance as Pillars of Fraud & Corruption Prevention" on December 19, 2025.
28. Ratifying the Updated Code of Group Governance, which serves as a guide for corporate governance with Subsidiaries, on December 24, 2025.

Internal Audit

Internal Audit is a supporting body to the Board of Directors, and plays a strategic role in the internal control system. In general, Internal Audit aim is to support management in achieving the Company's goals and objectives by evaluating the adequacy and effectiveness of internal control implementation, risk management, and corporate governance.

In the Company, the Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Unit (IAU), which is tasked with assisting the Board of Directors by conducting internal audits to assess the effectiveness of internal control systems, risk management, and corporate governance processes, and also providing recommendations for necessary improvements.

SPI merupakan unit kerja Perusahaan yang menjalankan kegiatan *assurance* dan konsultansi (*advisory services*). Unit ini dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern dan dalam pelaksanaan tugas pengawasan menjalankan fungsi independen dengan memberikan keyakinan objektif serta layanan konsultansi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasional Perusahaan.

Proses pengawasan dan audit yang dilakukan SPI diarahkan untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuan melalui penerapan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin guna mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, dan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.

Keberadaan SPI juga mencerminkan komitmen kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) termasuk fungsi pengawasan internal melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Kebijakan Audit Internal Pupuk Indonesia Group

Untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pupuk Indonesia Group, Direksi menetapkan kebijakan pengawasan intern sesuai SK Direksi No. SK/DIR/043/2015 tanggal 21 September 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pelaksanaan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat oleh SPI;
2. Penguatan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui:
    a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (*sustainable*);
    b. Pelaksanaan audit keuangan, audit operasional, dan audit khusus yang fokus pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi (*risk based audit*);
    c. Pemberian konsultansi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, tata kelola, dan manajemen risiko;
    d. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya SPI.
3. Program pengawasan intern dibuat oleh Kepala SPI dan ditetapkan oleh Direktur Utama;
4. SPI PTPI dapat melakukan audit kepada Entitas Anak atas penerapan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang bernilai strategis;
5. SPI PTPI berkoordinasi dengan SPI Entitas Anak dalam menetapkan program dan kegiatan pengawasan;
6. Kepala SPI menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan intern setiap Triwulan kepada Direktur Utama;
7. SPI Entitas Anak menyusun kebijakan pengawasan intern di masing-masing perusahaan dengan mengacu kepada Kebijakan pengawasan intern PTPI.

IAU is a Company work unit that carries out assurance and advisory activities, and is led by the Chief Audit Executive and, in carrying out its supervisory duties, performs an independent function by providing objective assurance and consulting services designed to add value and improve the Company's operational performance.

The IAU's supervisory and audit processes are aimed at assisting the Company in achieving its objectives through a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, the adequacy of controls, and the implementation of good corporate governance.

Having an IUA also reflects the Company's commitment to complying with applicable laws and regulations, including Law No. 1 of 2025 concerning SOEs, Government Regulation No. 12 of 1998 concerning Limited Liability Companies (Persero), and of the Minister of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, which emphasizes the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) principles, including the internal audit function through the IAU.

Pupuk Indonesia Group Internal Audit Policy

To establish a robust internal control system in the Pupuk Indonesia Group, the Board of Directors established an internal audit policy in accordance with Board of Directors Decree No. SK/DIR/043/2015 dated September 21, 2015, with the following key points:

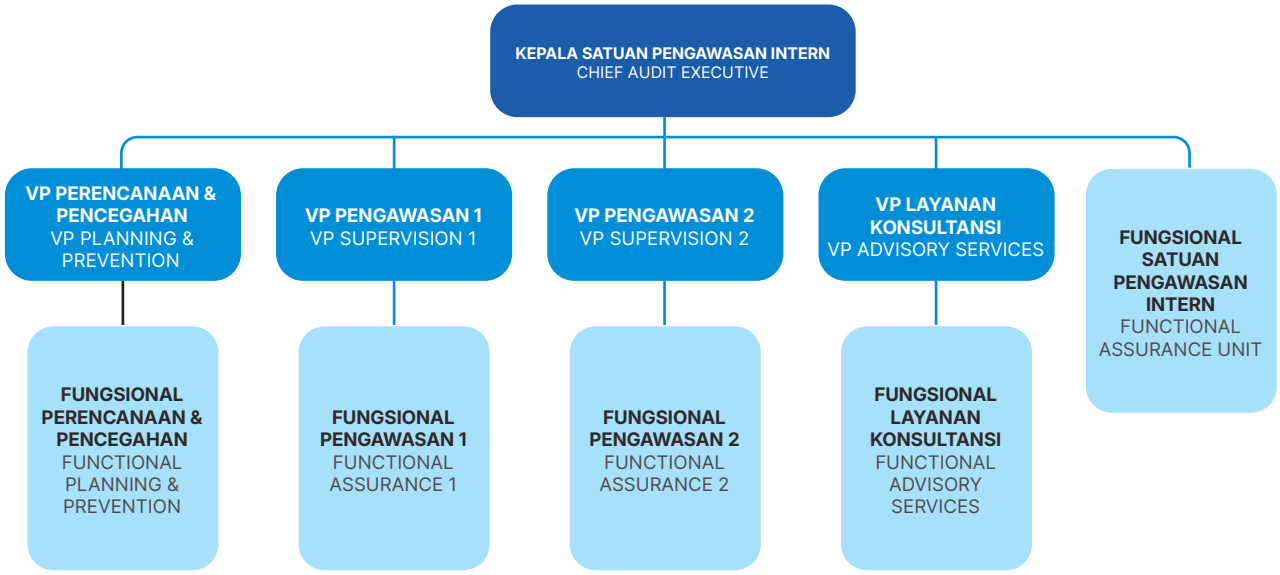
1. Implementation to establish a robust internal control system by the Internal Audit Unit;
2. Strengthening the internal control system is implemented through:
    a. Developing and strengthening sustainable internal control functions;
    b. Conducting financial audits, operational audits and special audits focused on activities with a high risk (risk based audit);
    c. Providing consultation to improve and increase the effectiveness of operations, governance and risk management;
    d. Increasingcapabilities and capacity of IAU resources.
3. The internal audit program was developed by the Head of the Internal Audit Unit and determined by the President Director;
4. The PTPI Internal Audit Unit may conduct audits of Subsidiaries regarding the implementation of policies issued by the Company and strategic activities;
5. The PTPI Internal Audit Unit coordinates with the Subsidiary Internal Audit Units in determining the internal audit program and activities;
6. The Head of the Internal Audit Unit submits a quarterly report on the internal audits to the President Director;
7. The Subsidiary's IAU develops internal audit policies for each company, referring to PTPI's internal audit policy.

Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 86/A/HK/E500/SK/2025 Tanggal 1 Oktober 2025 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) mencabut Surat Keputusan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala SPI didukung oleh 19 (sembilan belas) orang Auditor yang terbagi dalam beberapa departemen sebagai berikut:

Organizational Structure

Based on the terms stipulated in Board of Directors' Decree No. 86/A/HK/E500/SK/2025 dated October 1, 2025, concerning the Organizational Structure of Main Directorate of PT Pupuk Indonesia (Persero), the Head of Internal Audit Unit is supported by 19 (nineteen) auditors divided into several departments as follows:



Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

Perusahaan mengembangkan Sistem Pengendalian Intern agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengamankan investasi dan aset Perusahaan serta menjaga pencapaian kinerja yang baik. Selain itu, pengendalian internal dibangun guna meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Entitas Anak, guna memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

SPI Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. 86/A/HK/E0500/SK/2025 . Keberadaan dan tugas SPI BUMN mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bab VI Bagian Pertama Satuan Pengawasan Intern serta Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern PTPI dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. Kepala SPI dalam organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
3. Kepala SPI secara struktural bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Personel SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

Position of the Internal Audit Unit

The Company developed an Internal Control System to effectively safeguard its investments and assets and maintain strong performance. In addition, internal controls are developed to improve the integrated control system between the Company and its subsidiaries, ensuring operational activities are carried out effectively and increase added value for the Company through effective risk management and Good Corporate Governance principles.

The Company's Internal Audit Unit (SPI) was established based on a Board of Directors Decree, updated by Board of Directors Decree No. 86/A/HK/E0500/SK/2025. The existence and duties of the SOE SPI refer to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs), Chapter VI, Part One, on Internal Audit Units, and the Regulation of the Minister of SOEs.

The Internal Audit Unit (IAU) of PTPI and its Subsidiaries is structured as follows:

1. The IAU is led by the Head of the IAU, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
2. The Head of the IAU is under and reports directly to the President Director.
3. The Head of the IAU is structurally responsible to the President Director and functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
4. AU personnel are directly responsible to the Chief Audit Executive.

Hubungan kerja SPI secara internal dan eksternal dijabarkan sebagai berikut:

a. Hubungan Internal
   i) Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
   ii) Kepala SPI membawahi 4 (empat) Departemen, yaitu:
   - Perencanaan & Pencegahan;
   - Pengawasan 1;
   - Pengawasan 2;
   - Layanan Konsultansi.
   - Tanggung jawab pelaksanaan masing-masing Departemen didelegasikan kepada Vice President (VP) terkait.

b. Hubungan Eksternal
   i) Hubungan dengan auditor eksternal;
   ii) Hubungan dengan Komite Audit;
   iii) Hubungan dengan pihak luar lainnya, antara lain dengan Satuan Pengawasan Intern Entitas Anak dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit bersama.

IAU 's internal and external working relationships are outlined as follows:

a. Internal Relations
   i) The Head of Internal Affairs is directly responsible to the President Director;
   ii) The Head of Internal Affairs oversees 4 (four) departments:
   - Planning & Prevention;
   - Assurance 1;
   - Assurance 2;
   - Advisory Services.
   - Responsibility for the implementation of each department is delegated to the relevant Vice President (VP).

b. External Relations
   i) Relationship with external auditors;
   ii) Relationship with the Audit Committee;
   iii) Relationships with other external parties, including the Internal Audit Units of Subsidiaries in the form of coordinating joint audit implementation.

Pada tahun 2025, jumlah karyawan yang tergabung dalam Kompartemen Satuan Pengawasan Intern sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut:

In 2025, the number of employees who were members of the Internal Audit Unit Compartment were 18 people with the following details:

No.	Fungsi Function	Jumlah Karyawan Number of Employees
1	Kepala Satuan Pengawas Intern (KA SPI) Chief Audit Executive	1
2	Perencanaan & Pencegahan Planning & Prevention	5
3	Pengawasan 1 Assurance 1	6
4	Pengawasan 2 Assurance 2	4
5	Layanan Konsultansi Advisory Services	2
Jumlah Karyawan Number of Employees		**18**

Pihak Berwenang dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut telah selaras dengan Peraturan BUMN PER-02/MBU/03/2023 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Party Appointing and Dismissing the Chief Audit Executive

The appointment and dismissal of the Chief Audit Executive is carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, in line with BUMN Regulation PER-02/MBU/03/2023 concerning Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

Kualifikasi

Standar kualifikasi audit internal di lingkungan Perusahaan, terutama:

1. Mampu menjelaskan standar audit internal sesuai dengan *best practice* dan standar yang berlaku antara lain tugas, wewenang, dan kode etik;
2. Mampu menjelaskan definisi, jenis penugasan *assurance* dan tujuan serta mekanisme kegiatan *assurance* yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring tindak lanjut;
3. Mampu menjelaskan konsep *Risk Based Audit* dan *Three Lines Model*;

Qualifications

Internal audit qualification standards within the Company, specifically:

1. Ability to explain internal audit standards in accordance with best practices and applicable standards, including duties, authorities, and codes of ethics;
2. Ability to explain the definition, types of assurance assignments, objectives, and mechanisms of assurance activities, including planning, implementation, reporting, and follow-up monitoring;
3. Ability to explain the concept of Risk-Based Audit and The IIA's Three Lines Model;

4. Mampu menjelaskan konsep *Governance, Risk,* dan *Control* (GRC) sesuai dengan standar yang berlaku.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Jabatan Kepala SPI diemban oleh Maslani sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 82/A/HK/E0200/SK/2025 tanggal 1 Oktober 2025.

4. Ability to explain the concept of Governance, Risk, and Control (GRC) in accordance with applicable standards.

Chief Audit Executive Profile

The Chief Audit Executive is Maslani, as stipulated in Board of Directors Decree No. 82/A/HK/E0200/SK/2025 dated October 1, 2025.



Maslani
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Chief Audit Executive

Menjabat Sejak 1 Oktober 2025
Served from October 1, 2025

Usia I Age
49 tahun per 31 Desember 2025
49 years old as of December 31, 2025

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia

Domisili I Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- S3 Manajemen dan Bisnis, Sekolah Bisnis IPB (2023)
- S2 Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (2008)
- D-IV/S1 STAN (2000)

Pengalaman Kerja
- SVP Kinerja Korporat (2023 - 2025)
- SPM Reformasi Subsidi Pupuk (2021 – 2023)

Dasar Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi No. 82/A/HK/E0200/SK/2025 tanggal 1 Oktober 2025

Sertifikasi
- Brevet Pajak B
- Brevet Pajak A
- Register Akuntan Negara
- Qualified Risk Management Professional (QRMP)
- Chartered Accountant
- Certified Management Accountant
- Qualified Internal Auditor
- Certified Chief Internal Auditor (CCIA)

Educational History
- Doctorate in Management and Business, Sekolah Bisnis IPB (2023)
- Master's Degree in Development Economics, Universitas Gadjah Mada (2008)
- Diploma IV/S1 STAN (2000)

Work Experience
- SVP Corporate Performance (2023 - 2025)
- SPM Fertilizer Subsidy Reform Standards (2021 – 2023)

Basis of Appointment
Board of Directors' Decree No. 82/A/HK/E0200/SK/2025 dated October 1, 2025

Certification
- Tax Brevet B
- Tax Brevet A
- State Accountant Register
- Qualified Risk Management Professional (QRMP)
- Chartered Accountant
- Certified Management Accountant
- Qualified Internal Auditor
- Certified Chief Internal Auditor (CCIA)

Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Intern

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas auditor internal agar mampu berperan optimal dalam pengelolaan risiko di Perusahaan, Perusahaan menyediakan program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara terstruktur. Program tersebut diwujudkan melalui fasilitasi keikutsertaan auditor internal dalam berbagai skema sertifikasi profesional. Adapun daftar sertifikasi kompetensi personel SPI di Pupuk Indonesia Group adalah sebagai berikut:

Internal Audit Unit Professional Certification

To enhance the capabilities of internal auditors to optimally manage risks in the Company, the Company provides a structured competency development program. This program facilitates internal auditor participation in professional certification schemes. The list of competency certifications for IAU PI personnel is as follows:

No.	Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	Jumlah Number
1	QIA	7
2	CA/Ak.	2
3	CFE	1
4	CFrA	1
5	CISA	2
6	Sertifikasi Lainnya Other Certification	29

Pedoman Kerja: Piagam Satuan Pengawasan Intern

Pelaksanaan fungsi Audit Internal di lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh SPI dengan mengacu pada standar pelaksanaan Audit Internal yang berlaku serta kode etik Audit Internal. Piagam SPI terakhir kali direvisi dan disahkan pada 3 Januari 2024, dengan pengesahan dilakukan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan.

Piagam SPI mencakup visi, misi, fungsi, struktur, dan kedudukan Unit Satuan Pengawasan Intern, kualifikasi, ruang lingkup kerja operasional, wewenang, tugas dan tanggung jawab, standar profesional, persyaratan auditor internal, hubungan dengan auditor eksternal dan Komite Audit, kode etik, independensi dan objektivitas Auditor Intern, serta ketentuan mengenai larangan perangkapan tugas bagi personel SPI. Piagam SPI tersebut menjadi landasan bagi auditor pada Satuan Pengawasan Intern Perusahaan sekaligus acuan bagi Satuan Pengawasan Intern Anak Perusahaan. Dengan penerapan Piagam Audit Internal secara konsisten, diharapkan auditor dapat lebih mudah memahami tingkat perlindungan kepentingan serta komitmen seluruh pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Selain Piagam SPI, auditor internal Perusahaan juga didukung oleh seperangkat pedoman kerja, mekanisme kerja, dan sistem supervisi dalam organisasi, yang antara lain diatur dalam:

Kode Etik, Pedoman, Prosedur, dan Kebijakan SPI

1. Kode Etik SPI PTPI;
2. Kebijakan Pengawasan Intern PTPI;
   a. Pedoman:
      i) Pedoman Audit Intern Terintegrasi;
      ii) Pedoman Penunjukan Audit Eksternal;
      iii) Pedoman Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi;
      iv) Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.
   b. Prosedur:
      i) Prosedur Audit Internal;
      ii) Prosedur Pemantauan Status Tindak Lanjut;
      iii) Prosedur Audit Khusus;
      iv) Prosedur Penyusunan PKPT;
      v) Prosedur Kearsipan SPI;
      vi) Prosedur Audit Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan;
      vii) Prosedur Evaluasi SPIP;
      viii) Prosedur Penilaian Mandiri (*Control Self-Assessment*);
      ix) Prosedur Pengadaan Bersama Jasa KAP.
   c. Buku Ketentuan Lanjutan:
      i) Buku Ketentuan Lanjutan Audit Operasional;
      ii) Buku Ketentuan Audit Internal Berbasis Risiko;
      iii) Buku Ketentuan Lanjutan Pendampingan Audit Eksternal (*Counterpart*);
      iv) Buku Ketentuan Lanjutan Penyusunan Laporan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
      v) Buku Ketentuan Lanjutan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan;
      vi) Buku Ketentuan Lanjutan Tata Kelola TI.

Work Guidelines: Internal Audit Charter

The Internal Audit function within the Company is carried out by the Internal Audit Unit (IAU) in accordance with applicable Internal Audit standards and the Internal Audit Code of Ethics. The IAU Charter was last revised and ratified on January 3, 2024, with ratification by the Company's President Commissioner and President Director.

The IAU Charter covers the vision, mission, functions, structure, and position of the Internal Audit Unit, qualifications, operational scope of work, authorities, duties and responsibilities, professional standards, internal auditor requirements, relationships with external auditors and the Audit Committee, code of ethics, independence and objectivity of Internal Auditors, and provisions concerning the prohibition of concurrent duties for IAU personnel. The IAU Charter serves as a foundation for auditors in the Company's Internal Audit Unit and is a reference for the Internal Audit Units of Subsidiaries. Through consistent implementation of the Internal Audit Charter, it is hoped that auditors will more easily understand the level of protection of the interests and commitment of all parties involved in the Company.

In addition to the Internal Audit Charter, the Company's internal auditors are also supported by a set of work guidelines, work mechanisms, and supervisory systems in the organization, which are regulated in:

SPI Code of Ethics, Guidelines, Procedures, and Policies

1. PTPI ISU Code of Ethics;
2. PTPI ISU Policy;
   a. Guidelines:
      i) Integrated Internal Audit Guidelines;
      ii) External Audit Appointment Guidelines;
      iii) Information Technology Governance Evaluation Guidelines;
      iv) Company Internal Control System Guidelines.
   b. Procedures:
      i) Internal Audit Procedures;
      ii) Follow-up Status Monitoring Procedures;
      iii) Special Audit Procedures;
      iv) PKPT Preparation Procedures;
      v) IAU Archiving Procedures;
      vi) Internal Control Audit Procedures for Financial Reporting;
      vii) SPIP Evaluation Procedures;
      viii) Control Self-Assessment Procedures;
      ix) Joint Procurement Procedures with Public Accounting Firms.
   c. Advanced Terms Book:
      i) Advanced Conditions for Operational Audit Book;
      ii) Risk-Based Internal Audit Provisions Book;
      iii) Advanced Provisions Book for External Audit Assistance (Counterpart);
      iv) Advanced Provisions Book for Preparing Internal Audit Unit (IAU) Reports;
      v) Advanced Provisions Book for the Company's Internal Control System;
      vi) Advanced Provisions Book for IT Governance.

d. Kebijakan Internal:
   i) Syarat Kompetensi per Penugasan;
   ii) Mekanisme *Review* Berjenjang;
   iii) Jabatan Fungsional;
   iv) Jenjang Karier SPI;
   v) Audit Berbasis Komputer;
   vi) Fungsi Konsultansi;
   vii) Komunikasi Komite Audit;
   viii) Pelaporan Informasi Biaya.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra tepercaya dan profesional dalam mendukung pencapaian kinerja unggul Perusahaan.

Misi

1. Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pelaksanaan *assurance* dan konsultansi yang berbasis risiko, objektif, dan independen.
2. Meningkatkan harmonisasi dan sinergi fungsi internal audit antara Perusahaan dan Anak Perusahaan serta Eksternal Audit.
3. Meningkatkan kompetensi personel secara berkelanjutan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Persyaratan Keahlian dan Kecermatan Profesional

SPI merupakan unit kerja yang memiliki fungsi khusus, sehingga perlu adanya standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya seperti kompetensi dalam bidang audit, manajemen risiko, administrasi, akuntansi & keuangan, dan manajemen Perusahaan.

Untuk menghasilkan personel SPI yang kompeten dan menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Pupuk Indonesia Group, maka auditor SPI PTPI harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas yang dijalankan;
4. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, secara efektif;
5. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan manajemen risiko;
6. Menjaga kerahasiaan data/informasi perusahaan, terkecuali apabila informasi tersebut harus diungkapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesinya secara terus-menerus;
8. Kepala SPI, VP, dan Ketua Tim Audit memiliki sertifikasi audit internal.

d. Internal Policy
   i) Competency Requirements per Assignment;
   ii) Tiered Review Mechanism;
   iii) Functional Position;
   iv) SPI Career Path;
   v) Computer Based Audit;
   vi) Advisory Function;
   vii) Audit Committee Communication;
   viii) Cost Information Reporting.

Vision and Mission

Vision

Become a trusted and professional partner in supporting the Company's achievement of superior performance.

Mission

1. Provide added value to the Company through the implementation of risk-based, objective and independent assurance and advisory.
2. Increasing harmonization and synergy of the internal audit function between the Company and its Subsidiaries as well as External Audit.
3. Continuously improve personnel competency and optimize the use of information technology.

Professional Expertise and Due Diligence Requirements

IAU is a specialized work unit, requiring it to meet certain competency standards, including competency in auditing, risk management, administration, accounting & finance, and corporate management.

To produce competent IAU personnel and support the successful implementation of supervisory functions in the Pupuk Indonesia Group, PTPI's SPI auditors must meet the following qualifications:

1. Have integrity and professional, independent, honest and objective behavior in carrying out their duties;
2. Have knowledge and experience of audit techniques and scientific disciplines relevant to their field of work;
3. Have knowledge of laws and regulations relevant to the tasks being carried out;
4. Have the skills to interact and communicate both verbally and in writing effectively;
5. Understand the principles of good corporate governance, internal control and risk management;
6. Maintain the confidentiality of company data/ information unless the information must be disclosed based on applicable regulations;
7. Willing to continuously improve their knowledge, skills and professional abilities;
8. Chief Audit Executive, VP, and Audit Team Leader have internal audit certification.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun berdasarkan *Risk That Matter* (RTM) konsolidasi, *risk register*, hasil audit eksternal/internal, Arahan Direksi dan Dewan Komisaris *c.q.* Komite Audit, usulan unit kerja, serta pertimbangan lainnya yang diperlukan;
2. Melakukan kegiatan *assurance* yang meliputi audit kepatuhan, audit keuangan, dan audit operasional serta evaluasi atas keekonomisan, efektivitas, dan efisiensi kegiatan di seluruh unit kerja Perusahaan serta Anak Perusahaan dan afiliasi yang bernilai strategis berdasarkan standar yang berlaku dengan praktik terbaik;
3. Melakukan kegiatan konsultansi (*advisory services*) kepada seluruh unit kerja Perusahaan, baik diminta atau tidak diminta, untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan meningkatkan kinerja Perusahaan tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Oleh karenanya, jasa advis merupakan kegiatan fasilitasi, bukan penjaminan, yang meliputi pemberian pendampingan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling, dan pemberian nasihat;
4. Melakukan evaluasi dan memberikan opini atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola Teknologi Informasi;
5. Melakukan koordinasi dengan audit eksternal atau pengawasan fungsional lainnya seperti KAP, BPK-RI, BPKP, dan auditor/asesor eksternal lainnya, serta mengoordinasikan penyediaan data dan informasi Perusahaan untuk kebutuhan tersebut;
6. Melakukan evaluasi pengembangan sumber daya dan standardisasi infrastruktur SPI di lingkungan Pupuk Indonesia Group;
7. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan audit eksternal serta keputusan dan arahan RUPS Perusahaan oleh Pemegang Saham (KBUMN);
8. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direksi yang relevan;
9. Melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris *c.q.* Komite Audit;
10. Sebagai mitra kerja Komite Audit, auditor eksternal, asesor eksternal, dan SPI Anak Perusahaan;
11. Melaksanakan penugasan *ad hoc* sesuai permintaan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
12. Melaksanakan audit khusus berdasarkan pengembangan hasil audit dan permintaan Direksi.

Sedangkan wewenang SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh data, dokumen, informasi, dan sumber daya dari Perusahaan serta Anak Perusahaan dan Perusahaan afiliasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, dan pendekatan audit sesuai dengan profesi dan standar audit intern;
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan seluruh proses bisnis dan unit kerja Perusahaan, Anak Perusahaan, dan afiliasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Duties, Responsibilities, and Authorities

The description of the IAU duties and responsibilities as stipulated in the Internal Audit Charter are as follows:

1. Preparing and implementing the Annual Supervision Work Program (PKPT). PKPT is prepared based on consolidated Risk That Matter (RTM), risk register, external/internal audit results, Directions from the Board of Directors and Board of Commissioners c.q. Audit Committee, work unit proposals, and other necessary considerations;
2. Carrying out assurance activities including compliance audits, financial audits and operational audits as well as evaluation of the economics, effectiveness and efficiency of activities in all work units of the Company as well as Subsidiaries and affiliates with strategic value based on applicable standards and best practices;
3. Carrying out advisory activities (advisory services) for all Company work units, whether requested or not, to provide added value to the Company and improve Company performance without replacing management responsibilities. Therefore, advice services are facilitation activities, not guarantees, which include providing assistance, reviewing system development, selfassessment of control and performance, counseling and providing advice;
4. Evaluating and providing opinions on the implementation of the Internal Control System, Risk Management and Information Technology Governance;
5. Coordinating with external audits or other functional supervision such as KAP, BPK-RI, BPKP, and other external auditors/assessors, as well as coordinating the provision of Company data and information for these needs;
6. Evaluating resource development and standardization of IAU infrastructure in the Pupuk Indonesia Group;
7. Monitoring the implementation of follow-up actions to the results of internal audits and external audits as well as decisions and directives of the Company's GMS by the Shareholders (KBUMN);
8. Reporting the results of supervision to the President Director and relevant Directors;
9. Reporting the results of supervision to the Board of Commissioners c.q. Audit Committee;
10. Acting as a working partner of the Audit Committee, external auditors, external assessors and Subsidiaries IAU;
11. Carrying out ad hoc assignments as requested by the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
12. Carrying out special audits based on the development of audit results and requests from the Board of Directors.

While, IAU's authority as determined based on the Internal Audit Charter is as follows:

1. Having unlimited access to all data, documents, information and resources from the Company as well as its Subsidiaries and affiliated Companies to carry out its duties and authority;
2. Determining the scope, methods, methods, techniques, strategies and audit approaches in accordance with the profession and internal audit standards;
3. Supervising the activities of all business processes and work units of the Company, Subsidiaries and affiliates in accordance with applicable rules and regulations;

4. Memberikan pendapat, rekomendasi, dan saran-saran perbaikan kepada Direksi, SVP, dan para pejabat Kompartemen, Departemen, dan Tim *Ad hoc* Perusahaan serta Anak Perusahaan, baik diminta atau tidak diminta, dalam hal mengamankan harta dan kekayaan korporat;
5. Dapat meminta surat representasi kepada *auditee* atas keabsahan dan kelengkapan dokumen dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan penugasan pengawasan;
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
7. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta Unit Kerja Perusahaan;
8. Dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Unit Kerja di lingkungan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terintegrasi yang dijalankan melalui koordinasi dengan masing-masing SPI Anak Perusahaan yang terkait;
9. Dapat meminta bekerja sama dan melakukan koordinasi pengawasan dengan SPI Anak Perusahaan dan afiliasi;
10. Melakukan koordinasi dengan auditor/asesor eksternal;
11. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
12. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara;
13. Dapat melakukan kegiatan digital forensik di Perusahaan serta Anak Perusahaan dan afiliasi sesuai dengan *governance* yang berlaku.

Independensi

Sebagai pemeriksaan internal, SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kebebasan bertindak (independen) secara objektif.

1. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam Perusahaan seperti manajemen dan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum;
3. Dalam pelaksanaan tugas audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun unit kerja yang diperiksa, dengan tetap menjunjung teguh kode etik yang telah ditetapkan.

Rapat Satuan Pengawasan Intern

Kebijakan Rapat

1. SPI PTPI secara bulanan melaksanakan rapat monitoring kinerja SPI dengan Komite Audit dengan pembahasan antara lain progres pelaksanaan audit, progres penyelesaian tindak lanjut, dan isu-isu strategis;
2. Rapat bersama Direksi dilakukan secara insidentil, namun SPI rutin menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal setiap bulan dan menyampaikan laporan kinerja konsolidasi SPI Pupuk Indonesia Group setiap triwulan.

4. Providing opinions, recommendations and suggestions for improvement to the Board of Directors, SVP, and officials of Compartments, Departments and Ad Hoc Teams of the Company and Subsidiaries, whether requested or unsolicited, in terms of safeguarding corporate property and assets;
5. Can request a letter of representation from the auditee regarding the validity and completeness of the documents and supporting information required in the implementation of the supervisory assignment;
6. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee;
7. Holding regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee and Company Work Units;
8. Can coordinate and communicate with the Board of Commissioners, Audit Committee and Work Units within Subsidiaries and Affiliated Companies in the context of implementing integrated supervision which is carried out through coordination with each IAU in the relevant Subsidiaries;
9. Can request to cooperate and coordinate supervision with Subsidiaries and affiliates IAU;
10. Coordinating with external auditors/assessors;
11. Requesting or obtaining assistance from internal Company employees or parties outside the company, in the context of carrying out supervision;
12. Participating in strategic meetings without having voting rights;
13. Can carry out digital forensic activities in the Company as well as Subsidiaries and affiliates in accordance with applicable governance.

Independence

As an internal audit unit, IAU has the freedom to act objectively (independently) in carrying out its duties and functions.

1. Not taking sides in the interests of parties in the Company such as management and Commissioners, either directly or indirectly;
2. Carrying out audits in accordance with generally accepted internal audit rules and principles;
3. In carrying out audit duties, free yourself from all personal interests and those of the work unit being examined, while still strictly upholding the established code of ethics.

Internal Audit Unit Meetings

Meeting Policy

1. PTPI's IAU holds monthly performance monitoring meetings with the Audit Committee, discussing, among other things, audit progress, follow-up actions, and strategic issues.

2. Meetings with the Board of Directors are held incidentally, but SPI routinely submits follow-up monitoring reports on internal and external audit results every month and submits consolidated performance reports of the SPI Pupuk Indonesia Group every quarter.

Frekuensi Rapat
Meeting Frequency

Keterangan Description	Rapat dengan Meeting With		
	Direksi Board of Directors	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Komite Audit** Audit Committee
Frekuensi Rapat Meeting Frequency	1 kali per bulan Once a month	1 kali per bulan Once a month	1 kali per bulan Once a month

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi pada Tahun Buku

Perusahaan melibatkan Satuan Pengawasan Intern dalam berbagai program pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan yang seluruh pendanaannya ditanggung oleh Perusahaan. Rincian kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Satuan Pengawasan Intern sepanjang tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Training and/or Competency Development in the Fiscal Year

The Company involves the Internal Audit Unit in competency development programs through training and education, all of which are funded by the Company. Details of the training and competency development activities participated in by the Internal Audit Unit in 2025 are shown as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2025
2025 Competency Development Program

Nama dan Jabatan Name and Position	Kegiatan Activities	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants
Seluruh Personil Kompartemen Satuan Pengawasan Intern All Internal Audit Unit Compartment Personnel	Internalisasi ICOFR ICOFR Internalization	Deloitte Konsultan Indonesia	23
Febrio Disulistyo Sukma Nugraha	Pelatihan Nasional Audit Forensik dan Deteksi Korupsi National Training on Forensic Auditing and Corruption Detection	LEMIKNAS	2
Galih Sutrisno	Certified Supply Chain Analyst (CSCA)	ISCEA Indonesia	1
Yuli Priyatna	Workshop ICOFR	IIA	1
Seluruh Personil Kompartemen Satuan Pengawasan Intern All Internal Audit Unit Compartment Personnel	Sharing Knowledge & Workshop Peran Strategis Budaya Risiko Dalam Keberhasilan Implementasi ICOFR Knowledge Sharing & Workshop: The Strategic Role of Risk Culture in the Successful Implementation of ICOFR	Deloitte Konsultan Indonesia	23
Yanuar Rizaldi Rian Maulana Agustin Tri Wahyuningsih Nakuyama Lusepa Resti Sandy Tias	QIA Dasar Basic QIA	YPIA	5
Putri Ayu Ciptasari Rian Maulana Yudha Fitriansyah	QIA Manajerial Managerial QIA	YPIA	3
R. Sukma Nugraha A Galih Sutrisno Rian Maulana Yudha Fitriansyah Nakuyama Lusepa Ilham Rusdiansyah Agustin Tri Wahyuningsih	QIA Lanjutan Advanced QIA	YPIA	7
Yuli Priyanta	Workshop National Anti Fraud Conference (NAFC)	ACFE	1
Febrio Disulistyo Yanuar Rizaldi	Pelatihan Anti Korupsi Tematik Investigatif Thematic Investigative Anti-Corruption Training	KPK	2
Yuli Priyanta Eriza Amranto	Indonesia National Conference	IIA	2
M. Faisal Rahman W. Okky Pramadi S. M. Hendy A.	Certified Information System Auditor (CISA)	ISACA	3
Firdy Ikhwani Rian Maulana	Certified Supply Chain Analyst (CSCA)	ISCEA Indonesia	2

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2025
2025 Competency Development Program

Nama dan Jabatan Name and Position	Kegiatan Activities	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants
Yanuar Rizaldi Agung Gunawan Okky Pramadi S. Putri Amelia S.	Penguatan Fungsi Investigasi di Pupuk Indonesia Group	BPKP	4
Okky Pramadi S. M. Hendy A.	CISA	PT Andalan Teknologi Inovasi	2
Eriza Amranto	BSE Masterclass X – Leadership Unplugged – Dare to Disrupt	BUMN School of Excellence (BSE)	1
Ilham Rusdiansyah	Workshop Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang & Jasa Corruption Prevention Workshop in Procurement of Goods and Services	Pusdiklatnas	1

Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern Tahun 2025

Implementation of Internal Audit Unit Duties in 2025

Ringkasan Realisasi Kinerja
Summary of Performance Realization

Uraian Description	PKPT Program Audit PKPT Audit Program	Realisasi Realization	Persentase Percentage
Assurance	16	28	175%
Konsultansi Advisory Services	7	13	185%
Counterpart	6	13	216%
Pengembangan & Penguatan Infrastruktur Infrastructure Development & Strengthening	6	2	33%

Realisasi kegiatan *assurance* sepanjang tahun 2025, yaitu:
1. Audit atas Perhitungan HPP Subsidi Tahun Anggaran 2024 periode *Year-end*;
2. Evaluasi Atas Pengelolaan Investasi Pengembangan PT Pupuk Indonesia (Persero);
3. *Joint Audit* atas Selisih persediaan saat peralihan *stock* pupuk (*Good Issue to Cost Center*) di PT PIM;
4. *Joint Audit* atas Kegiatan Penjualan Komersial;
5. *Joint Audit* Pengelolaan Pupuk Curah;
6. Evaluasi Atas Validitas Data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) PT Pupuk Indonesia (Persero) Triwulan I 2025;
7. Evaluasi atas Validitas Data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) PT Pupuk Indonesia (Persero) Triwulan II 2025;
8. Evaluasi atas Validitas Data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) PT Pupuk Indonesia (Persero) Triwulan III 2025;
9. Audit Pendahuluan Biaya Docking Kapal PT Pupuk Indonesia Logistik;
10. Audit Evaluasi Distributor;
11. Joint Audit Penyaluran & Pengelolaan Stok Pupuk Bersubsidi (PSO);
12. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP) PT Pupuk Indonesia (Persero) Periode Tahun 2025;
13. Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko di PT Pupuk Indonesia (Persero) periode Tahun 2025;
14. Audit Pendahuluan Pengelolaan Bahan Baku;
15. Audit Interim Perhitungan Subsidi Tahun 2025;

Implementation of assurance activities in 2025, including:
1. Audit of the Calculation of Subsidy Cost of Goods Sold for the 2024 Fiscal Year-End Period;
2. Evaluation of the Management of Development Investments at PT Pupuk Indonesia (Persero);
3. Joint Audit of Inventory Differences During Fertilizer Stock Transfer (Good Issue to Cost Center) at PT PIM;
4. Joint Audit of Commercial Sales Activities;
5. Joint Audit of Bulk Fertilizer Management;
6. Evaluation of the Validity of Data on the Increase in Domestic Product Use (P3DN) at PT Pupuk Indonesia (Persero) for QI 2025;
7. Evaluation of the Validity of Data on the Increase in Domestic Product Utilization (P3DN) at PT Pupuk Indonesia (Persero) for QII 2025;
8. Evaluation of the Validity of Data on the Increase in Domestic Product Utilization (P3DN) at PT Pupuk Indonesia (Persero) for QIII 2025;
9. Preliminary Audit of Ship Docking Costs at PT Pupuk Indonesia Logistik;
10. Distributor Evaluation Audit;
11. Joint Audit of Distribution & Management of Subsidized Fertilizer Stock (PSO);
12. Evaluation of the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP) at PT Pupuk Indonesia (Persero) for the 2025 Period;
13. Evaluation of Risk Management Implementation at PT Pupuk Indonesia (Persero) for the 2025 Period;
14. Preliminary Audit of Raw Material Management;
15. Interim Audit of Subsidy Calculation for 2025;

16. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2024 *(Carry over 2024)*;
17. *Joint* Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Piutang di PT Petrosida Gresik (*Carry over 2024)*;
18. Telaah dan Klarifikasi Sdr. Sefin Martadjaja Eks Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Pangan;
19. Reviu atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI dalam Perencanaan dan Pengadaan Investasi Rutin *Bending Machine* dan *Overhead Crane* di PT Petrokimia Gresik;
20. Evaluasi atas Implementasi Program *Nature Based Solutions* (NBS) – Agroforestry PT Pupuk Indonesia (Persero);
21. Telaah Dugaan Kasus Penyimpangan Proses Pengadaan Jasa PKT berdasarkan WBS 01 Tahun 2022;
22. Audit atas Piutang *Distributor*;
23. Audit Investigasi Penyimpangan Proses Pengadaan Jasa di PT Pupuk Kalimantan Timur Periode 2018-2021 dan Proses Pengadaan di PT Mega Eltra/PT Pupuk Indonesia Niaga Periode 2021-2022;
24. Evaluasi atas transaksi perdagangan pupuk oleh PT Pupuk Indonesia Niaga dengan PT Sentana Adidaya Pratama selama periode 2022–2024;
25. Pengumpulan Data Pengembangan Audit atas Dugaan Penyimpangan di PT PSG;
26. Penyiapan Audit Forensik Proyek RDMP PT Rekayasa Industri;
27. *Joint* Audit atas Pengelolaan Proyek PLTU Lombok oleh Rekind;
28. Investigasi atas Pembocoran Informasi Rahasia Perusahaan dan Pemberitaan Negatif Perusahaan.

Realisasi kegiatan konsultansi sepanjang tahun 2025, yaitu:
1. Reviu Komposit Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2024;
2. Konsultansi atas Pengelolaan dan Tata Kelola K3 PT Pupuk Indonesia (Persero);
3. Konsultansi atas Pemanfaatan Sarana Transportasi PT PKT – PT KAN;
4. Konsultansi Penghapusbukuan Aset Tetap PT PKG;
5. Konsultansi Penghapusbukuan Aset Tetap PT PKT;
6. Konsultansi Kerja Sama Sewa Aset Graha Phonska PKG;
7. Konsultansi Penghapusbukuan Gudang Sumani Solok PSP;
8. Konsultansi Izin Prinsip Sewa Lahan Proyek *Green Ammonia* PIM;
9. Konsultansi Penghapusbukuan Aset Tetap PT PKT;
10. Penyempurnaan DSM atas Hasil Audit BPK-RI (Fungsi Pengadaan);
11. Penyempurnaan DSM atas Hasil Audit BPK-RI (Fungsi Pengembangan dan Fungsi Manajemen Risiko);
12. Penyempurnaan DSM atas Hasil Audit BPK-RI (Fungsi SDM, Fungsi Hubungan *Stakeholder*, dan Fungsi Keuangan);
13. Penyempurnaan DSM atas Hasil Audit BPK-RI (Fungsi Pemasaran).

Realisasi kegiatan *counterpart* sepanjang tahun 2025, yaitu:
1. Pendampingan Audit Atas Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi TA 2024 oleh BPK-RI DJPKN VII;

16. Evaluation of the Implementation of Risk Management at PT Pupuk Indonesia (Persero) for 2024 (Carry over 2024);
17. Joint Specific Purpose Audit of Accounts Receivable Management at PT Petrosida Gresik (Carry over 2024);
18. Review and Clarification by Sefin Martadjaja, Former Finance Director of PT Pupuk Indonesia Pangan;
19. Review of the Follow-up to the BPK-RI Recommendations regarding the Planning and Procurement of Routine Investments in Bending Machines and Overhead Cranes at PT Petrokimia Gresik;
20. Evaluation of the Implementation of the Nature-Based Solutions (NBS) Agroforestry Program at PT Pupuk Indonesia (Persero);
21. Review of Alleged Irregularities in the PKT Services Procurement Process based on the 2022 WBS 01;
22. Audit of Distributor Receivables;
23. Investigative Audit of Irregularities in the Services Procurement Process at PT Pupuk Kalimantan Timur for the 2018-2021 Period and the Procurement Process at PT Mega Eltra/PT Pupuk Indonesia Niaga for the 2021-2022 Period;
24. Evaluation of fertilizer trade transactions between PT Pupuk Indonesia Niaga and PT Sentana Adidaya Pratama for the 2022-2024 Period;
25. Data Collection for Audit Development on Alleged Irregularities at PT PSG;
26. Preparation for a Forensic Audit of the PT Rekayasa Industri RDMP Project;
27. Joint Audit of the Management of the Lombok PLTU Project by Rekind;
28. Investigation into the Leakage of Confidential Company Information and Negative Publicity.

Advisory activities implemented in 2025 including:
1. Review of the 2024 Composite Risk of PT Pupuk Indonesia (Persero);
2. Consultation on the Management and Governance of Occupational Health and Safety (OHS) of PT Pupuk Indonesia (Persero);
3. Consultation on the Utilization of Transportation Facilities between PT PKT and PT KAN;
4. Consultation on the Write-Off of Fixed Assets of PT PKG;
5. Consultation on the Write-Off of Fixed Assets of PT PKT;
6. Consultation on the Lease Agreement for the Graha Phonska PKG Asset;
7. Consultation on the Sumani Solok PSP Warehouse Write-Off;
8. Consultation on the Principle Permit for Land Lease for the Green Ammonia PIM Project;
9. Consultation on the Fixed Asset Write-Off of PT PKT;
10. Improvement of the DSM for the Audit Results of the Supreme Audit Agency (BPK-RI) (Procurement Function);
11. Improvement of the DSM for the Audit Results of the Supreme Audit Agency (BPK-RI) (Development Function and Risk Management Function);
12. Improvement of the DSM for the Audit Results of the Supreme Audit Agency (HR Function, Stakeholder Relations Function, and Finance Function);
13. Improvement of the DSM for the Audit Results of the Supreme Audit Agency (Marketing Function).

Implementation of counterpart activities throughout 2025, namely:
1. Audit assistance for the calculation of HPP Pupuk Bersubsidi TA 2024 fiscal year BPK-RI DJPKN VII;

2. Pendampingan Audit atas Volume Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh BPK-RI AKN IV TA 2024 di Jakarta, Sumatera Barat. Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat;
3. Tindak lanjut Diagnostik Internal *Control Over Financial Reporting* (ICoFR) – KAP;
4. Pendampingan Audit Atas Kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam Penyediaan Pupuk dan Peningkatan Daya Saing Perusahaan Tahun 2022, 2023 dan Semester I 2024 Terinci oleh BPK-RI DJPKN VII;
5. Pendampingan Audit atas Kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam Ketahanan Pangan Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2025 oleh BPK-RI DJPKN VII;
6. Pendampingan Rencana Penjualan Produk Urea Ekspor dengan Mekanisme *Long Term Contract* (LTC) PT Pupuk Indonesia (Persero) - BPKP;
7. Pendampingan *Close out Report* Reaktivasi Pabrik H202 PT Pupuk Iskandar Muda;
8. BPKP - Tindak Lanjut Rekomendasi:
   a. Laporan Hasil Evaluasi atas Transisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon - pada PT Pupuk Indonesia (Persero);
   b. Laporan Hasil Evaluasi Diversifikasi Energi pada PT Pupuk Indonesia (Persero);
   c. Laporan Hasil Evaluasi atas Efisiensi Industri Pupuk Nasional pada PT Pupuk Indonesia (Persero);
   d. Laporan Hasil Evaluasi atas Tata Kelola Pupuk Nasional pada PT Pupuk Indonesia (Persero);
   e. Laporan Hasil Penilaian Indonesian *Corporate Accountability Index* (ICORPAX) pada PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Buku 2023.
9. Pelaksanaan Koordinasi Awal dalam Rangka Pengawasan Berbasis Digital atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Subsidi Pupuk Tahun 2023-2024 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan - Itjen Kementerian Keuangan;
10. Reviu Komposit Risiko Pupuk Indonesia Group Tahun 2024;
11. *Counterpart* Audit Forensik Proyek RDMP;
12. *Counterpart* Audit Pembayaran Homologasi;
13. *Counterpart* Audit Investigasi PT Sigma Utama Tahun 2022-2024.

Realisasi kegiatan pengembangan dan penguatan infrastruktur sepanjang tahun 2025, yaitu:
1. Pemutakhiran Pedoman Audit Intern Terintegrasi;
2. Akselerasi Penerapan Integrated Audit Management System (AMS) SPI Pupuk Indonesia Group.

2. Audit assistance for the distribution volume of subsidized fertilizer by BPK-RI AKN IV TA 2024 for the 2024 fiscal year in Jakarta, West Sumatra, Lampung, West Java, Central Java, East Java, and West Nusa Tenggara;
3. Follow-up Diagnostic on the Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)– KAP;
4. Audit Assistance on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance in Fertilizer Supply and Increasing Company Competitiveness in 2022, 2023, and the First Semester of 2024, detailed by BPK-RI DJPKN VII);
5. Audit Assistance on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance in Food Security from 2023 to QIII 2025 by BPK-RI DJPKN VII);
6. Assistance on the Plan for Export Urea Product Sales using the Long Term Contract (LTC) Mechanism of PT Pupuk Indonesia (Persero) - BPKP;
7. Assistance on the Close-out Report on the Reactivation of the H202 Plant at PT Pupuk Iskandar Muda;
8. BPKP - Follow-up on Recommendations:
   a. Evaluation Report on the Transition to Low Carbon Development - at PT Pupuk Indonesia (Persero);
   b. Evaluation Report on Energy Diversification at PT Pupuk Indonesia (Persero);
   c. Evaluation Report on the Efficiency of the National Fertilizer Industry at PT Pupuk Indonesia (Persero);
   d. Evaluation Report on National Fertilizer Governance at PT Pupuk Indonesia (Persero);
   e. Assessment Report on the Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) at PT Pupuk Indonesia (Persero) for the 2023 Fiscal Year.
9. Implementation of Initial Coordination for Digital-Based Supervision of Subsidized Fertilizer Distribution in 2025 and Follow-up Monitoring of Fertilizer Subsidy Supervision Results in 2023-2024 by the Inspectorate General of the Ministry of Finance - Inspectorate General of the Ministry of Finance;
10. Pupuk Indonesia Group's Composite Risk Review for 2024;
11. Counterpart for the RDMP Project Forensic Audit;
12. Counterpart for the Homologation Payment Audit;
13. Counterpart for the PT Sigma Utama Investigative Audit for 2022-2024.

Implementation of infrastructure development and strengthening activities throughout 2025 including:
1. Updating the Integrated Internal Audit Guidelines;
2. Accelerating the Implementation of the Integrated Audit Management System (AMS) of the Pupuk Indonesia Group IAU.

Audit Eksternal/Akuntan Publik

External Audit/Public Accountant

Sebagai bagian dari penerapan sistem pengendalian intern Perusahaan, pemeriksaan atas laporan keuangan PTPI dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit ini dilaksanakan untuk memberikan opini secara independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas dalam *Holding*, dalam seluruh hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

As part of the Company's internal control system, the audit of PTPI's financial statements was conducted by a Public Accounting Firm (KAP) that complies with all applicable laws and regulations. This audit was conducted to provide an independent opinion on the fairness of the presentation of the Company's consolidated financial statements and those of its Holding entities, in all material respects, in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Auditor Eksternal wajib menjaga independensi dengan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan, guna memastikan objektivitas, integritas, serta kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan SAK di Indonesia sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

When carrying out their duties, External Auditors are required to maintain independence by having no conflict of interest with the Company, to ensure the objectivity, integrity, and quality of the audit results. External Auditors are responsible for providing an opinion on the conformity of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), demonstrating the Company's commitment to the principles of accountability and transparency for all stakeholders.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan yang disusun sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, laporan keuangan tersebut juga disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang saat ini menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor VIII.G.7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

The Company's management is fully responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements, which are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (FAS) as stipulated by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). In addition, the financial statements are prepared in accordance with applicable laws and regulations, including the Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), currently the Financial Services Authority (OJK), No. VIII.G.7, as set out in the Attachment to Decree No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, concerning Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan;
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI;
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan;
4. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen;

External Audit Procedures and Auditing Standards

1. The audit of the Company's financial statements was conducted in accordance with the professional standards of Public Accountants, which included all audit procedures deemed necessary in the circumstances;
2. The audit included testing and evaluating the internal control system, as well as examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also included an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the financial statements in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).
3. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducted inquiries of management regarding management statements presented in the financial statements;
4. Audits carry an inherent risk of material errors and irregularities. If such matters arise, the KAP will notify management;

5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk direviu oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan auditor eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan. Dalam pelaksanaan audit, Perusahaan selalu berupaya menciptakan komunikasi yang efektif antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan manajemen PTPI, Entitas Anak, dan beberapa Cucu Perusahaan melalui aktivitas koordinasi yang mencakup kegiatan Eksternal Auditor yang diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui komunikasi seluruh unit kerja terkait dan melaksanakan pertemuan secara berkala, pendampingan ke unit kerja lainnya dalam Perusahaan dan SPI Entitas Anak, guna membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi Perusahaan dan KAP.

Di samping itu, SPI PTPI juga bertanggung jawab membantu Komite Audit PTPI dalam melakukan evaluasi atas kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) yang meliputi antara lain aspek pemahaman atas isu-isu yang dihadapi oleh Perusahaan

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2025 didasarkan pada Keputusan RUPS Kinerja Tahun 2024 PT Pupuk Indonesia (Persero) KBUMN tanggal 16 Juni 2025 dengan berpedoman pada ketentuan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Adapun kronologis proses penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) sebagai auditor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi KAP PWC Tahun Buku 2024 berdasarkan surat Dewan Komisaris No. S-055/KOM/PIHC/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024 dan Permohonan Penetapan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2025

2. Pelimpahan wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham seri B untuk menunjuk KAP untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2025 sesuai Berita Acara RUPS Kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Buku 2024 tanggal 16 Juni 2026.

5. Management approves the KAP's audit working papers for review by the relevant bodies or authorities.

Audits are conducted in accordance with the Professional Standards for Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Indonesian government, the audit is conducted in accordance with the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Supreme Audit Agency (BPK).

Shareholders, through the GMS, have the authority to appoint an external auditor to audit the Company's financial statements. When conducting audits, the Company consistently endeavors to foster effective communication between the Public Accounting Firm (KAP) and the management of PTPI, its subsidiaries, and subsidiaries through coordination activities that include the activities of the External Auditor, which are expected to achieve comprehensive and optimal audit results. This coordination includes communication across all relevant work units, regular meetings, and mentoring of other work units within the Company and the Subsidiary's IAUs to discuss matters deemed important to the Company and the KAP.

In addition, PTPI's IAU is also responsible for assisting the PTPI Audit Committee in evaluating the performance of the Public Accounting Firm (KAP), which includes ensuring an understanding of the issues faced by the Company.

Mechanism for Appointing a Public Accounting Firm

The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) to audit the Company's Consolidated Financial Statements, the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program, and Other Reports for the 2025 Fiscal Year was based on the PT Pupuk Indonesia (Persero) 2024 Annual General Meeting of Shareholders Resolution KBUMN held on June 16, 2025, in accordance with OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms (KAP) in Financial Services Activities.

The chronology of the process for appointing the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) as the external auditor was as follows:

1. Evaluation of PWC's KAP for Fiscal Year 2024 based on the Board of Commissioners' letter No. S-055/KOM/PIHC/VI/2025 dated June 10, 2025, concerning the Evaluation of the Public Accounting Firm (KAP) for Fiscal Year 2024 and the Request for Appointment of Public Accounting Firm (KAP) Services for Fiscal Year 2025.
2. Delegation of authority from shareholders to the Board of Commissioners after obtaining written approval from the Series B shareholders to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements, the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program, and other reports for the 2025 Fiscal Year, in accordance with the Minutes of the 2024 PT Pupuk Indonesia (Persero) GMS dated June 16, 2026.

3. Proses pengadaan KAP Tahun Buku 2025 berdasarkan KAK/TOR surat Dewan Komisaris No.S-065/KOM/PIHC/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.

4. Berdasarkan surat Komite Audit Dewan Komisaris No.026/KA/PIHC/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Pengadaan, Penetapan Metode Pengadaan dan Usulan Rekanan Pengadaan Jasa Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2025 pengadaan Jasa Akuntan Publik Tahun Buku 2025 menggunakan metode Tender/Seleksi Terbatas dan kriteria KAP *Big Four* (4).

5. Proses Permintaan Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga/Komersial dari calon penyedia jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai surat Komite Audit Dewan Komisaris No. 028/KA/PIHC/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Surat Permintaan Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2025.

6. Penetapan pemenang Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2025 adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) berdasarkan surat Komite Audit Dewan Komisaris No. 044/KA/PIHC/XI/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Pengumuman Pemenang Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2025.

Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris PTPI No. S-098/KOM/PIHC/XI/2025 tanggal 15 November 2025, Perusahaan telah menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Tahun Buku 2025. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

3. The procurement process for the 2025 Financial Year KAP was based on the KAK/TOR of the Board of Commissioners, letter No. S-065/KOM/PIHC/VII/2025 dated July 21, 2025, concerning the Procurement of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the 2025 Financial Statements.
4. Based on Board of Commissioners Audit Committee letter No. 026/KA/PIHC/VIII/2025 dated August 19, 2025, concerning the Application for Procurement Implementation Permit, Determination of Procurement Methods, and Proposals for Public Accounting Services Procurement Partners for PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries for the 2025 Fiscal Year, the procurement of Public Accounting Services for the 2025 Fiscal Year used the Limited Tender/Selection method and the Big Four Public Accounting Firm criteria (4).
5. The Request for Bid for Administrative, Technical, and Pricing/Commercial Quotations from prospective Public Accounting Firm (KAP) service providers was in accordance with the Board of Commissioners Audit Committee e letter No. 028/KA/PIHC/VIII/2025 dated August 27, 2025, concerning the Request for a Bid for the Procurement of Public Accounting Services for PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries for the 2025 Fiscal Year.
6. The winner of the Public Accounting Firm (KAP) service for PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries for the 2025 Fiscal Year was determined to be Public Accounting Firm (KAP) of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC), based on the Board of Commissioners Audit Committee letter No. 044/KA/PIHC/XI/2025 dated November 13, 2025, concerning the Announcement of the Winner for the Public Accounting Firm (KAP) Service for PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries for the 2025 Fiscal Year.

Public Accounting Firm

Based on the PTPI Board of Commissioners Letter No. S-098/KOM/PIHC/XI/2025 dated November 15, 2025, the Company appointed and designated the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Fiscal Year. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor must not have a conflict of interest with the Company.

Akuntan Publik Tahun 2025

Public Accountants in 2025

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant Firm (KAP)	**KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC)**
Akuntan Accountant	**Heryanto**
Tahun Audit Audit Year	**2025**
Periode Penugasan Assignment Period	**17 November 2025 s.d. 31 Maret 2026** November 17, 2025 to March 31, 2026
Jasa Services	• Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025; • Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; • Laporan Auditor Independen atas Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. • Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the year ending December 31, 2025; • Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program for the year ending December 31, 2025; • Independent Auditor's Report on the Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2025.
Jasa Lainnya Other Services	• Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Penilaian Tingkat Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi Kolegial dan Individu Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; • Laporan Management Letter (bila ada) atas Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; • Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Tindak Lanjut atas Keputusan dan Arahan RUPS RKAP Tahun Buku 2025; • Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Tindak Lanjut atas tanggapan dan saran Dewan Komisaris PI atas Kinerja Perusahaan Tahun 2025; • Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati sesuai dengan format yang disampaikan oleh Kementerian BUMN perihal Penyampaian Format Laporan AUP; • Hasil pelaksanaan jasa terkait lingkup jasa yang dituangkan dalam Instruksi Audit dari BPK (SA 600); • Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait laporan Komposit Risiko untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; • Hasil pelaksanaan jasa terkait lingkup pekerjaan yang dituangkan dalam Grup *Audit Instruction* dari auditor pemegang saham (PT Danantara Asset Management). • Independent Accountant's Report on the Agreed-Upon Procedures for the Assessment of the Key Performance Indicators (KPIs) Achievement Level for the Board of Directors and Individual Directors for the year ending December 31, 2025; • Management Letter Report (if any) on Internal Control for the year ending December 31, 2025; • Independent Accountant's Report on the Agreed-Upon Procedures for the Follow-Up to the Decisions and Directives of the GMS and the RKAP for the 2025 Fiscal Year; • Independent Accountant's Report on the Agreed-Upon Procedures for the Follow-Up to the Responses and Recommendations of the PI Board of Commissioners regarding the Company's Performance in 2025; • Independent Accountant's Report on the Agreed-Upon Procedures in accordance with the format provided by the Ministry of BUMN regarding the Submission of AUP Report Formats; • Results of service implementation related to the scope of services outlined in the Audit Instructions from the Supreme Audit Agency (SA 600); • Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures related to the Composite Risk Report for the year ending December 31, 2025; • Results of service implementation related to the scope of work outlined in the Group Audit Instruction from the shareholder auditor (PT Danantara Asset Management).
Biaya Fees	**Rp20.675.000.000**

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya (Rp) Fees (Rp)	Biaya Non Audit (Rp) Non-Audit Fees (Rp)
2025	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Heryanto No. Izin: AP.1784. Heryanto Licence No.: AP.1784.	Wajar dalam semua hal yang material Fairly in all material respects	Perusahaan, 9 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 • Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 • Laporan Auditor Independen atas Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 • Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Penilaian Tingkat Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Direksi Kolegial dan Individu Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 • Laporan Management Letter (bila ada) atas Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 • Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Tindak Lanjut atas Keputusan dan Arahan RUPS RKAP Tahun Buku 2025 • Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terhadap Tindak Lanjut atas tanggapan dan saran Dewan Komisaris PI atas Kinerja Perusahaan Tahun 2025 • Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati sesuai dengan format yang disampaikan oleh Kementerian BUMN perihal Penyampaian Format Laporan AUP • Hasil pelaksanaan jasa terkait lingkup jasa yang dituangkan dalam Instruksi Audit dari BPK (SA 600) • Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait laporan Komposit Risiko untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 • Hasil pelaksanaan jasa terkait lingkup pekerjaan yang dituangkan dalam Group Audit Instruction dari auditor pemegang saham (PT Danantara Asset Management)	Rp17.970.000.000	Rp2.705.000.000

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya (Rp) Fees (Rp)	Biaya Non Audit (Rp) Non-Audit Fees (Rp)
				The Company, 9 Subsidiaries under direct ownership, and 11 Subsidiaries under indirect ownership, including: • Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the year ending December 31, 2025 • Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program for the year ending December 31, 2025 • Independent Auditor's Report on the Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2025 • Independent Accountant's Report on the Agreed-Upon Procedures for the Assessment of the Key Performance Indicators (KPIs) Achievement Level for the Board of Directors and Individual Directors for the year ending December 31, 2025 • Management Letter Report (if any) on Internal Control for the year ending December 31, 2025 • Independent Accountant's Report on the Agreed-Upon Procedures for the Follow-Up to the Decisions and Directives of the GMS and the RKAP for the 2025 Fiscal Year • Independent Accountant's Report on the Agreed-Upon Procedures for the Follow-Up to the Responses and Recommendations of the PI Board of Commissioners regarding the Company's Performance in 2025 • Independent Accountant's Report on the Agreed-Upon Procedures in accordance with the format provided by the Ministry of BUMN regarding the Submission of AUP Report Formats • Results of service implementation related to the scope of services outlined in the Audit Instructions from the Supreme Audit Agency (SA 600) • Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures related to the Composite Risk Report for the year ending December 31, 2025 • Results of service implementation related to the scope of work set forth in the Group Audit Instruction issued by the shareholder auditor (PT Danantara Asset Management)		

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya (Rp) Fees (Rp)	Biaya Non Audit (Rp) Non-Audit Fees (Rp)
2024	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Heryanto No. Izin: AP.1784. Heryanto Licence No.: AP.1784.	Wajar Tanpa Pengecualian Reasonable in all material respects	Perusahaan, 9 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Pupuk Indonesia Group) Tahun Buku 2024. • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK untuk PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur , PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Rekayasa Industri Tahun Buku 2024. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan. • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perusahaan serta arahan Dewan Komisaris. • Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN. The Company, 9 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial Statements of PI, Subsidiaries and Grand Subsidiaries (Pupuk Indonesia Group) for the 2024 Fiscal Year • Audit of Financial Reports for the Implementation of the MSE Funding Program for PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur , PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Rekayasa Industri for the 2024 Fiscal Year. • Audit of Compliance with Legislative Regulations and Internal Control. • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. • Review of the Evaluation Report • on the Status of Follow-up to the Company's GMS Directions and the Board of Commissioners' directions. • Review of the Implementation of Agreed Procedures in Preparation for the Compilation of Aggregated Financial Information for the Ministry of BUMN.	16.940.000.000	4.260.000.000

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya (Rp) Fees (Rp)	Biaya Non Audit (Rp) Non-Audit Fees (Rp)
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Toto Harsono No. Izin: AP.1122 Toto Harsono Licence No.: AP.1122	Wajar Tanpa Pengecualian Reasonable in all material respects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Pupuk Indonesia Group) Tahun Buku 2023. • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2023. • Audit Kepatuhan terhadap • Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Reviu atas Laporan Penilaian • Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan. • Reviu atas Laporan Evaluasi • Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perusahaan serta arahan Dewan Komisaris. • Management Letter. • Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN. The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial • Statements of Pupuk Indonesia Group for the 2023 Fiscal Year. • Audit of the Financial Report for the Implementation of the PTPI UMK Funding Program for the 2023 Fiscal Year. • Audit of Compliance with Legislative Regulations and Internal Control. • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. • Review of the Status Evaluation Report Follow-up to the Company's GMS Directions and the Board of Commissioners' directions. • Management Letter. • Review of the Implementation of Agreed Procedures in Preparation for the Compilation of Aggregated Financial Information for the Ministry of BUMN.	21.200.000.000 (exc. PPN) 21.200.000.000 (exc. VAT)	5.980.000 (exc. PPN) 5.980.000 (exc. VAT)

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya (Rp) Fees (Rp)	Biaya Non Audit (Rp) Non-Audit Fees (Rp)
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Toto Harsono	Wajar dalam semua hal yang material Fairly in all material respects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Pupuk Indonesia Group) Tahun Buku 2022; • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2022; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal; • Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Reviu atas Laporan Penilaian • Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan; • Reviu atas Laporan Evaluasi • Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perusahaan serta arahan Dewan Komisaris; • Management Letter; • Reviu atas penerapan prosedur yang disepakati dalam rangka persiapan penyusunan informasi keuangan agregasi Kementerian BUMN. The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial • Statements of PTPI, Subsidiaries and Subsidiaries (Pupuk Indonesia Group) for the 2022 Fiscal Year; • Audit of the Financial Report for the Implementation of the PTPI UMK Funding Program for the 2022 Fiscal Year; • Audit of Compliance with Legislative Regulations and Internal Control; • Review of the Company Performance Evaluation Report; • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report; • Review of the Evaluation Report on the Status of Follow-up to the Company's GMS Directions and the Board of Commissioners' directions; • Management Letter; • Review of the implementation of agreed procedures in preparation for the compilation of aggregate financial information for the Ministry of BUMN.	20.700.000.000 (exc. PPN) 20.700.000.000 (exc. VAT)	USD2.000 & Rp6.315.000.000 USD2.000 & Rp6.315.000.000

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya (Rp) Fees (Rp)	Biaya Non Audit (Rp) Non-Audit Fees (Rp)
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Izin: 241/ KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Licence No: 241/ KM.1/2015	Toto Harsono No. Izin: AP.1122 Toto Harsono Licence No.: AP.1122	Wajar dalam semua hal yang material Fairly in all material respects	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Pupuk Indonesia Group) Tahun Buku 2021; • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2021; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal; • Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan; • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perusahaan serta arahan Dewan Komisaris; • Management Letter; • Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN. The Company, 10 Subsidiaries under direct ownership and 11 Subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial • Statements of PTPI, Subsidiaries and Subsidiaries (Pupuk Indonesia Group) for the 2021 Fiscal Year; • Audit of the Financial Report for the Implementation of the PTPI UMK Funding Program for the 2021 Fiscal Year; • Audit of Compliance with Legislative Regulations and Internal Control; • Review of the Company Performance Evaluation Report; • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report; • Review of the Evaluation Report • on the Status of Follow-up to the Company's GMS Directions and the Board of Commissioners' directions; • Management Letter; • Review of the Implementation of Agreed Procedures in Preparation for the Compilation of Aggregated Financial Information for the Ministry of BUMN.	21.350.000.000 (exc. PPN) 21.350.000.000 (exc. VAT)	1.850.000.000 (exc. PPN) 1.850.000.000 (exc. VAT)

Sistem Pengendalian Intern

Internal Control System

Perusahaan menerapkan Sistem Pengendalian Intern untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan efektif dan efisien, pelaporan keuangan dan pelaporan manajemen tersaji andal dan tepat waktu, serta seluruh aktivitas Perusahaan selaras dengan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company has an Internal Control System to ensure that business activities run effectively and efficiently, that financial and management reporting is presented reliably and timely, and that all Company activities align with internal regulations and applicable laws and regulations.

Pengendalian internal dibangun untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Entitas Anak. Tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Internal controls have been established to improve the integrated control system between the Company and its Subsidiaries. The goal is to ensure that operational activities are carried out effectively and can increase added value for the Company through the effective implementation of risk management and the principles of Good Corporate Governance.

Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perusahaan

PTPI memiliki pedoman umum Sistem Pengendalian Intern melalui Dokumen No. PI-SPIPR-007 tanggal 29 Desember 2017 tentang Prosedur Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP). Dokumen tersebut telah disahkan bersama-sama oleh Direktur Utama, Direktur Keuangan, Kepala Satuan Pengawasan Intern dan VP Pengawasan Keuangan. Pedoman ini memberikan gambaran tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkup Perusahaan yang merupakan prosedur dengan tujuan untuk mengatur dan menjelaskan rangkaian aktivitas pelaksanaan evaluasi penerapan SPIP dan menilai tingkat kecukupan efektivitas penerapannya.

Company Internal Control System Guidelines

PTPI has instigated general guidelines for its Internal Control System through Document No. PI-SPIPR-007 dated December 29, 2017, concerning the Evaluation Procedures for the Company's Internal Control System (SPIP). This document was jointly approved by the President Director, the Director of Finance, the Chief Audit Executive, and the VP Financial Supervision. These guidelines provide an overview of the Internal Control System within the Company, with procedures aimed at regulating and explaining the activities for evaluating the SPIP and assessing the adequacy and effectiveness of its implementation.

Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian assertion mengenai efektivitas pengendalian internal dan memberikan keyakinan kepada *stakeholder* lain bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan telah cukup memadai dalam mencapai tujuan. Prosedur ini juga menjelaskan langkah-langkah dan tahapan dalam mengevaluasi penerapan SPIP oleh Satuan Pengawasan Intern Perusahaan yang melingkupi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Evaluation of the Company's Internal Control System is conducted to provide assurance to the Board of Directors regarding the effectiveness of internal controls and to provide assurance to other stakeholders that the Company's Internal Control System is adequate in achieving its objectives, and also explains the steps and stages in evaluating the Internal Control System (SPIP) by the Company's Internal Audit Unit, covering all activities from preparation, implementation, and reporting.

Kesesuaian terhadap Framework Internasional

Sistem Pengendalian Intern Perusahaan telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Standar internasional itu dipublikasikan pada tahun 2013 dan berisi 5 (lima) komponen pengendalian internal, sebagai pengembangan dari COSO-*Internal Control Framework* yang dipublikasikan pada tahun 1992.

Compliance with the International Framework

The Company's Internal Control System complies with the Internal Control Integrated Framework developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). This international standard, published in 2013, contains five internal control components, evolving from the COSO Internal Control Framework published in 1992.

Adapun 5 (lima) komponen pengendalian internal tersebut adalah: The five internal control components are:

No	Komponen Component	Uraian Description
1	Lingkungan Pengendalian Control Environment	Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu perusahaan dan mempengaruhi kesadaran personal tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh elemen perusahaan. Terdapat 5 (lima) prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam Perusahaan untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu: Direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika; 1. Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal; 2. Manajemen dengan pengawasan Direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan; 3. Perusahaan menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan; 4. Perusahaan meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan. The control environment creates an atmosphere of control within a company and influences personal awareness of control. The control environment is the foundation for all internal control components that form discipline and structure. The control environment is defined as a set of standards, processes and structures that provide the basis for implementing internal control across all elements of the company. There are 5 (five) principles that must be upheld or implemented within the Company to support the control environment so that it can be realized well, namely: 1. Board of Directors, management and other personnel demonstrate a commitment to integrity and ethical values; 2. Board of Directors demonstrates independence from management and in overseeing the development and performance of internal controls; 3. Management, with the supervision of the Board of Directors, determines the structure, reporting lines, authorities and responsibilities in pursuing goals; 4. The Company demonstrates a commitment to attracting, developing and retaining competent individuals in line with its objectives; 5. The Company ensures individuals are responsible for their internal control duties and responsibilities in achieving goals.
2	Penilaian Risiko Risk Assessment	Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko adalah suatu kemungkinan bahwa suatu kilas peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan; 2. Perusahaan mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola; 3. Perusahaan mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan; 4. Perusahaan mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern Risk assessment involves a dynamic and interactive process to identify and assess risks to the achievement of objectives. Risk is the possibility that an event will occur and affect the achievement of company goals. The principles that support risk assessment are as follows: 1. The Company sets objectives with sufficient clarity to enable identification and assessment of risks associated with the objectives; 2. The Company identifies risks to the achievement of objectives across entities and risk analysts as a basis for determining how risks should be managed; 3. The Company considers the potential for fraud in assessing risks to achieving objectives; 4. The Company identifies and assesses changes that could significantly affect the internal control system.
3	Aktivitas Pengendalian Control Activities	Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. Prinsip-prinsip dalam Perusahaan yang mendukung aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima; 2. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan; 3. Perusahaan mendistribusikan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan. Control activities are actions established through policies and procedures that help ensure that management directives to reduce risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities include different activities such as: authorization, verification, reconciliation, analysis, work performance, maintaining security of company assets and separation of functions. The principles in the Company that support control activities are as follows: 1. The Company selects and develops control activities that contribute to mitigating the risk of achieving targets at an acceptable level; 2. The Company selects and develops general control activities over technology to support the achievement of objectives; 3. The Company distributes control activities through policies that define what is expected, and procedures that put the policies into action.

No	Komponen Component	Uraian Description
4	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	Informasi dan komunikasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Terdapat 3 (tiga) prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu: 1. Perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal; 2. Perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal; 3. Perusahaan berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal The information and communication required by management is relevant and good quality information originating from internal and external sources and information used to support the function of other components of internal control. There are 3 (three) principles that support the information and communication components of internal control, namely: 1. The Company obtains or produces and uses quality and relevant information to support internal control functions; 2. The Company internally communicates information, including objectives and responsibilities for internal control in order to support the internal control function; 3. The Company communicates with internal parties regarding matters that affect the internal control function.
5	Aktivitas Pemantauan Monitoring Activities	Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk, baik yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya, yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau Manajemen dan Direksi, dan kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada Manajemen dan Direksi Monitoring activities are evaluation activities in several forms, either continuous, separate or a combination of both, which are used to ensure whether each of the five components of internal control influences the functions within each component, exists and is functioning. Findings are evaluated against criteria established by policy makers, recognized standard- setting institutions or Management and Directors, and deficiencies found are communicated to Management and Directors.

Ruang Lingkup Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Intern mencakup pengendalian pada aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Pengendalian Keuangan

Pengendalian keuangan diarahkan untuk menjaga keandalan pelaporan dan akuntabilitas keuangan melalui kebijakan, prosedur, serta pengendalian utama, antara lain otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemisahan fungsi (*segregation of duties*), dan pengamanan aset. Selain evaluasi internal, Perusahaan memperoleh penilaian independen atas sistem pengendalian intern melalui audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Rekomendasi penguatan pengendalian disampaikan kepada manajemen melalui Laporan PSA 62 dan *Management Letter* sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan keandalan pelaporan.

Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional diterapkan untuk memastikan proses bisnis berjalan sesuai kebijakan, standar, dan prosedur yang ditetapkan, serta mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha. Sebagai *holding*, Perusahaan membangun pengendalian operasional yang terintegrasi antara Perusahaan dan entitas anak (*integrated control system*), sehingga terdapat keseragaman minimum atas titik kendali proses (*control points*), mekanisme pelaporan, serta disiplin pelaksanaan prosedur pada aktivitas operasional utama.

Scope of Internal Control

The Internal Control System includes controls on financial, operational, and compliance aspects, as explained below:

Financial Control

Financial control is directed at maintaining the reliability of financial reporting and accountability through policies, procedures, and key controls, including authorization, verification, reconciliation, segregation of duties, and asset safeguards. In addition to internal evaluations, the Company obtains an independent assessment of its internal control system through a financial statement audit by a Public Accounting Firm (KAP). Recommendations for strengthening controls are communicated to management through the PSA 62 Report and Management Letter as part of an ongoing effort to improve the quality of controls and the reliability of reporting.

Operational Control

Operational control ensures that business processes comply with established policies, standards, and procedures, and support the effectiveness and efficiency of business activities. As a holding company, the Company has established an integrated operational control system between the Company and its subsidiaries, ensuring minimum uniformity in process control points, reporting mechanisms, and disciplined procedural implementation across key operational activities.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengendalian kepatuhan diterapkan untuk memastikan seluruh aktivitas Perusahaan berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal yang berlaku, sekaligus memperkuat pencegahan *fraud* pada proses bisnis. Evaluasi atas kepatuhan perundang-undangan dikoordinasikan oleh Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan, termasuk melalui pengembangan program kepatuhan dengan mengacu pada ISO 37301:2021 *Compliance Management System*.

Untuk memperkuat efektivitas pengendalian kepatuhan, Perusahaan melaksanakan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis ISO 37301:2021,
2. Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Kepatuhan (*Compliance Management System Online* Multi Company/ COMPOS).
3. Membentuk *Compliance Officer* yang bertanggung jawab dalam memonitor dan memastikan seluruh aktivitas unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melakukan pelatihan dan edukasi kepada semua insan perusahaan mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan operasional perusahaan dan pemahaman tentang implementasi serta audit Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis ISO 37301:2021.
5. Mengembangkan dan terus-menerus menyesuaikan kebijakan internal perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.
6. Melakukan audit internal secara berkala untuk memeriksa dan memastikan semua operasi perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengkomunikasikan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan tidak hanya kepada karyawan tapi juga kepada stakeholder eksternal seperti pelanggan, pemasok dan mitra lainnya.

Compliance with Laws and Regulations

Compliance controls are implemented to ensure all Company activities are aligned with applicable laws and regulations and internal regulations, while strengthening fraud prevention in business processes. Evaluation of legal compliance is coordinated by the Governance and Compliance Department, through the development of a compliance program based on the ISO 37301:2021 Compliance Management System.

To strengthen the effectiveness of compliance controls, the Company has instigated the following initiatives:

1. Implemented an ISO 37301:2021-based Compliance Management System.
2. Developed a Compliance Management Application System (Compliance Management System Online Multi-Company/ COMPOS).
3. Established a Compliance Officer responsible for monitoring and ensuring that all work unit activities comply with applicable regulations.
4. Conducted training and education for all Company personnel regarding laws and regulations relevant to the company's operations and an understanding of the application and auditing of the ISO 37301:2021-based Compliance Management System.
5. Developed and continuously adjusted internal Company policies to ensure compliance with applicable regulations.
6. Conducted regular internal audits to review and ensure all Company operations are running in accordance with applicable laws and regulations.
7. Communicated the Company's commitment to compliance not only to employees but also to external stakeholders such as customers, suppliers, and other partners.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern ditinjau melalui evaluasi internal dan penilaian independen. Kompartemen Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan evaluasi pengendalian internal pada proses bisnis keuangan dan operasional dalam pelaksanaan audit, dengan hasil yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) beserta rekomendasi perbaikan kepada unit kerja terkait. Perusahaan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui mekanisme perbaikan yang dipantau secara berkala untuk memastikan penguatan pengendalian berjalan konsisten.

Review of Internal Control System Effectiveness

The effectiveness of the Internal Control System is reviewed through internal evaluations and independent assessments. The IAU evaluates internal controls across financial and operational business processes during audits. The results are outlined in an Audit Result Report (LHA) together with recommendations for improvements to relevant work units. The Company follows up on these recommendations through a regularly monitored improvement mechanism to ensure consistent control strengthening.

Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi efektivitas penerapan SPIP disajikan dalam tabel berikut:

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System Implementation Results

The evaluation of the effectiveness results of the SPIP implementation are presented in the following table:

Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
Evaluation of the Effectiveness of the Company's Internal Control System Implementation Results

Komponen Penerapan SPIP SPIP Implementation Components	Bobot Weight	2024			2025		
		Nilai Score	% Tingkat Capaian Achievement Level	Keterangan Description	Nilai Score	% Tingkat Capaian Achievement Level	Keterangan Description
Lingkungan Pengendalian Control Environment	30	26,96	89,87	Baik Good	**26,72**	**89,08**	**Baik** Good
Penilaian Risiko Risk Assessment	20	18,14	90,68	Sangat Baik Very Good	**17,04**	**85,19**	**Baik** Good
Aktivitas Pengendalian Control Activities	20	17,75	88,76	Baik Good	**17,47**	**87,34**	**Baik** Good
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	15	14,01	93,40	Sangat Baik Very Good	**12,75**	**84,99**	**Baik** Good
Aktivitas Pemantauan Monitoring Activities	15	14,28	95,23	Sangat Baik Very Good	**14,14**	**94,25**	**Sangat Baik** Very Good
Jumlah Total	**100**	**91,14**	**91,14**	**Sangat Baik** Very Good	**88,12**	**88,12**	**Baik** Good

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

Direksi bersama Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian intern Perusahaan telah memadai untuk mendukung pencapaian tujuan operasional, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini didasarkan pada hasil evaluasi penerapan SPIP, pelaksanaan audit internal oleh Satuan Pengawasan Intern beserta tindak lanjut atas rekomendasinya, serta masukan dari auditor eksternal melalui *management letter*. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa pengendalian utama (*key controls*) telah berjalan dan risiko-risiko material dapat dikelola pada tingkat yang dapat diterima. Perusahaan terus melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan, termasuk penguatan integrasi pengendalian di lingkungan Grup, peningkatan kualitas pemantauan, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi audit.

Statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors and the Board of Commissioners declare that the Company's internal control system is adequate to support the achievement of operational objectives, reliable reporting, and compliance with applicable laws and regulations. This statement is based on the evaluation of the Internal Audit System (SPIP), the internal audits by the Internal Audit Unit and the follow-up to their recommendations, and input from the external auditor through a management letter. Based on these reviews, the Board of Directors and the Board of Commissioners has assessed that key controls are in place and material risks are managed at an acceptable level. The Company continues to make improvements, including strengthening the integration of controls within the Group, improving the quality of monitoring, and accelerating the follow-up to audit recommendations.

Sistem Pengendalian Intern Perusahaan merupakan suatu kerangka terpadu yang dijalankan oleh manajemen *(risk owner)* melalui aktivitas pengendalian berbasis COSO, didukung oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan (mengacu ISO 31000), serta diawasi secara independen oleh Internal Audit yang menganut prinsip The IIA's *Three Lines Model*.

Evaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP) dilakukan dengan menggunakan *scorecard* yang dikembangkan oleh audit internal dengan mengacu kepada referensi dan ketentuan dari standar Pengendalian Internal yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO).

Evaluasi dilakukan dengan cara menilai kecukupan dan efektivitas 5 (lima) komponen Pengendalian Internal Perusahaan berdasarkan COSO *framework* yang terdiri dari:
1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi, dan
5. Pemantauan.

Merujuk kepada surat Nomor 01049/A/PA/A0101/IT/2026 tanggal 12 Januari 2026 menunjukkan hasil evaluasi di tahun 2025 di PTPI mendapatkan predikat, "Baik" yaitu skor 88,12. Hal tersebut memberikan peluang peningkatan di berbagai aspek, dan telah dikomunikasikan kepada fungsi terkait.

The Company's Internal Control System (ICS) is an integrated framework implemented by management (risk owners) through COSO-based control activities, supported by risk management and compliance functions (based on ISO 31000), and independently monitored by Internal Audit, which adheres to the principles of The IIA's Three Lines Model.

Evaluation of the Company's Internal Control System (ICS) effectiveness is conducted using a scorecard developed by internal audit, in accordance with the references and provisions of the Internal Control standards issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

The evaluation is conducted by assessing the adequacy and effectiveness of the five components of the Company's Internal Control based on the COSO framework, which consists of:
1. Control environment,
2. Risk assessment,
3. Control activities,
4. Information and communication, and
5. Monitoring.

Referring to Letter No. 01049/A/PA/A0101/IT/2026 dated January 12, 2026, the results of the 2025 evaluation at PTPI received a rating of "Good," with a score of 88.12. This will provide opportunities for improvements in various aspects and has been communicated to the relevant.

Manajemen Risiko
Risk Management

Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan pada tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN beserta Petunjuk Teknis Turunannya. Implementasi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta untuk memastikan pencapaian sasaran Perusahaan, termasuk target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dalam rangka memperkuat tata kelola dan memastikan penerapan manajemen risiko yang *prudent* dan konsisten, PT Danantara Asset Management (Persero) di tahun 2025 menerbitkan Pedoman Strategis Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 Anak Perusahaan dan untuk pengelolaan risiko kedepannya yang memuat arahan penguatan pengelolaan profil risiko Perusahaan melalui pendekatan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berbasis data. Pendekatan tersebut mencakup integrasi profil risiko dengan perencanaan bisnis dan RKAP, penetapan parameter dan *threshold* risiko, serta pengembangan analisis risiko kuantitatif seperti *expected loss, unexpected loss, tail loss*, dan pengukuran eksposur risiko lainnya. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerugian ekstrem, menguatkan strategi mitigasi, serta memastikan setiap eksposur risiko dijaga dalam batas yang dapat diterima untuk mendukung keberlanjutan kinerja dan nilai aset BUMN.

Sebagai wujud komitmen dalam penerapan pengelolaan risiko yang selaras dengan prinsip-prinsip manajemen risiko guna melindungi dan menciptakan nilai bagi Pemegang Saham dan Pupuk Indonesia Group, Direksi memastikan bahwa seluruh insan perusahaan di lingkungan Pupuk Indonesia Group memiliki komitmen untuk:

1. Menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada Model Tiga Lini (The IIA's *Three Lines Model*) dan prinsip tata kelola terintegrasi.
2. Memastikan kecukupan kebijakan, pedoman, prosedur, serta strategi manajemen risiko yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan.
3. Memastikan kecukupan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta pengembangan sistem informasi risiko.
4. Memastikan fungsi manajemen risiko dijalankan secara independen sesuai peran dan tanggung jawab yang ditetapkan.
5. Menyelaraskan pengelolaan risiko pada setiap aktivitas strategis, bisnis, dan operasional di seluruh jenjang Pupuk Indonesia Group dengan strategi dan proses bisnis Perusahaan.
6. Memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
7. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola risiko, menyediakan dukungan anggaran dan teknologi informasi secara memadai, serta memperkuat budaya sadar risiko sebagai bagian dari budaya Perusahaan.

The Risk Management in the Company in 2025 was carried out by referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and its Derivative Technical Instructions. This is carried out in an integrated manner as part of strengthening good corporate governance and ensuring the achievement of the Company's targets, including the Company's Work Plan and Budget (RKAP)

To strengthen governance and ensure prudent and consistent risk management, PT Danantara Asset Management (Persero) issued Strategic Guidelines for the Preparation of the 2026 Corporate Work Plan & Budget (RKAP) for Subsidiaries and for future risk management in 2025. These guidelines include strengthening the Company's risk profile management through a more measurable, integrated, and data-driven approach. This approach includes integrating the risk profile with business planning and the RKAP, establishing risk parameters and thresholds, and developing quantitative risk analysis, such as expected loss, unexpected loss, tail loss, and other risk exposure measurements. This initiative aims to anticipate potential extreme losses, strengthen mitigation strategies, and ensure that each risk exposure is maintained within acceptable limits to support the sustainable performance and value of SOE assets.

As a manifestation of its commitment to implementing risk management in line with risk management principles to protect and create value for Shareholders and Pupuk Indonesia Group, the Board of Directors ensures that all employees within Pupuk Indonesia Group are committed to:

1. Implementing risk management based on the IIA's Three Lines Model and integrated governance principles.
2. Ensuring the adequacy of risk management policies, guidelines, procedures, and strategies that support effective implementation of the Company's risk management.
3. Ensuring the adequacy of risk management process, including risk identification, measurement, monitoring, and control, as well as the development of risk information system.
4. Ensuring that risk management function is carried out independently in accordance with the established roles and responsibilities.
5. Aligning risk management across all strategic, business, and operational activities at all levels of Pupuk Indonesia Group with the Company's strategy and business process.
6. Ensuring that risk management functions are carried out in accordance with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions/ Ministerial decisions.
7. Developing the competency of human resources for risk management, providing adequate budgetary and information technology support, and strengthening a risk-aware culture as part of the Company's culture.

8. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko Pupuk Indonesia Group secara berkala dalam rangka mendorong perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

Implementasi Manajemen Risiko yang efektif dan efisien dilakukan secara berkelanjutan pada setiap fungsi dan hierarki dalam Perusahaan. Dalam setiap tahapan implementasi, Perusahaan secara sistematis melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap seluruh risiko yang berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Perusahaan. Setiap risiko yang teridentifikasi dikategorikan berdasarkan taksonomi risiko yang berlaku di Perusahaan serta dikelola secara terintegrasi dengan dukungan sistem informasi Manajemen Risiko guna memastikan efektivitas pemantauan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berbasis risiko.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Mengacu pada pasal 49 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/2023, dalam rangka penerapan manajemen risiko dimana BUMN dikelompokkan berdasarkan kategori BUMN dan klasifikasi risiko BUMN berdasarkan intensitas risiko masing-masing BUMN. Berdasarkan hal tersebut, PT Pupuk Indonesia (Persero) termasuk dalam Kategori BUMN Konglomerasi dan Klasifikasi Sistemik A.

Berdasarkan pada Pasal 56, PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku BUMN dengan Kategori BUMN Konglomerasi dan Klasifikasi Sistemik A memiliki kewajiban pemenuhan seluruh Organ Pengelola Risiko. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Fungsi Manajemen Risiko di PT Pupuk Indonesia (Persero) dilaksanakan di bawah koordinasi Direktur Manajemen Risiko yang membawahi SVP Manajemen Risiko Korporasi yang didukung oleh tiga departemen dan satu fungsional, yaitu: (1) Departemen Perencanaan & Pelaporan Manajemen Risiko, (2) Departemen Manajemen Risiko Proyek & Terintegrasi, (3) Departemen Pengendalian Internal Korporasi, serta (4) Fungsional Kebijakan & Infrastruktur Manajemen Risiko. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PTPI Nomor : 92/A/HK/E0500/SK/2025 tanggal 01 Oktober 2025.

8. Conducting regular evaluations of the implementation of Pupuk Indonesia Group's risk management to encourage continuous improvement and enhancement.

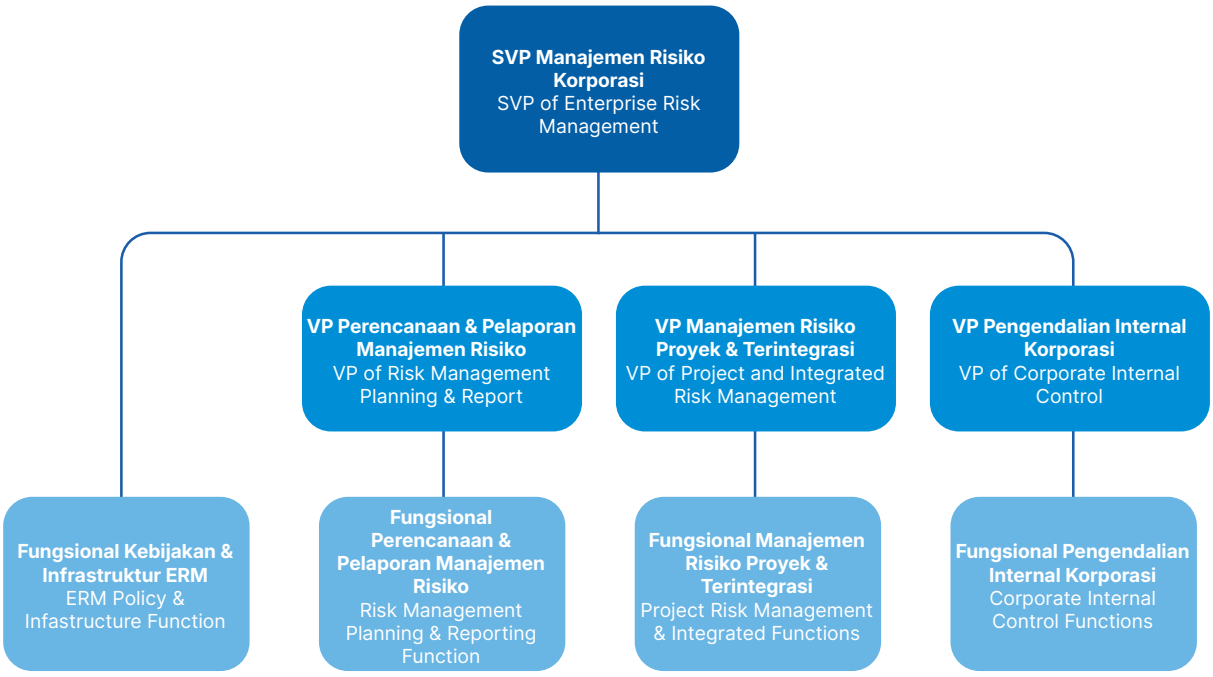
Effective and efficient Risk Management is carried out continuously across every function and hierarchy within the Company. At each stage of implementation, the Company systematically identifies, analyzes, and evaluates all risks that could potentially hinder the achievement of Company Goals. Each identified risk is categorized based on the Company's applicable risk taxonomy and managed in an integrated manner with the support of a Risk Management information system to ensure effective monitoring, control, and risk-based decision-making.

Risk Management Organizational Structure

Referring to Article 49 of the Minister of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/2023, in the context of implementing risk management, SOEs are grouped by category and classified based on the risk intensity of each SOE. Based on this, PT Pupuk Indonesia (Persero) is included in the Conglomerate SOE Category and Systemic Classification A.

Based on Article 56, PT Pupuk Indonesia (Persero), as a state-owned enterprise (SOE) with a Conglomerate SOE Category and Systemic Classification A, is obligated to fulfill all Risk Management Organs. In line with these provisions, the Risk Management Function at PT Pupuk Indonesia (Persero) is carried out under the coordination of the Director of Risk Management, who supervises the SVP Corporate Risk Management, supported by three departments and one functional unit: (1) the Risk Management Planning & Reporting Department, (2) the Project & Integrated Risk Management Department, (3) the Corporate Internal Control Department, and (4) the Risk Management Policy & Infrastructure Function. This is in accordance with PTPI Board of Directors Decree No. 92/A/HK/E0500/SK/2025 dated October 1, 2025.

Organisasi Kompartemen Manajemen Risiko Korporasi
Corporate Risk Management Compartment Organization



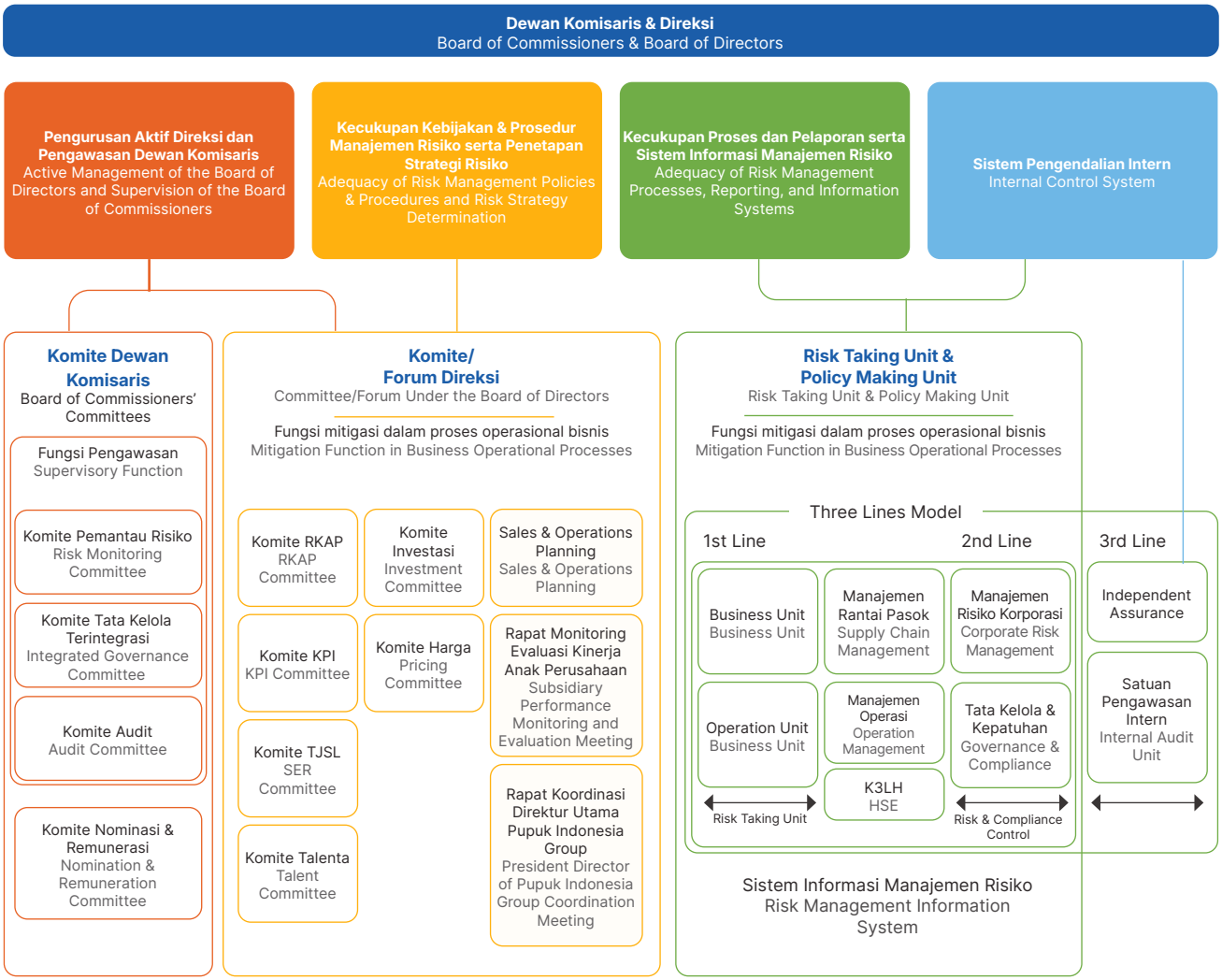
Hingga akhir Desember 2025, jumlah karyawan yang tergabung dalam Fungsi Manajemen Risiko Korporasi PTPI sebanyak 18 orang, dengan rincian sebagai berikut:

At the end of December 2025, the number of employees in PTPI's Corporate Risk Management Function was 18, with details as follows:

Fungsi Function	**Jumlah Karyawan** Number of Employees
SVP Manajemen Risiko Korporasi SVP of Enterprise Risk Management	1
Perencanaan & Pelaporan Manajemen Risiko Risk Management Planning & Reporting	6
Manajemen Risiko Proyek & Terintegrasi Project Risk Management & Integration	4
Pengendalian Internal Korporasi Corporate Internal Control	4
Fungsional Kebijakan & Infrastruktur Manajemen Risiko Risk Management Policy & Infrastructure Function	3
Jumlah Total	**18**

Framework Manajemen Risiko

Risk Management Framework



Pedoman Manajemen Risiko

Pedoman Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor Dokumen PI-SMT-PD-012 Rev 0 tanggal 30 September 2025 sebagai Kebijakan dan Pedoman dalam implementasi manajemen risiko di PTPI mengatur antara lain Kerangka Tata Kelola dan Struktur Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, Penilaian Tingkat Kematangan Risiko/*Risk Maturity Index* (RMI), Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU), Manajemen Risiko Proyek dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

PTPI juga telah menyusun Prosedur Pendukung Implementasi Pedoman Manajemen Risiko antara lain Prosedur Kajian Risiko Aksi Korporasi, Prosedur Pengujian Sistem Pengendalian Intern, Prosedur *Business Continuity Plan*, Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Risiko, Prosedur Pengelolaan *Loss Event Database* serta Prosedur Penerapan Sistem Deteksi Dini Risiko.

Strategi Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero)

Strategi pengelolaan risiko dikembangkan Perusahaan melalui penerapan pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam aktivitas operasional sehari-hari secara efektif, dengan dukungan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam penyusunan metrik strategi risiko, Perusahaan menggunakan pendekatan pemetaan hubungan antara taksonomi risiko dengan risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi untuk menentukan parameter risiko yang paling relevan dan material terhadap eksposur risiko Perusahaan. Hasil pemetaan tersebut kemudian diprioritisasi sehingga diperoleh metrik atau parameter risiko yang mampu merepresentasikan berbagai aspek risiko secara lebih komprehensif dan mendukung proses pemantauan eksposur risiko secara berkelanjutan.

Risk Appetite Statement PT Pupuk Indonesia (Persero)

Dalam melakukan penyusunan *Risk Appetite Statement* (RAS) PTPI mempertimbangkan karakteristik dari seluruh lini bisnis Perusahaan. PTPI melakukan penyelarasan dengan tema strategis perusahaan dan menggunakan tiga basis acuan dalam penyusunan yaitu RAS KBUMN, data historis, dan tujuan strategis Perusahaan (*management appetite*). Pernyataan sikap risiko PTPI dituangkan dalam 4 sikap yaitu tidak toleran, strategis, konservatif dan moderat. Pemilihan sikap risiko atas aktivitas bisnis mempertimbangkan kemampuan Perusahaan untuk mengeksploitasi *opportunity*, baik *opportunity to improve* maupun *opportunity to grow*. Perusahaan berkomitmen untuk melakukan perbaikan internal agar proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk sikap risiko tidak toleran, konservatif, dan moderat. Selanjutnya, Perusahaan berkomitmen untuk memanfaatkan peluang pasar sehingga dapat memaksimalkan keuntungan untuk sikap risiko strategis.

Risk Management Guidelines

PT Pupuk Indonesia (Persero) Risk Management Guidelines, Document No. PI-SMT-PD-012 Rev. 0, dated September 30, 2025, serves as the Policy and Guidelines for implementing risk management at PTPI. These guidelines regulate the Risk Management Governance Framework and Structure, Risk Management Process, Risk Maturity Index (RMI) Assessment, Internal Control System, Business Continuity Management (BCM), Project Risk Management, and Risk Management Information System.

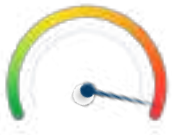
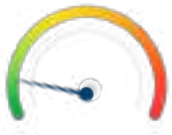
PTPI has also developed supporting procedures for the Risk Management Guidelines, including procedures for corporate action risk assessment, internal control system testing, business continuity planning, risk preparation and reporting, loss event database management, and early risk detection system procedures.

PT Pupuk Indonesia (Persero) Risk Strategy

The Company develops its risk management strategy by effectively implementing integrated risk management into its daily operational activities, with active oversight from the Board of Directors and the Board of Commissioners. In developing risk strategy metrics, the Company uses an approach that maps the relationship between risk taxonomies and the key risks that have been identified to determine the risk parameters most relevant and material to the Company's risk exposure. The results of this mapping are then prioritized to identify risk metrics or parameters capable of representing various aspects of risk more comprehensively and supporting the continuous monitoring of risk exposure.

PT Pupuk Indonesia (Persero) Risk Appetite Statement

When preparing its Risk Appetite Statement (RAS), PTPI considered the characteristics of all of the Company's business lines. PTPI aligns these with the Company's strategic theme and uses three reference bases: the RAS of BUMN, historical data, and the Company's strategic objectives (management appetite). PTPI's risk appetite statement is outlined in four levels: intolerant, conservative, conservative, and moderate. The selection of a risk appetite for business activities considers the Company's ability to exploit opportunities, both opportunities for improvement and opportunities for growth. The Company is committed to internal improvements to make business processes more effective and efficient for its intolerant, conservative, and moderate risk appetites. Also, the Company is committed to capitalizing on market opportunities to maximize profits for its strategic risk appetite.

No	Kategori Risiko Risk Category	Risk Appetite Statement (RAS) Risk Appetite Statement (RAS)	Sikap Attitude
1	Strategis Strategy	Pupuk Indonesia memiliki sikap strategis terhadap risiko terkait transformasi bisnis yang mencakup restrukturisasi, pengembangan usaha termasuk di dalamnya pengembangan proyek strategis, serta inisiatif strategis lainnya. Pupuk Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah transformasi didukung oleh analisis risiko yang komprehensif dan perencanaan yang matang demi mendukung pertumbuhan jangka panjang dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Pupuk Indonesia has a strategic attitude to risks associated with business transformation, encompassing restructuring, business development, including strategic project development, and other strategic initiatives. Pupuk Indonesia is committed to ensuring each transformation step is supported by comprehensive risk analysis and thorough planning to support long-term growth and adapt to market changes.	Strategis Strategy 
2	Pasar dan Makroekonomi Market and Macroeconomics	Pupuk Indonesia memiliki sikap moderat terhadap pengelolaan risiko pasar dan makroekonomi. Pupuk Indonesia akan fokus pada penggunaan strategi mitigasi dan instrumen keuangan untuk menghadapi volatilitas harga bahan baku dan fluktuasi kurs mata uang. Pupuk Indonesia juga akan secara aktif menyesuaikan operasional perusahaan untuk mengurangi dampak perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi demi mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pupuk Indonesia has a moderate attitude to market and macroeconomic risk management. Pupuk Indonesia will focus on the use of mitigation strategies and financial instruments to address raw material price volatility and currency fluctuations. Pupuk Indonesia will also actively adjust its operations to mitigate the impact of changing policies and economic conditions in order to maintain sustainable growth.	Moderat Moderate 
3	Keuangan Finance	Pupuk Indonesia memiliki sikap konservatif terhadap risiko terkait keuangan, seperti risiko yang terkait pemenuhan kewajiban keuangan, struktur keuangan, dan termasuk di dalamnya risiko subsidi, risiko pendanaan, serta risiko keuangan lainnya. Pupuk Indonesia berupaya untuk mengelola sumber pendanaan melalui manajemen keuangan yang kompeten demi menjaga kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pupuk Indonesia has a conservative attitude towards financial risks, such as those related to meeting financial obligations, its financial structure, including subsidy risk, funding risk, and other financial risks. Pupuk Indonesia strives to manage its funding sources through competent financial management to ensure the company's business continuity in both the short and long term.	Konservatif Conservative 
4	Hukum, Reputasi, dan Kepatuhan Legal, Reputation, and Compliance	Pupuk Indonesia memiliki sikap tidak toleran terhadap risiko terkait etika bisnis, *fraud*, tata kelola, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang -undangan. Pupuk Indonesia berkomitmen untuk memitigasi risiko bisnis eksisting maupun rencana pengembangan bisnis dan integrasi bisnis pupuk dengan memastikan keamanan data rahasia, kepatuhan terhadap undang -undang dan peraturan yang relevan serta uji tuntas yang komprehensif. Pupuk Indonesia has a zero-tolerance attitude towards risks related to business ethics, fraud, governance, and compliance with laws and regulations. Pupuk Indonesia is committed to mitigating existing business risks, as well as planned business development and fertilizer business integration, by ensuring the security of confidential data, compliance with relevant laws and regulations, and comprehensive due diligence.	Tidak Toleran Intolerant 
5	Proyek Project	Pupuk Indonesia memiliki sikap konservatif terhadap risiko terkait proyek, baik perencanaan, eksekusi, hingga kualitas proyek guna mendukung pertumbuhan perusahaan ke depannya. Pupuk Indonesia akan menjamin perencanaan proyek yang menyeluruh dengan prosedur pengawasan dan kontrol yang ketat untuk memastikan seluruh elemen proyek terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Pupuk Indonesia has a conservative attitude towards project-related risks, from planning and execution to quality, to support the company's future growth. Pupuk Indonesia ensures comprehensive project planning with strict monitoring and control procedures to ensure all project elements are realized according to the established plan.	Konservatif Conservative 
6	Teknologi Informasi & Keamanan Siber Information Technology & Cybersecurity	Pupuk Indonesia memiliki sikap tidak toleran terhadap risiko yang berkaitan dengan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Pupuk Indonesia tidak akan menoleransi risiko yang mengancam integritas data pribadi dan akan terus berkomitmen untuk menerapkan kontrol keamanan siber yang ketat demi memastikan operasional bisnis yang aman dan terlindungi. Pupuk Indonesia has a conservative attitude towards risks associated with information technology. Pupuk Indonesia is committed to implementing effective information systems management to ensure availability and reliability to support efficient operational and business activities.	Tidak Toleran Intolerant 
		Pupuk Indonesia memiliki sikap konservatif terhadap risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pupuk Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan sistem informasi yang efektif guna memastikan *availability* dan *reliability* untuk mendukung aktivitas operasional dan bisnis yang efisien. Pupuk Indonesia has a conservative attitude towards risks associated with information technology. Pupuk Indonesia is committed to implementing effective information systems management to ensure availability and reliability to support efficient operational and business activities.	Konservatif Conservative 

No	Kategori Risiko Risk Category	Risk Appetite Statement (RAS) Risk Appetite Statement (RAS)	Sikap Attitude
7	Sosial dan Lingkungan Social and Environmental	Pupuk Indonesia memiliki sikap konservatif terhadap risiko yang berkaitan dengan *Environment*, *Social*, dan *Governance* (ESG). Pupuk Indonesia akan mengelola risiko terkait lingkungan dengan bertanggung jawab, mempromosikan kesejahteraan sosial baik untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Pupuk Indonesia has a conservative attitude towards risks related to Environment, Social, and Governance (ESG). Pupuk Indonesia will manage environmental risks responsibly, promoting social welfare, and achieving sustainable goals.	Konservatif Conservative 
8	Operasional Operational	Pupuk Indonesia memiliki sikap tidak toleran terhadap risiko terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan menempatkan keselamatan karyawan dan masyarakat sebagai prioritas utama. Pupuk Indonesia berkomitmen untuk mematuhi seluruh standar terkait K3 dan menjamin kepatuhan penuh terhadap peraturan yang berlaku. Pupuk Indonesia has a zero-tolerance attitude towards Occupational Health and Safety (OHS) risks, prioritizing the safety of employees and the community. Pupuk Indonesia is committed to adhering to all OHS standards and ensuring full compliance with applicable regulations.	Tidak Toleran Intolerant 
		Pupuk Indonesia memiliki sikap konservatif terhadap risiko operasional yang mencakup operasional pengadaan, produksi, distribusi dan pemasaran untuk lini bisnis pupuk dan non pupuk. Pupuk Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan solusi pertanian berkualitas tinggi demi mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan nasional Indonesia. Pupuk Indonesia has a conservative attitude towards operational risk, encompassing procurement, production, distribution, and marketing operations for its fertilizer and non-fertilizer business lines. Pupuk Indonesia is also committed to improving the quality of its human capital to create high-quality agricultural solutions to support Indonesia's national food security and self-sufficiency program.	Konservatif Conservative 

Penguatan Organisasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Pupuk Indonesia Group, selama tahun 2025 dilakukan penguatan organisasi manajemen risiko pada beberapa entitas Anak Perusahaan melalui pembentukan fungsi Direktorat Manajemen Risiko.

Penguatan tersebut diwujudkan dengan terbentuknya Direktur Manajemen Risiko pada PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Kujang Cikampek.

Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan peran strategis manajemen risiko sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan, penguatan pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang lebih proaktif serta adaptif terhadap dinamika bisnis dan transformasi perusahaan.

Strengthening the Risk Management Organization

As part of the Company's commitment to strengthening corporate governance and increasing the effectiveness of risk management implementation within PI Group, the risk management organization was enhanced in several subsidiaries by establishing a Risk Management Directorate function in 2025.

Such enhancement was pursued by establishing Risk Management Directors at PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, and PT Pupuk Kujang Cikampek.

This step reflects the Company's commitment to enhancing risk management's strategic role as an integral part of decision-making process, internal control enhancement, and risk management more proactively and adaptively to business dynamics and Company transformation.

Pengelolaan Risiko

Risiko Utama/*Risk That Matters* (RTM) Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian rantai pasokan, dan tingginya inflasi harga pangan, Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi domestik. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penetapan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton serta perbaikan infrastruktur pertanian guna mendukung produktivitas petani.

Risk Management

Company Key Risks/Risks That Matter (RTM)

Throughout 2025, despite global challenges such as climate change, supply chain uncertainty, and high food price inflation, the Indonesian government continued to strengthen national food security by increasing domestic production. One strategic step taken was allocating 9.55 million tons of subsidized fertilizer and improving the agricultural infrastructure to support farmer productivity.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, PT Pupuk Indonesia (Persero) berperan strategis dalam memastikan ketersediaan pupuk yang memadai, tepat waktu, dan berkualitas, serta meningkatkan efektivitas distribusi melalui digitalisasi sistem distribusi dan pengelolaan jaringan logistik. Perusahaan juga melakukan efisiensi produksi, diversifikasi produk kimia, serta transformasi SDM untuk meningkatkan daya saing.

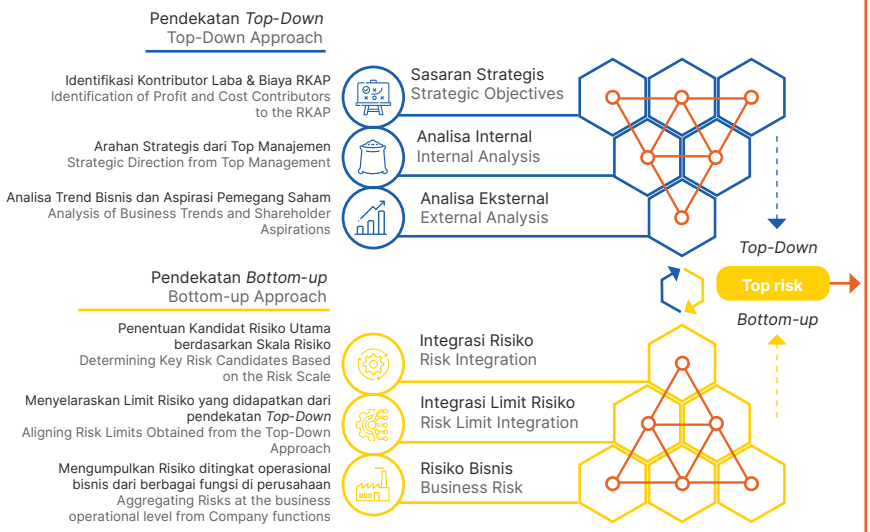
Sementara itu, ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh tingginya suku bunga, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi perdagangan tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi dalam menyusun strategi bisnis ke depan. Dengan berbagai dinamika tersebut, secara umum pengelolaan risiko Pupuk Indonesia Group sepanjang tahun 2025 berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran korporasi RKAP 2025, terlihat dari produksi Pupuk hingga akhir Desember 2025 sebesar 12.533.088 Ton atau 99,3% dari target RKAP 2025. Pada sektor Non Pupuk, produksi hingga akhir Desember 2025 sebesar 6.628.034 Ton atau 101,4% dari target RKAP 2025.

Risiko utama PTPI yang merupakan risiko-risiko yang paling berpengaruh terhadap pencapaian target RKAP telah diidentifikasi melalui pendekatan yang mengintegrasikan Metodologi *Top-Down* & *Bottom-Up*, sehingga memungkinkan identifikasi risiko secara komprehensif dari perspektif strategis maupun operasional.

In line with this policy, PT Pupuk Indonesia (Persero) plays a strategic role in ensuring adequate, timely, and high-quality fertilizer availability, as well as increasing distribution effectiveness through digitalization of its distribution system and logistics network management. The Company is also implementing production efficiency, chemical product diversification, and human capital transformation to enhance its competitiveness.

While, global economic uncertainty influenced by high interest rates, geopolitical tensions, and trade fragmentation remains a risk that must be anticipated in developing future business strategies. Given these dynamics, Pupuk Indonesia Group's overall risk management throughout 2025 was effective in supporting the achievement of its corporate targets in the 2025 Work Plan and Budget (RKAP). This was evident in fertilizer production of 12,533,088 tons by the end of December 2025, or 99.3% of the 2025 RKAP target. For the non-fertilizer sector, production by the end of December 2025 was 6,628,034 tons, or 101.4% of the 2025 RKAP target.

PTPI's key risks, those most impactful to achieving its RKAP targets, have been identified through an approach that integrates top-down and bottom-up methodologies, enabling comprehensive risk identification from both strategic and operational perspectives.



Top Risk Pupuk Indonesia Tahun 2025
Pupuk Indonesia's Top Risks in 2025

1. **RTM-01 – Risiko Strategis**
   Kinerja Rekind tidak membaik
   RTM-01 – Strategic Risk
   Rekind's performance is not improving
2. **RTM-02 – Risiko Keuangan**
   Kesehatan Finansial Perusahaan menurun
   RTM-02 – Financial Risk
   The Company's financial health is declining
3. **RTM-03 – Risiko Hukum, Reputasi & Kepatuhan**
   Ketidaksesuaian Penyaluran dan Penyerapan Pupuk PSO sesuai dengan Ketentuan
   RTM-03 – Legal, Reputation & Compliance
   Risk Distribution and Absorption of PSO Fertilizer is not in accordance with regulations
4. **RTM-04 – Risiko Proyek**
   Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pengembangan
   RTM-04 – Project Risk
   Delays in Development Project Implementation
5. **RTM-05 – Risiko Operasional**
   Ketidakefisienan Pengelolaan dan Operasional Pabrik
   RTM-05 – Operational Risk
   Factory Management and Operational Inefficiencies
6. **RTM-07 – Risiko Operasional**
   Hambatan Pasokan Bahan Baku Utama
   RTM-07 – Operational Risk
   Obstacles in Supply of Key Raw Materials
7. **RTM-06 – Risiko Operasional**
   Penjualan Produk Komersil di Bawah Rencana
   RTM-06 – Operational Risk
   Commercial Product Sales Below Plan
8. **RTM-08 – Risiko Operasional**
   Terjadinya Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality
   RTM-08 – Operational Risk
   Occurrence of a Workplace Accident Resulting in a Fatality
9. **RTM-09 – Risiko Operasional**
   Ketidakcukupan SDM Kunci untuk mendukung transformasi bisnis
   RTM-09 – Operational Risk
   Inadequate Key HC to Support Business Transformation

Seluruh risiko utama tersebut telah diperhitungkan nilai inheren dan residual yang selanjutnya diproyeksikan ke dalam target RKAP Perusahaan. Lebih lanjut, PTPI juga telah memperhitungkan nilai eksposur risiko untuk setiap risiko utama dengan mempertimbangkan nilai dampak dan peluang keterjadian risiko. Seluruh nilai eksposur inheren dipastikan telah berada pada level yang dapat diterima oleh Perusahaan.

All major risks have been calculated for inherent and residual values, and then projected into the Company's Work Plan and Budget (RKAP) targets. Furthermore, PTPI has also calculated the risk exposure value for each major risk, taking into account the impact and probability of risk occurrence. All inherent exposure values are ensured to be at acceptable levels for the Company.

Dalam rangka memastikan pengelolaan risiko yang efektif, setiap risiko utama telah dilengkapi dengan rencana mitigasi yang terintegrasi dalam program kerja RKAP 2025. Selain itu, setiap risiko yang ada di perusahaan telah memiliki *Key Risk Indicators* (KRI) sebagai *Early Warning Signal* (EWS) terjadinya risiko di PTPI. KRI yang digunakan merupakan indikator yang bersifat *leading/ current indicator*, sehingga memberikan ruang bagi manajemen untuk menyiapkan atau melakukan langkah antisipatif dan rencana perlakuan sebelum risiko terjadi. Pemilihan KRI juga telah mempertimbangkan kesiapan perusahaan dalam pemantauannya, sehingga KRI dipastikan dapat dimonitor dan digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan atas risiko yang mungkin terjadi. Hingga akhir Desember 2025, RTM konsolidasi yang dikelola oleh Pupuk Indonesia Group sebanyak 9 (sembilan) RTM yang ditunjukkan dalam Matriks Risiko sebagai berikut:

To ensure effective risk management, each major risk has a mitigation plan integrated into the 2025 RKAP work program. Also, each Company risk has Key Risk Indicators (KRI) as an Early Warning Signal (EWS) for risk occurrence at PTPI. The KRIs used are leading/current indicators, providing management with the opportunity to prepare or implement anticipatory measures and treatment plans before the risk occurs. The selection of KRIs also takes into account the Company's readiness for monitoring, ensuring that they can be monitored and used by management to make decisions regarding potential risks. As of the end of December 2025, the Pupuk Indonesia Group managed nine consolidated Risk Management Risks (RTMs), as shown in the Risk Matrix below:

Keterangan:
1. RTM-01 Kinerja Keuangan Rekind Tidak Membaik
2. RTM-02 Kesehatan Finansial Perusahaan Menurun
3. RTM-03 Ketidaksesuaian Penyaluran dan Penyerapan Pupuk PSO sesuai dengan Ketentuan
4. RTM-04 Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pengembangan
5. RTM-05 Ketidakefisienan Pengelolaan dan Operasional Pabrik
6. RTM-06 Hambatan Pasokan Bahan Baku Utama
7. RTM-07 Penjualan Produk Komersil di Bawah Rencana
8. RTM-08 Terjadinya Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality*
9. RTM-09 Ketidakcukupan SDM Kunci Untuk Mendukung Transformasi Bisnis

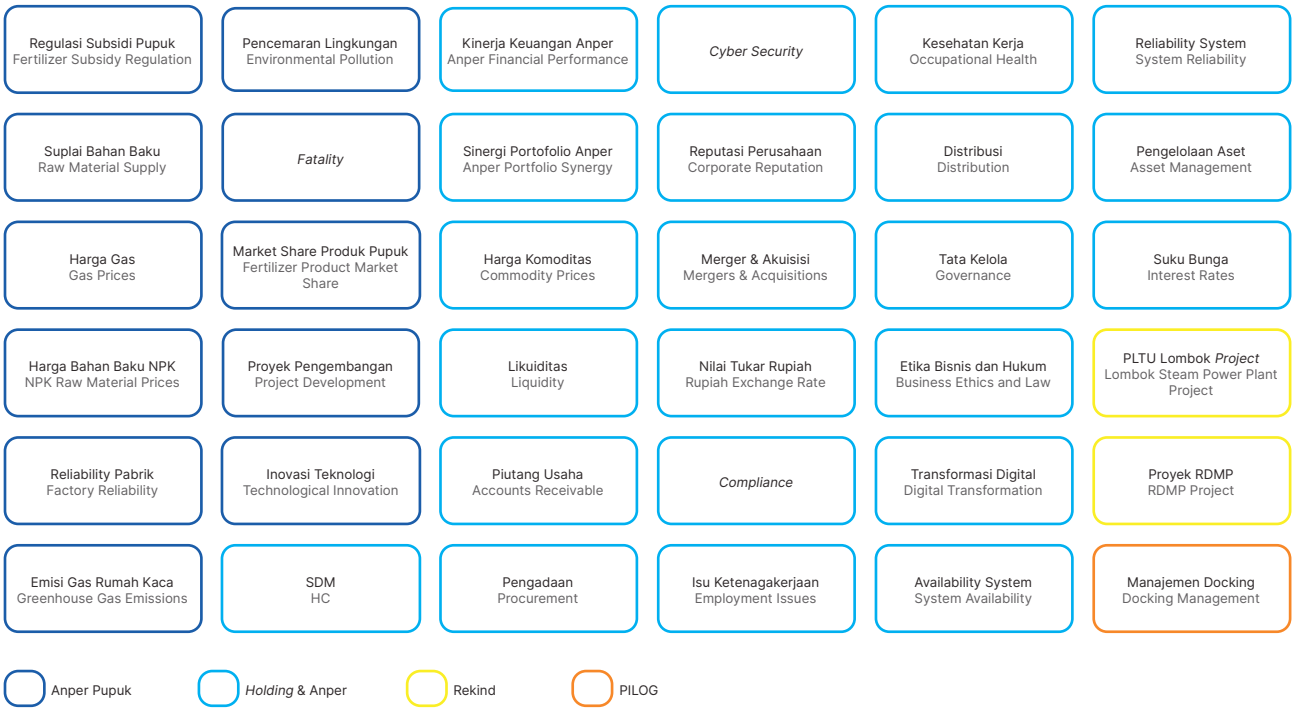
Description:
1. RTM-01 Rekind's Financial Performance Has Not Improved
2. RTM-02 The Company's Financial Health Has Decreased
3. RTM-03 Non-Compliance with Provisions for Distribution and Absorption of PSO Fertilizer
4. RTM-04 Delays in Development Project Implementation
5. RTM-05 Inefficiencies in Factory Management and Operations
6. RTM-06 Obstacles in Supply of Key Raw Materials
7. RTM-07 Commercial Product Sales Below Plan
8. RTM-08 Occurrence of Workplace Accidents Resulting in a Fatality
9. RTM-09 Inadequate Key HC to Support Business Transformation

Risiko Operasional Pupuk Indonesia Group

Perusahaan melakukan pengelolaan risiko sejumlah 2.979 risiko yang ada di seluruh Pupuk Indonesia Group. Dari keseluruhan risiko tersebut, terdapat beberapa risiko strategis di antaranya:

Pupuk Indonesia Group Operational Risk

The company manages 2,979 risks across the Pupuk Indonesia Group. Of these risks, several strategic risks include:



Kajian Risiko Aksi Korporasi

Sesuai dengan Prosedur Penyusunan Kajian Risiko untuk Aksi Korporasi, aksi korporasi diartikan sebagai tindakan atau keputusan Direksi/Perusahaan yang memerlukan: (a) persetujuan tertulis Dewan Komisaris; atau (b) tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam rangka memberikan assurance kepada Manajemen terhadap proses pengambilan keputusan atas pelaksanaan aksi korporasi, Perusahaan melakukan penyusunan kajian risiko aksi korporasi secara terstruktur sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah menyusun 69 (enam puluh sembilan) Kajian Risiko Aksi Korporasi yang mencakup berbagai aktivitas strategis dan bisnis, antara lain rencana pengembangan usaha dan investasi, pemanfaatan dan optimalisasi aset, kerja sama operasional, dan pengembangan inisiatif bisnis baru di lingkungan Pupuk Indonesia Group.

Pengembangan Kompetensi & Kapabilitas Manajemen Risiko

Dalam rangka peningkatan kompetensi organ pengelola risiko, Perusahaan secara periodik menyelenggarakan sertifikasi dan *Training, Sharing Session*, dan Sosialisasi Bidang Manajemen Risiko Organ Pengelola Risiko di Perusahaan, hal ini sejalan dengan implementasi Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN Nomor SK-3/DKU. MBU/05/2023 yang mengatur bahwa setiap Organ Pengelola Risiko wajib memenuhi kualifikasi di bidang manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum dan kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, HSSE, *data analytics* dan ESG. Adapun rincian permohonan kualifikasi sertifikasi dan pelatihan Organ Pengelola Risiko Perusahaan sampai dengan Desember 2025 sebagai berikut:

Corporate Action Risk Assessment

In accordance with the Procedures for Preparing Risk Assessments for Corporate Actions, a corporate action is defined as an action or decision by the Board of Directors or the Company that requires: (a) the written approval of the Board of Commissioners; or (b) the written response of the Board of Commissioners and the written approval of the General Meeting of Shareholders, as stipulated in the Company's Articles of Association.

To provide assurance to Management regarding the decision-making process for the implementation of corporate actions, the Company conducts a structured preparation of corporate action risk assessments as part of the application of the principle of prudence and corporate risk management.

Throughout 2025, the Company has prepared 69 (sixty-nine) Corporate Action Risk Assessments covering various strategic and business activities, including business development and investment plans, asset utilization and optimization, operational cooperation, and the development of new business initiatives within the Pupuk Indonesia Group.

Competency Development & Risk Management Capabilities

To develop the competency of risk management bodies, the Company periodically organizes certification and training sessions, sharing sessions, and supervision programs for Risk Management. This is in line with the Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Bodies in BUMN No. SK-3/DKU.MBU/05/2023, which stipulates that Risk Management Bodies must meet qualifications in the areas of risk management, fraud, business, corporate business activities, law and compliance, finance, accounting, auditing, HSSE, data analytics, and ESG. Details of the qualification requirements for certification and training for the Company's Risk Management Bodies until December 2025 are as follows:



Nama Entitas Entity	Kategori Category	Klasifikasi Classification	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Komite Audit Audit Committee
			Realisasi Implementation	Realisasi Implementation	Realisasi Implementation
PT Pupuk Indonesia	Konglomerasi Conglomerate	Sistemik A Systemic A	100%	100%	100%
PT Petrokimia Gresik	Individu Individual	Sistemik A Systemic A	100%	100%	100%
PT Pupuk Kujang	Individu Individual	Sistemik A Systemic A	100%	100%	100%
PT Pupuk Kalimantan Timur	Individu Individual	Sistemik A Systemic A	100%	100%	100%
PT Pupuk Iskandar Muda	Individu Individual	Sistemik A Systemic A	100%	100%	100%
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Individu Individual	Sistemik A Systemic A	100%	100%	100%
PT Rekayasa Industri	Konglomerasi Conglomerate	Sistemik A Systemic A	100%	100%	100%
PT Pupuk Indonesia Niaga	Individu Individual	Netral Neutral	83%	83%	100%
PT Pupuk Indonesia Logistik	Individu Individual	Netral Neutral	100%	100%	100%
PT Pupuk Indonesia Pangan	Individu Individual	Netral Neutral	100%	100%	100%
Total Organ			98%	98%	100%

Selain itu, Perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi melalui pelatihan, *sharing session*, dan sosialisasi di bidang Manajemen Risiko dan bidang lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 yang mencakup 8 topik, yaitu *fraud*, bisnis, kegiatan usaha, kepatuhan, keuangan, akuntansi dan/atau audit. Hingga akhir Desember 2025, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyelenggarakan berbagai kegiatan *training*, *sharing session*, dan *workshop* guna memperkuat kompetensi serta kapabilitas pengelolaan risiko di lingkungan Perusahaan, sebagai berikut:

1. Pelatihan melalui *Learning Experience Platform* Pupuk Indonesia untuk Unit Manajemen Risiko, SPI, *Risk Owner* dan *Risk Officer* dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau audit.
2. Pelatihan ICOFR KBUMN pada tanggal 18 – 19 Februari 2025.
3. Webinar Manajemen Risiko *Series* 1: "*Dive into Sustainability Disclosure*" pada tanggal 11 Juni 2025.
4. *Sharing Session* & *Workshop* "*Strengthening Internal Control System to Improve Risk Management* Pupuk Indonesia Group" pada tanggal 25 – 26 Juni 2025.
5. Pelatihan Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 6 – 7 Februari 2025.
6. *Training* IFRS S1 dan IFRS S2 tanggal 23 – 24 April 2025.

In addition, the Company continuously organizes competency development programs through training, sharing sessions, and socialization of Risk Management and other areas, in accordance with the Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs in BUMN (SOEs) No. SK-3/DKU.MBU/05/2023, which covers eight topics: fraud, business, business activities, compliance, finance, accounting, and/or auditing. By the end of December 2025, PT Pupuk Indonesia (Persero) held training activities, sharing sessions, and workshops to strengthen risk management competencies and capabilities within the Company, as follows:

1. Training through the Pupuk Indonesia Learning Experience Platform for the Risk Management Unit, Internal Audit Unit, Risk Owners, and Risk Officers on the topics of risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting, and/or audit.
2. KBUMN ICOFR Training on February 18-19, 2025.
3. Risk Management Webinar Series 1: "Dive into Sustainability Disclosure" on June 11, 2025.
4. Sharing Session & Workshop "Strengthening Internal Control Systems to Improve Risk Management at Pupuk Indonesia Group" on June 25-26, 2025.
5. Personal Data Protection Training on February 6-7, 2025.
6. IFRS S1 and S2 Training on April 23-24, 2025.

Organ Pengelola Risiko Risk Management Organs							
Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	**Komite Tata Kelola Terintegrasi** Integrated Governance Committee	**Direktur Manajemen Risiko** Director of Risk Management	**Direktur Keuangan** Director of Finance	**Manajemen Risiko** Risk Management	**SPI**	***Risk Owner***	**Persentase Realisasi** Implementation Persentage **(%)**
Realisasi Implementation	Realisasi Implementation	Realisasi Implementation	Realisasi Implementation	Realisasi Implementation	Realisasi Implementation	Realisasi Implementation	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	97.0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.7%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	94.0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	98.8%

7. *Technical Competency Assessment Workshop* untuk *Subject Matter Expert* (SME) Pupuk Indonesia Group tanggal 30 Juni – 1 Juli 2025.
8. Seminar Nasional Internal Audit 2025 tanggal 1 - 4 Juli 2025.
9. Pupuk Indonesia Group *T-Cup Series #3 Basic Risk Class,* pada tanggal 25 Juli 2025.
10. *Risk Management Technical Upskilling* Program – *Basic Level* tanggal 25 Juli 2025.
11. *Workshop IFRS Sustainability Standards* (SDS) dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) tanggal 4 Agustus 2025.
12. Sosialisasi Instrumen Penilaian Kematangan Siber (IKAS) tanggal 5 Agustus 2025.
13. Pelatihan *Integrated IT System for GRC Implementation* (Internal) 14 – 15 Agustus 2025.
14. *Risk and Governance Summit* (RGS) 2025 tanggal 19 Agustus 2025.
15. GRC *Summit* tanggal 21 – 22 Agustus 2025
16. *Total Quality Management* (TQM) *Training* tanggal 22 dan 25 Agustus 2025.
17. Pelatihan Pengenalan AMDAL Dasar dan Peraturan Perizinan Terkait Lingkungan tanggal 9 – 11 September 2025.
18. *Executive Training: Strategic Risk Management & Value Creation* tanggal 12 – 13 September 2025.
19. *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA) tanggal 16 – 19 September 2025.
20. Seminar Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (PTPI) tanggal 17 September 2025

7. Technical Competency Assessment Workshop for Subject Matter Experts (SME) of Pupuk Indonesia Group on June 30-July 1, 2025.
8. National Internal Audit Seminar 2025 on July 1-4, 2025.
9. Pupuk Indonesia Group T-Cup Series #3 Basic Risk Class on July 25, 2025.
10. Risk Management Technical Upskilling Program – Basic Level on July 25, 2025.
11. IFRS Sustainability Standards (SDS) and Sustainability Disclosure Standards (SPK) Workshop on August 4, 2025.
12. Socializing the Cyber Maturity Assessment Instrument (IKAS) on August 5, 2025.
13. Integrated IT System Training for GRC Implementation (Internal) on August 14-15, 2025.
14. Risk and Governance Summit (RGS) 2025 on August 19, 2025.
15. GRC Summit on August 21-22, 2025
16. Total Quality Management (TQM) Training on August 22 and 25, 2025.
17. Introduction to Basic AMDAL and Environmental Licensing Regulations Training on September 9–11, 2025.
18. Executive Training: Strategic Risk Management & Value Creation on September 12–13, 2025.
19. Qualified Risk Management Analyst (QRMA) on September 16–19, 2025.
20. Seminar on the Implementation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (PTPI) on September 17, 2025.

21. *Workshop Control Self Assessment* ICOFR tanggal 2 Oktober 2025.
22. *Risk Appetite and Risk Culture*: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan tanggal 09 Oktober 2025.
23. *Governance Fundamentals*, pada tanggal 29 – 30 Oktober 2025.
24. *Risk Control Self-Assessment* (RCSA), pada tanggal 3-4 November 2025.
25. *Governance Fundamentals*, pada tanggal 4-5 November 2025.
26. ERM *Fundamentals*, pada tanggal 10-11 November 2025.
27. *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA), pada tanggal 10-13 November 2025.
28. *Integrated Anti-Fraud Management System*, pada tanggal 17-18 November 2025.
29. *Master Class*: *Risk Governance*, pada tanggal 03-05 Desember 2025.
30. *Risk Beyond* 2025, pada tanggal 04-05 Desember 2025.
31. *Workshop Risk Control Self Assessment* (RCSA) *Non Risk That Matters* (RTM) Tahun 2026, pada tanggal 10 Desember 2025.

21. ICOFR Control Self-Assessment Workshop on October 2, 2025.
22. Risk Appetite and Risk Culture: Key Pillars in Strengthening Risk Management in the Financial Sector on October 9, 2025.
23. Governance Fundamentals on October 29-30, 2025.
24. Risk Control Self-Assessment (RCSA) on November 3-4, 2025.
25. Governance Fundamentals on November 4-5, 2025.
26. ERM Fundamentals, November 10-11, 2025.
27. Qualified Risk Management Analyst (QRMA), November 10-13, 2025.
28. Integrated Anti-Fraud Management System, November 17-18, 2025.
29. Master Class: Risk Governance, December 3-5, 2025.
30. Risk Beyond 2025, December 4-5, 2025.
31. Risk Control Self-Assessment (RCSA) Workshop for Non-Risk That Matters (RTM) 2026, December 10, 2025.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai salah satu langkah untuk mengefektifkan pengelolaan risiko, Perusahaan telah menerapkan pengelolaan risiko berbasis teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi PRISMA (Pupuk Indonesia *Risk Management Application*) sejak tahun 2018. Seluruh Anak Perusahaan telah menggunakan aplikasi PRISMA untuk melaporkan pengelolaan *Risk That Matters*/Risiko Utama (RTM). Dengan adanya PRISMA pengelolaan risiko dapat dilakukan secara *real time* dan menjadi *dashboard* bagi Manajemen dalam memantau pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan.

Pada Tahun 2025 PT Pupuk Indonesia (Persero) telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko (Sentra Modul Risk) yang merupakan sistem informasi manajemen risiko terpadu dan terintegrasi PTPI & Anak Perusahaan.

Benefit Pengembangan:
1. Pemenuhan Pemantauan Profil Risiko sesuai arahan PT Danantara Asset Management (Persero).
2. Menjadi Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dikelola terpusat oleh Perusahaan.
3. Mendukung dokumentasi strategi risiko (RAS, Ambang Batas Risiko & Metrik Strategi Risiko).
4. Memperkuat pengawasan risiko melalui *monitoring threshold* parameter risiko dan KRI sebagai *early warning system.*

Risk Management Information System

As a step to streamline risk management, the Company has implemented information technology-based risk management using the PRISMA (Pupuk Indonesia Risk Management Application) application since 2018. All subsidiaries use the PRISMA application to report on the management of Risks That Matter/Main Risks (RTM). PRISMA enables real-time risk management and serves as a dashboard for Management to monitor risk management and decision-making.

In 2025, PTPI developed a Risk Management Information System (Sentra Modul Risk), as an integrated risk management information system for PTPI and its subsidiaries.

Development Benefits:
1. Fulfills Risk Profile Monitoring as directed by PT Danantara Asset Management (Persero).
2. Becomes a Risk Management Information System managed centrally by the Company.
3. Supports risk strategy documentation (RAS, Risk Thresholds, and Risk Strategy Metrics).
4. Strengthens risk supervision by monitoring risk parameter thresholds and KRIs as an early warning system.

Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2025

Untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah efektif dijalankan dan mendukung pencapaian sasaran Perusahaan, maka Perusahaan melakukan Penilaian Risk Maturity Index (RMI) setiap tahun. PTPI telah melakukan penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) tahun 2025 atas Tahun Buku 2024 yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen dari PT Deloitte Konsultan Indonesia.

Penilaian RMI Kinerja Tahun Buku 2024 berdasarkan aspek dimensi dengan realisasi kinerja yang terdiri dari tingkat kesehatan peringkat akhir (*final rating*) dan peringkat komposit risiko. Aspek dimensi dalam penilaian RMI terdiri dari 5 aspek dimensi di antaranya budaya dan kapabilitas risiko, organisasi dan tata kelola risiko, kerangka risiko dan kepatuhan, proses dan kontrol risiko & model, data, dan teknologi risiko. Aspek penilaian kinerja memperhatikan skala penyesuaian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa Kualitas Penerapan Manajemen Risiko selaras dengan hasil kinerja perusahaan. Hasil penilaian indeks kematangan risiko (*Risk Maturity Index*) PTPI atas Kinerja Tahun Buku 2024 sebesar 3,1 kategori Praktik yang Baik.

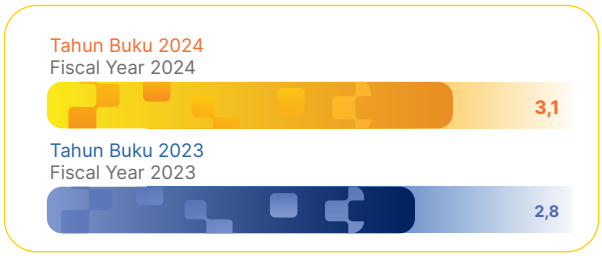
Hingga akhir Desember 2025, telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi RMI Tahun Buku 2024 yang harus dilaksanakan di tahun 2025 sebesar 100% atau seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti. Selanjutnya Perusahaan fokus melakukan inventarisir dan tindak lanjut rekomendasi RMI atas Tahun Buku 2024 di tahun 2026 dan 2027.

2025 Risk Maturity Index (RMI) Assessment

To ensure risk management implementation is effective and supports the achievement of the Company's goals, the Company conducts an annual Risk Maturity Index (RMI) assessment. PTPI 2025 Risk Maturity Index (RMI) assessment for Fiscal Year 2024 was by an Independent Assessment Team from PT Deloitte Konsultan Indonesia.

The RMI assessment for Fiscal Year 2024 performance was based on dimensional aspects, with realized performance consisting of a final rating and a composite risk rating. The RMI assessment comprised five dimensions: risk culture and capability, risk organization and governance, risk and compliance framework, risk processes and controls & models, data, and risk technology. The performance assessment considered the scale of adjustments made to demonstrate that the quality of risk management aligned with the Company's performance results. The Risk Maturity Index assessment for PTPI's 2024 performance was 3.1, in the Good Practice category.

By the end of December 2025, 100% of the RMI recommendations for Fiscal Year 2024, which had to be implemented in 2025, had been followed up. The Company will now focus on inventorying and following up on RMI recommendations for Fiscal Year 2024 in 2026 and 2027.



Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Sebagai bentuk komitmen Direksi PTPI dalam menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang sistemasis terstruktur, dan berkelanjutan guna menjamin pencapaian sasaran Perusahan, PTPI melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Risiko melalui pelaksanaan penilaian *Risk Maturity Index* (RMI). Penilaian tersebut dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI Nomor: SK-8/DKU.MBU/12/2023. Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Risiko di PTPI sepanjang tahun 2025 telah berjalan secara memadai.

Statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of the Company's Risk Management System

To demonstrate the PTPI Board of Directors' commitment to implementing a systematic, structured, and sustainable Risk Management System to ensure the achievement of the Company's goals, PTPI evaluated its Risk Management System through a Risk Maturity Index (RMI) assessment. This assessment is conducted annually in accordance with the Republic of Indonesia Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of BUMN Decree No. SK-8/DKU.MBU/12/2023. The evaluation results indicated that the Risk Management System at PTPI throughout 2025 had been running adequately.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Perusahaan, Manajemen berkomitmen untuk memastikan efektif di Perusahaan. Direksi bersama Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala melakukan pembahasan dengan Direktur Manajemen Risiko terkait perkembangan isu strategis internal dan eksternal Perusahaan, risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan baik pada level korporasi maupun proyek-proyek strategis, langkah mitigasi yang diperlukan, serta rencana dan realisasi program kerja Manajemen Risiko.

Pada tahun 2025, secara umum Manajemen menilai sistem manajemen risiko di PTPI telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut antara lain tercermin dari peningkatan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko Perusahaan yang diukur melalui *Risk Maturity Index* (RMI) Perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian RMI tahun 2025 atas tahun buku 2024 oleh Tim Penilai Independen dari PT Deloitte Konsultan Indonesia, PTPI memperoleh skor RMI sebesar 3.1 dari skala 5 yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di PTPI berada pada fase yang baik (*good practice phase*).

To support the achievement of the Company's targets, Management has committed to ensuring the effective implementation of risk management within the Company. The Board of Directors, together with the Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee and the Integrated Governance Committee, regularly discuss with the Director of Risk Management the development of the Company's internal and external strategic issues, key risks faced by the Company at both the corporate level and strategic projects, necessary mitigation measures, and the Risk Management work program plan and implementation.

In 2025, Management assessed that PTPI's risk management system had been implemented well. This was reflected by the increasing maturity level of the Company's risk management implementation, as measured by the Company's Risk Maturity Index (RMI). Based on the 2025 RMI assessment for the 2024 fiscal year by the Independent Assessment Team from PT Deloitte Konsultan Indonesia, PTPI received an RMI score of 3.1 on a scale of 5, indicating that the risk management at PTPI was in the good practice phase.

Perkara Hukum
Legal Cases

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2025 atau telah dinyatakan selesai di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The details of the legal issues faced by the Company in 2025 or resolved in 2025 are as follows:

Perkara Hukum yang Dihadapi PTPI
Legal Matters Faced by PTPI

Pokok Perkara Case	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company
Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Perkara Hukum yang Dihadapi Anak Perusahaan PTPI
Legal Cases Faced by PTPI Subsidiaries

Anak Perusahaan Subsidiaries	Pokok Perkara Case	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company
PT Petrokimia Gresik (PKG)	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
PT Pupuk Kujang (PKC)	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP).	PSP mengajukan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Distributor Pupuk. PSP filed a civil lawsuit alleging breach of contract by the Fertilizer Distributor.	Permohonan Peninjauan Kembali oleh Penggugat (Distributor Pupuk) di Mahkamah Agung. Request for Judicial Review by the Plaintiff (Fertilizer Distributor) to the Supreme Court.	Melaksanakan penanganan perkara dengan berkoordinasi bersama konsultan hukum yang ditunjuk oleh PSP. The case is being handled in coordination with a legal consultant appointed by PSP.	Nilai gugatan Rp. 2.122.568.597,-. The amount of the lawsuit is Rp2,122,568,597.
	PSP mengajukan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Distributor Pupuk terkait Permasalahan Jual Beli Pupuk Bersubsidi PSP filed a civil lawsuit alleging breach of contract by a fertilizer distributor related to subsidized fertilizer sales issues.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kota Lampung, telah menerbitkan sita persamaan terhadap aset milik Distributor Pupuk dan saat ini menunggu proses eksekusi penjualan/Lelang terhadap aset Distributor. The Gunung Sugih District Court in Lampung City issued a seizure order against assets belonging to the fertilizer distributor and is currently awaiting the execution of the sale/auction of the distributor's assets.	Berkoordinasi secara intensif dengan konsultan hukum terkait pelaksanaan eksekusi. Intensive coordination with legal consultants regarding the execution process underway.	Nilai gugatan Rp. 246.002.206,-. The amount of the lawsuit is Rp246,002,206.
PT Rekayasa Industri (Rekind).	Perkara Perdata, Rekind menjadi Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi oleh vendor proyek RDMP. In a civil case, Rekind is a co-defendant in a breach of contract lawsuit filed by a vendor for the RDMP project.	Perkara tersebut sedang ditangani oleh JO RDMP. The case is being handled by the RDMP Joint Operations Office (JO).	Melaksanakan penanganan perkara dengan berkoordinasi bersama tim proyek untuk melengkapi data-data & dokumen pendukung. The case is being handled in coordination with the project team to complete data and supporting documents.	Nilai gugatan Rp 18.428.979.086,- The amount of the lawsuit is Rp18,428,979,086.

Perkara Hukum yang Dihadapi Anak Perusahaan PTPI
Legal Cases Faced by PTPI Subsidiaries

Anak Perusahaan Subsidiaries	Pokok Perkara Case	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company
	Rekind menjadi Turut Tergugat dalam perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dengan belum menerima pembayaran kompensasi. Rekind is a co-defendant in a civil lawsuit for unlawful acts (PMH) related to unpaid compensation.	Perkara dalam proses Banding di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. The case is under appeal at the Jakarta High Court.	Berkoordinasi dengan konsultan hukum. Coordinating with legal counsel.	Nilai gugatan Rp 5.680.484.382. The amount of the claim is Rp5,680,484,382.
	Rekind menjadi Turut Tergugat dalam perkara Perdata Gugatan Wanprestasi terkait dengan Kesepakatan Konsumsi Material Fire Proofing Pyrocrete 40. Rekind is a co-defendant in a civil lawsuit for breach of contract related to the agreement for the consumption of Pyrocrate 40 fireproofing material.	Perkara dalam proses Kasasi di Tingkat Mahkamah Agung. The case is currently under appeal at the Supreme Court.	Menghadiri setiap proses persidangan. Attended every hearing.	Nilai Gugatan Rp2.030.600.000. The amount of the lawsuit: Rp2,030,600,000.
PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN)	Sengketa Arbitrase sehubungan dengan klaim ganti rugi atas transaksi jual beli batu bara. Arbitration dispute regarding a claim for compensation for a coal sale and purchase transaction.	Proses mediasi di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan melakukan negosiasi atas jangka waktu pembayaran klaim. Mediation process at the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) and negotiations regarding the claim payment period.	Berkoordinasi dengan konsultan hukum untuk melakukan negosiasi nilai klaim. Coordination with legal consultant to negotiate the claim amount.	Memiliki dampak nilai klaim gugatan kurang lebih USD 957.931,60. The amount of the approximately USD 957,931.60.
PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG)	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP)	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Perkara Hukum yang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTPI

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara hukum apa pun, yang melibatkan dirinya dalam kedudukannya masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PTPI.

Perkara Hukum yang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PTPI

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Anak Perusahaan PTPI yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara hukum apa pun, yang melibatkan dirinya dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi Anak Perusahaan PTPI.

Dampak Perkara Hukum bagi PTPI dan Anak Perusahaan

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi PTPI dan Anak Perusahaan sepanjang tahun 2025 tidak berdampak secara material terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha PTPI dan Anak Perusahaan.

Legal Cases Faced by Members of the Board of Commissioners and Directors of PTPI

Throughout 2025, all incumbent members of the Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any legal cases involving them in their respective positions as members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PTPI.

Legal Cases Faced by Members of the Board of Commissioners and Directors of PTPI's Subsidiaries

Throughout 2025, all incumbent members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PTPI's Subsidiaries were not involved in any legal cases involving them in their positions as members of the Board of Commissioners or Board of Directors of PTPI's Subsidiaries.

Impact of Legal Cases on PTPI and Subsidiaries

All legal cases faced by PTPI and its Subsidiaries throughout 2025 did not have a material impact on the position and business continuity of PTPI and its Subsidiaries.

Sanksi Administratif oleh Otoritas Terkait

Administrative Sanctions by the Relevant Authorities

Pada tahun 2025, PTPI dikenai sanksi administratif berupa denda oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas keterlambatan penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2024. Keterlambatan tersebut terutama disebabkan oleh belum selesainya audit laporan keuangan salah satu entitas anak yang bergerak di bidang EPC serta audit penyaluran pupuk bersubsidi oleh Auditor Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut, PTPI telah melakukan evaluasi dan penguatan koordinasi dengan entitas terkait serta auditor untuk memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan secara tepat waktu pada periode berikutnya.

In 2025, PTPI was subject to an administrative sanction in the form of a fine imposed by the Financial Services Authority (OJK) due to the late submission and publication of the Annual Financial Statements as of December 31, 2024. The delay was primarily attributable to the incomplete audit process of the financial statements of one subsidiary operating in the EPC sector, as well as the ongoing audit of subsidized fertilizer distribution conducted by the Government Auditor.

As a follow-up measure, PTPI has undertaken evaluations and strengthened coordination with the related entities and auditors to ensure the timely fulfillment of reporting obligations in subsequent reporting periods.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang

Long-Term Compensation Policy

Kebijakan Kompensasi Berbasis Saham (MSOP/ESOP)

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perusahaan belum menerapkan program kompensasi jangka panjang, baik melalui Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP) maupun Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (*Employees Stock Option Program*/ESOP). Seluruh kepemilikan saham Perusahaan saat ini sepenuhnya berada pada Pemerintah Republik Indonesia.

Kebijakan Penghargaan/Kompensasi yang Memperhitungkan Kinerja Perusahaan Jangka Panjang

Sebagai bagian dari strategi retensi talenta dan bentuk apresiasi atas loyalitas jangka panjang, PT Pupuk Indonesia (Persero) secara konsisten menerapkan kebijakan Penghargaan Bakti Kerja. Pada tahun 2025, Perusahaan memberikan penghargaan kepada Karyawan dengan masa pengabdian kelipatan 8 tahun sebagai pengakuan atas dedikasi tanpa putus yang berkontribusi pada keberlanjutan kinerja Perusahaan. Pemberian penghargaan ini, yang mencakup logam mulia dan piagam penghargaan, ditegaskan melalui Keputusan Direksi Nomor 23/A/HK/1/60101/SK/2025.

Share-Based Compensation Policy (MSOP/ESOP)

As of the end of 2025, the Company has not implemented a long-term compensation program, either through a Management Share Option Program (MSOP) or an Employee Share Option Program (ESOP). All of the Company's shares are currently fully owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Reward/Compensation Policies That Take Long-Term Company Performance into Account

As part of its talent retention strategy and as a token of appreciation for long-term loyalty, PT Pupuk Indonesia (Persero) has a Service Award policy. In 2025, the Company awarded employees with eight years of service in recognition of their unwavering dedication and contribution to the Company's sustainable performance. These awards, which included precious metals and a certificate of appreciation was confirmed by Board of Directors Decree No. 23/A/HK/1/60101/SK/2025.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Kerja Setelah Terjadinya Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan atas Saham Perusahaan Terbuka

Share Ownership Information Disclosure Policy for Members of The Board of Directors and Members of The Board of Commissioners No Later than 3 (Three) Business Days After the Ownership or any Change in Ownership of Shares of A Public Company

Perusahaan merupakan emiten non-perusahaan terbuka (penerbit instrumen utang) sehingga ketentuan keterbukaan informasi yang secara spesifik mengatur pengungkapan perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana berlaku bagi Perusahaan Terbuka tidak menjadi kewajiban regulatif bagi Perusahaan.

Meskipun demikian, Perusahaan tetap menempatkan prinsip transparansi dan pencegahan benturan kepentingan sebagai bagian dari penerapan tata kelola. Informasi yang relevan terkait kepemilikan saham dan/atau hubungan afiliasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan sesuai kebutuhan tata kelola dan disajikan dalam Laporan Tahunan pada Bab Profil Perusahaan dan beberapa pembahasan termasuk tentang benturan kepentingan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Laporan Tahunan ini, serta dikelola melalui mekanisme pelaporan internal yang mendukung pemantauan potensi benturan kepentingan.

The Company is a non-public company (issuer of debt instruments), so the information disclosure provisions specifically governing the disclosure of changes in share ownership of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners within a maximum period of 3 (three) business days, as applicable to Public Companies, is not a regulatory obligation for the Company.

Nevertheless, the Company maintains the principles of transparency and prevention of conflicts of interest as part of its governance implementation. Relevant information regarding share ownership and/or affiliated relationships of members of the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed as required by governance and presented in the Annual Report in the Company Profile chapter and in several discussions, including those on conflicts of interest, in the Corporate Governance chapter of this Annual Report. It is also managed through internal reporting mechanisms that support the monitoring of potential conflicts of interest.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Dalam rangka menjunjung keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan, Perusahaan berkomitmen menyediakan kemudahan akses terhadap informasi dan data Perusahaan sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi informasi. Kebijakan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala hal yang berdampak pada kepentingan publik, sekaligus sebagai wujud penerapan prinsip GCG.

To uphold information transparency for stakeholders, the Company is committed to providing easy access to Company information and data as part of the principle of information transparency. This policy is guided by Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, which affirms that public information disclosure is a means to optimize public supervision of the administration of the state and other public bodies, as well as all matters impacting the public interest, and also serves as a manifestation of the GCG implementation principles.

Perusahaan secara konsisten menyajikan informasi yang lengkap, bermanfaat, dan mutakhir kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan, yang pengungkapannya dilaksanakan oleh pejabat atau unit kerja sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, dalam hal ini Sekretaris Perusahaan. Informasi relevan mengenai Perusahaan telah disampaikan melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham, dengan penyampaian Laporan Manajemen Tahunan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang senantiasa dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penyebarluasan informasi Perusahaan dilakukan melalui berbagai media komunikasi, antara lain *website*, siaran pers, portal, media cetak, media elektronik, serta surat edaran internal.

The Company consistently provides complete, useful, and up-to-date information to shareholders and stakeholders. Disclosure is carried out by officials or work units, in accordance with their respective duties, authorities, and responsibilities, in this case the Corporate Secretary. Relevant information regarding the Company is conveyed through Quarterly and Annual Management Reports to the Board of Commissioners before being submitted to Shareholders. The Annual Management Report is submitted to Shareholders and the Board of Commissioners in a timely manner in accordance with applicable regulations. In addition, the Company disseminates information through communication media, including the website, press releases, portals, print media, electronic media, and internal circulars.

Situs Web Korporat

Sebagai salah satu sarana utama penyampaian informasi, situs web korporat memegang peranan penting dalam mendukung penerapan keterbukaan informasi Perusahaan. Melalui pengungkapan informasi pada laman resmi tersebut, publik dan para pemangku kepentingan memperoleh gambaran mengenai aktivitas operasional serta kinerja Perusahaan. Situs web Perusahaan dapat diakses melalui tautan www.pupuk-indonesia.com.

Melalui situs web tersebut, para pemangku kepentingan dapat mengakses beragam konten yang memuat informasi terkini mengenai Perusahaan, antara lain profil PTPI, produk dan jasa, kegiatan pemasaran, CSR dan HSE, stok pupuk harian, berita terkini, serta informasi Tata Kelola Perusahaan, termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. Pada *website* tersebut juga tersedia berbagai tautan menuju Pengadaan (e-Proc), Keterbukaan Informasi Publik (PPID), serta menuju *website* korporat anak perusahaan dan cucu perusahaan milik *Holding*. Untuk memastikan kualitas dan relevansi informasi yang disampaikan kepada publik, Perusahaan secara konsisten melakukan pembaruan konten secara berkala dan berkelanjutan.

Corporate Website

As a primary means of conveying information, the corporate website plays a crucial role in supporting the Company's information transparency. Through the disclosure of information on its official website, the public and stakeholders gain an overview of the Company's operational activities and performance. The Company's website can be accessed through www.pupuk-indonesia.com.

Through the website, stakeholders can access content containing the latest information about the Company, including PTPI's profile, products and services, marketing activities, SER and HSE, daily fertilizer inventory, the latest news, and Corporate Governance information, including the Annual Report and Sustainability Report. The website also provides links to Procurement (e-Proc), Public Information Disclosure (PPID), and the corporate websites of the Holding's subsidiaries and subsidiary companies. To ensure the quality and relevance of the information provided to the public, the Company consistently updates its content on a regular and ongoing basis.

Media Digital "Sintesa"

Sebagai media komunikasi internal, SINTESA diterbitkan dalam format majalah digital secara bulanan dan ditujukan bagi seluruh karyawan Perusahaan. Majalah ini memuat berbagai artikel informatif mengenai aktivitas PTPI dalam kurun waktu dua bulan terakhir dengan tujuan menyampaikan informasi yang relevan kepada karyawan terkait perkembangan Perusahaan. Dalam perannya sebagai media internal, SINTESA menjadi sarana bagi manajemen untuk menyosialisasikan program kerja, strategi bisnis yang dijalankan, serta target Perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Seluruh informasi disajikan dengan bahasa yang informatif dan mudah dipahami oleh karyawan. Distribusi SINTESA dilakukan secara terbatas dan hanya diperuntukkan bagi karyawan internal serta Entitas Anak.

"Sintesa" Digital Media

As an internal communication medium, SINTESA is published in a monthly digital magazine format and is intended for all Company employees. This magazine contains informative articles on PTPI's activities over the past two months, with the aim of conveying relevant information to employees regarding the Company's development. In its role as an internal media, SINTESA serves as a platform for management to disseminate work programs, implemented business strategies, and the Company's short-, medium-, and long-term targets. All information is presented in an informative language that is easy for employees to understand. Distribution of SINTESA is limited and intended only for internal employees and Subsidiaries.

Forum Komunikasi Internal

Sebagai bentuk fasilitasi komunikasi internal, Perusahaan menyediakan berbagai sarana yang mendukung terjalinnya dialog dan diskusi antara karyawan dan manajemen. Sarana tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan komunikasi berkala oleh Direksi kepada seluruh karyawan, Direksi kepada jajaran manajemen, serta pada masing-masing unit kerja, yang dilakukan melalui kegiatan *family gathering*, rapat kerja, *morning briefing*, dan berbagai kegiatan Perusahaan lainnya.

Internal Communication Forum

To facilitate internal communication, the Company provides tools to support dialogue and discussion between employees and management. These tools are implemented through regular communication between the Board of Directors and all employees, the Board of Directors and management, and within each work unit. This communication is conducted through family gatherings, work meetings, morning briefings, and other Company activities.

Media Sosial

Perusahaan memanfaatkan jejaring media sosial sebagai kanal komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan, pelanggan, dan masyarakat. Media tersebut digunakan untuk penyampaian informasi produk sekaligus sebagai sarana layanan pelanggan (*customer care*). Akses terhadap media sosial Perusahaan dapat dilakukan melalui:

1. X : @Pupuk_Indonesia
2. Instagram : pt.pupukindonesia
3. Facebook : PT Pupuk Indonesia
4. TikTok : pupuk.indonesia
5. Youtube : PT Pupuk Indonesia Official

Social Media

The Company uses social media networks as a two-way communication channel with stakeholders, customers, and the public. These platforms are used to convey product information and customer care. The Company's social media channels can be accessed through:

1. X : @Pupuk_Indonesia
2. Instagram : pt.pupukindonesia
3. Facebook : PT Pupuk Indonesia
4. TikTok : pupuk.indonesia
5. Youtube : PT Pupuk Indonesia Official

Laporan Tahunan

Perusahaan secara konsisten menyusun Laporan Tahunan setiap tahun. Laporan Tahunan tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta masyarakat. Adapun rincian tema Laporan Tahunan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Annual Report

The Company consistently prepares an Annual Report every year. This Annual Report is submitted to Shareholders, regulators, community organizations, the media, and the public. The detailed Annual Report themes for the past five years are as follows:

Tahun Year	Tema Theme
2025	Transformasi Industri Pupuk Penopang Kedaulatan Pangan Nasional Fertilizer Industry Transformation as a Pillar of National Food Sovereignty
2024	Mendorong Keberlanjutan, Mengawal Ketahanan Pangan Promoting Sustainability, Safeguarding Food Security
2023	Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan Forging a Sustainable Future
2022	Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih Transformation towards a Greener and Cleaner Industrial
2021	Memperkuat Konsolidasi, Melewati Tantangan, Menyambut Peluang Strengthening Consolidation, Overcoming Challenges, Welcoming Opportunities

Laporan Keberlanjutan

PTPI juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang memuat gambaran menyeluruh atas aktivitas Perusahaan dan disusun bersamaan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta masyarakat.

Sustainability Report

PTPI also publishes a Sustainability Report, which provides a comprehensive overview of the Company's activities and is prepared concurrently with the Annual Report. The Sustainability Report is submitted to Shareholders, regulators, community organizations, the media, and the public.

Tahun Year	Tema Theme
2025	Transformasi Industri Pupuk Penopang Kedaulatan Pangan Nasional Fertilizer Industry Transformation as a Pillar of National Food Sovereignty
2024	Mendorong Keberlanjutan, Mengawal Ketahanan Pangan Promoting Sustainability, Safeguarding Food Security
2023	Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan Building a Sustainable Future
2022	Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih Transformation Towards a Greener and Cleaner Industry
2021	Mengembangkan Keberlanjutan demi Ketahanan Pangan Reinforcing Sustainability for Food Security

Media untuk Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Perusahaan memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk menyajikan data dan informasi terkait kegiatan operasional, proses bisnis, serta capaian kinerja yang telah dicapai, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Media for Shareholders and Stakeholders

The Company utilizes communication media to present data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements, as shown in the table below:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Media Media
Regulator Regulator	Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja Komisi, dan Rapat dengan Kementerian/Lembaga Negara, publikasi kepatuhan di media massa. Public Hearings, Commission Working Meetings, and Meetings with Ministries/State Institutions, publication of compliance in the mass media.
Pemegang Saham Shareholders	RUPS, RUPSLB, rapat dengan Pimpinan Kementerian BUMN, publikasi kinerja dan capaian di media massa. AGMS, EGMS, meetings with the Head of the Ministry of BUMN, publication of performance and achievements in the mass media.
Investor Investors	Website Perusahaan, akun media sosial Perusahaan, publikasi kinerja dan capaian di media massa. Company Website, Company Social Media Accounts, Publication of Performance and Achievements in the mass media.
Lembaga Publik Public Institutions	Website Perusahaan dan akun media sosial Perusahaan Company Website and Company Social Media Accounts
Konsumen Consumers	Website Perusahaan, akun media sosial Perusahaan, kanal media sosial Entitas Anak Company Website, Company Social Media Accounts, Subsidiary Social Media Channels
Karyawan Employees	Majalah SPIN, TV Media, video, poster/e-flyer, Banner, spanduk, e-mail Perusahaan, dan desktop background. SPIN Magazine, TV Media, Videos, Posters/E-Flyers, Banners, Company Emails, and Desktop Backgrounds.
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Akun media sosial Perusahaan Company Social Media Accounts
Mitra Kerja dan Rekanan Partners and Associates	Akun media sosial Perusahaan Company Social Media Accounts
Organisasi Profesi Professional Organizations	Akun media sosial Perusahaan Company Social Media Accounts
Masyarakat/Umum Community/General	Akun media sosial Perusahaan, publikasi kinerja dan capaian di media massa Company Social Media Accounts, Publication of Performance and Achievements in the Mass Media

Teknologi Informasi
Information Technology

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "Perusahaan") menyadari pentingnya peran teknologi informasi (TI) dalam mendukung pengembangan kegiatan bisnis Perusahaan. Perusahaan memahami bahwa TI merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam mencapai visi Perusahaan jangka panjang.

The Company recognizes the critical role of information technology (IT) in supporting the development of its business activities. It understands that IT is a crucial component in achieving its long-term vision.

Pupuk Indonesia Group terus berkomitmen untuk mendorong transformasi digital dan penguatan keamanan siber yang terintegrasi dalam segala aspek operasionalnya. Melalui langkah strategis dengan peningkatan infrastruktur dan tata kelola TI yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan daya saing Perusahaan di pasar global yang semakin kompetitif.

The Pupuk Indonesia Group remains committed to driving digital transformation and strengthening cybersecurity integrated into all aspects of its operations. This strategic initiative, which includes improving IT infrastructure and good IT governance, aims to increase the Company's efficiency, effectiveness, and competitiveness in an increasingly competitive global market.

Dalam proses pengembangan TI, Perusahaan mengadopsi strategi sentralisasi TI yang bertujuan untuk menyatukan seluruh sumber daya TI yang terpusat di Pupuk Indonesia Group. Sentralisasi ini memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan terkait dengan pengelolaan TI dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi di seluruh bagian Perusahaan, sehingga menghasilkan dampak yang lebih besar dan konsisten di setiap lini bisnis.

In its IT development process, the Company has adopted an IT centralization strategy aimed at unifying all IT resources centralized across the Pupuk Indonesia Group. This centralization ensures all policies and decisions related to IT management can be implemented in a coordinated and integrated manner across all parts of the Company, resulting in a greater and more consistent impact across all business lines.

Dengan strategi ini, Perusahaan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh TI untuk mendukung transformasi digital yang lebih cepat, meningkatkan ketahanan sistem, dan menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan seluruh aspek operasional Perusahaan. Strategi ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029.

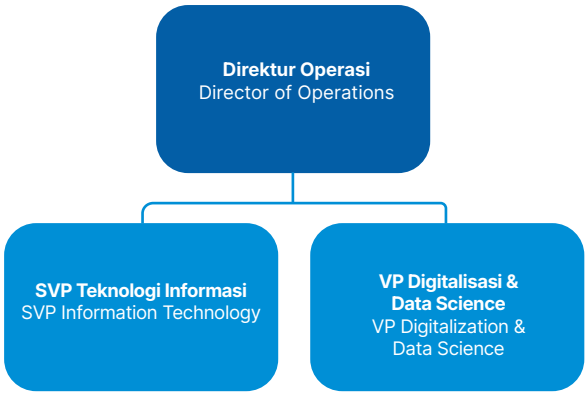
With this strategy, the Company can maximize the potential of IT to accelerate digital transformation, increase system resilience, and create greater efficiency in managing all aspects of its operations. This strategy is outlined in the Company's 2025-2029 Long-Term Plan.

Struktur Organisasi Pengelola TI Perusahaan

Secara struktural, pengelolaan TI di lingkungan Perusahaan dijalankan oleh Direktorat Operasi melalui Kompartemen Teknologi Informasi dan Kompartemen Digitalisasi & Data Science (DDS), seperti tercermin melalui struktur organisasi di bawah ini.

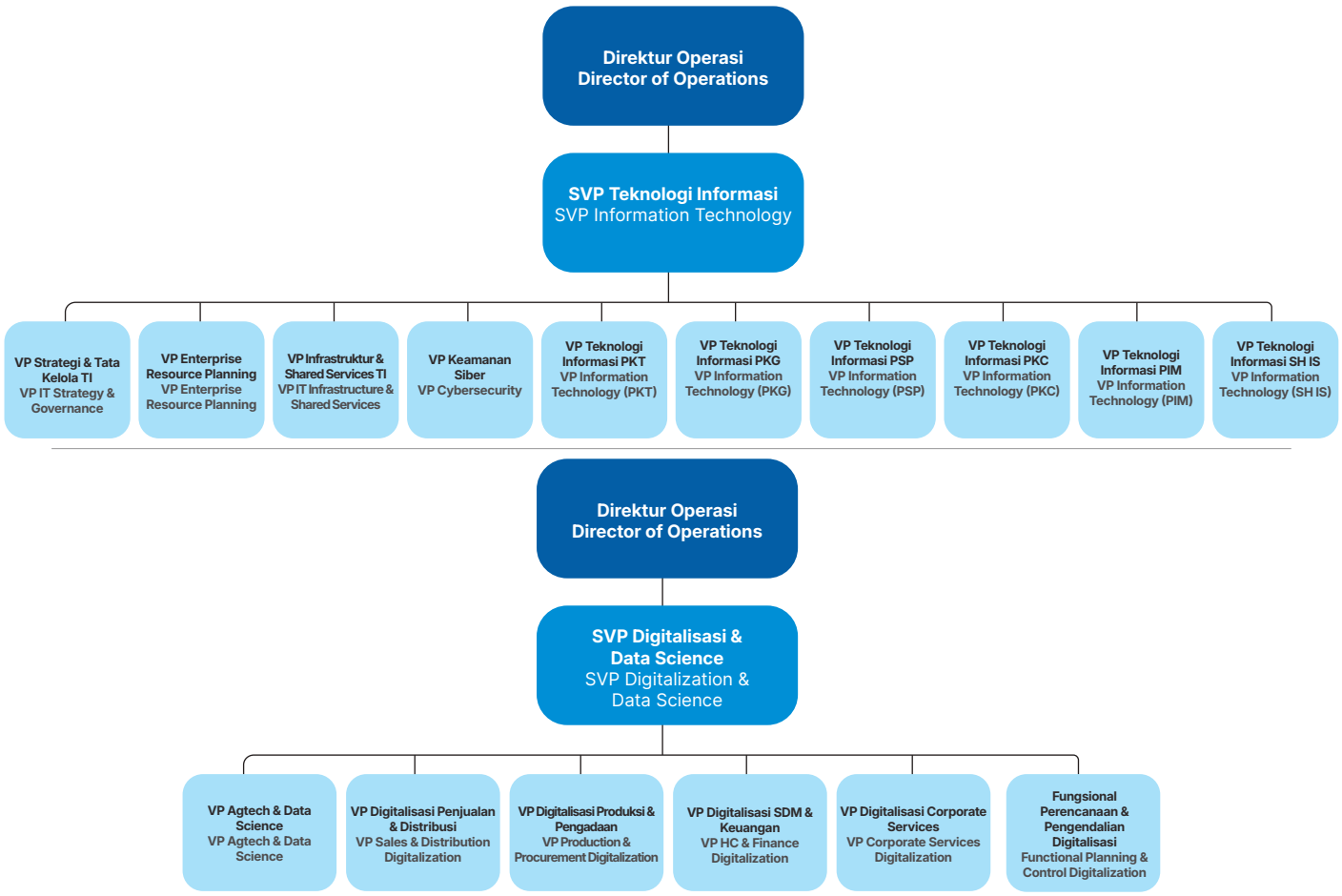
The Company's IT Management Organizational Structure

Structurally, IT management within the Company is carried out by the Operations Directorate through the Information Technology Compartment and the Digitalization & Data Science (DDS) Compartment, as shown in the organizational structure below.



Dengan detail struktur organisasi Kompartemen TI dan DDS sebagai berikut:

The detailed organizational structure of the IT and DDS compartments is as follows:



Mengacu pada struktur organisasi tersebut, tanggung jawab pengelolaan fungsi TI Perusahaan dilaksanakan oleh Kompartemen TI dan DDS yang masing-masing dipimpin oleh seorang Senior Vice President, dan keduanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi per tanggal 1 Oktober 2025.

Kompartemen TI dikepalai oleh Ari Novan Setiono selaku penanggung jawab perencanaan, koordinasi, dan evaluasi kebijakan dan arah strategis TI, pengembangan dan implementasi solusi *Enterprise Resource Planning* (ERP), infrastruktur, keamanan siber, serta pengelolaan operasional dan layanan TI Pupuk Indonesia Group dalam mendukung pencapaian target, strategi dan kebutuhan bisnis Perusahaan.

Adapun Kompartemen DDS dikepalai oleh Yetty Endarwati selaku penanggung jawab perencanaan, koordinasi, pengelolaan, serta evaluasi kegiatan di bidang transformasi digital dan data science di PT Pupuk Indonesia Group, meliputi namun tidak terbatas pada mengolaborasikan semua kebutuhan digitalisasi sistem dan *data analytics*, integrasi dengan sistem-sistem lain baik internal maupun eksternal, serta melakukan pengembangan dan implementasi sistem untuk PT Pupuk Indonesia Group.

Referring to this organizational structure, the responsibility for managing the Company's IT functions is carried out by the IT Compartment and DDS, each led by a Senior Vice President, and both reporting directly to the Director of Operations as of October 1, 2025.

The IT Compartment is headed by Ari Novan Setiono, who is responsible for planning, coordinating, and evaluating IT policies and strategic direction, developing and implementing Enterprise Resource Planning (ERP) solutions, infrastructure, cybersecurity, and managing Pupuk Indonesia Group's IT operations and services to support the achievement of the Company's targets, strategies, and business needs.

The DDS compartment is headed by Yetty Endarwati, who is responsible for planning, coordinating, managing, and evaluating digital transformation and data science activities within the Pupuk Indonesia Group, which includes collaborating on all system digitalization and data analytics needs, integrating with other internal and external systems, as well as developing and implementing systems for the Pupuk Indonesia Group.

Tugas Pokok Kompartement TI & DDS

Ruang lingkup kerja yang dijalankan antara lain:
1. Mengelola Penerapan Tata Kelola TI di PTPI dan Entitas Anak.
2. Mengelola Pengembangan dan Operasional Digitalisasi & Data Science.
3. Mengelola Pengoperasian Infrastruktur dan *shared services* TI di PTPI.
4. Mengelola Pengembangan dan Operasional Sistem ERP untuk PTPI dan Entitas Anak.
5. Mengelola pengelolaan keamanan siber guna menjaga ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan aset-aset TI di PTPI.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab, antara lain:
1. Memastikan kegiatan pengelolaan strategi dan tata kelola TI meliputi perencanaan strategis, arsitektur korporat, tata kelola, kepatuhan dan pengendalian internal TI
2. Memastikan ketersediaan kebijakan TI (pedoman dan prosedur), dan kepatuhan terhadap regulasi eksternal baik nasional maupun internasional
3. Memastikan pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, serta dukungan operasional solusi digital dalam fungsi Digitalisasi dan *Data Science*
4. Memastikan kegiatan operasional layanan TI dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang dijanjikan
5. Memastikan pengelolaan operasional fasilitas dan infrastruktur TI seperti *data center*, DRC, *server, storage,* jaringan, perangkat *end user computing* serta operasional layanan TI
6. Memastikan pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, serta dukungan operasional sistem ERP sesuai dengan SLA yang dijanjikan di PTPI dan Entitas Anak
7. Memastikan keamanan siber dan sistem TI untuk menjaga ketersediaan, integritas dan kerahasiaan aset-aset TI

Main Duties of the TI & DDS Compartment

The scope of work includes:
1. Managing the Implementation of IT Governance at PTPI and its Subsidiaries.
2. Managing the Development and Operations of Digitalization & Data Science.
3. Managing IT Infrastructure and IT Shared Services at PTPI.
4. Managing the Development and Operations of the ERP System for PTPI and its Subsidiaries.
5. Managing cybersecurity to maintain the availability, integrity, and confidentiality of PTPI's IT assets.

Key the duties and responsibilities include:
1. Ensuring IT strategy and governance activities, including strategic planning, corporate architecture, governance, compliance, and internal IT controls.
2. Ensuring availability of IT policies (guidelines and procedures) and compliance with external regulations, both national and international.
3. Ensuring the development, operation, maintenance, enhancement, and operational support of digital solutions within the Digitalization and Data Science function.
4. Ensuring effective IT service operations in accordance with the agrees Service Level Agreement (SLA).
5. Ensuring the operational management of IT facilities and infrastructure, such as data centers, DRCs, servers, storage, networks, end-user computing devices, and IT service operations.
6. Ensuring the development, operation, maintenance, repair, and operational support of ERP systems are in accordance with the agrees SLAs at PTPI and its subsidiaries.
7. Ensuring cybersecurity and IT systems to safeguard the availability, integrity, and confidentiality of IT assets.

SDM dan Sertifikasi di Bidang TI & DDS

Hingga akhir tahun 2025, jumlah karyawan Kompartemen TI sebanyak 70 orang yang terdiri dari 22 orang di TI Pusat, 12 orang di Petrokimia Gresik, 7 orang di Pupuk Kujang, 13 orang di Pupuk Kaltim, 3 orang di Pupuk Iskandar Muda, 13 orang di Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan 6 orang di Rekayasa Industri. Sedangkan, jumlah karyawan pada Kompartemen DDS sebanyak 15 orang.

Dalam menjalankan fungsinya, Kompartemen TI dan DDS didukung oleh SDM yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi di bidangnya. Berikut jumlah sertifikasi SDM di bidang TI.

HC and Certification in IT & DDS

By the end of 2025, the IT Compartment comprises 70 employees: 22 in Central IT, 12 in Petrokimia Gresik, 7 in Pupuk Kujang, 13 in Pupuk Kaltim, 3 in Pupuk Iskandar Muda, 13 in Pupuk Sriwidjaja Palembang, and 6 in Rekayasa Industri. The DDS Compartment had 15 employees.

In fulfilling their functions, both the IT and DDS Compartments are supported by experienced and certified personnel. The following is a summary of certifications held by employees.

No	Kategori Sertifikasi Certification Category	Jumlah Sertifikat Number of Certificates
1	Bidang Governance Governance	53
2	Bidang IT Architecture IT Architecture	2
3	Bidang Industri 4.0 Industry 4.0	2

No	Kategori Sertifikasi Certification Category	Jumlah Sertifikat Number of Certificates
4	Bidang Cloud & Data Center Cloud & Data Center	1
5	Bidang Network Network	4
6	Bidang Cyber Security Cyber Security	21
7	Bidang DevOps DevOps	7
8	Bidang Business Analysis Business Analysis	6
9	Bidang Data Analyst Data Analyst	15
10	Project Management	21

Roadmap Teknologi Informasi

Dalam rangka memperkuat transformasi digital dan mendukung strategi bisnis perusahaan, PT PI telah menetapkan berbagai program strategis TI yang tertuang dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2025-2029 dan telah disahkan pada 9 Mei 2025.

RSTI tersebut terbagi atas 5 (lima) portofolio, yaitu :
1. Model Operasi dan Tata Kelola TI
2. Aplikasi Bisnis
3. Manajemen Data
4. Teknologi – Infrastruktur TI
5. Teknologi – Keamanan Siber

Pemutakhiran RSTI berada di bawah koordinasi IT Steering Committee (ITSC) Pupuk Indonesia Group sebagai forum pengarah dan pengambil keputusan strategis di bidang teknologi informasi. RSTI Tahun 2025–2029 telah disosialisasikan kepada seluruh anggota ITSC Pupuk Indonesia Group sebagai pedoman bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif TI.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Perusahaan telah menyusun pedoman strategis TI sebagai panduan yang memastikan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola TI Perusahaan mengacu pada *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT) 2019. Perusahaan membentuk ITSC yang diketuai oleh direksi beranggotakan seluruh perwakilan unit bisnis dan bertujuan memberikan arahan strategis TI. Tata kelola TI juga mencakup penanganan gangguan, keamanan, serta pemulihan bencana demi memastikan semua risiko utama dapat diidentifikasi dan dikelola. Seluruh perkembangannya dilaporkan kepada Direksi.

Tata kelola TI yang baik dan terstruktur menjadi salah satu elemen kunci dalam menciptakan efisiensi operasional, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memitigasi risiko yang timbul dalam proses digitalisasi dan pengelolaan TI. Hal ini sesuai dengan Permen BUMN No. PER-02/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, perusahaan juga menerapkan Sistem Manajemen Layanan TI berstandar internasional ISO 20000-1:2018 untuk meningkatkan keandalan layanan TI dalam operasional bisnis Perusahaan.

Information Technology Roadmap

To strengthen digital transformation and support the Company's business strategy, PT PI has established strategic IT programs outlined in the 2025-2029 Information Technology Strategic Plan (RSTI), which was ratified on May 9, 2025.

The RSTI is divided into five portfolios:
1. IT Operations Model and Governance
2. Business Applications
3. Data Management
4. Technology – IT Infrastructure
5. Technology – Cybersecurity

RSTI updates are coordinated by the Pupuk Indonesia Group's IT Steering Committee (ITSC), which serves as a strategic steering and decision-making forum in the information technology sector. The 2025–2029 RSTI has been disseminated to Pupuk Indonesia Group ITSC members as a shared guideline for planning and implementing IT initiatives.

Information Technology Governance

The Company has developed strategic IT guidelines to ensure the implementation of the Company's IT policies and governance is in accordance with the Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 2019. The Company has established an ITSC, chaired by the Board of Directors and comprised of representatives from all business units, to provide strategic IT direction. IT governance also encompasses disruption management, security, and disaster recovery to ensure all key risks are identified and managed. All progress is reported to the Board of Directors.

Good and structured IT governance is a key element in creating operational efficiency, optimizing resource utilization, and mitigating risks arising from the digitalization process and IT management. This is in accordance with Minister of BUMN Regulation No. PER-02/MBU/03 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Also, the Company has implemented an IT Service Management System that adheres to the international standard ISO 20000-1:2018 to improve the reliability of IT services in its business operations.

Pedoman strategis TI memberikan panduan tata cara dalam melaksanakan pengelolaan TI yang meliputi:
1. Peran TI di dalam Perusahaan;
2. Perencanaan TI;
3. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI;
4. Pengelolaan Investasi TI;
5. Pengelolaan Sumber Daya TI;
6. Pengelolaan Proyek TI; dan
7. Penanganan Kebutuhan & Identifikasi Solusi.

Pada tahun 2025, Pupuk Indonesia Group telah melakukan pengukuran tingkat kematangan TI berbasis COBIT 2019 dengan hasil rata-rata skor sebesar 4,19, meningkat dibandingkan skor tahun sebelumnya sebesar 3,93. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses TI telah dikelola dengan baik. Peningkatan juga terjadi pada proses *Managed Data* sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pada tahun sebelumnya.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan manajemen layanan TI, sejak tahun 2023, PT PI telah menerapkan Sistem Manajemen Layanan TI (SMLTI) yang mengacu pada standar internasional ISO 20000-1:2018. Penerapan SMLTI ini mendukung peningkatan konsistensi, kualitas layanan, serta efektivitas pengendalian proses TI secara berkelanjutan.

Strategi ataupun Proses Implementasi Sistem Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Dalam rangka memenuhi peraturan SK Menteri BUMN No. SK-275/MBU/11/2024 tentang Prioritas Penerapan Keamanan Siber di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Perusahaan berkomitmen menerapkan kebijakan serta melakukan penguatan fungsi *cyber security* yang meliputi aspek tata kelola TI, infrastruktur, aplikasi, dan layanan. Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai standar ISO 27001:2022. Keamanan informasi merupakan tanggung jawab bersama yang melekat pada seluruh karyawan dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan, serta menjadi persyaratan wajib yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak ketiga. Sosialisasi kepada seluruh karyawan dilaksanakan secara berkala, dengan kegiatan terakhir pada 2 Oktober 2025.

Perusahaan berkomitmen menjaga integritas dan keamanan data melalui penerapan pengamanan yang memadai, termasuk pelaksanaan *Vulnerability Assessment/Penetration Testing* (VA/PT) dan analisis kerentanan untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan. Selain itu, Perusahaan secara berkala melaksanakan audit internal dan eksternal guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku serta efektivitas pengendalian sistem informasi. Perusahaan juga bekerja sama dengan BSSN untuk mengukur tingkat *Cyber Security Maturity* (CSM) secara berkala dan mencapai skor 4,36 pada tahun 2025. Skor tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 3.74.

Dalam menghadapi serangan siber, Perusahaan mengimplementasikan berbagai peralatan keamanan siber seperti *network firewall*, *web application firewall* dan *endpoint security* serta secara bersamaan dimonitor oleh *Security Operation Center* (SOC) yang beroperasi secara real time untuk deteksi dan analisa ancaman. Perusahaan juga memiliki

The IT strategic guidelines provide procedural guidance for implementing IT management, including:
1. The Role of IT in the Company;
2. IT Planning;
3. IT Process Framework and Organization;
4. IT Investment Management;
5. IT Resource Management;
6. IT Project Management; and
7. Requirements Management & Solution Identification.

In 2025, Pupuk Indonesia Group conducted an IT maturity assessment based on COBIT 2019, resulting in an average score of 4.19, an increase from the previous year's score of 3.93. This result indicates that most IT processes are well-managed. Improvements were also made in the Managed Data process, following up on recommendations from the previous year.

As part of strengthening Governance & Management of IT services, since 2023, PT PI has implemented an IT Service Management System (ITSMS) that adheres to the international standard ISO 20000-1:2018. This ITSMS supports continuous improvement in consistency, service quality, and the effectiveness of IT process control.

Strategy or Process for Implementing a Cybersecurity and Personal Data Protection (PDP) System

In compliance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-275/MBU/11/2024 on the Priority of Cybersecurity Implementation within State-Owned Enterprises, and the Republic of Indonesia Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, the Company has significantly reinforced its cybersecurity functions. The Company has an Information Security Management System (ISMS) in accordance with the ISO 27001:2022 standard. Information security is a shared responsibility inherent in all employees in all Company operations and is a mandatory requirement that must be complied with by all third parties. Socialization to all employees is conducted periodically, with the final activity taking place on October 2, 2025.

The Company is committed to maintaining data integrity and security through the application of adequate security measures, including Vulnerability Assessment/Penetration Testing (VA/PT) and vulnerability analysis to identify potential security gaps. Also, the Company regularly conducts internal and external audits to ensure compliance with applicable standards and the effectiveness of information system controls. The Company also collaborates with the National Cyber Security Agency (BSSN) to periodically measure its Cyber Security Maturity (CSM) level and achieved a score of 4.36 in 2025, an increase from the previous year's score of 3.74.

To address cyberattacks, the Company uses cybersecurity tools, such as network firewalls, web application firewalls, and endpoint security, which are simultaneously monitored by a Security Operations Center (SOC) that operates in real time for threat detection and analysis. The Company also has a Computer

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terdaftar di BSSN sebagai bagian dari kesiapsiagaan penanganan insiden keamanan siber. Sepanjang tahun pelaporan, terdapat sejumlah percobaan intrusi ke sistem/aplikasi PTPI dimana serangan yang terjadi dapat ditanggulangi tanpa menimbulkan gangguan operasional TI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelanggaran data. Jika terjadi pelanggaran, maka Perusahaan akan menindaklanjutinya dengan investigasi serta perbaikan sistem untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Ketersediaan Disaster Recovery Plan (DRP) dan Disaster Recovery Center (DRC)

Perusahaan memastikan ketersediaan infrastruktur *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai komponen penting dalam mendukung sistem TI guna menjamin kelangsungan operasional Perusahaan, baik dalam kondisi normal maupun darurat. Untuk meningkatkan keandalan dan kesiapan dalam menghadapi potensi gangguan operasional, Perusahaan secara berkala melakukan pemutakhiran strategi IT *Disaster Recovery Planning* (DRP) serta pelaksanaan simulasi penanganan gangguan. Pada 25 Agustus 2025, PTPI melakukan simulasi penanganan gangguan yang melibatkan salah satu fungsi bisnis utama yaitu Distribusi sebagai *end user* aplikasi yang terdampak bencana.

Pencapaian Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, pencapaian yang telah direalisasikan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Security Incident Response Team (CSIRT) registered with BSSN as part of its cybersecurity incident preparedness. Throughout the reporting year, there were several attempted intrusions into PT PI's systems/applications, but the attacks were remediated without disrupting IT operations. Therefore, it can be concluded that there were zero data breaches. If a breach does occur, the Company will follow up with an investigation and system improvements to prevent similar incidents in the future.

Availability of a Disaster Recovery Plan (DRP) and Disaster Recovery Center (DRC)

The Company ensures the availability of its Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) infrastructure, which are critical components supporting its IT systems and ensuring operational continuity, both under normal and emergency conditions. To improve reliability and preparedness in the face of potential operational disruptions, the Company periodically updates its IT Disaster Recovery Planning (DRP) strategy and conducts disruption response simulation. On August 25, 2025, PTPI conducted a disruption management simulation involving one of its core business functions, Distribution, as the end user of the application affected by the disaster.

2025 Achievements

Throughout 2025, the realized achievements are outlined in the table below.

No.	Kelompok Inisiatif Initiative Group	Nama Inisiatif Initiative Name	Uraian Description
1.	Model Operasi dan Tata Kelola TI IT Operating Model and Governance	Peningkatan IT Maturity Pupuk Indonesia Group berbasis COBIT 2019 Improving Pupuk Indonesia Group's IT Maturity Based on COBIT 2019	Melakukan peningkatan skor IT Maturity berbasis COBIT 2019 melalui perbaikan proses TI Improving the COBIT 2019-based IT Maturity score through IT Process enhancements
		Pemutakhiran Rencana Strategis TI 2025-2026 Pupuk Indonesia Group Updating Pupuk Indonesia Group's 2025-2026 IT Strategic Plan	Melakukan pemutakhiran Rencana Strategis TI 2025-2026 Pupuk Indonesia Group menyelaraskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Updating the Pupuk Indonesia Group's 2025-2026 IT Strategic Plan to align with the Company's Long-Term Plan
		Implementasi standar ISO/IEC 27001:2022 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi Implementing ISO/IEC 27001:2022 standard regarding Information Security Management Systems	Upgrade versi sertifikasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari ISO/IEC 27001:2013 ke ISO/IEC 27001:2022 Upgrading the Information Security Management System certification version from ISO/IEC 27001:2013 to ISO/IEC 27001:2022
2.	Aplikasi Bisnis Business Applications	Implementasi Digitalisasi Tata Kelola Subsidi Pupuk Implementing Digitalization of Fertilizer Subsidy Governance	Dengan adanya Perpres no 6 tahun 2025 yang diperbarui pada Perpres no 113 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi, maka PTPI bertanggung jawab penuh atas penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke titik serah. IPubers, aplikasi digital yang telah digunakan oleh Penerima Pada Titik Serah (PPTS) sejak 2024, dikembangkan dengan fitur pemesanan dari PPTS ke PTPI melalui Pelaku Usaha Distribusi (PUD). Fitur ini memungkinkan PTPI memonitor SLA pemenuhan pesanan PPTS oleh PUD dan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan. With the enactment of Presidential Regulation No. 6 of 2025, which was amended by Presidential Regulation No. 113 of 2025 concerning the management of subsidized fertilizer, PTPI assumed full responsibility for the distribution of subsidized fertilizer to the point of delivery. IPubers, a digital application used by Recipients at the Point of Delivery (PPTS) since 2024, was developed with an ordering feature from the PPTS to PTPI through Distribution Business Actors (PUD). This feature allows PTPI to monitor the PUD's SLA for fulfilling PPTS orders and ensuring the availability of subsidized fertilizer in the field.

No.	Kelompok Inisiatif Initiative Group	Nama Inisiatif Initiative Name	Uraian Description
		Pengembangan Single Platform Application Developing a Single Platform Application	1. Integrasi *end-to-end* proses pengadaan melalui aplikasi ProcureX untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa di seluruh Pupuk Indonesia Group. Pengembangan ProcureX tahun 2025 melingkupi: a. Modul Penerimaan b. Modul Contract Management c. Modul Warehouse Management 2. Pengembangan *Single Platform Corporate Service* (SENTRA) untuk mendigitalisasikan dan mengintegrasikan seluruh layanan korporat di Pupuk Indonesia Group dalam satu platform terpadu yang transparan, akuntabel, dan mudah dimonitor secara *real-time*. SENTRA mendukung proses *end-to-end* mulai dari pengajuan layanan, disposisi dan persetujuan berjenjang, hingga pelaporan dan monitoring kinerja layanan, sehingga meningkatkan efektivitas operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat tata kelola perusahaan. Pengembangan SENTRA tahun 2025 melingkupi: a. Modul Manajemen Risiko (pengelolaan dan monitoring risiko yang lebih terukur dan terdokumentasi) b. Modul Dokumen Sistem Manajemen (digitalisasi pengelolaan dan distribusi dokumen) c. Modul Pelaporan Akuntansi (FSCP & FSDC) untuk mendukung ketepatan dan percepatan pelaporan keuangan d. Modul Layanan Hukum (peningkatan *tracking* dan kontrol tindak lanjut layanan) e. Modul Layanan Umum seperti layanan kendaraan, konsumsi, dan peralatan kantor 3. Pengembangan *Single Platform* Keuangan (KIRANA) dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas proses transaksi keuangan, dan peningkatan kapabilitas analisa data kesehatan keuangan perusahaan. Pengembangan KIRANA tahun 2025 melingkupi: a. Modul Uang Muka dan *Reimbursement* b. Modul Permintaan Pembayaran c. Modul Business *Performance Analytics* 4. Pengembangan *Human Experience Management* (HXM) di platform PISmart dengan fokus pada peningkatan akurasi pengembangan kompetensi individu, penghematan biaya pengelolaan karyawan, dan layanan kepegawaian. Pengembangan PISmart tahun 2025 melingkupi: a. Modul Individual *Development Pla*n b. Modul *Payroll* c. Modul Rekrutmen d. Modul *Smart Services* e. Modul *People Analytics*

No.	Kelompok Inisiatif Initiative Group	Nama Inisiatif Initiative Name	Uraian Description
			1. End-to-end integration of the procurement process through the ProcureX application to improve the efficiency and effectiveness of the goods and services procurement process across the Pupuk Indonesia Group. ProcureX development in 2025 included: a. Receipt Module b. Contract Management Module c. Warehouse Management Module 2. Developing the Single Platform Corporate Service (SENTRA) to digitize and integrate all corporate services within the Pupuk Indonesia Group into a single, integrated platform that is transparent, accountable, and easily monitored in real time. SENTRA supports the end-to-end process, from service submission, disposition and tiered approval, to reporting and monitoring service performance, thereby increasing operational effectiveness, improving service quality, and strengthening corporate governance. The development and enhancement of SENTRA in 2025 included: a. Risk Management Module (more measurable and documented risk management and monitoring) b. Document Management System Module (digitalization of document management and distribution) c. Accounting Reporting Module (FSCP & FSDC) to support the accuracy and acceleration of financial reporting d. Legal Services Module (improved tracking and control of service follow-up) e. General Services Module such as vehicle, consumption, and office equipment services 3. Developing the Single Financial Platform (KIRANA) with a focus on increasing accountability in financial transaction processes and enhancing the Company's financial health data analysis capabilities. KIRANA development in 2025 included: a. Advance Payment and Reimbursement Module b. Payment Request Module c. Business Performance Analytics Module 4. Developing of Human Experience Management (HXM) on the PISmart platform with a focus on increasing the accuracy of individual competency development, reducing employee management costs, and improving personnel services. PISmart development in 2025 included: a. Individual Development Plan Module b. Payroll Module c. Recruitment Module d. Smart Services Module e. People Analytics Module
		Pengembangan *Production Analytics Center* (PAC) Developing a Production Analytics Center (PAC)	Integrasi data sensor pabrik di seluruh Pupuk Indonesia Group untuk *real-time monitoring* & *alerting* yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI)/*Machine Learning* (ML) model. ML Model yang dikembangkan yaitu *Anomaly Detection* pada sistem operasi pabrik dan *Remaining Useful Life* untuk mengestimasi sisa umur peralatan sebelum diperlukannya perbaikan. Integration of factory sensor data across Pupuk Indonesia Group for real-time monitoring and alerting utilizing AI/ML models. The ML models developed includes Anomaly Detection in the factory operating system and Remaining Useful Life to estimate the remaining lifespan of equipment before repairs are required.

No.	Kelompok Inisiatif Initiative Group	Nama Inisiatif Initiative Name	Uraian Description
		Pemanfaatan AI pada Digitalisasi Utilizing AI in Digitalization	Implementasi Pupuk Intelligence Center (PINTER) sebagai *platform Generative* AI terpusat, antara lain: 1. Pencarian dokumen sistem manajemen secara kontekstual pada Aplikasi SENTRA 2. AI *Assistant* yang memudahkan akses dan pembacaan data *dashboard* PAC 3. AYU (Agronom yang unggul) sebagai *WhatsApp Assistant* digital bagi agronomis 4. Penyusunan deskripsi KPI dan *executive summary* secara otomatis di KITA APPS Implementation of PINTER (Pupuk Intelligence Center) as a centralized Generative AI platform includes: 1. Contextual search for management system documents in the SENTRA application 2. An AI assistant that facilitates access and reading of PAC dashboard data 3. AYU (Agronom yang unggul) as a digital WhatsApp assistant for agronomists 4. Automatic compilation of KPI descriptions and executive summaries in KITA APPS
		Sentralisasi aplikasi layanan TI Pupuk Indonesia Group Centralizing Pupuk Indonesia Group's IT service applications	Pengembangan sistem berbasis IT *Service Management* (ITSM) yang terintegrasi di Pupuk Indonesia Group Developing of an integrated IT Service Management (ITSM) system within the Pupuk Indonesia Group
		Pengembangan dan penyiapan Industri 4.0 untuk *Global Lighthouse* Developing and Preparing Industry 4.0 for Global Lighthouse	Mempersiapkan Perusahaan untuk penerapan teknologi dan praktik industri 4.0 dengan standar *Global Lighthouse* Industri 4.0 Preparing the Company for Industry 4.0 technologies and practices based on the Global Lighthouse Industry 4.0 standards
3.	Manajemen Data Data Management	*Data Management and Analytics*	Pengadopsian kerangka kerja standar internasional serta pengembangan platform analitik *Big Data* yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data secara strategis dan efisien dengan melakukan inisiatif-inisiatif berikut: 1. Peningkatan *Data Governance* 2. *Single Source of Truth* 3. Regenerasi *Middleware Database* Adopting an international standard framework and development of a Big Data analytics platform for strategic and efficient data-driven decision-making through the following initiatives: 1. Improved Data Governance 2. Single Source of Truth 3. Database Middleware Regeneration
4.	Teknologi – Infrastruktur TI Technology – IT Infrastructure	Implementasi *Network Operation Center* Implementing a Network Operation Center	Peningkatan performa layanan *network* untuk operasional Perusahaan serta membentuk tim operasional yang bertanggung jawab untuk monitoring, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan Improving network service performance for Company operations and establishing an operational team responsible for monitoring, maintaining, and managing network infrastructure.
5.	Teknologi – Keamanan Siber Technology – Cybersecurity	Implementasi Teknologi Keamanan Siber Implementing Cybersecurity Technology	Penerapan dan pengkinian teknologi untuk meningkatkan keamanan Perusahaan dengan melakukan inisiatif-inisiatif sebagai berikut: 1. Implementasi *Multi-Factor Authentication* (MFA) 2. Penyempurnaan *Identity Access Management* (IAM) 3. Implementasi *Disk Encryption & Minimization (Workstation)* 4. Implementasi *Database Encryption (Server)* 5. Implementasi/Penyempurnaan *Server Monitoring Tool* 6. Pengembangan *End-Point Security* Implementing and updating technology to improve Company security through the following initiatives: 1. Implementing Multi-Factor Authentication (MFA) 2. Improving Identity Access Management (IAM) 3. Implementing Disk Encryption & Minimization (Workstation) 4. Implementing Database Encryption (Server) 5. Implementing/Improving Server Monitoring Tools 6. Developing End-Point Security

No.	Kelompok Inisiatif Initiative Group	Nama Inisiatif Initiative Name	Uraian Description
		Pembentukan *Security Operation Center* (SOC) dan Perluasan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Establishing a Security Operation Center (SOC) and Expanding the Computer Security Incident Response Team (CSIRT)	Pusat operasi keamanan TI yang terintegrasi dan memiliki kemampuan dalam mendeteksi anomali pada sistem yang berpotensi terhadap terjadinya serangan siber maupun kehilangan data An integrated IT security operations center capable of detecting system anomalies that could potentially lead to cyberattacks or data loss.
		Penyusunan Kebijakan Kepatuhan terhadap Pelindungan Data Pribadi (PDP) Developing a Personal Data Protection (PDP) Compliance Policy	Kepatuhan terhadap PDP dilakukan dengan penetapan kebijakan yang dituangkan dalam Pedoman serta penyediaan *call center* pengaduan pelanggaran PDP di Perusahaan Compliance with PDP was achieved by establishing policies outlined in the Guidelines and the provision of a call center for complaints of PDP violations within the Company.

Berdasarkan realisasi program kerja sepanjang tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel di atas, Fungsi Teknologi Informasi turut mendukung operasional dan pengembangan Perusahaan melalui implementasi berbagai inisiatif yang selaras dengan kebutuhan bisnis.

Secara keseluruhan, dukungan layanan TI yang terintegrasi, adaptif, dan responsif tersebut berkontribusi dalam menjaga kelancaran aktivitas organisasi, mendorong efisiensi proses, serta memperkuat fondasi transformasi digital guna mendukung pencapaian kinerja Perusahaan.

Investasi Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2025, Kompartemen TI telah merealisasikan beberapa item investasi sebagai berikut :

1. Implementasi dan pengembangan sistem.
2. *Upgrade* dan optimalisasi infrastruktur jaringan, server dan *storage.*
3. Pembelian lisensi *software.*
4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan *Database Server.*
5. Peningkatan Kapasitas DC.
6. Peningkatan penyediaan perangkat bagi pengguna akhir.

Based on the work programs realized throughout 2025, as presented in the table above, the Information Technology Function supported the Company's operations and development through initiatives aligned with business needs.

Overall, this integrated, adaptive, and responsive IT service support contributed to maintaining the smooth running of organizational activities, driving process efficiency, and strengthening the foundation of digital transformation to support the Company's performance.

Information Technology Investment

Throughout 2025, the IT Compartment realized the following investment items:

1. System implementation and development.
2. Upgrading and optimizing network, server, and storage infrastructure.
3. Purchasing software licenses.
4. Improving Database Server Quality and Security.
5. Increasing DC Capacity.
6. Improving end-user device provision.

Rencana Pengembangan TI 2026

Rencana pengembangan tahun 2026 terbagi atas 5 (lima) portofolio, yaitu :

Model Operasi dan Tata Kelola TI

1. Peningkatan *Service Level Operational* TI Pupuk Indonesia Group
2. Implementasi *Enterprise Architecture* (EA) Pupuk Indonesia Group

Aplikasi Bisnis

1. Implementasi digitalisasi tata kelola pupuk bersubsidi
2. Pengembangan *single platform*
3. Implementasi model Geospasial lahan pertanian
4. Implementasi aplikasi untuk akuisisi data petani dan lahan
5. Sentralisasi layanan TI Pupuk Indonesia Group
6. Implementasi *Small Enterprise* ERP
7. Peningkatan dan keberlanjutan sistem ERP SAP
8. Pengembangan dan penyiapan Industri 4.0 untuk *Global Lighthouse*

Manajemen Data

1. Peningkatan manajemen dan tata kelola data
2. Pemanfaatan data *warehouse*
3. Implementasi *Single Source of Truth* (SsoT)

Teknologi – Infrastruktur TI

1. Peningkatan efektivitas kapasitas *storage*
2. Pemutakhiran *server operating system*

Teknologi – Keamanan TI

Implementasi teknologi keamanan siber

2026 IT Development Plan

The 2026 development plan is divided into five portfolios:

IT Operational Model and Governance

1. Improving Pupuk Indonesia Group's Operational Service Level
2. Implementing Pupuk Indonesia Group's Enterprise Architecture (EA)

Business Applications

1. Implementation the digitalization of subsidized fertilizer management
2. Developing a single platform
3. Implementation a geospatial model for agricultural land
4. Implementation an application for farmer and land data acquisition
5. Centralizing Pupuk Indonesia Group's IT services
6. Implementation Small Enterprise ERP
7. Improving and sustaining the SAP ERP system
8. Developing and preparing Industry 4.0 for Global Lighthouse

Data Management

1. Improving data management and governance
2. Utilizing data warehouses
3. Implementing Single Source of Truth (SSO)

Technology – IT Infrastructure

1. Increasing storage capacity effectiveness
2. Upgrading server operating system

Technology – IT Security

Implementation cybersecurity technology

Pedoman Etika dan Perilaku

Ethics and Conduct Guidelines

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan salah satu elemen fundamental dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang selama ini berperan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman tersebut digunakan sebagai rujukan bagi seluruh insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam menjalin hubungan bisnis dengan pelanggan, mitra usaha, pesaing, kreditur/investor, penyedia barang dan/atau jasa, masyarakat dan lingkungan sekitar, pemegang saham, regulator, rekan kerja maupun pemangku kepentingan lainnya. Selain itu Pedoman ini juga merupakan rujukan bagi Perusahaan dalam melaksanakan bisnis (etika bisnis) khususnya ketika berhadapan dengan Pemegang Saham, Regulator, Auditor, Asesor, Aparat Penegak Hukum, Pejabat Publik maupun dengan pemangku-pemangku kepentingan lainnya.

Pemberlakuan Pedoman Etika dan Perilaku menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan memahami bahwa penerapan GCG memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai dan keberlanjutan pertumbuhan usaha jangka panjang, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi Pemegang Saham, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan GCG secara konsisten, salah satunya melalui penyusunan, penerapan, dan pemutakhiran Pedoman Etika dan Perilaku sesuai regulasi terbaru dan sesuai *best practices* perusahaan sejenis.

Penetapan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code Of Conduct*) Perusahaan

Pedoman Etika dan Perilaku pertama kali diterbitkan dan ditandatangani secara bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 5 November 2012. Sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 023/KEP/KOM/XII/2024 dan 141/A/HK/1/D0201/SK/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PTPI.

Maksud, Tujuan, dan Manfaat Pedoman Etika dan Perilaku

Maksud penerapan Pedoman Etika dan Perilaku bagi setiap Insan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Insan Perusahaan memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan serta interaksi dengan pemangku kepentingan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Insan Perusahaan selalu bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap situasi serta dalam melakukan interaksi dengan pemangku kepentingan;

The Code of Ethics and Conduct is a fundamental element for implementing corporate governance principles, which plays a role in supporting the achievement of the Company's Vision and Mission. These guidelines serve as a reference for all Company personnel in carrying out their daily duties and activities, and include establishing business relationships with customers, business partners, competitors, creditors/investors, suppliers of goods and/or services, the community and the surrounding environment, shareholders, regulators, colleagues, and other stakeholders. These guidelines also serve as a reference for the Company in conducting business (business ethics), especially when dealing with Shareholders, Regulators, Auditors, Assessors, Law Enforcement Officials, Public Officials, and other stakeholders.

The Code of Ethics and Conduct is an integral part of the implementation of GCG principles. The Company understands that GCG implementation plays a strategic role in increasing value and sustainable long-term business growth, which benefits not only shareholders but also all stakeholders. Therefore, the Company is committed to consistently implementing GCG, including the preparation, implementation, and updating of the Code of Ethics and Conduct in accordance with the latest regulations and best practices of similar companies.

Establishing the Ethics and Conduct Guidelines

The Ethics and Conduct Guidelines were first issued and jointly signed by the PTPI Board of Commissioners and Board of Directors on November 5, 2012. In line with the Company's business developments, the Ethics and Conduct Guidelines have been updated in the Joint Decrees of the PTPI Board of Commissioners and Board of Directors No. 023/KEP/KOM/XII/2024 and 141/A/HK/1/D0201/SK/2024 dated December 20, 2024, concerning the PTPI Code of Conduct.

Purpose, Objectives, and Benefits of the Ethics and Conduct Guidelines

The purpose of implementing the Code of Ethics and Conduct for all Company Employees is as follows:

1. Company personnel understanding that all Company activities and interactions with stakeholders must be based on the principles of good corporate governance;
2. Company personnel always acting with integrity, professionalism, and responsibility in all situations and in all interactions with stakeholders;

3. Insan Perusahaan menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan, yang dapat membangun hubungan kerja yang harmonis antar Insan Perusahaan, meningkatkan kinerja, produktivitas dan kreativitas;
4. Insan Perusahaan diharapkan mampu meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan regulator.

Tujuan-tujuan utama dari penyusunan dan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku:
1. Mendukung pencapaian Tujuan, Visi, dan Misi Perusahaan;
2. Panduan etika Perusahaan dalam melakukan usaha;
3. Menyediakan panduan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan serta melakukan interaksi dengan pemangku kepentingan;
4. Menjadi pedoman untuk menghindari Benturan Kepentingan dalam melaksanakan aktivitas Perusahaan;
5. Mendorong terciptanya hubungan yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antara Insan Perusahaan dan pemangku kepentingan;
6. Meminimalisir risiko potensi terjadinya permasalahan hukum yang diakibatkan oleh pelanggaran atas etika maupun perilaku dalam menjalankan aktivitas Perusahaan;
7. Mendukung kegiatan usaha Perusahaan untuk selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha;
8. Menggerakkan kegiatan usaha Perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien;
9. Mewujudkan perilaku profesional dan produktif sehingga tercipta lingkungan kerja yang positif.
10. Memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan;
11. Menambah keyakinan dan kepastian bagi pemegang saham bahwa Perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, dan wajar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku ini secara konsisten dan konsekuen oleh Insan Perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:
1. Bagi Perusahaan:
   a. Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif ; dan
   b. Meningkatkan nilai Perusahaan
2. Bagi Pemegang Saham:
   Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah, dengan prinsip kehati-hatian, efisien, transparan, akuntabel, dan fair, sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan
3. Bagi Insan Perusahaan:
   a. Memberikan acuan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam melaksaksanakan tugas dan tanggung jawab ; dan
   b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas secara menyeluruh.

3. Company personnel creating a healthy and comfortable work environment within the Company, which can build harmonious working relationships among Company personnel, improve performance, productivity, and creativity;
4. Company personnel are expected to minimize the potential for deviations or violations of the rules and regulations established by the Company and regulators.

The main objectives of the Ethics and Conduct Guidelines development and implementation include:
1. Supporting the achievement of the Company's Purpose, Vision, and Mission;
2. Guiding the Company's ethics in conducting business;
3. Providing behavioral guidelines that must be adhered to by all Company personnel when carrying out all Company activities and interacting with stakeholders;
4. Serving as a guideline to avoid Conflicts of Interest in carrying out Company activities;
5. Encouraging the creation of harmonious, synergistic, and mutually beneficial relationships between Company personnel and stakeholders;
6. Minimizing the risk of potential legal issues arising from ethical or behavioral violations in carrying out Company activities;
7. Supporting the Company's business activities by consistently observing and implementing the principles of business competition;
8. Driving the Company's business activities to be more effective and efficient;
9. Demonstrating professional and productive behavior to create a positive work environment.
10. Providing certainty and protection to stakeholders in their relationships with the Company;
11. Increasing shareholder confidence and certainty that the Company is managed transparently, accountably, responsibly, independently, and fairly in accordance with the principles of good corporate governance.

The consistent and consistent implementation of these Ethics and Conduct Guidelines by Company Personnel is expected to provide the following benefits:
1. For the Company:
   a. Encouraging more efficient and effective Company operations; and
   b. Increasing Company value.
2. For Shareholders:
   Increasing confidence that the Company is managed in a trustworthy manner, with the principles of prudence, efficiency, transparency, accountability, and fairness, in accordance with good corporate governance to achieve the desired level of profitability.
3. For Company Personnel:
   a. Providing clear guidelines regarding permitted and prohibited behavior in carrying out duties and responsibilities; and
   b. Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics, and openness, thereby improving overall performance and productivity.

4. Bagi Pemangku Kepentingan:
   a. Memberikan dukungan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan pemangku kepentingan;
   b. Menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan dengan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi dan etika bisnis yang sehat;
   c. Menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan; dan
   d. Membangun masyarakat dan pemangku kepentingan yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan berintegritas.

Pokok-Pokok Isi Pedoman Etika dan Perilaku

Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan memuat hal-hal sebagai berikut

1. Etika Usaha Perusahaan, memberikan panduan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, serta sikap dan perilaku Perusahaan sebagai entitas bisnis dalam menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan pemangku kepentingan, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;
2. Etika Insan Perusahaan, memberikan panduan kepatuhan Insan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjelaskan bagaimana Insan Perusahaan bersikap, beretika, dan bertindak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;
3. Tata Perilaku Insan Perusahaan, memberikan panduan tentang kaidah tata perilaku Insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Perusahaan dan di luar Perusahaan;
4. Komitmen Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku, memuat Komitmen Perusahaan, Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku secara konsisten dan berkelanjutan;
5. Peran Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku, memuat peran Perusahaan, Insan Perusahaan, dan Pemangku Kepentingan dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku; dan
6. Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku, mengatur mekanisme sosialisasi dan internalisasi, mekanisme pelaporan pelanggaran, sanksi atas pelanggaran, serta pengukuran dan evaluasi atas Pedoman Etika dan Perilaku.

Pengungkapan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Pedoman Etika dan Perilaku berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan, meliputi: Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, karyawan perusahaan dan karyawan dari pihak ketiga yang ditempatkan di perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku menjadi acuan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Seluruh Insan Perusahaan wajib untuk memenuhi ketentuan mengenai Pedoman Etika dan Perilaku . Setiap insan perusahaan diharapkan bertingkah laku sesuai budaya perusahaan sehingga tercipta perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya dalam hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun mitra kerja.

4. For Stakeholders:
   a. Providing support to the community and stakeholders to achieve socio-economic welfare;
   b. Creating harmonious, synergistic, and mutually beneficial relationships with the Company based on sound corporate principles and business ethics;
   c. Cultivating and enhancing trust from all stakeholders; and
   d. Building a community and stakeholders that encourages sustainable growth and integrity.

Main Contents of the Ethics and Conduct Guidelines

The Company's Ethics and Conduct Guidelines contains the following:

1. Corporate Business Ethics, which provides guidance on the Company's compliance with laws and regulations, as well as the Company's attitude and behavior as a business entity in balancing the Company's interests with those of stakeholders, in accordance with GCG principles;
2. Company Personnel Ethics, which provides guidance on Company Personnel compliance with laws and regulations, and explains how Company Personnel should behave, be ethical, and act in accordance with applicable norms and provisions;
3. Company Personnel Code of Conduct, which provides guidance on the rules of conduct for Company Personnel in carrying out their duties and responsibilities within the Company and outside the Company;
4. Commitment to applying the Ethics and Conduct Guidelines, containing the commitment of the Company, Company Personnel, and Stakeholders to consistently and sustainably apply the Ethics and Conduct Guidelines;
5. Role in applying the Ethics and Conduct Guidelines, containing the roles of the Company, Company Personnel, and Stakeholders in applying and supervising the application of the Ethics and Conduct Guidelines; and
6. Enforcement of the Code of Ethics and Conduct, regulating mechanisms for socialization and internalization, reporting mechanisms for violations, sanctions for violations, and measurement and evaluation of the Code of Ethics and Conduct.

Disclosure that the Code of Ethics Applies to All Levels of the Organization

The Code of Ethics and Conduct applies to all Company Personnel, including: the Board of Commissioners, the Board of Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners, Company employees, and third-party employees assigned to the Company. The Code of Ethics and Conduct serves as a reference for interacting with internal and external Company stakeholders. All Company Personnel are required to comply with the provisions of the Code of Ethics and Conduct. Every Company Personnel is expected to conduct themselves in accordance with the Company culture, thus fostering professional, responsible, fair, appropriate, and trustworthy behavior in business relationships with colleagues and business partners.

Upaya Penyebaran, Sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku, serta Penandatanganan Pakta Integritas

Dalam rangka memperkuat implementasi prinsip GCG, Perusahaan secara konsisten melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku, mengingat sosialisasi merupakan langkah krusial dalam membentuk insan PTPI yang berperilaku sesuai dengan budaya perusahaan. Pedoman ini disampaikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, Direksi, serta seluruh karyawan.

Dalam rangka memastikan bahwa Pedoman Etika dan Perilaku telah disampaikan, dimengerti, dipahami, serta ditaati seluruh Insan Perusahaan, maka seluruh Insan Perusahaan diwajibkan menandatangani Pakta Integritas secara periodik setiap tahun, sebagai bentuk komitmen Insan Perusahaan dalam mematuhi Ketentuan Perusahaan, termasuk Pedoman Etika dan Perilaku dan semua ketentuan yang berlaku.

Penandatanganan pernyataan komitmen terhadap Pedoman Etika dan Perilaku dalam bentuk Pakta Integritas tahun 2025 sebagai berikut:

Jumlah Insan Pupuk Indonesia Group yang Telah Menandatangani Pernyataan Komitmen Tahun 2025 Number of Pupuk Indonesia Group Employees Who Have Signed the 2025 Commitment Statement
18.442

Persentase Insan Pupuk Indonesia Group yang Telah Menandatangani Pernyataan Komitmen Tahun 2025 Percentage of Pupuk Indonesia Group Employees Who Have Signed the 2025 Commitment Statement
100%

Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Dissemination and Socialization of the Ethics and Behavior Guidelines, and Signing of the Integrity Pact

To strengthen the GCG implementation principles, the Company consistently socializes the Ethics and Behavior Guidelines, considering that this is a crucial step in shaping PTPI employees to behave in accordance with the Company's culture. These guidelines are disseminated and socialized to the Board of Commissioners and its supporting bodies, the Board of Directors, and all employees.

To ensure the Code of Ethics and Conduct has been communicated, understood, and complied with by all Company personnel, all Company personnel are required to sign an Integrity Pact every year, as a form of commitment to comply with Company Regulations, including the Code of Ethics and Conduct and all applicable provisions.

The signing of the statement of commitment to the Code of Ethics and Conduct in the form of the Integrity Pact in 2025 was as follows:

Details can be seen in the table below:

No	Perusahaan Company	Jumlah yang Sudah Menandatangani Pakta Integritas Number of Persons Who Have Signed the Integrity Pact	Persentase Percentage
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1952	100%
2	PT Petrokimia Gresik	5952	100%
3	PT Pupuk Kujang	1535	100%
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	3888	100%
5	PT Pupuk Iskandar Muda	1106	100%
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	3220	100%
7	PT Rekayasa Industri	611	100%
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	74	100%
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	86	100%
10	PT Pupuk Indonesia Pangan	18	100%
	Jumlah Total	**18.442**	**100%**

Kebijakan Penegakkan Disiplin dan Penanganan Pelanggaran

Perusahaan secara rutin melakukan pemantauan terhadap penerapan Pedoman Etika dan Perilaku serta menyediakan saluran pengaduan terkait pelanggaran etika melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan. Sesuai dengan pedoman tersebut, setiap pelanggaran etika akan dikenai sanksi yang berlaku, sebagai upaya memberikan efek jera bagi seluruh Insan Perusahaan.

Disciplinary Enforcement and Violation Handling Policy

The Company routinely monitors the application of the Code of Ethics and Conduct and provides a complaint channel for ethical violations through the Company's Whistleblowing System (WBS) application. In accordance with these guidelines, any ethical violations will be subject to applicable sanctions, as a deterrent to all Company personnel.

Sanksi Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku

Sesuai dengan Peraturan Perusahaan No. 145/A/HK/E0500/SK/2024 tanggal 30 Desember 2024, jenis sanksi ditetapkan dengan klasifikasi mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Sanctions for Violations of the Code of Ethics and Conduct

In accordance with Company Regulation No. 145/A/HK/E0500/SK/2024 dated December 30, 2024, the types of sanctions were determined, ranging from the lightest to the most severe.

No.	Pedoman Guidelines	Uraian Description
1.	Klasifikasi Sanksi: Sanction Classification:	
	Sanksi Ringan Minor Sanctions	Teguran Lisan Verbal Warning
	Sanksi Sedang Moderate Sanctions	• Surat Peringatan Tertulis 1 berlaku 6 (enam) bulan, • Surat Peringatan Tertulis 2 berlaku 6 (enam) bulan • Written Warning Letter 1 valid for 6 (six) months, • Written Warning Letter 2 valid for 6 (six) months
	Sanksi Berat Severe Sanctions	• Surat Peringatan Tertulis 3 berlaku 6 (enam) bulan • Surat Peringatan Tertulis 1 & Terakhir berlaku 6 (enam) bulan, dan • Surat Peringatan Tertulis 3 berlaku 6 (enam) bulan • Written Warning Letter 3 valid for 6 (six) months • Written Warning & Final Letter 1 valid for 6 (six) months, and • Written Warning Letter 3 valid for 6 (six) months
	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment	Untuk pelanggaran bersifat mendesak yang dapat langsung dilakukan PHK For urgent violations that can result in immediate termination
	Ganti Kerugian Compensation	• Apabila terjadi kerugian material terhadap Perusahaan, akibat dari perbuatan pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja, di samping sanksi hukuman seperti tersebut di atas, diberikan juga sanksi/hukuman ganti rugi senilai kerugian yang ditimbulkan. • Ganti rugi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji, jasa operasi, bantuan cuti, dan hak-hak lainnya. Apabila karyawan tidak bersedia mengganti maka akan diproses secara hukum. • If the Company experiences material losses due to violations of work rules and discipline, in addition to the penalties mentioned above, compensation equivalent to the losses incurred will also be imposed. • Compensation can be made through deductions from wages, operational fees, leave assistance, and other entitlements. If the employee refuses to pay, legal action will be taken.
2.	Bentuk Sanksi Form of Sanctions	• Perusahaan akan memberikan sanksi atau hukuman kepada karyawan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. • Pemberian sanksi atau hukuman dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan langkah korektif dari Perusahaan, agar karyawan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa mendatang. • Teguran lisan bersifat internal pada unit kerja dan harus menjadi perhatian serius karyawan, karena teguran lisan tersebut merupakan catatan atasan untuk menilai konduite karyawan yang bersangkutan. • Surat peringatan tertulis berlaku di seluruh lingkungan unit kerja Perusahaan dan akan mempengaruhi konduite karyawan yang bersangkutan. • Selama masa proses penyelesaian kasus pelanggaran hingga diterapkannya sanksi seperti tersebut di atas, karyawan tidak berhak atas kenaikan pangkat, baik berupa promotion increase maupun merit increase. • Apabila terdapat atasan yang enggan melaksanakan dan/atau memberikan sanksi atau hukuman kepada karyawan yang seharusnya menerimanya dalam jangka waktu tertentu, maka pejabat atau atasan tersebut akan diberikan sanksi administratif atau surat peringatan oleh pejabat yang lebih tinggi dan diketahui oleh Kompartemen Operasional SDM & Umum. • Skorsing apabila dalam tindakan atau perilaku dikategorikan sebagai PHK atau Pelanggaran Berat dapat dilakukan Skorsing. • The Company will impose sanctions or penalties on employees who commit violations according to the severity of the error or violation. • Sanctions or penalties are intended as a form of guidance and corrective action by the Company, so that employees can improve their attitudes and behavior in the future. • Verbal warnings are internal to the work unit and must be taken seriously by employees, as they serve as a record for their superiors in assessing the employee's conduct. • Written warnings are valid throughout the Company's work units and will affect the employee's conduct. • During the process of resolving the violation case until the sanctions mentioned above are implemented, employees are not entitled to promotions or merit increases. • If a superior is reluctant to implement and/or impose sanctions or penalties on employees who should have received them within a certain timeframe, the official or superior will be given administrative sanctions or a warning letter by a higher-ranking official, with the knowledge of the HC & General Operations Department. • Suspension if an action or behavior is categorized as a layoff or serious violation can be carried out.

Jumlah Pelanggaran Etika

Sebagai bagian dari penegakan etika Perusahaan, PTPI secara konsisten melaksanakan tindakan disipliner dengan rincian sanksi yang diterapkan selama tahun 2025, 2024, dan 2023.

Number of Ethical Violations

As part of enforcing corporate ethics, PTPI consistently implements disciplinary actions, with detailed sanctions applied during 2025, 2024, and 2023.

Sanksi Sanction	2025	2024	2023
Tindakan Disiplin Disciplinary Action	38	27	41
Jumlah Total	38	27	41

Management Review terhadap Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku

Dalam upaya mengevaluasi kinerja Perusahaan, PTPI secara berkesinambungan melakukan kajian terhadap penerapan Pedoman Etika dan Perilaku. Pedoman yang saat ini berlaku ditetapkan pada 20 Desember 2024 sebagai pemutakhiran dari pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya pada 16 Desember 2021.

Management Review of the Implementation of the Ethics and Conduct Guidelines

To evaluate the Company's performance, PTPI continuously reviews the implementation of the Ethics and Conduct Guidelines. The current guidelines were established on December 20, 2024, as an update to the guidelines previously established on December 16, 2021.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Perusahaan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk opsi pelaporan anonim. Implementasi WBS ditujukan, antara lain untuk:

1. Menyediakan sarana pelaporan yang aman, mudah diakses, dan terpercaya, baik bagi *stakeholder* internal maupun eksternal;
2. Mendorong deteksi dini atas potensi pelanggaran, baik yang berdampak finansial maupun non-finansial, guna melindungi aset, reputasi, dan keberlangsungan usaha Perusahaan;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam melaporkan dugaan pelanggaran;
4. Menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor (*whistleblower*) dari segala bentuk intimidasi, diskriminasi, maupun tindakan balasan;
5. Memastikan proses penanganan laporan yang objektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
6. Mendukung penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran;
7. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem pengendalian intern dan tata kelola Perusahaan;
8. Menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, transparan, dan beretika, serta mendorong budaya berani melaporkan (*speak-up culture*) di lingkungan Perusahaan.

Dasar Hukum dan Kebijakan

WBS di lingkungan Pupuk Indonesia Group diimplementasikan berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku serta best practice, yaitu:

1. Perundang-Undangan dan Ketentuan Kementerian BUMN
   a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
   b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
   d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
   e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

The Company has a Whistleblowing System (WBS) that is accessible to both internal and external stakeholders, including an anonymous reporting option. The WBS implementation aims to:

1. Provide a secure, easily accessible, and reliable reporting platform for both internal and external stakeholders;
2. Encourage early detection of potential violations, both with financial and non-financial impacts, to protect the Company's assets, reputation, and business continuity;
3. Improve the effectiveness of internal supervision through the active participation of all stakeholders in reporting suspected violations;
4. Guarantee the confidentiality and protection of whistleblowers from all forms of intimidation, discrimination, or retaliation;
5. Ensure an objective, transparent, and accountable report handling process, in accordance with applicable provisions and regulations;
6. Support the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, particularly transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness;
7. Increase stakeholder trust in the Company's internal control system and governance;
8. Create an open, transparent, and ethical work environment, and encourage a speak-up culture within the Company.

Legal Basis and Policy

The Pupuk Indonesia Group WBS is based on the applicable regulatory framework and best practices, including:

1. Legislation and Provisions of the Ministry of BUMN
   a. Law Number 28 of 1999 concerning the Governance of a Clean State Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
   b. Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in conjunction with Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
   c. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
   d. Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection;
   e. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
   f. Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for State Capital Participation and Administration in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies, in conjunction with Republic of Indonesia Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Procedures for State Capital Participation and Administration in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

i. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MSU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

j. Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Penanganan Benturan Kepentingan dan Penguatan Pengawasan Intern;

k. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan PTPI Nomor 79 Tahun 2020 dan Nomor 018/A/PA.08.01/E42/SP/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penanganan Pengaduan terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (WBS Terintegrasi PI-KPK), beserta Adendum Nomor 95/Tahun 2023 dan Nomor 178/A/PA/A21/SP/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

2. Pedoman dan Standar Praktik Terbaik
   a. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (*Whistleblowing System*-WBS), Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2008;
   b. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Persyaratan dengan Panduan Penggunaan;
   c. ISO 37002:2021 *Whistleblowing Management System* - Panduan Penggunaan;
   d. ISO 37301:2021 *Compliance Management System* - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan;
   e. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan TPK Terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021 melalui surat Pimpinan KPK No. S/4136/PM.00.00/30-35/07/2021 tanggal 23 Juli 2021;
3. Ketentuan dan/atau Kebijakan Internal PTPI
   a. Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya;
   b. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 023/KEP/KOM/XII/2024 dan 141/A/HK/1/D0201/SK/2024 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PTPI;
   c. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 002/KEP.KOM/11/2022 dan Nomor 012.1/A/KU/A24/SK/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PTPI;
   d. Pedoman Pengelolaan Tata Kelola dan Kepatuhan, PI-SMT-PD-004;
   e. Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*), PI-TKK-PD-001;
   f. Pedoman Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (WBMS), Nomor Dokumen PI-SEK-PD-011
   g. Peraturan perusahaan PTPI mengenai ketenagakerjaan tahun 2024-2026;

g. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises, in conjunction with Government Regulation Number 23/2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 45 of 2005;

h. Government Regulation Number 43 of 2018 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Corruption;

i. Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MSU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;

j. The Ministry of State-Owned Enterprises Circular Letter Number SE-2/MBU/07/2019 dated July 29, 2019, concerning Clean Management of State-Owned Enterprises through the Implementation of Prevention of Corruption, Collusion, and Nepotism, as well as Handling Conflicts of Interest and Strengthening Internal Oversight;

k. Cooperation Agreement between the Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission and PTPI No. 79 of 2020 and No. 018/A/PA.08.01/E42/SP/2021 dated March 2, 2021, concerning the Handling of Complaints Related to Corruption Crimes in Corruption Eradication Efforts (Integrated WBS PI-KPK), along with Addendum No. 95/2023 and No. 178/A/PA/A21/SP/2023 dated August 2, 2023.

2. Best Practice Guidelines and Standards
   a. Guidelines for the Whistleblowing System (WBS), National Committee for Governance Policy, 2008;
   b. SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Requirements with User Guide;
   c. ISO 37002:2021 Whistleblowing Management System - User Guide;
   d. ISO 37301:2021 Compliance Management System - Requirements with User Guide;
   e. Guidelines for the Integrated Corruption Crime Complaint Handling System, Corruption Eradication Commission, 2021, through KPK Leadership Letter No. S/4136/PM.00.00/30-35/07/2021 dated July 23, 2021;
3. PTPI Internal Provisions and/or Policies
   a. The Company's Articles of Association and amendments;
   b. Joint Decrees of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 023/KEP/KOM/XII/2024 and 141/A/HK/1/D0201/SK/2024 concerning PTPI's Code of Ethics and Conduct;
   c. Joint Decrees of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 002/KEP.KOM/11/2022 and No. 012.1/A/KU/A24/SK/2022 dated February 16, 2022, concerning PTPI's Code of Corporate Governance;
   d. Governance and Compliance Management Guidelines, PI-SMT-PD-004;
   e. Group Governance Guidelines (Code of Group Governance), PI-TKK-PD-001;
   f. Violation Reporting Management System (WBMS) Guidelines, Document Number PI-SEK-PD-011;
   g. Pupuk Indonesia's company regulations regarding employment for the 2024-2026 period;

h. Pedoman Penegakan Disiplin Kerja Nomor PI-SDM-PD-001;
i. Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS), Nomor Dokumen PI-SEK-PR-013.
j. Prosedur Pemberian Penghargaan atas Pelaporan Pelanggaran melalui WBS, PI-SEK-PR-020;
k. Prosedur Audit Khusus, PI-SPI-PR-003;
l. Prosedur Pelaporan Kejadian Fraud kepada Penegak Hukum, PI-SEK-PR-009.

Perusahan telah memiliki pedoman dan prosedur terkait WBS pertama kali sejak 8 September 2017 dan telah dimutakhirkan beberapa kali mengacu pada ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 37002:2021 tentang *Whistleblowing Management System* (WBMS), rekomendasi GCG Assessment dan monev WBS Terintegrasi PI dan KPK. Implementasi WBMS ditetapkan dalam Pedoman Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (WBMS) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-011 Rev.3 dan Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Nomor Dokumen PI-SEK-PR-013 Rev.3, yang terakhir diperbarui pada 13 Juli 2023. Melalui pedoman dan prosedur tersebut, Perusahaan memastikan mekanisme pengelolaan laporan berjalan terstandarisasi, akuntabel, dan memberikan kepastian proses bagi seluruh pihak.

Prinsip Penerapan WBS

Dalam penerapan WBS, Perusahaan menjunjung prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi kepada pihak berwenang sesuai kebutuhan, kehati-hatian, objektivitas, ketidakberpihakan , serta perlindungan bagi pelapor dan pihak terkait. Perusahaan juga menerapkan asas kerahasiaan dan praduga tidak bersalah dalam setiap tahap penanganan. Berikut penjelasan prinsip penerapan WBS di lingkup PTPI:

h. Work Discipline Enforcement Guidelines, Number PI-SDM-PD-001;
i. Violation Reporting System (WBS) Management Procedures, Document Number PI-SEK-PR-013.
j. Reward Procedures for Reporting Violations through the WBS, PI-SEK-PR-020;
k. Special Audit Procedures, PI-SPI-PR-003;
l. Procedures for Reporting Fraud Incidents to Law Enforcement, PI-SEK-PR-009.

The Company has guidelines and procedures related to the WBS since September 8, 2017, and these have been updated several times, referring to ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems, ISO 37002:2021 on Whistleblowing Management Systems (WBMS), recommendations for GCG Assessment, and the Integrated WBS monitoring and evaluation by the Indonesian Corruption Eradication Commission (PI) and the Corruption Eradication Commission (KPK). The WBMS is stipulated in the Guidelines for the Whistleblowing Management System (WBMS), Document Number PI-SEK-PD-011 Rev.3, and the Procedures for Managing the Whistleblowing System (WBS), Document Number PI-SEK-PR-013 Rev.3, which were last updated on July 13, 2023. Through these guidelines and procedures, the Company ensures that the reporting management mechanism is standardized, accountable, and provides process certainty for all parties.

WBS Implementation Principles

For applying the WBS, the Company upholds the principles of legal certainty, accountability, transparency to authorities as needed, prudence, objectivity, impartiality, and protection for whistleblowers and related parties. The Company also applies the principles of confidentiality and the presumption of innocence at every stage of the handling process. The following explains the PTPI WBS implementation principles:

Prinsip Penerapan WBS di Lingkup PTPI
WBS Implementation Principles within PTPI

No.	Prinsip Principle	Penjelasan Explanation
1	Kepastian Hukum Legal Certainty	Pelaksanaan WBMS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait. The WBMS prioritizes compliance with applicable laws and internal regulations, considers propriety and fairness, and provides protection for relevant parties.
2	Akuntabel Accountability	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya. The Whistleblowing System upholds the accuracy of submitted data and information and accountability.
3	Transparan Transparency	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku. The Whistleblowing System upholds transparency of information to authorized parties when it becomes aware of any deviations from the applicable business processes.
4	Kehati-hatian Prudence	Dalam pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personel terkait. The Whistleblowing System Guidelines must adhere to the principle of prudence, namely by calculating the smallest impact/risk to the Company and/or relevant Officials/Personnel.
5	Non Diskriminatif Non-Discrimination	Setiap Insan Perusahaan memiliki hak yang sama untuk dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan. Every Company Personnel has the same right to report any violation committed by any Company Personnel within the Company, in accordance with the form of reportable violation.

Prinsip Penerapan WBS di Lingkup PTPI
WBS Implementation Principles within PTPI

No.	Prinsip Principle	Penjelasan Explanation
6	Itikad Baik Good Faith	Setiap pelaporan pelanggaran dilakukan atas dasar itikad baik dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, bukan dilakukan atas dasar fitnah atau tanpa dasar/bukti. Every violation report must be made in good faith for the benefit of the Company, not based on slander or without basis/evidence.
7	Kerahasiaan Confidentiality	Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap Pelaporan Pelanggaran, WBMS harus mampu mengakomodir dan/atau menjaga kerahasiaan serta asas praduga tidak bersalah. In carrying out the follow-up process for each Whistleblowing Report, the WBMS must be able to accommodate and/or maintain confidentiality and the presumption of innocence.
8	Koordinasi Coordination	Penanganan pengaduan harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pejabat yang berwenang. Complaint handling must be carried out in close cooperation between authorized officials.
9	Objektivitas Objectivity	Penanganan Pelaporan Pelanggaran WBMS harus berdasar fakta atau bukti yang dapat dinilai. The handling of WBMS Violation Reports must be based on facts or evidence that can be assessed.
10	Kepercayaan Trust	Perusahaan mengakui kejujuran dan kebenaran atas Pelaporan Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan pemenuhan kecukupan bukti dan analisis yang dilakukan atas tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran. The Company acknowledges the honesty and truthfulness of Violation Reports made based on the sufficiency of evidence and the analysis conducted on the follow-up to the Violation Report.
11	Ketidakberpihakan Impartiality	Memegang keputusan berdasarkan bukti objektif yang diperoleh selama penilaian, bukan berdasarkan bias atau prasangka yang disebabkan oleh pengaruh kepentingan individu atau pihak terkait lainnya. Decisions are based on objective evidence obtained during the assessment, not on bias or prejudice caused by the influence of individual interests or other related parties.
12	Perlindungan Protection	Perusahaan memberikan perlindungan terhadap Pelapor dan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan atas Pelaporan Pelanggaran serta memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi. The Company provides protection for the Whistleblower and related parties in handling Violation Reports and ensures that there is no intimidation or discrimination.
13	Efektif Effectiveness	Penerapan WBMS dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Pedoman ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The WBMS is carried out in a standardized and legally compliant manner, referring to the general provisions contained in these Guidelines and applicable laws and regulations.
14	Efisien Efficiency	Aktivitas WBMS dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan/atau perangkat perusahaan secara efisien dalam mendukung pelaksanaan. WBMS activities are carried out while maintaining the efficient use of Company resources and/or equipment to support implementation.

Ruang Lingkup Aduan

Perusahaan memberikan batasan yang jelas untuk setiap pelaporan yang dapat diproses lebih lanjut oleh Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (WBMS). Batasan dan kategori aduan yang ditindaklanjuti oleh WBMS adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial, meliputi:

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan
   a. Pelanggaran Kode Etik/Perilaku merupakan perbuatan yang melanggar kode etik/perilaku dan peraturan relevan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
   b. Pelanggaran kebijakan/peraturan Perusahaan merupakan pelanggaran terhadap kebijakan/peraturan Perusahaan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan adanya kerugian material dan non-material bagi Perusahaan.
   c. Perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk.
2. Penipuan
   Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Scope of Complaints

The Company provides clear boundaries for each report so they can be further processed by the Whistleblowing Management System (WBMS). The boundaries and categories of complaints followed up by the WBMS include actions that could harm the Company, both financially and non-financially, including:

1. Violations of the Code of Ethics/Conduct and Company Regulations
   a. Violation of the Code of Ethics/Conduct is an act that violates the code of ethics/conduct and other relevant regulations established by the Company.
   b. Violation of Company Policy/Regulations is an intentional violation of Company Policy/Regulations that results in material and non-material losses to the Company.
   c. Behavior that, according to individual beliefs and social norms, is considered wrong or bad.
2. Fraud
   Acts with the intention of benefiting oneself or others illegally, by using a false name or false dignity, by trickery, or a series of lies, moving others to hand over something to them, or to give a debt or cancel a receivable.

3. Korupsi
   Perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Penyuapan
   Tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
5. Pemerasan
   Tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.
6. Gratifikasi yang tidak sah (ilegal)
   Perbuatan memberi dan/atau menerima dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perusahaan.
7. Kecurangan
   Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat, meliputi penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau pihak lain.
8. Pelanggaran hukum
   Tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.
9. Pencurian
   Perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
10. Penggelapan
    Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta Perusahaan oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan Perusahaan, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.
11. Kelalaian yang berdampak besar
    Jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan seseorang kurang berhati-hati dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

3. Corruption
   An act of unlawfully enriching oneself, another person, or a corporation that could harm state finances or the national economy.
4. Bribery
   The act of giving or promising something to someone with the intent to persuade that person to do or not do something in their duties, contrary to their authority or obligations concerning the public interest.
5. Extortion
   The act of unlawfully benefiting oneself or another person, forcing someone by force or threat of force to give something, wholly or partially belonging to that person or another person, or to incur debt or cancel a receivable, is punishable by extortion.
6. Illegal Gratuities
   The act of giving and/or receiving in a broad sense, including money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodations, tours, free medical treatment, and other facilities, whether received domestically or abroad, and whether conducted electronically or non-electronic, by Company personnel in connection with their authority/position within the Company, which may give rise to a conflict of interest that affects the independence, objectivity, and professionalism of Company personnel.
7. Fraud
   Dishonest or deceptive acts, including fraud, extortion, forgery, concealment or destruction of documents/reports, and the creation and use of false documents, committed by an individual or group of individuals that result in potential or actual loss to the Company or another party.
8. Violation of the law
   An act by an individual or group that violates regulations that are inconsistent with applicable laws.
9. Theft
   The act of taking something, wholly or partially belonging to another person, with the intent to possess it unlawfully.
10. Embezzlement
    A dishonest act involving the concealment of Company property/assets by one or more individuals without the Company's knowledge, with the intent of transferring ownership, controlling it, or using it for other purposes.
11. Negligence with a significant impact
    This type of error occurs due to a person's lack of caution, which can result in losses for the Company.

12. Diskriminasi
    Setiap perbedaan, peminggiran (marginalisasi), pembatasan, dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau pembedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas Perusahaan serta dalam interaksi di lingkungan kerja.
13. Intimidasi
    Tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu), gertakan, atau ancaman.
14. Kekerasan
    Setiap tindakan termasuk ancaman yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik maupun privat, sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis, maupun seksual.
15. Pelecehan
    Segala perbuatan di tempat kerja maupun media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi, merendahkan, menghina, atau mempermalukan seseorang.
16. Penggunaan dan/atau sumber daya publik yang tidak sah
    Penggunaan dana atau sumber daya publik yang tidak sah oleh Insan Perusahaan sehingga dapat memberikan kerugian bagi internal dan eksternal perusahaan.
17. Penyalahgunaan wewenang
    Insan Perusahaan dengan kekuasaan/jabatan yang dimilikinya melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara merugikan Negara dan/atau Perusahaan.
18. Benturan kepentingan
    Situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
19. Mis-manajemen
    Suatu kesalahan/kekeliruan tindakan pada saat proses pemberian bimbingan atau fasilitas manajerial berlangsung, atau mis-manajemen terjadi karena adanya kesalahan tindakan pada saat proses pencapaian tujuan sedang berlangsung.

WBS Perusahaan akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan/tindakan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pelaporan pelanggaran terkait dengan Keselamatan, Kesehatan, Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH), Sumber Daya Manusia, dan fasilitas Perusahaan dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan yang berlaku.

12. Discrimination
    Any distinction, marginalization, restriction, and/or exclusion made directly or indirectly on the basis of religion, ethnicity, race, ethnicity, group, class, social status, including marital status, economic status, gender, language, political affiliation, or disability, which has the impact or purpose of reducing or eliminating the recognition, implementation, or use of human rights and fundamental freedoms, resulting in unequal opportunity or differential treatment for an individual or group of individuals in Company activities and interactions within the work environment.
13. Intimidation
    An act of intimidation (especially to coerce another person or party into doing something), intimidation, or threats.
14. Violence
    Any act, including threats, that is arbitrarily carried out against another person in the workplace, whether in public or private, resulting in physical, psychological, or sexual harm.
15. Harassment
    Any conduct in the workplace or through communication media that violates the law or human rights provisions, and is intended to intimidate, demean, insult, or humiliate someone.
16. Unauthorized Use of Public Funds or Resources
    Unauthorized use of public funds or resources by Company personnel that may result in losses to the internal or external parties of the Company.
17. Abuse of Authority
    Company Personnel, using their power/position, abusing their authority for personal gain, the benefit of others, or a corporation, to the detriment of the State and/or the Company.
18. Conflict of Interest
    A situation or condition in which a Company Personnel, who holds power and authority, has or is suspected of having a personal or group interest in any use of their power and authority, which may affect the quality and performance of their work.
19. Mismanagement
    An error/mistake in actions during the process of providing managerial guidance or facilitation, or mismanagement occurs due to an error in action during the process of achieving goals.

The Company's WBS will follow up on complaints regarding the aforementioned actions/conduct. Reports of violations related to Occupational Health, Safety, and the Environment (OHSE), Human Resources, and Company facilities can be submitted to the relevant parties using the applicable reporting mechanisms.

WBS Perusahaan dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, dengan memberikan pilihan pelaporan pelanggaran bersifat anonim (tanpa mengungkapkan identitas) dan memberikan kesempatan apabila Pelapor ingin mengungkapkan identitasnya. Perusahaan menjamin kerahasiaan setiap Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor.

The Company's WBS is accessible to all stakeholders, both internal and external, and offers the option of anonymous reporting (without revealing identity) and allows the whistleblower to reveal their identity at will. The Company guarantees the confidentiality of every violation report submitted by the whistleblower.

Beririsan dengan ruang lingkup aduan WBS, PTPI menyediakan media pelaporan khusus terkait dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan implementasi RWP. Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian BUMN dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/04/2022 yang telah diratifikasi melalui kebijakan Pedoman Respectful Workplace Policy (RWP) PI-SDM-PD-009. Dimana RWP menekankan perilaku etis, kesempatan yang setara, dan perlindungan hak-hak karyawan, sehingga setiap individu dapat bekerja di lingkungan yang mendukung, bebas dari diskriminasi, pelecehan, atau kondisi yang tidak aman.

In line with the scope of WBS complaint, PTPI provides a dedicated reporting platform for alleged violations related to the implementation of RWP. This aligns with the direction of the Ministry of State-Owned Enterprises in Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number SE-3/MBU/04/2022, which has been ratified through the Respectful Workplace Policy (RWP) Guidelines PI-SDM-PD-009. The RWP emphasizes ethical behavior, equal opportunity, and the protection of employee rights, ensuring that every individual can work in a supportive environment free from discrimination, harassment, or unsafe conditions.

Komite *Respectful Workplace Policy* (RWP)

Komite *Respectful Workplace Policy* (RWP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 063/A/HK/E10/SK/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Wakil Perusahaan dan Wakil Pekerja serta Pembentukan Komite *Respectful Workplace Policy* (RWP) yang beranggotakan:

1. 4 (empat) orang perwakilan dari Perusahaan;
2. 3 (tiga) orang perwakilan dari karyawan, meliputi:
   a. 1 (satu) orang berasal dari Srikandi PI;
   b. 1 (satu) orang berasal dari BUMN Muda;
   c. 1 (satu) orang berasal atasan terkait.

Respectful Workplace Policy (RWP) Committee

The Respectful Workplace Policy (RWP) Committee was established based on the Board of Directors' Decision Letter No. 063/A/HK/E10/SK/2023 dated March 24, 2023, on the Appointment of Company Representatives and Employee Representatives and the Establishment of the Respectful Workplace Policy (RWP) Committee. The committee consists of:

1. 4 (four) representatives from the Company;
2. 3 (three) employee representatives, including:
   a. 1 (one) from Srikandi PI;
   b. 1 (one) from BUMN Muda;
   c. 1 (one) from the relevant superior.

Susunan Anggota Komite RWP
RWP Committee Membership

Jabatan Position	Dijabat oleh: Held By:
Anggota Members	1. SVP Operasional SDM 2. SVP Strategi & Perencanaan SDM 3. SVP Hukum 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern 5. Ketua Srikandi Pupuk Indonesia atau perwakilannya 6. Ketua BUMN Muda atau perwakilannya 7. Atasan karyawan terkait 1. SVP HC Operations 2. SVP HC Strategy & Planning 3. SVP Law 4. Chief Audit Executive 5. Chair of Srikandi Pupuk Indonesia or their representative 6. Chair of BUMN Muda or their representative 7. Employee superiors

Profil Anggota Komite RWP

Profil anggota Komite RWP yang meliputi nama dan jabatan serta keanggotaan dalam komite, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, termasuk rangkap jabatan disampaikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

RWP Committee Member Profile

The RWP Committee members profiles, including their names and positions, committee membership, age, nationality, educational background, and concurrent positions, can be found in full in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Pernyataan Independensi Komite RWP

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada Komite RWP berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 063/A/HK/E10/SK/2023 tanggal 24 Maret 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam menjalankan tugas tersebut selalu menjunjung:

1. Independensi: Akan bertindak secara independen, objektif, dan profesional tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dalam memberikan rekomendasi atau keputusan.
2. Bebas Benturan Kepentingan: Tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah maupun semenda), hubungan kedinasan yang bersifat subjektif, maupun hubungan finansial dengan pihak Terperiksa/Karyawan yang sedang diproses dalam sidang disiplin ini.
3. Kerahasiaan: Menjamin kerahasiaan seluruh data, informasi, dan dokumen yang terungkap selama proses sidang berlangsung sesuai dengan kebijakan kerahasiaan perusahaan.
4. Kepatuhan GCG: Senantiasa mematuhi pedoman *Code of Conduct* (Etika Bisnis dan Kerja) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).

RWP Committee Independence Statement

In connection with the assignment given to the RWP Committee based on the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors Decree No. 063/A/HK/E10/SK/2023 dated March 24, 2023, it declared that when carrying out these duties they will always uphold:

1. Independence: I will act independently, objectively, and professionally without pressure or influence from any party in making recommendations or decisions.
2. Be free from Conflict of Interest: I have no familial relationships (by blood or marriage), subjective official relationships, or financial relationships with the Examined Party/Employee currently being processed in this disciplinary hearing.
3. Confidentiality: Ensure the confidentiality of all data, information, and documents disclosed during the trial process in accordance with the Company's confidentiality policy.
4. GCG Compliance: Always adhere to the Code of Conduct (Business and Work Ethics) and applicable laws and regulations in PT Pupuk Indonesia (Persero).

Tugas Pokok Komite RWP

1. Menjaga dan menjamin kerahasiaan atas segala data dan informasi terkait kejadian pelanggaran;
2. Melakukan tindak lanjut atas pelaporan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan;
3. Melakukan pendampingan secara terpisah terhadap pihak pelapor dan terlapor selama proses penanganan berlangsung;
4. Membuat pelaporan dan evaluasi atas pelaporan RWP secara berkala kepada Direktur Utama.

RWP Committee Main Duties

1. Maintaining and ensuring confidentiality of all data and information related to incidents of violations;
2. Following up on reports that meet the established requirements and provisions;
3. Providing separate assistance to the reporting party and the reported party during the handling process;
4. Preparing periodic reports and evaluations of RWP reports to the President Director.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti
Training and/or Competency Improvement Attended

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Ammonia Energy Annual Conference 2025	Ammonia Energy Association	20 Oktober 2025 October 20, 2025
2	Annual Budget Planning (ABP)	Bester & Co	11 September 2025 September 11, 2025
3	Annual Gathering of HR Directors Indonesia	HR Directors Indonesia	24 April 2025 April 24, 2025
4	Argus Fertilizer Asia Conference 2025	Argus	22 April 2025 April 22, 2025
5	Baker Hughes Annual Meeting 2025	Baker Hughes	02 Februari 2025 February 2, 2025
6	Blue Ocean Strategy Training	INSEAD	3 & 10 Februari 2025 February 3 & 10, 2025
7	Business Judgement Rule (BJR) & ESGRC UU BUMN 2025	PT Media Madani Ultima (Majalah BusinessNews)	21 Februari 2025 February 21, 2025
8	Certified Information System Auditor (CISA)	ISACA	13 Maret 2025 March 13, 2025

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
9	Certified Internal Audit Officer (CIAO)	PPM Manajemen	12 Juni 2025 June 12, 2025
10	Certified Internal Auditor (CIA)	PPA FEB UI	21 Juni 2025 June 21, 2025
11	Certified Supply Chain Management (CSCM) Batch 21	ISCEA - PT. Lingkar Indonesia Unggul	02 September 2025 September 2, 2025
12	CFA (Chartered Financial Analyst) Level 1	Kaplan	30 Oktober 2025 October 30, 2025
13	D'Connection Leaders Roundtable – WEPs Corporate Action Lab Indonesia	Danantara	10 September 2025 September 10, 2025
14	ERM Fundamentals	CRMS Indonesia	10 November 2025 November 10, 2025
15	FHCI Connect Expert Series 2 : Unlocking Employee Potential With Personalized AI-Driven Development	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	27 Agustus 2025 August 27, 2025
16	FHCI Connect Expert Series 4 : Humanizing Digital Transformation: Building Ethical, Agile, and Future-Ready Talent Ecosystems	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	30 Oktober 2025 October 30, 2025
17	FHCI Connect Expert Series 5	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	19 November 2025 November 19, 2025
18	FHCI Connect Expert Series 6	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	18 Desember 2025 December 18, 2025
19	FHCI Connect Expert: Balancing Compliance, Business Agility, and Workforce Welfare - Series 1	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	09 Juli 2025 July 9, 2025
20	Governance Fundamentals	CRMS Indonesia	29 Oktober 2025 October 29, 2025
21	Governance Fundamentals	CRMS Indonesia	04 November 2025 November 4, 2025
22	IFA Annual Conference 2025	International Fertilizer Association (IFA)	12 Mei 2025 May 12, 2025
23	IFA Crossroads 2025	International Fertilizer Association (IFA)	07 Oktober 2025 October 7, 2025
24	IFA Cultivating Tomorrow Conference 2025 - Innovation Meets Sustainability	International Fertilizer Association (IFA)	01 April 2025 April 1, 2025
25	Konferensi Nasional IIA Indonesia Tahun 2025 IIA Indonesia National Conference 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA)	27 Agustus 2025 August 27, 2025
26	Mental Health & Wellness Exhibition and Conference	Mind Care	03 Desember 2025 December 3, 2025
27	Mindfulness Practice For Agile Leadership	Nurcahyo Adi Kusumo	13 November 2025 November 13, 2025
28	Pelatihan Counseling Counseling Training	Insan Performa	10 Juli 2025 July 10, 2025
29	Pelatihan Counseling Counseling Training	PT Daya Dimensi Indonesia (DDI)	02 Juni 2025 June 2, 2025
30	Pelatihan dan Sertifikasi CPLM (Certified Professional in Logistics Management) CPLM (Certified Professional in Logistics Management) Training and Certification	ISCEA Indonesia	20 Januari 2025 January 20, 2025
31	Pelatihan Manajemen Keuangan dan Digital Marketing bersama Srikandi PI Financial Management and Digital Marketing Training with Srikandi PI	PT Pupuk Indonesia (Persero)	06 Agustus 2025 August 6, 2025
32	Pre Class Top Gun Program 2025	Danantara Indonesia	08 Agustus 2025 August 8, 2025
33	Program Knowledge X	Kementerian BUMN	05 Mei 2025
34	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	CRMS	19 Mei 2025 May 19, 2025
35	Seminar Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Seminar on the Implementation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code	PT Pupuk Indonesia (Persero)	17 September 2025 September 17, 2025

No	Program Pelatihan Training Program	Narasumber Resource Person	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
36	Seminar National Anti Fraud Conference 2025	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)	25 Juni 2025 June 25, 2025
37	Sosialisasi Guidance HC Technology and People Analytics – FHCI HC Technology and People Analytics Guidance Socialization – FHCI	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	08 Mei 2025 May 8, 2025
38	Strategic Risk Management & Value Creation	INSEAD	12 September 2025 September 12, 2025
39	The New Special Directorship Program Managing Corporate Risk in A Volatile World	IICD	21 Mei 2025 May 21, 2025
40	Sosialisasi Guidance HC Technology and People Analytics – FHCI HC Technology and People Analytics Guidance Socialization – FHCI	PT Win Talent Center	16 Mei 2025 May 16, 2025

Sertifikasi Profesi Komite RWP

Belum memiliki sertifikasi profesi pada Komite RWP.

RWP Committee Professional Certification

The RWP Committee does not yet have professional certification.

Rapat Komite RWP

Sepanjang tahun 2025, Komite RWP tidak menyelenggarakan rapat karena tidak terdapat pengaduan yang diterima melalui mekanisme pelaporan RWP.

RWP Committee Meetings

In 2025, the RWP Committee did not hold meetings as no complaints were received through the RWP reporting mechanism.

Pelaksanaan Tugas Komite RWP

Sepanjang tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan program pelatihan maupun kegiatan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Komite RWP.

Implementation of RWP Committee Duties

In 2025, no training programs or competency Developments activities were organized for RWP Committee members.

Penanggung Jawab Penerapan WBS di Lingkup PTPI

Penanggung jawab penerapan WBS Perusahaan adalah Direktur Utama, yang dibantu Tim Penanganan Aduan (TPA). Sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023, khususnya bagi BUMN dengan klasifikasi risiko signifikan dan sistemik A yang mengutamakan pengelolaan WBS oleh pihak independen, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris atas penguatan independensi pengelolaan WBS, maka sejak Rapat Direksi tanggal 5 November 2024 Direksi telah menyetujui pengelolaan WBS dilakukan oleh Kompartemen Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai *lead coordinator* serta didukung dengan pihak independen yang profesional.

Perubahan fungsi pengelola WBS merupakan langkah strategis dalam rangka penguatan independensi pengelolaan WBS, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan dan meningkatkan objektivitas dalam penanganan laporan Melalui mekanisme ini, pengelolaan WBS dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus menjamin kerahasiaan serta perlindungan terhadap pelapor. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendorong peningkatan kualitas laporan yang diterima, sehingga berkontribusi secara optimal dalam memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian intern, dan budaya integritas di lingkungan Perusahaan.

Responsibility for WBS Implementation within PTPI

The President Director is responsible for the Company's WBS, assisted by the Complaint Handling Team (TPA). To fulfill the Company's compliance with Minister of BUMN Regulation No. PER-02/MBU/03/2023, specifically for SOEs with a significant and systemic risk classification of A, which prioritizes WBS management by an independent party. As a follow-up to the Board of Commissioners' recommendation to strengthen the WBS management independence, since the Board of Directors Meeting on November 5, 2024, the Board of Directors has approved WBS management by the Internal Audit Unit (IAU) as the lead coordinator, supported by a professional independent party.

The change in the WBS management function was a strategic step to strengthen the independence of WBS management, thereby minimizing potential conflicts of interest and increasing objectivity in report handling. Through this mechanism, WBS management is implemented in a more transparent, accountable, and integrated manner, while ensuring confidentiality and protection for whistleblowers. This step is also expected to increase stakeholder trust and encourage improvements in the quality of reports received, thus optimally contributing to strengthening the implementation of good corporate governance, internal control, and a culture of integrity within the Company.

Sosialisasi WBS 2025

WBS Socialization in 2025

No.	Perusahaan Company	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan WBS WBS Management Socialization Activities
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Sosialisasi WBS telah dilakukan melalui pengisian survei penerapan dan efektivitas pengelolaan WBS terintegrasi Pupuk Indonesia Group, yang diisi oleh responden internal dan eksternal di Pupuk Indonesia Group pada tanggal 19 Desember 2025 sd 12 Januari 2026, dengan hasil: 1. Survei dilakukan secara daring (*online*) melalui tautan Microsoft Forms dengan total jawaban survey yang diterima dan diolah adalah 1.256 jawaban. 2. Kesimpulan dari masing-masing aspek meliputi: a. Kesadaran terhadap Sistem WBS Mayoritas responden telah mengetahui keberadaan dan independensi pengelolaan Sistem WBS, dengan sumber informasi utama berasal dari atasan/rekan kerja dan media internal, meskipun sosialisasi formal masih perlu ditingkatkan. b. Perspektif Responden terhadap Sistem WBS Responden menilai Sistem WBS mudah digunakan, menjaga kerahasiaan, dan memberikan tindak lanjut yang memuaskan, namun sebagian masih ragu melapor karena kekhawatiran atas perlindungan identitas dan kepastian penanganan. c. Efektivitas Sistem WBS Sistem WBS dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran pelaporan, mencegah pelanggaran fraud dan non-fraud, serta mendukung penerapan GCG dan lingkungan kerja yang sehat. d. Tindakan Responden jika Mengetahui Penyalahgunaan Dana: Sebagian besar responden memilih melaporkan penyalahgunaan dana melalui pihak berwenang atau WBS, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang memilih menegur secara lisan atau membiarkan. e. Tindakan Responden jika Mengetahui Nepotisme: Mayoritas responden cenderung melaporkan praktik nepotisme kepada atasan atau melalui WBS, menunjukkan kesadaran etika yang relatif baik. f. Tindakan Responden jika Mengalami Intimidasi: Sebagian besar responden tetap memilih melaporkan pelanggaran meskipun mengalami intimidasi, namun masih terdapat keraguan yang menunjukkan perlunya penguatan perlindungan pelapor. g. Harapan terhadap Sistem WBS: Responden berharap adanya jaminan kuat atas kerahasiaan identitas, perlindungan karier dan keamanan pelapor, serta proses penanganan laporan yang transparan dan konsisten. h. Saran terhadap Sistem WBS: Responden menyarankan peningkatan sosialisasi dan edukasi WBS, penguatan perlindungan pelapor, penegakan sanksi yang tegas, kemudahan akses sistem, serta transparansi tindak lanjut laporan. WBS socialization was conducted through a survey on the implementation and effectiveness of Pupuk Indonesia Group's integrated WBS management. This survey was completed by internal and external respondents at Pupuk Indonesia Group from December 19, 2025, to January 12, 2026. The results were as follows: 1. A survey was conducted online via a Microsoft Forms link, with a total of 1,256 responses received and processed. 2. Conclusions from each aspect included: a. Awareness of the WBS System The majority of respondents were aware of the existence and independence of the WBS System management, with the primary sources of information coming from superiors/colleagues and internal media, although formal socialization still needs improvement. b. Respondents' Perspectives on the WBS System Respondents considered the WBS System easy to use, maintained confidentiality, and provided satisfactory follow-up. However, some remained hesitant to report due to concerns about identity protection and certainty of handling. c. Effectiveness of the WBS System The WBS System was considered effective in increasing reporting awareness, preventing fraud and non-fraud violations, and supporting the implementation of GCG and a healthy work environment. d. Respondents' Actions Upon Learning of Misuse of Funds: Most respondents chose to report misuse of funds through authorities or the WBS, although a small number still chose to give a verbal warning or ignore the incident. e. Respondents' Actions Upon Learning of Nepotism: The majority of respondents tended to report nepotism to their superiors or through the WBS, indicating relatively good ethical awareness. f. Respondents' Actions Upon Experiencing Intimidation: Most respondents still chose to report violations despite experiencing intimidation, but there was still hesitation, indicating the need to strengthen whistleblower protection. g. Expectations for the WBS System: Respondents expect strong guarantees of identity confidentiality, career protection, and whistleblower security, as well as a transparent and consistent report handling process. h. Recommendations for the WBS System: Respondents suggested improving WBS socialization and education, strengthening whistleblower protection, enforcing strict sanctions, making the system easier to access, and ensuring transparent follow-up on reports.

No.	Perusahaan Company	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan WBS WBS Management Socialization Activities
2	PT Petrokimia Gresik	1. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan SMAP kepada Mahasiswa Prakerin (Praktik Kerja Industri) melalui *Zoom Meeting*. 2. *Blasting* Whatsapp kepada Insan PG terkait Integritas dan WBS 3. Pengisian rubrik GEMA oleh seluruh karyawan 4. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan SMAP kepada Mahasiswa Magenta melalui Zoom Meeting 5. Focus Group Discussion (FGD) Person In Charge (PIC) LHKPN di Aston Inn Gresik 6. *Blasting* Whatsapp kepada Insan PG terkait Anti Gratifikasi Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 1446 H 7. *Blasting* Whatsapp kepada Insan PG terkait Organ Pendukung GCG 8. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan SMAP kepada On the Job Training Karyawan Pupuk Indonesia melalui *Zoom Meeting* 9. *Blasting* Whatsapp kepada Insan PG terkait Publikasi Komitmen dan Kebijakan Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 10. *Blasting* Whatsapp kepada Insan PG terkait integritas di tengah ketidakpastian isu global 11. *Blasting* melalui Email Perusahaan kepada seluruh stakeholder terkait Implementasi Anti Gratifikasi kepada mitra bisnis 12. Sosialisasi *Anti-Fraud* dan Penerapan GCG di Wisma Kebomas kepada Mitra Petroganik Subsidi 2025 13. Publikasi keberhasilan pelaksanaan Surveillance Audit 1 ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui Website PKG kepada seluruh stakeholder terkait 14. Sosialisasi terkait Anti Gratifikasi Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 1446 H melalui Instagram PKG kepada seluruh *stakeholder* terkait 15. Materi sosialisasi *Anti-Fraud* dan Implementasi SMAP melalui DOF kepada seluruh karyawan 16. Pengenalan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Baru melalui Zoom Meeting kepada Pejabat Grade I 17. *Blasting* Whatsapp kepada Insan PG terkait WBS Bukan Sekedar Sistem 18. *Blasting* Whatsapp terkait GCG kepada seluruh karyawan 19. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan SMAP kepada Peserta Magang HUB melalui *Zoom Meeting* 20. *Blasting* Whatsapp terkait Integritas *Challenge* kepada seluruh karyawan 21. *Blasting* Whatsapp terkait Peringatan Hakordia Internal Perusahaan kepada seluruh karyawan 22. *Blasting* Whatsapp terkait Komitmen Anti Gratifikasi NATARU kepada seluruh karyawan 23. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan SMAP kepada Karyawan K3PG di Gresik 24. Sosialisasi GCG, Gratifikasi dan SMAP kepada Rekanan Perusahaan di Gresik 1. Socialization of GCG, Gratification and SMAP to Prakerin (Industrial Work Practice) Students via Zoom Meeting. 2. WhatsApp message to PG employees regarding Integrity and WBS 3. Filling in the GEMA column by all employees 4. Socialization of GCG, Gratuities, and SMAP to Magenta students via Zoom Meeting 5. Focus Group Discussion (FGD) with the Person in Charge (PIC) of the LHKPN at Aston Inn Gresik 6. WhatsApp message to PG employees regarding Anti-Gratuities for the Eid al-Fitr 1446 H Religious Holiday 7. WhatsApp message to PG employees regarding GCG Supporting Organs 8. Socialization of GCG, Gratuities, and SMAP to PTPI On-the-Job Training Employees via Zoom Meeting 9. WhatsApp message to PG employees regarding the Publication of Commitments and Policies for the Implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) 10. WhatsApp message to PG employees regarding integrity amidst the uncertainty of global issues 11. Company email message to all stakeholders regarding the Implementation of Anti-Gratuities for business partners 12. Socialization Anti-Fraud and GCG Implementation at Wisma Kebomas to Petroganik Subsidized Partners in 2025 13. Publication of the successful implementation of Surveillance Audit 1 of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) through the PKG Website to all relevant stakeholders 14. Socialization regarding Anti-Gratuities for the Eid al-Fitr 1446 H Religious Holiday through the PKG Instagram to all relevant stakeholders 15. Socialization materials for Anti-Fraud and SMAP Implementation through the DOF to all employees 16. Introduction to the New Board of Commissioners and Supporting Organs through a Zoom Meeting for Grade I Officials 17. WhatsApp Blast to PG Staff regarding WBS Is Not Just a System 18. WhatsApp Blast regarding GCG to all employees 19. Socialization of GCG, Gratuities, and SMAP to HUB Internship Participants through a Zoom Meeting 20. WhatsApp Blast regarding the Integrity Challenge to all employees 21. WhatsApp Blast regarding the Company's Internal Hakordia Commemoration to all employees 22. WhatsApp Blast Regarding the Anti-Gratification Commitment for NATARU to all employees 23. Socialization of GCG, Gratification, and SMAP to K3PG Employees in Gresik 24. Socialization of GCG, Gratification, and SMAP to Company Partners in Gresik
	PT Pupuk Kujang	1. Sosialisasi Kebijakan WBS dan sosialisasi penerapan FCS terus dilakukan kepada pihak internal agar implementasinya didukung oleh segenap pihak secara efektif. Sosialisasi kepada pihak internal dilakukan melalui berbagai media antara lain dengan *workshop*, intranet, banner, maupun Laporan Tahunan (Annual Report). 2. Pada saat ini PTPI sudah melakukan pengembangan WBS Multi Company dan akan diberlakukan untuk semua anak perusahaan PTPI. 3. Sosialisasi Pemasangan spanduk, banner di tempat- tempat strategis dan pemasangan di gedung admin di lingkungan perusahaan. 4. Sosialisasi WBS dilakukan pada saat Internalisasi Pemahaman Gratifikasi kepada Insan Perusahaan PT Pupuk Kujang bersama KPK-RI pada tanggal 3 Juni 2024. 1. Continuous socialization of the WBS Policy and FCS implementation within the Company conducted internally to ensure effective support from all parties. Internal socialization conducted through media, including workshops, the intranet, banners, and the Annual Report. 2. PTPI is currently developing a Multi-Company WBS, which will be implemented for all PTPI subsidiaries. 3. Socialization involves installing banners and signs in strategic locations and in the administration building within the company. 4. Socialization of the WBS will be conducted during the Internalization of Gratification Understanding for PT Pupuk Kujang Company Personnel with the Corruption Eradication Commission (KPK) on June 3, 2024.

No.	Perusahaan Company	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan WBS WBS Management Socialization Activities
	PT Pupuk Kalimantan Timur	1. Webinar Kode Etik dan *Launching* Pakta Integritas (*Online*, 17 Januari 2025) kepada seluruh karyawan 2. Sosialisasi GCG Tahun 2025 "Ramadhan Penuh Berkah, Semangat GCG Tetap Terjaga" (21 Maret 2025) 3. Sosialisasi Penerapan GCG Departemen Manajemen Aset (9 Mei 2025) 4. Sosialisasi Penerapan GCG Departemen Pelayanan Umum (16 Mei 2025) 5. Sosialisasi Penerapan GCG Departemen Keamanan (23 Mei 2025) 6. Sosialisasi Penerapan GCG Departemen PP&P (30 Mei 2025) 7. Sosialisasi Penerapan GCG Departemen Bisnis dan Administrasi (3 Juli 2025) 8. Sosialisasi Penerapan GCG Departemen Teknik Kontrol Kualitas (3 Juli 2025) 9. Sosialisasi Penerapan GCG Departemen Rekayasa Konstruksi (4 Juli 2025) 10. Sosialisasi Penerapan GCG Departemen Pengadaan Barang (18 Juli 2025) 11. Seminar *Business Judgement Rules* oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur "PKT Bebas Korupsi (Harapan, Tantangan, Kenyataan)" (8 Oktober 2025) untuk seluruh Insan Pupuk Kaltim 1. Webinar on the Code of Ethics and Launch of the Integrity Pact (Online, January 17, 2025) for all employees 2. 2025 GCG Socialization "Ramadan Full of Blessings, Maintain the Spirit of GCG" (March 21, 2025) 3. Socialization of GCG Implementation in the Asset Management Department (May 9, 2025) 4. Socialization of GCG Implementation in the General Services Department (May 16, 2025) 5. Socialization of GCG Implementation in the Security Department (May 23, 2025) 6. Socialization of GCG Implementation in the PP&P Department (May 30, 2025) 7. Socialization of GCG Implementation in the Business and Administration Department (July 3, 2025) 8. Socialization of GCG Implementation in the Quality Control Engineering Department (July 3, 2025) 9. Socialization of GCG Implementation in the Construction Engineering Department (July 4, 2025) 10. Socialization of GCG Implementation in the Procurement Department (July 18 (2025) 1 11. Seminar on Business Judgment Rules by the East Kalimantan High Prosecutor's Office "Corruption-Free CCP (Hopes, Challenges, Reality)" (October 8, 2025) for all Pupuk Kaltim employees
	PT Pupuk Iskandar Muda	Sosialisasi Whistleblowing System (WBS) telah dilakukan kepada seluruh Insan PIM & Stakeholders pada bulan Desember Tahun 2025. Sosialisasi secara berkala juga dilakukan melalui E-mail PIM Bersih (pimbersih@pim.co.id) kepada seluruh karyawan dan pembuatan spanduk, baliho, banner yang ditempatkan pada ruang publik dan lintasan aktivitas karyawan. The Whistleblowing System (WBS) was socialized to all PIM personnel and stakeholders in December 2025. Periodic socialization was also conducted through the PIM Bersih email address (pimbersih@pim.co.id) to all employees, and banners, billboards, and banners were placed in public spaces and on employee activity routes.
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Sosialisasi melalui Acara Media Gathering PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada 21 Maret 2025. Socialization took place through the PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Media Gathering on March 21, 2025.
	PT Rekayasa Industri	Sosialisasi terealisasi sampai dengan Semester-2 Tahun 2025, Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran telah dilakukan dengan: 1. Sosialisasi melalui media Instagram @rekind_official 2. Sosialisasi Sistem Pop Up di website setiap mengakses website www.rekayasa.com. 3. Pemasangan Standing Banner 3 Tiga Titik Gedung (ROB 1, ROB 2 & RTO 1). 4. Tata Cara Pelaporan WBS telah di Pop Up pada Intranet.rekayasa.co.id. Socialization was realized up to the second semester of 2025. Socialization of the Violation Reporting System was carried out through: 1. Socialization via Instagram @rekind_official 2. Socialization of the Pop-Up System on the website every time you access www.teknik.com. 3. Installation of Standing Banners at three locations in the building (ROB 1, ROB 2, & RTO 1). 4. The WBS Reporting Procedures were posted on the Intranet.teknik.co.id.
	PT Pupuk Indonesia Niaga	Sosialisasi Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) kepada seluruh karyawan melalui aplikasi *Digital Office* (DOF), whatsapp grup dan *website* PT Pupuk Indonesia Niaga. Untuk tata cara pelaporan sudah tertuang dalam kebijakan dan disosialisasikan melalui *website* dan *banner* yang ada di *lobby* perusahaan. Socialization of the Violation Reporting System (WBS) Guidelines was carried out to all employees through the Digital Office (DOF) application, WhatsApp groups, and the PT Pupuk Indonesia Niaga website. The reporting procedures were outlined in the policy and socialized through the website and banners in the Company lobby.
	PT Pupuk Indonesia Logistik	Sosialisasi tentang Pengelolaan WBS dilakukan melalui *website*, *banner*, dan kotak pengaduan di PT Pupuk Indonesia Logistik. Socialization of WBS Management was carried out through the website, banners, and complaint boxes at PT Pupuk Indonesia Logistik.
	PT Pupuk Indonesia Pangan	Sosialisasi Gratifikasi dilakukan melalui form survey yang dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Pedoman Tata Kelola. Sosialisasi WBS dilakukan ke semua unit kerja dan hasil survey menunjukkan pemahaman Karyawan terhadap Tata Kelola pada kategori "Baik" Socialization of Gratuity was carried out through a survey form conducted concurrently with the socialization of the Governance Guidelines. The WBS was socialized to all work units, and survey results showed that employee understanding of Governance was in the "Good" category.

Kanal Pelaporan

Perusahaan menyediakan berbagai saluran bagi pelapor untuk menyampaikan dugaan pelanggaran, antara lain melalui *website*, *e-mail*, telepon, dan *desk* pengaduan, yang dapat dimanfaatkan oleh pelapor, yakni:
Website: http://wbs.pupuk-indonesia.com
Email: wbs@pupuk-indonesia.com
Phone/SMS/WA: (+62) 811 1069 1069
Complaint Desk: Tim WBS PTPI – Kantor Pusat PT Pupuk Indonesia (Persero) Gedung Pusri Lantai 1, Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Aduan

Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Perusahaan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan aduan melalui media pelaporan yang disediakan Perusahaan.
2. Tim Pengelola Aduan (TPA) menerima pengaduan yang masuk melalui media pelaporan dan melakukan verifikasi aduan sesuai dengan ketentuan. Apabila Pelapor tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak TPA memberikan tanggapan atas aduan, maka TPA dapat menetapkan bahwa aduan tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan *closed*.
3. Apabila aduan terverifikasi memenuhi persyaratan, TPA melakukan tahap penelaahan/analisis aduan dengan menggali informasi dari Pelapor, TPA, dokumen aduan, pihak-pihak lainnya, serta dokumen yang dianggap perlu, dan dapat bekerja sama dengan pihak eksternal untuk dapat ditarik simpulan dan tindak lanjut.
4. TPA melakukan telaah/analisis aduan dalam jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil verifikasi.
5. Kewenangan penanganan pelaporan sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham
      Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan aduan yang terkait dengan Dewan Komisaris/Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan, berdasarkan hasil verifikasi, telaah/analisis, Laporan Hasil Investigasi, dan rekomendasi putusan aduan yang disampaikan oleh Tim Investigasi.
   b. Dewan Komisaris
      Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan aduan yang terkait dengan Direktur Utama Perusahaan, berdasarkan hasil verifikasi, telaah/analisis, Laporan Hasil Investigasi, dan rekomendasi tindak lanjut aduan yang disampaikan oleh Tim Investigasi.
   c. Direktur Utama
      Direktur Utama memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan aduan yang terkait dengan Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Direksi Anak Perusahaan, dan Karyawan Perusahaan, berdasarkan hasil verifikasi, telaah/analisis, Laporan Hasil Investigasi, dan rekomendasi putusan aduan yang disampaikan oleh Tim Investigasi.

Reporting Channels

The Company provides channels for whistleblowers to report alleged violations, including the website, email, telephone, and complaint desk. These channels can be used by whistleblowers:

Website: wbs.pupuk-indonesia.com
Email: wbs@pupuk-indonesia.com
Phone/SMS/WA: (+62) 811 1069 1069
Complaint Desk: Tim WBS PTPI – Kantor Pusat PT Pupuk Indonesia (Persero) Gedung Pusri Lantai 1, Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480

Reporting and Complaint Handling Mechanism

Anyone can report suspected violations within the Company through the Company's Violation Reporting System (WBS). The mechanism is as follows:

1. The whistleblower submits a complaint through the reporting channels provided by the Company.
2. The Complaint Management Team (TPA) receives complaints received through the reporting channels and verifies them in accordance with the provisions. If the whistleblower fails to meet the requirements within 7 (seven) days of the TPA's response to the complaint, the TPA may determine that the complaint does not meet the requirements and will be closed.
3. If the verified complaint meets the requirements, the TPA conducts a complaint review/analysis phase by gathering information from the whistleblower, the TPA, the complaint documents, other parties, and any documents deemed necessary. It may collaborate with external parties to draw conclusions and take follow-up action.
4. The TPA conducts a complaint review/analysis within a maximum of 15 (fifteen) days after receiving the verification results.
5. The authority for handling reports is as follows:
   a. Shareholders
      Shareholders have the authority to determine the decision on complaints related to the Company's Board of Commissioners/Supporting Organs of the Board of Commissioners, based on the results of verification, review/analysis, Investigation Report, and recommendations for complaint decisions submitted by the Investigation Team.
   b. Board of Commissioners
      The Board of Commissioners has the authority to determine the decision on complaints related to the Company's President Director, based on the results of verification, review/analysis, Investigation Report, and recommendations for follow-up actions submitted by the Investigation Team.
   c. President Director
      The President Director has the authority to determine the decision on complaints related to the Company's Board of Directors, the Board of Commissioners of Subsidiaries/Supporting Organs of the Board of Commissioners of Subsidiaries/Directors of Subsidiaries, and Company Employees, based on the results of verification, review/analysis, Investigation Report, and recommendations for complaint decisions submitted by the Investigation Team.

d. Pengaduan yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Direksi Anak Perusahaan yang diteruskan oleh TPA di masing-masing Anak Perusahaan kepada Direktur Utama Perusahaan dan ditembuskan kepada Direktur yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan Perusahaan serta Pemegang Saham lainnya, akan diproses tindak lanjut oleh TPA Perusahaan dengan tahapan yang sama dengan tindak lanjut aduan yang diterima oleh TPA Perusahaan dari Pelapor WBS secara umum.

6. Tahap Investigasi
   Investigasi merupakan langkah lanjutan dari hasil penelaahan/analisis pengaduan, yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Utama/Dewan Komisaris. Tahapan kegiatan investigasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Prosedur Audit Khusus, Dokumen No. PI-SPI-PR-003.

7. Tahap Pelaporan Kejadian Fraud kepada Aparat Penegak Hukum
   Apabila berdasarkan hasil keputusan Pihak yang Berwenang aduan ditetapkan untuk dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum, maka SVP yang membidangi Unit Tata Kelola dan Kepatuhan (Koordinator TPA) paling lambat 7 (tujuh) hari menyampaikan kepada Unit yang membidangi Hukum Korporasi untuk dapat diproses pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum. Pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Prosedur Pelaporan Kejadian Fraud kepada Penegak Hukum, Dokumen No. PI-SEK-PR-009 dan perubahannya.

d. Complaints related to and/or filed by the Board of Commissioners of a Subsidiary/Supporting Organs of the Board of Commissioners of a Subsidiary/Directors of a Subsidiary, forwarded by the TPA in each Subsidiary to the Company's President Director and copied to the Director in charge of Corporate Governance and Compliance and other Shareholders, will be processed by the Company's TPA using the same steps as the follow-up to complaints received by the Company's TPA from WBS Whistleblowers in general.

6. Investigation Stage
   An investigation is a follow-up step to the complaint review/analysis, conducted based on recommendations from the President Director/Board of Commissioners. The stages of the investigation are carried out according to the provisions contained in the Special Audit Procedures, Document No. PI-SPI-PR-003.

7. Reporting Fraud Incidents to Law Enforcement Officials

   If, based on a decision of the Competent Authority, the complaint is determined to be reported to Law Enforcement Officials, the SVP in charge of the Governance and Compliance Unit (TPA Coordinator) shall, no later than 7 (seven) days, submit the matter to the unit responsible for Corporate Law Unit so that a report can be filed with law enforcement authorities. Reporting to Law Enforcement Officials is carried out in accordance with the provisions contained in the Procedure for Reporting Fraud Incidents to Law Enforcement, Document No. PI-SEK-PR-009 and its amendments.

Sinergi WBS Terintegrasi dengan KPK

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-489/S.MBU/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Kerja Sama WBS di BUMN dengan KPK RI, Perusahaan telah melaksanakan kerja sama terkait WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi PI dan KPK RI pada tanggal 2 Maret 2021 serta Adendum pada tanggal 2 Agustus 2023 terkait perluasan lingkup penanganan pengaduan terkait TPK meliputi PTPI dan Anak Perusahaan.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:
1. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal PTPI terkait penanganan pengaduan tindak pidana korupsi.
2. Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi.
3. Penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi melalui aplikasi.
4. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi.
5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait tindak pidana korupsi.

Adapun rincian kegiatan yang telah dilakukan bersama KPK RI pada tahun 2025 sebagai berikut:
1. Rapat implementasi WBS TPK Terintegrasi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk tahun 2025 yang dilakukan pada tanggal 16 September 2025 bersama dengan Tim KPK RI.
2. Pengesahan rencana aksi WBS TPK Terintegrasi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk tahun 2025 pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan mengacu pada perubahan fungsi pengelola WBS dari fungsi kepatuhan ke fungsi satuan pengawasan intern.

Integrated WBS Synergy with KPK

Following up on the letter from the Secretary of the Ministry of BUMN No. S-489/S.MBU/12/2020 dated December 22, 2020, regarding WBS Cooperation in SOEs with the KPK, the Company has implemented cooperation related to the Integrated Corruption Crime (TPK) WBS between PI and the KPK on March 2, 2021, as well as an Addendum on August 2, 2023, regarding the expansion of the scope of handling complaints related to TPK to include PTPI and its subsidiaries.
The scope of the Cooperation Agreement includes:
1. Development and/or strengthening of PTPI's internal regulations regarding the handling of corruption complaints.
2. Commitment to managing the handling of corruption complaints.
3. Handling corruption complaints using an application.
4. Coordination and joint activities in handling corruption complaints.
5. Exchange of data and/or information related to corruption crimes.

The details of activities carried out with KPK in 2025 were as follows:
1. Implementation meeting for the Integrated WBS TPK of PT Pupuk Indonesia (Persero) for 2025, held on September 16, 2025, in collaboration with the KPK Team.
2. Ratification of the Integrated WBS TPK Action Plan for PT Pupuk Indonesia (Persero) for 2025 on October 8, 2025, with reference to the change in the WBS management function from a compliance function to an internal audit unit function.

3. Pelaksanaan rencana aksi WBS TPK Terintegrasi PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan 31 Desember 2025 yang meliputi:
   a. Monitoring dan analisis aduan yang dapat di-*share* melalui aplikasi integrasi setiap bulan
   b. Survei tingkat efektivitas pengelolaan WBS dengan responden *stakeholder* internal dan eksternal yang dilakukan oleh konsultan independen
   c. Evaluasi sistem WBS *Multi company* dan penyusunan rencana dan target perbaikan
   d. Reviu dan pemutakhiran atas Pedoman, Prosedur, dan SK Tim Pengelola WBS
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi *Whistleblowing System* TPK Terintegrasi Tahun 2025 pada tanggal 29 Desember 2025 bersama dengan KPK RI.

Penanganan Aduan Dugaan TPK bersama KPK

1. Apabila dari hasil telaah/analisis dan/atau investigasi aduan termasuk kategori TPK serta direkomendasikan untuk dilakukan penanganan bersama dengan KPK, maka aduan tersebut diusulkan kepada Direktur Utama untuk dikoordinasikan penanganannya dengan KPK.

2. Apabila Direktur Utama menyetujui untuk dilakukan penanganan bersama dengan KPK, maka proses perencanaan dan pelaksanaan penanganan bersama KPK dilakukan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing institusi (Perusahaan dan KPK) sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
3. Penanganan bersama KPK atas pengaduan terkait dugaan TPK dikoordinasikan baik pada saat proses penanganan dilakukan maupun setelah kegiatan selesai.

Hasil penanganan bersama pengaduan dugaan TPK didiskusikan dalam Rapat Koordinasi untuk ditentukan tindak lanjutnya.

3. Implementation of the Integrated WBS TPK Action Plan for PT Pupuk Indonesia (Persero) until December 31, 2025, which included:
   a. Monthly monitoring and analysis of complaints that can be shared through the integration application.
   b. Survey of the effectiveness of WBS management with internal and external stakeholder respondents conducted by an independent consultant.
   c. Evaluation of the Multi-Company WBS system and development of improvement plans and targets.
   d. Review and updating of the Guidelines, Procedures, and Decree of the WBS Management Team.
4. Implementation of the monitoring and evaluation of the Integrated Whistleblowing System for 2025 on December 29, 2025, in collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK).

Handling Complaints of Alleged Corruption (TPK) with(KP)

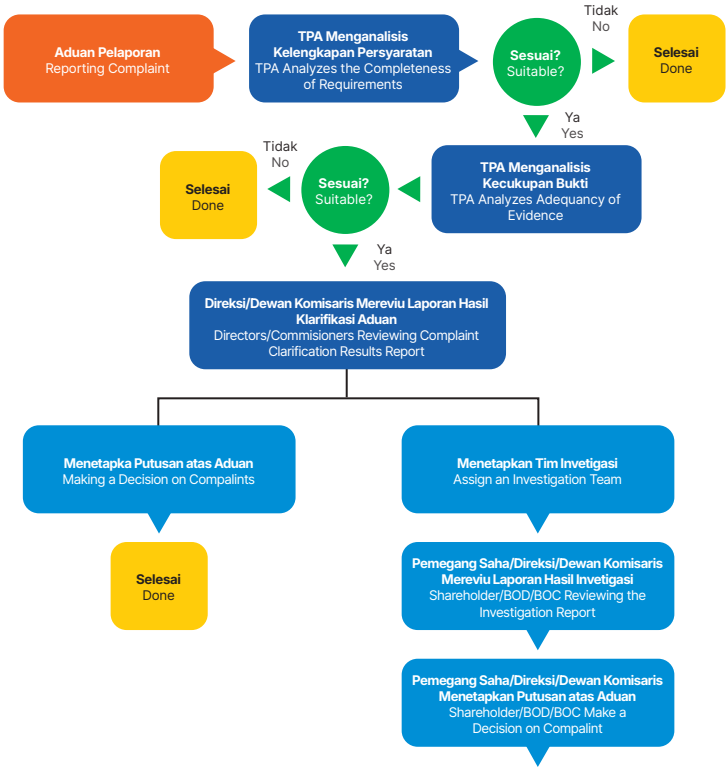
1. If the results of the review/analysis and/or investigation indicate that the complaint falls under the category of TPK and is recommended for joint handling with KPK, the complaint is submitted to the President Director for coordination with the KPK.

2. If the President Director agrees to joint handling with KPK, the planning and implementation of the joint handling process will be carried out in accordance with the internal provisions applicable to each institution (the Company and KPK), as stipulated in the Cooperation Agreement (PKS).

3. Joint handling of complaints related to alleged corruption by the KPK is coordinated both during and after the handling process is completed.

The results of the joint handling of complaints regarding alleged corruption are discussed in a Coordination Meeting to determine follow-up actions.

Bagan Alur Sistem Pengaduan
Complaint System Flowchart



Sanksi Bagi Terlapor

Setiap terlapor yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian Penghargaan

1. Penghargaan diberikan kepada pelapor yang telah beriktikad baik dan berjasa menyampaikan pengaduan pelanggaran.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan:
   a. Telah terbukti terjadi pelanggaran;
   b. Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti oleh Tim Investigasi.
3. Penghargaan diberikan dalam bentuk:
   a. Piagam; dan/atau
   b. Insentif sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
   c. Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Direksi dan atas persetujuan pelapor terkait pengungkapan identitasnya.

Perlindungan bagi Pelapor dan Petugas Terkait

Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun, sepanjang pelapor menjaga kerahasiaan identitas dan pelaporan pelanggaran yang diadukan. Perlindungan juga berlaku bagi pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak yang memberikan informasi terkait pengaduan tersebut.

Sanctions for Reported Parties

Any reported party found guilty of committing a violation will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Awards

1. Awards are given to whistleblowers who have acted in good faith and made a significant contribution in reporting violations.
2. The award referred to is granted under the following conditions:
   a. A violation has been proven;
   b. The complaint has been followed up by the Investigation Team.
3. The award is given in the form of:
   a. A certificate; and/or
   b. Incentives in accordance with applicable Company regulations;
   c. The award is granted based on a Board of Directors' Decision and with the consent of the whistleblower regarding the disclosure of their identity.

Protection for Whistleblowers and Related Officials

The Company guarantees protection for whistleblowers from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party, as long as the whistleblower maintains the confidentiality of their identity and the nature of the reported violation. This protection also applies to those conducting investigations and those providing information related to the complaint.

Apabila pelapor atau petugas TPA dan/atau Tim Investigasi menerima ancaman terhadap pekerjaan, hak remunerasi, maupun fasilitas pekerjaan yang diberikan Perusahaan, pelapor dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Pemegang Saham dan/atau Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama melalui Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan dapat memberikan perlindungan kepada keluarga pelapor, TPA, atau Tim Investigasi. Pemberian perlindungan dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas dan laporan.

Bentuk Perlindungan pada pelapor dan petugas terkait antara lain namun tidak terbatas pada:
1. Perlindungan kerahasiaan informasi yang diberikan;
2. Perlindungan atas pengenaan sanksi administrasi/ kepegawaian Perusahaan;
3. Perlindungan dari diskriminasi atau ancaman dari terlapor dan pihak terkait penyimpangan yang dilaporkan;
4. Perlindungan berupa bantuan hukum bagi pelapor dalam kondisi pelapor mendapat tuntutan hukum dari pihak yang dilaporkan;
5. Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan mengidentifikasi dan menerapkan strategi untuk melindungi pihak yang dilaporkan (terlapor) melalui:
1. Melindungi identitas;
2. Melakukan investigasi dengan cara menjaga kerahasiaan dan tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa pihak terlapor tidak terekspos kemungkinan rusaknya reputasi (informasi dibagikan berdasarkan *need to know basis*);
3. Memastikan proses penanganan pelaporan termasuk investigas dan asistensi/pendampingan dilakukan tepat waktu, adil, tidak memihak, dan rahasia;
4. Memberikan dukungan selama proses berlangsung, termasuk komunikasi secara reguler;
5. Jika tidak terdapat bukti kesalahan yang ditemukan, tindakan perbaikan dapat dipertimbangkan, misal perbaikan reputasi, keuangan, status pekerjaan.

Perusahaan juga berkomitmen memberikan perlindungan kepada pihak berkepentingan yang meliputi namun tidak terbatas pada: saksi, orang lain yang membantu atau terlibat dalam laporan pelanggaran, investigator internal, anggota keluarga, perwakilan serikat pekerja atau pihak lain yang mendukung pelapor, atau mereka yang diduga salah melaporkan pelanggaran.

Pihak yang bertanggung jawab khusus melindungi pelapor meliputi:
1. Perusahaan melindungi pelapor dari ancaman internal maupun eksternal melalui unit yang membidangi fungsi Kepatuhan serta Fungsi Hukum, serta fungsi lain di dalam Perusahaan yang memiliki kompetensi dalam menjamin perlindungan pelapor;

If a whistleblower, a TPA officer, and/or the Investigation Team receives threats regarding their employment, remuneration, or work facilities provided by the Company, they may submit a request for protection to the Shareholders and/or the President Commissioner and/or the President Director through the Whistleblowing System Manager.

Under certain conditions, the Company may provide protection to the Whistleblower's family, the TPA, or the Investigation Team. Protection may be refused or terminated if there is evidence that the reporting party has failed to fulfill their obligation to maintain the confidentiality of their identity and report.

Forms of protection for reporting parties and related officials include, but are not limited to:
1. Protection of the confidentiality of the information provided;
2. Protection against the imposition of administrative/employee sanctions;
3. Protection from discrimination or threats from the reported party and related parties related to the reported irregularities;
4. Protection in the form of legal assistance for the whistleblower in the event that the whistleblower faces legal action from the reported party;
5. The form of protection provided is tailored to the type of threat/retaliation received. Protection is provided while still adhering to the principle of confidentiality and related provisions applicable to the Company.

In addition, the Company identifies and implements strategies to protect the reported party by:
1. Protecting their identity;
2. Conducting investigations while maintaining confidentiality and taking appropriate measures to ensure the reported party is not exposed to potential reputational damage (information is shared on a need-to-know basis);
3. Ensuring the reporting process, including investigations and assistance/guidance, is timely, fair, impartial, and confidential;
4. Providing support throughout the process, including regular communication;
5. If no evidence of wrongdoing is found, remedial action may be considered, for example, improving reputation, finances, or employment status.

The Company is also committed to providing protection to stakeholders, including, but not limited to: witnesses, others who assist or are involved in reporting violations, internal investigators, family members, union representatives, or others who support the whistleblower, or those suspected of falsely reporting violations.

Parties specifically responsible for protecting whistleblowers include:
1. The Company protects whistleblowers from internal and external threats through units responsible for Compliance and Legal Affairs, as well as other functions within the Company competent to ensure whistleblower protection.

a. Perusahaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka pemberian perlindungan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penanganan aduan pelanggaran.
b. Perusahaan telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Nota Kesepahaman tentang Upaya Pemberian Perlindungan kepada Saksi dan Korban Tindak Pidana di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero), Nomor 177/A/PA/A21/SP/2023 dan Nomor NK-009/1.3.4.HMKS/LPSK/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023. Nota Kesepahaman ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ditandatangani.

a. The Company may collaborate with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) to provide protection to all parties involved in handling complaints of violations.

b. The Company has established a partnership with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) through a Memorandum of Understanding (MoU) concerning Efforts to Provide Protection to Witnesses and Victims of Crime within PT Pupuk Indonesia (Persero), No. 177/A/PA/A21/SP/2023 and No. NK-009/1.3.4.HMKS/LPSK/08/2023 dated August 2, 2023. This MoU is valid for a period of five years from the date of signing.

Jumlah Pelaporan Pelanggaran Tahun 2025

Berikut laporan yang masuk melalui media WBS sepanjang tahun 2025 dan 2024:

Number of Violation Reports in 2025

The following shows reports received through WBS media throughout 2025 and 2024:

No.	Jenis Aduan Type of Complaint	Jumlah Aduan berdasarkan Media Sosial Number of Complaints by Social Media								Jumlah Aduan (Seluruh Media) Number of Complaints (All Media)	
		Website		*E-mail*		Telepon Telephone		*Desk* Aduan Complaints Desk		2025	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	Total	%
1	Aduan Dugaan Pelanggaran Complaints of Alleged Violations	51	45	1	4	1	0	0	2	53	8,7%
2	Bukan Aduan Dugaan Pelanggaran Not a Complaint of Alleged Violation	4	6	346	414	205	0	0	0	555	91,3%
Jumlah Aduan Number of Complaints		**55**	**51**	**347**	**418**	**206**	**0**	**0**	**2**	**608**	**100%**

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

PTPI telah menetapkan larangan bagi Insan Perusahaan untuk meminta, memberikan, dan/atau menerima segala bentuk gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Setiap pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan dalam seluruh aktivitas bisnis.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Perusahaan telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi No.Dok. PI-TKK-PD-002 pertama kali pada tanggal 8 September 2017 dan beberapa kali dilakukan pemutakhiran terakhir pada tanggal 3 Oktober 2025, mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Kategori Gratifikasi

Berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah ditetapkan kategori gratifikasi, yaitu:
1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, meliputi: gratifikasi yang dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi: berlaku umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batas nilai yang wajar, atau merupakan bentuk pemberian dalam ranah adat istiadat kebiasaan, norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Sebagai langkah pencegahan praktik gratifikasi, Perusahaan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/072/2017 tentang Unit Pengendali Gratifikasi PTPI tertanggal 26 Desember 2017. UPG melekat pada fungsi Kepatuhan, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menerima, memverifikasi, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penolakan, penerimaan, pemberian, dan permintaan Gratifikasi dari Insan Perusahaan dan/atau Laporan Gratifikasi dari *stakeholder* lainnya yang disampaikan melalui media WBS;
2. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
3. Melaporkan rekapitulasi laporan penolakan, penerimaan, pemberian, dan permintaan Gratifikasi kepada KPK secara periodik;

PTPI has prohibited Company Personnel from requesting, giving, and/or accepting any form of gratification considered bribery, kickbacks, or bribery in any form related to their position and contrary to their obligations or duties, either directly or indirectly, from stakeholders.

Any violation of these provisions will be subject to sanctions according to the severity of the violation, ranging from minor to severe. This policy is part of the Company's efforts to consistently and sustainably implement GCG principles in all business activities.

Gratification Control Guidelines

The Company established Gratification Control Guidelines, Document No. PI-TKK-PD-002, for the first time on September 8, 2017, and updated several times, most recently on October 3, 2025, in accordance with KPK Regulation Number 2 of 2019 concerning Gratification Reporting.

Gratification Categories

Based on the Gratification Control Guidelines, the following gratification categories have been established:
1. Gratifications that must be reported including: gratification considered bribes if they are related to one's position and are contrary to one's obligations or duties.
2. Gratifications that do not have to be reported include: gratification that are generally accepted, do not conflict with applicable laws and regulations, are seen as a form of expression, hospitality, or respect in social relations within reasonable limits, or are a form of gift within the realm of customary customs and norms within reasonable limits.

Gratification Control Unit

As a preventive measure against gratification practices, the Company established a Gratification Control Unit (UPG) based on Board of Directors' Decree No. SK/DIR/072/2017 concerning the PTPI Gratification Control Unit dated December 26, 2017. The UPG is embedded within the Compliance function, with the following duties:
1. Receiving, verifying, analyzing, and administering reports of rejections, acceptances, grants, and requests for gratification from Company personnel and/or reports of gratification from other stakeholders submitted through the WBS;
2. Forwarding reports of gratification receipts to KPK;
3. Reporting a summary of reports of rejections, acceptances, grants, and requests for gratification to the KPK periodically;

4. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penolakan, penerimaan, pemberian, dan permintaan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Direksi;
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Kerja Satuan;
6. Mengkoordinasikan pengelolaan titik rawan potensi terjadinya praktik Gratifikasi di lingkungan perusahaan;
7. Mengusulkan Kebijakan/Pedoman pengelolaan, pembentukan lingkungan anti Gratifikasi, dan pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan;
8. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada internal dan eksternal perusahaan;
9. Mengusulkan dan membuat sistem pengelolaan Gratifikasi berbasis teknologi informasi;
10. Melakukan pemeliharaan objek Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status objek Gratifikasi tersebut oleh KPK; dan
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengendalian Gratifikasi dan menyampaikan data implementasi pengendalian Gratifikasi kepada KPK secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka menjamin Pedoman Pengendalian Gratifikasi dapat diketahui oleh seluruh Insan Perusahaan, maka:

1. Seluruh unit kerja berkewajiban mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada mitra/rekanan atau pihak ketiga lainnya;
2. Seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga berkewajiban menyampaikan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak dalam mata rantai pemasok (penyedia barang/jasa, agen, distributor, konsultan, auditor/*assessor* dan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya);
3. Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak eksternal terkait dengan adanya Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
4. Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban memonitor pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi;
5. Perusahaan secara periodik menyampaikan "Imbauan Larangan Penerimaan dan/atau Pemberian Gratifikasi" pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri serta menjelang Hari Raya Natal dan tahun baru.

Proses Pelaporan Gratifikasi

Insan Perusahaan dapat melaporkan penerimaan, pemberian, penolakan, dan permintaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan dan/atau langsung melalui sistem aplikasi pelaporan gratifikasi *online* yang diakses melalui www.gol.kpk.go.id serta melalui media pelaporan dugaan pelanggaran yang disediakan perusahaan melalui tautan: wbs.pupuk-indonesia.com

4. Submitting the results of the management of reports on rejections, acceptances, grants, and requests for Gratuities, as well as proposed Gratification control policies, to the Board of Directors;
5. Providing follow-up recommendations to the Internal Audit Unit if Company Personnel violate these Guidelines;
6. Coordinating the management of potential Gratification practices within the company;
7. Proposing policies/guidelines for management, the establishment of an anti- Gratification environment, and the prevention of corruption within the company;
8. Socializing Gratification provisions to internal and external stakeholders;
9. Proposing and creating an information technology-based Gratuity management system;
10. Holding Gratification objects until the Corruption Eradication Commission (KPK) determines their status; and
11. Monitoring and evaluating Gratification control and Submitting data on the implementation of Gratification control to the KPK periodically in accordance with applicable regulations.

Implementation of Gratification Control

To ensure Gratification Control Guidelines are known to all Company personnel, the following applies:

1. All work units are required to include provisions prohibiting the acceptance and provision of gratuities (gifts/facilities) in every announcement during the goods/services procurement process and/or in goods and services procurement contracts, as well as in letters sent to partners/associates or other third parties;
2. All work units that have working relationships with third parties are required to communicate the Gratification Control Policy to all parties in the supply chain (goods/service providers, agents, distributors, consultants, auditors/assessors, customers, and other stakeholders);
3. The Gratification Control Unit is required to continuously provide information to all employees and external parties regarding the Gratification Control Policy;
4. The Gratification Control Unit is required to monitor the implementation of the Gratification Control Policy and provide regular reports to the Board of Directors;
5. The Company periodically issues an "Advice on the Prohibition of Accepting and/or Giving Gratification" during the lead-up to Eid al-Fitr, Christmas, and New Year's holidays.

Gratification Reporting Process

Company personnel can report the receipt, giving, rejection, and request of gratuities through the Company's Gratification Control Unit and/or directly through the online Gratification reporting application system accessed at https://gol.kpk.go.id and through the Company's reporting platform for suspected violations at the following link: https://wbs.pupuk-indonesia.com

Sanksi atas Pelanggaran

Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Sanctions for Violations

Any violation of the Gratification Control Guidelines will be subject to sanctions in accordance with applicable Company regulations.

Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025

UPG menyampaikan laporan ke Direksi & Dewan Komisaris secara berkala dan berkoordinasi dengan KPK untuk laporan gratifikasi yang masuk ke ranah KPK. Pada tahun 2025, terdapat 133 pelaporan gratifikasi (penolakan 11 laporan, pemberian tidak ada laporan, permintaan tidak ada laporan dan Penerimaan 122 laporan di antaranya Dikelola Perusahaan 55 laporan, Menjadi milik Negara 19 laporan, dan Dikembalikan ke Penerima 48 laporan.

Gratification Control Unit Report in 2025

The GCU submits regular reports to the Board of Directors and Board of Commissioners and coordinates with the KPK regarding gratification reports submitted to the KPK. In 2025, there were 133 gratification reports (11 reports of rejections, no reports of gifts, no reports of requests, and 122 reports of receipts, of which 55 were managed by The Company, 19 became state property, and 48 were returned to recipients.

Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2025
Number of Gratification Reports in 2025

Kategori Laporan Gratifikasi Gratification Report Category	**Jumlah Laporan** Number of Reports
Penolakan Rejected	11
Penerimaan: Received:	122
Dikelola Perusahaan Managed by the Company	55
Menjadi Milik Negara Became State Property	19
Dikembalikan ke Penerima Returned to Recipient	48
Pemberian Granted	0
Permintaan Requested	0
Jumlah Laporan Gratifikasi Number of Gratification Reports	**133**

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Conflict of Interest Management

Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan, PTPI menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan No. Dok. PI-TKK-PD-001 Rev.0 tanggal 8 September 2017. Pedoman tersebut kemudian dimutakhirkan beberapa kali dilakukan pemutakhiran terakhir pada tanggal 3 Oktober 2025. Selama tahun 2025 tidak ada laporan pelanggaran terkait benturan kepentingan.

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan, setiap pejabat Perusahaan wajib menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan, masyarakat, Insan Perusahaan, serta mempertimbangkan faktor relevan lainnya.

Penerapan kebijakan pencegahan benturan kepentingan memerlukan keterlibatan seluruh Insan Perusahaan. Setiap Insan Perusahaan diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai benturan kepentingan, serta mampu mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan Insan Perusahaan, Perusahaan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mempublikasikan Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingan;
2. Secara berkala mengingatkan Insan Perusahaan adanya Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingan;
3. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
4. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan.
5. Memberi bantuan konsultansi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami Kebijakan dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Perusahaan.

Selama tahun 2025 tidak ada laporan pelanggaran terkait benturan kepentingan.

As a preventative measure against potential conflicts of interest that could harm the Company, PTPI established Conflict of Interest Management Guidelines, No. PI-TKK-PD-001 Rev.0, dated September 8, 2017. These guidelines have been updated several times, most recently on October 3, 2025. There were no reports of violations related to conflicts of interest during 2025.

To prevent conflicts of interest, every Company official is required to exercise their authority professionally, objectively, and responsibly, prioritizing the interests of the Company, the public, and Company personnel, while considering other relevant factors.

Implementing the conflict of interest prevention policy requires the involvement of all Company personnel. Each Company employee is expected to have an adequate understanding of conflicts of interest and be able to identify, anticipate, and prevent potential conflicts of interest.

To encourage the active participation and involvement of Company personnel, the Company undertakes the following efforts:

1. Publishes the Conflict of Interest Policy and Guidelines;
2. Periodically reminds Company Personnel of the Conflict of Interest Policy and Guidelines;
3. Ensures rules and procedures are easily accessible and understood;
4. Provides guidance on how to handle conflicts of interest.
5. Provides consultation and advice to those who do not yet understand the Conflict of Interest Policy and Guidelines, including external parties related to or associated with the Company.

During 2025, there were no reports of violations related to conflicts of interest.

Kebijakan Anti-*Fraud*/Antikorupsi

Anti-Fraud/Anti-Corruption Policy

Perusahaan berkomitmen kuat untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berintegritas dengan mencegah segala bentuk konflik kepentingan serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam setiap pengambilan keputusan, Perusahaan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok. Komitmen ini didukung melalui penerapan kebijakan antikorupsi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan komitmen tersebut, Perusahaan telah menetapkan sejumlah kebijakan sebagai berikut:

1. Pedoman Sistem Pengendalian *Fraud (Fraud Control System)* Nomor Dokumen PI-SEK-PD-014 pertama kali ditetapkan 28 April 2021 dan dimutakhirkan beberapa kali terakhir pada 3 Oktober 2025;
2. Pedoman Manajemen Anti Penyuapan, Nomor Dokumen PI-SEK-PD-007 pertama kali ditetapkan 14 Agustus 2019 dan dimutakhirkan beberapa kali terakhir pada 13 Mei 2025;
3. Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016, tanggal 18 Januari 2022 telah dimutakhirkan melalui Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi pada tanggal 28 November 2024.
4. Komitmen Pengendalian Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 28 Maret 2024.

Pengembangan Program Anti-*Fraud*

Perusahaan berkomitmen dalam pengembangan program anti-fraud melalui beberapa program strategis di antaranya:

1. *Fraud Control System*
   Pupuk Indonesia Group bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan *Fraud Control System* (FCS) secara bertahap dimulai pada tahun 2017, dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Tahun 2017: *Workshop Fraud Control System* Pupuk Indonesia Group "Menciptakan *Trusted Company* di Era Disruptif Melalui Penerapan *Fraud Control System*" bersama BPKP pada tanggal 5 Desember 2017;
   b. Tahun 2018: *Diagnostic Assessment* Tahap I untuk 4 (empat) entitas (PI, PKG, PKT, dan PSP).
   c. Tahun 2019:
      - Bimbingan Teknis FCS di PI;
      - Monitoring pengembangan FCS dan tindak lanjut *Area of Improvement* FCS di 4 (empat) entitas (PI, PKG, PKT, dan PSP);
      - *Diagnostic Assessment* Tahap II untuk 3 (tiga) entitas (PKC, PIM, dan REKIND).
   d. Tahun 2020:
      - Bimbingan Teknis FCS untuk 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND);
      - Monitoring pengembangan FCS dan tindak lanjut *Area of Improvement* FCS di 7 (tujuh) entitas (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).

The Company is strongly committed to building a healthy and integrity-based business climate by preventing all forms of conflicts of interest and the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). In every decision-making process, the Company prioritizes the Company's interests over personal, family, or group interests. This commitment is supported by an anti-corruption policy that refers to Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In line with this commitment, the Company has established the following policies:

1. Fraud Control System Guidelines, Document Number PI-SEK-PD-014, first established on April 28, 2021, and most recently updated on October 3, 2025;
2. Anti-Bribery Management Guidelines, Document Number PI-SEK-PD-007, first established on August 14, 2019, and most recently updated on May 13, 2025;
3. Anti-Bribery Policy and Commitment for the implementation of the Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001:2016, dated January 18, 2022, updated through the Integrated Management System Policy on November 28, 2024.
4. Commitment to Control the Implementation of Gratification Control, updated on March 28, 2024.

Anti-Fraud Program Development

The Company is committed to developing an anti-fraud program through several strategic programs, including:

1. Fraud Control System
   Pupuk Indonesia Group, in collaboration with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), developed a Fraud Control System (FCS) in stages, beginning in 2017, with the following stages:
   a. 2017: Pupuk Indonesia Group Fraud Control System Workshop "Creating a Trusted Company in a Disruptive Era Through the Implementation of a Fraud Control System" with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) on December 5, 2017;
   b. 2018: Phase I Diagnostic Assessment for four entities (PI, PKG, PKT, and PSP).
   c. 2019:
      - FCS Technical Guidance at PI;
      - Monitoring FCS development and follow-up on FCS Areas of Improvement in four entities (PI, PKG, PKT, and PSP);
      - Phase II Diagnostic Assessment for three entities (PKC, PIM, and REKIND).
   d. 2020:
      - FCS Technical Guidance for 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND);
      - Monitoring FCS development and follow-up on FCS Areas of Improvement in 7 (seven) entities (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).

- *Diagnostic Assessment* Tahap III untuk 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP); iv. Evaluasi Program FCS di PI.

e. Tahun 2021:
- Bimbingan Teknis FCS untuk 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP);
- Monitoring pengembangan FCS dan tindak lanjut *Area of Improvement* FCS di 11 (sebelas) entitas Pupuk Indonesia Group;
- Evaluasi Program FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).

f. Tahun 2022:
- Monitoring pengembangan FCS dan tindak lanjut *Area of Improvement* FCS di 11 (sebelas) entitas Pupuk Indonesia Group;
- Evaluasi Program FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP).

g. Tahun 2023:
- Tindak Lanjut Evaluasi FCS di PI.
- Evaluasi FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
- Bimbingan Teknis FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP).

h. Tahun 2024:
- Evaluasi FCS di PI
- Tindak Lanjut Evaluasi FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
- Evaluasi FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP)

Perusahaan melakukan penyesuaian *roadmap* pengembangan FCS tahun 2022–2024 sebagai berikut:

a. Evaluasi FCS di PI.
b. Bimbingan Teknis FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
c. Diagnostic Assessment FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP)

2. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Berikut sertifikasi yang diperoleh:

- Phase III Diagnostic Assessment for 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP); iv. FCS Program Evaluation at PI.

e. 2021:
- FCS Technical Guidance for 4 (four) entities entities (ME, PILOG, PIU, and PIP);
- FCS development monitoring and follow-up on FCS Areas of Improvement in eleven Pupuk Indonesia Group entities;
- FCS Program Evaluation in 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).

f. 2022:
- Monitoring FCS development and follow-up on FCS Areas of Improvement in 11 (eleven) Pupuk Indonesia Group entities;
- Evaluating FCS Programs in 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP).

g. 2023:
- Follow-up on FCS Evaluation at PI.
- FCS Evaluation at 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
- FCS Technical Guidance at 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP).

h. 2024:
- FCS Evaluation at PI
- Follow-up on FCS Evaluation at 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
- FCS Evaluating 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP)

The Company adjusted its FCS development roadmap for 2022–2024 as follows:

a. FCS Evaluation at PI.
b. FCS Technical Guidance at 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
c. FCS Diagnostic Assessment at 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP).

2. Implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) SNI ISO 37001:2016. The Company and its Subsidiaries obtained the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certificate. The certification obtained included the following:

No.	Perusahaan Company	Lembaga Sertifikasi Certification Body	Nomor Sertifikasi Certification Number	Tanggal Sertifikasi Certification Date	Berlaku Sampai Valid Until
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	TUV Nord Indonesia	0313 F 23000427	27 Juni 2023 June 27, 2023	26 Juni 2026 June 26, 2026
2	PT Petrokimia Gresik	Sucofindo	SAB 00145	24 November 2023 November 24, 2023	23 November 2026 November 23, 2026
3	PT Pupuk Kujang	Sucofindo	SAB 00014	3 Oktober 2023 October 3, 2023	9 Agustus 2026 August 9, 2026
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	British Standards Institution	IABMS 729332	16 Juni 2023 June 16, 2023	15 Juni 2026 June 15, 2026
5	PT Pupuk Iskandar Muda	Sucofindo	SAB 00009	31 Juli 2023 July 31, 2023	22 Juli 2026 July 22, 2026
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	TUV Nord Indonesia	0313 L 23000701	26 Oktober 2023 October 26, 2023	25 Oktober 2026 October 25, 2026
7	PT Rekayasa Industri	Mutu International	ABMS-031	22 September 2023 September 22, 2023	10 Agustus 2026 August 10, 2026
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	TUV Nord Indonesia	0313 F 23000414	21 Juni 2023 June 21, 2023	20 Juni 2026 June 20, 2026

No.	Perusahaan Company	Lembaga Sertifikasi Certification Body	Nomor Sertifikasi Certification Number	Tanggal Sertifikasi Certification Date	Berlaku Sampai Valid Until
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	TUV Nord Indonesia	0313 F 23000415	21 Juni 2023 June 21, 2023	20 Juni 2026 June 20, 2026
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas	TUV Nord Indonesia	0313 B 24000915	3 Februari 2023 February 3, 2023	6 Januari 2026 January 6, 2026
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	TUV Nord Indonesia	0313 F 23000416	21 Juni 2023 June 21, 2023	20 Juni 2026 June 20, 2026

Program dan Prosedur Pelaksanaan Antikorupsi

Perusahaan telah menetapkan berbagai pedoman dan prosedur sebagai infrastruktur utama dalam menumbuhkan dan memperkuat budaya antikorupsi, antara lain:

Anti-Corruption Program and Implementation Procedures roadmap.

The Company has established guidelines and procedures as key infrastructure for fostering and strengthening an anti-corruption culture, including:

No.	Nomor Dokumen Document Number	Nama Dokumen Document Name	Tanggal Dokumen Document Date
1	SKB Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 023/KEP/KOM/XII/2024 dan Nomor: 141/A/HK/1/D0201/SK/2024 Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 023/KEP/KOM/XII/2024 and No. 141/A/HK/1/D0201/SK/2024	Pedoman Etika dan Perilaku *(Code of Conduct)* Code of Conduct	20 Desember 2024 December 20, 2024
2	PI-SMT-PD-001	Pedoman Pengelolaan dan Penerapan Sistem Manajemen Guidelines for Managing and Implementing the Management System	13 Mei 2025 May 13, 2025
3	PI-SMT-PD-004	Pedoman Pengelolaan Tata Kelola dan Kepatuhan Guidelines for Governance and Compliance Management	03 Oktober 2025 October 03, 2025
4	PI-SEK-PD-011	Pedoman Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* Guidelines for the Whistleblowing Management System	13 Juli 2023 July 13, 2023
5	PI-SEK-PR-013	Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* Procedures for Managing the Whistleblowing System	13 Juli 2023 July 13, 2023

Sosialisasi Kebijakan Antikorupsi

Perusahaan menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi antikorupsi, antara lain:

1. *Workshop* Anti *Fraud*: "Satukan Aksi Basmi Korupsi – Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Pupuk Indonesia", yang dilaksanakan pada 10 Desember 2025;
2. Forum Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan "*Good Governance & Compliance* sebagai Pilar Pencegahan *Fraud* dan Korupsi", yang dilaksanakan pada 19 Desember 2025.

Anti-Corruption Policy Socialization

The Company held anti-corruption socialization activities, including:

1. Anti-Fraud Workshop: "Uniting Action to Eradicate Corruption - Strengthening Integrity and Governance at Pupuk Indonesia," on December 10, 2025;
2. "Good Governance & Compliance as Pillars of Fraud and Corruption Prevention" Governance and Compliance Strengthening Forum, held on December 19, 2025.

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Political Activities Funding Information

PTPI menghormati hak setiap individu yang bekerja di perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses politik serta memberikan dukungan kepada partai politik atau kandidat pilihannya secara pribadi dan bebas dari pengaruh perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PTPI bersikap netral dan tidak memihak partai politik mana pun, serta tidak memberikan sumbangan atau donasi dalam bentuk apa pun kepada partai politik maupun organisasi, perwakilan, atau pihak yang terafiliasi dengan partai politik di seluruh wilayah operasional perusahaan. Adapun pemberian donasi oleh PTPI hanya diperkenankan untuk kegiatan amal atau tujuan sosial, sepanjang dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PTPI respects the right of every individual working for the Company to participate in the political process and to support their chosen political party or candidate privately and free from corporate influence. In conducting its business activities, PTPI remains neutral and does not take sides with any political party. It does not provide any contributions or donations in any form to political parties, organizations, representatives, or parties affiliated with political parties in any of the company's operational areas. Donations by PTPI are permitted only for charitable activities or social purposes, provided they are made reasonably and in accordance with applicable laws and regulations.

Etika Perusahaan dalam Berhubungan dengan Pejabat Publik

Corporate Ethics in Relations with Public Officials

Perusahaan memiliki kebijakan etika yang mengatur hubungan dengan pejabat publik melalui Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran pejabat publik yang memiliki wewenang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Perusahaan memelihara hubungan dengan pejabat publik dalam batas toleransi yang diperbolehkan hukum, dan menghindari terjadinya penyelewengan.

The Company has an ethics policy that governs relations with public officials through the Company's Code of Conduct. This policy is designed to develop and maintain good relationships and effective communication with all levels of public officials who have authority related to the Company's operations. The Company maintains relations with public officials within the limits of legal tolerance and avoids any misconduct.

Perusahaan juga melarang pembayaran secara langsung atau tidak langsung kepada pegawai atau pejabat publik di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis. Larangan ini berlaku tidak hanya terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, namun juga terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan oleh wakil Perusahaan.

The Company also prohibits direct or indirect payments to employees or public officials outside their official capacity and in violation of the law and sound and ethical business practices. This prohibition applies not only to payments and expenses made by the Company, but also to payments and expenses made for and on behalf of the Company by Company representatives.

Jamuan terhadap pejabat publik dapat dilakukan oleh wakil Perusahaan sepanjang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang pantas dan dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan terhadap pejabat publik tersebut atau situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap integritas yang bersangkutan atau motif Perusahaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Entertainment for public officials may be provided by Company representatives as long as it complies with applicable law, is conducted in an appropriate manner, and is not subject to any compromise or bias toward the public official or to any situation that could raise suspicion about the public official's integrity or the Company's motives for such action.

Pelaporan Kekayaan Pejabat
Officials' Wealth Reporting

Prinsip Dasar Pelaporan Kekayaan Pejabat

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pejabatnya melaporkan harta kekayaan. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap asas penyelenggaraan negara yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Basic Principles for Officials' Wealth Reporting

As a State-Owned Enterprise, the Company is subject to statutory provisions requiring its officials to report their assets. This reporting aims to ensure compliance with the principles of clean state governance, integrity, and freedom from corruption, collusion, nepotism, and other reprehensible practices.

Dasar Hukum Penerapan Kewajiban Pelaporan Kekayaan Pejabat di Perusahaan

Dalam penerapan kebijakan kewajiban pelaporan kekayaan bagi Pejabat Perusahaan, Perusahaan menetapkan ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara *juncto* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 12 tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-341/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. INS-01/MBU/2009 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
8. Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Legal Basis for the Obligation to Report Company Officials Wealth Reports

In implementing the mandatory wealth reporting policy for Company Officers, the Company establishes provisions after considering the following legal basis:

1. Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Corruption-Free State Administration;
2. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption;
3. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in conjunction with Republic of Indonesia Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. KPK Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth Reports in conjunction with KPK Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth Reports;
6. KPK Circular Letter No. 12 of 2017 dated October 13, 2017, concerning Guidelines for Managing State Officials' Wealth Reports within State-Owned Enterprises;
7. Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-341/MBU/10/2021 dated October 5, 2021, concerning the Minister of State-Owned Enterprises Revocation of Instruction No. INS-01/MBU/2009 concerning State Officials Required to Submit State Official Wealth Reports (LHKPN) within State-Owned Enterprises;
8. Ministry of State-Owned Enterprises Circular Letter No. SE-12/MBU/10/2021 dated October 5, 2021, concerning the Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN) for Officials in State-Owned Enterprises;

9. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 002/KEP.KOM/II/2022 dan No. 12.1/A/ KU/A24/SK/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PTPI;
10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 023/KEP.KOM/XII/2024 dan No. 141/A/HK/1/D0201/SK/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PTPI;
11. Pedoman Pengelolaan dan Penerapan Sistem Manajemen, No. Dokumen PI-SMT-PD-001.

Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan

Kebijakan tentang pelaporan harta kekayaan pejabat telah ditetapkan oleh Perusahaan pada tahun 2013 dengan pembaruan terakhir pada tahun 2025, yaitu Pedoman Pengelolaan Tata Kelola & Kepatuhan No. PI-SMT-PD-004 Rev. 0 tanggal 3 Oktober 2025. Pedoman ini disampaikan ke Anak Perusahaan melalui Surat Edaran No. 10/A/HK/G0103/SE/2025 tanggal 4 November 2025. Pemutakhiran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan PER-3/MBU/03/2023.

Pejabat yang termasuk Wajib Lapor adalah seluruh pejabat di Perusahaan dan Entitas Anak meliputi:

9. PTPI Board of Commissioners and Board of Directors Joint Decrees No. 002/KEP.KOM/II/2022 and No. 12.1/A/KU/A24/SK/2022 dated February 16, 2022, concerning the PTPI Code of Corporate Governance;
10. PTPI Board of Commissioners and Board of Directors Joint Decrees No. 023/KEP.KOM/XII/2024 and No. 141/A/HK/1/D0201/SK/2024 dated December 20, 2024, concerning the PTPI Code of Ethics and Conduct;
11. Guidelines for the Management and Implementation of Management Systems, No. Document PI-SMT-PD-001.

Obligations Requiring Reporting of Company Officials' Wealth

The Company established a policy regarding the reporting of officials' assets in 2013, with the last update in 2025, namely the Governance & Compliance Management Guidelines No. PI-SMT-PD-004 Rev. 0 dated October 3, 2025. These guidelines were communicated to Subsidiaries through Circular Letter No. 10/A/HK/G0103/SE/2025 dated November 4, 2025. This update refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulations No. PER-2/MBU/03/2023 and PER-3/MBU/03/2023.

Those who are required to report include all officers of the Company and its Subsidiaries, including:

Pejabat Officials	**Induk Perusahaan** Parent Company	**Anak Perusahaan** Subsidiaries	**Perusahaan Terafiliasi Terkonsolidasi** Consolidated Affiliated Companies
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting
Direksi Board of Directors	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting
Grade I/Setara Grade I/Equivalent	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	-
Grade II/Setara Grade II/Equivalent	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	-
Grade III/Setara Grade III/Equivalent	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	-

Hal ini merupakan perluasan Wajib Lapor yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

This is an expansion of the Mandatory Reporting mandated by Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Corruption-Free State Administration, and refers to the Ministry of State-Owned Enterprises Circular Letter No. SE-12/MBU/10/2021 dated October 5, 2021, concerning the Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN) for Officials in State-Owned Enterprises.

Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat merupakan persyaratan wajib untuk promosi karyawan di PTPI, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi yang terkonsolidasi dengan PTPI, yang secara teknis diatur dalam Pedoman dan Prosedur tersendiri berkaitan dengan promosi.

Compliance with the submission of Official Wealth Reports is a mandatory requirement for employee promotions at PTPI, its subsidiaries, and affiliated companies consolidated with PTPI,, which is technically regulated in separate Guidelines and Procedures related to promotions.

Pengelolaan Pelaporan Kekayaan Pejabat Perusahaan

Perusahaan telah membentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (UPL). Unit ini berada pada fungsi Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan/atau unit lain yang ditetapkan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan. UPL bertindak sebagai mitra kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat, termasuk melakukan koordinasi terkait penyesuaian dan perubahan regulasi pengelolaan e-LHKPN di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

UPL juga menjalankan peran sebagai Admin Induk Perusahaan dan Admin Anak Perusahaan, yang terbagi atas:

1. Admin Induk Perusahaan dikelola oleh unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan SDM dan/atau unit yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Perusahaan. Admin Induk Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Unit yang membidangi fungsi kepatuhan di Perusahaan:
      i) Berkoordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor di Pupuk Indonesia Group dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta penggunaan aplikasi e-LHKPN;
      ii) Berkoordinasi dengan KPK dalam kegiatan sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Pupuk Indonesia Group;
      iii) Mengingatkan Wajib Lapor di Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat;
      iv) Melakukan koordinasi dengan UPL di Anak Perusahaan untuk mendorong kepatuhan Wajib Lapor di Anak Perusahaan;
      v) Mengajukan permintaan akun (*username* dan *password*) untuk Admin Induk Perusahaan dan Admin Anak Perusahaan kepada KPK;
      vi) Melakukan *approval*, aktivasi, dan non aktivasi akun Wajib Lapor di Pupuk Indonesia Group, serta membuat akun Admin Anak Perusahaan;
      vii) Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Lapor, baik dalam pelaporan Harta Kekayaan maupun pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Perusahaan;
      viii) Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Direksi Perusahaan yang membawahi fungsi kepatuhan terhadap Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap di Perusahaan.
   b. Unit yang membidangi fungsi SDM di Perusahaan:
      i) Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor di Perusahaan sewaktu-waktu, setiap terjadi mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan pensiun serta melakukan pemutakhiran berkala setiap bulan;
      ii) Melakukan koordinasi dengan UPL di Anak Perusahaan untuk pemutakhiran data Wajib Lapor di seluruh Anak Perusahaan;

Management of Company Officials' Wealth Reporting

The Company has established an Officials' Wealth Report Management Unit (UPL). This unit operates under the Compliance and Human Capital (HC) functions and/or other units designated by the Company and its subsidiaries. The UPL acts as a working partner of the Corruption Eradication Commission (KPK) in managing Officials' Wealth Reports, including coordinating adjustments and changes to regulations governing e-LHKPN management within the Company and its subsidiaries.

The UPL also serves as the Parent Company and Subsidiary Admin, which is divided into:

1. The Parent Company Admin is managed by a unit overseeing compliance and HC functions and/or a unit designated by the Company to manage Officials' Wealth Reports within the Company. The Parent Company Admin has the following duties and responsibilities:
   a. The Unit overseeing the Company's compliance function:
      i) Coordinating with KPK in monitoring and evaluating the compliance of Mandatory Reporters within the Pupuk Indonesia Group in reporting and announcing their assets and using the e-LHKPN application;
      ii) Coordinating with KPK in public outreach activities regarding the filing of Official Wealth Reports at Pupuk Indonesia Group;
      iii) Reminding Mandatory Reporters in the Company to comply with the obligation to submit Official Wealth Reports;
      iv) Coordinating with the UPL in Subsidiaries to encourage compliance with Mandatory Reports at Subsidiaries;
      v) Submitting account requests (usernames and passwords) for Parent Company and Subsidiary Admins to KPK;
      vi) Approving, activating, and deactivating Mandatory Reporter accounts at Pupuk Indonesia Group, as well as creating Subsidiary Admin accounts;
      vii) Monitoring and evaluating the level of compliance of Mandatory Reporters, both in reporting Assets and in announcing Officials' Asset Reports in the Company;
      viii) Submitting recommendations for imposing sanctions to the Company's Board of Directors in charge of compliance for Mandatory Reporters who fail to submit their Officials' Asset Reports and complete documentation to the Company.
   b. Units responsible for HC functions in the Company:
      i) Updating Mandatory Reporter data in the Company at any time, for each transfer, rotation, promotion, demotion, and retirement, and conduct periodic updates every month;
      ii) Monitoring and evaluating the level of compliance of Mandatory Reporters, both in reporting Assets and in announcing Officials' Asset Reports in the Company;

iii) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor Pupuk Indonesia Group kepada KPK sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPK.

2. Admin Anak Perusahaan dikelola oleh unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan SDM dan/atau unit yang ditunjuk oleh Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan. Admin Anak Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Unit yang membidangi fungsi kepatuhan di masing-masing Anak Perusahaan:
      i) Berkoordinasi dengan Admin Induk Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan penggunaan aplikasi e-LHKPN;
      ii) Mengajukan approval, aktivasi, dan non aktivasi akun Wajib Lapor serta Admin Anak Perusahaan di masing-masing Anak Perusahaan kepada Admin Induk Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan;
      iii) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan;
      iv) Mengingatkan Wajib Lapor di masing-masing Anak Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat;
      v) Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Lapor, baik dalam pelaporan Harta Kekayaan maupun pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan;
      vi) Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Direksi Anak Perusahaan yang membawahi fungsi kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk oleh Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat terhadap Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap di masing-masing Anak Perusahaan.
   b. Unit yang membidangi fungsi SDM di masing-masing Anak Perusahaan:
      i) Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor di masing-masing Anak Perusahaan posisi akhir tahun untuk pejabat aktif dan sesuai waktu pensiun untuk pejabat yang pensiun;
      ii) Menyampaikan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor di masing-masing Anak Perusahaan kepada Admin Induk Perusahaan bidang SDM untuk posisi akhir tahun paling lambat tanggal 1 Desember setiap tahunnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh KPK.

iii) Submitting personnel data and data on changes in positions subject to mandatory reporting for the Pupuk Indonesia Group to the KPK in accordance with the schedule set by the KPK.

2. Subsidiary Administration is managed by a unit responsible for compliance and HC functions and/or a unit designated by the Subsidiary to manage the Officials' Wealth Reports in each Subsidiary. The Subsidiary Administration has the following duties and responsibilities:
   a. The unit responsible for compliance functions in each Subsidiary:
      i) Coordinates with the Parent Company Administration responsible for compliance functions in monitoring and evaluating the compliance of Taxpayers in reporting and declaring their assets and using the e-LHKPN application;
      ii) Submits approval, activation, and deactivation of Mandatory Reporting and Subsidiary Admin accounts in each Subsidiary to the Parent Company Admin in charge of compliance;
      iii) Organizes socialization and assistance in completing the Official Asset Report in each Subsidiary;
      iv) Reminds Mandatory Reporters in each Subsidiary to comply with the obligation to submit the Official Asset Report;
      v) Monitors and evaluates the level of compliance of Mandatory Reporters, both in reporting Assets and in the publication of Official Asset Reports in each Subsidiary;
      vi) Submits recommendations for imposing sanctions to the Directors of Subsidiaries responsible for compliance functions or to the Directors appointed by the Subsidiary to manage Official Asset Reports for Mandatory Reporters who fail to submit their Official Asset Reports and complete documentation in each Subsidiary.
   b. The unit responsible for HR functions in each Subsidiary:
      i) Updates Mandatory Reporting data in each Subsidiary at the end of the year for active officials and at the retirement date for retired officials;
      ii) Submits updated personnel data and Mandatory Reporting position changes in each Subsidiary to the Parent Company Admin for HC for the end of the year no later than December 1 of each year or another time determined by KPK.

Sanksi atas Kelalaian Pelaporan Kekayaan Pejabat di Perusahaan

Jika ada Wajib Lapor tidak melaporkan harta kekayaannya atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Pedoman dan/atau Peraturan KPK, Direksi yang membawahi kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat dapat memberikan sanksi administratif kepada Wajib Lapor berdasarkan rekomendasi dari KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Lapor yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Sanksi bagi Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran secara lisan;
2. Teguran secara tertulis;
3. Penundaan hak atas:
    a. Pembayaran jasa operasi/bantuan biaya cuti tahunan/ sejenisnya bagi pejabat yang pertama kali menjabat, pejabat aktif, dan pejabat yang diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
    b. Pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan; atau
    c. Pembayaran pesangon atau sejenisnya bagi pejabat yang berakhir masa jabatan atau pensiun.

Sanksi penundaan hak pada huruf c dapat dicabut setelah kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap telah dilaksanakan oleh Wajib Lapor sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman. Ketentuan terkait sanksi tersebut ditetapkan dalam Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 tanggal 8 Juni 2023.

Transparansi Pelaporan Kekayaan Pejabat Perusahaan Tahun 2025

Selama tahun 2025, seluruh Wajib Lapor di lingkungan Perusahaan telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan dengan tingkat kepatuhan mencapai 100%. Rincian jumlah Wajib Lapor yang telah melakukan pelaporan disajikan berdasarkan masing-masing jabatan.

Sanctions for Failure to Report Officials' Wealth in a Company

If a Reporting Person fails to report their assets or fails to fulfill their obligations as stipulated in the KPK Guidelines and/or Regulations, the Board of Directors responsible for compliance or the Director appointed by the Company or Subsidiary to manage the Officials' Wealth Reporting may impose administrative sanctions on the Reporting Person based on recommendations from the KPK in accordance with applicable regulations. Reporting Persons who provide false information regarding their assets may be subject to sanctions in accordance with applicable laws and regulations.

Types of Sanctions for Mandatory Reporters who fail to submit a complete Official Asset Report along with the required documents will be subject to the following sanctions:

1. Verbal warning;
2. Written warning;
3. Suspension of the right to:
    a. Payment of operational fees/annual leave assistance/ similar benefits for first-time officials, active officials, and officials reappointed after the end of their term of office or retirement; or
    b. Definitive appointment for officials who receive a promotion; or
    c. Severance pay or similar benefits for officials whose term of office ends or retires.

The sanction of suspension of rights referred to in letter c may be revoked after the Obligated Reporter has complied with the obligation to submit a complete Official Wealth Report along with the required documents in accordance with the provisions of the Guidelines. The provisions regarding this sanction are stipulated in the Official Wealth Reporting Guidelines No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 dated June 8, 2023.

Company Official Wealth Reporting Transparency in 2025

In 2025, all Obligated Reporters within the Company submitted their Wealth Reports, with a compliance rate of 100%. The breakdown of the number of Obliged Reporters who have submitted reports is presented by position.

Penyampaian LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2025
Submission of LHKPN for Company Officials in 2025

Pejabat Wajib LHKPN Officials Required to Submit LHKPN	Jumlah Wajib Lapor Number of Reporting	Telah Melaporkan Reported	
		Jumlah Total	Persentase (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners	10	10	100
Direksi Board of Directors	9	9	100
Pejabat *Grade* I Grade I Officers	35	35	100
Pejabat *Grade* II Grade II Officers	124	124	100
Pejabat *Grade* III Grade III Officers	182	182	100
Jumlah Total	**360**	**360**	**100**

Status Pelaporan Kekayaan Pejabat Tahun 2025 di Pupuk Indonesia Group
Officials' Wealth Reporting Status in Pupuk Indonesia Group for 2025

Perusahaan Company	Jumlah Wajib Lapor Number of Reporting Officials	Telah Melaporkan Reported	
		Jumlah Total	Persentase (%)
PT Pupuk Indonesia (Persero)	360	360	100
PT Petrokimia Gresik	341	341	100
PT Pupuk Kujang	261	261	100
PT Pupuk Kalimantan Timur	389	389	100
PT Pupuk Iskandar Muda	142	142	100
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	528	528	100
PT Rekayasa Industri	382	382	100
PT Pupuk Indonesia Niaga	44	44	100
PT Pupuk Indonesia Logistik	25	25	100
PT Pupuk Indonesia Utilitas	31	31	100
PT Pupuk Indonesia Pangan	9	9	100
Jumlah Total	**2.512**	**2.512**	**100**

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement Of Goods and Services

Kebijakan serta Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan dilakukan secara cepat dan transparan dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Seluruh proses dilaksanakan tanpa benturan kepentingan serta mengacu pada kebijakan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297);
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2005 No. 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 3 tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBN);
8. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN;
9. Surat Edaran Menteri BUMN No. S-563/MBU/08/2020 tentang Penggunaan Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PADI UMKM") pada Proses Pengadaan dan Pembelanjaan Barang dan/atau Jasa pada UMKM di Lingkungan BUMN Disertai Pelaporannya;
10. Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan Perubahannya;
11. Perjanjian Bersama antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan No. 209/A/HK/A21/SP/2020, No. 1475/B/HK.01.01/13/SP/2020, No. 520/PK/SP/UK/XI/2020, No. 10610/SP-BTG/2020, No. 196/SP/DIR/PIM/LSM/2020, No. 265/SP/DIR/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Implementasi Kewenangan PTPI sehubungan dengan Penyelenggaraan Fungsi/Bidang Tertentu untuk Anak Perusahaan;
12. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 5/A/HK/E50/SK/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan perubahannya;

Procurement of Goods and Services Policy and Guidelines

The Company's procurement of goods and services is carried out expeditiously and transparently, upholding the principles of good corporate governance. The entire process is carried out without conflict of interest and adheres to applicable policies, including:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 70 of 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4297);
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 106 of 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4756);
3. Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services and its amendments;
4. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 117 of 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4556);
5. Government Regulation Number 22 of 2020 concerning the Implementing Regulations of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services and its amendments;
6. Minister of BUMN Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
7. Republic of Indonesia Minister of Industry Regulation No. 3 of 2014 concerning Guidelines for Increasing the Use of Domestic Products in Government Procurement of Goods and Services Not Funded by the State Budget and Regional Budgets (Non-APBN);
8. Republic of Indonesia Minister of Industry Regulation No. 16 of 2011 concerning Provisions and Procedures for Calculating Local Content (TKDN);
9. Minister of BUMN Circular Letter No. S-563/MBU/08/2020 concerning the Use of the Digital Marketplace for Micro, Small, and Medium Enterprises (PADI UMKM) in the Procurement and Purchasing of Goods and/or Services by MSMEs within State-Owned Enterprises, Accompanied by Reporting;
10. Articles of Association of Subsidiaries and Amendments;
11. Joint Agreements between the Company and Subsidiaries No. 209/A/HK/A21/SP/2020, No. 1475/B/HK.01.01/13/SP/2020, No. 520/PK/SP/UK/XI/2020, No. 10610/SP-BTG/2020, No. 196/SP/DIR/PIM/LSM/2020, No. 265/SP/DIR/2020 dated November 9, 2020, concerning the Implementation of PTPI's Authority in Relation to the Implementation of Certain Functions/Fields for Subsidiaries;
12. PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors Decree Number 5/A/HK/E50/SK/2024 dated January 23, 2024, concerning the Organizational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its amendments;

13. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SK/DIR/048/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Tanggung Jawab Penandatangan dan Pemaraf Dokumen di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan perubahannya;
14. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 111/A/KU/F55/SK/2021 tentang Panitia Pengadaan Barang, Panitia Pengadaan Jasa, Panitia Pengadaan Bahan Baku & Penolong serta Panitia Pengadaan Jasa Distribusi & Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) dan perubahannya;
15. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 50/A/HK/A40/SK/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Hirarki Dokumen Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan perubahannya;
16. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 38/A/HK/1/G0103/SK/2025 tanggal 13 Mei 2025 tentang Otorisasi Pengesahan Dokumen Sistem Manajemen di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan perubahannya;
17. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 113/A/HK/F0300/SK/2025 tanggal 4 Desember 2025 Otorisasi Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan perubahannya;
18. Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa, Nomor Dokumen PI-SMT-PD-015 dan perubahannya;
19. Pedoman Pengelolaan dan Penerapan Sistem Manajemen, Nomor Dokumen PI-SMT-PD-001 dan perubahannya;
20. Pedoman Pengelolaan *Inventory Material* No. PI-ADA-PD-001 Revisi 1 tanggal 10 Desember 2020 dan perubahannya;
21. Pedoman Penentuan Strategi MRO No. PI-ADA-PD-004 Revisi 1 tanggal 2 Januari 2023 dan perubahannya;
22. Pedoman Manajemen Anti Penyuapan No. PI-SEK-PD-007 dan perubahannya;
23. Pedoman Pengelolaan Rekanan No. PI-ADA-PD-003 tanggal 10 Desember 2020 dan perubahannya;
24. Pedoman Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa di Pupuk Indonesia Group No. PI-ADA-PD-005 revisi 0 Tanggal 11 Agustus 2023 dan perubahannya.

Dalam pelaksanaannya, PTPI senantiasa menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kemandirian dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses serta prosedur pengadaan barang dan jasa.

Prosedur, Surat Edaran, dan Instruksi Kerja

Pengelolaan pengadaan bertujuan untuk mengatur, memastikan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan maupun strategi pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, terstandarisasi, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu mendorong kelancaran proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

13. PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors Decree Number SK/DIR/048/2021 dated April 12, 2021, concerning the Responsibilities of Signers and Initializers of Documents at PT Pupuk Indonesia (Persero) and its amendments;
14. PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors Decree Number 111/A/KU/F55/SK/2021 concerning the Goods Procurement Committee, Services Procurement Committee, Raw Materials & Auxiliary Materials Procurement Committee, and Distribution & Marketing Services Procurement Committee of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its amendments;
15. PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors Decree Number 50/A/HK/A40/SK/2023 dated March 13, 2023, concerning the Corporate Document Hierarchy of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its amendments;
16. PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors Decree Number 38/A/HK/1/G0103/SK/2025 dated May 13, 2025, concerning Authorization for Approval of Management System Documents at PT Pupuk Indonesia (Persero) and its amendments;
17. PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Directors Decree Number 113/A/HK/F0300/SK/2025 dated December 4, 2025, Authorizing the Signing of Documents for the Implementation of Procurement of Goods and/or Services at PT Pupuk Indonesia (Persero) and its amendments;
18. General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services, Document Number PI-SMT-PD-015 and its amendments;
19. Guidelines for the Management and Implementation of Management Systems, Document Number PI-SMT-PD-001 and its amendments;
20. Guidelines for Material Inventory Management No. PI-ADA-PD-001, Revision 1, dated December 10, 2020, and its amendments;
21. MRO Strategy Determination Guidelines No. PI-ADA-PD-004, Revision 1, dated January 2, 2023, and its amendments;
22. Anti-Bribery Management Guidelines No. PI-SEK-PD-007, and its amendments;
23. Partner Management Guidelines No. PI-ADA-PD-003, dated December 10, 2020, and its amendments;
24. Guidelines for the Implementation of Domestic Component Levels (TKDN) in Goods and Services Procurement Activities at Pupuk Indonesia Group, No. PI-ADA-PD-005, Revision 0, dated August 11, 2023, and its amendments.

In its implementation, PTPI consistently upholds the principles of honesty and independence for all parties directly and indirectly involved in the goods and services procurement process and procedures.

Procedures, Circulars, and Work Instructions

Procurement management aims to regulate, ensure, and monitor the implementation of policies and strategies in the procurement of goods and services. This ensures their implementation is effective, standardized, measurable, and accountable, and ensures a smooth procurement process that supports the achievement of the Company's Vision, Mission, and Strategy in accordance with applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dan tata cara bagi Perusahaan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Rekanan, agar kegiatannya dapat berjalan secara efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung kelancaran proses bisnis Pengadaan serta mendorong peningkatan nilai tambah bagi Perusahaan.

Manajemen bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh dalam prosedur dan instruksi kerja operasional pengadaan barang dan jasa. Proses tersebut dimulai dengan rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan.

Prosedur, surat edaran, dan instruksi kerja yang berlaku meliputi:
1. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Rekanan (PI-PRO-PR-002) tanggal 18 Desember 2025;
2. SE Kategori Manajemen Sentralisasi Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 27 Desember 2025;
3. SE Service *Level Agreement* (SLA) Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 03 November 2025;
4. Instruksi Kerja Operasional Pengadaan tanggal 23 Maret 2025.

This procedure aims to provide guidance and procedures for the Company in implementing Goods/Services Procurement and Partner Management, ensuring activities are carried out effectively, orderly, and accountably, thereby supporting the smooth running of the Procurement business process and driving added value for the Company.

Management is responsible and has full authority over the procedures and operational work instructions for the procurement of goods and services. The process begins with the procurement plan, the procurement process, receipt, and storage.

Applicable procedures, circulars, and work instructions include:
1. Procedures for Procurement of Goods/Services and Partner Management (PI-PRO-PR-002) dated December 18, 2025;
2. Circular Letter on the Centralized Management Category for Procurement of Goods and Services dated December 27, 2025;
3. Circular Letter on the Service Level Agreement (SLA) for Procurement of Goods and Services dated November 3, 2025;
4. Procurement Operational Work Instructions dated March 23, 2025.

Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tahun 2025

Dalam memastikan pengelolaan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efektif, Perusahaan memiliki target dan perencanaan dalam wujud realisasi program pengadaan barang dan jasa yang disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Procurement Activities Realization and Implementation in 2025

To ensure effective management of goods and services procurement, the Company has targets and plans for the realization of its goods and services procurement program, as outlined in the table below.

No.	Kegiatan Activities	Dampak & Capaian Impact & Achievements
1	Perencanaan dan Proses Pengadaan Procurement Planning and Process	Pemenuhan Kebutuhan Perusahaan dan Anak Perusahaan Pupuk (Sentralisasi) dengan nilai pengadaan Rp22 triliun dengan penghematan sebesar Rp1,2 triliun. Fulfilling the needs of the Company and its Fertilizer Subsidiaries (Centralization) for a procurement value of Rp22 trillion, resulting in savings of Rp1.2 trillion.
2	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Increasing the Use of Domestic Products	Nilai transaksi Penggunaan Produk Dalam Negeri mencapai Rp45,7 Triliun. Transaction value for the use of domestic products reached Rp45.7 trillion.
3	Pelaksanaan *Vendor Gathering* Tahun 2025 Implementation of the 2025 Vendor Gathering	Menjalin interaksi dengan Rekanan PT PI serta peningkatan wawasan terkait GCG serta penerapan Sustainable Procurement pada Rekanan PTPI. Interacting with PTPI partners and increasing insight regarding GCG and the implementation of Sustainable Procurement among PT PI partners.
4	*Procurement Excellence*	Sosialisasi kegiatan Procurement Excellence ke Pupuk Indonesia Group melalui *Workshop Procurement Excellence*. Socializing Procurement Excellence activities to the Pupuk Indonesia Group through a Procurement Excellence Workshop.
5	*Sustainable Procurement*	Penetapan Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan pada Pedoman PI – SMT – PD – 015 dan sosialisasi *Supplier*/Rekanan pada kegiatan *Vendor Gathering* tahun 2025 dan serta komitmen penerapan *Sustainable Procurement* sebanyak 287 *Vendor*. Establishing a Sustainable Procurement Policy based on PI-SMT-PD-015 Guidelines and socializing information to suppliers/partners at the 2025 Vendor Gathering, as well as committing to implement Sustainable Procurement for 287 vendors.
6	*Single Platform* Digital Pengadaan Single Digital Procurement Platform	Implementasi digital fungsi Pengadaan Pupuk Indonesia Group, pada modul permintaan pengadaan, perencanaan pengadaan, proses pengadaan, penerimaan pengadaan, serta pembayaran. Implementing the Pupuk Indonesia Group Digital Procurement function, including modules for procurement requests, procurement planning, procurement processes, procurement receipts, and payments.
7	Evaluasi Sentralisasi Pengadaan Centralized Procurement Evaluation	Merupakan kegiatan evaluasi terhadap proses sentralisasi pengadaan, bekerja sama dengan konsultan sehingga diperoleh rekomendasi perbaikan. Evaluating the centralized procurement process in collaboration with consultants to obtain improvement recommendations.
8	*Logistic Contract Management*	Penetapan Prosedur LCM dan inisiasi awal untuk material sparepart dan jasa pemeliharaan pabrik. Determining LCM procedures and initial initiation for spare parts and factory maintenance services.
9	Kataloging Material Material Cataloging	Implementasi Kataloging Material pada Pupuk Indonesia Group sebanyak 170 ribu material. Implementing material cataloging at Pupuk Indonesia Group for 170,000 materials.

Pengelolaan Rekanan
Partner Management

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pupuk Indonesia Group menjalin kerja sama dengan berbagai pemasok barang dan jasa, mengingat Perusahaan belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut secara mandiri. Adapun rincian jumlah pemasok berdasarkan wilayah serta nilai realisasi kontrak sepanjang tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

When carrying out its business activities, Pupuk Indonesia Group collaborates with suppliers of goods and services, considering that the Company cannot yet meet all of these needs independently. The details regarding the number of suppliers by region and the value of contracts executed throughout 2025 are presented below.

Jumlah Pemasok dan Nilai Kontrak
Number of Suppliers and Contract Value

Kategori Pemasok Supplier Category	Jumlah Pemasok Number of Suppliers			Nilai Kontrak (Rp miliar) Contract Value (Rp billion)		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Pemasok Nasional National Supplier	2.094	2.781	2.647	45.703	50.729	44.630
Pemasok Internasional International Supplier	57	113	106	8.357	9.527	9.886
Jumlah Total	**2.151**	**2.894**	**2.753**	**54.060**	**60.256**	**54.516**

Upaya Peningkatan Kemampuan & Pemenuhan Pemasok

Sebagai upaya meningkatkan kapabilitas pemasok serta memastikan kesesuaian dengan kebutuhan Perusahaan, Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan program *Vendor Gathering* sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pemasok berkinerja baik, sekaligus menjadi forum diskusi serta sarana sosialisasi kebijakan dan ketentuan terbaru terkait proses pengadaan barang dan jasa. Melalui kegiatan ini, Perusahaan juga mendorong pemahaman dan penerapan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta GCG.

Selain itu, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, *coaching*, dan klinik terkait *Contractor Safety Management System* (CSMS) sebagai bagian dari upaya pengembangan kapabilitas pemasok, khususnya pemasok lokal, agar memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Kebijakan kepada Pemasok terkait Hak Asasi Manusia, TJSL, Keberlanjutan, Keadilan

1. Pakta Integritas serta komitmen pemasok merupakan sebuah kebijakan yang diperuntukan bagi seluruh pemasok agar memastikan implementasi prinsip-prinsip HAM kepada karyawan di seluruh lingkungan kerjanya, program TJSL yang dilakukan, serta laporan keberlanjutan pemasok tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pemasok.

Supplier Capacity Building & Fulfillment Efforts

To enhance supplier capabilities and ensure alignment with the Company's needs, the Company consistently holds a Vendor Gathering program at least once a year. This program aims to recognize high-performing suppliers, while also serving as a forum for discussion and a means of disseminating the latest policies and regulations related to the procurement of goods and services. Through this activity, the Company also encourages the understanding and implementation of sustainability principles, including Environmental, Social, and Governance (ESG) and Good Corporate Governance (GCG) aspects.

In addition, the Company conducts outreach, coaching, and clinics related to the Contractor Safety Management System (CSMS) as part of its efforts to develop supplier capabilities, particularly local suppliers, to ensure they possess adequate competencies aligned with the Company's needs.

Supplier Policies Regarding Human Rights, SER, Sustainability, and Equity

1. The Integrity Pact and Supplier Commitment is a policy intended for all suppliers to ensure the implementation of human rights principles for employees throughout their work environment, the SER programs they implement, and the full implementation of supplier sustainability reports.

2. Salah satu kriteria sosial yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa adalah implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS). Dalam CSMS, pihak-pihak yang bekerja di wilayah operasi Perusahaan, terutama pemasok yang bergerak di bidang konstruksi harus memenuhi persyaratan minimum aspek HSSE berdasarkan risiko pekerjaan sebagai persyaratan mengikuti proses tender.

3. Untuk mendapatkan sertifikat CSMS, salah satu syarat yang dimiliki oleh pemasok adalah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen HSSE dari Lembaga Sertifikasi Eksternal, seperti ISO 45001 serta ISO 14001.

4. Jika terdapat pemasok yang menyalahi ketentuan dalam persyaratan tender, Perusahaan secara tegas akan menjatuhkan sanksi kepada pemasok sesuai ketentuan *blacklist/suspend* yang diatur oleh peraturan Perusahaan yang berlaku.

Kriteria Pemilihan Pemasok

Dalam hal menjalankan proses bisnis pengadaan barang dan jasa Perusahaan menjaring pemasok melalui kriteria yang harus dipenuhi salah satunya adalah kriteria administrasi, legalitas, lingkungan serta kriteria mengenai kepatuhan prinsip GCG.

Pupuk Indonesia mengategorikan pemasok ke dalam beberapa golongan, seperti barang kritis bagi pemasok yang menyuplai bahan baku/dagangan, EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*) yang meliputi pengadaan yang memerlukan proses rekayasa desain, utilitas, distribusi, pengelolaan limbah, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH), pengujian, jasa, dan sebagainya.

Proses pemilihan pemasok di Pupuk Indonesia diawali dengan melakukan verifikasi legalitas perusahaan, mulai dari berkas pendirian, surat perizinan, hingga ke laporan keuangan beserta pelaporan pajaknya. Selain itu, pemasok diarahkan untuk menandatangani pakta integritas yang sejalan dengan kode etik pemasok milik Pupuk Indonesia. Pakta tersebut berisi kewajiban agar pemasok menerapkan integritas di berbagai hal, meliputi anti-korupsi, K3LH, lingkungan kerja dan pemenuhan hak pekerja, hingga ke dampak perusahaan terhadap lingkungan. Ke depannya, Pupuk Indonesia berencana akan menambahkan aspek yang berkaitan dengan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai kriteria dalam proses pemilihan pemasok. Ke depannya, akan ada pertimbangan mengenai pengelolaan sumber daya dan energi sebagai upaya menjaga perubahan iklim, seperti adanya target beserta rencana dekarbonisasi. Pupuk Indonesia berusaha untuk memprioritaskan aspek ESG, beserta etika dan kepatuhan hukumnya.

2. One of the social criteria used in the procurement of goods and services is the implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS). Under the CSMS, parties working in the Company's operational area, particularly suppliers engaged in construction, must meet minimum HSSE requirements based on job risks as a prerequisite for participating in the tender process.

3. To obtain a CSMS certificate, suppliers must have an HSSE Management System certification from an External Certification Body, such as ISO 45001 or ISO 14001.

4. If a supplier violates the tender requirements, the Company will strictly impose sanctions on the supplier in accordance with the blacklist/suspension provisions stipulated in applicable Company regulations.

Supplier Selection Criteria

When carrying out the procurement of goods and services, the Company selects suppliers based on criteria that must be met, including administrative, legal, environmental, and compliance with GCG principles.

PTPI categorizes suppliers into several categories, including critical goods for suppliers supplying raw materials/merchandise, and EPC (Engineering, Procurement, and Construction), which includes procurement requiring design engineering, utilities, distribution, waste management, Health, Safety and Environment (HSE), testing, services, and so on.

PTPI's supplier selection process begins with verifying the company's legality, from establishment documents and permits to financial statements and tax reporting. Also, suppliers are required to sign an integrity pact in line with PTPI's supplier code of ethics. This pact obligates suppliers to uphold integrity across various aspects, including anti-corruption, HSE, the work environment and fulfillment of workers' rights, and the company's impact on the environment. Going forward, Pupuk Indonesia plans to add aspects related to Environmental, Social, and Governance (ESG) as criteria in the supplier selection process. Furthermore, considerations regarding resource and energy management will be included in the supplier selection process to mitigate climate change, including decarbonization targets and plans. PTPI strives to prioritize ESG aspects, along with ethics and legal compliance.

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency of Bad Governance Practices

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan praktik GCG, sebagaimana dijelaskan berikut:

Up until the end of 2025, the Company did not take any actions or adopt any policies that conflict with GCG practices, as explained below:

No.	Praktik Practice	Penjelasan Explanation
1	Laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan Report on Company activities that pollute the environment	Tidak ada temuan None
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan Important matters currently being faced by the Company, its subsidiaries, current members of the Board of Directors, and/or members of the Board of Commissioners are not disclosed in the Annual Report	Tidak ada temuan None
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan Non-compliance with tax obligations	Tidak ada temuan None
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Non-compliance with the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and Indonesian Financial Accounting Standards	Tidak ada temuan None
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan No disclosure of operating segments in the Financial Statements	Tidak ada temuan None
6	Kasus terkait buruh dan karyawan Cases related to labor and employees	Tidak ada temuan None

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group

Implementation of Integrated Governance in The Pupuk Indonesia Group Conglomerate

Struktur Konglomerasi Pupuk Indonesia Group

Konglomerasi Pupuk Indonesia *Group* terdiri dari Entitas Induk dan Entitas Anak, dengan struktur sebagai berikut:

1. Entitas Induk adalah PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Entitas Anak sebagai Anggota Konglomerasi, merupakan Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) mencakup:
   a. Perusahaan partisipasi yang merupakan perusahaan yang dimiliki PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar 50% atau kurang namun memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
   b. Perusahaan yang dimiliki PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar 50% atau kurang yang memenuhi persyaratan, yaitu: (1) kepemilikan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan para pihak lainnya besar; dan (2) para pemilik melakukan pengendalian secara bersama yang didasarkan pada perjanjian dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya; atau
   c. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan berlaku wajib dikonsolidasikan.

Pupuk Indonesia Group Conglomerate Structure

The Pupuk Indonesia Group Conglomerate consists of a Parent Entity and Subsidiaries, with the following structure:

1. The Parent Entity is PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Subsidiaries, as Members of the Conglomerate, are Limited Liability Companies controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero) include:
   a. Participating companies, which are companies owned by PT Pupuk Indonesia (Persero) with a 50% or less ownership interest but exercise control over the company;
   b. Companies owned by PT Pupuk Indonesia (Persero) with a 50% or less ownership interest that meet the following requirements: (1) substantial ownership by PT Pupuk Indonesia (Persero) and other parties; and (2) the owners exercise joint control based on an agreement, evidenced by a written agreement or commitment from the owners to provide financial and non-financial support in accordance with their ownership; or
   c. Other entities that are required to be consolidated under applicable financial accounting standards.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Entitas Anak meliputi PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Niaga, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

Dengan demikian, struktur Konglomerasi Pupuk Indonesia Group dapat digambarkan sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the Subsidiaries included: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Niaga, PT Pupuk Indonesia Logistik, and PT Pupuk Indonesia Pangan.

Therefore, the structure of the Pupuk Indonesia Group Conglomerate can be described as follows:

Struktur Konglomerasi Pupuk Indonesia Group
Pupuk Indonesia Group Conglomerate Structure

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

Produsen Pupuk
Fertilizer Producer

PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Indonesia (Persero (99,9975%)
Yayasan PKG: 0,0024%
Saham Seri A Dwiwarna: 0,0001%

PT Pupuk Kujang
PT Pupuk Indonesia (Persero (99,9955%)
YKWK: 0,0044%
Saham Seri A Dwiwarna: 0,0001%

PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Indonesia (Persero (99,9988%)
YKHT PKT: 0,0011%
Saham Seri A Dwiwarna: 0,0001%

PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Indonesia (Persero (99,9995%)
YKHT PKT: 0,0004%
Saham Seri A Dwiwarna: 0,0001%

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pupuk Indonesia (Persero (99,9997%)
YKHT PKT: 0,0002%
Saham Seri A Dwiwarna: 0,0001%

Non-Produsen Pupuk
Non-Fertilizer Producer

PT Rekayasa Industri
PT Pupuk Indonesia (Persero (98,22%)
PT Danantara Asset Management: 0,89%
PKT: 0,89%

PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Pupuk Indonesia (Persero (99,84%)
Rekind: 0,16%

PT Pupuk Indonesia Logistik
PT Pupuk Indonesia (Persero (55,77%)
Rekind: 44,23%

PT Pupuk Indonesia Pangan
PT Pupuk Indonesia (Persero (55,77%)
PKG: 10% v: 10% PKT: 10% PSP: 10%

Catatan:
Komposisi kepemilikan saham PT Pupuk Indonesia (Persero) saat ini terdiri dari PT Danantara Asset Management (Persero) sebesar 99,9% dan Kementerian BUMN sebesar 0,0001%.
Note:
PT Pupuk Indonesia (Persero)'s current share ownership consists of PT Danantara Asset Management (Persero) with a 99.9% stake and the Ministry of State-Owned Enterprises with a 0.0001% stake.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Pupuk Indonesia Utilitas tentang Perubahan Kepemilikan dan Komposisi Pemegang Saham, Akta Nomor 13 tanggal 23 Desember 2024, para Pemegang Saham PT Pupuk Indonesia Utilitas telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT Pupuk Indonesia Utilitas yang dimiliki oleh PTPI kepada PT Rekayasa Industri.

Dengan adanya perubahan kepemilikan dan komposisi pemegang saham tersebut, maka PT Pupuk Indonesia Utilitas bukan lagi merupakan Entitas Anak PTPI, tetapi merupakan Entitas Anak PT Rekayasa Industri. Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Manajemen Risiko PTPI Nomor: 22357/A/MR/D0101/ET/2025, tanggal 30 Juni 2025, PT Rekayasa Industri ditetapkan sebagai perusahaan dengan kategori Konglomerasi dengan klasifikasi risiko Sistemik A.

Based on the Shareholders' Resolution of PT Pupuk Indonesia Utilitas concerning Changes in Ownership and Shareholder Composition, Deed Number 13 dated December 23, 2024, the Shareholders of PT Pupuk Indonesia Utilitas approved the transfer of all shares of PT Pupuk Indonesia Utilitas owned by PTPI to PT Rekayasa Industri.

With this change in ownership and shareholder composition, PT Pupuk Indonesia Utilitas is no longer a Subsidiary of PTPI, but rather a Subsidiary of PT Rekayasa Industri. Also, based on the Letter from the Director of Risk Management of PTPI Number 22357/A/MR/D0101/ET/2025, dated June 30, 2025, PT Rekayasa Industri was designated as a Conglomerate company with a Systemic Risk Classification of A.

Tata Kelola Terintegrasi PTPI

Dalam rangka memperkuat penerapan Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Pupuk Indonesia Group, Dewan Komisaris Perusahaan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta Surat Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 mengenai Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di lingkungan BUMN. Pembentukan KTKT ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PTPI Nomor 007/KEP.KOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Pembentukan KTKT mencerminkan komitmen Perusahaan dalam membangun *governance framework* yang terintegrasi dan selaras di seluruh entitas Pupuk Indonesia Group. Sebagai perusahaan *holding* dengan kompleksitas dan keterkaitan proses bisnis antar entitas yang tinggi, PTPI memandang perlunya mekanisme tata kelola yang mampu memperkuat harmonisasi kebijakan, efektivitas pengawasan, serta integrasi pengelolaan risiko dan kepatuhan secara berkelanjutan.

KTKT berperan sebagai *strategic governance oversight* dalam mendukung efektivitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Pupuk Indonesia Group. Melalui fungsi evaluasi, pemantauan, dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris, KTKT turut mendorong terciptanya penerapan GCG yang konsisten, penguatan pengendalian internal, serta sinergi tata kelola antar entitas dalam grup usaha.

Komposisi keanggotaan KTKT tidak hanya berasal dari PTPI sebagai Entitas Utama, tetapi juga melibatkan Dewan Komisaris dari Entitas Anak. Struktur tersebut mencerminkan pendekatan tata kelola yang terintegrasi dan kolaboratif guna mendukung pengelolaan perusahaan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan di seluruh ekosistem Pupuk Indonesia Group.

Informasi lebih lanjut mengenai Komite Tata Kelola Terintegrasi disajikan pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PTPI's Integrated Governance

To strengthen the implementation of Integrated Governance across the Pupuk Indonesia Group, the Company's Board of Commissioners established the Integrated Governance Committee (KTKT) pursuant to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of SOEs, as well as the Letter of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs Number SK-3/DKU.MBU/05/2023 dated May 26, 2023 regarding Technical Guidelines on the Composition and Qualifications of Risk Management Governing Bodies within SOEs. The establishment of KTKT was formalized through the Board of Commissioners' Resolution of PTPI Number 007/KEP.KOM/VIII/2023 dated August 14, 2023.

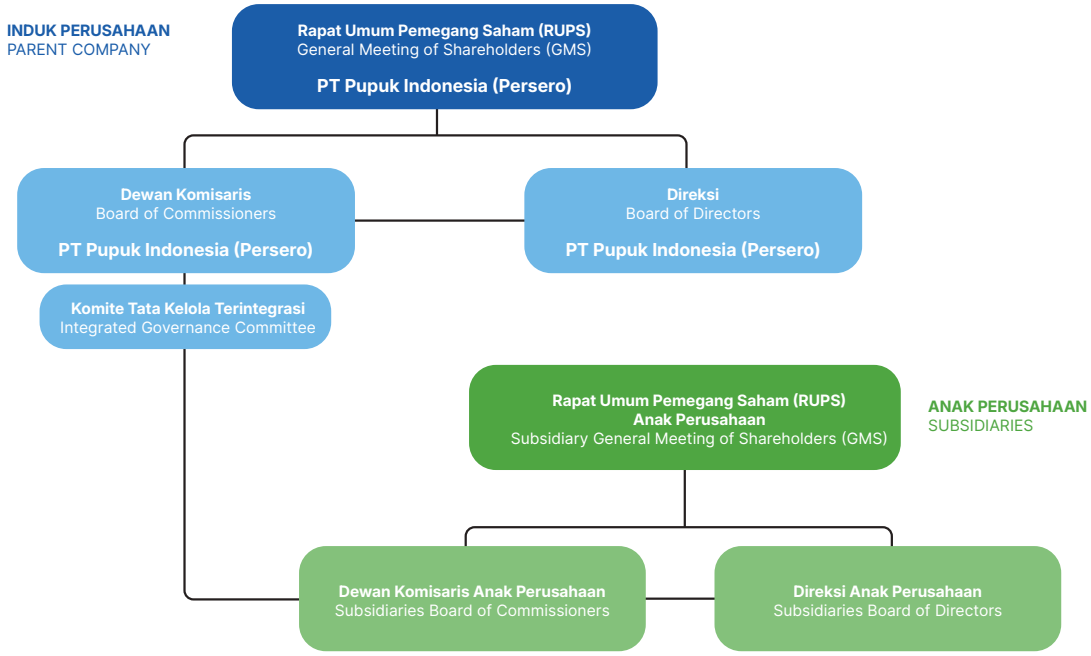
The establishment of KTKT reflects the Company's commitment to building an integrated and aligned governance framework across all entities within the Pupuk Indonesia Group. As a holding company with highly complex and interconnected business processes among its entities, PTPI recognizes the need for a governance mechanism capable of strengthening policy harmonization, enhancing oversight effectiveness, and ensuring the sustainable integration of risk management and compliance practices.

KTKT serves as a strategic governance oversight body in supporting the effective implementation of Integrated Governance throughout the Pupuk Indonesia Group. Through its evaluation, monitoring, and advisory functions to the Board of Commissioners, KTKT contributes to fostering consistent GCG practices, strengthening internal control systems, and enhancing governance synergy among entities within the Group.

The composition of KTKT membership not only comprises representatives from PTPI as the Main Entity, but also involves members of the Boards of Commissioners from Subsidiaries. This structure reflects an integrated and collaborative governance approach aimed at supporting effective, adaptive, and sustainable corporate management across the entire Pupuk Indonesia Group ecosystem.

Further information regarding the Integrated Governance Committee is presented in the Corporate Governance section of this Annual Report.

Desain Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group
Pupuk Indonesia Group Conglomerate Integrated Governance Design



Prinsip yang Diterapkan dalam Tata Kelola Terintegrasi

Pengelolaan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Pupuk Indonesia Group berlandaskan pada 5 (lima) prinsip tata kelola, yaitu: Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi atau Profesional, dan Kewajaran.

Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip Keterbukaan
   Prinsip Keterbukaan merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Prinsip Akuntabilitas
   Prinsip Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan dalam Konglomerasi Pupuk Indonesia Group, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Prinsip Pertanggungjawaban
   Prinsip Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan Pupuk Indonesia Group terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
4. Prinsip Independensi atau Profesional
   Prinsip Independensi atau Profesional merupakan keadaan dimana pengelolaan perusahaan Pupuk Indonesia Group dilakukan secara profesional serta tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Principles Applied in Integrated Governance

Corporate management is implemented in accordance with the principles stipulated in the Minister of BUMN Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as other relevant laws and regulations.

The implementation of Integrated Governance of the Pupuk Indonesia Group Conglomerate is based on 5(five) governance principles: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence or Professionalism, and Fairness.

These principles are outlined as follows:

1. Transparency Principle
   Transparency Principle refers to openness in the decision-making process and the disclosure of material and relevant information regarding the Company in accordance with applicable laws and regulations.

2. Accountability Principle
   Accountability Principle refers to the clarity of the functions, implementation, and accountability of Company organs within the Pupuk Indonesia Group Conglomerate, ensuring effective company management.
3. Responsibility Principle
   Responsibility Principle refers to the compliance of Pupuk Indonesia Group company management with laws and regulations and sound corporate principles.

4. Independency Principle or Professionalism
   The Independency of Independence or Professionalism is a condition in which the management of the Pupuk Indonesia Group is carried out professionally and without conflicts of interest and influence or pressure from any party that is inconsistent with laws and regulations and sound corporate principles.

5. Prinsip Kewajaran
   Prinsip Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Tata Kelola Kelompok Usaha Pupuk Indonesia Group

Prinsip tata kelola kelompok usaha dalam Pupuk Indonesia Group disusun berdasarkan pembagian kegiatan bisnis yang dijalankan oleh organ utama dan organ pendukung pada setiap entitas. Pembagian ini menjadi landasan penerapan tata kelola yang terstruktur dan selaras di seluruh lingkungan Pupuk Indonesia Group. Adapun prinsip tata kelola kelompok usaha Pupuk Indonesia Group adalah sebagai berikut:

1. Prinsip hubungan korporasi antara PTPI dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan mengutamakan kepentingan PTPI secara keseluruhan, dengan didasarkan atas prinsip sinergi serta memperhatikan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka mencapai hasil yang terbaik untuk PTPI dan Anak Perusahaan.
2. Interaksi dan koordinasi antara Direksi PTPI dengan dan antar Anak Perusahaan untuk hal-hal yang belum tercakup dalam Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*), atau tidak terkait dengan pengambilan keputusan ditetapkan oleh Direksi PTPI selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan. Interaksi dan koordinasi tersebut dibuat secara tertulis dan secara tegas menyatakan peran PTPI selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan dan peran Anak Perusahaan.
3. PTPI dan Anak Perusahaan akan bertindak berdasarkan praktik-praktik terbaik pada industri yang terkait, dengan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar PTPI dan Anak Perusahaan, serta memenuhi persyaratan-persyaratan dari stakeholders yang dapat berpengaruh kepada operasi PTPI dan Anak Perusahaan.

Hierarki Struktur Kelompok Usaha PTPI

1. Perusahaan memiliki kendali langsung atas Anak Perusahaan melalui kepemilikan saham mayoritas pada setiap Anak Perusahaan dan mendapatkan kuasa dari Negara RI selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di Anak Perusahaan Produsen Pupuk.
2. Anak Perusahaan berperan melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan sebagai Pemegang Saham mayoritas dan merupakan kepanjangan tangan dari Perusahaan sebagai Induk Perusahaan.
3. Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan, mengkoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Anak Perusahaan terkait dengan hal-hal yang menyangkut hubungan yang ada antar Perusahaan dalam kelompok usaha Pupuk Indonesia Group, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas operasional bisnis Anak Perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

5. The Fairness Principle
   The Fairness Principle is justice and equality in fulfilling stakeholder rights arising from agreements and laws and regulations.

Pupuk Indonesia Group Business Group Governance Principles

Pupuk Indonesia Group business group governance principles are structured based on the division of business activities carried out by the main and supporting organs within each entity. This division serves as the foundation for implementing structured and aligned governance throughout the Pupuk Indonesia Group. The Pupuk Indonesia Group business group governance principles are as follows:

1. Corporate relations between PTPI and its subsidiaries, as well as between subsidiaries, prioritize the interests of PTPI as a whole, based on the principle of synergy and observing the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in order to achieve the best results for PTPI and its subsidiaries.
2. Interaction and coordination between the Board of Directors of PTPI and between Subsidiaries for matters not covered by the Code of Group Governance or not related to decision-making are determined by the Board of Directors of PTPI as the Shareholder of the Subsidiary. Such interaction and coordination are made in writing and explicitly state the role of PTPI as the Shareholder of the Subsidiary and the role of the Subsidiary.
3. PTPI and its Subsidiaries will act based on best practices in the relevant industry, complying with all applicable laws and regulations, the Articles of Association of PTPI and its Subsidiaries, and meeting stakeholder requirements that may impact the operations of PTPI and its Subsidiaries.

PTPI Business Group Structure Hierarchy

1. The Company has direct control over its Subsidiaries through majority shareholding in each Subsidiary and is authorized by the Republic of Indonesia as the Holder of Series A Dwiwarna Shares in the Fertilizer Producer Subsidiary.
2. The Subsidiaries are responsible for carrying out operational activities in accordance with the targets established by the Company as the majority shareholder and acting as an extension of the Company as the Parent Company.
3. The Company has the authority to establish policies, coordinate, organize, and/or synergize functions for the Subsidiaries based on agreements with/authorization from the Subsidiaries regarding matters concerning the relationships between Companies within the Pupuk Indonesia Group business group, as well as to supervise and evaluate the Subsidiaries' business operations in accordance with applicable laws and regulations.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Good Corporate Governance Guidelines in Public Companies

Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan telah menginisiasi pemetaan atas penerapan GCG berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan terbuka sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

To strengthen good corporate governance implementation, the Company has initiated a mapping of GCG implementation based on the Public Company Governance Guidelines as stipulated in OJK Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines, and OJK (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Public Company Governance Guidelines.

Inisiasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan telah selaras dengan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi utama yang tercantum dalam Pedoman tersebut. Kegiatan pemetaan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen evaluatif, namun juga sebagai dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut yang terarah dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

This initiative's aim is to assess the extent to which the implementation of GCG principles within the Company aligns with the 5(five) aspects, 8(eight) principles, and 25(twenty-five) key recommendations contained in the Guidelines. This mapping is intended not only as an evaluative tool but also as a basis for developing a targeted follow-up plan to improve the quality of sustainable corporate governance implementation.

Hasil pemetaaan atas penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka selama periode pelaporan, sebagaimana tabel berikut:

The results of the mapping of the implementation of the Public Company Governance Guidelines during the reporting period are as shown in the following table:

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
I	**Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;** Aspect 1: The Relationship between Public Companies and Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights;			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1 Enhancing the Value of the GMS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public companies have technical methods or procedures for voting, both openly and secretly, that prioritize independence and the interests of shareholders.	• Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. • Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*. • Each issued share with voting rights carries one vote (one share, one vote). Shareholders can exercise their voting rights during decision-making, particularly when voting is required. However, the mechanism for decision-making through both open and closed voting has not been specifically regulated. • Public companies are recommended to have voting procedures for decisions on GMS agenda items. These voting procedures must maintain the independence and freedom of shareholders. For example, open voting is conducted by raising hands in accordance with the instructions offered by the GMS chairperson. Meanwhile, closed voting is conducted for decisions requiring confidentiality or at the request of shareholders, using ballot cards or electronic voting.	Perusahaan merupakan BUMN tertutup, dimana 100% kepemilikan adalah Pemerintah RI. Saat ini, Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait pengumpulan suara secara terbuka maupun tertutup. The Company is a privately held state-owned enterprise, 100% owned by the Indonesian government. Currently, the Company has policies regarding both open and closed voting.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. The presence of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of a Public Company is intended to ensure that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners can directly observe, explain, and respond to any issues or questions raised by shareholders regarding the agenda items of the GMS.	Terdapat 1 (satu) orang Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang Direksi tidak menghadiri RUPST RKAP. Dewan Komisaris tidak hadir dikuasakan kepada Anggota Dewan Komisaris lain dan Direksi tidak hadir dikuasakan kepada Anggota Direksi lainnya. Terdapat 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris yang tidak menghadiri RUPST Laporan Tahunan dan dikuasakan kepada Anggota Dewan Komisaris lain. One member of the Board of Commissioners and one member of the Board of Directors did not attend the Annual General Meeting of Shareholders (RKAP). The absence of the Commissioner was delegated to another member of the Board of Commissioners, and the absence of the Director was delegated to another member of the Board of Directors. One member of the Board of Commissioners did not attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and delegated to another member of the Board of Commissioners.
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of the GMS shall be available on the Public Company's website for at least one year.	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. Public companies are required to prepare a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and a foreign language (minimum English), and announce it to the public within 2 (two) business days after the GMS, through the Public Company's website. The availability of the summary of the minutes of the GMS on the Public Company's website provides shareholders who were unable to attend with easy and timely access to important information regarding the GMS. Therefore, the provisions regarding the minimum period for the availability of the summary of the minutes of the GMS on the website are intended to provide shareholders with sufficient time to obtain this information.	Perusahaan tidak mempublikan Risalah RUPS dikarenakan Perusahaan bukanlah Perusahaan Terbuka. The Company does not publish the Minutes of the GMS as it is not a public company.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public companies have a communication policy with shareholders or investors.	• Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. • Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. • Communication between a Public Company and its shareholders or investors is intended to provide shareholders or investors with a clearer understanding of information published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, and the implementation of Public Company Governance. In addition, shareholders or investors can also provide input and opinions to the management of the Public Company. • A communication policy with shareholders or investors demonstrates the Public Company's commitment to communicating with them. This policy may include strategies, programs, and timing for communication, as well as guidelines to support shareholders or investors in participating in such communication.	Perusahaan belum memiliki kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor secara rinci, yang memuat strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. The Company does not yet have a detailed communication policy with Shareholders or Investors, outlining the communication strategy, program, and timeline, as well as guidelines to support shareholders or investors in participating in such communication.
		5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public Companies disclose their communication policies with shareholders or investors on their Websites.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. Disclosure of communication policies demonstrates a public company's commitment to providing equal access to all shareholders and investors in its communications. Disclosure of this information also aims to increase shareholder or investor participation and participation in the implementation of the public company's communication program.	Perusahaan belum mengungkapkan Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor dalam *website* Perusahaan. The Company has not disclosed its Communications Policy with Shareholders or Investors on its website.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
II	**Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners			
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The number of members of the Board of Commissioners is determined by taking into account the conditions of the Public Company.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. The number of members of the Board of Commissioners can affect the effectiveness of the Board of Commissioners' duties. Determining the number of members of a Public Company's Board of Commissioners must comply with applicable laws and regulations, which must consist of at least two members, based on the Financial Services Authority (OJK) regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Furthermore, it is necessary to consider the conditions of the Public Company, including its characteristics, capacity, and size, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among Public Companies. However, an excessively large Board of Commissioners has the potential to disrupt the effective implementation of the Board of Commissioners' functions.	Per 31 Desember 2025, jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan anggota Direksi. As of December 31, 2025, the Company's Board of Commissioners consists of 8 (eight) members: 3 (three) Independent Commissioners and 5 (five) Commissioners. The number of Board of Commissioners' members is the same as the number of Board of Directors' members.
		7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Commissioners is determined by taking into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics, both in terms of the Board of Commissioners' organs and individual members, according to the needs of the Public Company. These characteristics are reflected in the determination of the expertise, knowledge, and experience required to carry out the Board of Commissioners' supervisory and advisory duties. A composition that takes into account the needs of the Public Company is a positive aspect, particularly regarding decision-making in the implementation of the supervisory function, which is carried out by considering a broader range of aspects.	Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2025 telah memperhatikan latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan Perusahaan. The composition of the Company's Board of Commissioners in 2025 has taken into account diverse backgrounds in terms of expertise, knowledge, and experience, aimed at supporting the Company's development. This can be seen in the profiles of each Commissioner in the Company's Annual Report.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
4	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 Improving the Quality of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	• Kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. • Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. • The Board of Commissioners' Self-Assessment Policy is a guideline used as a form of accountability for the collegial performance assessment of the Board of Commissioners. The Self-Assessment is conducted by each member to assess the Board's performance collegially, rather than individually. This Self-Assessment is expected to enable each member of the Board of Commissioners to contribute to the continuous improvement of the Board's performance. • This policy may include the assessment activities undertaken, their purpose and objectives, the periodic implementation timeframe, and the benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration function of a Public Company, where such function is required by the Financial Services Authority (OJK) Regulation concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang mengatur Penilaian Sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. The Board of Commissioners has a Board Manual that regulates self-assessment to assess Board of Commissioners' performance collegially.
		9. Kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris. Disclosure of the Board of Commissioners' performance self-assessment policy is not only intended to fulfill transparency requirements and demonstrate accountability for the performance of its duties, but also to provide assurance, particularly to shareholders and investors, regarding the necessary efforts to improve the Board of Commissioners' performance. This disclosure provides shareholders and investors with an understanding of the checks and balances in place for the Board of Commissioners' performance.	Kebijakan penilaian sendiri *(self assessment)* Dewan Komisaris tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual),* namun belum diungkapkan dalam Laporan Tahunan secara detail. The Board of Commissioners' self-assessment policy is outlined in the Board Manual, but has not been disclosed in detail in the Annual Report.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
		10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	• Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. • Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. • The policy of resigning members of the Board of Commissioners involved in financial crimes is a policy that can increase stakeholder trust in Public Companies, thereby maintaining the company's integrity. This policy is necessary to facilitate the smooth running of legal processes and ensure that they do not disrupt business operations. Furthermore, from a moral perspective, this policy fosters an ethical culture within the Public Company. This policy can be included in the Guidelines or Code of Ethics applicable to the Board of Commissioners. • Also, involvement in financial crimes is defined as the conviction of a member of the Board of Commissioners by the relevant authorities. These financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, as well as money laundering, as defined in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering.	Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. The Board of Commissioners does not yet have a policy for the resignation of members involved in financial crimes. This is a policy that can increase stakeholder trust in the Public Company, thereby maintaining the company's integrity.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
		11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors.	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Based on the OJK Regulation concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee carrying out the nomination function is tasked with developing policies and criteria required for the nomination process for prospective members of the Board of Directors. One policy that can support this nomination process is the Board of Directors succession policy. This succession policy aims to maintain the continuity of the regeneration or leadership development process within the Company in order to maintain business sustainability and the Company's long-term goals.	Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki kebijakan/*charter* Komite Nominasi dan Remunerasi yang mencakup pengaturan terkait kebijakan suksesi Direksi. The Nomination and Remuneration Committee has a Nomination and Remuneration Committee policy/ charter that includes provisions related to the Board of Directors' succession policy.
III	**Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi** Aspect 3: Board of Directors Functions and Roles			
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the conditions of the Public Company and the effectiveness of decision-making.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. As the corporate body authorized to manage the company, determining the number of Directors significantly impacts the performance of a Public Company. Therefore, the determination of the number of members of the Board of Directors must be made through careful consideration and must adhere to the provisions of applicable laws and regulations. According to the Financial Services Authority (OJK) Regulation concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Directors must consist of at least two (2) members. Furthermore, the determination of the number of Directors must be based on the need to achieve the aims and objectives of the Public Company and be tailored to the conditions of the Public Company, including the characteristics, capacity, and size of the Public Company, as well as how the Board of Directors achieves effective decision-making.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Komposisi Direksi Perusahaan sampai dengan akhir Desember 2025 adalah 8 (delapan) orang. Perusahaan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilengkapi dengan *charter* Komite Nominasi dan Remunerasi yang di dalamnya telah mencakup pengaturan terkait prosedur nominasi anggota Direksi. The determination of the number of members of the Board of Directors has taken into account the Company's conditions, with reference to the Articles of Association and applicable laws and regulations. The composition of the Company's Board of Directors until the end of December 2025 is 8 (eight) members. The Company has a Nomination and Remuneration Committee, which has been equipped with a Nomination and Remuneration Committee charter, which includes provisions regarding the nomination procedures for members of the Board of Directors.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
		13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. As with the Board of Commissioners, the diversity of the Board of Directors' composition is a combination of desired characteristics, both within the Board of Directors and individual members, according to the needs of the Public Company. This combination is determined by considering the appropriate skills, knowledge, and experience for the division of duties and functions of the Board of Directors' positions in achieving the Public Company's objectives. Therefore, considering this combination of characteristics will impact the accuracy of the nomination and appointment process for individual Board members, as well as the Board of Directors as a whole.	Komposisi Direksi Perusahaan Tahun 2025 telah memperhatikan latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi dalam *website* Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan. The composition of the Company's Board of Directors for 2025 takes into account diverse backgrounds in terms of expertise, knowledge, and experience, aimed at supporting the Company's development. This can be seen in the profiles of each Director on the Company's website and in the Company's Annual Report.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
		14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors who oversee accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	• Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. • Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait. • Financial Statements are management's accountability reports for the management of resources owned by a Public Company. They must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia and relevant OJK regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector governing the presentation and disclosure of Public Company Financial Statements. Based on laws and regulations in the Capital Market sector governing the Board of Directors' responsibility for Financial Statements, the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Financial Statements, which are signed by the President Director and the Board of Directors member in charge of accounting or finance. • Therefore, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will depend heavily on the expertise and/or knowledge of the Board of Directors, particularly the member in charge of accounting or finance. Having at least a minimum of qualified expertise and/or knowledge in accounting by the Board of Directors in question can provide confidence in the preparation of the Financial Statements, so that stakeholders can rely on these Financial Statements as a basis for making economic decisions related to the Public Company in question.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan telah memiliki latar keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors responsible for accounting and finance have expertise and/or knowledge in accounting.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
6	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Quality of the Implementation of the Board of Directors' Duties and Responsibilities.	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	• Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. • Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. • As with the Board of Commissioners, the Board of Directors' Self-Assessment policy serves as a guideline for accountability for collegial performance assessments. Self-assessments are conducted by each member of the Board of Directors to assess their collective performance, rather than their individual performance. This self-assessment is expected to enable each member of the Board of Directors to contribute to the continuous improvement of their performance. • This policy may include the assessment activities undertaken, their purpose and objectives, the periodic implementation schedule, and the benchmarks or assessment criteria used, in accordance with recommendations from the nomination and remuneration function of a Public Company. The establishment of such a function is mandated by the Financial Services Authority (OJK) Regulation concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.	Direksi telah memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang mengatur penilaian kinerja Direksi secara individu maupun kolegial. Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* oleh masing-masing anggota Direksi berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan pada saat RUPS RKAP. The Board of Directors has a Board Manual that regulates the performance assessment of Board of Directors, both individually and collegially. The Board of Directors' performance is assessed through a self-assessment mechanism by each member of Board of Directors based on the Key Performance Indicators (KPIs) established at the GMS and the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
		16. Kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is disclosed in the annual report of the Public Company.	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi. Disclosure of the Board of Directors' performance self-assessment policy is not only intended to fulfill transparency requirements and demonstrate accountability for the performance of their duties, but also to provide important information on improvements in the management of a public company. This information is crucial for assuring shareholders and investors that the company's management is consistently improving. This disclosure provides shareholders and investors with an understanding of the checks and balances that govern the Board of Directors' performance.	Kebijakan penilaian Direksi tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan telah diungkapkan secara lengkap dalam Laporan Tahunan. The Board of Directors' assessment policy is outlined in the Board Manual and is fully disclosed in the Annual Report.
		17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes.	• Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. • Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. • The policy of resigning members of the Board of Directors involved in financial crimes is a policy that can increase stakeholder trust in Public Companies, thereby maintaining the company's integrity. This policy is necessary to facilitate the smooth running of legal processes and ensure that they do not disrupt business operations. Furthermore, from a moral perspective, this policy will foster an ethical culture within the Public Company. This policy can be included in the Guidelines or Code of Ethics applicable to the Board of Directors. • Furthermore, involvement in financial crimes is defined as the conviction of a member of the Board of Directors by the relevant authorities. These financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, as well as money laundering, as defined in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering.	Direksi belum memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors does not yet have a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors involved in financial crimes.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
IV	**Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan** Aspect 4: Stakeholder Participation			
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 Improving Corporate Governance through Stakeholder Participation.	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Public companies have policies to prevent insider trading.	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. Anyone possessing insider information is prohibited from conducting securities transactions using insider information, as defined in the Capital Markets Law. Public companies can minimize the occurrence of insider trading through preventative policies, such as strictly separating confidential and public data and/or information, and dividing duties and responsibilities for managing such information proportionally and efficiently.	Perusahaan telah menetapkan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang melarang Insan Perusahaan menyalahgunakan informasi yang berasal dari internal Perusahaan kepada eksternal Perusahaan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan dapat menimbulkan kerugian materiil dan non materiil bagi Perusahaan. The Company has established a Code of Conduct that prohibits Company personnel from misusing internal Company information to external parties, in a manner inconsistent with regulations and potentially causing material and non-material losses to the Company.
		19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*. Public companies have anti-corruption and anti-fraud policies.	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. An anti-corruption policy is useful for ensuring that a Public Company's business activities are conducted legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. This policy can be part of a code of ethics or exist as a stand-alone document. This policy can include, among other things, programs and procedures implemented to address corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratuities within the Public Company. The scope of this policy must describe the Public Company's prevention of all corrupt practices, whether given or received from other parties.	Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud sebagaimana diatur dalam Kebijakan *Anti Fraud*, Pedoman SMAP, Kebijakan Gratifikasi, Kebijakan Benturan Kepentingan dan Kebijakan LHKPN. The Company has anti-corruption and anti-fraud policies as stipulated in the Anti-Fraud Policy, SMAP Guidelines, Gratuity Policy, Conflict of Interest Policy, and LHKPN Policy.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
		20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public companies have policies regarding the selection and development of supplier or vendor capabilities.	• Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* perusahaan. • Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. • Supplier or vendor selection policies are useful for ensuring that Public Companies obtain the goods or services they need at competitive prices and of good quality. Meanwhile, supplier or vendor capacity enhancement policies are useful for ensuring that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the company's goods or services needs will impact the quality of the company's output. • Implementing these policies can ensure continuity of supply, both in terms of quantity and quality, as required by Public Companies. The scope of these policies includes criteria for supplier or vendor selection, transparent procurement mechanisms, efforts to improve supplier or vendor capacity, and the fulfillment of rights related to suppliers or vendors.	Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diunggah dalam situs *website* Perusahaan. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. The Company has a Goods and Services Procurement Policy, which is posted on its website. This policy covers criteria for selecting suppliers or vendors, efforts to improve supplier or vendor capabilities, transparent procurement mechanisms, and the fulfillment of rights related to suppliers or vendors.
		21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public companies have policies regarding the fulfillment of creditors' rights.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. The policy on fulfilling creditor rights serves as a guideline for lending to creditors. The purpose of this policy is to ensure the fulfillment of rights and maintain creditors' trust in the Public Company. This policy covers considerations in entering into agreements and follow-up actions in fulfilling the Public Company's obligations to creditors.	Perusahaan telah memiliki kebijakan secara umum mengenai pemenuhan hak-hak kreditur dan tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada kreditur sebagaimana yang diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* terkait Kebijakan Perlindungan Hak dan Kepentingan Kreditur. Pedoman *Good Corporate Governance* terkait Kebijakan Perlindungan Hak dan Kepentingan Kreditur belum mengatur pertimbangan dalam melakukan perjanjian. The Company has a general policy regarding the fulfillment of creditors' rights and follow-up in fulfilling its obligations to creditors, as stipulated in the Good Corporate Governance Guidelines concerning the Policy for the Protection of Creditors' Rights and Interests. The Good Corporate Governance Guidelines concerning the Policy for the Protection of Creditors' Rights and Interests do not yet address considerations in entering into agreements.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
		22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *whistleblowing system*. Public companies have a whistleblowing system policy.	Kebijakan *whistleblowing system* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan *whistleblowing system* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. A well-developed whistleblowing system policy will provide certainty of protection to witnesses or whistleblowers of any indication of violations committed by employees or management of a Public Company. Implementing this policy will impact the development of a culture of good corporate governance. The whistleblowing system policy covers, among other things, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, the reporting process, protection and guarantees of confidentiality for whistleblowers, complaint handling, the party managing the complaint, and the results of the complaint handling and follow-up.	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait sistem pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system).* The Company has a policy regarding a whistleblowing system.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
		23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Public companies have a policy of providing long-term incentives to directors and employees.	• Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. • Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. • Long-term incentives are incentives based on long-term performance achievements. Long-term incentive plans are based on the premise that a company's long-term performance is reflected in the growth of its stock value or other long-term company targets. Long-term incentives are useful for maintaining loyalty and motivating Directors and employees to improve their performance or productivity, which will impact the company's long-term performance. • The existence of a long-term incentive policy represents a concrete commitment by a Public Company to encourage the implementation of long-term incentives for Directors and Employees with terms, procedures, and formats tailored to the Public Company's long-term goals. This policy may include, among other things: the purpose and objectives of providing long-term incentives, the terms and procedures for providing incentives, and the conditions and risks that the Public Company must consider when providing incentives. This policy may also be included in the Public Company's existing remuneration policy.	Dalam praktiknya, Perusahaan telah pemberian insentif jangka pendek kepada Direksi berdasarkan pencapaian dalam tahun buku sebelumnya atas capaian kinerja Direksi. Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. In practice, the Company has provided short-term incentives to Directors based on their performance achievements in the previous fiscal year. The Company does not yet have a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup PTPI dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Compliance of the Development of GCG Implementation within PTPI with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Description	Penjelasan Penerapan di PTPI Explanation of Implementation in PTPI
V	**Aspek 5 : Keterbukaan Informasi** Aspek 5: Information Disclosure			
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure.	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public companies utilize information technology more widely, in addition to websites, as a medium for information disclosure.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. The use of information technology can serve as a useful tool for promoting transparency. The information disclosed includes not only information required by law but also other information related to the Public Company that is deemed beneficial for shareholders or investors to know. By utilizing information technology more broadly—beyond the Company's website—the Company hopes to enhance the effectiveness of its information dissemination. Nevertheless, the use of information technology must still take into account the Company's benefits and costs.	Perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi secara lebih luas. Selain *website*, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media lainnya seperti majalah dan *platform* media sosial, yaitu: • Instagram: pt.pupukindonesia • Twitter : @pupuk_indonesia • Facebook : PT Pupuk Indonesia • Youtube : @PTPupukIndonesia The Company has utilized information technology more extensively. In addition to its website, the Company utilizes other information technology and media applications, such as magazines and social media platforms, including: • Instagram: pt.pupukindonesia • Twitter: @pupuk_indonesia • Facebook: PT Pupuk Indonesia • YouTube: @PTPupukIndonesia
		25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Public Company Annual Report shall disclose the ultimate beneficial owners of at least 5% (five percent) of the Public Company's shares, in addition to disclosure of the ultimate beneficial owners of the Public Company's shares through major and controlling shareholders.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. Capital Markets laws and regulations governing the submission of annual reports by Public Companies require disclosure of information regarding shareholders holding 5% (five percent) or more of a Public Company's shares, as well as disclosure of information regarding major and controlling shareholders, both directly and indirectly, down to the ultimate beneficial owner of such shares. These Governance Guidelines recommend disclosing the ultimate beneficial owner of at least 5% (five percent) of Public Company shares, in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of shares held by major and controlling shareholders.	Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025, Sampai dengan 31 Desember 2025, Pemegang Saham PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah • Negara Republik Indonesia : 1 lembar saham Seri A Dwiwarna • PT Danantara Aset Manajemen (Persero) yang sebelumnya bernama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero): 24.999.999 lembar saham Seri B As disclosed in the 2025 Annual Report, as of December 31, 2025, the shareholders of PT Pupuk Indonesia (Persero) are: • Republic of Indonesia: 1 Series A Dwiwarna share • PT Danantara Aset Manajemen (Persero), formerly known as PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero): 24,999,999 Series B shares

Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)

Implementation of The General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI)

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah menerbitkan PUGKI 2021 sebagai standar acuan tata kelola nasional yang mencakup 4 (empat) Pilar, 8 (delapan) Prinsip, dan 24 (dua puluh empat) Rekomendasi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik, PTPI telah melakukan pemetaan atas penerapan pedoman tersebut di Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, realisasi penerapan prinsip dan rekomendasi PUGKI di lingkungan PTPI adalah sebagai berikut:

The National Committee for Governance Policy (KNKG) issued the 2021 PUGKI as a reference standard for national governance, encompassing four pillars, 8(eight) principles, and 24 (twenty-four) recommendations.

As a commitment to good governance, PTPI has mapped the implementation of these guidelines within the Company. Throughout 2025, the application of the PUGKI principles and recommendations within PTPI were as follows:

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	***Apply/ Explain***	**Penjelasan/Bukti Penerapan** Explanation/Evidence of Implementation
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners			
Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors	1.1.1. Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: 1. Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; 2. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; 3. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta 4. Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh *(corporate resilience)*. 1.1.1 To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: 1. Competitive and focused on long-term performance; 2. Ethical and responsible in conducting business; 3. Contribute positively to society and the environment; and 4. Ability to survive and grow (corporate resilience)	*Apply*	Dalam rangka menjalankan peran dan tanggung jawab, Direksi PTPI telah menetapkan Struktur Organisasi dan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi yang dijabarkan dalam Profil Jabatan (*Job Profile*), sehingga dapat memberikan produktivitas yang optimal untuk mencapai tujuan Perusahaan. To carry out its roles and responsibilities, the PTPI Board of Directors has established an Organizational Structure and the division of duties for each member of the Board of Directors, as outlined in the Job Profile, to ensure optimal productivity and achieve the Company's goals.
	1.1.2. Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. 1.1.2. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with long-term objectives, utilizing innovation and technology effectively.	*Apply*	Direksi PTPI telah menetapkan *corporate plan* atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan beserta Key Performance Indicators (KPI) serta Kontrak Manajemen, untuk memastikan misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja diterapkan secara konsisten. The PTPI Board of Directors has established a corporate plan, or Long-Term Company Plan (RJPP), outlined in the annual Company Work Plan and Budget (RKAP), along with Key Performance Indicators (KPIs) and a Management Contract. This ensures the consistent implementation of the company's mission, vision, goals, objectives, strategies, and work programs.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	1.1.3. Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. 1.1.3. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that align with the corporation's vision, mission, goals, objectives, and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards.	*Apply*	Direksi PTPI telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern dengan membentuk Kompartemen Manajemen Risiko Korporasi dan Kompartemen Satuan Pengawasan Intern. Direksi PTPI telah menetapkan Pedoman Manajemen Risiko (PI-SMT-PD-012) dan Pedoman Sistem Pengendalian Intern (PI-SPI-PD-004). Direksi PTPI telah mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan bidang manajemen risiko PTPI dan Anak Perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. PTPI telah melakukan evaluasi / penilaian atas efektivitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian The PTPI Board of Directors has implemented risk management and internal control systems by establishing a Corporate Risk Management Compartment and an Internal Audit Unit Compartment. The Board of Directors of PTPI has established a Risk Management Guideline (PI-SMT-PD-012) and an Internal Control System Guideline (PI-SPI-PD-004). The PTPI Board of Directors has directed, coordinated, supervised, and is responsible for establishing the direction and policies for risk management at PTPI and its subsidiaries to support the smooth operation of the company's business, both in the short and long term. PTPI has conducted evaluations/assessments of the effectiveness of risk management and internal control systems.
	1.1.4. Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. 1.1.4. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	Apply	Direksi PTPI telah memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan dalam Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian. Cascading atas sertifikasi terhadap Laporan Keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas Laporan Keuangan yang akan dikonsolidasikan. The PTPI Board of Directors has certified the annual financial statements in the Directors' Statement on Responsibility for the Consolidated Financial Statements. This certification of the Financial Statements cascades down to the levels below the Board of Directors, who are the accounting and reporting entities for the consolidated Financial Statements.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	1.1.5. Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. 1.1.5. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared appropriately.	*Apply*	Perusahaan secara konsisten menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun. Laporan ini memuat kinerja dan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perusahaan, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Penyusunan Laporan Keberlanjutan dilakukan di bawah arahan Direksi dan dilaksanakan oleh tim lintas fungsi yang terdiri atas perwakilan unit kerja terkait. Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai koordinator untuk memastikan seluruh isu material teridentifikasi dan diungkapkan secara memadai. Sebelum diterbitkan, laporan ditelaah dan memperoleh persetujuan Direksi serta Dewan Komisaris guna memastikan kelengkapan, akurasi, dan kesesuaiannya dengan standar pelaporan yang berlaku. The Company consistently publishes a Sustainability Report annually. This report outlines the performance and economic, social, and environmental impacts of the Company's operational activities, and serves as a means of continuous evaluation and improvement in line with the long-term sustainable development agenda. The Sustainability Report is prepared under the direction of the Board of Directors and implemented by a cross-functional team consisting of representatives from relevant work units. The Corporate Secretary acts as a coordinator to ensure all material issues are identified and adequately disclosed. Prior to publication, the report is reviewed and approved by the Board of Directors and Board of Commissioners to ensure completeness, accuracy, and compliance with applicable reporting standards.
	1.1.6. Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. 1.1.6. The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that aligns with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate objectives and strategies.	*Apply*	PTPI telah memiliki IT Master Plan dan menerapkan sistem teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI. Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. PTPI has an IT Master Plan and implemented information technology systems in accordance with established policies and a thorough IT plan encompassing human resources, organizational management structure, and the level of IT services provided. The current IT implementation aligns with the company's needs.
	1.1.7. Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. 1.1.7. For corporations conducting business activities based on Sharia principles, the Board of Directors must ensure adequate authority and the availability of supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	*Apply*	PTPI tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian, PTPI telah menetapkan garis koordinasi organ pendukung Direksi dengan organ pendukung Dewan Komisaris untuk memastikan ketersediaan informasi bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya secara efektif. PTPI does not conduct its business activities based on Sharia principles. However, PTPI has established a line of coordination between the Board of Directors' supporting bodies and the Board of Commissioners' supporting bodies to ensure the availability of information for the Board of Commissioners to effectively carry out its role.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	1.1.8. Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. 1.1.8. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles for individual Directors, which can be regulated in the Board of Directors' Charter or by a Board of Directors' Decree.	*Apply*	PTPI telah menetapkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* yang merupakan rujukan kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas, hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman telah ditinjau secara periodik dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan. PTPI has established a Board Manual for the Board of Commissioners and Directors, which serves as a working reference for the Board of Commissioners and Directors in carrying out their duties and in their relationships. The Manual is reviewed periodically and updated as needed.
	1.1.9. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. 1.1.9. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and proven to have committed wrongdoing.	*Apply*	Dalam Anggaran Dasar telah ditetapkan bahwa anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. The Articles of Association stipulate that a member of the Board of Directors has the right to resign from his/her position by notifying the Company in writing of his/her intention, with a copy sent to the Shareholders, the Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors no later than 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation.
1.2. Penilaian Kinerja Direksi dan Anggotanya 1.2. Performance Assessment of the Board of Directors and its Members	1.2.1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. 1.2.1. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.	*Apply*	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* telah mengatur Penilaian Kinerja Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu Direksi, dan melaporkannya kepada Pemegang Saham. The Board Manual for the Board of Commissioners and Directors regulates the Board of Directors' Performance Assessment. The Board of Commissioners has conducted both collegial and individual performance assessments of the Board of Directors and reported these to Shareholders.
	1.2.2. Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. 1.2.2. The Board of Commissioners, with the advice of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	*Apply*	Dewan Komisaris PTPI melalui Komite Nominasi & Remunerasi bersama Komite Audit telah melakukan telaah dalam bentuk Kajian atas Usulan *Draft* KPI Individu Direksi PTPI Tahun 2025. The PTPI Board of Commissioners, through the Nomination & Remuneration Committee and the Audit Committee, has conducted a review of the proposed draft of the 2025 Individual KPIs for PTPI Directors.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
1.3. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1.3. Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners	1.3.1. Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. 1.3.1. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision, and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advises, and approves the corporation's long-term and short-term business and financial plans. The Board of Commissioners advises and monitors the management of its implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions that are critical to the corporation, as stipulated in the corporation's articles of association.	*Apply*	Dewan Komisaris PTPI telah melakukan reviu dan menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris telah memberikan saran dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan RKAP dan RJP tersebut. PTPI's Board of Commissioners has reviewed and signed the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJP) formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners has provided advice and monitored the implementation of the RKAP and RJP.
	1.3.2. Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. 1.3.2. The types of decisions requiring the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	*Apply*	Mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/ persetujuan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*. The mechanism for the Board of Commissioners to approve Board of Directors' actions requiring the Board of Commissioners' recommendation/approval is regulated in the Articles of Association and the Board Manual.
	1.3.3. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. 1.3.3. Taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and for decision by, the GMS the appointment and/ or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In making these proposals, the Board of Commissioners takes into account diversity, non-discriminatory elements, and provides equal opportunities without distinction of ethnicity, religion, race, social class, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and selection process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	*Apply*	Dewan Komisaris PTPI melalui Komite Nominasi & Remunerasi telah melakukan evaluasi terhadap Direksi yang sedang menjabat dengan menunjuk Konsultan Independen. Dewan Komisaris menyampaikan Matriks Rekapitulasi *Selected Talent* BUMN, *Nominated Talent* BUMN dan *Nominated Talent* lingkup Klaster BUMN Industri Pupuk kepada Menteri BUMN. The PTPI Board of Commissioners, through the Nomination & Remuneration Committee, has conducted an evaluation of the incumbent Board of Directors by appointing an Independent Consultant. The Board of Commissioners submitted a Recapitulation Matrix of Selected SOE Talent, Nominated SOE Talent, and Nominated Talent within the Fertilizer Industry SOE Cluster to the Minister of SOEs.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	1.3.4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. 1.3.4. The Board of Commissioners or the Committee performing the nomination function shall develop a succession policy for the nomination process for members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.	*Apply*	Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pembahasan data talent dalam rapat. Selanjutnya dengan memperhatikan data *talent* dan hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi rencana validasi Top 20% Talent BOD-1 oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee discussed talent data in a meeting. Furthermore, based on the talent data and the results of the Nomination and Remuneration Committee meeting, the Board of Commissioners submitted to the Board of Directors a plan for validation of the Top 20% BOD-1 Talent by the Nomination and Remuneration Committee.
	1.3.5. Dewan Komisaris a) mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b) secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 1.3.5. The Board of Commissioners a) submits to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee responsible for remuneration, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that aligns with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b) periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Dewan Komisaris PTPI telah mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan Usulan Penetapan Insentif Kinerja Usaha yang diusulkan oleh Direktur Utama. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan Usulan Penetapan Insentif Kinerja Usaha kepada Menteri BUMN selaku RUPS PTPI. The PTPI Board of Commissioners has proposed remuneration for the Board of Directors in accordance with applicable regulations and a performance assessment of the Board of Directors. The Board of Commissioners responded to the proposed remuneration for the Directors and Board of Commissioners, as well as the proposed determination of the Performance incentives Bonus, proposed by the President Director. The Board of Commissioners then submitted the proposed remuneration for the Directors and Board of Commissioners, as well as the proposed determination of the Business Performance incentives, to the Minister of State-Owned Enterprises, as the convener of the PTPI General Meeting of Shareholders.
	1.3.6. Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. 1.3.6. The Board of Commissioners supervises the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes when necessary.	*Apply*	Dewan Komisaris PTPI telah melaksanakan pemantauan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas *Area of Improvement* (AoI) hasil asesmen penerapan GCG dan telaah atas *draft* Keputusan Menteri BUMN tentang Pedoman Tata Kelola Risiko Berkesinambungan BUMN. PTPI's Board of Commissioners has monitored corporate governance principles, through follow-up monitoring of recommendations on Areas of Improvement (AoI) resulting from the GCG implementation assessment and reviewing the draft Decree of the Minister of State-Owned Enterprises concerning Guidelines for Sustainable Risk Governance for State-Owned Enterprises.
	1.3.7. Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. 1.3.7. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that align with the corporation's goals, objectives, and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct, and standards.	*Apply*	Dewan Komisaris PTPI melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit telah melaksanakan pemantauan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal. PTPI's Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee and the Audit Committee, has monitored and provided advice on risk management and internal control policies and implementation.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	1.3.8. Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. 1.3.8. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting systems, as well as the independence of the internal and external audit functions.	*Apply*	Dewan Komisaris PTPI telah memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dewan Komisaris PTPi dibantu Komite Audit telah melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya, menelaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik dan menelaah hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal. Dewan Komisaris PTPI melalui Komite Audit melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui penelaahan atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; penelaahan atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; serta manajemen fungsi SPI. PTPI's Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, assessed the effectiveness of external audit implementation by monitoring the compliance of audit progress with the work plan, reviewing the compliance of audit implementation with public accounting professional standards, and reviewing the external audit results and the quality of external audit recommendations. PTPI's Board of Commissioners, through the Audit Committee, assessed the effectiveness of internal audit implementation by reviewing the effectiveness of monitoring the follow-up of audit results by the Internal Audit Unit (SPI) and the external auditor; reviewing the compliance of audit implementation with internal audit standards; the completeness of findings and the quality of internal audit recommendations; and reviewing the supervisory work plan and its implementation; as well as the management of the Internal Audit Unit (SPI) function.
	1.3.9. Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. 1.3.9. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Corporation's annual and sustainability reports, ensuring their integrity, and oversees the Corporation's disclosure and communication processes.	*Apply*	Dewan Komisaris PTPI telah memberikan pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran seluruh informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan dengan menandatangani surat pernyataan bersama anggota Dewan Komisaris dan Direksi. The PTPI Board of Commissioners has declared its responsibility for the accuracy of all information in the Company's Annual Report by signing a joint statement with the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
	1.3.10. Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. 1.3.10. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	*Apply*	Dewan Komisaris telah menetapkan dan melakukan peninjauan secara periodik atas Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) serta Piagam Dewan Komisaris, meliputi: Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Piagam Komite Pemantau Risiko, Piagam Komite Audit, dan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. The Board of Commissioners has established and periodically reviews the Board Manual and the Board of Commissioners Charter, including the Nomination and Remuneration Committee Charter, the Risk Monitoring Committee Charter, the Audit Committee Charter, and the Integrated Governance Committee Charter.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	1.3.11. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. 1.3.11. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and proven to have committed a wrongdoing.	*Apply*	Dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* telah ditetapkan kebijakan terkait pemberhentian anggota Dewan Komisaris, salah satunya apabila terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara, atau mengundurkan diri. The Articles of Association and the Board Manual stipulate policies regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners, including those involving actions detrimental to the Company and/or the State, or resignation.
	1.3.12. Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif, dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. 1.3.12. Independent commissioners are strongly expected to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen atau 33% dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) orang. Komisaris Independen berperan aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi. The Board of Commissioners has 3(three) Independent Commissioners, representing 33% of the 9(nine) members. Independent Commissioners actively participate in internal Board meetings and Board meetings involving the Board of Directors.
	1.3.13. Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasikan penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. 1.3.13. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner fosters a culture of openness and constructive dialogue that allows for the expression of diverse views, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available for discussion of all items. Furthermore, the Board of Commissioners must be provided with opportunities to meet with the Board of Directors and senior management.	*Apply*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit, telah berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris. Komisaris Utama berperan aktif dalam memimpin Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi. Dalam Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi, Direksi dapat mengikutsertakan BOD-1 untuk memberikan kesempatan Dewan Komisaris bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. Pada tahun 2025 Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi diselenggarakan sebanyak 12 kali. The President Commissioner, who also serves as Independent Commissioner and Chair of the Audit Committee, has served as the coordinator of the Board of Commissioners. The President Commissioner plays an active role in leading Board of Commissioners meetings and Board of Commissioners meetings involving the Board of Directors. In Board of Commissioners meetings involving the Board of Directors, the Board of Directors may include the BOD-1 to provide the Board of Commissioners with opportunities to meet with the Board of Directors and senior management. In 2025, 12 Board of Commissioners meetings involving the Board of Directors were held.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
1.4. Pembentukan Komite 1.4. Formation of the Committee	1.4.1. Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 1.4.1. The Corporation has committees under the Board of Commissioners, namely: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Oversight Committee, and the Integrated Governance Committee.	*Apply*	Dewan Komisaris telah membentuk komite di bawah Dewan Komisaris meliputi: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. The Board of Commissioners has established committees under Board of Commissioners, including: Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Integrated Governance Committee.
	1.4.2. Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. 1.4.2. The Board of Commissioners ensures all members of the Audit Committee are independent, and that other committees formed by the Board of Commissioners are composed predominantly of independent parties, and that all committee members possess the competence, commitment, and authority to carry out their roles effectively and independently.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memastikan independensi, kompetensi, dan komitmen dari para anggota Komite Audit dan komite lainnya. Independensi para anggota Komite Audit dan komite lainnya diungkapkan di dalam Laporan Tahunan Perusahaan. The Board of Commissioners has ensured the independence, competence, and commitment of the members of the Audit Committee and other committees. The independence of the members of the Audit Committee and other committees is disclosed in the Company's Annual Report.
	1.4.3. Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. 1.4.3. To ensure the monitoring of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner may not serve as the chair of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances that must be explained in the annual report.	*Apply.*	Komisaris Utama PTPI tidak bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Komisaris Utama PTPI sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi. Adapun yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit adalah seorang Komisaris Independen. The President Commissioner of PTPI does not serve as Chair of the Audit Committee. The President Commissioner of PTPI serves as Chair of the Integrated Governance Committee. An Independent Commissioner serves as Chair of the Audit Committee.
1.5. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Anggotanya 1.5. Performance Assessment of the Board of Commissioners and its Members	1.5.1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu Komisaris. 1.5.1. The Board of Commissioners conducts an annual formal, objective evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual Commissioner.	*Apply*	Kebijakan Umum, Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan *self- assessment* Dewan Komisaris telah tertuang pada Bab terkait Sistem Penilaian Kinerja dan Evaluasi Dewan Komisaris pada *Board Manual* Perusahaan. The General Policy, Performance Evaluation Criteria for the Board of Commissioners, and the Board of Commissioners' self-assessment are outlined in the relevant chapter on the Board of Commissioners' Performance Assessment and Evaluation System in the Company's Board Manual.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
1.6. Benturan Kepentingan 1.6. Conflict of Interest	1.6.1. Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan Direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. 1.6.1. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner shall notify the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function before accepting a new appointment as a Director or Commissioner of a public corporation, another Director position, or any other position with a significant time commitment.	*Apply*	Perihal rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur pada bab terkait rangkap jabatan di Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan. Adapun klausul mengenai persetujuan Dewan Komisaris untuk Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi belum diatur dalam Pedoman GCG dan Board Manual tersebut, dikarenakan tidak ada ketentuan khusus dari Pemegang Saham sekaligus regulator yaitu Kementerian BUMN. The concurrent positions held by Directors and Commissioners are regulated in the chapters on concurrent positions in the Company's GCG Guidelines and Board Manual. The clause regarding the Board of Commissioners' approval for Directors holding concurrent positions outside the corporation is not regulated in the GCG Guidelines and Board Manual, due to the lack of specific provisions from the shareholder and regulator, the Ministry of State-Owned Enterprises.
	1.6.2. Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. 1.6.2. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest between management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners with conflicts of interest shall not participate in the monitoring and decision-making process for potential conflicts of interest involving the Commissioner or their affiliates.	*Apply*	Dewan Komisaris mengelola potensi benturan kepentingan melalui penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dan Pakta Integritas Aksi Korporasi. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau afiliasi tertentu. Dengan memastikan bahwa Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait, Dewan Komisaris dapat menjaga objektivitas dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan The Board of Commissioners manages potential conflicts of interest by signing an Annual Integrity Pact and a Corporate Action Integrity Pact. The Board of Commissioners has a significant responsibility to ensure that decisions are not influenced by personal interests or specific affiliations. By ensuring that Commissioners with conflicts of interest are not involved in relevant decisions, the Board of Commissioners can maintain objectivity and fairness in every decision-making process.
1.7. Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 1.7. Competency Development for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	1.7.1. Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan peran masing-masing. 1.7.1. The Board of Commissioners ensures members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards, and other applicable obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and improving the skills and knowledge necessary to carry out their respective duties and roles.	Apply	Dalam Pedoman GCG Perusahaan telah diatur mengenai Program Pengenalan dan Peningkatan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, akan diberikan Program Pengenalan Perusahaan dan bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris dilakukan program peningkatan kompetensi secara periodik baik melalui kegiatan pelatihan, workshop, studi banding ataupun kegiatan terkait lainnya. Setiap Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti sekurang-kurangnya 1 (satu) kali program pengembangan kompetensi selama tahun 2025. The Company's GCG Guidelines stipulate the Introduction and Competency Development Program for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Each newly appointed member of the Board of Commissioners will receive a Company Introduction Program, and all members of the Board of Commissioners will undergo periodic competency development programs through training, workshops, comparative studies, or other related activities. Each member of the Board of Commissioners has participated in at least one competency development program during 2025.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Principle 2: Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners			
Komposisi Direksi Board of Directors Composition	2.1.1. Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. 2.1.1. In determining candidate Directors, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, may utilize independent sources to identify qualified candidates.	*Apply*	Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi atas talenta terseleksi (selected talent) dan evaluasi terhadap Direksi yang saat ini sedang menjabat untuk diusulkan sebagai talenta ternominasi (*nominated talent*). Dewan Komisaris dapat menggunakan sumber informasi daftar dan rekam jejak kandidat Direktur yang dapat diperoleh dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, institusi Negara yang melaksanakan audit, dan/atau institusi Negara di bidang penegakan hukum. In determining candidate for Directors, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, evaluates selected talent and evaluates incumbent Directors to be nominated. The Board of Commissioners may utilize sources of information, including lists and track records of Director candidates, obtained from ministries and non-ministerial government agencies, state institutions conducting audits, and/or state institutions involved in law enforcement.
	2.1.2. Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. 2.1.2. The Board of Commissioners ensures the criteria for selecting members of the Board of Directors includes at least the knowledge, abilities, and expertise required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and ensures the diversity of the Board of Directors.	*Apply*	Dewan Komisaris memastikan kriteria calon Direksi memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komposisi Direksi mencerminkan keberagaman latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional serta rentang usia, sehingga diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang komprehensif dalam pengambilan keputusan. The Board of Commissioners ensures that the criteria for Director candidates meet the requirements stipulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The composition of Board of Directors reflects the diversity of educational backgrounds, professional experience, and age range, thus enabling them to provide a comprehensive perspective in decision-making.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. 2.1.3 The corporate policy on diversity among the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	*Apply*	Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi peran Direksi dan Dewan Komisaris. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, as disclosed in the Annual Report, reflects the diversity in skills, expertise, knowledge, age, cultural background, and gender required to fulfill the roles of the Board of Directors and Board of Commissioners.
	2.1.4. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. 2.1.4. The Board of Commissioners ensures the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent to achieve the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to identify qualified candidates.	*Apply*	Kebijakan seleksi dan nominasi Komisaris terkait proses seleksi Dewan merujuk langsung pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dan telah tertuang secara khusus dalam Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan. The Commissioner selection and nomination policy regarding the Board selection process refers directly to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, and is specifically outlined in the Company's GCG Guidelines and Board Manual.
	2.1.5. Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. 2.1.5. The Board of Commissioners/Committee carrying out the nomination function establishes nomination procedures and criteria consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix approved by the Board of Commissioners and ensures that candidate profiles meet the requirements set out in the expertise matrix and nomination criteria.	*Apply*	Penetapan kriteria nominasi yang digunakan oleh Dewan Komisaris/Komite adalah sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. The nomination criteria used by the Board of Commissioners/Committees are as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
	2.1.6. Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. 21.6. The Board of Commissioners' composition must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	*Apply*	Komposisi Dewan Komisaris telah mencerminkan keragaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, dan latar belakang budaya, sehingga dapat memenuhi tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners reflects diversity in terms of abilities, expertise, knowledge, experience, age, and cultural background, enabling it to fulfill its duties and obligations.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	2.1.7. Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. 2.1.7. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles that have the potential for a conflict of interest, the Board of Commissioners shall consist of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the terms of their Board of Commissioners membership and their independence from a corporate perspective.	*Apply*	Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen dengan jumlah yang cukup. Masa jabatan Dewan Komisaris dibatasi maksimal sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak pengangkatan. Jangka waktu dan independensi keanggotaan Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Board of Commissioners has 3 (three) Independent Commissioners, with a sufficient number of members. The term of office of he Board of Commissioners is limited to the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) following their appointment. The term and independence of Board of Commissioners' membership are disclosed in the Annual Report.
	2.1.8. Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 2.1.8. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures there is a formal, rigorous, and transparent process for the appointment and promotion of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemberian nasihatnya terhadap Sistem Manajemen Talenta, pengusulan calon wakil perusahaan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan, usulan dan evaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara individual, struktur organisasi, remunerasi dan program pengembanganbagi Direksi dan Dewan Komisaris serata hal-hal lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tinjauan secara berkala atas Sistem Manajemen Talenta perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya, untuk memastikan proses usulan dan pengangkatan calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan sesuai yang disyaratkan oleh Kementerian BUMN. The Nomination and Remuneration Committee's primary function is to assist the Board of Commissioners in overseeing and providing advice on the Talent Management System, proposing candidates for the company's representatives as members of Board of Directors or Board of Commissioners of Subsidiaries, proposing and evaluating individual Key Performance Indicators (KPIs) for Board of Directors, the organizational structure, remuneration and development programs for Board of Directors and Board of Commissioners, and other matters as determined by the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee conducts regular reviews of the company's Talent Management System and monitors and evaluates its implementation to ensure that the process for proposing and appointing candidates for Board of Directors or Board of Commissioners of Subsidiaries complies with the requirements of the Ministry of State-Owned Enterprises.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
			PTPI has a Nomination and Remuneration Committee that plays a role in ensuring that the appointment and promotion process is carried out according to clear and transparent principles. The following are some of the key elements generally applied: 5. Formal and Structured Process: The appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners must follow the procedures established in the Company's articles of association and applicable regulations. This includes systematic steps, such as selecting candidates based on qualifications and competencies that align with the Company's needs. 6. Rigorous Process and Based on Clear Criteria: The selection process for prospective members must be based on clear and stringent criteria, such as expertise, experience, track record, and ability to contribute to the Company's strategic direction. This ensures that the selected members can fulfill their roles effectively. 7. Transparency in Decision-Making: All stages of the selection process must be conducted with high transparency, including announcing prospective members to the public and stakeholders, and providing them with the opportunity to understand the reasons behind the appointment. 8. Evaluation and Consideration Based on Good Governance: The Nomination and Remuneration Committee is responsible for evaluating candidates objectively, avoiding conflicts of interest, and ensuring that appointments to the Board of Directors and Board of Commissioners are conducted with fair consideration and in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles. 9. Compliance with Applicable Provisions: In addition to internal company procedures, this process must also comply with applicable laws and regulations, both from capital market authorities and sectoral regulations, to ensure that all parties involved in the appointment carry out their responsibilities with integrity. 10. With a formal, rigorous, and transparent process, companies can build stronger trust among investors and stakeholders, which in turn will support the Company's reputation and sustainability.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
2.2. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 2.2. Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	2.2.1. Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. 2.2.1. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure oriented towards sustainable corporate development and encouraging the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners for decision by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors, the economic situation, and corporate performance.	*Apply*	Kebijakan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Kementerian BUMN No. SR-98/Wk.MBU.04/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PTPI tahun 2025. Pemberian remunerasi didasarkan pada pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) tahunan dan mempertimbangkan capaian kinerja jangka pendek dan jangka panjang yang merupakan hasil dari sistem, kebijakan, dan proses bisnis yang telah dibangun secara berkelanjutan. The policy for determining the remuneration of Directors and Board of Commissioners refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises and the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SR-98/Wk.MBU.04/08/2024 dated August 23, 2024, concerning the Determination of Remuneration for Directors and Board of Commissioners of PTPI in 2025. Remuneration is based on the achievement of annual Key Performance Indicators (KPIs) and takes into account short-term and long-term performance achievements resulting from systems, policies, and business processes that have been developed sustainably.
	2.2.2. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. 2.2.2. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners comprises a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and encouraging the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners, the economic situation, and corporate performance. In addition, consideration must be given to their positions as President Commissioner and chair, as well as their membership in committees.	*Apply*	Dalam menetapkan remunerasi, Perusahaan melakukan kajian komprehensif dengan memperhatikan berbagai indikator, antara lain: kinerja keuangan Perusahaan, pemenuhan kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, aspek kewajaran dibandingkan dengan peer group, serta keselarasan dengan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan. Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan memberikan penghargaan yang layak dan kompetitif berupa penghasilan yang mampu memotivasi Dewan Komisaris dan Direksi atas kontribusi, peran, dan tanggung jawabnya dalam mendorong kinerja serta keberlanjutan Perusahaan. In determining remuneration, the Company conducts a comprehensive review, taking into account a variety of indicators, including: the Company's financial performance, fulfillment of reserve requirements as stipulated in applicable laws and regulations, fairness compared to its peer group, and alignment with the Company's long-term goals and strategies. Through this policy, the Company provides appropriate and competitive rewards in the form of remuneration that motivates Board of Commissioners and Board of Directors for their contributions, roles, and responsibilities in driving the Company's performance and sustainability.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	2.2.3. Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 2.2.3. To ensure remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications, and competencies of Directors and Commissioners, taking into account corporate operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that fair and transparent procedures are in place for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang merujuk pada peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 serta ditetapkan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi melalui SK Dewan Komisaris Nomor 004/KEP.KOM/ II/2024 tanggal 29 Februari 2024. The Company has a policy regarding the remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, which refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/03/2023 and is stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter through Board of Commissioners Decree Number 004/KEP.KOM/II/2024 dated February 29, 2024.
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Principle 3: Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners			
3.1. Sifat Hubungan Kerja 3.1. Nature of the Working Relationship	3.1.1. Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. 3.1.1. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as between the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners. However, it is important to maintain the confidentiality of information to prevent leakage of confidential information.	*Apply*	Perusahaan telah mengatur hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris serta prinsip keterbukaan dan kerahasiaan informasi dalam Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan, yaitu: The Company has regulated the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as the transparency principles and information confidentiality, in the Company's GCG Guidelines and Board Manual, including:
	3.1.2. Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. 3.1.2. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision, and strategy and regularly discusses their implementation.	*Apply*	Manajemen Pupuk Indonesia Group yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Direktur Utama Anak Perusahaan telah menetapkan dan menyepakati purpose dan visi serta misi Pupuk Indonesia Group melalui *Strategic Workshop* Perumusan *Purpose*, Visi dan Misi Perusahaan. The Pupuk Indonesia Group management, consisting of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the President Directors of its subsidiaries, has established and agreed on the purpose, vision, and mission of the Pupuk Indonesia Group through a Strategic Workshop on Formulating the Company's Purpose, Vision, and Mission.
	3.1.3 Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 3.1.3 The Corporate Secretary plays a crucial role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	*Apply*	Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary plays a crucial role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including effective communication with shareholders and other stakeholders.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
3.2. Akses informasi Dewan Komisaris 3.2. Access to Information for the Board of Commissioners	3.2.1. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. 3.2.1. The Board of Directors is responsible for ensuring the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively on all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may request the Board of Directors provide additional information at any time.	*Apply*	PTPI telah mengatur keterbukaan dan kerahasiaan informasi dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa Komite Audit dan komite lainnya, serta auditor eksternal dan auditor internal mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu mengenai perusahaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. PTPI has regulated the transparency and confidentiality of information in its Corporate Governance Guidelines. The Board of Commissioners and Directors ensure that the Audit Committee and other committees, as well as the external and internal auditors, have access to accurate, relevant, and timely information regarding the company necessary to carry out their duties.
3.3. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi 3.3. Responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation	3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. 3.3.1 Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the corporation's share ownership structure and the relationships between shareholders that may impact the management and operations of the corporation.	*Apply*	Perusahaan telah mengatur hal terkait pelaporan mengenai kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain yang dituangkan dalam Pedoman GCG dan Board Manual Perusahaan. The Company has regulated matters related to reporting share ownership by Directors and Commissioners and/or their families in the Company and other companies, as outlined in the Company's GCG Guidelines and Board Manual.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
Prinsip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung jawab Principle 4: Ethical and Responsible Behavior			
4.1. Pedoman Etika dan Perilaku 4.1. Ethics and Conduct Guidelines	4.1.1. Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; 5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; 6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; 7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. 8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. 9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. 10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. 11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	*Apply*	Perusahaan telah mengatur perilaku dan etika seluruh Insan Perusahaan dengan setiap pemangku Kepentingan yang dituangkan pada Pedoman Etika dan Perilaku *(Code of Conduct)* yang merupakan salah satu kelengkapan infrastruktur GCG Perusahaan. Pedoman ini selain mengatur etika kerja dan tata perilaku Insan Perusahaan serta etika perusahaan dengan Pemangku Kepentingan juga merupakan panduan etika bisnis dalam kegiatan operasional sehari-hari. The Company has established a code of conduct for all Company Personnel and stakeholders, as outlined in the Code of Conduct, which is part of the Company's GCG infrastructure. This code, in addition to regulating the work ethics and conduct of Company Personnel and the Company's relationships with stakeholders, also serves as a guide for business ethics in daily operations.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	4.1.1. This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics, which must clearly express the corporation's expectation that each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employee will: 1. Act in the best interests of the corporation; 2. Act honestly and with a high standard of integrity; 3. Be independent and act on the basis of complete information, in good faith, with due diligence, and due care. 4. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations; 5. Avoid actions that violate laws and regulations or are unethical based on the corporation's ethical guidelines; 6. Not engage in or participate in any activity that would negatively impact the corporation's reputation; 7. Not take advantage of the corporation's property or information, other assets, or its customers for personal gain or that causes harm to the corporation or its customers. 8. Not exploit their position or the opportunities afforded by their position for personal gain. 9. Avoid soliciting or accepting payments, gratuities, or other benefits from third parties for oneself or others that create a conflict of interest or provide benefits to third parties in violation of laws and regulations. 10. Respect the differing opinions and rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees. 11. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications. pp		
	4.1.2. Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan *(anti-fraud)*, keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. 4.1.2. The Board of Directors establishes policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement, in accordance with national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other relevant standards.	*Apply*	Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan *(anti-fraud)*, keterlibatan dalam politik yang tertuang pada Pedoman tata Kelola Perusahaan dan Pedoman turunannya. The Board of Directors has established policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement, as outlined in the Corporate Governance Guidelines and their derivative Guidelines.
4.2. Nilai-nilai dan Budaya Organisasi 4.2. Organizational Values and Culture	4.2.1. Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan, dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. 4.2.1. The corporation articulates, cultivates, and expresses its corporate culture and values.	*Apply*	Nilai-nilai yang dianut Perusahaan telah dituangkan dalam Pedoman GCG Perusahaan. Adapun nilai-nilai ini telah merujuk pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Nilai-nilai perusahaan tersebut adalah Amanah, Harmonis, Kompeten, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK). The Company's values are outlined in the Company's GCG Guidelines. These values align with those established by the Ministry of State-Owned Enterprises. These values are: Trustworthy, Harmonious, Competent, Loyal, Adaptive, and Collaborative (AKHLAK).

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
4.3. Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya 4.3. Enforcement and Communication of Ethics, Values, and Culture Guidelines	4.3.1. Pedoman Etika dan Perilaku korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan dan diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan melalui Peraturan Perusahaan. 4.3.1. The corporate Code of Ethics and Conduct is effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees and integrated into the corporate strategy and operations, including the risk management system and remuneration structure, and enforced through Company Regulations.	*Apply*	Pedoman Etika dan Perilaku *(Code of Conduct)* telah disosialisasikan Perusahaan melalui survei pemahaman Pedoman Perusahaan serta dimasukkan ke dalam *website* Perusahaan, sehingga setiap Insan Perusahaan dapat mengakses pedoman tersebut setiap saat. Di tiap awal tahun, perusahaan juga memastikan bahwa tiap insan perusahaan menandatangani Pakta Integritas, di mana salah satu item di dalamnya adalah terkait pemahaman *code of conduct* (CoC) perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penegakan CoC dan nilai-nilai perusahaan. The Company has socialized the Code of Ethics and Behavior (Code of Conduct) through a survey to assess its understanding of the Code and has also posted it on its website, allowing all employees to access it at any time. At the beginning of each year, the Company also ensures that all employees sign an Integrity Pact, one of the items of which relates to an understanding of the company's Code of Conduct (CoC). This serves as a form of enforcement of the CoC and company values.
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Principle 5: Risk Management, Internal Control, and Compliance			
5.1. Pengendalian Internal dan Kepatuhan 5.1. Internal Control and Compliance	5.1.1. Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan korporasi. 5.1.1. The Board of Directors conducts regular reviews of the design accuracy and operational effectiveness of the corporate governance, risk management, internal control, and compliance systems and reports the implementation and results of these reviews to shareholders through the corporation's annual report.	*Apply*	Pengukuran penerapan GCG, pengelolaan risiko dan pengendalian internal telah dilaksanakan secara berkala dan diatur juga dalam Pedoman GCG Perusahaan dan dilaporkan kepada pemegang saham melalui laporan tahunan korporasi. Measurement of the implementation of GCG, risk management, and internal control has been carried out periodically and is also regulated in the Company's GCG Guidelines and reported to shareholders through the corporation's annual report.
5.2. Manajemen Risiko 5.2. Risk Management	5.2.1. Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dibahas secara periodik dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. 5.2.1. Strategy and risk are integrated, transparently disclosed, incorporated into the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and discussed periodically in Board of Commissioners and Board of Directors meetings.	*Apply*	Strategi Risiko Perusahaan ditetapkan oleh Manajemen dalam Buku RKAP. Evaluasi atas strategi risiko dengan melakukan monitoring atas realisasi parameter metrik strategi risiko setiap bulan. The Company's Risk Strategy is established by Management in the RKAP Book. The risk strategy is evaluated by monitoring the realization of the risk strategy's metric parameters on a monthly basis.
	5.2.2. Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. 5.2.2. The Risk Management Monitoring Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its duties by creating a transparent, focused, and independent mechanism for overseeing corporate risk management.	*Apply*	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko (KPR) untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan (oversight roles) dalam perspektif penerapan manajemen risiko terintegrasi. Pemantauan manajemen risiko perusahaan telah diatur dalam Pedoman GCG dan Board Manual Perusahaan, serta pedoman turunan lainnya seperti Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi. The Board of Commissioners has established a Risk Monitoring Committee (KPR) to assist the Board in carrying out its oversight role within the framework of implementing integrated risk management. Monitoring of the Company's risk management is regulated in the Company's GCG Guidelines and Board Manual, as well as other derivative guidelines, such as the Integrated Risk Management Guidelines.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5.3. Integrated Governance, Risk Management, and Compliance	5.3.1. Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya 5.3.1. The Board of Directors establishes an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure the corporation can achieve its objectives.	*Apply*	Perusahaan telah menerapkan Governansi, *Risk Management*, dan *Compliance* dan saat ini sedang membangun integrasi GRC yang terpadu sesuai dengan peraturan yang berlaku, Adapun fungsi kepatuhan saat ini telah dilaksanakan oleh Departemen Kepatuhan dan bersifat independen, tidak merangkap dengan fungsi yang lainnya. The Company has implemented Governance, Risk Management, and Compliance and is currently building a comprehensive GRC integration in accordance with applicable regulations. The compliance function is currently carried out by the Compliance Department and is independent, not overlapping with other functions.
	5.3.2 Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan 5.3.2 The Board of Directors ensures the department responsible for compliance does not concurrently perform functions that could potentially create a conflict of interest.	*Apply*	Fungsi kepatuhan berada di bawah koordinasi Kompartemen Tata Kelola & Kepatuhan terpisah dengan Kompartemen Manajemen Risiko dan Kompartemen Satuan Pengawasan Intern. The compliance function is coordinated by the Governance & Compliance Compartment, which is separate from the Risk Management Compartment and the Internal Audit Unit Compartment.
5.4. Audit Internal 5.4. Audit Internal	5.4.1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memantau dan memastikan Satuan Pengawasan Intern melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. 5.4.1. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, has monitored and ensured the Internal Audit Unit has evaluated the effectiveness of the implementation of risk management, internal control, and corporate governance.	*Apply*	Tugas dan wewenang Komite Audit telah diatur dalam Pedoman GCG Perusahaan dan pedoman turunan terkait Audit Internal. The Audit Committee duties and authorities are stipulated in the Company's GCG Guidelines and derivative guidelines related to Internal Audit.
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi Principle 6: Disclosure and Transparency			
6.1. Kebijakan Pengungkapan 6.1. Disclosure Policy	6.1.1. Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. 6.1.1. The Corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive and confidential corporate information.	*Apply*	Perusahaan menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para *stakeholders*, hal ini telah dituangkan dalam Pedoman GCG Perusahaan, Pedoman Pengelolaan *Website* Perusahaan, dan Pedoman Pengelolaan Informasi Publik. The Company provides material and relevant information about the Company in a manner that is easily accessible and understandable to stakeholders. This is outlined in the Company's GCG Guidelines, Company Website Management Guidelines, and Public Information Management Guidelines.
	6.1.2 Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. 6.1.2 Shareholders' rights to obtain regularly and timely relevant material information about the corporation must be fulfilled.	*Apply*	Perusahaan secara periodik dan tepat waktu menyampaikan informasi material yang diperlukan oleh Pemegang Saham. The Company periodically and timely provides material information required by Shareholders.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
6.2. Laporan Keuangan dan Keberlanjutan 6.2. Financial and Sustainability Reports	6.2.1. Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. 6.2.1. The Corporation shall disclose the systems and procedures to ensure interim financial statements that are not audited or reviewed by external auditors are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	*Apply*	Perusahaan telah mengatur hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris serta prinsip keterbukaan dan kerahasiaan informasi dalam Pedoman GCG dan Board Manual Perusahaan. The Company has established regulations regarding Financial Reports that are accountable for their quality, accuracy, and completeness. This is stipulated in the Company's GCG Guidelines and Financial Report Preparation Guidelines.
	6.2.2. Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. 6.2.2. The Audit Committee ensures the quality of the financial statement audits performed by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, the dismissal and remuneration of external auditors.	*Apply*	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi penunjukan auditor eksternal dilakukan setiap tahun oleh Komite Audit. Implementation has been carried out in accordance with applicable regulations. Recommendations for the appointment of an external auditor are made annually by the Audit Committee.
	6.2.3. Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. 6.2.3. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and in accordance with a national or international sustainability reporting framework.	*Apply*	Perusahan secara konsisten menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada standar nasional dan internasional, meliputi: Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021, *Global Reporting Initiative* (GRI) *Standards* 2021, *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD), serta adopsi awal International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 (*General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*) dan S2 (*Climate-related Disclosures*). The Company consistently publishes a Sustainability Report annually as a commitment to transparent and responsible governance. The Sustainability Report is prepared in accordance with national and international standards, including: OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021, the Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021, the Sustainability Accounting Standards Board (SASB), the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), and the initial adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) and S2 (Climate-related Disclosures).

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	6.2.4 Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. 6.2.4 The corporation publishes an integrated annual report that places historical performance in context and describes the corporation's risks, opportunities, and future prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	*Apply*	Perusahan menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang mencerminkan integrasi visi dan nilai keberlanjutan ke dalam kebijakan strategis perusahaan dan diperkuat melalui komitmen penerapan Kebijakan Keberlanjutan dan Pedoman Keberlanjutan Perusahaan dalam kegiatan operasional serta pengambilan keputusan. Laporan Keberlanjutan menempatkan pencapaian kinerja ekonomi berkelanjutan, pengembangan produk berkelanjutan, pengembangan talenta dan budaya keselamatan, peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan dampak lingkungan dan perubahan iklim, untuk menggambarkan kesimbangan pertumbuhan usaha, kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. The Company publishes a Sustainability Report that reflects the integration of its sustainability vision and values into its strategic policies and is reinforced by its commitment to implementing the Company's Sustainability Policy and Sustainability Guidelines in its operational activities and decision-making. The Sustainability Report highlights the achievement of sustainable economic performance, sustainable product development, talent development and safety culture, active participation in community empowerment, and environmental impact and climate change management, to illustrate the Company's balance of business growth, contribution to national food security, and social and environmental responsibility.
6.3. Diseminasi Informasi 6.3. Information Dissemination	6.3.1. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. 6.3.1. Information dissemination channels must provide equal, timely, and relatively inexpensive access to relevant information for users.	*Apply*	Perusahaan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Hal ini telah dituangkan dalam Pedoman GCG Perusahaan. The Company ensures the availability of necessary information to all stakeholders, both internal and external, through a well-functioning and timely communication system. This is outlined in the Company's GCG Guidelines.
	6.3.2. Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. 6.3.2. The Corporation ensures an annual statement on the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guideline, is available on the website for a minimum period of five years.	*Apply*	Pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia tertuang didalam Annual Report yang dipublikasikan dalam website The annual statement on the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance is contained in the Annual Report published on the website.
	6.3.3. Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. 6.3.3. For corporations listed on a capital market in a jurisdiction other than their home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross-listings, the criteria and procedures for cross-listings, as well as the criteria and procedures for recognizing listing requirements for primary listings, must be transparent and documented.	*Explain*	Perusahaan tidak mencatatkan diri di Bursa Efek sehingga tidak menerapkan peraturan terkait perusahaan terbuka. The Company is not listed on the Stock Exchange and therefore does not apply regulations related to public companies.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Principle 7: Protection of Shareholder Rights			
7.1. Hak Pemegang Saham 7.1. Shareholder Rights	7.1.1. Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. 7.1.1. The Corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengelolaan Komunikasi yang menjadi panduan dalam pelaksanaan komunikasi antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengelolaan Komunikasi yang menjadi panduan dalam pelaksanaan komunikasi antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
	7.1.2. Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. 7.1.2. A corporation that is a parent entity ensures its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation has significant investments.	*Explain*	Sampai akhir Desember 2025, Perusahaan sebagai entitas induk belum memberlakukan kebijakan tata kelola perusahaan kepada entitas Anak. Namun Perusahaan telah menetapkan dan memberlakukan Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha bagi seluruh entitas anak. As of the end of December 2025, the Company, as the parent entity, had not yet implemented its corporate governance policies for its subsidiaries. However, the Company had established and implemented Group Governance Guidelines for all subsidiaries.
	7.1.3. Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. 7.1.3. The Corporation shall have rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure that transactions occur transparently and on fair terms, and protect the rights of all shareholders, regardless of their class.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki Pedoman dan Prosedur yang menjadi panduan dalam pelaksanaan akuisisi, pengambilalihan, dan aksi korporasi lainnya seperti merger, akuisisi, dan pelepasan aset. The Company has established Guidelines and Procedures that serve as guidance for the implementation of acquisitions, takeovers, and other corporate actions such as mergers, acquisitions, and asset disposals.
7.2. Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham 7.2. Fair Treatment of Shareholders	7.2.1. Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: 1. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, 2. Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. 7.2.1. The Corporation has rules and procedures that ensure: 1. All shareholders of the same series within a class of shares must be treated equally, 2. Disclosure of such rules and procedures, as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control disproportionate to their shareholdings.	*Explain*	Kepemilikan saham perusahaan adalah 100% milik Pemerintah Republik Indonesia, melalui melalui Saham Seri A Dwiwarna oleh BP-BUMN dan Saham Seri B oleh PT Danantara Aset Management (Persero). Perusahaan menjalankan prinsip Kewajaran dan menerapkan *equal treatment* bagi seluruh pemegang saham. The Company's share ownership is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, through Series A Dwiwarna Shares held by BP-BUMN and Series B Shares held by PT Danantara Aset Management (Persero). The Company adheres to the principle of fairness and applies equal treatment to all shareholders.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	7.2.2. Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. 7.2.2. The corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in a manner that ensures that conflicts of interest are appropriately managed and protects the interests of the corporation and its shareholders.	*Explain*	Sampai dengan akhir Desember 2025, struktur kepemilikan saham perusahaan adalah 100% milik Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak ada transaksi pihak berelasi yang terjadi di perusahaan. As of the end of December 2025, the Company's share ownership structure was 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, so there were no related party transactions within the company.
	7.2.3. Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. 7.2.3. The corporation has and discloses a policy to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by directors, commissioners, and insiders to ensure that no one can directly or indirectly benefit from information that is not yet available to the market.	*Explain*	Sampai dengan akhir Desember 2025, struktur kepemilikan saham perusahaan adalah 100% milik Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak ada *insider trading* yang terjadi sepanjang tahun 2025. As of the end of December 2025, the Company's share ownership structure will be 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, so there was no insider trading throughout 2025.
7.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 7.3. General Meeting of Shareholders (GMS)	7.3.1. Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. 7.3.1. The corporation shall issue a notice for a General Meeting of Shareholders (GMS) with the agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days prior to the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to thoroughly review the meeting agenda. The meeting invitation and all GMS information shall be disclosed electronically, such as through the corporation's website.	*Explain*	Pelaksanaan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS menyesuaikan dengan informasi waktu pelaksanaan yang disampaikan oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham perusahaan. The GMS summons, with the agenda and materials for the GMS, was in accordance with the information regarding the timing of the meeting provided by the Ministry of State-Owned Enterprises, as the Company's shareholder.
	7.3.2. Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. 7.3.2. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders' effective participation and voting at the GMS.	*Explain*	Sampai dengan akhir Desember 2025, struktur kepemilikan saham perusahaan adalah 100% milik Pemerintah Republik Indonesia, sehingga tidak ada Pedoman dan Prosedur yang mengatur terkait hal ini. At the end of December 2025, the company's share ownership structure was 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, so there are no Guidelines and Procedures governing this matter.
	7.3.3. Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 7.3.3. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang di dalamnya salah satunya mengatur tentang tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. The appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners refers to the Minister of BUMN Regulation Number PER-03/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, which regulates the procedures for appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
	7.3.4. Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. 7.3.4. The Corporation ensures the transparency and accountability of external auditors at the GMS.	*Apply*	Penunjukan auditor eksternal yang akan melakukan audit atas laporan keuangan tahunan, ditetapkan dalam RUPS Kinerja Tahun Buku sebelumnya. The appointment of an external auditor to audit the annual financial statements is determined at the GMS' Performance Report for the previous fiscal year.
	7.3.5. Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. 7.3.5. The complete voting results and summary of the minutes of the GMS will be announced to the public the following business day.	*Explain*	Perusahaan adalah BUMN tertutup sehingga tidak terikat pada peraturan terkait publikasi hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS kepada publik. The Company is a privately held state-owned enterprise and is therefore not bound by regulations regarding the publication of voting results and a summary of the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) to the public.
Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Principle 8: Respect for Stakeholders			
8.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci 8.1. Key Stakeholder Engagement	8.1.1. Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. 8.1.1. The Corporation, through the Corporate Secretary, conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages with them to understand their expectations and concerns, as well as the corporation's impact on them.	*Apply*	Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan melakukan komunikasi yang efektif, transparan dengan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan menghadirkan media komunikasi kepada pelanggan sebagai upaya dalam memberikan pelayanan optimal terhadap penyampaian keluhan atau kendala melalui Suara Pelanggan (*Hotline Service* telepon bebas pulsa: 0800 100 800 1, Whatsapp: 0811-1000-1959, e-mail: konsumen@pupuk-indonesia.com). Keluhan pelanggan yang disampaikan akan diterima yang selanjutnya direspon dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Perusahaan juga menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh publik melalui *website* perusahaan. The Company, through its Corporate Secretary, maintains effective and transparent communication with all stakeholders. The Company provides communication channels to customers to provide optimal service when submitting complaints or issues through the Voice of Customers (Toll-free Hotline: 0800 100 800 1, WhatsApp: 0811-1000-1959, email: konsumen@pupuk-indonesia.com). Customer complaints will be received and responded to and followed up by the relevant work units. The Company also provides a variety of information accessible to the public through the company website.

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi PUGKI di PTPI
Application of PUGKI Principles and Recommendations at PTPI

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply/ Explain*	Penjelasan/Bukti Penerapan Explanation/Evidence of Implementation
8.2. Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis 8.2. Integrating Sustainability into Business Models	8.2.1. Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. 8.2.1. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including establishing the corporation's sustainability strategies, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including, among other things, in the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans, and risk management.	*Apply*	Direksi telah menetapkan Kebijakan Keberlanjutan sejak tanggal 8 Juli 2024 poin 26. dan pengesahan Pedoman Keberlanjutan Perusahaan Nomor Dokumen PI-SMT-PD-013 tanggal 12 Desember 2025, sebagai komitmen untuk mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam setiap aspek operasional dan strategi bisnis. Kebijakan ini menjadi panduan bagi seluruh Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan. Selain itu, inisiatif strategis Peningkatan *Sustainability* telah menjadi inisiatif strategis pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan. The Board of Directors has established a Sustainability Policy, point 26, since July 8, 2024, and ratified the Company's Sustainability Guidelines, Document Number PI-SMT-PD-013, on December 12, 2025, as a commitment to integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into every aspect of business operations and strategy. This policy serves as a guide for all Company personnel and stakeholders in carrying out their duties and responsibilities sustainably. Furthermore, the strategic initiative to Improve Sustainability has become a strategic initiative in the Company's Long-Term Plan.
8.3. Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan 8.3. Stakeholder Protection	8.3.1. Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. 8.3.1. The Board of Directors ensures and discloses that the corporation's operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	*Apply*	Direksi telah menetapkan Pedoman Etika dan Perilaku yang meliputi etika usaha Perusahaan dan etika Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu Perusahaan telah menetapkan Pedoman dan Prosedur terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi panduan bagi Insan Perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. The Board of Directors has established a Code of Ethics and Conduct that encompasses the Company's business ethics and the ethics of Company Personnel in interacting with all stakeholders. Furthermore, the Company has established Guidelines and Procedures related to social and environmental responsibility, which serve as a guide for Company Personnel in their social and environmental responsibility activities.
	8.3.2. Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. 8.3.2. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and to prioritize sustainability.	*Apply*	Direksi telah menetapkan Kebijakan Keberlanjutan sejak tanggal 8 Juli 2024 dan pengesahan Pedoman Keberlanjutan Perusahaan tanggal 12 Desember 2025, sebagai komitmen untuk mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam setiap aspek operasional dan strategi bisnis guna mencapai sasaran keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan. The Board of Directors established a Sustainability Policy since July 8, 2024, and ratified the Company's Sustainability Guidelines on December 12, 2025, as a commitment to integrating ESG principles into every aspect of business operations and strategy to achieve sustainability goals and continuous improvement.





06



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Komitmen dan Landasan Kebijakan

Commitment and Policy Basis



Perusahaan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara terintegrasi dengan strategi bisnis. Langkah ini merupakan wujud komitmen Perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sekaligus upaya menciptakan nilai bersama CSV (*Creating Shared Value*) bagi masyarakat dan lingkungan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam melaksanakan program TJSL, Perusahaan berpedoman pada:

1. Regulasi Umum Perseroan Terbatas:
   a. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   b. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara digantikan oleh UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
   c. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Regulasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN):
   a. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
   b. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

The Company has carried out a Social and Environmental Responsibility (SER) program that is integrated into its business strategy. This step demonstrates the Company's commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs) while at the same time exhibits its efforts to create shared value for the communities and the environment, particularly when supporting national food security.

In carrying out SER program, the Company refers to the following regulations:

1. General Regulations on Limited Liability Companies:
   a. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
   b. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as last amended by Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
   c. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
2. State-Owned Enterprises (BUMN) Regulations:
   a. Minister of BUMN Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.
   b. Minister of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.



c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK 277/MBU/10/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang dan/atau Pembiayaan Syariah Bermasalah pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Badan Usaha Milik Negara.
d. Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 Tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK").
e. Surat Edaran Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Akuntansi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Badan Usaha Milik Negara.

3. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
   b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
   c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Seluruh capaian, dampak, dan realisasi program TJSL selama Tahun 2025 diungkapkan secara komprehensif dalam Laporan Keberlanjutan 2025, yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini. Penyusunan laporan tersebut telah mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017, SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, dan GRI Standards untuk memastikan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan Perusahaan memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas internasional.

c. Minister of BUMN Decree No. SK 277/MBU/10/2023 dated October 4, 2023, concerning Guidelines for the Settlement of Non-Performing Sharia Receivables and/or Financing in the Micro and Small Enterprise Funding Program at State-Owned Enterprises.
d. Minister of BUMN Letter No. S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022, concerning Cooperation in the Micro and Small Enterprise Funding Program ("PUMK Program Cooperation").
e. Head of the State-Owned Enterprise Regulatory Agency Circular Letter No. 1 of 2026 concerning Accounting Guidelines for Micro and Small Business Funding Programs of State-Owned Enterprises.

3. Financial Services Authority (OJK) Regulations
   a. OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies; and
   b. Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Format and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies; and
   c. OJK Circular Letter No. 21/SEOJK.03/2024 concerning Banking Accounting Guidelines for Rural Banks.

All achievements, impacts, and realization of the SER program in 2025 are comprehensively disclosed in the 2025 Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report. The report was prepared in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021, and GRI Standards to ensure the Company's social and environmental performance disclosures meet international transparency and accountability standards.

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance Highlights

Kinerja Sosial
Social Highlights

Total Dana PUMK dan TJSL 2023-2025
Total MSE and CSR Funds 2023-2025

(Rp Juta) | (Rp Million)



Total Dana TJSL
Total CSR Funds

(Rp Juta) | (Rp Million)



Jumlah Mitra Binaan
Number of Fostered Partners



* Merupakan jumlah mitra binaan Swakelola dan Kolaborasi BRI.
*Represents the number of Swakelola and BRI Collaboration partners

Nilai Piutang Pendanaan UMK
Self-Managed MSE Funding Receivables

(Rp Juta) | (Rp Million)



* Merupakan jumlah piutang pendanaan UMK Swakelola dan Kolaborasi BRI.
*Represents the total receivables from Swakelola and BRI Collaboration MSE funding.

Kinerja Lingkungan
Environment Highlights

Penggunaan Energi
Energy Usage

	2025	2024	2023
Total Energi (GJ) Total Energy (GJ)	132.856.772	125.827.719	121.445.674
Intensitas Energi (GJ/ton Pupuk) Energy Intensity (GJ/ton Fertilizer)	29.13	29.84	29.64
Total Emisi (Ton CO_2eq) Total Emissions (Ton CO_2eq)	62.967.328	61.249.531	56.446.642

Intensitas Emisi Urea
Urea Emission Intensity

(Ton CO_2eq/ton Pupuk) | (Tons of CO_2eq/Ton of Fertilizer)



*) Terdapat penyajian data kembali
*) There is a restatement of data

Intensitas emisi dihitung dari total emisi produksi amonia dan urea setelah dikurangi CO_2 *recovery* untuk urea.
Emissions intensity is calculated based on total emissions from ammonia and urea production, minus CO_2 recovery for urea.

Pengurangan Emisi
Emission Reduction

(Ton CO_2eq) | (Tons CO_2eq)

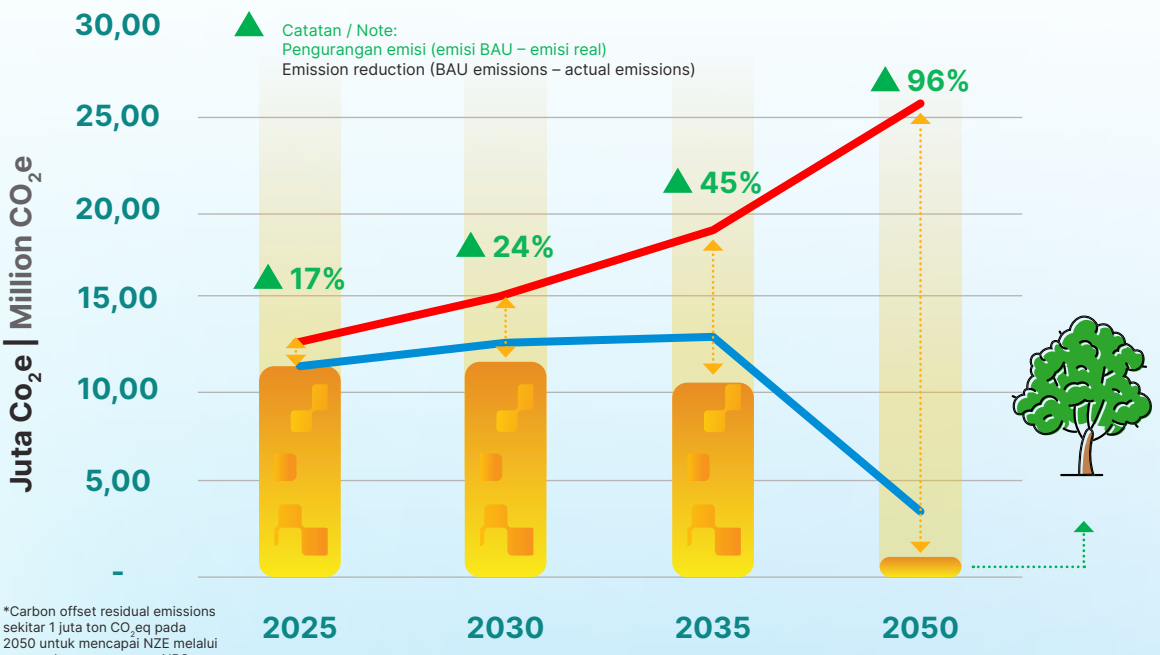


*) Terdapat penyajian data kembali
*) There is a restatement of data

Pengurangan emisi level organisasi dihitung dari emisi BAU (Business as Usual) dikurangi dengan inventori emisi aktual.
Organizational-level emission reductions are calculated by subtracting actual emissions from BAU (Business as Usual) emissions.

Kinerja Lingkungan
Environment Highlights

Roadmap Dekarbonisasi PTPI
PTPI's Decarbonization Roadmap



*Carbon offset residual emissions sekitar 1 juta ton CO_2eq pada 2050 untuk mencapai NZE melalui pengembangan program NBS.
*Carbon offset residual emissions of approximately 1 million metric tons of CO_2eq by 2050 to achieve net-zero emissions through the development of NBS programs.

2025

- Efisiensi energi dan *fuel switching*.
- Peralihan bahan bakar dari batu bara ke gas alam.
- Pemanfaatan CO_2 untuk CO_2 cair dan *dry ice*.
- Pemanfaatan *green energy* dan *renewable energy certificate* (REC).
- *Nature-based Solutions*.
- Kendaraan listrik.

- Energy efficiency and fuel switching.
- Transition from coal to natural gas.
- Utilization of CO_2 for liquid CO_2 and dry ice production.
- Adoption of green energy and renewable energy certificates (RECs).
- Nature-based Solutions.
- Electric vehicles.

2026-2030 *(SHORT-TERM)*

- Efisiensi energi (Pusri-IIIB, *Revamping Ammonia* Pabrik-2 PKT) dan *fuel switching*.
- Pemanfaatan CO_2 untuk soda ash.
- *Hybrid green ammonia*.
- Pemanfaatan *green energy*, REC, serta *biomass* (*cofiring pilot project*).
- *Nature-based Solutions*.
- Kendaraan listrik.

- Energy efficiency (Pusri-IIIB, Revamping Ammonia Plant-2 PKT) and fuel switching.
- Utilization of CO_2 for soda ash production.
- Hybrid green ammonia
- Adoption of green energy, RECs, and biomass (cofiring pilot project).
- Nature-based Solutions.
- Electric vehicles.

2031-2035 *(MID-TERM)*

- Efisiensi energi dan *fuel switching*.
- Komersialisasi awal CCS/ *blue ammonia*.
- Pemanfaatan *green energy*, REC, dan *biomass*.
- *Nature-based Solutions*.
- Kendaraan listrik.

- Energy efficiency and fuel switching.
- Initiation of CCS/blue ammonia.
- Adoption of green energy, RECs, and biomass.
- Nature-based Solutions.
- Electric vehicles.

2036-2050 *(LONG-TERM)*

- Efisiensi energi dan *fuel switching*.
- Peningkatan kapasitas CCS/ produksi *blue ammonia*.
- *Large scale green ammonia*.
- Pemanfaatan *green energy*, REC, *biomass*, dan *nuclear* (thorium).
- *Nature-based Solutions*.
- Kendaraan listrik.

- Energy efficiency and fuel switching.
- Large-scale CCS/blue ammonia.
- Large-scale green ammonia.
- Adoption of green energy, RECs, biomass, and nuclear (thorium).
- Nature-based Solutions.
- Electric vehicles .

Kinerja Tata Kelola
Governance Highlights



Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN mencapai 100%, dengan total Wajib Lapor sebanyak 2.512 orang yang disampaikan tepat waktu sebelum 31 Maret 2025.

LHKPN (State Officials' Wealth Report) Compliance Rate Reaches 100%, with a total of 2,512 individuals having submitted their reports on time by March 31, 2025.

Pelatihan antikorupsi diikuti seluruh Insan PTPI.

Anti-Corruption Training was attended by all PTPI personnel.

Kilas Kinerja Tahun 2025
Performance Highlights in 2025

Jumlah Mitra Binaan Aktif Swakelola dan Kerjasama BRI mencapai 3.387 mitra dengan nilai dana PUMK yang masih dipinjam oleh mitra binaan Kerjasama BRI sebesar Rp55,73 miliar dan dana PUMK Swakelola yang masih dipinjam oleh mitra binaan swakelola sebesar Rp48,97 miliar.

The total number of active self-managed and partnership-based BRI-supported partners stands at 3,387, with the value of PUMK funds still outstanding from BRI partnership-based supported partners amounting to Rp55.73 billion and self-managed PUMK funds still outstanding from self-managed supported partners amounting to Rp48.97 billion

Total Dana TJSL Rp259,09 miliar, mencerminkan efisiensi sebesar 18% dibandingkan tahun 2024.

Total SER Funds: Rp259,09 billion, an increase of 18% compared to 2024.

Realisasi Program Pengurangan Emisi Level Proyek sebesar 2.275.205 ton CO_2eq pada tahun 2025.

Implementation of Project-Level Emissions Reduction Programs: by 2,275,205 tons of CO_2eq in 2025.

Pengurangan Limbah sebesar 142.319 ton.

Waste Reduction of 142,319 tons.

Penggunaan Energi Terbarukan: Implementasi energi terbarukan untuk mendukung operasional yang berkelanjutan.

Use of Renewable Energy: Implementation of renewable energy to support sustainable operations.

Pelaksanaan Tiga Pilar TJSL

Implementation of Three SER Pillars



Sepanjang tahun 2025, Perusahaan merealisasikan berbagai inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Sebagai wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung keberlanjutan, pelaksanaan program difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang terintegrasi dalam strategi bisnis Perusahaan. Melalui pendekatan ini, Perusahaan tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan keberlangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

In 2025, the Company conducted Social and Environmental Responsibility initiatives aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), as part of Pupuk Indonesia's commitment to supporting sustainability, with programs focused on three main pillars: social, economic, and environmental, which were integrated into the Company's business strategy. With this approach, the Company not only created added value for the communities and stakeholders but also endeavored to maintain a balance between economic growth, environmental preservation, and sustainable improvements in quality of life. This commitment is a crucial part of supporting national food security while ensuring the Company's long-term business sustainability.

Pilar Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan

Pada tahun 2025, PTPI mengalokasikan dana TJSL sebesar Rp136,64 miliar, menurun 54% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp294,03 miliar. Dana tersebut digunakan untuk beberapa program, antara lain:

1. Program Rumah BUMN: Perusahaan membina 1.311 UMK dengan kategori *Fashion* 91 UMK, Makanan & Minuman 790 UMK, Kerajinan 110 UMK, Perdagangan 96 UMK, Jasa 121 UMK, dan Lainnya 103 UMK yang telah mendapatkan pembinaan melalui Rumah Kreatif BUMN PTPI melalui Rumah BUMN yang berlokasi di Sumatera Selatan. Program ini fokus pada peningkatan kapasitas dan daya saing UMK lokal, membantu mereka mendapatkan akses pelatihan dan fasilitas yang mendukung keberlanjutan usaha mereka. (TPB 4: Pendidikan Berkualitas)
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelatihan Keterampilan: Perusahaan juga memberikan dukungan untuk pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, serta program-program untuk meningkatkan kapasitas wirausaha yang berfokus pada kesetaraan gender dan kesejahteraan sosial. (TPB 5: Kesetaraan Gender, TPB 4: Pendidikan Berkualitas)
3. Dukungan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur bagi UMK yang merupakan bagian dari program TJSL yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai wadah inovasi bagi UMK. (TPB 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)
4. Peningkatan Kapasitas: Program peningkatan kapasitas berupa pelatihan dirancang sebagai upaya pemberdayaan UMK agar para pelaku usaha dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang lebih luas sehingga mampu berkembang dan berkontribusi pada perekonomian lokal. (TPB 4: Pendidikan Berkualitas) (TPB 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi)
5. Pengentasan Kemiskinan: Program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional PTPI mendukung pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. (TPB 1: Tanpa Kemiskinan)
6. Program Kesehatan: Program-program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di daerah sekitar operasional, dengan fokus pada akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. (TPB 3: Kehidupan Sehat & Sejahtera)

Pilar Ekonomi: Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan UMK

Perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp42,63 miliar di tahun 2025 untuk pelaksanaan program TJSL pada pilar ekonomi. Berikut serangkaian program-program yang telah dijalani sepanjang tahun:

1. Pendanaan UMK: Sepanjang tahun 2025, PTPI bekerja sama dengan BRI untuk menyalurkan dana PUMK sebesar Rp11,65 miliar. Dana ini disalurkan ke sektor-sektor perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, industri, perkebunan, jasa, dan lainnya dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. (TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Social Pillar: Community Empowerment and Welfare Improvement

In 2025, PTPI allocated Rp136.64 billion for SER funds, a 54% decrease compared to Rp294.03 billion in 2024. These funds were used for several programs, including:

1. BUMN House Program: The Company fostered 1,311 MSEs, including 91 in the Fashion sector, 790 in the Food & Beverage sector, 110 in the Crafts sector, 96 in the Trade sector, 121 in the Services sector, and 103 in Others. These MSEs received mentoring through PTPI's BUMN Creative House, located in South Sumatra. This program focuses on increasing the capacity and competitiveness of local MSEs, helping them gain access to training and facilities to support their business sustainability. (SDG 4: Quality Education)
2. Women's Empowerment and Skills Training: The Company also supports women's empowerment through skills training and programs to increase entrepreneurial capacity that focus on gender equality and social welfare. (SDG 5: Gender Equality, SDG 4: Quality Education)
3. Infrastructure Support: Infrastructure development for MSEs, as part of the SER program, focusing on community empowerment as a platform for innovation for MSEs. (SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure)
4. Capacity Building: Capacity building programs in the form of training designed to empower MSEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) to improve their knowledge, skills, and expand their networks, enabling them to grow and contribute to the local economy. (SDG 4: Quality Education) (SDG 8: Decent Work & Economic Growth)
5. Poverty Alleviation: Community empowerment-based assistance programs around PTPI's operational areas to support poverty reduction and equitable development. (SDG 1: No Poverty)
6. Health Programs: Programs that support improving community health in areas around operations, with a focus on better access to healthcare services. (SDG 3: Good Health and Well-being)

Economic Pillar: Economic Empowerment and MSE Development

The Company allocated Rp42.63 billion in 2025 for its SER program in the economic pillar. The following shows the programs implemented throughout the year:

1. MSE Funding: Throughout 2025, PTPI collaborated with BRI to distribute Rp11.65 billion in PUMK funds. These funds were distributed to the trade, agriculture, fisheries, livestock, industry, plantations, services, and other sectors with the aim of creating jobs and improving local economic welfare. (SDG 8: Decent Work and Economic Growth)

2. Mitra Binaan: Jumlah mitra binaan aktif pada tahun 2025 sebesar 3.378 mitra, dengan sektor perdagangan dan pertanian menerima dana terbesar. Program ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. (TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
3. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pertanian pada tahun 2025 terus diperkuat sebagai inisiatif strategis untuk mendukung UMK di sektor pertanian agar semakin mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Program ini kini mencakup pelatihan budidaya berbasis praktik terbaik, peningkatan kapasitas produksi dengan dukungan teknologi pertanian modern, penguatan manajemen usaha, serta pendampingan pemasaran yang terintegrasi dengan platform digital. (TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
4. Pengembangan Sektor Pertanian: Program-program pemberdayaan sektor pertanian, termasuk pendanaan bagi petani dan pengembangan agribisnis, mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. (TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

2. Fostered Partners: The number of fostered partners in 2025 reached 3,378 with the trade and agriculture sectors receiving the largest funding. This program reflects the Company's commitment to supporting the economic growth in the surrounding communities. (SDG 8: Decent Work and Economic Growth)
3. The Agricultural Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program continued to be strengthened as a strategic initiative to support MSEs in the agricultural sector to become more independent, sustainable, and competitive in 2025. This program now includes best-practice-based cultivation training, increased production capacity supported by modern agricultural technology, strengthened business management, and integrated marketing assistance with digital platforms. (SDG 8: Decent Work and Economic Growth)
4. Agricultural Sector Development: Agricultural sector empowerment programs, including funding for farmers and agribusiness development, support for food security and farmer welfare. (SDG 8: Decent Work and Economic Growth)

Pilar Lingkungan: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengurangan Jejak Karbon

Pada tahun 2025, Perusahaan telah merealisasikan dana sebesar Rp64,98 miliar untuk pelaksanaan program TJSL pada pilar lingkungan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, dengan tujuan memperkuat upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Adapun program-program yang telah direalisasikan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengurangan Emisi Level Proyek: Pada tahun 2025, PTPI berhasil mengurangi 2.275.205 ton CO_2eq melalui implementasi berbagai inisiatif dekarbonisasi. Capaian ini berhasil memenuhi target pengurangan emisi tahun 2025.
2. Pengurangan Limbah: Perusahaan berhasil mengurangi limbah sebanyak 142.319 ton pada tahun 2025, berkontribusi terhadap pengelolaan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Program Konservasi Alam:
   a. Penanaman 35.050 pohon mangrove merupakan langkah nyata dalam mencegah abrasi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
   b. Penanaman 5.153 pohon produktif dan pelindung tidak hanya memperbaiki kualitas udara dan menambah area hijau, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
   c. Konservasi terumbu karang dengan pemasangan *coral stabilization* dan media berbentuk atap sebagai penyangga pada *rubble* atau pecahan terumbu karang guna menjaga ekosistem laut.
   d. Konservasi kawasan rawa untuk menjaga keberlanjutan ekosistem rawa yang kaya akan keanekaragaman hayati sekaligus berfungsi sebagai penyerap air dan penyangga lingkungan sekitar.

Environmental Pillar: Natural Resource Management and Carbon Footprint Reduction

In 2025, the Company allocated Rp64.98 billion for the environmental pillar in its SER (Corporate Social and Environmental Management) program. These funds were used to support sustainable environmental conservation and management activities, with the aim of strengthening environmental conservation and management efforts. The programs are shown below:

1. Project-Level Emissions Reduction Program: In 2025, PTPI successfully reduced 2,275,205 tons CO_2eq equivalent through decarbonization initiatives. This achievement successfully met the 2025 emission reduction target.
2. Waste Reduction: The Company reduced waste by 142,319 tons in 2025, contributing to more efficient and environmentally friendly waste management.
3. Nature Conservation Program:
   a. Planting 35,050 mangrove trees as a concrete step in preventing abrasion while maintaining the sustainability of coastal ecosystems.
   b. Planting 5,153 productive and shade trees to not only improve air quality and increase green areas, but also provide direct benefits to the communities.
   c. Coral reef conservation by installing coral stabilization and roof-like media to support rubble or coral fragments to maintain marine ecosystems.
   d. Swamp area conservation to maintain the sustainability of swamp ecosystems, which are rich in biodiversity and function as water absorbers and buffers for the surrounding environment.

Investasi Lingkungan dan Dukungan terhadap Keberlanjutan

Selain pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perusahaan juga mengalokasikan dana untuk investasi lingkungan dan dukungan terhadap keberlanjutan sebagai bagian dari komitmen dalam memastikan operasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, realisasi investasi lingkungan mencapai Rp138 miliar yang digunakan untuk mendukung berbagai program pengelolaan lingkungan serta penguatan aspek keberlanjutan Perusahaan.

Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. **Investasi Lingkungan**
   Perusahaan mengalokasikan investasi lingkungan yang difokuskan pada berbagai kegiatan utama, meliputi pemeliharaan lingkungan, jasa konsultasi, audit dan perizinan, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, peningkatan kesadaran lingkungan, kegiatan penghijauan dan konservasi, serta penyediaan peralatan pengelolaan lingkungan. Porsi terbesar investasi diarahkan pada pengelolaan limbah sebagai bagian dari upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan operasional, diikuti oleh dukungan terhadap pemenuhan aspek perizinan dan kepatuhan lingkungan. Upaya ini berkontribusi dalam pengelolaan dampak lingkungan serta mendukung penerapan praktik keberlanjutan di lingkungan Perusahaan.

2. **Kepatuhan terhadap Peraturan Lingkungan dan Penguatan Tata Kelola Keberlanjutan**
   Perusahaan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan audit lingkungan secara berkala, pemenuhan dokumen perizinan, serta implementasi sistem manajemen lingkungan yang terstandarisasi. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pemantauan dan pelaporan dampak lingkungan secara transparan kepada regulator dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari penerapan prinsip akuntabilitas, tata kelola yang baik, serta penguatan praktik keberlanjutan yang terintegrasi.

Environmental Investment and Support for Sustainability

In addition to the SER program, the Company also allocated funds for environmental investment and sustainability support as part of its commitment to ensuring responsible and sustainable operations. In 2025, environmental investment realization reached Rp138 billion, which was used to support the environmental management programs and strengthen the Company's sustainability aspects.

The programs implemented include the following:

1. **Environmental Investment:**
   The Company allocated its environmental investments by focusing on the core activities, including environmental preservation, consulting services, audits and permits, B3 and non-B3 waste management, increasing environmental awareness, reforestation and conservation activities, and providing environmental management equipment. The largest portion of investment was directed toward waste management as part of the efforts to control the environmental impact of operational activities, followed by support for fulfilling environmental licensing and compliance requirements. These efforts contributed to environmental impact management and supported the application of sustainable practices within the Company.
2. **Compliance with Environmental Regulations and Strengthening Sustainability Governance**
   The Company ensures that all operational activities comply with environmental laws and regulations. This is achieved through regular environmental audits, compliance with permit requirements, and the implementation of a standardized environmental management system. In addition, the Company transparently monitors and reports its environmental impacts to regulators and stakeholders as part of the principles of accountability, good governance, and the strengthening of integrated sustainability practices.



Program *Creating Shared Value* (CSV) Tahun 2025

Creating Shared Value (CSV) Program in 2025

Pendekatan

1. Integrasi tujuan sosial dan lingkungan dengan tujuan bisnis:
   a. Teori CSV menekankan bahwa Perusahaan tidak hanya mengejar *profit*, tetapi juga mengintegrasikan isu sosial dan lingkungan ke dalam strategi inti bisnis.
   b. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *reconceiving products and markets* serta redefining *productivity in the value chain*.
2. Memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan sambil menciptakan nilai ekonomi bagi Perusahaan:
   a. CSV bukan sekadar filantropi atau kegiatan TJSL tradisional, melainkan menciptakan nilai bersama (*shared value*).
   b. Program harus menghasilkan dampak sosial/lingkungan dan keuntungan ekonomi yang nyata bagi Perusahaan.
   c. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip bahwa keberlanjutan sosial dan lingkungan memperkuat daya saing bisnis.
3. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan pengukuran dampak sosial serta finansial:
   a. CSV menekankan pentingnya *enabling local cluster development*, yaitu membangun ekosistem bersama dengan pemerintah, komunitas, dan mitra bisnis.
   b. Mengukur dampak sosial dan finansial adalah bagian dari akuntabilitas CSV, memastikan bahwa program benar-benar menciptakan nilai bersama.

Approach

1. Integration of social and environmental objectives with business objectives:
   a. CSV theory emphasizes that companies should not only pursue profit but also integrate social and environmental issues into their core business strategy.
   b. This approach aligns with the concept of reconceiving products and markets and redefining productivity within the value chain.
2. Providing sustainable social and environmental benefits while creating economic value for the Company:
   a. CSV is not just philanthropy or traditional TJSL activities but rather creates shared value.
   b. Programs must generate tangible social/environmental impacts and economic benefits for the Company.
   c. This approach aligns with the principle that social and environmental sustainability strengthens business competitiveness.
3. Collaboration with stakeholders and measuring social and financial impact:
   a. CSV emphasizes the importance of enabling local cluster development, namely building an ecosystem together with the government, communities, and business partners.
   b. Measuring social and financial impact is part of CSV's accountability, ensuring that programs truly create shared value.

Prinsip Utama

1. Merekonstruksi Produk dan Pasar: Memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produk dan layanan yang menciptakan nilai ekonomi dan dampak sosial.
2. Mendefinisikan Produktivitas dalam Rantai Nilai: Meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
3. Mendukung Pengembangan Klaster Lokal: Berinvestasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan komunitas lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Key Principles

1. Reconstructing Products and Markets:
   Meeting the needs of the community through products and services that create economic value and social impact.
2. Defining Productivity in the Value Chain:
   Improving efficiency and reducing costs by considering social and environmental aspects.
3. Supporting the Development of Local Clusters:
   Investing in education, infrastructure, and the welfare of local communities to support inclusive economic growth.

Rangkaian Program CSV PTPI Tahun 2025

1. Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI):
   a. Menumbuhkan kepedulian dan empati karyawan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial, pendidikan, pertanian, dan lingkungan di wilayah operasional.
   b. Membangun budaya kolaborasi dan sinergi antara karyawan, Perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.
   c. Menciptakan *value creation* melalui kolaborasi insan Perusahaan dalam pengembangan ekosistem program yang terintegrasi dengan rantai nilai perusahaan berbasis pendekatan CSV.

PTPI CSV Program Network in 2025

1. A Collaborative Event for All People (AKSI):
   a. Fosters employee awareness and empathy through direct involvement in social, educational, agricultural, and environmental activities in operational areas.
   b. Develops a culture of collaboration and synergy among employees, the Company, the government, and the communities to create a sustainable social impact.
   c. Creates value through collaboration among Company personnel in developing a program ecosystem integrated with the Company's value chain based on the CSV approach.



2. Program Tani Maju Makmur Sejahtera (TAJUMASE) Desa Hadakewa di Kabupaten Lembata, Provinsi NTT:

   a. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian dalam meningkatkan produktivitas lahan melalui sosialisasi pemupukan berimbang dengan prinsip 5T (Tepat Jenis, Tepat Dosis, Tepat Waktu, Tepat Cara, dan Tepat Sasaran).
   b. Mendorong diversifikasi sumber pendapatan masyarakat dengan membuka peluang ekonomi baru melalui pelatihan pengolahan hasil laut menjadi produk olahan bernilai tambah.
   c. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisasi gizi seimbang, serta pelatihan kader kesehatan desa agar terjadi peningkatan pemahaman pencegahan *stunting* dan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.
   d. Memperkuat kapasitas individu dan kelompok masyarakat melalui berbagai pelatihan di bidang pertanian, kesehatan, dan perikanan sehingga dapat memperkuat peran kelompok tani, kader posyandu, kelompok UMK, serta BUMDes dalam mendukung pembangunan desa.

3. Program Tani Maju Makmur Sejahtera (TAJUMASE) Desa Wowong di Kabupaten Lembata, Provinsi NTT:

   a. Mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan dan membuka lahan baru untuk produksi pangan.
   b. Membangun partisipasi aktif warga dan melahirkan generasi baru petani berorientasi keberlanjutan.

2. Tani Maju Makmur Sejahtera/TAJUMASE (Farmers Progress, Prosperity, and Welfare) Program in Hadakewa Village in Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province:
   a. Increases the productivity and efficiency of agricultural businesses by increasing land productivity through the promotion of balanced fertilization based on the 5 Right principles (type, dosage, timing, method, and target).
   b. Encourages a diversification of community income sources by opening new economic opportunities through training in processing marine products into value-added products.
   c. Improves community health and social welfare through free health check-ups, promoting a balanced nutrition, and training village health cadres to increase their understanding of stunting prevention and basic health services at the village level.
   d. Strengthens the capacity of individuals and community groups through training programs in agriculture, health, and fisheries so as to strengthen the role of farmer groups, integrated health post (Posyandu) cadres, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and village-owned enterprises (BUMDes) in supporting village development.

3. Tani Maju Makmur Sejahtera/TAJUMASE (Farmers Progress, Prosperity, and Welfare) Program in Wowong Village, Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province:
   a. Encourages communities to use their yards and open new land for food production.
   b. Develops active community participation and fosters a new generation of sustainability-oriented farmers.

4. Program Tani Maju Makmur Sejahtera (TAJUMASE) Desa Sriwijaya Mataram di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung:
   a. Peningkatan hasil pertanian.
   b. Peningkatan ekonomi keluarga dengan adanya diversifikasi usaha dari KWT dengan mengolah hasil panen Singkong sehingga memberi menambah nilai ekonomis.
5. Program Permaisuri Gresik, di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur:
   a. Peningkatan ekonomi keluarga dengan adanya diversifikasi usaha dari KSM Permaisuri Hebat dengan mengolah kain perca sehingga menambah nilai ekonomis.
   b. Memperkuat kapasitas individu dan kelompok masyarakat melalui berbagai pelatihan menjahit.

Dampak Positif Program CSV

1. Kontribusi terhadap Penanggulangan Kemiskinan: Pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Produktivitas Pertanian Berkelanjutan: Program pertanian yang dijalankan tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperkuat kapasitas petani dalam mengelola lahan secara ramah lingkungan.
3. Penciptaan Kesempatan Kerja Baru: Melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, masyarakat khususnya para petani didorong untuk menciptakan lapangan kerja baru yang mendukung kemandirian ekonomi.

Komitmen Masa Depan

PTPI bertekad untuk terus memperluas cakupan serta mengembangkan program CSV, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan lingkungan. Selain itu, Program CSV juga tetap menjadi pilar utama strategi keberlanjutan Perusahaan, dengan penekanan pada penciptaan dampak sosial dan lingkungan yang konsisten serta berkelanjutan.

4. Tani Maju Makmur Sejahtera/TAJUMASE (Farmers Progress, Prosperity, and Welfare) Program in Sriwijaya Mataram Village, Central Lampung Regency, Lampung Province:
   a. Increases agriculture yields.
   b. Increases family income through business diversification where KWT (Female Farmers' Group) process cassava harvests, thereby adding economic value.
5. Permaisuri Gresik Program, in Gresik Regency, East Java Province:
   a. Increases family economic well-being through business diversification of Permaisuri Hebat KSM (Small-owned Enterprise) by processing scrap fabric, thereby increasing its economic value.
   b. Strengthens the capacity of individuals and community groups through sewing trainings.

Positive Impacts of the CSV Program

1. Contribution to Poverty Alleviation:
   Empowering communities around the Company's operational areas to increase their incomes and reduce poverty levels.
2. Sustainable Agricultural Productivity:
   The agricultural program not only increases crop yields but also strengthens the farmers' capacity to manage land in an environmentally friendly manner.
3. Creating New Job Opportunities:
   Through training and capacity building, communities, especially farmers, are encouraged to create new jobs that support economic independence.

Future Commitments

PTPI is committed to continuously expanding its CSV program scope and development, to ensure its benefits are felt more widely by the community and the environment. In addition, the CSV program remains a key pillar in the Company's sustainability strategy, with an emphasis on creating consistent and sustainable social and environmental impacts.



Glosarium
Glossary

Entitas
Entities

Singkatan Abbreviation	Keterangan Description
BEL	PT Banyumas Energi Lestari
BKI	Biro Klasifikasi Indonesia
BPI Danantara	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency
BP BUMN	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprise Regulatory Agency
DAM	PT Danantara Asset Management
KAD	PT Kaltim Adhiguna Dermaga
KDM	PT Kaltim Daya Mandiri
KDM AE	PT KDM Agro Energi
KIE	PT Kaltim Industrial Estate
KIKC	PT Kawasan Industri Kujang Cikampek
KJS	PT Kaltim Jasa Sekuriti
PAL	PT Pusri Agro Lestari
PIHC	Pupuk Indonesia Holding Company
PIM	PT Pupuk Iskandar Muda
PKC	PT Pupuk Kujang
PKG	PT Petrokimia Gresik
PKT	PT Pupuk Kalimantan Timur
PKY	PT Petrokimia Kayaku
PSG	PT Petrosida Gresik
PSP	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PTPI	PT Pupuk Indonesia (Persero)
RDM	PT Rekind Daya Mamuju
RE	PT Rekayasa Engineering
Rekind	PT Rekayasa Industri
PIN	PT Pupuk Indonesia Niaga
Pilog	PT Pupuk Indonesia Logistik
PIP	PT Pupuk Indonesia Pangan
PIU	PT Pupuk Indonesia Utilitas
SU	PT Sigma Utama
YIN	PT Yasa Industri Nusantara
TIS	PT Tracon Industri Solusindo
OJK	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
BPK / BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Audit Board of the Republic of Indonesia
IAPI	Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesian Institute of Certified Public Accountants
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara State Financial Audit Standards
FHCI	Forum Human Capital Indonesia Indonesian Human Capital Forum
ISO	*International Organization for Standardization*
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi Corruption Eradication Commission

Istilah Keuangan
Financial Terms

Singkatan Abbreviation	Keterangan Description
Capex	*Capital Expenditure* (Belanja Modal)
DSCR	*Debt Service Coverage Ratio* (Rasio Cakupan Pembayaran Utang)
EBITDA	*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*
ICR	*Interest Coverage Ratio* (Rasio Cakupan Bunga)
CAGR	*Compound Annual Growth Rate* (Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan)
YoY	*Year on Year* (Tahun ke Tahun)
ROA	*Return on Asset*
ROE	*Return on Equity*
GPM	*Gross Profit Margin*
OPM	*Operating Profit Margin*
NPM	*Net Profit Margin*
PPh	Pajak Penghasilan Income Tax
PotPut	Pemotongan dan Pemungutan Withholding and Collection
PPN	Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax
WAPU	Wajib Pungut Collection Obligations
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenue
HET	Harga Eceran Tertinggi Maximum Retail Price

Satuan
Units

Singkatan Abbreviation	Keterangan Description
Rp	Rupiah
USD / AS$	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Ton	Metrik Ton Metric Ton
MMBTu	*Million British Thermal Units* (Satuan ukur untuk gas bumi) Million British Thermal Units (Unit of measurement for natural gas)
Ha	Hektare (Satuan luas lahan perkebunan/ pertanian) Hectares (Unit of agricultural land area)

Istilah Umum & Operasional
General and Operational Terms

Singkatan Abbreviation	Keterangan Description
AAE	*Assistant Account Executive* (Petugas lapangan PIHC) Assistant Account Executive (PIHC Field Officer)
BUMN	Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprises
Menko	Menteri Koordinator Coordinating Minister
DAP	Diamonium Fosfat Diammonium Phosphate
PTD	*Port to Door*
e-RDKK	Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Sistem pendataan petani) Electronic Definitive Group Needs Plan (Farmer Data Collection System)
ERM	*Enterprise Risk Management* (Manajemen Risiko Perusahaan)
ESG	*Environmental, Social, and Governance*
GCG	*Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)
i-Pubers	Integrasi Pupuk Bersubsidi (Aplikasi digital penyaluran pupuk subsidi) Subsidized Fertilizer Integration (Digital application for subsidized fertilizer distribution)
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety
RWP	*Respectful Workplace Policy*
KPI	*Key Performance Indicator* (Indikator Kinerja Utama)
KPKU	Kriteria Penilaian Kinerja Unggul Criteria for Assessing Excellent Performance
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara State Officials' Wealth Report
Lini I - IV	Sistem rantai pasok dan titik distribusi pupuk (dari Pabrik hingga Kios) Fertilizer Supply Chain System and Distribution Points (from Factory to Kiosk)
KCL	Kalium Klorida Potassium Chloride
MSCI	*Morgan Stanley Capital International* (Lembaga riset dan pemeringkat ESG global) Morgan Stanley Capital International (Research and Development Institute) (global ESG rating agency)
IARI	*Indonesia Agrichemical Research Institute*
MIT	*Massachusetts Institute of Technology*
NPK	Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Nitrogen, Phosphorus, and Potassium
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Indefinite-Term Employment Agreements
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Fixed-Term Employment Agreements
PROPER	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Environmental Management Company Performance Rating Program
PSN	Proyek Strategis Nasional National Strategic Projects
PSO	*Public Service Obligation* (Kewajiban Pelayanan Publik)
PUMK	Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Micro and Small Enterprise Funding
RKAP	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Company Work Plan and Budget
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholder
AGMS	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
SCM	*Supply Chain Management* (Manajemen Rantai Pasok)
SP-36	Super Phosphate 36% (Pupuk Fosfat) Super Phosphate 36% (Phosphate Fertilizer)
TJSL	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility
WBS	*Whistleblowing System* (Sistem Pelaporan Pelanggaran)
ZA	*Zwavelzure Ammoniak* (Pupuk Amonium Sulfat) Zwavelzure Ammoniak (Ammonium Sulfate Fertilizer)

Singkatan Abbreviation	Keterangan Description
ZK	*Zwavelzure Kali (Pupuk Kalium Sulfat)* Zwavelzure Kali (Potassium Sulfate Fertilizer)
EPC	*Engineering, Procurement & Construction*
AlF3	*Aluminium Fluorida* Aluminum Fluoride
CO2	Karbon Dioksida Carbon Dioxide
HCl	Asam Klorida Hydrochloric Acid
HPP	Harga Pokok Produksi Cost of Goods Sold
SVP	*Senior Vice President*
VP	*Vice President*
SPI / IAU	Satuan Pengawasan Intern Satuan Pengawasan Intern / Internal Audit Unit
KAP	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority Circular Letter
CGPI	*Corporate Governance Perception Index*
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Statement of Financial Accounting Standards
PUGKI	Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia General Guidelines for Indonesian Corporate Governance
RJPP	Rencana Jangka Panjang Perusahaan Company Long-Term Plan
AKHLAK	Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif BUMN core values
SDM / HC	Sumber Daya Manusia Human Capital
DDS	Digitalisasi dan Data Science Digitalization & Data Science
ERP	*Enterprise Resource Planning*
RSTI	Rencana Strategis Teknologi Informasi Information Technology Strategic Plan
ITSC	Komite Pengarah Teknologi Informasi IT Steering Committee
SLA	Perjanjian Tingkat Layanan Service Level Agreement
DRC	Pusat Pemulihan Bencana Disaster Recovery Center
SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System
WBMS	Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Management System
CSV	*Creating Shared Value*
CSR	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
UMK	Usaha Mikro dan Kecil Micro and Small Enterprises
PUD	Pelaku Usaha Distribusi Distribution Business Actor
KPL	Kios Pupuk Lengkap Authorized Fertilizer Kiosk / Fertilizer Shop
Gapoktan	Gabungan Kelompok Tani Association of Farmer Groups
Pokdakan	Kelompok Pembudidaya Ikan Fish Farmer Group
7T	Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Penerima Right Type, Right Quantity, Right Price, Right Place, Right Time, Right Quality, Right Target
NIK	Nomor Induk Kependudukan National Identity Number
TPB / SDGs	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals Sustainable Development Goals
SNI	Standar Nasional Indonesia Indonesian National Standard



07



Laporan Keuangan

Financial Statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2025 DAN 2024/
31 DECEMBER 2025 AND 2024

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2025 AND 2024 AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

1.	Nama	: Rahmad Pribadi	:	*Name* 1.
	Alamat Kantor	: Gedung PT Pupuk Indonesia (Persero) Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya Jakarta 11480	:	*Office Address*
	Alamat Domisili	: Jl. Tebet Mas Indah Blok F/3, Tebet Barat, Jakarta 12810	:	*Address of Domicile*
	Telepon	: +6221 536 54900	:	*Telephone*
	Jabatan	: Direktur Utama/*President Director*	:	*Title*
2.	Nama	: Wono Budi Tjahyono	:	*Name* 2.
	Alamat Kantor	: Gedung PT Pupuk Indonesia (Persero) Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya Jakarta 11480	:	*Office Address*
	Alamat Domisili	: Vila Bogor Indah CC. 10/29, Ciparigi, Kota Bogor	:	*Address of Domicile*
	Telepon	: +6221 536 54900	:	*Telephone*
	Jabatan	: Direktur Keuangan/ *Finance Director*	:	*Title*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak; / *We are responsible for the preparation and presentation of PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements;*

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information in the PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak. / *We are responsible for PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *Thus this statement is made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi. / *For and on behalf of the Board of Directors.*

Jakarta, 8 Mei/*May* 2026

Rahmad Pribadi
Direktur Utama/
President Director

Wono Budi Tjahyono
Direktur Keuangan/
Finance Director

Laporan/*Report* No. 00890/2.1457/AU.1/04/1784-2/1/V/2026

Laporan auditor independen
Kepada para Pemegang Saham

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent auditors' report
To the Shareholders of

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901/3119 2901
F: +62 (21) 5290 5555/5290 5050

Nomor Ijin Usaha: KEP-315/KM.1/2024

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

Pengukuran nilai tercatat aset dan liabilitas berkaitan dengan basis akuntansi kelangsungan usaha PT Rekayasa Industri ("Rekind")

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian, pertimbangan signifikan diperlukan untuk menelaah ketepatan dari penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha dalam pengukuran nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind per 31 Desember 2025. Penilaian ini melibatkan pertimbangan atas kondisi-kondisi tertentu yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Rekind untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, antara lain:

- Pelanggaran beberapa ketentuan rasio keuangan terkait fasilitas pinjaman dengan beberapa bank;
- Modal kerja negatif sebesar Rp2.192.682 juta pada 31 Desember 2025; dan
- Akumulasi kerugian sebesar Rp5.425.800 juta pada 31 Desember 2025.

Kondisi-kondisi ini berdampak pada apakah nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind telah diukur secara tepat pada laporan keuangan konsolidasian Grup berdasarkan asumsi basis akuntansi kelangsungan usaha, dimana memerlukan pertimbangan signifikan. Berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut, Rekind bergantung pada dukungan dari kreditur dan pemasok yang ada melalui penundaan pembayaran liabilitas dan kemampuannya untuk memperbaiki kinerja serta kondisi keuangannya.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows:

Measurement of the carrying value of assets and liabilities in relation to the going concern basis of accounting of PT Rekayasa Industri ("Rekind")

As disclosed in Note 37 to the consolidated financial statements, significant judgement is required in assessing the appropriateness of the going concern basis of accounting used in measuring the carrying values of Rekind's assets and liabilities as at 31 December 2025. This assessment involved consideration of certain conditions that may cast significant doubt on Rekind's ability to continue as a going concern, including:

- *Breach of certain financial ratio covenants related to borrowing facilities with several banks;*
- *Negative working capital of Rp2,192,682 million as at 31 December 2025; and*
- *Accumulated loss of Rp5,425,800 million as at 31 December 2025.*

These conditions impact whether Rekind's carrying value of assets and liabilities has been properly measured in the Group's consolidated financial statements based on the going concern basis of accounting assumption, which requires significant judgement. With respect to the conditions above, Rekind is reliant on the support from existing lenders and vendors in deferring the payment of its liabilities and its ability to improve its performance and financial condition.

Kami mengidentifikasi ini sebagai hal audit utama karena dampak signifikan yang mungkin timbul dari penyesuaian nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind yang disebabkan oleh ketidakpastian material atas keberhasilan rencana manajemen Rekind untuk memperbaiki kinerja dan kondisi keuangannya.

We identified this as a key audit matter due to the significant impact that may arise from adjustments to the carrying value of Rekind's assets and liabilities caused by the material uncertainty of the success of Rekind management's plans to improve Rekind's performance and financial condition.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

How our audit addressed the key audit matter

Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:

- Kami menelaah penilaian manajemen terkait pengukuran nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind pada 31 Desember 2025 berdasarkan basis akuntansi kelangsungan usaha yang diterapkan oleh manajemen Rekind;
- Kami memperoleh pemahaman penilaian manajemen Rekind terkait kelangsungan usaha. Ini termasuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal Rekind dan proses sehubungan dengan penyusunan proyeksi arus kas dan menilai risiko bawaan atas salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan proyeksi arus kas;
- Kami membandingkan asumsi-asumsi kunci yang digunakan dalam proyeksi arus kas, antara lain termasuk estimasi pendapatan dan beban di masa depan beserta sumber pendanaan, dengan data pendukung dan tren historis;
- Kami menelaah kemajuan pelaksanaan Rencana Penyelamatan Perusahaan; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Our audit procedures included the following:

- *We assessed management's assessment related to the carrying value measurement of Rekind's assets and liabilities as at 31 December 2025 based on the going concern basis of accounting applied by Rekind management;*
- *We understood Rekind management's going concern assessment. This included understanding Rekind's internal controls and processes in relation to the preparation of cash flow projections and assessing the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and judgement involved in preparing the cash flow projections;*
- *We compared the key assumptions used in the cash flow projections, which include the future estimated revenue and expenses as well as source of financing, against supporting data and historical trends;*
- *We assessed the implementation progress of the Corporate Recovery Plan; and*
- *We assessed the adequacy of the disclosures in the consolidated financial statements in accordance with the requirements of Indonesian Financial Accounting Standards.*

Informasi lain

Other information

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung inkonsistensi material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Merencanakan dan melaksanakan audit grup untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau unit bisnis dalam grup sebagai basis untuk merumuskan opini atas laporan keuangan grup. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan penelaahan atas pelaksanaan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business units within the group as a basis for forming an opinion on the group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Jakarta,
8 Mei/*May* 2026

Heryanto, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1784

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4	11,822,634	17,278,272	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha:	5			*Trade receivables:*
- Pihak berelasi		417,724	516,725	*Related parties -*
- Pihak ketiga		1,896,152	1,933,974	*Third parties -*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	6a	11,224,770	1,165,380	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia*
Piutang subsidi yang belum ditagih	6c	912,589	930,933	*Unbilled subsidy receivables*
Piutang lainnya:				*Other receivables:*
- Pihak berelasi		29,670	36,686	*Related parties -*
- Pihak ketiga		158,526	41,802	*Third parties -*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	7	192,643	369,944	*Construction contract work in progress - due from customers*
Persediaan	8	13,970,264	13,720,295	*Inventories*
Uang muka dan beban dibayar di muka		1,111,136	392,294	*Advances and prepayments*
Pajak dibayar di muka:	10a			*Prepaid taxes:*
- Pajak penghasilan badan		60,999	365,855	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		541,877	447,042	*Other taxes -*
Aset lancar lainnya	9	11,244,718	13,144,598	*Other current assets*
Jumlah aset lancar		53,583,702	50,343,800	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang lainnya - tidak lancar		2,074	18,462	*Other receivables - non-current*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia - tidak lancar	6a	419,242	452,313	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia - non-current*
Pajak dibayar di muka - tidak lancar:	10a			*Prepaid taxes - non-current:*
- Pajak penghasilan badan		440,967	630,818	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		873,376	747,640	*Other taxes -*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama		2,285,095	1,927,194	*Investment in associates and joint ventures*
Properti investasi		3,965,449	1,956,409	*Investment properties*
Aset tetap	11	84,562,281	79,680,596	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	10d	384,435	273,360	*Deferred tax assets*
Aset imbalan pascakerja	18b	695,330	654,558	*Post-employment benefits assets*
Aset tidak lancar lainnya		2,970,874	2,611,505	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		96,599,123	88,952,855	*Total non-current assets*
JUMLAH ASET		**150,182,825**	**139,296,655**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka pendek	15	2,529,628	4,209,975	*Short-term bank loans*
Utang usaha:	12			*Trade payables:*
- Pihak berelasi		568,888	338,205	*Related parties -*
- Pihak ketiga		2,837,380	1,997,138	*Third parties -*
Kelebihan subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia	6b	62,002	1,435,708	*Excess of subsidy paid by the Government of Indonesia*
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi		3,538	5,040	*Amounts due to customers for construction contract work*
Utang lainnya	13	1,676,961	1,264,821	*Other payables*
Utang pajak:	10b			*Taxes payables:*
- Pajak penghasilan badan		415,796	207,819	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		502,108	410,974	*Other taxes -*
Liabilitas yang masih harus dibayar	14a	9,923,722	9,543,703	*Accrued expenses*
Provisi	14b	1,573,629	860,530	*Provisions*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	18a	2,635,226	2,638,986	*Short-term employee benefit liabilities*
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang:				*Current portion of non-current borrowings:*
- Pinjaman bank dan lainnya	16	2,003,210	1,376,976	*Bank and other loans -*
- Utang obligasi	17	1,599,942	857,394	*Bonds payable -*
- Liabilitas sewa		193,277	138,920	*Lease liabilities -*
Jumlah liabilitas jangka pendek		26,525,307	25,286,189	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman jangka panjang:				*Non-current borrowings:*
- Pinjaman bank dan lainnya	16	14,244,908	7,986,445	*Bank and other loans -*
- Utang obligasi	17	1,224,701	2,823,534	*Bonds payable -*
- Liabilitas sewa		179,797	115,362	*Lease liabilities -*
Liabilitas imbalan pascakerja	18b	3,368,006	2,701,672	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	10d	567,610	828,425	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya		614,961	194,302	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang		20,199,983	14,649,740	*Total non-current liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**46,725,290**	**39,935,929**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/3 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owner of the parent entity***
Modal saham - modal dasar 100.000.000 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 25.000.000 lembar dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	19	25,000,000	25,000,000	*Share capital - authorised 100,000,000 shares; issued and fully paid 25,000,000 shares at a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share*
Saldo laba:				*Retained earnings:*
- Ditentukan penggunaannya		44,741,784	39,018,434	*Appropriated -*
- Belum ditentukan penggunaannya		2,279,491	5,412,512	*Unappropriated -*
Komponen ekuitas lainnya		31,221,005	29,656,092	*Other components of equity*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		103,242,280	99,087,038	*Total equity attributable to owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		215,255	273,688	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**103,457,535**	**99,360,726**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**150,182,825**	**139,296,655**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA				***SALES AND OTHER REVENUES***
Penjualan produk	22	48,118,045	44,202,966	*Sales of products*
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia	23	39,507,147	33,323,915	*Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia*
Pendapatan jasa	24	2,776,457	4,089,327	*Rendering of services*
Jumlah penjualan dan pendapatan		**90,401,649**	**81,616,208**	***Total sales and revenue***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	25	(75,013,927)	(65,590,416)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**15,387,722**	**16,025,792**	***GROSS PROFIT***
Beban penjualan	26	(920,334)	(1,039,742)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	27	(5,551,810)	(5,970,735)	*General and administrative expenses*
(Beban)/pendapatan lainnya - bersih	28	(443,404)	3,677,940	*Other (expense)/income - net*
		(6,915,548)	(3,332,537)	
LABA OPERASI		**8,472,174**	**12,693,255**	***OPERATING PROFIT***
Pendapatan keuangan		1,160,425	1,026,960	*Finance income*
Biaya keuangan	29	(1,372,451)	(1,917,934)	*Finance costs*
Bagian atas rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama		(342,126)	(581,710)	*Share of net loss of associates and joint ventures*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**7,918,022**	**11,220,571**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	10c	(2,405,237)	(2,334,533)	*Income tax expenses*
LABA TAHUN BERJALAN		**5,512,785**	**8,886,038**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak		49,059	73,991	*Difference in foreign currency arising from translation of the financial statements of subsidiaries*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti	18b	(520,236)	(408,978)	*Remeasurement loss on defined benefit plans*
Surplus revaluasi aset	11	1,928,798	-	*Asset surplus revaluation*
Lainnya		(7,160)	(7,298)	*Others*
Manfaat pajak penghasilan terkait	10d	114,452	89,975	*Related income tax benefit*
		1,515,854	(326,301)	
JUMLAH PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		**1,564,913**	**(252,310)**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR AFTER TAX***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**7,077,698**	**8,633,728**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		5,535,884	8,668,906	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		(23,099)	217,132	*Non-controlling interests*
		5,512,785	**8,886,038**	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		7,100,797	8,416,596	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		(23,099)	217,132	*Non-controlling interests*
		7,077,698	**8,633,728**	
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK - DASAR DAN DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	**20**	**221,435**	**346,756**	***EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNER OF THE PARENT ENTITY - BASIC AND DILUTED (in full Rupiah)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owner of the parent entity*										
			Saldo laba/ Retained earnings		Komponen ekuitas lainnya/ *Other components of equity*							
	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Difference in foreign currency due to translation of financial statements*	Surplus revaluasi aset/ *Assets revaluation surplus*	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ *Remeasurement on defined benefit plans*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada 1 Januari 2024		**25,000,000**	**34,031,056**	**2,944,386**	**241,067**	**32,160,334**	**(2,567,181)**	**74,182**	**91,883,844**	**81,334**	**91,965,178**	***Balance as at 1 January 2024***
Pencadangan laba ditahan	21	-	4,987,378	(4,987,378)	-	-	-	-	-	-	-	*Appropriation of retained earnings*
Dividen kas	21	-	-	(1,213,402)	-	-	-	-	(1,213,402)	(24,778)	(1,238,180)	*Cash dividend*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	8,668,906	73,991	-	(319,003)	(7,298)	8,416,596	217,132	8,633,728	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada 31 Desember 2024		**25,000,000**	**39,018,434**	**5,412,512**	**315,058**	**32,160,334**	**(2,886,184)**	**66,884**	**99,087,038**	**273,688**	**99,360,726**	***Balance as at 31 December 2024***
Pencadangan laba ditahan	21	-	5,723,350	(5,723,350)	-	-	-	-	-	-	-	*Appropriation of retained earnings*
Dividen kas	21	-	-	(2,945,555)	-	-	-	-	(2,945,555)	(35,334)	(2,980,889)	*Cash dividend*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	5,535,884	49,059	1,928,798	(405,784)	(7,160)	7,100,797	(23,099)	7,077,698	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada 31 Desember 2025		**25,000,000**	**44,741,784**	**2,279,491**	**364,117**	**34,089,132**	**(3,291,968)**	**59,724**	**103,242,280**	**215,255**	**103,457,535**	***Balance as at 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/1 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	52,952,000		49,452,261	*Receipts from customers*
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia	29,199,757	6a	42,291,595	*Receipts of fertiliser subsidy from the Government of Indonesia*
Penerimaan pendapatan keuangan	1,141,458		1,029,782	*Receipts from finance income*
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	530,517		70,197	*Receipts from corporate income tax restitutions*
Penerimaan klaim asuransi	-		233,540	*Receipt from insurance claim*
Pembayaran kepada pemasok	(67,959,659)		(57,652,339)	*Payments to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(7,852,094)		(7,620,292)	*Payments to employees*
Pembayaran utang subsidi ke Pemerintah Indonesia	(1,749,802)	6a	-	*Payment of subsidy payable to the Government of Indonesia*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(2,490,508)		(2,247,193)	*Payments of corporate income tax*
Pembayaran beban keuangan dan transaksi utang obligasi	(1,387,224)		(1,896,893)	*Payment of finance cost and bonds payable transaction*
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	4,185,122		5,809,623	*Withdrawal of restricted cash*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(2,469,587)		(6,981,618)	*Placement of restricted cash*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	4,099,980		22,488,663	*Net cash flows generated from operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	100,120		74,211	*Receipts of dividend from associates*
Pembelian aset tetap	(10,554,637)		(8,556,724)	*Purchase of fixed assets*
Penempatan deposito berjangka	(4,836,600)		(6,772,514)	*Placement of time deposits*
Pencairan deposito berjangka	5,074,100		4,218,752	*Withdrawal of time deposits*
Pelepasan investasi asosiasi	-		30,000	*Disposal of investment in associates*
Penerimaan atas penjualan aset tetap	42	11	44,665	*Receipts from sale of fixed assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(10,216,975)		(10,961,610)	*Net cash flows used in investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	12,523,575	33b	18,276,737	*Proceeds from short-term bank loans*
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(14,206,292)	15, 33b	(17,973,760)	*Repayments of short-term bank loans*
Penerimaan pinjaman jangka panjang	9,864,360	33b	2,313,012	*Proceeds from non-current borrowings*
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(3,074,328)	16, 33b	(9,645,714)	*Repayments of non-current borrowings*
Penerimaan utang salam	-	33b	150,000	*Proceeds from salam payables*
Pembayaran utang salam	(150,000)	33b	-	*Repayments of salam payables*
Pembayaran dividen kepada entitas non-pengendali	(35,333)		(24,778)	*Payment of dividends to non-controlling interest*
Pembayaran utang obligasi	(857,835)	33b	(2,435,000)	*Repayments of bonds payable*
Pembayaran liabilitas sewa	(492,985)	33b	(376,183)	*Repayment of lease liabilities*
Pembayaran dividen kas	(2,945,555)	21	(1,213,402)	*Payment of cash dividends*
Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	625,607		(10,929,088)	*Net cash flows generated from/(used in) financing activities*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/2 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(5,491,388)**		**597,965**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	35,750		94,891	*Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents*
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**17,278,272**	4	**16,585,416**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**11,822,634**	4	**17,278,272**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 33a.

Additional information regarding non-cash activities is presented in Note 33a.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/1 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), dahulu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960 dan Tambahan Berita Negara No. 186. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta.

Nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) telah berubah menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan akta notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, No. 3 tanggal 3 April 2012, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 April 2012 dengan Surat Keputusan No. AHU-17695.AH.01.02 tahun 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dimuat dalam akta notaris No. 02 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H. perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dimana pemegang saham menyetujui perubahan modal dasar Perusahaan yang terdiri dari 100.000.000 saham tanpa alokasi jenis saham, menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 99.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (jumlah penuh).

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Nomor 121 tanggal 22 Maret 2025, Pemerintah mengalihkan kepemilikan 24.999.999 Saham Seri B, atau 99,99% saham Perusahaan, kepada PT Danantara Asset Management (Persero) ("DAM") melalui proses penyertaan saham inbreng.

Pemerintah tetap berkedudukan sebagai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan (*Ultimate Beneficial Owner*) melalui kepemilikan langsung 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan kepemilikan tidak langsung saham Seri B melalui DAM.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. GENERAL

a. The Company's establishment

PT Pupuk Indonesia (Persero) (the "Company"), formerly PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), is a State-Owned Enterprise which was established based on notarial deed No. 177 dated 24 December 1959, of Eliza Pondaag and published in the State Gazette No. 46 dated 7 June 1960 and State Gazette Suplement No. 186. The head office of the Company is located at Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta.

The name of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was changed to PT Pupuk Indonesia (Persero) based on notarial deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, No. 3 dated 3 April 2012, which was approved by the Minister of Law and Human Rights on 5 April 2012 by Decree No. AHU-17695.AH.01.02 year 2012.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by notarial deed No. 02 dated 20 March 2025, made by Lumassia, S.H regarding the Changes in Share Types and Changes of the Articles of Association of the Company, where the shareholders approved the change in the Company's authorised share capital which consist of 100,000,000 shares without allocation of share types, into 1 Series A Dwiwarna share and 99,999,999 Series B shares, each with a nominal value amounting to Rp1,000,000 (full amount).

Based on Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 121 dated 22 March 2025, the Government transferred its ownership of 24,999,999 Series B shares, representing 99.99% of the Company's shares, to PT Danantara Asset Management (Persero) ("DAM") through a capital contribution in form of an inbreng transaction.

Government of Indonesia remains the ultimate controlling shareholder of the Company (Ultimate Beneficial Owner) through the direct ownership of one Series A Dwiwarna share with special rights and the indirect ownership of Series B shares through DAM.

In accordance with the Company's Articles of Association, the aims, objectives, and business activities of the Company are to engage in business in the following fields:

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/2 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

a) perdagangan besar;
b) aktivitas perusahaan *holding*;
c) aktivitas kantor pusat;
d) industri;
e) jasa konsultasi manajemen;
f) penelitian dan pengembangan;
g) kawasan industri;
h) reparasi;
i) pergudangan dan penyimpanan;
j) ekspedisi;
k) konstruksi;
l) pengadaan listrik; dan
m) pertambangan batu bara, lignit, serta mineral.

b. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") telah disusun dan disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2026.

c. Struktur Grup

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, struktur Grup adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. The Company's establishment (continued)

a) trade sector;
b) holding company activities;
c) head office activities;
d) industry;
e) management consulting services;
f) research and development;
g) industrial estate sector;
h) repair sector;
i) warehousing and storage sector;
j) expedition sector;
k) construction sector;
l) electricity supply sector; and
m) coal, lignite and mineral mining sector.

b. Completion of the consolidated financial statements

The Company and its subsidiaries' (collectively referred to as the "Group") consolidated financial statements were prepared and authorised for issuance by the Company's Board of Directors on 8 May 2026.

c. Group structure

As at 31 December 2025 and 2024, the structure of the Group were as follows:

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)*	
				31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/*Held directly by the Company*							
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	Gresik	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1971	99.99	99.99	42,725,536	39,982,278
PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	Bontang	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1985	99.99	99.99	39,401,788	38,110,873
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")	Palembang	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	2011	99.99	99.99	32,198,389	25,535,320
PT Pupuk Kujang ("PKC")	Cikampek	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1975	99.99	99.99	10,678,944	10,819,908
PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	Aceh	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1982	99.99	99.99	8,354,330	8,593,949
PT Rekayasa Industri ("Rekind")	Jakarta	Konstruksi/ *Construction*	1981	99.11	99.11	6,193,315	6,237,356
PT Pupuk Indonesia Logistik ("Pilog")	Jakarta	Logistik/ *Logistics*	2013	100.00	100.00	540,504	628,791
PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN")	Jakarta	Konstruksi dan lain-lain/ *Construction and others*	1970	100.00	100.00	431,675	651,162
PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	2015	100.00	100.00	78,922	83,678

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/3 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

***1. GENERAL** (continued)*

***c. Group structure** (lanjutan)*

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)*	
				31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024
Dimiliki melalui PKG/*Held through PKG*							
PT Petrosida Gresik ("PSG")	Gresik	Produksi, distribusi, dan perdagangan bahan aktif pestisida serta bertindak sebagai distributor pupuk/ *Producing, distributing and trading the active ingredients of pesticides and also as a distributor of fertilizer*	1983	99.99	99.99	646,309	845,612
PT Petrokimia Kayaku ("PKY")	Gresik	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida/*Producing, formulating and marketing pesticide*	1976	60.00	60.00	1,067,850	1,039,720
Dimiliki melalui PKC/*Held through PKC*							
PT Kawasan Industri Kujang Cikampek ("KIKC")	Cikampek	Pengelolaan kawasan industri/ *Managing industrial area*	1990	96.19	96.19	90,449	98,441
PT Sintas Kurama Perdana ("SKP")	Cikampek	Perdagangan, jasa dan pergudangan sektor industri kimia/ *Trading, services and warehousing related to chemical industry*	1988	99.00	99.00	96,952	94,651
Dimiliki melalui PKT/*Held through PKT*							
PT Kaltim Industrial Estate ("KIE")	Bontang	Pengelolaan kawasan industri/*Managing industrial area*	1991	99.99	99.99	1,435,438	1,291,506
PT Kaltim Adhiguna Dermaga ("KAD")	Bontang	Penyedia jasa bongkar muat/*Providing loading and unloading services*	1990	50.99	50.99	88,748	78,756
PT Kaltim Jasa Sekuriti ("KJS")	Bontang	Jasa pengamanan/ *Security services*	2002	70.00	70.00	59,861	50,157
Dimiliki melalui PIM/*Held through PIM*							
PT PIM Prima Medika	Lhokseumawe	Rumah Sakit/ *Hospital*	2017	96.00	96.00	39,520	40,722
Dimiliki melalui PSP/*Held through PSP*							
PT Pusri Agro Lestari ("PAL")	Jakarta	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida dan produk agrokimia lainnya/*Producing, formulating and marketing pesticide and other agrochemical products*	2015	51.00	51.00	36,335	55,480
Dimiliki melalui Rekind/*Held through Rekind*							
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangunan pembangkit tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik/ *Construction of power plants, sale of electrical power and distribution of electrical power*	2013	90.00	90.00	1,562,529	1,699,369
PT Tracon Industri	Jakarta	Penyedia jasa konsultasi dan perdagangan/ *Consulting services and general trading*	2001	80.00	80.00	574,461	327,070
PT Rekayasa Engineering ("RE")	Jakarta	Penyedia jasa teknik dan *engineering*/ *Technical and engineering services*	2001	80.00	80.00	315,864	298,432

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

1. *GENERAL (continued)*

c. *Group structure (lanjutan)*

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December* 2025	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December* 2024	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)* 31 Desember/ *December* 2025	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)* 31 Desember/ *December* 2024
Dimiliki melalui Rekind/*Held through Rekind* (lanjutan)							
PT Yasa Industri Nusantara ("YIN")	Jakarta	Perancangan dan perencanaan konstruksi, penyediaan dan pengawasan peralatan/ *Design and plan for construction, construction equipment and maintenance*	1999	99.67	99.67	89,577	81,028
PT Rekayasa Cakrawala Resources	Jakarta	Penyedia jasa rekrutmen, pelatihan, konsultasi dan pendidikan/ *Recruitment services, training, consulting and education*	2006	51.00	51.00	109,539	104,733
PT Puspetindo	Gresik	Industri logam dan permesinan umum/ *Metal industry and general machinery*	1991	91.38	91.38	82,829	72,572
PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU")[a)]	Jakarta	Pengelolaaan usaha industri, pembangunan, perdagangan dan jasa dibidang energi/ *Managing industry business, development, trading and services in energy sector*	2014	100.00	100.00	1,640,278	1,709,680
PT Rekayasa Industri Engineering and Construction ("Rekind E&C)	Jakarta	Penyedia jasa *engineering*, pengadaan dan konstruksi/ *Technical engineering, procurement and construction*	2014	80.00	80.00	82,156	85,171
Rekind Malaysia Sdn. Bhd.	Malaysia	Penyedia jasa teknik perancangan dan pengadaan/*Technical engineering and procurement services*	2014	100.00	100.00	499	12,667
PT Tracon Industri Solusindo ("TIS")	Jakarta	Penilaian, Audit Energi, *Project Management Consultant* ("PMC"), desain rekayasa/ *Assessment, Audit Energy, PMC, engineering design*	2019	98.00	98.00	12,673	14,315
PT Kaltim Daya Mandiri ("KDM") [d)]	Bontang	Produsen listrik dan utilitas/*Electricity and utilities producers*	2002	95.00	95.00	663,138	666,138
PT KDM Agro Energi ("KDM AE") [c)]	Bontang	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	2011	-	99.98	-	42,321
PT Banyumas Energi Lestari ("BEL")	Purwokerto	Pembangkit listrik/ *Electricity power plants*	[b)]	51.00	51.00	2,745	2,745
Dimiliki melalui PIN/*Held through PIN*							
PT Sigma Utama ("SU")	Cibinong	Manufaktur cat/ *Paint manufacturing*	1982	99.91	99.91	106,203	115,753

a) Perusahaan menyerahkan kepemilikan sahamnya di PIU kepada Rekind di bulan Desember 2024 melalui transaksi inbreng saham.
b) Belum beroperasi secara komersial.
c) Dalam proses likuidasi.
d) KDM telah mengalami kehilangan pengendalian atas KDM AE pada tahun 2025 karena proses likuidasi dimana pemegang saham telah memberikan kewenangan penuh kepada likuidator yang telah ditunjuk dan telah mendaftarkan keputusan likuidasi tersebut kepada Kementerian Hukum.

a) The Company transferred its share ownership in PIU to Rekind in December 2024 through a share inbreng transaction.
b) Not yet operated commercially.
c) In liquidation process.
d) KDM has lost its control over KDM AE in 2025 due to liquidation process, whereby the shareholders granted full authority to the appointed liquidator and the liquidation was duly registered with the Ministry of Law.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/5 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

d. Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee

The composition of the Company's Board of Commissioners as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

31 Desember/*December* 2025

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Sudaryono	*President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Irfan Ahmad Fauzi	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Rachlan S. Nashidik	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Chrisna Deva Priyapratama	*Independent Commissioner*
Komisaris	Iwan Sumule	*Commissioner*
Komisaris	Nurul Ichwan	*Commissioner*
Komisaris	Yovie Widianto	*Commissioner*
Komisaris	Suwandi	*Commissioner*

31 Desember/*December* 2024

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Darmin Nasution	*President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mustoha Iskandar	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Riswinandi	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Danar Rahmanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Irfan Ahmad Fauzi	*Independent Commissioner*
Komisaris	Febrio Nathan Kacaribu	*Commissioner*
Komisaris	Anwar Sanusi	*Commissioner*
Komisaris	Ari Dwipayana	*Commissioner*
Komisaris	Farhat Brachma	*Commissioner*
Komisaris	Suwandi	*Commissioner*

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Directors as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

31 Desember/*December* 2025

Direktur		***Directors***
Direktur Utama	Rahmad Pribadi	*President Director*
Direktur Operasi	Dwi Satriyo Annurogo	*Operation Director*
Direktur Keuangan	Wono Budi Tjahyono	*Finance Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	Tina T. Kemala Intan	*Human Resource Director*
Direktur *Supply Chain*	Robby Setiabudi Madjid	*Supply Chain Director*
Direktur Teknik & Pengembangan Bisnis	Jamsaton Nababan	*Engineering and Business Development Director*
Direktur Manajemen Aset	Tri Wahyudi Saleh	*Asset Management Director*
Direktur Manajemen Risiko	Ninis Kesuma Adriani	*Risk Management Director*

31 Desember/*December* 2024

Direktur		***Directors***
Direktur Utama	Rahmad Pribadi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Gusrizal	*Vice President Director*
Direktur Produksi	Bob Indiarto	*Production Director*
Direktur Keuangan	Wono Budi Tjahyono	*Finance Director*
Direktur Transformasi Bisnis	Panji Winanteya Ruky	*Business Transformation Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	Tina T. Kemala Intan	*Human Resource Director*
Direktur Pemasaran	Tri Wahyudi Saleh	*Marrketing Director*
Direktur Portfolio dan Pengembangan Usaha	Jamsaton Nababan	*Portfolio and Business Development Director*
Direktur Manajemen Risiko	Ninis Kesuma Adriani	*Risk Management Director*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/6 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit (lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. *GENERAL* *(continued)*

d. Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee *(continued)*

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

31 Desember/*December* 2025

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Rachlan S. Nashidik	*Chairman*
Wakil Ketua	Nurul Ichwan	*Vice Chairman*
Anggota	Arief Ibnu Nugroho	*Member*
Anggota	Tubagus Donny Syafardan	*Member*

31 Desember/*December* 2024

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Mustoha Iskandar	*Chairman*
Wakil Ketua I	Febrio Nathan Kacaribu	*Vice Chairman I*
Wakil Ketua II	Suwandi	*Vice Chairman II*
Wakil Ketua III	Danar Rahmanto	*Vice Chairman III*
Anggota	R.M. Wiratmoko Prasidhanto	*Member*
Anggota	Tubagus Donny Syafardan	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah karyawan tetap Grup masing-masing sebanyak 7.882 dan 7.712 karyawan (tidak diaudit).

As at 31 December 2025 and 2024, the Group had 7,882 and 7,712 employees (unaudited), respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Peraturan No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi terkait revaluasi tanah (aset tetap), dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") and the Regulations and Guidelines No. VIII.G.7 concerning Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority ("OJK").

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, as modified for revaluation of land (fixed assets), and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and other comprehensive income, and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/7 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan dinyatakan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan di Catatan 3.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Penerapan dari standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 namun tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya adalah sebagai berikut:
- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amandemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - kekurangan ketertukaran.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:
- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan.
- PSAK 338: "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" (Revisi 2025).

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:
- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

a. *Basis of preparation of the consolidated financial statements* *(continued)*

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 3.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Changes to the SFAS and IFAS

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2025 but did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods are as follows:
- *SFAS 117: Insurance Contracts;*
- *Amendment of SFAS 221: Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability.*

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2026, but early adoption is permitted, are as follows:
- *Amendments of SFAS 109 and SFAS 107: Classification and Measurement of Financial Instruments.*
- *SFAS 338: "Business Combinations of Entities Under Common Control" (Revised 2025)*

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2027, but early adoption is permitted, are as follows:
- *SFAS 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional." PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

Meskipun PSAK 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar di atas, yang telah diterbitkan namun belum berlaku, pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

(i) Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***a. Basis of preparation of the consolidated financial statements** (continued)*

***Changes to the SFAS and IFAS** (continued)*

SFAS 118 supersedes SFAS 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss." It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including Management-defined Performance Measures (MPMs), allowing investors to understand management's view of the company's financial performance and how these measures compare to those defined in SFAS 118.

Even though SFAS 118 will not impact the recognition or measurement of items in the financial statements, its impacts on presentation and disclosure are expected to be pervasive, in particular those related to the statement of financial performance and providing MPM within the financial statements.

As at 31 December 2025, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation of above standards issued, but not yet effective, on the Group's consolidated financial statements.

b. Principles of consolidation

(i) Subsidiaries

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/9 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 109, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi atas kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

***(i) Subsidiaries** (continued)*

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination achieved in stages, at the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that are deemed to be an asset or liability are recognised in accordance with SFAS 109, in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition date fair value of any previously held interest in the acquiree over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset bersih yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor. Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal tahun komparatif penyajian pelaporan keuangan.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

(ii) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

***(i) Subsidiaries** (continued)*

A business combination transaction between entities under common control is accounted for in accordance with SFAS 338: Business Combination of Entities Under Common Control. The difference between transfer price paid and carrying value of net assets acquired is presented as additional paid-in capital. The financial statement items of the combined entities are consolidated to the Group's consolidated financial statements as if the combination had occurred from the beginning of the comparative financial reporting year presented.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

(ii) Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of profit or loss. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/11 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi (lanjutan)

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi secara tepat.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama" di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

***(ii) Associates** (continued)*

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the difference to "share of net profit/(loss) of associates and joint ventures" in profit of loss. Unrealised lossess are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates are changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's financial statements only for the portion of other investors' interest in the associates.

Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognised in profit or loss.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/12 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(iii) Pengaturan bersama

Menurut PSAK 111, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Pada tanggal pelaporan, Grup hanya memiliki ventura bersama.

Ventura bersama

Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian Grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

c. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

(iii) Joint arrangements

Under SFAS 111, investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. At the reporting date, the Group only has joint ventures.

Joint ventures

Joint ventures are accounted for using the equity method. Under the equity method, interests in joint ventures are initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses and movements in other comprehensive income. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint venture (which includes any long-term interest that, in substance, forms part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated for the portion of the Group's interest in the joint ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures are changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

c. Foreign currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah currency, which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Group.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/13 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

(i) Mata uang fungsional dan penyajian (lanjutan)

Untuk tujuan konsolidasi, entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional berbeda, maka aset dan liabilitas entitas anak Grup tersebut ditranslasikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Sementara itu, pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata dari kurs tengah Bank Indonesia selama periode laporan laba rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak Grup tersebut ke dalam Rp disajikan dalam akun "Komponen ekuitas lainnya" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rp disesuaikan untuk mencerminkan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui di dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (nilai penuh):

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Foreign currency translation** (continued)*

***(i) Functional and presentation currency** (continued)*

For consolidation purposes, the Group's subsidiaries that have different functional currency, the Group's subsidiaries' assets and liabilities are translated using the Bank of Indonesia middle rate at the end of each reporting period. Revenue and expenses are translated using the average of the Bank of Indonesia middle rate during profit or loss period.

The difference arising from the translation of the Group's subsidiaries' financial statements into Rp is presented as "Other components of equity" account in the equity section of the consolidated statement of financial position.

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transactions.

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the reporting dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full amount):

	2025	2024	
Euro ("EUR")	19,753	16,851	*Euro ("EUR")*
Dolar Amerika Serikat ("USD")	16,782	16,162	*United States Dollar ("USD")*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya disajikan pada akun "aset lancar lainnya" apabila jatuh temponya kurang dari satu tahun dan "aset tidak lancar lainnya" apabila jatuh temponya lebih dari satu tahun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya juga disajikan pada akun "aset lancar lainnya" dan "aset tidak lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Piutang

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang lainnya merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi cadangan atas penurunan nilai.

Piutang lainnya dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

Sesuai peraturan OJK, piutang lainnya dari pihak berelasi disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada kondisi tertentu pada piutang lainnya dari pihak berelasi untuk disajikan sebagai aset lancar.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Time deposits with original maturity of more than three months at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted are presented as "other current assets" if mature less than one year and "other non-current assets" if mature more than one year in the consolidated statement of financial position.

Cash in banks and time deposits that are restricted are also presented as "other current assets" and "other non-current assets" in the consolidated statement of financial position.

e. Receivables

(i) Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are receivables arising from transactions outside of the ordinary course of business. If collection of the trade receivables is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to the related parties of the Group.

In accordance with OJK regulation, other receivables from related parties are classified as non-current assets unless there are specific circumstances ruled these other receivables from related parties to be presented as current assets.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/15 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Piutang (lanjutan)

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya (lanjutan)

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lainnya ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan piutang digunakan untuk mencatat dampak kerugian kredit ekspektasian, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban umum dan administrasi" pada laba rugi. Ketika piutang usaha dan piutang lainnya, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, diakui sebagai "Pendapatan lainnya - bersih" pada laba rugi.

(ii) Piutang subsidi, utang subsidi dan piutang subsidi yang belum ditagih dari dan ke Pemerintah Indonesia

Piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk bersubsidi.

Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia diakui berdasarkan harga pupuk bersubsidi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK-RI") dan estimasi kuantitas yang disalurkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan, yang didasarkan pada kuantitas penyaluran bulanan yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian. Kuantitas pupuk bersubsidi yang disalurkan merupakan subjek audit oleh BPK-RI, yang biasanya diselesaikan pada periode setelah penyelesaian laporan keuangan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***e. Receivables** (continued)*

***(i) Trade and other receivables** (continued)*

Collectibility of trade and other receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. A provision account is used to record impact from expected credit losses, using exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is charged to profit or loss as "General and administrative expenses" in profit or loss. When a trade and other receivable for which an impairment provision had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written-off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are recognised as "Other income - net" in profit or loss.

(ii) Subsidy receivables, subsidy payables and unbilled subsidy receivables from and to the Government of Indonesia

Subsidy receivables represent the subsidy receivables balance from the Government of Indonesia for the distribution of subsidised fertiliser.

Subsidy receivables from the Government of Indonesia are recognised based on the subsidised fertiliser price, audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK-RI") and the estimated quantities distributed as stated in the Minutes of the Audit Result, which are based on the monthly distribution quantities verified by the Ministry of Agriculture. The quantity of subsidised fertiliser distributed is subject to audit by BPK-RI, which is typically completed in the period following the completion of the financial statements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Piutang (lanjutan)

(ii) Piutang subsidi, utang subsidi dan piutang subsidi yang belum ditagih dari dan ke Pemerintah Indonesia (lanjutan)

Utang subsidi merupakan saldo utang kepada Pemerintah Republik Indonesia atas kelebihan pembayaran piutang subsidi oleh Kementerian Pertanian atas penyaluran pupuk urea, NPK, dan NPK Kakao yang bersubsidi.

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk subsidi ke pelaku usaha distribusi ("PUD") namun belum tersalurkan ke petani.

(iii) Piutang retensi

Piutang retensi adalah jumlah termin yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga ketidaksesuaian telah diperbaiki.

(iv) Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - kepada pelanggan dan utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak

Jumlah pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - kepada pelanggan adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dan dikurangi jumlah kerugian dan termin yang diakui, untuk semua pekerjaan dalam proses dimana biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) melebihi termin.

Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi jumlah yang diakui dan termin, untuk semua kontrak dimana termin melebihi biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) dan merupakan bagian dari liabilitas kontrak yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***e. Receivables** (continued)*

***(ii) Subsidy receivables, subsidy payables and unbilled subsidy receivables from and to the Government of Indonesia** (continued)*

Subsidy payables represents payables balances to the Government of Indonesia resulting from the overpayment of subsidy receivables from the Ministry of Agriculture for the distribution of subsidised fertiliser urea, NPK and NPK Kakao.

Unbilled subsidy receivables arise from the sales of subsidised fertiliser to distribution operator ("PUD") which have not yet distributed to the farmers.

(iii) Retention receivables

Retention receivables are amounts of progress billings that are not paid until the conditions specified in the contract for the payment of such amount have been satisfied or until defects have been rectified.

(iv) Construction contract work in progress - due from customers and amounts due to customers for contract work

Construction contract work in progress - due from customers is the net amount of costs incurred plus recognised profits and less the sum of recognised losses and progress billings, for all contracts in progress for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceeds progress billings.

Amounts due to customers for contract work is the net amount of costs incurred plus recognised profits, less the sum of recognised losses and progress billings, for all contracts in progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) and part of contract liabilities related to revenue from contracts with customers.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/17 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Persediaan

Persediaan dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersihnya. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* langsung maupun tidak langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penurunan nilai atas persediaan dan suku cadang yang usang dan perputarannya lambat, jika ada, ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap umur persediaan dan kondisi persediaan akhir periode laporan. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

g. Uang muka dan beban dibayar di muka

Uang muka pelanggan adalah jumlah yang diterima oleh Grup sebelum pekerjaan dilakukan. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang telah diberikan oleh penyedia barang dan jasa.

Beban dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

h. Properti investasi

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, dan prasarana yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh entitas di dalam Grup konsolidasian. Properti investasi juga termasuk properti yang sedang dikonstruksi atau pembangunan untuk penggunaan di masa yang akan datang sebagai properti investasi.

Properti investasi dalam bentuk tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Properti investasi lainnya diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis properti investasi yaitu 5 sampai dengan 40 tahun.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

f. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted-average method. The cost of finished goods and work in process comprises materials, labour and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Impairment for obsolete and slow moving inventories and spare parts, if any, is determined based on a review of the inventories aging and physical condition of the inventories at the end of reporting period. Any reversal of decline in value of inventories due to an increase in net realisable value is recognised as a reduction in the amount of cost of inventories in the period in which the recovery occurs.

g. Advances and prepayments

Advances from customers are amounts received by the Group before the related work is performed. The amounts will be compensated with invoices from supplier of goods and services.

Prepayments are amortised on a straight-line basis over the estimated beneficial periods of the prepayments.

h. Investment properties

Investment properties represent land, buildings and infrastructure that are held for long-term rental yields or for capital appreciation or both and that are not occupied by the companies in the consolidated Group. Investment properties also includes properties that is being constructed or developed for future use as investment properties.

Investment properties in the form of land are presented at acquisition cost and not depreciated.

Other investment properties are recognised at cost and depreciated over the estimated economic life. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the investment properties which is 5 to 40 years.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Properti investasi (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi. Properti investasi yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok properti investasi berikut akumulasi penyusutan dan penurunan nilainya, jika ada. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti investasi tersebut dibukukan dalam laba rugi pada tahun penjualan terjadi.

Manajemen melakukan penilaian atas properti investasi secara berkala untuk memastikan ada tidaknya penurunan nilai permanen yang material.

i Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi dalam periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Tanah dinyatakan berdasarkan model revaluasi dan tidak disusutkan. Aset tetap yang tidak digunakan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat atau jumlah terpulihkan.

Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala (3 tahun sekali) untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***h. Investment properties** (continued)*

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Expenditures which extends the useful lives of the property or results in increasing future economic benefits such as an increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance, is capitalised. When the property is unused or otherwhise disposed of, the carrying value and accumulated impairment losses, if any, are removed from the investment property account. Gains or losses from the sale of investment properties are recorded in profit or loss in the year of sale.

Management performs valuation of investment properties regularly to check whether or not there is a material permanent impairment.

i. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its acquisition cost and any cost directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance costs are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Land is stated at revaluation model and not depreciated. Unused fixed assets are stated at the lower of carrying value or recoverable amount.

Valuation of land is performed by external independent appraisers who are registered at OJK. Valuations are performed regularly (once every 3 years) to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/19 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai "Surplus revaluasi aset" di ekuitas. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya dicatat atas aset yang sama dibebankan di penghasilan komprehensif lainnya dan didebitkan terhadap "Surplus revaluasi aset" di ekuitas; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Keuntungan atau kerugian bersih dari pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil bersih pelepasan dengan nilai tercatat dan diakui dalam "Pendapatan lainnya - bersih" di laba rugi.

Penyusutan aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***i. Fixed assets** (continued)*

Increases in the carrying amount arising on the revaluation of land are credited to other comprehensive income and shown as "Assets revaluation surplus" in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited against "Assets revaluation surplus" in equity; all other decreases are charged to profit or loss.

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "Other income - net" in profit or loss.

Depreciation on other fixed assets are calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan dan prasarana permanen	20	*Permanent buildings and infrastructure*
Bangunan dan prasarana tidak permanen	10	*Non-permanent buildings and infrastructure*
Pabrik dan peralatan	8 - 40	*Plants and equipment*
Mesin bengkel kerja	8	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	4 - 8	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	4	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	10 - 35	*Ships and facilities*
Aset penyangga	8 - 20	*Supporting assets*

Hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan.

Land rights are recognised at cost.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116: Sewa. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216: Aset tetap.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 116: Leases. If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 216: Fixed assets.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

j. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset tetap, properti investasi dan aset tidak lancar lainnya, kecuali *goodwill*, ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Goodwill sebagai bagian dari investasi di asosiasi diuji penurunan nilainya bersamaan dengan investasi di asosiasi sebagai satu unit penghasil kas.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pemulihan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***i. Fixed assets** (continued)*

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

The accumulated costs of the construction of buildings, plants and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

j. Impairment of non-financial assets

Fixed assets, investment properties and other non-current assets, excluding goodwill, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is an amount which is higher between an asset's fair value less cost of disposal and value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Goodwill as part of investment in associates is assessed for impairment together with investment in associate as one cash generating unit.

Reversal on impairment losses of assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal in impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses related to goodwill would not be reversed.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/21 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam dua kategori sebagai berikut:
(i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
(ii) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual ketika menentukan apakah arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang bukan termasuk dimiliki untuk diperdagangkan, tergantung apakah Grup telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

k. Financial instruments

Classifications, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following two categories:
(i) Financial assets at amortised cost; and
(ii) Financial assets at fair value though profit or loss ("FVTPL") or fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at FVOCI.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those financial assets changes.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

As at 31 December 2025 and 2024, the Group had financial assets which were categorised as at amortised cost and fair value through other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikan instrumen utang:

(i) Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

(ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan lainnya - bersih. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lainnya, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

k. Financial instruments *(continued)*

Classifications, recognition and measurement *(continued)*

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

(i) Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses). Impairment losses of financial assets are presented as separate line item in the statement of profit or loss.

(ii) FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through Other Comprehencive Income ("OCI"), except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income - net. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/23 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikan instrumen utang: (lanjutan)

(iii) Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode keterjadiannya.

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kerugian penurunan nilai (dan pembalikan kerugian penurunan nilai) pada investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***k. Financial instruments** (continued)*

***Classifications, recognition and measurement** (continued)*

***Debt instruments** (continued)*

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments: (continued)

(iii) FVTPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at FVTPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVTPL and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it occurs.

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from changes in fair value.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of assets ownership.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

l. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan metode sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* terhadap kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya, dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian terhadap instrumen utang yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***k. Financial instruments** (continued)*

***Classifications, recognition and measurement** (continued)*

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

l. Impairment of financial assets

The Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and contract assets without a significant financing component.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and FVOCI. The impairment method applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/25 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Utang usaha dan utang lainnya

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang lainnya terdiri dari uang muka kontrak pelanggan, utang iuran, dan utang retensi. Utang usaha dan utang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

n. Provisi

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan. Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus kas keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan.

o. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

m. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables consist of contractual cash advances, contribution payables and retention payables. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

n. Provision

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (either legal or constructive) as a result of past events, it is more likely than not than an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and the obligation can be reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses. Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole.

o. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pinjaman (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup, pada atau sebelum akhir periode pelaporan, dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan perjanjian pinjaman dengan kovenan sebagai lancar atau tidak lancar. Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup setelah periode pelaporan tidak memengaruhi klasifikasi pada tanggal pelaporan.

Perjanjian pembiayaan pemasok

Grup memiliki fasilitas pembiayaan pemasok yang mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran dari 30 hari menjadi 45 hari setelah tanggal faktur dan Grup tidak lagi mampu menghapus utang yang diperoleh dengan nota kredit yang diterima dari pemasok.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Borrowings** (continued)*

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are derecognised from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has a right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Covenants that the Group is required to comply with, on or before the end of the reporting period, are considered in classifying loan arrangements with covenants as current or non-current. Covenants that the Group is required to comply with after the reporting period do not affect the classification at the reporting date.

Supplier financing agreement

The Group has supplier financing agreement that change the payment due from 30 days to 45 days after the invoice date and the Group is no longer being able to offset the acquired payables against the credit notes received from the supplier.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/27 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pinjaman (lanjutan)

Perjanjian pembiayaan pemasok (lanjutan)

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, manajemen telah menentukan bahwa jumlah tersebut bukan merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama entitas, sehingga menyajikan arus kas keluar untuk melunasi kewajiban pembiayaan pemasok ke bank dalam aktivitas pendanaan.

Manajemen menganggap bahwa penyedia keuangan melunasi faktur sebagai agen pembayaran atas nama Grup. Oleh karena itu, pembayaran yang dilakukan oleh penyedia keuangan disajikan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dan arus kas masuk aktivitas pendanaan dalam jumlah yang sama tetapi berlawanan pada saat penyedia keuangan membayar pemasok. Ketika Grup kemudian membayar jumlah yang terutang kepada penyedia keuangan, hal ini disajikan sebagai arus kas keluar pada aktivitas pendanaan. Akibatnya, kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan pemasok dimasukkan dalam rekonsiliasi utang bersih.

p. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Borrowings** (continued)*

Supplier financing agreement (continued)

For the purpose of the consolidated cash flow statement, management has determined that the amounts are not part of the working capital used in the entity's principal revenue-generating activities, so it presents the cash outflows to settle the supplier financing liability to the bank in the financing activities.

Management considers that the finance provider settles the invoices as a payment agent on behalf of the Group. The payments made by the finance provider are therefore presented as operating activities cash outflows and financing activities cash inflows in equal but opposite amounts at the point when the finance provider pays the supplier. When the Group subsequently pays the amount outstanding to the finance provider, this is presented as a financing activities cash outflow. As a result, the liabilities under the supplier financing agreement are included in the net debt reconciliation.

p. Borrowing cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. An entity shall cease capitalising borrowing costs when substantially all of the activities necessary to prepare the qualifying asset are complete.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Biaya emisi penerbitan utang obligasi

Utang obligasi pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

r. Imbalan kerja

(i) Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan manfaat pasti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan imbalan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung beberapa faktor, misalnya usia, masa kerja dan kompensasi.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang Rp sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

q. Bonds payable issuance costs

Bonds payable are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognised on an effective interest rate method.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognised over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

r. Employee benefits

(i) Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised and accrued to the employees.

(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits

The Group provides defined benefits in accordance with the Collective Labour Agreement ("CLA"), which are higher than those required under prevailing regulations related to manpower. Since manpower regulations and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the manpower regulations or the CLA represent defined benefit plans.

Defined benefit pension plan program defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually depending on factors such as age, years of service and compensation.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in Rp, the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/29 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya seperti uang penghargaan, santunan kematian, penghargaan pengabdian, dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan atau PKB. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya, kecuali imbalan jangka panjang lainnya dimana keuntungan dan kerugian aktuarial diakui langsung sebagai beban pada laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

(iii) Imbalan kesehatan pascakerja

Grup menyediakan imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum tertentu. Perkiraan biaya imbalan ini dicatat sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***r. Employee benefits** (continued)*

***(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits** (continued)*

The Group also provides other post-employment benefits and other long-term benefits such as long service reward, death allowance, jubilee rewards, and separation reward. The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualified family members pass away. The value of benefits provided to the employee is based on the Company's regulation or the CLA. The separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise, except for other long-term benefits where actuarial gains and losses are directly recognised as expenses in profit or loss.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

(iii) Post-retirement healthcare benefits

The Group provides post-retirement healthcare benefits to its retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using the projected unit credit method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:
(i) Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
(ii) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang (pupuk subsidi, pupuk nonsubsidi, amonia dan produk lainnya) diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:
- Grup telah memindahkan kontrol kepemilikan barang;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi pejualan tersebut dapat diukur secara andal.

Terpenuhinya kondisi tersebut tergantung persyaratan penjualan dengan setiap pelanggan. Secara umum risiko dan manfaat dianggap telah berpindah ke pelanggan ketika terjadi transfer kepemilikan dan risiko.

Subsidi pupuk Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi pupuk melalui Grup berdasarkan Peraturan Presiden ("Perpres") No. 6 Tahun 2025, bersama dengan Peraturan Menteri Pertanian ("Permentan") No. 15 Tahun 2025. Subsidi pupuk diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, dan terdiri dari Urea, NPK, NPK Kakao, ZA, organik serta pupuk bersubsidi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

s. Revenue and expense recognition

A performance obligation may be satisfied:
(i) At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

(ii) Over the time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over the time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Sales of goods

Revenue from the sale of goods (subsidised fertiliser, non-subsidised fertiliser, ammonia and other products) are recognised when all of the following conditions are fulfilled:
- *the Group has transferred control of the goods to the buyer;*
- *the Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the goods sold;*
- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and*
- *the cost incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.*

The fulfilment of these conditions depends upon the terms of the sales with individual customers. Generally, the risks and rewards are considered to be transferred to the customers when the title and risk are transferred.

Government's fertiliser subsidy

The Government of Indonesia provides a fertiliser subsidy through the Group based on Presidential Regulation ("Perpres") No. 6 of 2025, together with Minister of Agriculture Regulation ("Permentan") No. 15 of 2025. Fertiliser subsidies are provided in accordance with the needs of farmer groups and/or farmers in the agricultural sector, and consist of Urea, NPK, NPK Kakao, ZA, organic and other subsidised fertilisers as stipulated by the Ministry of Agriculture.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/31 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Subsidi pupuk Pemerintah (lanjutan)

Tata cara perhitungan, pencairan dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi.

Subsidi pupuk Pemerintah diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Pendapatan subsidi dari Pemerintah dicatat berdasarkan harga pupuk bersubsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI dan estimasi kuantitas yang disalurkan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan, yang didasarkan pada kuantitas penyaluran bulanan yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian.

Pendapatan jasa

Bila suatu transaksi pendapatan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil transaksi pendapatan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***s. Revenue and expense recognition** (continued)*

Government's fertiliser subsidy (continued)

The procedure for the calculation, settlement and accountability of subsidised fertiliser is stipulated by the Minstry of Finance Regulation ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Fertiliser subsidy amount is calculated based on the difference between cost of goods sold and the highest retail price.

The Government's fertiliser subsidy is recognised as revenue on an accrual basis which is calculated in accordance with the provisions that are stipulated in the Decrees of the Minister of Finance, the Minister of Agriculture, and the Minister of Trade of the Republic of Indonesia.

Revenue from the Government subsidy is recorded based on the subsidised fertiliser price, audited by BPK-RI and the estimated quantities distributed, as stated in the Minutes of the Audit Result, which are based on the monthly distribution quantities verified by the Ministry of Agriculture.

Rendering of services

When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, the revenue that is associated with the transaction is recognised with reference to the stage of completion of the transaction as at the consolidated statement of financial position date.

The outcome of a transaction can be estimated reliably when all of the following conditions are met:

- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits that are associated with the transaction will flow to the Group;*
- *the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and*
- *the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.*

When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognised only to the extent of the recognised expenses that are recoverable.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Grup mengakui aset kontrak dan liabilitas kontrak sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Aset kontrak terdiri dari pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan serta piutang retensi dan pendapatan yang belum ditagihkan yang disajikan sebagai bagian dari aset lancar lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian. Liabilitas kontrak terdiri dari utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi dan pendapatan diterima di muka yang disajikan sebagai bagian dari utang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian.

t. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus ini, masing-masing beban pajak juga diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan di negara dimana Grup beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan terkait dengan situasi dimana diperlukan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Grup dikenakan pajak final atas pendapatan dari *real estate* dan jasa konstruksi. Pajak final dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***s. Revenue and expense recognition** (continued)*

The Group has recognised contract assets and contract liabilities related to revenue from contract with customers. Contract assets consist of construction contract work in progress - due from customers and retention receivables and unbilled revenues which are presented as part of other current assets in the consolidated statements of financial position. Contract liabilities consist of amounts due to customers for construction contract work and unearned revenue which is presented as part of other payables in the consolidated statements of financial position.

t. Current and deferred income tax

The tax expense for the year comprises current and deferred tax. The tax expense is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns ("SPT") in situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. Where appropriate, it establishes a provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

The Group is subject to final income tax on revenue from real estate and construction services. The final income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date.

Final income tax is presented outside income tax expenses in profit or loss.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities related to the final income tax, and their respective final tax bases is not recognised as deferred tax assets or liabilities.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/33 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan dimana waktu pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Liabilitas atas ketidakpastian eksposur perpajakan atas pajak badan diklasifikasikan sebagai utang pajak dan untuk pajak lainnya diklasifikasikan sebagai provisi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan" dalam laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***t. Current and deferred income tax** (continued)*

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (or laws) that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax liabilities are provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries and associates, except for deferred tax liabilities where the timing of the reversal of temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

Liabilities related to uncertain tax exposure of corporate income tax is classified as taxes payables and of other taxes are classified as provisions.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there are legally-enforceable rights to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entities and where there is an intention to settle the balances on a net basis.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Income tax expenses" in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Aset keuangan dari perjanjian konsesi jasa

Piutang dari proyek konsesi merupakan jasa yang berhubungan dengan perjanjian konsesi jasa dimana pembayaran minimum yang dijamin telah disetujui tanpa dipengaruhi tingkat penggunaan listrik. Karena jangka waktu pembayaran yang panjang, piutang diukur sebesar nilai kini dari penerimaan kas yang dijamin di masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Akumulasi tahunan dari bunga atas piutang ini disajikan sebagai pendapatan keuangan dari perjanjian konsesi jasa menggunakan metode suku bunga efektif. Pembayaran akan dibagi menjadi porsi pengurang piutang dan bunga dari jumlah pokok yang belum dibayarkan dan porsi atas bagian konsesi jasa lainnya.

Aset keuangan dari perjanjian konsesi jasa disajikan pada akun "aset lancar lainnya" dan "aset tidak lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

v. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

w. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor.

x. Laba bersih per saham dasar dan dilusian

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam periode yang bersangkutan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Perusahaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

u. Financial assets from service concession arrangement

Receivables due from service concession project represents service provided in connection with a service concession arrangement for which guaranteed minimum payments have been agreed irrespective of the extent of use of the electricity. Due to the length of the payment period, receivables are measured using the present value of future guaranteed cash receipts discounted using certain interest rate. The annual accumulation of interest on these receivables is presented as finance income from service concession arrangement using the effective interest method. Payments will be divided into a portion to be deducted from the receivables and interest on the unpaid amounts and a portion for the other service concessions.

Financial assets from service concession arrangement is presented as "other current assets" and "other non-current assets" in the consolidated statement of financial position.

v. Segment reporting

Operating segments are reported in a consistent manner with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing the performance of the operating segments and making strategic decisions is the Board of Directors.

w. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuing of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax from the proceeds. Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital account.

x. Basic and diluted earnings per share

The amount of basic earnings per share is computed by dividing earnings for the period attributable to owners of the parent by the weighted-average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/35 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen dideklarasikan dan telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.

z. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 224: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan OJK No. VIII.G.7.

Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan pihak berelasi dari Grup. Entitas berelasi dengan Pemerintah mencakup entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan dalam Catatan 30.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

y. Dividend distributions

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

z. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS 224: Related Party Disclosures and OJK Regulation No. VIII.G.7.

Based on OJK Regulation No. VIII.G.7, Government-related entities are considered related parties of the Group. Government-related entities include entities which are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.

The details of significant balances and transactions entered into with related parties are presented in Note 30.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian aset keuangan

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

b. Ketidakpastian eksposur perpajakan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan besaran fasilitas pengurang pajak (*capital allowance*) dan pengurangan beban tertentu untuk tujuan fiskal selama proses estimasi atas perhitungan beban pajak penghasilan masing-masing perusahaan dalam Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

a. Provision for expected credit losses of financial assets

The Group calculates expected credit losses for cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

b. Uncertain tax exposures

Judgements and assumptions are required to determine the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for each company within the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

All judgements and estimates taken by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, can take several years to complete and in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which this determination is made.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/37 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang atau jasa, dan harga komoditas, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

d. Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun bersih mencakup tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa datang dan kenaikan biaya kesehatan. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 18.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

c. Income taxes

Deferred tax assets, including those arising from unrecouped tax losses and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes or sales of service, and commodity prices, which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in estimates and assumptions will alter the projected future taxable profits.

d. Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase and future medical costs. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of post-employment benefits liabilities.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds (as there is no deep market for highquality corporate bonds) that are denominated in the currency in which those benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

Other key assumptions for post-employment benefits liabilities are based on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 18.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Estimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi

Grup mengestimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi berdasarkan ekspektasi utilisasi aset yang sesuai dengan rencana dan strategi usaha setelah mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Di samping itu, estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi juga mempertimbangkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan keterbatasan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan dari aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis properti investasi dan aset tetap antara 4 sampai dengan 40 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa properti investasi dan aset tetap.

Nilai tercatat atas aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 11.

f. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan konstruksi mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang dilaporkan. Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

e. The estimated useful lives of fixed assets and investment properties

The Group estimates the useful lives of its fixed assets and investment properties based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviour. In addition, the Group's collective assessment of industry practice, an internal technical evaluation and experience with similar assets are also considered when estimating the useful lives of fixed assets and investment proprties. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

The costs of fixed assets and investment properties are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management estimates the useful life of these investment properties and fixed assets to be within 4 to 40 years. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful life and the residual values of these investment properties and fixed assets.

The net carrying amounts of the Group's fixed assets at reporting dates are disclosed in Note 11.

f. Revenue and expense recognition of construction contract

The revenue recognition policy for construction contract requires the use of estimates which may impact the reported amount of revenue. Revenue related to construction contracts is recognised based on the completion stage of contract activities at the end of reporting period (percentage of completion method).

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/39 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi (lanjutan)

Untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak konstruksi, Grup mengestimasi kemajuan proyek berdasarkan pengukuran langsung atas nilai barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan sampai akhir periode pelaporan secara relatif terhadap sisa barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak. Dalam menentukan estimasi kemajuan proyek, diperlukan juga pertimbangan manajemen karena tidak terdapat cara pengukuran yang baku untuk menentukan kemajuan proyek. Estimasi dan pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi tingkat presisi nilai persentase penyelesaian. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa estimasi dan pertimbangan yang dibuat adalah wajar dan tepat, perbedaan persentase dapat mempengaruhi besaran pendapatan konstruksi yang dicatat pada suatu periode.

Grup mengestimasi jumlah imbalan yang bersifat variabel atas penyerahan jasa konstruksi yang dijanjikan ke pelanggan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak. Apabila terdapat kemungkinan Grup kehilangan hak atas sebagian imbalan yang akan dibayarkan atau berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan karena satu dan lain hal, maka nilainya akan dibukukan sebagai provisi pada saat kondisi yang dapat menimbulkan hal tersebut teridentifikasi dan nilainya diestimasi berdasarkan informasi yang tersedia sampai dengan tanggal pelaporan.

Grup juga secara berkelanjutan mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak konstruksi. Dalam mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak, Grup perlu menggunakan pertimbangan dan pengetahuan Grup atas situasi terkini dari proyek karena tidak terdapat cara pengukuran yang baku untuk menentukan jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak. Estimasi dan pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi tingkat presisi hasil perhitungan kontrak yang merugikan.

g. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi pupuk melalui Grup berdasarkan Peraturan Presiden ("Perpres") No. 6 Tahun 2025 bersama dengan Peraturan Menteri Pertanian ("Permentan") No. 15 Tahun 2025. Subsidi pupuk diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, dan terdiri dari Urea, NPK, NPK Kakao serta pupuk bersubsidi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***f. Revenue and expense recognition of construction contract** (continued)*

To determine the completion stage of a construction contract, the Group estimates the progress of the project on the basis of direct measurements of the value of goods or services transferred to a customer as of the period end, relative to the remaining goods or services promised under the contract. In estimating the progress of project, management needs to include their judgements as there is no standardised measurement to calculate the progress of a project. These estimates and judgements may affect the level of precision of percentage of completion. While management believes that their estimates and judgements are reasonable and appropriate, differences in percentage of the actual completion stage may affect the amount of construction revenue recorded for a period.

The Group estimates the variable consideration amount from fulfilling promised construction services to the customer in line with the terms and conditions in the contract. If there is a possibility that the Group loss its entitlement of a portion of consideration that will be paid or liable to pay a compensation to the customer for one reason or another, the amount will be booked as a provision when the condition that indicates it arise and the amount is estimated based on the latest available information up to the reporting date.

The Group also continuously estimates the cost to complete a construction contract. In estimating the cost to complete a contract, the Group needs to include their judgements and knowledge of the latest project situation as there is no standardised measurement to calculate the cost to complete a contract. These estimates and judgements may affect the level of precision of the onerous contract calculation result.

g. Revenue and receivable recognition of subsidy

The Government of Indonesia provides a fertiliser subsidy through the Group based on Presidential Regulation ("Perpres") No. 6 of 2025 together with Minister of Agriculture Regulation ("Permentan") No. 15 of 2025. Fertiliser subsidies are provided in accordance with the needs of farmer groups and/or farmers in the agricultural sector, and consist of urea, NPK, NPK Kakao and other subsidised fertilisers as stipulated by the Ministry of Agriculture.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi (lanjutan)

Tata cara perhitungan, penyelesaian, dan pertanggungjawaban pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan pupuk bersubsidi dan harga eceran tertinggi. Pendapatan dari subsidi pemerintah dicatat sesuai dengan harga pupuk bersubsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI dan estimasi kuantitas yang disalurkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan, yang didasarkan pada kuantitas penyaluran bulanan yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian. Kuantitas pupuk bersubsidi yang disalurkan merupakan objek audit oleh BPK-RI, yang umumnya diselesaikan pada periode setelah penyelesaian laporan keuangan. Apabila terdapat selisih kuantitas antara hasil audit BPK-RI dan jumlah yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan subsidi pada tahun berjalan, selisih tersebut akan disesuaikan dan dicatat sebagai beban lain-lain pada periode ketika penyelesaian final ditetapkan.

Estimasi atas kuantitas penyaluran pupuk bersubsidi yang belum disalurkan pada akhir periode pelaporan keuangan dilakukan dengan menggunakan data rekonsiliasi manajemen yang didukung dengan berita acara verifikasi bulanan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pertanian.

Klasifikasi piutang subsidi menjadi bagian lancar dan tidak lancar ditentukan berdasarkan estimasi dan pertimbangan manajemen, dengan mempertimbangkan ketersediaan sisa anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") dan pos-pos anggaran lainnya untuk tahun berikutnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan piutang subsidi, serta konfirmasi dari Kementerian Pertanian pada tanggal neraca. Selain itu, juga didukung oleh tren pembayaran historis dari Pemerintah Republik Indonesia.

h. Provisi atas penurunan nilai persediaan

Grup melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

Estimasi nilai realisasi bersih berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia pada saat estimasi dibuat, pada jumlah persediaan yang diharapkan untuk terealisasi. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya secara langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode dimana peristiwa tersebut menyatakan kondisi yang terjadi pada akhir periode.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

g. Revenue and receivable recognition of subsidy *(continued)*

The procedure for the calculation, settlement and accountability of subsidised fertiliser is stipulated by the Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. The fertiliser subsidy amount is calculated based on the difference between subsidised cost of goods sold and the highest retail price. Revenue from the goverrnment subsidy is recorded in accordance with the subsidised fertiliser price audited by BPK-RI and the estimated distributed quantities as stated in the Minutes of the Audit Result. which are based on the monthly distributed quantities that have been verified by the Ministry of Agriculture. The quantity of subsidised fertiliser distributed is subject to audit by BPK-RI, which is typically completed in the period following the completion of the financial statements. If there is a difference in quantity between the BPK-RI audit results and the amount used as the basis for recognising subsidy revenue in the current year, the difference will be adjusted and recorded as other expenses in the period in which the final resolution is reached.

The estimation of the quantity of subsidised fertiliser that has not been distributed at the end of the financial reporting period is based on management's data as supported by monthly verification minutes that have been validated by the Ministry of Agriculture.

The classification of subsidy receivables into current and non-current portions is determined based on management's estimates and judgement, taking into consideration the availability of the remaining budget under the Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") and other budget items for the following year available to settle subsidy receivables, as well as confirmation from the Ministry of Agriculture as at the balance sheet date. In addition, it is also supported by the historical payment trends of the Government of Indonesia.

h. Provision for impairment of inventories

The Group provides provision of impairment of inventories based on estimated future usage and the condition of the inventories. Uncertainty associated with these factors may result in the realisable amount being different from the reported carrying amount of the inventories.

Estimates of net realisable value are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made of the amount the inventories are expected to realise. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the end of the period to the extent that such events confirm conditions existing at the end of the period.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/41 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Nilai wajar aset tetap yang menggunakan model revaluasi

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Penentuan nilai wajar dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi signifikan yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

j. *Take or Pay*

Dalam menentukan tingkat pemulihan terkait dengan pembayaran *take or pay*, manajemen membuat kajian perhitungan yang melibatkan sejumlah estimasi yang signifikan. Estimasi yang digunakan manajemen dalam menentukan perhitungan tersebut bergantung pada volume pemakaian gas masa depan. Perubahan dalam estimasi ini akan berdampak pada asumsi terkait dengan pemulihan atas uang muka dari pembayaran *take or pay*.

k. Keuntungan/kerugian atas pengukuran ulang dari restrukturisasi pinjaman dan utang

Berdasarkan Rencana Perdamaian, salah satu skema penyelesaian dengan para kreditur Rekind adalah modifikasi menjadi ketentuan pembayaran baru jangka panjang. Rekind mengevaluasi apakah restrukturisasi utang diperhitungkan sebagai modifikasi dari utang awal atau sebagai penghapusan utang awal dan penerbitan utang baru. Hal ini melibatkan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi signifikan.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai sekarang dari utang baru apabila nilai sekarang dari utang baru dan utang awal berbeda 10%, utang tersebut perlu diperhitungkan sebagai penghapusan utang awal dan penerbitan utang baru. Utang baru perlu dicatat pada nilai wajar dan selisih antara nilai awal utang dan nilai wajar utang baru dicatat sebagai penghasilan. Penentuan tingkat diskonto berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen dimana melibatkan kompleksitas dan subjektivitas, sehingga terdapat risiko salah saji atas penghasilan yang diakui sehubungan dengan restrukturisasi utang dalam laba rugi konsolidasian.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

i. Fair value of fixed assets that use revaluation model

Land is stated at fair value. The determination of the fair value was performed by an independent public appraiser.

Management, with the assistance of an independent public appraiser, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the appraisers as part of the valuation process. The approach and method that are used in the revaluation depend upon the grouping of assets. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs, or significant changes in assumptions, may materially affect the value of the assets that using the revaluation model.

j. Take or Pay

In determining the the recoverability related to take or pay payments, management conducts a calculation assessment that involves a number of significant estimates. The estimates used by management in making this calculation depend on the future volume of gas consumption. Changes in these estimates will affect the assumptions regarding the recovery of advances from take or pay payments.

k. Gain/loss on remeasurement from restructured loan and payable

Based on the Composition Plan, one of the settlement schemes with the Company's creditors is modification into new payment long terms. The Company's evaluated whether the restructuring debt was accounted as either a modification of the original debts or as an extinguishment of the original debts and issuance of new debts. This involved significant accounting judgements, estimates assumptions.

The Company determines the discount rate used in calculating the present value of the new debts if the present value between the new debts and original debts differ by 10%, the debt should be accounted as extinguishment of original debts and issuance of new debts. The new debts shall be recorded at fair value and the difference between initial recognition of the debts and fair value of new debts are recognised as income. The determination of the discount rate is based on management's judgements and estimates which complexity and subjectivity are involved, there is a risk of misstatement of income recognised in relation with the debt restructuring in the consolidated profit or loss.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/42 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2025	2024	
Kas			***Cash on hand***
Rp	6,966	7,414	*Rp*
USD	652	814	*USD*
Lainnya	45	25	*Others*
Jumlah	7,663	8,253	*Total*
Bank			***Cash in banks***
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	3,086,287	5,605,687	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	2,799,980	3,603,978	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	1,649,855	1,321,942	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	902,494	2,749,638	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	412,545	238,704	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")	111,881	451,043	*PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")*
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	83,541	125,021	*PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")*
PT Bank DKI ("Bank DKI")	52,453	190,498	*PT Bank DKI ("Bank DKI")*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC")	22,480	54,975	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC")*
PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")	12,147	25,259	*PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim")	10,040	50,075	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim")*
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")	3,873	100,891	*PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	28,869	13,841	*Others (each below Rp10,000)*
	9,176,445	14,531,552	
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Mandiri	521,695	149,776	*Bank Mandiri*
BRI	369,932	130,506	*BRI*
BNI	215,746	573,413	*BNI*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	193	2,169	*Others (each below Rp10,000)*
Pihak ketiga			***Third parties***
SMBC	27,994	2,710	*SMBC*
BCA	11,262	380	*BCA*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	13,325	17,473	*Others (each below Rp10,000)*
	1,160,147	876,427	

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/43 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / ***4. CASH AND CASH EQUIVALENTS** (continued)*

	2025	2024	
Mata uang asing lainnya			***Other currency***
Pihak berelasi			***Related party***
Bank Mandiri	-	94	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			***Third party***
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")	8,837	6,504	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")*
	8,837	6,598	
Jumlah	10,345,429	15,414,577	*Total*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
BRI	956,942	764,615	*BRI*
BTN	170,660	74,160	*BTN*
Bank Mandiri	140,793	43,877	*Bank Mandiri*
BNI	12,595	45,611	*BNI*
BSI	-	583,152	*BSI*
Pihak ketiga			***Third parties***
SMBC	71,000	12,700	*SMBC*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	12,000	14,500	*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank Muamalat Tbk ("Bank Muamalat")	11,000	-	*PT Bank Muamalat Tbk ("Bank Muamalat")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	2,000	2,400	*Others (each below Rp10,000)*
	1,376,990	1,541,015	
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related parties***
BNI	92,552	161,620	*BNI*
BRI	-	149,983	*BRI*
BSI	-	2,824	*BSI*
	92,552	314,427	
Jumlah	1,469,542	1,855,442	*Total*
Jumlah kas dan setara kas	**11,822,634**	**17,278,272**	***Total cash and cash equivalents***

Kisaran tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka (jangka waktu 1 - 3 bulan) per tahun sebagai berikut:

The range of contractual interest rates per annum on time deposits (time period 1 - 3 months) are as follows:

	2025	2024	
Rp	2.05% - 6.35%	2.25% - 6.90%	*Rp*
USD	2.50% - 4.02%	2.50% - 5.25%	*USD*

Lihat Catatan 30 untuk informasi mengenai pihak berelasi.

Refer to Note 30 for related parties information.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	2025	2024	
Pihak ketiga	2,602,600	2,667,975	*Third parties*
Cadangan penurunan nilai	(706,448)	(734,001)	*Provision for impairment*
	1,896,152	1,933,974	
Pihak berelasi (Catatan 30)	543,422	638,598	*Related parties (Note 30)*
Cadangan penurunan nilai	(125,698)	(121,873)	*Provision for impairment*
	417,724	516,725	
Jumlah - bersih	**2,313,876**	**2,450,699**	***Total - net***

Nilai tercatat piutang usaha Grup berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The carrying amounts of the Group's trade receivables are denominated in the following currencies:

	2025	2024	
Rp	2,575,890	2,903,323	*Rp*
USD	570,132	403,250	*USD*
	3,146,022	3,306,573	
Cadangan penurunan nilai	(832,146)	(855,874)	*Provision for impairment*
Jumlah - bersih	**2,313,876**	**2,450,699**	***Total - net***

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of the trade receivables is as follows:

	2025	2024	
Lancar	1,741,887	1,647,584	*Current*
Sudah jatuh tempo:			*Overdue:*
1-90 hari	523,395	736,435	*1-90 days*
91-120 hari	77,331	112,208	*91-120 days*
121-365 hari	37,279	130,023	*121-365 days*
>365 hari	766,130	680,323	*>365 days*
	3,146,022	3,306,573	
Cadangan penurunan nilai	(832,146)	(855,874)	*Provision for impairment*
Jumlah - bersih	**2,313,876**	**2,450,699**	***Total - net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movement of the provision for impairment losses were as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	855,874	700,398	*Beginning balance*
Penambahan	27,036	341,640	*Additional*
Pemulihan	(49,997)	(176,378)	*Reversal*
Penghapusan	(767)	(9,786)	*Write-off*
Saldo akhir	832,146	855,874	*Ending balance*

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Provision for impairment losses for individual receivables are provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/45 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Karena jatuh temponya yang pendek, nilai wajar piutang usaha kurang lebih sama dengan jumlah tercatatnya.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang individual dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 15).

Lihat Catatan 30 untuk informasi mengenai pihak berelasi.

***5. TRADE RECEIVABLES** (continued)*

Provision for impairment losses for collective receivables are provided for customers that have insignificant balances and with possibilities of payment default. This calculation considers trends of payment made by customers, relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

Due to the short-term nature, the fair value of trade receivables approximates their carrying amount.

Based on the review of the status of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that the provision for the impairment of trade receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible trade receivables.

Trade receivables of the Group are used as collateral for short-term bank loans (Note 15).

Refer to Note 30 for related parties information.

6. PIUTANG SUBSIDI DARI/(KELEBIHAN SUBSIDI YANG DIBAYARKAN OLEH) PEMERINTAH INDONESIA

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia

Rincian saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

6. SUBSIDY RECEIVABLES FROM/(EXCESS OF SUBSIDY PAID BY) THE GOVERNMENT OF INDONESIA

a. Subsidy receivables from the Government of Indonesia

The balance of the subsidy receivables from the Government of Indonesia is as follows:

	2025	2024	
Tahun			***Year***
2020	327,442	430,237	*2020*
2022	164,810	178,451	*2022*
2023	5,127	5,127	*2023*
2024	340,028	1,293,571	*2024*
2025	12,459,290	-	*2025*
	13,296,697	1,907,386	
Dikurangi:			*Less:*
Utang Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	(1,315,039)	(185,525)	*Value Added Tax ("VAT") out payable from unpaid subsidy receivables*
	11,981,658	1,721,861	
Cadangan penurunan nilai	(337,646)	(104,168)	*Allowance for impairment*
Jumlah	**11,644,012**	**1,617,693**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	**11,224,770**	**1,165,380**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**419,242**	**452,313**	***Non-current portion***

6. PIUTANG SUBSIDI DARI/(KELEBIHAN SUBSIDI YANG DIBAYARKAN OLEH) PEMERINTAH INDONESIA (lanjutan)

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan estimasi manajemen, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang subsidi tahun penyaluran 2025 akan terealisasi dalam 12 bulan ke depan, sehingga seluruh piutang subsidi ini diklasifikasikan sebagai aset lancar.

Estimasi piutang subsidi dari Pemerintah merupakan estimasi piutang subsidi atas penyaluran pupuk dari tahun 2020 sampai 2025. Lihat Catatan 2s dan 3g mengenai pengakuan pendapatan dan piutang subsidi.

Mutasi saldo piutang subsidi Grup adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo awal	313,750	10,482,676	*Beginning balance*
Penyesuaian	(190,007)	(24,962)	*Adjustment*
Pembayaran kepada Pemerintah	1,749,802	-	*Payment to the Government*
PPN atas pembayaran	192,478	-	*VAT related to payments*
Subsidi Pemerintah (Catatan 23)	39,525,491	33,552,647	*Government subsidy (Note 23)*
PPN atas pendapatan	4,347,804	3,690,791	*VAT related to revenue*
Penerimaan dari Pemerintah	(29,199,757)	(42,291,595)	*Settlement from the Government*
PPN atas penerimaan	(3,240,999)	(4,696,049)	*VAT related to settlements*
PPh 22 atas penerimaan	(263,867)	(399,758)	*Income tax article 22 related to settlements*
Jumlah	13,234,695	313,750	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	(1,315,039)	(185,525)	*VAT out payable from unpaid subsidy receivables*
Ditambah:			*Add:*
Utang PPN keluaran atas utang subsidi kepada Pemerintah	-	157,928	*VAT payable related to subsidy payable to the Government*
	11,919,656	286,153	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan penurunan nilai	(337,646)	(104,168)	*Allowance for impairment*
Saldo akhir	**11,582,010**	**181,985**	***Ending balance***

Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan merupakan utang PPN atas penjualan subsidi yang penyelesaiannya akan dilakukan melalui saling hapus dengan porsi PPN atas pelunasan piutang subsidi.

Pembayaran kepada Pemerintah terdiri dari pengembalian saldo kelebihan subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah tahun 2024 dan pembayaran atas koreksi Direktorat Jendral Pemeriksaan Keuangan Negara IV tahun 2024 sebesar masing-masing Rp1.435.708 dan Rp314.094.

6. SUBSIDY RECEIVABLES FROM/(EXCESS OF SUBSIDY PAID BY) THE GOVERNMENT OF INDONESIA (continued)

a. Subsidy receivables from the Government of Indonesia (continued)

As at 31 December 2025, based on management's estimation, management is of the opinion that all of the subsidy receivables from 2025 distribution year will be realised within the next 12 months, therefore all of these subsidy receivables are classified as current assets.

Estimated subsidy receivables from Government represent estimated subsidy receivable related to fertiliser distribution from 2020 up to 2025. Refer to Notes 2s and 3g regarding subsidy revenue and receivable recognition.

The movement of the subsidy receivables of the Group are as follows:

VAT out payable from unpaid subsidy receivables is VAT payable from subsidy sales, settlement of which will be performed by offsetting VAT portion from settlement of subsidy receivables.

Payment to the Government consist of repayment of excess subsidy balances paid by the Government in 2024 and payment for correction from the Directorate General of State Financial Audit IV in 2024, amounting to Rp1,435,708 and Rp314,094 respectively.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/47 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SUBSIDI DARI/(KELEBIHAN SUBSIDI YANG DIBAYARKAN OLEH) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (lanjutan)

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia (lanjutan)

Pada tahun 2020, terdapat 97.957 ton pendapatan pupuk subsidi yang masih dalam proses penelusuran kelengkapan bukti oleh BPK-RI. Menindaklanjuti hal ini, Grup telah memberikan seluruh bukti dokumen tambahan yang diminta di tahun 2021 dan berdasarkan hasil verifikasi lanjutan, terdapat penyesuaian pendapatan subsidi 2020 sebesar Rp296 berdasarkan notulen rapat tertanggal 3 Desember 2021. Berdasarkan notulen rapat tertanggal 9 Januari 2024, piutang subsidi tahun 2020 masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh BPK-RI. Berdasarkan notulen rapat tertanggal 22 Januari 2025, piutang subsidi tahun 2020 masih diperlukan proses verifikasi dan validasi kembali oleh BPK-RI. Pada tanggal 27 Oktober 2025, Grup telah menerima sebagian pembayaran piutang subsidi tahun 2020 sebesar Rp93.450. Berdasarkan notulen rapat tertanggal 28 Januari 2026, piutang subsidi tahun penyaluran 2020 sudah dilakukan reviu atas penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi, dan sudah dilakukan penyampaian kepada BPK-RI melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut ("SIPTL"), yang saat ini masih menunggu tanggapan dari BPK-RI. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih menunggu laporan BPK-RI terkait hal ini. Oleh karena itu, manajemen menyajikan piutang subsidi tahun 2020 pada porsi tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Kuantum Subsidi Pupuk Tahun 2022 oleh BPK-RI tertanggal 29 Mei 2023, terdapat selisih lebih salur atas kuantum penyaluran pupuk subsidi tahun 2022 sebanyak 40.491 ton yang diakibatkan karena belum terintegrasinya sistem penyaluran antara aplikasi T-Pubers dan Kartu Tani dengan nilai sebesar Rp164.810 yang disajikan sebagai piutang subsidi bagian tidak lancar. Berdasarkan notulen rapat tertanggal 28 Januari 2026, Kementerian Pertanian telah menyampaikan hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kepada BPK-RI melalui SIPTL, yang saat ini masih menunggu tanggapan dari BPK-RI. Piutang subsidi tersebut telah disajikan pada bagian tidak lancar pada 31 Desember 2025 dan 2024.

***6. SUBSIDY RECEIVABLES FROM/(EXCESS OF SUBSIDY PAID BY) THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA** (continued)*

***a. Subsidy receivables from the Government of Indonesia** (continued)*

In 2020, there were 97,957 tonnes of subsidised fertiliser revenue that are still under investigation by the BPK-RI for completeness of documentation. As a response, the Group provided all the requested additional documentation in 2021, and based on the results of the follow-up verification, there was an adjustment to the 2020 subsidy revenue amounting to Rp296, according to the minutes of the meeting dated 3 December 2021. Based on the minutes of the meeting dated 9 January 2024, the 2020 subsidy receivables are still under verification and validation by the BPK-RI. Based on the minutes of the meeting dated 22 January 2025, the subsidy receivables period 2020 still requires a process of re-verification and validation by BPK-RI. On 27 October 2025, the Group received a partial payment of the 2020 subsidy receivable amounting to Rp93,450. Based on the minutes of the meeting dated 28 January 2026, the review of the 2020 subsidy receivables regarding the distribution and inventory of subsidised fertiliser has been conducted. The findings have been submitted to BPK-RI through Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut ("SIPTL") and are currently awaiting a response from BPK-RI. As of completion date of these consolidated financial statements, management is still waiting for the BPK-RI report in regards to this matter. Therefore, management has presented the subsidy receivables from 2020 as non-current portion as at 31 December 2025 and 2024.

Based on the Minutes of Audit Results on the Year 2022 Subsidised Fertiliser Quantum Calculation by BPK-RI dated 29 May 2023, there were differences due to excess distribution of 40,491 tonnes as a result of disintegration of distribution system between T-Pubers application and Kartu Tani amounting to Rp164,810 which presented as a non-current portion of subsidy receivables. Based on the meeting minutes dated 28 January 2026, the Ministry of Agriculture has submitted the review results from the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture to the BPK-RI through SIPTL, and is currently awaiting a response from BPK-RI. The subsidy receivables has beenpresented in the non-current portion as of 31 December 2025 and 2024.

6. PIUTANG SUBSIDI DARI/(KELEBIHAN SUBSIDI YANG DIBAYARKAN OLEH) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (lanjutan)

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Kuantum Subsidi Pupuk Tahun 2024 oleh BPK-RI tertanggal 7 Mei 2025, terdapat penyaluran pupuk bersubsidi yang melebihi kontrak sebanyak 59.333,77 ton yang dikoreksi dari penyaluran tahun 2024, terdapat selisih lebih salur sebanyak 4.728,30 ton yang diakibatkan penyaluran pupuk bersubsidi yang melebihi e-RDKK dan terdapat penyaluran pupuk sebanyak 24.306,94 ton yang dikategorikan sebagai tunda bayar akibat penyaluran yang tidak didukung ketersediaan stok pada pengecer. Saldo piutang ini ditunda pembayarannya sampai dengan Grup dapat membuktikan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut telah diterima oleh petani dan Grup memperbaiki sistem penyaluran pupuk bersubsidi. Saldo piutang sebesar Rp340.028 disajikan sebagai piutang subsidi bagian tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025.

Berdasarkan notulen rapat tertanggal 28 Januari 2026, proses verifikasi ulang oleh Grup, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut atas temuan BPK-RI telah selesai dilakukan. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Grup masih menunggu penyelesaian pembayaran atas piutang subsidi atas tahun penyaluran 2020, 2022, 2023 dan 2024.

Secara umum, tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dianggap dapat diabaikan, sebab pihak debitur merupakan Pemerintah Republik Indonesia dan Grup memperoleh penggantian bunga atas keterlambatan pelunasan piutang subsidi ini. Namun, terkait dengan saldo piutang subsidi tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 dikarenakan ekspektasi jeda waktu atas proses verifikasi dan validasi data oleh BPK-RI, Grup telah mencadangkan provisi sejumlah Rp337.646 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp104.168)

6. SUBSIDY RECEIVABLES FROM/(EXCESS OF SUBSIDY PAID BY) THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA (continued)

a. Subsidy receivables from the Government of Indonesia (continued)

Based on the Minutes of Audit Results on the 2024 Subsidised Fertiliser Quantum Calculation by BPK-RI dated 7 May 2025, there was a distribution of subsidized fertilizer exceeding the contract by 59,333.77 tonnes, which has been corrected from the 2024 fertilizer distribution, an excess distribution discrepancy of 4,728.30 tonnes caused by the distribution of subsidized fertilizer exceeding the e-RDKK and distribution of 24,306.94 tonnes of fertilizer with payment deferred due to the distribution not being supported by stock availability at the retailers. These receivables payment will be postponed until the Group can prove that the subsidized fertilizers have been received by the farmers and the Group improves the subsidized fertilizer distribution system. The subsidy receivables amounting to Rp340,028 are presented as non-current subsidy receivables as at 31 December 2025.

Based on the minutes of the meeting dated 28 January 2026, the process of re-verification by the Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and the Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities of the Ministry of Agriculture as a follow-up action from BPK-RI's finding has been completed. As of the authorisation date of the consolidated financial statements, the Group is still awaiting the settlement of subsidy receivables for the distribution year 2020, 2022, 2023 and 2024.

In substance, no impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. The credit risk on receivables from the fertiliser subsidy is considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia and the Group is compensated with interest reimbursement as a result of late payment of subsidy's receivables. However, regarding the outstanding subsidy receivables for year 2020, 2022, 2023, and 2024 due to the expected time lag in the process of verification and validation of data by BPK-RI, the Group has recorded the provision amounting to Rp337,646 as at 31 December 2025 (2024: Rp104,168).

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/49 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SUBSIDI DARI/(KELEBIHAN SUBSIDI YANG DIBAYARKAN OLEH) PEMERINTAH INDONESIA (lanjutan)

b. Kelebihan subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia

Akun ini merupakan utang kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp62.002 (2024: Rp1.435.708) yang timbul dari kelebihan penerimaan atas penyaluran pupuk bersubsidi (urea dan NPK) oleh Grup.

c. Piutang subsidi yang belum ditagih

Piutang subsidi yang belum ditagih adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Piutang subsidi belum ditagih	1,012,973	1,033,336	Unbilled subsidy receivables
Dikurangi:			Less:
Utang PPN keluaran atas piutang subsidi yang belum ditagih	(100,384)	(102,403)	VAT out payable from unbilled subsidy receivables
Jumlah	**912,589**	**930,933**	**Total**

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk subsidi ke distributor namun belum tersalurkan ke petani. Piutang ini akan diakui sebagai piutang subsidi pada periode dimana pupuk bersubsidi tersalurkan ke petani.

6. SUBSIDY RECEIVABLES FROM/(EXCESS OF SUBSIDY PAID BY) THE GOVERNMENT OF INDONESIA (continued)

b. Excess of subsidy paid by the Government of Indonesia

This account represents payables to the Government of Indonesia amounting to Rp62,002 (2024: Rp1,435,708) arising from the excess of receipt for the distribution of subsidised fertilisers (urea and NPK) by the Group.

c. Unbilled subsidy receivables

Unbilled subsidy receivables were as follows:

Unbilled subsidy receivables arise from the sales of subsidised fertiliser to distributors which have not yet distributed to the farmers. These receivables will be recognized as subsidy receivables in the period when the subsidized fertilizer is distributed to farmers.

7. PEKERJAAN DALAM PENYELESAIAN KONTRAK KONSTRUKSI - DARI PELANGGAN

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan adalah bagian dari kontrak aset yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Rincian pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 30)	161,154	214,116	Related parties (Note 30)
Pihak ketiga	31,489	155,828	Third parties
Jumlah	**192,643**	**369,944**	**Total**

Berdasarkan hasil penelaahan atas individu dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa potensi kerugian atas jumlah tagihan bruto pelanggan tidak tertagih sangat minimum sehingga tidak terdapat provisi atas penurunan nilai jumlah tagihan bruto pelanggan yang dibukukan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

7. CONSTRUCTION CONTRACT WORK IN PROGRESS - DUE FROM CUSTOMERS

Construction contract work in progress - due from customers is recognised as part of contract assets related to revenue from contracts with customers.

Details of construction contract work in progress - due from customers are as follows:

Based on the assessment of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that there were minimal potential losses from uncollectible gross amount due from customers, hence there was no provision booked for the impairment of gross amount due from customers as at 31 December 2025 and 2024.

7. PEKERJAAN DALAM PENYELESAIAN KONTRAK KONSTRUKSI - DARI PELANGGAN (lanjutan) / *7. CONSTRUCTION CONTRACT WORK IN PROGRESS - DUE FROM CUSTOMERS (continued)*

Rincian pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:

The details of construction contract work in progress - due from customers based on currencies are as follows:

	2025	2024	
Rp	184,408	164,195	*Rp*
USD	8,235	205,749	*USD*
Jumlah	**192,643**	**369,944**	***Total***

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan dijaminkan oleh Grup sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 15 dan 16).

Construction contract work in progress - due from customers is used by the Group as collateral for short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 16).

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

	2025	2024	
Barang jadi	7,199,196	8,869,458	*Finished goods*
Suku cadang dan bahan pembantu	3,052,007	2,753,635	*Spare parts and supporting materials*
Bahan baku	2,705,746	1,942,662	*Raw materials*
Persediaan barang dalam proses	996,398	501,838	*Work in process inventories*
Persediaan dalam perjalanan	1,110,252	711,007	*Inventories in transit*
	15,063,599	14,778,600	
Provisi penurunan nilai	(1,093,335)	(1,058,305)	*Provision for impairment*
Jumlah	**13,970,264**	**13,720,295**	***Total***

Mutasi provisi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movement of provision for impairment of inventories is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	1,058,305	1,086,347	*Beginning balance*
Penambahan	181,120	163,440	*Addition*
Pemulihan	(130,155)	(185,720)	*Reversal*
Penghapusan	(15,935)	(5,762)	*Write-off*
Saldo akhir	**1,093,335**	**1,058,305**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa provisi tersebut cukup untuk menutup kerugian dari persediaan usang atau penurunan nilai.

Based on a review at the reporting date, the Group's management believes that the above provision is adequate to cover any losses from obsolescence or impairment of inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persediaan barang jadi diasuransikan terhadap risiko kerugian, gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (semua risiko) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp8.416.998 dan USD21.930.000 (2024: Rp10.901.823 dan USD21.930.000). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

As at 31 December 2025, finished goods are covered by insurance against the risk of losses, earthquake, fire and other risks (all risks) with total sum insured of Rp8,416,998 and USD21,930,000 (2024: Rp10,901,823 and USD21,930,000). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on inventories insured.

Persediaan dalam perjalanan merupakan pembelian bahan baku.

Inventories in transit represents purchase of raw materials.

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 15).

The inventories are used as collaterals for the short-term bank loans (Note 15).

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/51 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET LANCAR LAINNYA / *OTHER CURRENT ASSETS*

	2025	2024	
Deposito berjangka lebih dari 3 bulan			***Time deposit more than 3 months***
Pihak berelasi			*Related parties*
BRI	4,202,462	5,610,162	*BRI*
BNI	2,200,500	808,600	*BNI*
BTN	1,770,000	1,150,000	*BTN*
PT Bank Mandiri Taspen	1,000,000	300,000	*PT Bank Mandiri Taspen*
BSI	413,800	1,165,500	*BSI*
Pihak ketiga			*Third party*
Bank BJB	-	790,000	*Bank BJB*
	9,586,762	9,824,262	
Kas yang dibatasi penggunaannya			***Restricted cash***
Pihak berelasi			*Related parties*
BRI	519,622	2,541,531	*BRI*
BTN	172,000	-	*BTN*
BNI	199,914	99,611	*BNI*
Bank Mandiri	55,276	58,987	*Bank Mandiri*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	11,450	7,239	*Others (each below Rp10,000)*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	30,000	-	*PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk*
Bank BJB	13,000	-	*Bank BJB*
	1,001,262	2,707,368	
Pendapatan yang belum ditagihkan	392,026	357,379	*Unbilled revenue*
Piutang jasa konsesi - lancar	218,907	216,442	*Service concession receivables - current*
Piutang retensi - lancar	800	10,825	*Retention receivables - current*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	44,961	28,322	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah aset lancar lainnya	**11,244,718**	**13,144,598**	***Total other current assets***

Grup memiliki kas yang dibatasi penggunaannya pada BNI yang diperuntukan untuk Perjanjian Pelayanan Jasa *Notional Pooling* ("PPJNP") dan jaminan pelaksanaan proyek konstruksi Rekind.

The Group has restricted cash in BNI for the Notional Pooling Service Agreement ("NPSA") and performance bond for Rekind's construction project.

Grup memiliki kas yang dibatasi penggunaannya pada Bank Mandiri yang diperuntukan untuk pembayaran tantiem.

The Group has restricted cash in Bank Mandiri designated for the payment of tantiem.

Kas yang dibatasi penggunaannya di BRI dan BTN merupakan saldo giro terblokir oleh bank dalam jangka waktu kurang dari satu tahun dimana Grup memperoleh pendapatan bunga atas saldo tersebut.

Restricted cash in BRI and BTN represent blocked current account balances by the bank for a period of less than one year which the Group earns interest income on these balances.

Kisaran tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka (jangka waktu lebih dari 3 bulan) adalah sebagai berikut:

The range of contractual interest rates per annum on time deposits (time period more than 3 months) are as follows:

	2025	2024	
Rp	2.75% - 5.50%	2.75% - 6.95%	*Rp*
USD	-	5.25%	*USD*

10. PERPAJAKAN / *10. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan ("PPh badan")			***Corporate income tax ("CIT")***
Perusahaan			*The Company*
Pasal 28A			*Article 28A*
Tahun 2023	38,016	-	*Year 2023*
	38,016	-	
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pasal 28A			*Article 28A*
Tahun 2025	61,931	-	*Year 2025*
Tahun 2024	248,345	242,432	*Year 2024*
Tahun 2023	20,308	614,667	*Year 2023*
Tahun 2022	-	1,715	*Year 2022*
Tahun 2021	-	4,493	*Year 2021*
Tahun 2019	97,635	97,635	*Year 2019*
Tahun 2017	35,731	35,731	*Year 2017*
	463,950	996,673	
Pajak lainnya:			***Other taxes:***
Perusahaan			*The Company*
PPN	28,186	23,495	*VAT*
Entitas anak			*Subsidiaries*
PPN	1,387,067	1,171,187	*VAT*
	1,415,253	1,194,682	
Jumlah	**1,917,219**	**2,191,355**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	**(602,876)**	**(812,897)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**1,314,343**	**1,378,458**	***Non-current portion***

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/53 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***10. TAXATION** (continued)*

b. Utang pajak / ***b. Taxes payable***

	2025	2024	
PPh badan:			***CIT:***
Pasal 25/29	**415,796**	**207,819**	*Article 25/29*
Pajak lainnya:			***Other taxes:***
PPN	224,115	266,804	*VAT*
Pasal 21	196,973	60,173	*Article 21*
Pasal 4(2)	36,341	30,700	*Article 4(2)*
Pasal 23	21,475	27,869	*Article 23*
Pasal 22	19,346	22,301	*Article 22*
Lainnya	3,858	3,127	*Others*
	502,108	**410,974**	

c. Beban pajak penghasilan / ***c. Income tax expenses***

	2025	2024	
Perusahaan:			***The Company:***
Pajak kini	73,263	94,401	*Current tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	132,947	31,837	*Prior year adjustment*
	206,210	126,238	
Entitas anak:			***Subsidiaries:***
Pajak kini	2,400,913	2,078,230	*Current tax*
Pajak tangguhan	(257,438)	154,784	*Deferred tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	55,552	(24,719)	*Prior year adjustment*
	2,199,027	2,208,295	
Konsolidasian:			***Consolidated:***
Pajak kini	2,474,176	2,172,631	*Current tax*
Pajak tangguhan	(257,438)	154,784	*Deferred tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	188,499	7,118	*Prior year adjustment*
	2,405,237	**2,334,533**	

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

***10. TAXATION** (continued)*

***c. Income tax expenses** (continued)*

The reconciliation between profit before income tax of the Company and estimated taxable income of the Company is as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	7,918,022	11,220,571	*Consolidated profit before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(8,578,661)	(13,275,989)	*Profit before income tax of subsidiaries*
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasian	4,096,323	4,152,303	*Adjusted for consolidation elimination entries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	3,435,684	2,096,885	*Profit before income tax - the Company*
Koreksi fiskal:			*Fiscal corrections:*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(4,764,657)	(2,794,672)	*Income subject to final income tax*
Beban pokok pendapatan yang telah dikenakan pajak final	1,304,219	1,242,792	*Cost of revenues subject to final income tax*
Pembalikan provisi penurunan nilai piutang	-	(990,716)	*Reversal of provision for impairment of receivables*
Bonus, insentif, dan tantiem	20,016	197,484	*Bonus, incentive and tantiem*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut perpajakan	337,750	677,321	*Non-deductible expenses*
Laba kena pajak	333,012	429,094	*Taxable income*
Pajak kini	73,263	94,401	*Current tax*
Pembayaran pajak di muka			
- Perusahaan:			*Prepaid taxes - the Company:*
Pasal 23	(38,845)	(54,345)	*Article 23*
Pasal 25	(3,121)	(24,339)	*Article 25*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan	31,297	15,717	*Underpayment of corporate income tax - the Company*

Perusahaan merupakan *strategic investment holding* dengan penghasilan utama berupa dividen yang merupakan penghasilan bukan objek pajak. Dengan demikian, semua biaya yang terkait dengan dividen sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan.

The Company is a strategic investment holding whose main income is from dividend which is not a tax object. As such, all expenses incurred relating to dividend income are not deductible for taxation purpose.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian Grup dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup sebagai berikut:

The reconciliation between the Group's consolidated income tax expense and the theoretical tax amount on the Group's consolidated profit before income tax is as follows:

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/55 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***10. TAXATION** (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / ***c. Income tax expenses** (continued)*

	2025	2024	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	7,918,022	11,220,571	*Consolidated profit before income tax*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak efektif	1,741,965	2,468,526	*Income tax calculated at effective tax rates*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(1,021,559)	(1,955,379)	*Income subject to final income tax*
Beban pokok pendapatan yang telah dikenakan pajak final	613,084	937,600	*Cost of revenues subject to final income tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	863,695	978,969	*Non-deductible expenses*
Beban pajak final	94,821	25,675	*Final tax expense*
Bagian atas rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(75,268)	(127,976)	*Share in net loss of associates and joint ventures*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	188,499	7,118	*Adjustment of tax expense in respect of prior years*
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	**2,405,237**	**2,334,533**	***Consolidated income tax expenses***

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan / ***d. Deferred tax assets and liabilities***

	31 Desember/*December* 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *(Charged)/ credited to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	110,550	8,233	-	118,783	*Provision for impairment of trade receivables and other receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	86,943	6,510	27,353	120,806	*Post-employment benefit liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(70,349)	54,783	-	(15,566)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Aset hak-guna	1,425	1,374	-	2,799	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	(1,487)	(464)	-	(1,951)	*Lease liabilities*
Provisi penurunan nilai persediaan	58,002	3,889	-	61,891	*Provision for impairment of inventories*
Bonus, insentif, dan tantiem	55,106	8,545	-	63,651	*Bonus, incentive and tantiem*
Lain-lain	33,170	852	-	34,022	*Others*
Aset pajak tangguhan	**273,360**	**83,722**	**27,353**	**384,435**	*Deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan:					***Deferred tax liabilities:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha	45,020	70,088	-	115,108	*Provision for impairment of trade receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	602,800	43,543	75,922	722,265	*Post-employment benefits liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1,594,281)	92,588	11,177	(1,490,516)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Aset hak-guna	(220,618)	97,176	-	(123,442)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	140,680	(109,209)	-	31,471	*Lease liabilities*
Provisi penurunan nilai persediaan	169,176	1,685	-	170,861	*Provision for impairment of inventories*
Penurunan nilai investasi	(48,752)	(5,023)	-	(53,775)	*Impairment of investment*
Bonus, insentif, dan tantiem	205,458	(11,458)	-	194,000	*Bonus, incentive and tantiem*
Aset keuangan lainnya	(60,907)	(578)	-	(61,485)	*Other financial assets*
Lain-lain	(67,001)	(5,096)	-	(72,097)	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(828,425)**	**173,716**	**87,099**	**(567,610)**	*Deferred tax liabilities*
Jumlah – bersih	**(555,065)**			**(183,175)**	*Total – net*

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

***10. TAXATION** (continued)*

***d. Deferred tax assets and liabilities** (continued)*

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss***	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *(Charged)/ credited to other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	78,152	32,398	-	110,550	*Provision for impairment of trade receivables and other receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	90,183	4,942	(8,182)	86,943	*Post-employment benefit liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(102,665)	32,316	-	(70,349)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Aset hak-guna	842	583	-	1,425	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	(892)	(595)	-	(1,487)	*Lease liabilities*
Provisi penurunan nilai persediaan	66,993	(8,991)	-	58,002	*Provision for impairment of inventories*
Bonus, insentif, dan tantiem	54,023	1,083	-	55,106	*Bonus, incentive and tantiem*
Lain-lain	31,115	1,499	556	33,170	*Others*
Aset pajak tangguhan	**217,751**	**63,235**	**(7,626)**	**273,360**	*Deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan:					***Deferred tax liabilities:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha	72,292	(27,272)	-	45,020	*Provision for impairment of trade receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	485,767	18,822	98,211	602,800	*Post-employment benefits liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1,475,747)	(118,534)	-	(1,594,281)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Aset hak-guna	(345,203)	124,585	-	(220,618)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	271,218	(130,538)	-	140,680	*Lease liabilities*
Provisi penurunan nilai persediaan	172,575	(3,399)	-	169,176	*Provision for impairment of inventories*
Penurunan nilai investasi	12,522	(61,274)	-	(48,752)	*Impairment of investment*
Bonus, insentif, dan tantiem	221,573	(16,115)	-	205,458	*Bonus, incentive and tantiem*
Aset keuangan lainnya	(60,991)	84	-	(60,907)	*Other financial assets*
Lain-lain	(62,013)	(4,378)	(610)	(67,001)	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(708,007)**	**(218,019)**	**97,601**	**(828,425)**	*Deferred tax liabilities*
Jumlah – bersih	**(490,256)**			**(555,065)**	*Total – net*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/57 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

f. Surat ketetapan pajak

Berikut adalah status pemeriksaan pajak pada tanggal 31 Desember 2025:

Entitas/ *Entity*	Jenis pajak/ *Type of taxes*	Tahun pajak dan status pada 31 Desember 2025/ *Fiscal year and status as at 31 December 2025*	Nilai sengketa/ *Amount of disputes*	Nilai yang dibayarkan/ *Amount paid*	Pajak dibayar di muka/ *Prepaid tax*	Provisi pajak/ *Tax provision*
PSP	PPh badan/*CIT*	2019 (Banding/*Appeal*)	97,635	-	97,635	-
	PPh badan/*CIT*	2023 (Keberatan/ *Objection*)	3,515	-	3,515	-
PIHC	PPh Badan/CIT	2023 (Banding/*Appeal*)	38,016	-	38,016	-
	PPN/*VAT*	2023 (Banding/*Appeal*)	1,826	-	1,826	-
PKC	PPh Badan/*CIT*	2017 (Banding/Appeal)	35,731	-	35,731	-

Grup berkeyakinan bahwa hasil banding dan keberatan tidak akan memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

g. Aturan model Pilar Dua *Organisation for Economic Cooperation and Development* ("OECD")

Grup berada dalam lingkup aturan model OECD Pilar Dua dan menerapkan pengecualian dalam pengakuan serta pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua sejak 1 Januari 2025. Peraturan tersebut mulai berlaku untuk tahun fiskal Grup yang berakhir setelah 31 Desember 2024. Grup termasuk dalam lingkup peraturan yang telah disahkan atau secara substansial disahkan dan telah melakukan penilaian terhadap potensi eksposur Grup terhadap pajak penghasilan Pilar Dua. Berdasarkan penilaian tersebut, tarif pajak efektif di yurisdiksi tempat Grup beroperasi berada di atas 15%, oleh karena itu Grup tidak diwajibkan untuk membayar beban pajak penghasilan tambahan yang terkait dengan Pilar Dua.

***10. TAXATION** (continued)*

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

f. Tax assessment letters

Below is the status of tax examinations as of 31 December 2025:

The Group believes that the appeal and objection results will not have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

g. Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules

The Group is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and applied the exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes starting 1 January 2025. The legislation has become effective for the Group's financial year ended after 31 December 2024. The Group is within the scope of the enacted or substantially enacted legislation and has performed an assessment of the Group's potential exposure to Pillar Two income taxes. Based on the assessment, the effective tax rates in the jurisdictions in which the Group operated are above 15%, hence the Company is not required to pay for additional income tax expense related to Pillar Two.

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

	31 Desember/*December* 2025						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications**)	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation value***
Tanah	32,763,091	917	-	(1,688,951)	1,906,186	32,981,243	*Land*
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan dan prasarana	10,045,626	45,341	(15,858)	287,779	-	10,362,888	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan prasarana	63,194,962	477,689	(505,003)	3,250,781	-	66,418,429	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	3,927,815	-	(625)	55,410	-	3,982,600	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	614,771	36,254	(19,767)	19,386	-	650,644	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	1,552,970	118,291	(73,209)	106,536	-	1,704,588	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	736,294	56,398	-	25,833	-	818,525	*Ships and facilities*
Aset penyangga	1,336,694	219,823	(436)	(31,108)	-	1,524,973	*Supporting assets*
	114,172,223	954,713	(614,898)	2,025,666	1,906,186	118,443,890	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	708,920	75,520	(9,225)	-	-	775,215	*Land*
Bangunan dan prasarana	226,485	300,510	(211,572)	377	-	315,800	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	324,046	176,084	(134,162)	-	-	365,968	*Vehicles and heavy equipment*
	1,259,451	552,114	(354,959)	377	-	1,456,983	
Aset dalam penyelesaian	9,306,330	9,944,539	(266,440)	(4,878,972)	-	14,105,457	***Construction in progress***
	124,738,004	11,451,366	(1,236,297)	(2,852,929)	1,906,186	134,006,330	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	4,507,785	524,333	(1,207)	(7,000)	-	5,023,911	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan prasarana	35,575,136	4,334,219	(250,296)	(715,730)	-	38,943,329	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	1,905,634	164,640	(625)	-	-	2,069,649	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	406,158	34,714	(19,528)	(9,855)	-	411,489	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	1,133,460	184,114	(73,084)	(11,935)	-	1,232,555	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	498,486	114,894	-	-	-	613,380	*Ships and facilities*
Aset penyangga	544,058	65,391	(508)	(8,174)	-	600,767	*Supporting assets*
	44,570,717	5,422,305	(345,248)	(752,694)	-	48,895,080	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	79,020	31,949	(8,818)	-	-	102,151	*Land*
Bangunan dan prasarana	150,130	255,717	(205,042)	-	-	200,805	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	177,410	117,982	(129,510)	-	-	165,882	*Vehicles and heavy equipment*
	406,560	405,648	(343,370)	-	-	468,838	
	44,977,277	5,827,953	(688,618)	(752,694)	-	49,363,918	
Penurunan nilai	80,131	-	-	-	-	80,131	*Impairment*
	45,057,408	5,827,953	(688,618)	(752,694)	-	49,444,049	
Nilai buku bersih	**79,680,596**					**84,562,281**	***Net book value***

*) Pada tahun 2025, sejalan dengan perubahan fungsi dari aset tetap terkait, Grup melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dengan nilai sebesar Rp2.100.235, serta reklasifikasi dari aset tetap ke aset tidak lancar lainnya (aset tidak lancar yang akan ditinggalkan) dengan harga perolehan dan akumulasi penyusutan masing masing sebesar Rp752.694 dan Rp752.694.

**) In 2025, in line with changes of the function of its fixed assets, the Group reclassified from fixed assets to investment properties amounting to Rp2,100,235, and reclassified from fixed assets to other non-current assets (non-current assets to be abandoned) with acquisition cost and accumulated depreciation amounting to Rp752,694 and Rp752,694, respectively.*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/59 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan) / *11. FIXED ASSETS (continued)*

	31 Desember/*December* 2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications**)	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation value***
Tanah	32,823,452	-	-	(60,361)	-	32,763,091	*Land*
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan dan prasarana	9,355,605	48,672	(7,565)	648,914	-	10,045,626	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan prasarana	59,801,758	625,519	(23,774)	2,791,459	-	63,194,962	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	3,880,289	63,231	(28,375)	12,670	-	3,927,815	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	562,758	24,127	(5,718)	33,604	-	614,771	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	1,397,353	142,490	(17,703)	30,830	-	1,552,970	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	624,486	74,248	-	37,560	-	736,294	*Ships and facilities*
Aset penyangga	1,092,778	181,163	-	62,753	-	1,336,694	*Supporting assets*
	109,538,479	1,159,450	(83,135)	3,557,429	-	114,172,223	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	709,296	24,130	(24,506)	-	-	708,920	*Land*
Bangunan dan prasarana	333,663	126,573	(233,751)	-	-	226,485	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	308,376	124,246	(108,576)	-	-	324,046	*Vehicles and heavy equipment*
	1,351,335	274,949	(366,833)	-	-	1,259,451	
Aset dalam penyelesaian	4,910,295	8,064,716	(13,070)	(3,655,611)	-	9,306,330	***Construction in progress***
	115,800,109	9,499,115	(463,038)	(98,182)	-	124,738,004	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	4,064,069	455,098	(7,521)	(3,861)	-	4,507,785	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan prasarana	31,504,984	4,105,872	(35,720)	-	-	35,575,136	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	1,742,696	165,250	(2,312)	-	-	1,905,634	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	378,971	32,883	(5,696)	-	-	406,158	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	1,049,390	100,960	(16,890)	-	-	1,133,460	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	444,540	53,946	-	-	-	498,486	*Ships and facilities*
Aset penyangga	457,931	86,127	-	-	-	544,058	*Supporting assets*
	39,642,581	5,000,136	(68,139)	(3,861)	-	44,570,717	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	68,363	34,756	(24,099)	-	-	79,020	*Land*
Bangunan dan prasarana	190,327	193,028	(233,225)	-	-	150,130	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	177,870	105,936	(106,396)	-	-	177,410	*Vehicles and heavy equipment*
	436,560	333,720	(363,720)	-	-	406,560	
	40,079,141	5,333,856	(431,859)	(3,861)	-	44,977,277	
Penurunan nilai	25,793	54,338	-	-	-	80,131	*Impairment*
	40,104,934	5,388,194	(431,859)	(3,861)	-	45,057,408	
Nilai buku bersih	**75,695,175**					**79,680,596**	***Net book value***

*) Pada tahun 2024, sejalan dengan perubahan fungsi dari aset tetap terkait, Grup melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dengan nilai sebesar Rp94.321.

*) *In 2024, in line with changes of the function of its fixed assets, the Group reclassified from fixed assets to investment properties amounting to Rp94,321.*

11. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan sebagai berikut:

	2025	2024	
Beban pokok pendapatan (Catatan 25)	5,470,273	5,025,076	*Cost of revenues (Note 25)*
Beban penjualan (Catatan 26)	105,476	108,125	*Selling expenses (Note 26)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	252,204	200,655	*General and administrative expenses (Note 27)*
Jumlah	**5,827,953**	**5,333,856**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025, harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp15.687.102 (2024: Rp15.857.641).

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (semua risiko) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp20.880.040 dan USD3.331.579.145 (2024: Rp18.707.737 dan USD3.873.046.309). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 15 dan 16).

Revaluasi tanah

Pada tahun 2025, Grup melakukan revaluasi aset tetap tanah yang dilakukan oleh beberapa Kantor Jasa Penilaian Publik ("KJPP") dengan rincian sebagai berikut:

***11. FIXED ASSETS** (continued)*

Depreciation expenses of fixed assets for the years ended 31 December 2025 and 2024 were allocated as follows:

As at 31 December 2025, the acquisition cost of fixed assets which have been fully depreciated and still being used are amounting to Rp15,687,102 (2024: Rp15,857,641).

As at 31 December 2025, fixed assets of the Group are insured against risks of earthquake, fire and other risks (all risks) with total sum insured amounting to Rp20,880,040 and USD3,331,579,145 (2024: Rp18,707,737 and USD3,873,046,309). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

As at 31 December 2025 and 2024, the Group's management is of the opinion that there was no indication of impairment in the fixed assets' value.

Certain fixed assets are pledged as collateral for short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 16).

Revaluation of land

In 2025, the Group performed revaluation of its land which were carried out by several Independent Public Appraisers ("KJPP") with details as follows:

Entitas/ *Entity*	Nama KJPP/ *KJPP name*	Nomor laporan/ *Report number*	Tanggal laporan/ *Report date*
PIHC	Dasa'at Yudistira dan Rekan	00068/2.0041-14/PI/04/0605/1/IV/2026	10 Februari/*February* 2026
PKG	Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan	00597/2.0044-00/PI/04/0540/1/XII/2025	4 Desember/*December* 2025*)
PKC	Romulo, Charlie dan Rekan	00279/2.0032-00/PI/04/0151/1/XI/2025	13 November 2025*)
PKT	Dasa'at Yudistira dan Rekan	00068/2.0041-14/PI/04/0605/1/IV/2026	14 April 2026
PIM	Rizki Djunaedi dan Rekan	00102/2.0017-00/PI/02/0362/1/III/2026	5 Maret/*March* 2026
PSP	Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan	01200/2.0027-00/PI/11/0196/1/XI/2025	2 November 2025*)
Rekind	Karmanto dan Rekan	00038/2.0062-00/PI/03/0030/1/I/2026	30 Januari/*January* 2026
PIP	Abdullah Fitriantoro dan Rekan	00456/2.0051-00/PI/04/0152/1/XII/2025	22 Desember/*December* 2025*)
PIN	Dasa'at Yudistira dan Rekan	00423/2.0041-14/PI/05/0605/1/X/2025	31 Oktober/*October* 2025*)

*) Grup meyakini bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara valuasi pada tanggal 31 Desember 2025 dengan valuasi berdasarkan laporan KJPP.

*) *The Group believes that there were no significant changes between valuation date on 31 December 2025 with the KJPP's valuation reports.*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/61 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Adapun Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VII - 2018, dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendapatan untuk revaluasi tanah di tahun 2025.

Pendekatan pasar yang digunakan untuk mengukur nilai wajar tanah mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli, yang disesuaikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai. Nilai revaluasi tanah yang menggunakan pendekatan pasar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp27.633.481.

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

***11. FIXED ASSETS** (continued)*

The Assessment Standards used were the Indonesian Appraisal Standards VII Edition - 2018, using market and income approaches for the land revaluation in 2025.

The market approach used to measure the fair value of land considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by means of a comparison process. Generally, the properties being valued (the valuation objects) are properties that are compared to other similar properties that have either completed the transaction process or been offered for sale, adjusted for differences in the nature, location or condition of the specific land. The revaluation value of land using the market approach as of 31 December 2025 was amounting to Rp27,633,481.

Reconciliation of the beginning balance to the ending balance of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	Tanah yang belum dan sudah siap pakai/*Land not ready and ready to use*	
Saldo 1 Januari 2025	4,431,762	*Balance as at 1 January 2025*
Transfer ke tingkat 3	829,892	*Transfers to level 3*
Keuntungan yang diakui pada laporan pendapatan komprehensif	86,108	*Gain recognised in other comprehensive income*
Saldo akhir	5,347,762	*Ending balance*

Input penilaian signifikan yang tidak dapat diobservasi dan digunakan adalah sebagai berikut:
- Harga per m^2 yang berkisar antara Rp852.000 (nilai penuh) sampai dengan Rp2.770.000 (nilai penuh);
- Estimasi biaya pengembangan dan persiapan lahan per m^2 yang berkisar antara Rp266.386 (nilai penuh) sampai dengan Rp954.156 (nilai penuh); dan
- Tingkat diskonto yang digunakan adalah 9,57% - 10,50%.

Significant unobservable inputs used are as follows:
- *Price per m^2 ranging from Rp852,000 (full amount) up to Rp2,770,000 (full amount);*
- *Estimated costs of development and land preparation per m^2 ranging from Rp266,386 (full amount) up to Rp954,156 (full amount); and*
- *Discount rate used is 9.57% - 10.50%.*

11. ASET TETAP (lanjutan)

Peningkatan/(penurunan) signifikan dalam estimasi harga per m2, estimasi biaya pengembangan dan persiapan lahan per m2, dan tingkat diskonto secara tersendiri dapat menghasilkan nilai wajar yang secara signifikan lebih tinggi/(rendah).

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai tercatat tanah apabila menggunakan model biaya adalah sebesar Rp925.471.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap selain tanah.

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai aset dalam penyelesaian adalah sebesar Rp14.105.457 (2024: Rp9.306.330). Sebagian besar aset dalam penyelesaian diperkirakan akan selesai antara tahun 2026 - 2031 dengan persentase penyelesaian saat ini antara 1% - 99%, termasuk pembangunan pabrik Pusri III-B yang diperkirakan selesai di tahun 2027.

Grup telah mengkapitalisasi biaya pinjaman masing-masing sebesar Rp325.226 dan Rp154.810 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024. Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkatan bunga antara 6,35% - 8,25%.

Hak atas tanah diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir antara tahun 2029 sampai dengan tahun 2055. Mengacu pada praktik di masa lalu, Grup memiliki keyakinan dapat memperpanjang HGB tersebut.

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi kelompok aset yang revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset" pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.928.798 dan adanya kerugian nilai revaluasi sebesar Rp22.612 yang dicatat dalam laba rugi.

Surplus revaluasi telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain.

Pelepasan aset dalam penyelesaian dan aset tetap selama tahun 2025 merupakan aset milik PKT yang sudah tidak memiliki manfaat di masa mendatang.

Keuntungan atas pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***11. FIXED ASSETS** (continued)*

Significant increases/(decreases) in estimated price per m2 , estimated costs of development and land preparation, and discount rate would result in a significantly higher/(lower) fair value.

As at 31 December 2025, the carrying value of land using the cost model amounted to Rp925,471.

There is no significant difference between the fair value and carrying amount of fixed assets other than land.

As at 31 December 2025, construction in progress was amounting to Rp14,105,457 (2023: Rp9,306,330). Most of the construction in progress are estimated to be completed between 2026 - 2031 with current percentage of completion between 1% - 99%, including for the construction of Pusri III-B plant which is estimated to be completed in 2027.

The Group has capitalised borrowing cost amounting to Rp325,226 and Rp154,810 for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively. Borrowing costs were capitalised at the rate of 6.35% - 8.25%.

Land rights are held under renewable Building Right Titles ("HGB") which will expire between 2029 up to 2055. Based on historical practices, the Group believes that it can renew these HGB.

The total increase in the carrying amounts of the class of revalued assets has been recorded as the "Assets Revaluation Surplus" in 2025 amounting to Rp1,928,798 and asset revaluation loss amounting to Rp22,612 recorded in profit or loss.

The revaluation surplus was credited to other comprehensive income.

Disposal of construction in progress and fixed assets during 2025 consist of PKT's assets that no longer have any future benefits.

Gain on disposal of fixed assets for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Nilai jual	42	44,665	*Selling price*
Nilai buku	-	(31,179)	*Book value*
Keuntungan bersih	42	13,486	*Net gain*

12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 30)	568,888	338,205	*Related parties (Note 30)*
Pihak ketiga	2,837,380	1,997,138	*Third parties*
Jumlah	**3,406,268**	**2,335,343**	***Total***

Di 2024, utang usaha Rekind kepada beberapa pemasok telah direstrukturisasi dengan termin pembayaran menjadi 3 - 25 tahun tanpa bunga. Restrukturisasi tersebut berdasarkan keputusan homologasi tertanggal 31 Januari 2024. Utang usaha Rekind yang direstrukturisasi tersebut disajikan sebagai liabilitas tidak lancar lainnya.

In 2024, Rekind's trade payables to several vendors have been restructured with payment term of 3 - 25 years with no interest. The restructuring was based on the homologation decision dated 31 January 2024. Rekind's restructured trade payables were presented as other non-current liabilities.

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies are as follows:

	2025	2024	
Rp	3,031,914	1,847,729	*Rp*
USD	347,921	467,012	*USD*
EUR	21,059	16,768	*EUR*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	5,374	3,834	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	**3,406,268**	**2,335,343**	***Total***

Saldo utang usaha merupakan utang atas pembelian persediaan dan jasa konstruksi.

Trade payables are payable for the procurement of inventories and construction services.

13. UTANG LAINNYA / *13. OTHER PAYABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 30)	95,551	34,314	***Related parties (Note 30)***
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Pendapatan diterima di muka	721,067	283,676	*Unearned revenue*
Utang iuran	274,746	179,865	*Contribution payables*
Liabilitas kontrak	329,316	386,975	*Contract liabilities*
Utang retensi	108,177	100,190	*Retention payables*
Utang salam	-	150,000	*Salam payables*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	148,104	129,801	*Others (each below Rp10,000)*
	1,581,410	1,230,507	
Jumlah	**1,676,961**	**1,264,821**	***Total***

14. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PROVISI / *ACCRUED EXPENSES AND PROVISIONS*

a. Liabilitas yang masih harus dibayar / *Accrued liabilities*

	2025	2024	
Biaya bahan bakar dan gas alam	2,750,053	3,178,383	*Fuel and natural gas costs*
Biaya bahan baku non-gas	2,373,666	1,989,027	*Non-gas raw materials costs*
Biaya proyek	2,060,832	1,681,902	*Project costs*
Biaya distribusi	1,055,093	958,042	*Distribution costs*
Pembelian aset tetap	719,070	646,039	*Purchase of fixed assets*
Jasa	514,965	207,736	*Services*
Kompensasi Harga Eceran Tertinggi ("HET")	266,945	-	*Harga Eceran Tertinggi ("HET") compensation*
Bunga pinjaman	112,652	111,683	*Interest expenses*
Sewa kapal	36,576	54,664	*Ship rental*
Akrual atas kurang bayar pengadaan gas bumi (Catatan 36c)	-	714,070	*Accrual for underpayment of natural gas procurement (Note 36c)*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp50.000)	33,870	2,157	*Others (each below Rp50,000)*
Jumlah	**9,923,722**	**9,543,703**	***Total***

b. Provisi / *Provisions*

	2025	2024	
Provisi kerugian terkait proyek RDMP JO	1,269,836	523,608	*Provision for loss related to RDMP JO project*
Provisi *liquidated damage*	179,051	195,342	*Provision for liquidated damage*
Provisi kontrak merugikan	124,742	141,580	*Provision for onerous contract*
Jumlah	**1,573,629**	**860,530**	***Total***

Perubahan provisi adalah sebagai berikut: / *The movement in the provisions are as follows:*

	2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dibebankan/ (dikreditkan) pada laba rugi/ *Charged/(credited) to profit or loss*	Realisasi selama tahun berjalan/ *Realisation during the year*	Selisih kurs/ *Foreign exchanges*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Provisi kerugian terkait proyek RDMP JO	523,608	746,228	-	-	1,269,836	*Provision for loss related to RDMP JO project*
Liquidated damage	195,342	41,734	(58,025)	-	179,051	*Liquidated damage*
Kontrak yang merugikan	141,580	185,342	(202,180)	-	124,742	*Onerous contract*
Jumlah	**860,530**	**973,304**	**(260,205)**	**-**	**1,573,629**	*Total*

Perubahan provisi adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *The movement in the provisions are as follows: (continued)*

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dibebankan/ (dikreditkan) pada laba rugi/ *Charged/(credited) to profit or loss*	Realisasi selama tahun berjalan/ *Realisation during the year*	Selisih kurs/ *Foreign exchanges*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Provisi kerugian terkait proyek RDMP JO	-	523,608	-	-	523,608	*Provision for loss related to RDMP JO project*
Liquidated damage	1,338,159	(1,142,817)	-	-	195,342	*Liquidated damage*
Kontrak yang merugikan	384,278	99,258	(341,956)	-	141,580	*Onerous contract*
Kurang bayar pengadaan gas bumi	1,691,907	(1,734,876)	(38,904)	81,873	-	*Underpayment of natural gas procurement*
Jumlah	**3,414,344**	**(2,254,827)**	**(380,860)**	**81,873**	**860,530**	*Total*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/65 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PROVISI (lanjutan)

b. Provisi (lanjutan)

Liquidated damage

Grup memiliki kewajiban kontraktual untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat indikasi bahwa proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka Grup akan mencatatkan provisi atas potensi keterlambatan *liquidated damage* yang dapat dikenakan oleh pemilik proyek. Provisi diakui sebesar nilai dari perkiraan hari keterlambatan penyelesaian proyek dikalikan dengan tarif spesifik yang berlaku berdasarkan kontrak proyek. Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah provisi adalah sebesar Rp179.051 (2024: Rp195.342). Pemulihan atau beban provisi ini dibukukan sebagai penambah atau pengurang pendapatan.

Provisi tersebut dapat berubah apabila Grup mendapatkan perpanjangan waktu dari pemilik proyek dan/atau terjadi perubahan estimasi waktu penyelesaian.

Kontrak yang merugikan

Grup memiliki beberapa kontrak dengan indikasi rugi pada akhir proyek. Sebagian besar kerugian yang diestimasi merupakan nilai pekerjaan tambahan (*change order*) yang belum disetujui oleh pemilik proyek. Nilai provisi diakui sebesar total biaya yang dibutuhkan hingga kontrak selesai dikurangi dengan nilai kontrak yang sudah disetujui. Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah provisi yang diperkirakan adalah sebesar Rp124.742 (2024: Rp141.580). Beban provisi ini dibukukan sebagai bagian dari "Beban pokok pendapatan".

Provisi tersebut dapat berubah apabila Grup mendapatkan persetujuan pekerjaan tambahan dari pemilik proyek dan/atau terjadi perubahan estimasi total biaya yang dibutuhkan hingga penyelesaian kontrak.

Provisi kerugian proyek RDMP JO

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, bagian Grup atas rugi proyek RDMP Balikpapan JO ("RDMP JO") melebihi jumlah tercatat investasinya, sehingga Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian lebih lanjut. Namun, dikarenakan Grup memiliki kewajiban konstruktif atas nama RDMP JO, pada tanggal 31 Desember 2025 Grup mengakui provisi kerugian adalah sebesar Rp1.269.836 (2024: Rp523.608).

14. ACCRUED LIABILITIES AND PROVISIONS *(continued)*

b. Provisions *(continued)*

Liquidated damage

The Group has contractual liabilities to complete their projects within the scheduled period. The Group has recorded provisions for potential delay liquidated damages that might be charged by the project owners if there were indications that the projects cannot be completed within the scheduled period. The provision is recognised for the amount estimated from delay on project schedule days multiplied by the applicable charge rate stated in the project contract. As of 31 December 2025, the total provision was amounting to Rp179,051 (2024: Rp195,342). The recovery or provision was recorded as revenue addition or deduction.

The provision stated above may change due to extension of time received by the Group from project owner and/or changes in estimated time of completion.

Onerous contract

The Group has several contracts which might be onerous by the end of projects. Most of the estimated loss represent the amount of additional work (change order) which has not been approved by the project owners. Provision was recognised for the amount estimated from total cost required to complete the project deducted by the agreed contract value. As of 31 December 2025, total provision was amounting to Rp124,742 (2024: Rp141,580). This provision was booked as part of "Cost of revenues".

The provision stated above may change due to approval of additional work from project owners and/or changes in estimated total cost required until completion of the contract.

Provision for loss of RDMP JO project

As at 31 December 2025 and 2024, the Group's share of losses of RDMP JO project exceeded its carrying amount of investment, therefore the Group discontinued recognising its share of further losses. However, due to the Group has constructive obligations on behalf of the RDMP JO, as of 31 December 2025 the Group recognised provision for loss amounting to Rp1,269,836 (2024: Rp523,608).

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK / *15. SHORT-TERM BANK LOANS*

	2025	2024	
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
BRI	1,650,000	2,652	*BRI*
Bank Mandiri	398,936	2,506,112	*Bank Mandiri*
BNI	276,867	382,878	*BNI*
BSI	2,411	2,613	*BSI*
BTN	-	3,034	*BTN*
	2,328,214	2,897,289	
Pihak ketiga			***Third parties***
SMBC	47,802	62,876	*SMBC*
Bank Panin	41,527	28,641	*Bank Panin*
Bank BJB	26,990	-	*Bank BJB*
Bank Panin Dubai Syariah	20,430	-	*Bank Panin Dubai Syariah*
CIMB	16,825	655,233	*CIMB*
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")	15,000	21,709	*PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")*
BCA	3,552	503,104	*BCA*
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	12,208	23,742	*PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	17,080	17,381	*Others (each below Rp10,000)*
	201,414	1,312,686	
Jumlah	**2,529,628**	**4,209,975**	***Total***

Informasi lain mengenai fasilitas pinjaman bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Other information relating to short-term bank loans facilities as at 31 December 2025 is as follows:

Kreditur/*Creditors*[*)]	Jadwal pembayaran/ *Repayment schedule*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rates per annum*
Bank Mandiri	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	Suku bunga saat penarikan/*Interest rate at withdrawal date*
BRI	Maks. 180 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 180 days after withdrawal date*	IDR: JIBOR 3 bulan/*months* + 1.80%
BNI	Maks. 12 bulan setelah tanggal penarikan/*Max. 12 months after withdrawal date*	IDR: 6.5% - 11.5%
Bank Panin	90 - 240 hari setelah tanggal penarikan/*90 - 240 days after withdrawal date*	IDR: 8.50% - 8.75%
SMBC	Maks. 24 bulan setelah penarikan/*Max. 24 months after withdrawal date*	IDR: Suku bunga berdasarkan kesepakatan/ *Spot rate*
OCBC	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 8.25%
BCA	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 12%
ICBC	180 - 360 hari setelah tanggal penarikan/*180 - 360 days after withdrawal date*	IDR: 9.50%

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/67 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Informasi lain mengenai fasilitas pinjaman bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

15. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Other information relating to short-term bank loans facilities as at 31 December 2025 is as follows: (continued)

Kreditur/*Creditors**)	Jadwal pembayaran/ *Repayment schedule*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rates per annum*
CIMB	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 8.50%
BSI	Maks. 12 bulan setelah tanggal penarikan/*Max. 12 months after withdrawal date*	IDR: 4.00%
Bank Panin Dubai Syariah	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 8.75%
Bank BJB	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 10.00%
Bukopin Syariah	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 10.00%
SMBC	Maks. 5 bulan setelah tanggal penarikan/*Max. 5 months after withdrawal date*	IDR: 7.53%

*) Lihat Catatan 16 untuk rincian perjanjian pinjaman bank jangka panjang/*See Note 16 for the detail of long-term bank loans agreements.*

Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank, Grup diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan. Pada tanggal 19, 24 dan 30 Desember 2025, PSG telah memperoleh surat pembebasan (*waiver letters)* atas kewajiban-kewajiban tertentu masing-masing dari PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank DKI. Selain PSG, Grup telah memenuhi persyaratan rasio keuangan.

As specified by the bank loan agreements, the Group is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. On 19, 24, and 30 December 2025, PSG has obtained waiver letters for certain covenants from PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank DKI respectively. Apart from PSG, the Group has complied with the financial ratio requirements.

Liabilitas *supplier financing* adalah liabilitas kepada bank yang timbul akibat pembayaran yang dilakukan oleh bank atas transaksi pembelian yang dilakukan Grup dengan pemasok, sesuai dengan ketentuan perjanjian antara Grup dengan bank. Seluruh liabilitas *supplier financing* didenominasikan dalam mata uang Rp. Selama tahun 2025, bank telah melakukan pembayaran secara langsung kepada pemasok gas bumi atas instruksi Grup dengan menggunakan fasilitas *supplier financing* sebesar Rp127.229 (2024: Rp2.733.427). Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh liabilitas *supplier financing* telah dilunasi oleh Grup kepada bank.

Supplier financing liabilities are liabilities to the banks which arose from the payments made by the banks for the Group's purchases from suppliers, in accordance with the agreement between the Group and the banks. All supplier financing liabilities are denominated in Rp currency. During 2025, the banks made direct payments to natural gas suppliers based on the Group's instructions using supplier financing facilities amounting to Rp127,229 (2024: Rp2,733,427). As of 31 December 2025 and 2024, all supplier financing liabilities were fully paid by the Group to the banks.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) / *15. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)*

Rentang tanggal jatuh tempo pembayaran/ *Range of payment due dates*	2025	2024
Liabilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok/ *Liabilities under supplier financing arrangement*	1 - 180 hari setelah tanggal faktur/ *days after invoice date*	1 - 180 hari setelah tanggal faktur/ *days after invoice date*
Utang usaha sejenis yang bukan merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan pemasok (lini bisnis yang sama)/ *Comparable trade payables that are not part of the supplier financing arrangement (same line of business)*	1 - 60 hari setelah tanggal faktur/ *days after invoice date*	1 - 60 hari setelah tanggal faktur/ *days after invoice date*

Nilai tercatat liabilitas dalam perjanjian pembiayaan pemasok/ *Carrying amount of liabilities under supplier financing arrangement*	2025	2024
Liabilitas dalam perjanjian pembiayaan pemasok/ *Liabilities under supplier financing arrangement*	-	-
Jumlah yang diterima vendor dari bank/ *The amount received by vendor from the bank*	127,229	5,799,541

Informasi lain yang signifikan terkait dengan fasilitas *supplier financing* adalah sebagai berikut:

Other significant information related to supplier financing facilities were as follows:

Kreditur/*Creditors*	Jadwal pembayaran/ *Repayment schedule*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rates per annum*	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*
BNI	Maks. 180 hari setelah tanggal penarikan/ *Max. 180 days after withdrawal date*	Compounded Indonia 3 Bulan + 1.25%	Rp10.111.063 (Interchangeable dengan fasilitas KMK *dan lainnya/Interchangeable with KMK and other facilities)*
BRI	Maks. 180 hari setelah tanggal penarikan/ *Max. 180 days after withdrawal date*	JIBOR 3 bulan/*months* + 1.80%	Rp10,600,000 (*Interchangeable* dengan fasilitas KMK dan lainnya/*Interchangeable with KMK and other facilities*)

Jaminan pinjaman bank jangka pendek berupa piutang usaha (Catatan 5), piutang subsidi (Catatan 6), pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi (Catatan 7), persediaan (Catatan 8), dan aset tetap (Catatan 11).

The short-term bank loans collateral are trade receivables (Note 5), subsidy receivables (Note 6), construction contract work in progress - due from customers for construction contract work (Note 7), inventories (Note 8) and fixed assets (Note 11).

Dana yang diperoleh dari pinjaman bank jangka pendek digunakan untuk modal kerja dan pendanaan kegiatan umum. Grup mengawasi berbagai rasio yang diharuskan oleh pemberi pinjaman sehingga Grup tidak melanggar perjanjian untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

The funds received from short-term bank loans are used for working capital and general corporate funding. The Group monitors various ratios as required by the lenders so that the Group does not breach covenants on any borrowing facilities.

Sepanjang tahun 2025, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman jangka pendek sejumlah Rp14.206.292 (2024: Rp17.973.760).

In 2025, the Group has paid short-term bank loans amounting to Rp14,206,292 (2024: Rp17,973,760).

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/69 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG / *16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS*

	2025	2024	
Pinjaman bank	9,537,950	5,233,032	*Bank loans*
Pinjaman sindikasi	6,678,127	4,100,016	*Syndicated loans*
Pinjaman dari non-bank	32,041	30,373	*Non-bank loans*
	16,248,118	**9,363,421**	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(2,003,210)**	**(1,376,976)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**14,244,908**	**7,986,445**	***Non-current portion***

Pinjaman bank / *Bank loans*

	2025	2024	
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
BNI	1,550,000	2,580,000	*BNI*
Bank Mandiri	979,088	1,013,806	*Bank Mandiri*
BSI	32,907	41,372	*BSI*
BRI	24,344	53,453	*BRI*
	2,586,339	3,688,631	
Pihak ketiga			***Third parties***
SMBC	4,657,250	515,971	*SMBC*
Bank CIMB	1,700,000	-	*Bank CIMB*
Bank Jatim	228,200	293,400	*Bank Jatim*
Bank DKI	165,000	400,000	*Bank DKI*
Bank Muamalat	37,896	44,280	*Bank Muamalat*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	6,883	61,522	*Others (each below Rp10,000)*
	6,795,229	1,315,173	
Jumlah pinjaman bank saldo Rp	9,381,568	5,003,804	*Total bank loan in Rp amount*
USD			***USD***
Pihak ketiga			***Third party***
SMBC	156,382	229,228	*SMBC*
Jumlah pinjaman bank saldo USD	156,382	229,228	*Total bank loan in USD amount*
Jumlah pinjaman bank	9,537,950	5,233,032	*Total bank loan*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(1,806,517)**	**(363,547)**	***Short-term portion***
Bagian jangka panjang	**7,731,433**	**4,869,485**	***Long-term portion***

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, pinjaman jangka panjang Rekind senilai Rp967.234 (2024: Rp890.109) adalah nilai kini dari pinjaman yang telah direstrukturisasi dengan termin pembayaran menjadi 20 tahun dengan tingkat suku bunga 2%-3,5% per tahun yang dibayarkan setiap kuartal. Restrukturisasi tersebut berdasarkan keputusan homologasi tertanggal 31 Januari 2024.

Informasi yang signifikan terkait dengan pinjaman bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)

As at 31 December 2025, Rekind's long-term loans amounting to Rp967,234 (2024: Rp890,109) represented the present value of loans which have been restructured with payment term of 20 years with an interest rate of 2%-3.5% per annum which are payable quarterly. The restructuring was based on the homologation decision dated 31 January 2024.

Significant information related to long-term bank loans as at 31 December 2025 were as follows:

Kreditur/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Facilities type*	Fasilitas/ *Facilities*	Periode jatuh tempo/ *Maturity period*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rates*	Jaminan/ *Collateral*
Bank Mandiri	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp10,000,000	18 November 2027	Suku bunga saat penarikan/*Interest rate at withdrawal date*	Tanpa jaminan/*Clean basis*
BRI	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp10,600,000	31 Maret/*March* 2026	JIBOR 3 bulan/*months* + 1.80%	Tanpa jaminan/*Clean basis*
		Rp13,434	28 Maret/*March* 2022*)	JIBOR 3 bulan/*months* + 1.80%	Tanpa jaminan/*Clean basis*
Bank Muamalat Indonesia	- *Line facility*	Rp43,436	28 Februari/ *February* 2021*)	11.00%	Tidak ada jaminan/*No collateral*
BNI	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp10.111.063	20 September 2027	IDR: INDONIA 3 bulan/ *months* + 1.25%	*Negative pledge*
SMBC	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp3,990,000	29 Oktober/ *October* 2027	IDR: Compounded Indonia 3 bulan/*months + 1.50%*	*Negative pledge*
		Rp502,163	30 Agustus/ *August* 2027	JIBOR 1 bulan/ *months* + 1.20%	*Gresik gas cogeneration plant*
		USD63 juta/ *million*	30 Agustus/ *August* 2027	SOFR 1 bulan/ *months* + 1.20%	*Gresik gas cogeneration plant*
	- Pinjaman berjangka tanpa komitmen/*Uncommitted loan*	Rp900,000	31 Oktober/ *October* 2027	JIBOR + 1.60%	Tanpa jaminan/*Clean basis*
BCA	- Kredit multi fasilitas/*Uncommitted multi facility*	Rp300,000	28 November/ *November* 2027	*Reviewable*	Tanpa jaminan/*Clean basis*
	- *Installment loan*	Rp7,553	29 Agustus/ *August* 2028	7.50%	Tanpa jaminan/*Clean basis*
CIMB Niaga	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp1,800,000	16 September 2027	5.50%	Tanpa jaminan/*Clean basis*
Bank DKI	- Kredit modal kerja/ *Working capital loan*	Rp200,000	24 Januari/ *January* 2029	8.00%	Tanpa jaminan/*Clean basis*
BSI	- *Trance B line facility*	Rp32,169	31 Maret/ *March* 2016*)	11%	Tanpa jaminan/*Clean basis*
Bank Jatim	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp326,000	30 Agustus/ *August* 2029	IDR: INDONIA 3 bulan/ *months* + 2.88925%	Tanpa jaminan/*Clean basis*

*) YIN mengikuti proses PKPU dan mencapai homologasi dengan para kreditur pada tahun 2021, sehingga fasilitas diatas tidak lagi berlaku. Pinjaman yang tersisa akan dibayarkan mengikuti keputusan homologasi.

*) *YIN followed the PKPU process and reached homologation with its creditors in 2021, resulting facilities above no longer effective. The outstanding loans are to be paid in accordance with the homologation result.*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/71 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan) / *16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)*

Pinjaman sindikasi / *Syndicated loans*

	31 Desember/*December* 2025			
	Jumlah mata uang asing (nilai penuh)/ *Amount of foreign currency (full amount)*	Ekuivalen Rp/*Rp equivalent*		
		Jumlah/ *Total*	Jangka pendek/ *Current*	Jangka panjang/ *Non-current*
Pihak berelasi/*Related parties*				
BNI (Rp)	-	1,458,216	(63,055)	1,395,161
Bank Mandiri (Rp)	-	1,410,543	(63,055)	1,347,488
BSI (Rp)	-	758,301	(54,884)	703,417
BRI (Rp)	-	527,193	-	527,193
BTN (Rp)	-	486,281	-	486,281
Bank Mandiri (USD)	USD26,655,828	447,338	-	447,338
		5,087,872	(180,994)	4,906,878
Pihak ketiga/*Third parties*				
BCA (Rp)	-	540,341	-	540,341
ICBC (USD)	USD26,655,828	447,338	-	447,338
BJB (Rp)	-	349,599	-	349,599
Bank Sumsel Babel (Rp)	-	252,977	-	252,977
		1,590,255	-	1,590,255
Jumlah/*Total*		6,678,127	(180,994)	6,497,133

	31 Desember/*December* 2024			
	Jumlah mata uang asing (nilai penuh)/ *Amount of foreign currency (full amount)*	Ekuivalen Rp/*Rp equivalent*		
		Jumlah/ *Total*	Jangka pendek/ *Current*	Jangka panjang/ *Non-current*
Pihak berelasi/*Related parties*				
BNI (Rp)	-	863,475	(43,722)	819,753
Bank Mandiri (Rp)	-	841,002	(43,722)	797,280
BSI (Rp)	-	510,249	(38,057)	472,192
Bank Mandiri (USD)	USD26,685,931	431,298	(431,298)	-
BRI (Rp)	-	254,710	-	254,710
BTN (Rp)	-	229,227	-	229,227
		3,129,961	(556,799)	2,573,162
Pihak ketiga/*Third parties*				
ICBC (USD)	USD26,685,931	431,298	(431,298)	-
BCA (Rp)	-	254,710	-	254,710
BJB (Rp)	-	164,797	-	164,797
Bank Sumsel Babel (Rp)	-	119,250	-	119,250
		970,055	(431,298)	538,757
Jumlah/*Total*		4,100,016	(988,097)	3,111,919

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)

Other information related to syndicated loans as at 31 December 2025 were as follows:

Kreditur/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Facilities type*	Fasilitas/ *Facilities*	Periode jatuh tempo/ *Maturity period*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rates*	Jaminan/ *Collateral*
BRI	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp850,000	13 Oktober/ *October* 2034	Compounded Indonia 3 bulan/*months* + *spread adjustment* 3 bulan/*months* + 2,47979%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
	- *Interest During Construction* ("IDC")	Rp150,000	13 Oktober/ *October* 2034		Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
Bank Mandiri	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp1,825,000	13 Oktober/ *October* 2034	Compounded Indonia 3 bulan/*months* + *spread adjustment* 3 bulan/*months* + 2,47979%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
	- IDC	Rp325,000	13 Oktober/ *October* 2034		Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp718,000	6 Oktober/ *October* 2029	JIBOR 3 bulan/*months* + *Margin (eqv. 8.25%)*	Aset tetap/*Fixed assets*
	- IDC	Rp122,000	6 Oktober/ *October* 2029	JIBOR 3 bulan/*months* + *Margin (eqv. 8.25%)*	Aset tetap/*Fixed assets*
BSI	- *Musyarakah Mutanaqishah*	Rp359,000	6 Oktober/ *October* 2029	*Hishshah (ownerhip share)*	Aset tetap/*Fixed assets*
	- Kredit Investasi/*Investment loan*	Rp900,000	13 Oktober/ *October* 2034	Compounded Indonia 3 bulan/*months* + *Spread adjustment* 3 bulan/*months* + 2,47979%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
BNI	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp1,900,000	13 Oktober/ *October* 2034	Compounded Indonia 3 bulan/*months* + *Spread adjustment* 3 bulan/*months* + 2,47979%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
	- IDC	Rp350,000	13 Oktober/ *October* 2034		Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp718,000	6 Oktober/ *October* 2029	JIBOR 3 bulan/*months* + *Margin (eqv. 8.25%)*	Aset tetap/*Fixed assets*
BCA	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp850,000	13 Oktober/ *October* 2034	Compounded Indonia 3 bulan/*months* + *Spread Adj. 3 months* + 2,47979%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
	- IDC	Rp150,000	13 Oktober/ *October* 2034		Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
BTN	- Kredit Investasi/*Investment loan*	Rp765,000	13 Oktober/ *October* 2034	Compounded Indonia 3 bulan/*months* + *Spread Adj. 3 months* + 2,47979%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B plant*
	- IDC	Rp135,000	13 Oktober/ *October* 2034		Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
BJB	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp550,000	13 Oktober/ *October* 2034	Compounded Indonia 3 bulan/*months* + *Spread Adj. 3 bulan* + 2,47979%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B plant*
	- IDC	Rp100,000	13 Oktober/ *October* 2034		Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
BPD Sumsel	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp398,000	13 Oktober/ *October* 2034	Compounded Indonia 3 bulan/*months* + *Spread Adj. 3 months* + 2,47979%	Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B plant*
	- IDC	Rp69,000	13 Oktober/ *October* 2034		Pabrik Pusri III-B/*Pusri III-B Plant*
Sindikasi/ *Syndicated* PT Bank ICBC Indonesia dan/ *and* PT Bank Mandiri	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	USD75,000,000	30 Juni/ *June* 2026	6.50%	- Hak hipotik debitur/*Debtor's mortgage right* - Fidusia atas mesin dan peralatan, klaim asuransi, persediaan, dan piutang/*Fiduciary security over machinery and equipment, insurance claims, inventory, and receivables* - Gadai atas akun bank/*Pledge over bank accounts* - Surat jaminan Rekind/*Rekind guarantee letter*
	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rp25,915	30 Juni/ *June* 2026	9.50%	- Hak hipotik debitur/*Debtor's mortgage right* - Fidusia atas mesin dan peralatan, klaim asuransi, persediaan, dan piutang/*Fiduciary security over machinery and equipment, insurance claims, inventory, and receivables* - Gadai atas akun bank/*Pledge over bank accounts* - Surat jaminan Rekind/*Rekind guarantee letter*

Grup saat ini memiliki sejumlah kontrak dengan tingkat bunga yang mengacu pada JIBOR dan berlaku hingga setelah tahun 2025. Saat ini diekspektasikan IndONIA akan menggantikan JIBOR. Risiko yang timbul dari transisi terutama terkait dengan potensi dampak perbedaan jangka waktu dan kredit. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait di masa mendatang.

The Group currently has a number of contracts which interest rates refer to JIBOR and extend beyond 2025. It is currently expected that IndONIA will replace JIBOR. Risks arising from the transition relate principally to the potential impact of term and credit differences. Management will continue to monitor this and take the necessary actions to address related risks and uncertainties going forward.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/73 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS *(continued)*

Pinjaman dari non-bank / *Non-bank loans*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pemerintah RI (RDI-373)	27,239	34,049	*Government of RI (RDI-373)*
Pemerintah RI (RDI-014)	9,847	12,309	*Government of RI (RDI-014)*
Pemerintah RI (Bappenas)	6,187	6,187	*Government of RI (Bappenas)*
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")	7,194	2,809	*Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")*
	50,467	55,354	
Dikurangi: Selisih nilai wajar yang belum diamortisasi	(18,426)	(24,981)	*Less: Unamortised difference of fair value*
	32,041	30,373	
Dikurangi: **Bagian jangka pendek**	**(15,699)**	**(25,332)**	*Less:* ***Current portion***
Bagian jangka panjang	**16,342**	**5,041**	***Non-current portion***

Informasi lain mengenai pinjaman dari non-bank pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Other information related to non-bank loans as at 31 December 2025 were as follows:

Kreditur/ *Creditors*	Jumlah fasilitas/ *Total facilities*	Jadwal pembayaran/ *Repayment schedule*	Tingkat suku bunga/ *Interest rates*
Pemerintah/ *Government*			
RDI - 373	20 tahun/*years*	Tahunan, setiap tanggal 30 Oktober 2019 - 30 Oktober 2038/*Annually, every 30 October 2019 - 30 October 2038*	0%
RDI - 014	20 tahun/*years*	Tahunan, setiap tanggal 30 Oktober 2019 - 30 Oktober 2038/*Annually, every 30 October 2019 - 30 October 2038*	0%

Informasi lainnya / *Other information*

Pada tahun 2025, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang sebesar Rp3.074.328 (2024: Rp9.645.714).

In 2025, the Group has paid long-term bank loans and other loans amounting to Rp3,074,328 (2024: Rp9,645,714).

Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank dan sindikasi, Grup diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan antara lain rasio lancar, *debt to equity ratio* dan *debt service coverage ratio*. Grup juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan lainnya.

As specified by the bank and syndicated loan agreements, the Group is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants which are current ratio, debt to equity ratio, and debt service coverage ratio. The Group is also required to comply with certain terms and condition in relation to its Articles of Association, the nature of the business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters.

Pada tanggal 31 Desember 2025, RDM mengalami ketidakpatuhan (*breach*) dengan perjanjian pinjaman yang berkaitan dengan pinjaman bank jangka panjang yang berasal dari sindikasi ICBC dan Bank Mandiri.

As at 31 December 2025, RDM had a non-compliance (breach) with debt covenants related to long-term bank loans from syndication of ICBC and Bank Mandiri.

16. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lainnya (lanjutan)

Selanjutnya, RDM telah memperoleh surat dari Bank Mandiri dan sindikasi ICBC pada tanggal 30 Maret 2026 yang menyatakan bahwa pelanggaran perjanjian pinjaman pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah dikecualikan.

RDM masih dalam proses negosiasi atas pinjaman dengan pihak-pihak terkait. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses restrukturisasi pinjaman RDM masih berlangsung.

16. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)

Other information (continued)

Subsequently, RDM has obtained letters from Bank Mandiri and syndication of ICBC 30 March 2026 which outlined that the breach of covenants as at and for the year ended 31 December 2025 was waived.

RDM is still in the process of negotiating loan restructuring with the respective parties. As at the issuance date of these consolidated financial statetements, the restructuring process of RDM's loan is still ongoing.

17. UTANG OBLIGASI / *17. BONDS PAYABLE*

	2025	2024	
Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021	2,400,000	2,400,000	*Shelf Registration Bonds II Phase II PTPI Year 2021*
Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020	431,850	1,289,685	*Shelf Registration Bonds II Phase I PTPI Year 2020*
	2,831,850	3,689,685	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(7,207)	(8,757)	*Unamortised transaction costs*
Jumlah utang obligasi	**2,824,643**	**3,680,928**	***Total bonds payable***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(1,599,942)**	**(857,394)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**1,224,701**	**2,823,534**	***Non-current portion***

Rincian utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The details of bonds payable as at 31 December 2025 are as follows:

No.	Obligasi dan nilai nominal/ *Bonds and nominal amount*	Bunga per tahun/ *Interest per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity*
a.	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020/ *Shelf Registration Bonds II PTPI Phase I Year 2020*	7.70% 8.30%	3 September 2025 3 September 2027
b.	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021/ *Shelf Registration Bonds II PTPI Phase II Year 2021*	6.20% 7.20%	10 Maret/*March* 2026 10 Maret/*March* 2028

Dana yang diperoleh digunakan antara lain untuk modal kerja, pendanaan umum, pembiayaan kembali pinjaman dan kegiatan pembiayaan lainnya.

Funds received are used for working capital, general funding, loan refinancing and other financing activities.

Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, antara lain batasan rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi batasan rasio keuangan tersebut.

The Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. As at 31 December 2025 and 2024, the Company complied with the respective financial covenants.

Obligasi tersebut pada tangal 31 Desember 2025 mendapatkan peringkat "idAAA" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian lembaga pemeringkat atas kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

These bonds are rated "idAAA" by PT Pemeringkat Efek Indonesia as at 31 December 2025. The rating reflects the rating agency's assessment of the likelihood of timely payment of the principal and interest.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/75 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan) / *17. BONDS PAYABLE (continued)*

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

The bonds are not guaranteed with a specific collateral, but are guaranteed with all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and the future ones. The bondholders' rights are pari passu without preference to the other creditors.

Pada bulan Agustus 2025, Perusahaan melakukan pelunasan atas Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp857.835 (2024: Rp2.435.000).

In August 2025, the Company repaid portion of Shelf Registration Bonds II Phase II PTPI Year 2020 amounting to Rp857,835 (2024: Rp2,435,000).

18. IMBALAN KERJA / *18. EMPLOYEE BENEFITS*

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / *a. Short-term employee benefit liabilities*

	2025	2024	
Gaji, insentif, dan bonus	2,258,307	2,377,095	*Salaries, incentives and bonuses*
Manfaat pensiun	376,919	261,891	*Pension benefits*
Jumlah	**2,635,226**	**2,638,986**	***Total***

b. Liabilitas imbalan pascakerja / *b. Post-employment benefits liabilities*

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen. Tabel berikut menyajikan ikhtisar liabilitas imbalan pascakerja dan biaya yang dibebankan sebagaimana tercatat pada laporan keuangan konsolidasian:

The provision for post-employment benefits liabilities are calculated by independent actuaries. The table below presents a summary of the post-employment employee benefits liabilities and expenses reported in the consolidated financial statements:

	2025	2024	
Liabilitas di laporan posisi keuangan konsolidasian untuk:			*Liabilities on the consolidated statement of financial position for:*
Imbalan pascakerja ("IPK")	3,378,918	2,683,862	*Post-employment benefits ("PEB")*
Imbalan jangka panjang lainnya ("IJPL")	366,007	279,701	*Other long-term benefits ("OLTEB")*
	3,744,925	**2,963,563**	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek (Catatan 18a)	**(376,919)**	**(261,891)**	***Current portion (Note 18a)***
Bagian jangka panjang	**3,368,006**	**2,701,672**	***Non-current portion***
(Dikreditkan)/dibebankan pada laba rugi:			*(Credited)/charged to profit or loss:*
IPK	698,906	(455,094)	*PEB*
IJPL	184,981	190,925	*OLTEB*
Jumlah	**883,887**	**(264,169)**	***Total***
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
IPK	520,236	408,978	*PEB*

18. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Rincian estimasi liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan lainnya untuk masing-masing program yang diselenggarakan Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

18. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Post-employment benefits liabilities (continued)

The details of estimated post-employment benefits liabilities and other long-term benefits for each of the programs operated by the Group as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	31 Desember/*December* 2025						
	IPK/*PEB*		IJPL/*OLTEB*				
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Dampak batas atas aset/ *Impact on assets ceillings*	Jumlah/ *Total*	
Pada 1 Januari 2025	4,558,342	(1,874,480)	279,701	-	-	2,963,563	*As at 1 January 2025*
Biaya jasa kini	257,959	-	126,025	-	-	383,984	*Current service cost*
Biaya bunga bersih	294,368	-	13,035	-	177	307,580	*Net interest cost*
Biaya jasa lalu	(13,825)	(4,723)	(18,316)	-	-	(36,864)	*Past service costs*
Pendapatan bunga	4,110	(187,173)	615	-	-	(182,448)	*Interest income*
Keuntungan aktuaria bersih yang diakui	348,013	-	63,622	-	-	411,635	*Net actuarial gain*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	**890,625**	**(191,896)**	**184,981**	**-**	**177**	**883,887**	***Balance recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali:							*Remeasurements:*
Imbal hasil aset program non-bunga - bersih	65,271	(71,816)	-	-	-	(6,545)	*Return on plan assets excluding interest income - net*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	213,263	-	-	-	-	213,263	*Actuarial loss from change in demographic assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(20)	-	-	-	-	(20)	*Actuarial gain from change in financial assumptions*
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	309,710	3,828	-	-	-	313,538	*Actuarial loss from experience adjustment*
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**588,224**	**(67,988)**	**-**	**-**	**-**	**520,236**	***Balance recognised in other comprehensive income***
Pembayaran dari program:							*Payments from plans:*
Pembayaran iuran	(1,375)	(439,420)	(51,119)	-	-	(491,914)	*Contribution payments*
Imbalan yang dibayar	(456,142)	(322,479)	(47,556)	-	-	(826,177)	*Benefit payments*
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2025	**5,579,674**	**(2,896,263)**	**366,007**	**-**	**177**	**3,049,595**	***Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2025***
Dampak batas atas aset	-	177	-	-	(177)	-	*Impact on assets ceilling*
Aset program yang tidak memenuhi kriteria perspektif akuntansi	**-**	**695,330**	**-**	**-**	**-**	**695,330**	***Unqualified plan asset from an accounting perspective***
	5,579,674	**(2,200,756)**	**366,007**	**-**	**-**	**3,744,925**	

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/77 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *18. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

b. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan) / *b. Post-employment benefits liabilities (continued)*

	31 Desember/*December* 2024						
	IPK/*PEB*		IJPL/*OLTEB*				
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Dampak batas atas aset/ *Impact on assets ceillings*	Jumlah/ *Total*	
Pada 1 Januari 2024	4,973,751	(2,162,167)	219,031	-	-	3,030,615	*As at 1 January 2024*
Biaya jasa kini	102,743	3,129	153,116	-	35,671	294,659	*Current service cost*
Biaya bunga bersih	81,545	-	10,001	-	(185)	91,361	*Net interest cost*
Biaya jasa lalu	(505,876)	-	1,705	-	-	(504,171)	*Past service costs*
Pendapatan bunga	(164)	(171,957)	-	-	-	(172,121)	*Interest income*
Keuntungan aktuaria bersih yang diakui	-	-	26,103	-	-	26,103	*Net actuarial gain*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	**(321,752)**	**(168,828)**	**190,925**	**-**	**35,486**	**(264,169)**	***Balance recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali:							*Remeasurements:*
Imbal hasil aset program non-bunga - bersih	68,508	27,475	-	-	-	95,983	*Return on plan assets excluding interest income - net*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	83,773	-	-	-	-	83,773	*Actuarial loss from change in demographic assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	156,070	-	-	-	-	156,070	*Actuarial gain from change in financial assumptions*
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	71,509	1,643	-	-	-	73,152	*Actuarial loss from experience adjustment*
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**379,860**	**29,118**	**-**	**-**	**-**	**408,978**	***Balance recognised in other comprehensive income***
Pembayaran dari program:							*Payments from plans:*
Pembayaran iuran	(6,638)	(578,384)	(37,218)	-	-	(622,240)	*Contribution payments*
Imbalan yang dibayar	(471,895)	315,737	(93,037)	-	-	(249,195)	*Benefit payments*
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2024	**4,553,326**	**(2,564,524)**	**279,701**	**-**	**35,486**	**2,303,989**	***Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2024***
Dampak batas atas aset	5,016	35,486	-	-	(35,486)	5,016	*Impact on assets ceilling*
Aset program yang tidak memenuhi kriteria perspektif akuntansi	**-**	**654,558**	**-**	**-**	**-**	**654,558**	***Unqualified plan asset from an accounting perspective***
	4,558,342	**(1,874,480)**	**279,701**	**-**	**-**	**2,963,563**	

18. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai tunai aset program manfaat pasti pascakerja yang terbentuk pada PT Asuransi Jiwa IFG yang secara akuntansi tidak dapat disajikan secara bersih terhadap liabilitas adalah masing-masing sebesar Rp695.330 dan Rp654.558 disajikan sebagai "aset imbalan pascakerja". Nilai aset program pada Dana Pensiun sebesar Rp2.200.756 (2024: Rp1.874.480) memenuhi kriteria aset program secara akuntansi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset program ditempatkan dalam bentuk investasi deposito berjangka dan surat berharga yang tidak memiliki harga pasar yang dikutip dan nilai wajarnya mendekati nilai tercatatnya.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Tingkat diskonto per tahun	4.70% - 7.75%	6.46% - 7.55%	*Discount rate per annum*
Tingkat kenaikan gaji	1.00% - 8.86%	2.50% - 8.00%	*Salary growth rate*
Tingkat mortalitas	TM IV 2019	TM IV 2019	*Mortality rate*
Usia pensiun normal (dalam tahun)	56	56	*Normal retirement age (in years)*

Melalui program pensiun manfaat pasti, Grup terekspos beberapa risiko seperti kenaikan gaji, volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi, sebagai berikut:

Volatilitas aset

Asumsi yang berhubungan dengan tingkat pengembalian aset yang diharapkan ditentukan berdasarkan data historis dan ekspektasi manajemen terhadap pengembangan investasi dimasa yang akan datang. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Perubahan imbal hasil obligasi

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

***18. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***b. Post-employment benefits liabilities** (continued)*

As at 31 December 2025 and 2024, the total investment values of plan assets in PT Asuransi Jiwa IFG which cannot be accounted for net of the liabilities amounting to Rp695,330 and Rp654,558, respectively, are presented as "post-employment benefits assets". Plan assets in Dana Pensiun amounting to Rp2,200,756 (2024: 1,874,480) meet the criteria of plan assets in accordance with accounting perspectives.

As at 31 December 2025 and 2024, the plan assets were mostly placed in the form of investments in time deposits and bonds, which did not have quoted market prices and their fair values approximate their carrying value.

The principal assumptions used in determining the Group's employee benefit liabilities are as follows:

Through its defined benefits pension plans, the Group is exposed to a number of risks such as salary growth, assets volatility and changes in bonds yields, as follows:

Assets volatility

Assumptions regarding the expected return on plan assets are based on the historical data and management's expectation of the future investment development. If the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

Changes in bond yields

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit program.

A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/79 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Perubahan imbal hasil obligasi (lanjutan)

Grup memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Grup adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.

Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama tertimbang pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

***18. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***b. Post-employment benefits liabilities** (continued)*

***Changes in bond yields** (continued)*

The Group ensures that the investment positions are managed within an asset-liability matching ("ALM") framework that is developed to achieve long-term returns that are in line with the obligation in defined benefit pension plans. Within this ALM framework, the Group's objective is to match assets and the pension obligations by investing in a well-diversified portfolio that generates sufficient risk-adjusted returns.

Investment across the plans is well diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The sensitivity of the defined benefit obligation to the changes in the weighted actuarial principal assumptions as of 31 December 2025 were as follows:

	Dampak atas Kewajiban Imbalan Pasti/ *Impact on Defined Benefit Obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumptions***	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumptions***	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 8.70%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 9.03%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 6.22%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 6.43%	*Salary growth rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode proyeksi unit kredit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined medical benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

18. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Risiko gaji (lanjutan)

Rata-rata durasi untuk masing-masing kewajiban imbalan pasti adalah 1,09 - 20,75 tahun.

PSP menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") untuk karyawan yang bekerja sebelum periode tahun 2007, dimana peserta dijamin dengan manfaat panjang bulanan seumur hidup dengan kenaikan otomatis sebesar 6% setiap tahun. Iuran program ini seluruhnya ditanggung oleh PSP. Pada Juni 2024, terdapat perubahan atas kenaikan manfaat pensiun. Kenaikan yang sebelumnya sebesar 6% setiap tahun untuk periode 2003 hingga 2024 berubah menjadi 2% per tahun untuk periode 2025 hingga 2027. Perubahan ini menyebabkan pengurangan biaya jasa masa lalu pada tahun 2024 sebesar Rp535.784.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

***18. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***b. Post-employment benefits liabilities** (continued)*

***Salary risk** (continued)*

The weighted average duration of each defined benefit obligation is 1.09 - 20.75 years.

PSP provides a Defined Benefit Pension Program ("DBPP") for employees who work before the period of 2007. Under this plan, participants are guaranteed a lifetime pension benefit with 6% automatic increase every year. The total contribution of this program is borne by the PSP. In June 2024, there was change in the increase of pension benefits. The increase, which was previously 6% annually for the period from 2003 to 2024, was changed to 2% annually for the period from 2025 to 2027. The change resulted in a reduction of past service costs in 2024 by Rp535,784.

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefits is as follow:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	1 sampai 5 tahun/ *Between 1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
IPK	473,555	1,666,416	13,340,238	15,480,209	*PEB*
IJPL	147,577	534,275	2,703,804	3,385,656	*OLTEB*
Jumlah	621,132	2,200,691	16,044,042	18,865,865	*Total*

19. MODAL SAHAM

19. SHARE CAPITAL

	31 Desember/*December* 2025			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah/ *Amount*	
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Indonesia	1	0.00	1	*Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Indonesia*
Saham Seri B PT Danantara Asset Management (Persero)	24,999,999	100.00	24,999,999	*Saham Seri B PT Danantara Asset Management (Persero)*
Jumlah	**25,000,000**	**100.00**	**25,000,000**	***Total***

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/81 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan) / ***19. SHARE CAPITAL** (continued)*

	31 Desember/*December* 2024			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah/ *Amount*	
Pemerintah Indonesia	**25,000,000**	**100.00**	**25,000,000**	***The Government of Indonesia***

20. LABA BERSIH PER SAHAM / ***20. EARNINGS PER SHARE***

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

Earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owner of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

	2025	2024	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5,535,884	8,668,906	*Profit for the year attributable to owner of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	25,000,000	25,000,000	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (shares)*
Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (nilai penuh)	**221,435**	**346,756**	***Earnings per shares - basic and diluted (full amount)***

Grup tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba bersih per saham dasar sama dengan laba bersih per saham dilusian.

The Group did not have potential dilutive ordinary shares, therefore basic earnings per share is the same as the diluted earnings per share.

21. PENCADANGAN SALDO LABA DAN PEMBAGIAN LABA / ***21. APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTIONS OF INCOME***

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan wajib dari keuntungan paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Under Indonesian Limited Company Law, the company is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Kinerja Tahun Buku 2024 tanggal 16 Juni 2025 dan RUPS Kinerja Tahun Buku 2023 tanggal 22 Juli 2024, Perusahaan mencadangkan saldo laba sebesar masing-masing Rp5.723.350 dan Rp4.987.378 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024. Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya (*appropriated*) meliputi cadangan terkait pemenuhan kewajiban sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan cadangan umum lainnya.

Based on the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the Financial Year 2024 dated 16 June 2025 and GMS for the Financial Year 2023 dated 22 July 2024, the Company had appropriated retained earnings of Rp5,723,350 and Rp4,987,378 for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively. The reserves that have been designated for specific use (appropriated) include reserves related to fulfilling obligations in accordance with Limited Liability Company Law and other general reserves.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2024 berdasarkan Akta Notaris No. 1 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 16 Juni 2025, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2.945.555.

As resolved during the Annual GMS concerning the approval of the Consolidated Financial Statements for the year 2024 based on Notarial Deed No. 1 by notary Lumassia S.H. dated on 16 June 2025, the shareholders approved cash dividend of Rp2,945,555.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2023 berdasarkan Akta Notaris No. 5 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 22 Juli 2024, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp1.213.402.

As resolved during the Annual GMS concerning the approval of the Consolidated Financial Statements for the year 2023 based on Notarial Deed No. 5 by notary Lumassia S.H. dated on 22 July 2024, the shareholders approved cash dividend of Rp1,213,402.

22. PENJUALAN PRODUK / *SALES OF PRODUCTS*

Pendapatan dari penjualan produk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The revenues from sales of products for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 30)			***Related parties (Note 30)***
Penjualan pupuk:			*Fertiliser sales:*
- Subsidi	681,119	871,952	*Subsidy -*
- Non-subsidi	807,458	1,180,152	*Non-subsidy -*
Penjualan non-pupuk	1,359,627	1,006,055	*Non-fertiliser sales*
Penjualan produk lainnya	4,645	327	*Sales of other products*
	2,852,849	3,058,486	
Pihak ketiga			***Third parties***
Penjualan pupuk:			*Fertiliser sales:*
- Subsidi	12,541,102	12,366,016	*Subsidy -*
- Non-subsidi	26,551,999	21,704,804	*Non-subsidy -*
Penjualan non-pupuk	5,960,327	7,002,000	*Non-fertiliser sales*
Penjualan produk lainnya	211,768	71,660	*Sales of other products*
	45,265,196	41,144,480	
Jumlah	**48,118,045**	**44,202,966**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat penjualan produk kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari jumlah penjualan produk.

For the years ended 31 December 2025 and 2024, there were no customers which sales of product exceeded 10% of total sales of products.

Pendapatan dari penjualan produk diakui pada suatu titik waktu.

The revenues from sales of products are recognised at a point in time.

23. PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH INDONESIA / *REIMBURSEMENT OF SUBSIDY FROM THE GOVERNMENT OF INDONESIA*

Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Subsidi pupuk:			***Subsidy of fertilisers:***
NPK	23,840,855	20,531,568	*NPK*
Urea	14,957,039	12,636,330	*Urea*
NPK kakao	422,753	339,164	*NPK cocoa*
Organik	274,349	45,585	*Organic*
ZA	30,495	-	*ZA*
	39,525,491	33,552,647	
Penyesuaian piutang subsidi dari Pemerintah, yang belum ditagih - bersih setelah penyesuaian tahun sebelumnya	(18,344)	(228,732)	*Adjusment of unbilled subsidy receivables from the Government - net of prior year adjusment*
Jumlah	**39,507,147**	**33,323,915**	***Total***

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/83 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH INDONESIA (lanjutan)

Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah untuk tahun 2025 dibukukan berdasarkan harga pupuk subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 30 April 2026. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, volume penyaluran subsidi masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK-RI. Secara historis, kuantitas aktual penyaluran pupuk yang disetujui dan estimasi dari kuantitas penyaluran yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian tidak berbeda secara signifikan.

23. REIMBURSEMENT OF SUBSIDY FROM THE GOVERNMENT OF INDONESIA (continued)

Reimbursement of subsidy from the Government for the year 2025 were recorded based on subsidised fertiliser price audited by BPK-RI as stated on Minutes of Audit Result dated 30 April 2026. As at the issuance date of these consolidated financial statements, the subsidy distributed volume are still being audited by BPK-RI. Historically, the actual approved distributed quantity and estimates of distributed quantity verified by the Ministry of Agriculture are not significantly different.

24. PENDAPATAN JASA / *24. RENDERING OF SERVICES*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 30)	1,496,917	2,987,612	*Related parties (Note 30)*
Pihak ketiga	1,279,540	1,101,715	*Third parties*
Jumlah	**2,776,457**	**4,089,327**	***Total***

Pendapatan jasa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The rendering of services for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Jasa operasi dan pemeliharaan	1,090,642	977,532	*Operation and maintenance services*
Jasa konstruksi pabrik dan rantai pasokan	1,007,042	451,076	*Plant construction services and supply chain*
Pendapatan konstruksi	299,337	1,999,787	*Construction revenues*
Pendapatan dari transaksi penjualan tenaga listrik	182,171	174,078	*Revenue from electricity selling transactions*
Pendapatan keuangan dari perjanjian konsesi jasa	115,966	118,438	*Finance income from service concession arrangement*
Lainnya	81,299	368,416	*Others*
Jumlah	**2,776,457**	**4,089,327**	***Total***

Terdapat pendapatan konstruksi dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp574.327 (20,69%) dan Rp2.093.535 (51,19%) dari jumlah pendapatan jasa.

There were construction revenue from PT Pertamina (Persero) and its subsidiaries for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp574,327 (20,69%) and Rp2,093,535 (51.19%), respectively, from total rendering of services.

Manajemen memperkirakan bahwa nilai transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan yang belum diselesaikan namun telah menerima pembayaran di muka pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp167.177 (2024: Rp492.302) dan akan diakui sebagai pendapatan selama rentang waktu antara 1-3 tahun ke depan.

Management expects that the transaction value allocated to the unsatisfied performance obligation but has received payment as of 31 December 2025 were amounting to Rp167,177 (2024: Rp492,302) and will be recognised as revenue within the next 1-3 years.

Terdapat pemulihan provisi *liquidated damage* yang dicatat sebagai penambah pendapatan konstruksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp1.142.817.

There were recovery of liquidated damage provision which was recorded as revenue addition for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounting to nil and Rp1,142,817, respectively.

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *25. COST OF REVENUES*

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The cost of revenues for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Bahan baku yang digunakan	53,428,863	45,078,668	*Raw material used*
Biaya *overhead* lainnya	6,213,675	5,326,416	*Other overhead costs*
Beban penyusutan (Catatan 11)	5,470,273	5,025,076	*Depreciation expenses (Note 11)*
Biaya tenaga kerja langsung	3,924,951	3,516,350	*Direct labour*
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu	-	(331,567)	*Adjustment of post-employment benefit expense – past service cost*
Perbaikan dan pemeliharaan	1,104,144	895,865	*Repairs and maintenance*
Jumlah biaya produksi	70,141,906	59,510,808	*Total production costs*
Persediaan barang jadi dan barang dalam proses:			*Finished goods and work in progress inventories:*
Awal tahun	9,371,296	11,743,310	*Beginning of the year*
Akhir tahun	(8,195,594)	(9,371,296)	*End of the year*
	71,317,608	61,882,822	
Beban non-manufaktur:			*Non-manufacturing cost:*
Perdagangan	1,414,290	2,143,164	*Trading*
Listrik, *steam*, dan utilitas	1,688,836	1,189,284	*Electricity, steam and utilities*
Jasa konstruksi	216,065	220,253	*Construction services*
Properti dan jasa kawasan industri	236,381	51,577	*Properties and services industrial estate*
Lainnya	140,747	103,316	*Others*
Jumlah beban non-manufaktur	3,696,319	3,707,594	*Total cost of non-manufacturing*
Jumlah	**75,013,927**	**65,590,416**	***Total***

Pemasok yang memiliki transaksi pembelian lebih dari 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya dengan nilai sebesar Rp23.633.909 (31,50%) (2024: Rp14.224.659 (17,42%)).

Suppliers with purchase transactions that represent more than 10% of the total consolidated revenues for the years ended 31 December 2025 were PT Pertamina (Persero) and its subsidiaries amounting to Rp23,633,909 (31.50%) (2024: Rp14,224,659 (17.42%)).

Lihat Catatan 30 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30 for details of related parties balances and transactions.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/85 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN PENJUALAN / *26. SELLING EXPENSES*

	2025	2024	
Gaji, upah, dan kesejahteraan	294,761	392,362	*Salaries, wages, and welfare*
Beban promosi dan pemasaran	122,253	189,503	*Promotion and marketing expenses*
Beban jasa	111,350	125,482	*Service expenses*
Beban penyusutan (Catatan 11)	105,476	108,125	*Depreciation expenses (Note 11)*
Beban sewa	87,452	50,723	*Rent expenses*
Beban pemeliharaan	54,679	62,528	*Maintenance expenses*
Beban perlengkapan dan operasional kantor	41,579	39,863	*Supply and office operating expenses*
Beban asuransi	21,138	20,265	*Insurance expenses*
Beban penelitian	19,928	14,159	*Research expenses*
Beban perjalanan dinas	19,150	22,438	*Travel expenses*
Beban unit pelayanan dan utilitas	10,230	8,560	*Service unit and utility expenses*
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu	-	(28,167)	*Adjustment of post-employment benefit expense – past service cost*
Beban lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	32,338	33,901	*Other expenses (each below Rp10,000)*
Jumlah	**920,334**	**1,039,742**	***Total***

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	2024	
Gaji, upah, dan kesejahteraan	2,425,558	2,452,417	*Salaries, wages, and welfare*
Beban jasa	822,233	891,393	*Service expenses*
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang - bersih	344,223	546,925	*Additional provision for impairment of receivables - net*
Beban penyusutan (Catatan 11)	252,204	200,655	*Depreciation expenses (Note 11)*
Beban bina wilayah	214,717	250,864	*Regional development expenses*
Beban unit pelayanan dan utilitas	197,586	182,911	*Service unit and utility expenses*
Beban pemeliharaan	185,630	129,679	*Maintenance expenses*
Beban pajak lainnya	172,105	212,933	*Other tax expenses*
Beban perjalanan dinas	167,160	195,459	*Travel expenses*
Beban perlengkapan dan operasional kantor	168,389	148,632	*Supply and office operating expenses*
Beban promosi dan pemasaran	155,077	261,235	*Promotion and marketing expenses*
Beban pelatihan	131,333	159,163	*Training expenses*
Beban sewa	53,946	81,839	*Rent expenses*
Beban penelitian	51,388	50,693	*Research expenses*
Beban asuransi	9,505	17,773	*Insurance expenses*
Penurunan nilai aset tetap	-	54,338	*Impairment of fixed assets*
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu	-	(164,275)	*Adjustment of post-employment benefit expense – past service cost*
Beban lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	200,756	298,101	*Other expenses (each below Rp10,000)*
Jumlah	**5,551,810**	**5,970,735**	***Total***

28. (BEBAN)/PENDAPATAN LAINNYA - BERSIH / *28. OTHER (EXPENSE)/INCOME - NET*

	2025	2024	
Kerugian selisih kurs - bersih	(69,787)	(65,678)	*Foreign exchange loss - net*
Denda dan klaim	183,780	120,398	*Penalty and claim*
(Beban)/pendapatan lainnya - bersih	(557,397)	353,455	*Other (expense)/income - net*
Keuntungan atas restrukturisasi utang dan pinjaman (Catatan 38)	-	3,269,765	*Gain on restructurisation payable and loan (Note 38)*
Jumlah	**(443,404)**	**3,677,940**	***Total***

29. BIAYA KEUANGAN / *29. FINANCE COSTS*

	2025	2024	
Pinjaman bank jangka pendek	565,355	745,118	*Short-term bank loans*
Amortisasi atas restrukturisasi utang dan pinjaman - Rekind	286,793	227,456	*Amortisation of restructured payables and loans - Rekind*
Utang obligasi	238,596	350,799	*Bonds payable*
Pinjaman jangka panjang	173,086	351,547	*Long-term loans*
Biaya bank dan pinjaman	99,235	84,992	*Bank and loan cost*
Kerugian selisih kurs atas pinjaman	9,386	158,022	*Foreign exchange loss on borrowing*
Jumlah	**1,372,451**	**1,917,934**	***Total***

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI / *30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES*

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of rexlationships with related parties

In the normal course of business, the Group entered into trade and other transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those for transactions between unrelated parties.

The details of the nature of relationships and types of significant transactions with related parties are as follows:

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/87 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

***Nature of relationships with related parties** (continued)*

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties*	Transaksi/ *Transaction*
Pemerintah Indonesia/ *The Government of Indonesia*	Pemegang saham utama/ *Ultimate parent*	Dividen, piutang dan penggantian biaya subsidi/ *Dividend, receivables and reimbursement of subsidy*
Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI, PT Bank Mandiri Taspen	Entitas di bawah kendali Pemerintah/*Entities controlled by the Government*	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, fasilitas *Non Cash loan*, fasilitas *Bill Purchasing Line*, fasilitas Kredit Modal Kerja, fasilitas *Supply Chain Financing*, fasilitas *Treasury Line/ Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, placement of restricted cash, Non Cash Loan facility, Bill Purchasing Line facility, Working Capital Loans facility, Supply Chain Financing Facility, Treasury Line facility*
PT Adhi Karya (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Fokus Jasa Mitra, PT Graha Sarana Gresik, PT Industri Gula Glenmore, PT Pertamina (Persero) dan entitas anak/*and subsidiaries,* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak/*and subsidiaries*, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Dahana, PT Pembangunan Perumahan	Entitas di bawah kendali Pemerintah/*Entities controlled by the Government*	Penjualan pupuk subsidi, penjualan pupuk non-subsidi, pendapatan jasa EPC, pendapatan jasa non-EPC, pendapatan jasa, penjualan produk non-pupuk, pembelian bahan baku, sewa, jasa pemeliharaan mekanik, pemakaian listrik, jasa pengangkutan gas dan pengelola aset program manfaat pasti/*Subsidy fertiliser sales, non-subsidy fertiliser sales, revenue from EPC, revenue from non-EPC, rendering of services, non-fertiliser sales, purchase of raw material, rental, mechanic maintenance, electricities, gas transportation services and defined benefit plan asset manager*
PT Aneka Jasa Grhadika, PT Gresik Cipta Sejahtera, PT Petrokopindo Cipta Selaras, PT Multi Nitrotama Kimia ("MNK"), PT Yasida Makmur Abadi, Koperasi Karyawan Keluarga PT Petro Karya Mandiri Besar Petrokimia Gresik	Entitas asosiasi/*Associates*	Penjualan pupuk non-subsidi, penjualan non-pupuk, sewa dan pembelian non-bahan baku/*Non-subsidy fertiliser sales, non-fertiliser sales, rental and purchase of non-raw materials*
PT Petro Jordan Abadi ("PJA")	Ventura bersama/*Joint ventures*	Penjualan non-pupuk, piutang usaha dan utang usaha/*Non-fertiliser sales, trade receivables and trade payables*
RDMP Balikpapan JO	Ventura bersama/*Joint ventures*	Pendapatan, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan/*Revenues, trade receivables, unearned revenue, construction contract work in progress - due from customers*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Personil manajemen kunci (terdiri dari anggota direksi dan komisaris)/*Key management personnel (consisting of members of the board of directors and commissioners)*	Kompensasi dan remunerasi/ *Compensation and remuneration*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant transactions with related parties are as follows:

Piutang usaha: / ***Trade receivables:***

	2025	2024	
PT Gresik Cipta Sejahtera dan entitas anak	125,103	95,025	*PT Gresik Cipta Sejahtera and subsidiaries*
RDMP Balikpapan JO	69,803	88,761	*RDMP Balikpapan JO*
PT Pertamina (Persero)	65,428	46,615	*PT Pertamina (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) dan entitas anak	42,993	59,379	*PT Semen Indonesia (Persero) and subsidiaries*
PT Yasida Makmur Abadi	30,540	40,899	*PT Yasida Makmur Abadi*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	16,508	69,870	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp30.000)	193,047	238,049	*Others (each below Rp30,000)*
	543,422	638,598	
Cadangan penurunan nilai	(125,698)	(121,873)	*Provision for impairment*
Jumlah	417,724	516,725	*Total*
Persentase terhadap jumlah aset	0.28%	0.37%	*As a percentage to total assets*

Piutang/(utang) subsidi dari Pemerintah Indonesia: / ***Subsidy receivables/(payables) from the Government of Indonesia:***

	2025	2024	
Piutang subsidi Pemerintah Indonesia	11,981,658	1,721,861	*Subsidy receivables Government of Indonesia*
Cadangan penurunan nilai	(337,646)	(104,168)	*Allowance for impairment*
Jumlah	11,644,012	1,617,693	*Total*
Persentase terhadap jumlah aset	7.75%	1.16%	*As a percentage to total assets*
Utang subsidi Pemerintah Indonesia	62,002	1,435,708	*Subsidy payables Government of Indonesia*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.13%	3.59%	*As a percentage to total liabilities*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/89 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan:

Construction contract work in progress - due from customers:

	2025	2024	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	126,789	119,008	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	25,929	84,047	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	8,436	11,061	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	161,154	214,116	*Total*
Persentase terhadap jumlah aset	0.11%	0.15%	*As a percentage to total assets*

Utang usaha:

Trade payables:

	2025	2024	
PT Petro Jordan Abadi	110,232	7,335	*PT Petro Jordan Abadi*
PT Nindya Karya	59,580	-	*PT Nindya Karya*
PT Petrokopindo Cipta Selaras	44,034	23,177	*PT Petrokopindo Cipta Selaras*
Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik	38,469	17,558	*Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik*
PT BGR Logistik Indonesia	22,295	-	*PT BGR Logistik Indonesia*
PT Aneka Jasa Grhadika	31,356	8,093	*PT Aneka Jasa Grhadika*
PT Petro Karya Niaga	26,458	-	*PT Petro Karya Niaga*
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	124	90,591	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	32,275	24,912	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*
PT Freeport Indonesia	-	63,212	*PT Freeport Indonesia*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp20.000)	204,065	103,327	*Others (each below Rp20,000)*
Jumlah	568,888	338,205	*Total*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	1.22%	0.84%	*As a percentage to total liabilities*

Utang lainnya:

Other payables:

	2025	2024	
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	95,551	34,314	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	95,551	34,314	*Total*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.20%	0.09%	*As a percentage to total liabilities*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES* *(continued)*

Pendapatan:

Revenues:

	2025	2024	
Penjualan produk (Catatan 22)	2,852,849	3,058,486	*Sales of products (Note 22)*
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia (Catatan 23)	39,507,147	33,323,915	*Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia (Note 23)*
Pendapatan jasa (Catatan 24)	1,496,917	2,987,612	*Rendering of services (Note 24)*
Jumlah	43,856,913	39,370,013	*Total*

	2025	2024	
Pemerintah Indonesia (Catatan 23)	39,507,147	33,323,915	*Government of Indonesia (Note 23)*
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	582,179	2,582,210	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PT Gresik Cipta Sejahtera	532,464	601,299	*PT Gresik Cipta Sejahtera*
MNK	425,308	482,658	*MNK*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	429,171	393,625	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
PT Freeport Indonesia	298,251	34,427	*PT Freeport Indonesia*
PT Petrocentral	188,017	126,525	*PT Petrocentral*
PT Dahana	164,556	118,247	*PT Dahana*
PT Petro Karya Mandiri	152,067	146,231	*PT Petro Karya Mandiri*
RDMP Balikpapan JO	150,642	482,184	*RDMP Balikpapan JO*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	139,466	142,583	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak	118,169	121,301	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and subsidiaries*
PJA	109,956	107,783	*PJA*
Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik	79,186	82,008	*Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	77,352	199,200	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Smelting Indonesia	72,150	73,788	*PT Smelting Indonesia*
PT Sang Hyang Seri	-	205,240	*PT Sang Hyang Seri*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp70.000)	830,832	146,789	*Others (each below Rp70,000)*
Jumlah	43,856,913	39,370,013	*Total*
Persentase terhadap jumlah pendapatan	48.51%	48.24%	*As a percentage to total revenue*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/91 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / ***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES*** *(continued)*

Pembelian: / ***Purchases:***

	2025	2024	
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	23,633,909	14,224,659	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PJA	4,394,289	3,497,845	*PJA*
PT Bukit Asam Tbk	745,971	571,293	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Petrokopindo Cipta Selaras	697,734	464,439	*PT Petrokopindo Cipta Selaras*
PT Fokus Jasa Mitra	464,137	411,614	*PT Fokus Jasa Mitra*
PT Freeport Indonesia	368,051	308,174	*PT Freeport Indonesia*
PT Aneka Jasa Grhadika	350,565	349,879	*PT Aneka Jasa Grhadika*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	332,603	374,052	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	318,320	-	*PT Pembangunan Perumahan (Persero)*
PT Graha Sarana Gresik	256,341	208,021	*PT Graha Sarana Gresik*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	321,690	163,253	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*
PT Gresik Cipta Sejahtera	204,905	166,204	*PT Gresik Cipta Sejahtera*
PT Petro Karya Niaga	191,598	-	*PT Petro Karya Niaga*
Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik	169,625	218,064	*Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik*
Clariant Kujang Catalysts	133,624	-	*Clariant Kujang Catalysts*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	132,110	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100.000)	1,369,836	754,084	*Others (each below Rp100,000)*
Jumlah	33,953,198	21,843,691	*Total*
Persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan	45.24%	33.30%	*As a percentage to total cost of revenues*

Kompensasi manajemen kunci: / ***Key management compensation:***

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of the Company for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Direksi			***Board of Directors***
Gaji dan tunjangan rumah	32,035	34,150	*Salary and home allowance*
Tunjangan hari raya	2,598	2,598	*Holiday allowance*
Tantiem	97,415	59,875	*Tantiem*
Imbalan pascakerja	7,311	9,089	*Post-employment benefit*
	139,359	105,712	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Gaji dan tunjangan rumah	18,735	18,802	*Salary and home allowance*
Tunjangan hari raya	1,355	1,204	*Holiday allowance*
Tantiem	-	33,878	*Tantiem*
Imbalan pascakerja	3,903	4,195	*Post-employment benefit*
	23,993	58,079	
Jumlah	163,352	163,791	*Total*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/92 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN / *31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*

	31 Desember/*December* 2025			
	Jumlah/ *Total*	**Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *At amortised cost***	**Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*At fair value through other comprehensive income***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	11,822,634	11,822,634	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	2,313,876	2,313,876	-	*Trade receivables*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	11,644,012	11,644,012	-	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia*
Piutang subsidi yang belum ditagih	912,589	912,589	-	*Unbilled subsidy receivables*
Piutang lainnya	188,196	188,196	-	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	192,643	192,643	-	*Construction contract work in progress - due from customers*
Aset lancar lainnya	11,244,718	11,244,718	-	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	2,837,949	2,325,634	512,315	*Other non-current assets*
Jumlah	41,156,617	40,644,302	512,315	*Total*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	3,406,268	3,406,268	-	*Trade payables*
Utang lainnya	1,676,961	1,676,961	-	*Other payables*
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	62,002	62,002	-	*Subsidy payable to the Government of Indonesia*
Liabilitas yang masih harus dibayar	9,923,722	9,923,722	-	*Accrued liabilities*
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	3,538	3,538	-	*Amounts due to customer for construction contract work*
Pinjaman bank jangka pendek	2,529,628	2,529,628	-	*Short-term bank loans*
Bagian lancar pinjaman jangka panjang	3,796,429	3,796,429	-	*Current portion of non-current borrowings*
Pinjaman jangka panjang	15,649,406	15,649,406	-	*Non-current borrowings*
Liabilitas tidak lancar lainnya	614,961	614,961	-	*Other non-current liabilities*
Jumlah	37,662,915	37,662,915	-	*Total*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/93 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / ***31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*** *(continued)*

	31 Desember/*December* 2024			
	Jumlah/ *Total*	**Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *At amortised cost***	**Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*At fair value through other comprehensive income***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	17,278,272	17,278,272	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	2,450,699	2,450,699	-	*Trade receivables*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	1,617,693	1,617,693	-	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia*
Piutang subsidi yang belum ditagih	930,933	930,933	-	*Unbilled subsidy receivables*
Piutang lainnya	96,950	96,950	-	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	369,944	369,944	-	*Construction contract work in progress - due from customers*
Aset lancar lainnya	13,144,598	13,144,598	-	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	2,429,759	2,335,584	94,175	*Other non-current assets*
Jumlah	38,318,848	38,224,673	94,175	*Total*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	2,335,343	2,335,343	-	*Trade payables*
Utang lainnya	1,264,821	1,264,821	-	*Other payables*
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	1,435,708	1,435,708	-	*Subsidy payable to the Government of Indonesia*
Liabilitas yang masih harus dibayar	9,543,703	9,543,703	-	*Accrued liabilities*
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	5,040	5,040	-	*Amounts due to customer for construction contract work*
Pinjaman bank jangka pendek	4,209,975	4,209,975	-	*Short-term bank loans*
Bagian lancar pinjaman jangka panjang	2,373,290	2,373,290	-	*Current portion of non-current borrowings*
Pinjaman jangka panjang	10,925,341	10,925,341	-	*Non-current borrowings*
Liabilitas tidak lancar lainnya	194,302	194,302	-	*Other non-current liabilities*
Jumlah	32,287,523	32,287,523	-	*Total*

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos berbagai risiko keuangan diantaranya: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko keuangan dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari ketidakpastian atau perubahan tak terduga dalam kondisi pasar dan kinerja keuangan konsolidasian Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko keuangan yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

Faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

(i) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Risiko suku bunga dari kas di bank dan deposito tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Grup memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga nilai wajar. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Tabel berikut berisi liabilitas keuangan yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dengan suku bunga mengambang:

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks as follows: market risk (including foreign currency exchange rates risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential losses arising from uncertainties or unexpected changes in market conditions and the Group's consolidated financial performance.

The Group uses various methods to measure financial risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange and other price risks and aging analysis for credit risk.

Financial risk factor

a. Market risk

(i) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from short-term borrowings and long-term borrowings. The interest rate risk from cash in bank and deposits is not significant and all other financial instruments are non-interest bearing. The Group has borrowings with fixed and floating interest rates. Borrowings with floating interest rates are exposed to cashflow interest rate risk. Borrowings with fixed rates exposes the Group to fair value interest risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

The following table contains the financial liabilities of the Group as at 31 December 2025 with floating rate:

	2025	
Pinjaman bank	14,649,256	*Bank loans*

Sehubungan dengan adanya reformasi acuan suku bunga mengambang, acuan suku bunga USD *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") sudah dihentikan setelah 30 Juni 2023. Grup telah menelaah dan berdiskusi dengan para kreditur serta sudah melakukan transisi atas seluruh kontrak pinjaman di 31 Desember 2023. Suku bunga alternatif yang digunakan Grup dalam transisi dari USD LIBOR adalah *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR"), lihat Catatan 15 dan 16.

In connection with the floating interest rate benchmark reform, the USD London Interbank Offered Rate ("LIBOR") benchmark has been discontinued after 30 June 2023. The Group has reviewed and discussed this matter with its creditors and completed the transition of all loan agreements as of 31 December 2023. The alternative interest rate used by the Group in transitioning from USD LIBOR is the Secured Overnight Financing Rate ("SOFR"), see Notes 15 and 16.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/95 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

Berbagai skenario disimulasikan dengan mempertimbangkan pembiayaan kembali, pembaruan posisi yang ada, pembiayaan alternatif dan lindung nilai jika diperlukan. Berdasarkan skenario ini, Grup menghitung dampaknya terhadap laba rugi pada perubahan suku bunga yang ditentukan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 jika tingkat suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan panjang 100 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba rugi untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp117.041 (2024: Rp92.407).

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2025 jika Rp melemah/menguat sebesar 10% terhadap USD dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak tahun berjalan akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp93.008 (2024: lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp381.083), terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan/kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Grup didenominasikan dalam mata uang USD dan EUR. Deviasi pergerakan kurs untuk mata uang tersebut adalah masing-masing sebesar 2,91% dan 8,88% selama tahun 2025.

***32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***Financial risk factor** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(i) Interest rate risk (continued)

Various scenarios are simulated, taking into account refinancing, the rollover of existing positions, alternative financing, and hedging where necessary. Based on these scenarios, the Group calculates the impact on profit or loss of specified changes in interest rates.

As at 31 December 2025, if interest rates on short-term and long-term borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit or loss for the year would have been Rp117,041 (2024: Rp92,407), lower/higher.

(ii) Foreign currency exchange risk

The Group is facing foreign exchange risk arising from various currency exposures. Foreign exchange risk primarily arises from recognised monetary assets and liabilities that are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. These exposures are managed partially by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency.

As at 31 December 2025, if the Rp had weakened/strengthened by 10% against the USD with all other variables held constant, the pre-tax profit for the year would have been Rp93,008 lower or higher (2024: Rp381,083 lower or higher), respectively, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

As at 31 December 2025, monetary assets and liabilities held by the Group are denominated in USD and EUR. The deviation for such currencies are 2.91% and 8.88%, respectively, during 2025.

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, jika nilai tukar Rp terhadap mata uang asing meningkat sebesar deviasi yang telah disebutkan diatas dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak tahun berjalan akan menjadi lebih rendah sebesar Rp110.895 terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, piutang usaha, pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan, utang usaha, liabilitas yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek, dan pinjaman bank jangka panjang dalam mata uang asing.

(iii) Risiko harga

Harga komoditas seperti pupuk dan amonia tidak stabil seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pelanggan. Walaupun basis pelanggan Grup terdiversifikasi dan tidak tergantung pada satu pasar atau negara saja, pendapatan Grup tetap dapat mengalami dampak negatif dari menurunnya harga komoditas. Namun demikian, aset dan liabilitas keuangan Grup tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi harga pupuk dan amonia dunia karena penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli pupuk dan amonia yang ditentukan pada saat pengiriman.

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp40.244.028 (2024: Rp38.310.595) Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, piutang usaha, piutang subsidi, aset lancar dan tidak lancar lainnya, piutang lainnya dan pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan.

Semua kas di bank dan aset keuangan tidak lancar lainnya yang merupakan saldo bank yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan tersebut minimal.

Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dan piutang subsidi dari Pemerintah yang belum tertagih dianggap dapat diabaikan, sebab pihak yang bersangkutan merupakan Pemerintah Indonesia.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

***Financial risk factor** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(ii) Foreign currency exchange risk (continued)

As at 31 December 2025, if the exchange rates of the Rp against foreign currencies appreciated by the deviation aforementioned with all other variables held constant, profit before tax for the year would have been Rp110,895 lower, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables, construction contract work in progress - due from customers, trade payables, accrued liabilities, short-term bank loans and long-term bank loans denominated in foreign currencies.

(iii) Price risk

Commodity prices such as fertiliser and ammonia are unstable due to changes in supply and demand from customers. Although the Group has diverse customers and does not depend on a specific market or country, the Group revenue could be negatively affected by the decrease in commodity prices. However, the Group's financial assets and liabilities are not significantly exposed to the price volatility of fertilizers and ammonia markets because the settlement of financial assets and liabilities is based on the prices stipulated in the fertilizers and ammonia sales and purchase agreements that will be determined at the time of delivery.

b. Credit risk

As at 31 December 2025, the total maximum exposure from credit risk was Rp40,244,028 (2024: Rp38,310,595). Credit risk arises from cash in banks, trade receivables, subsidy receivables, other current and non-current assets, other receivables and construction contract work in progress - due from customers.

All the cash in banks and other non-current financial assets in the form of restricted deposits are placed in banks with good credit rating. Therefore, the Group believes the credit risk of such financial assets is minimal.

The credit risk on subsidy receivables and unbilled subsidy receivables from the Government are considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/97 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Terkait piutang retensi dan pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan, Grup mempunyai jaminan dalam bentuk garansi pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh bank atau institusi keuangan.

Selain itu, Grup juga memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan kepada pelanggan dengan sejarah kredit yang baik. Grup memiliki penilaian atas pelanggan dalam hal kemampuan membayar piutang saat jatuh tempo. Penilaian setiap pelanggan didasarkan pada kemampuan keuangan pelanggan serta pengalaman sebelumnya.

Atas dasar itu, penyisihan kerugian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ditetapkan sebagai berikut untuk piutang usaha dan piutang lainnya:

***32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***Financial risk factor** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

Related to retention receivables and construction contract work in progress - due from customers, the Group receives performance guarantees issued by banks or financial institutions.

In addition, the Group also ensures that sales are only made to customers with a good credit history. The Group has an assessment of customers in terms of ability to pay receivables when due. Each customer's valuation is based on the customer's financial ability and previous experience.

On that basis, the loss provisions as at 31 December 2025 and 2024 were determined as follows for trade receivables and other receivables:

	31 Desember/*December* 2025						
	Lancar/ *Current*	Sudah jatuh tempo 1-90 hari/ *Overdue 1-90 days*	Sudah jatuh tempo 91-120 hari/ *Overdue 91-120 days*	Sudah jatuh tempo 121-365 hari/ *Overdue 121-365 days*	Sudah jatuh tempo >365 hari/ *Overdue >365 days*	Jumlah/ *Total*	
Tingkat kerugian yang diharapkan	0.60%	5.78%	33.64%	70.00%	99.43%	32.52%	*Expected loss rate*
Piutang usaha	1,741,887	523,395	77,331	37,279	766,130	3,146,022	*Trade receivables*
Piutang lainnya	54,591	47,213	140,369	126,409	277,111	645,693	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	192,643	-	-	-	-	192,643	*Construction contract work in progress - due from customer*
Piutang lainnya - tidak lancar	-	-	-	-	38,686	38,686	*Other receivables - non-current*
Penyisihan kerugian	(11,941)	(33,002)	(73,235)	(114,588)	(1,075,721)	(1,308,487)	*Provision*

	31 Desember/*December* 2024						
	Lancar/ *Current*	Sudah jatuh tempo 1-90 hari/ *Overdue 1-90 days*	Sudah jatuh tempo 91-120 hari/ *Overdue 91-120 days*	Sudah jatuh tempo 121-365 hari/ *Overdue 121-365 days*	Sudah jatuh tempo >365 hari/ *Overdue >365 days*	Jumlah/ *Total*	
Tingkat kerugian yang diharapkan	3.51%	4.45%	3.18%	78.07%	99.67%	31.24%	*Expected loss rate*
Piutang usaha	1,647,584	736,435	112,208	130,023	680,323	3,306,573	*Trade receivables*
Piutang lainnya	57,876	28,398	8,402	152,938	266,217	513,831	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	369,944	-	-	-	-	369,944	*Construction contract work in progress - due from customer*
Piutang lainnya - tidak lancar	-	-	-	-	49,639	49,639	*Other receivables - non-current*
Penyisihan kerugian	(72,864)	(34,057)	(3,837)	(220,894)	(992,906)	(1,324,558)	*Provision*

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama dan hari lewat jatuh tempo. Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran pelanggan selama 36 bulan sebelum 1 Januari 2025 atau 31 Desember 2025 serta kerugian kredit historis yang dialami, bila ada. Tingkat kerugian historis kemudian disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi *forward-looking* mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Grup telah mencadangkan nilai piutang usaha dan piutang lainnya yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai.

Seluruh saldo piutang usaha dan piutang lainnya di atas yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai sebagian besar berasal dari pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi yang sudah ada lebih dari 12 bulan yang tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya yang telah dilakukan.

***32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***Financial risk factor** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due. The expected loss rates are based on the profile of payments from customers over a period of 36 months before 1 January 2025 or 31 December 2025 and historic credit losses, if any. The historical loss rates are then adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables.

As at 31 December 2025 and 2024, the Group had provided the provision for the balance of trade receivables and other receivables which were past due and impaired.

The entire balance from trade receivables and other receivables is mostly derived from third party and related party customers which have existed for more than 12 months and are spread over a large number of customers. The Group also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sale of fertiliser, non-fertiliser and other services rendered.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/99 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Kebijakan umum Grup untuk penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya untuk pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah sebagai berikut:

(i) memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik;

(ii) menerima pelanggan baru dan penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kewenangan Grup; dan

(iii) meminta pembayaran di muka untuk penjualan pupuk dan non-pupuk untuk pelanggan lama dan baru.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengelola risiko likuiditas dan memastikan ketersediaan kas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana. Selain itu, Grup juga memiliki fasilitas *stand-by loan* yang dapat ditarik sesuai dengan permintaan untuk mendanai kegiatan operasi pada saat diperlukan.

***32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***Financial risk factor** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

The Group's general policies for sale of fertiliser, non-fertiliser and other services rendered to new and existing customers are as follows:

(i) selecting customers with strong financial conditions and good reputations;

(ii) acceptance of new customers and sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered being approved by the authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy; and

(iii) requesting advance payments for sales of fertiliser and non-fertiliser for recurring and new customers.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the Group's cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. To manage its liquidity risk and ensuring cash availability, the Group monitors its level of cash and cash equivalents, and maintains these at a level deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan maturity profiles and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds. In addition, the Group has a stand-by loan facility which can be withdrawn upon request to fund its operations when needed.

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

***Financial risk factor** (continued)*

***c. Liquidity risk** (continued)*

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	2025				
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	**1-5 tahun/ *years***	**Di atas 5 tahun/ *Over 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	3,406,268	-	-	3,406,268	*Trade payables*
Utang lainnya	1,676,961	-	-	1,676,961	*Other payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	9,923,722	-	-	9,923,722	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	2,603,714	-	-	2,603,714	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang	-	11,813,273	7,850,234	19,663,507	*Long-term bank loans and other loans*
Utang obligasi	1,724,391	1,334,093	-	3,058,484	*Bonds payable*
Liabilitas tidak lancar lainnya	-	-	1,095,331	1,095,331	*Other non-current liabilities*
Liabilitas sewa	71,112	128,016	45,581	244,709	*Lease liabilities*
Jumlah	19,406,168	13,275,382	8,991,146	41,672,696	*Total*

	2024				
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	**1-5 tahun/ *years***	**Di atas 5 tahun/ *Over 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	2,335,343	-	-	2,335,343	*Trade payables*
Utang lainnya	1,264,821	-	-	1,264,821	*Other payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	9,543,703	-	-	9,543,703	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	4,374,263	-	-	4,374,263	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang	2,755,259	7,671,196	7,850,166	18,276,621	*Long-term bank loans and other loans*
Utang obligasi	1,082,947	3,034,576	-	4,117,523	*Bonds payable*
Liabilitas tidak lancar lainnya	36,608	142,098	930,124	1,108,830	*Other non-current liabilities*
Liabilitas sewa	135,118	141,791	5,147	282,056	*Lease liabilities*
Jumlah	21,528,062	10,989,661	8,785,437	41,303,160	*Total*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/101 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

d. Estimasi nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajarnya:

32. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES* *(continued)*

Financial risk factor *(continued)*

d. Fair value estimation

The table below describes the carrying amounts and fair value of financial liabilities that are not presented by the Group at fair value:

	2025		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Utang obligasi	2,824,643	2,879,317	*Bonds payable*
Pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap	206,514	242,128	*Long-term bank loans with fixed interest rate*

Nilai wajar dari utang obligasi diestimasi menggunakan harga pasar yang dikutip pada tanggal 31 Desember 2025 dan diklasifikasikan sebagai tingkat 1 dalam hierarki nilai wajar.

The fair value of bonds payable are estimated using the quoted market price as at 31 December 2025 and is within level 1 of the fair value hierarchy.

Nilai wajar dari pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap diestimasi menggunakan *input* tingkat 2 dalam hierarki nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2025.

The fair value of long-term bank loan with fixed interest rate is estimated using the inputs within level 2 of the fair value hierarchy as at 31 December 2025.

e. Manajemen risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

e. Capital risk management

In managing the capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowings and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach regarding capital management during the year.

33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS / *33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS*

a. Aktivitas investasi non-kas yang signifikan / *a. Significant non-cash investing activities*

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan aktivitas non kas adalah sebagai berikut:

Supplementary information to the consolidated statements of cash flow relating to non-cash activities is as follows:

	2025	2024	
Aktivitas investasi			***Investing activities***
Perolehan aset tetap melalui utang lainnya dan beban akrual	73,031	216,848	*Acquisition of fixed assets through other payables and accrued expenses*
Perolehan aset tetap melalui uang muka	53,644	295,784	*Acquisition of fixed assets through advances*
Perolehan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	552,114	274,949	*Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities*
Perolehan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	325,226	154,810	*Acquisition of fixed assets through capitalisation of borrowing cost*
Penambahan investasi asosiasi melalui penyesuaian nilai wajar	-	566,881	*Addition of investment in associate through fair value adjustment*

b. Rekonsiliasi utang bersih / *b. Net debt reconciliation*

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Table below presents a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2025 and 2024, as follows:

	Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	Pinjaman/ *Borrowings*	Jumlah/ *Total*	
Saldo pada 1 Januari 2024	286,418	28,439,091	28,725,509	*Balance as at 1 January 2024*
Arus kas masuk	-	20,739,749	20,739,749	*Cash in flows*
Arus kas keluar	(376,183)	(30,054,474)	(30,430,657)	*Cash out flows*
Akuisisi - liabilitas sewa	274,949	-	274,949	*Acquisition - lease liabilities*
Dampak restrukturisasi pinjaman	-	(2,436,146)	(2,436,146)	*Loan restructurisation impact*
Transaksi non kas lainnya	69,098	716,104	785,202	*Other non-cash transactions*
Saldo pada 31 Desember 2024	254,282	17,404,324	17,658,606	*Balance as at 31 December 2024*
Arus kas masuk	-	22,387,935	22,387,935	*Cash in flows*
Arus kas keluar	(492,985)	(18,138,455)	(18,631,440)	*Cash out flows*
Akuisisi - liabilitas sewa	552,114	-	552,114	*Acquisition - lease liabilities*
Transaksi non kas lainnya	59,663	98,586	158,249	*Other non-cash transactions*
Saldo pada 31 Desember 2025	373,074	21,752,390	22,125,464	*Balance as at 31 December 2025*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/103 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The Group's monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

		2025		2024		
		Mata uang/ *Currency* (000)	Setara Rp/ *Rp equivalent*	Mata uang/ *Currency* (000)	Setara Rp/ *Rp equivalent*	
Aset keuangan						***Financial assets***
Kas dan setara kas	USD	74,684	1,253,351	73,733	1,191,668	*Cash and cash equivalents*
	Lainnya/*Others*		8,882		6,623	
Piutang usaha	USD	33,973	570,132	24,951	403,250	*Trade receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	USD	146	8,235	12,730	205,749	*Construction contract work in progress - from customers*
Jumlah aset			1,840,600		1,807,290	*Total assets*
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Utang usaha	USD	20,732	347,921	28,895	467,012	*Trade payables*
	EUR	1,066	21,059	995	16,768	
	Lainnya/*Others*		5,374		3,834	
Liabilitas yang masih harus dibayar	USD	269,416	4,521,347	315,263	5,095,259	*Accrued liabilities*
	EUR	1,248	24,656	1,083	18,250	
	Lainnya/*Others*		56		20	
Pinjaman bank jangka panjang	USD	62,630	1,051,058	67,555	1,091,824	*Long-term bank loans*
Jumlah liabilitas			5,971,471		6,692,967	*Total liabilities*
Liabilitas moneter - bersih			(4,130,871)		(4,885,677)	*Monetary liabilities – net*

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain Rp pada tanggal 31 Desember 2025 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, liabilitas moneter bersih akan turun sekitar Rp59,930.

Monetary assets and liabilities mentioned above are translated using the Bank Indonesia closing rate as at 31 December 2025 and 2024.

If assets and liabilities in currencies other than Rp as at 31 December 2025 are translated using the exchange rate as at the issuance date of the consolidated financial statements, the total net monetary liabilities will decrease by approximately Rp59,930.

35. INFORMASI SEGMEN USAHA

Untuk kepentingan pelaporan manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut:

a. Pupuk dan amoniak

Segmen pupuk dan amoniak melakukan kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa di bidang perpupukan.

b. Jasa konstruksi

Segmen jasa konstruksi melakukan kegiatan usaha dalam *engineering*, *procurement,* dan *construction* ("EPC").

c. Lainnya

Segmen lainnya melakukan kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi, pergudangan, dan kegiatan terkait lainnya.

35. SEGMENT INFORMATION

For management reporting purposes, the Group is organised into business units based on their products and services and has three reportable operating segments as follows:

a. Fertiliser and ammonia

The fertiliser and ammonia segment involves in production, trading and services in fertiliser.

b. Construction services

The construction services segment involves in engineering, procurement and construction ("EPC").

c. Others

The other segment involves in transportation business activities, expedition, storage and other related activties.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/104 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba segmen dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

***35. SEGMENT INFORMATION** (continued)*

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of decision-making about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on segment income and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements.

	31 Desember/*December* 2025					
	Sebelum eliminasi/*Before elimination*					
	Pupuk dan amoniak/ *Fertiliser and ammonia*	Jasa konstruksi/ *Construction sevices*	Lainnya/ *Other*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan eksternal	89,102,651	3,148,947	1,061,594	(2,911,543)	90,401,649	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	1,661,665	-	5,785,280	(7,446,945)	-	*Inter-segment revenues*
Pendapatan bersih	90,764,316	3,148,947	6,846,874	(10,358,488)	90,401,649	*Net revenues*
LABA USAHA						***OPERATING INCOME***
Beban pokok pendapatan	(75,013,451)	(2,571,354)	(2,036,281)	4,607,159	(75,013,927)	*Cost of revenues*
Beban penjualan	(2,309,498)	(8,994)	(7,865)	1,406,023	(920,334)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(3,379,751)	(477,134)	(84,366)	(1,610,559)	(5,551,810)	*General and administrative expenses*
Beban lainnya - bersih	(477,625)	(6,771)	73,578	(32,586)	(443,404)	*Other expense - net*
Pendapatan keuangan	556,193	47,755	798,403	(241,926)	1,160,425	*Finance income*
Beban keuangan	(970,245)	(377,125)	(275,267)	250,186	(1,372,451)	*Finance costs*
Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	428,190	(746,229)	-	(24,087)	(342,126)	*Share of net profit/(loss) of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak	9,598,129	(990,905)	5,315,076	(6,004,278)	7,918,022	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(2,118,630)	(76,673)	(209,934)	-	(2,405,237)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	7,479,499	(1,067,578)	5,105,142	(6,004,278)	5,512,785	*Profit for the year*
LAPORAN POSISI KEUANGAN						***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	133,359,103	6,193,314	46,820,558	(36,190,150)	150,182,825	*Segment assets*
Liabilitas segmen	40,327,967	6,383,558	5,448,079	(5,434,314)	46,725,290	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	11,219,386	147,325	44,839	(213,565)	11,197,985	*Capital expenditures*

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/105 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / *35. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/*December* 2024					
	Sebelum eliminasi/*Before elimination*					
	Pupuk dan amoniak/ *Fertiliser and ammonia*	Jasa konstruksi/ *Construction sevices*	Lainnya/ *Other*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan eksternal	78,709,747	4,376,461	1,302,021	(2,772,021)	81,616,208	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	2,472,135	-	4,397,883	(6,870,018)	-	*Inter-segment revenues*
Pendapatan bersih	81,181,882	4,376,461	5,699,904	(9,642,039)	81,616,208	*Net revenues*
LABA USAHA						***OPERATING INCOME***
Beban pokok pendapatan	(66,075,932)	(1,969,974)	(2,783,144)	5,238,634	(65,590,416)	*Cost of revenues*
Beban penjualan	(2,412,945)	(1,791)	(15,351)	1,390,345	(1,039,742)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(3,025,440)	(720,988)	(1,558,300)	(666,007)	(5,970,735)	*General and administrative expenses*
Pendapatan lainnya - bersih	650,417	3,363,275	(12,239)	(323,513)	3,677,940	*Other income - net*
Pendapatan keuangan	427,729	11,865	1,058,028	(470,662)	1,026,960	*Finance income*
Beban keuangan	(1,504,294)	(352,380)	(384,390)	323,130	(1,917,934)	*Finance costs*
Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	306,406	(885,925)	-	(2,191)	(581,710)	*Share of net profit/(loss) of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak	9,547,823	3,820,543	2,004,508	(4,152,303)	11,220,571	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(2,095,318)	(108,251)	(130,964)	-	(2,334,533)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	7,452,505	3,712,292	1,873,544	(4,152,303)	8,886,038	*Profit for the year*
LAPORAN POSISI KEUANGAN						***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	123,042,326	6,237,359	47,681,994	(37,665,024)	139,296,655	*Segment assets*
Liabilitas segmen	34,840,555	5,113,090	6,580,166	(6,597,882)	39,935,929	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	9,172,188	759,596	373,037	(791,916)	9,512,905	*Capital expenditures*

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI / *36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Penugasan dari Pemerintah / *a. Public service obligation*

Pada 2025, Permendag No. 26 Tahun 2025 mencabut Permendag No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Selanjutnya, Perpres No. 6 Tahun 2025 bersama dengan Permentan No. 15 Tahun 2025 menetapkan tata kelola pupuk bersubsidi, termasuk ketentuan bahwa Pelaku Usaha Distribusi ("PUD") bertanggung jawab atas penyampaian dan penerimaan pupuk bersubsidi oleh penerima pada Titik Serah yang ditunjuk oleh Grup.

In 2025, Minister of Trade Regulation No. 26 of 2025 revoked Minister of Trade Regulation No. 4 of 2023 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the agricultural sector. Furthermore, Presidential Regulation No. 6 of 2025 together with Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 established the governance of subsidized fertilizers, including provisions that Distribution Operator ("PUD") are responsible for the delivery and receipt of subsidised fertilizers by recipients at the Delivery Points designated by the Group.

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Penugasan dari Pemerintah (lanjutan)

Pada tanggal 12 Januari 2024 dan 22 Desember 2024, Perusahaan menerbitkan surat No. 00128/D/HK/D11200/SP/2024 dan No. 00021/D/HK/D61200/SP/2025, yang di amandemen terakhir melalui adendum II pada tanggal 28 Juni 2025 perihal pembagian wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku masing-masing terhitung, 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2025.

Pada tanggal 19 November 2024, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2025 dan perubahannya melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 323/KPTS/RC.210/B/12/2025 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 2 Desember 2025.

Penetapan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan Grup melalui perjanjian No. B.881/SR.320/B.5/12/2024 dan No. 03156/A/HK/C0101/SP/2024 tanggal 24 Desember 2024 dan diubah dengan Addendum Perjanjian No. 38/SR.320/ADD.KONTRAK/B.4/12/2025 dan No. 09330/A/HK/C0101/SP/2025 tanggal 15 Desember 2025.

Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 sebagai berikut:

***36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***a. Public service obligation** (continued)*

On 12 January 2024 and 22 December 2024, the Company issued letter No. 00128/D/HK/D11200/SP/2024 and No. 00021/D/HK/D61200/SP/2025, which was last amended through addendum II on 28 June 2025 regarding the segregation of responsibility area for procurement and distribution of subsidised fertiliser to apply starting 1 January 2024 and 1 January 2025, respectively.

On 19 November 2024, the Government, through Minister of Agriculture Decree No. 644/KPTS/SR.310/M/11/2024, stipulated the allocation and HET of subsidised fertiliser for the agricultural sector for fiscal year 2025, and its amendment through Minister of Agriculture Decree No. 323/KPTS/RC.210/B/12/2025 concerning the Reallocation of Subsidised Fertiliser for the Agricultural Sector for Fiscal Year 2025 on 2 December 2025.

The stipulation was subsequently followed up through an agreement between the Ministry of Agriculture and the Group under No. B.881/SR.320/B.5/12/2024 and No. 03156/A/HK/C0101/SP/2024 dated 24 December 2024, as amended by Addendum of the Agreement No. 38/SR.320/ADD.KONTRAK/B.4/12/2025 and No. 09330/A/HK/C0101/SP/2025 dated 15 December 2025.

The highest retail prices of subsidised fertiliser for 2025 were stipulated through Minister of Agriculture Decree No. 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 as follows:

Peraturan Menteri Pertanian/*Decree of the Minister of Agricultural*	Tanggal terbit/ *Date of issuance*	Masa Berlaku/ *Effective period*	Urea per kilogram	NPK per kilogram	Organik/ *Organic* per kilogram	ZA per kilogram	SP-36 per kilogram	Organik cair/ *Liquid organic* per liter/*litre*	NPK Kakao per kilogram
Permentan No. 644 Tahun/ *Year* 2024	13 November 2024	2024	2,250	2,300	800	-	-	-	3,300

Yang kemudian diubah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 800/KPTS/SR.310/M/09/2025 sebagai berikut:

Which was subsequently amended through Minister of Agriculture Decree No. 800/KPTS/SR.310/M/09/2025 as follows:

Peraturan Menteri Pertanian/*Decree of the Minister of Agricultural*	Tanggal terbit/ *Date of issuance*	Masa Berlaku/ *Effective period*	Urea per kilogram	NPK per kilogram	Organik/ *Organic* per kilogram	ZA per kilogram	SP-36 per kilogram	Organik cair/ *Liquid organic* per liter/*litre*	NPK Kakao per kilogram
Permentan No. 800 Tahun/ *Year* 2025	22 Oktober 2025	2025	2,250	2,300	800	1,700	-	-	3,300

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/107 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Penugasan dari Pemerintah (lanjutan)

Yang kemudian diubah kembali melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 117/KPTS/SR.310/M/10/2025 sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pertanian/*Decree of the Minister of Agricultural*	Tanggal terbit/ *Date of issuance*	Masa Berlaku/ *Effective period*	Urea per kilogram	NPK per kilogram	Organik/ *Organic* per kilogram	ZA per kilogram	SP-36 per kilogram	Organik cair/ *Liquid organic* per liter/*litre*	NPK Kakao per kilogram
Permentan No. 117 Tahun/ *Year* 2025	22 Oktober 2025	2025	1,800	1,840	640	1,360	-	-	2,640

b. Pengadaan gas bumi

Pada tanggal 26 Februari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Republik Indonesia No. 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang menetapkan mengenai pengguna dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa pengguna dengan rekanannya, termasuk Grup.

Harga dan volume gas bumi tertentu yang telah ditetapkan untuk Grup melalui perjanjian sebagai berikut:

Entitas/ *Entity*	Pemasok/ *Supplier*	Periode kontrak/ *Contract period*	*Volume*
PSP	PT Pertamina EP	1 Januari/*January* 2024 - 31 Desember/*December* 2028	95 *British Thermal Unit per Day* ("BBTUD")
	PT Pertamina Gas	1 Januari/*January* 2019 - 31 Desember/*December* 2034	40.35 – 95 MMSCFD
	PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	11 September 2024 - 31 Desember/*December* 2035	11 - 57 BBTUD
	PT Tropik Energi Pandan	1 September 2019 - 31 Desember/*December* 2027	1 - 10 BBTUD
	PT Medco E&P Grissik	20 Desember/*December* 2023 - 31 Desember/*December* 2028	52 - 78 BBTUD
	PT Medco E&P Indonesia	1 Agustus/*August* 2021 - 27 November 2033	5 - 15 BBTUD
	PT Medco E&P Indonesia dan/*and* PT Medco E&P Lematang	1 Januari/*January* 2023 - 27 November 2033	5 - 17.63 BBTUD
PKG	Kangean Energy Indonesia Ltd	1 Januari/*January* 2022 - 31 Desember/*December 2026*	14.69 MMSCFD
	Husky CNOOC Madura Limited (MAC)	4 September 2023 - 30 Juni/*June* 2026	15 MMSCFD
	Husky CNOOC Madura Limited (BD)	24 Januari/*January* 2018 - 19 Oktober/*October* 2032	5 MMSCFD
	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	1 Februari/*February* 2018 - 31 Desember/*December* 2026	10 MMSCFD
	PT Pertamina EP Cepu	21 September 2023 - 16 September 2035	15 MMSCFD
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1 April 2023 - 31 Maret/*March* 2028	0.34 MMSCFD

36. *SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

a. Public service obligation *(continued)*

Which was subsequently amended again through Minister of Agriculture Decree No. 117/KPTS/SR.310/M/10/2025 as follows:

b. Supply of natural gas

On 26 Februari 2025, the Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") of the Republic of Indonesia issued a decree No. 76.K/MG.01/MEM.M/2025 regarding Certain Natural Gas Users in the Industrial Sector which stipulates certain users and prices of natural gas for several users and their partners, including the Group.

The prices and volumes of certain natural gas that have been set for the Group through agreements as follows:

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Pengadaan gas bumi (lanjutan)

Entitas/ *Entity*	Pemasok/ *Supplier*	Periode kontrak/ *Contract period*	*Volume*
PIM	PT Pertagas Niaga	30 Juli/*July* 2020 - 31 Mei/*May* 2033	28.3 BBTUD
PKC	PT Pertamina EP	1 Januari/*January* 2025 - 31 Desember/*December* 2029	30.00 - 33.00 *million cubic feet per day* ("MMCFD")
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1 Januari/January 2025 - 31 Desember/*December* 2027	22 - 33 BBTUD
	PT Pertamina Hulu Energi	27 Desember/*December* 2023 - 31 Desember/*December* 2030	45 BBTUD

c. Pengadaan gas bumi PKT

PKT menandatangani PJBG untuk pembelian gas bumi yang digunakan untuk operasi pabrik pupuk dengan rincian sebagai berikut:

Periode berlaku/ *Validity period*	Pabrik/ *Plant*	Volume	Pemasok/ *Supplier*
1 Januari/*January* 2022 31 Desember/*December* 2028*)	Kaltim-1A, 2, 3, 4 dan/*and* 5	335.06 BBTUD	PT Pertamina (Persero)
	Amurea Papua Barat	102 BBTUD	Genting Oil Kasuri Pte. Ltd

*) Tanggal efektif perjanjian adalah 1 Januari 2025 atau tanggal lain yang disepakati oleh PKT dan pemasok, dengan ketentuan syarat tangguh telah terpenuhi/*The effective date of agreement is on 1 January 2025 or other date agreed by PKT and supplier, provided that the conditions precedent have been satisfied*

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.91.K/MG.01/MEM/2023 ("Kep91") poin 9, Menteri atau regulator melakukan evaluasi terhadap harga gas bumi tertentu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Pada tanggal 24 Juni 2024, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Menteri ESDM No. T-260/MG.04/MEM.M/2024 ("Surat Menteri ESDM No. T-260") terkait dengan "Perubahan Harga Penyesuaian dan Harga Gas Bumi Tertentu di *Plant Gate* kepada Pengguna Gas Bumi PT Pupuk Kalimantan Timur", yang menjelaskan bahwa harga gas bumi untuk Kaltim 4 pada tahun 2022 ditetapkan untuk disesuaikan dengan Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") untuk Kaltim 4 yang masa berlakunya berakhir pada tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PKT telah menerima tagihan dari PT Pertamina (Persero) atas kurang bayar atas Kaltim 4 tahun 2022 dan mereklasifikasikan provisi atas Kaltim 4 tahun 2022 sebagai Utang Usaha. Pada Januari 2025, PKT telah melakukan pembayaran untuk tagihan ini.

36. *SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

b. Supply of natural gas *(continued)*

c. Procurement of PKT's natural gas

PKT entered into GSPA for the purchase of natural gas to be used in the operation of its fertiliser plants, with details as follows:

Based on Decree of the MOEMR No.91.K/MG.01/MEM/2023 ("Kep91") point 9, the Minister or regulator evaluates the price of certain natural gas by considering domestic economic conditions.

On 24 June 2024, the MOEMR issued Letter of MOEMR No. T-260/MG.04/MEM.M/2024 ("Letter of MOEMR No. T-260") regarding "Changes in Adjustment Prices and Certain Natural Gas Prices at Plant Gate to Natural Gas Users of PT Pupuk Kalimantan Timur", which explains that the natural gas price for Kaltim 4 in 2022 is set to be adjusted to the Gas Sales and Purchase Agreement ("GSPA") for Kaltim 4 which expires in 2022.

On 31 December 2024, the Company has received an invoice from PT Pertamina (Persero) for the underpayment for Kaltim 4 in 2022 and reclassified the provision for Kaltim 4 in 2022 as Trade Payable. In January 2025, PKT has made a payment for this invoice.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/109 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Pengadaan gas bumi PKT (lanjutan)

Pada tanggal 12 Juli 2024, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Menteri ESDM No. T-298/MG.04/MEM.M/2024 (”Surat Menteri ESDM No. T-298”) yang menyatakan bahwa harga gas bumi tertentu berdasarkan Kep 91 poin 9 tidak lagi berlaku sejak 1 Januari 2024 dan memberikan informasi mengenai rumus perhitungan harga gas bumi terbaru yang akan berlaku sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2028.

Surat Menteri ESDM No. T-298 juga menyatakan bahwa harga gas bumi tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar USD5.88/MMBTU sehingga PKT membukukan pembalikkan provisi untuk tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp1.734.876. Selain itu, untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2024 dimana PKT masih menerima tagihan dari PT Pertamina (Persero) dengan harga berdasarkan Kep 91, PKT juga telah mencatat pembebanan kurang bayar pengadaan gas bumi tahun 2024 sebesar Rp714.070 yang dicatat sebagai liabilitas yang masih harus dibayar.

Pada tanggal 9 Oktober 2024, Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 (”Kep 255”) yang kembali menekankan bahwa sejak 1 Januari 2024, Harga Gas Bumi Tertentu (”HGBT”) berdasarkan Kep 91 tidak lagi berlaku kepada PKT dan penetapan harga gas bumi harus didasari oleh Surat ESDM No. T-298.

Pada tanggal 17 Februari 2025, PJBG untuk tahun 2022 – 2028 telah difinalisasi dan ditandatangani oleh PKT, Pertamina dan seluruh pihak yang terkait. PJBG ini menggunakan Surat Menteri ESDM No. T-298 sebagai acuan dalam menentukan harga gas bumi dan mengatur bahwa:

- Harga gas bumi untuk pengadaan pada tahun 2022 – 2023 serta keperluan produksi pupuk bersubsidi untuk tahun 2024 dan seterusnya adalah USD5,88/MMBTU; dan
- Harga gas bumi untuk keperluan produksi pupuk non-subsidi untuk tahun 2024 dan seterusnya mengacu kepada rumus yang disediakan pada Surat Menteri ESDM No. T-298.

***36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***c. Procurement of PKT's natural gas** (continued)*

On 12 July 2024, the MOEMR issued the Letter of MOEMR No. T-298/MG.04/MEM.M/2024 (”Letter of MOEMR No. T-298”) which stated that the natural gas price based on Kep91 point 9 was no longer applicable since 1 January 2024 and provided the information regarding the new formula for the calculation of the natural gas price which will apply from 1 January 2024 up to 31 December 2028.

The Letter of MOEMR No. T-298 also stated that natural gas price for the year 2022 and 2023 is set at USD5.88/MMBTU, hence PKT booked a reversal of provision for the year of 2022 and 2023 amounting to Rp1,734,876. In addition, for the period of January up to June 2024 which PKT still received invoices from PT Pertamina (Persero) with the price based on Kep 91, PKT has also recorded an underpayment of natural gas procurement amounting to Rp714,070 recorded as accrued liabilities.

On 9 October 2024, the MOEMR published the Decree of the MOEMR No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 (”Kep 255”) which stipulated that since 1 January 2024, the Specific Price of Natural Gas (”HGBT”) which was based on Kep 91 is no longer applicable for PKT and the determination of natural gas price shall refer to the Letter of MOEMR No. T-298.

On 17 February 2025, the GSPA for the year of 2022 – 2028 has been finalised and signed by PKT, Pertamina and all of the affiliated parties. The GSPA refers to Letter of MOEMR No. T-298 as a benchmark in determining the price of natural gas and regulates that:

- *The price of natural gas for the procurement in 2022 – 2023 and for the purpose of production of subsidised fertilisers for the year of 2024 onwards is USD5.88/MMBTU; and*
- *The price of natural gas for the purpose of production of non-subsidised fertilisers for the year 2024 onwards shall refer to the formula which is provided in the Letter of MOEMR No. T-298.*

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Pengadaan gas bumi PKT (lanjutan)

Menyusul kepastian mengenai harga gas bumi untuk tahun 2022 - 2028 dengan terbitnya Surat Menteri ESDM No. T-298 dan ditandatanganinya PJBG untuk tahun 2022 - 2028, PKT membukukan nilai kurang bayar pengadaan gas bumi pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai liabilitas yang masih harus dibayar dan tidak lagi sebagai provisi.

Pada tanggal 26 Maret 2025, Perusahaan telah melunasi seluruh kurang bayar pengadaan gas bumi yang masih tercatat sebagai liabilitas yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2024.

d. Perjanjian kontrak konstruksi

Rekind

Berikut adalah kontrak yang signifikan dan masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2025:

Nama proyek/ *Project name*	Pemilik proyek/ *Project owner*	Jadwal/*Schedule*		Nilai kontrak/ *Contract price* (Nilai penuh/*Full amount*)
		Mulai/*Start*	Selesai/ *Completed*	
PLTU Lombok	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	11 April 2018	16 Agustus/ *August* 2026	USD18,855,000 Rp1,712,374,004,666
EWTP Balongan	PT Pertamina (Persero)	19 Desember/ *December* 2018	19 April 2026	Rp128,019,981,000
RDMP OC	RDMP Balikpapan JO	27 Maret/ *March* 2019	23 September 2025*)	USD6,000,000 Rp524,637,877,559
New EWTP Balongan	PT Pertamina (Persero)	25 Agustus/ *August* 2025	26 Februari/ *February* 2027	Rp167,500,000,000

*) Proyek masih berjalan/*Project is still in progress*

PSP

Pada tanggal 13 Oktober 2023, PSP menandatangani perjanjian kontrak konstruksi dengan Wuhuan Engineering Co., Ltd. dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkait proyek pembangunan pabrik Pusri-IIIB Amonia dan Urea yang diperkirakan akan selesai pada Maret 2027. Nilai kontrak dengan Wuhuan Engineering Co., Ltd sebesar USD456.255.000 dan Rp1.171.673 dan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp1.445.857.

PKT

Pada tanggal 22 Januari 2025, PKT menandatangani perjanjian kontrak konstruksi dengan PT TCC Indonesia Branch dan PT Enviromate Technology International, terkait proyek pembangunan pabrik Soda Ash paket A yang diperkirakan akan selesai pada November 2027. Nilai kontrak dengan PT TCC Indonesia Branch dan PT Enviromate Technology International sebesar Rp 3.056.846.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Procurement of PKT's natural gas *(continued)*

Following the certainty regarding the price of natural gas for the year of 2022 - 2028 due to the issuance of MOEMR letter No. T-298 and the signing of GSPA for the years of 2022 - 2028, PKT recognised the amount of underpayment of natural gas procurement as at 31 December 2024 as accrued liabilities instead of provision.

On 26 March 2025, the Company has fully paid all of the remaining underpayment of natural gas which was still recorded as accrued liabilities as at 31 December 2024.

d. Construction contract agreements

Rekind

Below are the significant contracts that are still ongoing up to 31 December 2025:

PSP

On 13 October 2023, PSP entered into construction contract with Wuhuan Engineering Co., Ltd and PT Adhi Karya (Persero) Tbk related to construction of the Ammonia and Urea Pusri-IIIB plant, which estimated to be completed in March 2027. The contract price with Wuhuan Engineering Co., Ltd amounting to USD456,255,000 and Rp1,171,673 and with PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to Rp1,445,857.

PKT

On 22 January 2025, the Company signed a construction contract with PT TCC Indonesia Branch and PT Enviromate Technology International for the Soda Ash plant construction project package A, which is expected to be completed in November 2027. The contract value with PT TCC Indonesia Branch and PT Enviromate Technology International is Rp3,056,846.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/111 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Klaim tambahan atas proyek pembangunan pabrik NPK di PIM

PIM melakukan perjanjian pembangunan pabrik NPK dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) ("PTPP") pada tanggal 28 Februari 2019 dengan total nilai kontrak sebesar Rp724.500 dan USD21.984.532 (nilai penuh), yang kemudian diperpanjang waktu penyelesaian proyek ini sampai dengan 25 September 2022. Di bulan Januari 2023, PTPP telah menyelesaikan proyek ini. Pada tanggal 15 Agustus 2023, PTPP mengajukan klaim tambahan atas proyek pembangunan pabrik NPK sebesar Rp1.012.652 yang ditolak oleh PIM.

PIM telah melakukan beberapa kali pembahasan penyelesaian klaim atas biaya tambahan terkait penyelesaian pembangunan proyek NPK dengan PTPP yang dimediasi oleh berbagai pihak, dimana diskusi terakhir dimediasi oleh Daya Anagata Nusantara ("Danantara") tanggal 3 November 2025. Berdasarkan hasil mediasi oleh Danantara, PIM dan PTPP sepakat untuk menurunkan nilai klaim menjadi sebesar Rp900.923 dan menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") untuk melakukan audit atas seluruh klaim yang diajukan oleh PTPP. Hasil audit BPKP akan menjadi rujukan final atas penyelesaian permasalahan ini.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses penyelesaian atas klaim-klaim tersebut masih berlangsung dan belum terdapat hasil atas prosedur penyelesaian yang disepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut, PIM telah melakukan analisa atas aktivitas, legalitas dan potensi dampak keuangan, yang diperkuat dengan opini legal dan penilaian independen dari pihak ketiga untuk mendukung posisi PIM. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan penyelesaian klaim tersebut mengakibatkan arus keluar submber daya. Oleh karena itu, manajemen tidak membukukan provisi atas perselisihan ini pada tanggal 31 Desember 2025.

***36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

e. Additional claim related to construction of NPK's plant at PIM

PIM entered into NPK's plant construction agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) ("PTPP") on 28 February 2019 with a total contract of Rp724,500 and USD21,984,532 (full amount), which the completion of this project was extended to 25 September 2022. In January 2023, PTPP has completed this project. On 15 August 2023, PTPP submitted an additional claim related to construction of NPK's plant amounting to Rp1,012,652 which has been rejected by PIM.

PIM has conducted multiple discussions regarding the settlement of additional cost claims related to the completion of the NPK project construction with PTPP, mediated by various parties, with the most recent discussions was mediated by Daya Anagata Nusantara ("Danantara") in November 2025. Based on the results of the mediation by Danantara, PIM and PTPP have mutually agreed to reduce the claim balance into Rp900,923 and appoint the Financial and Development Supervisory Agency ("BPKP") to perform an audit of the claims submitted by PTPP. The audit result of BPKP will be used as final reference to resolve this matter.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the settlement process for these claims is still ongoing and there have been no results from the agreed settlement procedures.

Related to these matters, PIM has carried out analysis related to activities, legality and financial impact which is supported by legal opinions and independent assessments from third party to support PIM's position. Management believes that an outflow of resources to settle these claims is not probable. Therefore, management did not record any provision for disputes as of 31 December 2025.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/112 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN, DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Perjanjian pembelian tenaga listrik ("PPA") RDM

Pada tanggal 27 Februari 2013, RDM, entitas anak Rekind, dan PLN menandatangani PPA jangka panjang. Termasuk di dalam PPA adalah konstruksi pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 2x25 MegaWatts ("MW") di Mamuju, Sulawesi Barat ("PLTU Mamuju") dan penyediaan listrik selama 25 tahun kepada PLN.

Berdasarkan PPA, RDM bertanggung jawab untuk perencanaan pembangunan, penyediaan peralatan dan konstruksi pembangkit dan memproduksi listrik yang akan diserahkan kepada PLN, sebagai gantinya perusahaan akan memperoleh penjualan listrik bulanan. RDM memiliki hak untuk mendapatkan pendapatan listrik bulanan. Pendapatan tersebut didasarkan pada harga listrik per unit yang telah ditetapkan selama masa komersial pembangkit dan digaransi dengan skema *take or pay*. Beberapa komponen perhitungan listrik bulanan memiliki formula untuk menyesuaikan dengan inflasi.

Komponen harga dalam PPA terdiri dari:
- Komponen A: pembayaran atas pemulihan biaya modal pembangkit listrik.
- Komponen B: pembayaran atas biaya operasi dan pemeliharaan tetap.
- Komponen C: pembayaran atas biaya bahan bakar.
- Komponen D: pembayaran atas biaya operasi dan pemeliharaan *variable*.
- Komponen E: pembayaran atas pemulihan biaya modal transmisi 15 km.

Pada tanggal 12 September 2018, RDM dan PLN menandatangani amendemen kedua PPA yang mengubah jadwal pelaksanaan proyek di mana tanggal operasi komersial ditetapkan 68 bulan sejak PPA ditandatangani (sebelumnya 58 bulan).

Pada tanggal 1 September 2022, RDM dan PLN menandatangani amendemen ketiga PPA terkait implementasi Undang-Undang No. 12 tahun 2020 dalam hal penerapan batubara sebagai barang kena pajak serta implementasi peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Republik Indonesia.

***36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

f. Power purchase agreements ("PPA")

On 27 February 2013, RDM, a subsidiary, and PLN signed a long-term PPA. The PPA includes the construction of a coal fired steam power plant with a total capacity of 2x25 MegaWatts ("MW") in Mamuju, West Sulawesi ("PLTU Mamuju") and a 25-year supply of electricity to PLN.

Under the PPA, RDM is responsible for the design engineering, equipment supply and construction of the proposed power plant and to produce electricity which will be delivered to PLN, in exchange for the monthly electricity charges. RDM has the right to receive monthly electricity charges. The charges are based on pre-determined base electricity price per unit of electricity delivered throughout commercial generation periods and subject to take or pay guarantee. Certain components of the monthly electricity charges have a formula to adjust for inflation.

The price components in the PPA consist of:
- *Component A: payment for power plant's capital costs recovery.*
- *Component B: payment for fixed operating and maintenance costs.*
- *Component C: payment for fuel costs.*
- *Component D: payment for variable operating and maintenance costs*
- *Component E: payment for 15 km transmission's capital costs recovery.*

On 12 September 2018, RDM and PLN signed the second amendment to the PPA which changes the project milestone schedule whereas Commercial Operation Date is set 68 months after the signing date of PPA (previously 58 months).

On 1 September 2022, RDM and PLN signed the third amendment to the PPA regarding the implementation of Law No. 12 of 2020 regarding the application of coal as a taxable item and the implementation of Bank Indonesia regulations regarding the mandatory use of the Rupiah in the Republic of Indonesia.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/113 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. PENGUKURAN NILAI TERCATAT ASET DAN LIABILITAS BERKAITAN DENGAN BASIS AKUNTANSI KELANGSUNGAN USAHA REKIND

Pada tanggal 31 Desember 2025, Rekind memiliki modal kerja negatif sebesar Rp2.192.682 dan akumulasi kerugian sebesar Rp5.425.800.

Rekind telah berhasil melaksanakan sebagian besar agenda dari Rencana Penyelamatan Perusahaan ("RPP") untuk memastikan kemampuan Rekind untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Implementasi tersebut telah memperbaiki modal kerja dan kondisi keuangan Rekind. Langkah dari RPP yang masih belum diimplementasikan adalah proyek-proyek yang diberikan kepada Rekind dengan skema penunjukan khusus, dimana merupakan salah satu dukungan dari Perusahaan. Operasional Rekind kedepannya akan sangat bergantung pada proyek yang dijanjikan dalam rencana pemulihan oleh Perusahaan untuk secara bertahap meningkatkan modalnya.

Sebagai tambahan dari RPP, Rekind berencana mengambil beberapa tindakan untuk memperbaiki modal kerja sebagai berikut:

a. Memaksimumkan upaya untuk memperoleh persetujuan restrukturisasi pinjaman bank pada RDM;
b. Memaksimumkan upaya untuk memperoleh *Change Order* ("CO") untuk beberapa proyek;
c. Memaksimumkan upaya untuk memperoleh persetujuan perpanjangan waktu kontrak atau negosiasi perubahan perhitungan denda keterlambatan dari pemilik proyek untuk menghapuskan atau memperkecil kewajiban Rekind atas kerugian akibat denda keterlambatan yang diatur dalam kontrak;
d. Mendapatkan proyek soda ash PKG dan NPK PKT yang diberikan kepada Rekind melalui penunjukan khusus sebagai bentuk dukungan Perusahaan. Selain itu, memaksimalkan upaya untuk memperoleh proyek non-EPC baru untuk dapat meningkatkan pendapatan Rekind;
e. Memaksimumkan laba dengan meninjau kemungkinan peluang untuk mendapatkan penyewa baru di gedung Kalibata;
f. Memaksimumkan upaya penjualan aset tanah Cijujung melalui persetujuan Pemegang Saham;
g. Melakukan efisiensi terhadap biaya operasional dan biaya proyek yang akan datang; dan
h. Meninjau opsi untuk mengalokasikan tenaga kerja yang tidak aktif didalam Grup.

37. MEASUREMENT OF THE CARRYING VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES IN RELATION TO THE GOING CONCERN BASIS OF ACCOUNTING OF REKIND

As at 31 December 2025, Rekind had a negative working capital of Rp2,192,682 and recorded an accumulated loss of Rp5,425,800.

Rekind has Corporate Recovery Plan ("RPP") aimed at ensuring Rekind's ability to continue as a going concern. Those implementation have improved its working capital and its financial conditions. The remaining recovery plan that has not been implemented is the projects offered to Rekind by specific appointment, which is part of support from the Company. Rekind's future operation will depend on the promised project in the recovery plan by the Company to steadily increase its capital.

In addition to the RPP, Rekind plans to perform several actions to improve the working capital as follow:

a. Maximising the effort to obtain approval on restructuring of RDM's bank loan;
b. Maximising the effort to obtain approved Change Order ("CO") for some projects;
c. Maximising the efforts to obtain approval for extension of time or negotiate changes for the delay liquidated damage calculation from project owner to either derecognise or reduce Rekind's liability for delay liquidated damages;
d. Obtain soda ash PKG and NPK PKT project, which were offered to Rekind by specific appointment that is a form of the Company's support. In addition, maximising the effort to obtain new non-EPC projects to increase Rekind's revenue;
e. Maximising profit by exploring the opportunity to obtain new lessee in the Kalibata building;
f. Maximising the effort to sell the land asset in Cijujung, subject to approval by the Shareholders;
g. Implementing efficiency of the upcoming operating expenses and project costs; and
h. Exploring the option of reallocating idle manpower within the Group.

37. PENGUKURAN NILAI TERCATAT ASET DAN LIABILITAS BERKAITAN DENGAN BASIS AKUNTANSI KELANGSUNGAN USAHA REKIND (lanjutan)

Secara keseluruhan, manajemen berkeyakinan bahwa rencana yang dijelaskan di atas akan dapat memperbaiki profitabilitas, meningkatkan likuiditas dan modal Rekind.

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan dasar bahwa Rekind akan terus berkelangsungan usaha, dan tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakpastian di atas. Manajemen juga telah mengukur nilai tercatat aset dan liabilitas Rekind agar tetap sesuai dengan basis akuntansi kelangsungan usaha pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian Grup.

37. MEASUREMENT OF THE CARRYING VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES IN RELATION TO THE GOING CONCERN BASIS OF ACCOUNTING OF REKIND *(continued)*

In overall, management believes that the projects will be obtained as intended and will help improve Rekind's profitability, enhance liquidity and its capital.

These consolidated financial statements have been prepared on the basis that Rekind will continue as a going concern, and do not include any adjustments that might arise as the result of the above uncertainty. Management has also measured the carrying value of Rekind's assets and liabilities to align with the going concern basis of accounting when preparing the Group's consolidated financial statements.

38. PENGAKUAN PENGHASILAN SEBAGAI AKIBAT DARI RESTRUKTURISASI UTANG YANG TIMBUL DARI KEPUTUSAN HOMOLOGASI TERKAIT DENGAN PKPU REKIND

Proses PKPU dimulai pada tanggal 16 November 2023 dan berakhir dengan keputusan Homologasi pada tanggal 31 Januari 2024. Keputusan tersebut tertuang dalam Rencana Perdamaian yang mengatur skema dan jadwal penyelesaian utang dan pinjaman dengan para kreditur Rekind.

Keputusan Homologasi yang tercapai pada tanggal 31 Januari 2024 memberi dampak keuntungan yang diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.269.765. Rincian keuntungan yang diakui adalah sebagai berikut:

Restrukturisasi utang usaha

Utang usaha Rekind merupakan utang usaha kepada beberapa pemasok yang jadwal pembayarannya telah direstrukturisasi menjadi 3 - 25 tahun tanpa bunga yang akan jatuh tempo sepenuhnya pada tahun 2048. Dampak selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat utang yang direstrukturisasi menghasilkan keuntungan sebesar Rp643.112 (2024: Rp833.619) dan amortisasi dampak restrukturisasi utang sebesar Rp134.672 (2024: Rp53.352) (dicatat sebagai biaya keuangan) yang diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Restrukturisasi pinjaman

Pinjaman jangka panjang Rekind merupakan hasil restrukturisasi pinjaman bank jangka pendek yang jadwal pembayarannya menjadi 20 tahun dengan tingkat bunga 2,0%-3,5% per tahun yang dibayarkan setiap kuartal. Dampak selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat pinjaman yang direstrukturisasi menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.246.019 (2024: Rp2.436.146) dan amortisasi dampak restrukturisasi pinjaman sebesar Rp145.325 (2024: Rp174.104) (dicatat sebagai biaya keuangan) yang diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

38. INCOME RECOGNITION AS A RESULT OF DEBT RESTRUCTURING ARISING FROM HOMOLOGATION DECISION RELATED TO THE REKIND'S PKPU

The PKPU process was started on 16 November 2023 and concluded with the Homologation decision on 31 January 2024. The decision is outlined in the Composition Plan which establishes the scheme and schedule for debt and loan repayment with Rekind's creditors.

Homologation decision reached on 31 January 2024 resulted the gain recognised in the consolidated statements of profit or loss for the year ended 31 December 2024 amounting to Rp3,269,765. The details of the gain recognised are as follows:

Restructured trade payables

Rekind's trade payables represent trade payables to several vendors which the payment schedule have been restructured to 3 - 25 years with no interest and will be fully due in 2048. The difference between fair value and the book value of the restructured trade payables resulting gain amounting to Rp643,112 (2024: Rp833,619) and amortisation of the impact of debt restructuring impact amounting to Rp134,672 (2024: Rp53,352) (recorded as finance costs) which was recognised in the consolidated statement of profit or loss for the year ended 31 December 2025.

Restructured loans

Rekind's long-term loans are the result of restructuring short-term bank loans, with a repayment schedule extended to 20 years and an interest rate of 2.0%-3.5% per annum which are paid quarterly. The difference between fair value and the book value of the restructured loans resulting gain amounting to Rp2,246,019 (2024: Rp2,436,146) and amortisation of the impact of loans restructuring amounting to Rp145,325 (2024: Rp174,104) (recorded as finance costs) which was recognised in the consolidated statement of profit or loss for the year ended 31 December 2025.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/115 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Marked to market

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia ("Perpres") No. 113 Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025, yang mengubah Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, maka peraturan turunan yang diterbitkan setelah periode pelaporan adalah sebagai berikut:

(i) Permentan No. 3 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2026, mengubah Permentan No. 15 Tahun 2025 tentang Perpres No. 6 Tahun 2025 mengenai Pengelolaan Pupuk bersubsidi;

(ii) Permentan No. 6 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2026 mengenai Prosedur Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk bersubsidi, menggantikan Permentan No. 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Produksi Pupuk Bersubsidi; dan

(iii) PMK No. 19 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2026, mengenai Perubahan Kedua atas PMK No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Peraturan-peraturan ini menjadi dasar bagi mekanisme pengelolaan subsidi pupuk yang menggunakan sistem *marked to market*

Penerimaan uang muka dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan implementasi *marked to market*

Berdasarkan Berita Acara No. BA/46/SR.340/B.4/03/2026 dan 01440/A/KU/B0103/SP/2026 tanggal 31 Maret 2026 terkait Perhitungan Pembayaran keperluan Pengadaan Bahan Baku Subsidi Pupuk Urea dan NPK, Grup telah menerima uang muka dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan implementasi *marked to market* sebagai berikut:

39. SUBSEQUENT EVENTS

Marked to market

Following the issuance by the Government of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia ("Perpres") No. 113 of 2025 dated 24 October 2025, which amends Perpres No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidised Fertiliser, the derivative regulation issued in the period after reporting are as follows:

(i) Permentan No. 3 of 2026 issued on 20 February 2026, amending Permentan No. 15 of 2025 regarding the Implementation Regulation of Perpres No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidised Fertilisers;

(ii) Permentan No. 6 of 2026 issued on 3 March 2026 regarding the Procedures for Calculation of Commercial Value and Raw Material Components of Subsidised Fertiliser, replacing Permentan No. 28 of 2020 on Components of Production Cost for Subsidised Fertiliser; and

(iii) PMK No. 19 of 2026 issued on 27 March 2026, regarding the Second Amendment to PMK No. 68/PMK.02/2016 on Procedures for Provision, Disbursement and Accountability of Fertiliser Subsidy Funds.

These regulations are used as the basis for subsidy management mechanism that uses the marked to market system.

Advance receipt from Government of Indonesia related to marked to market

Based on the Minutes of Meeting No. BA/46/SR.340/B.4/03/2026 and No. 01440/A/KU/B0103/SP/2026 dated 31 March 2026, regarding the Calculation of Payment for the Procurement of Subsidised Urea and NPK Fertilizer Raw Materials, the Group has received an advance payment from the Government of Indonesia related to the implementation of marked to market as follows:

Entitas	Uang muka diterima/*Advance receipt*	*Entity*
PKG	8,658,415	*PKG*
PSP	4,226,122	*PSP*
PKT	3,703,289	*PKT*
PKC	2,171,795	*PKC*
PIM	1,822,757	*PIM*

39. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

Perubahan kepemilikan dan komposisi pemegang saham untuk saham Perusahaan yang diotorisasi

Sesuai dengan Akta Notaris Lumassia, S.H., notaris di Jakarta No. 2 tanggal 26 Januari 2026 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum tanggal 5 Maret 2026 melalui Surat Keputusan No. AHU-0048823.AH.01.11 tahun 2026, para pemegang saham PT Pupuk Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengalihkan kepemilikan saham atas 249.999 lembar saham Seri B milik DAM kepada Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ("BP BUMN") dalam bentuk saham Seri A Dwiwarna.

Atas perubahan tersebut, komposisi pemegang saham PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi sebagai berikut:

***39. SUBSEQUENT EVENTS** (continued)*

Change in ownership and composition of the Company's shareholders for the shares that are authorised

In accordance with Notarial Deed No. 2 dated 26 January 2026 of Lumassia, S.H., a notary in Jakarta, and as approved by the Minister of Law on 5 March 2026 through Decree No. AHU-0048823.AH.01.11 year 2026, the shareholders of PT Pupuk Indonesia (Persero) approved the transfer of ownership of 249,999 Series B shares owned by DAM to the Government of Indonesia through the State-Owned Enterprises Regulatory Agency ("BP BUMN"), in the form of Series A Dwiwarna shares.

As a result of such change, the composition of shareholders of PT Pupuk Indonesia (Persero) became as follows:

	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah/ *Amount*	
Saham Seri A Dwiwarna				*Series A Dwiwarna Shares*
Pemerintah Indonesia	250,000	1.00	250,000	*Pemerintah Indonesia*
Saham Seri B				*Series B Shares*
PT Danantara Asset Management (Persero)	24,750,000	99.00	24,750,000	*PT Danantara Asset Management (Persero)*
Jumlah	**25,000,000**	**100**	**25,000,000**	***Total***

Referensi Silang SEOJK No. 16/ SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
I. Ketentuan Umum **I. General Terms**	
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	✓
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	✓
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	✓
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	✓
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	✓
f. Direksi: Board of Directors:	
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	✓
2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	✓
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	✓
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	✓
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	✓
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	✓
II. Bentuk Laporan **II. Report Format**	
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	✓
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	✓
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	✓
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	✓
III. Isi Laporan Tahunan **III. Annual Report Contents**	
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	32
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	45
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	70-87
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	56-69

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	92-199
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	200-304
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	306-692
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	695-707
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	711-844
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	90-91
2. Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	32-37
1) pendapatan/penjualan; income/sales;	32
2) laba bruto; gross profit;	32
3) laba (rugi); profit (loss);	32
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	33
5) total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	33
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	33
7) laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	33
8) jumlah aset; total assets;	34
9) jumlah liabilitas; total liabilities;	34
10) jumlah ekuitas; total equity;	35
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	36
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	36
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	36
14) rasio lancar; current ratio;	36
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	36
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	36
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	36

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	45
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	45
a) jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	45
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	45
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	45
d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	45
e) Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	45
2) dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	45
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	45
b) rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	45
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	45
d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	45
e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	45
3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	45
4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	45
c. Laporan Direksi Board of Directors' Report	70-87
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
1) kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	73-76
b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	73-76
c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	75-76

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	78-80
e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	80-81
2) gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	85-87
3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	81-83
d. Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	56-69
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	59-60
2) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	67-69
3) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	63-65
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Profile	92-199
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	
1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	94
2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	95-98
a) alamat; address;	95-98
b) nomor telepon; telephone number;	95-98
c) alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	95-98
d) alamat situs web; website address;	95-98
3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	99-102
4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	108-110
5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	112-120
6) wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	122-125
7) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	128-129

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
8) daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	127
9) profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	131-138
a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	131-138
b) foto terbaru; recent photograph;	131-138
c) usia; age;	131-138
d) kewarganegaraan; nationality;	131-138
e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	131-138
f) riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	131-138
» dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; » the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	131-138
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan » concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	131-138
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	131-138
g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	131-138
h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	139-142
10) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	143-151
a) nama dan jabatan; name and position;	143-151
b) foto terbaru; recent photograph;	143-151
c) usia; age;	143-151
d) kewarganegaraan; nationality;	143-151
e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	143-151
f) riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	143-151
» dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; » legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	143-151
» dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; » legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	143-151

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan » concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	143-151
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	143-151
g) hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	143-151
h) pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	143-151
i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	152-155
11) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	155-156
12) jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	163-166
13) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	
a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	170-171
b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	171
c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	170-171
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. **The above information can be presented in tabular form.**	
14) persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	171
15) Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	171
a) jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b) kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	170-171
c) kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	170-171
d) kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	170-171
e) kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	170-171
16) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	172
17) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	95-98, 173
18) kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	188
19) informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	190-191
20) informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	195-196
a) nama dan alamat; name and address;	195
b) periode penugasan; assignment period;	195
c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	195-196
d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	195-196
e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	195-196
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. **Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.**	✓
21) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	197-198
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
1) tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	208-227
a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; a) production, which includes the process, capacity, and development;	211-227
b) pendapatan/penjualan; dan b) income/sales; and	208, 211-227
c) profitabilitas; c) profitability;	219-220, 223, 226-227
2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	244-276
a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	245-250
b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	251-255
c) ekuitas; equity;	255-257
d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	257-270
e) arus kas; cash flows;	273-276
3) kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	277-278
4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	279-280
5) struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	281
6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	282
a) tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	282
b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	282
c) mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	282
d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	282
7) bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	283-284
a) jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	283
b) tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	283-284
c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	283-284
8) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	284-285
9) prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	300-302

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
10) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	287-291
a) pendapatan/penjualan; income/sales;	289
b) laba (rugi); profit (loss);	289
c) struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	291
d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	287-291
11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	302-304
a) pendapatan/penjualan; income/sales;	302
b) laba (rugi); profit (loss);	303
c) struktur modal (capital structure); capital structure;	303
d) kebijakan dividen; atau dividend policy; or	303-304
e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	302-304
12) aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	228-229
13) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	292-293
a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	292
b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	293
c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	293
d) jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	293
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. **Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.**	293
14) realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: ealization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	295
a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	295
b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	295
15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	297
a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	297

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b) nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	297
c) sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	297
d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	297
e) pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	297
f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	297
» pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan » (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	297
» peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); » (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	297
g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	297
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	
h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	297
i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; i) in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	297
16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	298-299
17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	299
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	306-692
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
1) RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan » resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	336-341, 342-349, 350-351, 352-354
» keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; » resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	336-341, 342-349, 350-351, 352-354
b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	336, 338, 350, 351
2) Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	
a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;	381-383
b) Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	384-385
c) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; a statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	380-381
d) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	428
e) Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding of the frequency of meetings of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	428-441, 448-451
f) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	386-388
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan » policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	386
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); » training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	386-388
g) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	
» prosedur penilaian kinerja; dan » performance appraisal procedures; and	400
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan » the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	400-402
h) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	400-402
3) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	
a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	363-365
b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	362-363
c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	416-427, 442-451

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. **Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.**	416-427, 442-451
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan » policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	367
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); » competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	367-369
e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	
» prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; » procedures for implementing performance appraisals;	404
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan » criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	405
» pihak yang melakukan penilaian; dan » party conducting the assessment; and	404-405
f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	
g) prosedur penilaian kinerja; dan (1) performance appraisal procedures; and	403
h) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; (2) the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	403-404
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	356-358, 377-378
b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; » procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	410-411
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan » the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	411-413
» besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. » the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	414-416
5) Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	
a) nama; name;	
b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c) periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	
d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	
e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	
6) Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	461-462
b) usia; age;	462-463
c) kewarganegaraan; nationality;	462-463
d) riwayat pendidikan; educational history;	462-463
e) riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; » (legal basis for appointment as committee member;	462-463
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan » concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	462-463
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	462-463
f) periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	461-462
g) pernyataan independensi komite audit; g) statement of independence of the audit committee;	464
h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); h) training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	466-467
i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan i) policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	468-469
j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; j) the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	469-470
7) komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	482-484
b) usia; age;	483-484
c) kewarganegaraan; nationality;	483-484
d) riwayat pendidikan; educational history;	483-484
e) riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; » legal basis for appointment as committee member;	483-484
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan » concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	483-484

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
	» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	483-484
f)	periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	482-483
g)	pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	484-485
h)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	487-488
i)	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	486-487
j)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;	485
k)	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	488-490
l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	490
m)	dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	-
	» alasan tidak dibentuknya komite; dan » reasons for not forming the committee; and	-
	» pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; » the party carrying out the nomination and remuneration function;	-
8)	komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	
a)	nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	491-500
b)	usia; age;	491-500
c)	kewarganegaraan; nationality;	491-500
d)	riwayat pendidikan; educational history;	491-500
e)	riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
	» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; » legal basis for appointment as committee member;	491-500
	» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan » concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	491-500
	» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	491-500
f)	periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	491-500
g)	pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	499-500
h)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	502-505
i)	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	501
j)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	501

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
k)	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	505-507
l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	507
9)	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	
a)	nama; name;	531
b)	domisili; domicile;	531
c)	riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
	» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan » legal basis for appointment as company secretary; and	531
	» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	531
d)	riwayat pendidikan; educational history;	531
e)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	532
f)	uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	533-535
10)	Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	
a)	nama kepala unit audit internal; a) name of the head of the internal audit unit;	541
b)	riwayat jabatan, meliputi: b) position history, including:	
	» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan » legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	541
	» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	541
c)	kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	541
d)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	546-547
e)	struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	539-540
f)	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	544-545
g)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	542-543
h)	uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	547-549
11)	uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	
a)	pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	562-563
b)	tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	563
c)	pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	564-565

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
12) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	
a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	566-567
b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	569-574
c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	579-580
d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	579-580
13) perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	
a) pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	581
b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	581
c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	581
14) informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	583
15) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	
a) pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	602
b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	603
c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	602
16) uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	585
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	585
a) jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	585
b) jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	585
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	585
d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	585
17) uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	
a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	585

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	585
18) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	
a) cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	619-621
b) perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	622-623
c) penanganan pengaduan; complaint handling;	623
d) pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	622-623
e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan » number of complaints received and processed in the fiscal year; and	624
» tindak lanjut pengaduan; » follow-up on complaints;	622-623
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. **In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.**	✓
19) uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	629-631, 625-627
b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	631
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. **In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.**	629
20) penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	649-665
a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	✓
b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	✓
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. **Disclosure of information can be presented in tabular form.**	✓
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	695-707
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	
a) penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	
b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	
c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	
d) penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
e) tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	
f) kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	
g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	
h) lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	
i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	
2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
3) informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	
a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	
b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	
4) Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	
5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	
a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	
b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	
7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	711-844

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	✓
j.	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	90-92

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2025

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Kantor Pusat
Head Office

Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan Jaya
Jakarta 11480, Indonesia

E-mail : info@pupuk-indonesia.com
Hotline : +62 800 100 800 1
SMS : +62 822 100 100 81
Tel. : +62 21 5365 4900
Fax. : +62 21 548 0607

www.pupuk-indonesia.com